Bank Sulteng

bersama membangun Indonesia



Digital untuk **Semua**

Digital for All

LAPORAN TAHUNAN 2025

ANNUAL REPORT

TENTANG LAPORAN TAHUNAN
ABOUT THE ANNUAL REPORT

Tahun 2025 merupakan periode yang penuh dinamika sekaligus peluang bagi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah ("Bank Sulteng" atau "Perseroan") dalam memperkuat kinerja dan memperluas kontribusinya bagi perekonomian daerah. Dengan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Perseroan mampu melalui berbagai tantangan yang ada dengan tetap menjaga stabilitas kinerja serta terus berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Pada tahun pelaporan ini, Perseroan mengangkat tema " Digital Untuk Semua" yang mencerminkan semangat Bank Sulteng dalam memperkuat fondasi bisnis, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendorong transformasi layanan perbankan yang semakin modern dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Tema tersebut dipilih dengan mempertimbangkan kondisi industri perbankan, perkembangan ekonomi, serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan di masa mendatang.

Sebagai lembaga keuangan daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi, Bank Sulteng senantiasa menjunjung tinggi prinsip transparansi dan keterbukaan informasi. Laporan Tahunan ini disusun sebagai sarana komunikasi yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja, strategi, serta berbagai pencapaian Perseroan sepanjang tahun buku 2025.

Di dalam laporan ini disajikan berbagai informasi penting yang meliputi profil perusahaan, kinerja operasional dan keuangan, implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), serta berbagai inisiatif strategis yang dijalankan untuk memperkuat daya saing Perseroan di industri perbankan. Bank Sulteng akan terus memperkuat kolaborasi, meningkatkan kualitas layanan, serta mengembangkan inovasi produk dan layanan perbankan guna menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Perseroan optimis dapat mempertahankan kinerja yang positif sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada kesempatan ini, kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pemegang saham, nasabah, mitra kerja, regulator, serta seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan kepada Bank Sulteng. Kami juga mengapresiasi dedikasi seluruh insan Bank Sulteng yang telah bekerja dengan penuh integritas dan profesionalisme dalam mendukung pencapaian kinerja Perseroan.

Kami mengundang para pemangku kepentingan untuk menelusuri lebih jauh perjalanan dan pencapaian Bank Sulteng melalui Laporan Tahunan ini. Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan dan perkembangan Perseroan dapat diakses melalui situs resmi kami di www.banksulteng.co.id.

The year 2025 constitutes a highly dynamic period as well as an opportunity for PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah ("Bank Sulteng" or the "Company") in strengthening its performance and expanding its contribution to the regional economy. With gratitude to God Almighty, the Company successfully navigated various challenges while maintaining performance stability and continuously striving to provide the best services to the public and all stakeholders. In this reporting year, the Company adopted the theme "Digital for All" ("Digital Untuk Semua"), reflecting Bank Sulteng's spirit in strengthening its business foundation, enhancing public trust, and driving the transformation of banking services to become more modern and responsive to technological advancements. The theme was selected by considering the conditions of the banking industry, economic developments, and opportunities that can be leveraged to drive future growth.

As a regional financial institution that plays a vital role in supporting economic development, Bank Sulteng consistently upholds the principles of transparency and information disclosure. This Annual Report is prepared as a communication medium that provides a comprehensive overview of the Company's performance, strategies, and various achievements throughout the 2025 financial year.

This report presents essential information encompassing the company profile, operational and financial performance, the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles, and various strategic initiatives executed to strengthen the Company's competitiveness in the banking industry. Bank Sulteng will continue to strengthen collaborations, improve service quality, and develop banking product and service innovations to address the continuously evolving needs of the community. With the support of all stakeholders, the Company is optimistic about sustaining its positive performance while making a tangible contribution to regional economic growth.

On this occasion, we also extend our highest gratitude and appreciation to the shareholders, customers, business partners, regulators, and all stakeholders for the trust and support bestowed upon Bank Sulteng. We also appreciate the dedication of all Bank Sulteng personnel who have worked with utmost integrity and professionalism in supporting the achievement of the Company's performance.

We invite stakeholders to further explore Bank Sulteng's journey and achievements through this Annual Report. Further information regarding the Company's activities and developments can be accessed through our official website at www.banksulteng.co.id.

TEMA & PENJELASAN TEMA
THEME & THEME EXPLANATION

Digital untuk Semua
Digital for All



Bank Sulteng terus melakukan inovasi digital yang tidak hanya dinikmati oleh segmen tertentu, tetapi dapat diakses secara luas oleh pelaku UMKM, masyarakat di daerah terpencil, hingga generasi muda.

Melalui edukasi literasi keuangan digital, penguatan sistem keamanan, serta pengembangan produk yang inklusif, Bank Sulteng berupaya menjadikan digitalisasi sebagai sarana pemerataan layanan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Bank Sulteng continuously carries out digital innovations that are not only enjoyed by specific segments but can also be widely accessed by MSME players, communities in remote areas, and the younger generation.

Through digital financial literacy education, strengthening security systems, and developing inclusive products, Bank Sulteng strives to make digitalization a means for equitable service distribution and sustainable regional economic growth.

KEBERLANJUTAN TEMA
THEME CONTINUITY



2024

Warisan Budaya Kekuatan Masa Depan

Cultural Heritage, Future Strength

"Warisan Budaya, Kekuatan Masa Depan"
Tahun 2024 menjadi momentum bagi Bank Sulteng untuk terus menguatkan peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, inklusi keuangan, serta penguatan sektor UMKM yang menjadi tulang punggung masyarakat. Kami percaya bahwa nilai-nilai budaya, seperti kebersamaan dan gotong royong menjadi pondasi dalam membangun sistem keuangan yang stabil dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Sebagai bank daerah yang tumbuh bersama masyarakat Sulawesi Tengah, Bank Sulteng memahami bahwa warisan budaya bukan hanya tentang sejarah, tetapi juga tentang nilai-nilai yang membentuk karakter, etos kerja, dan daya saing dalam menghadapi masa depan. Oleh karena itu, kami mengangkat tema "Warisan Budaya, Kekuatan Masa Depan" sebagai refleksi dari komitmen Bank Sulteng dalam mengembangkan ekonomi daerah yang berakar pada kearifan lokal dan berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan.

Melalui transformasi digital dan dukungan terhadap UMKM, Bank Sulteng berupaya memastikan bahwa kekuatan ekonomi daerah terus berkembang tanpa kehilangan identitasnya. Dengan menggabungkan nilai budaya dan inovasi, Bank Sulteng siap menghadapi tantangan masa depan serta berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera. Bank Sulteng percaya bahwa dengan menghormati dan mengembangkan warisan budaya, kita dapat membangun ekonomi yang berkelanjutan untuk generasi mendatang.

"Cultural Heritage, Future Strength"
The year 2024 is a momentum for Bank Sulteng to continue to strengthen its role in encouraging economic growth, financial inclusion, and strengthening the MSME sector which is the backbone of society. We believe that cultural values, such as togetherness and mutual cooperation, are the foundation in building a financial system that is stable and adaptive to changing times.

As a regional bank that grows with the people of Central Sulawesi, Bank Sulteng understands that cultural heritage is not only about history, but also about values that shape character, work ethic, and competitiveness in facing the future. Therefore, we raised the theme "Cultural Heritage, Future Strength" as a reflection of Bank Sulteng's commitment in developing a regional economy rooted in local wisdom and oriented towards sustainable growth.

Through digital transformation and support for MSMEs, Bank Sulteng seeks to ensure that the strength of the regional economy continues to grow without losing its identity. By combining cultural values and innovation, Bank Sulteng is ready to face future challenges and contribute to creating a more independent and prosperous society. Bank Sulteng believes that by honoring and developing cultural heritage, we can build a sustainable economy for future generations.

2023

Membangun Kepercayaan, Pertumbuhan yang Sehat, & Inovasi yang Berdaya Saing

Building Trust, Healthy Growth, & Competitive Innovation



Membangun Kepercayaan, Pertumbuhan yang Sehat, dan Inovasi yang Berdaya Saing merupakan landasan strategis Bank Sulteng untuk keberlanjutan usaha. Dalam upaya membangun kepercayaan, Bank Sulteng mengutamakan hubungan yang saling percaya dengan nasabah sebagai fondasi utama keberhasilan Perusahaan. Dengan mengedepankan nilai-nilai transparansi, integritas, dan keamanan, Bank Sulteng menjaga kepercayaan nasabah melalui layanan yang responsif dan mematuhi standar etika perbankan yang tinggi.

Pertumbuhan yang Sehat menjadi fokus strategis Bank Sulteng dengan menerapkan berbagai upaya dalam pengembangan portofolio produk dan jasa. Bank Sulteng terus berinovasi dengan menawarkan solusi keuangan yang inovatif, diversifikasi layanan, dan melakukan ekspansi ke segmen pasar yang potensial. Efisiensi operasional dan manajemen risiko yang cermat menjadi kunci untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi Bank Sulteng.

Building Trust, Healthy Growth, and Competitive Innovation form the strategic foundation for the sustainability of Bank Sulteng's business. In the effort to build trust, Bank Sulteng prioritizes mutually trusting relationships with customers as the primary foundation for the Company's success. By emphasizing the values of transparency, integrity, and security, Bank Sulteng maintains customer trust through responsive services and adherence to high banking ethics standards.

Healthy Growth is a strategic focus for Bank Sulteng, involving various efforts in developing the portfolio of products and services. Bank Sulteng continues to innovate by offering innovative financial solutions, diversifying services, and expanding into potential market segments. Operational efficiency and careful risk management are key to ensuring sustainable growth for Bank Sulteng.



2022

Bergerak Maju Mengembangkan Digitalisasi Bank

Moving Foward to Develop Bank Digitalization

Situasi pandemi dunia yang mengharuskan segala sektor industri dan masyarakat untuk berkembang dan beradaptasi mendorong seluruh pihak ke arah digitalisasi. Dalam waktu singkat, kehidupan masyarakat bergeser memasuki era baru yang serba digital. Pergeseran ini juga berdampak pada industri perbankan.

Berbagai pengembangan teknologi untuk layanan dalam industri bank telah menimbulkan perubahan yang signifikan. Oleh karenanya, di tahun 2022 ini Bank Sulteng menjadikan digitalisasi layanan sebagai fokus utamanya. Strategi dan berbagai langkah direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai digitalisasi agar dapat berkontribusi menjadi Bank yang berteknologi tepat guna bagi Sulawesi Tengah.

The world pandemic that compels all sectors of industry and society to develop and adapt is moving all entities toward digitalization. Within a short period of time, people's lives have shifted into a new, all-digital era. This transition has also affected the banking industry.

Numerous technological developments for services in the banking industry have resulted in significant changes. As such, in 2022 Bank Sulteng has made service digitalization its primary focus. Strategies and various measures are prepared and being implemented to achieve digitalization so that it can contribute to becoming a technologically relevant bank for Central Sulawesi.

SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB
DISCLAIMER AND LIMITATION OF LIABILITY



Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan utama dalam penyusunan Laporan Tahunan ini. Melalui laporan ini, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah ("Bank Sulteng" atau "Perseroan") menyajikan informasi yang komprehensif mengenai kinerja keuangan, operasional, serta arah strategi bisnis yang dijalankan sepanjang periode pelaporan, sekaligus memberikan gambaran mengenai dinamika industri perbankan yang mempengaruhi perkembangan Perseroan.

Laporan ini juga memuat berbagai pernyataan yang berkaitan dengan rencana serta prospek usaha Perseroan di masa mendatang. Pernyataan yang bersifat prospektif tersebut disusun berdasarkan sejumlah asumsi dengan mempertimbangkan kondisi internal Perseroan serta perkembangan lingkungan bisnis yang relevan. Namun demikian, berbagai faktor eksternal seperti perubahan kebijakan ekonomi, dinamika pasar, perkembangan regulasi, serta kondisi makro ekonomi dapat memengaruhi perbedaan antara proyeksi yang disampaikan dengan realisasi yang terjadi di masa depan.

Dalam menghadapi dinamika tersebut, Bank Sulteng terus berupaya memperkuat strategi bisnis melalui peningkatan kualitas layanan, pengembangan produk perbankan yang inovatif, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Upaya ini dilakukan untuk menjaga stabilitas kinerja sekaligus meningkatkan kontribusi Perseroan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Informasi lebih lanjut mengenai kinerja dan perkembangan Perseroan dapat diperoleh melalui situs web resmi Bank Sulteng di www.banksulteng.co.id, yang menyediakan berbagai publikasi, berita, serta rilis media terkait kegiatan dan pencapaian Perseroan.

The commitment to transparency and accountability serves as the primary foundation in the preparation of this Annual Report. Through this report, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah ("Bank Sulteng" or the "Company") presents comprehensive information regarding its financial and operational performance, as well as the strategic business direction executed throughout the reporting period, while simultaneously providing an overview of the banking industry dynamics influencing the Company's development.

This report also contains various statements relating to the Company's future business plans and prospects. These forward-looking statements are prepared based on several assumptions, considering the Company's internal conditions and the development of the relevant business environment. Nevertheless, various external factors such as changes in economic policies, market dynamics, regulatory developments, and macro economic conditions may cause discrepancies between the conveyed projections and the actual realizations in the future.

In facing these dynamics, Bank Sulteng continuously strives to strengthen its business strategy by improving service quality, developing innovative banking products, and implementing good corporate governance. These efforts are undertaken to maintain performance stability while simultaneously increasing the Company's contribution to supporting regional economic growth and providing added value for all stakeholders.

Further information regarding the Company's performance and development can be obtained through Bank Sulteng's official website at www.banksulteng.co.id, which provides various publications, news, and media releases related to the Company's activities and achievements.

PENCAPAIAN RATING BANK SULTENG TAHUN 2025
ACHIEVEMENT OF BANK SULTENG RATING IN 2025



Peringkat Kredit
Kewajiban Umum (GO) idA/Stable

Credit Rating(s)
General Obligation (GO) idA/Stable



Periode Peringkat
11 Desember 2025 – 1 Desember 2026

Rating Period
December 11, 2025 – December 1, 2026



Riwayat Peringkat yang Dipublikasikan

November 2024	idA/Stable
Juni 2023	idA/Stable
Mei 2022	idA/Stable

Published Rating History

November 2023	idA/Stable
June 2023	idAStable
May 2022	idAStable

PEFINDO menetapkan peringkat idA dengan prospek stabil untuk PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (Bank Sulteng atau Bank). Peringkat tersebut mencerminkan posisi bisnis Bank Sulteng yang kuat didukung oleh pasar captive, permodalan yang sangat kuat, serta likuiditas dan fleksibilitas keuangan yang kuat. Peringkat dibatasi profil pendanaan yang terkonsentrasi dan kualitas aset yang moderat.

Peringkat dapat dinaikkan jika Bank Sulteng secara signifikan memperkuat profil bisnis dan struktur pendanaannya dengan tetap mempertahankan kinerja keuangan secara berkelanjutan. Peringkat dapat diturunkan jika profil bisnis Bank mengalami pemburukan yang signifikan, atau profil keuangan melemah secara substantial, terutama dalam hal kualitas aset.

Didirikan pada tahun 1969, Bank Sulteng bergerak di bidang perbankan komersial, dengan sebagian besar layanan diarahkan ke Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah dan para pegawainya. Kegiatan operasional Bank didukung oleh 750 karyawan dan jaringan kantor terdiri dari satu kantor pusat, 15 kantor cabang, 11 kantor sub-cabang, dan 51 kantor lainnya. Pada 30 September 2025, 30,64% saham Bank Sulteng dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, 43,35% oleh Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, dan 26,00% oleh PT Mega Corpora.

PEFINDO assigns an "idA" rating with a stable outlook to PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (Bank Sulteng or the Bank). The rating reflects Bank Sulteng's strong business position, supported by a captive market, very strong capitalization, as well as strong liquidity and financial flexibility. The rating is constrained by a concentrated funding profile and moderate asset quality.

The rating may be upgraded if Bank Sulteng significantly strengthens its business profile and funding structure while sustaining its financial performance. The rating may be downgraded if the Bank's business profile experiences a significant deterioration, or if its financial profile weakens substantially, particularly in terms of asset quality.

Established in 1969, Bank Sulteng is engaged in commercial banking, with the majority of its services directed towards the Regional Government of Central Sulawesi and its employees. The Bank's operational activities are supported by 750 employees and an office network consisting of one head office, 15 branch offices, 11 sub-branch offices, and 51 other offices. As of September 30, 2025, 30.64% of Bank Sulteng's shares are owned by the Central Sulawesi Provincial Government, 43.35% by the City and Regency Governments within the Central Sulawesi Province, and 26.00% by PT Mega Corpora.

Rating Definition

Obligor dengan peringkat idA memiliki kemampuan yang kuat dibandingkan obligor Indonesia lainnya untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya. Walaupun demikian, kemampuan obligor mungkin akan mudah terpengaruh oleh perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi dibandingkan obligor dengan peringkat lebih tinggi.

Rating Definition

An obligor rated 'idA' has a strong capacity to meet its long-term financial commitments relative to other Indonesian obligors. However, the obligor's capacity is somewhat more susceptible to the adverse effects of changes in circumstances and economic conditions compared to higher-rated obligors.

KEUNGGULAN KAMI
OUR COMPETITIVE ADVANTAGES

Mendukung percepatan pembangunan infrastruktur nasional serta menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi.

Supporting the acceleration of national infrastructure development while ensuring economic growth stability.

Berperan aktif dalam memperluas akses keuangan di daerah.

Actively contributing to the expansion of financial access in regional areas.

Memberikan solusi terbaik dan layanan prima bagi seluruh nasabah.

Providing optimal financial solutions and excellent banking services to all customers.

Menerapkan prinsip GCG, WBS, pengendalian gratifikasi, serta kode etik secara konsisten.

Consistently implementing GCG principles, WBS, gratuity control, and the corporate code of ethics

Mendorong penerapan keuangan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan yang berkesinambungan.

Promoting the adoption of sustainable finance to support long-term economic development.

Berperan strategis dalam pemulihan ekonomi rakyat, terutama di daerah terdampak.

Playing a strategic role in economic recovery, particularly in affected regions.

Mengintegrasikan sistem digitalisasi perbankan dari kantor pusat hingga kantor cabang.

Integrating banking digitalization systems from the head office to branch offices.

Memiliki SDM yang tangguh dalam menghadapi tantangan krisis dan resesi ekonomi.

Developing a resilient human resources capable of navigating economic crises and recessions.

PENCAPAIAN PENTING 2025
2025 KEY ACHIEVEMENTS

ASET
Rp13,6 triliun
atau **meningkat 5,62%**
dibandingkan tahun **2024**

ASSETS Rp13,6 trillion or an **increase** of **5,62%** compared to **2024**

LDR 97,95%
Meningkat 8,21%
dibandingkan tahun **2024**

LDR 97,95% **increased** 8,21% compared to **2024**

PEMBIAYAAN
Rp8,5 triliun
atau **meningkat 1,99%**
dibandingkan tahun **2024**

FINANCING Rp8,5 trillion or an **increase of 1,99%** compared to **2024**

ROA 2,72%
atau **meningkat 3,03%**
dibandingkan tahun **2024**

ROA 2,72% or 3,03% **increase** compared to **2024**

LABA BERSIH TAHUN BERJALAN
Rp278 miliar
atau **naik 14,59%**
dibandingkan tahun **2024**

PROFIT FOR THE YEAR Rp278 billion or 14,59% increas than in **2024**

NIM 6,86%
atau **meningkat 6,69%**
dibandingkan tahun **2024**

NIM 6,86% or an **increase** of 6,69% compared to **2024**

EKUITAS
Rp1.711 miliar
atau **meningkat 7,14%**
dibandingkan tahun **2024**

EQUITY Rp1.711 billion or 7,14% **increase** compared to **2024**

RASIO BOPO
72,32%
atau **menurun 1,58%**
dibandingkan tahun **2024**

ASSETS 72,32% or an **lower** of 1,58% compared to **2024**

TINGKAT KESEHATAN BANK
Peringkat Komposit 2(PK-2)
Predikat **Sehat**

BANK HEALTH LEVEL
Composite **Rating 2 (PK-2)**, **Healthy Predicate**

CAR 25,52%

atau **meningkat 10,43%** dibandingkan tahun **2024**

CAR 25,52% or **increase 10,43%** compared to **2024**

NPL GROSS 2,90%

atau **meningkat 7,01%** dibandingkan tahun **2024**

GROSS NPL 2,90% or **increase 7,01%** compared to **2024**

DPK

Rp8,7 triliun

atau **menurun 5,75%** dibandingkan tahun **2024**

DPK Rp8,7 trillion or an **lower** of **5,75%** compared to **2024**

SELF-ASSESSMENT GCG

Peringkat **2 (dua)**, **PREDIKAT BAIK**

SELF-ASSESSMENT GCG Prated **2** (two), **GOOD PREDICATE**

PERISTIWA PENTING 2025
2025 KEY EVENTS



Senin, 20 Januari 2025
Monday, January 20, 2025

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2024 dan RUPS Luar Biasa Tahun 2025 yang digelar di Hotel Best Western Plus Coco.

Annual General Meeting of Shareholders (Annual GMS) for the 2024 Financial Year and Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) for 2025 held at the Best Western Plus Coco Hotel.



04 - 05 Februari 2025
February 04 – 05, 2025

Rapat Kerja Tahun 2025 PT. Bank Sulteng dengan Tema KERJA KERAS & KERJA CERDAS, di Gedung Workshop Tinombala.

PT Bank Sulteng's 2025 Working Meeting with the theme "WORK HARD & WORK SMART" at the Tinombala Workshop Building



Kamis, 08 Mei 2025
Thursday, May 08, 2025

Penandatanganan kesepakatan bersama Pemerintah Kabupaten Buol dan PT. Bank Sulteng tentang produk dan layanan perbankan PT. Bank Sulteng bertempat di Aston Hotel Palu.

Signing of a Joint Agreement between the Buol Regency Government and PT Bank Sulteng concerning PT Bank Sulteng's Banking Products and Services, held at the Aston Hotel Palu.





Kamis - Jumat, 24 – 25 Juli 2025
Thursday - Friday, July 24 – 25, 2025

Rapat koordinasi dan penandatanganan perjanjian kerja sama SP2D *online* PT. Bank Sulteng dan Pemda Kab. Parigi Moutung bertempat di *workshop* Bank Sulteng.

Coordination Meeting and Signing of the Cooperation Agreement for Online SP2D between PT Bank Sulteng and the Regional Government of Parigi Moutong Regency, held at the Bank Sulteng Workshop.

30 Juli 2025
July 30, 2025

Penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Poso dengan PT. Bank Sulteng tentang penggunaan SIPD RI dalam rangka pencairan SP2D *online* serta pembayaran & pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara *online* bertempat di Poso

Signing of a Cooperation Agreement between the Poso Regency Government and PT Bank Sulteng concerning the Utilization of SIPD RI for Online SP2D Disbursement as well as the Online Payment & Collection of Regional Taxes and Levies, held in Poso.





Rabu, 13 Agustus 2025
Wednesday, August 13, 2025

Penandatangan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Sigi dengan PT. Bank Sulteng tentang penggunaan SIPD dalam rangka pencairan SP2D *online* di Kantor Bupati Kabupaten Sigi Desa Bora

Signing of a Cooperation Agreement between the Sigi Regency Government and PT Bank Sulteng concerning the Utilization of SIPD for Online SP2D Disbursement at the Sigi Regent's Office, Bora Village.





Selasa, 07 Oktober 2025
Tuesday, October 07, 2025

Penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan PT. Bank Sulteng tentang penggunaan aplikasi sistem informasi pemerintah daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dalam rangka pencairan SP2D secara *online* dan pengelolaan keuangan daerah.

Signing of a Cooperation Agreement between the Regional Government of Banggai Kepulauan Regency and PT Bank Sulteng concerning the Utilization of the Regional Government Information System of the Republic of Indonesia (SIPD RI) Application for Online SP2D Disbursement and Regional Financial Management



SERTIFIKAT & PENGHARGAAN 2025
CERTIFICATIONS & AWARDS 2025



INFOBANK / THE ASIAN POST

PT. Bank Sulteng Raih Penghargaan:
EXELLENCE FINANCIAL PERFORMANCE DURING 2023 - 2024
Dalam awarding "Financial Regional Champion 2025"
Pada Jumat, 16 Mei 2025, di Sangri-La Hotel, Jakarta

PT. Bank Sulteng Receives Award:
EXELLENCE FINANCIAL PERFORMANCE DURING 2023 - 2024
At the "Financial Regional Champion 2025" Awards
On Friday, May 16, 2025, at the Sangri-La Hotel, Jakarta

TRANS N CO / INFO EKONOMI

PT. Bank Sulteng Raih Penghargaan:
SPECIAL ACVHIEVEMENT FOR BUMD
Dalam awarding "Indonesia Top Digital Public Relation Award 2025"
Pada Kamis, 26 Juni 2025, di Golden Ballroom - Sultan Hotel 2 Residence, Jakarta.

PT. Bank Sulteng Receives Award:
SPECIAL ACVHIEVEMENT FOR BUMD
At the "Indonesia Top Digital Public Relation Award 2025" Awards
On Thursday, June 26, 2025, at the Golden Ballroom of Sultan Hotel 2 Residence, Jakarta.





INFOBANK

PT. Bank Sulteng Raih Penghargaan:
THE EXCELLENT PERFORMANCE BANK IN 10 CONSECUTIVE YEARS 2015 - 2014 & THE EXELLENT PERFORMANCE BANK 2025
Dalam awarding 30TH Infobank Banking Appreciation 2025
Pada Jumat, 29 Agustus 2025, di Hotel Indonesia Kempinski

PT. Bank Sulteng Receives Award:
THE EXCELLENT PERFORMANCE BANK IN 10 CONSECUTIVE YEARS 2015 - 2014 & THE EXELLENT PERFORMANCE BANK 2025
At the 30TH Infobank Banking Appreciation 2025 Awards
On Friday, August 29, 2025, at Hotel Indonesia Kempinski

INFOBANK

PT. Bank Sulteng Raih Penghargaan:
TOP CEO 2025
Dalam awarding Top 100 Ceo And The Future Leaders Forum 2025
Pada Senin, 8 Desember 2025, di Hotel Shangri - La, Jakarta

PT. Bank Sulteng Receives Award:
TOP CEO 2025
At the Top 100 CEOs and The Future Leaders Forum 2025 Awards
On Monday, December 8, 2025, at the Shangri-La Hotel, Jakarta



DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENTS

1 PENDAHULUAN
INTRODUCTION

1 Tentang Laporan Tahunan
About the Annual Report

2 Tema & Penjelasan Tema
Theme & Theme Explanation

3 Keberlanjutan Tema
Theme Sustainability

6 Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab
Disclaimer and Limitation of Liability

7 Pencapaian Rating Bank Sulteng Tahun 2025
Bank Sulteng's 2025 Rating Achievements

8 Keunggulan kami
Our advantages

10 Pencapaian Penting 2025
Key Achievements 2025

12 Peristiwa Penting 2025
Key Events of 2025

15 Sertifikat & Penghargaan 2025
Certificates & Awards 2025

16 Daftar Isi
Table of Contents

20 KILAS KINERJA 2025
2025 PERFORMANCE OVERVIEW

22 Ikhtisar Keuangan Dan Rasio Keuangan Tahun 2021 – 2025
Financial Highlights And Financial Ratios For 2021 – 2025

24 Laporan Laba Rugi Tahun 2021 – 2025
Income Statement for the Years 2021 – 2025

26 Laporan Arus Kas Bank Sulteng Tahun 2021 - 2025
Bank Sulteng Cash Flow Statement For The Years 2021 – 2025

28 Rasio Keuangan Tahun 2021 – 2025
Financial Ratios for the Years 2021 – 2025

29 Ikhtisar Saham
Stock Overview

29 Ikhtisar Obligasi
Bond Summary

30 Ikhtisar Operasional
Operational Overview

31 Grafik Ikhtisar Keuangan
Financial Overview Chart

36 Laporan Dewan Komisaris
Board Of Commissioners Report

48 Laporan Direksi
Board Of Directors' Report

67 Pernyataan Pertanggungjawaban Atas Laporan Tahunan 2025
Statement of Accountability for the 2025 Annual Report

69 PROFIL PERUSAHAAN
COMPANY PROFILE

70 Identitas Perusahaan
Corporate Indetity

72 Brand Perusahaan dan Filosofi Logo Bank
Company Brand and Bank Logo Philosophy

74 Akses Terhadap Perusahaan Termasuk Kantor Cabang Atau Kantor Perwakilan
Access to The Company Including Branch or Representative Offices

76 Riwayat Singkat Perusahaan
Company Brief History

80 Jejak Langkah Perusahaan
Company Footsteps

82 Visi, Misi Perusahaan dan Budaya Perusahaan
Vision, Mission and Corporate Culture

86 Sasaran dan Strategi Perusahaan
Corporate Objectives and Strategies

90 Ruang Lingkup Kegiatan Usaha
Scope of Business Activities

97 Jaringan Kantor dan Wilayah Operasional
Office Network and Operational Area

100 Struktur Organisasi Perusahaan
Company Organizational Structure

102 Daftar Keanggotaan Asosiasi
List of Membership In Associations

104 Profil Direksi
Board of Directors Profile

112 Profil Komisaris
Board of Commissioners Profile

120 Profil Singkat Pejabat Eksekutif
Executive Officers' Brief Profile

130 Jumlah dan Profil Karyawan
Number and Profile Of Employee

132 Struktur dan Komposisi Pemegang Saham
Shareholding Structure and Composition

139 Profil Pemegang Saham
Shareholder Profile

147 Struktur Grup dan Informasi Entitas Anak dan/atau Perusahaan Asosiasi
Group Structure and Information on Subsidiaries and/or Associate Companies

147 Kronologis Pencatatan Saham
Stock Listing Chronology

147 Kronologis Pencatatan Obligasi dan Efek Lainnya
Chronology of Bond and Other Securities Listings

148 Informasi Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik
Information On Public Accounting Services And Public Accounting Firm

149 Nama Dan Alamat Lembaga Dan/Atau Profesi Penunjang Perusahaan
Name And Address Of Supporting Institutions And/Or Professionals Of The Company

150 Aksi Korporasi
Corporate Action

151 Profil Dana Pensiun Tahun Buku 2025
Pension Fund Profile for Financial Year 2025

158 FUNGSI PENUNJANG BISNIS
BUSINESS SUPPORT FUNCTIONS

160 **Sumber Daya Manusia**
Human Resources

160 Profil dan Struktur Organisasi SDM
HR Profile and Organizational Structure

161 Struktur Organisasi Divisi SDM
HR Division Organizational Structure

163 Membangun SDM Berkualitas
Building Quality Human Resources

166 Mekanisme Penilaian Kinerja
Performance Appraisal Mechanism

166 Sistem Manajemen Kinerja
Performance Management System

167 Penilaian Kinerja: Membangun Budaya Meritokrasi Berbasis Hasil
Performance Appraisal: Building a Results-Based Meritocracy Culture

168 Hubungan Industrial dan Kesejahteraan
Industrial Relations and Welfare

169 Kebijakan Remunerasi Strategis
Strategic Remuneration Policy

170 Program Remunerasi Strategis
Strategic Remuneration Program

170 Komponen Imbal Jasa dan Tunjangan Kesejahteraan
Compensation Components and Welfare Allowances

171 Program Manfaat dan Insentif Kinerja
Benefit and Performance Incentive Programs

171 Program Pensiun dan Purnabakti
Pension and Retirement Programs

171 Jaminan Masa Depan Melalui Program Pensiun
Future Security Through Pension Programs

172 Sistem Reward and Punishment
Reward and Punishment System

173 Manajemen Turnover Pegawai
Employee Turnover Management

174 Rencana Pengelolaan SDM Tahun 2025
2025 HR Management Plan

176 **Teknologi Informasi**
Information Technology

177 Sasaran TI Bank Sulteng
Bank Sulteng IT Goals

178 Langkah Strategis TI
IT Strategic Steps

179 Tujuan TI Bank Sulteng
Bank Sulteng IT

180 Kebijakan dan Tata Kelola TI
IT Policy and Governance

181 Struktur Divisi TI
IT Division Structure

182 Pengembangan SDM TI
IT HR Development

183 *Road Map* Pengembangan TI
IT Development Road Map

185 Sistem Keamananan TI Bank Sulteng
Bank Sulteng IT Security System

187 Penanganan Gangguan (*Disruption*)
Disruption Handling

188 Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery*)
Disaster Recovery

190 ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
MANAGEMENT ANALYSIS AND DISCUSSION

192 Tinjauan Perekonomian
Economic Overview

200 Analisis Perekonomian Sulawesi Tengah
Central Sulawesi Economic Analysis

203 Tinjauan Industri
Industrial Overview

204 Tinjauan Operasional
Operational Overview

205 Strategi Bank
Bank Strategy

237 Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang Serta Rasio Keuangan Lainnya
Ability to Pay Debt and Collectability of Receivables and Other Financial Ratios

243 Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal Yang Direalisasikan Pada Tahun Buku Terakhir
Material Bonds for Investment in Capital Goods Realised in the Last Financial Year

253 Aspek Perpajakan
Taxation Aspects

253 Aspek Pemasaran dan Pangsa Pasar
Marketing Aspects and Market Share

256 Kebijakan Dividen
Dividend Policy

257 Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Realization of The Use of Proceeds From Public Offerings

257 Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, Atau Restrukturisasi Hutang Dan/Atau Modal
Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, or Debt and/or Capital Restructuring

259 Informasi Transaksi Material Yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi
Material Transaction Information Containing Conflicts of Interest and/or Transactions With Affiliated Parties

264 Perubahan Peraturan dan Dampaknya Terhadap Kinerja Bank
Regulatory Changes and Their Impact on Bank Performance

264 Perubahan Kebijakan Akuntansi Terhadap Kinerja Bank
Changes In Accounting Policy on Bank Performance

269 Komponen Substansial Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya
Substantial Components Other Operating Income (Expenses)

269 Dampak Perubahan Pendapatan Bunga Terhadap Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya
The Impact of Changes In Interest Income on Other Operating Income (Expenses)

270 *Key Performance Indicator* (KPI) Tingkat Kesehatan Bank
Key Performance Indicator (KPI) Bank Health Level

271 Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Luar Biasa dan Jarang Terjadi
Financial Information Containing Extraordinary and Infrequent Events

272 Rencana & Strategi Jangka Panjang
Long-Term Plans & Strategies

275 Informasi Kelangsungan Usaha
Business Continuity Information

277 Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP)
Employee and/or Management Stock Ownership Program (ESOP/MSOP)

278 TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE

280 Komitmen Dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Commitment to The Implementation of Corporate Governance

281 Dasar Hukum Pedoman GCG Perusahaan
Legal Basis for the Company's GCG Guidelines

282 Tujuan dan Maksud Penerapan GCG
Objectives and Purpose of GCG Implementation

282 Prinsip-Prinsip GCG
GCG Principles

286 Faktor Strategis Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Strategic Factors for Corporate Governance Implementation

289 Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2025 & Rencana Tahun 2026
2025 Governance Implementation & 2026 Plans

289 Struktur Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Structure

290 Penanggung Jawab Penerapan GCG
Person in Charge of GCG Implementation

291 Kebijakan Implementasi Prinsip-Prinsip GCG
Policy on Implementation of GCG Principles

292 Kilas balik penerapan GCG di Bank Sulteng
Flashback of GCG implementation in Bank Sulteng

293 *Roadmap* GCG
GCG Roadmap

293 Mekanisme Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Mechanism

294 Tahapan Implementasi Tata Kelola Perusahaan
Stages of Corporate Governance Implementation

299 Pelaporan dan Disclosure
Reporting and Disclosure

299 Pemegang Saham
Shareholders

312 Dewan Komisaris
Board of Commissioners

337 Direksi
Directors

350 Komite di bawah Dewan Komisaris
Committees Under the Board of Commissioners

350 Komite Audit
Audit Committee

363 Komite Remunerasi Dan Nominasi
Remuneration and Nomination Committee

368 Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee

377 Komite Di Bawah Direksi
Committee Under the Board of Directors

377 Asset Liability Committee (ALCO)
Asset Liability Committee (ALCO)

381 Komite Kredit
Credit Committee

384 Komite Pengarah Teknologi Informasi
Information Technology Steering Committee

387 Komite Manajemen Risiko
Risk Management Committee

389 Komite Personalia
Personnel Committee

392 Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
Diversity of Board of Commissioners and Board of Directors Composition

392 Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi
Performance Assessment of Board of Commissioners and Board of Directors

393 Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Dan Direksi
Performance Assessment of the Board of Commissioners and Directors

394 Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris Dan Direksi
Board of Commissioners and Directors Remuneration Policy

396 Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of the Board of Commissioners

398 Sekretaris Perusahaan
Company Secretary

404 Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

410 Auditor Internal
Internal Auditor

423 Auditor Eksternal
External Auditor

426 Manajemen Risiko
Risk Management

439 Fungsi Kepatuhan
Compliance Function



447	Program Anti Pencucian Uang (APU) Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) Anti-Money Laundering (AML) and Countering the Financing of Terrorism (PPT) Programme
456	Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan Dan/ Atau Manajemen Employee And/Or Management Share Ownership Program
456	Kode Etik Code Of Ethics
461	Penerapan *Whistleblowing System* Implementation of A Whistleblowing System
468	Anti Fraud Anti-Fraud
470	Komitmen Anti Korupsi & Program Pengendalian Gratifikasi Anti-Corruption Commitment & Gratification Control Program
475	Pengungkapan Kebijakan Insider Trading Insider Trading Policy Disclosure
476	Pakta Integritas Integrity Pact
477	Perkara Hubungan Industrial Industrial Relations Cases
477	Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan Major Cases Faced by The Company
483	Akses Data dan Informasi Perusahaan Company Data and Information Access
484	Tranparansi Praktik Bad Corporate Governance Transparency of Bad Corporate Governance Practices

486 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

488	KebijakanTanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL) Corporate Social Responsibility Policy
496	Tanggung Jawab Sosial Bidang Lingkungan Hidup Environmental Responsibility
498	Tanggung Jawab Sosial Bidang Pengembangan Sosial & Kemasyarakatan Social and Community Development Responsibility
500	Tanggung Jawab Sosial Bidang Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Labor, Occupational Health, and Safety Responsibility
505	Tanggung Jawab Sosial Terhadap Perlindungan Konsumen Consumer Protection Responsibility

518 DAFTAR INDEKS SEOJK16/2021
SEOJK 16/2021 INDEX LIST

535 LAPORAN KEUANGAN AUDITED 2024
AUDITED FINANCIAL STATEMENTS 2024





Kilas Kinerja

Performance Highligt Functions

IKHTISAR KEUANGAN DAN RASIO KEUANGAN TAHUN 2021–2025
FINANCIAL HIGHLIGHTS AND FINANCIAL RATIOS FOR 2021–2025

(dalam Juta Rupiah) | (in Million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
						Rp	%
1	2	3	4	5	6	7 = (2-3)	8 = (7/3)
ASET ASSETS							
Kas Cash	154.429	134.176	102.116	152.061	223.579	20.253	15,09%
Giro pada Bank Indonesia Current Account with Bank Indonesia	1.133.091	996.769	825.877	911.670	349.461	136.322	13,68%
Giro pada Bank Lain Current Account with Other Banks	7.378	6.765	10.185	363.810	5.120	613	9,06%
Setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai tahun 2025 sebesar Nihil dan tahun 2024 sebesar Nihil Net of Allowance for Impairment Losses in 2025 is Nil, and in 2024 is Nil							
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain Placements with Bank Indonesia and Other Banks	0	690.000	1.854.883	895.396	3.146.222	(690.000)	(100,00%)
Setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai tahun 2025 sebesar Nihil dan tahun 2024 sebesar Nihil Net of Allowance for Impairment Losses in 2025 is Nil, and in 2024 is Nil							
Efek-efek Securities	3.627.165	2.509.215	2.042.538	3.249.088	1.543.550	1.117.950	44,55%
Setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai tahun 2025 sebesar Rp49.901.400 dan tahun 2024 sebesar Rp(Nihil) Net of Allowance for Impairment Losses in 2025 for total of Rp49.901.400 and in 2024 is Nil							
Kredit yang Diberikan Loans							
Pihak Berelasi Related Parties	19.367	21.503	22.381	21.926	26.011	(2.136)	(9,93%)
Pihak Ketiga Third Parties	8.528.646	8.359.710	7.044.231	6.245.526	5.599.579	168.936	2,02%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Allowance for Impairment Losses	(119.281)	(94.639)	(89.824)	(108.375)	(96.230)	(24.642)	26,04%
Jumlah Kredit yang Diberikan - Bersih Total Net Loans	8.428.732	8.286.574	6.976.788	6.159.077	5.529.360	142.158	1,72%
Aset Tetap Fixed Assets	146.648	135.454	116.623	114.654	107.610	11.194	8,26%
Setelah dikurangi akumulasi penyusutan tahun 2025 sebesar Rp85.327.769.566 dan tahun 2024 sebesar Rp57.728.450.370 Net of Accumulated Depreciation in 2025 is Rp85.327.769.566 and in 2024 is Rp57.728.450.370.							
Aset Tak Berwujud Intangible Assets	1.421	1.919	2.417	2.915	3.062	(498)	(25,96%)

(dalam Juta Rupiah) | (in Million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
						Rp	%
1	2	3	4	5	6	7 = (2-3)	8 = (7/3)
Setelah dikurangi akumulasi amortisasi tahun 2025 sebesar Rp4.070.124.766 dan tahun 2024 sebesar Rp3.572.329.362. Net of Accumulated Amortization in 2025 is Rp4.070.124.766 and in 2024 is Rp3.572.329.362.							
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	13.697	8.033	7.214	5.637	10.944	5.664	70,52%
Beban Dibayar Dimuka dan Aset Lain-lain Prepaid Expenses and Other Assets	136.382	153.943	144.013	109.604	82.279	(17.561)	(11,41%)
JUMLAH ASET **TOTAL ASSETS**	**13.648.944**	**12.922.848**	**12.082.655**	**11.963.911**	**11.001.187**	**726.096**	**5,62%**
LIABILITAS DAN EKUITAS **LIABILITIES AND EQUITY**							
LIABILITAS LIABILITIES							
Liabilitas Segera Immediate Liabilities	636.661	569.640	1.581.046	1.409.894	780.971	67.021	11,77%
Simpanan Nasabah Customer Deposits							
Pihak Berelasi Related Parties	35.704	82.458	219.030	579.454	379.817	(46.754)	(56,70%)
Pihak Ketiga Third Parties	8.690.865	9.176.032	7.004.677	7.565.621	7.599.715	(485.167)	(5,29%)
Simpanan dari Bank Lain Deposits from Other Banks	1.275.000	530.000	1.325.000	850.000	825.000	745.000	140,57%
Pinjaman yang Diterima Borrowings Received	1.220.535	897.344	356.663	75.013	67.999	323.191	36,02%
Utang Pajak Tax Payables	9.161	8.161	13.948	694	6.389	1.000	12,25%
Liabilitas Imbalan Kerja Employee Benefit Liabilities	55.644	50.175	48.774	45.036	46.444	5.469	10,90%
Beban yang Masih Harus Dibayar dan Liabilitas Lain-lain Accrued Expenses and Other Liabilities	14.318	11.990	14.626	18.443	42.262	2.328	19,42%
JUMLAH LIABILITAS **TOTAL LIABILITIES**	**11.937.889**	**11.325.800**	**10.563.765**	**10.544.155**	**9.748.597**	**612.089**	**5,40%**
EKUITAS **EQUITY**							
Modal saham Share Capital	491.970	491.970	465.005	426.990	426.990	0	0,00%
Nilai nominal Rp100.000 per saham, modal dasar 17.000.000 saham, dan modal ditetapkan dan disetor penuh tahun 2025 dan 2024 sebanyak 4.919.698 Nominal value of Rp100.000 per share, authorized capital of 17,000,000 shares, and issued and fully paid-up capital of 4,919,698 shares in 2025 and 2024.							
Agio Saham Share Premium	202.901	202.901	187.138	164.915	164.915	(0)	(0,00%)
Dana Setoran Modal Capital Deposit Fund	43.226	12.366	28.434	63.348	33.532	30.860	249,55%
Komponen Ekuitas Lainnya Other Equity Components							

(dalam Juta Rupiah) | (in Million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
						Rp	%
1	2	3	4	5	6	7 = (2-3)	8 = (7/3)
Pendapatan Komprehensif Lainnya Other Comprehensive Income							
Keuntungan/(Kerugian) Nilai Wajar Surat Berharga Fair Value Gain/(Loss) of Securities							
Keuntungan/(Kerugian) Aktuarial Program Manfaat Pasti setelah Dikurangi/Ditambah Pajak-pajak Terkait Actuarial Gains/(Losses) on Defined Benefit Plans, Net of Related Taxes	10.703	10.231	16.909	21.440	12.770	472	4,61%
Saldo Laba Retained Earnings							
Telah Ditentukan Penggunaannya Appropriated	684.678	637.348	563.828	496.677	409.374	47.330	7,43%
Belum Ditentukan Penggunaannya Unappropriated	277.576	242.232	257.575	246.385	205.009	35.344	14,59%
JUMLAH EKUITAS TOTAL EQUITY	**1.711.055**	**1.597.048**	**1.518.890**	**1.419.756**	**1.252.590**	**114.007**	**7,14%**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	**13.648.944**	**12.922.848**	**12.082.655**	**11.963.911**	**11.001.187**	**726.096**	**5,62%**

Laporan Laba Rugi Tahun 2021 – 2025
Income Statement for the Years 2021 – 2025

(dalam Juta Rupiah) | (in Million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
						Rp	%
1	2	3	4	5	6	7 = (2-3)	8 = (7/3)
Pendapatan Dan Beban Operasional **Operating Income and Expenses**							
Pendapatan Bunga Interest Income	1.239.532	1.083.149	998.645	875.669	744.274	156.383	14,44%
Beban Bunga Interest Expenses	(446.729)	(405.566)	(380.093)	(259.522)	(214.459)	(41.163)	10,15%
Pendapatan Bunga - Bersih Net Interest Income	792.803	677.583	618.552	616.147	529.815	115.220	17,00%
Pendapatan Operasional Lainnya **Other Operating Income**	78.206	117.008	90.065	73.256	78.882	(38.802)	(33,16%)
Beban Operasional **Operating Expenses**							
Penyisihan/(Pemulihan) CKPN Provision/(Reversal) for CKPN	25.747	15.128	(22.546)	16.483	899	10.619	70,19%
Administrasi dan Umum General and Administrative Expenses	163.001	161.465	140.894	134.824	112.959	1.536	0,95%
Tenaga Kerja Employee Expenses	285.134	267.429	227.798	192.143	194.039	17.705	6,62%
Lainnya Others	32.430	32.232	27.320	27.892	29.311	198	0,61%
Jumlah Beban Operasional Total Operating Expenses	506.312	476.255	373.467	371.342	337.208	30.057	6,31%

(dalam Juta Rupiah) | (in Million Rupiah)

Uraian Description	**2025**	**2024**	**2023**	**2022**	**2021**	**Pertumbuhan** Growth	
						Rp	**%**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7 = (2-3)**	**8 = (7/3)**
Laba Operasional **Operating Profit**	364.697	318.337	335.151	318.060	271.489	46.360	14,56%
Pendapatan Dan Beban Non Operasional **Non-Operating Income and Expenses**							
Pendapatan Non Operasional Non-Operating Income	2.307	4.228	2.820	4.661	3.802	(1.921)	(45,44%)
Beban Non Operasional Non-Operating Expenses	(5.747)	(1.907)	(1.572)	(2.042)	(1.801)	(3.840)	201,36%
Jumlah Pendapatan dan Beban Non Operasional **Total Non-Operating Income and Expenses**	(3.440)	2.321	1.248	2.619	2.001	(5.761)	(248,21%)
Laba Bersih Sebelum Pajak **Net Profit Before Tax**	361.257	320.658	336.399	320.680	273.490	40.599	12,66%
Beban Pajak Penghasilan **Income Tax Expenses**							
Beban Pajak Kini Current Tax Expenses	89.478	80.449	81.218	67.423	(59.959)	9.029	11,22%
(Manfaat)/Beban Pajak Tangguhan Deferred Tax (Benefit)/Expense	(5.797)	(2.023)	(2.394)	6.871	(8.521)	(3.774)	186,55%
Jumlah Beban Pajak Penghasilan Total Income Tax Expenses	83.681	78.426	78.824	74.294	(68.480)	5.255	6,70%
Laba Tahun Berjalan **Net Profit for the Year**	277.576	242.232	257.575	246.385	205.010	35.344	14,59%
Pendapatan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income							
Keuntungan/(Kerugian) Aktuarial Actuarial Gains/(Losses)	606	(5.474)	(3.714)	7.107	2.747	6.080	(111,07%)
Pajak Penghasilan terkait dengan komponen OCI Income Tax Related to OCI Components	(133)	(1.204)	(817)	1.564	604	1.071	(88,95%)
(Kerugian)/Pendapatan Komprehensif Lain Periode Berjalan **Other Comprehensive (Loss)/ Income for the Period**	472	(6.678)	(4.531)	8.671	3.350	7.150	(107,07%)
Total Laba Komprehensif Total Comprehensive Income	**278.048**	**235.553**	**253.044**	**255.056**	**208.360**	**42.495**	**18,04%**

LAPORAN ARUS KAS BANK SULTENG TAHUN 2021-2025
BANK SULTENG CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEARS 2021–2025

(dalam Juta Rupiah) | (in Million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
						Rp	%
1	2	3	4	5	6	7 = (2-3)	8 = (7/3)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI **CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES**							
Penerimaan Bunga Interest Receipts	1.237.050	1.083.149	996.371	860.772	738.398	153.901	14,21%
Pembayaran Bunga Interest Payments	(446.729)	(405.566)	(380.093)	(259.522)	(214.459)	(41.163)	10,15%
Pembayaran Kepada Karyawan Payments to Employees	(285.134)	(267.429)	(227.798)	(192.143)	(194.040)	(17.705)	6,62%
Pembayaran Beban Umum dan Administrasi Payments for General and Administrative Expenses	(138.359)	(146.336)	(168.034)	(132.040)	(103.085)	7.977	(5,45%)
Penerimaan Pendapatan Lainnya Receipts from Other Income	80.513	121.237	92.885	77.917	82.684	(40.724)	(33,59%)
Pembayaran Beban Lainnya Payments for Other Expenses	(38.177)	(34.139)	(28.892)	(29.934)	(31.112)	(4.038)	11,83%
Arus Kas Cash Flows	409.165	350.915	284.439	325.050	278.386	58.250	16,60%
Aset dan Kewajiban Operasi Operating Assets and Liabilities							
Penurunan/(Kenaikan) Aset Operasi: Decrease/(Increase) in Operating Assets:							
- Kredit yang Diberikan - Loans Disbursed	(192.548)	(1.329.729)	(776.615)	(658.345)	(1.036.070)	1.137.181	(85,52%)
- Aset Lain-lain - Other Assets	20.043	(9.930)	(32.135)	(12.427)	(15.788)	29.973	(301,84%)
Kenaikan/(Penurunan) Liabilitas Operasi: Increase/(Decrease) in Operating Liabilities:							
- Liabilitas Segera - Immediate Liabilities	67.021	(1.011.406)	171.152	628.923	660.360	1.078.427	(106,63%)
- Beban yang Masih Harus Dibayar - Accrued Expenses	2.328	(1.235)	(3.817)	(23.818)	(13.791)	3.563	(288,50%)
- Simpanan Nasabah - Customer Deposits							
- Pihak Berelasi - Related Parties	(46.755)	(136.572)	(360.423)	199.636	186.260	89.817	(65,77%)
- Pihak Ketiga - Third Parties	(485.167)	2.171.355	(560.944)	(34.095)	1.785.027	(2.656.522)	(122,34%)
- Simpanan dari Bank Lain - Deposits from Other Banks	745.000	(795.000)	475.000	25.000	(125.000)	1.540.000	(193,71%)
Pembayaran Pajak Penghasilan Income Tax Payments	(88.479)	(85.031)	(67.270)	(66.729)	(64.341)	(3.448)	4,05%
Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities	**430.609**	**(846.635)**	**(870.613)**	**383.195**	**1.655.224**	**1.277.244**	**(150,86%)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI **CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES**							
Efek-efek Securities	(1.084.748)	(466.677)	1.206.550	(1.705.539)	(735.545)	(618.071)	132,44%

(dalam Juta Rupiah) | (in Million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
						Rp	%
1	2	3	4	5	6	7 = (2-3)	8 = (7/3)
Pembelian Aset Tetap Acquisition of Fixed Assets	(38.296)	(27.557)	(1.969)	(7.044)	(10.991)	(10.739)	38,97%
Pembelian Aset Tidak Berwujud Acquisition of Intangible Assets	0	0	498	147	(601)	0	0,00%
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net Cash Used for Investing Activities	**(1.123.044)**	**(494.234)**	**1.205.079**	**(1.712.436)**	**(747.138)**	**(628.810)**	**127,23%**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN **CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES**							
Pembayaran Pinjaman yang Diterima Cash Flows From Financing Activities	323.192	540.680	281.650	7.015	21.959	(217.488)	(40,22%)
Penambahan Modal Disetor Additional Paid-in Capital	30.860	26.660	25.324	29.816	24.167	4.200	15,75%
Pembayaran Dividen Dividend Payments	(169.562)	(154.545)	(147.831)	(102.505)	(92.205)	(15.017)	9,72%
CSR	(25.339)	(30.599)	(18.954)	(15.202)		5.260	(17,19%)
Pendapatan Komprehensif Comprehensive Income	472	(6.678)	(4.531)	8.671	3.351	7.150	(107,07%)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Net Cash Used for Financing Activities	**159.623**	**375.518**	**135.658**	**(72.205)**	**(42.728)**	**(215.895)**	**(57,49%)**
KENAIKAN/(PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS **INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS**	(532.812)	(965.351)	470.125	(1.401.446)	865.358	432.539	(44,81%)
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE **CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF PERIOD**	1.827.710	2.793.061	2.322.936	3.724.382	2.859.024	(965.351)	(34,56%)
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE **CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF PERIOD**	1.294.898	1.827.710	2.793.061	2.322.936	3.724.382	(532.812)	(29,15%)
KAS DAN SETARA KAS, TERDIRI DARI: **CASH AND CASH EQUIVALENTS, CONSISTING OF:**							
Kas Cash	154.429	134.176	102.116	152.061	223.579	20.253	15,09%
Giro Bank Indonesia Current Accounts with Bank Indonesia	1.133.091	996.769	825.877	911.670	349.461	136.322	13,68%
Giro Pada Bank Lain Current Accounts with Other Banks	7.378	6.765	10.185	363.810	5.120	613	9,06%
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain Placements with Bank Indonesia and Other Banks	0	690.000	1.854.883	895.396	3.146.222	(690.000)	(100,00%)
JUMLAH KAS DAN SETARA KAS TOTAL CASH AND CASH EQUIVALENTS	**1.294.898**	**1.827.710**	**2.793.061**	**2.322.936**	**3.724.382**	**(532.812)**	**(29,15%)**

Rasio Keuangan Tahun 2021 – 2025
Financial Ratios for the Years 2021 – 2025

Uraian	2025	2024	2023	2022	2021	Description
Permodalan						Capitalization
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	25,52%	23,11%	27,32%	28,03%	27,37%	Minimum Capital Adequacy Requirement
Aset Produktif						**Earning Assets**
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	2,03%	1,93%	1,92%	0,68%	0,76%	Non-Performing Earning and Non-Earning Assets to Total Earning and Non-Earning Assets
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	2,08%	1,97%	2,18%	0,72%	0,76%	Non-Performing Earning Assets to Total Earning Assets
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	1,00%	0,82%	0,93%	0,99%	1,25%	Allowance for Impairment Losses (CKPN) on Financial Assets to Earning Assets
NPL Gross	2,90%	2,71%	2,99%	1,25%	1,30%	NPL Gross
NPL Netto	1,90%	1,82%	2,06%	0,00%	0,00%	NPL Netto
Rasio Rentabilitas						**Profitability Ratios**
Laba terhadap Total Aset (ROA)	2,72%	2,64%	2,97%	3,15%	3,07%	Return on Assets (ROA)
Laba terhadap Ekuitas (ROE)	18,54%	17,36%	19,90%	18,64%	18,95%	Return on Equity (ROE)
Net Interest Margin (NIM)	6,86%	6,43%	6,43%	6,60%	6,88%	Net Interest Margin (NIM)
Biaya Operasional/ Pendapatan Operasional (BOPO)	72,32%	73,48%	69,84%	67,02%	68,63%	Operating Expenses to Operating Income (BOPO)
Rasio Likuiditas						**Liquidity Ratio**
Loan to Funding Ratio (LFR)	97,95%	90,52%	97,83%	70,50%	76,40%	Loan to Funding Ratio (LFR)
Cost to Income Ratio (CIR)	55,17%	58,03%	55,89%	55,14%	53,69%	Cost to Income Ratio (CIR)

IKHTISAR SAHAM
STOCK SUMMARY

Sampai akhir tahun 2025, Bank Sulteng tidak terlibat dalam perdagangan saham. Dengan demikian, tidak tersedia informasi mengenai jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga tertinggi dan terendah, harga penutupan, serta volume perdagangan saham.

As of the end of 2025, Bank Sulteng is not engaged in stock trading. Consequently, there is no available information regarding the number of outstanding shares, market capitalization, highest and lowest stock prices, closing price, or stock trading volume.

IKHTISAR OBLIGASI
BOND SUMMARY

Sampai akhir tahun 2025, Bank Sulteng belum menerbitkan obligasi, sukuk, atau obligasi konversi. Dengan demikian, tidak tersedia informasi mengenai jumlah yang beredar, tingkat bunga atau imbalan, tanggal jatuh tempo, serta peringkat dari instrumen tersebut.

As of the end of 2025, Bank Sulteng has not issued any bonds, sukuk, or convertible bonds. Consequently, there is no available information regarding the outstanding amount, interest rate or yield, maturity date, or credit rating of these instruments.



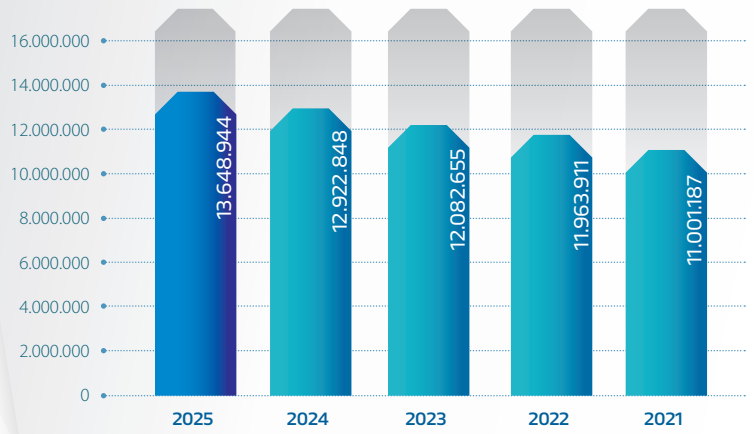
IKHTISAR OPERASIONAL
OPERATIONAL OVERVIEW

(dalam Juta Rupiah) | (in Million Rupiah)

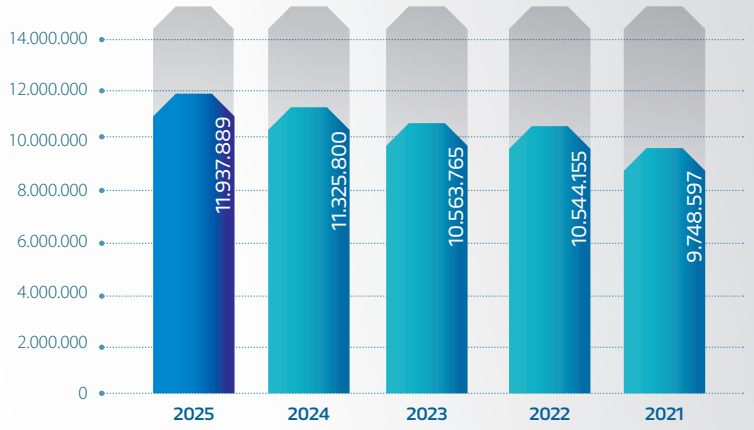
Uraian	2025	2024	2023	2022	2021	Description
Dana Pihak Ketiga						**Third Party Funds**
Giro	1.977.964	2.785.223	2.078.435	2.575.777	2.245.793	Current Accounts
Tabungan	2.182.782	2.154.826	1.883.884	1.795.546	1.612.644	Savings
Deposito Berjangka	4.565.822	4.318.441	3.261.388	3.773.752	4.121.096	Time Deposits
Jumlah Dana Pihak Ketiga	**8.726.568**	**9.258.490**	**7.223.707**	**8.145.075**	**7.979.533**	**Total Third Party Funds**
Kredit						**Credit**
Pihak Berelasi	19.367	21.503	22.381	21.926	26.011	Related Parties
Pihak Ketiga	8.528.646	8.359.710	7.044.231	6.245.526	5.599.579	Third Parties
(CKPN)	(119.281)	(94.639)	(89.824)	(108.374)	(96.229)	(CKPN)
Jumlah Kredit	**8.428.732**	**8.286.574**	**6.976.788**	**6.159.078**	**5.529.361**	**Total Credit**
Fee Based Income						**Fee Based Income**
Penerimaan Bunga Kredit Hapus Buku	84	87	255	0	10	Receipt of Written-off Loan Interest
Penerimaan Pokok Kredit Hapus Buku	2.049	1.410	1.434	788	1.811	Receipt of Written-off Loan Principal
Provisi Bank Garansi	316	557	290	676	1.025	Bank Guarantee Fees
Denda Kredit dan Deposito	5.696	4.813	4.683	11.824	8.125	Loan and Deposit Penalties
Jasa Penggantian Cek dan Bilyet Giro	362	408	455	493	490	Check and Current Accounts Slip Replacement Services
Jasa Administrasi	43.258	62.232	47.327	34.722	35.561	Administrative Services
Jasa Administrasi Referensi/Dukungan Bank		2	6	4	11	Bank Reference/Support Administrative Services
Jasa Transfer	576	655	550	516	488	Transfer Services
Pendapatan *Fee*	23.337	45.587	33.938	23143	29531	Fee Income
Keuntungan dari Penjualan Efek-efek	0	0	0	0	0	Gains from the Sale of Securities
Lainnya	2.528	1.257	1.127	1.090	1.829	Others
JUMLAH	**78.206**	**117.008**	**90.065**	**73.256**	**78.881**	**TOTAL**

GRAFIK IKHTISAR KEUANGAN
FINANCIAL OVERVIEW CHART

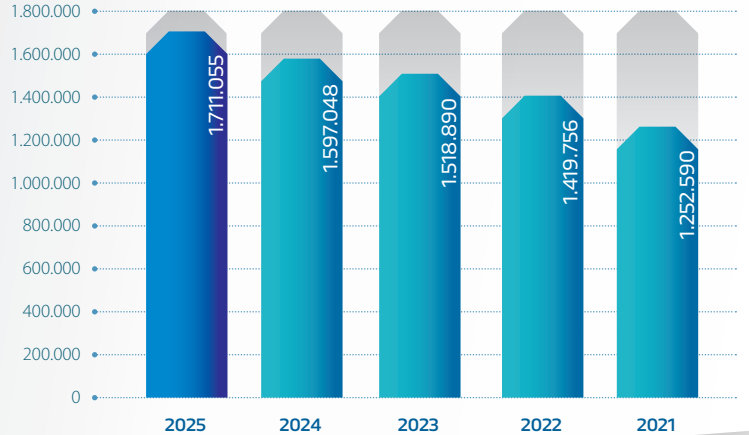
TOTAL ASET
TOTAL ASSETS



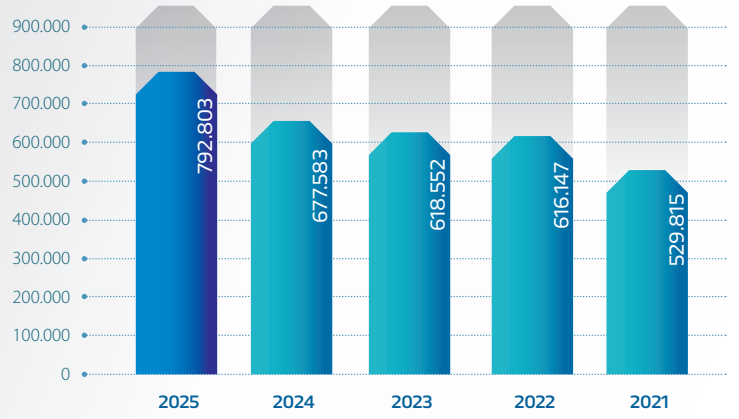
TOTAL LIABILITAS
TOTAL LIABILITIES



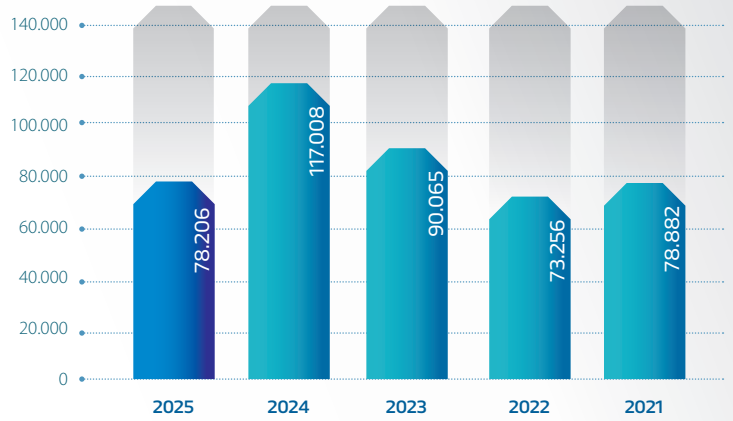
TOTAL EKUITAS
TOTAL EQUITY



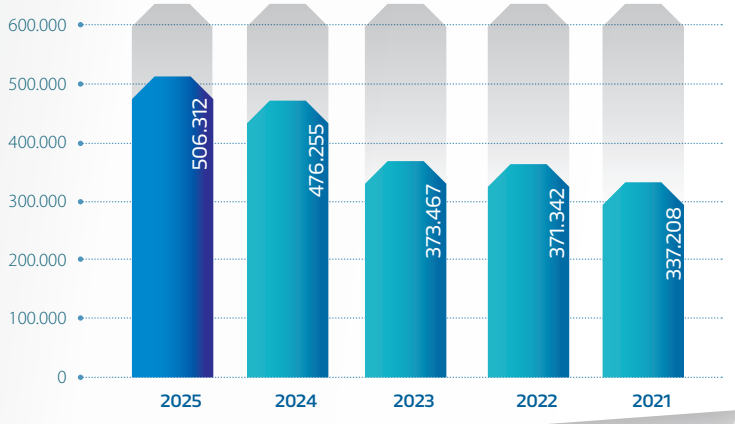
PENDAPATAN BUNGA BERSIH
NET INTEREST INCOME



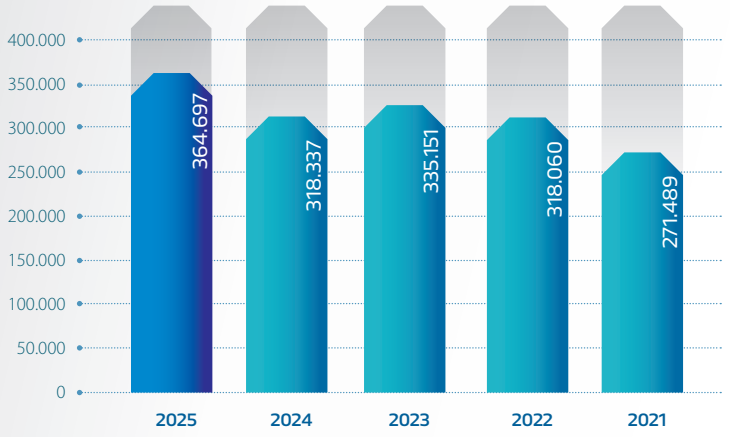
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA
OTHER OPERATING INCOME



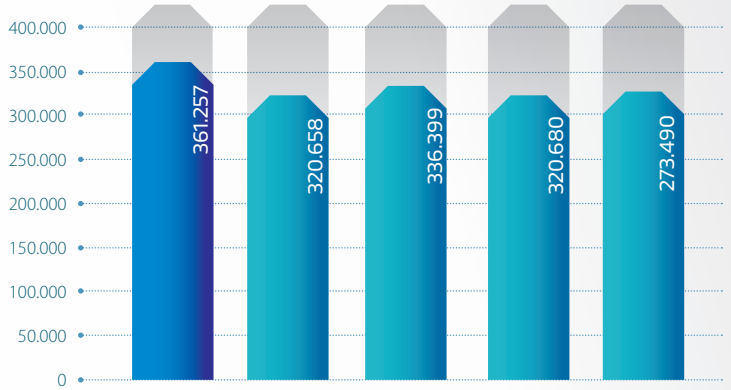
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL
TOTAL OPERATING EXPENSES



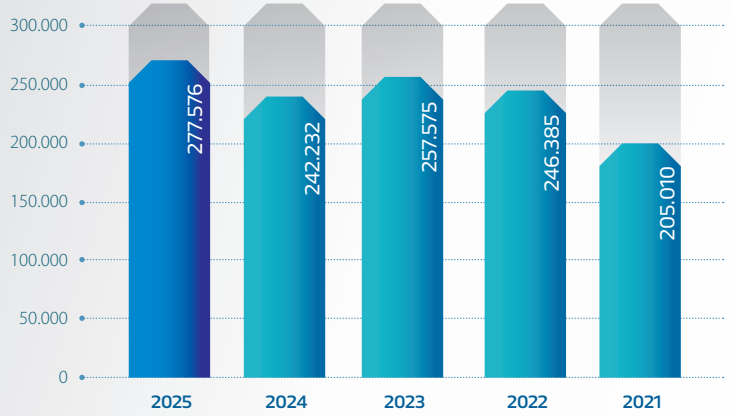
LABA OPERASIONAL
OPERATING PROFIT



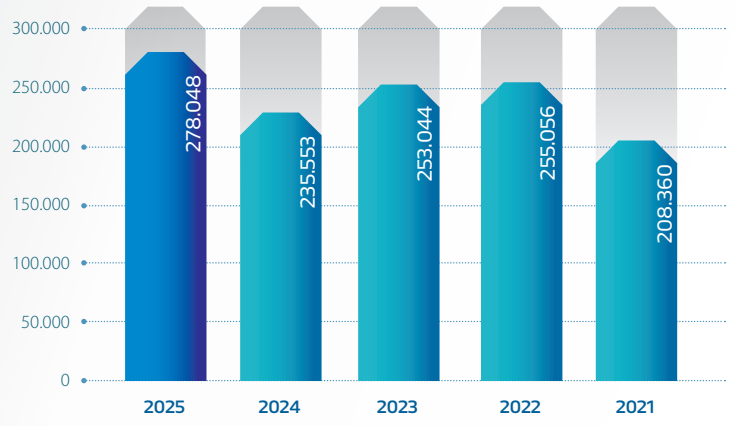
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK
NET PROFIT BEFORE TAX



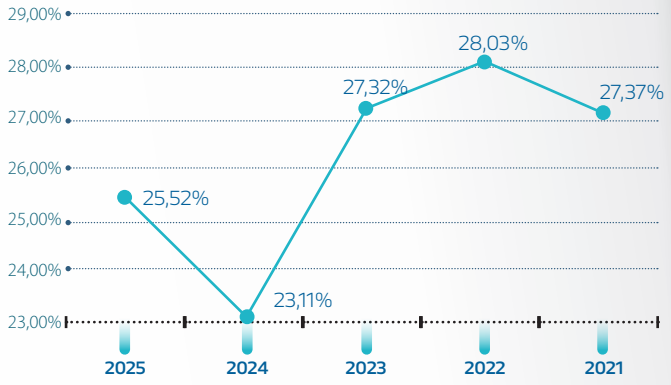
LABA TAHUN BERJALAN
PROFIT FOR THE YEAR



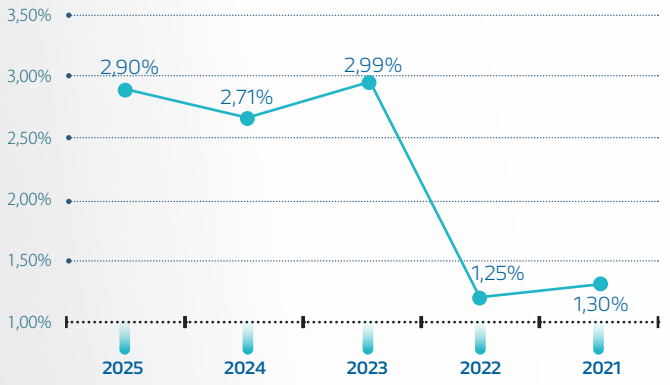
TOTAL LABA KOMPREHENSIF
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME



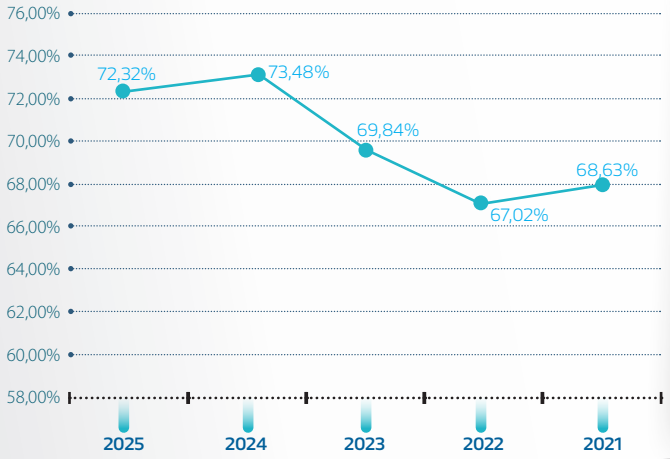
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM)
MINIMUM CAPITAL ADEQUACY REQUIREMENT



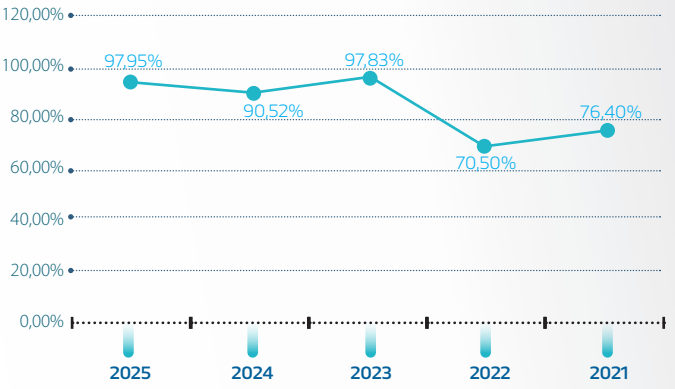
NPL GROSS
NPL GROSS



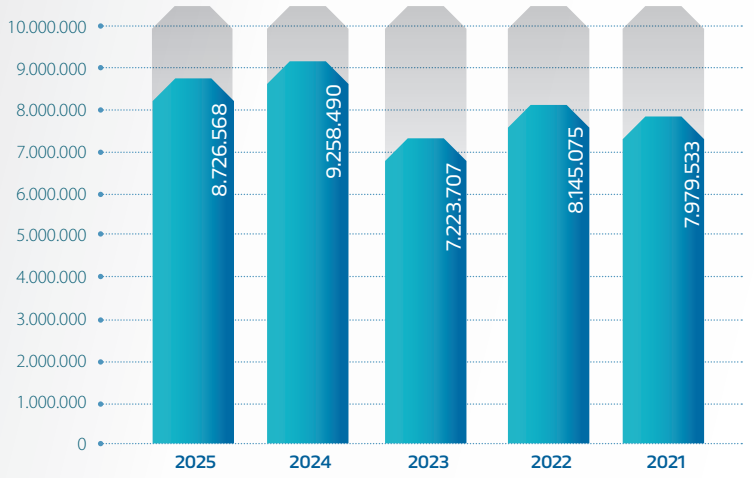
BIAYA OPERASIONAL/PENDAPATAN OPERASIONAL (BOPO)
OPERATIONAL COST/OPERATING INCOME (BOPO)



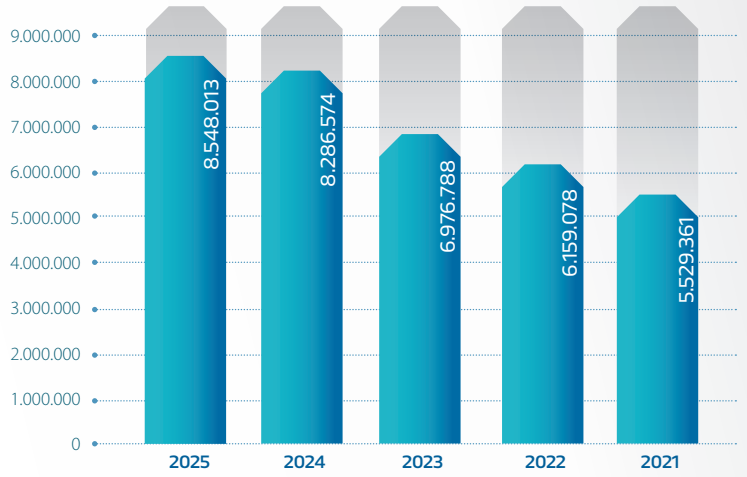
RASIO KREDIT TERHADAP PENDANAAN (LFR)
LOAN TO FUNDING RATIO (LFR)



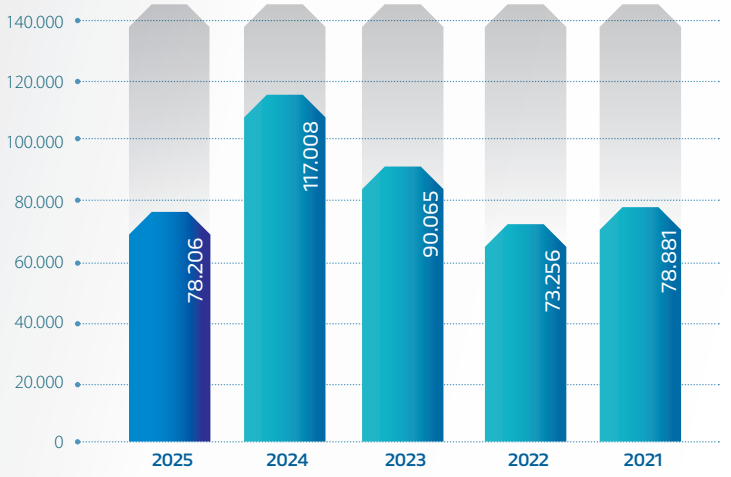
DANA PIHAK KETIGA
THIRD PARTY FUNDS



KREDIT
CREDIT



FEE BASED INCOME
FEE BASED INCOME





Novi V.B. Kaligis

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Pemegang Saham dan para Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Sebagai pertanggungjawaban dalam menjalankan fungsi pengawasan, pada kesempatan ini ijinkan Kami mewakili Dewan Komisaris menyampaikan laporan Dewan Komisaris atas pelaksanaan fungsi pengawasan yang telah dijalankan Dewan Komisaris selama tahun 2025. Seiring dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang telah diberikan, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Direksi yang telah menjalankan pengelolaan Bank sehingga Bank Sulteng dapat melalui tahun 2025 dengan berbagai capaian yang membanggakan di tengah tantangan dan dinamika usaha yang semakin kompleks. Direksi telah mampu memaksimalkan sumberdaya yang ada untuk mencapai target kinerja Perusahaan yang telah ditetapkan dan berhasil menjalankan berbagai strategi usaha sehingga Bank Sulteng dapat mencapai kinerja terbaiknnya. Dewan Komisaris senantiasa mendukung upaya Direksi untuk terus meningkatkan kinerja Bank dan pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

Sejalan dengan Rencana Bisnis Bank (RBB), Dewan Komisaris menyusun rencana kerja pengawasan yang ditetapkan setiap tahun oleh Dewan Komisaris dan menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris dapat berjalan secara terencana dan efektif. Dalam rangka pengawasan, Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap rencana dan kebijakan strategis yang ditetapkan Direksi dan memastikan pengelolaan Bank dilakukan Direksi sesuai dengan rencana, kebijakan strategis dan target yang telah ditetapkan.

Proses pengawasan dilakukan Dewan Komisaris baik melalui laporan-laporan yang disampaikan oleh Direksi maupun melalui mekanisme rapat yang dilaksanakan Dewan Komsiaris bersama Direksi. Dewan Komisaris telah memberikan arahan dan masukan kepada Direksi agar kinerja Bank dapat berjalan secara optimal. Direksi telah menyampaikan laporan dan informasi mengenai jalannya Perusahaan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu, valid dan dapat diandalkan sehingga Dewan Komisaris dapat menggunakannya sebagai bahan telaah sebelum Dewan Komisaris memberikan arahan dan masukan kepada Direksi sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi.

Dear Shareholders and Stakeholders,

As a form of accountability in carrying out the supervisory function, on this occasion, please allow us, representing the Board of Commissioners, to present the Board of Commissioners' report on the implementation of the supervisory function carried out by the Board of Commissioners during 2025. Along with gratitude to God Almighty for the grace and blessings bestowed, the Board of Commissioners expresses its highest appreciation to the Board of Directors who have managed the Bank so that Bank Sulteng could navigate 2025 with various proud achievements amidst increasingly complex business challenges and dynamics. The Board of Directors has been able to maximize existing resources to achieve the predetermined Company performance targets and successfully executed various business strategies so that Bank Sulteng could achieve its best performance. The Board of Commissioners continuously supports the Board of Directors' efforts to continuously improve the Bank's performance and sustainable business growth.

In line with the Bank Business Plan (RBB), the Board of Commissioners formulates a supervisory work plan determined annually by the Board of Commissioners, serving as a reference in carrying out its duties and responsibilities so that the implementation of the Board of Commissioners' supervisory function can run in a planned and effective manner. In the context of supervision, the Board of Commissioners reviews the plans and strategic policies set by the Board of Directors and ensures that the management of the Bank is carried out by the Board of Directors in accordance with the predetermined plans, strategic policies, and targets.

The supervisory process is carried out by the Board of Commissioners both through reports submitted by the Board of Directors and through meeting mechanisms held by the Board of Commissioners with the Board of Directors. The Board of Commissioners has provided direction and input to the Board of Directors so that the Bank's performance can run optimally. The Board of Directors has submitted reports and information regarding the Company's operations to the Board of Commissioners in a timely, valid, and reliable manner so that the Board of Commissioners can use them as review materials before providing direction and input to the Board of Directors according to the issues being faced.

Kondisi Perekonomian dan Industri Perbankan

Pada tahun 2025 kondisi perekonomian global dihadapkan pada dinamika yang semakin kompleks dan ketidakpastian. Ketegangan geopolitik masih berlanjut, baik akibat perang Rusia Ukraina di Eropa maupun eskalasi konflik di Timur Tengah. Di sisi lain, kebijakan proteksionisme Amerika Serikat kembali menguat melalui pengenaan tarif impor universal sebesar 10% serta tarif resiprokal yang tinggi kepada sejumlah mitra dagang utama, termasuk Tiongkok, Kanada, dan Meksiko dimana hal ini memicu meningkatnya fragmentasi perdagangan global serta memperdalam polarisasi ekonomi antarnegara.

Meskipun inflasi global menunjukkan tren penurunan dibandingkan periode puncak pasca pandemi, namun proses disinflasi berjalan lebih lambat akibat dampak tarif dan gangguan rantai pasok. Inflasi dunia diprakirakan masih berada di atas tingkat prapandemi hingga 2026, dengan tekanan lebih besar pada kelompok negara berkembang.

Dengan semua kondisi dan faktor pendukung yang ada, sepanjang tahun 2025 perekonomian global memasuki periode pertumbuhan yang lebih rendah dengan tingkat ketidakpastian yang tetap tinggi. Kondisi ini menuntut negara-negara, khususnya emerging market economies untuk memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas makro ekonomi, serta mendorong sumber pertumbuhan domestik yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Secara nasional, pada tahun 2025 perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat perang dagang, fragmentasi ekonomi, dan volatilitas pasar keuangan internasional. Stabilitas makro ekonomi nasional tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi berada pada jalur yang positif dimana Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 berada dalam kisaran 4,7–5,5% dan akan meningkat secara bertahap pada tahun 2026–2027.

Sepanjang tahun 2025, industri perbankan Indonesia berada dalam kondisi stabil dan berdaya tahan meskipun dihadapkan pada ketidakpastian global yang masih tinggi. Berdasarkan data Bank Indonesia tahun 2025, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, didukung oleh likuiditas yang memadai, kualitas aset yang terkendali, serta permodalan perbankan yang kuat. Dari sisi likuiditas, kondisi perbankan nasional

Economic Conditions and Banking Industry

In 2025, global economic conditions were faced with increasingly complex dynamics and uncertainty. Geopolitical tensions continued, both due to the Russia-Ukraine war in Europe and the escalation of conflict in the Middle East. On the other hand, the United States' protectionist policies strengthened again through the imposition of a universal import tariff of 10% as well as high reciprocal tariffs on a number of major trading partners, including China, Canada, and Mexico, which triggered an increase in global trade fragmentation and deepened economic polarization between countries.

Although global inflation showed a downward trend compared to the post-pandemic peak period, the disinflation process ran slower due to the impact of tariffs and supply chain disruptions. World inflation is projected to remain above pre-pandemic levels until 2026, with greater pressure on developing countries.

With all the existing conditions and supporting factors, throughout 2025, the global economy entered a period of lower growth with a persistently high level of uncertainty. These conditions demand that countries, especially emerging market economies, strengthen external resilience, maintain macroeconomic stability, and encourage more independent and sustainable sources of domestic growth.

Nationally, in 2025, the Indonesian economy continued to demonstrate strong resilience amidst rising global uncertainty due to trade wars, economic fragmentation, and international financial market volatility. National macroeconomic stability was maintained, and economic growth was on a positive trajectory where Bank Indonesia projects economic growth in 2025 to be in the range of 4.7–5.5% and will gradually increase in 2026–2027.

Throughout 2025, the Indonesian banking industry remained stable and resilient despite facing persistently high global uncertainty. Based on Bank Indonesia data for 2025, financial system stability was maintained, supported by adequate liquidity, manageable asset quality, and strong banking capitalization. In terms of liquidity, the condition of the national banking sector at the end of 2025

pada akhir 2025 menunjukkan tingkat yang longgar dan terjaga. Sesuai data Bank Indonesia dapat disimpulkan bahwa secara umum industri perbankan Indonesia berada pada kondisi yang likuid, sehat, dan resilien, dengan pertumbuhan kredit yang tetap positif, penghimpunan dana yang kuat, risiko kredit yang terkendali, serta permodalan yang solid.

Penilaian Dewan Komisaris Atas Kinerja Direksi

Dewan Komisaris menilai Direksi telah mampu menjalankan pengelolaan Bank dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada sehingga Bank Sulteng pada tahun 2025 dapat mencapai kinerja terbaiknya. Pertumbuhan usaha juga terus mengalami peningkatan di tengah persaingan dunia usaha dan tantangan yang semakin kompleks. Direksi telah menjalankan strategi dan kebijakan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan perannya, Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja Direksi baik yang bersifat kolegial maupun individual dengan berpedoman pada Key Performance Indicators (KPI) yang telah ditetapkan bagi Direksi dan melaporkan hasilnya kepada RUPS. Secara umum penilaian kinerja Direksi dilakukan Dewan Komisaris dengan melihat beberapa aspek sebagai dasar penilaian antara lain yaitu kinerja operasional bank, kinerja keuangan bank dan solvabilitas bank. Dewan Komisaris menyadari bahwa meskipun tidak mudah namun dengan dukungan seluruh jajaran Perusahaan dan komitmen bersama, Direksi berhasil memperoleh capaian yang membanggakan di tahun 2025.

Secara umum indikator realisasi pertumbuhan kinerja Bank Sulteng di tahun 2025 cukup baik jika dibandingkan dengan rencana target yang ditetapkan di tahun 2025. Pencapaian total aset Bank Sulteng mencapai 100,36% dari target sebesar Rp13.600.111 juta dengan realisasi Rp13.648.944 juta. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum posisi keuangan bank tetap tumbuh sesuai perencanaan. Namun, realisasi kredit yang diberikan hanya mencapai 92,71% dari target Rp9.220.139 juta dengan capaian Rp8.548.013 juta, yang mengindikasikan perlunya optimalisasi ekspansi kredit agar sesuai dengan rencana bisnis. Dana Pihak Ketiga (DPK) juga belum mencapai target, dengan realisasi sebesar Rp8.726.568 juta atau 85,88% dari target Rp10.161.877 juta. Secara rinci, giro hanya mencapai 64,08%, tabungan sebesar 89,89%, dan deposito sebesar 98,21% dari target. Rendahnya pencapaian giro menjadi faktor utama

showed a loose and maintained level. According to Bank Indonesia data, it can be concluded that generally, the Indonesian banking industry is in a liquid, sound, and resilient condition, with positive credit growth, strong fund accumulation, manageable credit risk, and solid capitalization.

Board of Commissioners' Assessment of the Board of Directors' Performance

The Board of Commissioners assesses that the Board of Directors has been able to manage the Bank by optimizing all available resources so that Bank Sulteng in 2025 could achieve its best performance. Business growth also continued to experience an increase amidst business competition and increasingly complex challenges. The Board of Directors has executed strategies and policies in accordance with the predetermined work plan.

In accordance with its role, the Board of Commissioners conducts a performance assessment of the Board of Directors both collegially and individually, guided by the predetermined Key Performance Indicators (KPIs) for the Board of Directors, and reports the results to the GMS. In general, the performance assessment of the Board of Directors is carried out by the Board of Commissioners by looking at several aspects as a basis for assessment, including the bank's operational performance, the bank's financial performance, and the bank's solvency. The Board of Commissioners realizes that although it is not easy, with the support of the entire Company's ranks and joint commitment, the Board of Directors succeeded in obtaining proud achievements in 2025.

In general, the realization indicators of Bank Sulteng's performance growth in 2025 were quite good compared to the target plan set in 2025. The achievement of Bank Sulteng's total assets reached 100.36% of the target of Rp13,600,111 million with a realization of Rp13,648,944 million. This indicates that in general, the bank's financial position continued to grow according to plan. However, the realization of granted loans only reached 92,71% of the target of Rp9,220,139 million with an achievement of Rp8.548.013 million, which indicates the need for optimalization of credit expansion to align with the business plan. Third-Party Funds (DPK) also have not reached the target, with a realization of Rp8.726.568 million or 85,88% of the target of Rp10,161,877 million. In detail, demand deposits only reached 64.08%, savings at 89.89%, and time deposits at 98.21% of the target. The low achievement of demand deposits was the main factor for not achieving the DPK target, so a

tidak tercapainya target DPK, sehingga perlu strategi peningkatan penghimpunan dana murah (CASA) untuk memperbaiki struktur pendanaan.

strategy to increase the accumulation of low-cost funds (CASA) is needed to improve the funding structure.

Dari sisi kinerja laba rugi, pendapatan bunga terealisasi sebesar Rp1.239.532 juta atau 103,00% dari target, menunjukkan kinerja pendapatan yang baik. Beban bunga juga melebihi target sebesar 103,10%, namun tetap mampu menghasilkan pendapatan bunga bersih sebesar Rp792.803 juta atau 102,94% dari target. Meskipun demikian, laba tahun berjalan hanya mencapai Rp277.576 juta atau 87,47% dari target, yang menunjukkan masih adanya tekanan pada efisiensi dan beban operasional.

From the perspective of profit and loss performance, interest income was realized at Rp1.239.532 million or 103,00% of the target, showing good income performance. Interest expenses also exceeded the target by 103.10%, but still managed to generate net interest income of Rp792,803 million or 102.94% of the target. Nevertheless, the profit for the current year only reached Rp277,576 million or 87.47% of the target, indicating that there is still pressure on efficiency and operational expenses.

Pada aspek SDM, secara umum Direksi telah menjalankan pengelolaan SDM yang disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan sejalan dengan visi dan misi Perusahaan. Dewan Komisaris menilai bahwa SDM merupakan aset penting Perusahaan dan memiliki peran penting dalam mempertahankan keunggulan kompetitif Perusahaan. Untuk itu Dewan Komisaris terus mendukung berbagai program yang ditetapkan Direksi guna meningkatkan kualitas SDM secara berkelanjutan. Sejalan dengan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2025, Bank Sulteng menetapkan akselerasi kapasitas talenta sebagai motor penggerak pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Program strategis ini dirancang untuk memastikan tersedianya profil pegawai yang kompeten, profesional, dan memiliki daya saing tinggi guna menghadapi tantangan digitalisasi perbankan.

On the HR aspect, in general, the Board of Directors has carried out HR management tailored to the Company's needs in line with the Company's vision and mission. The Board of Commissioners assesses that HR is an important asset of the Company and plays a vital role in maintaining the Company's competitive advantage. Therefore, the Board of Commissioners continues to support various programs determined by the Board of Directors to improve HR quality sustainably. In line with the 2025 Bank Business Plan (RBB), Bank Sulteng set the acceleration of talent capacity as the driving force for sustainable business growth. This strategic program is designed to ensure the availability of a competent, professional, and highly competitive employee profile to face the challenges of banking digitalization.

Pada aspek risiko, secara umum Direksi telah menerapkan manajemen risiko secara optimal sejalan dengan penerapan GCG dimana faktor rentabilitas dinilai masih memadai serta permodalan yang dijaga dan dikelola dengan baik. Dewan Komisaris melihat bahwa profil risiko Bank Sulteng memiliki potensi kerugian yang tergolong rendah. Untuk periode Desember 2025, profil risiko Bank Sulteng berada pada peringkat 2 (dua) dimana hampir seluruh parameter penilaian atau indikator risiko inheren berada pada peringkat 2 (dua) atau indikator risiko inheren berada pada tingkat *Low to Moderate* dan rata-rata kualitas penerapan manajemen risiko berada pada posisi Satisfactory yang berarti eksposur risiko yang dihadapi Bank masih dalam batas toleransi risiko yang dapat diterima serta tidak memberikan dampak material terhadap kelangsungan usaha dan stabilitas keuangan Bank.

In the risk aspect, generally, the Board of Directors has optimally implemented risk management in line with GCG implementation, where the profitability factor is considered adequate, and capital is well-maintained and managed. The Board of Commissioners observes that Bank Sulteng's risk profile has a relatively low potential for loss. For the December 2025 period, Bank Sulteng's risk profile was at rank 2, where almost all assessment parameters or inherent risk indicators were at rank 2 or inherent risk indicators were at a Low to Moderate level, and the average quality of risk management implementation was in a Satisfactory position, which means the risk exposure faced by the Bank is still within acceptable risk tolerance limits and does not have a material impact on the Bank's business continuity and financial stability.

Pada tahun 2025, kondisi kesehatan Bank Sulteng secara umum adalah Sehat dan dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya yang tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian. Berdasarkan hasil penilaian secara *self assessment* periode Desember 2025 diketahui tingkat kesehatan Bank Sulteng masuk dalam Peringkat Komposit (PK-2). Dewan Komisaris meminta Direksi untuk senantiasa memastikan tingkat kesehatan Bank Sulteng dapat terjaga pada level yang aman sekaligus memastikan kinerja Perusahaan dapat berjalan secara optimal dalam rangka menjaga pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

Pengawasan Dewan Komisaris dalam Perumusan dan Implementasi Strategi Perusahaan

Dengan semakin kompleksnya tantangan dan kompetitifnya persaingan usaha di dunia perbankan, Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk terus melakukan inovasi dan pengembangan produk dan layanan guna memberikan berbagai kemudahan dan solusi keuangan bagi nasabah. Oleh karena itu Direksi perlu merumuskan strategi pengembangan usaha yang dapat menjawab berbagai tuntutan kebutuhan nasabah dan menterjemahkannya dalam program kerja yang terarah sejalan dengan sasaran Perusahaan.

Sesuai dengan perannya, Dewan Komisaris terlibat dalam proses perumusan dan implementasi strategi Perusahaan melalui pelaksanaan fungsi pengawasan dan penasihatan yang dijalankan Dewan Komisaris. Dalam setiap rencana dan kebijakan strategis yang akan ditetapkan Direksi, Dewan Komisaris senantiasa memberikan pandangan, arahan dan masukan kepada Direksi diantaranya melalui kegiatan rapat yang dilaksanakan Dewan Komisaris bersama Direksi. Dalam pelaksanaannya dengan melibatkan komite-komite yang berada di bawahnya, Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap implementasi rencana dan kebijakan strategis yang dijalankan oleh Direksi. Secara berkala Dewan Komisaris memastikan agar rencana dan kebijakan strategis Perusahaan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan dengan memberikan arahan dan masukan kepada Direksi terkait upaya-upaya apa saja yang perlu dilakukan.

Kemajuan di bidang *Financial Technology* (*FinTech*) dimana seluruh transaksi jual beli dan pelayanan dijalankan dengan berbasis teknologi, menuntut Bank Sulteng untuk dapat menajwab tantangan ini dengan cepat. Untuk itu Dewan Komisaris mendukung

In 2025, the general soundness condition of Bank Sulteng was Sound and assessed to be able to withstand significant negative influences from changes in business conditions and other external factors, as reflected by the rating of the assessment factors. Based on the results of the self-assessment for the December 2025 period, it is known that the soundness level of Bank Sulteng is included in the Composite Rating (PK-2). The Board of Commissioners requested the Board of Directors to consistently ensure that the soundness level of Bank Sulteng can be maintained at a safe level while ensuring the Company's performance can run optimally in order to maintain sustainable business growth.

Board of Commissioners' Supervision in the Formulation and Implementation of Company Strategy

With increasingly complex challenges and competitive business rivalry in the banking world, the Board of Commissioners encourages the Board of Directors to continue innovating and developing products and services to provide various conveniences and financial solutions for customers. Therefore, the Board of Directors needs to formulate business development strategies that can answer the various demands of customer needs and translate them into directed work programs in line with the Company's targets.

In accordance with its role, the Board of Commissioners is involved in the process of formulating and implementing the Company's strategy through the execution of the supervisory and advisory functions carried out by the Board of Commissioners. In every plan and strategic policy to be determined by the Board of Directors, the Board of Commissioners consistently provides views, direction, and input to the Board of Directors, including through meetings held by the Board of Commissioners with the Board of Directors. In its implementation, by involving the committees under it, the Board of Commissioners supervises the implementation of plans and strategic policies carried out by the Board of Directors. Periodically, the Board of Commissioners ensures that the Company's strategic plans and policies are running as predetermined by providing direction and input to the Board of Directors regarding what efforts need to be made.

Advances in Financial Technology (FinTech), where all buying and selling transactions and services are carried out based on technology, demand that Bank Sulteng can answer this challenge quickly. Therefore, the Board of Commissioners supports the determination

penetapan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan Direksi guna merespon perkembangan dunia usaha perbankan saat ini.

Kami melihat selama tahun 2025, Direksi telah melakukan berbagai upaya untuk menjalankan strategi dan kebijakan strategis baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka menengah panjang sejalan dengan visi dan misi Perusahaan.

Dalam jangka pendek, Direksi menetapkan kebijakan terkait pemenuhan likuiditas untuk memenuhi likuiditas wajib minimum yang ditetapkan otoritas moneter disamping kebutuhan likuiditas untuk memenuhi penarikan dana oleh nasabah sehari-hari, menyediakan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan penanaman dana dalam bentuk surat-surat berharga jangka pendek atau instrumen pasar uang. Direksi berupaya untuk memaksimalkan penyaluran kredit konsumtif bagi ASN minimal 70%-80% dari seluruh jumlah ASN di Provinsi Sulawesi Tengah dan kelompok-kelompok usaha yang dikelola oleh keluarga ASN dalam bentuk kegiatan usaha yang produktif.

Sedangkan dalam jangka menengah panjang, Direksi memastikan Bank memperoleh keuntungan dari kegiatan operasional dan tata kelola bank yang baik dan sehat, sehingga tumbuh serta meningkatkan nilai perusahaan dan memaksimalkan kekayaan pemilik bank serta mensejahterahkan Pegawai yang merupakan *asset* bank yang tak terukur dengan nilai apapun. Direksi mengoptimalkan pelaksanaan Kelompok Usaha Bank (KUB) yang telah disetujui dengan pemanfaatan dan sinergi terhadap peningkatan sumber daya manusia, Teknologi Informasi dan pelaksanaan produk Bank lainnya. Selain itu Direksi juga melakukan evaluasi dan menyusun *Corporate Plan* serta Business Plan Teknologi Informasi yang disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan terkini TI di sektor perbankan.

Pandangan Atas Prospek Usaha

Dewan Komisari melihat bahwa prospek usaha Bank Sulteng di tahun mendatang masih sangat terbuka meskipun dibayangi oleh adanya perlambatan perekonomian global dan ketidakpastian karena Kami melihat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah masih kuat didukung dengan kondisi ekonomi nasional yang memiliki trend positif dimana ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh 4,7–5,5% dengan inflasi dan stabilitas makro yang terjaga.

of strategies and policy directions set by the Board of Directors to respond to current banking business developments.

We observed that during 2025, the Board of Directors made various efforts to execute strategies and strategic policies, both short-term and medium-long term, in line with the Company's vision and mission.

In the short term, the Board of Directors set policies related to fulfilling liquidity to meet the mandatory minimum liquidity set by the monetary authority, in addition to liquidity needs to meet daily fund withdrawals by customers, providing payment traffic services, and investing funds in the form of short-term securities or money market instruments. The Board of Directors strived to maximize the disbursement of consumptive credit for ASN (Civil Apparatus) at a minimum of 70%-80% of the total number of ASN in Central Sulawesi Province and business groups managed by ASN families in the form of productive business activities.

Meanwhile, in the medium to long term, the Board of Directors ensured that the Bank profits from operational activities and good and sound bank governance, so as to grow and increase corporate value and maximize bank owners' wealth as well as the welfare of Employees who are bank assets immeasurable by any value. The Board of Directors optimized the implementation of the approved Bank Business Group (KUB) by utilizing and synergizing the improvement of human resources, Information Technology, and the implementation of other Bank products. Furthermore, the Board of Directors also evaluated and prepared a Corporate Plan and Information Technology Business Plan tailored to the current growth and development of IT in the banking sector.

Views on Business Prospects

The Board of Commissioners views that Bank Sulteng's business prospects in the coming year are still very open despite being overshadowed by a global economic slowdown and uncertainty, because we see economic growth in Central Sulawesi is still strong supported by national economic conditions that have a positive trend where the Indonesian economy is estimated to grow by 4.7–5.5% with inflation and macro stability maintained.

Secara regional, Sulawesi Tengah mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 8,47% pada 2025, ditopang industri pengolahan, pertambangan, dan ekspor berbasis hilirisasi, sehingga membuka peluang ekspansi kredit dan penghimpunan dana. Dari sisi industri, perbankan nasional berada dalam kondisi likuid dan sehat, tercermin dari LDR 85,35% dan AL/DPK 28,57%. Dana Pihak Ketiga tumbuh 13,83% (yoy) dan kredit meningkat 9,69% (yoy), terutama kredit investasi yang tumbuh 21,06%. Kualitas aset tetap terjaga dengan NPL gross 2,21% dan CAR di atas 25%, menunjukkan daya tahan permodalan yang kuat.

Dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi, investasi di sektor industri yang meningkat dan komitmen Pemerintah dalam penguatan UMKM menjadi peluang yang sangat bagus bagi Bank Sulteng untuk memperluas pembiayaan sektor produktif khususnya industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Struktur ekonomi Sulawesi Tengah yang berbasis hilirisasi juga menciptakan peluang tersendiri bagi pembiayaan rantai pasok (*supply chain financing*) serta penguatan dana murah melalui peningkatan transaksi bisnis. Hal ini diperkuat dengan digitalisasi yang membuat layanan perbankan dan kegiatan operasional Bank semakin efisien serta pertumbuhan transaksi BI-FAST dan QRIS yang signifikan. Meskipun demikian, Direksi juga perlu mewaspadai bahwa volatilitas global dan fluktuasi harga komoditas tetap menjadi risiko yang perlu diantisipasi.

Pandangan Atas Penerapan Governansi Perusahaan

Seiring dengan semakin kompleksnya perkembangan dunia perbankan dan tantangan yang dihadapi, Dewan Komisaris meyakini bahwa penerapan GCG di Bank Sulteng menjadi hal yang sangat penting karena melalui penerapan GCG secara konsisten maka pengelolaan Bank akan berjalan secara lebih akuntabel, profesional dan amanah dalam rangka memperkuat kinerja Perusahaan sehingga Bank memiliki daya tahan (*resilience*) yang lebih tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan. Melalui penerapan GCG akan menciptakan nilai perusahaan secara berkelanjutan yang diperlukan dalam rangka menjaga kepercayaan dan kredibilitas Bank yang pada akhirnya berdampak pada semakin meningkatnya kepercayaan nasabah.

Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memastikan struktur dan prosedur GCG telah diterapkan secara efektif di Bank Sulteng dan secara konsisten menerapkan GCG dalam pengelolaan Bank yang

Regionally, Central Sulawesi recorded high growth of 8.47% in 2025, supported by the manufacturing, mining, and downstream-based export industries, thus opening up opportunities for credit expansion and fund accumulation. From an industry perspective, national banking is in a liquid and sound condition, reflected in an LDR of 85.35% and AL/DPK of 28.57%. Third-Party Funds grew by 13.83% (yoy) and credit increased by 9.69% (yoy), especially investment credit which grew by 21.06%. Asset quality was maintained with a gross NPL of 2.21% and a CAR above 25%, indicating strong capital resilience.

With high regional economic growth, increasing investment in the industrial sector, and the Government's commitment to strengthening MSMEs, this presents a very good opportunity for Bank Sulteng to expand financing to productive sectors, particularly the manufacturing, trade, and agricultural industries. Central Sulawesi's downstream-based economic structure also creates its own opportunities for supply chain financing and strengthening low-cost funds through increased business transactions. This is reinforced by digitalization which makes banking services and the Bank's operational activities more efficient, as well as the significant growth of BI-FAST and QRIS transactions. Nevertheless, the Board of Directors also needs to be cautious that global volatility and commodity price fluctuations remain risks that need to be anticipated.

Views on the Implementation of Corporate Governance

Along with the increasingly complex developments in the banking world and the challenges faced, the Board of Commissioners believes that the implementation of GCG at Bank Sulteng is very important because through consistent GCG implementation, the Bank's management will run more accountably, professionally, and trustworthily in order to strengthen the Company's performance so that the Bank has higher resilience in facing various challenges. The implementation of GCG will create sustainable corporate value necessary to maintain the Bank's trust and credibility, which ultimately impacts the increasing customer trust.

The Board of Commissioners requested the Board of Directors to ensure that GCG structures and procedures have been effectively implemented at Bank Sulteng and to consistently apply GCG in the

dijalankan secara sistematis dan berkelanjutan dan didukung dengan rencana kerja yang terukur. Secara berkala Direksi harus melakukan evaluasi atau penilaian terhadap penerapan GCG di Bank Sulteng baik secara internal dalam bentuk *self-assessment* maupun secara eksternal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Keberadaan kebijakan dan manual GCG Perusahaan juga merupakan hal penting dalam mendukung penerapan GCG di Bank Sulteng sebagai guidance agar pelaksanaan GCG tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Seiring dengan perkembangan peraturan perundangan dan dinamika usaha khususnya di bidang perbankan, Direksi perlu secara berkala melakukan review terhadap kebijakan dan manual GCG Bank Sulteng. Selain itu pemahaman seluruh Insan Perusahaan terhadap pentingnya penerapan GCG juga harus terus dipupuk melalui berbagai kegiatan edukasi, sosialisasi dan pelatihan yang diselenggarakan secara berkelanjutan termasuk dengan memanfaatkan berbagai media yang ada di Perusahaan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Berangkat dari kesadaran bahwa masyarakat di sekitar wilayah kegiatan operasional Bank memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan usaha Perusahaan, Dewan Komisaris meminta Direksi untuk secara konsisten dan berkelanjutan melaksanakan program tanggung jawab sosial Perusahaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan sekitar.

Dewan Komisaris menilai bahwa masyarakat dan lingkungan sekitar dimana Bank Sulteng beroperasi harus merasakan dampak positif dari keberadaan Bank Sulteng. Bank harus dapat memberikan manfaat yang nyata dan berkontribusi bagi peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar dan perbaikan lingkungan. Melalui program tanggung jawab sosial Perusahaan yang dilaksanakan secara berkelanjutan secara tidak langsung akan terbangun image Bank Sulteng sebagai perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada *profit* namun juga memiliki kepedulian terhadap kemajuan masyarakat dan lingkungan sekitar. Kinerja Bank Sulteng tumbuh dan berkembang seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan dimana Bank beroperasi.

Untuk itu program tanggung jawab sosial Perusahaan harus dilakukan secara terencana dan terukur agar dapat berjalan secara efektif. Dewan Komisaris meminta kepada Direksi untuk terus meningkatkan

Bank's management, carried out systematically and sustainably, and supported by a measurable work plan. Periodically, the Board of Directors must evaluate or assess the implementation of GCG at Bank Sulteng, both internally in the form of self-assessment and externally by the Financial Services Authority (OJK).

The existence of the Company's GCG policies and manuals is also important in supporting the implementation of GCG at Bank Sulteng as guidance so that GCG execution remains in accordance with applicable regulations. Along with the development of legislation and business dynamics, especially in the banking sector, the Board of Directors needs to periodically review Bank Sulteng's GCG policies and manuals. In addition, the understanding of all Company Personnel regarding the importance of GCG implementation must also continue to be fostered through various education, socialization, and training activities held sustainably, including by utilizing various media available in the Company.

Corporate Social Responsibility

Departing from the awareness that the community around the Bank's operational activity areas plays an important role in supporting the Company's business sustainability, the Board of Commissioners requested the Board of Directors to consistently and sustainably implement the Company's corporate social responsibility programs in an effort to improve community welfare and the surrounding environment.

The Board of Commissioners assesses that the community and surrounding environment where Bank Sulteng operates must feel the positive impact of Bank Sulteng's presence. The Bank must be able to provide tangible benefits and contribute to improving the living standards of the surrounding community and environmental improvement. Through sustainably implemented corporate social responsibility programs, Bank Sulteng's image as a company that is not only profit-oriented but also cares about the progress of the community and the surrounding environment will be indirectly built. Bank Sulteng's performance grows and develops along with the improvement of community welfare and environmental quality where the Bank operates.

Therefore, corporate social responsibility programs must be carried out in a planned and measurable manner so that they can run effectively. The Board of Commissioners requests the Board of Directors to

program tanggung jawab sosial Perusahaan dengan tetap memperhatikan kemampuan Perusahaan seiring dengan pertumbuhan usaha dan peningkatan kinerja Perusahaan ke depan.

Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran

Sebagai bagian dari penerapan GCG di Perusahaan, Bank Sulteng telah menyiapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) untuk mendukung praktik usaha perbankan yang sehat dengan menjunjung tinggi nilai etika usaha. Melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) memungkinkan siapa saja termasuk pihak yang berada di luar Perusahaan untuk dapat menyampaikan laporan dugaan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum lainnya yang dilakukan oleh Insan Perusahaan dimana Bank Sulteng memberikan jaminan kerahasiaan kepada setiap pelapor.

Dewan Komisaris bertugas untuk memastikan pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) dapat berjalan secara efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan perilaku tidak etis lainnya di lingkungan Perusahaan. Dewan Komisaris berharap Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) ini dapat dijadikan sebagai sistem deteksi dini (*early warning system*) atas berbagai kemungkinan tindakan pelanggaran termasuk praktik fraud yang mungkin dilakukan oleh Insan Perusahaan sehingga sejak dini Bank Sulteng dapat mengetahui dan segera mengambil langkah penting untuk mencegah tersebar luasnya informasi negatif ke luar Perusahaan dengan memprioritaskan penanganan secara internal.

Secara umum Dewan Komisaris menilai bahwa meskipun pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Bank Sulteng telah berjalan, namun perbaikan ke depan perlu untuk terus ditingkatkan seiring dengan kebutuhan yang ada. Sepanjang tahun 2025 terdapat 4 (empat) laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) dan seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh Direksi.

Penilaian Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris membentuk komite-komite yang bertugas untuk membantu pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris sehingga dapat berjalan secara efektif yang terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi

continue improving the Company's corporate social responsibility programs while keeping in mind the Company's capabilities in line with future business growth and improved Company performance.

Implementation of the Whistleblowing System

As part of GCG implementation in the Company, Bank Sulteng has prepared a Whistleblowing System to support sound banking business practices by upholding business ethics values. The Whistleblowing System allows anyone, including parties outside the Company, to submit reports of alleged violations or other unlawful acts committed by Company Personnel, where Bank Sulteng guarantees confidentiality to every whistleblower. The Board of Commissioners is tasked with ensuring that the implementation of the Whistleblowing System runs effectively to prevent violations and other unethical behaviors within the Company.

The Board of Commissioners is tasked with ensuring that the implementation of the Whistleblowing System runs effectively to prevent violations and other unethical behaviors within the Company. The Board of Commissioners hopes that this Whistleblowing System can be used as an early warning system for various possible violations, including fraudulent practices that might be committed by Company Personnel, so that Bank Sulteng can find out early on and immediately take important steps to prevent the widespread dissemination of negative information outside the Company by prioritizing internal handling.

In general, the Board of Commissioners assesses that although the implementation of the Whistleblowing System at Bank Sulteng has been running, future improvements need to be continuously enhanced in line with existing needs. Throughout 2025, there were 4 (four) reports of alleged violations submitted through the Whistleblowing System, all of which have been followed up by the Board of Directors.

Assessment of Committees Under the Board of Commissioners

The Board of Commissioners formed committees tasked with assisting the implementation of the Board of Commissioners' supervisory function so that it can run effectively, consisting of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Remuneration and

dan Nominasi. Komite-komite Dewan Komisaris secara struktur berada di bawah Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2025 pelaksanaan tugas komite-komite Dewan Komisaris telah berjalan secara optimal dalam mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan telaah, memberikan rekomendasi dan laporan kepada Dewan Komisaris terkait dengan berbagai aspek yang masuk dalam ruang lingkup pengawasan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menyadari bahwa hasil telaah, rekomendasi dan laporan yang disampaikan komite-komite Dewan Komisaris menjadi sangat penting karena menjadi salah satu pertimbangan bagi Dewan Komisaris dalam proses pengambilan keputusan. Melalui hasil telaah dan laporan yang disampaikan komite, Dewan Komisaris dapat melakukan analisa secara lebih dalam mengenai permasalahan yang akan diputuskan. Untuk itu Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi atas profesionalisme dan tanggung jawab yang telah dijalankan dalam rangka mendukung tugas Dewan Komisaris.

Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Susunan Dewan Komisaris selama tahun 2025 mengalami perubahan. Pada tanggal 20 Januari 2025 melalui RUPS Luar Biasa, Pemegang Saham telah melakukan perubahan susunan Dewan Komisaris dengan mengangkat Bapak Max Kembuan sebagai Komisaris Non Independen menggantikan Ibu Maimun Lawira sehingga susunan Dewan Komisaris sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari 2 (dua) anggota yaitu Bapak Novi V.B. Kaligis sebagai Komisaris Independen dan Bapak Max Kembuan sebagai Komisaris Non Independen.

Kami atas nama Dewan Komisaris menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Maimun Lawira yang telah memberikan tenaga dan pikirannya selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris di Bank Sulteng. Kami juga menyampaikan ucapan selamat bergabung kepada Bapak Max Kembuan semoga kehadiran beliau semakin memperkuat kinerja Dewan Komisaris.

Nomination Committee. The Board of Commissioners' committees are structurally under the Board of Commissioners and report directly to the Board of Commissioners.

The Board of Commissioners assesses that during 2025, the execution of the duties of the Board of Commissioners' committees ran optimally in supporting the duties and responsibilities of the Board of Commissioners. The Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Remuneration and Nomination Committee have reviewed, provided recommendations, and reported to the Board of Commissioners regarding various aspects within the scope of the Board of Commissioners' supervision. The Board of Commissioners realizes that the results of reviews, recommendations, and reports submitted by the Board of Commissioners' committees are very important because they serve as one of the considerations for the Board of Commissioners in the decision-making process. Through the review results and reports submitted by the committees, the Board of Commissioners can conduct a deeper analysis of the issues to be decided. Therefore, the Board of Commissioners extends its appreciation to the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Remuneration and Nomination Committee for the professionalism and responsibility carried out to support the duties of the Board of Commissioners.

Changes in the Composition of the Board of Commissioners

The composition of the Board of Commissioners experienced changes during 2025. On January 20, 2025, through an Extraordinary GMS, the Shareholders changed the composition of the Board of Commissioners by appointing Mr. Max Kembuan as a Non-Independent Commissioner replacing Mrs. Maimun Lawira, so that the composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2025, consists of 2 (two) members, namely Mr. Novi V.B. Kaligis as an Independent Commissioner and Mr. Max Kembuan as a Non-Independent Commissioner.

On behalf of the Board of Commissioners, we express our gratitude to Mrs. Maimun Lawira who has contributed her energy and thoughts while serving as a Member of the Board of Commissioners at Bank Sulteng. We also welcome Mr. Max Kembuan; hopefully, his presence will further strengthen the performance of the Board of Commissioners.

Penutup

Pada penghujung laporan ini, kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Direksi dan seluruh karyawan Bank Sulteng atas keberhasilan dalam mencapai kinerja tahun 2025. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemegang Saham, pelanggan, mitra usaha serta semua *stakeholder* lainnya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Bank Sulteng. Semoga Bank Sulteng dapat terus meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

Closing

At the end of this report, we extend our highest appreciation to the Board of Directors and all Bank Sulteng employees for their success in achieving the 2025 performance. We also thank the Shareholders, customers, business partners, and all other stakeholders for the trust bestowed upon Bank Sulteng. Hopefully, Bank Sulteng can continue to improve its performance in the future.

Palu, 01 April 2026
Palu, April 01, 2026
Atas nama Dewan Komisaris
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah
On behalf of Board of Commissioners
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah



Novi V.B. Kaligis
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Hj. Ramiyatie
Direktur Utama
President Director

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Pemegang Saham yang Kami Hormati,

Perkenankan kami mewakili Direksi untuk menyampaikan laporan pengelolaan Perusahaan kepada Pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya sebagai bentuk tanggung jawab atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan merupakan bagian dari pertanggungjawaban Kami dalam mengurus Perusahaan sepanjang tahun 2025 serta dalam memastikan jalannya Perusahaan telah dilaksanakan secara efektif dan terkendali pada seluruh tingkatan organisasi sesuai dengan Rencana bisnis Bank dan arahan Pemegang Saham.

Kita patut bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenannnya pada tahun 2025 Perusahaan masih mampu mempertahankan kinerjanya ditandai atas beberapa pencapaian kinerja keuangan dan operasional yang menunjukkan pencapaian secara berkelanjutan. Mempertahankan kinerja merupakan sebuah tantangan yang besar bagi Bank di tengah tantangan persaingan yang semakin ketat juga dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional dan global termasuk ketegangan geo politik dunia yang belum mereda ikut mempengaruhi pencapaian kinerja dan kelangsungan usaha Perusahaan, namun melalui strategi dan upaya yang dilakukan secara keseluruhan telah dapat menciptakan produk dan layanan yang semakin baik sehingga mampu mempertahankan keberlangsungan usaha dan terus meningkatkan perluasan pasar Perusahaan.

Hal ini dapat terlaksana karena adanya sinergi dan kerja keras segenap jajaran Perusahaan, inovasi yang tiada henti, dukungan pemegang saham sehingga dapat kita wujudkan Bank Sulteng sebagai Perusahaan yang semakin kompetitif dan berdaya saing.

Kondisi Perekonomian Indonesia

Pada tahun 2025 Perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat perang dagang, fragmentasi ekonomi, dan volatilitas pasar keuangan internasional. Di tengah tekanan eksternal tersebut, stabilitas makroekonomi nasional tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi berada pada jalur yang positif.

Sepanjang tahun 2025 pertumbuhan ekonomi terjaga di kisaran 5,11%, tumbuh dibanding tahun sebelumnya sebesar 5,03%, tertinggi kedua di G20 setelah India, sementara pertumbuhan global masih stagnan di sekitar 3%. Dari sisi skala ekonomi, Perekonomian Indonesia tahun 2025 berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dear Shareholders

Allow us, representing the Board of Directors, to present the Company's management report to the Shareholders and other stakeholders as a form of responsibility for the implementation of good corporate governance and as part of our accountability in managing the Company throughout 2025, as well as in ensuring that the Company's operations have been executed effectively and under control at all organizational levels in accordance with the Bank's Business Plan and the Shareholders' directives.

We should be grateful to God Almighty because, by His grace, in 2025 the Company was still able to maintain its performance, marked by several financial and operational performance achievements that demonstrate sustainable accomplishments. Maintaining performance is a significant challenge for the Bank amidst increasingly tight competition, which is also influenced by national and global economic conditions, including unresolved global geopolitical tensions that affect the achievement of the Company's performance and business continuity; however, through overall strategies and efforts, we have been able to create better products and services, enabling us to maintain business continuity and continuously increase the Company's market expansion.

This could be realized due to the synergy and hard work of all Company ranks, relentless innovation, and shareholder support, enabling us to realize Bank Sulteng as an increasingly competitive and resilient Company.

Indonesian Economic Conditions

In 2025, the Indonesian Economy continued to show strong resilience amidst increasing global uncertainty due to trade wars, economic fragmentation, and international financial market volatility. Amidst these external pressures, national macroeconomic stability was maintained, and economic growth was on a positive trajectory.

Throughout 2025, economic growth was maintained in the range of 5.11%, growing compared to the previous year's 5.03%, the second highest in the G20 after India, while global growth stagnated at around 3%. In terms of economic scale, the Indonesian Economy in 2025, based on Gross Domestic Product (GDP) at current prices, reached Rp23,821.1 trillion, and GDP

mencapai Rp23.821,1 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp83,7 juta atau USD 5.083,4. Stabilitas makro ekonomi Indonesia masih tetap terjaga dengan baik, Inflasi Indonesia sepanjang tahun 2025 tercatat sebesar 2,92% (y-on-y) per Desember 2025, meningkat dibandingkan 1,57% pada 2024, namun tetap terkendali, nilai tukar rupiah juga relatif stabil di kisaran Rp16.785 per dolar AS pada Desember 2025.

Di tingkat regional, Sulawesi Tengah mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 8,47% pada 2025, ditopang industri pengolahan, pertambangan, pertanian, kehutanan, perikanan dan ekspor berbasis hilirisasi, sehingga membuka peluang ekspansi kredit dan penghimpunan dana.

Perkembangan Industri Perbankan

Secara umum kinerja industri perbankan nasional masih menunjukkan kinerja positif seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh, walaupun tahun 2025 menjadi periode penuh tantangan bagi industri perbankan nasional di tengah dinamika ekonomi global dan domestik. Berdasarkan data Bank Indonesia disebutkan bahwa secara umum industri perbankan Indonesia berada pada kondisi yang likuid, sehat, dan resilien, dengan pertumbuhan kredit yang tetap positif, penghimpunan dana yang kuat, risiko kredit yang terkendali, serta permodalan yang solid.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kinerja intermediasi perbankan dari awal Januari hingga November 2025 meningkat dengan profil risiko yang terjaga, dan likuiditas di level yang memadai. Pada November 2025, kredit tumbuh 7,74% yoy menjadi Rp8.314,48 triliun. Kinerja didukung pertumbuhan pada sektor pengangkutan dan pergudangan sebesar 18,33%, pengadaan listrik, gas dan air 21,83%, industri pertambangan 11% serta konstruksi 8,14%.

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tercatat pertumbuhan tertinggi yaitu 17,98% yoy ditopang sektor pertambangan dan industri pengolahan. Kemudian kredit konsumsi tumbuh 6,67% dan kredit modal kerja tumbuh 2,04%. Adapun dari kategori debitur, kredit korporasi tumbuh 12,06%, sedangkan kredit UMKM terkontraksi 0,64%.

Adapun dari sisi pendanaan, dana pihak ketiga (DPK) perbankan tumbuh 12,03% yoy pada November 2025 dengan total DPK mencapai sekitar Rp9.800 triliun. Likuiditas perbankan dinilai tetap memadai, tercermin dari rasio AL/NCD sebesar 131,4% dan AL/DPK sebesar 29,67%, jauh di atas ambang batas. Selain itu, *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) berada di level tinggi 210,38%. Demikian juga dengan ketahanan perbankan yang

per capita reached Rp83.7 million or USD 5,083.4. Indonesia's macroeconomic stability remained well-maintained; Indonesia's inflation throughout 2025 was recorded at 2.92% (y-o-y) as of December 2025, an increase compared to 1.57% in 2024, but remained under control, and the rupiah exchange rate was also relatively stable in the range of Rp16,785 per US dollar in December 2025.

At the regional level, Central Sulawesi recorded a high growth of 8.47% in 2025, supported by the manufacturing, mining, agriculture, forestry, fisheries, and downstream-based export industries, thereby opening up opportunities for credit expansion and fund accumulation.

Banking Industry Developments

In general, the performance of the national banking industry still showed positive results in line with Indonesia's continued economic growth, although 2025 was a challenging period for the national banking industry amidst global and domestic economic dynamics. Based on Bank Indonesia data, it is stated that, in general, the Indonesian banking industry is in a liquid, healthy, and resilient condition, with credit growth remaining positive, strong fund accumulation, controlled credit risk, and solid capitalization.

The Financial Services Authority (OJK) noted that banking intermediation performance from early January to November 2025 improved with a maintained risk profile and liquidity at an adequate level. In November 2025, credit grew by 7.74% yoy to Rp8,314.48 trillion. This performance was supported by growth in the transportation and warehousing sector by 18.33%, electricity, gas, and water supply by 21.83%, the mining industry by 11%, and construction by 8.14%.

Based on the type of use, investment credit recorded the highest growth of 17.98% yoy, supported by the mining and manufacturing sectors. Furthermore, consumer credit grew by 6.67% and working capital credit grew by 2.04%. Regarding debtor categories, corporate credit grew by 12.06%, while MSME credit contracted by 0.64%.

In terms of funding, banking third-party funds (DPK) grew by 12.03% yoy in November 2025, with total DPK reaching approximately Rp9,800 trillion. Banking liquidity was considered to remain adequate, reflected in the AL/NCD ratio of 131.4% and the AL/DPK ratio of 29.67%, well above the threshold. In addition, the Liquidity Coverage Ratio (LCR) was at a high level of 210.38%. Likewise, banking resilience was supported

ditopang oleh permodalan yang kuat. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tercatat di level 26,05%, meski sedikit turun dari 26,38%, namun tetap menjadi bantalan yang solid dalam menghadapi potensi risiko ke depan.

Strategi dan Kebijakan Strategis Perusahaan

Bank Sulteng telah menyusun rencana-rencana strategis dalam rangka meningkatkan pertumbuhan bisnis bank berkelanjutan dan berkualitas serta menciptakan daya saing. Rencana tersebut menggambarkan arah kebijakan Bank dalam merespon perkembangan ekonomi terkini, tantangan dan proyeksi ke depan dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis baik yang berasal dari sisi global, domestik dan internal.

Strategi dan kebijakan strategi Perusahaan disusun dengan mengacu kepada sasaran Perusahaan yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank dengan menfokuskan kepada upaya Perusahaan dalam mengantisipasi setiap tantangan yang ada agar kemudian menjadi peluang pertumbuhan. Tema sasaran strategis tahunan sebagaimana *Corporate Plan* akan menjadi fokus utama Rencana Bisnis Bank kedepan.

Bank Sulteng menetapkan langkah strategis dan kebijakan dari manajemen dengan menggunakan beberapa metode pendekatan dan analisa salah satunya melalui pendekatan analisa *Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats* (SWOT). Analisa ini memungkinkan Bank untuk mengetahui posisi Bank dalam menghadapi persaingan usaha yang meliputi Informasi melalui posisi Bank Sulteng baik dalam kelompok usaha yang sama maupun secara industri, termasuk informasi mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta permasalahan dan hambatan yang di alami Bank Sulteng.

Direksi telah merumuskan kebijakan dan berbagai langkah strategis yang akan diambil dalam menghadapi tantangan serta persaingan bisnis bank sebagaimana tertuang dalam Rencana Bisnis Bank tahun 2025 di antaranya yaitu:

a. Meningkatkan struktur permodalan melalui pendekatan kepada pemegang saham untuk mengantisipasi pelaksanaan secara menyeluruh PP. 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bersama aturan pelaksanaannya yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI.
b. Melakukan perubahan terhadap struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan Bank Sulteng yang berorientasi pada proses bisnis, tugas dan tanggung jawab yang memadai.

by strong capitalization. The Capital Adequacy Ratio (CAR) was recorded at the level of 26.05%, despite a slight decrease from 26.38%, it remains a solid cushion in facing potential future risks.

The Company's Strategy and Strategic Policies

Bank Sulteng has formulated strategic plans in order to enhance sustainable and quality bank business growth and create competitiveness. This plan illustrates the Bank's policy direction in responding to recent economic developments, challenges, and future projections by observing the dynamics of strategic environmental developments originating from global, domestic, and internal sides.

The Company's strategy and strategic policies are formulated by referring to the Company's objectives outlined in the Bank's Business Plan, focusing on the Company's efforts to anticipate every existing challenge so that it then becomes a growth opportunity. The theme of annual strategic targets as per the Corporate Plan will be the main focus of the Bank's future Business Plan.

Bank Sulteng establishes strategic steps and policies from management using several approach and analysis methods, one of which is through the Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) analysis approach. This analysis allows the Bank to determine its position in facing business competition, which includes information regarding Bank Sulteng's position both within the same business group and industrially, including information regarding strengths, weaknesses, opportunities, threats, as well as problems and obstacles experienced by Bank Sulteng.

The Board of Directors has formulated policies and various strategic steps to be taken in facing challenges and bank business competition as outlined in the 2025 Bank Business Plan, including:

a. Improving the capital structure through approaches to shareholders to anticipate the comprehensive implementation of Government Regulation (PP). 54 of 2017 concerning Regional-Owned Enterprises (BUMD) along with its implementing regulations issued by the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia.
b. Making changes to the organizational structure in accordance with the needs of Bank Sulteng that is oriented towards business processes, with adequate duties and responsibilities.

c. Melakukan sosialisasi prinsip budaya kerja perusahaan yang baik, yang berorientasi untuk meminimalisir risiko dan meningkatkan budaya kepatuhan demi terciptanya Tata Kelola Perusahaan melalui prinsip *Transparency, Accauntabily, Independecy, Responsibility dan Fairness.*
d. Melakukan *assessment* kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia untuk mengetahui *gap* sesama Bank Pembangunan Daerah.
e. Meningkatkan dukungan teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan dengan berbasis digital yang berdaya saing.
f. Melakukan evaluasi produk dan jasa yang telah ada dan akan dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan permintaan masyarakat.
g. Meningkatkan penyaluran kredit pada sektor-sektor yang mempunyai prospek yang baik, yaitu Produktif, Konsumtif,KPR serta Non KPR.
h. Melakukan penagihan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah untuk menekan angka *Non Performing Loan* (NPL).
i. Meningkatkan pertumbuhan dana Pihak Ketiga melalui penciptakan *market share* baru dan upaya-upaya yang terukur dalam peningkatan *CASA*.
j. Membangun kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan pertumbuhan bisnis Bank Sulteng yang berkelanjutan.
k. Melakukan Peningkatan pendapatan usaha dan pengendalian biaya operasional disemua unit kerja yang ada baik operasional bisnis dan *support* operasional.
l. Melakukan penyusunan serta menyesuaikan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) maupun standar dan prosedur operasional (SOP) yang berorientasi terhadap percepatan proses, namun tetap memperhatikan risiko dan prinsip kehati-hatian dalam penerapan operasional Bank secara keseluruan.
m. Melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
n. Melanjutkan Pengembangan *Project* SIPD, SIKAP dan SISKEUDES yang digunakan untuk mendukung Transaksi Pemerintah Daerah serta Pengembangan Sistem Keuangan Desa dalam membantu penyaluran dan pengelolaan Dana Desa.
o. Melanjutkan penyelesaian beberapa Aplikasi Untuk pendukung Operasional seperti Aplikasi SDM, Aplikasi Digital Lending dan lain-lain guna mendukung Keperluan Program digitalisasi perbankan kedepan.
p. Melanjutkan penyelesaian seluruh aplikasi yang terkait dengan program optimalisasi SIPD disemua Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Tengah secara tersentralisasi yang merupakan program dari kementerian Dalam Negeri.

c. Socializing the principles of a good corporate work culture, which is oriented towards minimizing risks and enhancing a compliance culture to create Corporate Governance through the principles of Transparency, Accountability, Independency, Responsibility, and Fairness.
d. Conducting quantitative and competency assessments of Human Resources to determine the gap among Regional Development Banks.
e. Increasing information technology support in the context of improving the quality of competitive digital-based services.
f. Evaluating existing products and services and developing them in accordance with market needs and public demand.
g. Increasing credit disbursement to sectors with good prospects, namely Productive, Consumptive, Mortgage (KPR), and Non-Mortgage (Non-KPR).
h. Conducting credit collection and settlement of non-performing loans to suppress the Non-Performing Loan (NPL) rate.
i. Increasing the growth of Third-Party Funds through the creation of new market shares and measurable efforts in increasing CASA.
j. Building partnerships with third parties in order to enhance Bank Sulteng's sustainable business growth.
k. Increasing operating income and controlling operational costs in all existing work units, both business operations and operational support.

l. Preparing and adjusting the Company Policy Manual (BPP) as well as standard operating procedures (SOP) oriented towards accelerating processes, while still paying attention to risks and prudential principles in the overall implementation of the Bank's operations.

m. Executing Cooperation Agreements with PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), the People's Housing Savings Management Body (BP Tapera), and the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR).

n. Continuing the Development of the SIPD, SIKAP, and SISKEUDES Projects used to support Regional Government Transactions and the Development of the Village Financial System to assist in the distribution and management of Village Funds.
o. Continuing the completion of several Operational support Applications such as the HR Application, Digital Lending Application, and others to support the needs of future banking digitalization programs.
p. Continuing the completion of all applications related to the SIPD optimization program in all Regencies and Cities of Central Sulawesi Province centrally, which is a program from the Ministry of Home Affairs.

q. Melakukan pembentukan CKPN secara memadai dengan mengacu pada regulasi terkait CKPN yang berlaku.
r. Melajutkan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang merupakan komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat.

Peranan Direksi Dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan Strategis

Keterlibatan Direksi dalam penyusunan dan perumusan strategi dan kebijakan strategis Perusahaan sangat aktif, Direksi hadir dari proses awal sampai dengan di implemetasikan strategi bisnis yang akan di jalankan oleh Perusahaan. Direksi menjadi garda terdepan dalam perumusan dan implementasi strategi Perusahaan, keterlibatan tersebut dilakukan dengan menentukan arah dan strategi Perusahaan dimulai dari penentuan tujuan, analisis lingkungan, menentukan sasaran, membuat rencana kerja, melakukan evaluasi yang semua hal tersebut untuk selanjutnya dirumuskan dalam sebuah kebijakan dan Rencana Bisnis Bank.

Bank Sulteng menyusun strategi dan kebijakan strategis Perusahaan sesuai dengan kebutuhan Bank dan adaptif dengan lingkungan industri perbankan. Proses penyusunan strategi dan kebijakan strategi dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui pendekatan *bottom up*. Satuan-satuan kerja di Perusahaan ditugaskan untuk menyusun target dan strategi pencapaian target baik untuk satu tahun ke depan maupun untuk jangka panjang. Hasil dari rencana dan strategi pencapaian target yang disusun tersebut kemudian dilaporkan kepada Direksi untuk bersama-sama dilakukan reviu sekaligus untuk memetakan tantangan dan peluang yang ada dengan mencanangkan target dan arah strategi ke depan, kemudian diselaraskan dengan target dan strategi yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan.

Dalam proses perumusan strategi Direksi juga melibatkan Dewan Komisaris untuk memastikan rencana Bank yang disusun telah sesuai dengan tujuan dan sasaran Perusahaan. Direksi memandang Dewan Komisaris menjadi mitra dalam perumusan dan implementasi strategi Perusahaan, keterlibatan tersebut dilakukan dalam bentuk ide, saran dan masukan baik dalam media pertemuan yang diadakan atau melalui tanggapan tertulis atas laporan yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris.

q. Establishing adequate Allowance for Impairment Losses (CKPN) by referring to the applicable regulations related to CKPN.
r. Continuing the Partnership and Community Development Program, which is the company's commitment to playing a role in sustainable economic development to improve the quality of life and a beneficial environment.

The Role of the Board of Directors in Strategy and Strategic Policy Formulation

The involvement of the Board of Directors in the preparation and formulation of the Company's strategy and strategic policies is highly active; the Board of Directors is present from the initial process up to the implementation of the business strategy to be executed by the Company. The Board of Directors serves as the vanguard in the formulation and implementation of the Company's strategy; this involvement is carried out by determining the direction and strategy of the Company starting from goal setting, environmental analysis, determining targets, creating work plans, and conducting evaluations, all of which are subsequently formulated into a policy and the Bank's Business Plan.

Bank Sulteng formulates the Company's strategy and strategic policies in accordance with the Bank's needs and adaptively with the banking industry environment. The process of preparing the strategy and strategic policies is carried out systematically and structured through a bottom-up approach. Work units within the Company are assigned to set targets and strategies to achieve the targets, both for the next year and for the long term. The results of the prepared plans and strategies for target achievement are then reported to the Board of Directors to be jointly reviewed as well as to map existing challenges and opportunities by setting targets and future strategic directions, which are then aligned with the targets and strategies outlined in the Company's Long-Term Plan.

In the strategy formulation process, the Board of Directors also involves the Board of Commissioners to ensure that the prepared Bank plans are in accordance with the Company's goals and objectives. The Board of Directors views the Board of Commissioners as a partner in the formulation and implementation of the Company's strategy; this involvement takes the form of ideas, suggestions, and input either during held meetings or through written responses to reports submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners.

Peran Direksi Untuk Memastikan Strategi Dijalankan

Direksi memegang peranan penting dalam memastikan strategi dan kebijakan perusahaan yang ditetapkan telah dijalankan sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan.

Peranan Direksi dalam menjalankan strategi dan kebijakan dilakukan melalui peninjauan kinerja yang dilakukan secara berkala pada satuan kerja, dalam pelaksanaannya Direksi meminta Manajemen untuk menyampaikan perkembangan dan pencapaian terkini, serta tantangan atau hambatan yang dihadapi dan untuk selanjutnya Direksi memberikan umpan balik dan panduan tentang cara mengatasi masalah-masalah tersebut. Direksi melakukan tinjauan secara berkala untuk memastikan bahwa Perusahaan berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuannya dan melakukan penyesuaian jika diperlukan apabila strategi dan kebijakan yang diterapkan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan Perusahaan.

Untuk memastikan strategi yang diterapkan dapat berjalan dengan baik, Direksi juga memperhatikan ketersediaan sumber daya yang memadai baik sumberdaya manusia, keuangan maupun teknologi yang dimiliki sebagai dukungan untuk pencapaian rencana dan strategi yang ditetapkan. Alokasi keuangan yang tepat akan memudahkan melakukan aksi dalam mempercepat rencana aksi Perusahaan, demikian juga juga dengan ketersediaan SDM yang kompeten sangat mendukung pencapaian dari strategi Perusahaan. Direksi secara terencana dan berkelanjutan selalu berupaya untuk meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan maupun sertifikasi sebagai bentuk pengakuan kompetensi SDM yang dimiliki Bank. Selain itu pengembangan teknologi dan digitalisasi sistem manajemen memungkinkan Direksi dapat secara realtime mengetahui perkembangan pengelolaan Perusahaan. Pengembangan digitalisasi memberi kemudahan untuk mengetahui sejak dini jika terdapat indikasi adanya penyimpangan di masing-masing satuan kerja, sehingga akan dengan mudah dilakukan upaya pencegahan atau antisipasi dalam meminimalkan resiko yang mungkin terjadi.

Analisis Kinerja Perusahaan

Bank Sulteng semakin memperkokoh posisinya sebagai bank pembangunan daerah yang berkomitmen mendukung program-program strategis untuk pembangunan ekonomi Sulawesi Tengah serta akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Bank Sulteng sangat fokus dalam menjaga ketangguhan dan keberlanjutan bisnis

The Board of Directors' Role to Ensure Strategy Execution

The Board of Directors plays a crucial role in ensuring that the established corporate strategies and policies have been executed in accordance with the predetermined plans and targets.

The Board of Directors' role in executing strategy and policy is carried out through periodic performance reviews on work units; in its implementation, the Board of Directors requests Management to report on recent developments and achievements, as well as challenges or obstacles faced, and subsequently, the Board of Directors provides feedback and guidance on how to overcome these issues. The Board of Directors conducts periodic reviews to ensure that the Company is on the right track to achieve its goals and makes adjustments if necessary when the implemented strategies and policies are no longer aligned with the Company's needs.

To ensure the implemented strategies run well, the Board of Directors also pays attention to the availability of adequate resources, be it human resources, finance, or technology, as support for the achievement of the established plans and strategies. Appropriate financial allocation will facilitate taking action in accelerating the Company's action plans, just as the availability of competent HR strongly supports the achievement of the Company's strategy. The Board of Directors systematically and sustainably always strives to improve HR competencies through training and certification as a form of recognition of the HR competencies possessed by the Bank. In addition, the development of technology and the digitalization of management systems allow the Board of Directors to determine the progress of the Company's management in real-time. The development of digitalization provides convenience in identifying early indications of irregularities in each work unit, thereby facilitating prevention or anticipation efforts in minimizing potential risks.

Analysis of the Company's Performance

Bank Sulteng further solidifies its position as a regional development bank committed to supporting strategic programs for the economic development of Central Sulawesi and will continue to strengthen synergies with regional governments and stakeholders to support inclusive and sustainable economic development. Bank Sulteng is highly focused on maintaining the resilience and sustainability of the Company's business by gradually directing towards improvements and

Perusahaan dengan secara bertahap mengarah pada perbaikan-perbaikan serta semakin memperkuat pondasi untuk mendukung pertumbuhan usaha berkelanjutan dan menuju pencapaian yang semakin baik ke depan.

Bank telah melakukan berbagai upaya dengan terus melakukan perubahan-perubahan yang terstrukur dan berkesinambungan dalam usaha mecapai target dalam Rencana bisnis Bank. serta sebagai upaya untuk meningkatkan nilai Pemegang Saham secara berkelanjutan baik di sisi operasional maupun finansial. Pada tahun 2025, Bank Sulteng kembali menunjukkan kinerja positif di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tantangan ekonomi domestik serta terjadinya ketegangan geo politik perang Rusia dan Ukraina telah berimbas pada kinerja ekonomi nasional dan berdampak pada kinerja perbankan. Melalui strategi yang inovatif dan responsif, Bank Sulteng masih mampu menjaga pertumbuhan secara berkelanjutan dan semakin memperkuat kepercayaan dari berbagai pihak seperti yang tergambar dari keberhasilan Perusahaan mencatatkan pertumbuhan laba yang sehat dan peningkatan efisiensi operasional.

Dari sisi keuangan, beberapa pencapaian kinerja keuangan Bank Sulteng sampai dengan akhir tahun 2025 secara umum indikator realisasi pertumbuhan kinerja Bank cukup baik jika dibandingkan dengan rencana target yang ditetapkan, hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

- Realisasi total aset Bank Sulteng mencapai Rp13.648.944 juta dari target sebesar Rp13.600.111 juta atau mencapai 100,36% dari target.

- Realisasi kredit yang diberikan mencapai Rp8.548.013 juta dari target sebesar Rp9.220.139 juta atau tercapai sebesar 92,71% dari target. Optimalisasi ekspansi kredit agar sesuai dengan rencana bisnis harus menjadi perhatian Bank ke depannya.

- Realisasi Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp8.726.568 juta dari target yang ditetapkan sebesar Rp10.161.877 atau dengan capaian sebesar 85,88% dari target. Realiasi sebesar itu terinci dari capaian giro yang mencapai 64,08%, tabungan sebesar 89,98%, dan deposito sebesar 98,21% dari target. Rendahnya pencapaian giro menjadi faktor utama tidak tercapainya target DPK. Ke depan untuk memaksimalkan penyerapan DPK diperlukan strategi peningkatan penghimpunan dana murah (CASA) untuk memperbaiki struktur pendanaan.

further strengthening the foundation to support sustainable business growth and towards better future achievements.

The Bank has made various efforts by continuously making structured and continuous changes in an effort to achieve the targets in the Bank's Business Plan. as well as as an effort to enhance Shareholder value sustainably, both operationally and financially. In 2025, Bank Sulteng again demonstrated positive performance amidst global economic uncertainty and domestic economic challenges, as well as the occurrence of geopolitical tensions from the Russia-Ukraine war which has impacted national economic performance and affected banking performance. Through innovative and responsive strategies, Bank Sulteng was still able to maintain sustainable growth and further strengthen trust from various parties, as reflected by the Company's success in recording healthy profit growth and increased operational efficiency.

From a financial perspective, several achievements of Bank Sulteng's financial performance up to the end of 2025 generally indicate that the Bank's performance growth realization indicators are quite good when compared to the established target plans; this can be seen as follows:

- The realization of Bank Sulteng's total assets reached Rp13,648,944 million from a target of Rp13,600,111 million, or reaching 100.36% of the target.

- The realization of granted credit reached Rp8.548.013 million from a target of Rp9,220,139 million, or achieved 92,71% of the target. Optimizing credit expansion to align with the business plan must be a concern for the Bank moving forward.

- The realization of Third-Party Funds (DPK) amounted to Rp8.726.568 million from the set target of Rp10,161,877 million, or achieving 85,88% of the target. This realization is broken down by the achievement of demand deposits which reached 64,08%, savings at 89,98%, and time deposits at 98.21% of the target. The low achievement of demand deposits became the primary factor for not achieving the DPK target. Going forward, to maximize DPK absorption, a strategy to increase the accumulation of low-cost funds (CASA) is required to improve the funding structure.

- Realisasi kinerja laba rugi, laba tahun berjalan mencapai Rp277.576 juta atau 87,47% dari target namun lebih tinggi dibanding laba tahun sebelumnya sebesar Rp242.232 juta atau meningkat 14,59%. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan laba operasional sebesar 14,56% seiring dengan pertumbuhan pendapatan operasional yang mampu mengimbangi peningkatan beban operasional sepanjang tahun 2025.

Dalam aspek rasio keuangan, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tercatat sebesar 25,52% atau 102,65% dari target, mencerminkan kondisi permodalan yang sangat kuat dan di atas ketentuan regulator. Namun, rasio kualitas aset menunjukkan peningkatan risiko, di mana NPL Gross mencapai 107,81% dari target dan NPL Net sebesar 121,79%, mengindikasikan kenaikan kredit bermasalah yang perlu mendapat perhatian serius dalam pengelolaan risiko.

Dari sisi operasional, sejumlah langkah penting dan strategis ditempuh untuk memastikan operasional usaha berjalan lancar serta terus meningkatkan efektivitas kinerja pada setiap satuan kerja dilingkungan Perusahaan. Bank Sulteng terus berupaya melakukan pengembangan yang berkesinambungan melalui penetrasi pasar ataupun melalui pengembangan produk dan layanan dengan menghadirkan layanan yang inovatif dan modern, salah satunya yaitu peningkatan kualitas layanan secara keseluruhan dengan kecepatan, keamanan, dan kehandalan yang diwujudkan dengan menambah sarana dan prasarana untuk pengembangan teknologi dan informasi. Demikian juga dengan pengembangan SDM, peningkatan kompetensi SDM menjadi target utama Perusahaan selaras dengan dengan pertumbuhan usaha Perusahaan. Bank telah menetapkan rencana kerja berikut pendanaan untuk peningkatan kompetensi karyawan baik dengan mengikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan yang diadakan ataupun dalam rangka untuk mendapatkan sertifikasi sebagai pengakuan atas kompetensi yang dimiliki oleh karyawan Perusahaan.

Direksi memahami banyak hal yang harus terus ditingkatkan oleh Perusahaan, oleh karenanya Bank terus berupaya untuk senantiasa menerapan prinsip penuh kehati-hatian dalam setiap langkah terutama dalam pengambilan kebijakan dan keputusan, hal ini menjadi langkah sangat penting agar bank terhindar dari kendala-kendala serta dampak negatif dan menghindari risiko-risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha terutama yang akan mempengaruhi kepercayaan nasabah terhadap bank serta kesehatan dan kinerja bank.

- Regarding the realization of profit and loss performance, the profit for the current year reached Rp277,576 million or 87.47% of the target but was higher than the previous year's profit of Rp242,232 million, or an increase of 14.59%. This increase was primarily driven by an increase in operating profit of 14.56% in line with the growth in operating income which was able to offset the increase in operating expenses throughout 2025.

In terms of financial ratios, the Capital Adequacy Ratio (CAR) was recorded at 25,52% or 102,65% of the target, reflecting a very strong capital condition above regulatory requirements. However, the asset quality ratio showed an increase in risk, where Gross NPL reached 107.81% of the target and Net NPL stood at 121.79%, indicating a rise in non-performing loans that requires serious attention in risk management.

On the operational side, a number of important and strategic steps were taken to ensure smooth business operations and continuously improve performance effectiveness in every work unit within the Company. Bank Sulteng continuously strives for sustainable development through market penetration or the development of products and services by presenting innovative and modern services, one of which is improving overall service quality in terms of speed, security, and reliability, realized by adding facilities and infrastructure for information technology development.Similarly with HR development, improving HR competencies has become the Company's main target in alignment with the Company's business growth. The Bank has established work plans along with funding for employee competency improvement, both by involving them in organized trainings or in order to obtain certification as an acknowledgment of the competencies possessed by the Company's employees.

The Board of Directors understands there are many things the Company must continue to improve, and therefore the Bank continuously strives to apply prudential principles in every step, especially in policy and decision making; this becomes a very important step so that the bank avoids obstacles and negative impacts and averts risks arising from all business activities, especially those that will affect customer trust in the bank as well as the bank's soundness and performance.

Kendala dan Tantangan Yang Dihadapi

Bank melihat tantangan yang dihadapi semakin kompleks dan persaingan yang semakin ketat. Tantangan yang nyata terjadi yaitu dari pengaruh eksternal masih terjadinya ketegangan geo politik perang Rusia dan Ukraina ditambah lagi terjadinya perang antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran akan berimbas pada kinerja ekonomi nasional dan berdampak pada kinerja perbankan terutama sektor UMKM dan Korporasi yang diprediksi sulit bertahan terhadap tekanan ekonomi global tersebut. Kebijakan efisiensi belanja Pemerintah dan penghematan dengan pemangkasan anggaran tertentu, juga akan berdampak pada industri perbankan berupa penurunan volume kredit, penurunan kinerja investasi, dan potensi perlambatan pertumbuhan kredit.

Dari sisi internal, pengembangan teknologi informasi dan digitalisasi pada semua sistem di lingkungan Perusahaan harus terus di tingkatkan agar mampu bersaing dengan bank lainnya. Penguatan SDM juga tidak boleh berhenti, SDM yang dimiliki Bank harus mempuanyai kemampuan melakukan antisipasi dan cermat dalam menghadapi berbagai tantangan, mempunyai kemampuan dalam menerapakan teknologi, pengendalian internal dan mampu memitigasi risiko.

Beberapa kendala sekaligus tantangan bagi Bank Sulteng menjadi perhatian bagi Perusahaan, antara lain:

- Tata kelola, sumberdaya manusia, manajemen risiko dan infrastruktur yang belum memadai dapat memicu peningkatan kredit bermasalah dalam segmen produktif.
- Daya saing yang masih rendah lantaran produk dan mutu pelayanan belum memadai.
- Potensi peningkatan NPL sebagai Dampak Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi serta Covid-19.
- Kompetisi dengan Bank Pesaing (terutama Bank BUMN), (melalui keunggulan teknologi, kompetensi SDM, jaringan, CSR, biaya promosi, *top down access Government)*.
- Kompetisi dengan *start up (Digital Banking-Financial Technology),* disaat perusahaan digital masih *low regulated* yang berhadapan dengan Bank yang *fully regulated.*
- Kemampuan teknologi Bank Pesaing setiap saat tumbuh dan berubah sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat.

Constraints and Challenges Faced

The Bank sees the challenges faced becoming more complex and competition increasingly tight. A real challenge that occurs, namely from external influences, is the ongoing geopolitical tensions from the Russia-Ukraine war, compounded by the war involving the United States, Israel, and Iran, which will impact national economic performance and affect banking performance, especially the MSME and Corporate sectors, which are predicted to have difficulty surviving these global economic pressures. Government expenditure efficiency policies and savings through specific budget cuts will also impact the banking industry in the form of a decrease in credit volume, a decline in investment performance, and a potential slowdown in credit growth.

Internally, information technology development and digitalization across all systems within the Company must continue to be enhanced to remain competitive with other banks. HR strengthening must also not stop; the Bank's HR must possess the ability to anticipate and be astute in facing various challenges, possess the ability to apply technology, internal control, and be capable of mitigating risks.

Several constraints as well as challenges for Bank Sulteng have become a concern for the Company, including:

- Inadequate governance, human resources, risk management, and infrastructure can trigger an increase in non-performing loans in the productive segment.
- Low competitiveness due to inadequate products and service quality.
- Potential increase in NPL as an impact of Earthquakes, Tsunamis, Liquefaction, and Covid-19.
- Competition with Competitor Banks (especially State-Owned Banks) (through technological superiority, HR competence, networks, CSR, promotional costs, top-down Government access).
- Competition with start-ups (Digital Banking - Financial Technology), while digital companies are still low-regulated facing fully regulated Banks.
- The technological capabilities of Competitor Banks constantly grow and change according to the desires and expectations of the community.

Berbagai tantangan tersebut diyakini oleh Perusahaan tidak selamanya menjadi kendala bagi pengembangan Perusahaan namun juga akan menjadi kesempatan usaha untuk terus ditingkatkan.

Perubahan yang sangat cepat, yang terjadi dalam lingkungan bisnis bank secara otomatis menuntut setiap pelaku bisnis untuk selalu memberikan perhatian dan tanggapan terhadap lingkungannya. Hal ini mengkondisikan Perusahaan untuk kemudian merumuskan strategi agar mampu mengantisipasi perubahan dan pencapaian tujuan perusahaan. Program-program peningkatan layanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan manajemen risiko dan pengendalian internal, penguatan teknologi informasi serta percepatan digitalisasi layanan dan produk harus tetap menjadi prioritas untuk dikembangkan.

Gambaran Tentang Prospek Usaha Perusahaan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan meningkat dapat memberi harapan bagi industri perbankan untuk terus menggeliat, ditambah lagi dengan pertumbuhan Bank Sulteng diatas rata-rata nasional memberi peluang sekaligus menjadi kekuatan untuk pengembangan Perusahaan ke depan.

Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menyebutkan Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 5,4% dengan potensi hingga 5,6%. Demikian juga dengan Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2026 tetap di level 5%, Bank Dunia menyebut peluang pertumbuhan akan terjadi pada dua tahun mendatang dengan perkiraan pertumbuhan dengan peningkatan tipis ke 5,2%. IMF juga memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 5% pada 2025, dan naik sedikit menjadi 5,1% pada tahun 2026. IMF menyebut Indonesia sebagai *bright spot* atau titik terang ditengah masih tingginya ketidakpastian ekonomi global, dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat di tengah lingkungan eksternal yang menantang, dan inflasi diperkirakan tetap stabil dalam kisaran sasaran 2,5% plus minus 1%.

Pada tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah diperkirakan berada pada kisaran 7,45–9,05% (yoy). Kinerja tersebut masih ditopang oleh dominannya peran lapangan usaha industri pengolahan berbasis nikel dan lapangan usaha pertambangan dan penggalian dalam struktur ekonomi daerah.

Kombinasi pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi, peningkatan investasi industri, dan penguatan UMKM memberikan ruang bagi Bank Sulteng untuk

The Company believes that these various challenges will not always be constraints to the Company's development but will also become business opportunities to be continuously improved.

The extremely rapid changes occurring in the bank's business environment automatically demand every business actor to always pay attention and respond to their environment. This conditions the Company to subsequently formulate strategies to be able to anticipate changes and achieve corporate goals. Programs to improve services, enhance human resource quality, manage risk and internal controls, strengthen information technology, and accelerate the digitalization of services and products must remain priorities for development.

Overview of the Company's Business Prospects

Indonesia's economic growth, which is projected to increase, can provide hope for the banking industry to continue to stretch, coupled with Bank Sulteng's growth above the national average, providing opportunities as well as strengths for the Company's future development.

A Press Release from the Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia stated that Indonesia's economic growth in 2026 is targeted at 5.4% with potential up to 5.6%. Similarly, the World Bank estimates that Indonesia's economic growth or Gross Domestic Product (GDP) in 2026 will remain at the 5% level; the World Bank noted that growth opportunities will occur in the next two years with an estimated growth indicating a slight increase to 5.2%. The IMF also predicts that Indonesia's economy will grow by 5% in 2025, and rise slightly to 5.1% in 2026. The IMF refers to Indonesia as a bright spot amidst persistently high global economic uncertainty, with strong economic growth amidst a challenging external environment, and inflation is expected to remain stable within the target range of 2.5% plus minus 1%.

In 2026, Central Sulawesi's economic growth is estimated to be in the range of 7.45–9.05% (yoy). This performance is still supported by the dominant role of the nickel-based manufacturing industry sector and the mining and quarrying sector in the regional economic structure.

The combination of high regional economic growth, increased industrial investment, and MSME strengthening provides room for Bank Sulteng to

memperluas pembiayaan sektor produktif, khususnya industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Struktur ekonomi Sulawesi Tengah yang berbasis hilirisasi juga menciptakan peluang pembiayaan rantai pasok (*supply chain financing*) serta penguatan dana murah melalui peningkatan transaksi bisnis.

Demikian juga dengan kondisi industri perbankan yang stabil dan resilien, dapat memacu meningkatkan kinerja Perusahaan dengan terus menggeliat dan mengembangkan bisnisnya dalam rangka meningkatkan fungsi intermediasi perbankan. *Outlook* Sektor Jasa Keuangan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026 menyatakan optimistis tren positif kinerja sektor jasa keuangan di 2026 bisa berlanjut dengan mencermati berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi, serta kebijakan-kebijakan yang diambil. Kredit perbankan diproyeksikan tumbuh sebesar 10-12 persen, didukung pertumbuhan Dana Pihak Ketiga sebesar 7-9 persen.

Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sektor perbankan yang stabil telah memberi rasa optimisme yang kuat bagi Bank Sulteng untuk menatap prospek usaha ke depan, dengan strategi ekspansi yang selektif, pengelolaan likuiditas dan permodalan yang kuat, serta fokus pada pembiayaan sektor produktif dan UMKM, Bank Sulteng memiliki prospek usaha yang tetap tumbuh, sehat, dan berkelanjutan pada tahun 2026.

Meskipun demikian Bank harus tetap dengan langkah-langkah strategis dalam menjalankan Perusahaan mengingat faktor-faktor eksternal juga sangat berpengaruh yang dapat memberi dampak bagi operasional bank. Ketegangan geo politik perang Rusia dan Ukraina ditambah lagi terjadinya perang antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran akan berimbas pada kinerja ekonomi nasional dan berdampak pada kinerja perbankan serta kecenderungan akan meningkatnya pembiayaan bermasalah. Oleh karenanya aspek kehati-hatian tetap harus dikedepankan, pengelolaan risiko usaha semakin ditingkatkan, pengendalian internal dan memperkuat tata kelola perusahaan serta pengelolaan Perusahaan secara professional, transparan dan efisien harus dimaksimalkan.

Implementasi Tata Kelola Perusahaan Berkelanjutan

Penerapan tata kelola yang baik diwujudkan dengan dijalankannya praktik-praktik usaha yang sehat, menjunjung tinggi standar etika dan perilaku, dan dengan mendorong setiap Insan Perusahaan menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh amanah dan bertanggung jawab.

expand financing for productive sectors, particularly the manufacturing, trade, and agricultural industries. Central Sulawesi's downstream-based economic structure also creates opportunities for supply chain financing and strengthening low-cost funds through increased business transactions.

Similarly, a stable and resilient banking industry condition can spur the improvement of the Company's performance by continuously stretching and developing its business in order to enhance banking intermediation functions. The Financial Services Sector Outlook at the 2026 Financial Services Industry Annual Gathering (PTIJK) expressed optimism that the positive trend in financial sector performance in 2026 could continue by scrutinizing the various challenges and opportunities faced, as well as the policies taken. Bank credit is projected to grow by 10-12 percent, supported by Third-Party Fund growth of 7-9 percent.

Stable economic growth and banking sector development have provided a strong sense of optimism for Bank Sulteng to look at future business prospects; with a selective expansion strategy, strong liquidity and capital management, and a focus on financing productive sectors and MSMEs, Bank Sulteng has business prospects that will continue to grow, remain healthy, and be sustainable in 2026.

Nevertheless, the Bank must proceed with strategic steps in running the Company, considering that external factors are also very influential and can impact the bank's operations. Geopolitical tensions from the Russia-Ukraine war compounded by the war involving the United States, Israel, and Iran will impact national economic performance and affect banking performance, along with a tendency for increased non-performing financing. Therefore, prudential aspects must remain at the forefront, business risk management needs to be further improved, internal controls and corporate governance must be strengthened, and the management of the Company in a professional, transparent, and efficient manner must be maximized.

Implementation of Sustainable Corporate Governance

The implementation of good governance is realized through the execution of sound business practices, upholding ethical standards and behavior, and by encouraging every Company Personnel to carry out their duties and responsibilities in a trustworthy and responsible manner.

Bank Sulteng menyadari bahwa membangun GCG merupakan proses yang panjang sehingga perlu dijalankan dengan komitmen yang tinggi dan konsisten sehingga dapat menciptakan nilai perusahaan secara berkelanjutan guna menjaga kepercayaan dan kredibilitas perusahaan. Untuk itu, Bank Sulteng menetapkan strategi dan program kerja yang terarah sehingga prinsip-prinsip GCG dapat diterapkan di seluruh kegiatan usaha dan aktivitas perbankan Bank Sulteng. Berikut faktor-faktor strategis yang menjadi pertimbangan Bank Sulteng dalam menerapkan GCG, yaitu:

1. Bank Sebagai Lembaga Kepercayaan
   Bank Sulteng senantiasa menjaga kepercayaan baik dari Pemerintah dan masyarakat dengan berkomitmen untuk memiliki kinerja keuangan (*financial performance*) yang baik, memiliki tingkat kesehatan bank yang baik dan memiliki kecukupan modal di atas ketentuan minimum dan profil risiko secara komposit rendah.

2. Bank Merupakan Pelayanan Publik
   Bank Sulteng selalu berupaya untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada nasabahnya dan menjaga kepuasan nasabah (*customer satisfaction*) dengan memberikan pelayanan yang melebihi harapan nasabah.

3. Bank Sebagai *Agent of Development*
   Bank Sulteng sebagai *agent of development* dalam berbagai sektor usaha dan bisnis senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Bank Sulteng berupaya untuk mewujudkan program BPD *Regional Champion* dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG sehingga dalam pelaksanaannya tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku maupun etika bisnis dalam industri perbankan.

Strategi implementasi GCG ditetapkan Bank Sulteng guna mendukung pelaksanaan GCG agar dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sejalan dengan *business plan* Bank Sulteng yang selanjutnya dirumuskan kedalam tahapan-tahapan penerapan GCG yaitu strategi implementasi, *Awareness*, implementasi GCG, *monitoring* implementasi GCG, pelaporan dan *disclosure* dan *assessment* GCG.

Untuk mendukung efektivitas penerapan GCG di Perusahaan, Bank Sulteng telah menyediakan kebijakan (*soft structure*) GCG yang memberikan pedoman yang jelas bagi setiap Insan Perusahaan dalam menerapkan GCG di lingkungan Perusahaan. Bank Sulteng secara berkelanjutan terus melanjutkan kegiatan *review* dan penguatan terhadap berbagai kebijakan dan manual GCG disesuaikan dengan dinamika perkembangan usaha dan regulasi di sektor perbankan.

Bank Sulteng realizes that building GCG is a long process that needs to be carried out with high and consistent commitment to create sustainable corporate value to maintain the company's trust and credibility. For this reason, Bank Sulteng established directed strategies and work programs so that GCG principles can be applied across all business operations and banking activities of Bank Sulteng. The following are the strategic factors considered by Bank Sulteng in implementing GCG, namely:

1. Bank as an Institution of Trust
   Bank Sulteng always maintains trust from both the Government and the public by committing to having good financial performance, maintaining a sound bank rating, and having capital adequacy above the minimum requirements with a low composite risk profile.

2. Bank as a Public Service
   Bank Sulteng always strives to provide the best service to its customers and maintain customer satisfaction by delivering services that exceed customer expectations.

3. Bank as an Agent of Development
   Bank Sulteng, as an agent of development in various business sectors, continuously applies prudential banking principles. Bank Sulteng strives to realize the Regional Champion BPD program by adhering to GCG principles so that in its implementation, it does not violate applicable provisions and legislation or business ethics within the banking industry.

The GCG implementation strategy was established by Bank Sulteng to support the execution of GCG so that it can run effectively and sustainably in accordance with the established work plan aligned with Bank Sulteng's business plan, which is further formulated into GCG implementation stages, namely implementation strategy, Awareness, GCG implementation, GCG implementation monitoring, reporting and disclosure, and GCG assessment.

To support the effectiveness of GCG implementation within the Company, Bank Sulteng has provided GCG policies (soft structure) that give clear guidelines for every Company Personnel in implementing GCG in the Company environment. Bank Sulteng sustainably continues review and strengthening activities for various GCG policies and manuals, adapted to the dynamics of business developments and regulations in the banking sector.

Bank Sulteng juga melakukan program sosialisasi GCG kepada karyawan melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik dimana pelaksanaannya berkoordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam aktivitas sosialisasi GCG. Pelaksanaan kegiatan *awareness* maupun sosialisasi GCG didokumentasikan secara baik dan disampaikan dalam bentuk laporan dengan demikian Perusahaan dapat melakukan monitoring dan evaluasi.

Bank Sulteng also conducts GCG socialization programs for employees through various media, both print and electronic, where the execution is coordinated with parties who have interests in GCG socialization activities. The execution of awareness and GCG socialization activities is well documented and submitted in the form of reports, thereby enabling the Company to conduct monitoring and evaluation.

Beberapa inisiatif yang telah dijalankan Bank Sulteng selama tahun 2025 sebagai bagian dari strategi implementasi GCG di Bank antara lain yaitu:

1. Perlindungan terhadap hak pemegang saham;
2. Optimalisasi peran dan fungsi Dewan Komisaris, Direksi dan Komite;
3. Peningkatan fungsi manajemen risiko dan pengendalian internal;
4. Peningkatan fungsi kepatuhan;
5. Peningkatan Teknologi Informasi yang memadai.

Several initiatives executed by Bank Sulteng during 2025 as part of the GCG implementation strategy at the Bank include:

1. Protection of shareholder rights;
2. Optimization of the roles and functions of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Committees;
3. Improvement of risk management and internal control functions;
4. Improvement of the compliance function;
5. Enhancement of adequate Information Technology.

Secara berkala Bank Sulteng melakukan kegiatan monitoring terhadap implementasi GCG melalui penilaian yang dilakukan secara mandiri *(self assessment)* dengan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Untuk tahun 2025, berdasarkan hasil *self assessment* GCG diketahui bahwa Bank Sulteng masuk peringkat 2 (dua) dengan predikat "Baik". Hal ini menunjukkan Bank Sulteng telah melakukan pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, dan apabila terdapat kelamahan dalam penerapannya, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Periodically, Bank Sulteng monitors the implementation of GCG through self-assessment by referring to the Financial Services Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.03/2025 dated Juni 24, 2025, concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.For 2025, based on the GCG self-assessment results, it is known that Bank Sulteng was ranked 2 (two) with a "Good" predicate. This indicates that Bank Sulteng has made adequate fulfillment of Good Corporate Governance principles, and if there are weaknesses in its application, generally these weaknesses are less significant and can be resolved with normal actions by the Bank's management.

Melalui penerapan GCG secara konsisten dapat menjadikan Perusahaan bernilai tambah yaitu meningkatkan kesejahteraan seluruh karyawan Perusahaan berikut peningkatan kemanfaatan bagi pemangku kepentingan dan secara khusus akan berdampak pada semakin meningkatnya kepercayaan nasabah dan tumbuhnya kinerja Bank secara berkelanjutan.

Through the consistent implementation of GCG, it can make the Company value-added, namely improving the welfare of all Company employees along with increasing benefits for stakeholders, and specifically will impact the increasing customer trust and continuous growth of Bank performance.

Sebagai bagian dalam memperkuat implementasi tata kelola secara berkelanjutan Perusahaan juga terus memperkuat pengelolaan risiko, Bank Sulteng memandang semakin kompleknya risiko yang dihadapi bank, maka semakin meningkat pula kebutuhan praktik Tata Kelola oleh perbankan. Oleh karenanya Bank Sulteng merancang proses manajemen risiko agar mampu mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan usaha Bank tidak

As part of strengthening sustainable governance implementation, the Company also continuously strengthens risk management; Bank Sulteng views that the more complex the risks faced by the bank, the greater the need for Governance practices by banking institutions. Therefore, Bank Sulteng designed a risk management process to be able to identify, measure, monitor, and control the risks faced by the Company. This is intended so that the Bank's business activities do not cause losses that

menimbulkan kerugian yang melebihi *risk appetite* yang sudah ditentukan atau bahkan mengganggu kelangsungan usaha Bank.

Penerapan Manajemen Risiko yang sistematis dan terstruktur diharapkan akan tumbuh budaya sadar risiko dimana segenap unsur di Perusahaan mengenali risiko-risiko yang dihadapi dalam pencapaian visi maupun sasaran Perusahaan, sehinga dapat mempersiapkan langkah mitigasinya dengan memamfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal.

Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Partisipasi aktif Perusahaan dalam melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan secara profesional, dengan melaksanakan kegiatan melalui program-program yang terencana. Implementasi kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan manifestasi dari partisipasi dan kepedulian Bank dalam mendukung program pemerintah, masyarakat dan lingkungan kerja Bank. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk program filantropi perusahaan (*corporate philanthrophy*), pengembangan masyarakat (*community development*), pengembangan kewirausahaan (*enterpreuneurship development*), *reengineering value chain* dan pemasaran kemasyarakatan korporat (*corporate societal marketing*), program kemitraan Bank Sulteng yang merupakan program pembangunan ekonomi berkelanjutan (*sustainable*) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang berkelanjutan.

Bank Sulteng telah menetapkan program-program yang menjadi ruang lingkup implementasi tanggung jawab sosial perusahaan yang juga disesuaikan dengan maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial di lingkungan Perusahaan. Penyusunan program dalam rencana kerja ini dilakukan dengan memperhatikan wilayah sekitar operasional perusahaan dengan menganalisis kebutuhan serta dampak yang diperoleh dari hasil pemetaan kebutuhan. Pada tahun 2025, program *Corporate Social Responsibility* (CSR) diperuntukkan sesuai kondisi daerah masing-masing yang tersebar di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dengan penjabaran fokus program pada kegiatan bidang pendidikan, sosial, kesehatan, seni budaya, olahraga, Lingkungan Hidup dan Alam, dan bidang sarana umum.

Alokasi dana *Corporate Social Responsibility* untuk tahun 2025 ditetapkan oleh RUPS dimana sumber pembebanannya dari laba tahun berjalan dan dicadangkan setiap bulannya. Pada tahun 2025, Bank Sulteng telah mengalokasikan anggaran pelaksanaan program- program tanggung jawab sosial perusahaan sebesar Rp.18.975 juta yang terbagi menjadi 2 (dua)

exceed the predetermined risk appetite or even disrupt the Bank's business continuity.

The systematic and structured implementation of Risk Management is expected to foster a risk-aware culture where every element within the Company recognizes the risks faced in achieving the Company's vision and objectives, enabling them to prepare mitigation steps by optimally utilizing available resources.

Implementation of Corporate Social Responsibility

The active participation of the Company in carrying out social and environmental responsibility obligations executed professionally, by carrying out activities through planned programs. The implementation of corporate social and environmental responsibility activities is a manifestation of the Bank's participation and concern in supporting government programs, the community, and the Bank's working environment. These activities are carried out in the form of corporate philanthropy programs, community development, entrepreneurship development, value chain reengineering, and corporate societal marketing, Bank Sulteng's partnership program which is a sustainable economic development program aimed at improving the quality of life and a sustainable environment.

Bank Sulteng has established programs that fall within the scope of corporate social responsibility implementation, which are also aligned with the intent and purpose of carrying out social responsibility activities within the Company. The formulation of programs in this work plan is carried out by paying attention to the areas around the company's operations by analyzing the needs and the impacts obtained from the results of mapping the needs. In 2025, Corporate Social Responsibility (CSR) programs are designated according to the conditions of each region spread across Central Sulawesi Province, outlining the program focus on activities in the fields of education, social affairs, health, arts and culture, sports, Environment and Nature, and public facilities.

The allocation of Corporate Social Responsibility funds for 2025 is determined by the GMS, where the source of expense is from the current year's profit and is provisioned every month. In 2025, Bank Sulteng has allocated a budget for the implementation of corporate social responsibility programs amounting to Rp18,975 million, which is divided into 2 (two) clusters, namely

kluster yaitu dikelola oleh Bank Sulteng sebesar Rp.4.127 juta dan dikelola oleh Pemegang Saham Bank Sulteng sebesar Rp.14.847 juta. Penyisihan anggaran untuk kegiatan dan program-program CSR tersebut tidak memiliki dampak yang material bagi Perusahaan, anggaran untuk pelaksanaan program CSR berasal dari pembebanan laba yang diputuskan oleh RUPS.

Dalam pelaksanaannya penggunaan dan pemberian dana CSR bersifat layak, patut, wajar, sesuai kemampuan Bank dan anggaran yang tersedia. Pengelolaan dana CSR dikelola secara akuntabilitas, transparansi, berperilaku etis, memperhatikan *stakeholder*, mematuhi hukum, menghormati perilaku norma-norma masyarakat, menghargai hak asasi manusia dan penuh kehati-hatian dan berdasarkan pada azas manfaat dan tepat guna bagi masyarakat luas serta prinsip *good corporate governance*.

Bank Sulteng meyakini bahwa pelaksanaan program tanggung jawab sosial yang terencana telah memberi manfaat dan dampak positif bagi Perusahaan antara lain meningkatnya citra Perusahaan, penguatan daya saing, pengamanan aset dan terciptanya harmonisasi Perusahaan dengan masyarakat.

Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran Perusahaan

Bank Sulteng mengembangakan Sistem Pelaporan Pelanggaran Perusahaan (*Whistleblowing System*) yang merupakan media pelaporan untuk menyampaikan adanya dugaan atau kejadian yang berhubungan dengan tindakan kecurangan (*fraud*), pelanggaran hukum, peraturan Perusahaan, kode etik, gratifikasi dan benturan kepentingan yang dilakukan oleh pihak internal Bank. Melalui penerapan *Whistleblowing System* memungkinkan pihak internal dan eksternal Perusahaan melaporkan dugaan pelanggaran melalui media resmi dengan mudah dan nyaman dan terlindungi.

Keberadaan *Whistleblowing System* diharapkan dapat mencegah dan mendeteksi potensi terjadinya pelanggaran di Perusahaan yaitu tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) serta sebagai upaya meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan.

Bank melakukan evaluasi secara berkesinambungan terhadap penerapan *whistleblowing system* untuk mengetahui efektivitas dari program implementasi yang dijalankan dan untuk melihat sejauhmana kesesuaian Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran dengan kebutuhan Perusahaan. Kebijakan yang mendukung penerapan *whistleblowing system* semakin diperkuat, peningkatan pemahaman

managed by Bank Sulteng amounting to Rp4,127 million and managed by the Shareholders of Bank Sulteng amounting to Rp14,847 million. The budget provisioning for these CSR activities and programs does not have a material impact on the Company; the budget for the implementation of CSR programs originates from profit charging decided by the GMS.

In its implementation, the use and provision of CSR funds are appropriate, proper, reasonable, and in accordance with the Bank's capabilities and available budget. The management of CSR funds is managed with accountability, transparency, ethical behavior, observing stakeholders, complying with the law, respecting the behavior of community norms, respecting human rights, and full prudence, and is based on the principles of benefit and appropriateness for the wider community as well as good corporate governance principles.

Bank Sulteng believes that the implementation of planned social responsibility programs has provided benefits and positive impacts for the Company, including an improved Company image, strengthened competitiveness, asset protection, and the creation of Company harmonization with the community.

Implementation of the Corporate Whistleblowing System

Bank Sulteng developed a Corporate Whistleblowing System, which is a reporting medium to communicate any allegations or incidents related to acts of fraud, legal violations, company regulations, code of ethics, gratification, and conflicts of interest committed by internal parties of the Bank. Through the implementation of the Whistleblowing System, it allows internal and external parties of the Company to report alleged violations through official media easily, comfortably, and protectedly.

The existence of the Whistleblowing System is expected to prevent and detect potential violations within the Company, namely the availability of an early warning system mechanism and as an effort to improve the effectiveness of the control system implementation by focusing on disclosures from complaints.

The Bank continuously evaluates the implementation of the whistleblowing system to determine the effectiveness of the implemented program and to see the extent of the conformity of the Whistleblowing System Guidelines with the Company's needs. Policies supporting the implementation of the whistleblowing system are increasingly strengthened, and the enhancement of understanding regarding

mengenai *whistleblowing system* terus ditingkatkan melalui sosialisasi kapada seluruh Insan Perusahaan dan juga pemangku kepentingan. Demikian juga sarana dan prasarana pendukung terus diperbaharui salah satunya kemudahan untuk menyampaikan laporan melalui fitur yang secara khusus disediakan dalam *website* Perusahaan.

Sampai akhir tahun 2025, terdapat 4 jumlah pengaduan yang disampaikan melalui sarana *Whistleblowing System*. Penanganan atas laporan yang disampaikan oleh *whistleblower* akan ditindaklanjuti hingga tuntas hingga ada pemberian sanksi apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Penilaian Kinerja Komite Dan Satuan Kerja Di Bawah Direksi

Dalam menjalankan Perusahaan, Direksi dibantu oleh Satuan-Satuan Kerja sesuai analisa dan kebutuhan Perusahaan serta dibantu oleh Komite-Komite Direksi yang bertugas untuk memperkuat tata kelola dan efektivitas pengendalian internal Perusahaan dan dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi pengurusan yang dijalankan oleh Direksi.

Direksi membentuk satuan-satuan kerja termasuk komite-komite untuk membantu Direksi dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan Perusahaan dan membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan strategis serta melakukan evaluasi atas implementasi kebijakan strategis tersebut. Pembentukan satuan kerja yang ada saat ini sesuai dengan kebutuhan seperti yang tergambar dalam struktur organisasi, sedangkan komite yang dibentuk Direksi terdiri, yaitu Komite *Asset Liability Committee* (ALCO), Komite Kredit, Komite Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko dan Komite Sumber Daya Manusia.

Untuk memastikan keberadaan satuan kerja dan komite tersebut memberi kontribusi pada pencapaian kinerja Perusahaan, Direksi menetapkan sistem penilaian kinerja bagi satuan kerja dan komite di bawah Direksi yang digunakan sebagai bentuk evaluasi serta digunakan sebagai dasar pemberian *reward and punishment* atas capaian kinerja berdasarkan penetapan target kinerja dengan asumsi dan analisa yang realistis.

Direksi menilai kinerja satuan kerja dan komite-komite tersebut berdasarkan sistem penilaian kinerja yang ditetapkan. Keberadaan satuan kerja dan komite tersebut dinilai secara berkala oleh Direksi yang dilakukan secara adil dan transparan dengan menggunakan indikator kinerja kunci dan dengan mempertimbangkan aspek yang relevan, dapat

the whistleblowing system continues to be improved through socialization to all Company Personnel and also stakeholders. Similarly, supporting facilities and infrastructure continue to be updated, one of which is the ease of submitting reports through a feature specifically provided on the Company's website.

Until the end of 2025, there were 4 complaints submitted through the Whistleblowing System facility. The handling of reports submitted by whistleblowers will be followed up completely until sanctions are given if proven to have committed a violation.

Performance Assessment of Committees and Work Units Under the Board of Directors

In running the Company, the Board of Directors is assisted by Work Units according to the Company's analysis and needs, and is assisted by Board of Directors Committees tasked with strengthening the governance and effectiveness of the Company's internal controls and in the context of supporting the effectiveness of the execution of the management functions carried out by the Board of Directors.

The Board of Directors formed work units, including committees, to assist the Board of Directors in carrying out its duties to achieve the Company's goals and assist the Board of Directors in formulating strategic policies and evaluating the implementation of these strategic policies.The formation of the current work units is in accordance with the needs as illustrated in the organizational structure, while the committees formed by the Board of Directors consist of the Asset Liability Committee (ALCO), Credit Committee, Information Technology Committee, Risk Management Committee, and Human Resources Committee.

To ensure the existence of these work units and committees contributes to the achievement of the Company's performance, the Board of Directors established a performance assessment system for the work units and committees under the Board of Directors, which is used as a form of evaluation and serves as a basis for providing reward and punishment for performance achievements based on the setting of performance targets with realistic assumptions and analyses.

The Board of Directors assesses the performance of these work units and committees based on the established performance assessment system. The existence of these work units and committees is assessed periodically by the Board of Directors, conducted fairly and transparently using key performance indicators and taking into account

diukur, dapat diperbandingkan, komprehensif dan wajar. Penilaian dilakukan berdasarkan kriteria yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang mencakup aspek struktur, perencanaan, operasional, pelaporan, dan realisasi atas program kerja tahunan yang dibuat. Berdasarkan hasil penilaian, secara umum satuan kerja dan komite yang ada tersebut telah bekerja secara profesional dan memberikan dukungan yang signifikan dalam pelaksanaan tugas untuk pencapaian kinerja Perusahaan secara keseluruhan serta untuk mencapai tujuan Perusahaan.

aspects that are relevant, measurable, comparable, comprehensive, and reasonable. The assessment is carried out based on criteria related to the execution of duties and responsibilities that cover structural, planning, operational, reporting aspects, and realization of the annual work programs created. Based on the assessment results, in general, the existing work units and committees have worked professionally and provided significant support in the execution of tasks for the achievement of overall Company performance and to achieve the Company's goals.

Perubahan Susunan Dan Komposisi Anggota Direksi

Sepanjang Tahun 2025, susunan dan komposisi Direksi masih tetap sama dan tidak terjadi perubahan, yaitu:

- Hj. Ramiyatie sebagai Direktur Utama
- Myrna Rianasari sebagai Direktur Bisnis
- Judy Koagow sebagai Direktur Kepatuhan

Adapun susunan dan komposisi anggota Direksi Bank Sulteng berdasarkan akta penunjukan dan periode jabatan per 31 Desember 2025, sebagai berikut:

Changes in the Structure and Composition of the Board of Directors Members

Throughout 2025, the structure and composition of the Board of Directors remained the same and there were no changes, namely:

- Hj. Ramiyatie as President Director
- Myrna Rianasari as Director of Business
- Judy Koagow as Director of Compliance

The structure and composition of the Board of Directors members of Bank Sulteng based on the deed of appointment and term of office as of December 31, 2025, are as follows:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Akta Penunjukan** Deed of Appointment	**Periode Jabatan** Term of Office
Hj. Ramiyatie	Direktur Utama President Director	Akta Berita Acara RUPSLB No. 23 tanggal 12 Februari 2024 Deed of EGMS Minutes No. 23 dated February 12, 2024 SK Gubernur Sulawesi Tengah Selaku PSP No. 900.1.13.2/36/RO-EKON-G.ST/2024 Decree of the Governor of Central Sulawesi as PSP No. 900.1.13.2/36/RO-EKON-G.ST/2024	2024-2028
Myrna Rianasari	Direktur Bisnis Business Director	Akta Berita Acara RUPSLB No. 16 tanggal 14 Maret 2023 Deed of Minutes of EGMS No. 16 dated March 14, 2023 SK Gubernur Sulawesi Tengah Selaku PSP No. 002/SK/RUPSLB-ST/III/2023 Decree of the Governor of Central Sulawesi as PSP No. 002/SK/RUPSLB-ST/III/2023	2022-2026
Judy Koagow	Direktur Kepatuhan Compliance Director	Akta Berita Acara RUPSLB No. 53 tanggal 29 Mei 2023 (Periode Kedua) Deed of EGMS Minutes No. 53 dated May 29, 2023 (Second Period) SK Gubernur Sulawesi Tengah Selaku PSP 900.1.13.2/37/RO.EKON-G.ST.2024 Decree of the Governor of Central Sulawesi as PSP 900.1.13.2/37/RO.EKON-G.ST.2024	2024-2028

Penutup

Laporan tahunan ini merupakan bagian dari penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik khususnya penerapan pada aspek transparansi. Komitmen Bank untuk senantiasa menyediakan dan menyampaikan informasi secara terbuka dalam pengelolaan Perusahaan baik terkait aspek keuangan maupun operasional kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam rangka terus membangun kepercayaan dan kredibilitas Bank serta menjamin akuntabilitas manajemen.

Akhir kata, Direksi menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang tinggi kepada Pemegang Saham atas dukungan dan arahan serta kepercayaan yang diberikan selama ini kepada Perusahaan serta mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Dewan Komisaris yang merupakan *partner* utama dengan berbagi tugas dan tanggung jawab dalam mengurus Perusahaan untuk mencapai tujuan Perusahaan. Secara khusus Direksi menyampaikan apresiasi kepada Pegawai atas dedikasi dan kerja keras dalam upaya mencapai target kinerja Perusahaan serta untuk mencapai tujuan dan sasaran Perusahaan melalui berbagai terobosan dan inovasi yang dilakukan secara berkesinambungan.

Ucapan terimakasih tak terhingga juga disampaikan kepada nasabah yang merupakan mitra utama Bank serta pemangku kepentingan lainnya atas kerjasama dan kepercayaan yang telah diberikan selama ini.

Semoga dengan pencapain kinerja pada tahun 2025 akan menjadi motivasi untuk pencapaian dan peningkatan kinerja yang lebih baik di tahun-tahun yang akan datang. Semoga Allah SWT meridhai kerja keras kita semua sehingga Perusahaan semakin tumbuh dan berkembang serta memberi nilai tambah yang berkelanjutan kepada Pemegang saham dan masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Closing

This annual report is part of the application of good corporate governance principles, especially the application of the transparency aspect. The Bank's commitment to constantly provide and convey information openly in the management of the Company, both regarding financial and operational aspects, to shareholders and stakeholders in order to continuously build the Bank's trust and credibility as well as guarantee management accountability.

Finally, the Board of Directors expresses its gratitude and high appreciation to the Shareholders for the support, guidance, and trust bestowed upon the Company thus far, and expresses its gratitude and high appreciation to the Board of Commissioners who is the main partner in sharing duties and responsibilities in managing the Company to achieve the Company's goals. Specifically, the Board of Directors extends its appreciation to the Employees for their dedication and hard work in the effort to achieve the Company's performance targets and to achieve the Company's aims and objectives through various continuous breakthroughs and innovations.

Infinite gratitude is also conveyed to customers who are the Bank's main partners as well as other stakeholders for the cooperation and trust granted so far.

Hopefully, the performance achievements in 2025 will serve as motivation for achieving and improving even better performance in the years to come. May Allah SWT bless all our hard work so that the Company continues to grow and develop, and provides sustainable added value to the Shareholders and the people of Central Sulawesi in general.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palu, 01 April 2026
Palu, April 01, 2026
Atas nama Dewan Direksi
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah
On behalf of Board of Director
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah



Hj. Ramiyatie
Direktur Utama
President Director

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS LAPORAN TAHUNAN 2025
ACCOUNTABILITY STATEMENT FOR THE 2025 ANNUAL REPORT

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2025 PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah
Statement Letter of the Board of Commissioners and Board of Directors on Responsibility for the 2025 Annual Report of PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Tahun 2025 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, hereby declare that all information contained in the 2025 Annual Report of PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah has been fully disclosed, and we assume full responsibility for the accuracy of the contents of the Annual Report and the Company's Financial Statements.

This statement is made truthfully.

Palu, 01 April 2026
Palu, April 01, 2026

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Novi V.B. Kaligis



Komisaris Independen
Independent Commissioner

Max Kembuan



Komisaris Non Independen
Non-Independent Commissioner

Direksi
Board of Directors

Hj. Ramiyatie



Direktur Utama
President Director

Myrna Rianasari



Direktur Bisnis
Business Director

Judy Koagow



Direktur Kepatuhan
Compliance Director



Profil Perusahaan
Company Profile



IDENTITAS PERUSAHAAN
CORPORATE IDENTITY

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, yang secara luas dikenal sebagai Bank Sulteng, merupakan institusi perbankan yang berdedikasi tinggi dalam menyediakan jasa layanan keuangan berkualitas di wilayah Sulawesi Tengah. Berdiri kokoh sebagai Perseroan Terbatas (PT) sejak 1 April 1969, kami terus bertransformasi menjadi pilar ekonomi daerah yang terpercaya. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, widely known as Bank Sulteng, is a highly dedicated banking institution providing quality financial services in the Central Sulawesi region. Established firmly as a Limited Liability Company (Perseroan Terbatas/ PT) since April 1, 1969, we continue to transform into a trusted regional economic pillar. The details are as follows:



Nama Perusahaan : PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah
Legal Company Name : PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah

- Nama Panggilan : Bank Sulteng
  Company Name : Bank of Central Sulawesi
- Bidang Usaha : Jasa Perbankan
  Line of Business : Banking Services
- Status Perusahaan : Perseroan Terbatas (PT)
  Company Status : Limited Liability Company (LLC)
- Tanggal Pendirian : 1 April 1969
  Date of Establishment : April 1, 1969



Dasar Hukum Pendirian

Eksistensi Bank Sulteng dibangun di atas landasan hukum yang kuat dan transparan. Perjalanan kami dimulai melalui Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1966 dan diperkuat dengan izin operasional dari Menteri Keuangan RI pada tahun 1970. Dalam semangat modernisasi, Bank Sulteng melakukan pembaruan bentuk hukum melalui Perda No. 2 Tahun 1999, serta terus menjaga kepatuhan regulasi melalui pengesahan terbaru dari Menteri Hukum dan HAM RI pada Januari 2025. Berikut ini adalah landasan hukum selengkapnya:

- **Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 6 tahun 1966:** Mengenai pendirian Bank Pembangunan Daerah.
- **Surat Izin Menteri Keuangan RI No. D.15.6.1.17:** Ditetapkan pada tanggal 27 Januari 1970.
- **Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 2 tahun 1999:** Ditetapkan tanggal 30 Maret 1999 mengenai perubahan bentuk hukum BPD Sulawesi Tengah.
- **Akta No. 23:** Dibuat pada 30 April 1999 oleh Notaris Anand Umar Adnan SH di Palu mengenai pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah.
- **Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C-12841. HT.01.01 TH.99:** Ditetapkan pada 12 Juli 1999.
- **Akta No. 28:** Dibuat pada 20 Januari 2025 oleh Notaris/PPAT Farid, SH mengenai pernyataan keputusan rapat RUPS-LB.
- **Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0016111.AH.01.11. :** Ditetapkan pada 31 Januari 2025.

Legal Basis of Establishment

Bank Sulteng's existence is built upon a strong and transparent legal foundation. Our journey began through Regional Regulation No. 6 of 1966 and was reinforced by an operational license from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in 1970. Embracing modernization, Bank Sulteng updated its legal entity form through Regional Regulation No. 2 of 1999, and continues to maintain regulatory compliance through the latest ratification from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in January 2025. The comprehensive legal basis is as follows:

- **Central Sulawesi Provincial Regional Regulation No. 6 of 1966:** Regarding the establishment of the Regional Development Bank.
- **License Letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. D.15.6.1.17:** Promulgated on January 27, 1970.
- **Central Sulawesi Provincial Regional Regulation No. 2 of 1999:** Promulgated on March 30, 1999, regarding the change of legal entity form of BPD Sulawesi Tengah.
- **Deed No. 23:** Executed on April 30, 1999, by Notary Anand Umar Adnan, SH in Palu, regarding the establishment of PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah.
- **Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. C-12841.HT.01.01 TH.99:** Promulgated on July 12, 1999.
- **Deed No. 28:** Executed on January 20, 2025, by Notary/ Land Deed Official (PPAT) Farid, SH regarding the statement of the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS).
- **Ratification by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0016111.AH.01.11.:** Promulgated on January 31, 2025.

Kepemilikan Saham

Bank Sulteng dikelola dengan struktur kepemilikan saham yang kokoh, terdiri dari :

- **Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah** | Provincial Government of Central Sulawesi **30,64%**
- **13 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah** | 13 Regency/Municipal Governments across Central Sulawesi **43,36%**
- **Badan Usaha Nasional** | National Business Entities **26,00%**

Share Ownership

Bank Sulteng is managed under a robust share ownership structure, consisting of:





Jaringan Kantor & SDM | Office Network & HR

- **Kantor Pusat** | Head Office: **1**
- **Kantor Cabang Utama** | Main Branch Office: **1**
- **Kantor Cabang** | Branch Office: **14**
- **Kantor Cabang Pembantu** | Sub-Branch Office: **11**
- **Kantor Cabang Pembantu (Layanan Kas)** | Sub-Branch Office (Cash Service)Office: **14**
- *Payment Point*: **42**
- **Kas Mobil Keliling** | Mobile Cash Unit: **1**
- ATM: **143**
- **Jumlah Karyawan** | Total Employees: **744**



Informasi Kontak | Contact Information

- **Alamat Kantor Pusat** | Head Office Address: Jl. Sultan Hasanuddin No. 20, Palu, Sulawesi Tengah - 94112.
- **Telepon** | Telephone: (+62-451) 424537, (+62-451) 429509.
- **Fax** | Facsimile: (+62-451) 452836.
- **Sekretaris Perusahaan** | Corporate Secretary: Pth. I Gusti P. Suartika.
- *Email*: corsec@banksulteng.co.id.
- **Situs Web** | Website: http://www.banksulteng.co.id/.
- **Media Sosial** | Social Media: @banksulteng (Instagram & Facebook).
- *Call Center* : 14069
- *Contact Address Corporate Secretary*: corsec@banksulteng.co.id

BRAND PERUSAHAAN DAN FILOSOFI LOGO BANK
COMPANY BRAND AND BANK LOGO PHILOSOPHY

Bank Sulteng mengusung identitas visual yang mencerminkan harmoni antara nilai tradisional Sulawesi Tengah dengan visi perbankan modern yang progresif.

Bank Sulteng carries a visual identity that reflects the harmony between the traditional values of Central Sulawesi and the vision of progressive modern banking.

Warna Tosca
Turqoise Color

(Inovasi & Kesegaran): Warna Tosca melambangkan keseimbangan, ketenangan, dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Warna ini merepresentasikan adaptabilitas Bank Sulteng dalam merangkul inovasi digital dan semangat baru untuk terus berkembang di era modern.

(Innovation & Freshness): The color tosca symbolizes balance, tranquility, and sustainable business growth. This color represents Bank Sulteng's adaptability in embracing digital innovation and a renewed spirit to continuously evolve in the modern financial era.

Warna Kuning
Yellow Color

(Kesejahteraan & Keagungan): Melambangkan kemakmuran, kemandirian, dan semangat keagungan budi. Warna ini mencerminkan tekad Bank Sulteng dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang membawa kemuliaan dan kesejahteraan bagi seluruh pemangku kepentingan.

(Prosperity & Majesty): Symbolizes economic prosperity, financial independence, and a spirit of noble character. This color reflects Bank Sulteng's determination to accelerate economic growth, driving honor and prosperity for all stakeholders.

Bank Sulteng

Warna Biru
Blue Color

(Loyalitas & Profesionalisme): Warna ini merepresentasikan kedalaman komitmen kami terhadap integritas dan kepercayaan nasabah. Biru melambangkan profesionalisme tinggi sebagai pilar perbankan daerah yang andal, setia melayani tanah air dan cita-cita luhur masyarakat Sulawesi Tengah.

(Loyalty & Professionalism): This color represents the depth of our commitment to corporate integrity and customer trust. Blue symbolizes high professionalism as the core pillar of a reliable regional bank, faithfully serving the nation and the noble aspirations of the people of Central Sulawesi.

Pohon Kelapa
Coconut Trees

Diimplementasikan dalam bentuk daun kelapa yang sederhana namun ikonik, simbol ini mencerminkan fleksibilitas dan daya tahan perusahaan dalam menghadapi dinamika pasar, sekaligus menghargai kekayaan alam daerah.

Implemented in the form of a simple yet iconic coconut leaf, this symbol reflects the corporate flexibility and resilience in navigating market dynamics, while honoring the region's natural wealth.



Kapas
Cotton

Melambangkan karakter pelayanan yang ringan, fleksibel, namun tetap kuat. Kapas merepresentasikan keramah-tamahan, kenyamanan layanan, dan dedikasi kami dalam menjaga hubungan yang harmonis dengan nasabah.

Symbolizes a service character that is agile and flexible, yet remains structurally robust. Cotton represents hospitality, service convenience, and our dedication to maintaining harmonious relationships with our clientele.

Kedua elemen ini mencerminkan juga Kebinekaan dalam mewujudkan kebersamaan dan kemitraan yang berkelanjutan serta mempresentasikan Budaya Etnis Sulawesi Tengah.

These two elements also reflect diversity in realizing togetherness and sustainable partnerships. As well as representing the Ethnic Culture of Central Sulawesi.

AKSES TERHADAP PERUSAHAAN TERMASUK KANTOR CABANG ATAU KANTOR PERWAKILAN

ACCESS TO THE COMPANY INCLUDING BRANCH OR REPRESENTATIVE OFFICES

No.	Kantor Office	Alamat Address
1	Kantor Pusat Head Office	Jl. Sultan Hasanuddin No. 20, Kota Palu
2	Kantor Cabang Utama Main Branch Office	Jl. Sultan Hasanuddin No. 20, Kota Palu
3	Kantor Cabang Jakarta Jakarta Branch Office	Thamrin Residence Office Park, Blok RC-03, Kel.Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat
4	Kantor Cabang Poso Poso Branch Office	Jl. P. Sumatera No. 01, Kel. Gebangrejo, Kec. Poso Kota, Kabupaten Poso
5	Kantor Cabang Luwuk Luwuk Branch Office	Jl. Ahmad Yani No. 146, Luwuk
6	Kantor Cabang Bungku Bungku Branch Office	Jl. Trans Sulawesi, Desa Bente, Kec. Bungku Tengah, Kabupaten Morowali
7	Kantor Cabang Salakan Salakan Branch Office	Jl. KRI Imam Bonjol No. 48, Kel. Salakan, Kec. Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan
8	Kantor Cabang Sigi Sigi Branch Office	Jl. Guru Tua, Desa Kalulubula, Kec. Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi
9	Kantor Cabang Palu Barat West Palu Branch Office	Jl. I Gusti Ngurah Rai Palu No. 9A & 9B Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu
10	Kantor Cabang Donggala Donggala Branch Office	Jl. Kemakmuran No. 50 A, Kel Boya, Kec. Banawa, Kabupaten Donggala
11	Kantor Cabang Parigi Parigi Branch Office	Jl. Trans Sulawesi No.150, Kec. Parigi, Kabupaten Parigi Moutong
12	Kantor Cabang Ampana Ampana Branch Office	Jl. Pulau Talatako No. 05 Kel. Uentanaga Atas, Kec. Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una
13	Kantor Cabang Tolitoli Tolitoli Branch Office	Jl. Sultan Hasanuddin No. 53, Kec. Baolan, Kabupaten Tolitoli
14	Kantor Cabang Buol Buol Branch Office	Jl. Batalipu No. 50, Kabupaten Buol
15	Kantor Cabang Kolonedale Colonedale Branch Office	Jl. Tadulako Kel. Kolonodale, Kec. Petasia, Kabupaten Morowali Utara
16	Kantor Cabang Banggai Laut Banggai Laut Branch Office	Jl. Jogugu Zakaria, Desa Lampa, Kec. Banggai, Kabupaten Banggai Laut
17	Kantor Cabang Pembantu Tolai Tolai Sub-Branch Office	Jl. Trans Sulawesi, Desa Tolai, Kec. Torue, Kabupaten Parigi Moutong
18	Kantor Cabang Pembantu Tinombo Tinombo Sub-Branch Office	Jl. Trans Sulawesi, Desa Siavu, Kec. Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong
19	Kantor Cabang Pembantu Paleleh Paleleh Sub-Branch Office	Jl. Tadulako No. 03, Kec. Paleleh
20	Kantor Cabang Pembantu Tentena Tentena Sub-Branch Office	Jl. Setia Budi, Kel. Sangele, Kec. Pamona Puselemba, Kabupaten Poso
21	Kantor Cabang Pembantu Beteleme Beteleme Sub-Branch Office	Jl. Trans Sulawesi, Desa Beteleme, Kec. Lembo, Kabupaten Morowali Utara
22	Kantor Cabang Pembantu Toili Toili Sub-Branch Office	Jl. Tadulako No. 8, Unit 11, Desa Tirta Kencana, Kec. Toili, Kabupaten Banggai
23	Kantor Cabang Pembantu Tawaeli Tawaeli Sub-Branch Office	Jl. Baiya Raya Trans Sulawesi, Kel. Baiya, Kec. Tawaeli, Kota Palu
24	Kantor Cabang Pembantu Bohodopi Bohodopi Sub-branch Office	Jl. Trans Sulawesi, Desa Keurea, Kec Bahodopi, Kab Morowali
25	Kantor Cabang Pembantu Soni Soni Sub-Branch Office	Jl. Trans Sulawesi, Desa Soni, Kec. Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli
26	Kantor Cabang Pembantu Labean Labean Sub-Branch Office	Jl. Trans Sulawesi, Desa Labean, Kec. Balaesang, Kab. Donggala
27	Kantor Cabang Pembantu Tinombala Tinombala Sub-Branch Office	Jl. Gunung Tinombala No.1, Kel. Talise Valangguni, Kec. Mantikulore, Kota Palu.
28	Kantor Cabang Pembantu Lambunu (Layanan Kas) Lambunu Sub-branch Office (Cash Service)	Jl. Trans Sulawesi, Desa Anutapura, Kec. Bolano Lambunu, Kab. Parigi Moutong
29	Kantor Cabang Pembantu Wakai (Layanan Kas) Wakai Sub-branch Office (Cash Services)	Jl. Tadulako, Desa Wakai, Kec. Una-Una, Kab. Tojo Una-Una
30	Kantor Cabang Pembantu Bahomotefe (Layanan Kas) Bahomotefe Sub-Branch Office (Cash Services)	Jl. Trans Sulawesi, Desa Bahomotefe, Kec. Bungku Timur, Kab. Morowali

No.	Kantor Office	Alamat Address
31	Kantor Cabang Pembantu Baturube (Layanan Kas) Baturube Sub-branch Office (Cash Services)	Jl. Durian No. 6, Desa Baturube Kec. Bungku Utara, Kab. Morowali
32	Kantor Cabang Pembantu Batui (Layanan Kas) Batui Sub-branch Office (Cash Services)	Jl. Trans Sulawesi Sisipan Batui, Kec. Baitu, Kab. Banggai
33	Kantor Cabang Pembantu Tomata (Layanan Kas) Tomata Sub-branch Office (Cash Services)	Jl. Trans Sulawesi, Desa Tomata, Kec. Mori Atas, Kab. Morowali Utara
34	Kantor Cabang Pembantu Mamosalato (Layanan Kas) Mamosalato Sub-branch Office (Cash Services)	Jl. Trans Sulawesi, Kompleks Pasar, Desa Tanasumpu, Kec. Mamosalato, Kab. Morowali Utara
35	Kantor Cabang Pembantu Pendolo (Layanan Kas) Pendolo Sub-branch Office (Cash Services)	Jl. Trans Sulawesi, Desa Pendolo, Kec. Pamona Selatan, Kab. Poso
36	Kantor Cabang Pembantu Kulawi (Layanan Kas) Kulawi Sub-Branch Office (Cash Services)	Desa Bolopapu, Dusun Pobia, RT.1/RW.1, Kec. Kulawi, Kabupaten Sigi
37	Kantor Cabang Pembantu Napu (Layanan Kas) Napu Sub-branch Office (Cash Services)	Jl. Pramuka, Desa Wuasa, Kec. Lore Utara, Kabupaten Poso
38	Kantor Cabang Pembantu Kotaraya (Layanan Kas) Kotaraya Sub-branch Office (Cash Services)	Jl. Ki Hajar Dewantara, Desa Kotaraya Barat, Kec. Mepanga, Kab. Parigi Moutong
39	Kantor Cabang Pembantu Tambarana (Layanan Kas) Tambarana Sub-branch Office (Cash Service)	Jl. Poros Trans Sulawesi, Desa Tambarana, Kec. Poso Pesisir Utara, Kab. Poso
40	Kantor Cabang Pembantu Masama (Layanan Kas) Masama Sub-branch Office (Cash Service)	Jl. Trans Luwuk, Desa Padangon, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai
41	Kantor Cabang Pembantu Bunta (Layanan Kas) Bunta Sub-branch Office (Cash Service)	Jl. Trans Sulawesi Bunta Pagimana,Kel.Salabenda, Kec.Bunta, Kab.Banggai

Dalam upaya mengakselerasi inklusi keuangan di Provinsi Sulawesi Tengah dan ibu kota DKI Jakarta, Bank Sulteng mengoptimalkan sinergi berbagai kanal layanan operasional. Efisiensi transaksi nasabah didukung secara masif melalui 143 jaringan ATM yang tersebar strategis serta 42 unit payment point sebagai garda terdepan layanan administratif. Kehadiran unit Kas Mobil Keliling menjadi manifestasi nyata dari semangat kami untuk memberikan akses perbankan yang inklusif dan fleksibel bagi seluruh nasabah, di mana pun mereka berada.

To accelerate financial inclusion across Central Sulawesi Province and the capital city of DKI Jakarta, Bank Sulteng is optimizing the synergy across its diverse operational service channels. Customer transaction efficiency is robustly supported by a strategically distributed network of 143 ATMs, alongside 42 payment point units serving as the frontline for administrative services. The deployment of Mobile Cash units is a tangible manifestation of our commitment to providing inclusive and flexible banking access for all customers, regardless of their location.

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN
BRIEF COMPANY HISTORY



Eksistensi dan Fondasi Hukum Perjalanan historis PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (Bank Sulteng) berakar pada semangat pembangunan daerah berdasarkan UU No. 13 Tahun 1962. Fondasi ini diperkuat melalui komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan penerbitan Perda No. 6 Tahun 1966. Berbekal izin operasional dari Menteri Keuangan RI pada 27 Januari 1970, Bank Sulteng resmi memantapkan langkahnya sebagai institusi keuangan yang kredibel bagi masyarakat.

Evolusi Badan Hukum menuju Profesionalisme Seiring dinamika industri, pada tahun 1999, Bank Sulteng mengambil langkah strategis dengan mentransformasi bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Perubahan ini dikukuhkan melalui Akta Pendirian No. 23 Tahun 1999 dan telah mendapatkan pengesahan dari otoritas berwenang, termasuk persetujuan operasional dari Bank Indonesia pada 10 Desember 1999. Reformasi identitas ini merupakan titik balik bagi perusahaan untuk beroperasi secara lebih lincah dan profesional.

Semangat Inovasi dan Identitas Baru Optimisme perusahaan tercermin dalam semboyan "Maju, Harus Maju, Pasti Maju dan Maju Terus". Semangat ini pula

Existence and Legal Foundation. The historical journey of PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (Bank Sulteng) is rooted in the spirit of regional development based on Law No. 13 of 1962. This foundation was strengthened through the commitment of the Central Sulawesi Provincial Government with the issuance of Regional Regulation No. 6 of 1966. Armed with an operational license from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia on January 27, 1970, Bank Sulteng officially solidified its position as a credible financial institution for the public.

Evolution of Legal Entity Towards Professionalism. In line with industry dynamics, in 1999, Bank Sulteng took a strategic step by transforming its legal entity status from a Regional Enterprise (Perusahaan Daerah/PD) to a Limited Liability Company (Perseroan Terbatas/PT). This change was ratified through the Deed of Establishment No. 23 of 1999 and has received validation from the competent authorities, including operational approval from Bank Indonesia on December 10, 1999. This identity reform marked a turning point for the company to operate in a more agile and professional manner.

Spirit of Innovation and New Identity. The company's optimism is reflected in the motto "Maju, Harus Maju, Pasti Maju dan Maju Terus" (Forward, Must Move Forward,



yang melatarbelakangi penyegaran visual melalui perubahan logo pada tahun 2012, yang sekaligus memformalkan penyebutan nama merek menjadi Bank Sulteng. Langkah ini bukan sekadar perubahan citra, melainkan manifestasi dari sinergi dan kesiapan perusahaan dalam menghadapi tantangan perbankan masa depan.

Peningkatan kapasitas modal sebagai bentuk kepercayaan pemegang saham dan komitmen terhadap pertumbuhan yang progresif, struktur permodalan Bank Sulteng terus diperkuat secara signifikan. Bermula dari modal dasar sebesar Rp1 miliar pada awal berdiri, kini kapasitas permodalan perusahaan telah berkembang pesat menjadi Rp1,7 triliun berdasarkan ketetapan terbaru tahun 2020. Penguatan modal ini menjadi katalisator utama bagi Bank Sulteng untuk memperluas ekspansi bisnis dan meningkatkan ketahanan finansial di tahun-tahun mendatang.

Sebagai institusi yang terus bertransformasi, langkah strategis ini mencerminkan tingginya kepercayaan para pemegang saham serta kesiapan Bank dalam memperluas skala bisnis dan Perjalanan permodalan Bank Sulteng mencerminkan pertumbuhan yang progresif dan konsisten dalam memperkuat struktur keuangannya:

Certainly Move Forward, and Keep Moving Forward). This spirit also prompted the visual refreshment through a logo change in 2012, which simultaneously formalized the brand name as Bank Sulteng. This step is not merely a rebranding effort, but rather a manifestation of the company's synergy and readiness in facing the challenges of the future banking landscape.

Enhancement of Capital Capacity. As a form of shareholder trust and a commitment to progressive growth, Bank Sulteng's capital structure continues to be significantly strengthened. Starting from an authorized capital of Rp1 billion at its inception, the company's capital capacity has now rapidly expanded to Rp1.7 trillion based on the latest decree in 2020. This capital strengthening serves as a primary catalyst for Bank Sulteng to broaden its business expansion and enhance financial resilience in the coming years.

As an institution undergoing continuous transformation, this strategic move reflects the high level of trust from shareholders and the Bank's readiness to scale up its business. The capital journey of Bank Sulteng reflects progressive and consistent growth in solidifying its financial structure:

- Era Awal (1966–1982): Bank Sulteng mengawali kiprahnya dengan modal dasar Rp1 miliar pada tahun 1966. Meskipun sempat mengalami penyesuaian menjadi Rp100 juta pada tahun 1974, modal tersebut ditingkatkan kembali ke posisi Rp1 miliar pada tahun 1982.
- Fase Penguatan (1988–1993): Kapasitas permodalan terus ditingkatkan secara bertahap, mulai dari Rp5 miliar hingga mencapai angka Rp10 miliar di awal tahun 90-an.
- Transformasi Menjadi PT (1999–2009): Pasca perubahan status hukum menjadi Perseroan Terbatas (PT) pada tahun 1999, modal dasar melonjak menjadi Rp25 miliar dan terus tumbuh signifikan hingga menyentuh angka Rp200 miliar pada tahun 2009.
- Akselerasi Menuju Triliun (2011–2017): Dalam kurun waktu enam tahun, modal dasar mengalami peningkatan masif dari Rp490 miliar, kemudian Rp650 miliar, hingga akhirnya berhasil menembus angka Rp1 triliun pada tahun 2017.
- Posisi Saat Ini (2021): Sebagai bentuk komitmen pertumbuhan jangka panjang, peningkatan modal terakhir dilakukan pada Juni 2021, yang mengukuhkan modal dasar perusahaan pada angka Rp1,7 triliun.
- Posisi terbaru di tahun 2025 :
    - Terdapat pertumbuhan progresif pada pos Dana Setoran Modal (DSM) di Posisi 31 Desember 2025: sebesar Rp43.226.070.410.
    - Terjadi penambahan setoran modal tunai selama tahun 2025 sebesar Rp30.860.000.000 yang berasal dari 13 Pemerintah Kabupaten dan Kota di wilayah Sulawesi Tengah.
    - Strategis Modal Inti Rp3 Triliun Melalui sinergi dalam Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan PT Mega Corpora dan PT Bank Mega Tbk, Bank Sulteng memproyeksikan pencapaian target modal inti minimum sebesar Rp3 triliun. Langkah ini diambil untuk memastikan kemandirian masa depan Bank serta kepatuhan terhadap mandat konsolidasi perbankan.

Sebagai bagian dari upaya modernisasi organisasi dan peningkatan tata kelola perusahaan yang profesional, Bank Sulteng telah menuntaskan transformasi bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Langkah strategis ini merupakan wujud kesiapan Bank dalam menghadapi dinamika industri perbankan nasional yang semakin kompetitif.

- Early Era (1966–1982): Bank Sulteng commenced its operations with an authorized capital of Rp1 billion in 1966. Although it underwent an adjustment to Rp100 million in 1974, the capital was subsequently elevated back to Rp1 billion in 1982.

- Consolidation Phase (1988–1993): The capital capacity was continuously augmented in stages, starting from Rp5 billion to reaching Rp10 billion in the early 90s.
- Transformation into a Limited Liability Company (PT) (1999–2009): Following the change in legal status to a Limited Liability Company (PT) in 1999, the authorized capital surged to Rp25 billion and continued to grow significantly, reaching Rp200 billion in 2009.
- Acceleration Towards Trillions (2011–2017): Over a period of six years, the authorized capital experienced a massive increase from Rp490 billion, subsequently to Rp650 billion, until it ultimately breached the Rp1 trillion mark in 2017.
- Current Position (2021): As a commitment to long-term growth, the most recent capital increase was executed in June 2021, which cemented the company's authorized capital at Rp1.7 trillion.

- Latest Position in 2025:
    - There is progressive growth in the Capital Deposit Fund (DSM) position as of December 31, 2025: amounting to Rp43,226,070,410.
    - There was an addition of cash capital deposits during 2025 amounting to Rp30,860,000,000, originating from 13 Regency and City Governments within the Central Sulawesi region.
    - Rp3 Trillion Core Capital Strategy through synergy within the Bank Business Group (Kelompok Usaha Bank/KUB) alongside PT Mega Corpora and PT Bank Mega Tbk, Bank Sulteng projects the achievement of a minimum core capital target of Rp3 trillion. This measure is taken to ensure the Bank's future independence and compliance with banking consolidation mandates.

As part of the organizational modernization efforts and the enhancement of professional corporate governance, Bank Sulteng has completed its legal entity transformation from a Regional Enterprise (PD) to a Limited Liability Company (PT). This strategic step is a manifestation of the Bank's readiness to face the increasingly competitive dynamics of the national banking industry.

Proses transisi identitas hukum ini dilaksanakan secara akuntabel melalui landasan formal sebagai berikut:

- Legalisasi Notariil: Transformasi dikukuhkan melalui Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 23 tanggal 30 April 1999, yang disusun di hadapan Notaris Anand Umar Adnan, SH, di Palu. Melalui akta ini, nama perusahaan secara resmi ditetapkan menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, dengan penyebutan akronim yang kini dikenal luas sebagai Bank Sulteng.
- Pengesahan Pemerintah: Perubahan ini telah mendapatkan legalitas dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-12841 HT.01.01 TH 1999 tertanggal 12 Juli 1999.
- Publikasi Resmi: Identitas baru perusahaan telah diumumkan secara formal dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 69 pada tanggal 27 Agustus 1999.
- Persetujuan Regulator: Keabsahan operasional sebagai entitas perseroan terbatas disempurnakan dengan diterbitkannya izin dari Bank Indonesia melalui Surat Gubernur Bank Indonesia No. 1/29/KEP.GBI/1999 pada tanggal 10 Desember 1999.

Sejak awal transformasi hingga saat ini, Bank Sulteng senantiasa mempertahankan nama perusahaan tanpa perubahan. Konsistensi identitas ini merupakan refleksi dari integritas, stabilitas, dan komitmen jangka panjang Bank Sulteng dalam mengemban amanah sebagai mitra pembangunan daerah serta penyedia jasa keuangan terpercaya bagi masyarakat Sulawesi Tengah.

This legal identity transition process was executed accountably through the following formal foundations:

- Notarial Legalization: The transformation was formalized through the Deed of Establishment of a Limited Liability Company No. 23 dated April 30, 1999, drafted before Notary Anand Umar Adnan, SH, in Palu. Through this deed, the company's name was officially designated as PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, with the acronym widely recognized today as Bank Sulteng.
- Government Ratification: This amendment has obtained legality from the Minister of Justice of the Republic of Indonesia through Decree No. C-12841 HT.01.01 TH 1999 dated July 12, 1999.
- Official Publication: The company's new identity was formally announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia Supplement No. 69 on August 27, 1999.
- Regulatory Approval: The operational validity as a limited liability entity was perfected with the issuance of a license from Bank Indonesia through the Decree of the Governor of Bank Indonesia No. 1/29/KEP.GBI/1999 on December 10, 1999.

From the onset of the transformation up to the present, Bank Sulteng has consistently maintained its corporate name without any alterations. This identity consistency is a reflection of the integrity, stability, and long-term commitment of Bank Sulteng in carrying out its mandate as a regional development partner and a trusted financial service provider for the people of Central Sulawesi.



JEJAK LANGKAH PERUSAHAAN
MILESTONE

Sejarah Bank Sulteng merupakan manifestasi dari perjalanan panjang yang penuh dengan dedikasi, adaptabilitas, dan pertumbuhan yang terukur. Sejak awal pendiriannya, Bank senantiasa memperkuat fundamental organisasi untuk menjadi pilar utama dalam mendukung akselerasi ekonomi di wilayah Sulawesi Tengah.

1969

Peresmian berdirinya Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah pada 1 April 1969 dengan status Perusahaan Daerah (PD) dan modal dasar awal sebesar Rp1 miliar.

The official establishment of Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah on April 1, 1969, with the status of a Regional Enterprise (Perusahaan Daerah/ PD) and an initial authorized capital of Rp1 billion.

1970

Pengesahan operasional secara formal melalui izin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia pada 27 Januari 1970.

Obtained a business Formal operational ratification through a business license from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia on January 27, 1970.

1974

Penyesuaian struktur keuangan di mana modal dasar ditetapkan menjadi Rp100 juta berdasarkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 1974.

Financial structure adjustment where the authorized capital was set at Rp100 million based on Regional Regulation No. 13 of 1974.

1982

Penguatan kembali fundamental permodalan dengan peningkatan modal dasar menjadi Rp1 miliar.

Re-strengthening of capital fundamentals with an increase in authorized capital to Rp1 billion.

1988

Ekspansi kapasitas modal dasar perusahaan menjadi Rp5 miliar guna mendukung pertumbuhan bisnis perbankan di daerah.

Expansion of the company's authorized capital capacity to Rp5 billion to support the growth of the regional banking business.

1993

Peningkatan modal dasar secara berkelanjutan hingga mencapai angka Rp10 miliar.

Continuous enhancement of authorized capital, reaching the figure of Rp10 billion.

1999

Menjadi tonggak sejarah besar melalui transformasi bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) serta peningkatan modal dasar menjadi Rp25 miliar dan, perubahan nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, disingkat menjadi Bank Sulteng.

A major historical milestone through the transformation of the legal entity from a Regional Enterprise (PD) to a Limited Liability Company (PT), alongside an increase in authorized capital to Rp25 billion, and a name change to PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, abbreviated as Bank Sulteng.

2005

Penguatan struktur permodalan perseroan yang ditingkatkan menjadi Rp100 miliar.

Strengthening of the company's capital structure, which was elevated to Rp100 billion.

2009

Konsistensi pertumbuhan modal dasar yang kembali ditingkatkan mencapai angka Rp200 miliar.

Consistency in authorized capital growth, which was further increased to reach Rp200 billion.

2011

Pelaksanaan penyegaran identitas korporasi melalui perubahan logo dari Semboyan "Bank Sulteng Maju, Harus Maju, Pasti Maju dan Maju Terus" serta penyederhanaan nama resmi menjadi Bank Sulteng.

Implementation of corporate identity refreshment through a logo change, adopting the motto "Bank Sulteng Forward, Must Move Forward, Certainly Move Forward, and Keep Moving Forward", as well as the simplification of the official name to Bank Sulteng.

2012

Akselerasi modal dasar perusahaan secara signifikan hingga menyentuh angka Rp490.542.400.000.

Significant acceleration of the company's authorized capital, touching the figure of Rp490,542,400,000.

The history of Bank Sulteng is a manifestation of a long journey filled with dedication, adaptability, and measurable growth. Since its inception, the Bank has consistently strengthened its organizational fundamentals to become a primary pillar in supporting economic acceleration in the Central Sulawesi region

2015

Peningkatan modal dasar perseroan menjadi Rp650 miliar sebagai upaya memperkuat daya saing.

Enhancement of the company's authorized capital to Rp650 billion as an effort to strengthen competitiveness.

2017

Pencapaian milestone permodalan baru dengan peningkatan modal dasar menjadi Rp1 triliun.

Achievement of a new capital milestone with an increase in authorized capital to Rp1 trillion.

2020

Pemenuhan persyaratan modal inti yang tercatat mencapai Rp1,013 triliun, memenuhi kriteria sebagai Bank BUKU II.

Fulfillment of the core capital requirement, recorded at Rp1.013 trillion, meeting the criteria for a BUKU II Bank.

2021

Penyesuaian modal dasar perusahaan menjadi Rp1,7 triliun untuk mendukung ekspansi bisnis jangka panjang.

Adjustment of the company's authorized capital to Rp1.7 trillion to support long-term business expansion.

2022

Peningkatan status Kantor Fungsional Non Operasional (KFNO) di Jakarta menjadi Kantor Cabang serta pembukaan KCP Pendolo di Kabupaten Poso.

Upgrading the status of the Non-Operational Functional Office (KFNO) in Jakarta to a Branch Office, as well as the opening of the Pendolo Sub-Branch Office (KCP) in Poso Regency.

2023

Perluasan aksesibilitas nasabah dengan pembukaan Kantor Cabang Pembantu (Layanan Kas) di wilayah Napu Kabupaten Poso dan Kulawi di Kabupaten Sigi

Expansion of customer accessibility with the opening of Sub-Branch Offices (Cash Services) in the Napu area of Poso Regency and Kulawi in Sigi Regency.

2024

Ekspansi jaringan layanan melalui pembukaan Kantor Cabang Pembantu (KCP) di wilayah Tinombala, Kotaraya, dan Tambarana di kabupaten Poso

Service network expansion through the opening of Sub-Branch Offices (KCP) in the Tinombala, Kotaraya, and Tambarana areas within Poso Regency.

2025

- Sinergi Strategis Kelompok Usaha Bank (KUB) & Penguatan Modal guna memperkuat struktur permodalan dan optimalisasi transfer kapabilitas dalam ekosistem KUB Mega Corporation yang akan menjamin pertumbuhan bank yang stabil dan resilent.
- Akselerasi Digitalisasi melalui Peluncuran Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada Triwulan II/III 2025 sebagai solusi digitalisasi transaksi pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.
- Penambahan jaringan layanan melalui pembukaan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Layanan Kas Masama dan Bunta di wilayah Kabupaten Banggai.
- Strategic Synergy of the Bank Business Group (Kelompok Usaha Bank/KUB) & Capital Strengthening to fortify the capital structure and optimize capability transfers within the KUB Mega Corporation ecosystem, ensuring stable and resilient bank growth.
- Digitalization Acceleration through the Launch of the Indonesian Credit Card (Kartu Kredit Indonesia/KKI) in Q2/Q3 2025 as a digital solution for regional government transactions that is transparent, accountable, and regulatory compliant.
- Addition of service network through the opening of Masama and Bunta Cash Service Assistant Branch Offices (KCP) in Banggai Regency.

VISI, MISI PERUSAHAAN DAN BUDAYA PERUSAHAAN
VISION, MISSION AND CORPORATE CULTURE

Dalam menghadapi dinamika industri perbankan yang terus bertransformasi serta tuntutan digitalisasi layanan, Bank Sulteng senantiasa memperkuat arah strategis perusahaan. Seluruh elemen Visi dan Misi Bank Sulteng telah dirumuskan secara komprehensif dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) periode 2025-2027, yang telah mendapatkan persetujuan kolektif dari jajaran Direksi serta Dewan Komisaris.

In navigating the continuous transformation of banking industry dynamics and the demands for service digitalization, Bank Sulteng consistently strengthens the company's strategic direction. All elements of Bank Sulteng's Vision and Mission have been comprehensively formulated in the Bank Business Plan for the 2025-2027 period, which has obtained collective approval from the Board of Directors and the Board of Commissioners

Visi Perusahaan
Corporate Vision

Bank Sulteng berkomitmen untuk menjadi institusi perbankan yang resilien dan progresif melalui visi utama:

"Menjadi bank Terpercaya di Indonesia, Sehat, Maju Berkembang Berdaya Saing, Berteknologi Tepat Guna Serta Berkontribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah".

Bank Sulteng is committed to becoming a resilient and progressive banking institution through its primary vision:

"To become a trusted bank in Indonesia, healthy, advanced, competitive, technologically appropriate and contributing to the economic growth of Central Sulawesi".

Visi tersebut dijabarkan melalui enam pilar filosofis yang menjadi landasan operasional perusahaan:

This vision is elaborated through six philosophical pillars that serve as the foundation of the company's operations:

TERPERCAYA
TRUSTED

Membangun keyakinan publik atas eksistensi bank melalui dedikasi dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat secara berkelanjutan.
Building public confidence in the bank's existence through dedication to providing the best services to the community sustainably.

BERDAYA SAING
COMPETITIVE

Menghasilkan output produktivitas yang unggul guna memastikan Bank Sulteng tetap kompetitif di pasar keuangan.
Generating superior productivity output to ensure Bank Sulteng remains competitive in the financial market.

SEHAT
HEALTHY

Mewujudkan organisasi yang kuat secara fundamental, mencakup kesehatan finansial, fisik, rohani, dan sosial bagi seluruh insan yang menjalankan roda perusahaan.
Realizing a fundamentally strong organization, encompassing financial, physical, spiritual, and social health for all individuals driving the company.

BERTEKNOLOGI TEPAT GUNA
UTILIZING APPROPRIATE TECHNOLOGY

Mengimplementasikan teknologi inovatif yang adaptif terhadap aspek lingkungan, budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat.
Implementing innovative technology that is adaptive to the environmental, cultural, social, and economic aspects of the community.

MAJU
ADVANCED

Berkomitmen pada pertumbuhan yang progresif dan senantiasa bergerak ke depan berdasarkan target strategis yang telah ditetapkan.
Committing to progressive growth and continuously moving forward based on established strategic targets.

BERKONTRIBUSI
COMPETITIVE

Menjalankan peran aktif sebagai agen pembangunan untuk mencapai kesejahteraan bersama melalui sinergi kerja tim yang solid.
Playing an active role as an agent of development to achieve shared prosperity through solid teamwork synergy.

Misi Strategis Perusahaan
Corporate Strategic Mission

Dalam upaya mewujudkan visinya, Bank Sulteng menetapkan misi fundamental yang berfokus pada penguatan ekonomi daerah dan keunggulan operasional:

- Optimalisasi Layanan Perbankan: Menjalankan fungsi sebagai lembaga perbankan umum secara konvensional dengan standar kualitas terbaik.
- Akselerator Ekonomi Regional: Bertindak sebagai penggerak utama dalam memacu laju pertumbuhan ekonomi dan akselerasi pembangunan daerah.
- Mitra Strategis Pemerintah: Mengemban amanah sebagai pemegang kas daerah serta melaksanakan pengelolaan kas pemerintah daerah secara akuntabel.
- Kontributor Pendapatan Daerah: Menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang kontributif dan berkelanjutan.

In its endeavor to realize its vision, Bank Sulteng establishes a fundamental mission focused on strengthening the regional economy and achieving operational excellence:

- Optimization of Banking Services: Performing functions as a conventional commercial banking institution with the highest quality standards.
- Regional Economic Accelerator: Acting as a primary driver in stimulating the pace of economic growth and accelerating regional development.
- Government Strategic Partner: Fulfilling the mandate as the regional cash holder and executing regional government cash management accountably.
- Regional Revenue Contributor: Serving as a contributive and sustainable source of original regional revenue (PAD).

Secara manajerial, misi tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga fokus utama guna memastikan produktivitas operasional yang maksimal:

Managerially, this mission is classified into three primary focuses to ensure maximum operational productivity:

STAKEHOLDER **Menyelaraskan seluruh kepentingan pihak terkait dengan dukungan implementasi Tata Kelola Perusahaan (GCG) yang baik.**

Aligning all related parties' interests supported by the implementation of Good Corporate Governance (GCG).

PEOPLE **Mengembangkan talenta profesional yang berintegritas tinggi guna memberikan kontribusi optimal bagi perseroan dan pemangku kepentingan.**

Developing professional talents with high integrity to provide optimal contributions to the company and stakeholders.

OPERATION **Meningkatkan peran intermediasi bank dengan fokus pada pembiayaan usaha pembangunan daerah serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah.**

Enhancing the bank's intermediation role with a focus on financing regional development businesses and the effectiveness of regional financial management.

Budaya Perusahaan
Corporate Culture

Bank Sulteng meyakini bahwa tata kelola yang sehat harus didasarkan pada nilai-nilai etika dan budaya kerja yang kuat. Budaya perusahaan ini menjadi panduan perilaku bagi seluruh insan Bank Sulteng dalam menjalankan tugas keseharian:

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi secara berkelanjutan, Bank Sulteng menginternalisasi nilai-nilai budaya perusahaan ke dalam etos kerja seluruh insan perseroan. Nilai-nilai ini bukan sekadar landasan filosofis, melainkan panduan perilaku utama yang diimplementasikan dalam interaksi harian dengan seluruh pemangku kepentingan.

Bank Sulteng believes that sound governance must be based on strong ethical values and work culture. This corporate culture serves as a behavioral guideline for all Bank Sulteng personnel in carrying out their daily duties:

In an effort to realize the vision and mission sustainably, Bank Sulteng internalizes corporate cultural values into the work ethos of all company personnel. These values are not merely philosophical foundations, but rather primary behavioral guidelines implemented in daily interactions with all stakeholders.

Integritas
Integrity

Mengedepankan kejujuran dan konsistensi antara perkataan dan tindakan. Insan Bank Sulteng berkomitmen penuh untuk bekerja dengan tulus, berpegang teguh pada prinsip kebenaran, serta menjunjung tinggi kedisiplinan.

Prioritizing honesty and consistency between words and actions. Bank Sulteng personnel are fully committed to working sincerely, adhering strictly to principles of truth, and upholding high discipline.

Fokus Kepuasan Pelanggan
Customer Focus

Mengedepankan kejujuran dan konsistensi antara perkataan dan tindakan. Insan Bank Sulteng berkomitmen penuh untuk bekerja dengan tulus, berpegang teguh pada prinsip kebenaran, serta menjunjung tinggi kedisiplinan.

Prioritizing honesty and consistency between words and actions. Bank Sulteng personnel are fully committed to working sincerely, adhering strictly to principles of truth, and upholding high discipline.

Antusias
Enthusiasm

Menunjukkan semangat dan motivasi tinggi dalam menghadapi setiap tantangan. Insan Bank Sulteng didorong untuk bekerja keras secara optimal dan pantang menyerah guna mencapai prestasi serta hasil kerja terbaik.

Demonstrating high spirit and motivation in facing every challenge. Bank Sulteng personnel are encouraged to work optimally and relentlessly to achieve the best performance and work results.

Sinergi dan Pengaruh
Influence

Setiap insan Bank Sulteng didorong untuk memiliki kemampuan memotivasi rekan kerja dan lingkungan sekitar guna mencapai target kolektif. Perilaku utama yang dikedepankan adalah menjadi rolea model dalam lingkungan kerja serta secara aktif membantu rekan sejawat dalam mengatasi kendala operasional demi tercapainya tujuan bersama.

Every Bank Sulteng personnel is encouraged to possess the ability to motivate colleagues and the surrounding environment to achieve collective targets. The primary behavior emphasized is becoming a role model in the work environment and actively assisting peers in overcoming operational obstacles to achieve common goals.

Eksekusi yang Terukur
Execution

Kami menitikberatkan pada implementasi tugas yang berorientasi pada hasil nyata dan kontribusi positif bagi Bank. Fokus utama dari perilaku ini adalah ketepatan dalam pengambilan keputusan yang menguntungkan perseroan tanpa melanggar regulasi yang berlaku, serta memastikan setiap penugasan diselesaikan secara tuntas dan bertanggung jawab.

We emphasize the implementation of tasks oriented towards tangible results and positive contributions to the Bank. The main focus of this behavior is precision in decision-making that benefits the company without violating applicable regulations, as well as ensuring every assignment is completed thoroughly and responsibly.

Adaptabilitas terhadap Perubahan
Adaptability

Dalam menghadapi dinamika industri perbankan yang fluktuatif, personel Bank Sulteng dibekali dengan kesiapan mental untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan internal maupun eksternal. Insan perseroan diharapkan mampu bekerja secara optimal di bawah tekanan serta tetap waspada dan responsif terhadap setiap perubahan situasi pasar maupun kebijakan.

In facing the fluctuating dynamics of the banking industry, Bank Sulteng personnel are equipped with mental readiness to adjust to internal and external changes. Company personnel are expected to be able to work optimally under pressure and remain vigilant and responsive to any changes in market situations or policies.

Peningkatan Berkelanjutan
Continuous Improvement

Bank Sulteng senantiasa berupaya menyempurnakan produk, layanan, dan proses bisnis secara berkesinambungan. Semangat ini diwujudkan melalui pemberian solusi terbaik atas permasalahan yang ada serta mendorong keterlibatan aktif karyawan dalam menciptakan inovasi yang memperkuat daya saing perseroan di masa depan.

Bank Sulteng continuously strives to improve its products, services, and business processes on an ongoing basis. This spirit is realized by providing the best solutions to existing problems and encouraging active employee involvement in creating innovations that strengthen the company's competitiveness in the future.

Satu Visi,
One Vision,
Satu Tim,
One Team,
Satu Semangat.
One Spirit.

Sebagai kulminasi dari nilai-nilai budaya tersebut, Bank Sulteng menetapkan slogan motivasional sebagai representasi citra diri karyawan di mata pemangku kepentingan:

As the culmination of these cultural values, Bank Sulteng establishes a motivational slogan as a representation of the employees' self-image in the eyes of stakeholders:

"ONE GOAL, ONE TEAM, ONE SPIRIT"

Slogan ini mengandung esensi mendalam mengenai keselarasan fokus pada satu tujuan, kekuatan kolaborasi dalam satu tim yang solid, serta kesatuan semangat untuk bersama-sama meraih kemajuan dan kesejahteraan bagi Bank Sulteng dan seluruh masyarakat Sulawesi Tengah.

This slogan contains a profound essence regarding the alignment of focus on a single goal, the power of collaboration within one solid team, and the unity of spirit to collectively achieve progress and prosperity for Bank Sulteng and the entire community of Central Sulawesi.

SASARAN DAN STRATEGIS PERUSAHAAN
CORPORATE OBJECTIVES AND STRATEGIES



Maksud dan Tujuan Perusahaan

Sejalan dengan peran strategisnya, Bank Sulteng menetapkan maksud dan tujuan perusahaan yang berorientasi pada kepatuhan regulasi, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan pendapatan daerah:

- Pemenuhan Likuiditas dan Layanan Keuangan: Menjamin ketersediaan likuiditas sesuai ketetapan otoritas moneter serta memfasilitasi kebutuhan nasabah melalui jasa lalu lintas pembayaran dan penempatan dana pada instrumen pasar uang yang aman.
- Pemberdayaan Ekonomi ASN: Mengoptimalkan penyaluran kredit konsumtif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan target 70%-80% dari populasi ASN di Sulawesi Tengah, guna mendorong kegiatan usaha produktif bagi keluarga ASN.
- Optimalisasi Pendapatan Daerah: Memaksimalkan penerimaan daerah melalui kemitraan strategis dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang didukung oleh digitalisasi layanan perbankan secara berkelanjutan.

Corporate Intent and Objectives

In line with its strategic role, Bank Sulteng establishes corporate intents and objectives oriented towards regulatory compliance, economic empowerment, and the enhancement of regional revenue:

- Fulfillment of Liquidity and Financial Services: Ensuring liquidity availability in accordance with monetary authority provisions, as well as facilitating customer needs through payment traffic services and fund placement in secure money market instruments.
- Civil Servant (ASN) Economic Empowerment: Optimizing the disbursement of consumer credit for Civil State Apparatus (ASN) with a target of 70%-80% of the ASN population in Central Sulawesi, in order to stimulate productive business activities for ASN families.
- Optimization of Regional Revenue: Maximizing regional receipts through strategic partnerships with the Central Sulawesi Provincial Government, supported by the continuous digitalization of banking services.

- **Sinergi Akademis:** Memperkuat kolaborasi dengan institusi pendidikan tinggi dalam rangka mendukung program penerimaan mahasiswa baru, sebagai wujud kontribusi Perseroan terhadap pengembangan intelektual di Sulawesi Tengah.

Sasaran dan Strategi Perusahaan

Dalam menghadapi dinamika industri perbankan yang kompleks, Bank Sulteng telah merumuskan sasaran dan strategi operasional secara komprehensif. Strategi ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor kritikal yang memengaruhi manajemen Bank melalui tiga pendekatan utama:

1. Pendekatan Faktor Internal
   Strategi internal difokuskan pada penguatan fundamental organisasi dan optimalisasi sumber daya guna mendukung keberlanjutan bisnis, yang mencakup:
   - Penguatan Struktur dan Budaya: Melakukan maksimalisasi dan pengembangan struktur organisasi untuk meningkatkan efisiensi proses pengambilan keputusan, serta membangun budaya kerja perseroan yang lebih profesional.
   - Identitas dan Citra Korporasi: Memperkuat karakter dan filosofi serta gaya manajemen yang adaptif guna membangun identitas perusahaan yang solid.
   - Ekspansi dan Jangkauan: Mengimplementasikan strategi segmentasi pasar dan penempatan jaringan kantor yang memadai untuk menjangkau nasabah secara lebih luas.
   - Kapabilitas Sumber Daya: Memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten serta penggunaan teknologi tepat guna yang berhasil guna dalam operasional perbankan.
   - Kesejahteraan dan Layanan: Meningkatkan kesejahteraan pegawai sebagai penggerak utama bisnis serta membangun kantor-kantor pelayanan yang representatif guna memberikan nilai tambah dan kebanggaan bagi masyarakat Sulawesi Tengah.
   - Komitmen Pemegang Saham: Menjaga sinergi dan komitmen pemilik dalam pengembangan usaha, termasuk kepatuhan terhadap regulasi OJK terkait penyetoran modal.

2. Pendekatan Faktor Eksternal
   Bank Sulteng secara aktif memitigasi risiko dan peluang yang muncul dari lingkungan luar, yang meliputi:
   - Pengawasan terhadap kebijakan moneter, kepatuhan peraturan dan regulasi, serta pemantauan fluktuasi nilai tukar dan tingkat inflasi.

- **Academic Synergy:** Strengthening collaboration with higher education institutions to support new student admission programs, as a manifestation of the Company's contribution to intellectual development in Central Sulawesi.

Corporate Objectives and Strategies

In navigating the complex dynamics of the banking industry, Bank Sulteng has comprehensively formulated its operational objectives and strategies. These strategies are structured by considering various critical factors influencing Bank management through three primary approaches:

1. Internal Factor Approach
   Internal strategies are focused on strengthening organizational fundamentals and optimizing resources to support business sustainability, which include:
   - Strengthening of Structure and Culture: Maximizing and developing the organizational structure to enhance the efficiency of the decision-making process, as well as building a more professional corporate work culture.
   - Corporate Identity and Image: Strengthening the character, philosophy, and adaptive management style to build a solid corporate identity.
   - Expansion and Reach: Implementing market segmentation strategies and the adequate placement of office networks to reach a broader customer base.
   - Resource Capabilities: Ensuring the availability of competent Human Resources (HR) and the utilization of appropriate and effective technology in banking operations.
   - Welfare and Services: Improving employee welfare as the primary driver of the business and establishing representative service offices to provide added value and pride for the people of Central Sulawesi.
   - Shareholder Commitment: Maintaining the synergy and commitment of owners in business development, including compliance with FSA regulations regarding capital deposits.

2. External Factor Approach
   Bank Sulteng actively mitigates risks and opportunities arising from the external environment, which include:
   - Oversight of monetary policies, regulatory compliance, and the monitoring of exchange rate fluctuations and inflation rates.

- Analisis mendalam terhadap volatilitas tingkat suku bunga, sekuritisasi, treasury management, serta dampak globalisasi.
- Pemantauan terhadap persaingan antarbank maupun lembaga keuangan non-bank, perkembangan teknologi, serta inovasi instrumen keuangan terkini.

3. Pendekatan Risiko Usaha (*Business Risk*)
   Bank menyadari bahwa setiap aktivitas perbankan mengandung risiko yang harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Semakin tinggi ketidakpastian pendapatan, semakin besar risiko yang dihadapi, yang mencakup:
   - Risiko Kredit: Manajemen risiko terkait potensi kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya.
   - Risiko Investasi: Pengelolaan risiko pada portofolio investasi perseroan.
   - Risiko Likuiditas: Pemastian kemampuan Bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek secara tepat waktu.
   - Risiko Operasional: Perseroan memitigasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, maupun dampak dari kejadian eksternal yang dapat mengganggu kontinuitas layanan.
   - Risiko Penyelewengan: Sebagai bentuk komitmen terhadap integritas, Bank menerapkan sistem pengawasan ketat untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau tindakan tidak patuh hukum yang dapat merugikan aset dan reputasi Perseroan.
   - Risiko Fidusia: Bank senantiasa menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana atau aset yang dipercayakan oleh nasabah, memastikan seluruh tanggung jawab titipan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan etika perbankan yang berlaku.
   - Risiko Tingkat Bunga: Perseroan secara aktif memantau fluktuasi suku bunga di pasar guna meminimalkan dampak negatif terhadap pendapatan bunga bersih maupun nilai ekonomis modal Bank.
   - Risiko Solvensi: Manajemen memastikan pemeliharaan struktur permodalan yang kuat dan sehat untuk menjamin kemampuan Bank dalam memenuhi seluruh kewajiban jangka panjangnya secara berkelanjutan.
   - Risiko Valuta Asing: Bank mengelola eksposur risiko yang timbul dari perubahan nilai tukar mata uang asing melalui strategi lindung nilai yang terukur guna menjaga stabilitas posisi keuangan.

- In-depth analysis of interest rate volatility, securitization, treasury management, and the impacts of globalization.
- Monitoring of interbank competition and non-bank financial institutions, technological advancements, as well as the latest financial instrument innovations.

3. Business Risk Approach
   The Bank recognizes that every banking activity entails risks that must be managed with prudence (prudential banking). The higher the uncertainty of income, the greater the risks faced, which encompass:
   - Credit Risk: Risk management related to the potential failure of debtors to fulfill their obligations.
   - Investment Risk: Risk management within the Company's investment portfolio.
   - Liquidity Risk: Ensuring the Bank's capability to meet short-term obligations in a timely manner.
   - Operational Risk: The Company mitigates potential losses resulting from inadequate or failed internal processes, human error, system failures, or the impact of external events that could disrupt service continuity.
   - Fraud Risk: As a form of commitment to integrity, the Bank implements a stringent oversight system to prevent any irregularities or unlawful actions that could harm the Company's assets and reputation.
   - Fiduciary Risk: The Bank consistently upholds the prudential principle in managing funds or assets entrusted by customers, ensuring all fiduciary responsibilities are executed in accordance with prevailing legal provisions and banking ethics.
   - Interest Rate Risk: The Company actively monitors market interest rate fluctuations to minimize adverse impacts on net interest income and the economic value of the Bank's capital.
   - Solvency Risk: Management ensures the maintenance of a strong and healthy capital structure to guarantee the Bank's ability to fulfill all of its long-term obligations sustainably.
   - Foreign Exchange Risk: The Bank manages risk exposures arising from foreign currency exchange rate fluctuations through measured hedging strategies to maintain the stability of its financial position.

- Risiko Persaingan: Perseroan secara dinamis merespons intensitas persaingan antarbank maupun lembaga keuangan non-bank dengan terus berinovasi dalam produk, layanan, dan teknologi untuk mempertahankan serta meningkatkan pangsa pasar di wilayah Sulawesi Tengah dan sekitarnya.

Dalam upaya mewujudkan visinya, Bank Sulteng menetapkan misi fundamental yang berfokus pada penguatan ekonomi daerah dan keunggulan operasional:

- Optimalisasi Layanan Perbankan: Menjalankan fungsi sebagai lembaga perbankan umum secara konvensional dengan standar kualitas terbaik.
- Akselerator Ekonomi Regional: Bertindak sebagai penggerak utama dalam memacu laju pertumbuhan ekonomi dan akselerasi pembangunan daerah.
- Mitra Strategis Pemerintah: Mengemban amanah sebagai pemegang kas daerah serta melaksanakan pengelolaan kas pemerintah daerah secara akuntabel.
- Kontributor Pendapatan Daerah: Menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang kontributif dan berkelanjutan.

Secara manajerial, misi ini diklasifikasikan ke dalam tiga fokus utama guna memastikan produktivitas operasional yang maksimal:

1. *Stakeholder*: Menyelaraskan seluruh kepentingan pihak terkait dengan dukungan implementasi Tata Kelola Perusahaan (GCG) yang baik.
2. *People*: Mengembangkan talenta profesional yang berintegritas tinggi guna memberikan kontribusi optimal bagi perseroan dan pemangku kepentingan.
3. *Operation*: Meningkatkan peran intermediasi bank dengan fokus pada pembiayaan usaha pembangunan daerah serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

- Competition Risk: The Company dynamically responds to the intensity of competition among banks and non-bank financial institutions by continuously innovating its products, services, and technology to maintain and expand its market share in the Central Sulawesi region and its surroundings.

In its endeavor to realize its vision, Bank Sulteng establishes a fundamental mission focused on strengthening the regional economy and achieving operational excellence:

- Optimization of Banking Services: Performing functions as a conventional commercial banking institution with the highest quality standards.
- Regional Economic Accelerator: Acting as a primary driver in stimulating the pace of economic growth and accelerating regional development.
- Government Strategic Partner: Fulfilling the mandate as the regional cash holder and executing regional government cash management accountably.

- Regional Revenue Contributor: Serving as a contributive and sustainable source of original regional revenue (PAD).

Managerially, this mission is classified into three primary focuses to ensure maximum operational productivity:

1. Stakeholder: Aligning all related parties' interests supported by the implementation of Good Corporate Governance (GCG).
2. People: Developing professional talents with high integrity to provide optimal contributions to the company and stakeholders.
3. Operation: Enhancing the bank's intermediation role with a focus on financing regional development businesses and the effectiveness of regional financial management.

RUANG LINGKUP KEGIATAN USAHA
SCOPE OF BUSINESS ACTIVITIES

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Bank Sulteng menjalankan kegiatan usaha perbankan yang berfokus pada penghimpunan dan penyaluran dana, serta penyediaan jasa keuangan komprehensif guna mendukung pertumbuhan ekonomi regional. Seluruh aktivitas operasional dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Kegiatan usaha utama dan penunjang Perseroan meliputi:

1. Penghimpunan dan Penyaluran Dana
   - Mobilisasi Dana Masyarakat: Menghimpun dana dalam berbagai instrumen simpanan, termasuk namun tidak terbatas pada Giro, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, dan Tabungan.
   - Fasilitas Kredit: Menyediakan solusi pembiayaan jangka pendek, menengah, dan panjang yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dan sektor bisnis.
2. Transaksi Surat Berharga dan Pasar Uang
   - Melakukan kegiatan transaksi jual-beli instrumen keuangan jangka pendek dan jangka panjang yang memiliki likuiditas tinggi dan risiko relatif rendah. Pasar ini mempertemukan pihak yang membutuhkan dana cepat dengan pihak yang memiliki kelebihan dana, difasilitasi oleh bank atau lembaga keuangan dengan berbagai instrumen seperti Obligasi, Surat Berharga Negara (SBN), dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
3. Layanan Jasa Perbankan dan Pembayaran
   - Transfer Dana: Memfasilitasi pemindahan dana untuk kepentingan Perseroan maupun nasabah melalui berbagai kanal perbankan.
   - Keagenan Pembayaran: Bertindak sebagai agen penerima pembayaran tagihan atas surat berharga dan melakukan kliring antarpihak ketiga.
   - Dokumen Kredit: Menerbitkan instrumen pembiayaan perdagangan dan penjaminan dalam bentuk *Letter of Credit* (L/C) dan Bank Garansi.
4. Layanan Investasi dan Jasa Titipan
   - Manajemen Agunan: Melakukan pengambilalihan agunan melalui prosedur pelelangan maupun sukarela dalam rangka penyelesaian kewajiban debitur, sesuai dengan ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

5. Peran Strategis dan Pembinaan Daerah
   - Dana Pensiun: Bertindak selaku pendiri dan pengelola dana pensiun sesuai dengan regulasi yang berlaku.
   - Sinergi BUMD & BPR: Memberikan bantuan teknis bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta melaksanakan pembinaan bagi Bank

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, Bank Sulteng conducts banking business activities focused on the collection and disbursement of funds, as well as the provision of comprehensive financial services to support regional economic growth. All operational activities are executed by upholding the prudential banking principle and ensuring compliance with prevailing regulations.

The Company's primary and supporting business activities include:

1. Fund Collection and Disbursement
   - Public Fund Mobilization: Collecting funds through various deposit instruments, including but not limited to Demand Deposits (Giro), Time Deposits, Certificates of Deposit, and Savings.
   - Credit Facilities: Providing short, medium, and long-term financing solutions tailored to the needs of customers and business sectors.

2. Securities and Money Market Transactions
   - Conducting trading activities for short-term and long-term financial instruments characterized by high liquidity and relatively low risk. This market connects parties requiring fast funds with those possessing surplus funds, facilitated by banks or financial institutions through various instruments such as Bonds, Government Securities (Surat Berharga Negara/SBN), and Bank Indonesia Rupiah Securities (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia/SRBI).
3. Banking and Payment Services
   - Fund Transfers: Facilitating the transfer of funds for the benefit of the Company and its customers through various banking channels.
   - Payment Agency: Acting as a receiving agent for bill payments on securities and conducting clearing between third parties.

   - Credit Documents: Issuing trade financing and guarantee instruments in the form of Letters of Credit (L/C) and Bank Guarantees.

4. Investment and Custodial Services
   - Collateral Management: Executing the takeover of collateral through auction or voluntary procedures in order to settle debtor obligations, in accordance with the stipulated time limit provisions.

5. Strategic Role and Regional Development
   - Pension Fund: Acting as the founder and administrator of a pension fund in accordance with applicable regulations.
   - BUMD & BPR Synergy: Providing technical assistance to Regional-Owned Enterprises (Badan Usaha Milik Daerah/BUMD) and conducting

Perekonomian Rakyat (BPR) di wilayah Sulawesi Tengah guna memperkuat tata kelola keuangan daerah.

Kegiatan Usaha dan Portofolio Layanan

Sebagai institusi perbankan yang berfokus pada pertumbuhan inklusif, Bank Sulteng menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial nasabah baik di segmen ritel maupun korporasi. Strategi operasional kami berorientasi pada penguatan struktur dana, ekspansi kredit yang sehat, dan optimalisasi layanan jasa perbankan berbasis teknologi.

1. Penghimpunan Dana (*Funding*)
   Bank Sulteng secara aktif mengoptimalkan penghimpunan dana pihak ketiga dengan memprioritaskan pertumbuhan dana ritel/perorangan, tanpa mengesampingkan loyalitas nasabah korporasi dan instansi pemerintah. Strategi ini diimplementasikan melalui beragam produk simpanan yang kompetitif:
   - Giro: Menyediakan fasilitas dana murah bagi segmen Pemerintah, badan usaha Swasta, maupun perorangan untuk mendukung kelancaran transaksi bisnis dan operasional.
   - Tabungan: Menghadirkan beragam produk tabungan yang tersegmentasi untuk seluruh lapisan masyarakat, mulai dari Tabungan Simantap dan Simpeda, hingga tabungan tematik seperti Tabungan PNS, Tabungan Pensiun, serta tabungan bagi pelajar melalui Tabungan Siswa dan Simpel.
   - Deposito: Menawarkan instrumen investasi yang aman melalui Deposito Berjangka dan Deposito *On Call* dengan suku bunga yang bersaing bagi nasabah yang mengutamakan pertumbuhan nilai aset.

2. Penyaluran Dana (*Lending*)
   Dalam menjalankan fungsi intermediasi, Bank Sulteng berkomitmen menyalurkan pembiayaan secara selektif dan berkualitas guna mendorong roda perekonomian daerah melalui berbagai skema kredit:
   - Kredit Multiguna: Memberikan solusi keuangan fleksibel bagi pemenuhan kebutuhan nasabah perorangan.
   - Kredit Modal Kerja & Investasi: Mendukung akselerasi sektor produktif dan pengembangan usaha melalui penyediaan likuiditas serta pembiayaan aset tetap.
   - Kredit Pemilikan Rumah (KPR): Memfasilitasi nasabah dalam mewujudkan kepemilikan hunian yang layak dan terjangkau.

coaching for Rural Banks (Bank Perekonomian Rakyat/BPR) within the Central Sulawesi region to strengthen regional financial governance.

Business Activities and Service Portfolio

As a banking institution focused on inclusive growth, Bank Sulteng organizes various business activities designed to meet the financial needs of customers in both the retail and corporate segments. Our operational strategy is oriented towards strengthening the funding structure, healthy credit expansion, and optimizing technology-based banking services.

1. Funding
   Bank Sulteng actively optimizes the collection of third-party funds by prioritizing the growth of retail/individual funds, without neglecting the loyalty of corporate customers and government agencies. This strategy is implemented through a variety of competitive deposit products:
   - Demand Deposits (Giro): Providing low-cost fund facilities for the Government, Private business entities, and individuals to support the smooth running of business and operational transactions.
   - Savings: Presenting a variety of segmented savings products for all layers of society, ranging from Simantap and Simpeda Savings, to thematic savings such as Civil Servant (PNS) Savings, Pension Savings, as well as student savings through Tabungan Siswa and Simpel.
   - Time Deposits: Offering secure investment instruments through Time Deposits and On-Call Deposits with competitive interest rates for customers who prioritize asset value growth.

2. Lending
   In carrying out the intermediation function, Bank Sulteng is committed to disbursing selective and high-quality financing to stimulate the regional economy through various credit schemes:
   - Multipurpose Credit: Providing flexible financial solutions to fulfill the needs of individual customers.
   - Working Capital & Investment Credit: Supporting the acceleration of productive sectors and business development through the provision of liquidity and fixed asset financing.
   - Home Ownership Credit (KPR): Facilitating customers in realizing decent and affordable home ownership.

3. Layanan Jasa Perbankan Lainnya
   Guna mewujudkan kepuasan nasabah yang optimal, Bank Sulteng terus bertransformasi meningkatkan kualitas jasa layanan melalui pemanfaatan teknologi terkini dan perluasan jaringan mitra strategis. Inisiatif ini juga diproyeksikan untuk meningkatkan kontribusi *fee-based income* terhadap kinerja keuangan Perseroan secara keseluruhan. Layanan jasa perbankan kami meliputi:
   - Jaminan Bank (Garansi Bank): Memberikan dukungan penjaminan bagi nasabah dalam pelaksanaan proyek maupun transaksi bisnis.
   - Layanan Transfer Dana: Memfasilitasi pengiriman uang yang cepat dan aman melalui sistem BI-RTGS (*Real Time Gross Settlement*) dan SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia).
   - Layanan Kas Mobil: Menghadirkan solusi perbankan proaktif yang menjangkau lokasi nasabah secara fleksibel.
   - Penerimaan Pembayaran Iuran: Bertindak sebagai mitra resmi dalam penerimaan iuran BPJS Ketenagakerjaan guna mendukung program jaminan sosial nasional.

Peran Strategis sebagai Bank Pengelola Kas Daerah

Sebagai mitra strategis utama Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Sulawesi Tengah, Bank Sulteng mengemban amanah krusial dalam ekosistem keuangan daerah. Perseroan bertindak sebagai pilar penyangga yang memfasilitasi seluruh transaksi perbankan Pemerintah Daerah, mencakup tata kelola penerimaan pendapatan daerah hingga efektivitas penyaluran belanja daerah secara akuntabel.

Sinergi yang terjalin erat ini menempatkan Bank Sulteng sebagai integrator layanan bagi berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Aparatur Sipil Negara (ASN), mitra korporasi penyedia jasa Pemda, hingga masyarakat luas di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Melalui mandat ini, Bank Sulteng berkomitmen memastikan transparansi dan efisiensi pengelolaan likuiditas daerah guna mendukung kelancaran roda pembangunan regional.

3. Other Banking Services
   In order to achieve optimal customer satisfaction, Bank Sulteng continuously transforms to improve the quality of services through the utilization of the latest technology and the expansion of strategic partner networks.These initiatives are also projected to increase the contribution of fee-based income to the Company's overall financial performance. Our banking services include:
   - Bank Guarantee: Providing guarantee support for customers in the execution of projects and business transactions.
   - Fund Transfer Services: Facilitating fast and secure money transfers through the BI-RTGS (Real Time Gross Settlement) system and SKNBI (National Clearing System of Bank Indonesia).
   - Mobile Cash Services: Presenting proactive banking solutions that reach customer locations flexibly.
   - Contribution Payment Receipt: Acting as an official partner in receiving BPJS Ketenagakerjaan (Workers Social Security) contributions to support the national social security program.

Strategic Role as Regional Cash Management Bank

As the primary strategic partner of the Regional Government (Pemda) in Central Sulawesi Province, Bank Sulteng bears a crucial mandate in the regional financial ecosystem.The Company acts as a supporting pillar that facilitates all Regional Government banking transactions, encompassing the governance of regional revenue receipts up to the effectiveness of regional expenditure disbursement accountably.

This closely intertwined synergy positions Bank Sulteng as a service integrator for various stakeholders, ranging from Regional Apparatus Organizations (OPD), Civil State Apparatus (ASN), corporate partners providing services to the Regional Government, to the wider community across the Central Sulawesi region. Through this mandate, Bank Sulteng is committed to ensuring transparency and efficiency in regional liquidity management to support the smooth progress of regional development.

Adapun rincian cakupan pengelolaan arus dana daerah yang difasilitasi oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

The detailed scope of the regional cash flow management facilitated by the Company is as follows:

Struktur Pengelolaan Arus Kas Pemerintah Daerah

Regional Government Cash Flow Management Structure

Kategori Category	**Unsur Penerimaan (Revenue)** Revenue Elements	**Kategori** Category	**Unsur Pengeluaran (Expenditure)** Expenditure Elements
Pajak Daerah Regional Taxes	· Pajak Kendaraan Bermotor · Motor Vehicle Tax · PBB, Pajak Hotel & Restoran · Land & Building Tax (PBB), Hotel & Restaurant Tax · Pajak Hiburan, dan lain-lain · Entertainment Tax, and others	Belanja Pembangunan Development Expenditure	· Pembangunan Infrastruktur · Infrastructure Development · Proyek Pembangunan Lainnya · Other Development Projects
		Belanja Rutin Routine Expenditure	· Belanja Pegawai (Gaji, Tunjangan Kinerja, dll) · Personnel Expenditure (Salaries, Performance Allowances, etc.) · Belanja Barang dan Jasa · Goods and Services Expenditure · Belanja Modal, dan lain-lain · Capital Expenditure, and others

Produk dan Jasa

Bank Sulteng berkomitmen untuk tidak sekadar menjadi tempat penyimpanan dana, melainkan mitra finansial terpercaya yang tumbuh bersama nasabah. Sepanjang tahun 2025, Bank terus mempertajam portofolio produk dan jasa guna menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Strategi pengembangan produk kami difokuskan pada penciptaan nilai tambah (*value creation*), fleksibilitas layanan, serta dukungan ekosistem digital yang terintegrasi.

Kami menyadari bahwa setiap segmen nasabah mulai dari perorangan, pelaku UMKM, korporasi, hingga pemerintah daerah memiliki karakteristik kebutuhan finansial yang unik. Oleh karena itu, Bank Sulteng menghadirkan rangkaian produk penghimpunan dana (*funding*), penyaluran kredit (*lending*), dan jasa layanan perbankan lainnya yang dirancang secara presisi untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan

1. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)
   Dalam upaya memperkuat struktur pendanaan yang stabil dan berkelanjutan, Bank Sulteng menawarkan beragam instrumen simpanan. Produk-produk ini dirancang tidak hanya untuk menjaga keamanan dana nasabah, tetapi juga memberikan imbal hasil yang kompetitif serta kemudahan transaksi harian.

Products and Services

Bank Sulteng is committed to not merely being a depository for funds, but a trusted financial partner that grows alongside its customers. Throughout 2025, the Bank continues to sharpen its product and service portfolio to answer the increasingly dynamic needs of the community. Our product development strategy is focused on value creation, service flexibility, and the support of an integrated digital ecosystem.

We recognize that every customer segment, starting from individuals, MSME players, corporations, to regional governments, possesses unique financial need characteristics. Therefore, Bank Sulteng presents a series of funding products, lending products, and other banking services precisely designed to provide convenience, security, and optimal benefits for all stakeholders.

1. Funding Products
   In an effort to strengthen a stable and sustainable funding structure, Bank Sulteng offers a variety of deposit instruments. These products are designed not only to maintain the security of customer funds but also to provide competitive returns as well as convenience for daily transactions.

Tabel Produk Penghimpunan Dana
Funding Products Table

No.	Nama Produk Product Name	Penjelasan Produk Product Description
A.	**GIRO** **DEMAND DEPOSITS (GIRO)**	
1	Giro Pemerintah Government Demand Deposit	Rekening giro yang dikhususkan bagi instansi pemerintah untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. A checking account specifically designated for government agencies to support transparent and accountable regional financial management.
2	Giro Swasta Private Demand Deposit	Rekening giro bagi badan usaha swasta untuk memfasilitasi kelancaran transaksi bisnis dan arus kas perusahaan. A checking account for private business entities to facilitate the smooth operation of business transactions and corporate cash flows.
3	Giro Perorangan Individual Demand Deposit	Rekening simpanan dalam mata uang Rupiah yang khusus diperuntukkan bagi perorangan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, atau sarana perintah pembayaran lainnya. A deposit account in Rupiah specifically intended for individuals, where withdrawals can be made at any time using Checks, Bilyet Giro, or other payment instruction tools.
B.	**TABUNGAN** **SAVINGS (TABUNGAN)**	
1	Tabungan Simantap Simantap Savings	Produk tabungan khusus dari Bank Sulteng dengan jasa bunga yang dihitung dari saldo rata-rata harian, ditujukan untuk para eksekutif dan pebisnis dengan fasilitas pelayanan prioritas. A special savings product from Bank Sulteng with interest calculated based on the average daily balance, aimed at executives and businesspeople with priority service facilities.
2	Tabungan Simantap 3 in 1 Simantap 3 in 1 Savings	Program tabungan inovatif yang memberikan tiga manfaat sekaligus dalam satu rekening bagi nasabah. An innovative savings program that provides three benefits simultaneously in one account for the customer.
3	Tabungan Simpeda Simpeda Savings	Produk unggulan Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia yang memberikan jasa bunga menarik serta kesempatan mengikuti undian berhadiah miliaran rupiah secara nasional. The flagship product of Regional Development Banks (BPD) across Indonesia, offering attractive interest rates and the opportunity to participate in national prize draws worth billions of rupiah.
4	Tabungan PNS Civil Servant (PNS) Savings	Tabungan yang diperuntukkan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memudahkan pengelolaan gaji dan transaksi keuangan harian. Savings specifically designated for Civil Servants (PNS) to facilitate the management of salaries and daily financial transactions.
5	Tabungan PensiunKu PensiunKu Savings	Produk tabungan bagi perorangan yang disyaratkan khusus kepada Pensiunan (PNS Pusat/Daerah, Pejabat Negara, TNI/Polri, Veteran) bekerjasama dengan PT Taspen. An individual savings product specifically required for Retirees (Central/Regional PNS, State Officials, TNI/Polri, Veterans) in collaboration with PT Taspen.
6	TabunganKu TabunganKu	Tabungan perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan serta bebas biaya administrasi untuk menumbuhkan budaya menabung masyarakat. Individual savings with easy and light requirements, free of administrative fees, aimed at fostering a saving culture within the community.
7	TabungankuPlus TabungankuPlus	Tabungan yang ditujukan khusus untuk mengakomodir program – program pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah seperti Dana BOS, Dana Bantuan dll. Savings specifically intended to accommodate Central and Regional Government programs such as BOS Funds, Assistance Funds, etc.
8	Tabungan Simpel (Simpanan Pelajar) Simpel (Student Savings)	Tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur menarik untuk edukasi dan inklusi keuangan sejak dini. Savings for students issued nationally with easy and simple requirements, featuring attractive elements for early financial education and inclusion.
9	Tabungan Siswa Student Savings	Produk simpanan yang didedikasikan bagi pelajar untuk mendidik kebiasaan menabung. A deposit product dedicated to students to educate them on the habit of saving.
10	Tabungan Rencana Bank Sulteng Bank Sulteng Plan Savings	Tabungan berjangka dengan setoran rutin untuk membantu nasabah merencanakan keuangan masa depan secara disiplin. Term savings with routine deposits to assist customers in planning their future finances with discipline.

No.	Nama Produk Product Name	Penjelasan Produk Product Description
11	Tabungan Lokal Tamasya Tamasya Local Savings	Tabungan masyarakat yang pembukaan rekeningnya dapat dilakukan pada agen Bank Sulteng Tamasya dengan karakteristik *Basic Saving Account* (BSA). Community savings where account opening can be done at Bank Sulteng Tamasya agents, featuring Basic Saving Account (BSA) characteristics.
C.	**DEPOSITO** **TIME DEPOSITS (DEPOSITO)**	
1	Deposito Berjangka Time Deposit	Sarana investasi aman dan menguntungkan dengan bunga kompetitif. Tersedia dalam pilihan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan serta dilengkapi fasilitas *Automatic Roll Over* (ARO). A secure and profitable investment instrument with competitive interest rates. Available in terms of 1, 3, 6, and 12 months and equipped with an Automatic Roll Over (ARO) facility.
2	Deposito *On Call*	Deposito berjangka dengan jangka waktu maksimal 14 hari (jangka pendek), yang dapat dilakukan oleh antar bank ataupun nasabah retail/perusahaan. A time deposit with a maximum term of 14 days (short-term), which can be placed by other banks or retail/corporate customers.

2. Produk Penyaluran Dana (*Lending*)
   Bank Sulteng menjalankan fungsi intermediasi dengan menyalurkan kredit produktif dan konsumtif guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kami menawarkan skema pembiayaan yang adaptif terhadap kebutuhan nasabah, mulai dari pemenuhan kebutuhan hunian, modal usaha, hingga kebutuhan serbaguna lainnya.

2. Lending Products
   Bank Sulteng carries out the intermediation function by disbursing productive and consumptive credit to drive regional economic growth. We offer financing schemes that are adaptive to customer needs, ranging from the fulfillment of housing needs and business capital, to other multipurpose needs.

Tabel Produk Kredit
Lending Products

No.	Nama Produk Product Name	Penjelasan Produk Product Description
1	Kredit Multiguna Multipurpose Credit	Fasilitas kredit yang diberikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah yang bersifat konsumtif maupun serbaguna. Credit facilities provided to meet various customer needs of a consumptive or multipurpose nature.
2	Kredit Modal Kerja (termasuk R/C) Working Capital Credit (including R/C)	Fasilitas kredit untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha, atau kebutuhan khusus seperti membiayai inventori. piutang, atau proyek. Credit facilities to fulfill working capital needs that are exhausted within one business cycle, or special needs such as financing inventory, receivables, or projects.
3	Kredit Investasi Investment Credit	Fasilitas kredit jangka menengah atau panjang untuk membiayai pembelian barang modal, rehabilitasi, modernisasi, perluasan, atau pendirian proyek baru. Medium or long-term credit facilities to finance the purchase of capital goods, rehabilitation, modernization, expansion, or the establishment of new projects.
4	Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Home Ownership Credit (KPR)	Fasilitas pembiayaan untuk kepemilikan rumah tinggal, mendukung masyarakat memiliki hunian yang layak. Financing facilities for residential home ownership, supporting the community in owning decent housing.
5	Kredit UMKM MSME Credit (Kredit UMKM)	Penyaluran kredit bagi pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). The disbursement of credit for Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) players.

3. Jasa Layanan Perbankan
Selain produk simpanan dan pinjaman, Bank Sulteng menghadirkan layanan jasa perbankan yang dirancang untuk mendukung kelancaran transaksi keuangan nasabah. Dengan dukungan infrastruktur teknologi yang andal, kami memastikan setiap transaksi berjalan cepat, aman, dan efisien.

3. Banking Services
In addition to savings and loan products, Bank Sulteng presents banking services designed to support the smooth operation of customer financial transactions.With the support of reliable technological infrastructure, we ensure that every transaction runs quickly, safely, and efficiently.

Tabel Jasa Layanan Perbankan
Banking Services Table

No.	Nama Produk Product Name	Penjelasan Produk Product Description
1	Jaminan Bank (Garansi Bank) Bank Guarantee	Layanan penjaminan yang diberikan Bank untuk kepentingan nasabah dalam rangka memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga. Guarantee services provided by the Bank for the benefit of the customer in order to fulfill obligations to third parties.
2	Transfer Transfer	Jasa pengiriman uang untuk memanjakan nasabah mengirim dan menerima dana ke seluruh Indonesia dengan biaya kompetitif. Money remittance services to pamper customers in sending and receiving funds across Indonesia at competitive costs.
3	Kliring SKNBI SKNBI Clearing	Layanan penyelesaian piutang/transfer dana antarbank melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) untuk kelancaran lalu lintas pembayaran giral. Interbank receivable settlement/fund transfer services through the National Clearing System of Bank Indonesia (SKNBI) for the smooth operation of giro payment traffic.
4	BI-RTGS BI-RTGS	Layanan transfer dana elektronik antarbank dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika (*Real Time Gross Settlement*) per transaksi. Electronic interbank fund transfer services in Rupiah currency where settlement is executed instantaneously (Real Time Gross Settlement) per transaction.
5	Layanan Bank Persepsi Perception Bank Services	Bank Sulteng ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Pajak Negara sebagai Bank yang diizinkan menerima setoran pajak ke Kas Negara secara *online*. Bank Sulteng is appointed by the State Tax Service Office as a Bank authorized to receive tax deposits into the State Treasury online.
6	Layanan ATM ATM Services	Layanan 24 jam yang terkoneksi dengan jaringan ATM Bersama untuk penarikan tunai, transfer antarbank, cek saldo, pembelian pulsa, dan pembayaran tagihan (Samsat, dll). 24-hour services connected to the ATM Bersama network for cash withdrawals, interbank transfers, balance inquiries, mobile credit purchases, and bill payments (Samsat, etc.).
7	Layanan Kas Mobil Mobile Cash Services	Layanan jemput bola menggunakan unit mobil kas keliling untuk menjangkau nasabah di area yang jauh dari kantor cabang. Proactive outreach services utilizing mobile cash units to reach customers in areas far from branch offices.
8	Penerimaan Pembayaran Payment Point	Fasilitas untuk melayani pembayaran tagihan rutin, termasuk penerimaan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Facilities to serve routine bill payments, including the receipt of BPJS Ketenagakerjaan contribution payments.
9	Layanan *Cash Recycle Machine* (CRM) Cash Recycle Machine (CRM) Services	Mesin ATM yang berfungsi untuk menerima setoran tunai dan melakukan penarikan tunai serta dapat melayani transaksi non tunai lainnya. ATM machines functioning to receive cash deposits and execute cash withdrawals, as well as serve other non-cash transactions.

JARINGAN KANTOR DAN WILAYAH OPERASIONAL
OFFICE NETWORK AND OPERATIONAL AREA

Bank Sulteng telah memiliki dan mengelola beberapa jaringan kantor selama tahun 2025, sebagai wujud komitmen untuk memberikan kemudahan akses perbankan bagi masyarakat.

Hingga akhir Desember 2025, Bank Sulteng memiliki 1 Kantor Pusat serta melayani seluruh nasabah melalui jaringan yang terdiri dari Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Cabang Pembantu (Layanan Kas), Payment Point, Mobil Kas, dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar di berbagai lokasi strategis.

Bank Sulteng has owned and managed several office networks during 2025, as a manifestation of its commitment to providing easy banking access for the community.

As of the end of December 2025, Bank Sulteng operates 1 Head Office and serves all customers through a network consisting of Branch Offices, Sub-Branch Offices, Sub-Branch Offices (Cash Services), Payment Points, Mobile Cash, and Automated Teller Machines (ATMs) distributed across various strategic locations.

Tabel Data Jaringan Kantor
Office Network Data Table

Jaringan Kantor	2025	2024	2023	2022	2021	Office Network
Kantor Pusat	1	1	1	1	1	Head Office
Kantor Cabang Utama	1	1	1	1	1	Main Branch Office
Kantor Cabang	14	14	14	14	13	Branch Office
Kantor Cabang Pembantu	11	11	10	10	10	Sub-Branch Office
Kantor Cabang Pembantu (Layanan Kas)	14	12	10	8	7	Sub-Branch Office (Cash Service)
Kantor Fungsional Non-Operasional	0	0	0	0	1	Non-Operational Functional Office
Payment Point	42	38	38	34	34	Payment Point
Mobil Kas	1	1	1	1	14	Mobile Cash Unit
ATM	143	131	117	117	116	ATM

Sebaran Jaringan Kantor Bank Sulteng per Wilayah 2025
Distribution of Bank Sulteng Office Networks by Region 2025

Kabupaten / Kota Regency / City	Jaringan Kantor Office Network
Kota Palu	Kantor Pusat, Kantor Cabang Utama Palu, Kantor Cabang Palu Barat, KCP Tawaeli, KCP Tinombala.
Kab. Tolitoli	Kantor Cabang Tolitoli, KCP Soni.
Kab. Poso	Kantor Cabang Poso, KCP Tentena, KCP Pendolo (Layanan Kas), KCP Napu (Layanan Kas), KCP Tambarana (Layanan Kas).
Kab. Banggai	Kantor Cabang Luwuk, KCP Toili, KCP Batui (Layanan Kas), KCP Masama (Layanan Kas), KCP Bunta (Layanan Kas).
Kab. Morowali	Kantor Cabang Bungku, KCP Bahodopi, KCP Bahomotefe (Layanan Kas).
Kab. Banggai Kepulauan	Kantor Cabang Salakan.
Kab. Sigi	Kantor Cabang Sigi, KCP Kulawi (Layanan Kas).
Kab. Donggala	Kantor Cabang Donggala, KCP Labean.
Kab. Parigi Moutong	Kantor Cabang Parigi, KCP Tolai, KCP Tinombo, KCP Lambunu (Layanan Kas), KCP Kotaraya (Layanan Kas).
Kab. Tojo Una-Una	Kantor Cabang Ampana, KCP Wakai (Layanan Kas).

Kabupaten / Kota Regency / City	Jaringan Kantor Office Network
Kab. Buol	Kantor Cabang Buol, KCP Paleleh.
Kab. Morowali Utara	Kantor Cabang Kolonodale, KCP Beteleme, KCP Tomata (Layanan Kas), KCP Mamosalato (Layanan Kas), KCP Baturube (Layanan Kas).
Kab. Banggai Laut	Kantor Cabang Banggai Laut.
DKI Jakarta	Kantor Cabang Jakarta.

Rencana Pembukaan Jaringan Kantor Baru Tahun 2025

Sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2025, Bank Sulteng memfokuskan ekspansi jaringan pada lokasi-lokasi strategis untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kas sebagai berikut,:

1. KCP Masama (Layanan Kas): Berlokasi di Jl. Trans Luwuk, Desa Padangon, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai (Target Operasional: Triwulan I 2025).
2. KCP Bunta (Layanan Kas): Berlokasi di Jl. Trans Sulawesi Bunta Pagimana, Kel. Salabenda, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai (Target Operasional: Triwulan II 2025).
3. KCP Palolo (Layanan Kas): Berlokasi di Jl. Trans Sulawesi Palolo, Kabupaten Sigi (Target Operasional: Triwulan IV 2025).

Selain penambahan kantor kas, Bank juga merencanakan peremajaan **sebanyak 75 unit mesin ATM/CRM** yang akan disebar di seluruh jaringan kantor sepanjang tahun 2025 guna mendukung digitalisasi layanan kas.

Plans to Open New Office Network in 2025

In accordance with the 2025 Bank Business Plan (Rencana Bisnis Bank/RBB), Bank Sulteng focuses its network expansion on strategic locations to improve cash service accessibility as follows:

1. Masama Sub-Branch Office (Cash Services): Located on Jl. Trans Luwuk, Padangon Village, Masama District, Banggai Regency (Operational Target: Q1 2025).
2. Bunta Sub-Branch Office (Cash Services): Located on Jl. Trans Sulawesi Bunta Pagimana, Salabenda Sub-district, Bunta District, Banggai Regency (Operational Target: Q2 2025).
3. Palolo Sub-Branch Office (Cash Services): Located on Jl. Trans Sulawesi Palolo, Sigi Regency (Operational Target: Q4 2025).

In addition to the addition of cash offices, the Bank also plans to **rejuvenate 75 ATM/CRM units** that will be distributed across the entire office network throughout 2025 to support the digitalization of cash services.

WILAYAH OPERASIONAL PERUSAHAAN
COMPANY OPERATIONAL AREA



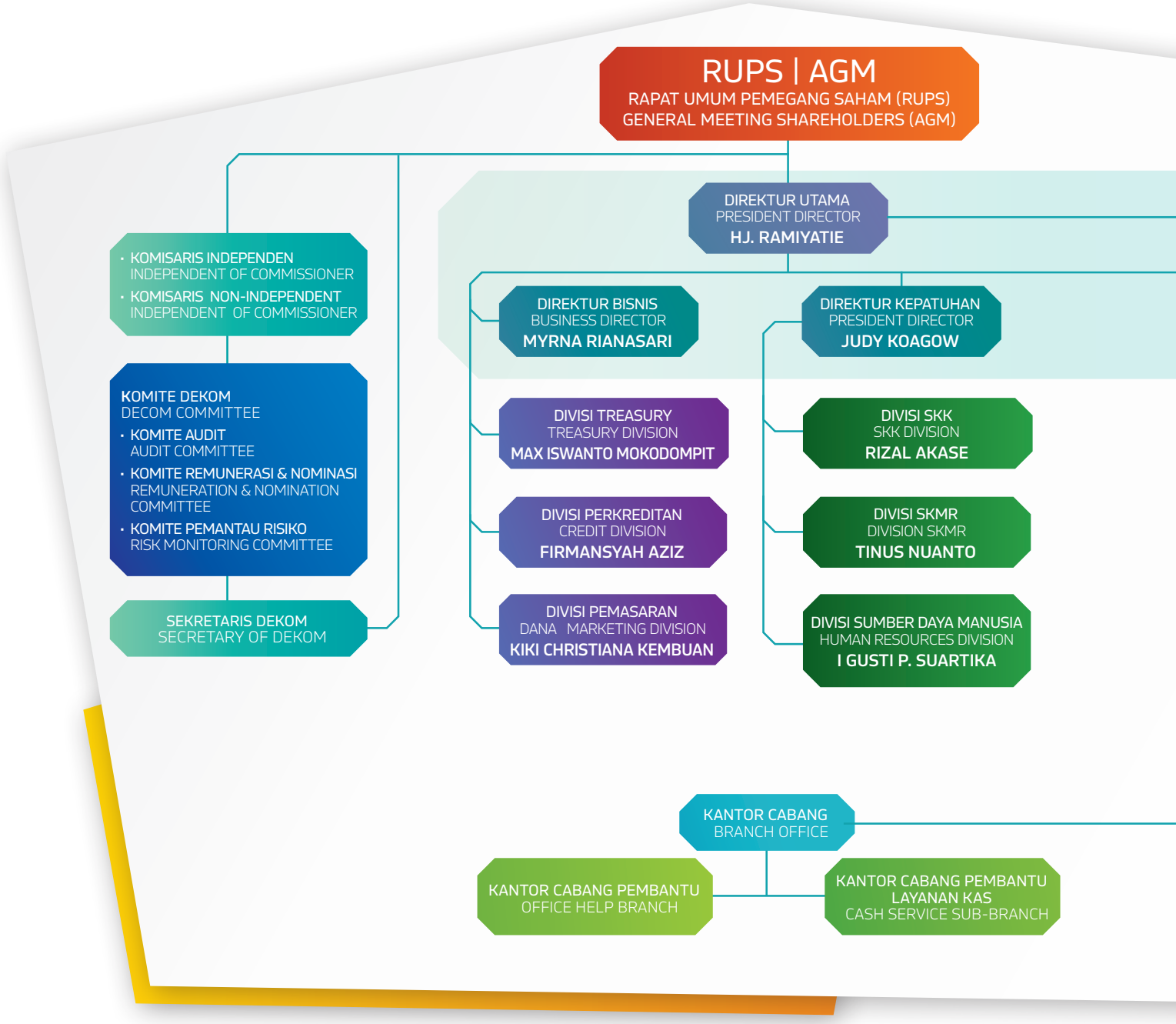
STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN
COMPANY ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Bank Sulteng meyakini bahwa struktur organisasi yang solid, transparan, dan akuntabel merupakan fondasi utama dalam mengeksekusi strategi pertumbuhan jangka panjang serta menjawab dinamika industri perbankan yang kian kompetitif.

Memasuki tahun buku 2025, selaras dengan arah kebijakan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2025-2027, Bank Sulteng melakukan penyempurnaan struktur organisasi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: 191/SK-DIR/BPD-ST/2025 tentang Struktur Organisasi dan *Job Description* Tahun 2025. Langkah strategis ini mencakup evaluasi mendalam terhadap beban kerja pada setiap divisi serta penajaman fungsi kontrol internal guna menciptakan manajemen operasional yang lebih efisien, praktis, dan terukur.

Bank Sulteng believes that a solid, transparent, and accountable organizational structure constitutes the primary foundation in executing long-term growth strategies and responding to the increasingly competitive dynamics of the banking industry.

Entering the 2025 financial year, in alignment with the policy direction of the 2025-2027 Bank Business Plan (RBB), Bank Sulteng has refined its organizational structure as stipulated through the Board of Directors Decree Number: 191/SK-DIR/BPD-ST/2025 concerning the 2025 Organizational Structure and Job Descriptions. This strategic step encompasses an in-depth evaluation of the workload in each division as well as the sharpening of internal control functions to create a more efficient, practical, and measurable operational management.

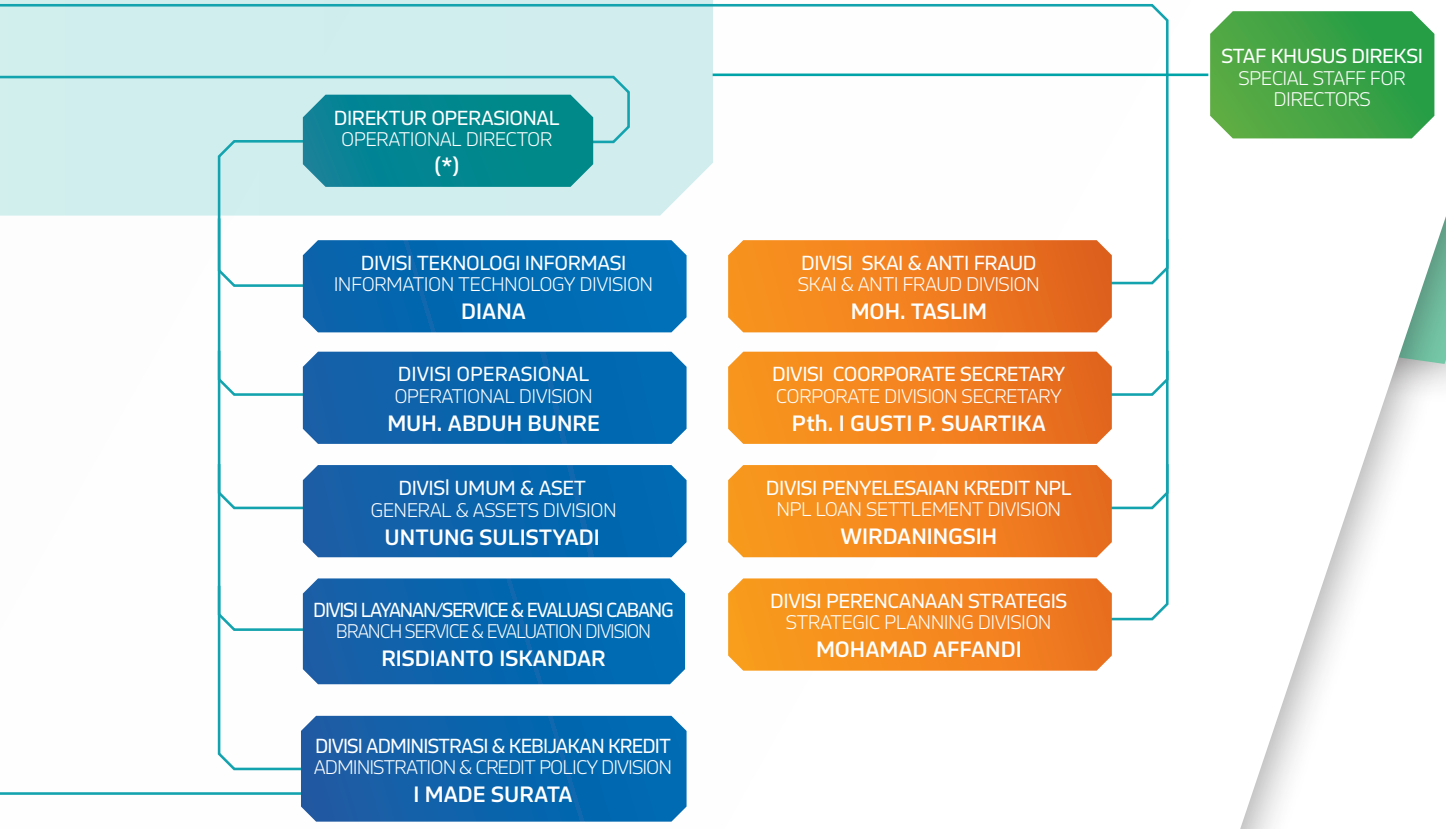


Struktur organisasi terbaru ini juga dirancang untuk memperkuat sinergi di dalam ekosistem Kelompok Usaha Bank (KUB) serta mengakomodasi kebutuhan digitalisasi perbankan, termasuk penguatan aspek ketahanan siber melalui unit kerja yang terspesialisasi. Dengan pembagian tugas dan wewenang yang lebih presisi, Bank Sulteng optimis dapat mengakselerasi pencapaian target bisnis sekaligus menegakkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) secara konsisten di seluruh lini organisasi.

Berikut adalah bagan Struktur Organisasi Bank Sulteng efektif per tahun 2025:

This latest organizational structure is also designed to strengthen synergy within the Bank Business Group (Kelompok Usaha Bank/KUB) ecosystem and accommodate the needs of banking digitalization, including the reinforcement of cyber resilience aspects through specialized work units. With a more precise division of duties and authorities, Bank Sulteng is optimistic that it can accelerate the achievement of business targets while consistently upholding the principles of Good Corporate Governance across all organizational lines.

The following is the Organizational Structure chart of Bank Sulteng, effective for the year 2025:



DAFTAR KEANGGOTAAN ASOSIASI
LIST OF MEMBERSHIP IN ASSOCIATIONS

Bank Sulteng aktif berkolaborasi dalam berbagai asosiasi industri dan lembaga profesi tingkat nasional. Hal ini dilakukan untuk selalu memperbarui informasi perbankan, meningkatkan standar layanan digital, serta memperkuat kompetensi karyawan sesuai dengan praktik terbaik di industri perbankan.

Sinergi ini juga mempertegas komitmen Bank Sulteng dalam mendukung pembangunan daerah melalui pertukaran pengetahuan yang berkelanjutan. Berikut adalah daftar asosiasi dan organisasi profesi yang diikuti oleh Bank Sulteng:

Bank Sulteng actively collaborates with various national-level industry associations and professional institutions. This initiative is undertaken to continuously stay abreast of the latest banking information, elevate digital service standards, and strengthen employee competencies in alignment with banking industry best practices.

This synergy further solidifies Bank Sulteng's commitment to supporting regional development through sustainable knowledge exchange. The following is a list of associations and professional organizations in which Bank Sulteng actively participates:

Nama Asosiasi Association Name	**Alamat** Address	**Kontak** Contact	**Website**	**Peran Keanggotaan** Membership Role
Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda)	Letjen M.T. Haryono No. 10, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12820	Telp/Fax: +62 21 83782420	www.asbanda.org	Member Member
Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	Kemang Raya No. 35, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12730	Telp/Fax: +62 21 71790212	www.lppi.or.id	Member Member
Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Menara IBI LSPP, Jl. RS. Fatmawati Raya No. 2, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12420	Telp/Fax: +62 21 75901547	www.lspp.or.id	Member Member
Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)	Jl. Sultan Iskandar Muda No. 22, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12240	Telp/Fax: +62 21 29036860	www.bsmr.org	Member Member
Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) Risk Management Certification Agency (BSMR)	Jl. Sultan Iskandar Muda No. 22, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12240 Telp: +62 21 29036680 Fax: +62 21 29036680 Website: www.bsmr.org			Member Member







Direksi memegang peranan sentral dalam menakhodai strategi dan operasional Bank Sulteng. Sesuai dengan Anggaran Dasar, Direksi bertanggung jawab penuh secara kolektif dalam mengelola Perseroan untuk kepentingan dan tujuan usaha, serta mewakili Bank Sulteng baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi senantiasa mengedepankan prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) serta kehati-hatian guna memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Komposisi Direksi Bank Sulteng diisi oleh figur-figur profesional yang memiliki kompetensi, integritas, dan pengalaman panjang di industri perbankan, yang telah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Otoritas Jasa Keuangan serta diangkat melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Berikut adalah profil singkat anggota Direksi Bank Sulteng yang menjabat per 31 Desember 2025:

The Board of Directors plays a central role in steering the strategy and operations of Bank Sulteng. In accordance with the Articles of Association, the Board of Directors bears full collective responsibility in managing the Company for its business interests and objectives, as well as representing Bank Sulteng both inside and outside the court of law.

In executing its duties, the Board of Directors consistently upholds the principles of Good Corporate Governance (GCG) and prudence to ensure sustainable business growth. The composition of the Board of Directors of Bank Sulteng is comprised of professional figures possessing competence, integrity, and extensive experience in the banking industry, who have passed the fit and proper test by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) and were appointed through the resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS/RUPS).

The following are the brief profiles of the members of the Board of Directors of Bank Sulteng serving as of December 31, 2025:



Hj. Ramiyatie
Direktur Utama
President Director

Tempat Tanggal Lahir & Usia Place, Date of Birth & Age	:	Kuala Kapuas, 21 Agustus 1971 / 54 Tahun per 31 Desember 2025 Kuala Kapuas, 21 August 1971 / 54 years old as of December 31, 2025
Domisili & Kewarganegaraan Domicile & Nationality	:	Palu, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	· Sarjana Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Palu (2004) · Bachelor of Economics, Universitas Muhammadiyah Palu (2004)
Sertifikasi Certifications	:	· Sertifikasi BSMR Level 4 pada 2017 · BSMR Level 4 Certification in 2017 · Sertifikasi BSMR Level 5 pada 2022 · BSMR Level 5 Certification in 2022 · Sertifikasi BSMR Jenjang 7 pada 2024 · BSMR Level 7 Certification in 2024
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	:	Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah No. 23 Tanggal 12 Februari 2024 dan mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 23 Januari 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) Resolution of PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah No. 23 dated February 12, 2024, and approved by the Financial Services Authority (OJK) on January 23, 2024
Riwayat Jabatan Career History	:	· Kepala Divisi Umum (2016-2019) · Head of General Affairs Division (2016-2019) · Kepala Divisi Satuan Kerja Kepatuhan (2019-2020) · Head of Compliance Unit Division (2019-2020) · Kepala Divisi Literasi, Inklusi Perlindungan Konsumen, dan Service Bank Sulteng (2020-2021) · Head of Financial Literacy, Inclusion Consumer Protection, and Service Division, Bank Sulteng (2020-2021)
Periode Menjabat & Masa Jabatan Term & Tenure	:	Periode Pertama & 2024-2028 First Term & 2024-2028
Hubungan Afiliasi Affiliation	:	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama. No affiliation with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or the controlling and principal shareholders.
Kepemilikan Saham Share Ownership	:	Tidak memiliki saham di Perusahaan No share ownership in the Company
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	:	Bank Sulteng · Komite Direksi · Board of Directors Committee Perusahaan Lain : Other Companies · Tidak ada · None



Myrna Rianasari
Direktur Bisnis
Business Director

Tempat Tanggal Lahir & Usia Place, Date of Birth & Age	:	Donggala, 01 Mei 1970 / 55 tahun per 31 Desember 2025 Donggala, 01 May 1970 / 55 years old as of December 31, 2025
Domisili & Kewarganegaraan Domicile & Nationality	:	Palu, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	Sarjana Ekonomi Manajemen dan Keuangan Perbankan, STIE YPKP Bandung (1994) Bachelor's Degree in Economics, Banking Management & Finance, STIE YPKP Bandung (1994)
Riwayat Jabatan Career History	:	· Kepala Divisi SDM (2014-2018) · Head of Human Resources Division (2014-2018) · Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Sulteng (2018-2022) · Supervisory Board Member of Bank Sulteng Pension Fund (2018-2022) · Kepala Divisi SKAI & Anti Fraud (2018-2019) · Head of SKAI & Anti-Fraud Division (2018-2019) · Pimpinan CMO (2020-2021) · Chief Marketing Officer (2020-2021) · Pemimpin Divisi Kebijakan dan Administrasi Kredit (Agustus 2021). Periode Menjabat & Masa Jabatan Periode Pertama & 2022-2026 · Head of Credit Policy and Administration Division (August 2021). Term of Office & Tenure: First Term & 2022-2026
Sertifikasi Certifications	:	· Sosialisasi Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan · Socialization on Handling Alleged Banking Crimes · Efektivitas Manajemen Audit dalam Menjaga Aset Bank · Effectiveness of Audit Management in Safeguarding Bank Asset · Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 · Risk Management Certification Level 5 · Sertifikasi BSMR Jenjang 7 pada 2024 · BSMR Level 7 Certification in 2024
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	:	Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah No. 16 tanggal 14 Maret 2023 dan mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 14 Desember 2022 Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) Resolution of PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah No. 16 dated March 14, 2023, and approved by the Financial Services Authority (OJK) on December 14, 2022
Periode Menjabat & Masa Jabatan Term & Tenure	:	Periode Pertama & 2022-2026 First Term & 2022-2026
Hubungan Afiliasi Affiliation	:	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama. | No affiliation with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or the controlling and principal shareholders.
Kepemilikan Saham Share Ownership	:	Tidak memiliki saham di Perusahaan No share ownership in the Company
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	:	Bank Sulteng · Komite Direksi · Board of Directors Committee Perusahaan Lain : Other Companies · Tidak ada · None



Judy Koagow
Direktur Kepatuhan
Compliance Director

Tempat Tanggal Lahir & Usia Place, Date of Birth & Age	:	Kotamobagu, 22 November 1969 / 56 Tahun per 31 Desember 2025 Kotamobagu, 22 November 1969 / 56 years old as of December 31, 2025
Domisili & Kewarganegaraan Domicile & Nationality	:	Palu, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	· Sarjana Perikanan, Universitas Sam Ratulangi Manado (1992) · Bachelor's Degree in Fisheries, Sam Ratulangi University, Manado (1992)
Sertifikasi Certifications	:	· Sertifikasi BSMR Jenjang 7 pada 2024 · BSMR Level 7 Certification in 2024
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	:	Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah No. 53 tanggal 29 Mei 2023 dan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah selaku PSP PT. Bank Sulteng No. 900.1.13.2/37/RO.EKON-G.ST.2024 tentang Perpanjangan masa jabatan Direktur Kepatuhan PT. Bank Sulteng periode 2024-2028 Statement of Resolution of the Extraordinary GMS of PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah No. 53 dated May 29, 2023 and Decree of the Governor of Central Sulawesi as PSP of PT Bank Sulteng No. 900.1.13.2/37/RO.EKON-G.ST.2024 concerning the Extension of the term of office of the Compliance Director of PT Bank Sulteng for the period 2024-2028
Riwayat Jabatan Career History	:	· Direktur Operasional BPD Sulawesi Utara Gorontalo (2012-2016) · Operational Director, BPD Sulawesi Utara Gorontalo (2012-2016) · Branch Manager Bank Mega (2012) · Branch Manager, Bank Mega (2012) · Relationship Manager Bank Danamon (2008) · Relationship Manager, Bank Danamon (2008)
Periode Menjabat & Masa Jabatan Term & Tenure	:	Periode Kedua & 2024-2028 First Term & 2024-2028
Hubungan Afiliasi Affiliation	:	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama. No affiliation with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or the controlling and principal shareholders.
Kepemilikan Saham Share Ownership	:	Tidak memiliki saham di Perusahaan No share ownership in the Company
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	:	Bank Sulteng · Komite Direksi · Board of Directors Committee Perusahaan Lain : Other Companies · Tidak ada · None

PROFIL KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE





Dewan Komisaris memegang peranan vital dalam memastikan terlaksananya prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) di setiap jenjang organisasi Bank Sulteng. Melalui fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris berkomitmen untuk menjaga keberlangsungan usaha serta meningkatkan nilai perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Anggota Dewan Komisaris Bank Sulteng merupakan kalangan profesional yang memiliki integritas tinggi serta kompetensi yang memadai. Penunjukan anggota Dewan Komisaris dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah memenuhi persyaratan dan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut adalah profil anggota Dewan Komisaris yang menjabat per 31 Desember 2025 :

The Board of Commissioners plays a vital role in ensuring the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles across every organizational level of Bank Sulteng. Through its supervisory and advisory functions to the Board of Directors, the Board of Commissioners is committed to safeguarding business continuity and enhancing corporate value for all stakeholders.

The members of the Board of Commissioners of Bank Sulteng are professionals who possess high integrity and adequate competence. The appointment of the members of the Board of Commissioners is conducted through the General Meeting of Shareholders (GMS/RUPS) upon fulfilling the requirements and obtaining approval from the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK).

The following are the profiles of the members of the Board of Commissioners serving as of December 31, 2025:



Novi V.B. Kaligis

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Tempat Tanggal Lahir & Usia Place, Date of Birth & Age	:	Manado, 20 November 1968 / 57 Tahun per 31 Desember 2025. Manado, November 20, 1968/ / 57 years old as of December 31, 2025
Domisili & Kewarganegaraan Domicile & Nationality	:	Palu, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	· Sarjana Ekonomi (SE), Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado (1993). · Bachelor of Economics (SE), Accounting Major, Sam Ratulangi University, Manado (1993) · Magister Manajemen (MM) Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado (2010). · Master of Management (MM), Faculty of Economics & Business, Sam Ratulangi University, Manado (2010). · Doktor Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado, (2019). · Doctorate in Management Studies, Faculty of Economics & Business, Sam Ratulangi University, Manado (2019).
Sertifikasi Certifications	:	· Asesor Sertifikasi Perbankan & Institusi, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) · Banking & Institutional Certification Assessor, National Professional Certification Agency (BNSP). · Sertifikasi Kompetensi Bidang Metodologi Pelatihan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR), Jenjang Kualifikasi 4 & 5, Bank Indonesia & Kementerian Tenaga Kerja RI · Competency Certification in Training Methodology for Payment System and Rupiah Currency Management (SPPUR), Qualification Levels 4 & 5, Bank Indonesia & Ministry of Manpower, Republic of Indonesia.
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	:	Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah No. 30 tanggal 20 September 2024 dan mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 23 Juli 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) Resolution of PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah No. 30 dated September 20, 2024, and approved by the Financial Services Authority (OJK) on July 23, 2024
Riwayat Jabatan Career History	:	· Direktur Pemasaran PT. Bank SulutGo, Bidang Treasury, Kredit & Marketing (Funding & Lending) (2012-2016) · Marketing Director, PT. Bank SulutGo, Treasury, Credit & Marketing (Funding & Lending) Division (2012-2016). · Direktur PT. Sentul Air Nusantara, Bogor (2019-2021) · Director, PT. Sentul Air Nusantara, Bogor (2019-2021). · Komisaris PT. Sentul Air Nusantara, Bogor (2019-2022) · Commissioner, PT. Sentul Air Nusantara, Bogor (2019-2022). · Direktur Utama PT. Sukaputra Graha Cemerlang, Town Management of Sentul City, Bogor (2019-2021) · President Director, PT. Sukaputra Graha Cemerlang, Town Management of Sentul City, Bogor (2019-2021). · Direktur Utama PT. Jaya Selaras Gemilang, Bogor (2019-2021) · President Director, PT. Jaya Selaras Gemilang, Bogor (2019-2021) · Direktur Operasional dan Subsidiaries PT. Sentul City, Tbk, Bogor (2021-2022) · Director of Operations and Subsidiaries, PT. Sentul City, Tbk, Bogor (2021-2022) · Direktur PT. Sentul Graha Sejahtera, Bogor (2022) · Director, PT. Sentul Graha Sejahtera, Bogor (2022)
Periode Menjabat & Masa Jabatan Term & Tenure	:	Periode Pertama & 2024-2028 First Term & 2024-2028
Hubungan Afiliasi Affiliation	:	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama. No affiliation with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or the controlling and principal shareholders.
Kepemilikan Saham Share Ownership	:	Tidak memiliki saham di Perusahaan No share ownership in the Company
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	:	Bank Sulteng · Komite Audit, · Audit Committee · Komite Pemantau Risiko · Risk Monitoring Committee · Komite Remunerasi dan Nominasi · Remuneration and Nomination Committee Perusahaan Lain : Other Companies · Tidak ada · None
Pernyataan Independensi	:	Pernyataan Independensi Komisaris Independen diungkapkan pada Bab Tata Kelola Perusahaan Sub Bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini. The Independence Statement of the Independent Commissioner is disclosed in the Corporate Governance Chapter of the Board of Commissioners Subchapter in this Annual Report.



Max Kembuan

Komisaris Non Independen
Non-Independent Commissioner

Tempat Tanggal Lahir & Usia Place, Date of Birth & Age	:	Kotamobagu, 12 Oktober 1957 / 68 Tahun per 31 Desember 2025. Kotamobagu, Oktober 12 1957 / 68 years old as of December 31, 2025.
Domisili & Kewarganegaraan Domicile & Nationality	:	Palu, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	· Sarjana Akuntansi, Universitas Hasanuddin Makassar (2003). · Bachelor of Accounting, Hasanuddin University Makassar (2003)
Sertifikasi Certifications	:	· Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Batch 1 (Tahap 2) · Risk Management Certification Maintenance Program Batch 1 (Phase 2). · Risk Management Level 6 · Risk Management Level 6.
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	:	Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah No. 30 tanggal 20 September 2024 dan mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEPR-31/D.03/2025. Statement of Resolution of the Extraordinary GMS of PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah No. 30 dated September 20, 2024, and obtained the approval of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) No. KEPR-31/D.03/2025.
Riwayat Jabatan Career History	:	· Direktur Bisnis PT. Bank Mega Tbk (2013 - 2016) · Business Director of PT Bank Mega Tbk (2013 - 2016). · Komisaris Non Independen PT. Bank SulutGo (Utusan PT. Bank Mega Corpora) (2016 s/d sekarang) · Non-Independent Commissioner of PT Bank SulutGo (Representative of PT Bank Mega Corpora) (2016 to present). · Direktur Utama PT. Trans Kalla Makassar (Trans Studio Mall Makassar) (2016 s/d sekarang) · President Director of PT Trans Kalla Makassar (Trans Studio Mall Makassar) (2016 to present).
Periode Menjabat & Masa Jabatan Term & Tenure	:	Periode Pertama & 2024-2028 First Term & 2024-2028
Hubungan Afiliasi Affiliation	:	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama. No affiliation with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or the controlling and principal shareholders.
Kepemilikan Saham Share Ownership	:	Tidak memiliki saham di Perusahaan No share ownership in the Company
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	:	Bank Sulteng · Komite Audit, · Audit Committee, · Komite Pemantau Risiko, · Risk Monitoring Committee, · Komite Remunerasi dan Nominasi. · Remuneration and Nomination Committee. Perusahaan Lain : Other Companies · Tidak ada · None
Pernyataan Independensi	:	Pernyataan Independensi Komisaris Independen diungkapkan pada Bab Tata Kelola Perusahaan Sub Bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini. The Independence Statement of the Independent Commissioner is disclosed in the Corporate Governance Chapter of the Board of Commissioners Subchapter in this Annual Report.

Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris Pada Tahun Buku dan Alasan Perubahannya

Penetapan komposisi Dewan Komisaris didasarkan pada pertimbangan kompetensi, integritas, dan pemenuhan unsur keberagaman guna mendukung pengambilan keputusan yang objektif, independen, serta bebas dari benturan kepentingan. Segala perubahan dalam susunan Dewan Komisaris dilakukan secara transparan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan tetap memperhatikan ketentuan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku.

Changes in the Composition of the Board of Commissioners During the Financial Year and the Reasons for the Changes

Composition of the Board of Commissioners is based on considerations of competence, integrity, and the fulfillment of diversity elements to support objective, independent decision-making that is free from conflicts of interest. All changes in the composition of the Board of Commissioners are carried out transparently through the General Meeting of Shareholders (GMS) mechanism, while continuing to observe the applicable regulatory provisions of the Financial Services Authority (OJK).

Periode 1 Januari 2025 – 31 Desember 2025 January 1, 2025 – December 31, 2025 Period		**Periode 1 Januari 2024 – 31 Desember 2024** January 1, 2024 – December 31, 2024 Period	
Nama Name	**Jabatan** Position	**Nama** Name	**Jabatan** Position
Novi V.B. Kaligis	Komisaris Non Independen Non-Independent Commissioner	Novi V.B. Kaligis	Komisaris Independen Independent Commissioner
Max Kembuan	Komisaris Non Independen Non-Independent Commissioner	Maimum Lawira	Komisaris Non Independen Non-Independent Commissioner


SATPAM

PROFIL SINGKAT PEJABAT EKSEKUTIF
EXECUTIVE OFFICERS' BRIEF PROFILE

Memasuki tahun buku 2025, Bank Sulteng mengakselerasi transformasi organisasi untuk menjawab tantangan perbankan digital yang dinamis. Sejalan dengan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2025-2027, Perseroan melakukan penataan ulang struktur kepemimpinan pada level Pejabat Eksekutif (Kepala Divisi) sebagai langkah strategis untuk memastikan setiap lini bisnis dipimpin oleh talenta dengan kapabilitas yang presisi.

Langkah rotasi dan penyelarasan jabatan di tahun 2025 ini merupakan manifestasi dari kebijakan evaluasi berkala yang berfokus pada tiga pilar utama:

1. Optimalisasi Produktivitas: Penyesuaian beban kerja divisi untuk menciptakan proses bisnis yang lebih efisien dan lincah (*agile*).
2. Penyelarasan Fungsi: Sinkronisasi tugas dan tanggung jawab jabatan dengan dinamika layanan perbankan modern.
3. Penguatan Tata Kelola: Penempatan talenta terbaik pada fungsi kontrol, kepatuhan, serta manajemen risiko berbasis teknologi.

Sebagai bentuk komitmen terhadap kesejahteraan talenta, transformasi tersebut didukung oleh kebijakan remunerasi yang kompetitif sesuai regulasi OJK, mencakup penyesuaian imbal jasa, tunjangan jabatan, serta apresiasi terhadap daya beli pegawai. Melalui kepemimpinan yang lebih segar dan kompeten, Bank Sulteng optimis dapat memperkokoh standar Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sekaligus mencapai target pertumbuhan yang berkelanjutan di tahun 2025.

Berikut adalah profil singkat 14 Pejabat Eksekutif Bank Sulteng yang menjabat per 31 Desember 2025:

Entering the 2025 financial year, Bank Sulteng is accelerating its organizational transformation to address the dynamic challenges of digital banking. In alignment with the 2025-2027 Bank Business Plan (Rencana Bisnis Bank/RBB), the Company has restructured its leadership at the Executive Officer (Division Head) level as a strategic measure to ensure that each business line is led by talents with precise capabilities.

The rotation and role alignment initiatives in 2025 are a manifestation of the periodic evaluation policy focused on three primary pillars:

1. Productivity Optimization: Adjusting divisional workloads to create more efficient and agile business processes.
2. Functional Alignment: Synchronizing roles and responsibilities with the dynamics of modern banking services.
3. Governance Reinforcement: Positioning top talents in control, compliance, and technology-based risk management functions.

As a form of commitment to talent welfare, this transformation is supported by a competitive remuneration policy in accordance with the Financial Services Authority (OJK) regulations, encompassing adjustments to compensation, position allowances, and appreciation for employee purchasing power. Through a refreshed and more competent leadership, Bank Sulteng is optimistic about fortifying the standards of Good Corporate Governance while simultaneously achieving sustainable growth targets in 2025.

The following are the brief profiles of the 14 Executive Officers of Bank Sulteng serving as of December 31, 2025:







Firmansyah Azis
Divisi Perkreditan
Credit Division

Tempat Tanggal Lahir & Usia Place, Date of Birth & Age	:	Tipo, 16 September 1977/48 Tahun per 31 Desember 2025 Tipo, 16 September 1977/48 years old as of 31 December 2025
Domisili & Kewarganegaraan Domicile & Nationality	:	Palu, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	Sarjana Ekonomi Manajemen, Universitas Tadulako (2000) Bachelor of Economics in Management, Universitas Tadulako (2000)
Sertifikasi Certifications	:	• Sertifikasi Manajemen Risiko Level IV • Risk Management Certification Level IV
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	:	SK Direksi No.165/SK.M/BPD-ST/2024 Board of Directors Decree No. 27/SK.M/BPD-ST/2021
Riwayat Jabatan Career History	:	• Kepala Divisi Pemasaran (2019) • Head of Marketing Division (2019) • Pemimpin Divisi Pemasaran (2020) • Head of Marketing Division (2020) • Pemimpin Divisi SKAI & Anti Fraud (2021) • Head of Internal Audit (SKAI) & Anti-Fraud Division (2021) • Pemimpin Divisi Treasury (2025) • Head of Treasury Division (2025) • Pemimpin Divisi Perkreditan (2025) • Head of Credit Division (2025)
Periode Menjabat & Masa Jabatan Term & Tenure	:	2025 – Sekarang 2025 - Present



Moh. Taslim
Divisi SKAI & Anti Fraud
Skai & Anti Fraud Division

Tempat Tanggal Lahir & Usia Place, Date of Birth & Age	:	Palu, 18 Oktober 1973 / 52 Tahun per 31 Desember 2025 Palu, 18 Oktober 1973 / 52 years old as of 31 December 2025
Domisili & Kewarganegaraan Domicile & Nationality	:	Palu, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	Sarjana Ilmu Sosial, STIA Panca Marga Palu (2005) Bachelor of Social Sciences, STIA Panca Marga Palu (2005)
Sertifikasi Certifications		Sertifikasi Manajemen Risiko Level IIIF Risk Management Certification Level IIIF
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	:	SK Direksi No. 143/SK.M/BPD-ST/2025 Board of Directors Decree No. 143/SK.M/BPD-ST/2025
Riwayat Jabatan Career History	:	• Kepala Cabang Parigi (2017) • Parigi Branch Manager (2017) • Pemimpin Divisi Umum & Aset (2021) • Head of General & Asset Division (2021) • Pemimpin Divisi Hukum & Penyelamatan Kredit (2024) • Head of Legal & Credit Rescue Division (2024) • Pemimpin Divisi SKAI & Anti Fraud (2025) • Head of SKAI & Anti-Fraud Division (2025)
Periode Menjabat & Masa Jabatan Term & Tenure	:	2025 – Sekarang 2025 - present



Wirdaningsih
Divisi Penyelesaian Kredit NPL
Head of NPL Credit Settlement Division Place,

Tempat Tanggal Lahir & Usia Place, Date of Birth & Age	:	Palu, 31 Maret 1976 / 49 Tahun per 31 Desember 2025 Palu, 31 March 1976 / 49 years old as of 31 December 2025
Domisili & Kewarganegaraan Domicile & Nationality	:	Palu, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	· Sarjana Ekonomi, Universitas Tadulako (1998) · Bachelor of Economics, Tadulako University (1998) · Magister Manajemen, Universitas Tadulako (2014) · Master of Management, Tadulako University
Sertifikasi Certifications	:	· Sertifikasi Manajemen Risiko Level II · Risk Management Certification Level II
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	:	SK Direksi No. 142/SK.M/BPD-ST/2025 Board of Directors Decree No. 142/SK.M/BPD-ST/2025
Riwayat Jabatan Career History	:	· Pinbag. Pemasaran Dana & Jasa Div. Pemasaran Dana & Jasa (2021) · Head of Fund & Service Marketing Department, Fund & Service Marketing Division (2021) · Pemimpin Bagian CMO & Lakupandai Divisi Perencanaan Strategis (2022) · Head of CMO & Lakupandai Department, Strategic Planning Division (2022) · Pjs. Pemimpin Divisi Layanan/Service & Evaluasi Cabang (2023) · Act. of Head of Service & Branch Evaluation Division (2023) · Pjs. Pemimpin Divisi Pemasaran Dana & Jasa (2024) · Act. of Head of Fund & Service Marketing Division (2024)
Periode Menjabat & Masa Jabatan Term & Tenure	:	2025 – Sekarang 2025 - present



Diana
Divisi Teknologi Informasi
Information Technology Division

Tempat Tanggal Lahir & Usia Place, Date of Birth & Age	:	Palu, 29 Oktober 1977 / 48 Tahun per 31 Desember 2025 Palu, 29 October 1977/ 48 years old as of 31 December 2025
Domisili & Kewarganegaraan Domicile & Nationality	:	Palu, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	Sarjana Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Bandung, 2001 Bachelor of Informatics Engineering, Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Bandung, 2001
Sertifikasi Certifications	:	· Sertifikasi Audit Internal Bank – Auditor · Internal Audit Certification – Auditor · Sertifikasi Manajemen Risiko Level IV · Risk Management Certification Level IV · Sertifikasi Manajemen Umum Dana Pensiun · Pension Fund General Management
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	:	SK Direksi No. 89/SK.M/BPD-ST/2025 Board of Directors Decree No. 89/SK.M/BPD-ST/2025
Riwayat Jabatan Career History	:	· Pemimpin Divisi Satuan Kerja Kepatuhan (2021) · Head of Compliance Unit Division (2021) · Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis (2022) · Head of Strategic Planning Division (2022) · Pemimpin Divisi Operasional (2025) · Head of Operational Division (2025) · Pemimpin Divisi Teknologi Informasi (2025) · Head of Information Technology Division (2025)
Periode Menjabat & Masa Jabatan Term & Tenure	:	2025 – Sekarang 2025 - present



Tinus Nuanto
Divisi Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)
Risk Management Unit Division (SKMR)

Tempat Tanggal Lahir & Usia Place, Date of Birth & Age	:	Palu, 08 September 1963 / 62 Tahun per 31 Desember 2025 Palu, 08 September 1963 / 62 years old as of 31 December 2025
Domisili & Kewarganegaraan Domicile & Nationality	:	Palu, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	Sarjana Ekonomi Manajemen, UNSIMAR (1999) Bachelor of Economics Management, UNSIMAR (1999)
Sertifikasi Certifications		Sertifikasi Manajemen Risiko Level IV Risk Management Certification Level IV
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	:	PKWT Direksi No. 02/PKWT/SH/BPD-ST/2024 Fixed-Term Employment Contract (PKWT) Board of Directors No. 02/PKWT/SH/BPD-ST/2024
Riwayat Jabatan Career History	:	Komisaris Non Independen (sampai dengan 20 September 2024) Non-Independent Commissioner (up to September 20, 2024)
Periode Menjabat & Masa Jabatan Term & Tenure	:	2024 – Sekarang 2024 - present



I Gusti P. Suartika
Divisi SDM
HR Division

Tempat Tanggal Lahir & Usia Place, Date of Birth & Age	:	Jembrana, 06 Agustus 1971 / 54 Tahun per 31 Desember 2025 Jembrana, 06 Agustus 1971 / 54 years old as of 31 December 2025
Domisili & Kewarganegaraan Domicile & Nationality	:	Palu, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	Sarjana Ekonomi, UNISMUH Palu (2010) Bachelor of Economics, UNISMUH Palu (2010)
Sertifikasi Certifications	:	• Sertifikasi Manajemen Risiko Level IV • Risk Management Certification Level IV • Sertifikasi Manajemen Umum Dana Pensiun • Pension Fund General Management
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	:	SK Direksi No. 57/SK.P/BPD-ST/2021 Board of Directors Decree No. 57/SK.P/BPD-ST/2021
Riwayat Jabatan Career History	:	• Kepala Bagian Adm & Penggajian Kantor Pusat (2013) • Head of Administration & Payroll Department, Head Office (2013) • Pemimpin Bagian Administrasi & Kepegawaian (2019) • Head of Administration & Personnel Department (2019) • Pjs. Pemimpin Divisi SDM (2021) • Act. of Head of HR Division (2021) • Pemimpin Divisi SDM (2022) • Head of HR Division (2022)
Periode Menjabat & Masa Jabatan Term & Tenure	:	2021 – Sekarang 2021 - present



Muh. Abduh Bunre
Divisi Operasional
Operational Division

Tempat Tanggal Lahir & Usia Place, Date of Birth & Age	:	Enrekang, 19 Februari 1974 / 51 Tahun per 31 Desember 2025 Enrekang, 19 Februari 1974 / 51 years old as of 31 December 2025
Domisili & Kewarganegaraan Domicile & Nationality	:	Palu, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	Sarjana Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar (2003) Bachelor of Economics, Makassar School of Economics (2003)
Sertifikasi Certifications	:	• Sertifikasi Manajemen Risiko Level IV • Risk Management Certification Level IV • Sertifikasi General Banking 3 • General Banking 3 Certification
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	:	SK Direksi No. 90/SK.M/BPD-ST/2025 Board of Directors Decree No. 90/SK.M/BPD-ST/2025
Riwayat Jabatan Career History	:	• Pemimpin Divisi Informasi Teknologi (2019) • Head of Information Technology Division (2019) • Pemimpin Satuan Kerja Kepatuhan (2020) • Head of Compliance Unit (2020) • Pemimpin Divisi Informasi Teknologi (2021) • Head of Information Technology Division (2021) • Pemimpin Divisi Operasional (2025) • Head of Operational Division (2025)
Periode Menjabat & Masa Jabatan Term & Tenure	:	2025 – Sekarang 2025 - present



Untung Sulistyadi
Divisi Umum dan Asset
General and Asset Division

Tempat Tanggal Lahir & Usia Place, Date of Birth & Age	:	Kayu Agung, 01 Mei 1985 / 40 Tahun per 31 Desember 2025 Kayu Agung, 01 Mei 1985 / 40 years old as of 31 December 2025
Domisili & Kewarganegaraan Domicile & Nationality	:	Palu, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	Sarjana Teknik Universitas Brawijaya Malang 2008 Bachelor of Engineering, Brawijaya University, Malang 2008
Sertifikasi Certifications	:	*Refreshment* Manajemen Risiko Jenjang 5 (2024). Risk Management Refreshment Level 5 (2024).
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	:	SK Direksi No. 121/SK.M/BPD-ST/2025 Board of Directors Decree No. 121/SK.M/BPD-ST/2025
Riwayat Jabatan Career History	:	• Deputi Branch Manager KCU Palu (2017) • Deputy Branch Manager, Palu Main Branch Office (2017) • Pemimpin Kantor Cabang Bungku (2019) • Bungku Branch Manager (2019) • Pjs. Pemimpin Divisi Satuan Kerja Kepatuhan (2025) • Acting Head of Compliance Unit Division (2025) • Pjs. Pemimpin Divisi Umum & Asset (2025) • Acting Head of General & Asset Division (2025)
Periode Menjabat & Masa Jabatan Term & Tenure	:	2025 – Sekarang 2025 - present



Max Iswanto Mokodompit
Divisi Treasury
Treasury Division

Tempat Tanggal Lahir & Usia Place, Date of Birth & Age	:	Makassar, 29 April 1971/54 Tahun per 31 Desember 2025 Makassar, 29 April 1971/54 years old as of 31 December 2025
Domisili & Kewarganegaraan Domicile & Nationality	:	Palu, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	Sarjana Hukum Perdata – UMI Makassar 1995 Bachelor of Civil Law – UMI Makassar 1995
Sertifikasi Certifications		Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 (2025) – LSP Perbankan. Risk Management Certification Level 6 (2025) – Banking LSP.
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	:	SK Direksi No. 171/SK.P/BPD-ST/2024 Board of Directors Decree No. 171/SK.P/BPD-ST/2024
Riwayat Jabatan Career History	:	• Pemimpin bagian Akuntansi & Pajak (2021) • Head of Accounting & Tax Department (2021) • Pemimpin bagian Pembinaan & Evaluasi Cabang (2023) • Head of Branch Coaching & Evaluation Department (2023) • Pemimpin Cabang PT. Bank Sulteng KC Tolitoli (2025) • Branch Manager of PT Bank Sulteng, Tolitoli Branch Office (2025) • Pjs. Pemimpin Divisi Treasury (2025 - Sekarang) • Acting Head of Treasury Division (2025 - Present)
Periode Menjabat & Masa Jabatan Term & Tenure	:	2024 – Sekarang 2024 - present



Mohammad Affandi
Divisi Perencanaan Strategis
Strategic Planning Division

Tempat Tanggal Lahir & Usia Place, Date of Birth & Age	:	Palu, 27 Agustus 1977 / 48 Tahun per 31 Desember 2025 Palu, 27 Agustus 1977 / 48 years old as of 31 December 2025
Domisili & Kewarganegaraan Domicile & Nationality	:	Palu, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	Sarjana Ekonomi – Universitas Tadulako 2004 Bachelor of Economics – Tadulako University 2004
Sertifikasi Certifications	:	• SESPIBANK Angkatan 72 • SESPIBANK Class of 72 • General Banking Level 3 • Perbankan Umum Level 3 • Refreshment Manajemen Risiko Jenjang 5 (2023). • Risk Management Refreshment Level 5 (2023).
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	:	SK Direksi No. 166/SK.P/BPD-ST/2025 Board of Directors Decree No. 166/SK.P/BPD-ST/2025
Riwayat Jabatan Career History	:	• Pemimpin Wilayah se-Kota (2020) • City-wide Regional Head (2020) • Pinbag Aset & Liability Management (2021) • Head of Asset & Liability Management Department (2021) • Pemimpin Bagian Regulasi & BPP/SOP Divisi SKK (2025) • Head of Regulation & BPP/SOP Department, SKK Division (2025) • Pjs. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis (2025) • Acting Head of Strategic Planning Division (2025)
Periode Menjabat & Masa Jabatan Term & Tenure	:	2025 – Sekarang 2025 - present



Risdianto Iskandar
Divisi Layanan/Service & Evaluasi Cabang
Service & Branch Evaluation Division

Tempat Tanggal Lahir & Usia Place, Date of Birth & Age	:	Palu, 22 Desember 1977 / 48 Tahun per 31 Desember 2025 Palu, 22 Desember 1977 / 48 years old as of 31 December 2025
Domisili & Kewarganegaraan Domicile & Nationality	:	Palu, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	Sarjana Ekonomi, STIE Makassar, 2003 Bach
Sertifikasi Certifications	:	Jenjang VI Bidang Sertifikasi Manajemen Risiko Risk
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	:	SK Direksi No.95/SK.M/BPD-ST/2024 Board of Directors Decree No.95/SK.M/BPD-ST/2024
Riwayat Jabatan Career History	:	• Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia (2019) • Head of Human Resources Division (2019) • Pemimpin Divisi Kredit (2021) • Head of Credit Division (2021) • Pemimpin Divisi Hukum & Penyelamatan Kredit (2022) • Head of Legal & Credit Rescue Division (2022) • Pemimpin Layanan/Service & Evaluasi Cabang (2024) • Head of Service & Branch Evaluation (2024)
Periode Menjabat & Masa Jabatan Term & Tenure	:	2024 – Sekarang 2024 - present



Rizal Akase
Divisi Satuan Kerja Kepatuhan (SKK)
Compliance Unit Division

Tempat Tanggal Lahir & Usia Place, Date of Birth & Age	:	Leok, 23 Mei 1975 / 50 Tahun per 31 Desember 2025 Leok, 23 May 1975 / 50 years old as of 31 December 2025
Domisili & Kewarganegaraan Domicile & Nationality	:	Palu, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	Sarjana Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YASIH, 1998 Bachelor of Economics, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YASIH, 1998
Sertifikasi Certifications	:	• Sertifikasi Audit Internal Bank - Auditor • Bank Internal Audit Certification - Auditor • Sertifikasi Manajemen Risiko Level IV • Risk Management Certification Level IV
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	:	SK Direksi No.31/SK.MB/PD-ST/2021 Board of Directors Decree No. 31/SK.MB/PD-ST/2021
Riwayat Jabatan Career History	:	• Kepala Divisi Satuan Kerja Kepatuhan (2017) • Head of Compliance Unit Division (2017) • Pemimpin Divisi Asset & Umum (2019) • Head of Asset & General Division (2019) • Pemimpin Divisi Satuan Kerja Kepatuhan (2021) • Head of Compliance Unit Division (2021) • Pemimpin Divisi SKAI & Anti Fraud (2021) • Head of SKAI & Anti-Fraud Division (2021)
Periode Menjabat & Masa Jabatan Term & Tenure	:	2025 – Sekarang 2025 - present



I Made Surata
Divisi Administrasi & Kebijakan Kredit
Credit Administration & Policy Division

Tempat Tanggal Lahir & Usia Place, Date of Birth & Age	:	Seribupati, 14 Mei 1973 / 52 Tahun per 31 Desember 2025 Seribupati, 14 May 1973 / 52 years old as of 31 Desember 2025
Domisili & Kewarganegaraan Domicile & Nationality	:	Palu, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	SMAN 3 Luwuk 1991 3 Luwuk State High School, 1991
Sertifikasi Certifications	:	• Sertifikasi Manajemen Risiko Level IV • Risk Management Certification Level IV
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	:	SK Direksi No. 16/SK.M/BPD-ST/2022 Tanggal 1 Juli 2022 Board of Directors Decree No. 16/SK.M/BPD-ST/2022 Dated July 1, 2022
Riwayat Jabatan Career History	:	• Kepala Bagian Kebijakan Kredit Kantor Pusat (2014) • Head of Credit Policy Department, Head Office (2014) • Pemimpin Bagian Kebijakan & Laporan Kredit (2019) • Head of Credit Policy & Reporting Department (2019) • Pinbag. Kebijakan & Lap. Kredit Div.Kebijakan & Lap. Kredit (2021) • Head of Credit Policy & Reporting Department, Credit Policy & Reporting Division (2021) • Pinbag. Review & Pelaporan Kredit Div.i Adm.& Kebijakan Kredit (2021) • Head of Credit Review & Reporting Department, Credit Admin. & Policy Division (2021) • Pjs. Pemimpin Divisi Kebijakan & Adm Kredit (2022) • Acting Head of Credit Policy & Admin Division (2022) • Pemimpin Divisi Kebijakan & Adm Kredit (2023 - Sekarang) • Head of Credit Policy & Admin Division (2023 - Present)
Periode Menjabat & Masa Jabatan Term & Tenure	:	2022 – Sekarang 2022 - present



I Gusti P. Suartika
PTH Corporate Secretary
Compliance Unit Division

Tempat Tanggal Lahir & Usia Place, Date of Birth & Age	:	Jembrana, 06 Agustus 1971 / 54 Tahun per 31 Desember 2025 Jembrana, 06 Agustus 1971 / 54 years old as of 31 December 2025
Domisili & Kewarganegaraan Domicile & Nationality	:	Palu, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	Sarjana Ekonomi, UNISMUH Palu (2010) Bachelor of Economics, UNISMUH Palu (2010)
Sertifikasi Certifications	:	• Sertifikasi Manajemen Risiko Level IV • Risk Management Certification Level IV • Sertifikasi Manajemen Umum Dana Pensiun • Pension Fund General Management Certification
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	:	SK Direksi No. 57/SK.P/BPD-ST/2021 Board of Directors Decree No. 57/SK.P/BPD-ST/2021
Riwayat Jabatan Career History	:	• Kepala Bagian Adm & Penggajian Kantor Pusat (2013) • Head of Administration & Payroll Department, Head Office (2013) • Pemimpin Bagian Administrasi & Kepegawaian (2019) • Head of Administration & Personnel Department (2019) • Pjs. Pemimpin Divisi SDM (2021) • Acting Head of HR Division (2021) • Pemimpin Divisi SDM (2022) • Head of HR Division (2022)
Periode Menjabat & Masa Jabatan Term & Tenure	:	2021 – Sekarang 2021 - present



Kiky Christiana Kembuan
Divisi Pemasaran
Marketing Division

Tempat Tanggal Lahir & Usia Place, Date of Birth & Age	:	Ujung Pandang, 17 Mei 1986 / 39 Tahun per 31 Desember 2025 Ujung Pandang, 17 Mei 1986 / 39 years old as of 31 December 2025
Domisili & Kewarganegaraan Domicile & Nationality	:	Palu, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	Sarjana Ekonomi, UNHAS (2011) Bachelor of Economics, UNHAS (2011)
Sertifikasi Certifications	:	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang V Risk Management Certification Level V
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	:	SK Direksi No. 141/SK.M/BPD-ST/2025 Board of Directors Decree No. 141/SK.M/BPD-ST/2025
Riwayat Jabatan Career History	:	• Pemimpin Cabang Utama (2024) • Main Branch Manager (2024) • Pjs. Pemimpin Divisi Corporate Secretary (2025) • Acting Head of Corporate Secretary Division (2025) • Pjs. Pemimpin Divisi Pemasaran (2025) • Acting Head of Marketing Division (2025)
Periode Menjabat & Masa Jabatan Term & Tenure	:	2025 – Sekarang 2025 - present

JUMLAH DAN PROFIL KARYAWAN
NUMBER AND PROFILE OF EMPLOYEE

Bank Sulteng meyakini bahwa akselerasi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan sangat bergantung pada kualitas dan dedikasi talenta yang memilikinya. Sebagai pilar utama penggerak organisasi, pengelolaan sumber daya manusia di tahun 2025 difokuskan pada penguatan struktur kompetensi dan pemerataan produktivitas di seluruh jaringan kantor. Bank senantiasa berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan dinamis guna memastikan setiap insan Bank Sulteng mampu memberikan kontribusi terbaiknya bagi kemajuan daerah.

Per 31 Desember 2025, Perusahaan didukung oleh kekuatan personel yang handal dengan komposisi yang beragam. Formasi ini dirancang secara strategis untuk menjawab tantangan perbankan digital serta memenuhi kebutuhan layanan nasabah yang semakin kompleks. Berikut adalah rincian profil dan komposisi karyawan Bank Sulteng pada akhir periode laporan tahun 2025:

Bank Sulteng believes that the acceleration of sustainable business growth highly depends on the quality and dedication of its talents. As the primary pillar driving the organization, human resource management in 2025 is focused on strengthening the competency structure and the equitable distribution of productivity across the entire office network. The Bank is consistently committed to creating an inclusive and dynamic work environment to ensure that every Bank Sulteng personnel is capable of making their best contribution to regional progress.

As of December 31, 2025, the Company is supported by a reliable workforce with a diverse composition. This formation is strategically designed to address the challenges of digital banking and to meet increasingly complex customer service needs. The following are the details of the profile and composition of Bank Sulteng's employees at the end of the 2025 reporting period:

1. Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

1. Employee Composition by Gender

Uraian	2025	2024	2023	Description
Laki-Laki	426	442	437	Male
Perempuan	318	327	309	Female
Jumlah	**744**	**769**	**746**	Total

2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Jabatan

2. Employee Composition by Job Level

Uraian	2025	2024	2023	Description
Senior Executive Vice President	-	-	1	Senior Executive Vice President
Vice President	14	7	8	Vice President
Assistant Vice President	15	9	7	Assistant Vice President
Senior Manager	13	25	25	Senior Manager
Manager	11	88	94	Manager
Junior Manager	45	50	50	Junior Manager
Officer	1	101	103	Officer
Senior Staff	14	69	73	Senior Staff
Junior Staff	178	335	300	Junior Staff
Senior Non-Staff	373	23	23	Senior Non-Staff
Junior Non-Staff	80	62	63	Junior Non-Staff
Jumlah	**744**	**769**	**746**	Total

3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

3. Employee Composition by Educational Background

Uraian	2025	2024	2023	Description
Magister	24	26	16	Master's Degree
Sarjana	500	511	479	Bachelor's Degree
Diploma	22	23	25	Diploma
SMA/SMK	198	209	226	Senior High School/Vocational School
Jumlah	**744**	**769**	**746**	Total

4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

4. Employee Composition by Employment Status

Uraian	2025	2024	2023	Description
Pegawai Tetap	696	610	610	Permanent Employee
Pegawai Tetap (Non-Staf)	48	85	86	Permanent Employee (Non-Staff)
Kontrak	-	74	50	Contract Employee
Jumlah	**744**	**769**	**746**	Total

5. Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

5. Employee Composition by Age

Uraian	2025	2024	2023	Description
> 55 tahun	2	2	1	> 55 years old
51 - 55 tahun	54	45	38	51 - 55 years old
46 - 50 tahun	86	85	84	46 - 50 years old
41 - 45 tahun	-	87	82	41 - 45 years old
36 - 40 tahun	160	138	131	36 - 40 years old
31 - 35 tahun	198	214	215	31 - 35 years old
26 - 30 tahun	126	151	156	26 - 30 years old
21 - 25 tahun	34	47	38	21 - 25 years old
18 - 20 tahun	-	-	1	18 - 20 years old
Jumlah	**744**	**769**	**746**	Total

STRUKTUR DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
STRUCTURE AND COMPOSITION OF SHAREHOLDERS

Kepercayaan dan dukungan berkelanjutan dari para pemegang saham merupakan fondasi utama bagi Bank Sulteng dalam menjalankan transformasi bisnis dan memperkuat ketahanan finansial di tengah dinamika industri perbankan yang kompetitif. Struktur kepemilikan saham Perusahaan yang melibatkan Pemerintah Daerah dan sektor swasta nasional mencerminkan kolaborasi harmonis yang berorientasi pada peningkatan nilai ekonomi di Sulawesi Tengah.

Sepanjang tahun 2025, Bank Sulteng senantiasa menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan modal, guna memastikan setiap kebijakan strategis selaras dengan kepentingan para pemegang saham. Fokus Bank tetap pada penguatan basis modal inti untuk mendukung ekspansi layanan digital dan pembiayaan sektor-sektor produktif di daerah.

Komitmen tersebut semakin dipertegas dengan adanya peningkatan dana setoran modal sepanjang tahun berjalan, yang diproyeksikan akan semakin memperkuat fondasi finansial Bank di masa depan. Per 31 Desember 2025, komposisi pemegang saham Bank Sulteng terdiri dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pemegang saham pengendali, 13 Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Tengah, serta PT Mega Corpora sebagai mitra strategis dari sektor usaha nasional, dengan rincian sebagai berikut

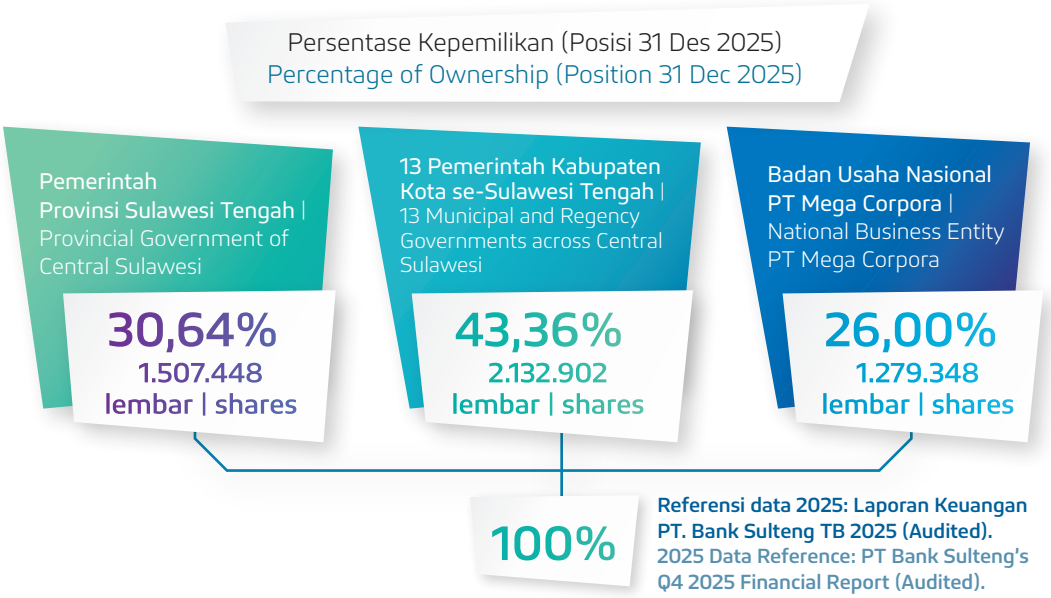
1. Struktur Pemegang Saham Bank Sulteng

The continuous trust and support from shareholders constitute the primary foundation for Bank Sulteng in executing business transformation and strengthening financial resilience amidst the dynamic and competitive banking industry. The Company's share ownership structure, involving the Regional Government and the national private sector, reflects a harmonious collaboration oriented towards enhancing economic value in Central Sulawesi.

Throughout 2025, Bank Sulteng consistently maintains transparency and accountability in capital management to ensure every strategic policy aligns with the interests of the shareholders. The Bank's focus remains on strengthening the core capital base to support the expansion of digital services and the financing of productive sectors in the region.

This commitment is further emphasized by the increase in capital deposit funds throughout the current year, which is projected to further strengthen the Bank's financial foundation in the future. As of December 31, 2025, the shareholder composition of Bank Sulteng consists of the Central Sulawesi Provincial Government as the controlling shareholder, 13 Regency and City Governments across Central Sulawesi, and PT Mega Corpora as a strategic partner from the national business sector, with the following details:

1. Bank Sulteng Shareholder Structure



Referensi data 2025: Laporan Keuangan PT. Bank Sulteng TB 2025 (Audited).
2025 Data Reference: PT Bank Sulteng's Q4 2025 Financial Report (Audited).

2. Komposisi Pemegang Saham (Rincian)

2. Shareholding Composition of Bank Sulteng

No.	Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (units)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)	Pemegang Saham Shareholders
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	1.507.448	30,64	Provincial Government of Central Sulawesi
2	Pemerintah Kabupaten Kota se-Sulawesi Tengah	2.132.902	43,36	Regency and City Governments of Central Sulawesi
	(1) Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong	242.638	4,93	(1) Government of Parigi Moutong Regency
	(2) Pemerintah Kabupaten Tolitoli	222.523	4,52	(2) Government of Tolitoli Regency
	(3) Pemerintah Kabupaten Poso	171.897	3,49	(3) Government of Poso Regency
	(4) Pemerintah Kabupaten Banggai	238.417	4,85	(4) Government of Banggai Regency
	(5) Pemerintah Kabupaten Buol	148.407	3,02	(5) Government of Buol Regency
	(6) Pemerintah Kabupaten Donggala	168.487	3,42	(6) Government of Donggala Regency
	(7) Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	181.068	3,68	(7) Government of Banggai Islands Regency
	(8) Pemerintah Kabupaten Tojo Una- una	164.495	3,34	(8) Government of Tojo Una-Una Regency
	(9) Pemerintah Kota Palu	125.728	2,56	(9) Government of Palu City
	(10) Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	144.741	2,94	(10) Government of North Morowali Regency
	(11) Pemerintah Kabupaten Morowali	144.164	2,93	(11) Government of Morowali Regency
	(12) Pemerintah Kabupaten Banggai Laut	113.591	2,31	(12) Government of Banggai Laut Regency
	(13) Pemerintah Kabupaten Sigi	66.746	1,36	(13) Government of Sigi Regency
3	PT Mega Corpora	1.279.348	26,00	PT Mega Corpora
Jumlah		**4.919.698**	**100,00**	Total

3. Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memegang peranan krusial sebagai Pemegang Saham Utama dan Pengendali (PSP) Bank Sulteng. Hingga akhir tahun buku 2025, kepemilikan saham oleh Pemerintah Provinsi tetap menjadi jangkar stabilitas organisasi, yang secara aktif mengarahkan kebijakan Bank untuk berkontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Main and Controlling Shareholders

The Central Sulawesi Provincial Government plays a crucial role as the Main and Controlling Shareholder (Pemegang Saham Utama dan Pengendali/PSP) of Bank Sulteng. Until the end of the 2025 financial year, share ownership by the Provincial Government remains the anchor of organizational stability, actively directing the Bank's policies to contribute maximally to regional economic growth.

Tabel Pemegang Saham dengan Kepemilikan ≥ 5%
Table of Shareholders with ≥ 5% Ownership

No	Nama Pemegang Saham	Lembar Saham Number of Shares	%	Shareholder Name
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	1.507.448	30,64	Provincial Government of Central Sulawesi
2	PT Mega Corpora	1.279.348	26,00	PT Mega Corpora
Jumlah Total		**2.786.796**	**56,64**	Total

4. Jumlah Pemegang Saham Berdasarkan Klasifikasi

4. Number of Shareholders Based on Classification

Klasifikasi Classification	Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase Percentage
Institusi Lokal Local Institutions	Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan PT Mega Corpora Provincial Government, Regency/City Governments, and PT Mega Corpora	4.919.698	100,00%
Institusi Asing Foreign Institutions	Tidak ada None	0	0,00%
Individu Lokal Local Individuals	Tidak ada None	0	0,00%
Individu Asing Foreign Individuals	Tidak ada None	0	0,00%
Jumlah Total		**4.919.698**	**100,00%**

Sumber Data: Berdasarkan struktur kepemilikan yang eksklusif dikuasai institusi lokal.
Data Source: Based on the ownership structure exclusively controlled by local institutions.

5. Informasi Kepemilikan Saham Masyarakat dan Internal

Partisipasi Publik dan Program Kepemilikan Saham

Hingga penutupan tahun buku 31 Desember 2025, Bank Sulteng tidak memiliki pemegang saham dari kelompok masyarakat (kepemilikan di bawah 5%), mengingat Perusahaan belum melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*/IPO).

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Perusahaan juga belum mengimplementasikan program kepemilikan saham bagi karyawan (*Employee Stock Option Program*/ESOP) maupun manajemen (*Management Stock Option Program*/MSOP). Dengan demikian, tidak terdapat kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pegawai Perusahaan pada akhir periode laporan ini.

5. Information on Public and Internal Share Ownership

Public Participation and Share Ownership Programs

Until the closing of the financial year on December 31, 2025, Bank Sulteng has no shareholders from the public group (ownership below 5%), considering the Company has not yet conducted an Initial Public Offering (IPO).

In line with this policy, the Company has also not implemented a share ownership program for employees (Employee Stock Option Program/ESOP) or management (Management Stock Option Program/MSOP). Therefore, there is no share ownership by members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Company employees at the end of this reporting period.

6. Konteks Sinergi Kelompok Usaha Bank (KUB)

Melalui keanggotaan dalam Kelompok Usaha Bank (KUB) Mega Corpora, Bank Sulteng mendapatkan dukungan strategis dari PT Mega Corpora selaku pemegang saham dan PT Bank Mega Tbk sebagai perusahaan induk. Sinergi ini mencakup penguatan manajemen risiko, pengembangan sumber daya manusia, hingga percepatan transformasi teknologi informasi guna meningkatkan daya saing Bank Sulteng di kancah perbankan nasional.

6. Context of the Bank Business Group (KUB) Synergy

Through membership in the Mega Corpora Bank Business Group (Kelompok Usaha Bank/KUB), Bank Sulteng receives strategic support from PT Mega Corpora as a shareholder and PT Bank Mega Tbk as the parent company. This synergy encompasses the strengthening of risk management, human resource development, and the acceleration of information technology transformation to enhance Bank Sulteng's competitiveness in the national banking arena.

Pelaksanaan Kelompok Usaha Bank (KUB)

PERMODALAN

Bank Sulteng menempatkan manajemen permodalan sebagai instrumen strategis untuk menjamin stabilitas operasional serta mendukung akselerasi bisnis jangka panjang. Fokus utama kami adalah mempertahankan struktur permodalan yang solid guna memperkuat fondasi kepercayaan bagi nasabah, deposan, dan seluruh mitra investasi. Melalui pengelolaan modal yang disiplin, Bank berupaya menyeimbangkan tingkat profitabilitas yang optimal dengan profil risiko yang terjaga (*gearing ratio*), sehingga tercipta posisi keuangan yang sehat dan resilien dalam menghadapi dinamika pasar

Rasio Penyediaan Modal Minimum

Untuk memitigasi potensi risiko kredit, pasar, maupun operasional, Bank Sulteng secara konsisten memantau Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Rasio ini merupakan parameter utama dalam mengukur kecukupan modal Bank terhadap total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Seluruh strategi alokasi modal diarahkan pada optimalisasi efisiensi biaya modal (*cost of capital*) serta pemenuhan mandat regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Dewan Direksi senantiasa melakukan tinjauan berkala atas kebijakan pengelolaan modal untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup dalam mendukung setiap inisiatif strategis dan perluasan jaringan usaha Perusahaan

Implementation of the Bank Business Group (KUB)

CAPITALIZATION

Bank Sulteng positions capital management as a strategic instrument to guarantee operational stability and support long-term business acceleration. Our primary focus is to maintain a solid capital structure to strengthen the foundation of trust for customers, depositors, and all investment partners. Through disciplined capital management, the Bank strives to balance optimal profitability levels with a well-maintained risk profile (gearing ratio), thereby creating a healthy and resilient financial position in facing market dynamics.

Minimum Capital Adequacy Ratio

To mitigate potential credit, market, and operational risks, Bank Sulteng consistently monitors the Minimum Capital Adequacy Requirement Ratio (KPMM) or Capital Adequacy Ratio (CAR). This ratio is a primary parameter in measuring the Bank's capital adequacy against the total Risk-Weighted Assets (ATMR). All capital allocation strategies are directed towards optimizing the cost of capital efficiency and fulfilling the regulatory mandates of the Financial Services Authority. The Board of Directors continuously conducts periodic reviews of capital management policies to ensure the availability of sufficient funds to support every strategic initiative and the expansion of the Company's business network.

Tabel Rasio Kecukupan Modal (*Position* Per 31 Desember 2025 & 2024)
Capital Adequacy Ratio Table (Position As of December 31, 2025 & 2024)

Uraian	2025	2024	Description
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Kredit	5.520.862	5.671.904	Risk Weighted Assets (RWA) Credit
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Operasional	545.970	505.374	Operational Risk Weighted Assets (RWA)
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Pasar	-	-	Market Risk Weighted Assets (RWA)
Total Modal	1.546.738	1.356.581	Total Capital
Rasio Kewajiban Penyertaan Modal Minimum (KPMM)	25,49%	23,11%	Minimum Capital Adequacy Ratio (CAR)
Rasio Minimum menurut POJK 11/POJK.03/2016	9,12%	10,39%	Minimum Ratio according to POJK 11/ POJK.03/2016

STRUKTUR KELOMPOK USAHA BANK (KUB)

Sesuai dengan mandat konsolidasi perbankan, Bank Sulteng tergabung dalam Kelompok Usaha Bank (KUB) bersama PT Mega Corpora selaku pemegang saham dan PT Bank Mega Tbk sebagai pelaksana perusahaan induk. Berikut adalah komposisi dan struktur kepemilikan dalam ekosistem KUB Mega Corpora posisi per 31 Desember 2025.

BANK BUSINESS GROUP (KUB) STRUCTURE

In accordance with the banking consolidation mandate, Bank Sulteng is incorporated in the Bank Business Group (KUB) alongside PT Mega Corpora as a shareholder and PT Bank Mega Tbk acting as the parent company. The following is the composition and ownership structure within the Mega Corpora KUB ecosystem as of December 31, 2025.

Tabel Struktur Kelompok Usaha Bank (KUB)
Bank Business Group (KUB) Structure Table

Entitas Perusahaan Corporate Entity	**Pemegang Saham Utama & Persentase Kepemilikan** Main Shareholders & Percentage of Ownership
PT MEGA CORPORA	PT CT CORPORA (99,99%) PT PARA REKAN INVESTAMA (0,01%)
PT Bank Mega Tbk	PT MEGA CORPORA (58,02%) PUBLIK (41,98%)
PT Bank Mega Syariah	PT MEGA CORPORA (99,99%) PT PARA REKAN INVESTAMA (0,01%)
PT Allo Bank Indonesia Tbk	PT MEGA CORPORA (60,88%) PUBLIK (39,12%)
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	PT MEGA CORPORA (26,00%) MITRA DAERAH (74,00%)
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	PT MEGA CORPORA (24,8%) MITRA DAERAH (75,2%)
PT Asuransi Umum Mega	PT MEGA CORPORA (99,99%) PT PARA REKAN INVESTAMA (0,01%)
PT Mega Finance	PT MEGA CORPORA (93,55%) CHAIRUL TANJUNG (6,45%)
PT Mega Capital Sekuritas	PT MEGA CORPORA (99,99%) PT PARA REKAN INVESTAMA (0,01%)
PT Mega Central Finance	PT MEGA CORPORA (57,50%) PARTNERS (42,50%)
PT Bank KB Bukopin Syariah	PT MEGA CAPITAL SEKURITAS (1,98%) PARTNERS (98,02%)
PT Mega Capital Investama	PT MEGA CAPITAL SEKURITAS (99,99%) PT MEGA FINANCE (0,01%)
PT Mega Auto Finance	PT MEGA CORPORA (50,00%) PARTNERS (50,00%)
PT Mega Asset Management	PT MEGA CORPORA (99,99%) PT MEGA FINANCE (0,01%)
PT PFI Mega Life Insurance	PT MEGA CORPORA (51,00%) PRUCO LIFE INSURANCE (49,00%)
PT Sistem Pembayaran Digital	PT MEGA CORPORA (99,99%) PT CT CORPORA (0,01%)

Bank Sulteng memandang manajemen permodalan bukan sekadar pemenuhan aspek kepatuhan regulasi, melainkan instrumen vital dalam memacu ekspansi bisnis dan memperkuat daya saing di industri perbankan nasional. Strategi alokasi modal Perusahaan senantiasa diarahkan untuk mengoptimalkan profil laba atas risiko yang terukur, selaras dengan rencana bisnis jangka panjang guna memberikan nilai tambah optimal bagi seluruh pemegang saham.

Sebagai langkah strategis dalam mematuhi Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2020 mengenai konsolidasi Bank Umum, Bank Sulteng telah secara resmi tergabung dalam ekosistem Kelompok Usaha Bank (KUB) Mega Corpora. Dalam kemitraan tersebut, PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai pelaksana perusahaan induk (*parent bank*), yang memberikan sokongan strategis bagi Bank Sulteng bersama entitas perbankan lain dalam grup, yaitu PT Bank Mega Syariah dan PT Allo Bank Indonesia Tbk.

Kolaborasi tersebut mencerminkan komitmen kuat antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) dengan PT Mega Corpora. Melalui setoran modal strategis, PT Mega Corpora kini memiliki komposisi kepemilikan sebesar 26,00%, memperkuat struktur permodalan Bank Sulteng tanpa mengubah mandat utama Perusahaan sebagai motor penggerak ekonomi daerah.

Nilai Tambah dan Transformasi Operasional Sinergi dalam KUB Mega Corpora telah memberikan dampak nyata pada penguatan infrastruktur operasional dan peningkatan kapabilitas personel Bank Sulteng, yang meliputi:

- Transformasi GRC :
  Implementasi pelatihan penyusunan kebijakan manajemen risiko dan studi banding penyusunan laporan rencana pemulihan (*recovery plan*) sesuai standar praktik terbaik perbankan.
- Ketahanan Likuiditas :
  Pelaksanaan studi banding perhitungan stress test likuiditas dan sinergi aktivitas ketreasurian melalui penempatan giro timbal balik guna memastikan efisiensi pengelolaan dana.
- Ekspansi Kredit Strategis :
  Kolaborasi dalam aktivitas penyaluran kredit, termasuk fasilitas *sell-down* pada sektor industri strategis, guna memperluas portofolio pembiayaan yang sehat.

Bank Sulteng views capital management not merely as a fulfillment of regulatory compliance aspects, but as a vital instrument in stimulating business expansion and strengthening competitiveness in the national banking industry. The Company's capital allocation strategy is consistently directed at optimizing the measurable return-on-risk profile, in alignment with the long-term business plan to provide optimal added value for all shareholders.

As a strategic step in complying with OJK Regulation No. 12/POJK.03/2020 concerning the consolidation of Commercial Banks, Bank Sulteng has officially joined the Mega Corpora Bank Business Group (KUB) ecosystem.In this partnership, PT Bank Mega Tbk acts as the executing parent company (parent bank), providing strategic support for Bank Sulteng along with other banking entities within the group, namely PT Bank Mega Syariah and PT Allo Bank Indonesia Tbk.

This collaboration reflects a strong commitment between the Central Sulawesi Provincial Government as the Controlling Shareholder (PSP) and PT Mega Corpora.Through strategic capital deposits, PT Mega Corpora now holds an ownership composition of 26.00%, strengthening Bank Sulteng's capital structure without altering the Company's primary mandate as a driving force for the regional economy.

Added Value and Operational Transformation: The synergy within the Mega Corpora KUB has delivered a tangible impact on strengthening the operational infrastructure and enhancing the capabilities of Bank Sulteng's personnel, which includes:

- GRC Transformation:
  Implementation of risk management policy formulation training and comparative studies on the preparation of recovery plan reports in accordance with banking best practice standards.
- Liquidity Resilience:
  Execution of comparative studies on liquidity stress test calculations and treasury activity synergy through reciprocal demand deposit placements to ensure efficiency in fund management.

- Strategic Credit Expansion:
  Collaboration in credit disbursement activities, including sell-down facilities in strategic industrial sectors, to broaden a healthy financing portfolio.

Menuju Kemandirian Masa Depan, sinergi ini diproyeksikan sebagai katalisator untuk membawa Bank Sulteng mencapai target modal inti minimum sebesar Rp3 triliun. Sesuai dengan kesepakatan strategis, apabila fundamental modal inti Perusahaan telah mencapai ambang batas tersebut secara mandiri, Bank memiliki fleksibilitas untuk menentukan arah kebijakan struktur permodalan selanjutnya demi keberlangsungan usaha dan kepentingan terbaik seluruh *stakeholders*.

Dengan dukungan ekosistem Mega Corpora dan pengawasan aktif dari para pemegang saham, Bank Sulteng optimis dapat terus bertransformasi menjadi institusi keuangan yang resilien, inovatif, dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi dinamika perbankan digital masa depan.

Towards Future Independence, this synergy is projected as a catalyst to bring Bank Sulteng to achieve the minimum core capital target of Rp3 trillion. In accordance with the strategic agreement, if the Company's core capital fundamentals have reached this threshold independently, the Bank possesses the flexibility to determine the direction of its subsequent capital structure policy for business continuity and the best interests of all stakeholders.

With the support of the Mega Corpora ecosystem and active supervision from the shareholders, Bank Sulteng is optimistic that it can continue to transform into a highly resilient, innovative, and competitive financial institution in facing the dynamics of digital banking in the future.



PROFIL PEMEGANG SAHAM
SHAREHOLDER PROFILE

Komposisi pemegang saham Bank Sulteng mencerminkan sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah di wilayah Sulawesi Tengah serta kemitraan strategis dengan sektor swasta nasional. Kepemilikan ini menjadi representasi mandat pembangunan daerah yang dijalankan dengan tata kelola profesional guna menciptakan kemakmuran yang merata. Hingga akhir tahun buku 2025, profil masing-masing pemegang saham adalah sebagai berikut:.

The shareholder composition of Bank Sulteng reflects a strong synergy between the Regional Governments within the Central Sulawesi region and a strategic partnership with the national private sector. This ownership serves as a representation of the regional development mandate executed with professional governance to create equitable prosperity. As of the end of the 2025 financial year, the profiles of each shareholder are as follows:.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Central Sulawesi Province Government

Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah. Wilayah ini mencakup 13 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 1 Kota Palu dan 12 Kabupaten lainnya.

The Central Sulawesi Province region was established based on Law No. 13 of 1964 concerning the Establishment of the First Level Regional Province of Central Sulawesi. This region encompasses 13 Regencies/Cities consisting of 1 City of Palu and 12 other Regencies.

- Jumlah Saham : 1.507.448 Lembar Saham.
- Nilai Nominal : Rp150.744.800.000,00.
- Persentase Kepemilikan : 30,64%.

- Number of Shares: 1,507,448 Shares.
- Nominal Value: Rp150,744,800,000.00.
- Percentage of Ownership: 30.64%.

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong
Parigi Moutong Regency Government

Wilayah Kabupaten Parigi Moutong dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2002. Kabupaten ini terdiri dari 22 wilayah kecamatan, mulai dari Kecamatan Sausu hingga Kecamatan Ongka Malino.

The Parigi Moutong Regency region was established based on Law No. 10 of 2002. This regency consists of 22 district areas, ranging from Sausu District to Ongka Malino District.

- Jumlah Saham : 242.638 Lembar Saham.
- Nilai Nominal : Rp24.263.800.000.
- Persentase Kepemilikan : 4,93%.

- Number of Shares: 242,638 Shares.
- Nominal Value: Rp24,263,800,000.
- Percentage of Ownership: 4.93%.

Pemerintah Kabupaten Tolitoli
Tolitoli Regency Government

Wilayah Kabupaten Tolitoli dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 59 Tahun 1960. Kabupaten ini terdiri dari 10 wilayah kecamatan, dengan pusat pemerintahan di Kecamatan Baolan.

The Tolitoli Regency region was established based on Law No. 59 of 1960. This regency consists of 10 district areas, with the center of government in Baolan District.

- Jumlah Saham: 222.523 Lembar Saham.
- Nilai Nominal: Rp22.252.300.000.
- Persentase Kepemilikan: 4,52%.

- Number of Shares: 222.523 Shares.
- Nominal Value: Rp22.252.300.000.
- Percentage of Ownership: 4,52%.

Pemerintah Kabupaten Poso
Poso Regency Government

Pemerintah Kabupaten Poso merupakan salah satu pemegang saham kunci yang mendukung operasional Bank Sulteng di wilayah Sulawesi Tengah bagian tengah.

The Poso Regency Government is one of the key shareholders supporting the operations of Bank Sulteng in the central region of Central Sulawesi.

- Jumlah Saham: 171.897 Lembar Saham.
- Nilai Nominal: Rp17.189.700.000,00.
- Persentase Kepemilikan: 3,49%.

- Number of Shares: 171.897 Shares.
- Nominal Value: Rp17.189.700.000,00.
- Percentage of Ownership: 3,49%.

Pemerintah Kabupaten Banggai
Banggai Regency Government

Kabupaten Banggai secara konsisten berperan aktif dalam memperkuat permodalan Bank Sulteng guna mendukung pembangunan ekonomi di wilayah timur Sulawesi Tengah.

The Banggai Regency consistently plays an active role in strengthening the capital of Bank Sulteng to support economic development in the eastern region of Central Sulawesi.

- Jumlah Saham : 238.417 Lembar Saham.
- Nilai Nominal : Rp23.841.700.000,00.
- Persentase Kepemilikan : 4,85%.

- Number of Shares: 238.417 Shares.
- Nominal Value: Rp23.841.700.000,00.
- Percentage of Ownership: 4,85%.

Pemerintah Kabupaten Buol
Buol Regency Government

Wilayah Kabupaten Buol dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 51 Tahun 1999. Kabupaten ini terdiri dari 11 cakupan wilayah kecamatan.

The Buol Regency region was established based on Law No. 51 of 1999. This regency consists of 11 district coverage areas.

- Jumlah Saham : 148,407 Lembar Saham.
- Nilai Nominal : Rp14,840,700,000.
- Persentase Kepemilikan : 3.02%.

- Number of Shares: 148,407 Shares.
- Nominal Value: Rp14,840,700,000.
- Percentage of Ownership: 3.02%.

Pemerintah Kabupaten Donggala
Donggala Regency Government

Wilayah Kabupaten Donggala dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah. Kabupaten ini terdiri dari 16 wilayah kecamatan

The Donggala Regency region was established based on Law No. 29 of 1953 concerning the Establishment of Second Level Regions in Central Sulawesi.

- Jumlah Saham : 168.487 Lembar Saham.
- Nilai Nominal : Rp16.848.700.000.
- Persentase Kepemilikan : 3,42%.

- Number of Shares: 168.487 Shares.
- Nominal Value: Rp16.848.700.000.
- Percentage of Ownership: 3,42%.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan
Banggai Kepulauan Regency Government

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan turut menjadi bagian dari pemilik Bank Sulteng sebagai bentuk komitmen dalam pengelolaan kas daerah dan pembangunan ekonomi kepulauan.

The Banggai Kepulauan Regency Government also acts as part of the owners of Bank Sulteng as a form of commitment to regional cash management and archipelagic economic development.

- Jumlah Saham : 181.068 Lembar Saham.
- Nilai Nominal : Rp18,106,800,000.
- Persentase Kepemilikan : 3.68%.

- Number of Shares: 181.068 Shares.
- Nominal Value: Rp18,106,800,000.
- Percentage of Ownership: 3.68%.

Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una
Tojo Una-Una Regency Government

Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2003 dan terdiri dari 9 wilayah kecamatan.

The Tojo Una-Una Regency region was established based on Law No. 32 of 2003 and consists of 9 district areas.

- Jumlah Saham : 164.495 Lembar Saham.
- Nilai Nominal : Rp16.449.500.000.
- Persentase Kepemilikan : 3,34%.

- Number of Shares: 164.495 Shares.
- Nominal Value: Rp16.449.500.000.
- Percentage of Ownership: 3,34%.

Pemerintah Kota Palu
Palu City Government

Wilayah Kota Palu dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1978 sebagai Kota Administratif. Kota Palu terdiri dari 8 wilayah kecamatan.

The Palu City region was established based on Government Regulation No. 18 of 1978 as an Administrative City. Palu City consists of 8 district areas.

- Jumlah Saham : 125.728 Lembar Saham.
- Nilai Nominal : Rp12.572.800.000.
- Persentase Kepemilikan : 2.56%.

- Number of Shares: 125,728 Shares.
- Nominal Value: Rp12,572,800,000.
- Percentage of Ownership: 2.56%.

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara
Morowali Utara Regency Government

Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2013 dengan ibu kota di Kolonodale. Merupakan hasil pemekaran dari sebagian wilayah Kabupaten Morowali.

This regency was established based on Law No. 12 of 2013 with its capital in Kolonodale. It is the result of the subdivision of a portion of the Morowali Regency region.

- Jumlah Saham : 144.741 Lembar Saham.
- Nilai Nominal : Rp14.474.100.000.
- Persentase Kepemilikan : 2.94%.

- Number of Shares: 168.487 Shares.
- Nominal Value: Rp14.474.100.000.
- Percentage of Ownership: 2.94%.

Pemerintah Kabupaten Morowali
Morowali Regency Government

Wilayah Kabupaten Morowali dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 51 Tahun 1999. Pasca pemekaran Morowali Utara, kini wilayahnya terdiri dari 9 kecamatan.

The Morowali Regency region was established based on Law No. 51 of 1999. Following the subdivision of Morowali Utara, its region now consists of 9 districts.

- Jumlah Saham : 144.164 Lembar Saham.
- Nilai Nominal : Rp14.416.400.000.
- Persentase Kepemilikan : 2,93%.

- Number of Shares: 144.164 Shares.
- Nominal Value: Rp14.416.400.000.
- Percentage of Ownership: 2,93%.

Pemerintah Kabupaten Banggai Laut
Banggai Laut Regency Government

Kabupaten Banggai Laut dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2015 dan mencakup wilayah kepulauan sebanyak 7 kecamatan.

The Banggai Laut Regency was established based on Law No. 5 of 2015 and encompasses an archipelagic region of 7 districts.

- Jumlah Saham : 113.591 Lembar Saham.
- Nilai Nominal : Rp11.359.100.000,00.
- Persentase Kepemilikan : : 2,31%.

- Number of Shares: 113.591 Shares.
- Nominal Value: Rp11.359.100.000,00.
- Percentage of Ownership: : 2,31%.

Pemerintah Kabupaten Sigi
Sigi Regency Government

Wilayah Kabupaten Sigi dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2008 yang terdiri dari 15 wilayah kecamatan.

The Sigi Regency region was established based on Law No. 27 of 2008 and consists of 15 district areas.

- Jumlah Saham : 66.746 Lembar Saham.
- Nilai Nominal : Rp6.674.600.000.
- Persentase Kepemilikan : 1,36%.

- Number of Shares: 66.746 Shares.
- Nominal Value: Rp6.674.600.000.
- Percentage of Ownership: 1,36%.

PT Mega Corpora

Didirikan berdasarkan Akta No. 53 tanggal 27 Oktober 1994 di hadapan Notaris Ny. Enirmaya Agoes Suwarko, SH, dan disahkan oleh Menteri Kehakiman RI melalui SK No. C2-18944.HT.01.01. TH.94.

Established based on Deed No. 53 dated October 27, 1994, before Notary Mrs. Enirmaya Agoes Suwarko, SH, and ratified by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia through Decree No. C2-18944.HT.01.01.TH.94.

- Pengurus Perusahaan (per Desember 2025):
  - Komisaris Utama : Chairul Tanjung.
  - Komisaris : Zainal Rahman.
  - Direktur Utama : Ardhayadhi.
  - Direktur : Ali Gunawan.
- Jumlah Saham: 1.279.348 Lembar Saham.
- Nilai Nominal : Rp127.934.800.000.
- Persentase Kepemilikan : 26,00%.

- Corporate Management (as of December 2025):
  - President Commissioner: Chairul Tanjung.
  - Commissioner: Zainal Rahman.
  - President Director: Ardhayadhi.
  - Director: Ali Gunawan.
- Number of Shares: 1,279,348 Shares.
- Nominal Value: Rp127,934,800,000.
- Percentage of Ownership: 26.00%.

STRUKTUR GRUP DAN INFORMASI ENTITAS ANAK DAN/ATAU PERUSAHAAN ASOSIASI

GROUP STRUCTURE AND INFORMATION ON SUBSIDIARIES AND/OR ASSOCIATE COMPANIES

Struktur Grup Perusahaan

Bank Sulteng senantiasa menjalankan operasional bisnis yang independen dan fokus pada penguatan fundamental perbankan daerah. Hingga periode pelaporan yang berakhir pada 31 Desember 2025, Perusahaan tercatat tidak tergabung dalam grup perusahaan manapun. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi material mengenai struktur grup perusahaan yang perlu diungkapkan dalam laporan tahunan ini.

Corporate Group Structure

Bank Sulteng consistently conducts independent business operations and focuses on strengthening regional banking fundamentals. As of the reporting period ended December 31, 2025, the Company is not affiliated with any corporate group. Therefore, there is no material information regarding a corporate group structure that requires disclosure in this annual report.

Entitas Anak dan Asosiasi

Dalam upaya mengoptimalkan kinerja bisnis inti secara terpusat, Bank Sulteng mempertahankan struktur organisasi yang ramping dan efektif. Sepanjang tahun buku 2025, Bank Sulteng tidak memiliki entitas anak, entitas cucu, maupun entitas asosiasi. Konsistensi ini memungkinkan Bank untuk tetap fokus pada pemberian layanan perbankan yang berkualitas bagi masyarakat Sulawesi Tengah.

Subsidiaries and Associates

In an effort to centrally optimize core business performance, Bank Sulteng maintains a lean and effective organizational structure. Throughout the 2025 financial year, Bank Sulteng has no subsidiaries, sub-subsidiaries, or associated entities. This consistency enables the Bank to remain focused on delivering high-quality banking services to the people of Central Sulawesi.

KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM

STOCK LISTING CHRONOLOGY

Bank Sulteng mengelola permodalan melalui sinergi yang kuat dengan Pemerintah Daerah dan Mitra Strategis tanpa melibatkan mekanisme pasar modal. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Bank Sulteng belum pernah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek manapun. Dengan demikian, informasi mengenai kronologi penerbitan saham melalui penawaran umum (*Initial Public Offering*) tidak tersedia untuk periode laporan tahunan ini.

Bank Sulteng manages its capital through a strong synergy with Regional Governments and Strategic Partners, without engaging in capital market mechanisms. As of December 31, 2025, Bank Sulteng has not listed its shares on any Stock Exchange. Consequently, information regarding the chronology of share issuance through an Initial Public Offering (IPO) is not available for this annual reporting period.

KRONOLOGIS PENCATATAN OBLIGASI DAN EFEK LAINNYA

CHRONOLOGY OF BOND AND OTHER SECURITIES LISTINGS

Guna menjaga stabilitas struktur liabilitas dan profil risiko yang terjaga, Perusahaan mengandalkan instrumen pendanaan perbankan yang konvensional dan sehat. Hingga akhir tahun buku 2025, Bank Sulteng belum melakukan penerbitan serta pencatatan obligasi maupun efek lainnya di pasar modal. Hal ini selaras dengan kebijakan manajemen dalam mengelola likuiditas secara konservatif dan terukur

To maintain the stability of its liability structure and a prudent risk profile, the Company relies on conventional and sound banking funding instruments. As of the end of the 2025 financial year, Bank Sulteng has not issued or listed any bonds or other securities in the capital market. This aligns with the management's policy to manage liquidity in a conservative and measured manner.

INFORMASI JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK
INFORMATION ON PUBLIC ACCOUNTING SERVICES AND PUBLIC ACCOUNTING FIRM

Sebagai wujud kepatuhan terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta komitmen pada prinsip transparansi, Bank Sulteng menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) independen untuk melakukan audit komprehensif atas laporan keuangan perusahaan. Penunjukan ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan rotasi auditor eksternal yang berlaku.

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan yang memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris, Perseroan telah menetapkan KAP [Cahyadi dan Adhi] untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2025. Proses ini bertujuan memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan telah disusun secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia. Rincian penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut adalah sebagai berikut:

As a manifestation of compliance with the Financial Services Authority (OJK) regulations and a commitment to the principles of transparency, Bank Sulteng appoints an independent Public Accounting Firm (KAP) to conduct a comprehensive audit of the company's financial statements. This appointment is made with due observance of the applicable external auditor rotation provisions.

Based on the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (Annual GMS) which granted authority to the Board of Commissioners, the Company has appointed the Public Accounting Firm (KAP) [Cahyadi dan Adhi] to audit the Financial Statements for the 2025 Financial Year. This process aims to provide reasonable assurance that the financial statements have been prepared fairly in all material respects, in accordance with the Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia. The details of the appointment of the Public Accountant (AP) and the Public Accounting Firm (KAP) are as follows:

Tabel Informasi Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
Public Accounting Services and Public Accounting Firms Information Table

No.	Uraian	Penjelasan
1	Nama Kantor Akuntan Publik (KAP) Name of Public Accounting Firm	Cahyadi dan Adhi
2	Nama Akuntan Publik (AP) Name Public Accountant	Annas Cahyadi, M.Sc, Ak, CA, CPA, CFI
3	Alamat Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accounting Firm Address	The Boulevard Office Tower 1st Floor D1, Jl. H. Fachrudin No.5, Jakarta Pusat - 10250 Phone/ Fax: 021-31991447
4	Periode Penugasan KAP Public Accounting Firm Engagement Period	Ke 4 to 4
5	Periode Penugasan AP Public Accountant Engagement Period	Ke 4 to 4
6	Jasa Audit Audit Services	Jasa Audit Atas Laporan Keuangan PT Bank Sulteng Tahun Buku 2025 Audit Services for the Financial Statements of PT. Bank Sulteng for the Fiscal Year 2025
7	Jasa Non-Audit Non-Audit Services	-
8	Biaya (*Fee*) Audit Audit Fee	Rp560.000.000
9	Biaya (*Fee*) Non-Audit Non-Audit Fee	-

NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG PERUSAHAAN

NAME AND ADDRESS OF SUPPORTING INSTITUTIONS AND/OR PROFESSIONALS OF THE COMPANY

Bank Sulteng secara aktif berkolaborasi dengan berbagai lembaga dan profesi penunjang untuk memastikan seluruh aktivitas bisnis dan operasional perusahaan berjalan sesuai dengan koridor hukum, standar akuntansi, serta praktik terbaik industri perbankan nasional.

Sinergi strategis tersebut merupakan wujud komitmen Bank dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme demi memberikan perlindungan serta nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Berikut adalah rincian lembaga dan profesi penunjang yang memberikan jasa profesional bagi Perusahaan :

Bank Sulteng actively collaborates with various supporting institutions and professionals to ensure that all of the Company's business and operational activities are conducted within the legal frameworks, accounting standards, and best practices of the national banking industry.

This strategic synergy is a manifestation of the Bank's commitment to maintaining transparency, accountability, and professionalism in order to provide protection and added value for all stakeholders.

The following are the details of the supporting institutions and professionals providing professional services to the Company:

Tabel Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan
Table of Company Supporting Institutions and Professions

Lembaga Penunjang Supporting Institution	Nama Lembaga Institution Name	Alamat Address	Jasa yang Diberikan Services Provided	Biaya Fees
Notaris Notary	Siane Morimin Lamasigi	Jl. Towua, Palu	Jasa Kredit KPR AJB AJB Home Ownership Credit Services	Rp4.500.000/Orang Rp4.500.000/ Person
	Baso Mappatoba	Jl. Juanda, Palu	Jasa Kredit PK Kredit Pegawai Employee Loan Agreement Services	Rp400.000/Orang Rp4.500.000/ Person
	Nurfitryana	Jl. Otista, Palu	Kredit KPR Home Ownership Credit	Rp4.500.000/Orang Rp4.500.000/ Person
Konsultan Hukum/ Pengacara Legal Consultant/Lawyer	Lilox dan Rekan	BTN Baliase Indah Blok E No. 5	Jasa Konsultan Hukum/Advokat Legal Consultant/Advocate Services	Rp280.000.000
Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accounting Firm (KAP)	Anas Cahyadi	Jl. Fachrudin Raya No. 5 Tanah Abang, Jakarta	Jasa Akuntan Publik Public Accountant Services	Rp560.000.000
Asosiasi Profesi Professional Association	ACI FMA Indonesia	Plaza Mandiri, Treasury Group 8th Floor, Jl. Gatot Subroto No. Kav. 36-38, RT.7/RW.1, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta 12190	Asosiasi profesional para pelaku pasar keuangan dan tresuri di Indonesia yang berfokus pada peningkatan kompetensi, etika, dan standar profesionalisme, khususnya di bidang valuta asing dan pasar uang. organisasi ini berperan penting dalam memberikan sertifikasi serta edukasi kode etik (*Code of Conduct*) bagi *treasury* dealer di perbankan dan institusi keuangan A professional association of financial market and treasury practitioners in Indonesia that focuses on enhancing competencies, ethics, and standards of professionalism, particularly in the foreign exchange and money markets. This organization plays a crucial role in providing certification and education on the Code of Conduct for treasury dealers across banking and financial institutions.	Rp1.250.000/ Orang/Tahun Rp1,250,000/ Person/Year
Asosiasi Profesi Professional Association	APUVINDO (Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia) APUVINDO (Indonesian Money Market and Foreign Exchange Market Association)	Intiland Tower Lantai 18, Jl. Jenderal Sudirman No.32, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10220	Mewakili pelaku pasar uang dan pasar valuta asing di Indonesia yang berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pasar Representing money market and foreign exchange market players in Indonesia who play an important role in increasing market efficiency and transparency.	Rp50.000.000/ Tahun Rp50.000.000/Year

AKSI KORPORASI
CORPORATE ACTION

Dalam menjalankan rencana bisnis sepanjang tahun buku 2025, Manajemen tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta fokus pada optimalisasi kapabilitas internal dan penguatan sinergi Kelompok Usaha Bank (KUB) yang telah terjalin.

Berdasarkan pencatatan laporan hingga penutupan periode 31 Desember 2025, Bank Sulteng tidak melakukan Aksi Korporasi yang bersifat material, seperti penggabungan (*merger*), peleburan (*consolidation*), pengambilalihan (*acquisition*), maupun pemisahan (*spin-off*).

In executing the business plan throughout the 2025 financial year, the Management consistently upholds the prudential principle while focusing on optimizing internal capabilities and strengthening the established synergy within the Bank Business Group (KUB).

Based on the report records up to the closing period of December 31, 2025, Bank Sulteng did not execute any material Corporate Actions, such as a merger, consolidation, acquisition, or spin-off.



PROFIL DANA PENSIUN TAHUN BUKU 2025
PENSION FUND PROFILE FOR FINANCIAL YEAR 2025

Bank Sulteng menempatkan kesejahteraan jangka panjang bagi seluruh pegawainya sebagai prioritas strategis perusahaan. Hal ini diwujudkan melalui pengelolaan dana pensiun yang profesional, transparan, dan akuntabel guna memastikan tersedianya jaminan finansial yang layak di masa depan. Melalui tata kelola yang solid dan strategi investasi yang terukur, Dana Pensiun Bank Sulteng berkomitmen memberikan nilai tambah yang konsisten bagi seluruh peserta.

Landasan Hukum dan Pengesahan

Eksistensi Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah telah memiliki legitimasi yang kokoh sejak operasionalnya dimulai pada 3 Oktober 1988. Landasan hukum pengelolaannya didasarkan pada:

- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah No. SK.188.44/3983/BPD tanggal 3 Oktober 1988.
- Surat Keputusan Direksi No. 44/SK/BPD. ST/1989 (6 November 1989) yang telah diperbarui melalui SK Direksi No. 10/SK/BPDST/1992 (2 Januari 1992).
- Yayasan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah merupakan entitas pengelola yang dibentuk melalui Akta Notaris Hans Kansil, SH No. 8 (7 Januari 1987) dengan pemisahan antara Yayasan Kesejahteraan dan Dana Pensiun yang berpedoman pada UU No. 11 Tahun 1992.
- Pembaruan Terkini: Transformasi kebijakan terbaru dilaksanakan di tahun 2024 melalui Keputusan Direksi No. 53/SK/BPDST/2024 dan telah mendapatkan pengesahan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Keputusan Dewan Komisioner No. KEP-128/PD.02/2025 tanggal 27 Februari 2025.

Struktur Organisasi Dana Pensiun

Pendiri:
Direksi Pemberi Kerja

Dewan Pengawas :
- Ketua: Wakil Pemberi Kerja
- Anggota: Wakil Peserta

Pengurus :
- Direktur Utama
- Direktur Keuangan & Investasi
  1. Staf Bagian Keuangan & Investasi
  2. Staf Bagian Pelaporan
- Direktur Kepesertaan
  1. Staf Bagian Umum & Administrasi
  2. Staf Bagian Kepesertaan
  3. Penanggung Jawab Pelaksana Fungsi :
     - Fungsi Kepatuhan
     - Fungsi Manajemen Risiko
     - Fungsi Audit Internal

Bank Sulteng places the long-term welfare of all its employees as the company's strategic priority. This is realized through professional, transparent, and accountable pension fund management to ensure the availability of adequate financial security in the future. Through solid governance and a measured investment strategy, the Bank Sulteng Pension Fund is committed to providing consistent added value for all participants.

Legal Basis and Ratification

The existence of the Pension Fund of Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah has had a strong legitimacy since its operations commenced on October 3, 1988. The legal basis for its management is founded on:

- Decree of the Governor, Head of the First Level Region of Central Sulawesi No. SK.188.44/3983/BPD dated October 3, 1988.
- Board of Directors Decree No. 44/SK/BPD. ST/1989 (November 6, 1989), which has been updated through Board of Directors Decree No. 10/SK/BPDST/1992 (January 2, 1992).
- The Pension Fund Foundation of Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah is the managing entity established through the Notarial Deed of Hans Kansil, SH No. 8 (January 7, 1987), with a separation between the Welfare Foundation and the Pension Fund guided by Law No. 11 of 1992.
- Latest Updates: The latest policy transformation was implemented in 2024 through Board of Directors Decree No. 53/SK/BPDST/2024 and has obtained official ratification from the Financial Services Authority (OJK) through the Board of Commissioners Decree No. KEP-128/PD.02/2025 dated Februari 27, 2025.

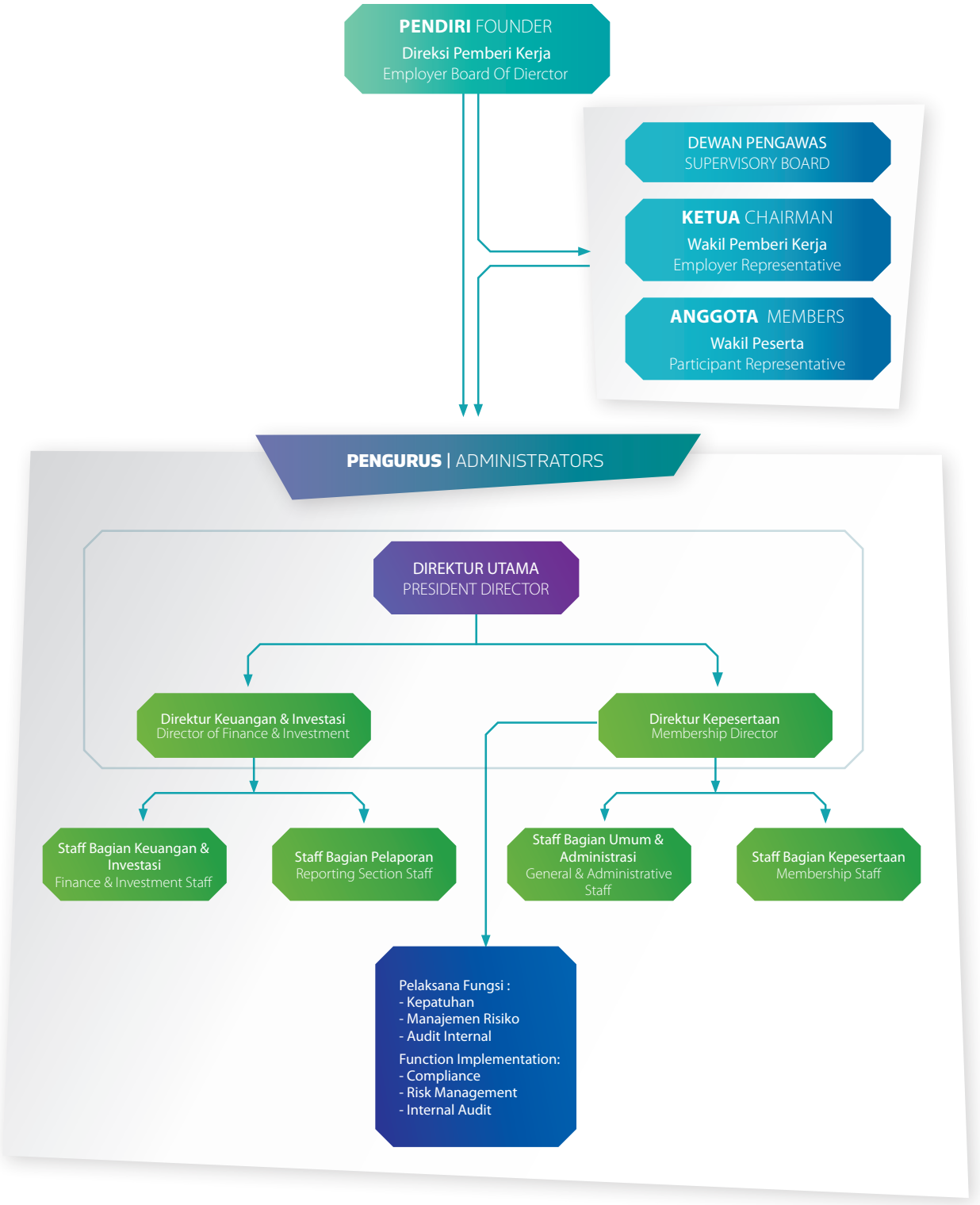
Organizational Structure of the Pension Fund

Founder:
Board of Directors of the Employer

Supervisory Board:
- Chairman: Representative of the Employer
- Member: Representative of the Participants

Management:
- President Director
- Director of Finance & Investment
  1. Finance & Investment Department Staff
  2. Reporting Department Staff
- Director of Participation
  1. General & Administration Department Staff
  2. Participation Department Staff
  3. Person in Charge of Function Implementation:
     - Compliance Function
     - Risk Management Function
     - Internal Audit Function

STRUKTUR ORGANISASI DANA PENSIUN BPD SULTENG
ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE SULTENG BPD PENSION FUND



Kepengurusan Dana Pensiun

Dalam upaya memastikan pengelolaan dana pensiun yang profesional dan akuntabel, Bank Sulteng selaku Pendiri telah menetapkan jajaran pengurus yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Penunjukan pengurus ini didasarkan pada Surat Keputusan Direksi Bank Sulteng No. 071/SK-DIR/BPD-ST/2022 tanggal 7 April 2020 perihal Penunjukan Pengurus Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah untuk masa jabatan 2 Mei 2022 hingga 2 Mei 2026.

Selain itu, untuk memperkuat struktur organisasi, telah ditetapkan Direktur Kepesertaan melalui Surat Keputusan Direksi Bank Sulteng No. 140/SK-DIR/BPD-ST/2024 tanggal 31 Oktober 2024 untuk periode jabatan 28 Juni 2022 sampai dengan 28 Juni 2026. Seluruh perubahan dan susunan kepengurusan ini telah secara resmi dilaporkan serta dicatat dalam Sistem Informasi Perizinan Lembaga Jasa Keuangan (SIJINGGA) melalui surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-3794/PD.021/2024 tertanggal 17 Desember 2024.

Berikut adalah susunan Pengurus Dana Pensiun Bank Sulteng yang menjabat :
- Direktur Utama : Maliegi Dumola.
- Direktur Keuangan dan Investasi : Zulfaisyah.
- Direktur Kepesertaan & Umum : Moh. Hasan Laminula.

Dewan Pengawas

Fungsi pengawasan terhadap kinerja pengurus Dana Pensiun dijalankan oleh Dewan Pengawas guna menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan kepentingan para peserta. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Sulteng No. 088/SKDIR/BPD-ST/2022 tanggal 18 Agustus 2022, telah dilakukan penunjukan Ketua Dewan Pengawas untuk masa bakti 13 November 2021 hingga 12 November 2025.

Guna melengkapi keterwakilan peserta dalam fungsi pengawasan, Bank juga telah menerbitkan Surat Keputusan Direksi Bank Sulteng No. 141/SK-DIR/BPD-ST/2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang penunjukan Anggota Dewan Pengawas untuk periode 1 Agustus 2022 sampai dengan 1 Agustus 2026. Susunan ini telah divalidasi dan tercatat dalam sistem SIJINGGA OJK sesuai surat nomor S-3794/PD.021/2024.

Adapun komposisi Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Sulteng adalah sebagai berikut :
- Ketua (Mewakili Pendiri): I Gusti P. Suartika.
- Anggota (Mewakili Peserta) : Diana.

Pension Fund Management

In an effort to ensure professional and accountable pension fund management, Bank Sulteng, acting as the Founder, has appointed a management team possessing competencies in their respective fields. The appointment of this management is based on the Board of Directors of Bank Sulteng Decree No. 071/SK-DIR/BPD-ST/2022 dated April 7, 2020, regarding the Appointment of the Pension Fund Management of PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah for the term of office from May 2, 2022, to May 2, 2026.

Furthermore, to strengthen the organizational structure, the Director of Participation has been appointed through the Board of Directors of Bank Sulteng Decree No. 140/SK-DIR/BPD-ST/2024 dated October 31, 2024, for the term of office from June 28, 2022, to June 28, 2026. All these changes and the management composition have been officially reported and recorded in the Financial Services Institution Licensing Information System (SIJINGGA) through the Financial Services Authority (OJK) letter No. S-3794/PD.021/2024 dated December 17, 2024.

The following is the composition of the serving Management of the Bank Sulteng Pension Fund:
- President Director: Maliegi Dumola.
- Director of Finance and Investment: Zulfaisyah.
- Director of Participation and General Affairs: Moh. Hasan Laminula.

Supervisory Board

The supervisory function over the performance of the Pension Fund management is executed by the Supervisory Board to guarantee compliance with regulations and the interests of the participants. Based on the Board of Directors of Bank Sulteng Decree No. 088/SKDIR/BPD-ST/2022 dated August 18, 2022, the appointment of the Chairman of the Supervisory Board has been made for the service period from November 13, 2021, to November 12, 2025.

In order to complete participant representation in the supervisory function, the Bank has also issued the Board of Directors of Bank Sulteng Decree No. 141/SK-DIR/BPD-ST/2024 dated October 31, 2024, regarding the appointment of a Member of the Supervisory Board for the period of August 1, 2022, to August 1, 2026. This composition has been validated and recorded in the OJK's SIJINGGA system in accordance with letter number S-3794/PD.021/2024.

The composition of the Supervisory Board of the Bank Sulteng Pension Fund is as follows:
- Chairman (Representing the Founder): I Gusti P. Suartika.
- Member (Representing the Participants): Diana.

PROFIL PENGURUS DANA PENSIUN

Bank Sulteng memastikan Dana Pensiun dikelola oleh individu-individu yang memiliki kapabilitas manajerial tinggi dan pemahaman mendalam mengenai industri dana pensiun serta manajemen risiko. Sinergi antara Pengurus dan Dewan Pengawas bertujuan untuk menjaga tata kelola yang sehat, memastikan ketepatan pembayaran manfaat pensiun, serta mengoptimalkan hasil investasi secara aman dan berkelanjutan demi kesejahteraan purna bakti seluruh pegawai.

PROFILES OF THE PENSION FUND MANAGEMENT

Bank Sulteng ensures that the Pension Fund is managed by individuals who possess high managerial capabilities and a profound understanding of the pension fund industry and risk management. The synergy between the Management and the Supervisory Board aims to maintain sound governance, ensure the accuracy of pension benefit payments, and optimize investment returns safely and sustainably for the post-retirement welfare of all employees.



Maliegi Dumola
Direktur Utama Pengurus Dana Pensiun
President Director of Pension Fund Management

Tempat Tanggal Lahir & Usia Place, Date of Birth & Age	Tantena, 26 Februari 1971 / 54 Tahun Tantena, February 26, 1971 / 54 Years
Domisili & Kewarganegaraan Domicile & Nationality	Palu, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sekolah Menengah Atas Senior High School
Sertifikasi Certifications	· Sertifikasi Manajemen Umum Dana Pensiun (MUDP) · Pension Fund General Management Certification (MUDP) · Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (KKNI) Jenjang 7 · Indonesian National Work Competency Certification (KKNI) Level 7
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	SK Direksi No .71/SK-DIR/BPD-ST/2022 tanggal 07 April 2022 tentang Penunjukan Pengurus Dana Pensiun PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Periode 02 Mei 2022 S/D 02 Mei 2026 Board of Directors Decree No. 71/SK-DIR/BPD-ST/2022 dated April 7, 2022, concerning the Appointment of the Pension Fund Management of PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah for the Period May 2, 2022, to May 2, 2026
Riwayat Jabatan Career History	Pengurus DAPEN (Direktur Utama) DAPEN Management (President Director)
Periode Menjabat & Masa Jabatan Term & Tenure	2022 - 2026
(Berakhir 1 September 2025 Sesuai Surat Keputusan Pendiri Bank Sulteng Nomor 133/SK-DIR/BPD-ST/2025). (Ends September 1, 2025 in accordance with the Decree of the Founder of Bank Sulteng Number 133/SK-DIR/BPD-ST/2025).	



Zulfaisyah
Direktur Keuangan & Investasi Investasi
Finance & Investment Director

Tempat Tanggal Lahir & Usia Place, Date of Birth & Age	Ujung Pandang, 27 Januari 1979 / 46 Tahun Ujung Pandang, January 27, 1979 / 46 Years
Domisili & Kewarganegaraan Domicile & Nationality	Palu, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	Diploma Manajemen Informatika Diploma in Management Informatics
Sertifikasi Certifications	· Sertifikasi Manajemen Umum Dana Pensiun (MUDP) · General Pension Fund Management Certification (MUDP) · *Certificate Risk Management Officer* (CRMO) · *Certificate Risk Management Officer* (CRMO)
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	SK Direksi No .71/SK-DIR/BPD-ST/2022 tanggal 07 April 2022 tentang Penunjukan Pengurus Dana Pensiun PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Periode 02 Mei 2022 S/D 02 Mei 2026 Board of Directors Decree No. 71/SK-DIR/BPD-ST/2022 dated April 7, 2022, concerning the Appointment of the Pension Fund Management of PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah for the Period May 2, 2022, to May 2, 2026
Riwayat Jabatan Career History	Pengurus Dana Pensiun BPD Sulawesi Tengah (Direktur Keuangan & Investasi) Pension Fund Manager of BPD Sulawesi Tengah (Finance & Investment Director)
Periode Menjabat & Masa Jabatan Term & Tenure	2022 – 1 September 2025 (Berakhir 1 September 2025) 2022 – September 1, 2025 (Ends September 1, 2025)



Moh. Hasan Laminula
Direktur Kepesertaan & Umum
Participation and General Affairs Director

Tempat Tanggal Lahir & Usia Place, Date of Birth & Age	Tinabongan, 19 Juni 1969 / 56 Tahun Tinabongan, June 19, 1969 / 56 Years Old
Domisili & Kewarganegaraan Domicile & Nationality	Palu, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	· Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Palu (2000) · Bachelor of Law, Muhammadiyah University of Palu (2000) · Magister Ekonomi Manajemen STIE ISM Jakarta (2004) · Master of Management Economics, STIE ISM Jakarta (2004)
Sertifikasi Certifications	· Sertifikasi Manajemen Umum Dana Pensiun (MUDP) · Pension Fund General Management Certification (MUDP) · Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (KKNI) Jenjang 7. · Indonesian National Work Competency Certification (KKNI) Level 7
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	SK Direksi No. 140/SK-DIR/BPD-ST/2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang Penunjukan Direktur Kepesertaan Dana Pensiun BPD Sulawesi Tengah Periode 28 Juni 2022 S/D 28 Juni 2026 Board of Directors Decree No. 140 / SK-DIR / BPD-ST / 2024 dated October 31, 2024 concerning the Appointment of the Membership Director of the BPD Central Sulawesi Pension Fund for the Period June 28, 2022 to June 28, 2026
Riwayat Jabatan Career History	· Pengurus Dana Pensiun BPD Sulawesi Tengah (Direktur Kepesertaan) · Central Sulawesi BPD Pension Fund Management (Membership Director)
Periode Menjabat & Masa Jabatan Term & Tenure	2022 - 2026

Profil Dewan Pengawas Dana Pensiun

Profile of the Pension Fund Supervisory Board



I Gusti P. Suartika
Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun
Head of Pension Fund Supervisory Board

Tempat Tanggal Lahir & Usia Place, Date of Birth & Age	:	Jembrana, 06 Agustus 1971 / 54 Tahun Jembrana, 06 Agustus 1971 / 54 years old
Domisili & Kewarganegaraan Domicile & Nationality	:	Palu, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	Sarjana Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Palu (2010) Bachelor of Economics, Muhammadiyah University Palu (2010)
Sertifikasi Certifications	:	· Sertifikasi Manajemen Umum Dana Pensiun (MUDP) · Pension Fund General Management Certification · Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Jenjang 6 · Indonesian National Work Competency Certification (SKKNI) Level 6
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	:	SK Direksi No. 170/SK-DIR/BPD-ST/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penunjukan Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Periode 13 November 2025 s/d 13 November 2029 Board of Directors Decree No. 170/SK-DIR/BPD-ST/2025 dated October 31, 2025 concerning the Appointment of the Chairman of the Pension Fund Supervisory Board of PT. Central Sulawesi Regional Development Bank for the Period of November 13, 2025 to November 13, 2029
Riwayat Jabatan Career History	:	Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun BPD Sulawesi Tengah Chairman of the Supervisory Board of the Central Sulawesi BPD Pension Fund
Periode Menjabat & Masa Jabatan Term & Tenure	:	2025 - 2029 2025 - 2029



Diana
Anggota Dewan Pengawas (Mewakili Peserta)
Members of the Supervisory Board (Representing Participants)

Tempat Tanggal Lahir & Usia Place, Date of Birth & Age	Palu, 29 Oktober 1977 / 47 Tahun Palu, October 29, 1977 / 47 Years
Domisili & Kewarganegaraan Domicile & Nationality	Palu, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	S-1 Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Teknologi Telkom Bandung (2001) S-1 Informatics Engineering, Telkom Bandung Institute of Technology (2001)
Sertifikasi Certifications	• Sertifikasi Manajemen Umum Dana Pensiun (MUDP) • Pension Fund General Management Certification (MUDP) • Sertifikasi Manajemen Risiko Level IV • Level IV Risk Management Certification
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	SK Direksi No. 141/SK-DIR/BPD-ST/2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang Penunjukan Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun BPD Sulawesi Tengah Periode 01 Agustus 2022 s.d 01 Agustus 2026 Board of Directors Decree No. 141 / SK-DIR / BPD-ST / 2024 dated October 31, 2024 concerning the Appointment of Members of the BPD Sulawesi Tengah Pension Fund Supervisory Board for the Period August 1, 2022 to August 1, 2026
Riwayat Jabatan Career History	Dewan Pengawas Dana Pensiun (2024 - 2026) Pension Fund Supervisory Board (2024 - 2026)
Periode Menjabat & Masa Jabatan Term & Tenure	2022 - 2026

Karakteristik Program dan Kepesertaan

- Jenis Program : Dana Pensiun Bank Sulteng menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), di mana manfaat bagi peserta ditetapkan secara spesifik dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP).
- Populasi Peserta : Hingga akhir periode pelaporan, total peserta tercatat sebanyak 448 orang, yang mencakup 361 Peserta Aktif, 68 Penerima Pensiun, dan 19 Peserta Pensiun Ditunda.

Ikhtisar Kinerja Keuangan (Audited)

Berdasarkan hasil audit independen oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs Harly Weku & Priscillia, posisi finansial Dana Pensiun menunjukkan tren pertumbuhan yang sehat per 31 Desember 2025:

- Aset Netto: Rp112,10 miliar (meningkat 7,35% YoY).
- Total Investasi: Mencapai Rp110,52 miliar (Meningkat 7,79% YoY).
- Pendapatan Hasil Investasi: Sebesar Rp7,45 miliar (Meningkat 2,38% YoY).
- Nilai Kini Aktuaria: Mencapai Rp106,77 miliar, menghasilkan Surplus sebesar Rp5,32 miliar. Dengan capaian ini, Dana Pensiun diklasifikasikan berada pada Kualitas Pendanaan Tingkat Pertama.

Program Characteristics and Participation

- Program Type: Bank Sulteng Pension Fund administers a Defined Benefit Pension Plan (PPMP), where the benefits for participants are specifically determined in the Pension Fund Regulations (PDP).
- Participant Population: Until the end of the reporting period, the total number of participants was recorded at 448 individuals, comprising 361 Active Participants, 68 Pension Recipients, and 19 Deferred Pension Participants.

Summary of Financial Performance (Audited)

Based on the independent audit results by the Public Accounting Firm Drs Harly Weku & Priscillia, the financial position of the Pension Fund demonstrates a healthy growth trend dated December 31, 2025:

- Net Assets: Rp112.10 billion (Increased by 7,35% YoY).
- Total Investment: Reached Rp110.52 billion (Increased by 7,79% YoY).
- Investment Income: Amounted to Rp7.45 billion (Increased by 2,38% YoY).
- Actuarial Present Value: Reached Rp106.77 billion, generating a Surplus of Rp5.32 billion. With this achievement, the Pension Fund is classified as being at the First Level of Funding Quality.

Tabel Rasio-Rasio Keuangan dan Pos Tertentu (Dana Pensiun)
Table of Financial Ratios and Certain Items (Pension Fund)

Rasio-Rasio Keuangan dan Pos Tertentu	%	Financial Ratios and Specific Items
Return on Investment (ROI)	7,02	Return on Investment (ROI)
Return on Asset (ROA)	7,48	Return on Asset (ROA)
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional	26,53	Operating Expenses to Operating Income
Rasio Pendanaan	104,99	Funding Ratio
Rasio Solvabilitas	133,84	Solvency Ratio


Bank Sulteng





Fungsi Penunjang Bisnis

Business Support Functions

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES

Bank Sulteng meyakini bahwa ketersediaan talenta yang tangguh, unggul, dan adaptif merupakan pilar krusial dalam merealisasikan visi menjadi bank yang terpercaya dan berdaya saing tinggi. Selaras dengan arah kebijakan transformasi menuju *future* bank, pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) di tahun 2025 diintegrasikan secara komprehensif dengan Rencana Kerja dan Anggaran Bank (RBB) serta strategi pertumbuhan jangka panjang Perusahaan.

Guna mencapai sasaran tersebut, Divisi SDM secara konsisten mengeksekusi inisiatif strategis yang bersifat berkelanjutan dengan mempertimbangkan dinamika industri perbankan digital serta kebutuhan internal Bank. Fokus utama Bank tetap pada pengembangan budaya kerja yang produktif dan penguatan nilai-nilai inti perusahaan guna memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, Bank Sulteng terus mengoptimalkan implementasi *Human Resources Information System* (HRIS) yang terintegrasi secara daring. Platform ini memberikan kemudahan akses bagi seluruh pegawai untuk mengelola aktivitas administrasi secara mandiri (*self-service*). Keberadaan HRIS mencakup fitur-fitur strategis, antara lain :

1. Administrasi Kepegawaian :
   Digitalisasi data personel, sistem absensi, pengelolaan perjalanan dinas, hingga klaim biaya operasional.
2. Pengembangan Kualitas :
   Integrasi modul pendidikan dan sertifikasi profesi untuk memantau peningkatan kompetensi pegawai.
3. Manajemen Kinerja :
   Pengelolaan jenjang karier serta penilaian kinerja yang objektif dan transparan.

Profil dan Struktur Organisasi SDM

Jumlah SDM Bank Sulteng

Bank Sulteng memandang bahwa keunggulan kompetitif di era perbankan digital tidak hanya ditentukan oleh kuantitas personel, melainkan oleh ketajaman kompetensi dan efektivitas pengorganisasian talenta. Sebagai bagian dari transformasi, pada tahun 2025 Perseroan melakukan penajaman struktur melalui evaluasi beban kerja (*workload analysis*) yang mendalam guna menciptakan manajemen operasional yang lebih efisien dan terukur.

Bank Sulteng believes that the availability of resilient, superior, and adaptive talent is a crucial pillar in realizing its vision of becoming a highly trusted and competitive bank. In alignment with the transformation policy direction towards a future bank, Human Resources (HR) management in 2025 is comprehensively integrated with the Bank's Business Plan (RBB) and the Company's long-term growth strategy.

To achieve these objectives, the HR Division consistently executes sustainable strategic initiatives, taking into account the dynamics of the digital banking industry and the internal needs of the Bank. The Bank's primary focus remains on developing a productive work culture and strengthening core corporate values to provide added value for all stakeholders.

In an effort to enhance operational efficiency and effectiveness, Bank Sulteng continues to optimize the implementation of an integrated, online Human Resources Information System (HRIS). This platform provides easy access for all employees to independently manage administrative activities (self-service). The existence of HRIS encompasses strategic features, including:

1. Personnel Administration:
   Digitalization of personnel data, attendance systems, business travel management, and operational expense claims.
2. Quality Development:
   Integration of education and professional certification modules to monitor the enhancement of employee competencies.
3. Performance Management:
   Career path management and objective, transparent performance appraisals.

HR Profile and Organizational Structure

Number of Bank Sulteng HR

Bank Sulteng considers that competitive advantage in the digital banking era is determined not only by personnel quantity but also by the sharpness of competencies and the effectiveness of talent organization. As part of the transformation, in 2025 the Company refined its structure through in-depth workload analysis to create more efficient and measurable operational management.

Hingga akhir periode 31 Desember 2025, total jumlah karyawan Bank Sulteng tercatat sebanyak 744 orang. Angka ini menunjukkan adanya penurunan sebesar 3,25% dibandingkan posisi akhir Desember 2024 yang berjumlah 769 orang. Penurunan jumlah ini merupakan manifestasi dari kebijakan strategis Bank dalam melakukan optimalisasi pengelolaan Sumber Daya Manusia. Fokus utama Bank di tahun 2025 adalah pada penguatan struktur kompetensi dan pemerataan produktivitas di seluruh jaringan kantor, bukan sekadar penambahan jumlah personel secara organik.

Langkah ini selaras dengan arah kebijakan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2025-2027 yang menitikberatkan pada penyesuaian deskripsi jabatan (*job description*) dan fungsi operasional di lapangan untuk mengakomodasi kebutuhan digitalisasi perbankan. Meskipun secara nominal jumlah pegawai mengalami penurunan, Bank Sulteng memastikan bahwa setiap individu yang berada dalam formasi organisasi saat ini memiliki kapabilitas yang handal untuk mendukung akselerasi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Struktur Organisasi Divisi SDM

Guna memastikan pengelolaan talenta yang tetap humanis di tengah upaya efisiensi tersebut, Bank melakukan penyempurnaan struktur organisasi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: 191/SK-DIR/BPD-ST/2025. Struktur terbaru tersebut dirancang untuk memperkuat fungsi kontrol internal serta memastikan program pengembangan kompetensi dan manajemen karier tetap berjalan optimal bagi 744 insan Bank Sulteng.

Pengelolaan talenta di Bank Sulteng berada di bawah Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), yang dipimpin oleh Bapak I Gusti P. Suartika selaku Pemimpin Divisi. Dalam menjalankan fungsinya, Divisi SDM berada di bawah supervisi langsung Direktur Kepatuhan, guna memastikan seluruh kebijakan kekaryawanan sejalan dengan standar governansi dan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku.

Struktur organisasi Divisi SDM telah dirancang sedemikian rupa untuk mendukung proses bisnis yang lincah, meliputi fungsi rekrutmen, pengembangan kompetensi, hingga pengelolaan remunerasi dan kesejahteraan pegawai.

As of the end of the period on December 31, 2025, the total number of Bank Sulteng employees was recorded at 744 individuals. This figure represents a decrease of 3.25% compared to the position at the end of December 2024, which stood at 769 individuals. This reduction in headcount is a manifestation of the Bank's strategic policy in optimizing Human Resources management. The Bank's primary focus in 2025 is on strengthening the competency structure and ensuring the equitable distribution of productivity across the entire office network, rather than merely increasing the number of personnel organically..

This step is in line with the policy direction of the 2025-2027 Bank Business Plan (RBB), which emphasizes the adjustment of job descriptions and operational functions in the field to accommodate banking digitalization needs. Although the nominal number of employees has decreased, Bank Sulteng ensures that every individual currently in the organizational formation has reliable capabilities to support the acceleration of sustainable business growth.

HR Division Organizational Structure

To ensure that talent management remains humanistic amidst these efficiency efforts, the Bank implemented organizational structure improvements stipulated through Board of Directors Decree Number: 191/SK-DIR/BPD-ST/2025. The updated structure is designed to strengthen the internal control function and ensure that competency development and career management programs continue to run optimally for the 744 individuals of Bank Sulteng.

Talent management at Bank Sulteng falls under the Human Resources (HR) Division, led by Mr. I Gusti P. Suartika as the Division Head. In executing its functions, the HR Division operates under the direct supervision of the Compliance Director, ensuring that all employment policies align with prevailing governance standards and labor regulations.

The organizational structure of the HR Division has been purposefully designed to support agile business processes, encompassing recruitment functions, competency development, and the management of employee remuneration and welfare.

Struktur organisasi Divisi Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:
The organizational structure of the Human Resources Division is as follows:



Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Divisi SDM

Divisi Sumber Daya Manusia Bank Sulteng memegang mandat krusial sebagai arsitek talenta yang menyelaraskan aspirasi individu dengan target strategis Perusahaan. Dalam menjalankan fungsinya, Divisi SDM bertanggung jawab atas seluruh siklus hidup karyawan, mulai dari perencanaan hingga purna bakti, dengan rincian tugas utama sebagai berikut :

1. Menyusun dan mengeksekusi *Blueprint* (Cetak Biru) SDM di seluruh unit operasional sesuai dengan pedoman tata kelola yang berlaku.
2. Mengelola aktivitas fungsional yang mencakup penetapan *Key Performance Indicators* (KPI), proses rekrutmen, administrasi kepegawaian, serta sistem penggajian.
3. Menyelenggarakan program pengembangan kapasitas pegawai melalui pendidikan, pelatihan berkelanjutan, dan *on-the-job training.*
4. Melakukan evaluasi kinerja yang komprehensif bagi seluruh karyawan di setiap unit aktivitas operasional Bank.
5. Mengidentifikasi kebutuhan formasi jabatan secara presisi guna memastikan efektivitas struktur organisasi dan menghindari redundansi personel.
6. Menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan hubungan industrial guna menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif.

Scope of Duties and Responsibilities of the HR Division

The Human Resources Division of Bank Sulteng holds a crucial mandate as the talent architect, aligning individual aspirations with the Company's strategic targets. In performing its functions, the HR Division is responsible for the entire employee lifecycle, from planning to retirement, with the following detailed main duties:

1. Formulating and executing the HR Blueprint across all operational units in accordance with applicable corporate governance guidelines.
2. Managing functional activities that include establishing Key Performance Indicators (KPIs), recruitment processes, personnel administration, and the payroll system.
3. Organizing employee capacity-building programs through education, continuous training, and on-the-job training.
4. Conducting comprehensive performance evaluations for all employees across every operational activity unit of the Bank.
5. Identifying structural position requirements precisely to ensure organizational structure effectiveness and prevent personnel redundancy.
6. Executing industrial relations supervision and development functions to foster a harmonious and productive work environment.

Membangun SDM Berkualitas

Bank Sulteng berkomitmen membangun fundamental organisasi yang resilien dengan mencetak SDM yang berkualitas tinggi melalui pendekatan yang terstruktur. Strategi pengembangan talenta di tahun 2025 difokuskan pada tiga pilar utama:

- Pengelolaan SDM Strategis : Penyelarasan perencanaan kebutuhan tenaga kerja dengan dinamika ekspansi bisnis Bank.
- Optimalisasi Proses SDM : Penajaman standar prosedur operasional (SOP) pengelolaan karyawan agar lebih adaptif dan efisien.
- Penguatan Sistem Informasi SDM : Akselerasi digitalisasi melalui HRIS untuk meningkatkan akurasi data dan kecepatan pengambilan keputusan manajerial.

Pengelolaan SDM Strategis, Proses dan Kebijakan SDM

Guna memastikan keberlanjutan operasional dan keunggulan kompetitif, Perusahaan mengimplementasikan langkah-langkah peningkatan kualitas SDM secara progresif, meliputi :

- Pemenuhan posisi strategis (seperti Analis Kredit, *Teller*, dan *Customer Service*) di kantor jaringan yang membutuhkan penekanan layanan.
- Penguatan fungsi pengawasan melalui penambahan *Resident Auditor* (RA) untuk memitigasi risiko operasional dan *anti-fraud* di tingkat cabang.
- Evaluasi berkala atas pencapaian KPI guna menjaga tingkat produktivitas dan disiplin pegawai.
- Penyegaran (*refreshment*) pada posisi layanan garis depan (*frontliner*) untuk memastikan standar pelayanan prima tetap terjaga.
- Kolaborasi strategis dengan institusi pendidikan, termasuk Universitas Tadulako, untuk menjaring lulusan terbaik sebagai kader masa depan Bank.

Pengembangan Kompetensi dan Karir

Bank Sulteng memandang penguatan kompetensi dan produktivitas karyawan sebagai investasi strategis guna menjamin keberlanjutan bisnis serta pencapaian target korporasi yang optimal. Perseroan senantiasa berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang sehat untuk memotivasi setiap talenta memberikan kontribusi terbaiknya. Seluruh pegawai diberikan kesempatan setara untuk mengikuti program pendidikan, pelatihan, serta sertifikasi profesi di sektor perbankan, baik yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) maupun standar internasional yang relevan.

Building High-Quality HR

Bank Sulteng is committed to building a resilient organizational foundation by cultivating high-quality HR through a structured approach. The talent development strategy in 2025 focuses on three main pillars:

- Strategic HR Management: Aligning workforce planning needs with the dynamics of the Bank's business expansion.
- HR Process Optimization: Refining standard operating procedures (SOPs) for employee management to be more adaptive and efficient.
- HR Information System Strengthening: Accelerating digitalization through HRIS to enhance data accuracy and the speed of managerial decision-making.

Strategic HR Management, Processes, and HR Policies

To ensure operational sustainability and competitive advantage, the Company implements progressive HR quality improvement measures, including:

- Fulfilling strategic positions (such as Credit Analyst, Teller, and Customer Service) in the network offices that require service emphasis.
- Strengthening the supervisory function through the addition of Resident Auditors (RA) to mitigate operational and anti-fraud risks at the branch level.
- Periodic evaluation of KPI achievements to maintain employee productivity and discipline levels.
- Refreshment for frontliner service positions to ensure excellent service standards are maintained.

- Strategic collaboration with educational institutions, including Tadulako University, to recruit top graduates as future cadres for the Bank.

Competency and Career Development

Bank Sulteng views the strengthening of employee competency and productivity as a strategic investment to ensure business continuity and the optimal achievement of corporate targets. The Company remains committed to fostering a healthy work environment to motivate every talent to deliver their best contribution. All employees are granted equal opportunities to participate in education, training, and professional certification programs within the banking sector, referencing both the Indonesian National Work Competency Standards (SKKNI) and relevant international standards.

Pada tahun 2025, Bank Sulteng mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan sebesar Rp20,415 juta. Angka ini mencerminkan rasio 19,95% dari total beban gaji kotor perusahaan, sebuah langkah konkret yang secara signifikan melampaui ketentuan minimal 3,5% sebagaimana diamanatkan dalam POJK Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum.

Investasi yang jauh di atas standar industri ini merupakan bentuk keseriusan Bank dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing pegawai.

Kebijakan dan Mekanisme Rekrutmen

Kebijakan rekrutmen Bank Sulteng diarahkan untuk mengakuisisi talenta yang berintegritas dan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri perbankan masa depan. Perusahaan senantiasa mengedepankan prinsip kesetaraan peluang tanpa membedakan gender, agama, maupun ras.

Proses akuisisi bakat dilaksanakan melalui tiga jalur utama :

- Rekrutmen Reguler : Ditujukan bagi putra-putri terbaik lulusan SMA/SMK hingga Sarjana (S1/S2) untuk mengisi posisi tetap maupun tidak tetap.
- Rekrutmen Internal : Memberikan kesempatan bagi pegawai tidak tetap untuk dipromosikan menjadi pegawai tetap berdasarkan evaluasi kinerja dan kompetensi.
- Professional Hire : Menarik tenaga profesional berpengalaman dari industri perbankan nasional untuk memperkuat kompetensi spesifik di unit kerja strategis.

In 2025, Bank Sulteng allocated an education and training budget of IDR20,415 million. This figure represents a ratio of 19.95% of the company's total gross salary expense, a concrete measure that significantly exceeds the 3.5% minimum requirement as mandated by POJK Number 24 of 2022 concerning Human Resources Quality Development for Commercial Banks.

Investment far exceeding industry standards demonstrates the Bank's commitment to enhancing employee capacity and competitiveness.

Recruitment Policy and Mechanism

Bank Sulteng's recruitment policy is directed at acquiring talent with integrity and competencies relevant to the needs of the future banking industry. The Company consistently prioritizes the principle of equal opportunity regardless of gender, religion, or race.

The talent acquisition process is conducted through three primary channels:

- Regular Recruitment: Targeted at the best male and female high school/vocational school (SMA/SMK) to Bachelor's/Master's (S1/S2) graduates to fill permanent or non-permanent positions.
- Internal Recruitment: Providing opportunities for non-permanent employees to be promoted to permanent employees based on performance and competency evaluations.
- Professional Hire: Attracting experienced professionals from the national banking industry to reinforce specific competencies in strategic work units.

Jabatan	2025	2024	2023	2022	2021	Position
Analis Kredit	-	-	1	1	13	Credit Analyst
Staf Layanan Dana & Jasa	-	1	1	6	11	Funds & Services Staff
Teller	-	30	12	8	10	Teller
Customer Service	-	9	5	7	5	Customer Service
Professional Hire	2	-	-	1	-	Professional Hire
Tenaga Ahli	-	-	-	1	-	Expert
Administrasi	-	4	2	1	25	Administration
Total	**2**	**44**	**21**	**25**	**64**	**Total**

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tabel di atas menjelaskan di tahun 2025 Bank Sulteng sengaja mengambil langkah lebih selektif dalam melakukan rekrutmen. Perusahaan berfokus mengutamakan strategi bisnis dan kebutuhan organisasi.

Sebagai bagian dari rencana strategis tersebut, Bank juga telah melaksanakan proses rekrutmen selektif yang dimulai sejak akhir Agustus 2025. Para talenta

Unlike previous years, the table above illustrates that in 2025, Bank Sulteng intentionally adopted a more selective approach toward recruitment. The Company focused on prioritizing business strategies and organizational needs.

As part of this strategic plan, the Bank also conducted a selective recruitment process starting in late August 2025. These selected talents are prepared

terpilih ini dipersiapkan untuk memperkuat formasi organisasi dan secara resmi akan memulai ikatan kerja pada Januari 2026.

to strengthen the organizational structure and will officially commence their employment in January 2026.

Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Manajemen secara berkesinambungan mengembangkan potensi SDM melalui berbagai lokakarya dan pelatihan, baik yang diselenggarakan secara internal melalui *Pedagogical Institute* (Lembaga Pendidikan) Bank Sulteng maupun bekerja sama dengan institusi eksternal yang kredibel. Materi pembelajaran mencakup bidang krusial seperti Manajemen Risiko, *Treasury*, Perpajakan, Teknologi Informasi (TI), serta aspek operasional lainnya. Selain itu, sejak tahun 2010, Bank telah menyediakan Unit Layanan Konseling untuk mendukung kesejahteraan mental dan kinerja harian pegawai.

Competency Development Policy and Implementation

Management continuously develops HR potential through various workshops and training sessions, both organized internally through Bank Sulteng's Pedagogical Institute and in collaboration with credible external institutions. Learning materials cover crucial areas such as Risk Management, Treasury, Taxation, Information Technology (IT), and other operational aspects. Furthermore, since 2010, the Bank has provided a Counseling Service Unit to support the mental well-being and daily performance of employees.

Realisasi Pelatihan SDM Bank Sulteng Tahun 2025

Dibandingkan dengan tahun buku sebelumnya, aktivitas pengembangan SDM di Bank Sulteng tumbuh sebesar 87,5% (YoY). Dari total 48 pelatihan di tahun 2024, Bank berhasil merealisasikan 90 kegiatan pada tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Realization of Bank Sulteng HR Training in 2025

Compared to the previous fiscal year, Human Resources (HR) development activities at Bank Sulteng grew by 87.5% (YoY). From a total of 48 training sessions in 2024, the Bank successfully realized 90 activities in 2025, with the following details:

KATEGORI CATEGORIES	NAMA NAME	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL
PESERTA PARTICIPANTS	PESERTA PARTICIPANTS	1.407	1.741	1600	2.782	7530
PELATIHAN TRAINING	PELATIHAN TRAINING	22	24	23	21	90
JENIS PELATIHAN TYPE OF TRAINING	KURSUS COURSE	0	0	0	0	0
	SEMINAR SEMINAR	0	0	3	0	3
	SERTIFIKASI CERTIFICATION	6	2	5	3	16
	TRAINING TRAINING	15	3	10	7	35
	WORKSHOP / PUBLIC TRAINING WORKSHOP / PUBLIC TRAINING	0	19	3	7	29
	SOSIALISASI SOCIALIZATION	1	0	2	4	7
	STUDI BANDING COMPARATIVE STUDY	0	0	0	0	0

Per 31 Desember 2025, total biaya yang direalisasikan untuk pengembangan talenta mencapai Rp29.387.461.787.

As of December 31, 2025, total realized expenditure for talent development amounted to IDR29.387.461.787.

Kebijakan Pelaksanaan dan Pengembangan Karier

Pengembangan karier di Bank Sulteng diarahkan sebagai instrumen formal untuk memacu pertumbuhan profesional, meningkatkan kepuasan kerja, serta memastikan ketersediaan kader pemimpin yang andal. Strategi perencanaan karier yang transparan membantu menyelaraskan aspirasi individu dengan kebutuhan jangka panjang organisasi.

Mengacu pada Peraturan Perusahaan No. 170/SK-DIR/BPDST/2019, implementasi pengembangan karier dijalankan dengan prinsip-prinsip utama sebagai berikut :

- Pemberian peluang seluas-luasnya bagi seluruh pegawai untuk meniti jenjang karier.
- Pelaksanaan karier dilakukan melalui sinergi antara Kepala Unit Kerja dan pegawai yang bersangkutan.
- Penempatan dan rotasi disesuaikan dengan kebutuhan strategis Bank serta kompetensi individu.
- Fokus pada penguatan rencana suksesi (*succession planning*) di setiap Unit Kerja guna menjamin regenerasi kepemimpinan yang solid.

Mekanisme Penilaian Kinerja

Keakuratan data kepegawaian merupakan fondasi dalam pengambilan keputusan manajemen yang presisi, mulai dari penilaian kinerja hingga penentuan skema kompensasi. Sejak tahun 2022, Bank Sulteng telah mentransformasi pengelolaan personalia melalui implementasi *Human Resources Information System* (HRIS).

Sistem berbasis teknologi ini mengintegrasikan seluruh database manajemen SDM secara daring, yang memungkinkan:

- Reduksi pekerjaan manual (*paperless*) guna meningkatkan efisiensi operasional.
- Integrasi data antar unit kerja di dalam Divisi SDM maupun unit lainnya.
- Akses layanan mandiri (*self-service*) bagi pegawai untuk pemantauan data kehadiran, administrasi perjalanan dinas, dan pengajuan klaim biaya.

Sistem Manajemen Kinerja

Bank Sulteng mengadopsi budaya kerja berbasis kinerja melalui sistem *Key Performance Indicators* (KPI) untuk evaluasi unit kantor secara kuartalan dan tahunan, serta Sasaran Kinerja Individu (SKI) untuk menilai kontribusi personal setiap tahun. Penilaian ini dirancang untuk memberikan evaluasi potensi secara objektif dan membimbing pegawai dalam mencapai target usaha Perusahaan.

Career Implementation and Development Policy

Career development at Bank Sulteng is directed as a formal instrument to stimulate professional growth, increase job satisfaction, and ensure the availability of reliable leadership cadres. A transparent career planning strategy helps align individual aspirations with the organization's long-term needs.

Referring to Company Regulation No. 170/SK-DIR/BPDST/2019, the implementation of career development is carried out according to the following main principles:

- Providing the widest possible opportunities for all employees to climb the career ladder.
- Career execution is carried out through synergy between the Head of the Work Unit and the respective employee.
- Placements and rotations are adjusted to the Bank's strategic needs and individual competencies.
- Focusing on strengthening succession planning in every Work Unit to guarantee solid leadership regeneration.

Performance Appraisal Mechanism

Personnel data accuracy is the foundation for precise management decision-making, from performance appraisals to determining compensation schemes. Since 2022, Bank Sulteng has transformed personnel management through the implementation of a Human Resources Information System (HRIS).

This technology-based system integrates the entire HR management database online, which allows for:

- Reduction of manual work (paperless) to increase operational efficiency.
- Data integration among work units within the HR Division as well as other units.
- Self-service access for employees to monitor attendance data, business travel administration, and expense claim submissions.

Performance Management System

Bank Sulteng adopts a performance-based work culture through the Key Performance Indicators (KPI) system for quarterly and annual office unit evaluations, and Individual Performance Targets (SKI) to assess personal contributions annually. This appraisal is designed to provide objective potential evaluations and guide employees in achieving the Company's business targets.

Pengukuran kinerja SKI mencakup empat perspektif strategis:

1. Perspektif Keuangan (*Financial*) : Fokus pada target profitabilitas, volume kredit, dan penghimpunan dana.
2. Perspektif Nasabah (*Customer*) : Mengukur kualitas layanan, kepuasan pelanggan, dan perluasan basis nasabah.
3. Perspektif Proses Internal : Menilai efisiensi biaya operasional, kualitas audit, dan pemenuhan *Service Level Agreement* (SLA).
4. Perspektif Pengembangan SDM (*Learning and Growth*) : Fokus pada produktivitas, indeks iklim kerja, dan pengembangan kompetensi.

Hasil akhir dari penilaian kinerja ini menjadi dasar mutlak bagi manajemen dalam menentukan kebijakan promosi, rotasi, pemberian penghargaan (*reward*), maupun penegakan disiplin (*punishment*). Sinergi sistem ini memastikan setiap individu di Bank Sulteng memiliki tanggung jawab yang selaras dengan visi transformasi Bank menuju masa depan.

Penilaian Kinerja: Membangun Budaya Meritokrasi Berbasis Hasil

Bank Sulteng meyakini bahwa akuntabilitas kinerja individu merupakan mesin penggerak utama dalam pencapaian target korporasi secara keseluruhan. Melalui sistem manajemen kinerja yang terstruktur, Perusahaan senantiasa menyelaraskan kontribusi setiap pegawai dengan arah strategis Bank guna mendorong produktivitas yang berkelanjutan. Sistem penilaian kinerja ini berlaku bagi seluruh jenjang, baik Pegawai Pimpinan maupun Non-Pimpinan, yang mencakup dua komponen fundamental :

- Penilaian Sasaran Kerja (KPI) : Merupakan evaluasi berkala atas pencapaian target nyata yang telah disepakati bersama di awal periode. Pengukuran KPI dilakukan secara komprehensif melalui empat perspektif utama : *Financial, Customer, Internal Process, dan People Perspective (Learning & Growth).*
- Penilaian Kompetensi Kerja : Dilaksanakan untuk memetakan kapasitas teknis dan perilaku pegawai dalam menjalankan tugasnya. Hasil evaluasi ini menjadi basis obyektif bagi manajemen dalam menentukan kebijakan mutasi, promosi jabatan, pengembangan karier, serta penentuan skema *reward and punishment* yang adil. Sepanjang tahun 2025, Bank telah melakukan mutasi terhadap 85 pegawai dan promosi bagi 38 pegawai sebagai hasil dari evaluasi kompetensi tersebut.

SKI performance measurement covers four strategic perspectives:

1. Financial Perspective: Focuses on profitability targets, credit volume, and fund-raising.
2. Customer Perspective: Measures service quality, customer satisfaction, and customer base expansion.
3. Internal Process Perspective: Assesses operational cost efficiency, audit quality, and Service Level Agreement (SLA) fulfillment.
4. Learning and Growth Perspective: Focuses on productivity, work climate index, and competency development.

The final result of this performance appraisal serves as the absolute basis for management in determining policies regarding promotion, rotation, rewarding, or disciplinary enforcement (punishment). The synergy of this system ensures every individual in Bank Sulteng has responsibilities that align with the Bank's transformation vision for the future.

Performance Appraisal: Building a Results-Based Meritocracy Culture

Bank Sulteng believes that individual performance accountability is the main driver in achieving overall corporate targets. Through a structured performance management system, the Company continually aligns each employee's contribution with the Bank's strategic direction to drive sustainable productivity. This performance appraisal system applies to all levels, both Managerial and Non-Managerial Employees, comprising two fundamental components:

- Work Target Assessment (KPI): A periodic evaluation of the achievement of tangible targets agreed upon together at the beginning of the period. KPI measurement is conducted comprehensively across four main perspectives: Financial, Customer, Internal Process, and People Perspective (Learning & Growth).
- Work Competency Assessment: Conducted to map the technical capacity and behavior of employees in carrying out their duties.The results of this evaluation become an objective basis for management in determining policies for mutation, job promotion, career development, and the determination of fair reward and punishment schemes. Throughout 2025, the Bank mutated 85 employees and promoted 38 employees as a result of these competency evaluations.

Sebagai parameter keberhasilan pencapaian sasaran kerja, Bank Sulteng menetapkan klasifikasi nilai berdasarkan ambang batas (*threshold*) pencapaian sebagai berikut :

As a parameter of successful work target achievement, Bank Sulteng establishes value classifications based on achievement thresholds as follows:

Tabel Kriteria Pencapaian KPI (KPI Achievement)
KPI Achievement Criteria Table (KPI Achievement)

Nilai KPI KPI Value	**KPI *Achievement*** KPI Achievement
G5	≥ 105%
G4	90,50% – < 105%
G3	85% – < 90,50%
G2	70% – < 85%
G1	< 70%

Hubungan Industrial dan Kesejahteraan

Penciptaan ekosistem kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan adalah prasyarat mutlak bagi keberlanjutan operasional Bank Sulteng. Perseroan memandang seluruh Insan Bank sebagai mitra strategis dalam membangun pertumbuhan bisnis, sehingga pemenuhan hak dan kewajiban antara Perusahaan dan pegawai senantiasa diatur secara jelas dalam Buku Peraturan Perusahaan.

Pilar utama dalam mewujudkan hubungan industrial yang solid di tahun 2025 difokuskan pada:

- **Dialog Konstruktif dan Terbuka :** Penguatan saluran komunikasi dua arah melalui rapat rutin unit kerja, portal informasi internal, serta sesi tanya jawab terbuka guna menjembatani aspirasi pegawai dengan kebijakan manajemen.
- **Partisipasi Aktif Pegawai :** Mendorong keterlibatan seluruh lini organisasi dalam memberikan ide kreatif dan kontribusi pada proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap Perusahaan.
- **Integritas, Keadilan, dan Kesetaraan :** Menjamin perlakuan yang setara bagi seluruh pegawai dalam hal remunerasi, promosi berbasis prestasi (*merit-based*), serta perlindungan penuh terhadap segala bentuk diskriminasi maupun pelecehan di lingkungan kerja.

Sebagai wujud kepatuhan terhadap regulasi, Bank Sulteng senantiasa mengacu pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Hingga akhir periode pelaporan 2025, Bank Sulteng mampu mempertahankan reputasi nihil perkara (*zero dispute*) di bidang hubungan industrial guna menjaga stabilitas dan reputasi positif organisasi di mata seluruh pemangku kepentingan.

Industrial Relations and Welfare

The creation of a harmonious, dynamic, and fair work ecosystem is an absolute prerequisite for Bank Sulteng's operational sustainability. The Company views all Bank Personnel as strategic partners in building business growth, ensuring that the fulfillment of rights and obligations between the Company and employees is always clearly stipulated in the Company Regulation Book.

The main pillars in realizing solid industrial relations in 2025 are focused on:

- Constructive and Open Dialogue: Strengthening two-way communication channels through routine work unit meetings, internal information portals, and open Q&A sessions to bridge employee aspirations with management policies.
- Active Employee Participation: Encouraging the involvement of all organizational lines in providing creative ideas and contributions to the decision-making process to enhance the sense of belonging toward the Company.
- Integrity, Fairness, and Equality: Guaranteeing equal treatment for all employees regarding remuneration, merit-based promotion, and full protection against all forms of discrimination or harassment in the workplace.

As a form of regulatory compliance, Bank Sulteng consistently adheres to Law No. 2 of 2004 concerning the Settlement of Industrial Relations Disputes. By the end of the 2025 reporting period, Bank Sulteng managed to maintain a zero dispute reputation in industrial relations to preserve the organization's stability and positive reputation in the eyes of all stakeholders.

Bank Sulteng meyakini bahwa sistem imbal jasa yang kompetitif dan program kesejahteraan yang menyeluruh merupakan kunci utama dalam menjaga motivasi serta loyalitas pegawai. Perusahaan senantiasa menyelaraskan kebijakan kesejahteraan dengan standar industri perbankan nasional dan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku, guna memastikan setiap insan Bank Sulteng mendapatkan penghargaan yang proporsional atas kinerja dan dedikasinya.

Kebijakan Remunerasi Strategis

Sistem remunerasi di Bank Sulteng dirancang secara transparan dan meritokratis, mengacu pada Buku Pedoman Perusahaan. Untuk jajaran Pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi), kebijakan remunerasi ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dengan mempertimbangkan asas kepatutan, kemampuan finansial bank, serta pencapaian target strategis.

Sepanjang tahun buku 2025, Bank Sulteng secara konsisten mengimplementasikan sistem remunerasi berbasis *Job Grade*. Struktur ini memastikan adanya keadilan internal dalam pemberian paket manfaat yang mencakup gaji pokok, tunjangan jabatan, fasilitas kesehatan, hingga penghargaan masa bakti.

Bank Sulteng believes that a competitive compensation system and comprehensive welfare programs are key to maintaining employee motivation and loyalty. The Company continuously aligns its welfare policies with national banking industry standards and prevailing labor regulations to ensure every Bank Sulteng personnel receives proportionate appreciation for their performance and dedication.

Strategic Remuneration Policy

The remuneration system at Bank Sulteng is designed to be transparent and meritocratic, referring to the Company's Guidelines. For the Management (Board of Commissioners and Directors), remuneration policy is determined through the General Meeting of Shareholders (GMS) based on recommendations from the Remuneration and Nomination Committee, taking into account the principle of propriety, the bank's financial capacity, and the achievement of strategic targets.
Throughout the 2025 financial year, Bank Sulteng consistently implemented a Job Grade-based remuneration system. This structure ensures internal equity in providing benefit packages that include basic salary, positional allowances, health facilities, and long-service awards.

Tabel Struktur Remunerasi Berdasarkan Sistem *Job Grade*
Table of Remuneration Structure Based on Job Grade System

Golongan Level Level Group	**Grade** Grades	**Jenjang Manajemen** Management Level	**Manfaat** | Benefit				
			Gaji Salary	**Pemeliharaan Kesehatan** Health Maintenance	**Pendidikan & Pelatihan** Education & Training	**Fasilitas** Facility	
						Bantuan Duka & Bencana Grief & Disaster Assistance	**Kendaraan Dinas** Service Vehicles
General Manager	10 - 12	Senior Vice President	√	√	√	√	√
		Assistant Vice President	√	√	√	√	√
Manager	6 - 9	Senior Manager	√	√	√	√	√
		Junior Manager	√	√	√	√	-
Officer	5	Officer	√	√	√	√	-
Staff	3 - 4	Senior Staf	√	√	√	√	-
		Junior Staf	√	√	√	√	-
Staff	1 - 2	Senior Non Staf	√	√	√	√	-
		Junior Non Staf	√	√	√	√	-

Program Remunerasi Strategis

Sebagai bagian dari strategi akselerasi target usaha di tahun buku 2025, Bank menjalankan program insentif khusus yang difokuskan pada unit bisnis utama, meliputi:

1. Insentif bagi *Funding Officer* :
   Skema apresiasi untuk mendorong pertumbuhan dana pihak ketiga secara berkualitas.
2. Insentif bagi Analis Kredit :
   Penghargaan atas ketepatan dan efektivitas dalam proses penyaluran serta pengelolaan portofolio kredit.

Komponen Imbal Jasa dan Tunjangan Kesejahteraan

Sebagai wujud nyata dukungan terhadap kualitas hidup dan loyalitas pegawai, Bank Sulteng memberikan beragam komponen pembayaran di luar gaji pokok yang direalisasikan sepanjang tahun 2025. Seluruh pembayaran tersebut merupakan manifestasi dari tanggung jawab sosial bidang ketenagakerjaan guna memastikan kesejahteraan pegawai tetap terjaga secara holistik.

Berikut adalah rincian pembayaran serta manfaat kesejahteraan yang telah diberikan perusahaan kepada pegawai selama periode satu tahun:

- Apresiasi Kinerja : Mencakup pembayaran Jasa Produksi, Bonus Kinerja, serta Insentif Kuartalan yang didasarkan pada evaluasi pencapaian target unit dan korporasi.
- Tunjangan Hari Raya dan Akhir Tahun : Pemberian imbal jasa tahunan sebagai bagian dari pemenuhan hak normatif pegawai.
- Dukungan Operasional dan Pendidikan : Penyaluran bantuan pakaian dinas, uang kehadiran/uang makan, serta tunjangan pendidikan guna mendukung profesionalisme pegawai.
- Perlindungan Kesehatan : Penjaminan biaya perawatan kesehatan bagi pegawai dan keluarga yang dikelola secara terpadu melalui asuransi mandiri perusahaan dan program BPJS Kesehatan.
- Penghargaan Loyalitas : Pemberian penghargaan masa bakti bagi individu yang telah mendedikasikan diri selama 15, 20, 25, hingga 30 tahun.
- Jaminan Masa Depan dan Perlindungan : Mencakup pemenuhan kewajiban imbalan pasca kerja serta penyediaan uang santunan kematian sebagai bentuk kepedulian sosial perusahaan.

Dengan struktur kompensasi yang komprehensif, Bank Sulteng optimis dapat mempertahankan talenta terbaik (*top talent*) dan memperkuat budaya kerja yang produktif serta penuh integritas di tahun-tahun mendatang.

Strategic Remuneration Program

As part of the strategy to accelerate business targets in the 2025 financial year, the Bank runs special incentive programs focused on core business units, including:

1. Incentives for Funding Officers:
   An appreciation scheme to drive the high-quality growth of third-party funds.
2. Incentives for Credit Analysts:
   Rewards for accuracy and effectiveness in the credit disbursement process and portfolio management.

Compensation Components and Welfare Allowances

As a tangible manifestation of support for employee quality of life and loyalty, Bank Sulteng provides various payment components beyond the basic salary, realized throughout 2025. All these payments demonstrate social responsibility in the employment sector to ensure employee welfare is maintained holistically.

The following are details of payments and welfare benefits provided by the company to employees during a one-year period:

- Performance Appreciation: Includes payments for Production Bonuses, Performance Bonuses, and Quarterly Incentives based on unit and corporate target achievement evaluations.
- Religious Holiday and Year-End Allowances: Provision of annual compensation as part of fulfilling employees' normative rights.
- Operational and Educational Support: Disbursement of assistance for official uniforms, attendance/meal allowances, and educational allowances to support employee professionalism.
- Health Protection: Guaranteeing healthcare costs for employees and their families, managed in an integrated manner through independent company insurance and the BPJS Health program.
- Loyalty Awards: Presenting long-service awards for individuals who have dedicated themselves for 15, 20, 25, up to 30 years.
- Future Security and Protection: Encompasses the fulfillment of post-employment benefit obligations and the provision of death compensation as a form of corporate social care.

With a comprehensive compensation structure, Bank Sulteng is optimistic about retaining top talent and strengthening a productive, high-integrity work culture in the coming years.

Program Manfaat dan Insentif Kinerja

Selain komponen gaji tetap, Bank juga memberikan berbagai bentuk apresiasi tambahan untuk memacu produktivitas, antara lain:

1. Insentif Berbasis Target :
   Diberikan secara khusus bagi *Funding Officer* dan Analis Kredit guna mengakselerasi pertumbuhan bisnis.
2. Tunjangan Kesejahteraan :
   Mencakup Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan pendidikan, bantuan pakaian dinas, uang makan, serta tunjangan akhir tahun.
3. Penghargaan Masa Bakti :
   Pemberian emas seberat 10 gram, uang penghargaan, dan piagam bagi pegawai yang telah mengabdi selama 15, 20, 25, hingga 30 tahun sebagai wujud penghormatan atas loyalitas mereka

Program Pensiun dan Purnabakti

Jaminan Masa Depan Melalui Program Pensiun

Sebagai bentuk perlindungan finansial bagi pegawai saat memasuki purna bakti, Bank Sulteng menyelenggarakan program perlindungan hari tua yang dikelola secara profesional melalui dua skema utama,:

1. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)
   - Pengelola : Dikelola oleh Dana Pensiun Bank Sulteng.
   - Kepesertaan : Pegawai tetap yang memenuhi kriteria sesuai regulasi dan telah terdaftar secara resmi.
   - Mekanisme : Manfaat pensiun ditetapkan secara spesifik dan dapat diklaim saat pegawai mencapai usia pensiun normal atau purna tugas.
2. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)
   - Pengelola : Bekerja sama dengan entitas eksternal, yaitu Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
   - Kepesertaan : Seluruh karyawan yang terdaftar guna memperkuat bantalan finansial masa tua melalui akumulasi iuran berkala.

Melalui implementasi kedua program tersebut, didukung oleh pemberian Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) dari BPJS Ketenagakerjaan serta jaminan Tunjangan Hari Tua (THT) dari Yayasan Kesejahteraan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, Bank Sulteng optimis dapat menjamin ketenangan hidup pegawai dimasa depan.

Pemenuhan hak pegawai dalam masa Pensiun Normal merupakan prioritas Bank yang pelaksanaannya berpedoman pada SK Direksi No. 170/SK-DIR/BPD-ST/2024. Adapun rincian manfaat yang diberikan sebagai bentuk proteksi masa depan pegawai meliputi:

Benefit and Performance Incentive Programs

In addition to the fixed salary component, the Bank also provides various forms of additional appreciation to stimulate productivity, including:

1. Target-Based Incentives:
   Specifically given to Funding Officers and Credit Analysts to accelerate business growth.
2. Welfare Allowances:
   Includes Religious Holiday Allowance (THR), educational allowances, uniform assistance, meal allowances, and year-end allowances.
3. Long Service Awards:
   Provision of 10 grams of gold, monetary rewards, and certificates for employees who have served for 15, 20, 25, up to 30 years as a tribute to their loyalty.

Pension and Retirement Programs

Future Security Through Pension Programs

As a form of financial protection for employees entering retirement, Bank Sulteng organizes old-age protection programs professionally managed through two main schemes:

1. Defined Benefit Pension Plan (PPMP)
   - Administrator: Managed by the Bank Sulteng Pension Fund.
   - Membership: Permanent employees who meet criteria according to regulations and are officially registered.
   - Mechanism: Pension benefits are specifically determined and can be claimed when the employee reaches normal retirement age or retires.
2. Defined Contribution Pension Plan (PPIP)
   - Administrator: In collaboration with an external entity, namely a Financial Institution Pension Fund (DPLK).
   - Membership: All registered employees, aimed at strengthening their old-age financial cushion through the accumulation of periodic contributions.

Through the implementation of these two programs, supported by the provision of Old Age Security (JHT) and Pension Security (JP) from BPJS Employment as well as Old Age Allowance (THT) from the Central Sulawesi Regional Development Bank Welfare Foundation, Bank Sulteng is optimistic that it can guarantee the peace of mind of its employees in the future..

Fulfilling employee rights during the Normal Retirement period is a priority for the Bank, the implementation of which is guided by Directors' Decree No. 170/SK-DIR/BPD-ST/2024. The details of the benefits provided as a form of protection for employees' futures include:

1. Manfaat Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun (JP) dari BPJS Ketenagakerjaan.
2. Manfaat Pensiun bagi peserta Dana Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun, berupa:
   - Manfaat pensiun sekaligus atau bulanan
   - Manfaat Lain yang dibayarkan setiap tahun sebesar 1 (satu) bulan Manfaat Pensiun dan dibayarkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum Hari Raya Lebaran
3. Manfaat Tunjangan Hari Tua (THT) dari Yayasan Kesejahteraan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah.
4. Manfaat Pensiun bagi Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
5. Biaya/ongkos pulang untuk Pegawai dan keluarganya ke Home Base Pegawai.

Sistem *Reward and Punishment*

Bank Sulteng meyakini bahwa akselerasi kinerja perusahaan sangat bergantung pada terciptanya budaya kerja yang disiplin, kompetitif, dan berorientasi pada hasil. Implementasi sistem *reward and punishment* dijalankan sebagai instrumen strategis manajemen untuk memotivasi pegawai agar senantiasa menunjukkan perilaku kerja yang selaras dengan nilai-nilai inti Bank Sulteng.

Penghargaan *(Reward)* diberikan sebagai bentuk apresiasi nyata atas dedikasi dan loyalitas jangka panjang pegawai. Sebaliknya, Sanksi (*Punishment*) diterapkan secara tegas, adil, dan transparan sebagai konsekuensi atas pelanggaran prosedur atau etika kerja, dengan tujuan memberikan efek jera serta memitigasi risiko operasional maupun reputasi. Kebijakan ini sepenuhnya mengacu pada Peraturan Perusahaan No. 170/SK-DIR/BPD-ST/2024.

Sepanjang tahun berjalan, Bank Sulteng telah merealisasikan pemberian penghargaan dan penerapan sanksi sebagai berikut :

1. Old Age Security and Pension Security (JP) benefits from BPJS Employment.
2. Pension Benefits for Pension Fund participants in accordance with Pension Fund Regulations, in the form of:
   - Lump-sum or monthly pension benefits.
   - Other Benefits paid annually equivalent to 1 (one) month's Pension Benefit and paid no later than 2 (two) weeks before the Eid al-Fitr Holiday.
3. Old Age Allowance (THT) benefits from the Central Sulawesi Regional Development Bank Welfare Foundation.
4. Pension Benefits for Participants of the Financial Institution Pension Fund (DPLK).
5. Travel/return costs for Employees and their families to the Employee's Home Base.

Reward and Punishment System

Bank Sulteng believes that the acceleration of company performance heavily relies on the creation of a disciplined, competitive, and results-oriented work culture. The implementation of the reward and punishment system is carried out as a strategic management instrument to motivate employees to consistently display work behaviors aligned with Bank Sulteng's core values.

Rewards are given as a tangible form of appreciation for the long-term dedication and loyalty of employees. Conversely, Sanctions (Punishment) are applied firmly, fairly, and transparently as a consequence for procedural or work ethics violations, with the aim of creating a deterrent effect and mitigating operational and reputational risks. This policy is fully guided by Company Regulation No. 170/SK-DIR/BPD-ST/2024.

Throughout the current year, Bank Sulteng has realized the granting of rewards and application of sanctions as follows:

Jumlah Pegawai yang mendapatkan Reward
Number of Rewarded Employees

Jenis Reward Reward Type	2025	2024
15 Tahun Masa Bakti 15 Years of Service	29	21
20 Tahun Masa Bakti 15 Years of Service	13	18
25 Tahun Masa Bakti 15 Years of Service	1	1
30 Tahun Masa Bakti 15 Years of Service	1	2
Total	**44**	**42**

Jumlah Pegawai yang mendapatkan Sanksi
Number of sanctioned employees

Kategori Category	Keterangan Description	2025
Ringan Lightweight	Peringatan Pertama First Warning	28
	Peringatan Kedua Second Warning	11
	Peringatan Ketiga Third Warning	9
	Teguran Tertulis Written Reprimand	61
Sedang Medium	Pernyataan Tidak Puas Dissatisfied Statement	-
	Demosi Grade Grade Demotion	5
Berat Weight	Pemutusan Hubungan Kerja Termination of Employment	6
Jumlah Total		**120**

Manajemen *Turnover* Pegawai

Bank Sulteng berkomitmen untuk senantiasa menjaga stabilitas organisasi melalui pengelolaan tingkat perputaran karyawan (*employee turnover*) yang sehat. Strategi utama yang dijalankan adalah dengan menciptakan lingkungan kerja yang profesional namun tetap mengedepankan nilai kekeluargaan, serta melakukan tinjauan berkala terhadap paket remunerasi dan manfaat kesejahteraan lainnya guna menjamin daya saing Bank sebagai tempat kerja pilihan (*employer of choice*).

Manajemen meyakini bahwa hubungan industrial yang sehat dan lingkungan kerja yang positif merupakan faktor utama dalam menekan kecenderungan perputaran pegawai. Hingga akhir periode 2025, tingkat *turnover* pegawai tetap terjaga pada rasio yang relatif kecil, sehingga tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap keberlanjutan operasional perusahaan. Berikut adalah perbandingan data *turnover* pegawai:

Employee Turnover Management

Bank Sulteng is committed to consistently maintaining organizational stability through the healthy management of employee turnover rates. The primary strategy executed is creating a professional work environment that continues to prioritize family values, as well as conducting periodic reviews of remuneration packages and other welfare benefits to ensure the Bank's competitiveness as an employer of choice.

Management believes that healthy industrial relations and a positive work environment are the main factors in suppressing the tendency for employee turnover. As of the end of the 2025 period, the employee turnover rate was maintained at a relatively small ratio, thus not having a significant impact on the company's operational sustainability. The following is comparative data on employee turnover:

Data Perbandingan Tingkat Turnover Pegawai (2021–2025)
Comparative Data of Employee Turnover Rates (2021–2025)

Uraian Alasan Keluar	2025	2024	2023	2022	2021	Description of Reason for Leaving
Mencapai Usia Pensiun	10	4	8	2	2	Reaching Retirement Age
Mengundurkan Diri (Resign)	10	3	14	4	14	Resignation
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	4	10	9	5	3	Termination of Employment (PHK)
Meninggal Dunia	2	3	3	1	1	Deceased
Habis Masa Kontrak	2	1	-	1	-	End of Contract Period
Jumlah Total (Orang)	28	21	34	13	20	Total (Persons)
Tingkat Turnover (%)	3,76%	2,73%	4,56%	1,71%	2,68%	Turnover Rate (%)

Rencana Pengelolaan SDM Tahun 2025

Sejalan dengan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2025, Bank Sulteng menetapkan akselerasi kapasitas talenta sebagai motor penggerak pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Program strategis ini dirancang untuk memastikan tersedianya profil pegawai yang kompeten, profesional, dan memiliki daya saing tinggi guna menghadapi tantangan digitalisasi perbankan.

Program strategis pengelolaan SDM Bank Sulteng tahun 2025 mencakup empat pilar utama sebagai berikut :

1. Rencana Pengembangan Organisasi
   Guna mendukung kesuksesan target bisnis tahun 2025, Bank melakukan penguatan organisasi secara menyeluruh yang meliputi :

   - Evaluasi Beban Kerja: Melakukan analisis mendalam terhadap beban kerja di setiap divisi dan unit operasional untuk mengoptimalkan efektivitas proses bisnis.
   - Penyelarasan Struktur: Mengevaluasi struktur organisasi secara berkala agar tetap adaptif terhadap dinamika pasar, termasuk penyesuaian deskripsi jabatan (*job description*) dan fungsi operasional di lapangan.
   - Optimalisasi Penugasan: Melaksanakan rencana pemindahan bagian, penguatan garis koordinasi, serta pemisahan atau penambahan unit kerja di Kantor Pusat maupun kantor jaringan (KC/KCP) sesuai kebutuhan ekspansi.
   - Pengisian Posisi Strategis: Memenuhi kebutuhan staf di Struktur Organisasi Kantor Pusat melalui promosi pegawai *frontliner* senior serta mengisi jabatan manajerial yang kosong dengan kandidat yang memiliki kompetensi unggul.
   - Penyegaran Jabatan (*Refreshment*): Melakukan rotasi atau penyegaran bagi pejabat yang telah lama menduduki posisi tertentu guna menjaga motivasi dan performa kerja.

2. Rencana Pengembangan Sistem Informasi Manajemen SDM
   Bank Sulteng melanjutkan akselerasi digitalisasi pengelolaan SDM melalui *Human Resources Information System* (HRIS). Di tahun 2025, fokus utama adalah penguatan modul-modul terintegrasi seperti *Payroll, Recruitment, Career Management, Leave & Permits,* Klaim Biaya, Perjalanan Dinas, Penilaian Kinerja, Pendidikan & Pelatihan, serta sinkronisasi Laporan Apolo. Sistem ini dapat diakses secara daring oleh seluruh pegawai guna meningkatkan efisiensi operasional Divisi SDM.

2025 HR Management Plan

In line with the 2025 Bank Business Plan (RBB), Bank Sulteng establishes the acceleration of talent capacity as the driving engine for sustainable business growth. This strategic program is designed to ensure the availability of employee profiles that are competent, professional, and highly competitive to face the challenges of banking digitalization.

Bank Sulteng's strategic HR management program for 2025 comprises four main pillars as follows:

1. Organizational Development Plan
   To support the success of 2025 business targets, the Bank carries out comprehensive organizational strengthening, which includes:

   - Workload Evaluation: Conducting in-depth analyses of the workload in every division and operational unit to optimize business process effectiveness.
   - Structural Alignment: Periodically evaluating the organizational structure to remain adaptive to market dynamics, including adjustments to job descriptions and operational functions in the field.
   - Assignment Optimization: Executing plans for departmental transfers, strengthening coordination lines, and separating or adding work units at the Head Office and network offices (Branch Offices/ Sub-Branch Offices) according to expansion needs.
   - Filling Strategic Positions: Fulfilling staff needs in the Head Office Organizational Structure through the promotion of senior frontliner employees and filling vacant managerial positions with candidates possessing superior competencies.
   - Position Refreshment: Conducting rotation or refreshment for officials who have long occupied certain positions to maintain motivation and work performance.

2. HR Management Information System Development Plan
   Bank Sulteng continues to accelerate HR management digitalization through the Human Resources Information System (HRIS). In 2025, the primary focus is on strengthening integrated modules such as Payroll, Recruitment, Career Management, Leaves & Permits, Expense Claims, Business Travel, Performance Appraisal, Education & Training, and the synchronization of Apolo Reports. This system can be accessed online by all employees to increase the operational efficiency of the HR Division.

3. Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

   Fokus pengembangan talenta di tahun 2025 diarahkan pada peningkatan integritas, disiplin, dan penguasaan kompetensi teknis melalui :

   - Rekrutmen: Merencanakan rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan Perusahaan dan menggantikan pegawai yang pensiun atau keluar.
   - Evaluasi Kinerja Obyektif: Melakukan evaluasi rutin terhadap *Key Performance Indicator* (KPI) guna memantau produktivitas setiap individu.
   - Optimalisasi Peran fungsional: Mengasah potensi Analis Kredit untuk pertumbuhan penyaluran kredit yang sehat, penguatan Staf Layanan Dana dalam penghimpunan DPK, serta peningkatan kapabilitas *Resident Auditor* (RA) dalam fungsi pengendalian *anti-fraud.*
   - Peningkatan Standar Layanan: Melakukan *refreshment* pada petugas layanan garis depan *(frontliner)* untuk memastikan kualitas pelayanan nasabah tetap prima dan menarik secara profesional
   - Pembaruan Governansi: Memutakhirkan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan kebijakan internal SDM agar tetap relevan dengan regulasi terkini.
   - Implementasi *Blueprint* SDM: Mengeksekusi Cetak Biru Pengembangan SDM dan memberikan kesempatan luas bagi pegawai untuk mendapatkan sertifikasi sektor perbankan (SKKNI) maupun non-SKKNI

4. Rencana Strategi Kebijakan Remunerasi

   Kebijakan remunerasi tahun 2025 diarahkan untuk memberikan imbal jasa yang kompetitif dan memotivasi, meliputi :

   - Penyesuaian Skema Imbal Jasa: Melakukan evaluasi *Grading* pegawai serta penyesuaian tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya seiring dengan tren pertumbuhan positif Bank.
   - Tunjangan Perumahan: Memberikan fasilitas tunjangan perumahan bagi pejabat eksekutif yang ditetapkan melalui SK Direksi
   - Kenaikan Gaji Pokok: Merencanakan kenaikan Gaji Pokok sebesar 3%, dengan mempertimbangkan target inflasi nasional tahun 2025 yang diperkirakan sebesar 2,5%.
   - Peningkatan Uang Makan: Merencanakan penyesuaian nilai uang makan dari Rp50.000 menjadi Rp75.000 atau Rp100.000 per hari

3. Human Resources (HR) Development Plan

The focus of talent development in 2025 is directed at enhancing integrity, discipline, and the mastery of technical competencies through:

- Recruitment: Planning recruitment to meet the Company's needs and replace employees who retire or leave.
- Objective Performance Evaluation: Conducting routine evaluations of Key Performance Indicators (KPIs) to monitor individual productivity.
- Functional Role Optimization: Honing the potential of Credit Analysts for healthy credit disbursement growth, strengthening Fund Service Staff in raising Third-Party Funds (DPK), and enhancing the capabilities of Resident Auditors (RA) in anti-fraud control functions.
- Service Standard Improvement: Conducting refreshment for frontline service officers to ensure customer service quality remains excellent and professionally engaging.

- Governance Updates: Updating Standard Operating Procedures (SOPs) and internal HR policies to remain relevant to current regulations.

- HR Blueprint Implementation: Executing the HR Development Blueprint and providing broad opportunities for employees to obtain banking sector certifications (SKKNI) as well as non-SKKNI certifications.

4. Strategic Remuneration Policy Plan

   The remuneration policy for 2025 is directed at providing competitive and motivating compensation, including:

   - Compensation Scheme Adjustment: Evaluating Employee Grading and adjusting positional allowances and other allowances in line with the Bank's positive growth trend.
   - Housing Allowance: Providing housing allowance facilities for executive officials established through Board of Directors Decrees.
   - Basic Salary Increase: Planning a 3% Basic Salary increase, taking into account the 2025 national inflation target, which is estimated at 2.5%.

   - Meal Allowance Increase: Planning the adjustment of the meal allowance value from Rp50,000 to Rp75,000 or Rp100,000 per day.

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

Perkembangan digital dalam dekade terakhir menunjukkan percepatan yang signifikan dan berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Transformasi digital telah menjadi fenomena global yang mempengaruhi pola interaksi sosial, sistem ekonomi, serta mekanisme pelayanan publik. Inovasi teknologi seperti *mobile banking, big data, artificial intelligence* dan *financial technology* berperan sebagai katalis utama perubahan tersebut. Pada sektor keuangan, digitalisasi membuka peluang penyediaan layanan yang lebih cepat, transparan dan efisien serta mengubah cara masyarakat dalam mengakses informasi serta melakukan transaksi keuangan. Perubahan ini menciptakan ekosistem baru yang menuntut lembaga keuangan untuk beradaptasi agar tetap relevan dan berdaya saing.

Dalam pengelolaan operasional Bank, keamanan data *(cyber security)* memainkan peran yang sangat krusial dalam meningkatkan kepuasan nasabah, terutama dalam konteks implementasi layanan digital perbankan. Nasabah mengharapkan perlindungan yang sangat kuat terhadap data pribadi. Ketidakpastian mengenai keamanan data dapat mengurangi kepercayaan nasabah. Risiko keamanan data yang tinggi juga dapat mengurangi tingkat kepercayaan nasabah.

Nasabah yang merasa aman dengan perlindungan data cenderung memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi terhadap layanan yang diberikan, tingkat keamanan data yang baik secara signifikan berkontribusi pada kepuasan nasabah. Oleh karena itu, investasi dalam keamanan data tidak hanya melindungi informasi sensitif, tetapi juga membangun kepercayaan nasabah yang pada akhirnya turut berkontribusi pada loyalitas dan retensi nasabah.

Saat ini peralihan bank konvensional ke digital di Indonesia semakin digalakkan. Hal ini didorong oleh kebutuhan efisiensi, perubahan perilaku nasabah serta adopsi teknologi seperti *mobile banking* dan *fintech* untuk layanan 24/7 tanpa kantor cabang. Transformasi ini melibatkan kolaborasi antara bank tradisional dan *fintech (symbiotic transformation)* guna meningkatkan inklusi keuangan dan keamanan data. Bank Sulteng sebagai Bank Daerah turut menyesuaikan proses ini dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Peralihan ini mendorong Bank Sulteng untuk menyesuaikan strategi bisnis, melakukan penataan ulang jaringan distribusi, mendorong transaksi digital melalui layanan *mobile app* dan internet termasuk penggunaan perangkat perbankan elektronik terkini sebagai upaya peningkatan pengalaman nasabah.

Digital developments over the past decade have demonstrated significant acceleration and broadly impacted various aspects of human life. Digital transformation has become a global phenomenon affecting social interaction patterns, economic systems, and public service mechanisms. Technological innovations such as mobile banking, big data, artificial intelligence, and financial technology serve as the primary catalysts for these changes. In the financial sector, digitalization opens opportunities to provide faster, more transparent, and efficient services, while also fundamentally changing the way the public accesses information and conducts financial transactions. This shift creates a new ecosystem that requires financial institutions to adapt in order to remain relevant and competitive.

In the operational management of the Bank, data security (cybersecurity) plays a highly crucial role in enhancing customer satisfaction, particularly in the context of implementing digital banking services. Customers expect highly robust protection of their personal data; uncertainty regarding data security can diminish customer trust. High data security risks can also erode the level of customer confidence.

Customers who feel secure regarding data protection tend to have higher satisfaction levels with the provided services, meaning a strong level of data security significantly contributes to customer satisfaction. Therefore, investments in data security not only protect sensitive information but also build customer trust, which ultimately contributes to customer loyalty and retention. Currently, the transition from conventional to digital banking in Indonesia is increasingly being promoted.
This is driven by the need for efficiency, shifts in customer behavior, and the adoption of technologies such as mobile banking and fintech for 24/7 branchless services. This transformation involves collaboration between traditional banks and fintech companies (symbiotic transformation) to enhance financial inclusion and data security. Bank Sulteng, as a Regional Development Bank, is actively adapting to this process in conducting its operational activities. This transition compels Bank Sulteng to realign its business strategy, restructure its distribution network, and promote digital transactions through mobile app and internet services, including the utilization of the latest electronic banking devices to improve the customer experience. Furthermore, Bank Sulteng is also implementing an Integrated Digital Ecosystem to optimize the performance of all existing applications and channels. An Integrated Digital Ecosystem is a collection of several integrated applications that form a system to provide comprehensive services to customers.

Selain itu, Bank Sulteng juga mengimplementasikan *Integrated Digital Ecosystem* untuk mengoptimalkan kerja semua aplikasi dan *channel* yang ada. *Integrated Digital Ecosystem* adalah suatu kumpulan beberapa aplikasi yang terintegrasi menjadi suatu sistem yang memberikan pelayanan secara terpadu kepada nasabah. Bank Sulteng sebagai salah satu Bank Daerah yang sedang berkembang senantiasa berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah baik individual maupun bisnis dan memperluas jangkauan pasar. Oleh karena itu, Bank Sulteng terus berinovasi mengembangkan aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai lapisan masyarakat seperti masyarakat umum, pegawai Pemda/ASN, pedagang, pebisnis, petani, peternak dan pelajar. Dengan demikian, terbentuklah Ekosistem Ekonomi yang terintegrasi dengan *Digital Ecosystem* Bank Sulteng. Sistem ini memiliki *multi effect* terhadap penggunaan produk Bank, baik berupa produk dana maupun kredit. Dengan konsep *Digital Ecosystem* Bank Sulteng diharapkan mampu memberikan skalabilitas tinggi untuk mendukung transaksi online 24x7.

As a growing Regional Development Bank, Bank Sulteng consistently strives to improve services for both individual and corporate customers and to expand its market reach. Therefore, Bank Sulteng continues to innovate by developing applications that can be utilized by various segments of society, such as the general public, Regional Government employees/Civil Servants (ASN), merchants, business owners, farmers, livestock breeders, and students. Consequently, an Economic Ecosystem that is integrated with Bank Sulteng's Digital Ecosystem has been established. This system generates a multiplier effect on the utilization of the Bank's products, encompassing both funding and lending products. The Bank Sulteng Digital Ecosystem concept is expected to provide high scalability to support 24x7 online transactions.

Seiring dengan diberlakukannya regulasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang mewajibkan Bank Sulteng untuk sepenuhnya mendukung transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari cara tunai ke non tunai berbasis digital, yang mana regulasi ini menjadi peluang bagi Bank Sulteng menjadi *Regional Champion* dan *Market Leader,* khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, serta membantu peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, Bank Sulteng turut memperkuat ekosistem digital melalui pengembangan layanan perbankan berbasis teknologi, peningkatan kualitas kanal elektronik, serta penguatan infrastruktur dan keamanan informasi. Upaya ini bertujuan untuk mendorong inklusi keuangan, memperluas jangkauan layanan hingga ke daerah, serta mendukung aktivitas ekonomi daerah yang semakin terdigitalisasi.

Dengan melangkah bersama digital, Bank Sulteng berupaya menjadi mitra terpercaya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan di era digital.

In line with the enactment of the Regional Government Transaction Electronification (ETPD) regulation, which mandates Bank Sulteng to fully support the transition of regional government revenue and expenditure transactions from cash to digital-based non-cash methods, this regulation presents an opportunity for Bank Sulteng to emerge as a Regional Champion and Market Leader, particularly in regional financial management, as well as to assist in increasing the Regional Original Revenue (PAD) of Central Sulawesi Province. Therefore, Bank Sulteng is strengthening the digital ecosystem through the development of technology-based banking services, enhancement of electronic channel quality, and the fortification of information infrastructure and security. This initiative aims to drive financial inclusion, expand service reach to remote areas, and support increasingly digitalized regional economic activities.
By advancing together with digitalization, Bank Sulteng aims to become a trusted partner in fostering inclusive, competitive, and sustainable regional economic growth in the digital era.

Sasaran TI Bank Sulteng

Divisi TI Bank Sulteng telah menetapkan sejumlah sasaran strategis untuk mengimplementasikan semua ide dan konsep yang berkaitan dengan TI yang dirincikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola Teknologi Informasi yang profesional dalam mendukung *Good Corporate Governance.*

Bank Sulteng IT Objectives

The Bank Sulteng IT Division has established several strategic objectives to implement all IT-related ideas and concepts, which are detailed as follows:

1. Enhancing professional Information Technology governance to support Good Corporate Governance.

a. Penerapan inisiatif tata kelola TI yang berkelanjutan serta *comply* dengan regulasi perbankan.
b. Menyempurnakan dan menyusun BPP dan SOP layanan TI.
c. Meningkatkan peran TI sebagai *supporting* bisnis yang *enabler.*

2. Menyediakan Teknologi Sistem Informasi yang terkini (*update*) dan bersinergi serta berkolaborasi dengan pihak ketiga lainnya (bidang teknologi) dalam meningkatkan kapabilitas produk dan layanan Bank agar mampu bersaing di industri perbankan nasional.
   a. Meningkatkan kapabilitas *Core Banking System* (CBS) sesuai dengan kebutuhan bisnis.
   b. Menyediakan aplikasi sesuai dengan arsitektur aplikasi yang direncanakan.
   c. Mengimplementasikan produk-produk digital banking sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing dan loyalitas nasabah.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya Teknologi Sistem Informasi yang dapat diandalkan dan terpercaya bagi stakeholders.
   a. Menyusun kebutuhan dan mengikuti *training* baik *in house training* maupun *Joint Application Development* (JAD) untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia TI.
   b. Melakukan peremajaan infrastruktur TI sebagai bentuk mitigasi terhadap risiko operasional yang disebabkan kegagalan sistem dikarenakan infrastruktur yang *out of date.*
4. Meningkatkan kemitraan yang produktif antara pengelola teknologi sistem informasi dengan pelaksana bisnis dalam mencapai strategi dan tujuan bisnis Bank.
   a. Melakukan diskusi dan *workshop* dengan *business user* dalam konteks pemanfaatan TI untuk bisnis.
   b. Melaksanakan kerjasama dengan penyedia TI eksternal (kolaborasi) untuk meningkatkan layanan TI Bank.

Langkah Strategis TI

Guna mencapai sasaran strategis TI secara efektif, Bank Sulteng telah menyusun berbagai langkah strategis sebagai berikut:

1. Pengelolaan Organisasi, SDM dan Budaya Kerja *(Teamwork)*
   a. Organisasi TI berorientasi pada peran yang akan diwujudkan dengan mengakomodir seluruh siklus pengelolaan TI.
   b. SDM memiliki kecukupan dari aspek kuantitas dan kualitas berdasarkan strategi pengelolaan TI.

a. Implementing sustainable IT governance initiatives while complying with banking regulations.
b. Refining and drafting IT Service Corporate Guidelines (BPP) and Standard Operating Procedures (SOP).
c. Elevating the role of IT as a business supporting enabler.

1. Providing updated Information Systems Technology and creating synergies and collaborations with third parties (in the technology sector) to enhance the capability of the Bank's products and services, ensuring competitiveness in the national banking industry.
   d. Improving the capabilities of the Core Banking System (CBS) in accordance with business requirements.
   e. Deploying applications in alignment with the planned application architecture.
   f. Implementing digital banking products as an effort to increase competitiveness and customer loyalty.
2. Enhancing the quality of Information Systems Technology human resources to be reliable and trustworthy for stakeholders.
   g. Formulating training needs and participating in both in-house training and Joint Application Development (JAD) to improve the capabilities of IT human resources.
   h. Conducting IT infrastructure rejuvenation as a form of operational risk mitigation against system failures caused by outdated infrastructure.
3. Fostering a productive partnership between information systems technology managers and business executors to achieve the Bank's business strategies and objectives.
   i. Facilitating discussions and workshops with business users regarding the utilization of IT for business.
   j. Executing collaborations with external IT providers to enhance the Bank's IT services.

Strategic IT Initiatives

To effectively achieve the strategic IT objectives, Bank Sulteng has formulated various strategic initiatives as follows:

1. Organization, HR, and Work Culture Management (Teamwork)
   k. The IT organization is role-oriented, actualized by accommodating the entire IT management lifecycle.
   l. Human resources possess adequacy in terms of quantity and quality based on the IT management strategy.

c. Budaya pengelolaan TI berorientasi pada penerapan *knowledge management* sehingga terbangun sinergi dalam *teamwork* dan mencegah ketergantungan pada personil.

2. Pengelolaan Aplikasi dan Infrastruktur
   a. Aplikasi yang akan dikembangkan berorientasi pada rencana strategis Bank dan memberikan *value* pada *stakeholder* Bank.
   b. Infrastruktur dikelola dengan berorientasi pada terciptanya layanan yang mengedepankan *availability* (ketersediaan), *security* (keamanan), *capacity* (kapasitas), *performance* (performa) dan *scalability* (tumbuh menyesuaikan volume data) yang memadai sesuai layanan TI yang akan diwujudkan.
3. Pengembangan dan Standarisasi Pedoman TI
   a. Pengembangan TI dikembangkan berdasarkan arsitektur dan *roadmap* dengan mengacu pada *best practice* dan ketentuan Regulator.
   b. Bank harus memiliki pedoman TI sesuai dengan ketentuan Regulator dan *best practice*. Pedoman atau kebijakan TI harus senantiasa di-*review* berdasarkan perkembangan kompeksitas Bank, arah bisnis dan *update* ketentuan regulator.
4. Penguatan IT *Governance, Risk and Compliance*
   a. Pengelolaan risiko TI menjadi bagian dalam melakukan pengelolaan TI untuk menciptakan layanan dan kinerja TI berbasis risiko.
   b. Pengelolaan TI didasarkan pada tingkat kepatuhan terhadap ketentuan Regulator dan internal perusahaan dalam mencapai kinerja yang optimal.

Tujuan TI Bank Sulteng

Berdasarkan *roadmap* Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI), Bank Sulteng telah menerapkan kebijakan dan prosedur TI yang memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Peningkatan fungsi teknologi informasi sebagai pilar utama pendukung kebutuhan bisnis yang dinamis, mematuhi ketentuan regulasi serta mengikuti perkembangan teknologi informasi terkini perbankan.
2. Peningkatan standar dan kualitas layanan, jaringan dan infrastruktur serta keamanan teknologi informasi.
3. Peningkatan inovasi di bidang transformasi layanan digital untuk menjadikan Bank Sulteng sebagai *market leader* di Sulawesi Tengah serta mampu meningkatkan keunggulan kompetitif Bank Sulteng.

a. The IT management culture is oriented towards the implementation of knowledge management to build synergy within teamwork and prevent reliance on specific personnel.

1. Application and Infrastructure Management
   b. Applications to be developed are oriented towards the Bank's strategic plan and provide value to the Bank's stakeholders.
   c. The infrastructure is managed with an orientation towards creating services that prioritize availability, security, capacity, performance, and scalability (growing in accordance with data volume) adequate for the IT services to be realized.

2. Development and Standardization of IT Guidelines
   d. IT development is executed based on the architecture and roadmap, referring to best practices and regulatory provisions.
   e. The Bank must possess IT guidelines in accordance with regulatory provisions and best practices. IT guidelines or policies must be continuously reviewed based on the evolving complexity of the Bank, business direction, and updates to regulatory provisions.
3. Strengthening IT Governance, Risk, and Compliance
   f. IT risk management becomes an integral part of IT operations to create risk-based IT services and performance.
   g. IT management is based on the level of compliance with regulatory provisions and internal corporate policies to achieve optimal performance.

Bank Sulteng IT Goals

Based on the Information Technology Strategic Plan (RSTI) roadmap, Bank Sulteng has implemented IT policies and procedures with the following goals:

1. Enhancing the information technology function as the primary pillar supporting dynamic business needs, complying with regulatory provisions, and keeping pace with the latest banking information technology developments.
2. Elevating the standards and quality of services, networks, and infrastructure, as well as information technology security.
3. Driving innovation in the field of digital service transformation to position Bank Sulteng as a market leader in Central Sulawesi and to enhance Bank Sulteng's competitive advantage.

Selain itu, arah dan kebijakan TI yang dirumuskan pada Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) dibahas serta disepakati bersama dalam rapat dengan anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) yang dibuat dengan tujuan untuk memastikan keselarasan dan dukungan teknologi terhadap dukungan bisnis dengan arah teknologi sebagai berikut:

1. Mengendalikan risiko-risiko strategis/jangka panjang dari penerapan dan penggunaan teknologi informasi lingkungan Bank Sulteng.
2. Merencanakan arsitektur sistem informasi Bank Sulteng yang berkesinambungan dan terintegrasi.
3. Merencanakan arsitektur sistem informasi yang fleksibel, adaptif dan mudah disesuaikan dengan perubahan kebutuhan bisnis Bank Sulteng.
4. Merencanakan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan arsitektur sistem informasi dan sesuai dengan tren teknologi informasi dalam bisnis perbankan nasional.
5. Merencanakan peta jalan dan investasi penerapan dan penggunaan teknologi informasi Bank Sulteng dalam jangka panjang.

Kebijakan dan Tata Kelola TI

Dalam rangka menyempurnakan pengelolaan Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi yang baik serta pemenuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5963) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 21/SEOJK.03/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum. Dengan demikian, maka Divisi TI Bank Sulteng senantiasa berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh bisnis Bank Sulteng yang selaras dengan RKUD dan *Corporate Plan* Bank Sulteng dengan tetap mengacu kepada regulasi perbankan yang ada antara lain:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2016 tanggal 01 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
2. Surat Edaran OJK No. 21/SEOJK.03/2017 tanggal 06 Juni 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.

In addition, the IT direction and policies formulated in the Information Technology Strategic Plan (RSTI) are discussed and mutually agreed upon in meetings with members of the Information Technology Steering Committee (KPTI), established to ensure IT alignment and technological support for business operations, with the following technological directions:

1. Controlling strategic/long-term risks arising from the implementation and utilization of information technology within Bank Sulteng's environment.
2. Planning a sustainable and integrated information systems architecture for Bank Sulteng.
3. Planning a flexible, adaptive information systems architecture that can easily be adjusted to Bank Sulteng's changing business needs.
4. Planning an information technology infrastructure that supports the implementation of the information systems architecture and aligns with information technology trends in the national banking business.
5. Planning a long-term roadmap and investments for the implementation and utilization of information technology at Bank Sulteng.

IT Policy and Governance

In order to refine sound Information Technology Management and Information Technology Risk Management, and to fulfill the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 38/POJK.03/2016 dated December 1, 2016, regarding the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2016 No. 267, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 5963) and the Financial Services Authority Circular Letter No. 21/SEOJK.03/2017 dated June 6, 2017, regarding the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks. Accordingly, the Bank Sulteng IT Division is continuously committed to providing full support to Bank Sulteng's business, aligned with the Regional General Treasury Account (RKUD) and Bank Sulteng's Corporate Plan, while continuing to refer to existing banking regulations, which include:

1. Financial Services Authority Regulation No. 38/POJK.03/2016 dated December 1, 2016, concerning the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks.
2. OJK Circular Letter No. 21/SEOJK.03/2017 dated June 6, 2017, concerning the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks.
3. Financial Services Authority Regulation No. 12/POJK.03/2018 concerning the Provision of Digital Banking Services by Commercial Banks.

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
5. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulteng No.49/SK-DIR/BPD-ST/2023 tentang Buku Pedoman Perusahaan Penyelenggaraan Teknologi Informasi PT. Bank Sulteng.
6. Rencana Strategis Teknologi Informasi Periode 2022 – 2026.

Berbagai peraturan dan *framework* tata kelola teknologi informasi telah disusun untuk memastikan keselarasan dan dukungan teknologi informasi terhadap bisnis. Dalam hal ini, Bank Sulteng mengacu pada Rencana Strategis Teknologi Informasi tahun 2022-2026 yang mengatur hal-hal berikut:

1. Pendahuluan
2. Cita-cita dan Tujuan Arsitektur
3. Arsitektur Bisnis
4. Arsitektur Data
5. Arsitektur Aplikasi
6. Arsitektur Teknologi
7. Arsitektur Organisasi TI
8. Peta Jalan Rencana Pengembangan TI dan
9. Rencana Anggaran Biaya Pengembangan TI.

Struktur Divisi TI

Sebagaimana ditetapkan dalam SK.No. 191/SK-DIR/BPD-ST/2025 tentang Perubahan Struktur Organisasi, pengelolaan teknologi informasi Bank Sulteng dikelola oleh Divisi Teknologi Informasi yang dibawahi langsung oleh Direktur Operasional yang bertanggung jawab dalam memastikan sistem teknologi informasi yang berfungsi dengan baik untuk mendukung operasional bank dan memantau kinerja TI. Pemimpin Divisi TI saat ini dipimpin oleh Bu Diana, S.T. dimana profil beliau dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan Sub Bab Profil Singkat Pejabat Eksekutif.

Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, Divisi Teknologi Informasi terbagi menjadi empat bidang yaitu Bagian Perencanaan & Keamanan Teknologi Informasi, Bagian Pengembangan Teknologi Informasi, Bagian Operasional Teknologi Informasi dan Bagian *E-Channel* seperti tergambar dalam bagan di bawah ini.

1. Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2022 concerning Information Technology Operation by Commercial Banks.
2. Board of Directors Decree of PT. Bank Sulteng No. 49/SK-DIR/BPD-ST/2023 concerning the Corporate Manual for Information Technology Operation of PT. Bank Sulteng.
3. Information Technology Strategic Plan for the Period 2022 – 2026.

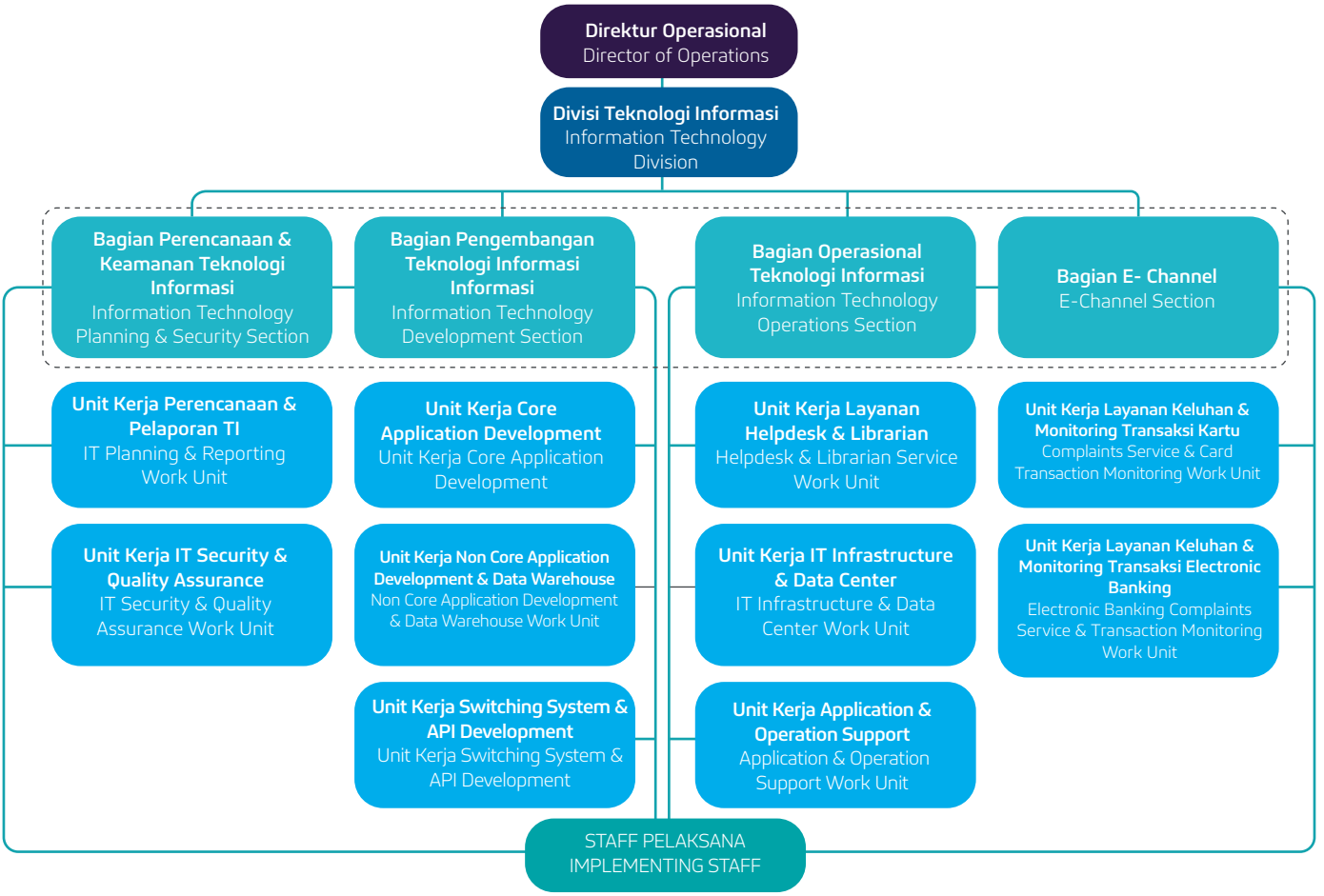
Various regulations and information technology governance frameworks have been formulated to ensure the alignment and support of information technology for the business. In this regard, Bank Sulteng refers to the Information Technology Strategic Plan for the years 2022-2026, which governs the following matters:

1. Introduction
2. Architectural Vision and Goals
3. Business Architecture
4. Data Architecture
5. Application Architecture
6. Technology Architecture
7. IT Organization Architecture
8. IT Development Plan Roadmap and
9. IT Development Budget Plan.

IT Division Structure

As stipulated in Decree No. 191/SK-DIR/BPD-ST/2025 concerning Organizational Structure Changes, the management of Bank Sulteng's information technology is administered by the Information Technology Division, which falls directly under the Director of Operations, who is responsible for ensuring that the information technology systems function properly to support the bank's operations and for monitoring IT performance. Currently, the Head of the IT Division is Ms. Diana, S.T.. Her profile can be viewed in the Company Profile Chapter, Sub-Chapter Brief Profile of Executive Officers.

Based on the aforementioned Decree, the Information Technology Division is divided into four departments: Information Technology Planning & Security Department, Information Technology Development Department, Information Technology Operations Department, and the E-Channel Department, as depicted in the organizational chart below.



Pengembangan SDM TI

Guna mendukung semua Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2026, maka diperlukan struktur organisasi dan penambahan SDM TI. Namun, untuk struktur organisasi Divisi TI telah disesuaikan dengan Renstra TI untuk 5 (lima) tahun ke depan dan telah disesuaikan dengan ketentuan POJK No.22/POJK.03/22 yang mana telah ditambahkan fungsi ketahanan dan keamanan siber sesuai dengan Pasal 26 Ayat 1 dan 2 POJK No.22/ POJK.03/22 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Umum.

Selain itu, Bank Sulteng telah merencanakan kebutuhan SDM yang mempunyai kualifikasi dan spesifikasi teknis sesuai kebutuhan pada operasional Divisi TI sehingga dapat mendukung kelancaran operasional TI dan Rencana Bisnis Bank Sulteng tersebut.

IT HR Development

To support all components of the 2026 Bank Business Plan (RBB), an appropriate organizational structure and the addition of IT personnel are required. However, the organizational structure of the IT Division has already been aligned with the IT Strategic Plan for the next 5 (five) years and complies with the provisions of POJK No. 22/POJK.03/22, wherein cyber resilience and cybersecurity functions have been added in accordance with Article 26 Paragraphs 1 and 2 of POJK No. 22/ POJK.03/22 concerning Information Technology Operations for Commercial Banks.
Furthermore, Bank Sulteng has mapped the need for human resources possessing specific technical qualifications and specifications tailored to the operational requirements of the IT Division, thereby supporting smooth IT operations and Bank Sulteng's overall Business Plan.

Terkait dengan rencana pengembangan SDM, Bank Sulteng memfokuskan pada pengembangan Infrastruktur Data Center & Virtualisasi, *Delivery Channel, Host-to-host (Middleware), Surrounding* dan *Security.* Dengan demikian, Bank Sulteng berharap ke depannya *step by step* kemampuan *(skill)* SDM TI Bank Sulteng turut meningkat serta dapat mengembangkan sendiri aplikasi-aplikasi pendukung bisnis Bank Sulteng sehingga tingkat ketergantungan kepada Vendor dapat dikurangi.

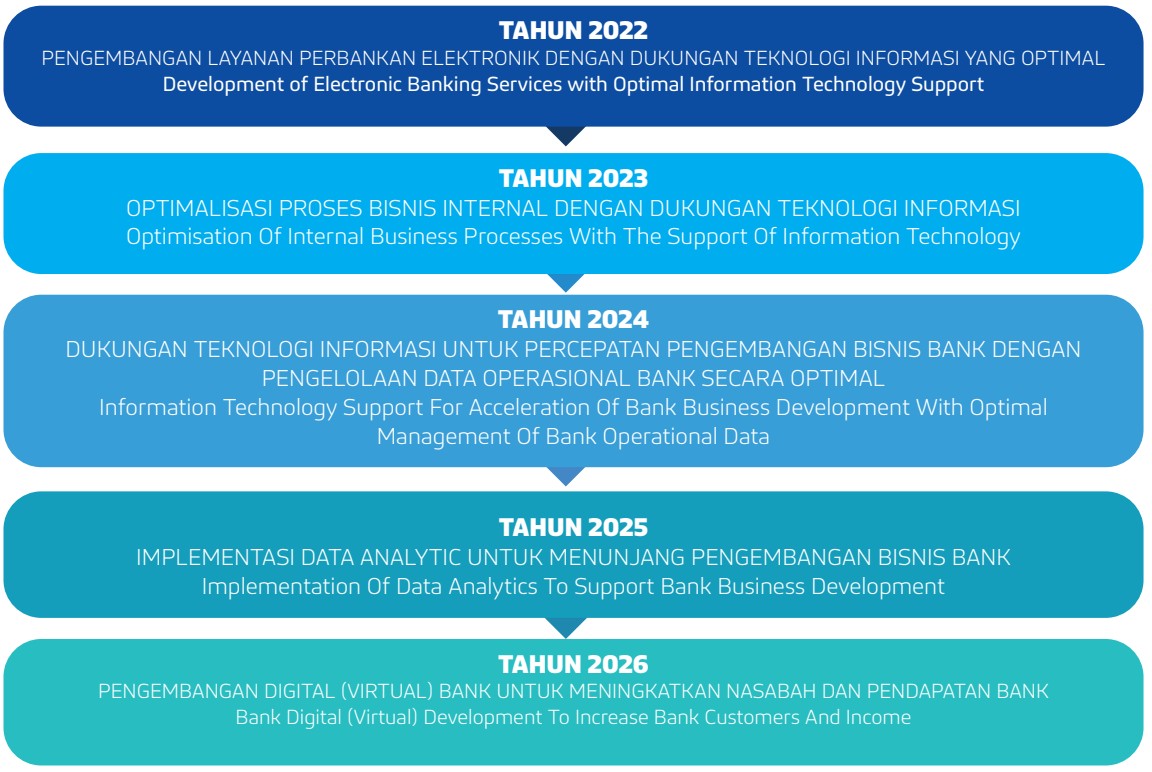
Regarding the HR development plan, Bank Sulteng focuses on developing Data Center Infrastructure & Virtualization, Delivery Channels, Host-to-host (Middleware), Surrounding Systems, and Security. By doing so, Bank Sulteng expects that, step by step, the skills of Bank Sulteng's IT personnel will improve in the future, empowering them to independently develop business support applications for the Bank and subsequently reducing reliance on external vendors.

Road Map Pengembangan TI

Guna mendeskripsikan daftar rencana pengembangan teknologi informasi, Bank Sulteng menyusun *Road Map* rencana pengembangan teknologi informasi sebagai berikut:

IT Development Road Map

To describe the inventory of information technology development plans, Bank Sulteng has structured an Information Technology Development Road Map as follows:



Tahun 2022

Pengembangan teknologi informasi pada tahun pertama adalah fokus pada pengembangan layanan perbankan elektronik dengan dukungan teknologi informasi yang optimal untuk meningkatkan layanan ke nasabah dengan cepat, mudah, aman, dan nyaman.

Year 2022

Information technology development in the first year focuses on the development of electronic banking services with optimal information technology support to improve customer service in a fast, easy, secure, and convenient manner.

Tahun 2023

Tahun kedua pengembangan fokus pada optimalisasi proses bisnis internal dengan dukungan teknologi informasi. Proses bisnis internal diharapkan bisa dilaksanakan secara otomasi menggunakan teknologi informasi sehingga bisa meningkatkan kinerja setiap Divisi yang ada di PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (Bank Sulteng).

Tahun 2024

Tahun ketiga fokus pada dukungan teknologi informasi untuk percepatan pengembangan bisnis Bank dengan pengelolaan data operasional Bank secara optimal. Salah satu pengembangan yang dilaksanakan adalah pengembangan *data warehouse* dan *reporting system* untuk membantu pengambilan keputusan dan mendapatkan data yang valid dalam memutuskan arah pengembangan bisnis Bank.

Tahun 2025

Implementasi data *analytic* untuk menunjang pengembangan bisnis Bank adalah fokus untuk tahun keempat. Pada tahun ini akan dikembangakan inisiasi awal *big data* sebagai pengembangan dari data *warehouse* yang telah dikembangkan sebelumnya untuk memberikan nilai tambah lebih dalam pengembangan bisnis Bank dengan melakukan pengelolaan dan analis data baik data internal maupun data eksternal Bank.

Tahun 2026

Pengembangan pada tahun kelima adalah pengembangan Digital (*Virtual*) Bank untuk meningkatkan nasabah dan pendapatan Bank. Pada tahun ini mulai dilakukan kajian dan inisiasi awal pengembangan Digital (*Virtual*) Bank.

Pada fase Renstra untuk tahun 2026, adalah fokus pada dukungan teknologi informasi untuk percepatan pengembangan bisnis Bank dengan pengelolaan data operasional Bank secara optimal yaitu :

- Salah satu pengembangan yang dilaksanakan adalah pengembangan *data warehouse* dan *reporting system* menggunakan bisnis *intelligence* dalam rangka membantu pengambilan keputusan dan mendapatkan data yang valid dalam memutuskan arah pengembangan bisnis Bank.
- Inisiatif awal pengembangan *Digital* (virtual) *Banking* seperti *Hybrid Branch* dan *Digital Lounge* dimana nasabah dapat melakukan transaksi secara mandiri secara cepat, aman, dan nyaman.

Year 2023

The second year of development focuses on optimizing internal business processes with information technology support. Internal business processes are expected to be automated using information technology, thereby improving the performance of every Division within PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (Bank Sulteng).

Year 2024

The third year focuses on information technology support to accelerate the Bank's business development through optimal management of the Bank's operational data. One of the implementations is the development of a data warehouse and reporting system to facilitate decision-making and acquire valid data in determining the Bank's business development trajectory.

Year 2025

Implementation of data analytics to support the Bank's business development is the focus for the fourth year. During this year, the initial phase of big data will be developed as an expansion of the previously built data warehouse to provide greater added value in the Bank's business development by managing and analyzing both internal and external Bank data.

Year 2026

The development in the fifth year is the development of a Digital (Virtual) Bank to increase Bank customers and income. During this year, preliminary studies and initiations for Digital (Virtual) Bank development commence.

During the Strategic Plan phase for 2026, the focus is on information technology support to accelerate the Bank's business development through optimal management of the Bank's operational data, encompassing:

- One of the implementations is the development of a data warehouse and reporting system utilizing business intelligence to aid decision-making and obtain valid data for directing the Bank's business development.
- Initial initiatives for Digital (Virtual) Banking development, such as Hybrid Branches and Digital Lounges, where customers can execute transactions independently in a fast, secure, and comfortable manner.

- Melanjutkan pengembangan aplikasi-aplikasi *Digital Banking* untuk menunjang kemudahan transaksi nasabah produk tabungan, giro, dan pengembangan fitur dengan mitra-mitra/*merchant* dengan inisiatif seperti pengembangan *mobile banking* menjadi super apps, *Internet Banking Coorporate,* QRIS CPM & MPM, *Virtual account, e-Money,* dan lain-lain.
- Selain itu perlu dilakukan penguatan Ekosistem Digital dengan implementasi transaksi penerimaan dan pendapatan Daerah Sulawesi Tengah sebagai *subject expert matter* dalam elektronifikasi sistem, transaksi, dan pembayaran berbasis digital untuk mendukung transparansi pembayaran serta mendukung keuangan daerah yang diharapkan dapat menunjang peningkatan perekonomian daerah Sulawesi Tengah.
- Dengan bertambahnya kebutuhan penggunaan *bandwidth* sehingga perlu mempertimbangkan melakukan migrasi jaringan komunikasi data dari VPN ke SDWAN.
- Dalam strategi meningkatkan tata kelola keamanan informasi juga akan melakukan sertifikasi ISO 27001.
- Meningkatkan keamanan teknologi informasi dengan melakukan register aset-aset teknologi informasi, membutuhkan SOC dan *threat intelligence* untuk deteksi, melakukan *vulnerability assesment* secara berkala, melakukan penambahan dan meningkatkan perangkat *security appliance* untuk proteksi, dan membentuk tim CSIRT untuk melakukan respon.

Sistem Keamanan TI Bank Sulteng

Kemajuan digitalisasi selain membawa dampak positif yang signifikan dalam dunia perbankan, ternyata di sisi lain juga memberikan ancaman terhadap sistem dan data. Oleh karena itu, menjadi hal yang sangat krusial bagi Bank Sulteng untuk melindungi informasi sensitif nasabah dan aset digital dari serangan yang dapat merugikan kedua belah pihak. Bank Sulteng senantiasa berkomitmen untuk memelihara kesinambungan operasional dan tetap memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah. Hal ini dilakukan melalui pengelolaan yang efektif terhadap keamanan siber *(cyber security),* penanganan gangguan *(disruption)* dan pemulihan bencana *(disaster recovery).*

Keamanan Siber (*Cyber Security*)

Digitalisasi selain berdampak positif pada pertumbuhan bisnis, juga dapat menimbulkan risiko ancaman siber untuk sektor finansial yang menjadi target utama atas serangan siber berbagai *attack vektor*.

- Continuing the development of Digital Banking applications to facilitate ease of customer transactions for savings and current accounts, as well as feature developments with partners/merchants through initiatives such as developing mobile banking into super apps, Corporate Internet Banking, CPM & MPM QRIS, Virtual Accounts, e-Money, and others.
- Furthermore, strengthening the Digital Ecosystem is essential by implementing revenue and receipt transactions for the Central Sulawesi Regional Government as a subject matter expert in system electronification, transactions, and digital-based payments to support payment transparency and bolster regional finances, which is anticipated to enhance the regional economy of Central Sulawesi.

- Addressing the growing bandwidth requirements necessitates considering the migration of the data communication network from VPN to SD-WAN.

- As part of the strategy to improve information security governance, obtaining ISO 27001 certification will also be pursued.
- Enhancing information technology security by registering IT assets, requiring a Security Operations Center (SOC) and threat intelligence for detection, conducting periodic vulnerability assessments, adding and upgrading security appliances for protection, and establishing a CSIRT team for response.

Bank Sulteng IT Security System

While digitalization brings significant positive impacts to the banking industry, it conversely introduces threats to systems and data. Therefore, it is highly crucial for Bank Sulteng to safeguard sensitive customer information and digital assets against attacks that could be detrimental to both parties. Bank Sulteng is consistently committed to maintaining operational continuity and delivering the best service to customers. This is achieved through effective management of cybersecurity, disruption handling, and disaster recovery.

Cyber Security

Beyond its positive impact on business growth, digitalization can also spawn cybersecurity threats to the financial sector, which is a prime target for cyber attacks across various attack vectors.

Terdapat beberapa regulasi yang menjadi acuan dalam penguatan ketahanan dan keamanan siber untuk memitigasi risiko ancaman di atas yang dirincikan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum. Ketentuan yang berkaitan dengan *cyber security* antara lain:

    - Kewajiban Bank menjaga ketahanan dan keamanan siber (Pasal 22).
    - Pengujian keamanan siber (analisis kerentanan dan skenario) (Pasal 23-35).
    - Penanganan insiden siber (Pasal 60).

2. Surat Edaran OJK No. 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum. Ketentuan yang berkaitan dengan *cyber security* terkait dengan detail teknis pelaksanaan ketentuan pada POJK No. 11/POJK.03/2022.

3. Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Ketentuan yang berkaitan dengan *cyber security* antara lain:

    - Pemenuhan aspek standar keamanan sistem informasi (Pasal 47).
    - Pemenuhan kewajiban manajemen risiko dan standar keamanan sistem informasi (Pasal 71).
    - Penerapan standar keamanan siber: aspek tata kelola, aspek pencegahan dan aspek penanganan (Pasal 72).
    - Penerapan insidental terkait kejadian kahar *(force majeurer)* (Pasal 254).

Berikut upaya yang telah dilakukan Bank Sulteng untuk mencegah terjadinya serangan maupun ancaman siber melalui dunia maya antara lain:

1. Membentuk unit atau fungsi yang menangani ketahanan dan keamanan siber bank.
2. Melakukan uji coba Disaster *Recovery Plan* (DRP) secara rutin.
3. Melakukan pengkinian kebijakan dan prosedur ketahanan dan keamanan siber.
4. Melakukan perumusan tingkat risiko yang akan diambil *(risk appetite)* dan toleransi risiko *(risk tolerance)* terkait keamanan siber.
5. Menerapkan *multi layer defense mechanism* yang didukung dengan teknologi pengamanan terkini agar dapat membangun visibiltas dan perlindungan hingga ke level *endpoint.*
6. Melakukan *vulnerability assessment* (VA) secara berkala.
7. Meningkatkan budaya dan kesadaran risiko terkait keamanan siber dengan memberikan training kepada seluruh karyawan.

Several regulations serve as benchmarks in strengthening cyber resilience and security to mitigate the aforementioned risks, detailed as follows:

1. Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2022 concerning Information Technology Operations by Commercial Banks. Provisions related to cybersecurity include:

    - The Bank's obligation to maintain cyber resilience and security (Article 22).
    - Cybersecurity testing (vulnerability and scenario analysis) (Articles 23-35).
    - Cyber incident handling (Article 60).

2. OJK Circular Letter No. 29/SEOJK.03/2022 concerning Cyber Resilience and Security for Commercial Banks. Provisions related to cybersecurity pertain to the technical execution details of the provisions in POJK No. 11/POJK.03/2022.

3. Bank Indonesia Regulation No. 23/6/PBI/2021 concerning Payment Service Providers. Provisions related to cybersecurity include:

    - Fulfillment of information system security standard aspects (Article 47).
    - Fulfillment of risk management obligations and information system security standards (Article 71).
    - Implementation of cybersecurity standards: governance, prevention, and handling aspects (Article 72).
    - Incidental implementation regarding force majeure events (Article 254).

The following are the measures Bank Sulteng has undertaken to prevent cyber attacks and threats originating from cyberspace, including:

1. Establishing a unit or function dedicated to handling the bank's cyber resilience and security.
2. Routinely conducting Disaster Recovery Plan (DRP) testings.
3. Updating cyber resilience and security policies and procedures.
4. Formulating the targeted risk appetite and risk tolerance related to cybersecurity.
5. Deploying a multi-layer defense mechanism supported by the latest security technologies to build visibility and protection down to the endpoint level.
6. Conducting periodic vulnerability assessments (VA).
7. Fostering a risk culture and awareness regarding cybersecurity by providing training to all employees.

Selain itu, Bank Sulteng juga menerapkan 3 (tiga) pilar keamanan untuk memastikan tidak adanya pelanggaran keamanan siber pada sistem TI. Ketiga aspek tersebut meliputi:

1. *Governance and Awareness*
   - Meningkatkan kesadaran akan keamanan informasi.
   - Kebijakan dan prosedur keamanan.
   - Penerapan manajemen keamanan informasi sertifikasi ISO 27001.

2. *Protection*
   - Melakukan pemonitoran sistem dengan tim yang didedikasikan khusus.
   - *Security Appliance.*

3. *Operation*
   - Melakukan pengujian keamanan terhadap sistem secara berkala atau setiap kali ada perubahan.
   - Membentuk struktur CISRT atau Tim Tanggap Insiden.

Penanganan Gangguan (*Disruption*)

Bank Sulteng telah melakukan langkah strategis sebagai upaya untuk mencegah dan menangani gangguan yang mungkin muncul seperti *phising, malware, denial of service* serta *ransomware* sebagai berikut:

1. Memastikan ketersediaan SDM, proses, dan teknologi yang mampu mendeteksi penyimpangan dari kinerja dasar sistem.
2. Memiliki kriteria batasan yang dapat memicu peringatan atau tanda ketika terdapat aktivitas atau kejadian anomali.
3. Melakukan analisis untuk memahami penyebab kejadian, target dan metode serangan atau kejadian, serta dampak yang dapat ditimbulkan atas suatu kejadian.
4. Memastikan bahwa kemampuan deteksi, kinerja dasar sistem, kriteria batasan pemicu, dan peringatan selalu ditinjau dan diperbaharui secara berkala untuk memastikan akurasi dalam pemeriksaan risiko terkait keamanan siber serta tetap sepadan dengan ancaman dan kerentanan siber bank.
5. Melakukan sentralisasi dan mengkoordinasikan proses keamanan siber dan teknologi.
6. Memastikan dokumentasi kinerja dasar disimpan dalam media yang aman dan terdapat *backup*.

Additionally, Bank Sulteng implements 3 (three) security pillars to ensure the absence of cybersecurity breaches within its IT systems. These three aspects encompass:

1. Governance and Awareness
   - Enhancing information security awareness.
   - Security policies and procedures.
   - Implementation of information security management certification ISO 27001.

2. Protection
   - Conducting system monitoring with a specially dedicated team.
   - Security Appliance.

3. Operation
   - Performing security testing on the system periodically or whenever a change occurs.
   - Establishing a CISRT or Incident Response Team structure.

Disruption Handling

Bank Sulteng has executed strategic measures in an effort to prevent and handle disruptions that may arise, such as phishing, malware, denial of service, and ransomware, as follows:

1. Ensuring the availability of HR, processes, and technologies capable of detecting deviations from baseline system performance.
2. Possessing threshold criteria that can trigger alerts or indicators upon the occurrence of anomalous activities or events.
3. Conducting analyses to comprehend the root causes of events, targets, attack methods, and the potential impacts of an incident.
4. Ensuring that detection capabilities, baseline system performance, trigger threshold criteria, and alerts are consistently reviewed and updated periodically to guarantee accuracy in cybersecurity risk inspections and remain commensurate with the bank's cyber threats and vulnerabilities.
5. Centralizing and coordinating cybersecurity and technology processes.
6. Ensuring that baseline performance documentation is stored in secure media and backed up.

Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery*)

Bank Sulteng melakukan beberapa langkah penanganan apabila terjadi bencana yang menimbulkan dampak pada data Perusahaan diantaranya:

1. Membentuk BCM *(Business Continuity Management)* yang merupakan organisasi *Crisis Center* yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat pada saat terjadinya bencana.
2. Mengatur kebijakan BCP *(Business Continuity Plan)* yang mencakup *contigency plan,* pra disaster, saat *disaster, pasca disaster*, dan kebijakan uji coba.
3. Melaksanakan pengujian terhadap *environment backup* minimal setahun sekali.

Disaster Recovery

Bank Sulteng executes several handling procedures in the event of a disaster that impacts the Company's data, including:

1. Establishing a BCM (Business Continuity Management) framework, serving as a Crisis Center organization that regulates the duties and responsibilities of involved parties during a disaster.
2. Governing BCP (Business Continuity Plan) policies that encompass contingency plans, pre-disaster, during disaster, post-disaster procedures, and testing policies.
3. Executing tests on the backup environment at least once a year.

Investasi TI

Bank Sulteng telah mengimplementasikan investasi TI yang diarahkan untuk menciptakan nilai tambah bagi Perusahaan, dalam hal peningkatan kualitas layanan, efisiensi operasional, dan pencapaian tujuan strategis jangka panjang. Pada era digital, investasi TI memiliki peranan yang penting guna mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan Perusahaan. Oleh karena itu, pada tahun 2025 Bank Sulteng telah melaksanakan berbagai pengelolaan dan pengembangan dengan rincian sebagai berikut:

IT Investment

Bank Sulteng has implemented IT investments directed toward creating added value for the Company, in terms of service quality enhancement, operational efficiency, and the achievement of long-term strategic goals. In the digital era, IT investment plays a pivotal role in supporting the Company's growth and sustainability. Therefore, in 2025, Bank Sulteng executed various management and development initiatives with the following details:

No.	Uraian	Jumlah	Description
1	Jasa Pengelolaan TI	6.728.504.552	IT Management Services
2	Beban Jaringan Komunikasi Data	9.331.206.253	Data Communication Network Expenses
3	Beban Jasa Outsourcing CBS	11.841.480.000	CBS Outsourcing Services Expenses
4	Beban Sewa ATM, CRM, EDC	5.370.214.501	ATM, CRM, EDC Rental Expenses
5	Beban Sewa Data Center, Cloud & Co-Location	308.136.000	Data Centre, Cloud & Co-Location Rental Expenses
6	Biaya Layanan Switching, Host to Host & Service Fee	679.126.832	Switching, Host to Host & Service Fee Expenses
7	Biaya Sewa Aplikasi & Surrounding	15.463.100.426	Application & Surrounding Rental Fees
8	Biaya Jasa Pengelolaan TSI lainnya	358.494.322	Other TSI Management Service Fees
TOTAL		**50.080.262.886**	

Realisasi Program Kerja Divisi TI

Pada tahun 2025, Bank Sulteng telah merealisasikan beberapa pengembangan TI yang berfokus pada aplikasi-aplikasi berikut:

1. Aplikasi Internal
   Aplikasi operasional internal merupakan aplikasi alat bantu pendukung kerja operasional di setiap bagian sehingga lebih mempercepat proses layanan dari sisi internal baik itu yang dikembangkan sendiri oleh bank maupun pihak ketiga.

Realization of IT Division Work Programs

In 2025, Bank Sulteng realized several IT developments focusing on the following applications:

1. Internal Applications
   Internal operational applications are support tools for operational work in every department, designed to expedite service processes from an internal perspective, whether developed in-house by the bank or by third parties.

2. Aplikasi Bisnis
   Aplikasi operasional bisnis Bank merupakan aplikasi yang mendukung kegiatan usaha Bank baik berupa metode pembayaran nasabah, transfer dana, pinjaman, pengumpulan dana, maupun pengelolaan aset.

3. Aplikasi Regulasi
   Aplikasi regulasi yaitu aplikasi yang dirancang untuk memenuhi permintaan dari instansi pemerintah maupun institusi regulator terkait regulasi yang ditetapkan.

Dengan berbagai inovasi yang akan dikembangkan tersebut, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah dan meningkatkan efisiensi dalam kegiatan operasional Bank Sulteng serta meningkatkan inklusi keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah di masa mendatang.

2. Business Applications
   The Bank's operational business applications are applications that support the Bank's business activities, whether in the form of customer payment methods, fund transfers, lending, fund collection, or asset management.

3. Regulatory Applications
   Regulatory applications are applications designed to fulfill demands from government agencies and regulatory institutions regarding stipulated regulations.

With these various innovations to be developed, it is expected to be capable of enhancing the quality of service to customers, improving efficiency in Bank Sulteng's operational activities, and elevating regional financial inclusion in Central Sulawesi Province in the future.




GRAFIK TRANSAKSI
FREQUENSI TRANSAKSI



Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Analysis and Discussion

TINJAUAN EKONOMI GLOBAL

Perekonomian global pada tahun 2025 dihadapkan pada dinamika yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian. Ketegangan geopolitik masih berlanjut, baik akibat perang Rusia Ukraina di Eropa maupun eskalasi konflik di Timur Tengah. Di sisi lain, kebijakan proteksionisme Amerika Serikat kembali menguat melalui pengenaan tarif impor universal sebesar 10% serta tarif resiprokal yang tinggi kepada sejumlah mitra dagang utama, termasuk Tiongkok, Kanada, dan Meksiko. Kebijakan yang diumumkan pada 2 April 2025 tersebut memicu meningkatnya fragmentasi perdagangan global serta memperdalam polarisasi ekonomi antarnegara.

Dampak kebijakan tarif dan ketegangan geopolitik tersebut tercermin pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Pertumbuhan global menurun dari 3,3% pada 2024 menjadi 3,1% pada 2025 dan diprakirakan melambat lebih lanjut menjadi 3,0% pada 2026 sebelum sedikit membaik pada 2027 (tabel 1.1). Divergensi pertumbuhan antarnegara berlanjut. Negara maju mengalami perlambatan pertumbuhan, sementara negara *emerging market dan developing economies (EMDEs)* juga terdampak, meskipun beberapa negara seperti India dan kelompok ASEAN-5 relatif lebih berdaya tahan.

GLOBAL ECONOMIC OVERVIEW

The global economy in 2025 was confronted with increasingly complex dynamics and heightened uncertainty. Geopolitical tensions persisted, driven by both the ongoing Russia-Ukraine war in Europe and the escalation of conflicts in the Middle East. Furthermore, United States protectionist policies intensified through the imposition of a universal 10% import tariff, alongside steep reciprocal tariffs levied against key trading partners, including China, Canada, and Mexico. These policies, announced on April 2, 2025, catalyzed the further fragmentation of global trade and exacerbated economic polarization across nations.

The ramifications of these tariff policies and geopolitical headwinds were reflected in a deceleration of global economic growth. Global growth declined from 3.3% in 2024 to 3.1% in 2025, and is projected to moderate further to 3.0% in 2026 before registering a marginal recovery in 2027 (Table 1.1). Growth divergence across jurisdictions continued to persist. Advanced economies experienced a growth slowdown, and while emerging market and developing economies (EMDEs) were similarly impacted, select regions such as India and the ASEAN-5 bloc demonstrated relative resilience.

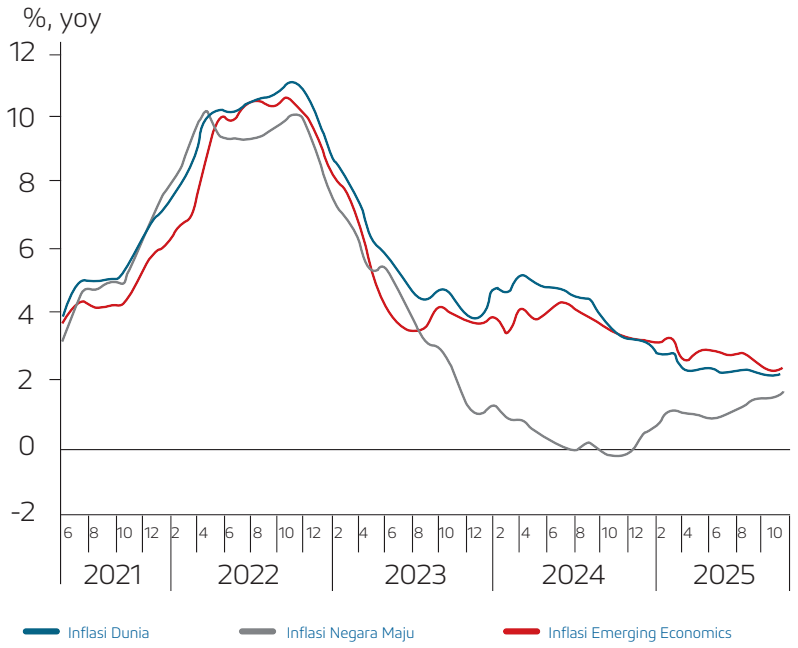
Tabel 1.1 Kinerja dan Prospek Pertumbuhan Ekonomi Global (%)
Table 1.1 Global Economic Growth Performance and Outlook (%)

	2023	2024*	2025*	2026*	2027*
Dunia World	3,5	3,3	3,1	3,0	3,1
Negara Maju Developed Countries	1,7	1,8	1,7	1,6	1,8
Amerika Serikat United States of America	2,9	2,8	2,0	2,0	2,3
Kawasan Eropa European Region	0,4	0,9	1,3	1,3	1,3
Jepang Japan	1,2	0,1	1,0	0,5	0,5
Negara Berkembang Developing Countries	4,7	4,3	4,1	3,9	3,9
Tiongkok China	5,4	5,0	4,8	4,2	3,8
India India	8,7	6,5	6,6	6,4	6,7
ASEAN-5 ASEAN-5	4,1	4,6	4,4	4,3	4,6
Amerika Latin Latin America	2,4	2,4	1,9	2,2	2,6

Sumber: WEO-IMF, Bank Indonesia (2025)
Keterangan: *Proyeksi Bank Indonesia

Kebijakan tarif turut memicu lonjakan harga emas, serta kenaikan sejumlah komoditas pangan dan sektor jasa. Kondisi ini memperbesar tekanan biaya, terutama akibat peningkatan upah yang dipengaruhi kebijakan imigrasi di Amerika Serikat dan beberapa negara maju sebelumnya. Dampaknya, proses penurunan inflasi global berlangsung lebih lambat dari proyeksi awal. Inflasi dunia diperkirakan berada pada kisaran 4,3% pada 2025 dan 4,1% pada 2026. Dalam periode yang sama, inflasi di negara maju diproyeksikan sekitar 2,4%, sedangkan di kelompok Emerging Economies diperkirakan masih lebih tinggi, yakni masing-masing 5,5% dan 5,1%.

The tariff policies also contributed to a surge in gold prices, alongside price escalations in various food commodities and the services sector. These conditions amplified cost pressures, predominantly driven by wage growth influenced by prior immigration policies in the United States and several advanced economies. Consequently, the global disinflationary process has proceeded at a slower pace than initially projected. Global inflation is estimated to be at approximately 4.3% in 2025 and 4.1% in 2026. Over the same period, inflation in advanced economies is projected to be around 2.4%, whereas in Emerging Economies, it is expected to remain elevated at 5.5% and 5.1%, respectively.



Grafik 1.1. Inflasi Global
Chart 1.1 Global Inflation

Di Amerika Serikat, pertumbuhan ekonomi diprakirakan menurun menuju kisaran 2% pada 2025–2026 akibat dampak kebijakan tarif, melemahnya daya saing industri tertentu, serta tekanan fiskal dari tingginya defisit dan utang pemerintah. Di kawasan Eropa, pemulihan ekonomi berlangsung secara bertahap dengan dukungan pelonggaran kebijakan moneter, sementara Jepang menghadapi tantangan struktural akibat penuaan penduduk. Di sisi lain, Tiongkok mengalami perlambatan pertumbuhan dari 5,0% pada 2024 menjadi 4,8% pada 2025 dan diprakirakan terus menurun pada tahun-tahun berikutnya, seiring lemahnya permintaan domestik dan tekanan eksternal dari kebijakan tarif AS. Sementara itu, India tetap menunjukkan pertumbuhan tinggi di atas 6%, ditopang konsumsi domestik dan ekspansi sektor manufaktur.

In the United States, economic growth is projected to decelerate toward the 2% range in 2025–2026, driven by the impact of tariff policies, weakening competitiveness in specific industries, and fiscal pressures stemming from elevated government deficits and debt. In the Euro area, the economic recovery is proceeding gradually, supported by monetary policy easing, while Japan faces structural challenges due to an aging population. Conversely, China is experiencing a growth slowdown from 5.0% in 2024 to 4.8% in 2025 and is projected to continue moderating in subsequent years, weighed down by subdued domestic demand and external pressures from US tariff policies. Meanwhile, India continues to exhibit robust growth above 6%, underpinned by resilient domestic consumption and manufacturing sector expansion.

Inflasi global memang menunjukkan tren menurun dibandingkan periode puncak pascapandemi, namun proses disinflasi berjalan lebih lambat akibat dampak tarif dan gangguan rantai pasok. Inflasi dunia diprakirakan masih berada di atas tingkat prapandemi hingga 2026, dengan tekanan lebih besar pada kelompok negara berkembang.

Di sektor moneter dan keuangan, bank-bank sentral menghadapi dilema kebijakan. Penurunan inflasi membuka ruang pelonggaran suku bunga, tetapi ketidakpastian global dan tekanan fiskal membatasi ruang gerak tersebut. *The Federal Reserve* menurunkan suku bunga secara bertahap, sementara European Central Bank melakukan pelonggaran lebih awal. Perbedaan arah dan kecepatan kebijakan moneter antarnegara memicu volatilitas pasar keuangan global, termasuk fluktuasi aliran modal dan nilai tukar .

Ketidakpastian global juga diperparah oleh tingginya utang publik dunia yang telah mencapai lebih dari 110 triliun dolar AS (sekitar 94,6% PDB global), dengan sebagian besar berada di negara maju . Selain itu, meningkatnya peran lembaga keuangan nonbank (NBFIs), serta maraknya penerbitan dan perdagangan aset digital seperti *cryptocurrency* dan *stablecoin,* menambah kerentanan sistem keuangan global. Ke depan, perekonomian dunia diperkirakan masih dibayangi lima risiko utama, yaitu: (i) berlanjutnya perang dagang dan polarisasi perdagangan global; (ii) perlambatan pertumbuhan dengan fragmentasi ekonomi yang melebar; (iii) tingginya utang publik dan tekanan fiskal; (iv) kerentanan sektor keuangan nonbank; serta (v) meningkatnya risiko dari perkembangan aset dan mata uang digital swasta . Dengan dinamika tersebut, perekonomian global memasuki periode pertumbuhan yang lebih rendah dengan tingkat ketidakpastian yang tetap tinggi. Kondisi ini menuntut negara-negara, khususnya emerging market economies, untuk memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas makroekonomi, serta mendorong sumber pertumbuhan domestik yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

TINJAUAN EKONOMI NASIONAL

Perekonomian Indonesia pada tahun 2025 tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat perang dagang, fragmentasi ekonomi, dan volatilitas pasar keuangan internasional. Di tengah tekanan eksternal tersebut, stabilitas makroekonomi nasional tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi berada pada jalur yang positif. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 berada dalam kisaran 4,7–5,5% dan akan meningkat secara bertahap pada tahun 2026–2027 .

Although global inflation is exhibiting a downward trend compared to its post-pandemic peak, the disinflationary process is proceeding more slowly due to the impact of tariffs and supply chain disruptions. Global inflation is projected to remain above pre-pandemic levels through 2026, with disproportionately higher pressures on developing economies.

In the monetary and financial sectors, central banks are confronting a policy dilemma. While falling inflation opens room for interest rate easing, global uncertainty and fiscal pressures constrain this policy space. The Federal Reserve is lowering interest rates gradually, whereas the European Central Bank initiated an earlier easing cycle. Divergences in the trajectory and pace of monetary policy across jurisdictions are triggering global financial market volatility, including fluctuations in capital flows and exchange rates.

Global uncertainty is further exacerbated by elevated global public debt, which has surpassed USD 110 trillion (approximately 94.6% of global GDP) and is heavily concentrated in advanced economies. Furthermore, the growing role of non-bank financial institutions (NBFIs), coupled with the proliferation of issuance and trading in digital assets such as cryptocurrencies and stablecoins, amplifies vulnerabilities within the global financial system. Looking ahead, the global economy is expected to remain overshadowed by five primary risks:Trade Tensions: The persistence of trade wars and global trade polarization.Economic Fragmentation: A growth slowdown accompanied by widening economic fragmentation.Fiscal Strains: Elevated public debt and fiscal pressures.Systemic Vulnerabilities: Vulnerabilities within the non-bank financial sector.Digital Asset Risks: Escalating risks stemming from the development of private digital assets and currencies.Against this backdrop, the global economy is entering a period of subdued growth characterized by persistently high uncertainty. These conditions necessitate that nations, particularly emerging market economies (EMEs), fortify external resilience, safeguard macroeconomic stability, and foster more self-reliant and sustainable domestic sources of growth.

NATIONAL ECONOMIC OVERVIEW

The Indonesian economy in 2025 continued to demonstrate strong resilience amidst mounting global uncertainty stemming from trade wars, economic fragmentation, and international financial market volatility. Amidst these external pressures, national macroeconomic stability was maintained, and economic growth remained on a positive trajectory. Bank Indonesia projects economic growth in 2025 to range between 4.7% and 5.5%, with a gradual acceleration expected in 2026–2027.

Secara triwulanan, pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4,87% (yoy) pada triwulan I 2025 menjadi 5,12% (yoy) pada triwulan II dan tetap kuat sebesar 5,04% (yoy) pada triwulan III 2025 . Kinerja ini didorong oleh penguatan ekspor nonmigas, peningkatan investasi swasta, serta tetap terjaganya konsumsi domestik. Strategi antisipatif pelaku usaha terhadap dinamika kebijakan perdagangan global turut menopang kinerja ekspor, sementara percepatan realisasi program prioritas pemerintah memperkuat permintaan domestik.

Dari sisi sektoral, pertumbuhan didukung oleh industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, transportasi dan pergudangan, serta informasi dan komunikasi. Hilirisasi sumber daya alam dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) meningkatkan nilai tambah domestik dan kapasitas produksi nasional. Sementara itu, sektor jasa keuangan dan jasa lainnya turut menunjukkan penguatan, mencerminkan pemulihan ekonomi yang semakin merata .

Stabilitas ekonomi tetap terjaga dengan inflasi yang terkendali, defisit fiskal yang berada dalam batas aman, serta sistem perbankan yang kuat dengan permodalan memadai. Sinergi kebijakan fiskal Pemerintah dan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran Bank Indonesia menjadi faktor utama dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan .

Ke depan, penguatan transformasi struktural, percepatan hilirisasi industri, pendalaman pasar keuangan, serta akselerasi digitalisasi ekonomi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Dengan fundamental yang solid dan koordinasi kebijakan yang erat, perekonomian Indonesia diproyeksikan tetap tumbuh lebih tinggi dan berdaya tahan menuju Indonesia Emas.

PENDAPATAN DOMESTIK BRUTO (PDB)

Kinerja Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2025 menunjukkan perbaikan bertahap dengan struktur pertumbuhan yang semakin seimbang. Pertumbuhan ekonomi diprakirakan berada dalam kisaran 4,7–5,5%, dengan realisasi triwulanan meningkat dari 4,87% (yoy) pada triwulan I menjadi 5,12% (yoy) pada triwulan II dan tetap kuat sebesar 5,04% (yoy) pada triwulan III 2025 . Konsumsi rumah tangga tetap menjadi kontributor terbesar PDB, didukung mobilitas masyarakat dan program sosial pemerintah, meskipun masih menghadapi tantangan daya beli kelompok menengah bawah dan keterbatasan lapangan kerja. Konsumsi pemerintah turut menopang pertumbuhan melalui percepatan realisasi belanja negara pada berbagai program prioritas strategis.

On a quarterly basis, economic growth exhibited a robust trend:Q1/2025: 4.87% (yoy).Q2/2025: 5.12% (yoy).Q3/2025: 5.04% (yoy).This performance was driven by the strengthening of non-oil and gas exports, an increase in private investment, and sustained domestic consumption. The anticipatory strategies of business actors in response to global trade policy dynamics further bolstered export performance, while the accelerated realization of government priority programs strengthened domestic demand. From a sectoral perspective, growth was primarily supported by:Manufacturing industry Construction Trade Transportation and storage Information and communication
Natural resource downstreaming and the development of Special Economic Zones (SEZs) successfully enhanced domestic value-added and national production capacity. Meanwhile, the financial services and other services sectors also exhibited strengthening, reflecting an increasingly broad-based economic recovery.

Economic stability remained preserved, characterized by controlled inflation, a fiscal deficit within safe limits, and a robust banking system with adequate capitalization. The synergy between the Government's fiscal policy and Bank Indonesia's policy mix—encompassing monetary, macroprudential, and payment system policies—served as the primary factor in maintaining the balance between stability and growth.

Moving forward, the reinforcement of structural transformation, acceleration of industrial downstreaming, financial market deepening, and the acceleration of economic digitalization are expected to enhance national productivity and competitiveness. Backed by solid fundamentals and close policy coordination, the Indonesian economy is projected to sustain higher and resilient growth, advancing towards Indonesia Emas (Golden Indonesia).

GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP)

Indonesia's Gross Domestic Product (GDP) performance in 2025 demonstrated a gradual improvement, underpinned by an increasingly balanced growth structure. Economic growth is estimated to range between 4.7% and 5.5%, with quarterly outturns accelerating from 4.87% (yoy) in the first quarter (Q1) to 5.12% (yoy) in the second quarter (Q2), and remaining robust at 5.04% (yoy) in the third quarter (Q3) of 2025. Household consumption remained the primary contributor to GDP, supported by sustained public mobility and government social programs. However, it continued to face headwinds regarding the purchasing power of the lower-middle-income segment and limited employment opportunities. Furthermore, government consumption bolstered growth through the accelerated realization of state expenditure across various strategic priority programs.

Dari sisi investasi, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menunjukkan penguatan seiring peningkatan investasi swasta, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta kelanjutan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan hilirisasi sumber daya alam . Ekspor nonmigas juga meningkat, didukung strategi antisipatif terhadap dinamika perdagangan global dan penguatan ekspor manufaktur serta pertanian, sementara impor tumbuh sejalan kebutuhan bahan baku dan barang modal. Secara keseluruhan, struktur PDB Indonesia semakin ditopang oleh kombinasi konsumsi, investasi produktif, dan ekspor bernilai tambah, sehingga memperkuat kualitas pertumbuhan ekonomi yang lebih berdaya tahan dan berkelanjutan.

NERACA PERDAGANGAN INDONESIA

Kinerja neraca perdagangan Indonesia pada tahun 2025 tetap menunjukkan ketahanan di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan meningkatnya fragmentasi perdagangan internasional. Ekspor nonmigas mencatat peningkatan, antara lain dipengaruhi oleh strategi *front-loading* ekspor sebagai respons terhadap dinamika kebijakan tarif global, serta penguatan ekspor produk manufaktur dan pertanian. Hilirisasi sumber daya alam turut meningkatkan nilai tambah ekspor dan memperkuat struktur perdagangan Indonesia agar tidak hanya bergantung pada komoditas mentah.

Di sisi lain, impor mengalami kenaikan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan bahan baku dan barang modal untuk mendukung aktivitas produksi dan investasi domestik. Peningkatan impor tersebut mencerminkan penguatan sisi penawaran dalam perekonomian, khususnya pada sektor industri pengolahan dan proyek-proyek strategis nasional. Dengan perkembangan tersebut, neraca perdagangan Indonesia tetap berada dalam kondisi yang relatif terjaga, didukung diversifikasi pasar ekspor serta daya saing produk bernilai tambah.

Ke depan, kinerja neraca perdagangan dipengaruhi oleh dinamika harga komoditas global, kebijakan perdagangan mitra utama, serta keberlanjutan program hilirisasi dan reformasi struktural. Penguatan kerja sama perdagangan bilateral dan regional, termasuk perluasan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan, menjadi strategi penting untuk menjaga stabilitas eksternal dan memperkuat ketahanan sektor perdagangan Indonesia.

CADANGAN DEVISA

Posisi cadangan devisa Indonesia hingga akhir September 2025 tercatat sebesar 148,7 miliar dolar

On the investment front, Gross Fixed Capital Formation (GFCF) demonstrated strengthening in line with the increase in private investment, the development of Special Economic Zones (SEZs), alongside the continuation of National Strategic Projects (NSPs) and natural resource downstreaming. Non-oil and gas exports also increased, supported by anticipatory strategies in response to global trade dynamics and the strengthening of manufacturing and agricultural exports, while imports grew in tandem with the demand for raw materials and capital goods. Overall, Indonesia's GDP structure was increasingly underpinned by a combination of consumption, productive investment, and value-added exports, thereby reinforcing the quality of economic growth to be more resilient and sustainable.

INDONESIA'S TRADE BALANCE

The performance of Indonesia's trade balance in 2025 continued to demonstrate resilience amidst the slowdown in global economic growth and the escalation of international trade fragmentation. Non-oil and gas exports recorded an increase, driven, among others, by export front-loading strategies in response to global tariff policy dynamics, as well as the strengthening of manufactured and agricultural product exports. Natural resource downstreaming further enhanced export value-added and fortified Indonesia's trade structure, reducing its reliance on raw commodities.

Conversely, imports experienced an uptick in line with the growing demand for raw materials and capital goods to support domestic production activities and investment. This rise in imports reflected the strengthening of the supply side of the economy, particularly within the manufacturing sector and national strategic projects. Following these developments, Indonesia's trade balance remained relatively stable, supported by export market diversification and the competitiveness of value-added products.

Looking ahead, the performance of the trade balance will be influenced by global commodity price dynamics, the trade policies of key partners, and the continuity of downstreaming programs and structural reforms. Strengthening bilateral and regional trade cooperation, including expanding the use of local currencies in trade transactions (Local Currency Transactions), remains a crucial strategy to maintain external stability and bolster the resilience of Indonesia's trade sector.

FOREIGN EXCHANGE RESERVES

Indonesia's foreign exchange reserves position at the end of September 2025 was recorded at USD 148.7

AS, setelah sebelumnya mencapai 157,1 miliar dolar AS dan 155,7 miliar dolar AS pada periode sebelumnya . Cadangan devisa tersebut setara dengan sekitar 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, tetap berada jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Perkembangan cadangan devisa ini sejalan dengan dinamika Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang diprakirakan kembali mencatat surplus, didukung oleh kinerja ekspor yang tetap baik serta aliran masuk penanaman modal asing dan portofolio seiring prospek ekonomi Indonesia yang positif.

Bank Indonesia menilai bahwa posisi cadangan devisa yang memadai tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan . Penguatan kebijakan kewajiban penyimpanan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam sesuai PP No. 8 Tahun 2025, termasuk perluasan instrumen penempatan valas, turut mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah. Ke depan, dengan defisit transaksi berjalan yang diprakirakan tetap rendah dalam kisaran 1,0–0,2% PDB serta surplus pada neraca modal dan finansial, posisi cadangan devisa diperkirakan tetap kuat dan menjadi pilar penting dalam menjaga ketahanan eksternal perekonomian nasional.

DEFISIT TRANSAKSI BERJALAN

Bank Indonesia memperkirakan defisit transaksi berjalan Indonesia pada tahun 2025 tetap rendah dan terkendali dalam kisaran 0,2–1,0% dari PDB, mencerminkan ketahanan eksternal ekonomi nasional yang tetap solid di tengah ketidakpastian global . Berdasarkan data kumulatif hingga September 2025, transaksi berjalan tercatat sebesar 1,1% dari PDB, setelah sebelumnya berada di kisaran -0,6% hingga 0,0% pada periode sebelumnya . Defisit yang tetap terjaga ini didukung oleh kinerja ekspor yang tetap baik, termasuk kontribusi positif dari hilirisasi sumber daya alam yang meningkatkan nilai tambah ekspor nasional.

Di sisi pembiayaan eksternal, neraca modal dan finansial diprakirakan mencatat surplus yang bersumber dari penanaman modal asing dan kembali masuknya aliran investasi portofolio sejalan dengan prospek ekonomi Indonesia yang tetap positif . Dengan perkembangan tersebut, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) diprakirakan kembali mencatat surplus dan menopang posisi cadangan devisa yang tetap memadai. Secara keseluruhan, defisit transaksi berjalan yang rendah dan pembiayaan eksternal yang sehat menunjukkan struktur eksternal Indonesia yang semakin kuat. Ke depan, penguatan daya saing ekspor, diversifikasi pasar, serta keberlanjutan program hilirisasi diharapkan dapat semakin memperkokoh ketahanan transaksi berjalan dan stabilitas makroekonomi nasional.

billion, after previously reaching USD 157.1 billion and USD 155.7 billion in the preceding periods. These official reserve assets were equivalent to approximately 6.0 months of imports and servicing of the Government's external debt, remaining well above the international adequacy standard of around 3 months of imports. The development of these reserves is in line with the dynamics of Indonesia's Balance of Payments (BOP), which is projected to record another surplus, supported by robust export performance as well as foreign direct investment (FDI) and portfolio inflows, consistent with Indonesia's positive economic outlook.

Bank Indonesia assesses that this adequate foreign exchange reserves position is capable of supporting external sector resilience while maintaining macroeconomic and financial system stability. The strengthening of the mandatory retention policy for Natural Resources Export Proceeds (DHE SDA) in accordance with Government Regulation (PP) No. 8 of 2025, including the expansion of foreign exchange placement instruments, further bolstered the stability of the Rupiah exchange rate. Going forward, with the current account deficit projected to remain low within the range of 1.0%–0.2% of GDP, alongside a surplus in the capital and financial account, the foreign exchange reserves position is expected to remain robust and serve as a crucial pillar in safeguarding the external resilience of the national economy.

CURRENT ACCOUNT DEFICIT

Bank Indonesia projects Indonesia's current account deficit in 2025 to remain low and manageable within the range of 0.2%–1.0% of GDP, reflecting the persistently solid external resilience of the national economy amidst global uncertainty. Based on cumulative data up to September 2025, the current account was recorded at 1.1% of GDP, having previously hovered in the range of -0.6% to 0.0% in the preceding periods. This manageable deficit was supported by resilient export performance, including the positive contribution from natural resource downstreaming, which enhanced national export value-added.

On the external financing front, the capital and financial account is projected to record a surplus stemming from foreign direct investment (FDI) and the resumption of portfolio investment inflows, in line with Indonesia's persistently positive economic outlook. Following these developments, Indonesia's Balance of Payments (BOP) is projected to record another surplus and bolster the adequate foreign exchange reserves position. Overall, the low current account deficit and sound external financing indicate Indonesia's increasingly robust external structure. Going forward, the strengthening of export competitiveness, market diversification, and the continuity of downstreaming programs are expected to further fortify current account resilience and national macroeconomic stability.

NILAI TUKAR RUPIAH

Sepanjang tahun 2025, nilai tukar Rupiah menghadapi tekanan akibat meningkatnya ketidakpastian global, terutama setelah pengumuman kebijakan tarif impor Amerika Serikat pada awal April 2025 yang memicu aliran keluar portofolio asing dari negara-negara *Emerging Market*, termasuk Indonesia. Tekanan tersebut juga tercermin pada meningkatnya volatilitas di pasar *off-shore Non-Deliverable Forward* (NDF), yang sempat memberikan tekanan signifikan terhadap Rupiah. Kondisi ini terjadi seiring masih tingginya imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun di kisaran 4,12% serta kebijakan suku bunga *Federal Reserve* yang relatif ketat. Meskipun demikian, secara fundamental ketahanan eksternal Indonesia tetap terjaga dengan defisit transaksi berjalan yang rendah dalam kisaran 0,2–1,0% PDB.

Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia memperkuat kebijakan stabilisasi melalui strategi triple intervention, yaitu intervensi di pasar spot, *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Selain itu, intervensi di pasar *off-shore* NDF dilakukan secara intensif di pasar Asia, Eropa, dan Amerika Serikat guna meredam tekanan eksternal. Penguatan kebijakan kewajiban penyimpanan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam sesuai PP No. 8 Tahun 2025 juga turut mendukung stabilisasi Rupiah. Ke depan, dengan cadangan devisa yang tetap memadai sebesar 148,7 miliar dolar AS atau setara 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta prospek ekonomi domestik yang tetap positif, nilai tukar Rupiah diperkirakan akan tetap stabil dan terjaga dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional.

INFLASI

Perkembangan inflasi Indonesia sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan yang tetap terkendali. Pada Desember 2025, inflasi tahunan (*year-on-year/y-on-y)* tercatat sebesar 2,92 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,92, meningkat dibandingkan Desember 2024 yang sebesar 1,57 persen. Secara bulanan (*month-to-month/m-to-m*), inflasi Desember 2025 tercatat 0,64 persen, sementara inflasi tahun kalender (*year-to-date/y-to-d*) juga sebesar 2,92 persen. Sepanjang 2025, inflasi bergerak dari level rendah pada awal tahun (0,76% pada Januari dan sempat -0,09% pada Februari) kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai 2,92% pada Desember, mencerminkan normalisasi tekanan harga domestik.

RUPIAH EXCHANGE RATE

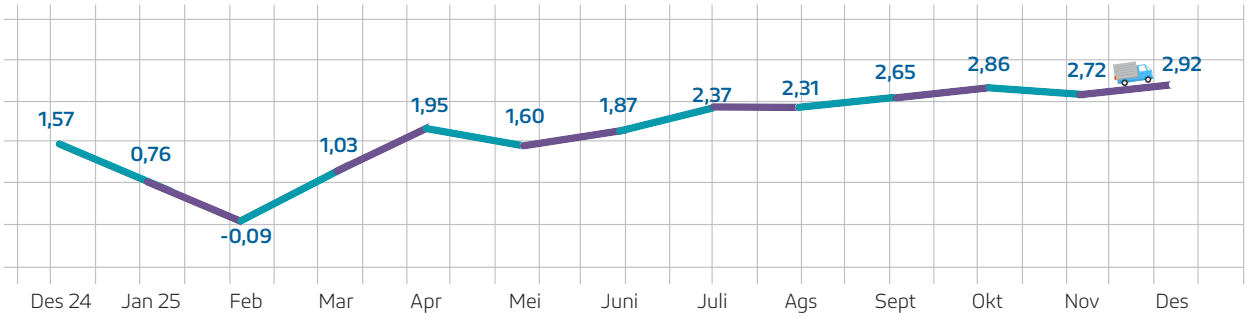
Throughout 2025, the Rupiah exchange rate faced pressures due to heightened global uncertainty, particularly following the announcement of the United States' import tariff policies in early April 2025, which triggered foreign portfolio outflows from Emerging Market economies, including Indonesia. These pressures were also reflected in increased volatility within the offshore Non-Deliverable Forward (NDF) market, which temporarily exerted significant pressure on the Rupiah. These conditions unfolded alongside persistently high 10-year US Treasury yields at around 4.12% and the relatively tight interest rate policy of the Federal Reserve. Nevertheless, fundamentally, Indonesia's external resilience remained firmly preserved, supported by a low current account deficit in the range of 0.2%–1.0% of GDP.

To safeguard exchange rate stability, Bank Indonesia strengthened its stabilization policy through a triple intervention strategy, encompassing interventions in the spot market, the Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) market, and the purchase of Government Securities (SBN) in the secondary market. Furthermore, interventions in the offshore NDF market were conducted intensively across the Asian, European, and United States markets to mitigate external pressures. The strengthening of the mandatory retention policy for Natural Resources Export Proceeds (DHE SDA) in accordance with Government Regulation (PP) No. 8 of 2025 also contributed to Rupiah stabilization.Going forward, backed by adequate foreign exchange reserves of USD 148.7 billion—equivalent to 6.0 months of imports and the servicing of the Government's external debt—coupled with a persistently positive domestic economic outlook, the Rupiah exchange rate is projected to remain stable and controlled, thereby supporting national economic resilience.

NFLATION

Inflation dynamics in Indonesia throughout 2025 exhibited a manageable upward trajectory. In December 2025, annual inflation (year-on-year/y-o-y) was recorded at 2.92 percent, with the Consumer Price Index (CPI) standing at 109.92, reflecting an increase compared to the 1.57 percent recorded in December 2024. On a monthly basis (month-to-month/m-o-m), December 2025 inflation stood at 0.64 percent, while calendar year inflation (year-to-date/y-t-d) also registered at 2.92 percent.Throughout 2025, inflation progressed from a low base at the beginning of the year (0.76% in January, briefly experiencing deflation of -0.09% in February), and subsequently accelerated at a gradual pace to reach 2.92% in December, reflecting the normalization of domestic price pressures.

Tingkat Inflasi Yaer-on-Year (Y-on-Y) Nasional, Desember 2024-Desember 2025
National Year-on-Year (YoY) Inflation Rate, December 2024–December 2025



Kelompok Pengeluaran Group Spending	**IHK Desember 2024** December CPI 2024	**IHK Desember 2025** December CPI 2025	**Tingkat Inflasi M-to-M Desember 2025(%)** M-to-M Inflation Rate December 2025[1](%)	**Tingkat Inflasi YtoD Desember 2025(%)** December YtoD Inflation Rate 2025(%)	**Tingkat Inflasi Y-on-Y Desember 2025(%)** December Y-on-Y Inflation Rate 2025 (%)	**Andil Inflasi M-to-M Desember 2025 (%)** December M-to-M Inflation Share 2025 (%)	**Andil Inflasi Y-on-Y Desember 2025 (%)** Inflation Share Y-on-Y December 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum (Headlline) General (Headlline)	106,80	109,92	0,64	2,92	2,92	0,64	2,92
Makanan. Minuman, dan Tembakau Food. Beverages, and Tobacco	110,41	115,47	1,66	4,58	4,58	0,48	1,33
Pakaian dan Alas Kaki Clothing and Footwear		103,38	0.11	1.16	1.16	0.01	0.06
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga Housing, Water, Electricity, and Household Fuel	102,60	104,26	0,06	1,62	1,62	0,01	0,26
Perlengkapan. Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga Equipment, Equipment, and Routine Maintenance Housekeeping	103,87	104,08	-0	0,20	0,20	-0	0,01
Kesehatan Health	104,64	106,55	0,09	1,83	1,83		0,05
Transportasi Transportation	109,48	110,83	0,55	1,23	1,23	0,07	0,15
Informasi. Komunikasi, dan Jasa Keuangan Information. Communication, and Financial Services	99,48	99,20	-0,03	-0,28	-0,28	-0	-0.02
Rekreasi. Olahraga, dan Budaya Recreation, Sports, and Culture	104,26	105,48	0,10	1,17	1.17	-0	0.02
Pendidikan Education	104,92	106,20	0,01	1,22	1,22		0,07
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran Provision of Food and Beverages/Restaurants	106,64	108,20	0,13	1,46	1,46	0,01	0,15
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Personal Care and Other Services	113,22	128,31	1,00	13,33	13,33	0,07	0,87

Secara komponen, inflasi 2025 terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi 4,58% (y-on-y) dengan andil 1,33%, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang meningkat signifikan sebesar 13,33% dengan andil 0,87%. Komponen bahan makanan secara khusus mengalami inflasi 5,38% (y-on-y) dengan kontribusi 1,09%, sedangkan komponen bergejolak (volatile food) tercatat 6,21% dengan andil 1,01%. Inflasi inti tercatat 2,38% (y-on-y) dengan andil 1,53%, menunjukkan tekanan permintaan yang relatif moderat. Sementara itu, komponen energi hanya mengalami inflasi 0,66% (y-on-y) dengan kontribusi 0,07%, menandakan tekanan harga yang relatif terkendali pada sektor ini.
Dari sisi spasial, inflasi tertinggi di tingkat provinsi terjadi di Aceh sebesar 6,71%, sedangkan terendah di Sulawesi Utara sebesar 1,23%. Pada tingkat kabupaten/kota, inflasi tertinggi terjadi di Kota Gunungsitoli sebesar 10,84%, sedangkan terendah di Minahasa Utara dan Maumere masing-masing 0,38%. Secara analitis, inflasi 2025 terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas pangan seperti cabai, beras, dan daging ayam ras, serta peningkatan harga emas perhiasan. Sementara itu, tekanan dari sisi energi relatif terbatas. Pola kenaikan inflasi yang bertahap sepanjang tahun mencerminkan pemulihan permintaan domestik yang tetap moderat serta pengendalian harga yang efektif. Dengan inflasi tahunan sebesar 2,92% yang masih dalam kisaran sasaran nasional, stabilitas harga pada 2025 dapat dinilai tetap terjaga dan mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi.

By component, 2025 inflation was primarily driven by the food, beverages, and tobacco group, which recorded inflation of 4.58% (y-o-y) with a 1.33% contribution, as well as the personal care and other services group, which saw a significant increase of 13.33% with a 0.87% contribution. Specifically, the foodstuff component experienced inflation of 5.38% (y-o-y), contributing 1.09%, while the volatile food component was recorded at 6.21% with a 1.01% contribution. Core inflation stood at 2.38% (y-o-y) with a 1.53% contribution, reflecting relatively moderate demand-side pressures. Meanwhile, the energy component only experienced inflation of 0.66% (y-o-y) with a 0.07% contribution, signaling well-contained price pressures within the sector. From a spatial perspective, the highest provincial inflation was recorded in Aceh at 6.71%, while the lowest was in North Sulawesi at 1.23%. At the regency/city level, the highest inflation occurred in Gunungsitoli City at 10.84%, whereas the lowest rates were recorded in North Minahasa and Maumere, both at 0.38%. Analytically, 2025 inflation was predominantly influenced by rising prices of food commodities—such as chili, rice, and poultry—alongside the appreciation of gold jewelry prices. Conversely, pressures from the energy side remained relatively limited. The gradual upward trend in inflation throughout the year reflects a domestic demand recovery that remains moderate, coupled with effective price control measures. With annual inflation at 2.92%, which remains within the national target corridor, price stability in 2025 is assessed as well-maintained, thereby supporting sustainable economic growth.

ANALISIS PEREKONOMIAN SULAWESI TENGAH

CENTRAL SULAWESI ECONOMIC ANALYSIS

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

Perekonomian Sulawesi Tengah tahun 2025 tumbuh sebesar 8,47 persen dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp415.477,22 miliar dan PDRB per kapita sebesar Rp131,64 juta (US$7.989,22) . Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Industri Pengolahan sebesar 14,12 persen, yang sekaligus menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap struktur ekonomi (41,24 persen), diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Pertambangan dan Penggalian yang tetap menjadi penopang utama. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terutama didorong oleh Ekspor Barang dan Jasa yang meningkat 10,61 persen, sementara konsumsi rumah tangga tumbuh 5,10 persen, meskipun konsumsi pemerintah mengalami kontraksi. Secara tahunan (y-on-y), ekonomi Triwulan IV-2025 tumbuh 9,43

REGIONAL MACROECONOMIC DEVELOPMENTS

The economy of Central Sulawesi in 2025 recorded a growth rate of 8.47 percent, with the Gross Regional Domestic Product (GRDP) at current prices reaching IDR 415,477.22 billion and GRDP per capita standing at IDR 131.64 million (USD 7,989.22).From the production side, the highest growth was observed in the Manufacturing Industry at 14.12 percent, which simultaneously served as the largest contributor to the economic structure (41.24 percent). This was followed by Agriculture, Forestry, and Fisheries, as well as Mining and Quarrying, which remain the primary pillars of the regional economy. From the expenditure side, growth was predominantly driven by Exports of Goods and Services, which increased by 10.61 percent. Meanwhile, household consumption grew by 5.10 percent, despite a contraction in government consumption. On a year-on-year (y-o-y) basis, the economy in the fourth

persen, sedangkan secara triwulanan (q-to-q) tumbuh 4,29 persen, mencerminkan momentum pertumbuhan yang tetap kuat hingga akhir tahun dengan struktur ekonomi yang masih berbasis industri dan ekspor.

KEUANGAN PEMERINTAH

Hingga Oktober 2025, realisasi APBD Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan kinerja yang cukup positif. Pendapatan daerah telah terealisasi sebesar Rp16,92 triliun atau 65,82 persen dari target, sementara belanja daerah mencapai Rp15,34 triliun atau 57,55 persen dari total pagu anggaran. Dengan capaian tersebut, posisi fiskal daerah mencatatkan surplus sebesar Rp1,98 triliun, yang mencerminkan pengelolaan anggaran yang relatif terkendali dan prudent.

Struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh transfer ke daerah, namun Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan pertumbuhan yang positif melalui inovasi kebijakan dan digitalisasi sistem penerimaan. Dari sisi belanja, percepatan realisasi terutama terjadi pada belanja modal di Triwulan III dan IV 2025, yang difokuskan pada proyek-proyek fisik seperti pembangunan infrastruktur jalan dan revitalisasi fasilitas kesehatan.

Secara keseluruhan, kinerja APBD tahun 2025 berperan dalam menjaga stabilitas fiskal daerah sekaligus mendukung aktivitas ekonomi lokal. Percepatan belanja pada paruh akhir tahun turut memperkuat konsumsi pemerintah sebagai salah satu komponen penggerak ekonomi, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang tetap kuat dan terkendali.

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

Pada Desember 2025, Provinsi Sulawesi Tengah mengalami inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 3,31 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,71 . Secara bulanan (m-to-m) tercatat inflasi 0,14 persen, sedangkan secara *year-to-date* (y-to-d) juga sebesar 3,31 persen, menunjukkan bahwa tekanan harga sepanjang tahun 2025 relatif terkendali. Inflasi y-on-y terutama disumbang oleh kenaikan harga pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 5,68 persen (andil 1,74 persen), Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 12,04 persen (andil 0,88 persen), serta Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran sebesar 3,01 persen. Sementara itu, beberapa kelompok mengalami deflasi, seperti Pakaian dan Alas Kaki (-0,13 persen) serta Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan (-0,18 persen). Secara spasial, inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Tolitoli sebesar 6,13 persen, sedangkan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Morowali sebesar 1,89 persen. Dengan capaian

quarter of 2025 (Q4-2025) grew by 9.43 percent, while on a quarter-on-quarter (q-o-q) basis, it expanded by 4.29 percent. These figures reflect sustained growth momentum through the end of the year, with an economic structure that remains heavily export-oriented and industry-based.

GOVERNMENT FINANCE

As of October 2025, the budget realization of the Central Sulawesi Provincial Government (APBD) demonstrated a positive performance. Regional revenue was recorded at IDR 16.92 trillion, or 65.82 percent of the target, while regional expenditure reached IDR 15.34 trillion, representing 57.55 percent of the total budget ceiling. Consequently, the regional fiscal position recorded a surplus of IDR 1.98 trillion, reflecting a relatively controlled and prudent budgetary management.

The regional revenue structure remains dominated by intergovernmental transfers; however, Local-Generated Revenue (PAD) showed positive growth driven by policy innovation and the digitalization of revenue systems. On the expenditure side, an acceleration in realization occurred primarily in capital expenditure (Capex) during the third and fourth quarters of 2025, which focused on physical projects such as road infrastructure development and the revitalization of healthcare facilities.

Overall, the 2025 APBD performance played a vital role in maintaining regional fiscal stability while supporting local economic activity. The acceleration of spending in the latter half of the year further bolstered government consumption as a key economic driver, thereby contributing to the sustained and stable economic growth of Central Sulawesi.

REGIONAL INFLATION DEVELOPMENTS

In December 2025, Central Sulawesi Province recorded year-on-year (y-o-y) inflation of 3.31 percent, with the Consumer Price Index (CPI) standing at 110.71. On a month-to-month (m-o-m) basis, inflation was registered at 0.14 percent, while the year-to-date (y-t-d) rate also stood at 3.31 percent, indicating that price pressures throughout 2025 remained relatively well-contained. The y-o-y inflation was primarily driven by price increases in the Food, Beverages, and Tobacco group at 5.68 percent (contributing 1.74 percent), Personal Care and Other Services at 12.04 percent (contributing 0.88 percent), and Food and Beverage Services/Restaurants at 3.01 percent. Conversely, several expenditure groups experienced deflation, such as Clothing and Footwear (-0.13 percent) and Information, Communication, and Financial Services (-0.18 percent).From a spatial perspective, the highest inflation was recorded in Tolitoli Regency at 6.13 percent, while the lowest was observed in Morowali Regency

tersebut, inflasi Sulawesi Tengah tahun 2025 masih berada pada tingkat yang moderat dan mendukung stabilitas daya beli masyarakat di tengah pertumbuhan ekonomi daerah yang tetap kuat.

PEMBIAYAAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

Pada Triwulan IV 2025, pembiayaan daerah dan pengembangan UMKM di Provinsi Sulawesi Tengah diarahkan pada penguatan ketahanan ekonomi lokal, sejalan dengan tren pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11 persen. Strategi ini menitikberatkan pada peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM melalui optimalisasi regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk implementasi POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM, guna memperluas inklusi keuangan terutama bagi sektor informal dan sektor unggulan daerah seperti perkebunan, pertanian, dan perikanan. Dari sisi fiskal daerah, optimalisasi APBD dilakukan untuk mendorong belanja produktif, khususnya pembangunan infrastruktur ekonomi yang mendukung konektivitas dan aktivitas sektor riil. Penguatan pembiayaan pada sektor produktif ini berkontribusi terhadap perbaikan indikator sosial, tercermin dari penurunan angka kemiskinan hingga sekitar 10,52 persen pada akhir 2025.

Secara keseluruhan, kebijakan pembiayaan daerah dan pengembangan UMKM pada akhir 2025 tidak hanya berfokus pada stabilitas fiskal, tetapi juga pada peningkatan peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Strategi ini diharapkan memperkuat struktur ekonomi Sulawesi Tengah agar lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing pada tahun-tahun mendatang.

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Prospek perekonomian Sulawesi Tengah pada tahun 2026 tetap positif meskipun dibayangi perlambatan pertumbuhan global yang diproyeksikan sekitar 3,0–3,1 persen serta meningkatnya fragmentasi perdagangan dan ketegangan geopolitik. Di tingkat nasional, ekonomi Indonesia yang diprakirakan tumbuh pada kisaran 4,7–5,5 persen dengan inflasi dan defisit transaksi berjalan yang terkendali menjadi penopang stabilitas makro bagi daerah. Dalam konteks tersebut, Sulawesi Tengah memiliki fondasi yang kuat dengan pertumbuhan 8,47 persen pada 2025, ditopang dominasi industri pengolahan, ekspor berbasis hilirisasi, serta dukungan sektor pertanian dan pertambangan. Stabilitas inflasi daerah sebesar 3,31 persen (y-on-y) dan pengelolaan fiskal yang prudent turut memperkuat daya tahan ekonomi daerah.

at 1.89 percent. Based on these results, inflation in Central Sulawesi for 2025 remains at a moderate level, supporting the stability of public purchasing power amidst robust regional economic growth.

REGIONAL FINANCING, FINANCIAL ACCESS, AND MSME DEVELOPMENT

In the fourth quarter (Q4) of 2025, regional financing and MSME development in Central Sulawesi Province were geared towards strengthening local economic resilience, in alignment with the national economic growth trend which reached 5.11 percent. This strategy focuses on enhancing access to financing for MSMEs by optimizing Financial Services Authority (OJK) regulations, including the implementation of OJK Regulation (POJK) Number 19 of 2025 regarding Ease of Access to Financing for MSMEs. This initiative aims to expand financial inclusion, particularly for the informal sector and leading regional sectors such as plantations, agriculture, and fisheries. On the regional fiscal side, the optimization of the Regional Budget (APBD) was conducted to stimulate productive spending, specifically for the development of economic infrastructure that supports connectivity and real sector activities. The reinforcement of financing in these productive sectors contributed to the improvement of social indicators, as reflected in the decline of the poverty rate to approximately 10.52 percent by the end of 2025.

Overall, regional financing policies and MSME development at the end of 2025 focused not only on fiscal stability but also on elevating the role of MSMEs as the backbone of the regional economy. This strategy is expected to reinforce Central Sulawesi's economic structure, making it more inclusive, sustainable, and competitive in the years to come.

REGIONAL ECONOMIC OUTLOOK

The economic outlook for Central Sulawesi in 2026 remains positive, despite being shadowed by a projected global growth deceleration of approximately 3.0%–3.1%, as well as rising trade fragmentation and geopolitical tensions. At the national level, the Indonesian economy—which is projected to grow within the range of 4.7%–5.5% with manageable inflation and a controlled current account deficit—serves as a macroeconomic stability anchor for the region. Within this context, Central Sulawesi possesses robust fundamentals, evidenced by its 8.47% growth in 2025, underpinned by the dominance of the manufacturing industry, downstreaming-based exports, and the support of the agricultural and mining sectors. Regional inflation stability at 3.31% (y-o-y) and prudent fiscal management further reinforce the region's economic resilience.

Ke depan, pertumbuhan Sulawesi Tengah diperkirakan tetap didorong oleh investasi industri, ekspor bernilai tambah, percepatan belanja infrastruktur produktif, serta penguatan UMKM melalui perluasan akses pembiayaan. Optimalisasi APBD dan implementasi kebijakan inklusi keuangan diharapkan memperluas basis ekonomi lokal dan menekan kemiskinan secara berkelanjutan. Namun demikian, risiko fluktuasi harga komoditas global, potensi perlambatan permintaan eksternal, dan volatilitas pasar keuangan tetap perlu diantisipasi melalui diversifikasi ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan ketahanan fiskal daerah agar pertumbuhan tetap inklusif dan berkelanjutan.

Moving forward, Central Sulawesi's growth is expected to be propelled by industrial investment, value-added exports, the acceleration of productive infrastructure spending, and the strengthening of MSMEs through expanded access to financing. The optimization of the Regional Budget (APBD) and the implementation of financial inclusion policies are expected to broaden the local economic base and achieve sustainable poverty reduction. Nevertheless, risks arising from global commodity price fluctuations, potential slowdowns in external demand, and financial market volatility necessitate proactive mitigation. This includes economic diversification, enhancing the quality of human resources, and fortifying regional fiscal resilience to ensure that growth remains inclusive and sustainable.

TINJAUAN INDUSTRI

INDUSTRY OVERVIEW

ANALISIS INDUSTRI PERBANKAN

BANKING INDUSTRY ANALYSIS

Industri perbankan Indonesia sepanjang tahun 2025 berada dalam kondisi stabil dan berdaya tahan, meskipun dihadapkan pada ketidakpastian global yang masih tinggi. Berdasarkan data Bank Indonesia tahun 2025, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, didukung oleh likuiditas yang memadai, kualitas aset yang terkendali, serta permodalan perbankan yang kuat. Dari sisi likuiditas, kondisi perbankan nasional pada akhir 2025 menunjukkan tingkat yang longgar dan terjaga. Hal ini tercermin dari rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebesar 85,35% dan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 28,57%. Posisi rasio tersebut mengindikasikan bahwa perbankan memiliki ruang likuiditas yang cukup untuk menopang fungsi intermediasi secara berkelanjutan.

The Indonesian banking industry throughout 2025 remained stable and resilient, despite facing elevated global uncertainty. Based on 2025 Bank Indonesia data, financial system stability was well-maintained, supported by ample liquidity, managed asset quality, and strong bank capitalization. Regarding liquidity, national banking conditions at the end of 2025 were characterized as loose and well-preserved. This was reflected in a Loan to Deposit Ratio (LDR) of 85.35% and a Liquid Assets to Third-Party Funds (LA/DPK) ratio of 28.57%. These ratios indicate that the banking sector possesses sufficient liquidity buffers to support its intermediation function sustainably.

Penghimpunan dana masyarakat juga menunjukkan kinerja yang kuat. Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat tumbuh sebesar 13,83% (year-on-year) pada 2025, mencerminkan tetap terjaganya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan serta dukungan pendanaan yang memadai bagi penyaluran kredit. Dari sisi intermediasi, kredit perbankan tumbuh sebesar 9,69% (year-on-year) pada akhir 2025. Pertumbuhan kredit tersebut terutama ditopang oleh kredit investasi yang meningkat signifikan sebesar 21,06% (year-on-year), sementara kredit konsumsi tumbuh 6,58% (*year-on-year*) dan kredit modal kerja tumbuh 4,52% (*year-on-year*). Pola ini menunjukkan bahwa ekspansi kredit perbankan pada 2025 lebih banyak didorong oleh kebutuhan pembiayaan investasi, sejalan dengan upaya peningkatan kapasitas produksi dan ekspansi usaha. Berdasarkan segmen debitur, kredit korporasi tumbuh sebesar 18,33% (*year-on-year*) dan menjadi kontributor utama pertumbuhan kredit.

Public funding collection also demonstrated robust performance. Third-Party Funds (DPK) grew by 13.83% (y-o-y) in 2025, reflecting sustained public confidence in the banking industry and providing adequate funding support for credit disbursement. In terms of intermediation, bank credit grew by 9.69% (y-o-y) at the end of 2025. This growth was primarily driven by investment credit, which increased significantly by 21.06% (y-o-y), while consumption credit grew by 6.58% (y-o-y) and working capital credit by 4.52% (y-o-y). This trend indicates that bank credit expansion in 2025 was largely propelled by investment financing needs, in line with efforts to increase production capacity and business expansion. By debtor segment, corporate credit grew by 18.33% (y-o-y) and served as the primary contributor to overall credit growth. Banking asset quality in 2025 remained well-preserved. The Non-Performing Loan (NPL) ratio was recorded at 2.21% (gross) and 0.86% (net), reflecting relatively low

Kualitas aset perbankan pada 2025 tetap terjaga dengan baik. Rasio *non-performing loan* (NPL) tercatat sebesar 2,21% (gross) dan 0,86% (net), mencerminkan risiko kredit yang relatif rendah. Ketahanan perbankan semakin diperkuat oleh kecukupan permodalan, dengan rasio kecukupan modal (CAR) industri perbankan tetap berada di atas 25%, sehingga memberikan bantalan risiko yang memadai dalam menghadapi potensi tekanan ekonomi. Dari sisi moneter, kondisi likuiditas perekonomian turut mendukung kinerja perbankan. Uang beredar luas (M2) meningkat dari 5,46% (year-on-year) pada awal 2025 menjadi 8,30% (year-on-year) pada November 2025, sejalan dengan penguatan likuiditas dan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Peningkatan likuiditas ini berkontribusi pada terjaganya kapasitas perbankan dalam menyalurkan pembiayaan. Selain itu, akselerasi digitalisasi turut memperkuat kinerja industri perbankan. Sepanjang 2025, nilai transaksi BI-RTGS meningkat 31,04% (year-on-year), volume transaksi BI-FAST tumbuh 30,44% (year-on-year), dan transaksi pembayaran digital meningkat 39,21% (year-on-year). Sementara itu, transaksi QRIS tumbuh sangat tinggi sebesar 139,99% (year-on-year), dengan jumlah pengguna mencapai 59,53 juta dan merchant 42,75 juta. Perkembangan ini mendorong efisiensi sistem pembayaran, perluasan inklusi keuangan, serta penguatan basis transaksi perbankan. Secara keseluruhan, data Bank Indonesia tahun 2025 menunjukkan bahwa industri perbankan Indonesia berada pada kondisi yang likuid, sehat, dan resilien, dengan pertumbuhan kredit yang tetap positif, penghimpunan dana yang kuat, risiko kredit yang terkendali, serta permodalan yang solid. Kondisi ini menempatkan perbankan sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang masih penuh tantangan.

credit risk. Banking resilience was further bolstered by capital adequacy, with the industry's Capital Adequacy Ratio (CAR) remaining above 25%, providing a sufficient risk buffer against potential economic pressures. From a monetary perspective, broad economic liquidity conditions supported banking performance. Broad Money (M2) growth increased from 5.46% (y-o-y) at the beginning of 2025 to 8.30% (y-o-y) by November 2025, consistent with the strengthening of liquidity and the effectiveness of monetary policy transmission. This enhanced liquidity contributed to the sustained capacity of banks to disburse financing.Furthermore, the acceleration of digitalization strengthened the performance of the banking industry. Throughout 2025, the value of BI-RTGS transactions increased by 31.04% (y-o-y), BI-FAST transaction volume grew by 30.44% (y-o-y), and digital payment transactions rose by 39.21% (y-o-y). Meanwhile, QRIS transactions saw exponential growth of 139.99% (y-o-y), with the number of users reaching 59.53 million and merchants totaling 42.75 million. These developments have enhanced payment system efficiency, expanded financial inclusion, and strengthened the banking transaction base.Overall, 2025 Bank Indonesia data indicates that the Indonesian banking industry is in a liquid, sound, and resilient condition, characterized by positive credit growth, strong funding collection, managed credit risk, and solid capitalization. These conditions position the banking sector as the primary pillar for maintaining financial system stability while supporting national economic growth amidst a challenging global landscape.

TINJAUAN OPERASIONAL

OPERATIONAL REVIEW

Segmen Usaha Bank

Bank Sulteng merupakan bank umum konvensional kelas usaha KBMI I yaitu bank yang memiliki modal inti hingga 6 triliun Rupiah. Bank Sulteng terus berupaya untuk meraih pangsa pasar yang optimal dalam industri perbankan nasional melalui pengembangan segmen usaha berikut:

1. Dana Pihak Ketiga (DPK)
    a. Bank Sulteng berupaya mengembangkan Dana Pihak Ketiga melalui pengembangan berbagai produk dana dan jasa keuangan. Pengembangan produk-produk dana dan jasa keuangan diawali dengan proses penyusunan kajian produk hingga pelaksanaan strategi untuk peningkatan penghimpunan dana melalui

Bank Business Segments

Bank Sulteng is a KBMI 1 conventional commercial bank, classified as a bank with core capital of up to IDR 6 trillion. Bank Sulteng continues to strive for optimal market share within the national banking industry by developing the following business segments:

1. Third-Party Funds (TPF)
    a. Bank Sulteng is committed to growing its Third-Party Funds through the development of various deposit products and financial services. The development of these products and services encompasses comprehensive product feasibility studies and the execution of strategies aimed at increasing fund mobilization across various TPF

berbagai komposisi DPK, seperti: kartu debit, program Prima Optima, Qris, program Tabungan Berjangka dan Penguatan implementasi Laku Pandai turut menjadi fokus strategis melalui perluasan jaringan agen, peningkatan aktivitas transaksi, serta optimalisasi peran agen sebagai perpanjangan layanan Bank di wilayah potensial dan daerah terpencil. Langkah ini tidak hanya mendukung peningkatan volume transaksi dan *fee based income*, tetapi juga memperluas basis nasabah dan memperkuat struktur pendanaan Bank secara berkelanjutan sepanjang tahun 2025.

2. Penyaluran Kredit Bank Sulteng
   Terdapat 2 bentuk penyaluran kredit perbankan sebagai segmen usaha yang dilakukan oleh Bank Sulteng, yaitu:
   a. Kredit Konsumer: merupakan penyaluran dana kredit untuk kebutuhan konsumsi yang difokuskan untuk 2 jenis konsumer:
      1. Konsumer ASN: diberikan untuk ASN yang memasuki masa pra pensiun dan yang sudah memasuki masa pensiun (***gressperiod***), serta ASN yang akan menuju masa pensiun dalam waktu 15 tahun.
      2. Konsumer Komersil: bagi konsumer komersil, kredit yang diberikan adalah berupa KPR Komersil.
   b. Kredit Produktif : merupakan penyediaan dana atau pembiayaan bagi pelaku usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah serta Korporasi yang membutuhkan dukungan bantuan Modal Kerja maupun kebutuhan Investasi.

components, such as: debit cards, the Prima Optima program, QRIS, and Term Savings programs.The reinforcement of branchless banking implementation (Laku Pandai) also remains a strategic focus through the expansion of agency networks, increased transaction activity, and the optimization of the role of agents as an extension of the Bank's services in high-potential and remote areas. This initiative not only supports growth in transaction volume and fee-based income but also broadens the customer base and strengthens the Bank's funding structure sustainably throughout 2025.

2. Bank Sulteng Credit Distribution
   Bank Sulteng operates two primary credit distribution segments:
   a. Consumer Credit: Credit facilities provided for consumption needs, categorized into two main consumer types:
      1. Civil Servant (ASN) Consumers: Targeted toward ASNs entering pre-retirement, those in their grace period (already retired), and ASNs within 15 years of their retirement date.
      2. Commercial Consumers: For the commercial segment, credit is provided in the form of Commercial Mortgages (KPR).
   b. Productive Credit: The provision of funding or financing for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) as well as Corporations requiring support for Working Capital or Investment purposes.

STRATEGI BANK

BANK STRATEGY

ARAH KEBIJAKAN BANK

Untuk mencapai hasil akhir berupa tercapainya visi Bank Sulteng, maka Bank Sulteng telah menetapkan arah kebijakan Bank untuk menjalankan misi dalam jangka pendek dan jangka menengah, yaitu:

1. Kebijakan Jangka Pendek Bank
   a. Pemenuhan likuiditas untuk memenuhi likuiditas wajib minimum yang ditetapkan otoritas moneter di samping kebutuhan likuiditas untuk memenuhi penarikan dana oleh nasabah sehari-hari, menyediakan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan penanaman dana dalam bentuk surat-surat berharga jangka pendek atau instrumen pasar uang;
   b. Memaksimalkan Penyaluran Kredit Konsumtif Bagi ASN minimal 70%-80% dari seluruh jumlah ASN di Provinsi Sulawesi Tengah dan

BANK POLICY DIRECTION

To realize the ultimate goal of fulfilling Bank Sulteng's vision, the Bank has established strategic policy directions to execute its short-term and medium-term missions, as follows:

1. Short-Term Bank Policy
   a. Liquidity Fulfillment: Maintaining the statutory reserve requirements mandated by the monetary authority, as well as meeting daily customer withdrawal needs, providing payment traffic services, and managing fund placements in short-term securities or money market instruments.
   b. Maximizing Consumer Credit for Civil Servants (ASN): Targeting a minimum penetration rate of 70%–80% of the total ASN population in

kelompok-kelompok Usaha yang dikelolah oleh keluarga ASN dalam bentuk kegiatan usaha yang produktif;

c. Memaksimalkan Penerimaan atau Pendapatan daerah bekerjasama dengan PT. Bank Sulteng serta melajutkan program-program produk bisnis bank dalam konsep digitalisasi Perbankan;
d. Melakukan Penyusunan, penyempurnaan dan Mereview beberapa Buku Pedoman Perusahaan (BPP) dan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

2. Kebijakan Jangka Menengah dan Panjang Bank
   a. Sasaran jangka menengah yaitu memperoleh keuntungan dari kegiatan operasional dan tata kelola bank yang baik dan sehat, sehingga tumbuh serta meningkatkan nilai perusahaan dan memaksimalkan kekayaan pemilik bank serta mensejahterahkan Pegawai yang merupakan asset bank yang tak terukur dengan nilai apapun.
   b. Mengoptimalkan Pelaksanaan Kelompok Usaha Bank (KUB) yang telah disetujui dengan Pemanfaatan dan Sinergi terhadap peningkatan sumber daya manusia, Teknologi Informasi dan pelaksanaan produk Bank lainnya.
   c. Melakukan evaluasi dan menyusun *Corporate Plan* serta *Bisnis Plan* Teknologi Informasi yang disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan terkini TI Bank.

PROGRAM TRANSFORMASI BPD

Transformasi BPD dirancang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Dalam Negeri dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) yang bertujuan agar seluruh BPD mampu meningkatkan ketahanan usahanya (*resilience*) dan memperkuat perannya sebagai agen pembangunan daerah serta meningkatkan sinergi antar BPD melalui transfer pengetahuan dan *benchmarking*.

Program Transformasi BPD diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 26 Mei 2015 dengan visi:

"Menjadi bank regional yang berdaya saing tinggi dan kuat serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan".

Central Sulawesi Province, as well as business groups managed by ASN families in the form of productive business activities.

c. Regional Revenue Optimization: Maximizing regional revenue collection in collaboration with PT Bank Sulteng and continuing the implementation of banking business products under the digital banking framework.
d. Governance Documentation: Drafting, refining, and reviewing Corporate Guidelines (BPP) and Standard Operating Procedures (SOP) to ensure alignment with current operational needs and applicable regulations.

2. Medium and Long-Term Bank Policy
   a. Sustainable Profitability: Achieving profitability through sound operational activities and Good Corporate Governance (GCG) to enhance corporate value, maximize shareholder wealth, and improve the welfare of employees as the Bank's most invaluable assets.
   b. KUB Optimization: Optimizing the implementation of the Bank Integration Group (KUB) framework through the strategic utilization and synergy of human resources, Information Technology, and other banking products.
   c. Strategic IT Planning: Evaluating and formulating the Corporate Plan and IT Business Plan to remain aligned with the latest advancements in banking technology.

BPD TRANSFORMATION PROGRAM

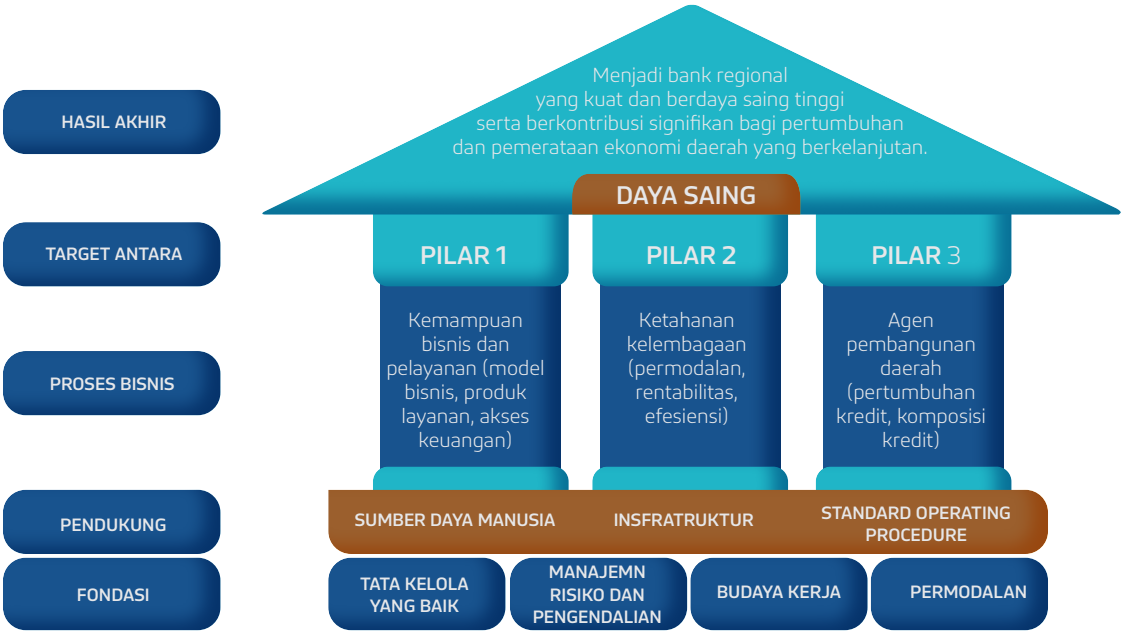
The Regional Development Bank (BPD) Transformation Program was designed by the Financial Services Authority (OJK) in collaboration with the Ministry of Home Affairs and the Regional Development Bank Association (ASBANDA). The program aims to enhance the resilience of all BPDs, strengthen their role as regional development agents, and increase inter-BPD synergy through knowledge transfer and benchmarking.

The BPD Transformation Program was inaugurated by the President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, on May 26, 2015, with the vision:

"To become a highly competitive and robust regional bank that contributes significantly to sustainable regional economic growth and equity."

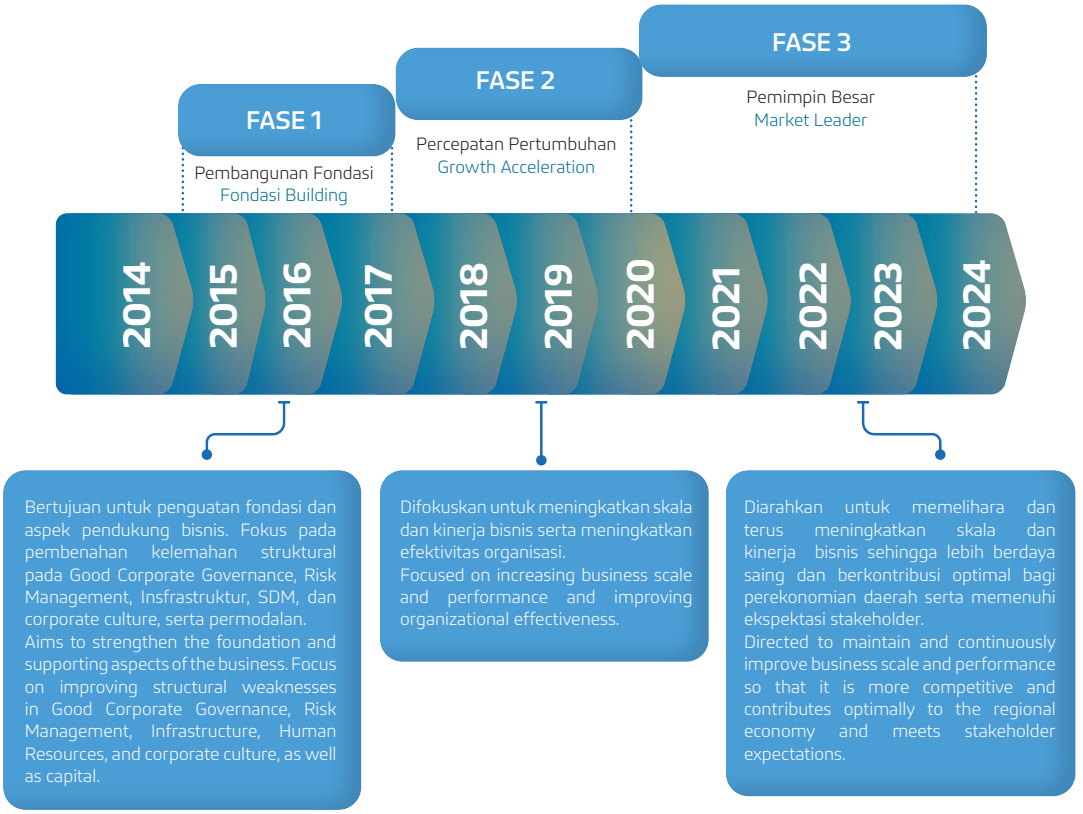
Kerangka program transformasi BPD disusun secara menyeluruh dan seimbang dengan menekankan pentingnya pondasi dan aspek pendukung, yaitu penerapan GCG serta pengembangan infrastruktur dan SDM. Hal tersebut untuk menopang 3 pilar proses transformasi termasuk aspek bisnis guna mencapai hasil akhir berupa tercapainya visi transformasi BPD.

The transformation framework is structured comprehensively and balanced, emphasizing the importance of foundations and supporting aspects, namely the implementation of GCG and the development of infrastructure and human resources. These elements support the three pillars of the transformation process, including business aspects, to achieve the ultimate goal of fulfilling the BPD transformation vision.



Untuk melaksanakan Program Transformasi BPD, terdapat *roadmap* dalam 3 fase, yaitu:

In implementing the BPD Transformation Program, there are roadmap in 3 phases, namely:



Hasil akhir dari Program Transformasi BPD merupakan capaian yang terukur dalam mencapai Visi yang sesuai dengan 3 Tema Transformasi BPD dan menjadi pedoman kerangka Transformasi Bank Sulteng. Hal ini tertuang dalam rencana jangka panjang Bank Sulteng yang telah dirumuskan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) Bank Sulteng Tahun 2025 – 2027.

Agar tetap searah dengan kebijakan Bank Sulteng dalam mencapai visinya ke depan, secara konkrit Bank Sulteng telah menetapkan langkah-langkah strategis melalui 3 pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Melalui Faktor Internal
   Langkah strategis melalui faktor internal ini terkait dengan pengambilan kebijakan dan penetapan strategi operasional Bank, yaitu:
   a. Memaksimalkan dan mengembangkan Struktur organisasi bank yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan kebijakan atau perencanaan dengan memperhatian perkembangan usaha/bisnis bank;
   b. Membangun Budaya kerja perusahaan yang lebih baik;
   c. Membentuk karakter dan Filosofi serta gaya manajemen yang baik;
   d. Strategi segmentasi pasar dan jaringan kantor yang memadai;
   e. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dan penggunaan teknologi yang tepat guna dan berhasil guna;
   f. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai untuk mendukung peningkatan usaha bank yang lebih baik;
   g. Membangun Kantor-kantor pelayanan yang representative dalam rangka memberikan nilai tambah dan kepercayaan kepada masyarakat dan menjadi kebanggakan khususnya Masyarakat Sulawesi Tengah baik didalam daerah maupun di luar daerah.
   h. Adanya Komitmen pemilik (para pemegang Saham) terhadap pengembangan usaha bank dengan memperhatikan regulasi OJK terkait Penyetoran Modal.

2. Pendekatan Melalui Faktor Eksternal
   Bank Sulteng juga menetapkan langkah strategis melalui faktor eksternal terkait dengan faktor-faktor di luar kendali Bank, yaitu:
   a. Kebijakan moneter;
   b. Kepatutan peraturan dan regulasi;
   c. Fluktuasi nilai tukar dan tingkat inflasi;
   d. Volatilitas tingkat suku bunga;
   e. Sekuritisasi;
   f. Treasury management;
   g. Globalisasi;

The ultimate outcome of the BPD Transformation Program is a measurable achievement of the Vision, aligned with the Three Themes of BPD Transformation, which serves as the framework for Bank Sulteng's Transformation. This is articulated in Bank Sulteng's long-term strategy as formulated in the Bank Business Plan (RBB) 2025–2027.

To remain aligned with Bank Sulteng's policy in achieving its future vision, the Bank has established concrete strategic steps through three approaches:

1. Internal Factor Approach
   Strategic measures via internal factors pertain to policy-making and the determination of the Bank's operational strategies, including:
   a. Organizational Structure Optimization: Enhancing and developing the Bank's organizational structure to streamline decision-making and policy planning while remaining responsive to business developments;
   b. Corporate Culture: Cultivating an improved corporate work culture;
   c. Governance Philosophy: Establishing strong character, philosophy, and sound management styles;
   d. Market Segmentation & Network: Implementing robust market segmentation strategies and maintaining an adequate branch office network;
   e. Human Resources & Technology: Ensuring the availability of skilled Human Resources and the implementation of efficient, high-impact technology;
   f. Employee Welfare: Enhancing employee welfare to support improved business performance;
   g. Service Infrastructure: Developing representative service offices to provide added value, foster public trust, and serve as a symbol of pride for the people of Central Sulawesi, both within and outside the region;
   h. Shareholder Commitment: Securing the commitment of shareholders toward business expansion, with strict adherence to OJK regulations regarding capital injection.

2. External Factor Approach
   Bank Sulteng has established strategic measures to navigate external factors—variables that remain outside the Bank's direct control—namely:
   a. Monetary Policy;
   b. Regulatory Compliance: Adherence to prevailing laws and regulations;
   c. Exchange Rate Fluctuations and Inflation Levels;
   d. Interest Rate Volatility;
   e. Securitization;
   f. Treasury Management;
   g. Globalization;

h. Persaingan antar bank maupun lembaga keuangan non bank;
i. Perkembangan teknologi; dan,
j. Inovasi instrumen keuangan.

3. Pendekatan Melalui Risiko Usaha
Tingkat ketidakpastian usaha yang akan mempengaruhi pendapatan yang akan diterima Bank perlu juga diantisipasi karena semakin besar kemungkinan risiko-risiko yang dihadapi akan semakin tinggi pula premi risiko atau bunga yang timbul dari risiko-risiko tersebut, yaitu :
a. Risiko kredit;
b. Risiko investasi;
c. Risiko likuiditas;
d. Risiko operasional;
e. Risiko penyelewengan;
f. Risiko fidusia;
g. Risiko tingkat bunga;
h. Risiko solvensi;
i. Risiko valuta asing; dan,
j. Risiko persaingan.

h. Inter-bank and Non-Bank Financial Institution (NBFI) Competition;
i. Technological Advancements; and,
j. Innovation in Financial Instruments.

3. Business Risk Approach
The level of business uncertainty that may impact the Bank's projected earnings must be anticipated. As the probability of encountering these risks increases, the risk premiums or interest costs arising from them will also escalate. These risks include:

a. Credit Risk;
b. Investment Risk;
c. Liquidity Risk;
d. Operational Risk;
e. Fraud Risk (or Malpractice Risk);
f. Fiduciary Risk;
g. Interest Rate Risk;
h. Solvency Risk;
i. Foreign Exchange Risk; and,
j. Competition Risk.

STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS

Strategi pengembangan bisnis, antara lain memuat informasi langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan usaha Bank Umum yang telah ditetapkan, termasuk penjelasan mengenai strategi pengembangan organisasi dan teknologi system informasi, dan strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal, berikut Strategis tersebut diantaranya:

1. Strategi Pengembangan Organisasi dan Teknologi Sistem Informasi

Dalam rangka menghadapi era digital di seluruh lini industri maupun revolusi industri 4.0, yang kesemuanya berbasis pada teknologi informasi. Bank Sulteng perlu melakukan peningkatan daya saing dan peningkatan tata kelola bank yang lebih professional. Bank Sulteng sangat membutuhkan peran Teknologi Informasi serta rencana besar (Grand Design) dan rencana jangka pendek serta jangka Panjang Teknologi Informasi perusahaan dalam bentuk Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI). Rencana Bisnis Bank dan Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan syarat wajib untuk dimiliki dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Secara spesifik arah perkembangan teknologi Bank Sulteng sesuai visi dan misi Bank Sulteng yang pada intinya memberikan support penuh ke

BUSINESS DEVELOPMENT STRATEGY

The business development strategy encompasses strategic measures designed to achieve the Bank's established objectives. This includes a comprehensive explanation of organizational development, Information Technology (IT) system strategies, and frameworks to anticipate changes in external conditions. The key strategic pillars are as follows:

1. Organizational Development and Information Technology System Strategy

In response to the digital era across all industrial sectors and the Industrial Revolution 4.0—both of which are fundamentally rooted in information technology—Bank Sulteng recognizes the necessity of enhancing its competitiveness and implementing more professional corporate governance. Bank Sulteng requires a pivotal role for Information Technology, structured through a Grand Design as well as short and long-term IT strategic plans, articulated within the Bank Business Plan (RBB) and the Information Technology Strategic Plan (RSTI). The RBB and RSTI are inseparable components and constitute a mandatory requirement for the realization of Good Corporate Governance (GCG).

Specifically, the trajectory of Bank Sulteng's technological development is aligned with its vision and mission, providing comprehensive support for

arah perkembangan bisnis bank berbasis teknologi perbankan terkini yang terarah dan terukur, sesuai arah kebijakan Bank Sulteng, maka Rencana Strategis Framework dan Program kerja Divisi TI dalam tahun 2025, dibagi 1 kebijakan dan 4 (empat) konsep perencanaan yaitu;

a). Kebijakan dan Organisasi TI
b). Rencana Program Kerja
   1). Bagian Perencanaan dan Keamanan TI
   2). Bagian Pengembangan TI
   3). Bagian Operasioal TI
   4). Bagian e-Channel
c). Rencana Pengembangan Struktur dan SDM IT
d). Rencana Anggaran Biaya Divisi IT

Arah dan kebijakan IT di rumuskan pada rencana strategis teknologi informasi (RSTI) yang disusun oleh Divisi IT dan dibahas serta disepakati bersama dalam rapat dengan anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) yang secara umum dibuat dengan tujuan untuk memastikan keselarasan dan dukungan teknologi terhadap bisnis dengan arah teknologi sebagai berikut :

a). Mengendalikan risiko-risiko strategis/jangka panjang dari penerapan dan
b). penggunanaan teknologi informasi lingkungan PT. Bank Sulteng;
c). Merencanakan arsitektur system informasi PT. Bank Sulteng yang berkesinambungan dan terintegrasi;
d). Merencanakan arsitektur sistem informasi yang fleksibel/adaptive/mudah disesuaikan dengan perubahan kebutuhan bisnis PT. Bank Sulteng;
e). Merencanakan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan arsitektur system informasi dan sesuai dengan tren teknologi informasi dalam bisnis perbankan nasional;
f). Merencanakan peta jalan dan investasi penerapan dan penggunaan teknologi informasi PT. Bank Sulteng dalam jangka panjang.

2. Strategis mengantisipasi perubahan kondisi eksternal

Perubahan yang sangat cepat, yang terjadi dalam lingkungan bisnis bank secara otomatis menuntut setiap pelaku bisnis untuk selalu memberikan perhatian dan tanggapan terhadap lingkungannya. Hal ini mengkondisikan perusahaan untuk kemudian merumuskan strategi agar mampu mengantisipasi perubahan dan pencapaian tujuan perusahaan. Didasari atas pentingnya perumusan strategi, proses perumusan strategi merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk menemukan strategi yang tepat bagi perusahaan. Perubahan lingkungan bisnis akan terjadi setiap saat, umumnya berupa gerak perubahan dari salah satu atau gabungan faktor-faktor lingkungan luar perusahaan, baik pada

technology-based business growth that is targeted, measurable, and consistent with the Bank's policy direction. Consequently, the Strategic Framework and IT Division Work Program for 2025 are categorized into one core policy and four planning concepts:

a). IT Policy and Organization
b). Work Program Plans:
   1). IT Planning and Security Department
   2). IT Development Department
   3). IT Operations Department
   4). e-Channel Department
c). IT Structure and Human Resources Development Plan
d). IT Division Budgetary Plan (CAPEX/OPEX)

The IT direction and policies are formulated within the Information Technology Strategic Plan (RSTI), drafted by the IT Division and subsequently deliberated and approved during meetings with the Information Technology Steering Committee (KPTI). Generally, these policies are designed to ensure strategic alignment and technological support for business operations, focusing on the following technological trajectories:

a). Managing strategic/long-term risks from the implementation and
b). use of information technology within PT. Bank Sulteng;
c). Planning a sustainable and integrated information system architecture for PT. Bank Sulteng;
d). Planning a flexible/adaptive information system architecture that is easily adjusted to the changing business needs of PT. Bank Sulteng;
e). Planning an information technology infrastructure that supports the implementation of the information system architecture and aligns with information technology trends in the national banking business;
f). Planning a roadmap and investment for the long-term implementation and use of information technology at PT. Bank Sulteng.

2. Strategies for Anticipating Changes in External Conditions

Rapid shifts within the banking business environment necessitate that all industry players maintain constant vigilance and responsiveness toward their surroundings. This dynamic requires the company to formulate robust strategies to anticipate changes and ensure the achievement of corporate objectives. Given the critical importance of strategic formulation, this process serves as a structured series of activities aimed at identifying the optimal strategy for the company. Changes in the business environment occur continuously, typically driven by shifts in one or a combination of external factors—whether on a national, regional, or global scale. While many of these impacts have

skala nasional, regional maupun global. Sebagian dari dampak yang mereka timbulkan banyak terbukti telah mempengaruhi datangnya berbagai kesempatan usaha (business opportunities), tetapi banyak pula rekaman contoh kasus dari faktor eksternal ini yang menjadi kendala dalam berusaha (business threats and constraints). Kita sering mendengar bagaimana perusahaan yang memiliki sistem organisasi yang baik dengan dukungan visi, misi dan rencana aksi business plan yang terencana tidak menjamin sukses dalam meraih laba. Bahkan banyak perusahaan ini mengalami penurunan dalam kinerja usahanya hanya karena kesalahan dalam menafsirkan skenario dan asumsi pengaruh lingkungan luar tersebut. Suatu lingkungan eksternal organisasi yang menyusun faktor-faktor yang memiliki ruang lingkup luas dan faktor-faktor tersebut pada dasarnya berada di luar dan terlepas dari operasional perusahaan. Lingkungan ini hanya memiliki sedikit dampak implikasi langsung bagi pengaturan suatu organisasi. Faktor- faktor tersebut antara lain adalah:

a). Faktor Ekonomi;
b). Faktor Sosial;
c). Faktor Politik dan Hukum;
d). Faktor Teknologi Informasi;
e). Faktor Demografi

TINJAUAN KEUANGAN

Tinjauan keuangan berikut disusun berdasarkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2025 sebagaimana disajikan dalam Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Cahyadi dan Adhi serta memperoleh opini "Wajar Dalam Semua Hal yang Material" atas posisi keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025, serta atas kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

KINERJA KEUANGAN

Kinerja keuangan Bank Sulteng terdiri atas kinerja Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain serta Laporan Arus Kas disajikan sebagai berikut.

been proven to generate significant business opportunities, there are also numerous documented cases where external factors have manifested as business threats and constraints. It is frequently observed that companies possessing sound organizational systems, supported by a well-defined vision, mission, and actionable business plans, are not guaranteed success in achieving profitability. In fact, many such entities have experienced a decline in performance due to errors in interpreting scenarios and assumptions regarding the influence of the external environment. An organization's external environment is comprised of factors with a broad scope that are fundamentally outside of, and independent from, the company's internal operations. While these factors may have limited direct implications for immediate organizational management, they significantly shape the broader landscape. These factors include:

a). Economic Factors;
b). Social Factors;
c). Political and Legal Factors;
d). Information Technology Factors;
e). Demographic Factors.

FINANCIAL REVIEW

The following financial review has been prepared based on the Financial Statements for the fiscal years ending December 31, 2024, and 2025, as presented in this Annual Report. These Financial Statements have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Cahyadi & Adhi, which expressed an "Unqualified Opinion" (Fair in all material respects) regarding the financial position of PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah as of December 31, 2025, as well as its financial performance and cash flows for the fiscal year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK).

FINANCIAL PERFORMANCE

Bank Sulteng's financial performance, comprising the Statement of Financial Position, the Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income, and the Statement of Cash Flows, is presented as follows:

LAPORAN POSISI KEUANGAN

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Tabel Laporan Posisi Keuangan
Table of Financial Position Statement

(dalam jutaan Rupiah
(in million rupiah

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp	%	
1	2	3	4 = (2-3)	5 = (4/3)	1
ASET					ASSETS
Kas	154.429	134.176	20.253	15,09	Cash
Giro pada Bank Indonesia	1.133.091	996.769	136.322	13,68	Current Accounts with Bank Indonesia
Giro pada Bank Lain	7.378	6.765	613	9,06	Current Accounts with Other Banks
Setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai tahun 2025 sebesar Nihil dan tahun 2024 sebesar Nihil					Net of allowance for impairment losses in 2025 amounting to Nil and in 2024 amounting to Nil
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	0	690.000	(690.000)	(100,00)	Placements with Bank Indonesia and Other Banks
Setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai tahun 2025 sebesar Nihil dan tahun 2024 sebesar Nihil					Net of allowance for impairment losses in 2025 amounting to Nil and in 2024 amounting to Nil
Efek-efek	3.627.165	2.509.215	1.117.950	44,55	Marketable Securities
setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai tahun 2025 sebesar Nihil dan tahun 2024 sebesar Rp49.901.400					Net of allowance for impairment losses in 2025 amounting to Nil and in 2024 amounting to Rp49,901,400
Kredit yang Diberikan					Loans
Pihak Berelasi	19.367	21.503	(2.136)	(9,93)	Related Parties
Pihak Ketiga	8.528.646	8.359.710	168.936	2,02	Third Parties
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(119.281)	(94.639)	(24.642)	26,04	Allowance for Impairment Losses
Jumlah Kredit yang Diberikan - Bersih	8.428.732	8.286.574	142.158	1,72	Total Loans – Net
Aset Tetap	146.648	135.454	11.194	8,26	Fixed Assets
setelah dikurangi akumulasi penyusutan tahun 2025 sebesar Rp85.327.769.566 dan tahun 2024 sebesar Rp57.728.450.370					Net of accumulated depreciation in 2025 amounting to Rp85,327,769,566 and in 2024 amounting to Rp57,728,450,370
Aset Tak Berwujud	1.421	1.919	(498)	(25,95)	Intangible Assets
setelah dikurangi akumulasi amortisasi tahun 2025 sebesar Rp4.070.124.766 dan tahun 2024 sebesar Rp3.572.329.362					Net of accumulated amortization in 2025 amounting to Rp4,070,124,766 and in 2024 amounting to Rp3,572,329,362
Aset Pajak Tangguhan	13.697	8.033	5.664	70,51	Deferred Tax Assets
Beban Dibayar Dimuka dan Aset Lain-lain	136.382	153.943	(17.561)	(11,41)	Prepaid Expenses and Other Assets
JUMLAH ASET	**13.648.944**	**12.922.848**	**726.096**	**5,62**	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS					LIABILITIES
Liabilitas Segera	636.661	569.640	67.021	11,77	Due to Customers

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp	%	
1	2	3	4 = (2-3)	5 = (4/3)	1
Simpanan Nasabah					Customer Deposits
Pihak Berelasi	35.704	82.458	(46.754)	(56,70)	Related Parties
Pihak Ketiga	8.690.865	9.176.032	(485.167)	(5,29)	Third Parties
Simpanan dari Bank Lain	1.275.000	530.000	745.000	140,57	Deposits from Other Banks
Pinjaman Yang Diterima	1.220.535	897.344	323.191	36,02	Borrowings
Utang Pajak	9.161	8.161	1.000	12,25	Taxes Payable
Liabilitas Imbalan Kerja	55.644	50.175	5.469	10,90	Employee Benefits Liabilities
Beban yang Masih Harus Dibayar dan Liabilitas Lain-lain	14.318	11.990	2.328	19,42	Accrued Expenses and Other Liabilities
JUMLAH LIABILITAS	**11.937.889**	**11.325.800**	**612.089**	**5,40**	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS					EQUITY
Modal saham	491.970	491.970	0	0,00	Share Capital
Nilai nominal Rp100.000 per saham modal dasar 17.000.000 saham dan modal ditetapkan dan disetor penuh tahun 2025 dan 2024 sebanyak 4.919.698 Lembar saham					Par value of Rp100,000 per share, authorized capital of 17,000,000 shares, and issued and fully paid-up capital in 2025 and 2024 totaling 4,919,698 shares
Agio Saham	202.901	202.901	(0)	(0,00)	Share Premium
Dana Setoran Modal	43.226	12.366	30.860	249,56	Capital Paid-in Advance
Komponen Ekuitas Lainnya					Other Equity Components
Pendapatan Komprehensif Lainnya					Other Comprehensive Income
Keuntungan/(Kerugian) Nilai Wajar Surat Berharga					Fair Value Gain/(Loss) on Marketable Securities
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Program Manfaat Pasti Setelah Dikurangi Ditambah Pajak-pajak Terkait	10.703	10.231	472	461	Actuarial Gain/(Loss) on Defined Benefit Obligations, Net of Related Taxes
Saldo Laba					Retained Earnings
Telah Ditentukan Penggunaannya	684.678	637.348	47.330	7,43	Appropriated
Belum Ditentukan Penggunaannya	277.576	242.232	35.344	14,59	Unappropriated
JUMLAH EKUITAS	**1.711.055**	**1.597.048**	**114.007**	**7,14**	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**13.648.944**	**12.922.848**	**726.096**	**5,62**	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

ASET

Aset Bank Sulteng pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp13.648.944 juta, meningkat 5,62% dibandingkan tahun 2024. Kenaikan ini terutama didorong oleh pertumbuhan Efek-efek, Giro pada Bank Indonesia, dan Kas, serta peningkatan Kredit yang Diberikan – Bersih, meskipun penurunan Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain serta Beban Dibayar Dimuka dan Aset Lain-lain menahan laju pertumbuhan aset.

ASSETS

In 2025, Bank Sulteng's Total Assets were recorded at IDR 13,648,944 million, representing a 5.62% increase compared to 2024. This growth was primarily driven by the expansion of Securities, Current Accounts with Bank Indonesia, and Cash, alongside an increase in Net Loans. However, the overall asset growth was moderated by a decline in Placements with Bank Indonesia and Other Banks, as well as Prepaid Expenses and Other Assets.

Tabel Aset
Asset Table

(dalam jutaan Rupiah
(in million rupiah

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp	%	
1	2	3	4 = (2-3)	5 = (4/3)	1
ASET					**ASSETS**
Kas	154.429	134.176	20.253	15,09	Cash
Giro pada Bank Indonesia	1.133.091	996.769	136.322	13,68	Current Accounts with Bank Indonesia
Giro pada Bank Lain	7.378	6.765	613	9,06	Current Accounts with Other Banks
Setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai tahun 2025 sebesar Nihil dan tahun 2024 sebesar Nihil					Net of allowance for impairment losses of nil in 2025 and nil in 2024
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	0	690.000	(690.000)	(100,00)	Placements with Bank Indonesia and Other Banks
Setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai tahun 2025 sebesar Nihil dan tahun 2024 sebesar Nihil					Net of allowance for impairment losses of nil in 2025 and nil in 2024
Efek-efek	3.627.165	2.509.215	1.117.950	44,55	Marketable Securities
setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai tahun 2025 sebesar Nihil dan tahun 2024 sebesar Rp49.901.400					Net of allowance for impairment losses of nil in 2025 and Rp49,901,400 in 2024
Kredit yang Diberikan					Financing
Pihak Berelasi	19.367	21.503	(2.136)	(9,93)	Related Parties
Pihak Ketiga	8.528.646	8.359.710	168.936	2,02	Third Parties
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(119.281)	(94.639)	(24.642)	26,04	Allowance for Impairment Losses
Jumlah Kredit yang Diberikan - Bersih	8.428.732	8.286.574	142.158	1,72	Total Financing – Net
Aset Tetap	146.648	135.454	11.194	8,26	Fixed Assets
setelah dikurangi akumulasi penyusutan tahun 2025 sebesar Rp85.327.769.566 dan tahun 2024 sebesar Rp57.728.450.370					Net of accumulated depreciation of Rp85,327,769,566 in 2025 and Rp57,728,450,370 in 2024
Aset Tak Berwujud	1.421	1.919	(498)	(25,95)	Intangible Assets
setelah dikurangi akumulasi amortisasi tahun 2025 sebesar Rp4.070.124.766 dan tahun 2024 sebesar Rp3.572.329.362					Net of accumulated amortization of Rp4,070,124,766 in 2025 and Rp3,572,329,362 in 2024
Aset Pajak Tangguhan	13.697	8.033	5.664	70,51	Deferred Tax Assets
Beban Dibayar Dimuka dan Aset Lain-lain	136.382	153.943	(17.561)	(11,41)	Prepaid Expenses and Other Assets
JUMLAH ASET	**13.648.944**	**12.922.848**	**726.096**	**5,62**	TOTAL ASSETS

ASET LANCAR

Aset Lancar Bank Sulteng pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp13.350.795 juta, meningkat 4,16% dibandingkan tahun 2024, terutama didorong oleh kenaikan Efek-efek, Giro pada Bank Indonesia, dan Kas, serta pertumbuhan Kredit yang Diberikan – Bersih, meskipun penurunan Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain menahan laju pertumbuhan Aset Lancar.

CURRENT ASSETS

In 2025, Bank Sulteng's Current Assets were recorded at IDR 13,350,795 million, representing a 4.16% increase compared to 2024. This growth was primarily driven by the appreciation in Securities, Current Accounts with Bank Indonesia, and Cash, as well as the expansion of Net Loans. However, the growth rate of Current Assets was moderated by a decline in Placements with Bank Indonesia and Other Banks.

Tabel Aset Lancar
Table of Current Assets

(dalam jutaan Rupiah
(in million rupiah

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp	%	
1	2	3	4 = (2-3)	5 = (4/3)	1
ASET LANCAR					**CURRENT ASSETS**
Kas	154.429	134.176	20.253	15,09	Cash
Giro pada Bank Indonesia	1.133.091	996.769	136.322	13,68	Current Accounts with Bank Indonesia
Giro pada Bank Lain	7.378	6.765	613	9,06	Current Accounts with Other Banks
Setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai tahun 2024 sebesar Nihil dan tahun 2023 sebesar Nihil					Net of allowance for impairment losses of nil in 2024 and nil in 2023
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	0	690.000	(690.000)	(100,00)	Placements with Bank Indonesia and Other Banks
Setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai tahun 2024 sebesar Nihil dan tahun 2023 sebesar Nihil					Net of allowance for impairment losses of nil in 2024 and nil in 2023
Efek-efek	3.627.165	2.509.215	1.117.950	44,55	Marketable Securities
Setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai tahun 2024 sebesar Rp49.901.400 dan tahun 2023 sebesar Nihil					Net of allowance for impairment losses of Rp49,901,400 in 2024 and nil in 2023
Kredit yang Diberikan					Financing
Pihak Berelasi	19.367	21.503	(2.136)	(9,93)	Related Parties
Pihak Ketiga	8.528.646	8.359.710	168.936	2,02	Third Parties
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(119.281)	(94.639)	(24.642)	26,04	Allowance for Impairment Losses
Jumlah Kredit yang Diberikan - Bersih	8.428.732	8.286.574	142.158	1,72	Total Financing – Net
JUMLAH ASET LANCAR	**13.350.795**	**12.623.499**	**727.296**	**5,76**	TOTAL CURRENT ASSETS

KAS

Pada tahun 2025, posisi Kas Bank Sulteng tercatat sebesar Rp154.429 juta, meningkat sebesar 15,09% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp134.176 juta. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan Kas Besar sebesar Rp20.718 juta atau 21,65% dan Kas ATM sebesar Rp4.535 juta atau 13,55%, sejalan dengan peningkatan kebutuhan transaksi dan layanan operasional. Sementara itu, Kas dalam Perjalanan menurun menjadi nihil dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, kenaikan kas mencerminkan penguatan likuiditas jangka pendek Bank Sulteng pada tahun 2025.

CASH

As of 2025, Bank Sulteng's Cash position was recorded at IDR 154,429 million, representing a 15.09% increase compared to the IDR 134,176 million recorded in 2024. This growth was primarily driven by an increase in Vault Cash (Cash in Hand) of IDR 20,718 million or 21.65%, and ATM Cash of IDR 4,535 million or 13.55%, aligned with the rising demand for transactions and operational services. Meanwhile, Cash in Transit decreased to nil compared to the previous year. Overall, the rise in cash reflects the strengthening of Bank Sulteng's short-term liquidity in 2025.

Tabel Kas
Cash Table

(dalam jutaan Rupiah
(in million rupiah

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp	%	
1	2	3	4 = (2-3)	5 = (4/3)	1
ASET					**ASSETS**
Kas Besar	116.416	95.698	20.718	21,65	Vault Cash
Kas ATM	38.013	33.478	4.535	13,55	ATM Cash
Kas dalam Perjalanan	0	5.000	(5.000)	(100,00)	Cash in Transit
JUMLAH KAS	**154.429**	**134.176**	**20.253**	**15,09**	TOTAL CASH

GIRO PADA BANK INDONESIA

Pada tahun 2025, Giro Rupiah pada Bank Indonesia tercatat sebesar Rp1.133.091 juta, meningkat sebesar 13,68% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp996.769 juta. Peningkatan ini mencerminkan penguatan posisi likuiditas Bank Sulteng seiring dengan kebutuhan pengelolaan dana giro pada Bank Indonesia.

Current Accounts with Bank Indonesia

In 2025, Rupiah current accounts with Bank Indonesia amounted to Rp1,133,091 million, representing an increase of 13.68% compared to Rp996,769 million in 2024. This increase reflects the strengthening of Bank Sulteng's liquidity position in line with the Bank's need to manage its current account balances with Bank Indonesia.

Tabel Giro Pada Bank Indonesia
Table of Current Accounts with Bank Indonesia

(dalam jutaan Rupiah
(in million rupiah

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp	%	
1	2	3	4 = (2-3)	5 = (4/3)	1
Giro Rupiah	1.133.091	996.769	136.322	13,68	Rupiah Current Accounts
Jumlah	**1.133.091**	**996.769**	**136.322**	**13,68**	TOTAL

GIRO PADA BANK LAIN

Aset Lancar Bank Sulteng berupa Giro pada Bank Lain pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp7.378 juta, meningkat 9,06% dibandingkan tahun 2024, terutama didorong oleh kenaikan Giro pada Bank Pemerintah khususnya pada PT Bank Syariah Indonesia dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, meskipun penurunan signifikan pada Giro Bank Swasta terutama pada PT Bank Mega Tbk menahan laju pertumbuhan secara keseluruhan.

CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS

Bank Sulteng's Current Assets in the form of Current Accounts with Other Banks were recorded at IDR 7,378 million in 2025, representing a 9.06% increase compared to 2024. This growth was primarily driven by an increase in current accounts held at state-owned banks, specifically at PT Bank Syariah Indonesia and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. However, a significant decline in current accounts with private banks, particularly at PT Bank Mega Tbk, moderated the overall growth rate.

Tabel Giro Pada Bank Lain
Table of Current Accounts with Other Banks

(dalam jutaan Rupiah
(in million rupiah

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp	%	
1	2	3	4 = (2-3)	5 = (4/3)	1
GIRO PADA BANK PEMERINTAH					CURRENT ACCOUNT AT GOVERNMENT BANKS
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	136	138	(2)	(1,45)	Current Current With Government Banks
PT. Bank Syariah Indonesia	590	105	485	461,90	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	735	506	229	45,26	PT Bank Syariah Indonesia
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.807	3.241	566	17,46	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	569	566	3	0,53	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.
JUMLAH GIRO PADA BANK PEMERINTAH	5.837	4.556	1.281	28,12	TOTAL CURRENT ACCOUNT WITH GOVERNMENT BANKS
GIRO PADA BANK DAERAH					GIRO ACCOUNT AT REGIONAL BANKS
PT. Bank DKI	13	13	0	0,00	PT. Bank DKI
PT. Bank Sulselbar	77	77	0	0,00	PT. Bank Sulselbar
JUMLAH GIRO PADA BANK DAERAH	90	90	0	0,00	TOTAL OF CURRENT ACCOUNT WITH REGIONAL BANK
GIRO PADA BANK SWASTA					GIRO ACCOUNT IN PRIVATE BANKS
PT. Bank Danamon Tbk	532	532	0	0,00	PT. Bank Danamon Tbk
PT. Bank Maybank Indonesia Tbk	49	49	0	0,00	PT. Bank Maybank Indonesia Tbk
PT. Bank Mega Tbk	20	693	(673)	(97,11)	PT. Bank Mega Tbk
PT. Bank Panin Tbk	2	4	(2)	(50,00)	PT. Bank Panin Tbk
PT. Bank Muamalat Tbk	29	30	(1)	(3,33)	PT. Bank Muamalat Tbk
PT. Bank CIMB Niaga Tbk	3	3	0	0,00	PT. Bank CIMB Niaga Tbk
PT. Bank Nationalnobu Tbk	130	130	0	0,00	PT. Bank Nationalnobu Tbk
PT. Bank Mayapada Tbk	686	678	8	1,18	PT. Bank Mayapada Tbk
JUMLAH GIRO PADA BANK SWASTA	1.451	2.119	(668)	(31,52%)	TOTAL OF CURRENT ACCOUNT WITH REGIONAL BANK
JUMLAH GIRO PADA BANK LAIN	**7.378**	**6.765**	**613**	**9,06%**	TOTAL CURRENT WITH PRIVATE BANK

PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN

Aset Bank Sulteng dalam bentuk Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain pada tahun 2025 tercatat sebesar nihil, atau mengalami penurunan sebesar 100,00% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp690.000 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh tidak adanya penempatan pada instrumen Call Money yang pada tahun 2025.

PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS

In 2025, Bank Sulteng's assets in the form of Placements with Bank Indonesia and Other Financial Institutions were recorded at nil, representing a 100.00% decrease compared to the IDR 690,000 million recorded in 2024. This decline was primarily attributable to the absence of placements in Call Money instruments during the 2025 fiscal year.

Tabel Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain
Table of Placements with Bank Indonesia and Other Banks

(dalam jutaan Rupiah
(in million rupiah

BERDASARKAN JENIS DAN JATUH TEMPO	JATUH TEMPO	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Based on Type and Maturity
				Rp	%	
1	2	3	4	5 = (3 - 4)	6 = (5 / 4)	1
Call Money Depo Facility	-	-	-	-	-	Call Money Deposit Facility
Term Deposit	-	-	-	-	-	Term Deposit
Call Money	Januari 2025	-	690.000	(690.000)	(100,00)	Call Money
DOC dan Deposito Berjangka	-	-	-	-	-	DOC and Time Deposits
JUMLAH		**-**	**690.000**	**(690.000)**	**(100,00)**	TOTAL

EFEK-EFEK

Efek-efek Bank Sulteng pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp3.627.165 juta, meningkat 44,55% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2.509.215 juta. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan signifikan pada Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), meskipun terjadi penurunan pada Surat Berharga Negara dan Obligasi.

SECURITIES

In 2025, Bank Sulteng's Securities were recorded at IDR 3,627,165 million, representing a substantial increase of 44.55% compared to the IDR 2,509,215 million recorded in 2024. This growth was primarily driven by a significant surge in Bank Indonesia Rupiah Securities (SRBI), which offset the decline observed in Government Securities (SBN) and Corporate Bonds.

Tabel Efek-Efek
Table of Effects

(dalam jutaan Rupiah
(in million rupiah)

BERDASARKAN JENIS DAN TUJUAN	2025	2024	Pertumbuhan Growth		BASED ON TYPE AND PURPOSE
			Rp	%	
1	2	3	5 = (3 - 4)	6 = (5 / 4)	1
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo:					Held Until Maturity:
Obligasi	17.000	32.000	(15.000)	(46,88)	Bond
Negotiable Certificate Deposit	-	-	-	-	Negotiable Certificate Deposit
Surat Berharga Negara	1.051.055	1.612.173	(561.118)	(34,81)	Government Securities
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)	2.261.500	700.000	1.561.500	223,07	Government Debt Securities (Reverse Repo)
Surat Berharga Repo	300.000	200.000	100.000	50,00	Repo Securities
Diskonto Surat Berharga	(2.390)	(34.908)	32.518	(93,15)	Unamortized Discount

BERDASARKAN JENIS DAN TUJUAN	2025	2024	Pertumbuhan Growth		BASED ON TYPE AND PURPOSE
			Rp	%	
1	2	3	5 = (3 - 4)	6 = (5 / 4)	1
Jumlah Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	**3.627.165**	**2.509.265**	**1.117.900**	**44,55**	Toatal Held Until Maturity
Tersedia untuk Dijual					Available for Sale:
Sertifikat Bank Indonesia	-	-	-	-	Bank Indonesia Certificate
Jumlah Tersedia Untuk Dijual	**-**	**-**	**-**	**-**	Quantity Available for Sale
Jumlah Efek-Efek	3.627.165	2.509.265	1.117.900	44,55	Number of Securities
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	(50)	-	-	Allowance for Impairment Losses
JUMLAH BERSIH EFEK-EFEK	**3.627.165**	**2.509.215**	**1.117.950**	**44,55**	NET AMOUNT OF SECURITIES

Seluruh efek-efek yang dimiliki oleh Bank Sulteng pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dalam mata uang Rupiah dan digolongkan dalam kolektabilitas lancar.

As of December 31, 2025, and 2024, all securities held by Bank Sulteng were denominated in Rupiah and classified as Performing (Current).

KREDIT YANG DIBERIKAN

Kredit yang Diberikan Bank Sulteng pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp8.548.013 juta, meningkat sebesar 1,99% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp8.381.213 juta. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan Kredit Konsumsi kepada Pihak Ketiga yang meningkat sebesar 4,83%, sehingga mampu mengimbangi penurunan Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi. Di sisi lain, Kredit kepada Pihak Berelasi mengalami penurunan sebesar 9,93%.

LOANS GRANTED

Bank Sulteng's Gross Loans in 2025 were recorded at IDR 8,548,013 million, representing a 1.99% increase compared to the IDR 8,381,213 million recorded in 2024. This growth was primarily driven by the expansion of Consumer Loans to third parties, which increased by 4.83%, effectively offsetting the contraction in Working Capital Loans and Investment Loans. Conversely, Loans to Related Parties experienced a decline of 9.93%.

(dalam jutaan Rupiah
(in million rupiah)

BERDASARKAN JENIS DAN HUBUNGAN DENGAN BANK	2025	2024	Pertumbuhan Growth		BASED ON TYPE AND RELATIONSHIP WITH BANK
			Rp	%	
1	2	3	4 = (2 - 3)	5 = (4 / 3)	
Pihak Berelasi:					Related Parties:
Konsumsi	19.367	21.503	(2.136)	(9,93)	Consumption
Jumlah Kredit Pihak Berelasi	**19.367**	**21.503**	**(2.136)**	**(9,93)**	Amount of Related Party Credit
Pihak Ketiga:					Third party:
Modal Kerja	561.032	616.710	(55.678)	(9,03)	Working capital
Investasi	1.088.735	1.181.143	(92.408)	(7,82)	Investment
Konsumsi	6.878.879	6.561.856	317.023	4,83	Consumption
Jumlah Kredit Pihak Ketiga	**8.528.646**	**8.359.710**	**168.936**	**2,02**	Third Party Credit Amount
Jumlah Kredit Yang Diberikan	**8.548.013**	**8.381.213**	**166.800**	**1,99**	Amount of Credit Given
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(119.281)	(94.639)	(24.642)	26,04	Allowance for Impairment Losses
JUMLAH BERSIH KREDIT YANG DIBERIKAN	**8.428.732**	**8.286.574**	**142.158**	**1,72**	NET AMOUNT OF CREDIT PROVIDED

Kredit yang disalurkan oleh Bank Sulteng dijamin dengan agunan yang diikat melalui hak tanggungan, surat kuasa untuk menjual, atau bentuk jaminan lain yang memenuhi ketentuan perbankan. Kredit konsumsi (baik kepada Pihak Berelasi maupun Pihak Ketiga) meliputi kredit pemilikan rumah dan kredit perorangan lainnya. Kredit kepada Pihak Berelasi merupakan kredit yang diberikan kepada pejabat eksekutif.

Selain itu, Bank Sulteng juga menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera yang didukung oleh Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka kepemilikan rumah sejahtera yang dibeli dari pengembang. Program ini merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Bank Sulteng.
Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2025, Bank Sulteng tidak memiliki pelanggaran maupun pelampauan atas ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada Pihak Ketiga maupun Pihak Berelasi, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

ASET TETAP

Nilai Aset Tetap Bank Sulteng pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp146.648 juta, meningkat sebesar 8,26% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp135.454 juta. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan Aset Hak Guna yang meningkat sebesar 30,31%, Perabot Kantor sebesar 12,54%, serta Mesin Kantor sebesar 3,63%. Sementara itu, sebagian besar aset tetap lainnya seperti Tanah, Bangunan Kantor, Rumah Dinas, dan Kendaraan relatif tidak mengalami perubahan nilai.

Aset Tetap yang dimiliki Bank Sulteng berupa bangunan dan gedung, kendaraan dan inventaris tertentu diasuransikan atas kemungkinan risiko kebakaran, kecelakaan dan risiko lainnya. Besarnya nilai pertanggungan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp117.011.232.407 dan Rp264.928.820.428 diasuransikan kepada PT. Asuransi Eka Lloyd Bank Sulteng berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutup kemungkinan terjadinya kerugian dari bencana alam seperti gempa bumi dan kebakaran.

Loans disbursed by Bank Sulteng are secured by collateral bound through mortgage rights (hak tanggungan), powers of attorney to sell, or other forms of guarantees that comply with banking regulations. Consumer credit (granted to both Related Parties and Third Parties) comprises mortgages and other personal loans. Loans to Related Parties consist of credit facilities extended to executive officers.

Furthermore, Bank Sulteng disburses Prosperous Home Ownership Loans (Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera) supported by the Housing Financing Liquidity Facility (FLPP) for Low-Income Households (MBR) to facilitate the purchase of subsidized housing from developers. This program is a collaborative initiative between the Ministry of Public Works and Public Housing and Bank Sulteng.As of December 31, 2024, and 2025, Bank Sulteng maintained full compliance with the Legal Lending Limit (BMPK) regulations, with no violations or excesses reported for either Third Parties or Related Parties, in accordance with the provisions set by Bank Indonesia.

FIXED ASSETS

Bank Sulteng's Fixed Assets in 2025 were recorded at IDR 146,648 million, representing an 8.26% increase compared to the IDR 135,454 million recorded in 2024. This growth was primarily driven by a 30.31% increase in Right-of-Use Assets, a 12.54% rise in Office Furniture, and a 3.63% increase in Office Machinery. Meanwhile, most other fixed assets—including Land, Office Buildings, Official Residences, and Vehicles—remained relatively stable in value.

Fixed Assets owned by Bank Sulteng, comprising buildings, vehicles, and certain inventories, are insured against potential risks of fire, accidents, and other perils. The total sum insured as of December 31, 2025, and 2024, amounted to IDR 117,011,232,407 and IDR 264,928,820,428, respectively, insured through PT Asuransi Eka Lloyd. Management believes that the insurance coverage is adequate to mitigate potential losses arising from natural disasters, such as earthquakes and fires.

Tabel Aset Tetap
Fixed Assets Table

(dalam jutaan Rupiah
(in million rupiah

ASET TETAP	2025	2024	Pertumbuhan		FIXED ASSETS
			Rp	%	
1	2	3	4 = (2 - 3)	5 = (4 / 3)	
Tanah	15.675	15.675	0	0,00	Land
Bangunan Kantor	73.446	73.446	0	0,00	Office building
Rumah Dinas	11.243	11.243	0	0,00	Official residence
Kendaraan	185	185	0	0,00	Vehicle
Mesin Kantor	10.906	10.524	382	3,63	Office Machines
Perabot Kantor	23.673	21.036	2.637	12,54	Office Furniture
Perabot Rumah Dinas	216	186	30	16,13	Official Home Furniture
Aset Hak Guna	70.569	54.154	16.414	30,31	Use Rights Assets
Jumlah Aset Tetap (Harga Perolehan)	**205.913**	**186.449**	**19.464**	**10,44**	Total Fixed Assets (Acquisition Price)
Aset Dalam Penyelesaian	26.063	6.733	19.330	287,09	Assets in Progress
Jumlah Aset Tetap (Harga Perolehan)	**231.976**	**193.182**	**38.794**	**20,08**	Total Fixed Assets (Acquisition Price)
Akumulasi Penyusutan:					Accumulated Depreciation of Fixed Assets:
Bangunan Kantor	(30.103)	(26.424)	(3.679)	13,92	Office building
Rumah Dinas	(6.130)	(5.251)	(879)	16,74	Official residence
Kendaraan	(176)	(159)	(17)	10,69	Vehicle
Mesin Kantor	(9.208)	(8.321)	(887)	10,66	Office Machines
Perabot Kantor	(18.154)	(15.635)	(2.519)	16,11	Office Furniture
Perabot Rumah Dinas	(183)	(168)	(15)	8,93	Official Home Furniture
Aset Lainnya	(21.373)	(1.771)	(19.602)	1106,83	Other Assets
Jumlah Akumulasi Penyusutan	(85.328)	(57.728)	(27.600)	47,81	Total Accumulated Depreciation of Fixed Assets
NILAI BUKU ASET TETAP	**146.648**	**135.454**	**11.194**	**8,26**	BOOK VALUE OF FIXED ASSETS

Aset Tetap Dalam Penyelesaian yang dimiliki oleh Bank Sulteng pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp26.063 juta dan Rp6.733 juta, yang merupakan Bangunan Kantor dan inventaris dalam penyelesaian yang masih berada dalam tahap pengerjaan. Manajemen Bank Sulteng menilai tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas Aset Tetap tersebut, serta tidak terdapat Aset Tetap yang dijaminkan oleh Bank Sulteng pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Bank Sulteng's Construction in Progress (Fixed Assets under Construction) as of December 31, 2025, and 2024, amounted to IDR 26,063 million and IDR 6,733 million, respectively, representing office buildings and inventory currently under development. Management assesses that there are no indications of impairment for these fixed assets. Furthermore, no fixed assets were pledged as collateral by Bank Sulteng as of December 31, 2025, and 2024.

ASET TAK BERWUJUD

Aset Tak Berwujud Bank Sulteng pada tahun 2025 tercatat sama dengan tahun 2024, yaitu sebesar Rp5.491 juta. Kondisi ini disebabkan karena Bank Sulteng tidak melakukan penambahan aset dalam bentuk Aset Tak Berwujud selama tahun 2025.

INTANGIBLE ASSETS

Bank Sulteng's Intangible Assets in 2025 remained unchanged from 2024, recorded at IDR 5,491 million. This stable position is due to the fact that the Bank did not undertake any additional acquisitions or development of intangible assets throughout the 2025 fiscal year.

Tabel Aset Tak Berwujud
Intangible Assets

(dalam jutaan Rupiah
(in million rupiah

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp	%	
1	2	3	4 = (2 - 3)	5 = (4 / 3)	
Aset Tak Berwujud	5.491	5.491	0	0,00	Intangible Assets

Beban Pajak Dibayar Dimuka dan Aset Lain-lain

Beban Dibayar Dimuka dan Aset Lain-lain Bank Sulteng pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp136.382 juta, menurun 11,41% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp153.943 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya Persediaan, Tagihan Link Telkom, dan Aset Lainnya, meskipun sebagian penurunan tersebut tertahan oleh peningkatan Beban Dibayar Dimuka dan Tagihan ATM Bersama.

Prepaid Tax Expenses and Other Assets

In 2025, Bank Sulteng's Prepaid Expenses and Other Assets were recorded at IDR 136,382 million, representing an 11.41% decrease compared to the IDR 153,943 million recorded in 2024. This decline was primarily driven by a reduction in Inventories, Telkom Link Receivables, and Other Assets. However, the overall decrease was partially offset by an increase in Prepaid Expenses and ATM Bersama Receivables.

Tabel Beban Pajak Dibayar Dimuka dan Aset Lain-lain
Table of Prepaid Tax Expenses and Other Assets

(dalam jutaan Rupiah
(in million rupiah

BEBAN DIBAYAR DIMUKA DAN ASET LAIN-LAIN	2025	2024	Pertumbuhan Growth		PREPAIRED EXPENSES AND OTHER ASSETS
			Rp	%	
1	2	3	4 = (2 - 3)	5 = (4 / 3)	
Persediaan	4.128	9.632	(5.504)	(57,14)	Supply
Beban Dibayar Dimuka	14.292	8.983	5.309	59,10	Prepaid Expenses
Tagihan ATM Bersama	45.037	27.381	17.656	64,48	Joint ATM Bill
Tagihan ATM Bersama (Transfer)	-	-	-	-	ATM Bersama Transfer Payables
Tagihan Klaim Asuransi - Bersih	12.003	0	12.003	0,00	Insurance Claims Receivable
Tagihan Link Telkom	13	44.220	(44.207)	(99,97)	Telkom Link Bill
Pendapatan Yang Masih Akan Diterima	60.644	58.162	2.482	4,27	Income That Will Still Be Received
Aset Lainnya	262	3.118	(2.856)	(91,60)	Other Assets
Panjar Uang Muka PPh Pasal 25	-	2.439	-	-	Advance Payment for Income Tax Article 25
Panjar Uang Muka Pihak Ketiga	3	8	(5)	(62,50)	Advance Payment for Income Tax Article 25
Jumlah	**136.382**	**153.943**	**(17.561)**	**(11,41)**	

LIABILITAS

Liabilitas Bank Sulteng pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp11.937.888 juta, meningkat 5,40% dibandingkan tahun 2024. Kenaikan ini terutama didorong oleh peningkatan Pinjaman yang Diterima dan Simpanan dari Bank Lain, meskipun terjadi penurunan pada Simpanan Nasabah.

LIABILITIES

In 2025, Bank Sulteng's Total Liabilities were recorded at IDR 11,937,888 million, representing a 5.40% increase compared to 2024. This growth was primarily driven by an increase in Borrowings and Deposits from Other Banks, which offset the decline observed in Customer Deposits (Third-Party Funds).

Tabel Liabilitas
Liability Table

(dalam jutaan Rupiah
(in million rupiah

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp	%	
1	2	3	4 = (2 - 3)	5 = (4 / 3)	
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Liabilitas Segera	636.661	569.640	67.021	11,77	Immediate Liabilities
Simpanan Nasabah					Customer Savings
Pihak Berelasi	35.704	82.458	(46.754)	(56,70)	Related Parties
Pihak Ketiga	8.690.865	9.176.032	(485.167)	(5,29)	Third party
Simpanan dari Bank Lain	1.275.000	530.000	745.000	140,57	Deposits from Other Banks
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	**10.638.230**	**10.358.130**	**280.100**	**2,70**	TOTAL CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Pinjaman Yang Diterima	1.220.535	897.344	323.191	36,02	Loans Received
Utang Pajak	9.161	8.161	1.000	12,25	Tax debt
Liabilitas Imbalan Kerja	55.645	50.175	5.470	10,90	Employee Benefits Liabilities
Beban yang Masih Harus Dibayar dan Liabilitas Lain-lain	14.318	11.990	2.328	19,42	Accrued Expenses and Other Liabilities
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	**1.299.659**	**967.670**	**331.989**	**34,31**	**TOTAL CURRENT LIABILITIES**
JUMLAH LIABILITAS	**11.937.889**	**11.325.800**	**612.089**	**5,40**	**TOTAL LIABILITIES**

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Liabilitas Jangka Pendek Bank Sulteng pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp10.638.230 juta, meningkat sebesar 2,70% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp10.358.130 juta. Kenaikan tersebut terutama didorong oleh peningkatan Simpanan dari Bank Lain sebesar 140,57%dan Liabilitas Segera sebesar 11,77%, meskipun Simpanan Nasabah, baik dari Pihak Berelasi maupun Pihak Ketiga, mengalami penurunan.

SHORT-TERM LIABILITIES

In 2025, Bank Sulteng's Short-Term Liabilities were recorded at IDR 10,638,230 million, representing a 2.70% increase compared to the IDR 10,358,130 million reported in 2024. This growth was primarily driven by a 140.57% surge in Deposits from Other Banks and an 11.77% increase in Obligations Due Immediately. These increases effectively offset the decline in Customer Deposits (Third-Party Funds) from both Related Parties and Third Parties.

Tabel Liabilitas Jangka Pendek
Table of Current Liabilities

(dalam jutaan Rupiah
(in million rupiah

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp	%	
1	2	3	4 = (2 - 3)	5 = (4 / 3)	
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Liabilitas Segera	636.661	569.640	67.021	11,77	Immediate Liabilities
Simpanan Nasabah					Customer Deposits
Pihak Berelasi	35.704	82.458	(46.754)	(56,70)	Related Parties
Pihak Ketiga	8.690.865	9.176.032	(485.167)	(5,29)	Third Parties
Simpanan dari Bank Lain	1.275.000	530.000	745.000	140,57	Deposits from Other Banks
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	**10.638.230**	**10.358.130**	**280.100**	**2,70**	**TOTAL CURRENT LIABILITIES**

LIABILITAS SEGERA

Liabilitas Segera merupakan kewajiban Bank Sulteng kepada pihak lain yang harus segera dibayarkan sesuai dengan instruksi pemberi amanat atau perjanjian yang telah ditetapkan. Liabilitas Segera meliputi kiriman uang, dana titipan, dana yang telah jatuh tempo namun belum diambil oleh nasabah, transaksi kliring, kewajiban kepada pihak ketiga, serta kewajiban pemungutan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh).

Liabilitas Segera Bank Sulteng pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp636.661 juta, meningkat sebesar 11,77% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp569.640 juta. Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan Dana Titipan sebesar 538,65% serta Kewajiban atas Surat Berharga Repo yang meningkat sebesar 53,16%. Di sisi lain, penurunan terjadi pada Kiriman Uang dan Titipan Pajak Penghasilan, namun tidak menghambat kenaikan Liabilitas Segera secara keseluruhan.

OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY

Obligations Due Immediately represent Bank Sulteng's liabilities to other parties that must be settled promptly in accordance with the instructions of the principal or established agreements. These obligations include remittances, escrow funds (deposited funds), matured funds that remain unclaimed by customers, clearing transactions, liabilities to third parties, and obligations related to the collection and withholding of Income Tax (PPh).

In 2025, Bank Sulteng's Obligations Due Immediately were recorded at IDR 636,661 million, an increase of 11.77% compared to the IDR 569,640 million recorded in 2024. This growth was primarily driven by a 538.65% surge in Escrow Funds and a 53.16% increase in Repurchase Agreement (Repo) Liabilities. Conversely, while there were declines in Remittances and Withholding Tax Payables, these did not offset the overall upward trend in Obligations Due Immediately.

Tabel Liabilitas Segera
Immediate Liabilities Table

(dalam jutaan Rupiah
(in million rupiah

LIABILITAS SEGERA	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp	%	
1	2	3	4 = (2 - 3)	5 = (4 / 3)	
Kiriman Uang	62.019	195.655	(133.636)	(68,30)	Money Transfer
Dana Titipan	117.237	18.357	98.880	538,65	Trust Fund
Titipan Pajak Penghasilan	1.978	4.784	(2.806)	(58,65)	Income Tax Deposit
Kewajiban Pada Pihak Ketiga	116.318	110.036	6.282	5,71	Liabilities to Third Parties
Standing Instruction (SI) Gaji	116	1.106	(991)	(89,52)	Standing Instruction (SI) Salary
Standing Instruction (SI) Kredit	114	106	8	7,55	Standing Instruction (SI) Credit
Angsuran Asset Sales	342	341	1	0,29	Asset Sales Installments
Setoran Deposito Jatuh Tempo	-	-	-	-	Deposit Due
Cadangan Remunerasi	1.144	888	256	28,83	Remuneration Reserve
Liabilitas Hak Aset Guna	48.979	50.061	(1.082)	(2,16)	Use Asset Rights Liabilities
Kewajiban atas Surat Berharga Repo	288.414	188.305	100.109	53,16	Obligations for Repo Securities
Jumlah Liabilitas Segera	**636.661**	**569.640**	**67.021**	**11,77**	Amount of Immediate Liabilities

SIMPANAN NASABAH

Simpanan Nasabah Bank Sulteng pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp8.726.568 juta, menurun 5,75% dibandingkan tahun 2024, terutama disebabkan oleh penurunan Simpanan Giro, meskipun Deposito Pihak Ketiga masih mengalami peningkatan.

CUSTOMER DEPOSITS

In 2025, Bank Sulteng's Customer Deposits (Third-Party Funds) were recorded at IDR 8,726,568 million, representing a 5.75% decrease compared to 2024. This decline was primarily attributable to a contraction in Demand Deposits (Giro), although Third-Party Time Deposits continued to show growth.

Tabel Simpanan Nasabah
Customer Savings Table

(dalam jutaan Rupiah
(in million rupiah

SIMPANAN NASABAH	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Customer Deposits
			Rp	%	
1	2	3	4 = (2 - 3)	5 = (4 / 3)	
PIHAK BERELASI					RELATED PARTIES
Giro	33.587	79.157	(45.570)	(57,57)	Giro
Tabungan	2.116	3.302	(1.186)	(35,92)	Savings
JUMLAH PIHAK BERELASI	**35.703**	**82.459**	**(46.756)**	**(56,70)**	NUMBER OF RELATED PARTIES
PIHAK KETIGA					THIRD PARTY
Giro	1.944.377	2.706.066	(761.689)	(28,15)	Giro
Tabungan	2.180.666	2.151.524	29.142	1.35	Savings
Deposito	4.565.822	4.318.441	247.381	5,73	Deposit
JUMLAH SIMPANAN DARI PIHAK KETIGA	**8.690.865**	**9.176.031**	**(485.166)**	**(5,29)**	TOTAL OF SAVINGS FROM THIRD PARTIES
JUMLAH SIMPANAN NASABAH	**8.726.568**	**9.258.490**	**(531.922)**	**(5,75)**	TOTAL OF CUSTOMER SAVINGS

SIMPANAN DARI BANK LAIN

Simpanan dari Bank Lain Bank Sulteng pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp1.275.000 juta, meningkat signifikan sebesar 140,57% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp530.000 juta. Peningkatan tersebut sepenuhnya berasal dari kenaikan Call Money. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat Simpanan dari Bank Lain yang diblokir atau dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan.

DEPOSITS FROM OTHER BANKS

In 2025, Bank Sulteng's Deposits from Other Banks were recorded at IDR 1,275,000 million, representing a significant increase of 140.57% compared to the IDR 530,000 million reported in 2024. This growth was entirely driven by an increase in Interbank Call Money. As of December 31, 2025, and 2024, there were no deposits from other banks that were blocked or pledged as collateral for loans granted.

Tabel Simpanan dari Bank Lain
Table of Deposits from Other Banks

(dalam jutaan Rupiah
(in million rupiah

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp	%	
1	2	3	4 = (2 - 3)	5 = (4 / 3)	
Call Money	1.275.000	530.000	745.000	140,57	Call Money
Jumlah	**1.275.000**	**530.000**	**745.000**	**140,57**	**Total**

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas Jangka Panjang Bank Sulteng pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp1.299.658 juta, meningkat sebesar 34,31% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp967.670 juta. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan Pinjaman yang Diterima sebesar 36,02%, serta peningkatan Liabilitas Imbalan Kerja dan Beban yang Masih Harus Dibayar. Secara keseluruhan, jumlah Liabilitas Bank Sulteng pada tahun 2025 meningkat sebesar 5,40% menjadi Rp11.937.888 juta.

LONG-TERM LIABILITIES

In 2025, Bank Sulteng's Long-Term Liabilities were recorded at IDR 1,299,658 million, representing a 34.31% increase compared to the IDR 967,670 million reported in 2024. This growth was primarily driven by a 36.02% rise in Borrowings, alongside increases in Employee Benefit Liabilities and Accrued Expenses. Overall, Bank Sulteng's Total Liabilities in 2025 rose by 5.40% to reach IDR 11,937,888 million.

Tabel Liabilitas Jangka Panjang
Long-Term Liabilities Table

(dalam jutaan Rupiah
(in million rupiah

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp	%	
1	2	3	4 = (2 - 3)	5 = (4 / 3)	
LIABILITAS JANGKA PANJANG					Long-Term Liabilities
Pinjaman Yang Diterima	1.220.535	897.344	323.191	36,02	Borrowings / Loans Received
Utang Pajak	9.161	8.161	1.000	12,25	Taxes Payable
Liabilitas Imbalan Kerja	55.644	50.175	5.469	10,90	Employee Benefits Liabilities
Beban yang Masih Harus Dibayar dan Liabilitas Lain-lain	14.318	11.990	2.328	19,42	Accrued Expenses and Other Liabilities
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	**1.299.658**	**967.670**	**331.988**	**34,31**	Total Long-Term Liabilities
JUMLAH LIABILITAS	**11.937.888**	**11.325.800**	**612.088**	**5,40**	**Total Liabilities**

PINJAMAN YANG DITERIMA

Pinjaman Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) merupakan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan pengelolaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pinjaman tersebut bersumber dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 29/PKS/BP-TPR/IV/12/2024 dan Nomor 1211/BPD-ST/DIR/PKS/KDT/X/2024 tanggal 23 Desember 2024, terkait penyaluran dana FLPP melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera bagi MBR. Perjanjian Kerja Sama tersebut berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, dengan kewajiban penyetoran pokok kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang disesuaikan dengan jangka waktu kredit kepada debitur. Selain itu, Bank Sulteng juga memperoleh Pinjaman Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang bersumber dari PT

LOAN RECEIVED

The Housing Financing Liquidity Facility Loan (FLPP) is a housing financing liquidity facility intended for low-income communities (MBR), managed by the Ministry of Public Works and Public Housing. The loan is sourced from the Public Housing Savings Management Agency based on the Cooperation Agreement between the Public Housing Savings Management Agency and PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Number 29/PKS/BP-TPR/IV/12/2024 and Number 1211/BPD-ST/DIR/PKS/KDT/X/2024 dated December 23, 2024, related to the distribution of FLPP funds through the Prosperous Home Ownership Credit for MBR. The Cooperation Agreement is valid for a period of 1 (one) year, starting from January 1, 2025 to December 31, 2025, with the obligation to deposit principal to the Ministry of Public Works and Public Housing adjusted to the credit period to the debtor. In addition, Bank Sulteng also obtained a Housing Financing Liquidity Facility Loan sourced from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) in order to distribute Prosperous Home Ownership Credit for low-income communities. The facility was provided based on the Cooperation

Sarana Multigriya Finansial (Persero) dalam rangka penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Fasilitas tersebut diberikan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 058/FLPP/PP/SMF-BPD.SULTENGIII/2025 dan Nomor 305/BPD-ST/PKS/KDT/XVII/2025 tanggal 13 Maret 2025.

Agreement between PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) and PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Number 058/FLPP/PP/SMF-BPD.SULTENGIII/2025 and Number 305/BPD-ST/PKS/KDT/XVII/2025 dated March 13, 2025.

Pinjaman yang Diterima Bank Sulteng pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp1.220.535 juta, meningkat sebesar Rp323.191 juta atau 36,02% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp897.344 juta. Peningkatan tersebut terutama berasal dari Pinjaman yang Diterima dari PT Sarana Multigriya Financial (SMF) yang meningkat sebesar Rp325.860 juta atau 40,29%, meskipun Pinjaman dari BP Tapera mengalami penurunan sebesar Rp2.669 juta atau 3,01%.

In 2025, Bank Sulteng's Borrowings were recorded at IDR 1,220,535 million, an increase of IDR 323,191 million or 36.02% compared to the IDR 897,344 million reported in 2024. This growth was primarily driven by borrowings from PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), which rose by IDR 325,860 million or 40.29%, effectively offsetting a minor decline in borrowings from BP Tapera of IDR 2,669 million or 3.01%.

Tabel Pinjaman yang Diterima
Table of Loans Received

(dalam jutaan Rupiah
(in million rupiah

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp	%	
1	2	3	4 = (2 - 3)	5 = (4 / 3)	
BP Tapera	85.939	88.608	(2.669)	(3,01)	BP Tapera
PT. Sarana Multigriya Financial (SMF)	1.134.596	808.736	325.860	40,29	PT. Sarana Multigriya Financial (SMF)
Jumlah	**1.220.535**	**897.344**	**323.191**	**36,02**	**Total**

UTANG PAJAK

Utang Pajak Bank Sulteng pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp9.161 juta, meningkat sebesar Rp1.000 juta atau 12,25% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp8.161 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Pajak Penghasilan Kini sebesar 11,22%, meskipun Angsuran Pajak Penghasilan (Pasal 25) juga mengalami peningkatan kewajiban sebesar 11,11%.

TAX PAYABLES

In 2025, Bank Sulteng's Tax Payables were recorded at IDR 9,161 million, representing an increase of IDR 1,000 million or 12.25% compared to the IDR 8,161 million reported in 2024. This increase was primarily driven by an 11.22% rise in Current Income Tax, although obligations for Income Tax Installments (Article 25) also increased by 11.11%.

Tabel Utang Pajak
Tax Payable Table

(dalam jutaan Rupiah
(in million rupiah

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp	%	
1	2	3	4 = (2 - 3)	5 = (4 / 3)	
Pajak Penghasilan Kini	89.478	80.449	9.029	11,22	Current Income Tax
Angsuran Pajak Penghasilan (Pasal 25)	(80.317)	(72.288)	(8.029)	11,11	Income Tax Installments (Article 25)
Jumlah Utang Pajak	**9.161**	**8.161**	**1.000**	**12,25**	

BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR DAN LIABILITAS LAIN-LAIN

Beban yang Masih Harus Dibayar dan Liabilitas Lain-lain Bank Sulteng pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp14.318 juta, meningkat sebesar Rp2.328 juta atau 19,42% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp11.990 juta. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan Bunga yang Masih Harus Dibayar sebesar 14,81% serta CKPN Rekening Administratif yang meningkat sebesar 58,04%, sementara pos lainnya relatif tidak material.

ACCRUED EXPENSES AND OTHER LIABILITIES

In 2025, Bank Sulteng's Accrued Expenses and Other Liabilities were recorded at IDR 14,318 million, representing an increase of IDR 2,328 million or 19.42% compared to the IDR 11,990 million reported in 2024. This growth was primarily driven by a 14.81% increase in Accrued Interest and a 58.04% rise in Allowance for Impairment Losses (CKPN) on Off-Balance Sheet Accounts. Other line items remained relatively immaterial.

Tabel Beban yang Masih Harus Dibayar dan Liabilitas Lain-Lain
Table of Accrued Expenses and Other Liabilities

(dalam jutaan Rupiah
(in million rupiah

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp	%	
1	2	3	4 = (2 - 3)	5 = (4 / 3)	
Jaminan Tender	-	-	-	-	Tender Guarantee
Bunga Yang Masih Harus Dibayar	12.418	10.817	1.601	14,80	Accrued Interest
CKPN Rekening Administratif (Longgar Tarik)	1.827	1.156	671	58,04	Administrative Account CKPN (Loose Withdrawals)
Lain-lain	73	17	56	329,41	Etc
Jumlah Beban Yang Masih Harus Dibayar Dan Liabilitas Lain-Lain	**14.318**	**11.990**	**2.328**	**19,42**	Amount of Accrued Expenses and Other Liabilities

EKUITAS

Ekuitas Bank Sulteng pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp1.711.055 juta, meningkat sebesar Rp114.007 juta atau 7,14% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp1.597.048 juta. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan Dana Setoran Modal sebesar 249,55% serta pertumbuhan Saldo Laba, baik yang telah ditentukan penggunaannya maupun yang belum ditentukan penggunaannya.

EQUITY

In 2025, Bank Sulteng's Total Equity was recorded at IDR 1,711,055 million, representing an increase of IDR 114,007 million or 7.14% compared to the IDR 1,597,048 million reported in 2024. This growth was primarily driven by a 249.55% surge in Capital Stock Subscriptions (Capital Deposit Funds), as well as growth in Retained Earnings, both appropriated and unappropriated.

Tabel Ekuitas
Equity Table

(dalam jutaan Rupiah
(in million rupiah

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp	%	
1	2	3	4 = (2 - 3)	5 = (4 / 3)	
Modal Saham	491.970	491.970	0	0,00	Capital stock
Agio Saham	202.901	202.901	0	0,00	Share Premium
Dana Setoran Modal	43.226	12.366	30.860	249,56	Capital Deposit Funds
Komponen Ekuitas Lainnya:					Other equity components:
Pendapatan Komprehensif Lainnya	10.703	10.231	472	4,61	Other Comprehensive Income
Saldo Laba					Retain earning
Telah ditentukan penggunaannya	684.678	637.348	47.330	7,43	Its use has been determined
Belum di tentukan penggunaannya	277.576	242.232	35.344	14,59	Its use has not been determined
Jumlah Ekuitas	**1.711.055**	**1.597.048**	**114.006**	**7,14**	Total Equity

MODAL SAHAM

Modal yang Ditempatkan dan Disetor Penuh Bank Sulteng pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp491.970 juta, sama dengan posisi tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan tidak adanya perubahan modal disetor selama tahun 2025, sehingga struktur permodalan Bank Sulteng tetap stabil dalam mendukung kegiatan operasional dan posisi keuangan bank.

SHARE CAPITAL

Bank Sulteng's Issued and Fully Paid-in Capital in 2025 was recorded at IDR 491,970 million, remaining unchanged from the 2024 position. This indicates that there were no changes to the paid-in capital throughout 2025, ensuring that Bank Sulteng's capital structure remained stable in supporting its operational activities and overall financial position.

Tabel Modal Saham
Share Capital Table

(dalam jutaan Rupiah
(in million rupiah

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp	%	
1	2	3	4 = (2 - 3)	5 = (4 / 3)	
Modal Ditempatkan dan disetor penuh	491.970	491.970	0	0,00	Issued and fully deposited capital
Jumlah	**491.970**	**491.970**	0	0,00	Total

AGIO SAHAM

Agio Saham Bank Sulteng pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp202.901 juta, sama dengan posisi tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan tidak adanya tambahan agio saham selama tahun 2025, sehingga saldo agio saham tetap stabil.

ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (SHARE PREMIUM)

Bank Sulteng's Additional Paid-in Capital (Share Premium) in 2025 was recorded at IDR 202,901 million, remaining consistent with the 2024 position. This indicates that there were no further share premium additions throughout 2025, resulting in a stable share premium balance.

Tabel Agio Saham
Share Agio Table

(dalam jutaan Rupiah
(in million rupiah

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp	%	
1	2	3	4 = (2 - 3)	5 = (4 / 3)	
Agio Saham	202.901	202.901	-	-	Share Agio
Jumlah	**202.901**	**202.901**	**-**	**-**	Total

PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA

Pendapatan Komprehensif Lainnya Bank Sulteng pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp10.703 juta, meningkat sebesar Rp472 juta atau 4,61% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp10.231 juta. Pendapatan Komprehensif Lainnya tersebut seluruhnya berasal dari Keuntungan Aktuarial Program Manfaat Pasti, yaitu keuntungan atau kerugian yang timbul dari penyesuaian dan perubahan asumsi aktuaria atas selisih yang melebihi batas 10% dari nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar aset program atau nilai kini liabilitas imbalan pasti, yang diamortisasi dan diakui selama estimasi rata-rata sisa masa kerja karyawan.

OTHER COMPREHENSIVE INCOME (OCI)

In 2025, Bank Sulteng's Other Comprehensive Income was recorded at IDR 10,703 million, representing an increase of IDR 472 million or 4.61% compared to the IDR 10,231 million reported in 2024. This Other Comprehensive Income was entirely derived from Actuarial Gains on Defined Benefit Plans, specifically gains or losses arising from adjustments and changes in actuarial assumptions. These reflect differences exceeding the 10% threshold of the greater of the fair value of plan assets or the present value of the defined benefit obligation, which are amortized and recognized over the estimated average remaining service life of employees.

Tabel Pendapatan Komprehensif Lainnya
Other Comprehensive Income Tables

(dalam jutaan Rupiah
(in million rupiah

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp	%	
1	2	3	4 = (2 - 3)	5 = (4 / 3)	
Keuntungan (Kerugian) Nilai Wajar Surat Berharga	-	-	-	-	Gain (Loss) on Fair Value of Securities
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Program Manfaat Pasti	10.703	10.231	472	4,61	Actuarial Gains (Losses) of Defined Benefit Plans
Jumlah	**10.703**	**10.231**	**472**	**4,61**	

SALDO LABA

Saldo Laba Bank Sulteng pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp962.254 juta, meningkat sebesar Rp82.674 juta atau 9,40% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp879.580 juta. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya sebesar 7,43% serta saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya yang meningkat sebesar 14,59%.

RETAINED EARNINGS

In 2025, Bank Sulteng's Retained Earnings were recorded at IDR 962,254 million, representing an increase of IDR 82,674 million or 9.40% compared to the IDR 879,580 million reported in 2024. This growth was primarily driven by a 7.43% increase in appropriated retained earnings, as well as a 14.59% rise in unappropriated retained earnings.

Tabel Saldo Laba
Retained Earnings Table

(dalam jutaan Rupiah
(in million rupiah

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp	%	
1	2	3	4 = (2 - 3)	5 = (4 / 3)	
Telah ditentukan penggunaannya	684.678	637.348	47.330	7,43	Its use has been determined
Belum di tentukan penggunaannya	277.576	242.232	35.344	14,59	Its use has not been determined
Jumlah saldo laba	**962.254**	**879.580**	**82.674**	**9,40**	

Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Table of Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income

(dalam jutaan Rupiah
(in million rupiah

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growt		Description
1	2	3	4 = (2 - 3)	5 = (4 / 3)	
Pendapatan Dan Beban Operasional					Operating Income and Expenses
Pendapatan Bunga	1.239.532	1.083.149	156.383	14,44	Interest income
Beban Bunga	(446.729)	(405.566)	(41.163)	10,15	Interest expense
Pendapatan Bunga - Bersih	792.803	677.583	115.220	17,00	Net interest income
Pendapatan Operasional Lainnya	78.206	117.008	(38.802)	(33,16)	Other Operating Income

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growt		Description
1	2	3	4 = (2 - 3)	5 = (4 / 3)	
Beban Operasional					Operational Expenses
Penyisihan/(Pemulihan) CKPN	25.747	15.128	10.619	70,19	Allowance/(Recovery) of CKPN
Administrasi dan Umum	163.001	161.465	1.536	0,95	Administration and General
Tenaga Kerja	285.134	267.429	17.705	6,62	Labor
Lainnya	32.430	32.232	198	0,61	Other
Jumlah Beban Operasional	506.312	476.255	30.057	6,31	Total Operational Expenses
Laba Operasional	364.697	318.337	46.360	14,56	Operational profit
Pendapatan Dan Beban Non Operasional					Non-Operating Income and (Expenses).
Pendapatan Non Operasional	2.307	4.228	(1.921)	(45,44)	Non-Operating Income
Beban Non Operasional	(5.747)	(1.907)	(3.840)	201,36	Non-Operating Expenses
Jumlah Pendapatan dan Beban Non Operasional	(3.440)	2.321	(5.761)	(248,21)	Total Non-Operating Income and (Expenses).
Laba Bersih Sebelum Pajak	361.257	320.658	40.599	12,66	Net Profit Before Tax
Beban Pajak Penghasilan					Income Tax Expense
Beban Pajak Kini	89.478	80.449	9.029	11,22	Current Tax Burden
(Manfaat)/Beban Pajak Tangguhan	(5.797)	(2.023)	(3.774)	186,55	(Benefits)/Deferred Tax Expenses
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	83.681	78.426	5.255	6,70	Total Income Tax Expense
Laba Tahun Berjalan	277.576	242.232	35.344	14,59	Current year profit
Pendapatan Komprehensif Lain					Other Comprehensive Income
Keuntungan/(Kerugian) Aktuarial	606	(5.474)	6.080	(111,07)	Actuarial Gains/(Losses)
Pajak Penghasilan terkait dengan kompo nen OCI	(133)	(1.204)	1.071	(88,95)	Income Tax is related to the OCI component
(Kerugian)/Pendapatan Komprehensif Lain Periode Berjalan	472	(6.678)	7.150	(107,07)	(Loss)/Other Comprehensive Income for the Current Period
Total Laba Komprehensif	**278.048**	**235.553**	**42.495**	**18,04**	Total Comprehensive Profit

PENDAPATAN BUNGA

Pendapatan Bunga Bank Sulteng pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp1.239.532 juta, meningkat sebesar Rp156.383 juta atau 14,44% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp1.083.149 juta. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan Pendapatan Bunga dari Penempatan pada Bank Indonesia yang tumbuh signifikan sebesar 204,34% serta peningkatan Pendapatan Bunga Kredit yang Diberikan sebesar 9,17%. Sementara itu, Pendapatan Bunga dari Penempatan pada Bank Lain dan Pihak Ketiga bukan Bank mengalami penurunan.

INTEREST INCOME

In 2025, Bank Sulteng's Interest Income was recorded at IDR 1,239,532 million, representing an increase of IDR 156,383 million or 14.44% compared to the IDR 1,083,149 million reported in 2024. This growth was primarily driven by a significant 204.34% surge in Interest Income from Placements with Bank Indonesia, as well as a 9.17% increase in Interest Income from Loans Granted. Conversely, interest income from Placements with Other Banks and Non-Bank Third Parties experienced a decline.

Tabel Beban Bunga
Interest Expense Table

(dalam jutaan Rupiah
(in million rupiah

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp	%	
1	2	3	4 = (2 - 3)	5 = (4 / 3)	
Penempatan pada Bank Indonesia	157.762	51.837	105.924	204,34	Placement with Bank Indonesia
Penempatan pada Bank Lain	6.773	16.961	(10.188)	(60,07)	Placement with Another Bank
Kredit Yang Diberikan	976.207	894.224	81.983	9,17	Credits Given
Pihak Ketiga bukan Bank (SBN)	98.790	120.127	(21.337)	(17,76)	Third Party is not a Bank
Total Pendapatan Bunga	**1.239.532**	**1.083.149**	**156.383**	**14,44**	Total Interest Income

BEBAN BUNGA

Beban Bunga Bank Sulteng pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp446.729 juta, meningkat sebesar Rp41.163 juta atau 10,15% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp405.566 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan Beban Bunga Non Bank sebesar 14,55%, khususnya pada Deposito Berjangka yang meningkat sebesar 10,44% serta pos Lainnya yang tumbuh signifikan sebesar 39,80%. Sementara itu, Beban Bunga dari Bank Lain mengalami penurunan sebesar 13,43% seiring dengan turunnya beban Call Money dan pos Lainnya.

INTEREST EXPENSE

In 2025, Bank Sulteng's Interest Expense was recorded at IDR 446,729 million, representing an increase of IDR 41,163 million or 10.15% compared to the IDR 405,566 million reported in 2024. This increase was primarily driven by a 14.55% rise in Non-Bank Interest Expense, particularly from Time Deposits, which grew by 10.44%, and a significant 39.80% growth in other interest-related items. Conversely, Interest Expense from Other Banks declined by 13.43%, in line with the reduction in Interbank Call Money expenses and other associated costs.

Tabel Beban Bunga
Interest Expense Table

(dalam jutaan Rupiah
(in million rupiah

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp	%	
1	2	3	4 = (2 - 3)	5 = (4 / 3)	
Bank Indonesia					Bank Indonesia
Lending Facility Bank Indonesia	-	-	-	-	Bank Indonesia Lending Facility
Jumlah Beban Bunga Bank Indonesia	-	-	-	-	Total Bank Indonesia Interest Expenses
Bank Lain					Other Banks
Call Money	43.731	47.889	(4.158)	(8,68)	Call Money
Deposito Berjangka	2	0	2.00	-	Time deposit
Giro	1	1	0	0,00	Giro
Lainnya	11.531	15.950	(4.419)	(27,71)	Other
Jumlah Beban Bunga Bank Lain	55.265	63.840	(8.575)	(13,43)	Total Interest Expenses from Other Banks
Non Bank					Non-Bank
Giro	43.824	41.459	2.366	5,70	Giro
Tabungan	12.808	11.855	953	8,04	Savings
Deposito Berjangka	257.180	232.866	24.314	10,44	Time deposit
Lainnya	77.651	55.546	22.105	39,80	Other
Jumlah Beban Bunga Non Bank	391.464	341.726	49.738	14,55	Total Non-Bank Interest Expenses
JUMLAH BEBAN BUNGA	**446.729**	**405.566**	**41.163**	**10,15**	TOTAL OF INTEREST EXPENSES

PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

Pendapatan Operasional Lainnya Bank Sulteng pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp78.206 juta, mengalami penurunan sebesar Rp38.802 juta atau 33,16% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp117.008 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya Pendapatan Provisi Kredit sebesar 51,71%, Jasa Administrasi sebesar 30,49%, serta Pendapatan Fee sebesar 37,92%. Namun demikian, penurunan tersebut sebagian tertahan oleh peningkatan pada Penerimaan Pokok Kredit Hapus Buku, Denda Kredit dan Deposito, serta kenaikan signifikan pada pos Lainnya.

OTHER OPERATING INCOME

In 2025, Bank Sulteng's Other Operating Income was recorded at IDR 78,206 million, representing a decrease of IDR 38,802 million or 33.16% compared to the IDR 117,008 million reported in 2024. This decline was primarily driven by a 51.71% reduction in Loan Provision Income, a 30.49% decrease in Administrative Fees, and a 37.92% drop in Fee-Based Income. Nevertheless, the overall decline was partially offset by an increase in Recoveries of Written-off Loans, Loan and Deposit Penalties, and a significant surge in other miscellaneous items.

Tabel Pendapatan Operasional Lainnya
Other Operating Income Table

(dalam jutaan Rupiah
(in million rupiah

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp	%	
1	2	3	4 = (2 - 3)	5 = (4 / 3)	
Pendapatan Provisi Kredit	17.379	35.989	(18.610)	(51,71)	Credit Interest Receipt Write-Off
Penerimaan Bunga Kredit Hapus Buku	84	87	(3)	(3,45)	Receipt of Credit Principal Write-Off
Penerimaan Pokok Kredit Hapus Buku	2.049	1.410	639	45,32	Bank Guarantee Provision
Provisi Bank Garansi	316	557	(241)	(43,27)	Credit and Deposit Fines
Denda Kredit dan Deposito	5.696	4.813	883	18,35	Check and Giro Bilyet Replacement Services
Jasa Penggantian Cek dan Bilyet Giro	362	408	(46)	(11,27)	Administrative Services
Jasa Administrasi	43.258	62.234	(18.976)	(30,49)	Bank Reference/Support Administration Services
Jasa Transfer	576	655	(79)	(12,06)	Transfer Services
Pendapatan Fee	5.958	9.598	(3.640)	(37,92)	Fee Income
Lainnya	2.528	1.257	1.271	101,11	Other
Total Pendapatan Operasional Lainnya	**78.206**	**117.008**	**(38.802)**	**(33,16)**	Total Other Operating Income

BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional Bank Sulteng pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp506.312 juta, meningkat sebesar Rp30.057 juta atau 6,31% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp476.255 juta. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan Beban Tenaga Kerja sebesar 6,62% serta peningkatan Penyisihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai sebesar 70,19%, sementara Beban Administrasi dan Umum serta Beban Lainnya relatif stabil.

OPERATING EXPENSES

In 2025, Bank Sulteng's Operating Expenses were recorded at IDR 506,312 million, representing an increase of IDR 30,057 million or 6.31% compared to the IDR 476,255 million reported in 2024. This growth was primarily driven by a 6.62% rise in Personnel Expenses and a significant 70.19% increase in Allowance for Impairment Losses (CKPN). Meanwhile, General and Administrative Expenses and Other Expenses remained relatively stable.

Tabel Beban Operasional
Operational Expense Table

(dalam jutaan Rupiah
(in million rupiah

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp	%	
1	2	3	4 = (2 - 3)	5 = (4 / 3)	
Penyisihan (Pemulihan) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	25.747	15.128	10.619	70,19	Allowance (Recovery) Allowance for Impairment Losses
Beban Administrasi dan Umum	163.001	161.465	1.536	0,95	Administrative and General Expenses
Beban Tenaga Kerja	285.134	267.429	17.705	6,62	Labor Expenses
Beban Lainnya	32.430	32.232	198	0,61	Other Expenses
Total Beban Operasional	**506.312**	**476.255**	**30.057**	**6,31**	Total Operating Expenses

LABA OPERASIONAL

Laba Operasional Bank Sulteng pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp364.697 juta, meningkat sebesar Rp46.360 juta atau 14,56% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp318.337 juta. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan pendapatan operasional yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan beban operasional sepanjang tahun 2025.

OPERATING PROFIT

In 2025, Bank Sulteng's Operating Profit was recorded at IDR 364,697 million, representing an increase of IDR 46,360 million or 14.56% compared to the IDR 318,337 million reported in 2024. This growth was primarily driven by operating income growth outstripping the rise in operating expenses throughout 2025.

Tabel Laba Operasional
Operating Profit Table

(dalam jutaan Rupiah
(in million rupiah

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp	%	
1	2	3	4 = (2 - 3)	5 = (4 / 3)	
Laba Operasional	364.697	318.337	46.360	14,56	Operating Profit

LABA TAHUN BERJALAN

Laba Tahun Berjalan Bank Sulteng pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp277.576 juta, meningkat sebesar Rp35.344 juta atau 14,59% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp242.232 juta. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan laba operasional sebesar 14,56% seiring dengan pertumbuhan pendapatan operasional yang mampu mengimbangi peningkatan beban operasional sepanjang tahun 2025.

PROFIT FOR THE YEAR

In 2025, Bank Sulteng's Profit for the Year was recorded at IDR 277,576 million, representing an increase of IDR 35,344 million or 14.59% compared to the IDR 242,232 million reported in 2024. This growth was primarily driven by a 14.56% increase in operating profit, as operating income growth effectively outpaced the rise in operating expenses throughout 2025.

Tabel Laba Tahun Berjalan
Current Year Profit Table

(dalam jutaan Rupiah
(in million rupiah

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp	%	
1	2	3	4 = (2 - 3)	5 = (4 / 3)	
Laba Tahun Berjalan	277.576	242.232	35.344	14,59	Current Year Profit

LABA KOMPREHENSIF

Laba Komprehensif Bank Sulteng pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp278.048 juta, meningkat sebesar Rp42.495 juta atau 18,04% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp235.553 juta. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh meningkatnya laba tahun berjalan serta perbaikan pendapatan komprehensif lainnya yang berasal dari keuntungan aktuarial program manfaat pasti.

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME

In 2025, Bank Sulteng's Total Comprehensive Income was recorded at IDR 278,048 million, representing an increase of IDR 42,495 million or 18.04% compared to the IDR 235,553 million reported in 2024. This growth was primarily driven by the increase in profit for the year and an improvement in other comprehensive income arising from actuarial gains on defined benefit plans.

Tabel Laba Komprehensif
Comprehensive Profit Table

(dalam jutaan Rupiah
(in million rupiah

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp	%	
1	2	3	4 = (2 - 3)	5 = (4 / 3)	
Laba Komprehensif	278.048	235.553	42.495	18,04	Comprehensive Profit

LAPORAN ARUS KAS

CASH FLOW STATEMENT

Tabel Laporan Arus Kas
Cash Flow Statement Table

(dalam jutaan Rupiah
(in million rupiah

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp	%	
1	2	3	4 = (2 - 3)	5 = (4 / 3)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					ASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan Bunga	1.237.050	1.083.149	153.901	14,21	Interest Receipts
Pembayaran Bunga	(446.729)	(405.566)	(41.163)	10,15	Interest Payments
Pembayaran Kepada Karyawan	(285.134)	(267.429)	(17.705)	6,62	Payments to Employees
Pembayaran Beban Umum dan Administrasi	(138.359)	(146.336)	7.977	(5,45)	Payments for General and Administrative Expenses
Penerimaan Pendapatan Lainnya	80.513	121.237	(40.724)	(33,59)	Other Income Received
Pembayaran Beban Lainnya	(38.177)	(34.139)	(4.038)	11,83	Other Expenses Paid
Arus Kas	409.165	350.915	58.250	16,60	Cash Flows from Operating Assets and Liabilities
Aset dan Kewajiban Operasi					Decrease/(Increase) in Operating Assets:
Penurunan/(Kenaikan) Aset Operasi:					Loans
- Kredit yang Diberikan	(192.548)	(1.329.729)	1.137.181	(85,52)	Other Assets
- Aset Lain-lain	20.043	(9.930)	29.973	(301,84)	Increase/(Decrease) in Operating Liabilities:
Kenaikan/(Penurunan) Liabilitas Operasi:					Obligations Due Immediately
- Liabilitas Segera	67.021	(1.011.406)	1.078.427	(106,63)	Accrued Expenses
- Beban yang Masih Harus Dibayar	2.328	(1.235)	3.563	(288,50)	Customer Deposits
- Simpanan Nasabah					Related Parties
- Pihak Berelasi	(46.755)	(136.572)	89.817	(65,77)	Third Parties
- Pihak Ketiga	(485.167)	2.171.355	(2.656.522)	(122,34)	Deposits from Other Banks
- Simpanan dari Bank Lain	745.000	(795.000)	1.540.000	(193,71)	Deposits from Other Banks
Pembayaran Pajak Penghasilan	(88.479)	(85.031)	(3.448)	4,05	Income Tax Paid
Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi	**430.609**	**(846.635)**	**1.277.244**	**(150,86)**	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Efek-efek	(1.084.748)	(466.677)	(618.071)	132,44	Marketable Securities
Pembelian Aset Tetap	(38.296)	(27.557)	(10.739)	38,97	Acquisition of Fixed Assets
Pembelian Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0,00	Acquisition of Intangible Assets

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp	%	
1	2	3	4 = (2 - 3)	5 = (4 / 3)	
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	**(1.123.044)**	**(494.234)**	**(628.810)**	**127,23**	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran Pinjaman yang Diterima	323.192	540.680	(217.488)	(40,22)	Repayment of Borrowings
Penambahan Modal Disetor	30.860	26.660	4.200	15,75	Additional Paid-in Capital
Pembayaran Dividen	(169.562)	(154.545)	(15.017)	9,72	Dividend Payments
CSR	(25.339)	(30.599)	5.260	(17,19)	Corporate Social Responsibility (CSR)
Pendapatan Komprehensif	472	(6.678)	7.150	(107,07)	Comprehensive Income
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	**159.623**	**375.518**	**(215.895)**	**(57,49)**	Net Cash Used in Financing Activities
KENAIKAN/(PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	**(532.812)**	**(965.351)**	**432.539**	**(44,81)**	INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	**1.827.710**	**2.793.061**	**(965.351)**	**(34,56)**	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF PERIOD
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	**1.294.898**	**1.827.710**	**(532.812)**	**(29,15)**	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF PERIOD
KAS DAN SETARA KAS, TERDIRI DARI:					CASH AND CASH EQUIVALENTS CONSIST OF:
Kas	154.429	134.176	20.253	15,09	Cash
Giro Bank Indonesia	1.133.091	996.769	136.322	13,68	Current Accounts with Bank Indonesia
Giro Pada Bank Lain	7.378	6.765	613	9,06	Current Accounts with Other Banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	0	690.000	(690.000)	(100,00)	Placements with Bank Indonesia and Other Banks
JUMLAH KAS DAN SETARA KAS	**1.294.898**	**1.827.710**	**(532.812)**	**(29,15)**	**TOTAL CASH AND CASH EQUIVALENTS**

Kas bersih dari aktivitas operasi pada tahun 2025 tercatat positif sebesar Rp430.609 juta, membaik 150,86% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencatat arus kas negatif sebesar Rp846.635 juta. Perbaikan ini terutama didorong oleh peningkatan penerimaan bunga sebesar 14,21%, kenaikan simpanan dari bank lain sebesar 193,71%, serta perbaikan perubahan liabilitas operasi.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp1.123.044 juta, meningkat 127,23% dibandingkan dengan tahun 2024. Peningkatan arus kas keluar ini terutama disebabkan oleh kenaikan pembelian efek-efek sebesar 132,44% serta peningkatan pembelian aset tetap sebesar 38,97%.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp159.623 juta, menurun 57,49% dibandingkan dengan tahun 2024. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh berkurangnya pembayaran pinjaman yang diterima, meskipun terdapat peningkatan penambahan modal disetor sebesar 15,75%.

Net cash provided by operating activities in 2025 was recorded at Rp430,609 million, representing an improvement of 150.86% compared to 2024, which recorded a negative cash flow of Rp846,635 million. This improvement was primarily driven by a 14.21% increase in interest income, a 193.71% increase in deposits from other banks, as well as an improvement in changes in operating liabilities.

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Net cash used in investing activities in 2025 amounted to Rp1,123,044 million, increasing by 127.23% compared to 2024. The higher cash outflow was mainly attributable to a 132.44% increase in the purchase of marketable securities, as well as a 38.97% increase in the acquisition of fixed assets.

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Net cash used in financing activities in 2025 amounted to Rp159,623 million, representing a 57.49% decrease compared to 2024. The decrease was primarily influenced by lower repayments of borrowings received, despite an increase in additional paid-in capital of 15.75%.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG SERTA RASIO KEUANGAN LAINNYA

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Kemampuan Bank Sulteng dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo diukur melalui rasio likuiditas. Beberapa rasio yang umum digunakan untuk menilai tingkat likuiditas antara lain Rasio Kas *(Cash Ratio),* Rasio Lancar *(Current Ratio*), dan Rasio Kredit terhadap Dana Pihak Ketiga *(Loan to Deposit Ratio)* Semakin tinggi nilai rasio-rasio tersebut, semakin baik kemampuan Bank Sulteng dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Adapun rasio likuiditas Bank Sulteng disajikan pada tabel berikut:

DEBT SERVICING CAPABILITY, RECEIVABLES COLLECTIBILITY LEVEL, AND OTHER FINANCIAL RATIOS

DEBT SERVICING CAPABILITY

Bank Sulteng's ability to meet its short-term obligations as they fall due is measured through liquidity ratios. Several ratios commonly used to assess the level of liquidity include the Cash Ratio, Current Ratio, and Loan to Deposit Ratio (LDR). The higher the value of these ratios, the stronger Bank Sulteng's ability to fulfill its maturing obligations. The liquidity ratios of Bank Sulteng are presented in the following table.

Tabel Rasio Likuiditas Tahun 2024 – 2025
Table of Liquidity Ratios for 2024 – 2025

(dalam %) | (in %)

Uraian	2025	2024	Description
Rasio Likuiditas (%)			Liquidity Ratio (%)
Rasio Kas	10,91%	16,21%	Cash Ratio
Rasio Lancar	113,36%	112,79%	Current Ratio
Loan to Deposit Ratio (LDR)	97,95%	90,52%	Loan to Deposit Ratio (LDR)

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG JANGKA PENDEK (LIKUIDITAS BANK)

Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan Bank Sulteng dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) merupakan rasio likuiditas yang digunakan untuk mengukur kemampuan Bank dalam memenuhi kewajiban kepada nasabah melalui penyaluran kredit yang bersumber dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Rasio ini menunjukkan seberapa besar dana yang dihimpun dari masyarakat disalurkan kembali dalam bentuk kredit.

Pada tahun 2024, LDR tercatat sebesar 90,52%, yang masih berada dalam batas ideal likuiditas perbankan. Sementara itu, pada tahun 2025, LDR meningkat menjadi 97,95%. Kenaikan ini menunjukkan bahwa penyaluran kredit tumbuh lebih agresif dibandingkan pertumbuhan dana pihak ketiga, sehingga likuiditas Bank menjadi relatif lebih ketat dibandingkan tahun sebelumnya.

SHORT-TERM DEBT SERVICING CAPABILITY (BANK LIQUIDITY)

Liquidity ratios reflect Bank Sulteng's ability to meet its short-term obligations or liabilities as they fall due. The Loan to Deposit Ratio (LDR) is a liquidity ratio used to measure the Bank's ability to fulfill its obligations to customers through loan disbursement sourced from Third-Party Funds (DPK). This ratio indicates the extent to which funds collected from the public are redistributed in the form of loans.

In 2024, the LDR was recorded at 90.52%, which remained within the ideal range of banking liquidity. Meanwhile, in 2025, the LDR increased to 97.95%. This increase indicates that loan disbursement grew more aggressively than the growth of third-party funds, resulting in relatively tighter liquidity compared to the previous year.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG JANGKA PANJANG (SOLVABILITAS BANK)

Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan Bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Pengukuran rasio ini dilakukan melalui tingkat kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR), yang menjadi salah satu indikator kesehatan permodalan Bank. CAR mencerminkan sejauh mana modal yang dimiliki telah memadai untuk mendukung kegiatan usaha serta menjadi dasar dalam menilai keberlanjutan operasional Bank di masa mendatang.

LONG-TERM DEBT SERVICING CAPABILITY (BANK SOLVENCY)

Solvency ratios reflect the Bank's ability to meet its long-term obligations. This ratio is measured through the Capital Adequacy Ratio (CAR), which serves as one of the key indicators of the Bank's capital soundness. CAR reflects the extent to which the Bank's capital is adequate to support its business activities and serves as a basis for assessing the sustainability of the Bank's operations in the future.

Tabel Rasio Solvabilitas
Solvency Ratio Table

(dalam %) | (in %)

Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan Increase/(Decrease)	Description
Capital Adequacy Ratio (CAR)	25,49%	23,11%	2,38%	Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank pada tahun 2025 tercatat sebesar 25,49%, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 23,11%, atau naik 2,38%. Peningkatan ini menunjukkan adanya penguatan struktur permodalan Bank dalam mendukung aktivitas usaha dan penyerapan risiko. Dengan tingkat CAR yang berada jauh di atas ketentuan minimum yang ditetapkan regulator, Bank telah memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Posisi CAR yang kuat tersebut mencerminkan kemampuan Bank dalam mengelola risiko, baik risiko kredit, risiko pasar, maupun risiko operasional. Selain itu, permodalan yang memadai juga memberikan ruang yang cukup bagi Bank untuk mendukung ekspansi usaha secara sehat dan berkelanjutan.

The Bank's Capital Adequacy Ratio (CAR) in 2025 was recorded at 25.49%, increasing from 23.11% in 2024, or up by 2.38 percentage points. This increase reflects the strengthening of the Bank's capital structure in supporting its business activities and risk absorption capacity. With the CAR level significantly above the minimum requirement set by the regulator, the Bank has complied with the minimum capital adequacy requirement in accordance with the regulations of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK). The strong CAR position also reflects the Bank's ability to manage various risks, including credit risk, market risk, and operational risk. In addition, adequate capitalization provides sufficient room for the Bank to support business expansion in a sound and sustainable manner.

RASIO RENTABILITAS

Rasio rentabilitas mencerminkan tingkat profitabilitas dan efisiensi operasional yang dicapai oleh Bank. Tingkat profitabilitas diukur melalui indikator *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Net Interest Margin* (NIM). Sementara itu, efisiensi usaha dinilai melalui rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

PROFITABILITY RATIOS

Profitability ratios reflect the level of profitability and operational efficiency achieved by the Bank. Profitability is measured through indicators such as Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), and Net Interest Margin (NIM). Meanwhile, operational efficiency is assessed through the Operating Expenses to Operating Income ratio (BOPO).

Tabel Rasio Likuiditas Tahun 2024 – 2025
Table of Liquidity Ratios for 2024 – 2025

(dalam %) | (in %)

Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan Increase/(Decrease)	Description
Return on Assets (ROA)	2,74%	2,64%	0,10%	Return on Assets (ROA)
Return on Equity (ROE)	18,54%	17,36%	1,22%	Return on Equity (ROE)
Net Interest Margin (NIM)	6,86%	6,43%	0,43%	Net Interest Margin (NIM)
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	72,32%	73,48%	(1,16%)	Operating Expenses to Operating Income (BOPO)

Pada tahun 2025, rasio rentabilitas Bank menunjukkan kinerja yang relatif stabil dibandingkan tahun 2024. ROA sedikit meningkat dari 2,64% menjadi 2,74%.Hal ini mengindikasikan bank semakin efesien dan produktif dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih, sementara ROE meningkat dari 17,36% menjadi 18,54%, yang mencerminkan peningkatan imbal hasil terhadap modal. NIM juga mengalami kenaikan dari 6,43% menjadi 6,86%, menunjukkan perbaikan kemampuan Bank dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih. Di sisi efisiensi, rasio BOPO menurun dari 73,48% menjadi 72,32%, yang menunjukkan peningkatan efisiensi operasional. Secara keseluruhan, rasio rentabilitas tahun 2025 menggambarkan bahwa Bank tetap mampu menghasilkan laba dengan tingkat efisiensi yang semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya.

In 2025, the Bank's profitability ratios demonstrated relatively stable performance compared to 2024. This indicates that the Bank has become increasingly efficient and productive in utilizing its assets to generate net profit. Return on Assets (ROA) slightly increased from 2.64% to 2.74%, while Return on Equity (ROE) rose from 17.36% to 18,54%, reflecting improved returns on capital. The Net Interest Margin (NIM) also increased from 6.43% to 6.86%, indicating an enhanced ability to generate net interest income. On the efficiency side, the Operating Expenses to Operating Income (BOPO) ratio declined from 73.48% to 72.32%, demonstrating improved operational efficiency. Overall, the profitability ratios in 2025 indicate that the Bank remains capable of generating profits with a higher level of efficiency compared to the previous year.

KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Bank menggunakan rasio Non Performing Loan (NPL) untuk mengukur tingkat kolektibilitas piutang atau kualitas kredit yang disalurkan. Rasio ini menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kinerja Bank, karena dapat menunjukkan adanya potensi permasalahan kredit yang berisiko memengaruhi kondisi dan kinerja Bank secara keseluruhan.

RECEIVABLES COLLECTIBILITY

The Bank uses the Non-Performing Loan (NPL) ratio to measure the collectibility level of receivables or the quality of loans disbursed. This ratio serves as one of the key indicators in assessing the Bank's performance, as it reflects potential credit issues that may affect the Bank's overall financial condition and performance.

Tabel Rasio *Non Perfoming Loan* (NPL)
Non Performing Loan (NPL) Ratio Table

(dalam %) | (in %)

Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan Increase/(Decrease)	Description
Non Perfoming Loan (NPL) *Gross*	2,90%	2,71%	0,19%	Non Perfoming Loan (NPL) Gross
Non Perfoming Loan (NPL) *Nett*	1,90%	1,82%	0,08%	Non Perfoming Loan (NPL) Nett

Non Performing Loan (NPL) Gross Bank pada tahun 2025 tercatat sebesar 2,90%, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 2,71% atau naik 0,19%. Sementara itu, NPL Nett pada tahun 2025 sebesar 1,90%, juga meningkat dari 1,82% pada tahun 2024 atau naik 0,08%. Peningkatan rasio NPL tersebut menunjukkan adanya kenaikan pembiayaan bermasalah dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, tingkat NPL masih berada pada level yang relatif terkendali, sehingga risiko kredit masih dapat dikelola dengan baik dan dampaknya terhadap kondisi keuangan Bank tetap terjaga.

The Bank's Gross Non-Performing Loan (NPL) ratio in 2025 was recorded at 2.90%, increasing from 2.71% in 2024, or up by 0.19 percentage points. Meanwhile, the Net NPL ratio in 2025 stood at 1.90%, also rising from 1.82% in 2024, or by 0.08 percentage points. The increase in the NPL ratios indicates a rise in non-performing financing compared to the previous year. Nevertheless, the NPL level remains relatively manageable, indicating that credit risk continues to be well controlled and its impact on the Bank's financial condition remains limited.

Tabel Tingkat Kolektibilitas Kredit
Credit Collectibility Level Table

(dalam jutaan Rupiah
(in million rupiah

Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		Description
			Nominal	(%)	
Lancar	8.209.078	7.875.293	333.785	4,24	Fluent
Dalam Perhatian Khusus	72.172	278.722	(206.550)	(74,11)	Special Mention
Kurang Lancar	30.477	7.662	22.815	297,77	Not that smooth
Diragukan	17.833	32.092	(14.259)	(44,43)	Doubtful
Macet	218.453	187.444	31.009	16,54	Congested
Jumlah	**8.548.013**	**8.381.213**	**166.800**	**1,99**	**Total**

Kualitas kredit pada tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang beragam dibandingkan tahun 2024. Kredit Lancar meningkat menjadi Rp8.209.078 atau tumbuh 4,24%, sehingga tetap mendominasi struktur portofolio kredit. Sementara itu, kategori Dalam Perhatian Khusus menurun signifikan sebesar 74,11% menjadi Rp72.172, yang mencerminkan perbaikan pada kredit dengan potensi risiko. Namun demikian, kredit pada kategori Kurang Lancar meningkat cukup tinggi sebesar 297,77%, dan kredit Macet juga naik sebesar 16,54%, yang menunjukkan adanya peningkatan kredit bermasalah. Di sisi lain, kredit kategori Diragukan menurun sebesar 44,43%, mencerminkan adanya upaya penyelesaian atau perbaikan kualitas kredit. Secara keseluruhan, total kredit meningkat sebesar 1,99% menjadi Rp8.548.013, menunjukkan pertumbuhan penyaluran kredit yang tetap terjaga meskipun terdapat dinamika pada kualitas portofolio kredit.

Credit quality in 2025 showed mixed developments compared to 2024. Current loans increased to Rp8,209,078 million, growing by 4.24%, and continued to dominate the structure of the loan portfolio. Meanwhile, loans classified as Special Mention declined significantly by 74.11% to Rp72,172 million, reflecting an improvement in loans with potential risk.However, loans in the Substandard category increased significantly by 297.77%, while Loss loans also rose by 16.54%, indicating an increase in non-performing loans. On the other hand, loans in the Doubtful category decreased by 44.43%, reflecting the Bank's efforts in resolving or improving the quality of such loans. Overall, total loans increased by 1.99% to Rp8,548,013 million, indicating that credit disbursement continued to grow despite the dynamics in the quality of the loan portfolio.

CURRENT ACCOUNT SAVING ACCOUNT (CASA)

Salah satu faktor utama dalam meningkatkan kemampuan bank menghasilkan laba, selain kualitas kredit, adalah ketersediaan sumber dana yang memadai. Semakin besar proporsi dana murah atau *Current Account Saving Account* (CASA) yang dimiliki bank, semakin besar pula potensi keuntungan yang dapat diperoleh dari penyaluran kredit.

CASA Bank pada tahun 2024 tercatat sebesar 53,36%, dengan dana murah yang terhimpun mencapai Rp4.940.049 juta. Sementara itu, pada tahun 2025, rasio CASA menurun menjadi 47,68%, dengan dana murah sebesar Rp4.160.746 juta. Penurunan rasio dan nominal CASA tersebut menunjukkan adanya perubahan komposisi dana pihak ketiga, di mana proporsi dana murah terhadap total dana yang dihimpun menjadi lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya.

CURRENT ACCOUNT SAVING ACCOUNT (CASA)

One of the key factors in enhancing a bank's ability to generate profits, in addition to credit quality, is the availability of adequate funding sources. The larger the proportion of low-cost funds or Current Account Saving Account (CASA) held by the Bank, the greater the potential profit that can be generated from loan disbursement.

The Bank's CASA ratio in 2024 was recorded at 53.36%, with low-cost funds amounting to Rp4,940,049 million. Meanwhile, in 2025, the CASA ratio declined to 47.68%, with low-cost funds totaling Rp4,160,746 million. The decrease in both the CASA ratio and the nominal amount indicates a shift in the composition of third-party funds, where the proportion of low-cost funds relative to total funds collected became smaller compared to the previous year.

Tabel Dana CASA Bank Sulteng
Central Sulawesi Bank CASA Fund Table

(dalam %)
(in %)

Uraian	2025	2024	Description
Current Account Saving Account	47,68%	53,36%	Current Account Saving Account

ASET PRODUKTIF

Bank Sulteng mengklasifikasikan aset produktifnya berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI No.14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013. Bank Sulteng melakukan klasifikasi aset produktif berdasarkan evaluasi atas kinerja debitur, prospek usaha, dan kemampuan membayar kepada Bank.

Aset produktif Bank pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp12.182.556 juta, meningkat 5,14% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp11.587.193 juta. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan Surat Berharga sebesar 44,55% menjadi Rp3.627.165 juta serta pertumbuhan kredit yang diberikan sebesar 1,99% menjadi Rp8.548.013 juta. Sementara itu, Giro pada Bank Lain meningkat tipis sebesar 9,06%, sedangkan Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain mengalami penurunan signifikan sebesar 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Bank lebih mengoptimalkan aset produktif melalui investasi pada surat berharga dan penyaluran kredit dibandingkan penempatan dana pada instrumen likuid lainnya.

EARNING ASSETS

Bank Sulteng classifies its earning assets in accordance with Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 7/2/PBI/2005 dated January 20, 2005, as last amended by PBI No. 14/15/PBI/2012 dated October 24, 2012, and Bank Indonesia Circular Letter No. 15/28/DPNP dated July 31, 2013. The Bank classifies its earning assets based on an evaluation of the debtor's performance, business prospects, and repayment capacity to the Bank.

The Bank's earning assets in 2025 were recorded at Rp12,182,556 million, representing an increase of 5.14% compared to Rp11,587,193 million in 2024. The increase was mainly driven by a 44.55% rise in marketable securities to Rp3,627,165 million, as well as a 1.99% growth in loans to Rp8,548,013 million. Meanwhile, current accounts with other banks increased slightly by 9.06%, while placements with Bank Indonesia and other banks declined significantly by 100%. This condition indicates that the Bank has optimized its earning assets through investments in marketable securities and loan disbursement rather than placing funds in other liquid instruments.

Tabel Aset Produktif
Productive Assets Table

(dalam jutaan Rupiah
(in million rupiah

Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		Description
			Nominal	(%)	
1	2	3	4 = (2 - 3)	5 = (4 / 3)	
Giro Pada Bank Lain	7.378	6.765	613	9,06	Placements with Other Banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	0	690.000	(690.000)	(100,00)	Placements with Bank Indonesia and Other Banks
Surat Berharga	3.627.165	2.509.215	1.117.950	44,55	Securities
Kredit yang diberikan	8.548.013	8.381.213	166.800	1,99	Credit given
Jumlah	**12.182.556**	**11.587.193**	**595.363**	**5,14**	Total

Struktur Modal Dan Kebijakan Permodalan

Struktur Modal

Bank Sulteng berupaya menerapkan kebijakan struktur permodalan yang optimal untuk memastikan ketersediaan modal yang memadai dalam mendukung kelangsungan operasional Bank. Struktur modal mencerminkan perbandingan antara liabilitas dan ekuitas, di mana ekuitas terdiri dari modal saham, saldo laba, serta pendapatan komprehensif lainnya. Berikut disajikan komposisi struktur modal Bank Sulteng dalam dua tahun terakhir.

Capital Structure And Capital Policy

Capital Structure

Bank Sulteng strives to implement an optimal capital structure policy to ensure the availability of adequate capital to support the Bank's operational sustainability. The capital structure reflects the proportion between liabilities and equity, where equity consists of share capital, retained earnings, and other comprehensive income. The composition of Bank Sulteng's capital structure over the past two years is presented in the following table.

Struktur Modal Bank Sulteng Tahun 2024 – 2025
Central Sulawesi Bank Capital Structure for 2024 – 2025

(dalam jutaan Rupiah
(in million rupiah

Uraian	2025		2024		Kenaikan (Penurunan) 2024 - 2025		Description
	Nominal (Rp Juta) Amount (Rp Million)	Komposisi (%) Composition (%)	Nominal (Rp Juta) Amount (Rp Million)	Komposisi (%) Composition (%)	Selisih (Rp Juta) Difference (Rp Million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Liabilitas	11.937.889	87,46	11.325.800	87,64	612.089	84,30	Total Liabilities
Ekuitas	1.711.055	12,54	1.597.048	12,36	114.007	15,70	Total Equity
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	**13.648.944**	**100,00**	**12.922.848**	**100,00**	**726.096**	**100,00**	Total Liabilities and Equity

Struktur Modal Bank Sulteng pada tahun 2025 masih didominasi oleh Liabilitas dibandingkan dengan Ekuitas. Struktur modal Bank Sulteng pada tahun 2025 terdiri atas Liabilitas sebesar Rp11.937.889 juta atau 87,46% dan Ekuitas sebesar Rp1.711.055 juta atau 12,54%. Dibandingkan dengan tahun 2024, proporsi Liabilitas mengalami sedikit penurunan dari 87,64% menjadi 87,46%, sementara proporsi Ekuitas meningkat dari 12,36% menjadi 12,54%. Hal ini menunjukkan adanya penguatan permodalan Bank Sulteng dalam mendukung struktur keuangan yang lebih sehat

Bank Sulteng's capital structure in 2025 continued to be dominated by liabilities compared to equity. The Bank's capital structure in 2025 consisted of liabilities amounting to Rp11,937,889 million or 87.46%, and equity amounting to Rp1,711,055 million or 12.54%. Compared to 2024, the proportion of liabilities slightly decreased from 87.64% to 87.46%, while the proportion of equity increased from 12.36% to 12.54%. This indicates a strengthening of Bank Sulteng's capital position in supporting a healthier financial structure.

Kebijakan Permodalan

Bank Sulteng mengelola struktur permodalan secara optimal untuk menjaga keberlangsungan usaha serta memastikan kemampuan Bank dalam memberikan imbal hasil yang berkelanjutan kepada pemegang saham dan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Dalam pengelolaannya, Bank senantiasa menyesuaikan struktur permodalan dengan mempertimbangkan dinamika kondisi ekonomi, kebijakan, serta peraturan yang berlaku.

Capital Policy

Bank Sulteng manages its capital structure optimally to maintain business sustainability and ensure the Bank's ability to generate sustainable returns for shareholders while delivering value to all stakeholders. In managing its capital structure, the Bank continuously aligns its policies with the dynamics of economic conditions, prevailing policies, and applicable regulations.

Struktur permodalan tersebut dirancang untuk memastikan kesinambungan operasional Bank, sekaligus mengoptimalkan nilai bagi pemegang saham melalui peningkatan efisiensi operasional dan pencapaian tujuan strategis Bank.

The capital structure is designed to ensure the continuity of the Bank's operations while optimizing shareholder value through improved operational efficiency and the achievement of the Bank's strategic objectives.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL YANG DIREALISASIKAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Bank Sulteng tidak memiliki komitmen material terkait investasi barang modal selama tahun 2025. Dengan demikian, tidak terdapat informasi yang perlu diungkapkan mengenai pihak yang terlibat dalam komitmen tersebut, tujuan dari komitmen, sumber pendanaan yang direncanakan, mata uang yang digunakan sebagai denominasi, maupun langkah-langkah yang disiapkan Bank Sulteng untuk mengantisipasi risiko yang timbul dari eksposur mata uang asing terkait.

MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL EXPENDITURE REALIZED IN THE LATEST FISCAL YEAR

Bank Sulteng did not have any material commitments related to capital expenditure during 2025. Accordingly, there is no information to be disclosed regarding the parties involved in such commitments, the purpose of the commitments, the planned sources of funding, the currency denomination used, or the measures prepared by Bank Sulteng to anticipate risks arising from related foreign exchange exposure.

INVESTASI BARANG MODAL

Investasi Barang Modal *(Capital Expenditure)* merupakan kegiatan pengeluaran dana yang dilakukan untuk memperoleh aset tetap atau meningkatkan nilai aset tetap yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa mendatang.

Pada tahun 2025, Bank Sulteng telah melakukan investasi barang modal dengan tujuan memperluas jaringan kantor, sehingga dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah, serta memberikan nilai tambah dan mendukung pertumbuhan kinerja Bank Sulteng di masa depan.

CAPITAL EXPENDITURE

Capital Expenditure represents the allocation of funds made to acquire fixed assets or to enhance the value of existing fixed assets that are expected to generate economic benefits in the future.

In 2025, Bank Sulteng carried out capital expenditure investments aimed at expanding its branch network in order to reach a broader community, improve the quality of services to the people of Central Sulawesi Province, and create added value while supporting the Bank's performance growth in the future.

JENIS DAN NILAI INVESTASI BARANG MODAL

Berikut ini adalah jenis dan nilai investasi barang modal yang telah dilakukan Bank Sulteng pada tahun 2025.

TYPES AND VALUE OF CAPITAL EXPENDITURES

The following presents the types and value of capital expenditures undertaken by Bank Sulteng in 2025.

Tabel Jenis Investasi Barang Modal
Capital Goods Investment Type Table

(dalam jutaan Rupiah
(in million rupiah

Jenis Investasi Barang Modal	Nilai Tahun 2025	Nilai Tahun 2024	Types of Capital Goods Investment
Tanah	15.675	15.675	Land
Bangunan Kantor	73.446	73.446	Office building
Rumah Dinas	11.243	11.243	Official residence
Kendaraan	185	185	Vehicle
Mesin Kantor	10.906	10.524	Office Machines
Perabot Kantor	23.673	21.036	Office Furniture
Perabot Rumah Dinas	216	186	Official Home Furniture
Aset Hak Guna	70.568	54.154	Use Rights Assets
Total	**205.913**	**186.449**	Total

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL

Pada tahun 2025, realisasi investasi barang modal merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh Bank Sulteng untuk memperoleh dan meningkatkan nilai aset tetap yang dimiliki, guna mendukung kegiatan operasional dan memberikan manfaat ekonomi di masa mendatang. Investasi barang modal tersebut terutama digunakan untuk pengadaan dan peningkatan sarana pendukung operasional, seperti mesin kantor dan perabot kantor. Seluruh transaksi belanja barang modal dilakukan dalam mata uang Rupiah, sehingga Bank tidak menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing. Adapun realisasi belanja barang modal Bank Sulteng untuk tahun 2024 dan 2025 disajikan sebagai berikut.

CAPITAL EXPENDITURE REALIZATION

In 2025, the realization of capital expenditure represented spending undertaken by Bank Sulteng to acquire and enhance the value of its fixed assets in order to support operational activities and generate economic benefits in the future. These capital investments were primarily allocated for the procurement and improvement of operational supporting facilities, such as office equipment and office furniture. All capital expenditure transactions were conducted in Indonesian Rupiah, therefore the Bank was not exposed to foreign exchange risk. The realization of Bank Sulteng's capital expenditure for 2024 and 2025 is presented as follows.

Tabel Program Kegiatan Investasi Bank Sulteng Tahun 2024 – 2025
Table of Central Sulawesi Bank Investment Activity Program Year 2024 – 2025

(dalam jutaan Rupiah
(in million rupiah

No	Jenis Investasi Barang Modal	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Types of Capital Goods Investment
				Nominal	(%)	
1	2	3	4	5 = (3-4)	6 = (5/4)	
1	Tanah	15.675	15.675	0	0,00	Land
2	Bangunan Kantor	73.446	73.446	0	0,00	Office building
3	Rumah Dinas	11.243	11.243	0	0,00	Official residence
4	Kendaraan	185	185	0	0,00	Vehicle
5	Mesin Kantor	10.906	10.524	382	3,63	Office Machines
6	Perabot Kantor	23.673	21.036	2.637	12,54	Office Furniture
7	Perabot Rumah Dinas	216	186	30	16,13	Official Home Furniture
JUMLAH INVESTASI BARANG MODAL		**135.344**	**132.295**	**3.049**	**2,30**	TOTAL INVESTMENT IN CAPITAL GOODS

Pada tahun 2025, total investasi barang modal Bank Sulteng tercatat sebesar Rp135.344 juta, meningkat sebesar 2,30% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp132.295 juta. Peningkatan ini terutama berasal dari kenaikan investasi pada Perabot Kantor sebesar 12,54%, Perabot Rumah Dinas sebesar 16,13%, serta Mesin Kantor sebesar 3,63%. Sementara itu, investasi pada Tanah, Bangunan Kantor, Rumah Dinas, dan Kendaraan tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya.

In 2025, Bank Sulteng's total capital expenditure amounted to Rp135,344 million, representing an increase of 2.30% compared to Rp132,295 million in 2024. The increase was mainly driven by higher investments in office furniture, which rose by 12.54%, official residence furniture by 16.13%, and office equipment by 3.63%. Meanwhile, investments in land, office buildings, official residences, and vehicles remained unchanged compared to the previous year.

Kebijakan Lindung Nilai (*Hedging*)

Sepanjang tahun 2025, Bank Sulteng menghadapi risiko pasar yang terutama dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku bunga. Dalam rangka menjaga stabilitas keuangan serta memastikan pengelolaan risiko yang efektif, Bank Sulteng memanfaatkan instrumen derivatif sebagai bagian dari strategi manajemen risiko. Penggunaan instrumen derivatif tersebut dilakukan secara terbatas dan semata-mata untuk tujuan lindung nilai (*hedging*), bukan untuk tujuan spekulatif maupun perdagangan.

Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, Bank Sulteng berkomitmen untuk mengelola risiko pasar secara optimal guna menjaga kesehatan keuangan dan memberikan keyakinan kepada seluruh pemangku kepentingan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan keuangan yang diambil sejalan dengan kerangka manajemen risiko yang telah ditetapkan serta memenuhi ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Hedging Policy

Throughout 2025, Bank Sulteng faced market risks primarily influenced by fluctuations in interest rates. In order to maintain financial stability and ensure effective risk management, the Bank utilized derivative instruments as part of its risk management strategy. The use of these derivative instruments was limited and strictly intended for hedging purposes, rather than for speculative or trading activities.

By applying the prudential principle, Bank Sulteng is committed to managing market risks optimally in order to maintain financial soundness and provide assurance to all stakeholders. This approach ensures that every financial policy and decision taken aligns with the established risk management framework and complies with applicable regulations.

IKATAN DAN KONTINJENSI

Posisi komitmen bersih Bank Sulteng pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp169.611 juta, mengalami penurunan sebesar 37,08% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp269.587 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya Komitmen Kredit yang Belum Ditarik.

Tagihan kontinjensi, yang terdiri dari Pendapatan Bunga dalam Penyelesaian, tercatat sebesar Rp61.685 juta pada tahun 2025, meningkat sebesar 33,47% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp46.215 juta. Sementara itu, kontinjensi bersih meningkat signifikan menjadi Rp91.543 juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.914 juta, terutama dipengaruhi oleh perubahan pada Garansi yang Diterbitkan.

Jumlah tagihan lainnya pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp94.019 juta, meningkat sebesar 38,31% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp67.975 juta, terutama berasal dari peningkatan Aset Produktif yang Dihapusbukukan.

COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Bank Sulteng's net commitments position in 2025 was recorded at Rp169,611 million, representing a 37.08% decrease compared to Rp269,587 million in 2024. This decline was mainly attributable to the reduction in undrawn loan commitments.

Contingent receivables, consisting of interest income in suspense, amounted to Rp61,685 million in 2025, increasing by 33.47% compared to Rp46,215 million in 2024. Meanwhile, net contingencies increased significantly to Rp91,543 million, compared to Rp4,914 million in the previous year, primarily influenced by changes in issued guarantees.

Total other receivables in 2025 were recorded at Rp94,019 million, representing an increase of 38.31% compared to Rp67,975 million in 2024, mainly originating from the increase in written-off earning assets.

Secara keseluruhan, jumlah tagihan komitmen dan kontinjensi bersih pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp355.172 juta, meningkat sebesar 6,77% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp332.648 juta.

Overall, the total net commitments and contingencies receivables in 2025 amounted to Rp355,172 million, increasing by 6.77% compared to Rp332,648 million in 2024.

Tabel Komitmen dan Kontinjensi
Table of Commitments and Contingencies

(dalam jutaan Rupiah
(in million rupiah

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Description
			Nominal	(%)	
1	2	3	4 = (2 - 3)	5 = (4 / 3)	
KOMITMEN					COMMITMENT
Tagihan komitmen					Commitment bill
- Komitmen Kredit yang Belum Digunakan	-	-	-	-	- Unused Credit Commitments
- Lainnya	-	-	-	-	- Other
Jumlah	**-**	**-**	**-**	**-**	Total
Liabilitas komitmen:					Commitment Liabilities
- Komitmen Kredit yang Belum Ditarik	169.611	269.587	(99.976)	(37,08)	- Undrawn Credit Commitments
- Lainnya	-	-	-	-	- Other
Jumlah	**169.611**	**269.587**	**(99.976)**	**(37,08)**	Total
KOMITMEN BERSIH	**169.611**	**269.587**	**(99.976)**	**(37,08)**	NET COMMITMENT
KONTIJENSI					CONTINGENCIES
Tagihan Kontijensi:					Contingent bills
- Pendapatan Bunga dalam Penyelesaian	61.685	46.215	15.470	33,47	- Interest Income Under Settlement
- Lainnya	-	-	-	-	- Other
Jumlah	**61.685**	**46.215**	**15.470**	**33,47**	Total
Liabilitas Kontijensi:					Contingent Liabilities:
- Garansi yang Diterbitkan	29.237	(41.301)	70.538	(170,79)	- Guarantees Issued
- Lainnya	620	0	620	0,00	- Other
Jumlah	**29.858**	**(41.301)**	**71.159**	**(172,29)**	Total
KONTIJENSI BERSIH	**91.543**	**4.914**	**86.629**	**1.762,90**	NET CONTINGENCIES
LAINNYA					OTHER
- Aset Produktif yang Dihapusbukukan	93.807	67.204	26.603	39,59	- Productive assets written off
- Lainnya	211	770	(559)	(72,60)	- Other
Jumlah Tagihan Lainnya	94.019	67.975	26.044	38,31	Total Other Bills
JUMLAH TAGIHAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI - BERSIH	**355.172**	**332.648**	**22.524**	**6,77**	TOTAL COMMITMENTS AND CONTINGENCIES - NET

Pada Tahun 2025 Bank melakukan tidak melakukan hapus buku kredit, sedangkan pada tahun 2024, Bank melakukan hapus kredit. Penghapusbukuan kredit tersebut bukan merupakan hapus tagih, sehingga upaya penagihan tetap dilakukan.

In 2025, the Bank did not record any loan write-offs, whereas in 2024 the Bank carried out loan write-offs. The loan write-offs conducted in 2024 did not constitute debt forgiveness; therefore, collection efforts on the written-off loans continue to be pursued.

Dampak Perubahan Tingkat Suku Bunga Terhadap Kinerja Bank

Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga kebijakan secara bertahap selama tahun 2025 sebagai bagian dari strategi untuk menjaga stabilitas

Impact of Interest Rate Changes on the Bank's Performance

Bank Indonesia gradually reduced its policy interest rate throughout 2025 as part of its strategy to maintain stability and support economic growth. At

dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada awal tahun 2025, suku bunga BI-7 *Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) berada pada level 6,00 persen, kemudian diturunkan secara bertahap hingga mencapai 4,75 persen pada akhir tahun 2025. Penurunan suku bunga tersebut dilakukan seiring dengan terkendalinya inflasi, stabilitas nilai tukar rupiah, serta untuk memperkuat fungsi intermediasi perbankan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Per 31 Desember 2025, suku bunga kebijakan tetap berada pada level 4,75 persen, yang memberikan dampak terhadap struktur dana perbankan, khususnya melalui penurunan suku bunga simpanan dan biaya dana (*cost of fund*). Kondisi ini turut mendukung pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tetap positif dan memperkuat likuiditas perbankan, serta mendorong peningkatan penyaluran kredit terutama pada sektor investasi. Selain itu, penurunan suku bunga juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan efisiensi operasional perbankan di tengah dinamika perekonomian global.

Akselerasi Pertumbuhan Fee Based Income

Fee based income atau pendapatan berbasis komisi merupakan pendapatan yang diperoleh bank dari pemberian komitmen dan berbagai layanan perbankan lainnya di luar pendapatan yang berasal dari penyaluran aktiva produktif, seperti kredit dan surat berharga.

Untuk meningkatkan *fee based income,* Bank Sulteng dapat menerapkan strategi berbasis kompetensi inti yang didukung oleh benchmarking serta pengelolaan *strategic business unit* secara efektif. Selain itu, Bank Sulteng berkomitmen menjadikan *fee based income* sebagai salah satu sumber utama dalam meningkatkan profitabilitas.

Peningkatan *fee based income* juga dapat dilakukan melalui penyediaan layanan yang berkualitas serta pengembangan produk dan jasa perbankan yang beragam, sehingga mampu meningkatkan kepuasan nasabah sekaligus mendorong peningkatan volume transaksi nasabah.

the beginning of 2025, the BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) stood at 6.00%, and was gradually reduced to 4.75% by the end of 2025. The policy rate cuts were implemented in line with controlled inflation, the stability of the Indonesian Rupiah exchange rate, and efforts to strengthen the banking sector's intermediation function while supporting national economic growth.

As of December 31, 2025, the policy rate remained at 4.75%, which had an impact on the structure of banking funds, particularly through lower deposit interest rates and a reduction in the cost of funds. This condition supported the continued positive growth of Third-Party Funds (DPK) and strengthened banking liquidity, while also encouraging increased credit disbursement, particularly in the investment sector. In addition, the decline in interest rates contributed to maintaining financial system stability and improving banking operational efficiency amid global economic dynamics.

Acceleration of Fee-Based Income Growth

Fee-based income, or commission-based income, refers to revenue earned by the Bank from commitments and various banking services other than income derived from the distribution of earning assets such as loans and marketable securities.

To enhance fee-based income, Bank Sulteng may implement strategies based on its core competencies, supported by benchmarking practices and effective management of strategic business units. In addition, the Bank is committed to positioning fee-based income as one of the key sources for improving profitability.

The growth of fee-based income can also be supported through the provision of high-quality services and the development of diverse banking products and services, thereby increasing customer satisfaction while encouraging higher transaction volumes from customers.

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA BANK TAHUN 2025 DAN PROYEKSI TAHUN 2026

Pencapaian Target 2025

Untuk mengevaluasi kinerja serta memastikan bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat tercapai, Bank Sulteng menetapkan sejumlah indikator utama sebagai alat ukur kinerja. Indikator tersebut digunakan untuk membandingkan capaian kinerja periode berjalan dengan kinerja periode sebelumnya, serta dengan target yang telah dirumuskan dalam Rencana Bisnis Bank.

Perbandingan Target Dan Realisasi Keuangan

Secara keseluruhan indikator realisasi pertumbuhan kinerja Bank Sulteng di tahun 2025 cukup baik jika dibandingkan dengan rencana target yang ditetapkan di tahun 2025.

COMPARISON OF TARGETS AND PERFORMANCE REALIZATION IN 2025 AND PROJECTION FOR 2026

Achievement of 2025 Targets

To evaluate performance and ensure that the established strategic objectives are achieved, Bank Sulteng has set several key indicators as performance measurement tools. These indicators are used to compare the performance achievements of the current period with those of the previous period, as well as with the targets set in the Bank's Business Plan.

Comparison of Financial Targets and Realization

Overall, the realization indicators of Bank Sulteng's performance growth in 2025 were relatively positive compared to the targets set for the year.

Tabel Perbandingan Rencana Bisnis Bank dan Realisasi Keuangan 2025
Comparison Table of Bank Business Plans and Financial Realization 2025

(dalam jutaan Rupiah
(in million rupiah

Uraian	Realisasi Desember 2025	Target Desember 2025	Pencapaian	Description
1	2	3	4=2/3	
Posisi Keuangan				Financial Position
Aset	13.648.944	13.600.111	100,36%	Asset
Kredit yang diberikan	8.548.013	9.220.139	92,71%	Credit given
Dana Pihak Ketiga	8.726.568	10.161.877	85,88%	Third-party funds
Giro	1.977.964	3.086.785	64,08%	Giro
Tabungan	2.182.782	2.425.986	89,98%	Savings
Deposito	4.565.822	4.649.106	98,21%	Deposit
Laba Rugi				Profit and loss
Pendapatan bunga	1.239.532	1.203.414	103,00%	Interest income
Beban bunga	(446.729)	(433.285)	103,10%	Interest expense
Pendapatan (beban) bunga bersih	792.803	770.129	102,94%	Net interest income (expense)
Laba (rugi) tahun berjalan	277.576	317.331	87,47%	Profit (loss) for the year Before Tax
Rasio Keuangan (%)				Financial Ratios (%)
Capital Adequacy Ratio (CAR)	25,52%	24,86%	102,65%	Capital Adequacy Ratio (CAR)
Non Perfoming Loan (NPL) Gross	2,90%	2,69%	107,81%	Non-Performing Loans (NPL) Gross
Non Perfoming Loan (NPL) Net	1,90%	1,56%	121,79%	Non-Performing Loans (NPL) Net
Return on Assets (RoA)	2,72%	3,04%	89,47%	Return on Assets (RoA)
Return on Equity (RoE)	18,54%	21,93%	84,54%	Return on Equity (RoE)
Net Interest Margin (NIM)	6,86%	6,38%	107,52%	Net Interest Margin (NIM)
Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)	72,32%	69,36%	104,27%	Operating Costs Operating Income (BOPO)

Pada tahun 2025, pencapaian total aset Bank Sulteng mencapai 100,36% dari target sebesar Rp13.600.111 juta dengan realisasi Rp13.648.944 juta. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum posisi keuangan bank tetap tumbuh sesuai perencanaan. Namun, realisasi kredit yang diberikan hanya mencapai 92,71% dari target Rp9.220.139 juta dengan capaian Rp8.548.013 juta, yang mengindikasikan perlunya optimalisasi ekspansi kredit agar sesuai dengan rencana bisnis.

Dana Pihak Ketiga (DPK) juga belum mencapai target, dengan realisasi sebesar Rp8.726.568 juta atau 85,88% dari target Rp10.161.877 juta. Secara rinci, giro hanya mencapai 64,08%, tabungan sebesar 89,98%, dan deposito sebesar 98,21% dari target. Rendahnya pencapaian giro menjadi faktor utama tidak tercapainya target DPK, sehingga perlu strategi peningkatan penghimpunan dana murah (CASA) untuk memperbaiki struktur pendanaan.

Dari sisi kinerja laba rugi, pendapatan bunga terealisasi sebesar Rp1.239.532 juta atau 103,00% dari target, menunjukkan kinerja pendapatan yang baik. Beban bunga juga melebihi target sebesar 103,10%, namun tetap mampu menghasilkan pendapatan bunga bersih sebesar Rp792.803 juta atau 102,94% dari target. Meskipun demikian, laba tahun berjalan hanya mencapai Rp277.576 juta atau 87,47% dari target, yang menunjukkan masih adanya tekanan pada efisiensi dan beban operasional.

Dalam aspek rasio keuangan, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tercatat sebesar 25,49% atau 102,65% dari target, mencerminkan kondisi permodalan yang sangat kuat dan di atas ketentuan regulator. Namun, rasio kualitas aset menunjukkan peningkatan risiko, di mana NPL Gross mencapai 107,81% dari target dan NPL Net sebesar 121,79%, mengindikasikan kenaikan kredit bermasalah yang perlu mendapat perhatian serius dalam pengelolaan risiko.

Rasio profitabilitas menunjukkan *Return on Assets* (RoA) sebesar 2,72% atau 89,47% dari target, serta *Return on Equity* (RoE) sebesar 18,54% atau 84,54% dari target, yang menandakan kinerja profitabilitas masih di bawah ekspektasi. Sebaliknya, *Net Interest Margin* (NIM) mencapai 107,52% dari target, menunjukkan kemampuan bank dalam menjaga margin bunga tetap baik. Rasio BOPO sebesar 72,32% atau 104,27% dari target menunjukkan efisiensi operasional masih perlu ditingkatkan karena biaya operasional relatif lebih tinggi dari yang direncanakan.

Ke depan, Bank Sulteng perlu memfokuskan strategi pada peningkatan pertumbuhan kredit yang berkualitas, optimalisasi penghimpunan dana

In 2025, Bank Sulteng's total assets reached 100.36% of the target, with a realization of Rp13,648,944 million compared to the target of Rp13,600,111 million. This indicates that, overall, the Bank's financial position continued to grow in line with its planned targets. However, loans disbursed only reached 92,71% of the target of Rp9,220,139 million, with an actual realization of Rp8.548.013 million, indicating the need to further optimize credit expansion to align with the Bank's business plan.

Third-Party Funds (DPK) also fell short of the target, with a realization of Rp8,726,568 million, or 85.88% of the target of Rp10,161,877 million. In detail, current accounts achieved only 64.08%, savings accounts reached 89.98%, and time deposits reached 98.21% of their respective targets. The lower achievement of current accounts was the main factor behind the shortfall in DPK targets, indicating the need for strategies to increase the mobilization of low-cost funds (CASA) in order to improve the Bank's funding structure.

From the perspective of profit and loss performance, interest income was realized at Rp1,239,532 million, or 103.00% of the target, reflecting strong revenue performance. Interest expenses also exceeded the target at 103.10%, yet the Bank was still able to generate net interest income of Rp792,803 million, or 102.94% of the target. Nevertheless, profit for the year reached Rp277,576 million, or 87.47% of the target, indicating that operational efficiency and cost management remain areas that require improvement.

In terms of financial ratios, the Capital Adequacy Ratio (CAR) was recorded at 25.49%, or 102.65% of the target, reflecting a very strong capital position and well above the regulatory requirement. However, asset quality ratios indicated an increase in risk, with Gross NPL reaching 107.81% of the target and Net NPL at 121.79%, suggesting an increase in non-performing loans that requires close attention in risk management.

Profitability ratios showed Return on Assets (ROA) of 2.72%, or 89,47% of the target, and Return on Equity (ROE) of 18,54%, or 84,54% of the target, indicating that profitability performance remained below expectations. On the other hand, Net Interest Margin (NIM) reached 107,52% of the target, demonstrating the Bank's ability to maintain a healthy interest margin. The Operating Expenses to Operating Income (BOPO) ratio stood at 72.32%, or 104.27% of the target, indicating that operational efficiency still needs improvement as operating expenses were relatively higher than planned.

Going forward, Bank Sulteng needs to focus its strategy on enhancing high-quality credit growth, optimizing the mobilization of low-cost funds to improve its funding

murah untuk memperbaiki struktur pendanaan, serta pengendalian risiko kredit guna menekan rasio NPL. Selain itu, peningkatan efisiensi biaya operasional dan diversifikasi sumber pendapatan non-bunga menjadi kunci untuk mendorong pencapaian laba yang lebih optimal dan menjaga keberlanjutan kinerja keuangan bank.

structure, and strengthening credit risk management in order to reduce the NPL ratio. In addition, improving operational cost efficiency and diversifying non-interest income sources will be key to achieving more optimal profit growth and maintaining the sustainability of the Bank's financial performance.

TARGET KE DEPAN

Bank Sulteng telah menyusun Rencana Bisnis Bank tahun 2025 - 2027 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini dan proyeksi perekonomian di tahun 2026 baik dari segi makro maupun mikro.

FUTURE TARGETS

Bank Sulteng has prepared its Bank Business Plan for 2025–2027 by taking into account the current economic conditions and economic projections for 2026, both from macroeconomic and microeconomic perspectives.

Tabel Asumsi dalam Menyusun Proyeksi
Table of Assumptions Used in Preparing the Projections

Asumsi	2026	Assumptions
ASUMSI MAKRO		MACRO ASSUMPTIONS
Pertumbuhan PDB	5,30%	GDP Growth
Inflasi	2,60%	Inflation
Kurs IDR/USD	16.100	IDR/USD exchange rate
BI 7 Days Rate	6	BI 7 Days Rate
ASUMSI MIKRO		MICRO ASSUMPTIONS
Pertumbuhan Kredit	11,00%	Credit Growth
Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga	7,25%	Growth of Third Party Funds
Tingkat Suku Bunga Simpanan Tabungan	4,00%	Savings Deposit Interest Rate
Tingkat Bunga Kredit Ritel Komersial	10,85%	Commercial Retail Credit Interest Rates

Sumber: Rencana Bisnis Bank Tahun 2025 – 2027
Bank Business Plan 2025–2027

Berdasarkan kondisi makro dan mikro pada tahun 2026 dan asumsi perbankan di tahun 2026, maka disusun proyeksi sebagai berikut

Based on the macroeconomic and microeconomic outlook and banking assumptions for 2026, the Bank has prepared the following financial projections.

PROYEKSI KEUANGAN TAHUN 2026

2026 Financial Projections

Tabel Proyeksi Keuangan 2026
Table Financial Projection 2025

(dalam jutaan Rupiah
(in million rupiah

Uraian	Proyeksi 2026 2026 Projection	Description
Posisi Keuangan		Financial Position
Aset	14.960.122	Asset
Kredit yang diberikan	9.598.054	Credit given
Dana Pihak Ketiga	10.669.972	Third-party funds
Giro	3.395.464	Giro
Tabungan	2.474.506	Savings

Uraian	Proyeksi 2026 2026 Projection	Description
Deposito	4.800.002	Deposit
Laba Rugi		Profit and loss
Pendapatan bunga	1.310.714	Interest income
Beban bunga	(460.649)	Interest expense
Pendapatan (beban) bunga bersih	850.065	Net interest income (expense).
Pendapatan (beban) operasional selain bunga	(414.937)	Operating income (expenses) other than interest
Laba (rugi) tahun berjalan Sebelum Pajak	413.418	Profit (loss) for the year Before Tax
Rasio Keuangan (%)		Financial Ratios (%)
Capital Adequacy Ratio (CAR)	24,34%	Capital Adequacy Ratio (CAR)
Non Perfoming Loan (NPL) Gross	2,73%	Non-Performing Loans (NPL) Gross
Non Perfoming Loan (NPL) Net	1,37%	Non-Performing Loans (NPL) Net
Return on Assets (ROA)	2,86%	Return on Assets (ROA)
Return on Equity (ROE)	22,70%	Return on Equity (ROE)
Net Interest Margin (NIM)	6,61%	Net Interest Margin (NIM)
Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)	70,55%	Operating Costs Operating Income (BOPO)

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Sampai dengan tanggal penyusunan Laporan Tahunan, tidak terdapat peristiwa material yang terjadi setelah tanggal laporan auditor yang berdampak terhadap kinerja maupun profil risiko usaha Bank di masa mendatang.

MATERIAL INFORMATION AND FACTS SUBSEQUENT TO THE AUDITOR'S REPORT DATE

Up to the date of preparation of this Annual Report, there have been no material events occurring after the date of the auditor's report that could have an impact on the Bank's performance or its future business risk profile.

PROSPEK USAHA

Prospek usaha Bank Sulteng pada tahun 2026 tetap positif didukung oleh ketahanan ekonomi nasional, kuatnya pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah, serta kondisi industri perbankan yang stabil dan resilien. Meskipun perekonomian global masih dibayangi perlambatan dan ketidakpastian, ekonomi Indonesia diprakirakan tumbuh 4,7–5,5% dengan inflasi dan stabilitas makro yang terjaga. Di tingkat regional, Sulawesi Tengah mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 8,47% pada 2025, ditopang industri pengolahan, pertambangan, dan ekspor berbasis hilirisasi, sehingga membuka peluang ekspansi kredit dan penghimpunan dana.

Dari sisi industri, perbankan nasional berada dalam kondisi likuid dan sehat, tercermin dari LDR 85,35% dan AL/DPK 28,57%. Dana Pihak Ketiga tumbuh 13,83% (yoy) dan kredit meningkat 9,69% (yoy), terutama kredit investasi yang tumbuh 21,06%. Kualitas aset tetap terjaga dengan NPL *gross* 2,21% dan CAR di atas 25%, menunjukkan daya tahan permodalan yang kuat.

BUSINESS PROSPECTS

Bank Sulteng's business prospects in 2026 remain positive, supported by the resilience of the national economy, strong economic growth in Central Sulawesi, and stable and resilient conditions within the banking industry. Although the global economy continues to face slowing growth and uncertainty, Indonesia's economy is projected to grow by 4.7–5.5%, supported by controlled inflation and stable macroeconomic conditions.At the regional level, Central Sulawesi recorded strong economic growth of 8.47% in 2025, driven by the manufacturing sector, mining industry, and downstream-based exports, thereby creating opportunities for credit expansion and the mobilization of funds.

From an industry perspective, the national banking sector remains liquid and sound, as reflected by an LDR of 85.35% and an AL/DPK ratio of 28.57%. Third-Party Funds grew by 13.83% (yoy) and credit increased by 9.69% (yoy), particularly investment loans, which grew significantly by 21.06%. Asset quality also remained well maintained, with gross NPL at 2.21% and CAR above 25%, indicating strong capital resilience.

Secara analitis, kombinasi pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi, peningkatan investasi industri, dan penguatan UMKM memberikan ruang bagi Bank Sulteng untuk memperluas pembiayaan sektor produktif, khususnya industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Struktur ekonomi Sulawesi Tengah yang berbasis hilirisasi juga menciptakan peluang pembiayaan rantai pasok *(supply chain financing)* serta penguatan dana murah melalui peningkatan transaksi bisnis. Di sisi lain, volatilitas global dan fluktuasi harga komoditas tetap menjadi risiko yang perlu diantisipasi melalui manajemen risiko yang prudent, penguatan kualitas kredit, dan diversifikasi portofolio.

Penguatan digitalisasi, pertumbuhan transaksi BI-FAST dan QRIS yang signifikan, serta peningkatan inklusi keuangan semakin memperluas basis layanan perbankan dan efisiensi operasional. Dengan strategi ekspansi yang selektif, pengelolaan likuiditas dan permodalan yang kuat, serta fokus pada pembiayaan sektor produktif dan UMKM, Bank Sulteng memiliki prospek usaha yang tetap tumbuh, sehat, dan berkelanjutan pada tahun 2026.

Analytically, the combination of strong regional economic growth, increasing industrial investment, and the strengthening of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) provides opportunities for Bank Sulteng to expand financing in productive sectors, particularly manufacturing, trade, and agriculture. The economic structure of Central Sulawesi, which is increasingly driven by downstream industrialization, also creates opportunities for supply chain financing and the strengthening of low-cost funds through increased business transactions.

The strengthening of digitalization, the significant growth of BI-FAST and QRIS transactions, as well as the increasing level of financial inclusion, continue to expand the banking service base while improving operational efficiency. With a strategy of selective expansion, strong liquidity and capital management, and a focus on financing productive sectors and MSMEs, Bank Sulteng maintains positive business prospects for sustainable and healthy growth in 2026.

ASPEK PERPAJAKAN
TAXATION ASPECTS

Pada tahun 2025, Bank Sulteng telah menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)* secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam pengelolaan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kontribusi Bank Sulteng kepada negara diwujudkan melalui pemenuhan kewajiban perpajakan baik sebagai Wajib Pajak maupun sebagai pihak pemotong dan pemungut pajak. Sebagai Wajib Pajak, kontribusi utama Bank Sulteng berasal dari pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Selain itu, Bank Sulteng juga telah melaksanakan kewajibannya sebagai pemotong dan pemungut pajak atas berbagai transaksi yang merupakan objek pajak, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

In 2025, Bank Sulteng implemented Good Corporate Governance principles transparently and accountably, particularly in managing tax obligations in accordance with applicable laws and regulations. Bank Sulteng's contribution to the state is realized through the fulfillment of tax obligations, both as a Taxpayer and as a tax withholder and collector. As a Taxpayer, Bank Sulteng's primary contribution originates from the fulfillment of Corporate Income Tax (CIT) obligations. Furthermore, Bank Sulteng has also fulfilled its obligations as a tax withholder and collector on various transactions that constitute tax objects, in accordance with applicable tax regulations.

ASPEK PEMASARAN DAN PANGSA PASAR
MARKETING ASPECTS AND MARKET SHARE

STRATEGI PEMASARAN TAHUN 2025

Bank Sulteng senantiasa berupaya meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga dengan menitikberatkan pada inovasi produk dan layanan. Selain itu, Bank juga mendorong pengembangan sumber fee based income guna memperkuat kapabilitas produk serta kualitas layanan dan hubungan dengan nasabah. Upaya tersebut didukung oleh strategi komunikasi pemasaran yang efektif dan efisien untuk membangun citra bisnis yang positif, serta pelaksanaan berbagai program edukasi dan pemasaran guna memperluas pengetahuan dan mempererat relasi dengan nasabah.

Beberapa inisiatif strategis yang dijalankan Bank Sulteng dalam rangka mendukung program pemasaran tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

a. Pelatihan *Office Channeling* merupakan salah satu inisiatif strategis Bank Sulteng yang bekerja sama dengan PT Taspen guna menjadikan Bank sebagai mitra layanan Taspen dalam pengurusan berkas calon pensiun, pemberian informasi ketaspenan, serta penerimaan dan penerusan klaim peserta kepada Kantor Cabang PT Taspen (Persero). Pelatihan ini bertujuan meningkatkan jumlah nasabah pensiun, memperkuat kompetensi tenaga funding, serta memberikan kemudahan layanan bagi nasabah pensiun tanpa harus datang langsung ke kantor Taspen. Program ini mendukung strategi peningkatan loyalitas nasabah dan penghimpunan DPK, dengan mitigasi risiko reputasi melalui pelatihan pelayanan khusus bagi penerima pensiun;

2025 MARKETING STRATEGY

Bank Sulteng continuously strives to increase the accumulation of Third-Party Funds (DPK) by emphasizing product and service innovation. In addition, the Bank also encourages the development of fee-based income sources to strengthen product capabilities as well as service quality and customer relationships. These efforts are supported by an effective and efficient marketing communication strategy to build a positive business image, along with the implementation of various educational and marketing programs to broaden knowledge and strengthen relations with customers.
Several strategic initiatives executed by Bank Sulteng to support the 2025 marketing program include the following:

a. Office Channeling Training is one of Bank Sulteng's strategic initiatives in collaboration with PT Taspen to establish the Bank as Taspen's service partner in processing prospective retirees' documents, providing Taspen-related information, and receiving and forwarding participant claims to PT Taspen (Persero) Branch Offices. This training aims to increase the number of pensioner customers, strengthen the competencies of funding officers, and provide service convenience for pensioner customers without the need to visit the Taspen office directly. This program supports the strategy of increasing customer loyalty and accumulating Third-Party Funds (DPK), with reputation risk mitigation through specialized service training for pension recipients;

b. Pelatihan Funding merupakan salah satu inisiatif strategis Bank Sulteng untuk meningkatkan kapabilitas dan kinerja tenaga funding melalui penguatan pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas yang relevan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi tenaga funding di seluruh cabang sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal dan memuaskan bagi nasabah. Inisiatif ini sejalan dengan strategi Bank dalam meningkatkan loyalitas nasabah serta mendorong pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK);
c. Aplikasi *Digital Funding* (Monitoring, Laporan Insentif, dan Evaluasi Funding) merupakan inisiatif strategis Bank Sulteng berupa pengembangan aplikasi yang digunakan oleh petugas funding untuk menyusun daftar kunjungan nasabah, memantau aktivitas di lapangan, serta melaporkan pencapaian dan evaluasi kinerja. Aplikasi ini bertujuan membantu Bank dalam memonitor kinerja funding, mengukur pencapaian target, mempermudah penyusunan laporan, serta mendukung pemberian insentif secara lebih terukur. Bagi nasabah, inisiatif ini diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan. Secara strategis, pengembangan aplikasi ini mendukung upaya peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Sulteng melalui pengelolaan kinerja *funding* yang lebih efektif dan terintegrasi;
d. Program Prima Optima merupakan inisiatif strategis Bank Sulteng berupa pemberian hadiah langsung kepada nasabah baru maupun nasabah lama yang membuka rekening atau menempatkan dana segar *(fresh fund)* dengan mekanisme pemblokiran dana sesuai skema program. Tujuan utama program ini adalah meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), khususnya tabungan, serta menambah *Number of Accounts* (NOA) baru. Bagi nasabah, program ini memberikan manfaat berupa *cash back* atau hadiah barang sesuai ketentuan. Secara strategis, Program Prima Optima mendukung peningkatan basis nasabah dan pertumbuhan dana murah Bank Sulteng;
e. Layanan Nasabah Prioritas merupakan inisiatif strategis Bank Sulteng yang memberikan fasilitas dan pelayanan khusus kepada nasabah dengan kriteria tertentu sebagai bentuk penghargaan atas loyalitas dan kontribusinya. Layanan ini bertujuan meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kepada nasabah prioritas. Bagi nasabah, program ini memberikan berbagai keistimewaan yang tidak diperoleh nasabah reguler. Secara strategis, layanan ini mendukung peningkatan loyalitas nasabah secara berkelanjutan yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan DPK Bank Sulteng;

b. Funding Training is a strategic initiative by Bank Sulteng to enhance the capabilities and performance of funding officers through the reinforcement of knowledge, skills, and creativity relevant to their duties and responsibilities. This training aims to improve the competencies of funding officers across all branches, enabling them to deliver more optimal and satisfactory services to customers. This initiative aligns with the Bank's strategy to increase customer loyalty and drive the growth of Third-Party Funds (DPK);

c. The Digital Funding Application (Monitoring, Incentive Reports, and Funding Evaluation) is a strategic initiative by Bank Sulteng comprising the development of an application utilized by funding officers to compile customer visit lists, monitor field activities, and report achievements and performance evaluations. This application aims to assist the Bank in monitoring funding performance, measuring target achievements, facilitating report compilation, and supporting a more measurable incentive distribution. For customers, this initiative is expected to improve service quality. Strategically, the development of this application supports efforts to increase Bank Sulteng's Third-Party Funds (DPK) through a more effective and integrated funding performance management;
d. The Prima Optima Program is a strategic initiative by Bank Sulteng involving the provision of direct rewards to new and existing customers who open accounts or place fresh funds with a fund-blocking mechanism according to the program scheme. The primary objective of this program is to increase the accumulation of Third-Party Funds (DPK), particularly savings, and to increase the Number of Accounts (NOA). For customers, this program provides benefits in the form of cash back or physical rewards according to the provisions. Strategically, the Prima Optima Program supports the expansion of the customer base and the growth of Bank Sulteng's low-cost funds;
e. Priority Customer Service is a strategic initiative by Bank Sulteng that provides exclusive facilities and services to customers meeting specific criteria as a form of appreciation for their loyalty and contribution. This service aims to increase the accumulation of Third-Party Funds (DPK) while enhancing service quality for priority customers. For customers, this program offers various privileges not available to regular customers. Strategically, this service supports the sustainable enhancement of customer loyalty, which ultimately impacts the growth of Bank Sulteng's DPK;

f. Program Tabungan Rencana Qurban merupakan inisiatif strategis Bank Sulteng yang ditujukan untuk membantu masyarakat merencanakan pembelian hewan qurban pada Hari Raya Idul Adha melalui mekanisme autodebet. Program ini dirancang untuk memudahkan nasabah dalam menabung secara bertahap guna memenuhi kebutuhan biaya qurban yang relatif besar, sesuai dengan jenis hewan yang dipilih. Program ini bertujuan meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK), khususnya dana murah dalam bentuk tabungan, sekaligus memberikan kemudahan perencanaan keuangan bagi nasabah. Secara strategis, program ini mendukung perolehan *Number of Accounts* (NOA) baru serta peningkatan penghimpunan dana tabungan Bank Sulteng;

g. Pengoptimalan Mobil Bus Layanan Kas Berjalan merupakan inisiatif strategis Bank Sulteng untuk memaksimalkan peran layanan perbankan keliling dalam menjangkau masyarakat, khususnya di wilayah yang belum terlayani jaringan kantor fisik. Melalui layanan ini, Bank dapat menjaring nasabah baru, meningkatkan penghimpunan tabungan dan giro melalui pendekatan jemput bola, serta menyesuaikan operasional berdasarkan kebutuhan dan efektivitas lokasi. Bagi masyarakat, layanan ini memberikan kemudahan akses transaksi tanpa harus datang ke kantor cabang, terutama bagi nasabah di daerah terpencil atau dengan keterbatasan mobilitas. Secara strategis, program ini mendukung perluasan jangkauan pasar dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga tanpa perlu membuka kantor cabang baru;

h. Program HUT Bank Sulteng merupakan inisiatif promosi berupa pemberian hadiah kepada nasabah yang membuka rekening tabungan dengan saldo awal sesuai ketentuan penempatan dana yang ditetapkan. Program ini berlangsung pada Triwulan I hingga Triwulan II tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp500.000.000. Tujuan program tersebut adalah menarik nasabah baru, meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), serta mendorong pertumbuhan pendapatan melalui biaya administrasi dan bunga. Bagi nasabah, program ini memberikan manfaat berupa hadiah menarik sekaligus meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan keuangan. Secara strategis, program ini mendukung penambahan *Number of Accounts* (NOA) baru dan peningkatan DPK Bank Sulteng.

PANGSA PASAR

Dalam industri perbankan nasional, Perseroan sebagai bagian dari kelompok Bank Pembangunan Daerah (BPD) beroperasi di tengah dominasi Bank Umum Konvensional (BUK), khususnya bank dengan skala besar yang memiliki jaringan dan kapabilitas lebih luas. Meskipun demikian, Bank Sulteng tetap mampu

f. The Qurban Planning Savings Program is a strategic initiative by Bank Sulteng aimed at assisting the community in planning the purchase of sacrificial animals for Eid al-Adha through an auto-debit mechanism. This program is designed to facilitate customers in saving progressively to meet the relatively large cost of Qurban, depending on the type of animal selected. This program aims to increase Third-Party Funds (DPK), particularly low-cost funds in the form of savings, while providing financial planning convenience for customers. Strategically, this program supports the acquisition of new Number of Accounts (NOA) and the increase in the accumulation of Bank Sulteng's savings funds;

g. The Optimization of Mobile Cash Service Buses is a strategic initiative by Bank Sulteng to maximize the role of mobile banking services in reaching the community, especially in areas not yet served by physical office networks. Through this service, the Bank can acquire new customers, increase the accumulation of savings and current accounts through a proactive approach, and adjust operations based on location needs and effectiveness. For the community, this service provides convenient transaction access without having to visit a branch office, particularly for customers in remote areas or with mobility constraints. Strategically, this program supports market reach expansion and the growth of Third-Party Funds without the necessity of opening new branch offices;

h. Bank Sulteng's Anniversary Program is a promotional initiative involving the provision of rewards to customers who open savings accounts with an initial balance in accordance with the stipulated fund placement provisions. This program runs from the First Quarter to the Second Quarter of 2025 with a budget of Rp500,000,000. The objective of the program is to attract new customers, increase the accumulation of Third-Party Funds (DPK), and drive revenue growth through administration fees and interest. For customers, this program offers attractive reward benefits while raising awareness regarding financial management. Strategically, this program supports the addition of new Number of Accounts (NOA) and the increase of Bank Sulteng's DPK.

MARKET SHARE

Within the national banking industry, the Company, as part of the Regional Development Bank (BPD) group, operates amidst the dominance of Conventional Commercial Banks (BUK), particularly large banks with broader networks and capabilities. Despite this, Bank Sulteng has maintained its market share by

menjaga pangsa pasar dengan mengandalkan fokus pada pembiayaan sektor produktif serta layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah operasionalnya.

Di antara kelompok BPD, Perseroan menunjukkan posisi yang kompetitif dengan pangsa pasar yang terjaga, terutama di Sulawesi Tengah. Kedekatan dengan pemerintah daerah serta pemahaman terhadap karakteristik ekonomi lokal menjadi keunggulan utama dalam meningkatkan penghimpunan dana dan penyaluran kredit. Bank Sulteng terus melakukan upaya penguatan digitalisasi dan peningkatan kualitas layanan untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan daya saing.

focusing on financing productive sectors and providing services tailored to the needs of the communities in its operational areas.

Among the regional development banks (BPD), the Company demonstrates a competitive position with a maintained market share, particularly in Central Sulawesi. Close ties with the local government and an understanding of local economic characteristics are key advantages in increasing fundraising and lending. Bank Sulteng continues to strengthen digitalization and improve service quality to expand market share and enhance competitiveness.

KEBIJAKAN DIVIDEN
DIVIDEND POLICY

Bank Sulteng menerapkan kebijakan pembagian Dividen Bank Sulteng sebagai berikut:

1. Membayarkan dividen tunai sebesar 70% dari laba bersih setiap tahunnya, yang besarnya akan diputuskan melalui RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi; dan,
2. Keputusan untuk membayar dividen tergantung pada laba, kondisi keuangan dan likuiditas, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Bank Sulteng setelah memperoleh persetujuan RUPS.

Bank Sulteng implements the following dividend distribution policy:

1. Paying an annual cash dividend of 70% of net income, the amount of which will be resolved through the General Meeting of Shareholders (GMS) based on the Board of Directors' recommendation; and,
2. The decision to pay dividends depends on profitability, financial and liquidity conditions, compliance with laws and regulations, and other factors deemed relevant by the Board of Directors of Bank Sulteng following the approval of the GMS.

Tabel Komposisi Pembagian Laba
Profit Sharing Composition Table

Pembagian Laba	Tahun Buku 2024	Tahun Buku 2023	Profit sharing
Dividen Tunai	70%	60%	Cash Dividends
Dividen Saham	-	-	Stock Dividends
Cadangan umum	30%	40%	General reserve
Jumlah Laba yang dibagikan	**100%**	**100%**	Amount of Profit distributed

Tabel Pengumuman dan Pembayaran Dividen Tahun Buku 2024 – 2023
Table of Dividend Announcements and Payments for Fiscal Year 2024 – 2023

Uraian	Tahun Buku 2024	Tahun Buku 2023	Description
Laba (Rugi) Bersih	242.231.516.003	257.575.111.108	Net Profit (Loss).
Laba (Rugi) per Lembar Saham	49.237	55.392	Profit (Loss) per Share
Jumlah Dividen Tunai	169.562.061.202	154.545.066.665	Cash Dividend Amount
Jumlah Dividen Saham	-	-	Amount of Stock Dividends
Cadangan Umum	72.669.454.801	103.030.044.443	General Reserve
Dividend Payout Ratio	70%	60%	Dividend Payout Ratio

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM
REALIZATION OF THE USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERINGS

Sampai dengan akhir tahun 2025, Bank Sulteng tidak pernah melakukan penawaran umum saham maupun penerbitan obligasi kepada publik melalui pasar modal. Oleh karena itu, Bank Sulteng tidak memiliki informasi terkait realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, termasuk jumlah dana yang diperoleh, rencana dan rincian penggunaan dana, saldo dana yang tersedia, serta persetujuan RUPS atau RUPO atas perubahan penggunaan dana tersebut.

Up to the end of 2025, Bank Sulteng has never conducted a public offering of shares or issued bonds to the public through the capital market. Therefore, Bank Sulteng does not possess information regarding the realization of the use of public offering proceeds, including the total funds raised, the plan and breakdown of the use of funds, the available fund balance, as well as the approval from the GMS or the General Meeting of Bondholders (RUPO) regarding changes in the use of said funds.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI, ATAU RESTRUKTURISASI HUTANG DAN/ATAU MODAL
MATERIAL INFORMATION REGARDING INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, ACQUISITION, OR DEBT AND/OR CAPITAL RESTRUCTURING

INVESTASI

Bank Sulteng melakukan penempatan dana pada berbagai instrumen efek-efek sebagai bagian dari strategi pengelolaan aset untuk mendukung peningkatan kinerja dan profitabilitas sepanjang tahun 2025. Rincian nilai investasi efek-efek Bank Sulteng per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut:

INVESTMENT

Bank Sulteng places funds in various securities instruments as part of its asset management strategy to support performance improvement and profitability throughout 2025. The breakdown of the investment value of Bank Sulteng's securities as of December 31, 2024, and December 31, 2025, is presented as follows:

Tabel Rincian Investasi Efek-Efek
Securities Investment Details Table

(dalam jutaan Rupiah) (in million rupiah)

BERDASARKAN JENIS DAN TUJUAN	2025	2024	Pertumbuhan Growth		BASED ON TYPE AND PURPOSE
			Rp	%	
1	2	3	4 = (2-3)	5 = (4/3)	1
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo:					**Held Until Maturity:**
Obligasi	17.000	32.000	(15.000)	(46,88)	Bond
Negotiable Certificate Deposit	-	-	-	-	Negotiable Certificate Deposit
Surat Berharga Negara	1.051.055	1.612.173	(561.118)	(34,81)	Government Securities
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)	2.261.500	700.000	1.561.500	223,07	Bank Indonesia Rupiah Securities (SRBI)
Surat Berharga Repo	300.000	200.000	100.000	50,00	Repo Securities
Diskonto Surat Berharga	(2.390)	(34.908)	32.518	(93,15)	Discount on Securities
Jumlah Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	3.627.165	2.509.265	1.117.900	44,55	**AMOUNT HELD UNTIL MATURITY**
Tersedia untuk Dijual:	-	-	-	-	Available for Sale:
Sertifikat Bank Indonesia	-	-	-	-	Bank Indonesia Certificate
Tersedia untuk Dijual:	-	-	-	-	**AVAILABLE FOR SALE:**
Jumlah Efek-Efek	3.627.165	2.509.265	1.117.900	44,55	Number of Securities
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	(50)	50	(100,00)	Allowance for impairment losses
JUMLAH BERSIH EFEK-EFEK	**3.627.165**	**2.509.215**	**1.117.950**	**44,55**	NET AMOUNT OF MARKETABLE SECURITIES

EKSPANSI

Pada tahun 2025, Bank Sulteng tidak melakukan kegiatan Ekspansi.

DIVESTASI

Bank Sulteng tidak melakukan kegiatan divestasi sepanjang tahun 2025.

AKUISISI

Sepanjang tahun 2025, Bank Sulteng tidak melakukan kegiatan akuisisi apapun.

RESTRUKTURISASI HUTANG/MODAL

Bank Sulteng tidak melakukan transaksi restrukturisasi utang dan/atau restrukturisasi modal sepanjang tahun 2025.

EXPANSION

In 2025, Bank Sulteng did not conduct any expansion activities.

DIVESTMENT

Bank Sulteng did not conduct any divestment activities throughout 2025.

ACQUISITION

Throughout 2025, Bank Sulteng did not conduct any acquisition activities.

DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

Bank Sulteng did not conduct any debt restructuring and/or capital restructuring transactions throughout 2025.



INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

MATERIAL TRANSACTION INFORMATION CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES

Transaksi material, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bapepam-LK Nomor: Kep-412/BL/2009, merupakan transaksi yang meliputi berbagai bentuk kegiatan seperti investasi pada badan usaha, proyek, atau aktivitas usaha tertentu. Transaksi tersebut dapat berupa pembelian, penjualan, pengalihan, atau pertukaran aset maupun segmen usaha, penyewaan aset, pemberian atau penerimaan pinjaman, pemberian jaminan perusahaan, serta penjaminan aset. Suatu transaksi dikategorikan sebagai transaksi material apabila nilainya mencapai atau melebihi 20% dari total ekuitas perusahaan, baik dilakukan dalam satu transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang saling terkait dan memiliki tujuan tertentu.

Material transactions, as stipulated in Bapepam-LK Regulation Number: Kep-412/BL/2009, are transactions that encompass various forms of activities such as investments in business entities, projects, or specific business activities. These transactions may take the form of purchases, sales, transfers, or exchanges of assets or business segments, asset leasing, provision or receipt of loans, provision of corporate guarantees, as well as asset pledging. A transaction is categorized as a material transaction if its value reaches or exceeds 20% of the company's total equity, whether executed in a single transaction or in several interrelated transactions with a specific purpose.

TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

Sepanjang tahun 2025, Bank Sulteng tidak melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor: Kep-412/BL/2009. Benturan kepentingan didefinisikan sebagai perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang berpotensi merugikan perusahaan.

Dengan demikian, seluruh kegiatan dan transaksi Bank Sulteng selama tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance)* dan bebas dari konflik kepentingan.

CONFLICT OF INTEREST TRANSACTIONS

Throughout 2025, Bank Sulteng did not engage in any transactions containing a conflict of interest as defined in Bapepam-LK Regulation Number: Kep-412/BL/2009. A conflict of interest is defined as a divergence between the company's economic interests and the personal interests of members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or principal shareholders that has the potential to disadvantage the company.
Therefore, all activities and transactions of Bank Sulteng during 2025 were executed in accordance with Good Corporate Governance principles and were free from conflicts of interest.

TRANSAKSI AFILIASI

Menurut Bapepam LK Nomor: Kep-412/BL/2009, definisi "Afiliasi", adalah:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara Pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari Pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
4. Hubungan antara Perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
5. Hubungan antara 2 (dua) Perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara Perusahaan dan Pemegang Saham Utama.

AFFILIATED TRANSACTIONS

According to Bapepam-LK Number: Kep-412/BL/2009, the definition of "Affiliate" is:

1. Family relations by marriage and descent up to the second degree, both horizontally and vertically;
2. The relationship between a Party and an employee, Director, or Commissioner of the said Party;
3. The relationship between 2 (two) companies where there are one or more common members of the Board of Directors or Board of Commissioners;
4. The relationship between a Company and a Party that, directly or indirectly, controls or is controlled by the said company;
5. The relationship between 2 (two) Companies that are controlled, directly or indirectly, by the same Party; or
6. The relationship between a Company and a Principal Shareholder.

Transaksi Afiliasi merupakan transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan atau entitas anak dengan pihak yang memiliki hubungan afiliasi, baik dengan Perusahaan maupun dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama. Berdasarkan ketentuan tersebut, selama tahun 2025 Bank Sulteng tidak memiliki transaksi yang termasuk dalam kategori transaksi afiliasi.

TRANSAKSI PIHAK BERELASI

1. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 7 Penyesuaian 2015) tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak berelasi", yang dimaksud dengan Pihak Berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi dengan entitas pelapor sebagai berikut:
   a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
      - Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama terhadap entitas pelapor; atau,
      - Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau,
      - Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
   b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal sebagai berikut:
      - Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
      - Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
      - Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
      - Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
      - Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
      - Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a).
      - Orang yang diidentifikasi huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas personil manajemen kunci entitas (entitas induk dari entitas).

Affiliated Transactions are transactions conducted by the Company or its subsidiaries with parties that have an affiliated relationship, either with the Company or with members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or principal shareholders. Based on these provisions, during 2025, Bank Sulteng did not have any transactions classified under the affiliated transaction category.

RELATED PARTY TRANSACTIONS

1. Based on the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK 7, 2015 Adjustment) concerning "Related Party Disclosures", a Related Party is a person or entity that is related to the reporting entity as follows:
   a. A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
      - Has control or joint control over the reporting entity; or,
      - Has significant influence over the reporting entity; or,
      - Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
   b. An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions apply:
      - The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary, and fellow subsidiary is related to the others).
      - One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
      - Both entities are joint ventures of the same third party.
      - One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
      - The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
      - The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in point (a).
      - A person identified in point (a) (i) has significant influence over the entity (the parent of the entity) key management personnel.

Semua transaksi yang jumlahnya signifikan dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan syarat normal, sebagaimana dilakukan dengan Pihak berelasi, maupun tidak, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan PSAK 7 (Penyesuaian 2015), transaksi antara bank dengan pemerintah, BUMN lainnya dan perusahaan-perusahaan yang dimiliki, atau dikendalikan negara, termasuk Lembaga Penjamin Simpanan tidak dikategorikan sebagai transaksi dengan pihak berelasi.

2. Berdasarkan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK No.Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012, entitas yang berelasi dengan pemerintah merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham dari entitas.
   Pihak yang bukan merupakan pihak berelasi adalah sebagai berikut:
   a. Dua entitas hanya karena memiliki Direktur atau personil manajemen kunci yang sama atau karena personil manajemen kunci dari satu entitas mempunyai pengaruh sifnifikan atas entitas lain.
   b. Dua venturer hanya karena mereka mengendalikan bersama atas ventura bersama.
   c. Penyandang dana, Serikat Dagang, Entitas Pelayanan Publik, Serta Kementerian dan Instansi Pemerintah yang tidak mengendalikan, mengendalikan bersama atau memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor, hanya karena ada keharusan *(simply by virtue)* dalam pelaksanaan urusan normal dengan entitas (meskipun pihak-pihak tersebut dapat membatasi kebebasan entitas atau ikut serta dalam proses pengambilan keputusan).
   d. Pelanggan, pemasok, pemegang hak waralaba, distributor, atau agen umum yang mengadakan transaksi usaha dengan volume signifikan yang hanya disebabkan ketergantungan ekonomis yang diakibatkan oleh keadaan.

All transactions of significant amounts with related parties, whether conducted under normal terms as with related parties or otherwise, have been disclosed in the financial statements.

Based on PSAK 7 (2015 Adjustment), transactions between the bank and the government, other State-Owned Enterprises (BUMN), and state-owned or state-controlled companies, including the Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS), are not categorized as related party transactions.

2. Based on the Attachment to the Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-347/BL/2012 dated June 25, 2012, government-related entities are entities that are controlled, jointly controlled, or significantly influenced by the government. The government in this context is the Minister of Finance or the Regional Government who is the shareholder of the entity.
   Parties that are not related parties are as follows:
   a. Two entities simply because they have a Director or other key management personnel in common or because a member of key management personnel of one entity has significant influence over the other entity.
   b. Two venturers simply because they share joint control over a joint venture.
   c. Providers of finance, Trade Unions, Public Utilities, and Government Departments and Agencies that do not control, jointly control, or significantly influence the reporting entity, simply by virtue of their normal dealings with an entity (even though they may affect the freedom of action of an entity or participate in its decision-making process).
   d. A customer, supplier, franchisor, distributor, or general agent with whom an entity transacts a significant volume of business, simply by virtue of the resulting economic dependence.

NAMA PIHAK YANG BERTRANSAKSI DAN SIFAT HUBUNGAN

Dalam kegiatan normal usaha, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

NAMES OF TRANSACTING PARTIES AND NATURE OF RELATIONSHIP

In the normal course of business, the Bank conducts transactions with related parties due to ownership and/or management relationships. All transactions with related parties have been carried out under mutually agreed policies and terms.

Tabel Pihak Berelasi
Related Party Table

NO	Pihak-pihak Berelasi	Sifat Hubungan Istimewa Nature of Special Relationship	Transaksi Transactions	Related Parties
1	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Pemegang saham Shareholders	Simpanan giro Current Account	Central Sulawesi Provincial Government
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong	Pemegang saham Shareholders	Simpanan Giro Current Account	Parigi Moutong Regency Regional Government
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai	Pemegang saham Shareholders	Simpanan Giro Current Account	Banggai Regency Regional Government
4	Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli	Pemegang saham Shareholders	Simpanan Giro Current Account	Tolitoli Regency Regional Government
5	Pemerintah Daerah Kabupaten Poso	Pemegang saham Shareholders	Simpanan giro Current Account	Poso Regency Regional Government
6	Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala	Pemegang saham Shareholders	Simpanan Giro Current Account	Donggala Regency Regional Government
7	Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Pemegang saham Shareholders	Simpanan Giro Current Account	Banggai Kepulauan Regency Regional Government
8	Pemerintah Daerah Kabupaten Buol	Pemegang saham Shareholders	Simpanan Giro Current Account	Buol Regency Regional Government
9	Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Unauna	Pemegang saham Shareholders	Simpanan giro Current Account	Tojo Unauna Regency Regional Government
10	Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara	Pemegang saham Shareholders	Simpanan Giro Current Account	North Morowali Regency Regional Government
11	Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali	Pemegang saham Shareholders	Simpanan Giro Current Account	Morowali Regency Regional Government
12	Pemerintah Daerah Kota Palu	Pemegang saham Shareholders	Simpanan Giro Current Account	Palu City Regional Government
13	Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut	Pemegang saham Shareholders	Simpanan Giro Current Account	Banggai Laut Regency Regional Government
14	Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi	Pemegang saham Shareholders	Simpanan Giro Current Account	Sigi Regency Regional Government
15	PT. Mega Corpora	Pemegang saham Shareholders	Simpanan Giro Current Account	PT. Mega Corpora

KEWAJARAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Bank Sulteng melakukan transaksi usaha dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan kepemilikan dan/atau manajemen yang sama dengan Bank. Selain pinjaman karyawan kepada karyawan kunci, transaksi tersebut terutama terkait kegiatan pinjam meminjam dana dalam rangka operasional normal Bank dan dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan yang wajar sebagaimana transaksi dengan pihak independen. Seluruh transaksi dengan pihak berelasi dilakukan berdasarkan kebijakan yang berlaku serta persyaratan yang telah disepakati bersama, sehingga tetap mencerminkan prinsip kewajaran dan tata kelola yang baik.

FAIRNESS AND REASONS FOR CONDUCTING TRANSACTIONS

Bank Sulteng conducts business transactions with parties that share common ownership and/or management with the Bank. Apart from employee loans to key personnel, these transactions primarily relate to the borrowing and lending of funds within the framework of the Bank's normal operations and are executed under fair terms and conditions analogous to transactions with independent third parties. All transactions with related parties are conducted based on applicable policies and mutually agreed terms, thus consistently reflecting the principles of fairness and good corporate governance.

REALISASI TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Berikut rincian saldo transaksi dengan pihak-pihak berelasi pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

REALIZATION OF RELATED PARTY TRANSACTIONS

The breakdown of transaction balances with related parties as of December 31, 2025, and 2024 is detailed in the following table.

Tabel Realisasi Transaksi Pihak Berelasi
Related Party Transaction Realization Table

(dalam jutaan) (in million)

Uraian	2025	2024	Description
ASET	13.648.944	12.922.848	ASSETS
Kredit yang diberikan dan pembiayaan	8.548.013	8.381.213	Credits and financing
Karyawan/pihak internal	19.367	21.503	Employees / internal parties
% terhadap jumlah aset	0,14%	0,17%	% to total assets
LIABILITAS	11.937.889	11.325.800	LIABILITIES
Simpanan nasabah	8.726.569	9.258.490	Customer deposits
Simpanan dari nasabah	35.704	82.458	Savings from customers
% terhadap jumlah liabilitas	0,30%	0,73%	% to total liabilities
Simpanan dari bank lain	1.275.000	530.000	Deposits from other banks
% terhadap jumlah liabilitas	10,68%	4,68%	% to total liabilities

Simpanan nasabah tersebut berasal dari Pemerintah Daerah dan perusahaan-perusahaan yang kepemilikannya berada pada pemegang saham akhir yang sama. Sementara itu, simpanan dari bank lain merupakan dana yang berasal dari Bank Mega Dan Bank BPD Sulutgo yang juga dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama.

These customer deposits originate from the Regional Government and companies whose ownership rests with the same ultimate shareholders. Meanwhile, deposits from other banks constitute funds originating from Bank Mega and Bank BPD Sulutgo, which are also owned by the same ultimate shareholders.

KEBIJAKAN MEKANISME REVIEW ATAS TRANSAKSI DAN PEMENUHAN PERATURAN DAN KETENTUAN TERKAIT

Seluruh transaksi telah melalui proses penelaahan sesuai dengan karakteristik masing-masing transaksi. Setiap transaksi dilakukan analisis kelayakan, termasuk analisis kredit atas fasilitas yang diberikan kepada pihak berelasi, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Hal yang sama juga diterapkan pada transaksi lainnya, seperti simpanan tabungan, giro, dan deposito. Bank Sulteng berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha secara *prudent*, serta memastikan seluruh transaksi telah memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku.

POLICIES FOR TRANSACTION REVIEW MECHANISMS AND COMPLIANCE WITH RELEVANT LAWS AND REGULATIONS

All transactions have undergone a review process in accordance with the characteristics of each respective transaction. Each transaction is subject to a feasibility analysis, including a credit analysis for facilities granted to related parties, while continually upholding the prudential principle. The same principle is applied to other transactions, such as savings accounts, demand deposits, and time deposits. Bank Sulteng is committed to conducting its business activities prudently and ensuring that all transactions comply with applicable laws and regulations.

PERUBAHAN PERATURAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA BANK
REGULATORY CHANGES AND THEIR IMPACT ON BANK PERFORMANCE

Pada tahun 2025, tidak terdapat perubahan maupun penerbitan peraturan baru dari otoritas regulator yang memberikan dampak material terhadap kinerja Bank selama periode tersebut.

In 2025, there were no changes or issuances of new regulations by regulatory authorities that had a material impact on the Bank's performance during the period.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI TERHADAP KINERJA BANK
CHANGES IN ACCOUNTING POLICY ON BANK PERFORMANCE

Bank Sulteng menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru yang efektif sejak tanggal 1 Januari 2021. Bank Sulteng telah menetapkan Perubahan Kebijakan Akuntansi seperti yang disyaratkan sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi. Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan dalam rangka mematuhi PSAK yang berlaku relevan dengan operasional Bank Sulteng. Terdapat standar baru dan penyesuaian atau amendemen terhadap beberapa standar yang masih berlaku dan relevan dengan operasi Bank yang berlaku efektif sejak tanggal penetapan Perubahan Kebijakan Akuntansi ini.

Bank Sulteng implements new Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) effective from January 1, 2021. Bank Sulteng has adopted Changes in Accounting Policies as required in accordance with the transitional provisions in the respective standards and interpretations. Changes in accounting policies are made in order to comply with the applicable PSAK relevant to Bank Sulteng's operations. There are new standards and adjustments or amendments to several existing standards that are relevant to the Bank's operations, which are effective from the adoption date of these Changes in Accounting Policies.

PSAK NOMOR 16: "ASET TETAP" (REVISI TAHUN 2011)

Bank memilih untuk menggunakan metode biaya untuk mengukur Aset Tetapnya. Aset Tetap, kecuali tanah, dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai (jika ada) berdasarkan PSAK Nomor 16: "Aset Tetap" (Revisi Tahun 2011). Aset Tetap, kecuali tanah dan bangunan, disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda *(double-declining balance method).* Bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus *(straightline method).* Aset Tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan mengalokasikan harga perolehan sepanjang estimasi masa manfaatnya.

Metode penyusutan, umur manfaat dan nilai sisa tetap ditelaah minimal setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian terhadap beban penyusutan tahun berjalan. Biaya pemeliharaan dan perbaikan dicatat sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat dikapitalisasi dan disusutkan. Aset Tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang telah dijual, dikeluarkan dari kelompok Aset Tetap yang bersangkutan, dan atas laba atau rugi yang diperoleh/diderita dilaporkan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun yang bersangkutan. Jumlah tercatat Aset Tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari

PSAK NUMBER 16: "FIXED ASSETS" (2011 REVISION)

The Bank elected to use the cost method to measure its Fixed Assets. Fixed Assets, except land, are recorded at cost less accumulated depreciation and impairment losses (if any) based on PSAK Number 16: "Fixed Assets" (2011 Revision). Fixed Assets, excluding land and buildings, are depreciated using the double-declining balance method. Buildings are depreciated using the straight-line method. Fixed Assets, except land, are depreciated by allocating the acquisition cost over their estimated useful lives.

The depreciation method, useful lives, and residual values are reviewed at least at each financial year-end, and adjustments are made to the depreciation expense for the current year. Maintenance and repair costs are recognized as expenses as incurred. Expenditures that extend the useful life are capitalized and depreciated. Fixed Assets that are no longer in use or have been sold are removed from the respective Fixed Assets group, and the resulting gain or loss generated/incurred is reported in the statement of comprehensive income for the respective year. The carrying amount of a Fixed Asset is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from the derecognition

penghentian pengakuan (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif pada tahun aset tersebut dihentikan.

PSAK NOMOR 46: "PAJAK PENGHASILAN" (REVISI TAHUN 2014)

Bank menerapkan PSAK Nomor 46: "Pajak Penghasilan" (Revisi 2014) dimana Beban Pajak tahun berjalan ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum dikompensasikan, sepanjang perbedaan temporer dan rugi fiskal yang belum dikompensasikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal posisi laporan keuangan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba fiskal yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan yang telah diakui sebelumnya.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah secara subtantif telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Tangguhan" dan termasuk dalam laba atau rugi neto tahun berjalan, kecuali untuk transaksi transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

PSAK NOMOR 48: "PENURUNAN NILAI ASET" (REVISI TAHUN 2014)

PSAK Nomor 48: "Penurunan Nilai Aset" (Revisi Tahun 2014) menetapkan prosedur-prosedur yang diterapkan entitas agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkannya. Suatu aset dicatat melebihi jumlah terpulihkannya jika jumlah tersebut melebihi jumlah yang akan dipulihkan melalui penggunaan atau penjualan aset. Pada kasus demikian, aset mengalami penurunan nilai. PSAK yang direvisi ini juga menentukan kapan entitas akan membalik suatu rugi penurunan nilai dan pengungkapan yang diperlukan.

of an asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the statement of comprehensive income in the year the asset is derecognized.

PSAK NUMBER 46: "INCOME TAXES" (2014 REVISION)

The Bank applies PSAK Number 46: "Income Taxes" (2014 Revision) where the current tax expense is determined based on the estimated taxable income for the current year. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at each reporting date.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and uncompensated fiscal losses, to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the deductible temporary differences and uncompensated fiscal losses can be utilized. The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each statement of financial position date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the statement of financial position date. The tax effects related to the provision for and/or reversal of all temporary differences during the year, including the effect of changes in tax rates, are recognized as "Deferred Income Tax Benefit (Expense)" and included in the net income or loss for the current year, except for transactions previously charged or credited directly to equity.

PSAK NUMBER 48: "IMPAIRMENT OF ASSETS" (2014 REVISION)

PSAK Number 48: "Impairment of Assets" (2014 Revision) prescribes the procedures applied by an entity to ensure that its assets are carried at no more than their recoverable amount. An asset is carried at more than its recoverable amount if its carrying amount exceeds the amount to be recovered through use or sale of the asset. In such cases, the asset is described as impaired. This revised PSAK also specifies when an entity should reverse an impairment loss and the necessary disclosures.

Pada setiap akhir periode pelaporan, Bank Sulteng menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian pada tanggal laporan atas penurunan nilai aset tertentu (yaitu aset tidak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset tidak berwujud yang belum dapat digunakan, atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Bank akan membuat estimasi atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasilan Kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi komprehensif sebagai "rugi penurunan nilai". Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilai pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik aset.

PSAK NOMOR 71: "INSTRUMEN KEUANGAN"

PSAK Nomor 71: "Instrumen Keuangan" mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan Bank. PSAK ini juga mengatur bahwa aset keuangan dengan fitur pelunasan dipercepat yang menghasilkan kompensasi negatif dapat memenuhi kualifikasi sebagai arus kas kontraktual yang berasal dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah terutang.

ASET KEUANGAN

Aset keuangan dapat diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut ini terpenuhi:

a. Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan,

At the end of each reporting period, Bank Sulteng assesses whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required (i.e., intangible assets with indefinite useful lives, intangible assets not yet available for use, or goodwill acquired in a business combination), the Bank makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or Cash-Generating Unit's (CGU) fair value less costs to sell and its value in use, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses of continuing operations are recognized in the statement of comprehensive income as "impairment loss". In assessing value in use, the estimated future net cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

PSAK NUMBER 71: "FINANCIAL INSTRUMENTS"

PSAK Number 71: "Financial Instruments" establishes the classification and measurement of financial instruments based on the characteristics of the contractual cash flows and the entity's business model; the expected credit loss method for impairment which produces more timely, relevant, and understandable information for users of financial statements; hedge accounting that better reflects the entity's risk management by introducing more general requirements based on the Bank's judgment. This PSAK also stipulates that financial assets with a prepayment feature that yields negative compensation may qualify as contractual cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

FINANCIAL ASSETS

A financial asset is measured at amortised cost if both of the following conditions are met:

a. The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and,

b. Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga *(solely payments of principal and interest)* dari jumlah pokok terutang.

LIABILITAS KEUANGAN

Bank Sulteng menetapkan Klasifikasi liabilitas keuangan dengan mengukur biaya perolehan diamortisasi (*Financial Liability at Amortised Cost/* FLAC). Kriteria untuk menetapkan liabilitas keuangan di FLAC adalah dengan menerapkan opsi nilai wajar liabilitas.

PERUBAHAN PENURUNAN NILAI ATAS ASET KEUANGAN

Penerapan PSAK Nomor 71: "Instrumen Keuangan" telah mengubah metode perhitungan kerugian penurunan nilai dari pendekatan kerugian yang telah terjadi *(incurred loss)* sesuai PSAK Nomor 55: "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", menjadi pendekatan kerugian kredit ekspektasian *(expected credit loss).* Bank Sulteng mengakui penyisihan kerugian kredit ekskpektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekskpektasian pada investasi instrumen ekuitas.

Bank menerapkan pendekatan tiga tahap untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian (*Expected Credit Losses/* ECL) pada instrumen utang yang dicatat dengan biaya perolehan diamortisasi dan FVOCI. Aset bermigrasi melalui tiga tahap berikut berdasarkan perubahan kualitas kredit sejak pengakuan awal:

- *Stage* 1: mencakup instrumen keuangan yang tidak memiliki peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal atau memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan. Untuk instrumen-instrumen keuangan ini, akan berlaku perhitungan ECL 12 bulan. Aset keuangan dalam *stage 1* termasuk fasilitas dimana risiko kredit telah membaik dan aset keuangan dapat direklasifikasi dari *stage 2*.
- *Stage 2:* mencakup instrumen keuangan yang mengalami peningkatan risiko kredit sejak pengakuan awal (kecuali Bank merasa risiko kredit tergolong rendah pada tanggal pelaporan) namun belum terbukti adanya bukti penurunan nilai secara objektif. Untuk instrumen-instrumen ini, akan berlaku perhitungan ECL Seumur Hidup. ECL

b. The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

FINANCIAL LIABILITIES

Bank Sulteng determines the classification of financial liabilities by measuring Financial Liability at Amortised Cost (FLAC). The criterion for designating financial liabilities at FLAC is by applying the fair value option for liabilities.

CHANGES IN IMPAIRMENT OF FINANCIAL ASSETS

The implementation of PSAK Number 71: "Financial Instruments" has altered the calculation method for impairment losses from the incurred loss approach under PSAK Number 55: "Financial Instruments: Recognition and Measurement", to the expected credit loss approach. Bank Sulteng recognizes an allowance for expected credit losses on financial instruments that are not measured at fair value through profit or loss. There is no allowance for expected credit losses on equity instrument investments.

The Bank applies a three-stage approach to measure Expected Credit Losses (ECL) on debt instruments accounted for at amortised cost and FVOCI. Assets migrate through the following three stages based on the change in credit quality since initial recognition:

- Stage 1: includes financial instruments that have not had a significant increase in credit risk since initial recognition or that have low credit risk at the reporting date. For these financial instruments, a 12-month ECL calculation will apply. Financial assets in stage 1 include facilities where credit risk has improved and the financial asset has been reclassified from stage 2.
- Stage 2: includes financial instruments that have experienced a significant increase in credit risk since initial recognition (unless the Bank considers the credit risk to be low at the reporting date) but for which there is no objective evidence of impairment. For these instruments, a Lifetime ECL calculation will apply. Lifetime ECL is the expected credit losses

Seumur Hidup adalah kerugian kredit ekspektasian yang diharapkan dari semua kejadian gagal bayar yang mungkin terjadi selama perkiraan umur dari instrumen keuangan tersebut. *Stage 2* juga mencakup fasilitas dimana risiko kedit telah membaik dan aset keuangan telah direklasifikasi dari *Stage 3.*

- *Stage 3:* mencakup instrumen keuangan yang telah terbukti mengalami penurunan nilai secara objektif pada tanggal pelaporan. Kelompok ini biasanya terdiri atas debitur yang mengalami gagal bayar. Bank mencatat cadangan ECL Seumur Hidup.

Evaluasi penurunan nilai didasarkan pada konsep *Probability of Default* (PD), *Loss Given Default* (LGD) dan *Exposure at Default* (EAD) yang mempertimbangkan informasi masa lalu, terkini, dan masa mendatang.

PSAK NOMOR 73: "SEWA"

PSAK Nomor 73: "Sewa" menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (*right-of-use assets*) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 (dua) pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk:

1. sewa jangka pendek; dan,
2. sewa yang aset pendasarnya (*underlying assets*) bernilai rendah.

Pada tahun berjalan, Bank telah menerapkan PSAK Nomor 73 yang diterbitkan oleh DSAK IAI pada tahun 2017 efektif mulai tanggal 1 Januari 2020.

PSAK Nomor 73 menerapkan persyaratan baru atau amandemen sehubungan dengan akuntansi sewa. Standar ini memperkenalkan perubahan signifikan untuk akuntansi lessee dengan menghapus perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan, serta mensyaratkan pengakuan aset hak guna dan pengakuan liabilitas sewa pada saat dimulainya sewa untuk seluruh sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Berbeda dengan akuntansi lessee, persyaratan untuk akuntansi *lessor* sebagian besar tidak berubah.

that result from all possible default events over the expected life of the financial instrument. Stage 2 also includes facilities where credit risk has improved and the financial asset has been reclassified from Stage 3.

- Stage 3: includes financial instruments that have objective evidence of impairment at the reporting date. This group typically consists of defaulting debtors. The Bank records an allowance for Lifetime ECL.

The evaluation of impairment is based on the concept of Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD), and Exposure at Default (EAD), considering historical, current, and forward-looking information.

PSAK NUMBER 73: "LEASES"

PSAK Number 73: "Leases" establishes the principles for the recognition, measurement, presentation, and disclosure of leases by introducing a single accounting model requiring lessees to recognize right-of-use assets and lease liabilities. There are 2 (two) optional exemptions in recognizing lease assets and liabilities, namely for:

1. short-term leases; and,
2. leases for which the underlying asset is of low value.

In the current year, the Bank has applied PSAK Number 73 issued by the DSAK IAI in 2017, effective starting January 1, 2020.

PSAK Number 73 introduces new requirements or amendments regarding lease accounting. This standard introduces significant changes to lessee accounting by removing the distinction between operating and finance leases and requiring the recognition of a right-of-use asset and a lease liability at lease commencement for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. In contrast to lessee accounting, the requirements for lessor accounting remain largely unchanged.

KOMPONEN SUBSTANSIAL PENDAPATAN (BEBAN) OPERASIONAL LAINNYA
SUBSTANTIAL COMPONENTS OTHER OPERATING INCOME (EXPENSES)

Komponen Pendapatan Operasional Lainnya terdiri atas Pendapatan Provisi Kredit, Penerimaan Bunga Kredit Hapus Buku, Penerimaan Pokok Kredit Hapus Buku, Provisi Bank Garansi, Denda Kredit dan Deposito, Jasa Penggantian Cek dan Bilyet Giro, Jasa Administrasi, Jasa Transfer, Pendapatan Fee, dan pendapatan lainnya.

Secara total, Pendapatan Operasional Lainnya pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp78.206 juta, menurun sebesar 33,16% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp117.008 juta. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh turunnya Pendapatan Provisi Kredit, Jasa Administrasi, dan Pendapatan Fee, meskipun terdapat peningkatan pada beberapa komponen seperti Penerimaan Pokok Kredit Hapus Buku dan Denda Kredit dan Deposito.

Components of Other Operating Income consist of Loan Provision Income, Interest Income on Written-Off Loans, Principal Recovery on Written-Off Loans, Bank Guarantee Provision, Loan and Deposit Penalties, Check and Bilyet Giro Replacement Fees, Administration Fees, Transfer Fees, Fee-Based Income, and other income.

In total, Other Operating Income in 2025 was recorded at Rp78,206 million, decreasing by 33.16% compared to 2024 which amounted to Rp117,008 million. This decline was primarily influenced by the decrease in Loan Provision Income, Administration Fees, and Fee-Based Income, despite an increase in several components such as Principal Recovery on Written-Off Loans and Loan and Deposit Penalties.

DAMPAK PERUBAHAN PENDAPATAN BUNGA TERHADAP PENDAPATAN (BEBAN) OPERASIONAL LAINNYA
THE IMPACT OF CHANGES IN INTEREST INCOME ON OTHER OPERATING INCOME (EXPENSES)

Perubahan Pendapatan Bunga Terhadap Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya

Pendapatan bunga dan beban bunga diakui dalam laporan laba rugi komprehensif dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Metode suku bunga efektif merupakan tingkat bunga yang digunakan untuk mendiskontokan secara tepat estimasi arus kas masa depan selama umur instrumen keuangan, sehingga menghasilkan nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Dalam menentukan suku bunga efektif, Bank Sulteng melakukan estimasi terhadap arus kas masa depan dengan mempertimbangkan seluruh ketentuan kontraktual yang melekat pada instrumen keuangan tersebut, tanpa memperhitungkan potensi kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, biaya transaksi, serta premi atau diskonto lain yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif.

Changes in Interest Income on Other Operating Income (Expenses)

Interest income and interest expense are recognized in the statement of comprehensive income using the effective interest rate method. The effective interest rate method is the rate that exactly discounts estimated future cash flows through the expected life of the financial instrument, thereby yielding the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

In determining the effective interest rate, Bank Sulteng estimates future cash flows considering all contractual terms associated with the financial instrument, without factoring in future credit losses. This calculation encompasses all fees, provisions, transaction costs, and other premiums or discounts that form an integral part of the effective interest rate.

Apabila suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai akibat kerugian penurunan nilai, maka pengakuan pendapatan bunga selanjutnya didasarkan pada suku bunga efektif atas nilai tercatat setelah penurunan nilai. Kredit yang mengalami keterlambatan pembayaran pokok atau bunga selama 90 (sembilan puluh) hari atau lebih, atau kredit yang diragukan kolektibilitasnya, diklasifikasikan sebagai kredit mengalami penurunan nilai (*impairment*), dan pendapatan bunga atas kredit tersebut dihentikan pengakuannya sejak saat diklasifikasikan sebagai kredit bermasalah.

Penerapan metode suku bunga efektif pada tahun 2025 memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan bunga Bank Sulteng, yang pada akhirnya turut mendukung pertumbuhan laba operasional pada tahun berjalan.

If a financial asset or a group of financial assets becomes impaired due to an impairment loss, subsequent recognition of interest income is based on the effective interest rate applied to the carrying amount following the impairment. Loans experiencing payment delays of principal or interest for 90 (ninety) days or more, or loans with doubtful collectability, are classified as impaired loans, and the recognition of interest income on such loans ceases from the moment they are classified as non-performing loans.

The application of the effective interest rate method in 2025 positively contributed to the increase in Bank Sulteng's interest income, which ultimately supported the growth of operating profit during the current year.

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) TINGKAT KESEHATAN BANK
KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) BANK HEALTH LEVEL

Bank Sulteng melaksanakan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menerapkan metode berbasis risiko (*Risk Based Bank Rating/RBBR*) sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor berikut:

1. Profil Risiko (*Risk Profile*);
2. *Good Corporate Governance* (GCG);
3. Rentabilitas (*Earnings*); dan
4. Permodalan (*Capital*).

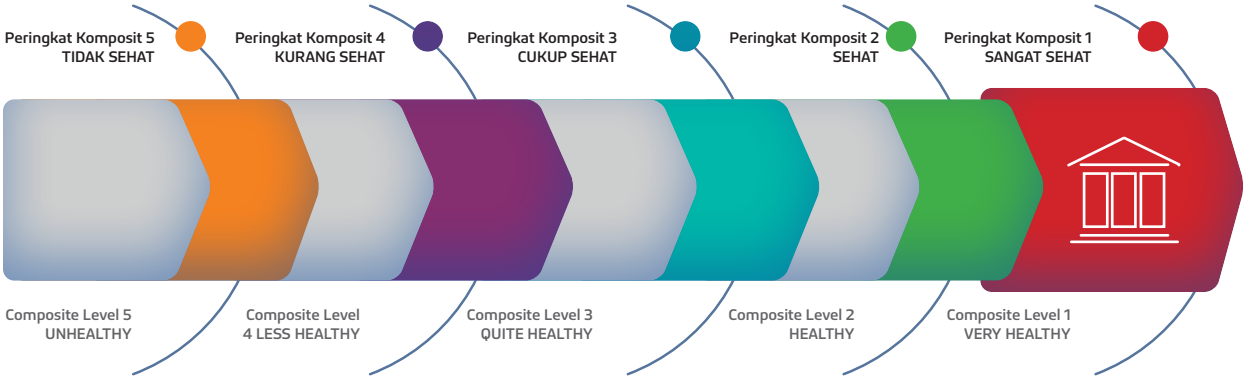
Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank ditentukan melalui evaluasi yang menyeluruh dan sistematis terhadap berbagai indikator sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Hasil penilaian tersebut diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) peringkat komposit, yaitu:

Bank Sulteng assesses its Bank Health Level by applying the Risk-Based Bank Rating (RBBR) method in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 4/POJK.03/2016 concerning the Assessment of Commercial Bank Health Level and Financial Services Authority Circular Letter Number 14/SEOJK.03/2017 concerning the Assessment of Commercial Bank Health Level.

The Bank Health Level assessment encompasses the evaluation of the following factors:

1. Risk Profile;
2. Good Corporate Governance (GCG);
3. Earnings; and
4. Capital.

The Bank Health Level Composite Rating is determined through a comprehensive and systematic evaluation of various indicators as stipulated in the Financial Services Authority regulations. The results of this assessment are classified into 5 (five) composite ratings, namely:



Berdasarkan hasil *self assessment* periode Desember 2025, Bank Sulteng memperoleh Peringkat Komposit (PK 2). Peringkat tersebut menunjukkan bahwa secara umum kondisi kesehatan Bank berada dalam kategori baik dan dinilai mampu menghadapi potensi dampak negatif yang signifikan akibat perubahan kondisi bisnis maupun faktor eksternal lainnya, sebagaimana tercermin dari hasil penilaian masing-masing faktor. Berikut disajikan hasil *self assessment* Tingkat Kesehatan Bank Sulteng untuk periode Desember 2025 dan Desember 2024.

Based on the self-assessment results for the December 2025 period, Bank Sulteng achieved a Composite Rating of 2 (PK 2). This rating indicates that, in general, the Bank's health condition is categorized as good and is considered capable of withstanding significant potential negative impacts arising from changes in business conditions or other external factors, as reflected in the assessment results of each factor. The following are the results of Bank Sulteng's Bank Health Level self-assessment for the periods of December 2025 and December 2024.

Tabel Tingkat Kesehatan Bank
Bank Health Level Table

NO	Faktor	Peringkat (*Rating*)		Factor
		Desember 2025 December 2025	**Desember 2024** December 2024	
1	Profil Risiko	2	2	Risk Profile
2	Penerapan Tata Kelola	2	2	Implementation of Governance
3	Rentabilitas	2	2	Profitability
4	Permodalan	2	2	Capital
Peringkat Komposit		2	2	Composite Rating

INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI
FINANCIAL INFORMATION CONTAINING EXTRAORDINARY AND INFREQUENT EVENTS

Selama tahun 2025, tidak terdapat kejadian yang bersifat luar biasa maupun jarang terjadi yang berdampak pada informasi keuangan Bank Sulteng, sebagaimana tercermin dalam Laporan Keuangan Bank Sulteng tahun 2025 yang telah diaudit dan disajikan.

During 2025, there were no extraordinary or infrequent events that impacted Bank Sulteng's financial information, as reflected in the audited and presented Bank Sulteng Financial Statements for 2025.

RENCANA & STRATEGI JANGKA PANJANG
LONG-TERM PLANS & STRATEGIES

Bank Sulteng berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat di berbagai kondisi perekonomian. Dalam rangka meningkatkan kinerja usaha, Bank telah menyusun rencana kegiatan dan strategi pelaksanaan yang terukur sesuai dengan target dan jangka waktu yang ditetapkan, baik untuk jangka pendek 1 tahun maupun jangka menengah 3 tahun, sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Bank dan Rencana Bisnis Bank RBB tahun 2025 sampai dengan 2027. Seluruh rencana dan strategi tersebut disusun dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko yang efektif, serta penguatan tata kelola perusahaan yang baik.

Berdasarkan kondisi tersebut, Bank Sulteng memiliki prospek yang cukup baik untuk melanjutkan pertumbuhan usaha. Sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Bank Sulteng antara lain sebagai berikut:

1. Semakin meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat Sulawesi Tengah sehingga mampu mendorong perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah. Hal tersebut tercemin dari adanya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), serta penurunan tingkat ketimpangan.
2. Berdasarkan kontribusi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Tengah cukup memiliki kontribusi terhadap perekonomian di wilayah timur Indonesia, khususnya di wilayah Sulampua (Sulawesi Maluku Papua).
3. Pembiayaan yang diberikan kepada ASN belum digarap secara maksimal.
4. Perkembangan *financial technology* yang memungkinkan perluasan jangkauan layanan dan pasar yang lebih luas dengan berbiaya rendah.
5. Pengembangan potensi pasar diluar ASN, seperti pembiayaan di bidang infrastruktur dan juga pembiayaan ekspor impor.

Berdasarkan berbagai peluang tersebut, Bank Sulteng optimis mampu terus meningkatkan kinerja dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Bank memiliki prospek usaha yang baik serta fondasi yang kuat untuk bertransformasi menjadi Bank Pembangunan Daerah yang andal dan kompetitif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Optimisme tersebut sejalan dengan komitmen Transformasi BPD–SI yang ditandatangani oleh seluruh Gubernur selaku Pemegang Saham dan DPRD se-Indonesia pada 26 Mei 2015 di Istana Negara Jakarta. Komitmen tersebut memberikan mandat kepada jajaran pengurus Bank

Bank Sulteng is committed to continuously playing an active role in supporting the recovery and strengthening of the community's economy across various economic conditions. In order to improve business performance, the Bank has formulated an activity plan and implementation strategy that is measurable in accordance with the established targets and timeframes, both for the 1-year short term and the 3-year medium term, as outlined in the Bank's Work Plan and the Bank's Business Plan (RBB) for 2025 to 2027. All of these plans and strategies are formulated while continually prioritizing the prudential principle, the implementation of effective risk management, and the strengthening of good corporate governance.

Based on these conditions, Bank Sulteng possesses favorable prospects to continue its business growth. Several opportunities that can be leveraged by Bank Sulteng include the following:

1. The increasing economic activity of the Central Sulawesi community, which is capable of driving improvements in the welfare level of the Central Sulawesi population. This is reflected in the decline of the Open Unemployment Rate (TPT), as well as the reduction in inequality levels.
2. Based on contribution, the Gross Regional Domestic Product (GRDP) of Central Sulawesi Province significantly contributes to the economy in eastern Indonesia, particularly in the Sulampua (Sulawesi, Maluku, Papua) region.
3. Financing provided to State Civil Apparatus (ASN) has not yet been maximized.
4. The development of financial technology enables the expansion of service reach and broader markets at a low cost.
5. The development of market potential beyond ASN, such as financing in the infrastructure sector as well as export-import financing.

Based on these various opportunities, Bank Sulteng is optimistic about its ability to continuously improve performance in the short, medium, and long term. The Bank has good business prospects and a strong foundation to transform into a reliable and competitive Regional Development Bank in supporting regional economic growth. This optimism is in line with the BPD-SI Transformation commitment signed by all Governors as Shareholders and Regional People's Representative Councils (DPRD) throughout Indonesia on May 26, 2015, at the State Palace in Jakarta. This commitment mandates the Bank's management to implement three

untuk melaksanakan tiga tahapan pengelolaan Bank Pembangunan Daerah dalam tiga fase transformasi, yaitu:

1. *Fondation Building* (Pembangunan Pondasi)
   Membangun proses pendukung melalui sinergi grup Bank Pembangunan Daerah dibidang produk dan layanan, Teknologi dan Informasi, *Governance, Risk & Compliance,* pengembangan Sumber Daya Manusia dan *corporate culture,* yang selanjutnya akan menjadi pijakan dalam memasuki fase ke 2 (dua) pertumbuhan Bank Sulteng.

2. *Growth Acceleration* (Percepatan Pertumbuhan)
   Menciptakan pertumbuhan cepat untuk mencapai posisi ketiga dengan memperkuat proses bisnis inti, ekpansi kredit komersial dan, memperkuat pinjaman sindikasi dan intensifikasi sinergi grup BPD, penguatan permodalan serta pemantapan *corporate culture.*

3. *Market Leadership* (Pemimpin Pasar)
   Membangun posisi sebagai pemimpin pasar dengan kapasitas inti dan pendukung yang disegani melalui transformasi grup BPD sebagai *holding corporation,* sehingga pada akhirnya dapat menjadi Bank yang kompetitif, kontributif dan berdaya saing. Dengan mempedomani *roadmap* Penguatan BPD 2024-2027 dimana terdapat 4 (empat) pilar utama yaitu Pertama, Penguatan Struktur dan Keunggulan BPD. Kedua, akselerasi Transformasi Digital BPD. Ketiga, Penguatan Peran BPD Terhadap Perekonomian Daerah dan Nasional. Keempat, Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan BPD. Dalam penguatan tersebut maka diharapkan arah Kebijakan Direksi yang akan dituangkan kedalam Rencana Bisnis Bank (RBB) Bank Sulteng tahun 2025-2027, sesuai dengan program Penguatan BPD sehingga arah kebijakan dan langkah strategis yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi Bank dapat lebih terarah.

Bank Sulteng telah menuangkan rencana kerja dan strategi pengembangan bank dalam Rencana Bisnis Bank tahun 2024 – 2026 untuk mewujudkan ketiga amanah tersebut. Hal tersebut juga sesuai dengan Visi Bank Sulteng yang telah ditetapkan, yaitu, "Menjadi Bank Terpercaya di Indonesia, Sehat, Maju Berkembang, Berdaya Saing, Berteknologi Tepat Guna Serta Berkontribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah". Sedangkan untuk mewujudkan Visi Bank Sulteng tersebut, Bank Sulteng telah menetapkan Misi Bank Sulteng yaitu:

- Menjalankan usaha sebagai bank umum secara konvensional;
- Penggerak dan pendorong laju perekonomian serta pembangunan daerah;

stages of Regional Development Bank management within three transformation phases, namely:

1. Foundation Building
   Building support processes through the synergy of the Regional Development Bank group in the areas of products and services, Information and Technology, Governance, Risk & Compliance, Human Resources development, and corporate culture, which will subsequently serve as a stepping stone entering the 2nd (second) phase of Bank Sulteng's growth.
2. Growth Acceleration
   Creating rapid growth to achieve the third position by strengthening core business processes, expanding commercial credit, strengthening syndicated loans and intensifying BPD group synergy, strengthening capital, and solidifying corporate culture.

3. Market Leadership
   Establishing a position as a market leader with respected core and supporting capacities through the transformation of the BPD group as a holding corporation, so that it can ultimately become a competitive, contributive, and resilient Bank. By adhering to the 2024-2027 BPD Strengthening roadmap, which comprises 4 (four) main pillars: First, Strengthening the Structure and Excellence of BPD. Second, accelerating BPD Digital Transformation. Third, Strengthening the Role of BPD in the Regional and National Economy. Fourth, BPD Regulation, Licensing, and Supervision. Within this strengthening framework, it is expected that the Board of Directors' Policy direction, which will be incorporated into Bank Sulteng's 2025-2027 Bank Business Plan (RBB), will align with the BPD Strengthening program so that the policy direction and strategic steps taken to achieve the Bank's vision and mission can be more focused.

Bank Sulteng has outlined the bank's work plan and development strategy in the 2024–2026 Bank Business Plan to realize these three mandates. This is also in accordance with the established Vision of Bank Sulteng, which is, "To Become a Trusted Bank in Indonesia that is Healthy, Advanced, Growing, Competitive, Utilizing Appropriate Technology, and Contributing to the Economic Growth of Central Sulawesi". Meanwhile, to realize this Vision of Bank Sulteng, Bank Sulteng has established the Mission of Bank Sulteng, namely:

- Conducting business as a conventional commercial bank;
- Acting as a driver and catalyst for the pace of the economy and regional development;

- Pemegang kas daerah, dan/atau melaksanakan pengelolaan kas Pemda;
- Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Bank Sulteng juga telah menetapkan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk mencapai Visi dan Misi sesuai dengan arah kebijakan Bank yang meliputi arah kebijakan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang berikut ini:

Kebijakan Jangka Pendek Bank

- Memastikan kecukupan likuiditas untuk memenuhi ketentuan likuiditas minimum yang ditetapkan oleh otoritas moneter, sekaligus menjaga ketersediaan dana guna memenuhi kebutuhan penarikan nasabah sehari-hari, mendukung kelancaran transaksi pembayaran, serta mengoptimalkan penempatan dana pada surat berharga jangka pendek maupun instrumen pasar uang;
- Mengoptimalkan penyaluran kredit konsumtif kepada ASN dengan target minimal 70%–80% dari total ASN di Provinsi Sulawesi Tengah, serta mendorong pembiayaan kepada kelompok usaha yang dikelola oleh keluarga ASN dalam bentuk kegiatan usaha produktif;
- Mengoptimalkan penerimaan atau pendapatan daerah melalui kerja sama dengan PT Bank Sulteng serta melanjutkan pengembangan program dan produk bisnis bank berbasis digitalisasi perbankan;
- Melakukan penyusunan, penyempurnaan, dan peninjauan kembali sejumlah Buku Pedoman Perusahaan (BPP) dan/atau Standar Operasional Prosedur (SOP) agar selaras dengan kebutuhan operasional dan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Bank

- Sasaran jangka menengah diarahkan pada pencapaian keuntungan dari kegiatan operasional dengan tata kelola yang sehat dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan nilai perusahaan, memaksimalkan kekayaan pemilik, serta meningkatkan kesejahteraan pegawai sebagai aset strategis Bank;
- Mengoptimalkan implementasi Kelompok Usaha Bank (KUB) yang telah disetujui melalui pemanfaatan sinergi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan teknologi informasi, serta pengembangan produk dan layanan perbankan;
- Melakukan evaluasi dan penyusunan *Corporate Plan* serta *Business Plan* Teknologi Informasi yang disesuaikan dengan dinamika pertumbuhan dan perkembangan teknologi informasi perbankan.

- Serving as the regional treasury holder and/or executing the management of Local Government cash;
- Serving as one of the sources of local own-source revenue.

Bank Sulteng has also established strategic steps to be taken to achieve the Vision and Mission in accordance with the Bank's policy direction, which includes the following short-term, medium-term, and long-term policy directions:

Bank's Short-Term Policies

- Ensuring adequate liquidity to meet the minimum liquidity requirements set by the monetary authority, while simultaneously maintaining fund availability to fulfill daily customer withdrawal needs, supporting the smoothness of payment transactions, and optimizing fund placements in short-term securities and money market instruments;

- Optimizing the disbursement of consumer loans to ASN with a minimum target of 70%–80% of the total ASN in Central Sulawesi Province, and encouraging financing for business groups managed by ASN families in the form of productive business activities;
- Optimizing regional receipts or revenues through collaboration with PT Bank Sulteng and continuing the development of the bank's digital-based business programs and products;
- Compiling, refining, and reviewing a number of Company Manuals (BPP) and/or Standard Operating Procedures (SOP) to ensure alignment with operational needs and applicable regulations.

Bank's Medium-Term and Long-Term Policies

- Medium-term objectives are directed towards achieving profitability from operational activities with sound and sustainable governance, thereby enhancing corporate value, maximizing owner's wealth, and improving employee welfare as the Bank's strategic asset;

- Optimizing the implementation of the approved Bank Business Group (KUB) through the utilization of synergies in improving the quality of human resources, strengthening information technology, and developing banking products and services;
- Evaluating and formulating a Corporate Plan and an Information Technology Business Plan adapted to the dynamics of banking information technology growth and development.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA
BUSINESS CONTINUITY INFORMATION

HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Bank Sulteng secara rutin melakukan evaluasi komprehensif atas kondisi keuangan dan operasional untuk memastikan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil penelaahan terakhir, manajemen meyakini bahwa prospek usaha Bank tetap positif serta didukung oleh sumber daya yang memadai untuk menjalankan kegiatan operasional secara berkesinambungan. Hingga saat ini, tidak terdapat risiko maupun ketidakpastian material yang dapat mengganggu stabilitas dan pertumbuhan usaha.

Sampai dengan akhir tahun 2025, kondisi Bank tetap sehat dan stabil tanpa indikasi yang dapat mengancam kelangsungan operasionalnya. Keyakinan tersebut didasarkan pada analisis SWOT yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank Sulteng Tahun 2025–2027, serta diperkuat oleh opini auditor independen atas laporan keuangan tahun buku 2025 yang menyatakan "Wajar Dalam Semua Hal yang Material."

ASSESSMENT MANAJEMEN ATAS HAL-HAL YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Bank Sulteng secara berkala melakukan evaluasi komprehensif untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang berpotensi berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha. Evaluasi tersebut mencakup penelaahan aspek internal dan eksternal, termasuk analisis atas kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan tantangan yang dihadapi dalam dinamika industri perbankan.

Sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan bisnis, Bank telah melakukan kajian atas kondisi keuangan dan operasionalnya. Berdasarkan laporan keuangan audited tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Cahyadi dan Adhi, kinerja Bank menunjukkan kondisi yang solid dengan fundamental keuangan yang sehat. Hasil tersebut semakin memperkuat keyakinan bahwa Bank memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk mendukung kelangsungan usaha dalam jangka panjang.

MATTERS WITH POTENTIAL SIGNIFICANT IMPACT ON BUSINESS CONTINUITY

Bank Sulteng routinely conducts comprehensive evaluations of its financial and operational conditions to ensure long-term business continuity. Based on the latest review results, management believes that the Bank's business prospects remain positive and are supported by adequate resources to execute operational activities sustainably. To date, there are no material risks or uncertainties that could disrupt business stability and growth.

Up to the end of 2025, the Bank's condition remains healthy and stable without any indications that could threaten its operational continuity. This conviction is based on the SWOT analysis outlined in Bank Sulteng's 2025–2027 Business Plan, and is reinforced by the independent auditor's opinion on the financial statements for the 2025 fiscal year, which states "Fair in All Material Respects."

MANAGEMENT'S ASSESSMENT OF MATTERS HAVING A SIGNIFICANT IMPACT ON BUSINESS CONTINUITY

Bank Sulteng periodically conducts comprehensive evaluations to identify various factors that potentially have a significant impact on business continuity. This evaluation encompasses a review of internal and external aspects, including an analysis of inherent strengths and weaknesses, as well as opportunities and challenges faced amidst the dynamics of the banking industry.

As part of the effort to maintain business sustainability, the Bank has conducted a review of its financial and operational conditions. Based on the audited financial statements for the 2025 fiscal year audited by the Public Accounting Firm Cahyadi and Adhi, the Bank's performance demonstrates a solid condition with sound financial fundamentals. These results further strengthen the conviction that the Bank possesses adequate capacity and resources to support long-term business continuity.

Manajemen juga secara proaktif melakukan identifikasi dan pengelolaan risiko yang berpotensi memengaruhi stabilitas operasional dan keuangan. Hingga saat ini, tidak terdapat ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan terhadap keberlanjutan usaha Bank. Dengan strategi yang adaptif serta komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Bank Sulteng optimis dapat terus bertumbuh dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah serta memenuhi kebutuhan nasabah secara berkelanjutan.

ASUMSI YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN DALAM MELAKUKAN *ASSESMENT*

Bank Sulteng dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerjanya menggunakan berbagai asumsi yang bersumber dari data internal maupun eksternal. Asumsi tersebut antara lain mencakup indikator makroekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat inflasi, dan nilai tukar, serta data kinerja internal yang meliputi laporan kinerja keuangan dan indikator penerapan Tata Kelola Perusahaan.

Tidak terdapat kondisi maupun faktor yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap kelangsungan usaha Bank Sulteng pada tahun 2025 maupun periode mendatang. Keyakinan tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh KAP Cahyadi dan Adhi menyatakan bahwa laporan keuangan Bank Sulteng telah menyajikan secara "Wajar Dalam Semua Hal yang Material";
2. Bank Sulteng berhasil membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp277.576 juta pada tahun 2025. Bank Sulteng juga berhasil membukukan laba komprehensif sebesar Rp278.048 juta walaupun turun dari tahun sebelumnya;
3. Rasio keuangan Bank Sulteng pada tahun 2025 menunjukkan hasil positif sebagaimana dijelaskan pada bagian Analisis Kemampuan Membayar Utang, Tingkat Kolektibilitas Piutang, dan Rasio Keuangan Lainnya; dan,
4. Pada tahun 2025 tidak terdapat gugatan hukum yang menuntut pailit terhadap Bank Sulteng.

Management also proactively identifies and manages risks that potentially affect operational and financial stability. To date, there are no material uncertainties that could cast significant doubt on the Bank's business sustainability. With adaptive strategies and a commitment to implementing good corporate governance, Bank Sulteng is optimistic that it can continue to grow and make a positive contribution to the regional economy while meeting customer needs sustainably.

ASSUMPTIONS USED BY MANAGEMENT IN CONDUCTING THE ASSESSMENT

In preparing its planning and evaluating its performance, Bank Sulteng utilizes various assumptions derived from internal and external data. These assumptions include, among others, macroeconomic indicators such as Gross Domestic Product (GDP), inflation rates, and exchange rates, as well as internal performance data which includes financial performance reports and Corporate Governance implementation indicators.

There are no conditions or factors that have the potential to exert a significant impact on Bank Sulteng's business continuity in 2025 or future periods. This conviction is based on the following considerations:

1. The financial statements issued by KAP Cahyadi and Adhi state that Bank Sulteng's financial statements have been presented "Fairly in All Material Respects";
2. Bank Sulteng successfully recorded a profit for the year of Rp 277,576 million in 2025. Bank Sulteng also successfully recorded a comprehensive income of Rp 278,048 million, although it decreased from the previous year;
3. Bank Sulteng's financial ratios in 2025 showed positive results as explained in the sections on Debt Repayment Capacity, Receivables Collectibility Level, and Other Financial Ratios; and,
4. In 2025, there were no legal lawsuits demanding bankruptcy against Bank Sulteng.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH PEGAWAI DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

EMPLOYEE AND/OR MANAGEMENT STOCK OWNERSHIP PROGRAM (ESOP/MSOP)

Bank Sulteng tidak memiliki program *Employee Stock Ownership Program* (ESOP) maupun *Management Stock Ownership Program* (MSOP), karena saham Bank tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di bursa efek. Dengan demikian, Bank tidak menyajikan informasi terkait jumlah saham ESOP/MSOP beserta realisasinya, jangka waktu pelaksanaan, persyaratan bagi karyawan dan/atau manajemen yang berhak, maupun harga pelaksanaan (*exercise price*).

Sehubungan dengan hal tersebut, selama periode tahun buku 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, tidak terdapat karyawan dan/atau manajemen Bank Sulteng yang memiliki saham Bank Sulteng.

Bank Sulteng does not have an Employee Stock Ownership Program (ESOP) or a Management Stock Ownership Program (MSOP), as the Bank's shares are not listed and are not traded on the stock exchange. Consequently, the Bank does not present information regarding the number of ESOP/MSOP shares along with their realization, execution period, requirements for eligible employees and/or management, or the exercise price.

In connection with this matter, during the fiscal year period from January 1, 2025, to December 31, 2025, no employees and/or management of Bank Sulteng held shares in Bank Sulteng.




REALISASI TRANSAKSI
BANK SULTENG MOBILE



Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Komitmen Dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Komitmen Bank Sulteng dalam menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten terus dijaga yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan penerapan GCG secara efektif. Hal ini dikarenakan Bank Sulteng memahami bahwa tantangan dan persaingan usaha khususnya di sektor perbankan yang semakin kompleks tidak akan dapat dihadapi oleh Bank apabila Bank tidak menerapkan GCG sehingga terbangun kondisi perusahaan yang tangguh dan berkelanjutan.

Bank Sulteng menyadari bahwa membangun GCG merupakan proses yang panjang sehingga perlu dijalankan dengan komitmen yang tinggi dan konsisten sehingga dapat menciptakan nilai perusahaan secara berkelanjutan guna menjaga kepercayaan dan kredibilitas perusahaan. Untuk itu Bank Sulteng menetapkan strategi dan program kerja yang terarah sehingga prinsip-prinsip GCG dapat diterapkan di seluruh kegiatan usaha dan aktivitas perbankan Bank Sulteng.

Penerapan GCG dapat mendukung pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan melalui pengelolaan perusahaan secara lebih professional, transparan, efisien dan akuntabel yang sekaligus dapat mencegah terjadinya pelanggaran (*fraud*). Dengan demikian usaha Bank dapat senantiasa terjaga dan tumbuh secara berkelanjutan yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan para nasabah dan pemangku kepentingan lainnya.

Setiap pegawai Bank Sulteng diwajibkan untuk menandatangani pernyataan komitmen untuk mematuhi ketentuan yang ada di *Code of Conduct* sebagai bagian dari implementasi GCG dan wujud kepatuhan pegawai dalam menjalankan prinsip-prinsip GCG di Bank Sulteng. Melalui kepatuhan dan penerapan *Code of Conduct* diharapkan setiap insan Perusahaan berkomitmen untuk menjalankan aktivitas dan kegiatan usahanya secara sehat dengan menjunjung tinggi standar etika dan perilaku. Secara tegas Bank Sulteng menegakkan ketentuan yang telah diatur dalam *Code of Conduct*. Bank Sulteng akan memberikan sanksi secara adil dan transparan sesuai peraturan yang berlaku di Perusahaan bagi siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran. Bank Sulteng juga telah menyediakan saluran pelaporan pelanggaran dan memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk melaporkan ketika terjadi adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Insan Perusahaan.

Commitment To The Implementation Of Corporate Governance

Bank Sulteng's commitment to consistently implementing Good Corporate Governance (GCG) is continually maintained, manifested in various activities aimed at improving the effective implementation of GCG. This is because Bank Sulteng understands that business challenges and competition, especially in the increasingly complex banking sector, cannot be addressed by the Bank unless it implements GCG to build a resilient and sustainable corporate condition.

Bank Sulteng realizes that establishing GCG is a long-term process that requires high commitment and consistency to create sustainable corporate value, thereby maintaining the company's trust and credibility. Therefore, Bank Sulteng has established targeted strategies and work programs so that GCG principles can be applied across all business activities and banking operations of Bank Sulteng.

The implementation of GCG supports the achievement of the company's goals and objectives through more professional, transparent, efficient, and accountable corporate management, which simultaneously prevents the occurrence of fraud. Consequently, the Bank's business can be consistently safeguarded and grow sustainably, ultimately increasing the trust of customers and other stakeholders.

Every employee of Bank Sulteng is required to sign a statement of commitment to comply with the provisions outlined in the Code of Conduct as part of GCG implementation and as a manifestation of employee compliance in upholding GCG principles at Bank Sulteng. Through compliance and the application of the Code of Conduct, it is expected that every individual within the Company is committed to conducting their activities and business operations soundly, upholding high ethical and behavioral standards. Bank Sulteng strictly enforces the provisions stipulated in the Code of Conduct. Bank Sulteng will impose sanctions fairly and transparently in accordance with applicable Company regulations on anyone proven to have committed a violation. Bank Sulteng has also provided a whistleblowing reporting channel and offers the opportunity for anyone to report alleged violations committed by Company Personnel.

Dasar Hukum Pedoman GCG Perusahaan

Melalui penerapan GCG secara konsisten, Bank Sulteng meyakini bahwa Perusahaan akan dapat dikelola secara lebih profesional, efektif dan akuntabel sehingga akan meningkatkan daya saing perusahaan serta meningkatkan kepercayaan nasabah.

Beberapa regulasi yang digunakan sebagai acuan Bank Sulteng dalam penerapan GCG antara lain:

1. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/ POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/ POJK.03/2017 tanggal 07 April 2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/ POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ POJK.03/2016
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/ POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/ POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 25/ SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/ POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/ SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/ SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
13. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/ SEOJK.03/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Legal Basis For The Company's Gcg Guidelines

Through the consistent implementation of GCG, Bank Sulteng believes that the Company will be managed more professionally, effectively, and accountably, thereby enhancing corporate competitiveness and customer trust.

Several regulations used as references by Bank Sulteng in implementing GCG include:

1. Law No. 10 of 1998 concerning Amendments to Law No. 7 of 1992 concerning Banking
2. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies
3. Financial Services Authority Regulation No. 1/ POJK.07/2013 concerning Consumer Protection
4. Financial Services Authority Regulation No. 15/ POJK.03/2017 dated April 7, 2017, concerning the Determination of Status and Follow-up Supervision of Commercial Banks
5. Financial Services Authority Regulation No. 6/ POJK.03/2015 concerning Transparency and Publication of Bank Reports as amended by Financial Services Authority Regulation No. 32/ POJK.03/2016
6. Financial Services Authority Regulation No. 4/ POJK.03/2016 concerning the Assessment of Commercial Bank Soundness Rating
7. Financial Services Authority Regulation No. 18/ POJK.03/2016 concerning the Application of Risk Management for Commercial Banks
8. Financial Services Authority Circular Letter No. 25/SEOJK.03/2016 concerning Commercial Bank Business Plans
9. Financial Services Authority Regulation No. 27/ POJK.03/2016 concerning the Fit and Proper Test for Primary Parties of Financial Services Institutions
10. Financial Services Authority Circular Letter No. 13/ SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017, concerning the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks
11. Financial Services Authority Circular Letter No. 14/ SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017, concerning the Assessment of Commercial Bank Soundness Rating
12. Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks
13. Financial Services Authority Circular Letter No. 14/ SEOJK.03/2025 dated June 24, 2025, concerning the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks

Tujuan Dan Maksud Penerapan GCG

Penerapan GCG di Bank Sulteng dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan yang baik antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pemangku kepentingan;
2. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan;
3. Mencapai pertumbuhan dan imbal hasil yang maksimal sehingga meningkatkan kemakmuran Perusahaan serta mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan para pemangku kepentingan lainnya;
4. Mendukung aktivitas pengendalian internal dan pengembangan Perusahaan;
5. Memperbaiki budaya kerja Perusahaan; dan
6. Menjadikan Perusahaan bernilai tambah yaitu meningkatkan kesejahteraan seluruh karyawan Perusahaan berikut peningkatan kemanfaatan bagi pemangku kepentingan.

Objectives and Purposes of GCG Implementation

The implementation of GCG at Bank Sulteng is carried out with the objectives to:

1. Control and direct positive relationships among Shareholders, the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all stakeholders
2. Enhance accountability to stakeholders
3. Achieve maximum growth and returns, thereby increasing Company prosperity and realizing long-term shareholder value without neglecting the interests of other stakeholders
4. Support internal control activities and Company development
5. Improve the Company's work culture
6. Make the Company value-added, namely improving the welfare of all Company employees along with increasing benefits for stakeholders

Prinsip-Prinsip GCG

GCG Principles



Dalam rangka menghadapi dinamika usaha dan tantangan yang semakin kompleks, Bank Sulteng menerapkan GCG dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Penerapan GCG Bank Sulteng dilakukan pada setiap aspek bisnis dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG yaitu *Transparency* (Keterbukaan), *Accountability* (Akuntabilitas), *Responsibility* (Pertanggungjawaban), *Independency* (Kemandirian), dan *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran) yang diuraikan sebagai berikut:

To face increasingly complex business dynamics and challenges, Bank Sulteng implements GCG with reference to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks.

The implementation of Bank Sulteng's GCG is carried out in every business aspect, guided by GCG principles, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness, which are described as follows:

1. *Transparency* (Keterbukaan)

Transparency yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Dalam mewujudkan transparansi, bank harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan dengan bank tersebut. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting bank secara mudah pada saat diperlukan. Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada stakeholders harus dilakukan oleh bank agar dapat dikatakan transparan.

Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari investasinya. Kurangnya pernyataan keuangan yang menyeluruh menyulitkan pihak luar untuk menentukan apakah bank tersebut memiliki dana dalam tingkat yang mengkhawatirkan. Kurangnya informasi akan membatasi kemampuan investor untuk memperkirakan nilai dan risiko serta pertambahan dari perubahan modal (volatility of capital). Dengan keterbukaan informasi tersebut maka para stakeholder dapat menilai kinerja berikut mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan.

Adanya informasi kinerja perusahaan yang diungkap secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan, dapat menghasilkan efisiensi atau disiplin pasar. Selanjutnya, jika prinsip transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat, akan dapat mencegah terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam perusahaan.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Accountability (akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bila prinsip *accountability* (akuntabilitas) ini diterapkan secara efektif, maka bank akan terhindar dari *agency problem* (benturan kepentingan peran).

Pengelolaan bank harus didasarkan pada pembagian kekuasaan diantara pejabat bank, yang bertanggung jawab pada pengoperasian setiap harinya, dan pemegang sahamnya yang diwakili oleh Direksi. Direksi diharapkan untuk menetapkan kesalahan (*oversight*) dan pengawasan. Masalah yang sering ditemukan di perusahaan-perusahaan Indonesia adalah kurang efektifnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Atau bahkan sebaliknya, Komisaris mengambil alih peran berikut wewenang yang seharusnya dijalankan Direksi.

1. Transparency

Transparency refers to openness in disclosing material and relevant information, as well as openness in the decision-making process. In achieving transparency, banks must provide sufficient, accurate, and timely information to parties interested in the bank. Furthermore, investors must easily access important bank information when needed. Providing adequate, accurate, and timely information to stakeholders must be carried out by the bank to be considered transparent.

Adequate disclosure is highly necessary for investors to make decisions regarding the risks and returns of their investments. A lack of comprehensive financial statements makes it difficult for external parties to determine if the bank possesses funds at an alarming level. Insufficient information will restrict investors' ability to estimate value, risk, and incremental volatility of capital. With such information disclosure, stakeholders can assess performance and recognize potential risks when transacting with the company.

The existence of corporate performance information disclosed accurately, timely, clearly, consistently, and comparably can generate market efficiency or discipline. Furthermore, if the transparency principle is implemented properly and correctly, it can prevent conflicts of interest among various parties within the company.

2. Accountability

Accountability involves the clarity of functions and the execution of the bank's responsibilities so that its management runs effectively. If the accountability principle is applied effectively, the bank will avoid agency problems (conflicts of interest in roles).

Bank management must be based on the distribution of power between bank officers, who are responsible for daily operations, and shareholders, who are represented by the Board of Directors. The Board of Directors is expected to establish oversight and supervision. A frequently encountered problem in Indonesian companies is the ineffective supervisory function of the Board of Commissioners. Conversely, Commissioners sometimes usurp the roles and authorities that should be executed by the Board of Directors.

Oleh karena itu, diperlukan kejelasan mengenai tugas serta fungsi organ perusahaan agar tercipta suatu mekanisme checks and balances kewenangan dan peran dalam mengelola perusahaan.

Sejumlah bentuk implementasi lain dari prinsip akuntabilitas ini antara lain:
a. Praktek Audit Internal yang efektif;
b. Kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam anggaran dasar perusahaan, kebijakan, dan prosedur di bank.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Responsibility (pertanggungjawaban) adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan bank terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat.

Penerapan prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya seringkali menghasilkan eksternalitas (dampak luar kegiatan perusahaan) negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat. Di luar hal itu, lewat prinsip responsibilitas ini juga diharapkan membantu peran pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar.

4. *Independency* (Kemandirian)

Independency atau kemandirian adalah suatu keadaan di mana bank dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Independensi penting sekali dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut. Independensi merupakan prinsip penting dalam penerapan Tata Kelola di Indonesia.

Untuk meningkatkan independensi dalam pengambilan keputusan bisnis, perusahaan hendaknya mengembangkan beberapa aturan, pedoman, dan praktek di tingkat pengurus bank, terutama di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi yang oleh Undang-undang diberi amanat untuk mengurus perusahaan dengan sebaik-baiknya.

Therefore, clarity regarding the duties and functions of corporate organs is required to create a checks and balances mechanism of authority and roles in managing the company.

Several other forms of implementation of this accountability principle include:
a. Effective Internal Audit practices
b. Clarity of functions, rights, obligations, authorities, and responsibilities in the company's articles of association, policies, and bank procedures

3. *Responsibility*

Responsibility is the conformity or compliance in bank management with sound corporate principles and applicable laws and regulations. Applicable regulations include those relating to tax issues, industrial relations, environmental protection, occupational health/safety, remuneration standards, and fair competition.

The application of this principle is expected to make companies realize that their operational activities often produce negative externalities (external impacts of company activities) that must be borne by society. Beyond that, this responsibility principle is also expected to assist the government's role in reducing income and employment opportunity gaps in community segments that have not yet benefited from market mechanisms.

4. *Independency*

Independency is a condition in which the bank is managed professionally without conflicts of interest and influence/pressure from any party that is contrary to applicable laws and regulations and sound corporate principles. Independence is paramount in the decision-making process. The loss of independence in the decision-making process will eliminate objectivity within that decision. Independence is a crucial principle in implementing Corporate Governance in Indonesia.

To enhance independence in business decision-making, companies should develop several rules, guidelines, and practices at the bank management level, particularly at the level of the Board of Commissioners and Board of Directors, who are mandated by Law to manage the company to the best of their abilities.

5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Fairness yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Fairness* diharapkan membuat seluruh aset bank dikelola secara baik dan prudent (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara fair (jujur dan adil). Secara sederhana kesetaraan didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Dalam pengelolaan bank perlu ditekankan pada kesetaraan, terutama untuk pemegang saham minoritas. Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya.

Fairness juga mencakup adanya kejelasan hak-hak *stakeholder* berdasarkan sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan. Bentuk kecurangan ini bisa berupa *insider trading* (transaksi yang melibatkan informasi orang dalam), *fraud* (penipuan), dilusi saham (nilai perusahaan berkurang), korupsi-kolusi nepotisme (KKN), atau keputusan-keputusan yang dapat merugikan seperti pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan, penerbitan saham baru, merger, akuisisi, atau pengambilalihan perusahaan lain.

Dalam perjalanannya, Pemerintah melalui Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) sebagai komite yang bertanggung jawab atas pengembangan penerapan governansi di Indonesia melakukan pemutakhiran terhadap prinsip-prinsip GCG yang semula terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness (TARIF) bertransformasi menjadi 4 Pilar Governansi yang meliputi Etika, Transparansi, Akuntabilitas dan Keberlanjutan (ETAK) yang selanjutnya diterjemahkan Bank Sulteng dengan pengertian sebagai berikut:

1. Etika

Dalam melaksanakan kegiatannya, Bank Sulteng senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (*respect*), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten.

5. *Fairness*

Fairness entails justice and equality in fulfilling stakeholder rights arising from agreements and applicable laws and regulations. Fairness is expected to ensure all bank assets are managed properly and prudently, leading to the protection of shareholder interests fairly. Simply put, fairness is defined as fair and equal treatment in fulfilling stakeholder rights arising from agreements and applicable laws and regulations. In bank management, emphasis must be placed on equality, especially for minority shareholders. Investors must have clear ownership rights and a system of rules and laws enforced to protect their rights.

Fairness also encompasses clarity of stakeholder rights based on the legal system and law enforcement to protect investor rights, especially minority shareholders, from various forms of fraud. These forms of fraud can include insider trading, fraud, share dilution (reduced company value), corruption, collusion, nepotism (KKN), or detrimental decisions such as share buybacks, new share issuance, mergers, acquisitions, or the takeover of other companies.

Over time, the Government, through the National Committee on Governance Policy (KNKG) as the committee responsible for developing governance implementation in Indonesia, updated the GCG principles from Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness (TARIF) to transform into the 4 Pillars of Governance, comprising Ethics, Transparency, Accountability, and Sustainability (ETAK), which Bank Sulteng subsequently translates with the following meanings:

1. Ethics

In carrying out its activities, Bank Sulteng consistently prioritizes honesty, treats all parties with respect, fulfills commitments, and consistently builds and maintains moral values and trust.

Bank Sulteng memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

2. Transparansi

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, Bank Sulteng menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

Bank Sulteng mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

3. Akuntabilitas

Bank Sulteng dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.

4. Keberlanjutan

Bank Sulteng mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan.

Faktor Strategis Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Bank Sulteng menyadari bahwa melalui penerapan GCG secara konsisten akan berdampak pada semakin meningkatnya kepercayaan nasabah dan tumbuhnya kinerja Bank secara berkelanjutan dan berikut ini faktor-faktor strategis yang menjadi pertimbangan Bank Sulteng dalam menerapkan GCG, yaitu:

Bank Sulteng considers the interests of shareholders and other stakeholders based on the principles of fairness and is managed independently so that each corporate organ does not dominate each other and cannot be intervened by other parties.

2. Transparency

To maintain objectivity in conducting business, Bank Sulteng provides material and relevant information in a manner that is easily accessible and understandable by stakeholders.

Bank Sulteng takes the initiative to disclose not only matters required by laws and regulations but also matters essential for decision-making by shareholders, creditors, and other stakeholders.

3. Accountability

Bank Sulteng can account for its performance transparently and fairly. For this reason, the Company must be managed properly, measurably, and in accordance with the company's interests while continuing to consider the interests of shareholders and stakeholders. Accountability is a necessary prerequisite to achieving sustainable performance.

4. Sustainability

Bank Sulteng complies with laws and regulations and is committed to implementing social and environmental responsibilities to contribute to sustainable development through cooperation with all relevant stakeholders to improve their lives in a manner aligned with business interests and sustainable development agendas.

Strategic Factors In Corporate Governance Implementation

Bank Sulteng realizes that the consistent implementation of GCG will result in increasing customer trust and sustainable Bank performance growth. The following are the strategic factors considered by Bank Sulteng in implementing GCG, namely:

1. Bank Sebagai Lembaga Kepercayaan

Melalui fungsinya sebagai lembaga intermediasi dengan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta berperan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, Bank Sulteng senantiasa menjaga kepercayaan baik dari Pemerintah dan masyarakat dengan berkomitmen untuk memiliki kinerja keuangan (*financial performance*) yang baik, memiliki tingkat kesehatan bank yang baik dan memiliki kecukupan modal di atas ketentuan minimum dan profil risiko secara komposit rendah.

Bank Sulteng juga berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan nasabah penyimpan dan simpanannya serta rahasia Perusahaan, menerapkan prinsip keterbukaan dalam penyampaian informasi kepada publik berkaitan dengan produk dan aktivitas baru bank dan menjaga kepentingan shareholders dan stakeholder. Selain itu juga komitmen untuk selalu bersaing secara sehat dalam menetapkan harga (*price*) atau suku bunga dana dan kredit/ pembiayaan serta melaksanakan etika bisnis industri perbankan dengan baik, mengendalikan risiko reputasi agar dapat mencegah persepsi negatif kepada bank sekaligus menjaga pencitraan bagi bank, memiliki Sumber Daya Manusia yang handal, profesional, integritas yang tinggi, serta akhlak dan moral yang baik, serta meningkatkan dan atau mempertahankan kualitas mutu pelayanan secara konsisten dan berkelanjutan.

2. Bank Merupakan Pelayanan Publik

Sebagai pelayanan publik Bank Sulteng harus dapat memberikan pelayanan terbaik kepada nasabahnya dan menjaga kepuasan nasabah (*customer satisfaction*) dengan memberikan pelayanan yang melebihi harapan nasabah. Bank Sulteng juga memberikan fasilitas kenyamanan bagi nasabahnya berupa sarana dan prasarana, ketepatan waktu transaksi, online system, *non stop service* transaksi penarikan tunai dan transfer serta fasilitas lainnya berupa fitur pembayaran, serta *Cash Deposite Machine* pada ATM.

Sesuai fungsinya dalam melaksanakan intermediasi dengan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pembiayaan, Bank Sulteng harus dapat mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang selain menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

1. The Bank as an Institution of Trust

Through its function as an intermediary institution by collecting and channeling public funds and playing a role in supporting the implementation of national development, Bank Sulteng continuously maintains trust from both the Government and the public by committing to having good financial performance, a sound bank health rating, maintaining capital adequacy above the minimum requirements, and a low composite risk profile.

Bank Sulteng is also committed to maintaining the confidentiality of depositing customers and their deposits as well as Company secrets, applying the transparency principle in conveying information to the public regarding the bank's new products and activities, and safeguarding the interests of shareholders and stakeholders. In addition, it is committed to always competing fairly in pricing or setting interest rates for funds and credit/ financing, practicing good banking industry business ethics, controlling reputation risk to prevent negative perceptions of the bank while maintaining the bank's image, possessing highly reliable, professional Human Resources with high integrity, good morals, and ethics, and consistently and sustainably improving or maintaining service quality standards.

2. The Bank as a Public Service

As a public service, Bank Sulteng must provide the best service to its customers and maintain customer satisfaction by delivering services that exceed customer expectations. Bank Sulteng also provides convenience facilities for its customers in the form of infrastructure, transaction timeliness, online systems, non-stop service for cash withdrawals and transfers, and other facilities such as payment features and Cash Deposit Machines at ATMs.

In accordance with its function in carrying out intermediation by collecting public funds and channeling them back to the public in the form of credit/financing, Bank Sulteng must be able to encourage economic growth and regional development in all sectors, besides being a source of regional income to improve the people's standard of living.

3. Bank Sebagai Agent of Development

Bank Sulteng sebagai agent of development di berbagai sektor usaha dan bisnis senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Bank Sulteng menyadari bahwa objek pelayanan publik yang bergerak di sektor jasa keuangan seperti perbankan selalu mendapat perhatian lebih dari masyarakat dalam bentuk pengendalian sosial di sektor keuangan (*social control of environment*), pemerintah (*eksekutif*) dan DPR/DPRD (*legislatif*) serta Otoritas/Regulator. Untuk itu merupakan sebuah keharusan bagi Bank Sulteng untuk menerapkan GCG.

Sejalan dengan arah kebijakan strategis Bank Sulteng yaitu menjadi "Bank terkemuka di daerah melalui produk dan layanan kompetitif dengan jaringan luas yang dikelola secara profesional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi regional", Bank Sulteng berupaya untuk mewujudkan program BPD *Regional Champion* dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG sehingga dalam pelaksanaannya tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku maupun etika bisnis dalam industri perbankan.

Untuk memperkuat kelembagaan menuju *Regional Champion* sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkannya, Bank Sulteng sangat menyadari manfaat yang besar atas penerapan GCG, antara lain:

1. Mewujudkan visi, misi, dan strategi perusahaan;
2. Meningkatkan kinerja perusahaan;
3. Meningkatnya nilai pemegang saham (*shareholders value*);
4. Meningkatkan kredibilitas perusahaan secara profesional;
5. Terlaksananya pengendalian intern secara efektif;
6. Patuh terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
7. Meningkatkan nilai etika perusahaan;
8. Meningkatkan budaya perusahaan (*corporate culture*) dan budaya risiko (*risk culture*);
9. Terlaksananya pengelolaan usaha secara efisien dan efektif;
10. Terlaksananya pengambilan keputusan dan kebijakan yang lebih baik;
11. Tumbuhnya keyakinan dan kepercayaan dari *shareholders* maupun *stakeholders* terhadap perusahaan;
12. Meningkatkan *rating* Bank oleh lembaga pemeringkat independen;
13. Dapat memberikan *cost of capital* atau *capital charge* yang lebih murah.

3. The Bank as an Agent of Development

As an agent of development across various business and industry sectors, Bank Sulteng consistently applies prudential banking principles. Bank Sulteng recognizes that public service objects operating in the financial services sector, such as banking, consistently receive closer attention from the public in the form of social control of the environment, the government (executive), the regional parliament/ DPRD (legislative), and Authorities/Regulators. Therefore, implementing GCG is a necessity for Bank Sulteng.

In line with Bank Sulteng's strategic policy direction, which is to become a "Leading regional bank through competitive products and services with a widespread network managed professionally to drive regional economic growth", Bank Sulteng strives to realize the BPD Regional Champion program by adhering to GCG principles so that its implementation does not violate applicable laws and regulations or business ethics within the banking industry.

To strengthen institutions toward becoming a Regional Champion, thereby improving services to the community that needs them, Bank Sulteng is highly aware of the substantial benefits of implementing GCG, including:

1. Realizing the company's vision, mission, and strategy
2. Improving corporate performance
3. Increasing shareholders' value
4. Enhancing the company's professional credibility
5. Executing effective internal control
6. Complying with applicable laws and regulations
7. Elevating corporate ethical values
8. Fostering corporate culture and risk culture
9. Executing efficient and effective business management
10. Executing better decision-making and policy formulation
11. Growing confidence and trust from shareholders and stakeholders towards the company
12. Improving the Bank's rating by independent rating agencies
13. Providing a more affordable cost of capital or capital charge

Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2025 & Rencana Tahun 2026

Sebagai upaya penguatan dalam penerapan GCG, sepanjang tahun 2025 Bank Sulteng telah menjalankan beberapa kebijakan dan program diantaranya yaitu pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penyusunan laporan Tata Kelola Bank.

Untuk tahun 2026, Bank Sulteng telah menyiapkan beberapa program strategis dalam rangka penguatan implementasi GCG. Kegiatan sosialisasi dan penyusunan laporan Tata Kelola Bank akan tetap dilanjutkan pada tahun 2026 ditambah dengan program *review* dan penyesuaian kebijakan dan prosedur internal.

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Bank Sulteng telah menetapkan struktur tata kelola perusahaan dalam rangka memastikan penerapan GCG di Perusahaan dapat berjalan secara efektif melalui pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing Organ Perusahaan dan pejabat-pejabat yang berada di bawahnya. Dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bank Sulteng menetapkan struktur tata kelola perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi.

Melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, setiap Organ Perusahaan memiliki peran yang penting dalam implementasi GCG. Sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola Perusahaan sedangkan Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan yang dijalankan Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab kepada RUPS yang merupakan Organ Perusahaan tertinggi yang memiliki semua kewenangan yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris didukung oleh organ pendukung yang terdiri dari Komite Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris. Sedangkan Direksi dilengkapi dengan unit kerja di bawah Direksi yang bertanggung jawab dalam implementasi GCG serta menjadi mitra kerja dari Komite Dewan Komisaris.

2025 Governance Implementation & 2026 Plans

As part of the efforts to strengthen the implementation of GCG (Good Corporate Governance), throughout 2025, Bank Sulteng has executed several policies and programs, including the conduct of socialization initiatives and the preparation of Bank Governance reports.

For the 2026 fiscal year, Bank Sulteng has developed several strategic programs aimed at further strengthening GCG implementation. The socialization initiatives and the preparation of Bank Governance reports will continue in 2026, supplemented by a program for the review and alignment of internal policies and procedures.

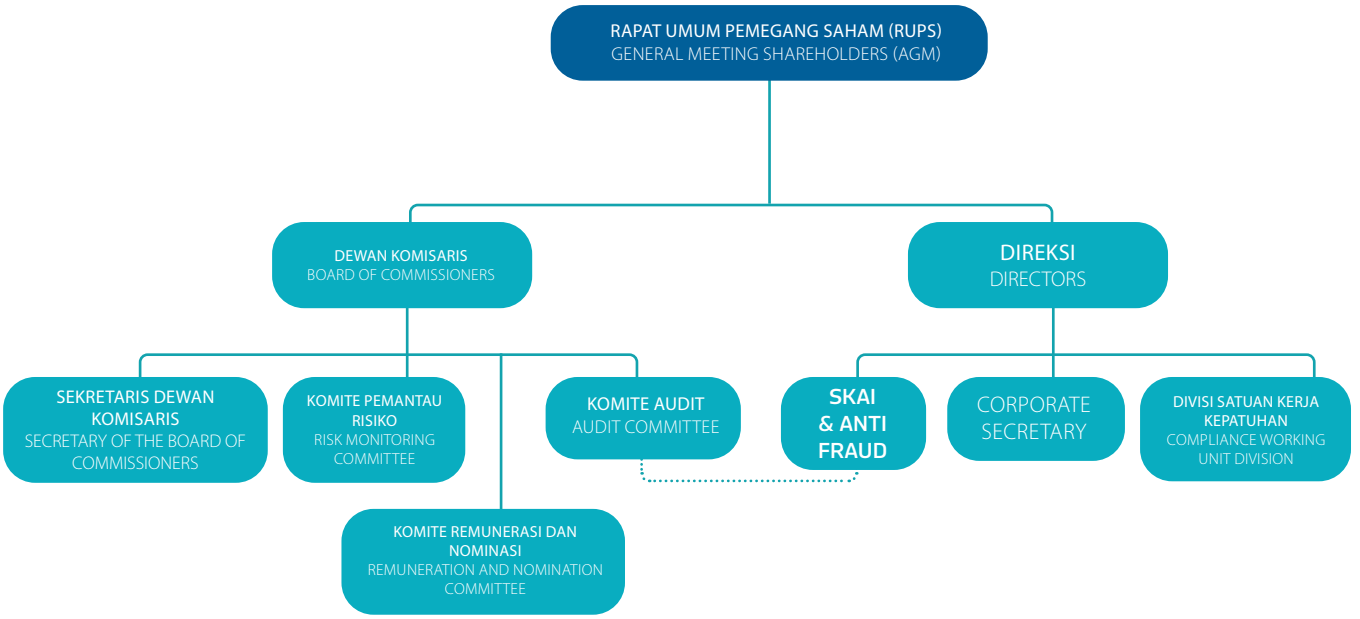
Corporate Governance Structure

Bank Sulteng has established a corporate governance structure to ensure GCG implementation in the Company can run effectively through the division of duties and responsibilities of each Corporate Organ and the officials below them. Guided by the provisions of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Bank Sulteng established a corporate governance structure consisting of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors.

Through the execution of their respective duties and responsibilities, each Corporate Organ plays a vital role in GCG implementation. As mandated in the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations, the Board of Directors has the duty and responsibility to manage the Company, while the Board of Commissioners has the duty and responsibility to oversee the Company's management carried out by the Board of Directors. Both the Board of Commissioners and the Board of Directors are accountable to the GMS, which is the highest Corporate Organ possessing all authorities not delegated to the Board of Commissioners and the Board of Directors.

In performing its duties and responsibilities, the Board of Commissioners is supported by supporting organs consisting of the Board of Commissioners' Committees and the Corporate Secretary of the Board of Commissioners. Meanwhile, the Board of Directors is equipped with working units under the Board of Directors responsible for GCG implementation and serving as partners to the Board of Commissioners' Committees.

Struktur Tata Kelola Perusahaan Bank Sulteng:
Corporate Governance Structure of Bank Sulteng:



Secara profesional dan independen, Dewan Komisaris dan Direksi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi terkait pengelolaan Bank yang dilakukan oleh Direksi serta melakukan telaah terhadap berbagai kebijakan yang dijalankan Direksi. Sedangkan Direksi menjalankan pengelolaan Bank dan menjalankan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan Perusahaan dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan serta target yang telah ditetapkan.

Bank Sulteng menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung berjalannya struktur organisasi secara efektif. Ketersediaan sarana Teknologi Informasi (TI) sampai aturan yang mengatur kegiatan operasional Perusahaan seperti kebijakan, SOP dan surat edaran internal harus dipatuhi semua pihak di Bank Sulteng.

Penanggung Jawab Penerapan GCG

Bank Sulteng terus memastikan pelaksanaan GCG dapat berjalan secara efektif yang didukung dengan pelaksanaan program-program GCG secara berkelanjutan. Bank Sulteng menetapkan Direktur Kepatuhan sebagai penanggung jawab dalam penerapan GCG di Perusahaan yang dalam pelaksanaannya dijalankan oleh Bagian *Good Corporate Governance* (GCG) dan Tingkat Kesehatan Bank (TKB) yang berada di bawah Divisi Satuan Kerja Kepatuhan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

Bank Sulteng Corporate Governance Structure Professionally and independently, the Board of Commissioners and the Board of Directors carry out their respective duties and responsibilities. The Board of Commissioners exercises oversight and provides advice to the Board of Directors regarding the management of the Bank carried out by the Board of Directors, as well as reviewing various policies executed by the Board of Directors. Meanwhile, the Board of Directors manages the Bank and executes various policies established by the Company to achieve corporate objectives and predetermined targets.
Bank Sulteng prepares adequate facilities and infrastructure to support the effective operation of the organizational structure. The availability of Information Technology (IT) facilities up to the rules governing the Company's operational activities, such as policies, SOPs, and internal circulars, must be adhered to by all parties at Bank Sulteng.

Party Responsible for GCG Implementation

Bank Sulteng continuously ensures that GCG implementation operates effectively, supported by the execution of sustainable GCG programs. Bank Sulteng appoints the Compliance Director as the party responsible for GCG implementation in the Company, which in practice is executed by the Good Corporate Governance (GCG) and Bank Soundness Rating (TKB) Department located under the Compliance Task Force Division, reporting directly to the Compliance Director.

Bagian GCG dan TKB memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain yaitu:

1. Melakukan rincian pelaksanaan pengumpulan data untuk pelaporan *Self Assessment* GCG dan TKB dimaksud kepada Komite Dewan Komisaris, Divisi Corsec, Divisi Operasional, Divisi Perencanaan dan divisi lainnya yang terkait;
2. Melakukan pelaporan *Self Assessment* GCG untuk periode pelaporan Semester I, Semester II dan Laporan GCG Tahunan (selambatnya tanggal 30 April) tahun berjalan kepada OJK;
3. Melakukan pelaporan Self Assessment TKB untuk periode pelaporan Semester I dan Semester II selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah periode laporan yang kemudian disampaikan kepada OJK;
4. Melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
5. Mengawasi dan mengendalikan utilisasi/ pemanfaatan anggaran yang berada di bawah cakupan wewenangnya;
6. Memantau pengembangan sistem dan prosedur terkait proses yang berada dibawah cakupan wewenangnya.

Kebijakan Implementasi Prinsip-Prinsip GCG

Untuk mendukung efektivitas penerapan GCG di Perusahaan, Bank Sulteng telah menyediakan kebijakan (*soft structure*) GCG yang akan memberikan pedoman yang jelas bagi setiap Insan Perusahaan. *Soft structure* GCG akan menghilangkan ruang abu-abu (*grey area*) sebagai akibat dari ketidakjelasan aturan dan kebijakan. Selain itu Bank Sulteng juga telah menetapkan kebijakan-kebijakan operasional untuk seluruh unit kerja dalam rangka meningkatkan kualitas dan cakupan penerapan GCG agar sampai pada setiap pegawai sampai dengan level terbawah.

Selama tahun 2025, Bank Sulteng secara berkelanjutan terus melanjutkan kegiatan review dan penguatan terhadap berbagai kebijakan dan manual GCG disesuaikan dengan dinamika perkembangan usaha dan regulasi di sektor perbankan.

Bank Sulteng telah menetapkan berbagai kebijakan (*soft structure*) GCG dan Standard Operating Procedures (SOP) untuk mendukung pelaksanaan GCG, antara lain yaitu:

1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (GCG)
2. *Charter* Dewan Komisaris
3. *Charter* Direksi
4. *Charter* Komite Audit

The GCG and TKB Department have the following duties and responsibilities:

1. Detailing the implementation of data collection for GCG and TKB Self-Assessment reporting to the Board of Commissioners' Committee, Corporate Secretary Division, Operations Division, Planning Division, and other relevant divisions
2. Reporting the GCG Self-Assessment for the reporting periods of Semester I, Semester II, and the Annual GCG Report (no later than April 30) of the current year to the OJK
3. Reporting the TKB Self-Assessment for the reporting periods of Semester I and Semester II no later than 1 (one) month after the report period, which is then submitted to the OJK
4. Preparing the Annual Work Plan and Budget for the execution of activities in accordance with the scope of its duties
5. Supervising and controlling the utilization of the budget under its scope of authority
6. Monitoring the development of systems and procedures related to processes under its scope of authority

GCG Principles Implementation Policy

To support the effectiveness of GCG implementation in the Company, Bank Sulteng has provided GCG soft structure policies that will offer clear guidelines for every Company Personnel. The GCG soft structure will eliminate grey areas resulting from ambiguous rules and policies. Furthermore, Bank Sulteng has also established operational policies for all work units to improve the quality and coverage of GCG implementation, ensuring it reaches every employee down to the lowest level.

During 2025, Bank Sulteng consistently continued review and reinforcement activities on various GCG policies and manuals adapted to business dynamics and banking sector regulations.

Bank Sulteng has established various GCG soft structure policies and Standard Operating Procedures (SOPs) to support GCG implementation, including:

1. Corporate Governance (GCG) Guidelines
2. Board of Commissioners Charter
3. Board of Directors Charter
4. Audit Committee Charter

5. *Charter* Komite Pemantau Risiko
6. *Charter* Komite Remunerasi dan Nominasi
7. Piagam Koordinasi Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan dengan Dewan Pengawas
8. *Charter* Internal Audit
9. *Code of Conduct* (CoC)
10. Kebijakan dan SOP Lainnya.

Kebijakan (*soft structure*) GCG merupakan "*living document*" yang ketentuan dan penerapannya dapat disesuaikan dengan perkembangan regulasi dan kondisi terkini perusahaan serta dinamika yang terjadi di dunia usaha perbankan. Untuk itu Bank Sulteng melakukan *review* secara berkala untuk menyempurnakan dan mengembangkan kebijakan (*soft structure*) GCG sesuai dengan perubahan peraturan yang berlaku dan perkembangan dinamika usaha perusahaan.

Kilas Balik Penerapan GCG di Bank Sulteng

Secara terstruktur penerapan GCG di Bank Sulteng telah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

5. Risk Oversight Committee Charter
6. Remuneration and Nomination Committee Charter
7. Coordination Charter between the Director Superintending the Compliance Function and the Compliance Task Force with the Supervisory Board
8. Internal Audit Charter
9. Code of Conduct (CoC)
10. Other Policies and SOPs

The GCG soft structure policy is a "living document," its provisions and application can be adjusted according to regulatory developments, the company's current condition, and dynamics occurring in the banking business world. Therefore, Bank Sulteng conducts periodic reviews to refine and develop GCG soft structure policies in accordance with changes in applicable regulations and the development of the company's business dynamics.

Overview of GCG Implementation At Bank Sulteng

Structurally, the implementation of GCG at Bank Sulteng has been carried out through the following stages:

Tahun	Program GCG	GCG Program
2021	• Melaksanakan sosialisasi GCG kepada Dewan Komisaris Bank Sulteng.	• Conducting GCG socialization to the Board of Commissioners of Bank Sulteng
2022	• Pengembangan Aplikasi Integrasi Data Antasena untuk mendukung aplikasi Tingkat Kesehatan Bank (TKB) dan profil risiko cabang (PRC) dimana pelaporan Self Asessment GCG menjadi bagian dalam aplikasi tersebut.	• Development of the Antasena Data Integration Application to support the Bank Health Level (TKB) application and branch risk profile (PRC) where the Self-Assessment GCG reporting becomes part of this application.
2023	• Mengikuti sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 tahun 2023; • Melakukan perbaikan lanjutan pada aplikasi Tingkat Kesehatan Bank (TKB) dimana pelaporan *Self Asessment* GCG menjadi bagian dalam aplikasi tersebut.	• Participating in the socialization of the Financial Services Authority Regulation Number 17 of 2023; • Making further improvements to the Bank Health Level (TKB) application where the Self-Assessment GCG reporting becomes part of this application.
2024	• Melaksanakan Sosialisasi Fungsi Kepatuhan (termasuk pelaksanaan GCG pada Bank) dan *Whistleblowing System* bersama Divisi SKAI dan Anti Fraud ke Cabang-Cabang Bank Sulteng; • Menjadi anggota Tim *Counterpart* untuk beberapa kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit terkait dalam rangka mendukung dan mempercepat proses bisnis sehingga dapat mengawal dan memastikan bahwa proses yang dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	• Conducting socialization of the Compliance Function (including the implementation of GCG at the Bank) and Whistleblowing System together with the SKAI Division and Anti-Fraud to the Branches of Bank Sulteng; • Being a member of the Counterpart Team for several activities carried out by related units to support and expedite the business process to ensure that the processes carried out have been implemented in accordance with applicable regulations.
2025	• Melaksanakan Sosialisasi Penerapan GCG, Fungsi Kepatuhan dan *Whistleblowing System* ke Cabang-Cabang Bank Sulteng; • Menjadi anggota Tim *Counterpart* untuk beberapa kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit terkait dalam rangka mendukung dan mempercepat proses bisnis sehingga dapat mengawal dan memastikan bahwa proses yang dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	• Conducting socialization on the implementation of GCG, Compliance Function, and Whistleblowing System to Bank Sulteng Branches; • Serving as a member of the Counterpart Team for several activities conducted by relevant units to support and accelerate business processes, in order to monitor and ensure that the processes performed have been implemented in accordance with applicable regulations.

Roadmap GCG

Bank Sulteng telah memiliki Roadmap GCG untuk memberikan arah yang jelas bagi penerapan GCG secara berkelanjutan sejalan dengan visi dan misi Perusahaan. Roadmap GCG juga merupakan bagian dari perencanaan strategis dalam penerapan GCG.

Melalui Roadmap GCG, Bank Sulteng dapat mengetahui gambaran mengenai tahapan-tahapan dalam proses penerapan GCG yang ditetapkan dalam kurun waktu tertentu. *Roadmap* GCG menjadi panduan bagi Bank Sulteng yang akan memberikan peta jalan bagi penerapan GCG di Perusahaan secara berkesinambungan.

GCG Roadmap

Bank Sulteng has established a GCG Roadmap to provide a clear direction for sustainable GCG implementation aligned with the Company's vision and mission. The GCG Roadmap is also part of strategic planning in GCG implementation.

Through the GCG Roadmap, Bank Sulteng can obtain an overview of the stages in the GCG implementation process determined over a specific period. The GCG Roadmap serves as a guide for Bank Sulteng, providing a roadmap for continuous GCG implementation in the Company.



Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, mekanisme tata kelola perusahaan ditetapkan dan dirumuskan Bank Sulteng ke dalam tahapan-tahapan implementasi GCG.

Bank Sulteng mewajibkan setiap Insan Perusahaan untuk senantiasa berkomitmen menerapkan GCG secara konsisten dan menerapkan prinsip-prinsip GCG pada setiap aktivitas dan kegiatan usahanya.

Corporate Governance Mechanism

Referring to Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks and Financial Services Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.03/2025 dated Juni 24, 2025, concerning the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks, the corporate governance mechanism is established and formulated by Bank Sulteng into GCG implementation stages.

Bank Sulteng requires every Company Personnel to continuously commit to consistently implementing GCG and applying GCG principles in every business activity and operation. Bank Sulteng requests every Company

Bank Sulteng meminta setiap Insan Perusahaan berkomitmen untuk mewujudkan penerapan GCG yang diwujudkan melalui komitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, GCG *Charter*, Pedoman Etika Perusahaan, Visi, Misi serta Strategi Perusahaan.

Mekanisme penerapan GCG di Bank Sulteng dijalankan melalui pelaksanaan peran dan fungsi masing-masing Organ Perusahaan yang memiliki peran yang penting dalam implementasi GCG. Melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan antara Dewan Komisaris, Direksi dan komite-komite yang ada, pelaksanaan GCG dijalankan dan dipantau secara berkala.

Dalam upaya untuk memastikan seluruh jajaran Perusahaan memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Bank Sulteng telah mensosialisasikan kebijakan (*soft structure*) GCG kepada seluruh jajaran Perusahaan. Bank Sulteng juga secara berkala melakukan penilaian terhadap pelaksanaan GCG untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas penerapan GCG. Penilaian GCG dilakukan baik secara internal melalui proses penilaian sendiri (*self assessment*) yang diselenggarakan setiap semester maupun secara eksternal melalui penilaian yang dilakukan oleh OJK.

Tahapan Implementasi Tata Kelola Perusahaan

Bank Sulteng menetapkan tahapan-tahapan dalam implementasi GCG agar penerapan GCG dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan. Tahapan ini nantinya akan menjadi panduan bagi Bank Sulteng dalam menerapkan GCG sehingga dapat berjalan secara terarah.

Tahapan implementasi GCG di Bank Sulteng diawali dengan Strategi Implementasi yang selanjutnya diikuti dengan tahapan secara berkelanjutan meliputi *Awareness* GCG, Implementasi GCG, Monitoring Implementasi GCG, Pelaporan dan Disclosure GCG serta *Assessment* GCG.

Personnel to commit to realizing GCG implementation, manifested through a commitment to comply with all provisions stipulated in the Company's Articles of Association, GCG Charter, Corporate Code of Ethics, Vision, Mission, and Corporate Strategy.

The GCG implementation mechanism at Bank Sulteng is executed through the fulfillment of the roles and functions of each Corporate Organ, which plays a critical role in GCG implementation. Through coordination meetings held between the Board of Commissioners, the Board of Directors, and existing committees, GCG implementation is executed and monitored periodically.

In an effort to ensure the entire Company hierarchy understands and implements GCG principles while executing their duties and responsibilities, Bank Sulteng has socialized GCG soft structure policies to all Company staff. Bank Sulteng also periodically conducts assessments on GCG execution to evaluate the effectiveness of GCG implementation. GCG assessments are conducted both internally through a self-assessment process held every semester and externally through assessments conducted by the OJK.

Stages Of Corporate Governance Implementation

Bank Sulteng establishes stages in GCG implementation to ensure it runs effectively and sustainably. These stages will serve as guidelines for Bank Sulteng in applying GCG in a directed manner.

The stages of GCG implementation at Bank Sulteng commence with Implementation Strategy, followed by continuous stages including GCG Awareness, GCG Implementation, GCG Monitoring Implementation, GCG Reporting and Disclosure, and GCG Assessment.

Tahapan-tahapan implementasi GCG di Bank Sulteng
Stages of GCG implementation at Bank Sulteng



Strategi Implementasi Tata Kelola Perusahaan

Bank Sulteng menetapkan strategi implementasi GCG untuk mendukung implementasi GCG agar dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan. Strategi implementasi GCG ditetapkan sebagai bagian dari rencana kerja Perusahaan sejalan dengan *business plan* Bank Sulteng.

Beberapa inisiatif yang telah dijalankan Bank Sulteng selama tahun 2025 sebagai bagian dari strategi implementasi GCG di Bank Sulteng antara lain yaitu:

1. Perlindungan terhadap hak pemegang saham
2. Optimalisasi peran dan fungsi Dewan Komisaris, Direksi dan Komite
3. Peningkatan fungsi manajemen risiko dan pengendalian internal
4. Peningkatan fungsi kepatuhan
5. Peningkatan Teknologi Informasi yang memadai.

Sosialisasi dan GCG Awareness

Sejalan dengan komitmen Bank Sulteng untuk terus meningkatkan pemahaman seluruh Insan Perusahaan terhadap penerapan GCG di Bank Sulteng, secara berkesinambungan Bank Sulteng menyelenggarakan program awareness dan sosialisasi GCG. Dengan demikian diharapkan nantinya praktik dan sikap yang dilandasi dengan prinsip-prinsip GCG melekat dan menjadi budaya setiap insan Perusahaan.

Corporate Governance Implementation Strategy

Bank Sulteng establishes a GCG implementation strategy to support GCG implementation so it can run effectively and sustainably. The GCG implementation strategy is set as part of the Company's work plan in line with Bank Sulteng's business plan.

Several initiatives executed by Bank Sulteng during 2025 as part of the GCG implementation strategy at Bank Sulteng include:

1. Protection of shareholder rights
2. Optimization of the roles and functions of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Committees
3. Enhancement of risk management and internal control functions
4. Enhancement of the compliance function
5. Enhancement of adequate Information Technology

Socialization and GCG Awareness

In line with Bank Sulteng's commitment to continuously improve the understanding of all Company Personnel regarding GCG implementation at Bank Sulteng, Bank Sulteng continuously organizes GCG awareness and socialization programs. Thus, it is expected that practices and attitudes based on GCG principles will eventually become embedded and become the culture of every Company personnel.

Untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya implementasi GCG kepada setiap Insan Perusahaan, Bank Sulteng menyelenggarakan program *awareness* GCG. Bank Sulteng memberikan program *awareness* GCG kepada karyawan baru melalui Pendidikan Dasar Perbankan sampai dengan dilaksanakannya GCG refreshment bagi karyawan. Secara berkala Bank Sulteng juga melakukan program sosialisasi GCG kepada karyawan melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik dimana pelaksanaannya berkoordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam aktivitas sosialisasi GCG. Pelaksanaan kegiatan *awareness* maupun sosialisasi GCG didokumentasikan secara baik dan disampaikan dalam bentuk laporan dengan demikian Perusahaan dapat melakukan monitoring dan evaluasi.

Implementasi GCG

Sepanjang tahun 2025 Bank Sulteng telah menjalankan berbagai kegiatan yang menjadi program kerja GCG diantaranya yaitu:

1. Melakukan *monitoring* terkait pelaporan LHKPN oleh para wajib lapor LHKPN di lingkungan Perusahaan;
2. Menyusun Laporan *Self Assessment* Penerapan Tata Kelola dan Tingkat Kesehatan Bank (TKB) untuk disampaikan kepada OJK;
3. Melaksanakan sosialisasi Fungsi Kepatuhan, GCG dan *Whistleblowing System*.

Monitoring Implementasi GCG

Penerapan GCG yang dapat berjalan dengan efektif tidak terlepas dari upaya Perusahaan untuk melakukan monitoring pelaksanaannya secara berkala. Untuk itu Bank Sulteng melakukan kegiatan monitoring terhadap implementasi GCG guna mengetahui sejauh mana tahapan implementasi GCG telah dilaksanakan sekaligus untuk memastikan bahwa implementasi GCG berjalan sesuai dengan rencana dan tahapan yang telah ditetapkan.

Bank Sulteng menjalankan kegiatan dan program kerja GCG yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bagian GCG dan TKB yang berada di bawah Divisi Satuan Kerja Kepatuhan yang meliputi tahap *awareness*, penilaian sampai dengan pelaporan. Secara internal penilaian dilakukan secara mandiri (self assessment) sedangkan secara eksternal penilaian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

To provide an understanding of the importance of GCG implementation to every Company Personnel, Bank Sulteng organizes GCG awareness programs. Bank Sulteng provides GCG awareness programs to new employees through Basic Banking Education up to conducting GCG refreshment training for employees. Periodically, Bank Sulteng also conducts GCG socialization programs for employees through various media, both print and electronic, where the execution is coordinated with parties having an interest in GCG socialization activities. The execution of GCG awareness and socialization activities is well-documented and submitted in the form of a report so the Company can conduct monitoring and evaluation.

GCG Implementation

Throughout 2025, Bank Sulteng executed various activities that constitute GCG work programs, including:

1. Conducting monitoring regarding LHKPN reporting by LHKPN reporting obligors within the Company;
2. Preparing the Self Assessment Report on Governance Implementation and Bank Soundness Level (TKB) for submission to OJK;
3. Conducting socialization on Compliance Function, GCG, and Whistleblowing System.

GCG Monitoring Implementation

Effective GCG implementation cannot be separated from the Company's efforts to monitor its execution periodically. Therefore, Bank Sulteng conducts monitoring activities on GCG implementation to determine the extent to which GCG implementation stages have been executed and to ensure that GCG implementation runs according to the predetermined plans and stages.

Bank Sulteng executes GCG activities and work programs managed by the GCG and TKB Department under the Compliance Task Force Division, which encompasses the awareness, assessment, and reporting stages. Internally, assessments are conducted independently (self-assessment), while externally, assessments are conducted by the Financial Services Authority (OJK).

Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa implementasi GCG telah berjalan secara optimal. Bank Sulteng mendokumentasikan seluruh kegiatan tersebut dan menyampaikannya dalam bentuk laporan sehingga dapat dengan mudah dievaluasi.

The Board of Commissioners, through the Audit Committee, exercises oversight to ensure that GCG implementation has run optimally. Bank Sulteng documents all these activities and submits them in the form of reports so they can be easily evaluated.

Assessment Monitoring GCG

Penilaian secara mandiri (*self assessment*) terhadap penerapan GCG dilakukan secara berkala dengan menggunakan parameter sebagaimana telah ditetapkan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Berdasarkan hasil *self assessment* GCG untuk Semester II tahun 2025 diketahui bahwa Bank Sulteng masuk peringkat 2 (dua) dengan predikat "Baik" dimana secara umum hasilnya dapat uraian sebagai berikut:

GCG Assessment Monitoring

Independent assessments (self-assessment) on GCG implementation are conducted periodically using parameters established concerning Financial Services Authority Circular Letter No. 13/POJK.03/2017 dated March 17, 2017, concerning the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks.

Based on the GCG self-assessment results for the second semester (H2) of 2025, it is noted that Bank Sulteng attained Composite Rating 2 (two) with a "Good" predicate, where the general results can be summarized as follows:

Peringkat Rank		Definisi Peringkat Rank Definition
Individual Individual	2 (Baik) 2 (Good)	Berdasarkan hasil *self assessment* terhadap (tiga) faktor yaitu: *Governance Structure, Governance Process* dan *Governance Outcome* yang mencakupi 16 (enam belas) Kriteria/Indikator, bahwa PT Bank Sulteng telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank. Based on the results of the self-assessment of (three) factors, namely: Governance Structure, Governance Process, and Governance Outcome, which encompass 16 (sixteen) Criteria/Indicators, PT Bank Sulteng has implemented Governance that is generally Good. This is reflected in the adequate fulfillment of Good Corporate Governance principles. Should there be any weaknesses in the implementation of Good Corporate Governance principles, such weaknesses are generally insignificant and can be resolved through normal actions by the Bank's management.

Untuk tahun buku 2025, berdasarkan hasil *self assessment* GCG yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa Bank Sulteng juga masuk peringkat 2 (dua) dengan predikat "Baik".

For the 2025 financial year, based on the executed GCG self-assessment results, Bank Sulteng also ranked 2nd (Two) with a "Good" predicate.

Perbandingan hasil *self assessment* GCG pada Semester I dan Semester II untuk Tahun 2024 dan Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

The comparison of GCG self-assessment results for Semester I and Semester II of 2024 and 2025 can be detailed as follows:

No	Aspek	2025	2024	
		Semester I	Semester I	Semester II
1	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Directors	2	2	2
2	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners	2	3	3
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Completeness and Implementation of Committee Duties	2	3	3
4	Penanganan Benturan Kepentingan Handling of Conflicts of Interest	2	2	2
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank Implementation of the Bank's Compliance Function	3	3	3

No	Aspek	2025	2024	
		Semester I	Semester I	Semester II
6	Penerapan Fungsi Audit Intern Implementation of the Internal Audit Function	2	2	2
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern Implementation of the External Audit Function	2	2	2
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern Implementation of Risk Management Including Internal Control Systems	3	3	3
9	Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) Provision of funds to related parties and large exposures	2	2	2
10	Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Dan Pelaporan Internal Transparency of Financial and Non-Financial Conditions of Governance Implementation Reports and Internal Reporting	2	2	2
11	Rencana Strategis Bank Bank's Strategic Plan	2	2	2
	Predikat Predicate	**2**	**2**	**2**

*) Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
*) In accordance with Financial Services Authority Circular Letter Number 13/SEOJK.03/2017 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks

No	Aspek	2025
		Semester II
1	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Directors	2
2	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners	2
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Completeness and Implementation of Committee Duties	2
4	Penanganan Benturan Kepentingan Handling of Conflicts of Interest	2
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank Implementation of the Bank's Compliance Function	2
6	Penerapan Fungsi Audit Intern Implementation of the Internal Audit Function	2
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern Implementation of the External Audit Function	2
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern Implementation of Risk Management Including Internal Control Systems	2
9	Pemberian Remunerasi Remuneration Provision	2
10	Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar Provision of funds to related parties and large exposures	2
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi Reporting Integrity and Information Technology Systems	2
12	Rencana Strategis Bank Bank's Strategic Plan	2
13	Aspek Pemegang Saham Shareholder Aspects	2
14	Penerapan Strategi Anti *Fraud*, Termasuk Anti Penyuapan Implementation of Anti-Fraud Strategy, Including Anti-Bribery	2
15	Penerapan Keuangan Berkelanjutan, Termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Implementation of Sustainable Finance, Including the Implementation of Social and Environmental Responsibility	2
16	Penerapan Tata Kelola Dalam KUB Implementation of Governance within KUB	2
	Predikat Predicate	**2**

*) Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2025 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
*) In accordance with Financial Services Authority Circular Letter Number 14/SEOJK.03/2025 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks

Pelaporan dan Disclosure

Laporan penerapan GCG diterbitkan Bank Sulteng sesuai dengan standar pengungkapan informasi dengan berpedoman pada ketentuan pelaksanaan GCG bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Setiap tahunnya Bank Sulteng mengungkapkan kondisi penerapan GCG di Perusahaan untuk periode 1 tahun melalui Laporan Tahunan (*Annual Report*). Laporan Tahunan (*Annual Report*) Bank Sulteng dapat diakses melalui *website* Perusahaan.

Pemegang Saham

Pemegang Saham merupakan seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada Perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Saham Perusahaan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari:

1. Saham Seri A (saham preferen) yang hanya khusus dimiliki Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
2. Saham Seri B (saham biasa) yang dimiliki Pihak Ketiga.

Tanggung Jawab Pemegang Saham

Pemegang Saham sebagai pemilik modal, memiliki tanggung jawab antara lain yaitu:

1. Melakukan pemisahan antara kepemilikan harta perusahaan terbuka dengan kepemilikan harta pribadi;
2. Melakukan pemisahan fungsi sebagai pemegang saham dan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi apabila pemegang saham menjabat pada salah satu dari kedua organ tersebut;
3. Pemegang Saham yang memiliki kepentingan tidak diperbolehkan memberikan suara.

Hak Pemegang Saham

Pemegang Saham Seri A (saham preferen) mempunyai hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh pemegang saham lainnya, antara lain yaitu:

Reporting and Disclosure

The GCG implementation report is published by Bank Sulteng in accordance with information disclosure standards guided by bank GCG implementation provisions as stipulated in Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks and Financial Services Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.03/2025 dated June 24, 2025.

Annually, Bank Sulteng discloses the condition of GCG implementation in the Company for a 1-year period through the Annual Report. Bank Sulteng's Annual Report can be accessed via the Company's website.

Shareholders

A Shareholder is an individual or legal entity that legally owns one or more shares in the Company. Shareholders are the owners of the company. Company shares are registered shares issued to owners listed in the Register of Shareholders consisting of:

1. Series A Shares (preferred shares) exclusively owned by the Provincial, Regency, and City Regional Governments
2. Series B Shares (common shares) owned by Third Parties

Shareholders' Responsibilities

Shareholders, as capital owners, have responsibilities including:

1. Separating ownership of public company assets from personal asset ownership
2. Separating functions as a shareholder and as a member of the Board of Commissioners or Board of Directors if the shareholder holds a position in either of these organs
3. Shareholders with a conflict of interest are prohibited from casting votes

Shareholders' Rights

Series A Shareholders (preferred shares) possess special privileges not held by other shareholders, including:

1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal sebagai berikut:
   a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar.
   b. Persetujuan perubahan permodalan.
   c. Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
   d. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran Perusahaan.
   e. Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
   f. Persetujuan pemindahtanganan dan penjamin aset yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
   g. Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan persentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
   h. Persetujuan penggunaan laba bersih.
   i. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
2. Hak untuk mengusulkan agenda RUPS.
3. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan.
4. Hak untuk mengajukan pencalonan yang mengikat atas calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.

Pemegang Saham Seri B (saham biasa) memiliki hak-hak antara lain yaitu:

1. Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat, dan memberikan suara dalam RUPS berdasarkan satu saham.
2. Setiap Pemegang Saham memiliki hak 1 (satu) suara/saham.
3. Mendapatkan penjelasan prosedur voting sebelum RUPS dimulai.
4. Mekanisme *voting* dilakukan dengan metode *poolling*.
5. Kesempatan untuk mengajukan agenda pada RUPS.
6. Kesempatan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain apabila pemegang saham berhalangan hadir dalam RUPS.
7. Mengungkapkan praktik-praktik untuk mendorong keterlibatan Pemegang Saham di luar RUPS.
8. Bertanya untuk setiap pembahasan agenda dan setiap putusan agenda RUPS.
9. Kesempatan untuk memberikan suara setuju, tidak setuju, atau abstain pada setiap usulan putusan agenda RUPS.
10. Hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar, dan teratur, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia.

1. The right to approve in the GMS regarding the following matters:
   a. Approval of amendments to the Articles of Association.
   b. Approval of capital changes.
   c. Approval of the appointment and dismissal of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.
   d. Approval regarding mergers, amalgamations, acquisitions, separations, and dissolution of the Company.
   e. Approval of the remuneration of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.
   f. Approval of the transfer and pledging of assets which, based on the Articles of Association, requires GMS approval.
   g. Approval regarding capital participation and reduction of capital participation percentage in other companies which, based on the Articles of Association, requires GMS approval.
   h. Approval of the appropriation of net profit.
   i. Approval regarding long-term, non-operational investments and financing which, based on the Articles of Association, requires GMS approval.
2. The right to propose GMS agendas.
3. The right to request and access company data and documents.
4. The right to submit binding nominations for candidates for members of the Board of Directors and Board of Commissioners.

Series B Shareholders (common shares) possess rights including:

1. The right to attend, express opinions, and vote in the GMS based on one share.
2. Every Shareholder has the right to 1 (one) vote per share.
3. Obtaining an explanation of voting procedures before the GMS commences.
4. The voting mechanism is conducted via the pooling method.
5. The opportunity to propose agendas at the GMS.
6. The opportunity to grant power of attorney to other parties if the shareholder is unable to attend the GMS.
7. Disclosing practices to encourage Shareholder engagement outside the GMS.
8. Asking questions for every agenda discussion and every GMS agenda decision.
9. The opportunity to vote for, against, or abstain on every proposed GMS agenda decision.
10. The right to obtain accurate and regular information about the company in a timely manner, except for confidential matters.

11. Hak untuk menerima bagian dari keuntungan Perusahaan yang diperuntukan bagi Pemegang Saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya, sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki.
12. Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS.

Akuntabilitas Pemegang Saham

Kewajiban Pemegang Saham antara lain yaitu:

1. Memastikan bahwa pengelolaan perusahaan tetap sesuai dengan tujuan pendirian perusahaan;
2. Melaksanakan GCG sesuai wewenang dan tanggung jawabnya;
3. Tidak mencampuri kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi.

Akses Informasi Bagi Pemegang Saham

Bank Sulteng menyediakan informasi mengenai perusahaan secara memadai, tepat waktu, benar, dan berkala yang dapat digunakan Pemegang Saham dalam membuat keputusan berdasarkan informasi yang valid dan akurat.

Informasi mengenai Perusahaan disediakan Bank Sulteng untuk Pemegang Saham melalui:

1. Rapat Umum Pemegang Saham dimana Pemegang Saham dapat berkomunikasi dengan Manajemen dalam hal informasi mengenai Perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan.
2. *Website* Perusahaan dengan alamat www.banksulteng.co.id dimana Pemegang Saham dapat mendapatkan informasi terbaru dan relevan terkait berbagai laporan dan publikasi mengenai Bank Sulteng.
3. Laporan Tahunan (*Annual Report*) dimana Pemegang Saham dapat mendapatkan informasi mengenai kinerja dan kondisi keuangan Perusahaan.

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan Organ Perusahaan yang memiliki semua kewenangan yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam batas yang ditentukan oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang antara lain mencakup meminta pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan pengawasan dan pengurusan Bank, mengubah Anggaran Dasar, mengangkat dan

11. The right to receive a portion of Company profits allocated to Shareholders in the form of dividends and other profit distributions, proportional to the number of shares owned.

12. The right to obtain comprehensive explanations and accurate information regarding procedures that must be fulfilled concerning the execution of the GMS.

Shareholders' Accountability

Shareholders' obligations include:

1. Ensuring that company management remains aligned with the company's founding objectives
2. Implementing GCG in accordance with their authority and responsibilities
3. Refraining from interfering in the company's operational activities, which are the responsibility of the Board of Directors.

Information Access for Shareholders Bank

Sulteng provides adequate, timely, accurate, and periodic information regarding the company that Shareholders can utilize to make decisions based on valid and accurate information.

Company information is provided by Bank Sulteng to Shareholders through:

4. The General Meeting of Shareholders, where Shareholders can communicate with Management regarding Company information as a basis for decision-making.
5. The Company website at www.banksulteng.co.id, where Shareholders can access the latest and relevant information regarding various reports and publications concerning Bank Sulteng.

6. The Annual Report, where Shareholders can access information regarding the Company's performance and financial condition.

General Meeting of Shareholders

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the Corporate Organ possessing all authorities not delegated to the Board of Commissioners and the Board of Directors within limits defined by the Articles of Association and applicable laws and regulations. This includes demanding accountability from the Board of Commissioners and Board of Directors regarding Bank oversight and management, amending the Articles of Association, and appointing or dismissing members of

memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

RUPS merupakan sarana bagi Pemegang Saham dalam mengarahkan jalannya Perusahaan. Melalui forum RUPS, Pemegang Saham dapat menggunakan hak yang dimilikinya untuk mengemukakan pendapat dan memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perusahaan dari Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang berhubungan dengan acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perusahaan. RUPS menjadi media komunikasi antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan para Pemegang Saham Perusahaan melalui forum tanya jawab yang diberikan kepada seluruh Pemegang Saham yang hadir pada setiap mata acara RUPS. Dalam forum RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Pemegang Saham. Melalui forum, Pemegang Saham dapat melakukan pembahasan dan pengambilan keputusan strategis dan penting yang berkaitan dengan kepentingan usaha Perusahaan.

RUPS Bank Sulteng terdiri dari 2 (dua) yaitu: RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Untuk RUPS Tahunan diadakan setiap tahun untuk memberikan persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan. Sedangkan untuk RUPS Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kepentingan Perusahaan.

Proses Pelaksanaan RUPS

Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. Perusahaan wajib melakukan pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau kosong, maka RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau kosong, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau kosong, maka RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

the Board of Commissioners and Board of Directors.

The GMS is a medium for Shareholders to direct the course of the Company. Through the GMS forum, Shareholders may exercise their rights to express opinions and obtain information related to the Company from the Board of Commissioners and Board of Directors, provided it relates to the meeting agenda and does not conflict with Company interests. The GMS serves as a communication channel between the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Company's Shareholders through Q&A sessions provided for all attending Shareholders for each GMS agenda item. In the GMS forum, the Board of Commissioners and the Board of Directors report and are held accountable for the execution of their duties and responsibilities to the Shareholders. Through the forum, Shareholders can engage in discussions and make strategic and crucial decisions related to the Company's business interests.

Bank Sulteng's GMS consists of 2 (two) types: The Annual GMS and the Extraordinary GMS. The Annual GMS is held yearly to approve the Annual Report and ratify the Financial Statements. The Extraordinary GMS can be convened at any time according to the Company's needs and interests.

GMS Execution Process

The GMS announcement is made no later than 14 (fourteen) days before the GMS invitation, excluding the date of the announcement and the date of the invitation. The Company must issue the GMS invitation to the Shareholders no later than 21 (twenty-one) days before the GMS, excluding the date of the invitation and the date of the GMS.

The GMS is chaired by the President Commissioner; in the event the President Commissioner is absent or vacant, the GMS is chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners' Meeting. In the event all members of the Board of Commissioners are absent or vacant, the GMS is chaired by a member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors. In the event all members of the Board of Directors are absent or vacant, the GMS is chaired by a Shareholder present at the GMS, appointed from and by the attendees.
In the event the member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners has a conflict of interest regarding the matters to be decided in the GMS, the GMS is chaired by another member of the Board of Commissioners who has no conflict of interest, appointed by the Board of Commissioners. If

Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS.

RUPS Tahunan Tahun 2025

RUPST Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2025 bertempat di Hotel Best Western Plus Coco yang dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang mewakili sebanyak 15 (lima belas) Pemegang Saham atau setara dengan 100% dari jumlah total saham dengan hak suara sah yang dikeluarkan oleh Perusahaan.

Pemegang Saham telah meminta penjelasan dan memberikan arahan secara langsung dalam RUPS. Seluruh kegiatan RUPS telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, baik dari sisi tempat, pemberitahuan, pemanggilan RUPS, pimpinan dan berita acara RUPS berikut ketentuan kuorum, hak suara dan keputusan RUPS.

all members of the Board of Commissioners have a conflict of interest, the GMS is chaired by one of the Directors appointed by the Board of Directors.

In the event one of the Directors appointed by the Board of Directors has a conflict of interest regarding the matters to be decided in the GMS, the GMS is chaired by a member of the Board of Directors who has no conflict of interest. If all members of the Board of Directors have a conflict of interest, the GMS is chaired by one of the non-controlling Shareholders elected by the majority of the Shareholders present at the GMS.

2025 Annual GMS

The Annual GMS for the Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements for the 2024 Financial Year was held on January 20, 2025, at Hotel Best Western Plus Coco attended by the Shareholders and/or their proxies representing 15 (fifteen) Shareholders, equivalent to 100% of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

The Shareholders requested explanations and provided direct directives during the GMS. All GMS activities were executed in accordance with applicable regulations, regarding the venue, notification, GMS invitation, chairperson, and GMS minutes, as well as provisions on quorum, voting rights, and GMS resolutions.

No.	Kegiatan Activity	Tanggal Date	Keterangan Description
1.	Pemanggilan RUPS Tahun Buku 2024 kepada Pemegang Saham Invitation to the GMS for Financial Year 2024 to Shareholders	02 Januari 2025 January 02, 2025	Pengumuman pada media cetak harian lokal Radar Palu tentang Pemanggilan RUPS Tahun Buku 2024. Announcement in the local daily print media Radar Palu regarding the Invitation to the GMS for the Financial Year 2024.
2.	Pelaksanaan RUPS Tahun Buku 2024 Implementation of GMS for Financial Year 2024	20 Januari 2025 January 20, 2025	Pelaksanaan RUPS di Hotel Best Western Plus Coco dan dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau wakil Pemegang Saham seluruhnya. The GMS was held at Hotel Best Western Plus Coco and attended by all Shareholders and/or representatives
3.	Berita Acara Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for Financial Year 2024	20 Januari 2025 January 20, 2025	Termuat dalam Akta No. 27 tentang Pernyataan Keputusan Rapat RUPS Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah tanggal 20 Februari 2025. Contained in Deed No. 27 concerning the Statement of Meeting Resolutions of the Annual GMS of PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dated January 20, 2025.

Berikut ini diuraikan terkait pelaksanaan RUPS Tahun Buku 2024 sebagai berikut:

The following outlines the execution of the GMS for the 2024 Financial Year:

RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 GMS Approval of Annual Report and Ratification of Financial Statements for the Financial Year 2024	
Tanggal Pelaksanaan: Implementation Date:	20 Januari 2025 January 20, 2025
Tempat: Place:	Hotel Best Western Plus Coco
Agenda: Agenda:	1. Pengantar Pembukaan Rapat; 2. Pengesahan Tata Tertib Rapat; 3. Laporan Tahunan Direksi mengenai jalannya Perusahaan selama Tahun Buku 2024 dan Rencana Bisnis Bank Tahun 2025; 4. Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris terhadap jalannya Perusahaan selama Tahun Buku 2025; 5. Persetujuan Penggunaan Laba Perusahaan Tahun Buku 2024; 6. Usulan keputusan yang diajukan oleh Pengurus Perusahaan. 1. Introduction to the Opening of the Meeting; 2. Ratification of the Meeting Rules; 3. Annual Report of the Board of Directors regarding the course of the Company during the Financial Year 2024 and the Bank's Business Plan for 2025; 4. Report on the Implementation of Supervisory Duties of the Board of Commissioners on the course of the Company during the Financial Year 2024; 5. Approval of the use of the Company's profit of the financial year 2024; 6. Proposed resolutions submitted by the Company's Management.
Keputusan: Decision:	1. Menyetujui dan mengesahkan tata tertib RUPS Tahunan Tahun Buku 2024; 2. Menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan Tahun Buku 2024 yang terdiri dari Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh KAP Annas Cahyadi sesuai Laporan Nomor 0004/2.1034/AU.1/07/1162-4/1/I/2025 tanggal 16 Januari 2025 dengan opini "wajar dalam semua hal yang meterial atas Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; 3. Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perusahaan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 4. Menyetujui penggunaan laba Perusahaan tahun buku 2024; 5. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan pemeriksaan pada Tahun Buku 2025; 6. Memberikan persetujuan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui pernyataan pendiri Dana Pensiun Bank Sulteng dalam perubahan peraturan Dana Pensiun Bank Sulteng. 1. Approved and ratified the rules of conduct for the Annual GMS for the 2024 Financial Year; 2. Approved the Company's Annual Report for the 2024 Financial Year, comprising the Board of Directors' Report and the Board of Commissioners' Supervisory Duty Report, and ratified the Company's Financial Statements for the Financial Year ended December 31, 2024, along with the explanatory notes audited by the Public Accounting Firm (KAP) Annas Cahyadi per Report Number 0004/2.1034/AU.1/07/1162-4/1/I/2025 dated January 16, 2025, with the opinion "presented fairly, in all material respects" on the Financial Statements of PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah for the year ended December 31, 2024; 3. Approved the granting of full release and discharge from responsibility (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision executed during the 2024 Financial Year, provided that such actions are reflected in the Company's Financial Statements and comply with applicable regulations; 4. Approved the appropriation of the Company's profit for the 2024 financial year; 5. Granted authority to the Board of Commissioners to appoint the Public Accounting Firm (KAP) that will conduct the audit for the 2025 Financial Year; 6. Granted approval of authority to the Board of Commissioners to approve the statement of the founder of the Bank Sulteng Pension Fund regarding amendments to the regulations of the Bank Sulteng Pension Fund.

Tingkat Kehadiran Pemegang Saham Dalam RUPS Tahunan

Selama 3 (tiga) tahun terakhir, tingkat kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan rata-rata sebesar 100% yang berarti bahwa pelaksanaan pengumuman dan panggilan RUPS Perusahaan telah berjalan secara efektif dengan tingkat kepedulian dan kehadiran yang tinggi dari para Pemegang Saham.

Shareholder Attendance Rate at the Annual GMS

Over the last 3 (three) years, the average Shareholder attendance rate at the Annual GMS was 100%, indicating that the implementation of the Company's GMS announcements and invitations has been highly effective, reflecting a high level of engagement and attendance from the Shareholders.

Pemegang Saham Shareholders	**% Kehadiran** % Attendance		
	2025	**2024**	**2023**
Pemprov Sulawesi Tengah Central Sulawesi Provincial Government	100%	100%	100%
PT Mega Corpora PT Mega Corpora	100%	100%	100%
Pemkot Parigi Moutong Parigi Moutong City Government	100%	100%	100%
Pemkab Tolitoli Tolitoli District Government	100%	100%	100%
Pemkab Poso Poso District Government	100%	100%	100%
Pemkab Banggai Banggai District Government	100%	100%	100%
Pemkab Buol Buol District Government	100%	100%	100%
Pemkab Donggala Donggala Government	100%	100%	100%
Pemkab Banggai Kepulauan Banggai Islands Regency Government	100%	100%	100%
Pemkab Tojo Una-Una Tojo Una-Una District Government	100%	100%	100%
Pemkot Palu City Government of Palu	100%	100%	100%
Pemkab Morowali Utara North Morowali Regency Government	100%	100%	100%
Pemkab Morowali Morowali Regency Government	100%	100%	100%
Pemkab Banggai Laut Banggai Laut District Government	100%	100%	100%
Pemkab Sigi Sigi Regency Government	100%	100%	100%

RUPS Luar Biasa Tahun 2025

RUPS Luar Biasa (RUPSLB) selama tahun 2025 telah dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 20 Januari 2025 bertempat di Hotel Best Western Plus Coco RUPS Luar Biasa (RUPSLB) tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang mewakili sebanyak 15 (lima belas) Pemegang Saham atau setara dengan 100% dari jumlah total saham dengan hak suara sah yang dikeluarkan oleh Perusahaan.

2025 Extraordinary GMS

During 2025, the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) was held 1 (one) time, on January 20, 2025, at Hotel Best Western Plus Coco The Extraordinary GMS (EGMS) was attended by Shareholders and/or their proxies representing 15 (fifteen) Shareholders, equivalent to 100% of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

Pemegang Saham telah meminta penjelasan dan memberikan arahan secara langsung dalam RUPSLB. Seluruh kegiatan RUPSLB telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, baik dari sisi tempat, pemberitahuan, pemanggilan RUPS, pimpinan dan berita acara RUPS berikut ketentuan kuorum, hak suara dan keputusan RUPS.

The Shareholders requested explanations and provided direct directives during the EGMS. All EGMS activities were executed in accordance with applicable regulations, regarding the venue, notification, GMS invitation, chairperson, and GMS minutes, as well as provisions on quorum, voting rights, and GMS resolutions.

No.	Kegiatan Activities	Tanggal Date	Keterangan Description
1.	Pemberitahuan RUPS Luar Biasa kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Notification of Extraordinary GMS to the Financial Services Authority (OJK)	31 Januari 2025 January 31, 2025	Perihal Penyampaian Laporan Hasil Keputusan RUPS PT Bank Sulteng. Regarding the Submission of the Report on the Resolutions of the GMS of PT Bank Sulteng.
2.	Pengumuman RUPS Luar Biasa kepada Pemegang Saham Announcement of Extraordinary GMS to Shareholders	02 Januari 2025 January 02, 2025	Pengumuman pada media cetak harian lokal Radar Palu tentang Pemanggilan RUPS Tahun Buku 2024. Announcement in the local daily print media Radar Palu regarding the Invitation to the GMS for the Financial Year 2024.
3.	Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Implementation of Extraordinary GMS	20 Januari 2025 January 20, 2025	Pelaksanaan RUPS di Hotel Best Western Plus Coco dan dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau wakil Pemegang Saham seluruhnya. The GMS was held at Hotel Best Western Plus Coco and attended by all Shareholders and/or representatives of Shareholders.
4.	Penyampaian Risalah RUPS Luar Biasa Submission of Minutes of Extraordinary GMS	20 Januari 2025 January 20, 2025	Termuat dalam Akta No. 28 tentang Pernyataan Keputusan Rapat RUPS Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah tanggal 20 Januari 2025. Contained in Deed No. 23 concerning the Resolution of the Extraordinary GMS Meeting of PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dated January 20, 2025.

Berikut ini diuraikan mengenai pelaksanaan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 20 Januari 2025 yaitu sebagai berikut:

The following outlines the execution of the Extraordinary GMS held on January 20, 2025, as follows:

RUPS Luar Biasa Extraordinary GMS	
Tanggal Pelaksanaan: Implementation Date:	20 Januari 2025 January 20, 2025
Tempat: Place:	Hotel Best Western Plus Coco
Agenda: Agenda:	1. Pengesahan tata tertib rapat; a. Pembangunan Kantor Pusat PT Bank Sulteng; b. Pembelian tanah untuk gedung arsip, rumah dinas dan parkiran pada kantor PT Bank Sulteng Cabang Ampana; 2. Penegasan pembahasan rancangan perubahan Anggaran Dasar; 3. Pembahasan tentang pengurus PT Bank Sulteng; 1. Ratification of the meeting rules of conduct; a. Construction of the Head Office of PT Bank Sulteng; b. Land acquisition for the archive building, official residences, and parking lot at the PT Bank Sulteng Ampana Branch office; 2. Reaffirmation of discussions regarding the draft amendments to the Articles of Association; 3. Discussion regarding the management of PT Bank Sulteng;
Keputusan: Decision:	1. Menyetujui dan mengesahkan tata tertib RUPS Luar Biasa; 2. Memutuskan untuk mengajukan rencana pembangunan gedung Kantor Pusat PT Bank Sulteng pada RUPS yang akan datang; 3. Menyetujui dan menerima serta memutuskan pembelian tanah untuk gedung arsip, rumah dinas dan parkiran pada kantor PT Bank Sulteng Cabang Ampana; 4. Menyetujui dan menerima serta memutuskan perubahan Anggaran Dasar; 5. Menyetujui dan memutuskan perubahan pengurus PT Bank Sulteng. 1. Approved and ratified the rules of conduct for the Extraordinary GMS; 2. Resolved to propose the construction plan for the Head Office building of PT Bank Sulteng at the upcoming GMS; 3. Approved, accepted, and resolved the land acquisition for the archive building, official residences, and parking lot at the PT Bank Sulteng Ampana Branch office; 4. Approved, accepted, and resolved the amendments to the Articles of Association; 5. Approved and resolved the changes in the management of PT Bank Sulteng.

Tingkat Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Luar Biasa

Tingkat kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tahun 2025 yaitu rata-rata sebesar 100% yang berarti bahwa pelaksanaan pengumuman dan panggilan RUPS Perusahaan telah berjalan secara efektif dengan tingkat kepedulian dan kehadiran yang tinggi dari para Pemegang Saham.

Shareholder Attendance Rate at the Extraordinary GMS

The average Shareholder attendance rate at the Extraordinary GMS held in 2025 was 100%, indicating that the implementation of the Company's GMS announcements and invitations has been highly effective, reflecting a high level of engagement and attendance from the Shareholders.

Pemegang Saham Shareholders	**% Kehadiran pada RUPSLB 2024** % Attendance at EGM 2024
Pemprov Sulawesi Tengah Central Sulawesi Provincial Government	100%
PT Mega Corpora PT Mega Corpora	100%
Pemkot Parigi Moutong Parigi Moutong City Government	100%
Pemkab Tolitoli Tolitoli District Government	100%
Pemkab Poso Poso District Government	100%
Pemkab Banggai Banggai District Government	100%
Pemkab Buol Buol District Government	100%
Pemkab Donggala Donggala Government	100%
Pemkab Banggai Kepulauan Banggai Islands Regency Government	100%
Pemkab Tojo Una-Una Tojo Una-Una District Government	100%
Pemkot Palu City Government of Palu	100%
Pemkab Morowali Utara North Morowali Regency Government	100%
Pemkab Morowali Morowali Regency Government	100%
Pemkab Banggai Laut Banggai Laut District Government	100%
Pemkab Sigi Sigi Regency Government	100%

Realisasi Keputusan RUPS Tahun 2025 dan Keputusan RUPS Tahun 2024 (RUPS Tahun Sebelumnya)

RUPS Tahun 2025

Realization of the 2025 GMS Resolutions and 2024 GMS Resolutions (Previous Year's GMS)

2025 GMS

Jenis RUPS GMS Type	**Keputusan RUPS** GMS Resolution	**Realisasi** Realization	**Keterangan/ Status** Description/Status
RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 Annual General Meeting of Shareholders for Financial Year 2024	1. Menyetujui dan mengesahkan tata tertib RUPS Tahunan Tahun Buku 2024; 2. Menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan Tahun Buku 2024 yang terdiri dari Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh KAP Annas Cahyadi sesuai Laporan Nomor 0004/2.1034/AU.1/07/1162-4/1/I/2025 tanggal 16 Januari 2025 dengan opini "wajar dalam semua hal yang meterial atas Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; 3. Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perusahaan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 4. Menyetujui penggunaan laba Perusahaan tahun buku 2024; 5. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan pemeriksaan pada Tahun Buku 2025; 6. Memberikan persetujuan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui pernyataan pendiri Dana Pensiun Bank Sulteng dalam perubahan peraturan Dana Pensiun Bank Sulteng. 1. Approved and ratified the rules of conduct for the Annual GMS for the 2024 Financial Year; 2. Approved the Company's Annual Report for the 2024 Financial Year, comprising the Board of Directors' Report and the Board of Commissioners' Supervisory Duty Report, and ratified the Company's Financial Statements for the Financial Year ended December 31, 2024, along with the explanatory notes audited by the Public Accounting Firm (KAP) Annas Cahyadi per Report Number 0004/2.1034/AU.1/07/1162-4/1/I/2025 dated January 16, 2025, with the opinion "presented fairly, in all material respects" on the Financial Statements of PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah for the year ended December 31, 2024; 3. Approved the granting of full release and discharge from responsibility (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision executed during the 2024 Financial Year, provided that such actions are reflected in the Company's Financial Statements and comply with applicable regulations; 4. Approved the appropriation of the Company's profit for the 2024 financial year; 5. Granted authority to the Board of Commissioners to appoint the Public Accounting Firm (KAP) that will conduct the audit for the 2025 Financial Year; 6. Granted approval of authority to the Board of Commissioners to approve the statement of the founder of the Bank Sulteng Pension Fund regarding amendments to the regulations of the Bank Sulteng Pension Fund.	Telah dilaksanakan Has been implemented	Selesai Finish

Jenis RUPS GMS Type	**Keputusan RUPS** GMS Resolution	**Realisasi** Realization	**Keterangan/ Status** Description/Status
RUPS Luar Biasa tanggal 20 Januari 2025	1. Menyetujui dan mengesahkan tata tertib RUPS Luar Biasa; 2. Memutuskan untuk mengajukan rencana pembangunan gedung Kantor Pusat PT Bank Sulteng pada RUPS yang akan datang; 3. Menyetujui dan menerima serta memutuskan pembelian tanah untuk gedung arsip, rumah dinas dan parkiran pada kantor PT Bank Sulteng Cabang Ampana; 4. Menyetujui dan menerima serta memutuskan perubahan Anggaran Dasar; 5. Menyetujui dan memutuskan perubahan pengurus PT Bank Sulteng. 6. Approved and ratified the rules of conduct for the Extraordinary GMS; 7. Resolved to propose the construction plan for the Head Office building of PT Bank Sulteng at the upcoming GMS; 8. Approved, accepted, and resolved the land acquisition for the archive building, official residences, and parking lot at the PT Bank Sulteng Ampana Branch office; 9. Approved, accepted, and resolved the amendments to the Articles of Association; 10. Approved and resolved the changes in the management of PT Bank Sulteng.		

RUPS Tahun 2024

2024 GMS

Jenis RUPS GMS Type	**Keputusan RUPS** GMS Resolution	**Realisasi** Realization	**Keterangan/ Status** Description/Status
RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 Annual General Meeting of Shareholders for Financial Year 2023	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan untuk Tahun Buku 2023 yang terdiri dari Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 beserta penjelasannya yang telah diaudit dengan opini "wajar dalam semua hal yang meterial atas Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; 2. Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perusahaan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 3. Menyetujui penggunaan laba Perusahaan tahun buku 2023; 4. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan pemeriksaan pada Tahun Buku 2024; 5. Memberikan persetujuan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui pernyataan pendiri Dana Pensiun Perusahaan dalam perubahan peraturan Dana Pensiun Perusahaan.	Telah dilaksanakan Has been implemented	Selesai Finish

Jenis RUPS GMS Type	**Keputusan RUPS** GMS Resolution	**Realisasi** Realization	**Keterangan/ Status** Description/Status
	1. Approved the Company's Annual Report for the Financial Year 2023 consisting of the Board of Directors' Report, the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report and ratified the Company's Financial Statements for the Financial Year ended on December 31, 2023 along with the audited explanations with the opinion "fair in all material respects on the Financial Statements of PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah ended on December 31, 2023; 2. Approve the granting of full release and discharge from responsibility (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision that has been carried out during the Financial Year 2023 as long as these actions are reflected in the Company's Financial Statements and in accordance with applicable regulations; 3. Approved the use of the Company's profit for the financial year 2023; 4. To authorize the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant Firm (KAP) that will conduct an audit in Financial Year 2024; 5. To approve the authority to the Board of Commissioners to approve the statement of the founder of the Company's Pension Fund in the amendment of the Company's Pension Fund regulations.		
RUPS Luar Biasa tanggal 7 Februari 2024 Extraordinary GMS on February 7, 2024	1. Menyetujui dan mengesahkan tata tertib RUPS Luar Biasa; 2. Menegaskan pengesahan kembali setoran modal PT Mega Corpora dari 24,9% menjadi 26%; 3. Menyetujui dan menerima serta memutuskan perubahan Anggaran Dasar; 4. Menyetujui dan menerima serta memutuskan penggunaan remunerasi; 5. Memutuskan pembatalan dan pemberhentian pengurus dan calon pengurus PT Bank Sulteng; 6. Menyetujui pelantikan Direktur Utama PT Bank Sulteng. 1. Approve and ratify the rules of the Extraordinary GMS; 2. Confirmed the revalidation of PT Mega Corpora's capital deposit from 24.9% to 26%; 3. Approve and accept and decide on the amendment of the Articles of Association; 4. Approve and accept and decide on the use of remuneration; 5. Decided the cancellation and dismissal of the management and prospective management of PT Bank Sulteng; 6. Approved the inauguration of the President Director of PT Bank Sulteng.	Telah dilaksanakan Has been implemented	Selesai Finish

Jenis RUPS GMS Type	**Keputusan RUPS** GMS Resolution	**Realisasi** Realization	**Keterangan/ Status** Description/Status
RUPS Luar Biasa tanggal 20 September 2024 Extraordinary GMS on September 20, 2024	1. Menyetujui dan mengesahkan tata tertib rapat 2. Menyetujui pengesahan Kelompok Usaha Bank (KUB) yang telah disetujui oleh OJK dan pengesahan dana setoran modal Pemegang Saham; 3. Menyetujui dan menerima serta memutuskan: a. Penyertaan Modal Provinsi Sulawesi Tengah dalam bentuk aset (tanah); b. Persetujuan pembelian tanah dan pembangunan gedung kantor Bank Sulteng cabang Sigi; c. Penyertaan modal Pemda Kabupaten Morowali Utara dalam bentuk aset (tanah) 4. Menyetujui dan menerima pengesahan perubahan Tunjangan Representatif Pengurus menjadi Tunjangan Jabatan; 5. Memutuskan pembatalan dan pemberhentian Pengurus dan Calon Pengurus serta pengangkatan dan pengesahan Pengurus. 1. Approve and ratify the meeting rules 2. Approved the ratification of the Bank Business Group (KUB) approved by OJK and the ratification of the Shareholders' capital deposit; 3. Approve and accept and decide: a. Capital Participation of Central Sulawesi Province in the form of assets (land); b. Approval of land purchase and construction of Bank Sulteng's Sigi branch office building; c. Capital participation of the Regional Government of North Morowali Regency in the form of assets 4. To approve and accept the ratification of the change of Representative Allowance to Position Allowance; 5. Deciding on the cancellation and dismissal of the Management and Management Candidates as well as the appointment and ratification of the Management.	Telah dilaksanakan Has been implemented	Selesai Finish

Kebijakan Dividen

Kebijakan pembayaran dividen kepada Pemegang Saham ditetapkan RUPS dengan memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perusahaan. Pembagian dividen untuk 2 (dua) tahun terakhir yang ditetapkan sesuai keputusan pemegang saham, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk tahun 2024 nilai dividen yang dibagikan sebesar Rp154.545.066.664 untuk laba bersih tahun 2023 atau setara dengan Rp31.413 per lembar saham.
2. Untuk tahun 2025 nilai dividen yang dibagikan sebesar Rp169.562.061.202 untuk laba bersih tahun 2024 atau setara dengan Rp49.237 per lembar saham

Dividend Policy

The policy for dividend payments to Shareholders is determined by the GMS, taking into account the Company's financial position or soundness rating. The dividend distribution for the last 2 (two) years, determined in accordance with the shareholders' resolutions, is as follows:

1. For 2024, the value of dividends distributed amounted to Rp154,545,066,664 from the net profit of 2023, equivalent to Rp31,413 per share.
2. For 2025, the value of dividends distributed amounted to Rp169.562.061.202 from the net profit of 2024, equivalent to Rp49.237 per share.

Dewan Komisaris

Sebagai salah satu Organ Perusahaan, Dewan Komisaris merupakan Organ Perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi secara independen terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam mengelola Perusahaan.

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perusahaan oleh Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan, ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. Dewan Komisaris juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS setelah melalui proses pencalonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi, integritas, dan reputasi yang memadai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dewan Komisaris memiliki organ pendukung yang berada di bawah Dewan Komisaris yang berperan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komsiaris yang terdiri dari Komite Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris. Organ pendukung Dewan Komisaris tersebut bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Dasar Hukum

Dewan Komisaris Bank Sulteng dibentuk dan ditetapkan berdasarkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Peraturan Bank Indonesia No. 13/27/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

Board of Commissioners

As one of the Corporate Organs, the Board of Commissioners is the Corporate Organ that has the collective duty and responsibility to exercise oversight and provide advice to the Board of Directors independently regarding the execution of the Board of Directors' duties and responsibilities in managing the Company.

In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners is tasked with overseeing the management policies, the course of the Company's management by the Board of Directors, including the supervision of the execution of the Company's Long-Term Plan, the Company's Annual Work Plan and Budget, the provisions of the Articles of Association and GMS resolutions, as well as applicable laws and regulations for the benefit of the Company and in accordance with the Company's purposes and objectives. The Board of Commissioners is also responsible for ensuring that GCG has been implemented effectively and sustainably.

The Board of Commissioners is accountable to the GMS. The appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners are carried out by the GMS after going through a nomination process in accordance with laws and regulations, and such nominations are binding upon the GMS. All members of the Board of Commissioners possess adequate competence, integrity, and reputation in carrying out their duties and responsibilities.

The Board of Commissioners has supporting organs under the Board of Commissioners that serve to support the execution of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, consisting of the Board of Commissioners' Committees and the Secretary to the Board of Commissioners. These supporting organs of the Board of Commissioners report directly to the Board of Commissioners.

Legal Basis

The Board of Commissioners of Bank Sulteng is formed and stipulated based on several provisions as follows:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies
2. Bank Indonesia Regulation No. 13/27/PBI/2011 concerning Amendments to Bank Indonesia Regulation No. 11/1/PBI/2009 concerning Commercial Banks
3. Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks

4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
5. Anggaran Dasar Bank Sulteng.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mengacu pada pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam buku Pedoman Kerja Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 91/SK-DK/BPD-ST/2024 tanggal 18 September 2024 tentang BPP Pedoman Kerja Dewan Komisaris.

Buku Pedoman Kerja Dewan Komisaris secara umum menjadi pedoman kerja dan tata tertib kerja bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan agar dapat berjalan secara efektif, akuntabel, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Buku Pedoman Kerja Dewan Komisaris memuat ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum korporasi Indonesia yang menganut *two tiers system.*

Buku Pedoman Kerja Dewan Komisaris secara umum mengatur mengenai:

1. Jumlah, Komposisi, Kriteria, Idependensi, Keanggotaan Dewan Komisaris;
2. Tugas, Wewenang, Hak dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
3. Rapat, Aspek Transparansi dan Waktu Kerja Dewan Komisaris;
4. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris.

Fungsi pengawasan yang dijalankan Dewan Komisaris terdiri dari Pengawasan Umum dan Pengawasan Khusus.

1. Pengawasan Umum

   Terkait dengan pengawasan umum, Dewan Komisaris melakukan pemantauan, pengawasan serta evaluasi terhadap proses pelaksanaan kebijakan strategis yang dilakukan Direksi, antara lain rencana bisnis dan rencana strategis bank, Standar Operasional Prosedur, Struktur Organisasi Bank, Implementasi GCG, kerja sama dengan pihak ketiga.

4. Financial Services Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.03/2025 dated June 24, 2025, concerning the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks
5. Articles of Association of Bank Sulteng.

Guidelines and Rules of Conduct for the Board of Commissioners

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners refers to the guidelines and rules of conduct for the Board of Commissioners as stipulated in the Board of Commissioners' Working Guidelines Book, established based on the Board of Commissioners' Decree No. 91/SK-DK/BPD-ST/2024 dated September 18, 2024, concerning the BPP Working Guidelines for the Board of Commissioners.

The Board of Commissioners' Working Guidelines Book generally serves as a working guideline and rules of conduct for the Board of Commissioners in executing the supervisory function so that it can run effectively, accountably, independently, and responsibly in accordance with applicable laws and regulations. The Board of Commissioners' Working Guidelines Book contains the provisions of the Articles of Association, applicable laws and regulations, and is prepared based on the principles of Indonesian corporate law which adheres to a two-tier system.

The Board of Commissioners' Working Guidelines Book generally regulates:

1. The Number, Composition, Criteria, Independence, and Membership of the Board of Commissioners;
2. The Duties, Authorities, Rights, and Responsibilities of the Board of Commissioners;
3. Meetings, Transparency Aspects, and Working Hours of the Board of Commissioners;
4. Performance Evaluation of the Board of Commissioners.

The supervisory function executed by the Board of Commissioners consists of General Oversight and Special Oversight.

1. General Oversight

   Regarding general oversight, the Board of Commissioners conducts monitoring, supervision, and evaluation of the implementation process of strategic policies carried out by the Board of Directors, including the bank's business plans and strategic plans, Standard Operating Procedures, Bank Organizational Structure, GCG Implementation, and collaborations with third parties.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan umum dimaksud maka kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan adalah melakukan Rapat Internal Dewan Komisaris dan Rapat dengan Direksi Bank Indonesia dan Pemegang saham pengendali baik rutin maupun berkala, guna memastikan bahan Rencana Bisnis Bank dan rencana strategis Bank, Standar operasional Prosedur, Struktur Organisasi Bank telah di susun sesuai dengan standar-standar perbankan yang berlaku serta memperhitungkan kemampuan internal Bank seperti Sumber Daya Manusia, Informasi Teknologi, Modal serta capaian-capaian sebelumnya serta melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap realisasi pencapaian hasil sesuai target yang telah ditetapkan.

2. Pengawasan Khusus

Terkait pengawasan khusus, Dewan Komisaris melakukan pemantauan, pengawasan serta evaluasi terhadap pencapaian target-target Rencana Bisnis Bank, hasil temuan SKAI dan Eksternal Audit, tindak lanjut atas pelaksanaan Internal Audit dan Eksternal Audit serta saran dan Rekomendasi Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris juga memberikan nasihat-nasihat yang dianggap perlu kepada Direksi agar pelaksanaan operasional bank tetap berjalan sesuai dengan target-target bisnis yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk:

1. Memberikan saran/pendapat dalam rangka penyusunan Visi, Misi dan Rencana Strategis Jangka Panjang Bank
2. Memastikan bahwa kebijakan penerapan manajemen risiko telah terlaksana sesuai dengan Buku Pedoman Bank Manajemen Risiko yang telah disetujui
3. Memastikan bahwa Bank telah memiliki Standar Sistem Pengendalian Intern dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern bank secara umum
4. Memastikan bahwa Bank mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai pemantauan likuiditas, melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya serta memastikan kebenaran isi, kesesuaian persyaratan dan ketepatan waktu penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan memberikan pendapat atas laporan tersebut

In the context of executing the aforementioned general oversight duties, the activities to be carried out involve holding Internal Meetings of the Board of Commissioners and Meetings with the Board of Directors, Bank Indonesia, and controlling shareholders, both routinely and periodically, to ensure that the Bank's Business Plan and the Bank's strategic plan, Standard Operating Procedures, and Bank Organizational Structure have been prepared in accordance with applicable banking standards and take into account the Bank's internal capabilities such as Human Resources, Information Technology, Capital, as well as previous achievements, and to conduct monitoring, supervision, and evaluation of the realization of outcomes in accordance with the predetermined targets.

1. Special Oversight

Regarding special oversight, the Board of Commissioners conducts monitoring, supervision, and evaluation of the achievement of Bank Business Plan targets, findings from the SKAI and External Audit, follow-ups on the implementation of Internal Audits and External Audits, as well as the suggestions and Recommendations of the Board of Commissioners.

The Board of Commissioners also provides necessary advice to the Board of Directors to ensure the bank's operational execution continues to run in accordance with predetermined business targets and in compliance with applicable laws and regulations.

Responsibilities of the Board of Commissioners

In carrying out its duties and obligations, the Board of Commissioners is responsible for:

1. Providing suggestions/opinions within the framework of drafting the Bank's Vision, Mission, and Long-Term Strategic Plan
2. Ensuring that the implementation of risk management policies has been carried out in accordance with the approved Bank Risk Management Guidelines Book
3. Ensuring that the Bank has Internal Control System Standards and supervising the implementation of the bank's internal controls in general

4. Ensuring that the Bank complies with applicable provisions regarding liquidity monitoring, supervising its implementation, and ensuring the accuracy of content, compliance with requirements, and timeliness of report submissions to the Financial Services Authority, and providing opinions on such reports

5. Bahwa kebijakan dan prosedur Bank dalam menjalankan Sistem BI-RTGS telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memantau pelaksanaannya
6. Memastikan bahwa Bank mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai kegiatan penyertaan modal bank, memberikan persetujuan terhadap rencana penyertaan modal bank
7. Memantau Bank mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai penggunaan Informasi Teknologi (IT)
8. Memantau perkembangan kinerja Bank berdasarkan penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
9. Memantau pelaksanaan Kewajiban Penyedian Modal Minimum (KPMM/CAR) Bank Umum
10. Memantau pelaksanaan pemeliharaan Giro Wajib Minimum (GWM) pada Bank Indonesia
11. Memantau bahwa bank memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) dan melakukan pengawasan atas penerapan (KYC) secara berkala
12. Mengawasi pelaksanaan ketentuan kebijakan perkreditan secara benar, dan melakukan pengawasan atas pemberian kredit
13. Memantau bahwa bank telah melaksanakan perbaikan Portofolio Kredit dan tetap menjaga NPL lebih kecil dari ketentuan Bank Indonesia
14. Memantau bahwa bank mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penanaman dana pada aktiva produktif
15. Memastikan bahwa bank mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memberikan saran/pendapat terhadap BMPK
16. Memastikan bahwa Bank telah membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) sesuai ketentuan yang berlaku dan memonitor pelaksanaannya
17. Memastikan bahwa Bank telah membuat laporan keuangan bulanan secara benar dan tepat waktu kepada Bank Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk dievaluasi
18. Memastikan bahwa Bank membuat laporan keuangan Publikasi Triwulanan, Semesteran dan Tahunan secara benar dan tepat waktu kepada Bank Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris
19. Memastikan bahwa Bank telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan Satuan Pemeriksaan Intern Bank (SPI) dan pemeriksa Ekstern (Bank Indonesia, Akuntan Publik dan BPK)

5. Ensuring that the Bank's policies and procedures in operating the BI-RTGS System comply with applicable regulations and monitoring their implementation
6. Ensuring that the Bank complies with applicable provisions regarding the bank's equity participation activities, and granting approval for the bank's equity participation plans
7. Monitoring the Bank's compliance with applicable provisions regarding the use of Information Technology (IT)
8. Monitoring the development of the Bank's performance based on the Bank Soundness Rating assessment stipulated by Bank Indonesia
9. Monitoring the implementation of the Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM/CAR) for Commercial Banks
10. Monitoring the implementation of the Statutory Reserve Requirement (GWM) maintenance at Bank Indonesia
11. Monitoring that the bank fulfills applicable provisions regarding the Implementation of Know Your Customer (KYC) Principles and periodically supervising the KYC implementation
12. Supervising the proper execution of credit policy provisions and overseeing the provision of credit
13. Monitoring that the bank has implemented Credit Portfolio improvements and maintains Non-Performing Loans (NPL) below the limit stipulated by Bank Indonesia
14. Monitoring that the bank complies with applicable provisions regarding Earning Asset Quality (KAP) and supervising the application of prudential principles in the placement of funds in earning assets
15. Ensuring that the bank complies with applicable provisions regarding the Legal Lending Limit (BMPK) and providing suggestions/opinions on the BMPK
16. Ensuring that the Bank has formed an Allowance for Earning Asset Losses (PPAP) in accordance with applicable regulations and monitoring its implementation
17. Ensuring that the Bank has prepared accurate and timely monthly financial reports to Bank Indonesia and that copies are submitted to the Board of Commissioners for evaluation
18. Ensuring that the Bank prepares accurate and timely Quarterly, Semesterly, and Annual Published financial reports to Bank Indonesia and that copies are submitted to the Board of Commissioners
19. Ensuring that the Bank has followed up on the findings and recommendations from the audit results of the Bank's Internal Audit Unit (SPI) and External Auditors (Bank Indonesia, Public Accountants, and the Supreme Audit Agency/BPK)

20. Memastikan Bank telah melaksanakan prinsip GCG kepada setiap kegiatan usaha Bank di semua tingkatan atau jenjang organisasi
21. Memastikan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan tugas secara efektif
22. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal
23. Dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain untuk mempengaruhi kegiatan operasional bank yang dapat merugikan bank atau mempengaruhi profesionalisme pengelolaan Bank
24. Dilarang mengambil dan atau menerima untuk keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang telah diltetapkan menurut ketentuan yang berlaku.

Kewajiban Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Dewan Komisaris berkewajiban untuk:

1. Melakukan pengawasan dan mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perseroan atas jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi
2. Mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham atas penunjukkan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perusahaan
3. Melakukan tugas wewenang dan tanggung jawab lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
4. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi serta pada setiap waktu diperlukan mengenai perkembangan Perseroan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham Kendali
5. Memberikan pendapat dan persetujuan atas rencana kerja jangka panjang Perseroan yang disiapkan dan disampaikan oleh Direksi
6. Memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, bulan pertama setelah tahun buku baru dimulai.

Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Dewan Komisaris berhak dan berwewenang untuk:

1. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan Operasional Bank yang dilaksanakan oleh Direksi Bank Sulteng

20. Ensuring the Bank has implemented GCG principles across every bank business activity at all levels or hierarchical tiers of the organization
21. Ensuring the Audit Committee, Risk Oversight Committee, and Remuneration and Nomination Committee have executed their duties effectively
22. Providing sufficient time to execute duties and responsibilities optimally

23. Being prohibited from utilizing the Bank for personal, family, and/or other parties' interests to influence the bank's operational activities that could harm the bank or compromise the professionalism of the Bank's management
24. Being prohibited from taking and/or accepting for personal gain from the Bank other than remuneration and other facilities established according to applicable regulations.

Obligations of the Board of Commissioners

In carrying out its duties and obligations, the Board of Commissioners is obligated to:

1. Conduct oversight and supervise the implementation of the Company's work plan and budget concerning the course of the Company's management by the Board of Directors
2. Propose to the General Meeting of Shareholders the appointment of a Public Accountant who will audit the Company's books
3. Perform other duties, authorities, and responsibilities in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and the Resolutions of the General Meeting of Shareholders
4. Provide responses to the periodic reports of the Board of Directors as well as at any necessary time regarding the Company's development and report the results of its duty execution to the Controlling Shareholders
5. Provide opinions and approvals on the Company's long-term work plan prepared and submitted by the Board of Directors
6. Grant approval for the Company's annual work plan and budget to be provided no later than 30 (thirty) days in the first month after the new financial year commences.

Rights and Authorities of the Board of Commissioners

In carrying out its duties and obligations, the Board of Commissioners has the right and authority to:

1. Exercise oversight over the implementation of the Bank's Operations carried out by the Board of Directors of Bank Sulteng

2. Menyetujui kebijakan umum Bank dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, ketentuan-ketentuan lain yang digariskan oleh Bank Indonesia, perkembangan ekonomi dan keuangan serta perbankan
3. Memberikan persetujuan penyusunan Rencana Jangka Panjang *(Corporate Plan)* bank, dan memberikan persetujuan Rencana Bisnis Jangka Menengah dan Tahunan bank yang di ajukan oleh Direksi
4. Menilai dan memberikan persetujuan Perubahan Rencana Bisnis Tahunan Bank yang diajukan oleh Direksi
5. Mengevaluasi dan menilai laporan Realisasi Bisnis Bank setiap Triwulan, Semester dan Tahunan, Laba/Rugi, Tingkat Kesehatan Bank, Portofolio Kredit dan kegiatan operasional lainnya
6. Menyetujui kebijakan dan prosedur manajemen risiko sesuai dengan prinsip pengendalian risiko yang baik dan memenuhi peratuan perundang-undangan
7. Meminta keterangan kepada Direksi dan atau satuan kerja lainnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepengurusan dan pengelolaan bank bila diketahui atau diduga ada kebijakan pengelolaan bank yang dapat merugikan atau mempengaruhi kesehatan bank
8. Memberikan penilaian dan persetujuan kepada Direksi dalam hal pembelian dan/atau penjualan aset tetap/barang tidak bergerak untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Memberikan persetujuan penghapusbukuan kredit macet yang sulit untuk ditagih dalam rangka perbaikan portofolio kredit
10. Memberikan pertimbangan pembukaan Kantor Cabang/Cabang Pembantu dan pengangkatan Kepala-kepala Divisi dan Kepala Kantor Cabang Bank Sulteng
11. Mengevaluasi dan menilai Laporan Hasil Pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan memberikan petunjuk serta saran atas hasil evaluasi dan penilaian hasil pemeriksaan tersebut kepada Direksi
12. Meminta laporan kepada Direktur Kepatuhan atas pelaksanaan kegiatan operasional Bank yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap pelaksanaan semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan operasional Bank
13. Memberikan persetujuan atas sistem Remunerasi dan Nominasi dalam lingkungan Bank
14. Memberikan persetujuan terhadap rencana pemberian kredit kepada pihak terkait, dan besar dan kredit sindikasi.

2. Approve the Bank's general policies by taking into account Regional Government policies, other provisions outlined by Bank Indonesia, and economic, financial, and banking developments
3. Grant approval for the preparation of the bank's Long-Term Plan (Corporate Plan), and grant approval for the bank's Medium-Term and Annual Business Plans proposed by the Board of Directors
4. Assess and grant approval for Amendments to the Bank's Annual Business Plan proposed by the Board of Directors
5. Evaluate and assess reports on the Bank's Business Realization Quarterly, Semesterly, and Annually, Profit/Loss, Bank Soundness Rating, Credit Portfolio, and other operational activities
6. Approve risk management policies and procedures in accordance with sound risk control principles and in compliance with laws and regulations
7. Request information from the Board of Directors and/or other work units regarding matters related to the bank's management and administration if it is known or suspected that there are bank management policies that could harm or affect the bank's soundness
8. Provide assessment and approval to the Board of Directors regarding the purchase and/or sale of fixed assets/immovable properties to be processed in accordance with applicable laws and regulations
9. Grant approval for the write-off of non-performing loans that are difficult to collect within the framework of credit portfolio improvement
10. Provide considerations on the opening of Branch Offices/Sub-Branch Offices and the appointment of Division Heads and Branch Office Heads of Bank Sulteng
11. Evaluate and assess the Internal Audit Unit (SKAI) Examination Results Reports and provide directives and suggestions based on the evaluation and assessment results of the said examinations to the Board of Directors
12. Request reports from the Compliance Director regarding the execution of Bank operational activities related to compliance with the implementation of all applicable laws and regulations in the Bank's operational activities
13. Grant approval for the Remuneration and Nomination system within the Bank's environment
14. Grant approval for plans to provide credit to related parties, large exposures, and syndicated loans.

Keputusan yang Perlu Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris

Berikut ini keputusan-keputusan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan antara lain yaitu:

1. Mengeluarkan surat-surat obligasi;
2. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik Perseroan;
3. Melepas atau menjual barang tidak bergerak milik Perseroan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
4. Menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Perseroan;
5. Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta di dalam perseroan atau badan-badan lain atau mendirikan perusahaan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang;
6. Melepas sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan dalam perseroan atau badan-badan lainnya yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang;
7. Perbuatan untuk tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapus buku yang jumlahnya dari waktu ke waktu ditetapkan oleh RUPS.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris ditetapkan RUPS yaitu selama 4 (empat) tahun. Setelah masa jabatannya berakhir, Anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali apabila mempunyai prestasi kerja yang baik setelah memperhatikan pertimbangan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Kriteria Dewan Komisaris

Bank Sulteng menetapkan kriteria bagi Anggota Dewan Komisaris yaitu Anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang terdiri dari Persyaratan Umum, Persyaratan Khusus dan Persyaratan Lainnya sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 13/27/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum.

Dewan Komisaris Bank Sulteng harus memenuhi persyaratan umum, yaitu:

1. Cakap melakukan perbuatan hukum
2. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik

Decisions Requiring the Approval of the Board of Commissioners

The following are the decisions of the Board of Directors that require the approval of the Board of Commissioners as stipulated in the Company's Articles of Association, including:

1. Issuing debt securities (bonds);
2. Purchasing, selling, or otherwise acquiring or releasing rights to the Company's inventory assets;
3. Releasing or selling the Company's immovable assets that exceed a certain amount determined by the Board of Commissioners' Meeting;
4. Establishing the organizational structure and working procedures of the Company;
5. Taking part, either partially or wholly, or participating in a company or other entities or establishing a new company not in the context of credit restructuring (loan rescue);
6. Releasing, either partially or wholly, the Company's equity participation in a company or other entities not in the context of credit restructuring;

7. The act of no longer collecting bad debts that have been written off, the amount of which from time to time is determined by the GMS.

Term of Office of the Board of Commissioners

The term of office of the Members of the Board of Commissioners is determined by the GMS, which is for 4 (four) years. After their term of office ends, Members of the Board of Commissioners may be reappointed if they have good work performance after considering the considerations of Bank Indonesia/Financial Services Authority without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time.

Criteria for the Board of Commissioners

Bank Sulteng establishes criteria for Members of the Board of Commissioners, namely that Members of the Board of Commissioners must meet the requirements of integrity, competence, and financial reputation consisting of General Requirements, Specific Requirements, and Other Requirements in accordance with Article 27 Paragraph (1) of Bank Indonesia Regulation No. 13/27/PBI/2011 concerning Amendments to Bank Indonesia Regulation No. 11/1/PBI/2009 concerning Commercial Banks.

The Board of Commissioners of Bank Sulteng must meet the general requirements, namely:

1. Capable of performing legal acts.
2. Having good morals, ethics, and integrity.

3. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Dewan Komisaris yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter
4. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   a. Tidak pernah dinyatakan pailit
   b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
   c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atauyang berkaitan dengan sektor keuangan
   d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      1). Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan
      2). Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS
      3). Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari otoritas yang bertanggung jawab dalam bidang pasar modal tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas yang bertanggung jawab di bidang pasar modal
5. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan
6. Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan persyaratan tersebut dalam angka 1 sampai dengan angka 6
7. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Bank Sulteng; dan

Sedangkan persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh Anggota Dewan Komisaris Bank Sulteng, diantaranya yaitu:

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/ atau dengan anggota Direksi
2. Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud di atas terjadi setelah pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari RUPS

3. Physically and mentally healthy (not suffering from any disease) that may hinder the execution of duties as the Board of Commissioners as evidenced by a health certificate from a Doctor.

4. Within 5 (five) years prior to appointment and during their term of office:
   a. Never having been declared bankrupt.
   b. Never having been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt.
   c. Never having been convicted for committing a criminal act detrimental to state finances and/or related to the financial sector.
   d. Never having been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners who during their term of office:
      1). Failed to hold an annual GMS.
      2). Had their accountability as a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners rejected by the GMS or failed to provide accountability as a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners to the GMS.
      3). Caused a company that obtained a license, approval, or registration from the authority responsible for the capital market sector to fail to meet the obligation to submit an annual report and/or financial report to the Authority responsible for the capital market sector.

5. Having a commitment to comply with laws and regulations.
6. Fulfilling other requirements as determined by the applicable laws and regulations, as long as they do not conflict with the requirements in numbers 1 to 6.

7. Having knowledge and/or expertise in the areas required by Bank Sulteng; and

Meanwhile, other requirements that must be met by Members of the Board of Commissioners of Bank Sulteng include:

1. Members of the Board of Commissioners are prohibited from having family relationships up to the second degree with fellow members of the Board of Commissioners and/or with members of the Board of Directors.
2. If the family relationship referred to above occurs after the appointment as a member of the Board of Commissioners, written approval from the GMS is required to continue their position.

3. Calon anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat eksekutif pada satu lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan
4. Tidak termasuk rangkap jabatan, apabila anggota Dewan Komisaris:
   a. Menjalankan tugas fungsional pengawasan dari pemilik bank yang berbentuk badan hukum
   b. Merangkap jabatan pada organisasi atau lembaga lainnya, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi
   c. Calon anggota Dewan Komisaris dilarang menjadi pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan

Proses Nominasi dan Pemilihan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS setelah melalui proses uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG. Calon anggota Dewan Komisaris yang telah melalui *proses fit and proper test* yang dilakukan oleh OJK dan dinyatakan lulus maka selanjutnya dapat diangkat oleh RUPS. Dengan demikian Bank Sulteng dapat memastikan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris Bank Sulteng memiliki kompetensi, integritas, dan reputasi yang memadai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Komposisi dan Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris ditetapkan RUPS sedemikian rupa sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan Dewan Komisaris secara cepat, tepat, efektif dan efisien dengan tetap menjaga independensi. Setiap anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama memiliki kedudukan yang setara dimana tugas Komisaris Utama yaitu mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris ditetapkan RUPS dengan komposisi yang mencerminkan keberagaman diantara anggotanya baik dalam hal pendidikan, pengalaman kerja, usia, maupun keahlian. Setiap Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka mendukung kinerja Bank.

Berikut ini susunan Dewan Komisaris beserta perubahannya yang telah ditetapkan RUPS sepanjang tahun 2025 sebagai berikut:

3. Candidates for members of the Board of Commissioners may only hold concurrent positions as members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Executive Officers in one non-financial institution/company.
4. Not considered concurrent positions, if the member of the Board of Commissioners:
   a. Performs functional supervisory duties from the bank's owners in the form of a legal entity.
   b. Holds concurrent positions in other organizations or institutions, provided that the person concerned does not neglect the execution of duties and responsibilities as a member of the Board of Directors.
   c. Candidates for members of the Board of Commissioners are prohibited from becoming administrators of political parties as evidenced by a statement letter from the person concerned.

Nomination and Election Process of the Board of Commissioners

Members of the Board of Commissioners are appointed by the GMS after going through a fit and proper test process in accordance with applicable laws and regulations and GCG principles. Candidates for members of the Board of Commissioners who have passed the fit and proper test conducted by the Financial Services Authority (OJK) can then be appointed by the GMS. Thus, Bank Sulteng can ensure that all members of the Board of Commissioners of Bank Sulteng possess adequate competence, integrity, and reputation in executing their duties and responsibilities.

Composition and Division of Tasks of the Board of Commissioners

The composition of the Board of Commissioners is determined by the GMS in such a way that the decision-making process can be carried out by the Board of Commissioners swiftly, accurately, effectively, and efficiently while maintaining independence. Each member of the Board of Commissioners, including the President Commissioner, holds an equal position, wherein the duty of the President Commissioner is to coordinate the activities of the Board of Commissioners. The Board of Commissioners is appointed by the GMS with a composition that reflects diversity among its members in terms of education, work experience, age, and expertise. Each Member of the Board of Commissioners possesses adequate competence in accordance with their field of duties to support the Bank's performance.

The following is the structure of the Board of Commissioners along with its changes as determined by the GMS throughout 2025:

Sampai dengan tanggal 19 Januari 2025 susunan Dewan Komisaris yang ditetapkan Pemegang Saham yaitu sebagai berikut:

Up to January 19, 2025, the structure of the Board of Commissioners determined by the Shareholders is as follows:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Akta Penunjukan** Deed of Appointment	**Periode Jabatan** Position Period
Novi V.B. Kaligis	Komisaris Independen Independent Commissioner	Akta Berita Acara RUPSLB No. 30 Tanggal 20 September 2024 Deed of Minutes of EGMS No. 30 Dated September 20, 2024 SK Gubernur Sulawesi Tengah Selaku PSP Bank Sulteng No. 500.16.3.5/427/ GUB.ST/2024 Decree of the Governor of Central Sulawesi as the Controlling Shareholder of Bank Sulteng No. 500.16.3.5/427/ GUB.ST/2024	2024-2028
Maimun Lawira	Komisaris Non Independen Non-Independent Commissioner	Akta Berita Acara RUPSLB No. 02 Tanggal 02 Agustus 2021 Deed of EGM Minutes No. 02 Dated August 02, 2021 SK Gubernur Sulawesi Tengah Selaku PSP Bank Sulteng No. 003/SK PSP/BST/II/ 2022 Decree of the Governor of Central Sulawesi as PSP of Bank Sulteng No. 003/SK PSP/BST/II/ 2022	2021-2025

Selanjutnya melalui RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2025, Pemegang Saham telah melakukan perubahan komposisi Dewan Komisaris sehingga sampai dengan 31 Desember 2025 susunan Dewan Komisaris yaitu sebagai berikut:

Furthermore, through the Extraordinary GMS held on January 20, 2025, the Shareholders altered the composition of the Board of Commissioners so that up to December 31, 2025, the structure of the Board of Commissioners is as follows:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Akta Penunjukan** Deed of Appointment	**Periode Jabatan** Position Period
Novi V.B. Kaligis	Komisaris Independen Independent Commissioner	Akta Berita Acara RUPSLB No. 30 Tanggal 20 September 2024 Deed of Minutes of EGMS No. 30 Dated September 20, 2024 SK Gubernur Sulawesi Tengah Selaku PSP Bank Sulteng No. 500.16.3.5/427/ GUB.ST/2024 Decree of the Governor of Central Sulawesi as the Controlling Shareholder of Bank Sulteng No. 500.16.3.5/427/ GUB.ST/2024	2024-2028
Max Kembuan	Komisaris Non Independen Non-Independent Commissioner	Akta Berita Acara RUPSLB No. 30 Tanggal 20 September 2024 Deed of Minutes of EGMS No. 30 Dated September 20, 2024 SK Gubernur Sulawesi Tengah Selaku PSP Bank Sulteng No. 500.16.3.5/430/ GUB.ST/2024 Decree of the Governor of Central Sulawesi as the Controlling Shareholder of Bank Sulteng No. 500.16.3.5/430/ GUB.ST/2024	2024-2028

Untuk memastikan tugas pengawasan Dewan Komisaris dapat berjalan dengan efektif, Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas diantara Anggota Dewan Komisaris dengan pembagian sebagai berikut:

To ensure the supervisory duties of the Board of Commissioners run effectively, the Board of Commissioners distributes duties among the Members of the Board of Commissioners with the following division:

Nama Name	**Pembagian Tugas** Division of Tasks
Novi V.B. Kaligis	1. Melakukan pengawasan untuk kepentingan bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasehat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai maksud dan tujuan bank yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS; 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehatin-hatian; 3. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis bank sesuai ketentuan yang berlaku; 4. Melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh RUPS; 5. Melaksanakan tugas pengawasan lain sesuai ketentuan yang berlaku; 6. Memberikan persetujuan atas penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai POJK mengenai BMPK dan penyediaan dana besar; 7. Melakukan pengawasan dan memberikan persetujuan atas usulan Direksi mengenai penghapusbukuan kredit (write off) sesuai prosedur yang berlaku; 8. Menindaklanjuti keputusan RUPS untuk menetapkan Akuntan Publik dalam melakukan audit Laporan Keuangan sesuai prosedur yang berlaku; 9. Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit internal maupun eksternal sesuai dengan komitmen auditee; 10. Melakukan tugas pengawasan lainnya sesuai POJK; 11. Mengevaluasi dan memberikan persetujuan atas Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT); 12. Melaksanakan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, dan Rapat Dewan Komisaris dengan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerai dan Nominasi dengan mengacu pada POJK No. 17 Tahun 2023; 13. Melakukan pengawasan aktif melalui kunjungan ke Divisi dan Cabang dengan sepengetahuan Direksi untuk memastikan unit kerja melaksanakan kebijakan Direksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 14. Melaksanakan koordinasi dan rapat secara berkala dengan Bank Mega selaku entitas induk Kelompok Usaha Bank perihal Materi Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Manajemen Risiko Teritegrasi sebagai upaya untuk menciptakan tata kelola dan mitigasi risiko dalam meningkatkan kinerja Bank Sulteng.

Nama Name	Pembagian Tugas Division of Tasks
	1. Perform oversight in the interest of the bank regarding policies and the course of management by the Board of Directors, provide advice to the Board of Directors, and be responsible for such oversight, in accordance with the bank's purposes and objectives as stipulated in laws and regulations, Articles of Association, and GMS resolutions; 2. Carry out duties and responsibilities in good faith and with the principle of prudence; 3. Direct, monitor, and evaluate the implementation of integrated governance, risk management, and compliance as well as the bank's strategic policies in accordance with applicable regulations; 4. Carry out duties mandated by the GMS; 5. Carry out other oversight duties in accordance with applicable regulations; 6. Provide approval for the provision of funds to related parties in accordance with OJK Regulation (POJK) regarding the Legal Lending Limit (BMPK) and large exposures; 7. Perform oversight and provide approval on the Board of Directors' proposals regarding credit write-offs in accordance with applicable procedures; 8. Follow up on GMS resolutions to appoint a Public Accountant in conducting audits of Financial Statements in accordance with applicable procedures; 9. Perform oversight on the Board of Directors' follow-up on internal and external audit findings in accordance with the auditee's commitment; 10. Carry out other oversight duties in accordance with OJK Regulation (POJK); 11. Evaluate and provide approval for the Bank Business Plan (RBB) and the Annual Work Plan and Budget (RKAT); 12. Convene Board of Commissioners Meetings, Board of Commissioners Meetings with the Board of Directors, and Board of Commissioners Meetings with the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Remuneration and Nomination Committee by referring to OJK Regulation (POJK) No. 17 of 2023; 13. Conduct active oversight through visits to Divisions and Branches with the knowledge of the Board of Directors to ensure work units implement Board of Directors' policies in accordance with applicable laws and regulations; 14. Carry out regular coordination and meetings with Bank Mega as the parent entity of the Banking Group regarding Integrated Governance Committee and Integrated Risk Management Committee materials as an effort to create governance and risk mitigation in enhancing Bank Sulteng's performance.
Max Kembuan	1. Melakukan pengawasan untuk kepentingan bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi; 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehatin-hatian; 3. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis bank sesuai ketentuan yang berlaku; 4. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh RUPS; 5. Melaksanakan tugas pengawasan lain sesuai ketentuan yang berlaku; 6. Memberikan persetujuan atas penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai POJK mengenai BMPK dan penyediaan dana besar; 7. Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit internal maupun eksternal sesuai dengan komitmen auditee; 8. Melakukan tugas pengawasan lainnya sesuai POJK; 9. Mengevaluasi dan memberikan persetujuan atas Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT); 10. Mengevaluasi dan memberikan persetujuan atas Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT); 11. Melaksanakan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, dan Rapat Dewan Komisaris dengan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerai dan Nominasi dengan mengacu pada POJK No. 17 Tahun 2023; 12. Melaksanakan koordinasi dan rapat secara berkala dengan Bank Mega selaku entitas induk Kelompok Usaha Bank perihal Materi Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Manajemen Risiko Teritegrasi Sebagai upaya untuk menciptakan tata kelola dan mitigasi risiko dalam meningkatkan kinerja Bank Sulteng. 1. Perform oversight in the interest of the bank regarding policies and the course of management by the Board of Directors; 2. Carry out duties and responsibilities in good faith and with the principle of prudence; 3. Direct, monitor, and evaluate the implementation of integrated governance, risk management, and compliance as well as the bank's strategic policies in accordance with applicable regulations; 4. Carry out duties assigned by the GMS; 5. Carry out other oversight duties in accordance with applicable regulations; 6. Provide approval for the provision of funds to related parties in accordance with OJK Regulation (POJK) regarding the Legal Lending Limit (BMPK) and large exposures; 7. Perform oversight on the Board of Directors' follow-up on internal and external audit findings in accordance with the auditee's commitment; 8. Carry out other oversight duties in accordance with OJK Regulation (POJK); 9. Evaluate and provide approval for the Bank Business Plan (RBB) and the Annual Work Plan and Budget (RKAT); 10. Evaluate and provide approval for the Bank Business Plan (RBB) and the Annual Work Plan and Budget (RKAT); 11. Convene Board of Commissioners Meetings, Board of Commissioners Meetings with the Board of Directors, and Board of Commissioners Meetings with the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Remuneration and Nomination Committee by referring to OJK Regulation (POJK) No. 17 of 2023; 12. Carry out regular coordination and meetings with Bank Mega as the parent entity of the Banking Group regarding Integrated Governance Committee and Integrated Risk Management Committee materials as an effort to create governance and risk mitigation in enhancing Bank Sulteng's performance..

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Berikut ini informasi terkait hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali yaitu sebagai berikut:

Affiliation Relationships of the Board of Commissioners

The following is information related to affiliation relationships among members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and Controlling Shareholders:

Nama Name	**Hubungan Afiliasi Keluarga dengan** Relationship between Family Affiliation with						**Hubungan Afiliasi Keuangan dengan** Financial Affiliation Relationship with					
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		**Direksi** Directors		**Pemegang Saham Pengendali** Controlling Shareholders		**Dewan Komisaris** Board of Commissioners		**Direksi** Directors		**Pemegang Saham Pengendali** Controlling Shareholders	
	Ya Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No
Novi V.B. Kaligis		√		√		√		√		√		√
Maimun Lawira*		√		√		√		√		√		√
Max Kembuan**		√		√		√		√		√		√

*) menjabat sampai 19 Januari 2025 / Served until January 19, 2025
**) menjabat mulai 20 Januari 2025 / Serving from January 20, 2025

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Bank Sulteng melarang adanya rangkap jabatan bagi Anggota Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER03/MBU/02/2015 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
   a. Anggota Dewan Komisaris BUMN lainnya
   b. Anggota Direksi pada BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta
   c. Jabatan lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap
   d. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN yang bersangkutan.

2. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pejabat Eksekutif:
   a. Pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank
   b. Pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri

3. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagai:
   a. Sebagai Direksi, Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) Entitas Anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank
   b. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank
   c. Anggota Dewan Komisaris pada organisasi atau lembaga nirlaba

Concurrent Positions of the Board of Commissioners

Bank Sulteng prohibits concurrent positions for Members of the Board of Commissioners in accordance with the provisions stipulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) No. PER03/MBU/02/2015 and Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks as follows:

1. Members of the Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as:
   a. Members of the Board of Commissioners of other State-Owned Enterprises.
   b. Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises (BUMD), or Private-Owned Enterprises.
   c. Other positions that are prohibited from being held concurrently based on laws and regulations.
   d. Positions that may create a conflict of interest with the relevant State-Owned Enterprise.
2. Members of the Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or Executive Officers:
   a. In financial institutions or financial companies, both banks and non-banks.
   b. In more than 1 (one) non-financial institution or non-financial company, either domiciled domestically or overseas.
3. Excluded from concurrent positions as:
   a. The Board of Directors, Board of Commissioners, or Executive Officers carrying out supervisory functions in 1 (one) non-bank Subsidiary controlled by the Bank.
   b. Non-Independent Commissioners carrying out functional duties from Bank shareholders in the form of a legal entity within the Bank's business group.
   c. Members of the Board of Commissioners in non-profit organizations or institutions.

Berikut ini informasi terkait rangkap jabatan Anggota Dewan Komisaris yaitu sebagai berikut:

The following is information related to concurrent positions of the Members of the Board of Commissioners:

Nama Name	Jabatan Position	Rangkap Jabatan Duplicate Position		
		Bank Sulteng	Perusahaan lain Other companies	Lembaga lain Other institutions
Novi V.B. Kaligis	Komisaris Independen Independent Commissioner	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Maimun Lawira*	Komisaris Non Independen Non-Independent Commissioner	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Max Kembuan**	Komisaris Non Independen Non-Independent Commissioner	Tidak No	Tidak No	Tidak No

*) menjabat sampai 19 Januari 2025 / Served until January 19, 2025
**) menjabat mulai 20 Januari 2025 / Serving from January 20, 2025

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris Bank Sulteng diwajibkan bebas dari benturan kepentingan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu Bank Sulteng menetapkan ketentuan sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi;
2. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan;
3. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank;
4. Anggota Dewan Komisaris dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham dalam pemungutan suara di dalam rapat;
5. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Tidak terdapat saham Bank Sulteng yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris. Hal ini dikarenakan Bank Sulteng tidak pernah melakukan penawaran umum saham di bursa efek, melakukan program kepemilikan saham untuk manajemen *(Management Stock Option Program/MSOP)* maupun program kepemilikan saham oleh karyawan *(Employee Stock Option Program/ESOP).*

Conflict of Interest Management of the Board of Commissioners

Members of the Board of Commissioners of Bank Sulteng are required to be free from conflicts of interest in executing their duties and responsibilities. Therefore, Bank Sulteng establishes the following provisions:

1. Members of the Board of Commissioners are prohibited from having family relationships up to the second degree with fellow members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors;
2. In the event of a conflict of interest, members of the Board of Commissioners are prohibited from taking actions that may harm the Bank or reduce the Bank's profits and are obligated to disclose the conflict of interest in every decision;
3. Members of the Board of Commissioners are prohibited from utilizing the Bank for personal, family, and/or other parties' interests that may harm or reduce the Bank's profits;
4. Members of the Board of Commissioners are prohibited from acting as proxies for Shareholders in voting during meetings;
5. Members of the Board of Commissioners are prohibited from taking and/or accepting personal benefits from the Bank other than the remuneration and other facilities determined based on the GMS resolution.

Share Ownership of the Board of Commissioners

There are no Bank Sulteng shares owned by members of the Board of Commissioners. This is because Bank Sulteng has never conducted a public offering of shares on the stock exchange, conducted a Management Stock Option Program (MSOP), or an Employee Stock Option Program (ESOP).

Independensi Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris harus memegang teguh prinsip independensi dengan demikian setiap anggota Dewan Komisaris bebas dari potensi terjadinya benturan kepentingan dalam menjalankan tugasnya. Prinsip Independensi sangat penting menjadi pegangan setiap anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pengelolaan Bank.

Bank Sulteng mewajibkan setiap anggota Dewan Komisaris bertindak secara independen, tidak memberikan dan mendapat tekanan yang mengarah pada benturan kepentingan, serta tidak terikat secara moral dan material kepada pihak-pihak tertentu yang dapat mempengaruhi independensinya.

Setiap anggota Dewan Komisaris Bank Sulteng diwajibkan untuk menandatangani pernyataan independensi dan bebas benturan kepentingan untuk menjamin independensinya. Bank Sulteng juga memastikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiiki hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat ketiga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.

Sepanjang tahun 2025, Bank Sulteng memastikan tidak terdapat situasi yang mengindikasikan adanya potensi benturan kepentingan yang dihadapi oleh anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya termasuk dalam proses pengambilan keputusan Dewan Komisaris.

Independence of the Board of Commissioners

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners must uphold the principle of independence so that each member of the Board of Commissioners is free from potential conflicts of interest in executing their duties. The principle of Independence is crucial as a guide for every member of the Board of Commissioners in exercising the supervisory function over the course of the Bank's management.

Bank Sulteng requires every member of the Board of Commissioners to act independently, neither exerting nor receiving pressure that leads to conflicts of interest, and not being morally or materially bound to certain parties that could influence their independence.

Every member of the Board of Commissioners of Bank Sulteng is required to sign a declaration of independence and freedom from conflicts of interest to guarantee their independence. Bank Sulteng also ensures that every member of the Board of Commissioners does not have a family relationship up to the third degree with other members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors.

Throughout 2025, Bank Sulteng ensured there were no situations indicating potential conflicts of interest faced by members of the Board of Commissioners in the execution of their duties and responsibilities, including in the decision-making process of the Board of Commissioners.

Nama Name	**Hubungan Keluarga Dengan** Family Relationship with						**Hubungan Keuangan Dengan** Financial Relationship with						**Kepengurusan dan Kepemilikan Saham Pada Perusahaan Lain** Management and Share Ownership in Other Companies					
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		**Direksi** Directors		**Pemegang Saham** Controlling Shareholders		**Dewan Komisaris** Board of Commissioners		**Direksi** Directors		**Pemegang Saham** Controlling Shareholders		**Dewan Komisaris** Board of Commissioners		**Direksi** Directors		**Pemegang Saham** Controlling Shareholders	
	Ya Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No
Novi V.B. Kaligis		√		√		√		√		√		√		√		√		√
Maimun Lawira*		√		√		√		√		√		√		√		√		√
Max Kembuan**		√		√		√		√		√		√		√		√		√

*) menjabat sampai 19 Januari 2025 / Served until January 19, 2025
**) menjabat mulai 20 Januari 2025 / Serving from January 20, 2025

Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Independent Commissioner

An Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners appointed based on a GMS resolution who has no financial, management, share ownership, and/or family relationship with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Controlling Shareholders, or other relationships that could affect their ability to act independently.

Dalam menjalankan fungsinya, Komisaris Independen memiliki peran penting dalam mendorong penerapan GCG secara efektif di Bank. Sebagai bagian dari organ pengawasan, Komisaris Independen harus dapat menolak pengaruh, intervensi dan tekanan dari pemegang saham utama yang memiliki kepentingan atas transaksi atau kepentingan tertentu.

Dalam komposisi Dewan Komisaris Bank Sulteng saat ini telah terdapat 1 (satu) orang Komisaris Independen yang ditetapkan oleh RUPS.

Program Pengenalan (Orientasi) bagi Komisaris baru

Bank Sulteng menyelenggarakan program pengenalan (orientasi) bagi Anggota Dewan Komisaris yang baru yang merupakan program yang sangat penting bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang baru menjabat di Bank Sulteng mengingat latar belakang anggota Dewan Komisaris yang berasal dari berbagai pihak yang mewakili Pemegang Saham. Pelaksanaan program pengenalan menjadi tanggung jawab Sekretaris Perusahaan.

Program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris baru dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan kepada anggota Dewan Komisaris terkait organisasi perusahaan, aktivitas bisnis dan rencana perusahaan ke depan, termasuk pedoman kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Pelaksanaan program pengenalan anggota Dewan Komisaris baru diantaranya dalam bentuk presentasi, pertemuan, dan kunjungan ke fasilitas Perusahaan serta program lain yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Berikut ini materi program pengenalan yang telah diberikan kepada anggota Dewan Komisaris baru antara lain yaitu:

1. Gambaran mengenai Bank Sulteng berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis;
2. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Bank Sulteng;
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

In executing their functions, the Independent Commissioner plays a vital role in promoting the effective implementation of GCG in the Bank. As part of the supervisory organ, the Independent Commissioner must be able to reject influence, intervention, and pressure from major shareholders who have interests in specific transactions or affairs.

In the current composition of the Board of Commissioners of Bank Sulteng, there is 1 (one) Independent Commissioner determined by the GMS.

Induction (Orientation) Program for New Commissioners

Bank Sulteng organizes an induction (orientation) program for new Members of the Board of Commissioners, which is an extremely important program for every new member of the Board of Commissioners taking office at Bank Sulteng, considering the background of the members of the Board of Commissioners who come from various parties representing the Shareholders. The execution of the induction program is the responsibility of the Corporate Secretary.
The induction program for new members of the Board of Commissioners is intended to provide knowledge to the members of the Board of Commissioners related to the corporate organization, business activities, and future corporate plans, including the working guidelines that constitute the duties and responsibilities of the Board of Commissioners. The execution of the induction program for new members of the Board of Commissioners is in the form of presentations, meetings, visits to Company facilities, and other programs tailored to the needs.
The following are the induction program materials that have been provided to new members of the Board of Commissioners, including:

1. An overview of Bank Sulteng related to its objectives, nature and scope of activities, financial and operational performance, strategy, short-term and long-term business plans, competitive position, risks, and strategic issues;
2. Implementation of GCG principles by Bank Sulteng;
3. Information regarding delegated authority, internal and external audit, internal control systems and policies, including the Audit Committee;

4. Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.

Program Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris

Bank Sulteng memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris untuk mengikuti program peningkatan kompetensi yang merupakan salah satu program penting bagi Dewan Komisaris. Program peningkatan kompetensi dilakukan secara berkelanjutan sejalan dengan tuntutan dan perkembangan bisnis Bank yang sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun. Melalui program tersebut Dewan Komisaris dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari aktivitas bisnis perusahaan dan pengetahuan-pengetahuan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Beberapa program peningkatan kompetensi yang telah diikuti Dewan Komisaris selama tahun 2025 diantaranya yaitu:

1. Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Penyelarasan Pemahaman/Persepsi Mengenai Perizinan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) Kepengurusan dan Kepemilikan Bank Umum.
2. *Workshop* Peran dan Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris dan komite yang bersifat Konstruksi dan Efektif.
3. Program Pelatihan Publik Integrated Governance Risk, and Compliance (GRC).
4. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) dan Seminar Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris BPDSI (FKDK BPDSI) topik "Membangun Ketahanan Siber di Era Digital Banking".
5. Sosialisasi Implementasi Aplikasi SIPESAT versi 3.0.
6. Seminar Nasional FKDK BPDSI Wil. Tengah Topik "Roadmap Penguatan BPD".
7. Seminar "Kejahatan Siber di Era Digital".
8. Seminar Nasional dan Rakerwil FKDK BPDSI Wil. Timur dengan Topik "Transformasi Bank Pembangunan Daerah Menuju BPD Regional Champion 2045".
9. Diskusi Progress dan Tantangan Roadmap Penguatan BPD 2024-2027 bagi BPD Se Indonesia dan Penjelasan Panduan Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia.
10. Refreshment Sertifikat Bidang Manajemen Risiko Jenjang 7 bagi Komisaris PT. Bank Sulteng.
11. Seminar Program Eksekutif Bagi Bank Pembangunan Daerah dengan Tema "*Implementasi Governance Risk and Compliance* (GRC) dan Perlindungan Hukum Direksi serta Komisaris Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam rangka Akselerasi Pengembangan Bisnis dan Pembangunan Daerah".

Competency Enhancement Program for the Board of Commissioners

Bank Sulteng provides opportunities for members of the Board of Commissioners to participate in competency enhancement programs, which is a vital program for the Board of Commissioners. The competency enhancement program is conducted on an ongoing basis in line with the demands and developments of the Bank's business, which is carried out at least 1 (one) time a year. Through this program, the Board of Commissioners can continuously update information on the latest developments in the company's business activities and other knowledge related to the execution of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.

Several competency enhancement programs attended by the Board of Commissioners during 2025 include:

1. Focus Group Discussion (FGD) on Aligning the Understanding/Perception Regarding the Fit and Proper Test (PKK) Licensing for the Management and Ownership of Commercial Banks.
2. Workshop on the Supervisory Roles and Functions of the Board of Commissioners and Committees that are Constructive and Effective.
3. Public Training Program: Integrated Governance, Risk, and Compliance (GRC).
4. National Working Meeting (RAKERNAS) and National Seminar of the Regional Development Bank Commissioners' Communication Forum (FKDK BPDSI) with the topic "Building Cyber Resilience in the Digital Banking Era."
5. Socialization of the Implementation of the SIPESAT Application version 3.0.
6. FKDK BPDSI National Seminar for the Central Region with the Topic "Roadmap for Strengthening BPD."
7. Seminar on "Cybercrime in the Digital Era."
8. National Seminar and Regional Working Meeting (Rakerwil) of FKDK BPDSI for the Eastern Region with the Topic "Transformation of Regional Development Banks Towards BPD Regional Champion 2045."
9. Discussion on the Progress and Challenges of the 2024-2027 BPD Strengthening Roadmap for BPDs throughout Indonesia and Explanation of the Indonesian Banking Artificial Intelligence Governance Guidelines.
10. Risk Management Certification Refreshment Level 7 for the Commissioners of PT Bank Sulteng.
11. Executive Program Seminar for Regional Development Banks with the Theme "Implementation of Governance, Risk, and Compliance (GRC) and Legal Protection for Directors and Commissioners of Regional Development Banks (BPD) in the context of Accelerating Business Development and Regional Development."

12. *Sharing Session* Strategis tema "Terompet dari Timur: Merumuskan Pemikiran dan Langkah Strategis FKDK BPDSI Menyikapi Dinamika Regulasi dan Kebijakan Menteri Keuangan RI".
13. Kegiatan Recycling Bank Pembangunan Daerah (BPD) se-Sulawesi, Maluku, dan Papua Tahun 2025.
14. Seminar Nasional tema "*Governance* Digital dan Ketahanan Siber BPD".
15. Pelatihan APU PPT bagi Pengurus PT. Bank Sulteng.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan, Anggota Dewan Komisaris Bank Sulteng telah mendapatkan Sertifikasi Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum dimana Pengurus Bank (Dewan Komisaris dan Direksi) wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

Berikut ini sertifikasi Manajemen Risiko yang telah dimiliki oleh Dewan Komisaris yaitu sebagai berikut:

12. Strategic Sharing Session with the theme "Trumpet from the East: Formulating Strategic Thoughts and Steps for FKDK BPDSI in Responding to the Dynamics of Regulations and Policies of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia."
13. Regional Development Bank (BPD) Recycling Activities across Sulawesi, Maluku, and Papua for the Year 2025.
14. National Seminar with the theme "Digital Governance and BPD Cyber Resilience."
15. AML-CFT (APU PPT) Training for the Management of PT Bank Sulteng.

To support the execution of the supervisory function, Members of the Board of Commissioners of Bank Sulteng have obtained Risk Management Certification in accordance with the provisions stipulated in Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 11/19/PBI/2009 concerning Risk Management Certification for Commercial Bank Executives and Officers, where Bank Executives (Board of Commissioners and Board of Directors) are required to hold a Risk Management Certificate issued by a Professional Certification Agency. The following are the Risk Management certifications held by the Board of Commissioners:

Nama	Jabatan	Lembaga Sertifikasi	Tingkat
Novi V.B. Kaligis	Komisaris Independen Independent Commissioner	Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan Banking Professional Certification Institute	7
Maimun Lawira*	Komisaris Non Independen Non-Independent Commissioner	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification Body	1
Max Kembuan**	Komisaris Non Independen Non-Independent Commissioner	Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan Banking Professional Certification Institute	6

*) menjabat sampai 19 Januari 2025 / Served until January 19, 2025
**) menjabat mulai 20 Januari 2025 / Serving from January 20, 2025

Rapat Dewan Komisaris

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, Rapat Dewan Komisaris adalah rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris yang terdiri dari Rapat Internal Dewan Komisaris (RAKOM) dan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi (RAKOMDIR). Secara berkala Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun.

Rapat Internal Dewan Komisaris (RAKOM) yaitu rapat internal Dewan Komisaris dan/atau dengan mengundang Direktur bidang yang terkait. Sedangkan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi (RAKOMDIR) yaitu rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi. RAKOMDIR dilakukan sebagai bentuk koordinasi guna membahas laporan kinerja perusahaan, hal penting dan strategis serta masalah-masalah yang dihadapi Perseroan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan penasehatan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Board of Commissioners' Meetings

In accordance with the Company's Articles of Association, Board of Commissioners' Meetings are meetings held by the Board of Commissioners consisting of Internal Board of Commissioners' Meetings (RAKOM) and Meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors (RAKOMDIR). Periodically, the Board of Commissioners' Meeting is held at least 4 (four) times a year.
The Internal Board of Commissioners' Meeting (RAKOM) is an internal meeting of the Board of Commissioners and/or by inviting the relevant functional Director. Meanwhile, the Meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors (RAKOMDIR) is a joint meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors. RAKOMDIR is conducted as a form of coordination to discuss corporate performance reports, critical and strategic matters, and issues faced by the Company within the framework of executing the supervisory and advisory functions carried out by the Board of Commissioners.

Dewan Komisaris juga dapat mengambil keputusan yang sah di luar Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua Anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris yang dilaksanakan secara fisik.

The Board of Commissioners may also make valid decisions outside the Board of Commissioners' Meeting, provided that all Members of the Board of Commissioners grant their approval regarding the proposed motion in writing by signing the said approval. Decisions made in such a manner carry the same legal force as decisions validly made in a physically convened Board of Commissioners' Meeting.

Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 15 (lima belas) kali selama tahun 2025 yang terdiri dari RAKOM sebanyak 7 (tujuh) kali dan RAKOMDIR sebanyak 8 (delapan) kali, yang diuraikan sebagai berikut:

The Board of Commissioners held a total of 15 (fifteen) meetings during the year 2025, consisting of 7 (seven) RAKOM and 8 (eight) RAKOMDIR, which are outlined as follows:

No.	Tanggal Date	Jenis Rapat Meeting Type	Agenda Agenda
1.	23 Januari 2025 January 23, 2025	RAKOM	1. Pembahasan RBB 2. Penyampaian hasil RUPS Tahun 2025 3. Program kerja masing-masing komite Tahun 2025 1. Discussion of the Bank Business Plan (RBB). 2. Presentation of the 2025 General Meeting of Shareholders (RUPS) results. 3. Work programs for each committee for the Year 2025.
2.	17 Maret 2025 March 17, 2025	RAKOM	1. Evaluasi tugas Komite 2. Pemaparan program kerja Komite 3. Isu strategis lainnya 1. Evaluation of Committee duties. 2. Presentation of Committee work programs. 3. Other strategic issues.
3.	19 Juni 2025 June 19, 2025	RAKOM	1. Evaluasi kinerja masing-masing Komite periode kerja TW II Tahun 2025 2. Optimalisasi pengawasan aktif lewat peran Komite Dewan Komisaris 3. Pembahasan permasalahan terkini Bank Sulteng dan solusi pemecahannya 4. Lainnya yang dianggap penting 1. Performance evaluation of each Committee for the Q2 2025 working period. 2. Optimization of active supervision through the role of the Board of Commissioners Committees. 3. Discussion of current issues at Bank Sulteng and their solutions. 4. Other matters deemed important.
4.	01 Juli 2025 July 01, 2025	RAKOM	1. Arahan Komisaris Utusan PSP 2 PT. Mega Corpora dalam optimalisasi tugas Komite Dewan Komisaris 2. Optimalisasi fungsi Komite dalam meningkatkan fungsi pengawasan Dewan Komisaris 3. Evaluasi kompetensi Komite dalam mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris 4. Isu terkini internal maupun eksternal dalam upaya memitigasi Risiko Bank. 1. Directives from the Representative Commissioner of the Controlling Shareholder (PSP) 2 PT Mega Corpora regarding the optimization of Board of Commissioners Committee tasks. 2. Optimization of Committee functions in enhancing the supervisory functions of the Board of Commissioners. 3. Evaluation of Committee competencies in supporting the duties and responsibilities of the Board of Commissioners. 4. Current internal and external issues in efforts to mitigate Bank Risk.
5.	08 Juli 2025 July 08, 2025	RAKOM	1. Mempresentasikan hasil kinerja kredit Bank Sulteng Posisi Mei 2025 1. Presentation of Bank Sulteng's credit performance results as of May 2025.
6.	14 Oktober 2025 October 14, 2025	RAKOM	1. Evaluasi kinerja Komite 2. Pemantapan tugas dan tanggung jawab Komite 3. Peningkatan kompetensi Komite 4. Lain-lain 1. Evaluation of Committee performance. 2. Strengthening of Committee duties and responsibilities. 3. Enhancement of Committee competencies. 4. Miscellaneous.
7.	16 Desember 2025 December 16, 2025	RAKOM	1. Evaluasi dan strategy pencapaian RBB Tahun 2025 2. Evaluasi dan strategy ekspansi kredit ASN pasca Implementasi SIPD Bank Sulteng 3. Evaluasi dan proyeksi ratio-ratio keuangan Bank Sulteng akhir Tahun 2025 4. Lainnya yang dianggap penting 1. Evaluation and achievement strategy of the 2025 Bank Business Plan (RBB). 2. Evaluation and strategy for Civil Servant (ASN) credit expansion following the implementation of SIPD at Bank Sulteng. 3. Evaluation and projection of Bank Sulteng's financial ratios for year-end 2025. 4. Other matters deemed important.

No.	Tanggal Date	Jenis Rapat Meeting Type	Agenda Agenda
8.	06-07 Februari 2026 February 06-07, 2026	RAKOMDIR	1. Kinerja DPK dan Likuiditas 2. Performance Kredit 3. Risk Manajemen 4. Lain-lain 1. Third-Party Funds (DPK) Performance and Liquidity 2. Credit Performance 3. Risk Management 4. Miscellaneous.
9.	04 Juni 2025 June 04, 2025	RAKOMDIR	1. Pembahasan Debitur Inti dan Debitur Bermasalah 2. Discussion on Core Debtors and Non-Performing Debtors.
10.	02 Juli 2025 July 02, 2025	RAKOMDIR	1. Evaluasi Kinerja Keuangan & Operasional Semester I Tahun 2025 2. Pembahasan khusus performance Debitur Inti 3. Pemaparan Strategy Bisnis Semester II Tahun 2025 4. Lain-lain 5. Evaluation of Semester I 2025 Financial & Operational Performance 6. Specific discussion on Core Debtor performance 7. Presentation of Semester II 2025 Business Strategy 8. Miscellaneous.
11.	24 Juli 2025 July 24, 2025	RAKOMDIR	1. Presentasi Pembahasan Penyampaian Laporan Self Assessment Tingkat Kesehatan Bank (TKB) PT Bank Sulteng Semester I (Satu) Tahun 2025. 2. Presentation and Discussion on the Submission of PT Bank Sulteng's Bank Soundness Rating (TKB) Self-Assessment Report for Semester I of 2025.
12.	22 September 2025 September 22, 2025	RAKOMDIR	1. Evaluasi Kualitas Kredit Bank Sulteng posisi Juni dan Agustus 2025 2. Strategi Peningkatan Market Share kredit ASN dengan Mitigasi Risiko yang Optimal 3. Strategi peningkatan Kredit Produktif yang Efektif 4. Lain-lain 1. Evaluation of Bank Sulteng Credit Quality for June and August 2025 positions 2. Strategy to Increase Civil Servant (ASN) Credit Market Share with Optimal Risk Mitigation 3. Strategy for Effective Productive Credit increase 4. Miscellaneous.
13.	23 September 2025 September 23, 2025	RAKOMDIR	1. Evaluasi Kinerja PT. Bank Sulteng Posisi Juni dan Agustus 2025 2. Evaluasi dan Strategi Penanganan NPL PT. Bank Sulteng 3. Evaluasi Kualitas Kredit Debitur Inti 4. Evaluasi dan Strategi Peningkatan Kualitas SDM PT. Bank Sulteng 5. Evaluasi Operasional APU PPT PT. Bank Sulteng 6. Tindaklanjut Temuan Internal dan Eksternal PT. Bank Sulteng 7. Lain-lain 1. Evaluation of PT. Bank Sulteng Performance for June and August 2025 positions 2. Evaluation and Strategy for PT. Bank Sulteng NPL Handling 3. Evaluation of Core Debtor Credit Quality 4. Evaluation and Strategy for Improving PT. Bank Sulteng Human Resources Quality 5. Evaluation of PT. Bank Sulteng APU PPT (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism) Operations 6. Follow-up on PT. Bank Sulteng Internal and External Findings 7. Miscellaneous.
14.	03 November 2025 November 03, 2025	RAKOMDIR	1. Evaluasi dan Strategi Perbaikan Resiko NPL PT. Bank Sulteng 2. Evaluasi khusus Debitur Inti PT. Bank Sulteng serta Strategi Peningkatan kualitas kreditnya 3. Pembahasan Implementasi SIPD dan Strategi Peningkatan Ekspansi Kredit, serta Fee Base Income 4. Pembahasan Pembentukan CKPN sesuai ketentuan yang berlaku 5. Evaluasi tindaklanjut Hasil temuan Pemeriksaan Baik Auditor Internal maupun Eksternal 6. Pembahasan penyesuaian Struktur Organisasi dan tata kerja (SOTK) dalam meningkatkan kinerja PT. Bank Sulteng 7. Lain-lain 1. Evaluation and Strategy for PT. Bank Sulteng NPL Risk Improvement 2. Specific Evaluation of PT. Bank Sulteng Core Debtors and Credit Quality Improvement Strategies 3. Discussion on SIPD Implementation and Strategy for Credit Expansion and Fee-Based Income Increase 4. Discussion on Allowance for Impairment Losses (CKPN) Formation according to applicable provisions 5. Evaluation of follow-up on Examination Findings by both Internal and External Auditors 6. Discussion on adjustments to the Organizational Structure and Work Procedures (SOTK) to improve PT. Bank Sulteng's performance 7. Miscellaneous.
15.	16 Desember 2025 December 16, 2025	RAKOMDIR	1. Evaluasi dan Strategy Pencapaian RBB Tahun 2025 2. Evaluasi dan Strategy Ekspansi kredit ASN pasca Implementasi SIPD Bank Sulteng 3. Evaluasi dan proyeksi ratio-ratio keuangan Bank Sulteng akhir Tahun 2025 4. Lain-lain 1. Evaluation and Strategy for Achieving the 2025 Bank Business Plan (RBB) 2. Evaluation and Strategy for ASN Credit Expansion post Bank Sulteng SIPD Implementation 3. Evaluation and projection of Bank Sulteng's financial ratios at the end of 2025 4. Miscellaneous.

Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Berikut ini tingkat kehadiran masing-masing Anggota Dewan Komisaris dalam seluruh rapat yang telah dilaksanakan selama tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

Attendance Rate of Board of Commissioners' Meetings

The following is the attendance rate of each Member of the Board of Commissioners in all meetings held during 2025:

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Percentage
Novi V.B. Kaligis	15	15	100%
Maimun Lawira*	-	-	-
Max Kembuan**	15	15	100%

*) menjabat sampai 19 Januari 2025 / Served until January 19, 2025
**) menjabat mulai 20 Januari 2025 / Serving from January 20, 2025

Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Implementasi Strategi Perusahaan

Pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank telah dilakukan Dewan Komisaris Bank Sulteng yang mencakup antara lain kebijakan dan strategi manajemen. Hal ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank. Hasil pengawasan Dewan Komisaris tersebut dituangkan dalam Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan tiap Semester.

Board of Commissioners' Oversight on the Implementation of Corporate Strategy

The oversight over the implementation of the Bank Business Plan has been carried out by the Board of Commissioners of Bank Sulteng, which includes, among others, management policies and strategies. This is in accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 5/POJK.03/2016 concerning Bank Business Plans. The results of the Board of Commissioners' oversight are outlined in the Oversight Report on the Implementation of the Bank Business Plan, which is submitted to the Financial Services Authority every semester.

Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah menjalankan tugas pengawasan secara efektif selama tahun 2025. Pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris merupakan mekanisme yang dijalankan Dewan Komisaris untuk memantau dan memastikan bahwa pengelolaan perusahaan oleh Direksi telah berjalan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang telah ditetapkan.

Selama tahun 2025 Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya diantaranya yaitu:

1. Memastikan penerapan GCG terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
2. Memastikan profil risiko Bank dikelola dengan baik khususnya dalam hal mitigasi risiko;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam rangka meningkatkan kinerja Bank;
4. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank untuk menciptakan iklim bisnis yang sehat dan menguntungkan namun tetap mengacu pada prinisp kehati-haitian sehingga dapat meningkatkan kinerja Bank Sulteng ke depan.

Execution of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners has effectively executed its supervisory duties during 2025. The supervision conducted by the Board of Commissioners is a mechanism implemented by the Board of Commissioners to monitor and ensure that the management of the company by the Board of Directors has run in accordance with the established Annual Work Plan and Budget (RKAT).
During 2025, the Board of Commissioners executed its duties and responsibilities, which include:

1. Ensuring the implementation of GCG is carried out in every Bank business activity across all organizational levels or hierarchies;
2. Ensuring the Bank's risk profile is well-managed, particularly in terms of risk mitigation;
3. Exercising oversight on the implementation of policies, duties, and responsibilities of the Board of Directors, as well as providing advice to the Board of Directors in order to improve Bank performance;
4. Directing, monitoring, and evaluating the implementation of the Bank's strategic policies to create a healthy and profitable business climate while remaining committed to prudential principles to enhance Bank Sulteng's performance in the future.

Persetujuan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya untuk mendorong peningkatan kinerja Perusahaan, Dewan Komisaris selama tahun 2025 telah memberikan persetujuan dan rekomendasi termasuk menindaklanjuti beberapa surat permintaan persetujuan yang disampaikan Direksi diantaranya sebagaimana diuraikan berikut ini:

Approvals and Recommendations of the Board of Commissioners

As part of the execution of its duties and responsibilities to encourage improvements in the Company's performance, the Board of Commissioners during 2025 has granted approvals and recommendations, including following up on several letters requesting approval submitted by the Board of Directors, as described below:

Uraian Description	**Nomor dan Tanggal Surat Dewan Komisaris** Number and Date Board of Commissioners Letter
Penyampaian OJK Atas Laporan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) PT Bank Sulteng Tahun 2024 OJK Submission regarding the Recovery Plan Report of PT Bank Sulteng for 2024	No. 002/DK-BPDST/I/2025 tanggal 09 Januari 2025 No. 002/DK-BPDST/I/2025 dated January 09, 2025
Evaluasi Laporan Perkreditan PT Bank Sulteng Posisi 30 November 2024 Evaluation of PT Bank Sulteng Credit Report for the Position of November 30, 2024	No. 003/DK-BPDST/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 No. 003/DK-BPDST/I/2025 dated January 10, 2025
Analisa Atas Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan SKAI & Anti Fraud Posisi 23 Desember 2024 Analysis on the Follow-up of SKAI & Anti-Fraud Examination Findings Position December 23, 2024	No. 010/DK-BPDST/I/2025 tanggal 16 Januari 2025 No. 010/DK-BPDST/I/2025 dated January 16, 2025
Risalah Rapat Uji Coba Terbatas QRIS PT Bank Sulteng Minutes of the PT Bank Sulteng QRIS Limited Trial Meeting	No. 012/DK-BPDST/I/2025 tanggal 21 Januari 2025 No. 012/DK-BPDST/I/2025 dated January 21, 2025
Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2025-2027 Revision of the Bank Business Plan (RBB) for 2025-2027	No. 013/DK-BPDST/I/2025 tanggal 23 Januari 2025 No. 013/DK-BPDST/I/2025 dated January 23, 2025
Laporan Pemeriksaan Umum KC Buol dan KCP Paleleh pada Semester I Tahun 2024 General Examination Report of Buol Branch and Paleleh Sub-Branch for Semester I of 2024	No. 017/DK-BPDST/I/2025 tanggal 31 Januari 2025 No. 017/DK-BPDST/I/2025 dated January 31, 2025
Laporan Hasil Audit Penyelenggaraan Teknologi Informasi Tahun 2024 Audit Result Report on Information Technology Implementation for 2024	No. 018/DK-BPDST/I/2025 tanggal 31 Januari 2025 No. 018/DK-BPDST/I/2025 dated January 31, 2025
Evaluasi Laporan Perkreditan PT Bank Sulteng Posisi 31 Desember 2024 Evaluation of PT Bank Sulteng Credit Report for the Position of December 31, 2024	No. 019/DK-BPDST/I/2025 tanggal 31 Januari 2025 No. 019/DK-BPDST/I/2025 dated January 31, 2025
Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit Semester II Tahun 2024 PT Bank Sulteng Summary Report of Audit Results for Semester II of 2024 for PT Bank Sulteng	No. 021/DK-BPDST/II/2025 tanggal 06 Februari 2025 No. 021/DK-BPDST/II/2025 dated February 06, 2025
Laporan Kantor Akuntan Publik Annas Cahyadi TB. 2024 tentang Management Letter Audit Nomor AC.ML.25.001 Report of the Public Accounting Firm Annas Cahyadi for FY 2024 concerning Audit Management Letter Number AC.ML.25.001	No. 022/DK-BPDST/II/2025 tanggal 06 Februari 2025 No. 022/DK-BPDST/II/2025 dated February 06, 2025
Penunjukan Kantor Akuntan Publik Appointment of the Public Accounting Firm	No. 023/DK-BPDST/II/2025 tanggal 07 Februari 2025 No. 023/DK-BPDST/II/2025 dated February 07, 2025
Persetujuan Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2025-2027 Approval of the Revision of the Bank Business Plan (RBB) for 2025-2027	No. 024/DK-BPDST/II/2025 tanggal 07 Februari 2025 No. 024/DK-BPDST/II/2025 dated February 07, 2025
Tanggapan OJK Atas Hasil RUPS OJK Response to GMS Results	No. 027/DK-BPDST/II/2025 tanggal 14 Februari 2025 No. 027/DK-BPDST/II/2025 dated February 14, 2025
Laporan Rekapitulasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan SKAI & Anti Fraud Recapitulation Report on the Follow-up of SKAI & Anti-Fraud Examination Findings	No. 029/DK-BPDST/II/2025 tanggal 17 Februari 2025 No. 029/DK-BPDST/II/2025 dated February 17, 2025
Laporan Perkembangan Penerapan Strategi Anti Fraud Semester II Tahun 2024 Progress Report on the Implementation of the Anti-Fraud Strategy for Semester II of 2024	No. 030/DK-BPDST/II/2025 tanggal 17 Februari 202 No. 030/DK-BPDST/II/2025 dated February 17, 2025
Laporan Pelaksanaan Penarapan Program APU & PPT Tahun 2024 Implementation Report on the APU & PPT (AML & CFT) Program for 2024	No. 031/DK-BPDST/II/2025 tanggal 17 Februari 2025 No. 031/DK-BPDST/II/2025 dated February 17, 2025
Penyampaian Revisi Rencana Penyelenggaraan Produk Bank (RPPB) PT Bank Sulteng Tahun 2025 Submission of the Revision of the Bank Product Implementation Plan (RPPB) of PT Bank Sulteng for 2025	No. 037/DK-BPDST/II/2025 tanggal 27 Februari 2025 No. 037/DK-BPDST/II/2025 dated February 27, 2025
Penyampaian Jadwal Audit Umum Semester II Tahun 2024 Submission of the General Audit Schedule for Semester II of 2024	No. 038/DK-BPDST/II/2025 tanggal 27 Februari 2025 No. 038/DK-BPDST/II/2025 dated February 27, 2025
Optimalisasi Penyelesaian Kredit Bermasalah Optimization of Non-Performing Loan Resolution	No. 039/DK-BPDST/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 No. 039/DK-BPDST/III/2025 dated March 10, 2025

Uraian Description	**Nomor dan Tanggal Surat Dewan Komisaris** Number and Date Board of Commissioners Letter
Laporan Evaluasi Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2024 oleh KAP Annas Cahyadi Evaluation Report on the 2024 Financial Statements by KAP Annas Cahyadi	No. 040/DK-BPDST/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 No. 040/DK-BPDST/III/2025 dated March 14, 2025
Laporan Rekaptulasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan SKAI & Anti Fraud Recapitulation Report on the Follow-up of SKAI & Anti-Fraud Examination Findings	No. 041/DK-BPDST/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 No. 041/DK-BPDST/III/2025 dated March 14, 2025
Evaluasi Laporan Perkreditan PT Bank Sulteng Posisi 31 Januari dan 28 Februari 2025 Evaluation of PT Bank Sulteng Credit Report for the Positions of January 31 and February 28, 2025	No. 045/DK-BPDST/III/2025 tanggal 20 Maret 2025 No. 045/DK-BPDST/III/2025 dated March 20, 2025
Laporan Posisi Keuangan Bulanan Per 28 Februari 2025 Monthly Financial Position Report as of February 28, 2025	No. 046/DK-BPDST/III/2025 tanggal 20 Maret 2025 No. 046/DK-BPDST/III/2025 dated March 20, 2025
Laporan Rencana Aksi Pemuhlihan (Recovery Plan) PT Bank Sulteng Recovery Plan Report of PT Bank Sulteng	No. 048/DK-BPDST/III/2025 tanggal 21 Maret 2025 No. 048/DK-BPDST/III/2025 dated March 21, 2025
Penyesuaian Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2025-2027 Adjustment of the Bank Business Plan (RBB) for 2025-2027	No. 049/DK-BPDST/III/2025 tanggal 21 Maret 2025 No. 049/DK-BPDST/III/2025 dated March 21, 2025
Laporan Hasil Audit Umum KCP Labean Semester I Tahun 2024 General Audit Result Report of Labean Sub-Branch for Semester I of 2024	No. 050/DK-BPDST/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 No. 050/DK-BPDST/III/2025 dated March 24, 2025
Persetujuan Penyesuaian Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2025-2027 Approval for Adjustment of the Bank Business Plan (RBB) for 2025-2027	No. 054/DK-BPDST/IV/2025 tanggal 11 April 2025 No. 054/DK-BPDST/IV/2025 dated April 11, 2025
Laporan Rekaptulasi Tindaklanjut Temuan SKAI & Anti Fraud Recapitulation Report on the Follow-up of SKAI & Anti-Fraud Findings	No. 055/DK-BPDST/IV/2025 tanggal 14 April 2025 No. 055/DK-BPDST/IV/2025 dated April 14, 2025
Peningkatan Tata Kelola Teknologi Informasi (Ti) dan Siber Bank Sulteng Improvement of Information Technology (IT) and Cyber Governance of Bank Sulteng	No. 056/DK-BPDST/IV/2025 tanggal 14 April 2025 No. 056/DK-BPDST/IV/2025 dated April 14, 2025
Evaluasi Laporan Perkreditan PT Bank Sulteng Posisi 31 Maret 2025 Evaluation of PT Bank Sulteng Credit Report for the Position of March 31, 2025	No. 063/DK-BPDST/IV/2025 tanggal 30 APRIL 2025 No. 063/DK-BPDST/IV/2025 dated April 30, 2025
Dokumen Penyesuaian Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2025-2027 Bank Business Plan (RBB) Adjustment Document for 2025-2027	No. 064/DK-BPDST/IV/2025 tanggal 30 APRIL 2025 No. 064/DK-BPDST/IV/2025 dated April 30, 2025
Laporan Pemeriksaan Umum KC Palu Barat dan KC Sigi Pada Semster II Tahun 2024 General Examination Report of Palu Barat Branch and Sigi Branch for Semester II of 2024	No. 065/DK-BPDST/IV/2025 tanggal 30 April 2025 No. 065/DK-BPDST/IV/2025 dated April 30, 2025
Laporan Hasil Audit Investigasi Indikasi Penarikan Rekening Nasabah An. Lemot di KC Palu Barat Investigative Audit Result Report on Indications of Customer Account Withdrawal on behalf of Lemot at Palu Barat Branch	No. 066/DK-BPDST/V/2025 tanggal 06 Mei 2025 No. 066/DK-BPDST/V/2025 dated May 06, 2025
Laporan Kinerja Keuangan Dibandingkan Dengan Realisasi Bisnis Bank TW I Tahun 2025 Financial Performance Report Compared with Bank Business Realization Q1 of 2025	No. 067/DK-BPDST/V/2025 tanggal 08 Mei 2025 No. 067/DK-BPDST/V/2025 dated May 08, 2025
Pengawalan Pelanggaran Prosedur, Kejadian, Fraud dan Kejahatan Perbankan Escort of Procedural Violations, Incidents, Fraud, and Banking Crimes	No. 068/DK-BPDST/V/2025 tanggal 09 Mei 2025 No. 068/DK-BPDST/V/2025 dated May 09, 2025
Evaluasi Laporan Perkreditan PT Bank Sulteng Posisi 30 April 2025 Evaluation of PT Bank Sulteng Credit Report for the Position of April 30, 2025	No. 070/DK-BPDST/V/2025 tanggal 22 Mei 2025 No. 070/DK-BPDST/V/2025 dated May 22, 2025
Laporan Penerapan Tata Kelola Bank Sulteng Corporate Governance Implementation Report of Bank Sulteng	No. 072/DK-BPDST/V/2025 tanggal 26 Mei 2025 No. 072/DK-BPDST/V/2025 dated May 26, 2025
Reminder Penyelesaian Ketidaksesuaian Data Laporan Debitur Slik Periode Semester II Tahun 2024 Reminder on the Resolution of Data Discrepancies in the SLIK Debtor Report for the Period of Semester II of 2024	No. 073/DK-BPDST/V/2025 tanggal 26 Mei 2025 No. 073/DK-BPDST/V/2025 dated May 26, 2025
Teguran Atas Ketidakpatuhan Penyampain Laporan Bulanan Gangguaan Sistem dan Availability (GSA) Insfrastruktur Teknologi Informasi (TI) Layanan Sistem Pembayaran (SP) Reprimand on Non-Compliance with the Submission of Monthly Reports on System Disruptions and Availability (GSA) of Information Technology (IT) Infrastructure for Payment System Services (SP)	No. 074/DK-BPDST/V/2025 tanggal 26 Mei 2025 No. 074/DK-BPDST/V/2025 dated May 26, 2025
Tanggapan OJK Atas Laporan Tahunan 2024 dan Laporan Berkelanjutan Tahun 2024 OJK Response to the 2024 Annual Report and the 2024 Sustainability Report	No. 075/DK-BPDST/V/2025 tanggal 27 Mei 2025 No. 075/DK-BPDST/V/2025 dated May 27, 2025
Penetapan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk Rencana Audit Laporan Keuangan PT Bank Sulteng Tahun Buku 2025 Determination of Public Accounting Firm (KAP) Services for the Audit Plan of PT Bank Sulteng Financial Statements for the 2025 Financial Year	No. 075a/DK-BPDST/VI/2025 tanggal 11 Juni 2026 No. 075a/DK-BPDST/VI/2025 dated June 11, 2026
Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Siber Bank Improvement of Bank Cyber Resilience and Security	No. 076/DK-BPDST/VI/2025 tanggal 12 Juni 2025 No. 076/DK-BPDST/VI/2025 dated June 12, 2025
Laporan Strategi Anti Fraud Bank Sulteng Bank Sulteng Anti-Fraud Strategy Report	No. 077/DK-BPDST/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025 No. 077/DK-BPDST/VI/2025 dated June 13, 2025
Evaluasi Atas Kualitas Kredit Debitur Inti Evaluation of Core Debtor Credit Quality	No. 078/DK-BPDST/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025 No. 078/DK-BPDST/VI/2025 dated June 13, 2025

Uraian Description	Nomor dan Tanggal Surat Dewan Komisaris Number and Date Board of Commissioners Letter
Progress Sinergi KUB dan Implementasi Roadmap Penguatan BPD Tahun 2024-2027 Progress on KUB Synergy and Implementation of the BPD Strengthening Roadmap for 2024-2027	No. 080/DK-BPDST/VI/2025 tanggal 18 Juni 2025 No. 080/DK-BPDST/VI/2025 dated June 18, 2025
Persetujuan Perubahan RBB Tahun 2025-2027 Approval for Revision of the RBB for 2025-2027	No. 082/DK-BPDST/VI/2025 tanggal 23 Juni 2025 No. 082/DK-BPDST/VI/2025 dated June 23, 2025
Evaluasi Laporan Perkreditan PT Bank Sulteng Posisi 31 Mei 2025 Evaluation of PT Bank Sulteng Credit Report for the Position of May 31, 2025	No. 085/DK-BPDST/VII/2025 tanggal 04 Juli 2025 No. 085/DK-BPDST/VII/2025 dated July 04, 2025
Pengusulan Pejabat Eksekutif Pemimpin SKAI & Anti Fraud Proposal for the Executive Officer Head of SKAI & Anti-Fraud	No. 088/DK-BPDST/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025 No. 088/DK-BPDST/VII/2025 dated July 14, 2025
Laporan Hasil Investigasi Terhadap Klaim Fiktif Transaksi Antar Bank Interakoneksi oleh Petugas Keluhan Nasabah Kantor Pusat Investigation Result Report on Fictitious Claims of Interconnection Interbank Transactions by the Customer Complaint Officer at the Head Office	No. 090/DK-BPDST/VII/2025 tanggal 16 Juli 2025 No. 090/DK-BPDST/VII/2025 dated July 16, 2025
Laporan Rekaptulasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan SKAI & Anti Fraud Recapitulation Report on the Follow-up of SKAI & Anti-Fraud Examination Findings	No. 091/DK-BPDST/VII/2025 tanggal 16 Juli 2025 No. 091/DK-BPDST/VII/2025 dated July 16, 2025
Evaluasi Laporan Perkreditan PT Bank Sulteng Posisi 30 Juni 2025 Evaluation of PT Bank Sulteng Credit Report for the Position of June 30, 2025	No. 093/DK-BPDST/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025 No. 093/DK-BPDST/VII/2025 dated July 21, 2025
Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Umum Periode Semester I (Satu) Tahun 2025 PT Bank Sulteng Minimum Capital Adequacy Requirement Report for Commercial Banks for the Period of Semester I of 2025 PT Bank Sulteng	No. 094/DK-BPDST/VII/2025 tanggal 22 Juli 2025 No. 094/DK-BPDST/VII/2025 dated July 22, 2025
Pemeriksaan Umum Bank Sulteng Tahun 2025 General Examination of Bank Sulteng 2025	No. 095/DK-BPDST/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025 No. 095/DK-BPDST/VII/2025 dated July 23, 2025
Perubahan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2025-2027 Revision of the Bank Business Plan (RBB) for 2025-2027	No. 098/DK-BPDST/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025 No. 098/DK-BPDST/VII/2025 dated July 28, 2025
Penyelesaian Ketidaksesuaian Data Laporan Debitur Slik Periode Semester I Tahun 2025 Resolution of Data Discrepancies in the SLIK Debtor Report for the Period of Semester I of 2025	No. 099/DK-BPDST/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025 No. 099/DK-BPDST/VII/2025 dated July 28, 2025
Persetujuan 2025-2027 Approval for 2025-2027	No. 101/DK-BPDST/VIII/2025 tanggal 05 Agustus 2025 No. 101/DK-BPDST/VIII/2025 dated August 05, 2025
Laporan Pemeriksaan Umum KC Banggai Laut dan KC Salakan Semester II Tahun 2024 General Examination Report of Banggai Laut Branch and Salakan Branch for Semester II of 2024	No. 104/DK-BPDST/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025 No. 104/DK-BPDST/VIII/2025 dated August 13, 2025
Laporan Rekaptulasi Tindak Lanjur Temuan Hasil Pemeriksaan SKAI & Anti Fraud Recapitulation Report on the Follow-up of SKAI & Anti-Fraud Examination Findings	No. 105/DK-BPDST/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025 No. 105/DK-BPDST/VIII/2025 dated August 13, 2025
Perpanjangan Kontrak Anggota Komite Dewan Komisaris Contract Extension for Members of the Board of Commissioners' Committees	No. 109/DK-BPDST/VIII/2025 tanggal 26 Agustus 2025 No. 109/DK-BPDST/VIII/2025 dated August 26, 2025
Evaluasi Laporan Perkereditan PT Bank Sulteng Posisi 31 Juli 3025 Evaluation of PT Bank Sulteng Credit Report for the Position of July 31, 2025	No. 110/DK-BPDST/IX/2025 tanggal 02 September 2025 No. 110/DK-BPDST/IX/2025 dated September 02, 2025
LPU KC Ampana, KC Bungku, dan KC Jakarta Semester II Tahun 2024 General Examination Report (LPU) of Ampana Branch, Bungku Branch, and Jakarta Branch for Semester II of 2024	No. 111/DK-BPDST/IX/2025 tanggal 02 September 2025 No. 111/DK-BPDST/IX/2025 dated September 02, 2025
Penyampaian Penyesuaian Perubahan Rencana Bisnis Bank (RBB) PT Bank Sulteng Tahun 2025-2027 Submission of Adjustments to the Revision of the Bank Business Plan (RBB) of PT Bank Sulteng for 2025-2027	No. 112/DK-BPDST/IX/2025 tanggal 02 September 2025 No. 112/DK-BPDST/IX/2025 dated September 02, 2025
LPU KCP Labean dan KC Toli-Toli Semester II Tahun 2024 LPU of Labean Sub-Branch and Toli-Toli Branch for Semester II of 2024	No. 117/DK-BPDST/IX/2025 tanggal 17 September 2025 No. 117/DK-BPDST/IX/2025 dated September 17, 2025
Evaluasi Laporan Perkreditan PT Bank Sulteng Posisi 31 Agustus 2025 Evaluation of PT Bank Sulteng Credit Report for the Position of August 31, 2025	No. 118/DK-BPDST/IX/2025 tanggal 23 September 2025 No. 118/DK-BPDST/IX/2025 dated September 23, 2025
Rekomendasi Dewan Komisaris Entitas Utama Terkait Tata Kelola Terintegritas pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora Recommendation of the Board of Commissioners of the Primary Entity Regarding Integrated Governance in the Mega Corpora Financial Conglomeration	No. 119/DK-BPDST/IX/2025 tanggal 24 September 2025 No. 119/DK-BPDST/IX/2025 dated September 24, 2025
Penyampaian OJK Atas Pemanfaatan Sistem Informasi Pelaku di Sektor Jasa Kuangan (SIPELAKU) OJK Submission regarding the Utilization of the Financial Services Sector Actor Information System (SIPELAKU)	No. 121/DK-BPDST/IX/2025 tanggal 29 September 2025 No. 121/DK-BPDST/IX/2025 dated September 29, 2025
Laporan Rekaptulasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan SKAI & Anti Fraud Recapitulation Report on the Follow-up of SKAI & Anti-Fraud Examination Findings	No. 124/DK-BPDST/X/2025 tanggal 02 Oktober 2025 No. 124/DK-BPDST/X/2025 dated October 02, 2025
Tanggapan OJK Atas Permohonan Penyelenggaraan Aktivitas/Produk Baru Bank Sulteng OJK Response to the Request for the Implementation of Bank Sulteng's New Activities/ Products	No. 125/DK-BPDST/X/2025 tanggal 03 Oktober 2025 No. 125/DK-BPDST/X/2025 dated October 03, 2025

Uraian Description	**Nomor dan Tanggal Surat Dewan Komisaris** Number and Date Board of Commissioners Letter
Laporan Kinerja Keuangan Dibandingkan Dengan Realisasi Bisnis Bank TW II Tahun 2025 Financial Performance Report Compared with Bank Business Realization Q2 of 2025	No. 130/DK-BPDST/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025 No. 130/DK-BPDST/X/2025 dated October 10, 2025
Persetujuan Tindak Lanjut Temuan OJK Pusat Terkait Pemeriksaan Penerapan APU, PPT dan PPPSP Tahun 2025 Approval for the Follow-up of Central OJK Findings Regarding the Examination of the Implementation of APU, PPT, and PPPSP for 2025	No. 131/DK-BPDST/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025 No. 131/DK-BPDST/X/2025 dated October 10, 2025
Persetujuan Tindak Lanjut Temuan OJK Pusat Terkait Pemeriksaan Penerapan APU, PPT dan PPPSP Tahun 2025 Poin 1 Hurf A Penyesuaian Struktur UKK APU PPT Approval for the Follow-up of Central OJK Findings Regarding the Examination of the Implementation of APU, PPT, and PPPSP for 2025 Point 1 Letter A Adjustment of the UKK APU PPT Structure	No. 132/DK-BPDST/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025 No. 132/DK-BPDST/X/2025 dated October 10, 2025
Laporan Perkreditan PT Bank Sukteng Posisi 30 September 2025 PT Bank Sulteng Credit Report for the Position of September 30, 2025	No. 133/DK-BPDST/X/2025 tanggal 15 Oktober 2025 No. 133/DK-BPDST/X/2025 dated October 15, 2025
Evaluasi Laporan Perkreditan PT Bank Sulteng Posisi 30 September 2025 Evaluation of PT Bank Sulteng Credit Report for the Position of September 30, 2025	No. 134/DK-BPDST/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025 No. 134/DK-BPDST/X/2025 dated October 16, 2025
Persetujuan Pejabat Eksekutif Pemimpin SKAI & Anti Fraud Approval of the Executive Officer Head of SKAI & Anti-Fraud	No. 134a/DK-BPDST/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025 No. 134a/DK-BPDST/X/2025 dated October 16, 2025
Pemenuhan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bank Sulteng Fulfillment of Follow-up on Bank Sulteng Examination	No. 135/DK-BPDST/X/2025 tanggal 21 Oktober 2025 No. 135/DK-BPDST/X/2025 dated October 21, 2025
Surat Instruksi (Menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah Atas Operasional PT Bank Sulteng Tahun Buku 2010 dan 2011) Letter of Instruction (Following up on the Results of the Financial Examination (BPK) RI of the Central Sulawesi Provincial Representative regarding the Operations of PT Bank Sulteng for Financial Years 2010 and 2011)	No. 139/DK-BPDST/X/2025 tanggal 28 Oktober 2025 No. 139/DK-BPDST/X/2025 dated October 28, 2025
Permintaan Data Profil Bank Untuk Buku "Terompet Dari Timur-BPD Regional Champion 2045" Request for Bank Profile Data for the Book "Trumpet From the East - BPD Regional Champion 2045"	No. 143/DK-BPDST/X/2025 tanggal 28 Oktober 2025 No. 143/DK-BPDST/X/2025 dated October 28, 2025
Permohonan Perpanjangan Perjalanan Dinas Pegawai Request for Extension of Employee Business Travel	No. 144/DK-BPDST/XI/2025 tanggal 16 Oktober 2025 No. 144/DK-BPDST/XI/2025 dated October 16, 2025
Evaluasi Kualitas Governance, Risk, and Compliance (GRC) Serta Kinerja Pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Terhadap Kontribusi Pembangunan Daerah Sulteng Evaluation of the Quality of Governance, Risk, and Compliance (GRC) and Performance at PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah concerning Contributions to Central Sulawesi Regional Development	No. 145/DK-BPDST/XI/2025 tanggal 05 November 2025 No. 145/DK-BPDST/XI/2025 dated November 05, 2025
Penegasan Optimalisasi Atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Pada PT Bank Sulteng Tahun Buku 2025 Reaffirmation of the Optimization of Annual Historical Financial Information at PT Bank Sulteng for the 2025 Financial Year	No. 146/DK-BPDST/XI/2025 tanggal 05 November 2025 No. 146/DK-BPDST/XI/2025 dated November 05, 2025
Laporan Rekaptulasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan SKAI & Anti Fraud Recapitulation Report on the Follow-up of SKAI & Anti-Fraud Examination Findings	No. 147/DK-BPDST/XI/2025 tanggal 07 November 2025 No. 147/DK-BPDST/XI/2025 dated November 07, 2025
Informasi Penelitian Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Bank Sulteng Periode Semester I Tahun 2025 Information on Bank Sulteng's Bank Soundness Rating (TKB) Assessment for the Period of Semester I of 2025	No. 148/DK-BPDST/XI/2025 tanggal 13 November 2025 No. 148/DK-BPDST/XI/2025 dated November 13, 2025
Tanggapan Atas Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin SKAI & Anti Fraud dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Response to the Report on the Appointment and Dismissal of the Head of SKAI & Anti-Fraud and the Compliance Work Unit (SKK)	No. 149/DK-BPDST/XI/2025 tanggal 13 November 2025 No. 149/DK-BPDST/XI/2025 dated November 13, 2025
Laporan Kinerja Keuangan Dibandingkan Dengan Realisasi Bisnis Bank TW II Financial Performance Report Compared with Bank Business Realization Q2	No. 150/DK-BPDST/XI/2025 tanggal 13 November 2025 No. 150/DK-BPDST/XI/2025 dated November 13, 2025
Laporan Profil Resiko Triwulan III Tahun 2025 Risk Profile Report for Quarter III of 2025	No. 151/DK-BPDST/XI/2025 tanggal 14 November 2025 No. 151/DK-BPDST/XI/2025 dated November 14, 2025
Laporan Pemeriksaan Umum KC Parigi Semester I Tahun 2025 General Examination Report of Parigi Branch for Semester I of 2025	No. 152/DK-BPDST/XI/2025 tanggal 14 November 2025 No. 152/DK-BPDST/XI/2025 dated November 14, 2025
Persetujuan Pelampauan Anggaran Pemeliharaan Sertifikasi SPPUR Jenjang 6 PUT dan PTD Approval for Exceeding the SPPUR Level 6 PUT and PTD Certification Maintenance Budget	No. 152a/DK-BPDST/XI/2025 tanggal 18 November 2025 No. 152a/DK-BPDST/XI/2025 dated November 18, 2025
Tanggapan OJK Kelengkapan Dokumen Layanan Prioritas OJK Response on the Completeness of Priority Service Documents	No. 153/DK-BPDST/XI/2025 tanggal 26 November 2025 No. 153/DK-BPDST/XI/2025 dated November 26, 2025
Persetujuan OJK Atas Produk/Aktivitas Baru Berupa Layanan Bank Sulteng Prioritas OJK Approval regarding New Products/Activities in the form of Bank Sulteng Priority Services	No. 154/DK-BPDST/XI/2025 tanggal 27 November 2025 No. 154/DK-BPDST/XI/2025 dated November 27, 2025

Uraian Description	Nomor dan Tanggal Surat Dewan Komisaris Number and Date Board of Commissioners Letter
Persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2026-2028 Approval of the Bank Business Plan (RBB) for 2026-2028	No. 155/DK-BPDST/XI/2025 tanggal 27 November 2025 No. 155/DK-BPDST/XI/2025 dated November 27, 2025
Pemindahan Alamat Kantor Cabang Kolonodale Relocation of Kolonodale Branch Office Address	No. 156/DK-BPDST/XI/2025 tanggal 27 November 2025 No. 156/DK-BPDST/XI/2025 dated November 27, 2025
Pemindahan Alamat Kantor Cabang Kolonodale Relocation of Kolonodale Branch Office Address	No. 157/DK-BPDST/XI/2025 tanggal 28 November 2025 No. 157/DK-BPDST/XI/2025 dated November 28, 2025
Uji Coba Terbatas Smart Branch Bank Sulteng Limited Trial of Bank Sulteng Smart Branch	No. 158/DK-BPDST/XI/2025 tanggal 28 November 2025 No. 158/DK-BPDST/XI/2025 dated November 28, 2025
Perubahan Struktur Organisasi dan Job Description PT Bank Sulteng Tahun 2025 Revision of the Organizational Structure and Job Description of PT Bank Sulteng for 2025	No. 159/DK-BPDST/X/2025 tanggal 02 Desember 2025 No. 159/DK-BPDST/X/2025 dated December 02, 2025
Rencana Penyelenggaraan Produk Baru (RPPB) PT Bank Sulteng Tahun 2026 New Product Implementation Plan (RPPB) of PT Bank Sulteng for 2026	No. 163/DK-BPDST/X/2025 tanggal 03 Desember 2025 No. 163/DK-BPDST/X/2025 dated December 03, 2025
Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 2026 Sustainable Finance Action Plan 2026	No. 164/DK-BPDST/X/2025 tanggal 03 Desember 2025 No. 164/DK-BPDST/X/2025 dated December 03, 2025
Pemenuhan Komitmen Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Khusus APU PPT Otoritas Jasa Kuangan (OJK) Pusat Posisi 31 Juli Fulfillment of Commitment to Follow-up on the Findings of the Central Financial Services Authority (OJK) APU PPT Special Examination Position July 31	No. 165/DK-BPDST/XII/2025 tanggal 08 Desember 2025 No. 165/DK-BPDST/XII/2025 dated December 08, 2025
Laporan Implementasi dan Realisasi Layanan QRIS MPM Sebagai Issuer dan Acquier PT Bank Sulteng Report on the Implementation and Realization of QRIS MPM Services as Issuer and Acquirer for PT Bank Sulteng	No. 166/DK-BPDST/XII/2025 tanggal 10 Desember 2025 No. 166/DK-BPDST/XII/2025 dated December 10, 2025
Evaluasi Laporan Perkreditan PT Bank Sulteng Posisi 31 Oktober 2025 Evaluation of PT Bank Sulteng Credit Report for the Position of October 31, 2025	No. 167/DK-BPDST/XII/2025 tanggal 10 Desember 2025 No. 167/DK-BPDST/XII/2025 dated December 10, 2025
Permohonan Persetujuan Kredit Hapus Buku Request for Approval of Write-Off Credit	No. 168/DK-BPDST/XII/2025 tanggal 10 Desember 2025 No. 168/DK-BPDST/XII/2025 dated December 10, 2025
Tanggapan Atas Permohonan Penyelenggaraan Aktivitas/Produk Baru Berupa Layanan Smart Branch Response to the Request for the Implementation of New Activities/Products in the form of Smart Branch Services	No. 169/DK-BPDST/XII/2025 tanggal 12 Desember 2025 No. 169/DK-BPDST/XII/2025 dated December 12, 2025
Hasil Pemriksaan PT Bank Sulteng oleh Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2025 Results of the Examination of PT Bank Sulteng by the Financial Services Authority in 2025	No. 170/DK-BPDST/XII/2025 tanggal 12 Desember 2025 No. 170/DK-BPDST/XII/2025 dated December 12, 2025
Pembayaran Biaya Tiket Payment of Ticket Expenses	No. 171/DK-BPDST/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025 No. 171/DK-BPDST/XII/2025 dated December 15, 2025
Penyampaian Laporan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) PT Bank Sulteng Tahun 2025 Submission of the Recovery Plan Report of PT Bank Sulteng for 2025	No. 172/DK-BPDST/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025 No. 172/DK-BPDST/XII/2025 dated December 19, 2025
Laporan Rekaptulasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan SKAI & Anti Fraud Recapitulation Report on the Follow-up of SKAI & Anti-Fraud Examination Findings	No. 173/DK-BPDST/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025 No. 173/DK-BPDST/XII/2025 dated December 19, 2025
Financial Integrity Rating on Money And Terorism Financing (Fir On Ml/Tf) Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing (FIR ON ML/TF)	No. 174/DK-BPDST/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025 No. 174/DK-BPDST/XII/2025 dated December 29, 2025
Evaluasi Laporan Perkreditan PT Bank Sulteng Posisi 30 November 2025 Evaluation of PT Bank Sulteng Credit Report for the Position of November 30, 2025	No, 175/DK-BPDST/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025 No. 175/DK-BPDST/XII/2025 dated December 29, 2025
Laporan Pemeriksaan Umum KC Donggala, KC Poso dan KCP Tinombo Semester I Tahun 2025 General Examination Report of Donggala Branch, Poso Branch, and Tinombo Sub-Branch for Semester I of 2025	No. 176/DK-BPDST/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025 No. 176/DK-BPDST/XII/2025 dated December 30, 2025
Penyampaian Penyelenggaraan Aktivitas Baru Layanan Bank Sulteng Prioritas Submission on the Implementation of New Activities for Bank Sulteng Priority Services	No. 177/DK-BPDST/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025 No. 177/DK-BPDST/XII/2025 dated December 30, 2025
Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Rencana Bisnis Bank Periode Semester II Tahun 2024 Report on the Results of the Board of Commissioners' Oversight over the Bank Business Plan for the Period of Semester II of 2024	No. 034/DK-BPDST/II/2025 tanggal 24 Februari 2025 No. 034/DK-BPDST/II/2025 dated February 24, 2025
Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Rencana Bisnis Bank Periode Semester I Tahun 2025 Report on the Results of the Board of Commissioners' Oversight over the Bank Business Plan for the Period of Semester I of 2025	No. 108/DK-BPDST/VIII/2025 tanggal 22 Agustus 2025 No. 108/DK-BPDST/VIII/2025 dated August 22, 2025

Direksi

Sebagai salah satu Organ Perusahaan, Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengelolaan Perusahaan dalam rangka mencapai visi, misi dan sasaran yang telah digariskan dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Direksi bertanggung jawab untuk menjalankan keputusan yang telah diambil dalam RUPS.

Direksi bertanggung jawab kepada RUPS dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan oleh RUPS setelah melalui proses pencalonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS. Seluruh anggota Direksi memiliki kompetensi, integritas, dan reputasi yang memadai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dasar Hukum

DIreksi Bank Sulteng dibentuk dan ditetapkan berdasarkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Peraturan Bank Indonesia No. 13/27/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
5. Anggaran Dasar Bank Sulteng.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi mengacu pada pedoman dan tata tertib kerja Direksi sebagaimana diatur dalam buku Pedoman Kerja Direksi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 94/SK-DIR/BPD-ST/SKK/2024 tanggal 30 Agustus 2024 tentang BPP Pedoman Kerja Direksi.

Buku Pedoman Kerja Direksi secara umum menjadi pedoman kerja dan tata tertib kerja bagi Direksi dalam menjalankan fungsi pengelolaan Perusahaan agar

Board of Directors

As one of the Corporate Organs, the Board of Directors is responsible for the management of the Company in the interests of the Company, in accordance with the Company's purposes and objectives, and represents the Company, both inside and outside the court, in accordance with the provisions of the Articles of Association. The Board of Directors is responsible for the execution and management of the Company in achieving the vision, mission, and targets outlined in the Company's Articles of Association. The Board of Directors is responsible for executing the decisions made in the GMS.

The Board of Directors is accountable to the GMS in carrying out its duties and responsibilities. The appointment and dismissal of members of the Board of Directors are carried out by the GMS after undergoing a nomination process in accordance with laws and regulations, and such nomination is binding upon the GMS. All members of the Board of Directors possess adequate competence, integrity, and reputation in carrying out their duties and responsibilities.

Legal Basis

The Board of Directors of Bank Sulteng is formed and established based on several provisions as follows:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Bank Indonesia Regulation No. 13/27/PBI/2011 concerning Amendments to Bank Indonesia Regulation No. 11/1/PBI/2009 concerning Commercial Banks.
3. Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks.
4. Financial Services Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.03/2025 dated June 24, 2025, concerning the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks.
5. Articles of Association of Bank Sulteng.

Guidelines and Rules of Conduct for the Board of Directors

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors refers to the guidelines and rules of conduct for the Board of Directors as stipulated in the Board of Directors' Working Guidelines Book, established based on the Board of Directors' Decree No. 94/SK-DIR/BPD-ST/SKK/2024 dated August 30, 2024, concerning the BPP Working Guidelines for the Board of Directors.

The Board of Directors' Working Guidelines Book serves generally as a working guideline and rules of conduct for the Board of Directors in executing the

dapat berjalan secara efektif, akuntabel, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Buku Pedoman Kerja Direksi memuat ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum korporasi Indonesia yang menganut *two tiers system*.

Buku Pedoman Kerja Direksi secara umum mengatur mengenai:

1. Jumlah, Komposisi, Kriteria, Independensi, dan Etika Direksi;
2. Tugas, Wewenang, Hak dan Tanggung Jawab Direksi;
3. Rapat dan Transparansi Direksi;
4. Penilaian Kinerja Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Bank Sulteng, Direksi bertanggung jawab dalam pelaksanaan kepengurusan Bank dan penetapan strategi dan kebijakan di lingkungan Bank serta pelaksanaannya sesuai dengan tujuan usaha Bank. Direksi menjalankan pengelolaan Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Direksi, yaitu:
   a. Melaksanakan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut
   b. Memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan.
2. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perusahaan
3. Setiap anggota Direksi bertangung jawab penuh secara pribadi apabila anggota Direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan
4. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Direksi berhak mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan serta melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun

Company's management function to ensure it runs effectively, accountably, independently, and responsibly in accordance with applicable laws and regulations. The Board of Directors' Working Guidelines Book contains the provisions of the Articles of Association, applicable laws and regulations, and is structured based on the principles of Indonesian corporate law which adheres to a two-tier system.
The Board of Directors' Working Guidelines Book generally regulates:

1. Number, Composition, Criteria, Independence, and Ethics of the Board of Directors;
2. Duties, Authorities, Rights, and Responsibilities of the Board of Directors;
3. Meetings and Transparency of the Board of Directors;
4. Performance Evaluation of the Board of Directors.

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

Based on the provisions of the Articles of Association of Bank Sulteng, the Board of Directors is responsible for the execution of the Bank's management and the establishment of strategies and policies within the Bank as well as their execution in accordance with the Bank's business objectives. The Board of Directors manages the Bank in accordance with the authority and responsibility stipulated in the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.

The Board of Directors has the following duties and responsibilities:

1. The Principal Duties of the Board of Directors include:
   a. Executing the management of the Company for the benefit and objectives of the Company and acting as the leader in such management.
   b. Maintaining and managing the Company's assets.
2. The Board of Directors holds full responsibility for executing its duties in the interests of the Company to achieve the Company's purposes and objectives.
3. Each member of the Board of Directors is fully and personally responsible if the concerned member of the Board of Directors is at fault or negligent in executing their duties for the interests and business of the Company.
4. Each member of the Board of Directors must, in good faith and with full responsibility, execute their duties for the interests and business of the Company while adhering to applicable laws and regulations.
5. The Board of Directors has the right to represent the Company both inside and outside the court and to take all actions and deeds, regarding both

mengenai kepemilikan serta mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan

6. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
   a. Mengeluarkan surat-surat obligasi
   b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik Perusahaan
   c. Melepaskan atau menjual barang tidak bergerak milik Perusahaan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Komisaris
   d. Menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan
   e. Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta di dalam Perusahaan atau badan-badan lain atau mendirikan perusahaan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang
   f. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perusahaan dalam perusahaan atau badan-badan lainnya yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang
   g. Perbuatan untuk tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapus tagih yang jumlahnya dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
7. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah harta kekayaan Perusahaan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
8. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada point (7) di atas tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perusahaan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikat baik
9. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang mengakibatkan benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Komisaris atau Pemegang Saham dengan kepentingan ekonomis Perusahaan, Direksi memerlukan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang Perbankan.
10. Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku di bidang perbankan

management and ownership, as well as binding the Company with other parties and/or other parties with the Company.

6. The following acts of the Board of Directors must obtain written approval from the Board of Commissioners while adhering to applicable laws and regulations:
   a. Issuing debt securities (bonds).
   b. Purchasing, selling, or otherwise acquiring or releasing rights over the Company's inventory assets.
   c. Releasing or selling the Company's immovable assets that exceed a certain amount stipulated by the Board of Commissioners' Meeting.
   d. Establishing the organizational structure and working procedures of the Company.
   e. Taking part, either partially or wholly, or participating in the Company or other entities or establishing a new company not in the context of credit restructuring.
   f. Releasing, either partially or wholly, the Company's equity participation in a company or other entities not in the context of credit restructuring.
   g. The act of no longer collecting bad debts that have been written off, the amount of which from time to time is determined by the General Meeting of Shareholders.
7. Legal acts to transfer, release rights, or pledge as debt collateral all or more than 50% (fifty percent) of the total assets of the Company, either in a single transaction or in several independent or interrelated transactions, must obtain the approval of the General Meeting of Shareholders.
8. Legal acts as referred to in point (7) above without GMS approval remain binding upon the Company as long as the other party in the legal act acts in good faith.
9. To execute legal acts in the form of transactions resulting in a conflict of interest between the personal economic interests of members of the Board of Directors, Commissioners, or Shareholders and the economic interests of the Company, the Board of Directors requires the Approval of the General Meeting of Shareholders as stipulated in these Articles of Association and by observing applicable laws and regulations in the Banking sector.
10. Management policies are established in the Board of Directors' meeting by considering applicable provisions and regulations in the banking sector.

11. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam Surat Kuasa.

Kewajiban Direksi

Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya memiliki kewajiban antara lain yaitu:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan tujuan dan lapangan usahanya;
2. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan dan menyampaikannya kepada Komisaris selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai untuk mendapatkan persetujuan Komisaris;
3. Menyiapkan rencana jangka panjang Perusahaan, untuk mendapatkan persetujuan Komisaris;
4. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan.
5. Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
6. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan berupa laporan kegiatan Perseroan termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainya menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam anggaran dasar setiap diminta oleh Komisaris;
7. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian tugas;
8. Direksi dapat mengangkat tenaga ahli atau konsultan dalam melakukan sebahagian tugas perseroan dan tidak dapat diangkat menjadi pegawai atau pejabat dalam perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku;
9. Direksi dapat mengangkat tenaga yang berpengalaman (Special hare) sebagai pejabat dalam perseroan, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan Angaran Dasar Perseroan.

Hak dan Wewenang Direksi

Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya memiliki hak dan wewenang antara lain:

1. Menetapkan kebijakan dalam kepemimpinan dan kepengurusan;

11. The Board of Directors, for specific acts under its own responsibility, also has the right to appoint one or more persons as its representative(s) or proxy(ies), by granting him/her or them the power for the specific acts stipulated in a Power of Attorney.

Obligations of the Board of Directors

In executing its duties and responsibilities, the Board of Directors has obligations including:

1. Striving for and guaranteeing the execution of the Company's business and activities in accordance with its objectives and field of business;
2. Preparing the Company's annual work plan and budget and submitting them to the Commissioners no later than 60 (sixty) days before the commencement of the next financial year to obtain the Commissioners' approval;
3. Preparing the Company's long-term plan to obtain the Commissioners' approval;
4. Maintaining and carrying out the Company's bookkeeping and administration in accordance with the prevailing norms for a limited liability company.
5. Establishing an accounting system based on internal control principles, specifically the separation of management, recording, safekeeping, and supervisory functions;
6. Providing accountability and all information concerning the condition and course of the Company in the form of Company activity reports, including financial statements, both in the form of annual reports and other periodic reports according to the method and time determined in the articles of association whenever requested by the Commissioners;
7. Preparing the complete organizational structure of the Company along with task details;
8. The Board of Directors may appoint experts or consultants to perform part of the Company's duties, and they cannot be appointed as employees or officers within the company, taking into account applicable laws and regulations;
9. The Board of Directors may appoint experienced personnel (Special Hire) as officers within the company, while still adhering to applicable laws and regulations;
10. Executing other obligations in accordance with the Company's Articles of Association.

Rights and Authorities of the Board of Directors

In executing its duties and responsibilities, the Board of Directors possesses rights and authorities including:

1. Establishing policies in leadership and management;

2. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk menetapkan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan;
3. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan/atau Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku;
4. Mengangkat Sekertaris dan Komite-Komite Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan usulan Komisaris, dan kriteria dari anggota komite adalah berintegritas dan jujur serta memiliki pengalaman di bidang perbankan, keuangan dan hukum serta ekonomi baik praktisi maupun akademisi. Khusus Sekretaris diwajibkan dari seorang Pegawai dalam Perseroan;
5. Mengatur pendelegasian kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perseroan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada badan lain;
6. Menghapusbukukan piutang macet yang selanjutnya mendapat persetujuan Komisaris;
7. Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan, sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Rapat Komisaris dengan memperhatikan perundangundangan yang berlaku.

Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan Anggota Direksi ditetapkan RUPS yaitu selama 4 (empat) tahun. Setelah masa jabatannya berakhir, Anggota Direksi dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Kriteria Direksi

Sesuai ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum, Anggota Direksi Bank Sulteng wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan, yang terdiri dari Persyaratan Umum, Persyaratan Khusus dan Persyaratan lainnya.

Persyaratan Umum Direksi antara lain mencakup sebagai warga negara Indonesia, sehat jasmani dan rohani, cakap melakukan perbuatan hukum, dan tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan negara atau tindakan tercela di bidang keuangan dan perbankan. Sedangkan persyaratan Khusus Direksi antara lain meliputi memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang perbankan, keuangan/akuntansi, hukum atau manajemen risiko, tidak

2. Regulating provisions regarding the Company's personnel, including determining salaries, pensions, or old-age security, and other income for Company employees;
3. Appointing and dismissing Company employees based on the Company's personnel regulations and/or applicable Labor Regulations;

4. Appointing the Secretary and Board of Commissioners' Committees by considering the proposals of the Commissioners, and the criteria for committee members are that they must have integrity, be honest, and possess experience in the fields of banking, finance, law, and economics, whether as practitioners or academics. Specifically, the Secretary must be an Employee within the Company;
5. Regulating the delegation of the Board of Directors' authority to represent the Company inside and outside the court to one or several members of the Board of Directors specifically appointed for that purpose, or to one or several Company employees, either individually or jointly, or to other entities;

6. Writing off bad debts, which subsequently requires the approval of the Commissioners;
7. Executing other actions, regarding both management and ownership, in accordance with the provisions further regulated by the Board of Commissioners' Meeting by observing applicable laws and regulations.

Term of Office of the Board of Directors

The term of office of Members of the Board of Directors is determined by the GMS, which is for 4 (four) years. After their term of office ends, Members of the Board of Directors may be reappointed by observing the provisions of the Articles of Association without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time.

Criteria for the Board of Directors

In accordance with the provisions of Article 27 Paragraph (1) of Bank Indonesia Regulation Number 11/1/PBI/2009 concerning Commercial Banks, Members of the Board of Directors of Bank Sulteng are required to meet the requirements of integrity, competence, and financial reputation, which consist of General Requirements, Specific Requirements, and Other Requirements.

General Requirements for the Board of Directors include being an Indonesian citizen, physically and mentally healthy, capable of performing legal acts, and never having committed activities detrimental to the state or reprehensible actions in the financial and banking sector. Meanwhile, Specific Requirements for the Board of Directors encompass possessing knowledge and/or experience in the fields of banking, finance/accounting, law, or risk management; not being

termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pengurus bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan dan lulus *fit and proper test* yang ditetapkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Sedangkan terkait persyaratan lainnya, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud di atas terjadi setelah pengangkatan sebagai anggota Direksi, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari RUPS;
2. Anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau sesama anggota Direksi;
3. Calon anggota Direksi hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat eksekutif pada satu lembaga/ perusahaan bukan lembaga keuangan;
4. Tidak termasuk rangkap jabatan, apabila anggota Direksi:
   a. Menjalankan tugas fungsional pengawasan dari pemilik bank yang berbentuk badan hukum, atau
   b. Merangkap jabatan pada organisasi atau lembaga lainnya, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi
5. Calon anggota Direksi dilarang menjadi pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan.

Proses Nominasi dan Pemilihan Direksi

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS setelah melalui proses uji kemampuan dan kepatutan *(fit and proper test)* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG. Setelah melalui proses *fit and proper test* yang dilakukan oleh OJK dan dinyatakan lulus maka calon anggota Direksi selanjutnya diangkat oleh RUPS. Dengan demikian seluruh anggota Direksi Bank Sulteng diwajibkan untuk memiliki kompetensi, integritas, dan reputasi yang memadai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Komposisi dan Pembagian Tugas Direksi

Komposisi dan jumlah Direksi ditetapkan RUPS dengan memperhatikan visi, misi, dan rencana strategis Perusahaan sehingga memungkinkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan Direksi secara

included in the list of persons prohibited from becoming bank administrators determined by Bank Indonesia or the Financial Services Authority; and passing the fit and proper test established by Bank Indonesia and the Financial Services Authority.

Regarding other requirements, they can be explained as follows:

1. If the family relationship referred to above occurs after the appointment as a member of the Board of Directors, a written permission from the GMS is required to continue their position;
2. Members of the Board of Directors are prohibited from having family relationships up to the second degree with members of the Board of Commissioners and/or fellow members of the Board of Directors;
3. Candidates for members of the Board of Directors may only hold concurrent positions as members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Executive Officers in one non-financial institution/company;
4. Not considered concurrent positions, if the member of the Board of Directors:
   a. Performs functional supervisory duties from the bank's owners in the form of a legal entity, or
   b. Holds concurrent positions in other organizations or institutions, provided that the person concerned does not neglect the execution of duties and responsibilities as a member of the Board of Directors.
5. Candidates for members of the Board of Directors are prohibited from becoming administrators of political parties, evidenced by a statement letter from the person concerned.

Nomination and Election Process of the Board of Directors

In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, Members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the GMS after undergoing a fit and proper test process according to the provisions of applicable laws and regulations and GCG principles. After going through the fit and proper test process conducted by the OJK and being declared passed, candidates for members of the Board of Directors are subsequently appointed by the GMS. Thus, all members of the Board of Directors of Bank Sulteng are required to possess adequate competence, integrity, and reputation in executing their duties and responsibilities.

Composition and Division of Tasks of the Board of Directors

The composition and number of the Board of Directors are determined by the GMS by considering the vision, mission, and strategic plans of the Company, enabling the decision-making process to be executed by the

cepat, tepat, efektif dan efisien dengan tetap menjaga independensi.

Board of Directors swiftly, accurately, effectively, and efficiently while maintaining independence.

Berikut ini komposisi Direksi Bank Sulteng sampai dengan 31 Desember 2025 yaitu sebagai berikut:

The following is the composition of the Board of Directors of Bank Sulteng up to December 31, 2025:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Akta Penunjukan** Deed of Appointment	**Periode Jabatan** Period
Hj. Ramiyatie	Direktur Utama Director Main	Akta Berita Acara RUPSLB No. 23 tanggal 12 Februari 2024 Deed of EGMS Minutes No. 23 dated February 12, 2024 SK Gubernur Sulawesi Tengah Selaku PSP No. 900.1.13.2/36/RO-EKON-G.ST/2024 Decree of the Governor of Central Sulawesi as PSP No. 900.1.13.2/36/RO-EKON-G.ST/2024	2024-2028
Myrna Rianasari	Direktur Bisnis Business Director	Akta Berita Acara RUPSLB No. 16 tanggal 14 Maret 2023 (Periode Pertama) Deed of EGMS Minutes No. 16 dated March 14, 2023 (First Period) SK Gubernur Sulawesi Tengah Selaku PSP No. 002/SK/RUPSLB-ST/III/2023 Decree of the Governor of Central Sulawesi as PSP No. 002/SK/RUPSLB-ST/III/2023	2022-2026
Judy Koagow	Direktur Kepatuhan Compliance Director	Akta Berita Acara RUPSLB No. 53 tanggal 29 Mei 2023 (Periode Kedua) Deed of EGMS Minutes No. 53 dated May 29, 2023 (Second Period) SK Gubernur Sulawesi Tengah Selaku PSP No. 900.1.13.2/37/RO.EKON-G.ST.2024 Decree of the Governor of Central Sulawesi as PSP No. 900.1.13.2/37/RO.EKON-G.ST.2024	2024-2028

Direksi melakukan pengaturan terkait pembidangan tugas rutin Direksi sebagaimana tujuan dan fungsi masing-masing Direktur dalam rangka mendukung pelaksanaan GCG sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dapat berjalan dengan efektif.

The Board of Directors manages the arrangements related to the routine task division of the Board of Directors according to the objectives and functions of each Director to support the implementation of GCG so that the execution of the duties and responsibilities of the Board of Directors runs effectively.

Direksi menetapkan pembagian tugas dan pelimpahan wewenang Direksi sebagai berikut:

The Board of Directors establishes the division of tasks and delegation of authority of the Board of Directors as follows:

Nama Name	**Pembagian Tugas**	Division of Tasks
Hj. Ramiyatie	Direktur Utama, memiliki tugas yaitu: 1. Tercapainya kegiatan pengelolaan pemeriksaan (audit) yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang berlaku; 2. Terciptanya sistem pengendalian intern yang efektif; 3. Terpenuhinya SDM yang profesional dan berintegritas tinggi; 4. Terlaksananya pembinaan terhadap operasional dan bisnis cabang dan cabang pembantu berdasarkan usulan dari satuan kerja yang membidangi pembinaan cabang.	The President Director has the following duties: 1. The achievement of audit management activities carried out in accordance with applicable policies, provisions, systems and procedures; 2. The creation of an effective internal control system; 3. Fulfillment of professional human resources with high integrity; 4. Implementation of guidance on the operations and business of branches and sub-branches based on proposals from the work unit in charge of branch development.
Myrna Rianasari	Direktur Bisnis, memiliki tugas yaitu: 1. Tercapainya peningkatan volume bisnis; 2. Tercapainya peningkatan pendanaan/*fee-based income*; 3. Tercapainya peningkatan Volume Transaksi Digital; 4. Menjaga Kualitas kredit *Non-Performing Loan* menjadi *Performing Loan*.	The Business Director, has the duties of: 1. Achieved an increase in business volume; 2. Achieved an increase in funding/fee-based income; 3. Achieved increase in Digital Transaction Volume; 4. Maintain the quality of Non-Performing Loan to Performing Loan.
Judy Koagow	Direktur Kepatuhan, memiliki tugas yaitu: 1. Tercapainya pelaksanaan kepatuhan di Bank Sulteng; 2. Tercapainya penurunan rasio jumlah sanksi denda dari regulator; 3. Tercapainya persentase yang ditetapkan tentang penyelesaian perkara lebih baik dari tahun sebelumnya.	The Compliance Director has the following duties: 1. Achieving compliance implementation in Bank Sulteng; 2. Achieved a reduction in the ratio of the number of regulatory fines; 3. Achieved the set percentage of case resolution better than the previous year.

Hubungan Afiliasi Direksi

Berikut ini informasi terkait hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali, yaitu sebagai berikut:

Affiliation Relationships of the Board of Directors

The following is information related to affiliation relationships among members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Controlling Shareholders:

Nama Name	Hubungan Afiliasi Keluarga dengan Relationship between Family Affiliation with						Hubungan Afiliasi Keuangan dengan Financial Affiliation Relationship with					
	Direksi Directors		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders		Direksi Directors		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Hj. Ramiyatie		√		√		√		√		√		√
Myrna Rianasari		√		√		√		√		√		√
Judy Koagow		√		√		√		√		√		√

Rangkap Jabatan Direksi

Bank Sulteng menetapkan auran mengenai rangkap jabatan Direksi mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum sebagai berikut:

1. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan:
   a. Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain;
   b. pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
   c. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi; dan/atau
   d. pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal anggota Direksi:
   a. bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
   b. bertanggung jawab terhadap pengawasan dana pensiun atau menjalankan tugas sebagai dewan pengawas dana pensiun, yang dimiliki oleh Bank;
   c. melaksanakan tugas sebagai direktur pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b; dan/atau
   d. menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba

Concurrent Positions of the Board of Directors

Bank Sulteng establishes regulations regarding concurrent positions of the Board of Directors referring to Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks as follows:

1. Members of the Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions:
   a. As members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, members of the Sharia Supervisory Board, or executive officers in banks, companies, and/or other institutions;
   b. In functional duty areas in bank financial institutions and/or non-bank financial institutions domiciled domestically or overseas;
   c. In other positions that may create a conflict of interest in the execution of duties as members of the Board of Directors; and/or
   d. In other positions in accordance with the provisions of laws and regulations.

2. Excluded from concurrent positions as referred to in paragraph (1) if members of the Board of Directors:
   a. Are responsible for overseeing the Bank's equity participation in subsidiary companies, carrying out functional duties as members of the Board of Commissioners in non-bank subsidiary companies controlled by the Bank;
   b. Are responsible for overseeing the pension fund or carrying out duties as the supervisory board of the pension fund owned by the Bank;
   c. Execute duties as substitute directors as referred to in Article 14 paragraph (1) letter b; and/or
   d. Hold positions in non-profit organizations or institutions.

sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi

Anggota Direksi Bank Sulteng diwajibkan bebas dari benturan kepentingan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi adanya konflik antara kepentingan ekonomis perusahaan dan kepentingan ekonomi individu.

Direksi harus mengungkapkan mengenai benturan kepetingan maupun yang berpotensi menjadi benturan kepentingan atau segala sesuatu yang dapat menghambat Direksi untuk bertindak independen. Direksi harus mengutamakan kepentingan Bank jika terdapat benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan. Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau merugikan keuntungan Bank pada saat terjadi benturan kepentingan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. Pengungkapan benturan kepentingan dicantumkan dalam setiap risalah rapat Direksi, paling kurang mencakup nama Direksi yang memiliki benturan kepentingan, masalah benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

Dalam proses pengambilan keputusan, Direksi yang memiliki benturan kepentingan diperkenankan untuk mengungkapkan ide dan pendapat, akan tetapi tidak disertakan dalam pengambilan keputusan, baik dalam musyawarah maupun pengambilan suara terbanyak. Hal tersebut harus dicatat dalam risalah rapat Direksi. Dalam hal Bank mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Bank akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Bank diwakili oleh Dewan Komisaris.

Kepemilikan Saham Direksi

Tidak terdapat saham Bank Sulteng yang dimiliki oleh anggota Direksi. Hal ini dikarenakan Bank Sulteng tidak pernah melakukan penawaran umum saham di bursa efek, melakukan program kepemilikan saham untuk manajemen *(Management Stock Option Program/ MSOP)* maupun program kepemilikan saham oleh karyawan *(Employee Stock Option Program/ESOP).*

Provided that this does not result in the person concerned neglecting the execution of duties and responsibilities as a member of the Board of Directors.

Conflict of Interest Management of the Board of Directors

Members of the Board of Directors of Bank Sulteng are required to be free from conflicts of interest in executing their duties and responsibilities. A conflict of interest is a condition where there is a conflict between the economic interests of the company and individual economic interests.

The Board of Directors must disclose any conflict of interest or potential conflict of interest, or anything that could hinder the Board of Directors from acting independently. The Board of Directors must prioritize the interests of the Bank if there is a conflict of interest in decision-making. The Board of Directors is prohibited from taking actions that could harm the Bank or reduce the Bank's profits when a conflict of interest occurs and is required to disclose the intended conflict of interest in every decision. Disclosures of conflicts of interest are included in every minutes of the Board of Directors' meetings, comprising at least the name of the Director who has a conflict of interest, the issue of the conflict of interest, and the fundamental considerations for the decision-making.

In the decision-making process, a Director who has a conflict of interest is permitted to express ideas and opinions, but is excluded from decision-making, both in deliberations and majority voting. This must be recorded in the minutes of the Board of Directors' meeting. In the event the Bank has a conflict of interest with the personal interests of a member of the Board of Directors, the Bank will be represented by other members of the Board of Directors; and in the event the Bank has interests conflicting with the interests of all members of the Board of Directors, the Bank is represented by the Board of Commissioners.

Share Ownership of the Board of Directors

There are no Bank Sulteng shares owned by members of the Board of Directors. This is because Bank Sulteng has never conducted a public offering of shares on the stock exchange, conducted a Management Stock Option Program (MSOP), or an Employee Stock Option Program (ESOP).

Independensi Direksi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Direksi harus memegang teguh prinsip independensi dengan demikian setiap anggota Direksi bebas dari potensi terjadinya benturan kepentingan dalam menjalankan tugasnya. Melalui prinsip independensi Direksi dituntut untuk dapat bertindak sebaik-baiknya demi kepentingan Perusahaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam upaya untuk menjaga independensi Direksi, Bank Sulteng menetapkan ketentuan sebagai berikut:

1. Selain Direksi, pihak lain manapun dilarang melakukan atau campur tangan dalam kepengurusan Perseroan;
2. Direksi harus dapat mengambil keputusan secara obyektif, tanpa benturan kepentingan dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun;
3. Anggota Direksi dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus Perseroan.

Setiap anggota Direksi Ban Sulteng diwajibkan untuk menandatangani pernyataan bebas benturan kepentingan setiap tahunnya dalam rangka menjamin independensinya dan melaporkan apabila terjadi perubahan status yang mempengaruhi independensinya misalnya terkait kepemilikan saham di suatu perusahaan. Bank Sulteng juga memastikan bahwa setiap anggota Direksi tidak memiiki hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat ketiga dengan anggota Direksi lainnya dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2025, Bank Sulteng memastikan tidak terdapat situasi yang mengindikasikan adanya potensi benturan kepentingan yang dihadapi oleh anggota Direksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya termasuk dalam proses pengambilan keputusan Direksi.

Program Pengenalan (Orientasi) bagi Anggota Direksi baru

Bank Sulteng menyelenggarakan program pengenalan (orientasi) bagi Anggota Direksi yang baru yang merupakan program yang sangat penting bagi setiap anggota Direksi yang baru menjabat di Bank Sulteng yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Sekretaris Perusahaan.

Program pengenalan bagi anggota Direksi baru dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan kepada anggota Direksi terkait organisasi perusahaan, aktivitas bisnis dan rencana perusahaan ke depan,

Independence of the Board of Directors

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors must uphold the principle of independence so that each member of the Board of Directors is free from potential conflicts of interest in executing their duties. Through the principle of independence, the Board of Directors is demanded to act to the best of their abilities for the benefit of the Company in executing their duties and responsibilities.

In an effort to maintain the independence of the Board of Directors, Bank Sulteng establishes the following provisions:

1. Other than the Board of Directors, any other party is prohibited from engaging or interfering in the management of the Company;
2. The Board of Directors must be able to make decisions objectively, free from conflicts of interest and any pressure from any party;
3. Members of the Board of Directors are prohibited from engaging in activities that may interfere with their independence in managing the Company.

Every member of the Board of Directors of Bank Sulteng is required to sign a declaration of freedom from conflicts of interest annually to guarantee their independence and report any change in status that affects their independence, for instance, regarding share ownership in a company. Bank Sulteng also ensures that every member of the Board of Directors does not have a family relationship up to the third degree with other members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.

Throughout 2025, Bank Sulteng ensured there were no situations indicating potential conflicts of interest faced by members of the Board of Directors in the execution of their duties and responsibilities, including in the decision-making process of the Board of Directors.

Induction (Orientation) Program for New Members of the Board of Directors

Bank Sulteng organizes an induction (orientation) program for new Members of the Board of Directors, which is a highly essential program for every new member of the Board of Directors taking office at Bank Sulteng, the execution of which is the responsibility of the Corporate Secretary.

The induction program for new members of the Board of Directors is intended to provide knowledge to the members of the Board of Directors related to the corporate organization, business activities, and future

termasuk pedoman kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab Direksi. Pelaksanaan program pengenalan yang diberikan kepada anggota Direksi dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke kantor cabang dan pengkajian dokumen perusahaan serta program lainnya sesuai dengan kebijakan Bank Sulteng.

Berikut ini materi program pengenalan yang telah diberikan kepada anggota Direksi baru antara lain yaitu:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Bank Sulteng
2. Gambaran mengenai Bank Sulteng berkaitan dengan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalahmasalah strategis
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi.

Program Peningkatan Kompetensi Direksi

Bank Sulteng memberikan kesempatan kepada anggota Direksi untuk mengikuti program peningkatan kompetensi yang merupakan salah satu program penting bagi Direksi. Melalui program tersebut Direksi dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari aktivitas bisnis perusahaan dan pengetahuan-pengetahuan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Beberapa program peningkatan kompetensi yang telah diikuti Direksi selama tahun 2025 diantaranya yaitu:

corporate plans, including the working guidelines that constitute the duties and responsibilities of the Board of Directors. The execution of the induction program provided to members of the Board of Directors may be in the form of presentations, meetings, branch office visits, and reviews of corporate documents, as well as other programs in accordance with Bank Sulteng's policies.

The following are the induction program materials that have been provided to new members of the Board of Directors, including:

1. Implementation of GCG principles by Bank Sulteng;
2. An overview of Bank Sulteng related to its scope of activities, financial and operational performance, strategy, short-term and long-term business plans, competitive position, risks, and strategic issues;
3. Information concerning delegated authority;
4. Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Directors.

Competency Enhancement Program for the Board of Directors

Bank Sulteng provides opportunities for members of the Board of Directors to participate in competency enhancement programs, which is a vital program for the Board of Directors. Through this program, the Board of Directors can continuously update information on the latest developments in the company's business activities and other knowledge related to the execution of the duties and responsibilities of the Board of Directors.

Several competency enhancement programs attended by the Board of Directors during 2025 include:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Training/Seminar** Training/Seminar	**Penyelenggara** Organizer	**Tanggal** Date	**Tempat** Place
Hj. Ramiyatie	Direktur Utama President Director	Seminar Nasional BPDSI dan Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda National Seminar of BPDSI and National Prize Drawing for Simpeda Savings	ASBANDA	07 Agustus 2025 07 August 2025	Yogyakarta
		Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Sulteng Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT) Training for the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Bank Sulteng	Sinergi Partner Prima	23 Desember 2025 23 December 2025	Jakarta
Myrna Rianasari	Direktur Bisnis Business Director	*Workshop* Investasi Reksa Dana Bagi Bank Pembangunan Daerah Mutual Fund Investment Workshop for Regional Development Banks	PT PNM Investment Management	04 Februari 2025 04 February 2025	Jakarta
		Program Pemeliharaan Jenjang 7 Level 7 Certification Maintenance Program	Indonesian Risk Professional Association	13 Maret 2025 13 March 2025	Jakarta
		Seminar Nasional BPDSI dan Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda National Seminar of BPDSI and National Prize Drawing for Simpeda Savings	ASBANDA	24 April 2025 24 April 2025	Jayapura

Nama Name	Jabatan Position	Training/Seminar Training/Seminar	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date	Tempat Place
		Sosialisasi Rancangan POJK tentang Akses Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (RPOJK UMKM) dan Panduan Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia Socialization of the Draft OJK Regulation (RPOJK) on Access to MSME Financing and the Indonesian Banking Artificial Intelligence Governance Guidelines	OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)	21 Juni 2025 21 June 2025	Jakarta
Judy Koagow	Direktur Kepatuhan Compliance Director	*Workshop* Teknis Penyusunan Laporan Climate Risk mangement and Scenario Analysis (CRMS) OJK BPD se-indonesia Technical Workshop on Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS) Reporting for BPD across Indonesia	ASBANDA	02 Juni 2025 02 June 2025	Bandung
		Refreshment Rencana Aksi Pemulihan Recovery Plan Action Refreshment	LPS	23 – 24 Juni 2025 23 – 24 June 2025	Surabaya
		Final and Closing Ceremony TrackAML Hackthon 2.0 Final and Closing Ceremony TrackAML Hackathon 2.0	PPATK	20 Agustus 2025 20 August 2025	Jakarta
		Diskusi Progress dan Tantangan Roadmap penguatan BPD se Indonesia dan Penjelasan Tata Kelola Kecerdasan Artifisial perbankan Indonesia Discussion on Progress and Challenges of the Regional Development Bank (BPD) Strengthening Roadmap and Explanation of Indonesian Banking Artificial Intelligence Governance	ASBANDA	22 Agustus 2025 22 August 2025	Yogyakarta
		Seminar Program Eksekutif bagi BPD dengan tema : Implementasi Governance Risk and Compliance (GRC) dan perlindungan daerah (BPD) dalam rangka Akselerasi Pengembangan Bisnis dan Pembangunan daerah Executive Program Seminar for BPD: Implementation of Governance, Risk, and Compliance (GRC) and Regional Protection in the Context of Business Development and Regional Development Acceleration	ASBANDA	24 – 25 Agustus 2025 24 – 25 August 2025	Jakarta

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Anggota Direksi Bank Sulteng telah mendapatkan Sertifikasi Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum dimana Pengurus Bank (Dewan Komisaris dan Direksi) wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

Berikut ini sertifikasi Manajemen Risiko yang telah dimiliki oleh Direksi yaitu sebagai berikut:

In order to support the execution of their duties and responsibilities, Members of the Board of Directors of Bank Sulteng have obtained Risk Management Certification in accordance with the provisions stipulated in Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 11/19/PBI/2009 concerning Risk Management Certification for Commercial Bank Executives and Officers, where Bank Executives (Board of Commissioners and Board of Directors) are required to hold a Risk Management Certificate issued by a Professional Certification Agency.

The following is the Risk Management certification held by the Board of Directors:

Nama Name	Jabatan Position	Lembaga Sertifikasi Certification Body	Jenjang Level
Hj. Ramiyatie	Direktur Utama Director Main	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification Body	7
Myrna Rianasari	Direktur Bisnis Business Director	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification Body	7
Judy Koagow	Direktur Kepatuhan Compliance Director	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification Body	7

Rapat Direksi

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, Rapat Direksi adalah rapat yang dilaksanakan oleh Direksi yang dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan dimana jadwal dan agendanya dikoordinasikan oleh Sekretaris Perusahaan. Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis

Board of Directors Meeting

In accordance with the Company's Articles of Association, the Board of Directors Meeting is a meeting held by the Board of Directors that is conducted periodically at least 1 (one) time a month, where the schedule and agenda are coordinated by the Corporate Secretary. The Invitation for the Board of Directors

oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

Direksi juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan semua Anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi yang dilaksanakan secara fisik.

Direksi telah melaksanakan Rapar Direksi sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) kali selama tahun 2025 dengan agenda sebagaimana diuraikan berikut ini:

Meeting is made in writing by a member of the Board of Directors entitled to represent the Board of Directors and is delivered no later than 3 (three) days before the meeting is held, excluding the date of the invitation and the date of the meeting.

The Board of Directors may also make valid decisions without holding a Board of Directors Meeting, provided that all Members of the Board of Directors provide their approval regarding the proposed proposal in writing by signing the said approval. Decisions taken in such a manner have the same legal force as decisions validly taken in a physical Board of Directors Meeting.

The Board of Directors has convened Board of Directors Meetings for 22 (twenty-two) times throughout the year 2025, with the agendas described as follows:

No.	Tanggal Date	Agenda	Agenda
1	14 Januari 2025 January 14, 2025	Rapat pembahasan RBB bersama Divisi Perencanaan, Treasury, Kredit, Pemasaran, Operasional dan Administrasi & kebijakan kredit.	Meeting for the discussion of the Bank Business Plan (BBP) with the Planning, Treasury, Financing, Marketing, Operations, and Administration & Financing Policy Divisions.
2	15 Januari 2025 January 15, 2025	Rapat dengan agenda pembahasan RBB.	Meeting with the agenda of Bank Business Plan (BBP) discussion.
3	17 Januari 2025 January 17, 2025	Menghadiri Undangan Rapat dengan agenda pembahasan RBB.	Attending a Meeting Invitation regarding the Bank Business Plan (BBP) discussion.
4	20 Januari 2025 January 20, 2025	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Sulteng.	General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Bank Sulteng.
5	04 s/d 05 Februari 2025 February 04 to 05, 2025	Rapat Kerja Tahun 2025 PT. Bank Sulteng	2025 Annual Work Meeting of PT Bank Sulteng.
6	06 Maret 2025 March 06, 2025	Rapat dengan agenda ALCO	Meeting regarding the ALCO (Asset and Liability Committee) agenda.
7	10 April 2025 April 10, 2025	Rapat Pembahasan Maintenance Sistem BI-FAST BPD.	Meeting on the Maintenance of the BPD BI-FAST System.
8	11 April 2025 April 11, 2025	Rapat Evaluasi Kinerja bulan Maret 2025, Pembahasan ALCO, dan Isu-isu strategis lainnya.	Performance Evaluation Meeting for March 2025, ALCO Discussion, and other strategic issues.
9	24 April 2025 April 24, 2025	Rapat bersama Direktur Kepatuhan dan Dewan Komisaris dengan pembahasan kredit.	Meeting with the Compliance Director and the Board of Commissioners regarding financing discussions.
10	05 Mei 2025 May 05, 2025	Rapat Evaluasi Kinerja bulan April 2025, Pembahasan ALCO, dan Isu-isu strategis lainnya.	Performance Evaluation Meeting for April 2025, ALCO Discussion, and other strategic issues.
11	06 Mei 2025 May 06, 2025	Pertemuan dengan Pimpinan BPK Perwakilan Sulawesi Tengah.	Meeting with the Head of the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) Representative for Central Sulawesi.
12	24 Mei 2025 May 24, 2025	Rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi terkait presentasi Evaluasi Kondisi Bisnis dan Laporan Keuangan bersama PT. Parigi Aquakultura Prima & Group	Meeting with the Board of Commissioners and the Board of Directors regarding the presentation of the Business Condition Evaluation and Financial Statements with PT Parigi Aquakultura Prima & Group.
13	04 Juni 2025 June 04, 2025	Rapat Gabungan BOD dan BOC Nomor 004/DK-BPDST/UND/V/2025 perihal pembahasan Debitur inti dan Debitur bermasalah, bertempat di Kantor Cabang Jakarta.	Joint Meeting of the BOD and BOC Number 004/DK-BPDST/UND/V/2025 regarding the discussion of core customers and non-performing customers, held at the Jakarta Branch Office.
14	04 Juni 2025 June 04, 2025	Rapat PT. PAP Group bersama Dekom dan Direksi bertempat di Tangerang.	PT PAP Group Meeting with the Board of Commissioners and the Board of Directors held in Tangerang.
15	10 s/d 11 Juni 2025 June 10 to 11, 2025	Rapat Kerja PT. Bank Sulteng	PT Bank Sulteng Work Meeting.
16	24 Juni 2025 June 24, 2025	Rapat Koordinasi bersama Direksi dan Pemimpin Divisi Operasional, Kredit dan Perencanaan.	Coordination Meeting with the Board of Directors and the Division Heads of Operations, Financing, and Planning.
17	21 Juli 2025 July 21, 2025	Rapat bersama OJK terkait rapat koordinasi.	Meeting with the Financial Services Authority (OJK) regarding the coordination meeting.
18	03 September 2025 September 03, 2025	Rapat Evaluasi Kinerja bulan Agustus 2025 dan Pembahasan ALCO.	Performance Evaluation Meeting for August 2025 and ALCO Discussion.
19	25 s/d 26 Oktober 2025 October 25 to 26, 2025	PT. Mega Corpora perihal Undangan Meeting serta Peninjauan Lokasi Kantor Cabang PT. Bank Sulteng di Kota Makassar.	PT Mega Corpora regarding Meeting Invitation and Site Inspection of PT Bank Sulteng Branch Office in Makassar City.
20	03 November 2025 November 03, 2025	Rapat Kinerja Evaluasi bulan Oktober 2025 dan Pembahasan ALCO	Performance Evaluation Meeting for October 2025 and ALCO Discussion.
21	29 Desember 2025 December 29, 2025	Rapat persiapan akhir tahun 2025	2025 Year-End Preparation Meeting.
22	31 Desember 2025 December 31, 2025	Rapat Koordinas Akhir Tahun 2025	2025 Year-End Coordination Meeting.

Tingkat Kehadiran Rapat Direksi

Berikut ini tingkat kehadiran masing-masing Anggota Direksi dalam seluruh rapat yang telah dilaksanakan selama tahun 2025 yaitu sebagai berikut

Board of Directors Meeting Attendance Rate

The following is the attendance rate of each Member of the Board of Directors in all meetings held during 2025:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Percentage
Hj. Ramiyatie	Direktur Utama President Director	22	22	100%
Myrna Rianasari	Direktur Bisnis Business Director	22	22	100%
Judy Koagow	Direktur Kepatuhan Business Director	22	22	100%

Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris memiliki organ pendukung Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Organ pendukung Dewan Komisaris terdiri dari Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi yang semuanya berada di bawah Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Committees Under The Board Of Commissioners

In order to improve the effectiveness of the implementation of the oversight function, the Board of Commissioners has supporting organs tasked with assisting the Board of Commissioners in carrying out its duties and responsibilities. The supporting organs of the Board of Commissioners consist of the Secretary to the Board of Commissioners, Audit Committee, Risk Oversight Committee, and Remuneration and Nomination Committee, all of which are under the Board of Commissioners and report directly to the Board of Commissioners.

Komite Audit

Komite Audit diangkat dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Komite Audit bertanggung jawab untuk membantu tugas pengawasan Dewan Komisaris guna memastikan pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Sebagai organ pendukung Dewan Komisaris, Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi untuk melakukan pengawasan atas efektivitas sistem pengendalian intern, proses internal audit dan pelaporan keuangan, sehingga Bank dapat dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.

Audit Committee

The Audit Committee is appointed by and responsible to the Board of Commissioners. The Audit Committee is responsible for assisting the oversight duties of the Board of Commissioners to ensure that the management of the company carried out by the Board of Directors can run effectively and efficiently.

As a supporting organ of the Board of Commissioners, the Audit Committee is tasked with assisting the Board of Commissioners in carrying out its function to oversee the effectiveness of the internal control system, internal audit process, and financial reporting, so that the Bank can be managed based on the principles of transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness.

Dasar Pembentukan Komite Audit

Dewan Komisaris memiliki Komite Audit yang dibentuk berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Komite Audit bekerja secara kolektif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Pembentukan Komite Audit merupakan salah satu kewajiban Bank Sulteng sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Basis for the Establishment of the Audit Committee

The Board of Commissioners has an Audit Committee established based on the decree of the Board of Commissioners. The Audit Committee works collectively in supporting the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners. The establishment of the Audit Committee is one of Bank Sulteng's obligations in accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 17 of 2023 dated September 14, 2023, concerning the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks.

Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit

Dalam rangka mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit, dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan
2. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut diatas, Komite Audit wajib melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit terhadap:
   - Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
   - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
   - Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
   - Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Kantor Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
   - Laporan keuangan dan non keuangan yang dikeluarkan Bank baik rencana maupun realisasinya;
   - Ketaatan bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   - Pengaduan dan keluhan-keluhan yang berkaitan dengan citra bank.
   - Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Kantor Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
   - Laporan keuangan dan non keuangan yang dikeluarkan Bank baik rencana maupun realisasinya;
   - Ketaatan bank terhadap peraturan prerundang-undangan yang berlaku;
   - Pengaduan dan keluhan-keluhan yang berkaitan dengan citra bank
3. Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
4. Membuat laporan atas segala pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris setiap 3 (tiga) bulan dan setiap akhir Tahun Buku;
5. Menganalisa/mengevaluasi setiap surat/memo yang diterima/masuk terkait dengan bidang tugasnya, baik dari internal maupun eksternal bank dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris;
6. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditugaskan Dewan Komisaris yang berhubungan dengan ruang lingkup tugas Komite Audit;

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

In order to support the oversight function of the Board of Commissioners, the Audit Committee has the following duties and responsibilities:

1. To perform monitoring and evaluation of audit planning and execution, as well as monitoring the follow-up of audit findings, in order to assess the adequacy of internal controls, including the adequacy of financial reporting processes.
2. In order to perform the aforementioned duties, the Audit Committee is mandatory required to conduct monitoring and evaluation at least toward the following:
   - The execution of duties by the Internal Audit Department (SKAI);
   - The compliance of audit execution by the Public Accounting Firm with applicable auditing standards;
   - The compliance of financial statements with applicable accounting standards;
   - The implementation of follow-up actions by the Board of Directors regarding the findings of the Internal Audit Department, the Public Accounting Firm, and the supervision results of the Financial Services Authority (OJK), in order to provide recommendations to the Board of Commissioners;
   - Financial and non-financial reports issued by the Bank, regarding both plans and realizations;
   - The Bank's compliance with applicable laws and regulations;
   - Complaints and grievances related to the Bank's corporate image.
   - The implementation of follow-up actions by the Board of Directors regarding the findings of the Internal Audit Department, the Public Accounting Firm, and the supervision results of the Financial Services Authority (OJK), in order to provide recommendations to the Board of Commissioners;
   - Financial and non-financial reports issued by the Bank, regarding both plans and realizations;
   - The Bank's compliance with applicable laws and regulations;
   - Complaints and grievances related to the Bank's corporate image.
3. The Audit Committee is mandatory required to provide recommendations regarding the appointment of the Public Accountant and the Public Accounting Firm (KAP) to the Board of Commissioners to be presented at the General Meeting of Shareholders (GMS);
4. To prepare reports on all executions of its duties to the Board of Commissioners every 3 (three) months and at the end of each Fiscal Year;
5. To analyze and evaluate every letter/memorandum received/incoming related to its scope of duties, from both internal and external sources of the Bank, and report the results to the Board of Commissioners;
6. To perform other duties assigned by the Board of Commissioners related to the scope of work of the Audit Committee;

7. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Komite Audit bertanggung jawab:
   - Memantau dan mengkaji efektifitas pelaksanaan audit intern Bank;
   - Mengevaluasi kinerja SKAI & Anti *Fraud*;
   - Memastikan SKAI & Anti Fraud melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor eksternal, dan Otoritas Jasa Keuangan;
   - Memastikan SKAI & Anti Fraud bekerja secara independen;
   - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SKAI & Anti Fraud;
   - Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI & Anti Fraud;
   - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI & Anti Fraud secara keseluruhan serta penghargaan kinerja; dan
   - Memastikan SKAI & Anti Fraud menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.

Wewenang Komite Audit

Dalam rangka mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris, Komite Audit memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Mendapatkan informasi, melalui Dewan Komisaris, mengenai operasional Bank, data karyawan, dana, aset serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
2. Bekerja sama dengan Divisi Audit Internal;
3. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai penyempurnaan proses audit internal, eksternal, dan laporan keuangan Bank;
4. Melakukan evaluasi deskripsi mengenai pengendalian internal/audit yang akan dipublikasikan dalam laporan keuangan dan laporan pelaksanaan penerapan Tata Kelola;
5. Melakukan kajian atas independensi dan objektivitas auditor eksternal serta merekomendasikan auditor eksternal yang akan dipilih oleh Bank untuk mengaudit laporan keuangan Bank.

Secara umum Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil evaluasi dan semua risiko yang penting dipertimbangkan, identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian khusus dalam bidang laporan keuangan dari Direksi dan auditor eksternal, serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan manajemen risiko.

7. In performing the internal audit function, the Audit Committee is responsible for:
   - Monitoring and reviewing the effectiveness of the Bank's internal audit execution;
   - Evaluating the performance of the Internal Audit Department (SKAI) & Anti-Fraud;
   - Ensuring that the Internal Audit Department (SKAI) & Anti-Fraud maintain communication with the Board of Directors, Board of Commissioners, external auditors, and the Financial Services Authority (OJK);
   - Ensuring that the Internal Audit Department (SKAI) & Anti-Fraud operate independently;
   - Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the preparation of the audit plan, scope, and budget of the Internal Audit Department (SKAI) & Anti-Fraud;
   - Reviewing audit reports and ensuring that the Board of Directors takes necessary corrective actions promptly to address control weaknesses, fraud, issues regarding compliance with policies, laws, and regulations, or other matters identified and reported by the Internal Audit Department (SKAI) & Anti-Fraud;
   - Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the overall annual remuneration of the Internal Audit Department (SKAI) & Anti-Fraud, as well as performance awards; and
   - Ensuring that the Internal Audit Department (SKAI) & Anti-Fraud uphold high integrity in the execution of their duties.

Authority of the Audit Committee

In order to support the oversight function of the Board of Commissioners, the Audit Committee possesses the following authority:

1. Obtaining information, through the Board of Commissioners, regarding the Bank's operations, employee data, funds, assets, and other Bank resources related to the implementation of its duties;
2. Collaborating with the Internal Audit Division;
3. Providing input to the Board of Commissioners regarding improvements to the internal audit, external audit, and the Bank's financial reporting processes;
4. Conducting descriptive evaluations regarding internal control/audits to be published in the financial statements and the report on the implementation of Corporate Governance;
5. Conducting a review of the independence and objectivity of the external auditor and recommending the external auditor to be selected by the Bank to audit the Bank's financial statements.

In general, the Audit Committee is tasked with providing independent professional opinions to the Board of Commissioners based on evaluation results and all critical risks to be considered, identifying matters requiring special attention in the area of financial reporting from the Board of Directors and external auditors, as well as compliance with laws and regulations and risk management implementation.

Piagam Komite Audit

Komite Audit telah dilengkapi dengan Piagam Komite Audit yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit. Piagam Komite Audit ditetapkan Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/SK-DK/BPD-ST/2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang BPP Pedoman Kerja dan Tata Tertib Komite Dewan Komisaris.

Piagam Komite Audit memberikan pedoman bagi Komite Audit dalam menjalankan fungsi, tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya secara profesional, akuntabel, kompeten, independen dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan yang berlaku. Piagan Komite Audit merupakan dokumen formal yang menjadi acuan bagi pihak-pihak di dalam dan di luar Perusahaan dalam hubungan kerja dengan Komite Audit.

Struktur Keanggotaan Komite Audit

Sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang GCG bagi Bank Umum, jumlah anggota Komite Audit Bank Sulteng telah memenuhi persyaratan. Saat ini jumlah Anggota Komite Audit yaitu 3 (tiga) orang yang terdiri dari Komisaris Independen sebagai Ketua Komite dan 2 (dua) orang dari pihak eksternal Bank yang ahli di bidang Akuntansi/Keuangan dan Perbankan.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/SK/BPD-ST/2025 tanggal 6 Oktober 2025 tentang Susunan Komite Dewan Komisaris PT Bank Sulteng, susunan Komite Audit sampai dengan 31 Desember 2025 yaitu sebagai berikut :

1. Ketua : Novi V.B. Kaligis
2. Anggota : Max Kembuan
3. Anggota : Nurmarjani Loulembah
4. Anggota : Bill Wowor

Audit Committee Charter

The Audit Committee has been equipped with an Audit Committee Charter which serves as a guideline for the implementation of the Audit Committee's duties and responsibilities. The Audit Committee Charter was stipulated by the Board of Commissioners based on the Board of Commissioners Decree No. 002/SK-DK/BPD-ST/2024 dated October 31, 2024, concerning the Standard Operating Procedures (BPP) for Work Guidelines and Rules of Conduct for the Committees of the Board of Commissioners.
The Audit Committee Charter provides guidelines for the Audit Committee in carrying out its functions, duties, authorities, and responsibilities in a professional, accountable, competent, independent, and justifiable manner in accordance with applicable regulations. The Audit Committee Charter is a formal document that serves as a reference for internal and external parties of the Company in working relations with the Audit Committee.

Audit Committee Membership Structure

In accordance with the provisions of Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 8/4/PBI/2006 dated January 30, 2006, regarding GCG for Commercial Banks, the number of Bank Sulteng's Audit Committee members has met the requirements. Currently, the number of Audit Committee Members is 3 (three) persons consisting of an Independent Commissioner as the Committee Chairman and 2 (two) persons from external parties to the Bank who are experts in Accounting/Finance and Banking.

Pursuant to the Board of Commissioners' Resolution No. 003/SK/BPD-ST/2025 dated October 6, 2025, regarding the Composition of the Board of Commissioners Committees of PT Bank Sulteng, the composition of the Audit Committee until December 31, 2025, is as follows:

1. Chairman : Novi V.B. Kaligis
2. Member : Max Kembuan
3. Member : Nurmarjani Loulembah
4. Member : Bill Wowor

Profil Komite Audit

Profile of the Audit Committee

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Tahun Pengangkatan Year of Appointment	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
Novi V.B. Kaligis	Ketua Komite Audit Chairman of the Audit Committee	57 Tahun 57 Years	2024	Dr. Ilmu Manajemen Dr. Management Science	Direktur PT. Sentul Graha Sejahtera, Bogor (2022) Director of PT Sentul Graha Sejahtera, Bogor (2022)
Max Kembuan	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	68 Tahun 68 Years	2024	Sarjana Akuntansi Bachelor of Accounting	Direktur Utama PT. Trans Kalla Makassar (Trans Studio Mall Makassar) Director of PT. Trans Kalla Makassar (Trans Studio Mall Makassar)
Nurmarjani Loulembah	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	53 Tahun 53 Years	2022	S1 Ekonomi Manajemen Bachelor of Economics Management	Sub Branch Manager Cabang Pembantu Palu Barat PT Bank Muamalat Indonesia Sub Branch Manager West Palu Sub-Branch PT Bank Muamalat Indonesia
James Adolf Nelson Rompas	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	69 Tahun 69 Years	2025	S1 Ilmu Sosial Bachelor's in Social Sciences	Owner/Direktur CV. Lifansa Membangun Owner/Director of CV. Lifansa Membangun

Independensi Komite Audit

Bank Sulteng memastikan seluruh anggota Komite Audit dapat bersikap independen dan senantiasa menjaga independensinya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya karena Komite Audit memiliki peran penting untuk memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris. Anggota Komite Audit merupakan anggota yang independen dan tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Perusahaan.

Seluruh Anggota Komite Audit Bank Sulteng saat ini berasal dari pihak independen dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga baik dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali maupun hubungan dengan Perusahaan sehingga dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Berikut ini diuraikan aspek independensi yang harus dimiliki anggota Komite Audit:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan maupun perusahaan afiliasi;
3. Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan;
4. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit;
5. Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah.

Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2025

Rencana kerja Komite Audit disusun untuk digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Komite Audit dalam rangka mendukung tugas pengawasan Dewan Komisaris. Untuk tahun 2025 rencana kerja Komite Audit meliputi:

1. Evaluasi Kinerja Komite Audit Tahun 2024
2. Evaluasi Komitmen Bank terhadap pelaksanaan tindaklanjut oleh Direksi atas hasil pemeriksaan Intern SKAI, Ekstern AP/KAP dan OJK.
3. Memantau dan mengevaluasi Perencanaan dan pelaksanaan Audit serta memantau tindaklanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan pelaporan keuangan.
4. Melakukan kaji ulang terhadap : Pelaksanaan tugas dan indepensi Divisi SKAI, kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan

Independence of the Audit Committee

Bank Sulteng ensures that all members of the Audit Committee can act independently and consistently maintain their independence in carrying out their duties and responsibilities because the Audit Committee has a crucial role in providing professional and independent opinions to the Board of Commissioners. Audit Committee members are independent members and do not have personal interests/affiliations that could cause negative impacts and conflicts of interest towards the Company.

All current Audit Committee Members of Bank Sulteng are from independent parties and have no financial, management, share ownership, and/or familial relationships with the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or Controlling Shareholders, nor relationships with the Company that could affect their ability to act independently.

The following describes the independence aspects that must be possessed by Audit Committee members:

1. No financial relationship with the Board of Commissioners and the Board of Directors;
2. No management relationship within the company or affiliated companies;
3. No share ownership relationship within the company;
4. No family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow Audit Committee members;
5. Not serving as an official of a political party, government official, or public official.

Audit Committee Work Plan for 2025

The Audit Committee's work plan is prepared to be used as a reference in carrying out the Audit Committee's duties and responsibilities in order to support the Board of Commissioners' oversight duties. For the year 2025, the Audit Committee's work plan includes:

1. 2024 Audit Committee Performance Evaluation
2. Evaluation of the Bank's Commitment to the implementation of follow-up actions by the Board of Directors regarding the results of audits from the Internal Audit (SKAI), External Auditor (AP/KAP), and the Financial Services Authority (OJK).
3. Monitoring and evaluating the Planning and execution of Audits, as well as monitoring the follow-up of audit results to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of financial reporting.
4. Reviewing: The performance of duties and the independence of the Internal Audit Division (SKAI), the compliance of Financial Statements with Financial Accounting Standards,

dan kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit.
5. Mengikuti seminar dan pelatihan.

Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya, Komite Audit secara berkala menyusun dan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris. Laporan Komite Audit terdiri dari laporan yang bersifat rutin dan laporan atas setiap penugasan yang diberikan Dewan Komisaris.

Selama tahun 2025, beberapa kegiatan Komite Audit yang telah dijalankan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit, diantaranya yaitu:

1. Melakukan penelaahan atas beberapa laporan maupun hal-hal yang dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris;
2. Menyusun rekomendasi dan laporan yang ditujukan kepada Dewan Komisaris;
3. Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan unit-unit kerja di Bank Sulteng untuk berdiskusi membahas hal-hal yang sedang menjadi *current issue* di Bank Sulteng dimana terkait hasil diskusi tersebut, Komite Audit telah menyampaikan pokok-pokok pembahasan dalam bentuk *pointers meeting* yang selanjutnya dijadikan informasi/data penunjang dalam Rapat Komite Audit.

Selama tahun 2025 Komite Audit telah menyampaikan rekomendasi sebagai berikut :
1. Rekomendasi Nomor : 01/KA/DEKOM-BPD. ST/I/2025 Tanggal 02 Januari 2025 Perihal Laporan Tugas KA 2024
2. Rekomendasi Nomor : 03/KA/DEKOM-BPD. ST/I/2025 Tanggal 09 Januari 2025 Perihal Penyampaian OJK atas Recovery Plan
3. Rekomendasi Nomor : 04/KA/DEKOM-BPD. ST/I/2025 Tanggal 15 Januari 2025 Perihal Tindak Lanjut Pemeriksaan SKAI & Fraud Des 2024
4. Rekomendasi Nomor : 05/KA/DEKOM-BPD. ST/I/2025 Tanggal 21 Januari 2025 Perihal Risalah Rapat Uji Coba Terbatas QRIS BS
5. Rekomendasi Nomor : 06/KA/DEKOM-BPD. ST/I/2025 Tanggal 23 Januari 2025 Perihal Revisi RBB 2025 – 2027
6. Rekomendasi Nomor : 07/KA/DEKOM-BPD. ST/I/2025 Tanggal 31 Januari 2025 Perihal LPU KCU Buol , KCP Paleleh SI 2024
7. Rekomendasi Nomor : 08/KA/DEKOM-BPD. ST/I/2025 Tanggal 31 Januari 2025 Perihal Rekomendasi Audit TI 2024
8. Rekomendasi Nomor : 09/KA/DEKOM-BPD. ST/I/2025 Tanggal 31 Januari 2025 Perihal Kredit Posisi Des 2024

and the compliance of audits conducted by the Public Accounting Firm (KAP) with auditing standards.
5. Attending seminars and training.

Implementation of Audit Committee Duties

As a form of accountability and responsibility for the implementation of its duties, the Audit Committee periodically prepares and submits reports to the Board of Commissioners. Audit Committee reports consist of routine reports and reports on every assignment given by the Board of Commissioners.

During 2025, several Audit Committee activities have been carried out as part of the implementation of the Audit Committee's duties and responsibilities, which include:

1. Conducting reviews of several reports and matters requiring approval from the Board of Commissioners;
2. Preparing recommendations and reports addressed to the Board of Commissioners;
3. Establishing communication and coordination with work units at Bank Sulteng to discuss matters that are current issues at Bank Sulteng, where related to the results of these discussions, the Audit Committee has conveyed the main discussion points in the form of meeting pointers which are subsequently used as supporting information/data in the Audit Committee Meetings.

During 2025, the Audit Committee has submitted the following recommendations:
1. Recommendation Number: 01/KA/DEKOM-BPD. ST/I/2025 Date: January 02, 2025 Re: 2024 Audit Committee Task Report
2. Recommendation Number: 03/KA/DEKOM-BPD.ST/I/2025 Date: January 09, 2025 Re: OJK Submission regarding the Recovery Plan
3. Recommendation Number: 04/KA/DEKOM-BPD. ST/I/2025 Date: January 15, 2025 Re: Follow-up on Internal Audit (SKAI) & Fraud Inspection December 2024
4. Recommendation Number: 05/KA/DEKOM-BPD. ST/I/2025 Date: January 21, 2025 Re: Minutes of Meeting for Sharia QRIS (QRIS BS) Limited Trial
5. Recommendation Number: 06/KA/DEKOM-BPD. ST/I/2025 Date: January 23, 2025 Re: Revision of 2025 – 2027 Bank Business Plan (RBB)
6. Recommendation Number: 07/KA/DEKOM-BPD.ST/I/2025 Date: January 31, 2025 Re: Unit Implementation Report (LPU) of Buol Branch Office and Paleleh Sub-Branch Office H2 2024
7. Recommendation Number: 08/KA/DEKOM-BPD. ST/I/2025 Date: January 31, 2025 Re: 2024 IT Audit Recommendation
8. Recommendation Number: 09/KA/DEKOM-BPD. ST/I/2025 Date: January 31, 2025 Re: Financing Position as of December 2024

9. Rekomendasi Nomor : 10/KA/DEKOM-BPD.ST/II/2025 Tanggal 05 februari 2025 Perihal Lap Pokok- Hasil Audit S II 2023
10. Rekomendasi Nomor : 11/KA/DEKOM-BPD.ST/II/2025 Tanggal 05 Februari 2025 Perihal Management Letter KAP 2024
11. Rekomendasi Nomor : 12/KA/DEKOM-BPD.ST/II/2025 Tanggal 07 Februari 2025 Perihal Persetujuan Revisi RBB 2024 – 2027
12. Rekomendasi Nomor : 13/KA/DEKOM-BPD.ST/II/2025 Tanggal 10 Februari 2025 Perihal Tanggapan OJK atas hasil RUPS
13. Rekomendasi Nomor : 14/KA/DEKOM-BPD.ST/II/2025 Tanggal 17 Februari 2025 Perihal Laporan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pmeriksaan SKAi & Anti Fraud Januari 2025
14. Rekomendasi Nomor : 15/KA/DEKOM-BPD.ST/II/2025 Tanggal 17 Februari 2025 Perihal Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud Semester II 2024
15. Rekomendasi Nomor : 16/KA/DEKOM-BPD.ST/II/2025 Tanggal 17 Februari 2025 Perihal Laporan Penerapan APU & PPT 2024
16. Rekomendasi Nomor : 17/KA/DEKOM-BPD.ST/II/2025 Tanggal 20 Februari 2025 Perihal Penyampaian Revisi produk Baru RBB 2025
17. Rekomendasi Nomor : 18/KA/DEKOM-BPD.ST/II/2025 Tanggal 20 Februari 2025 Perihal Penyampaian Jadwal Audit Umum S II 2024
18. Rekomendasi Nomor : 19/KA/DEKOM-BPD.ST/III/2025 Tanggal 07 Maret 2025 Perihal Optimalisasi Penyelesaian Kredit Bermasalah
19. Rekomendasi Nomor : 20/KA/DEKOM-BPD.ST/III/2025 Tanggal 11 Maret 2025 Perihal Laporan atas Laporan Audit 2024
20. Rekomendasi Nomor : 21/KA/DEKOM-BPD.ST/III/2025 Tanggal 12 Maret 2025 Perihal Laporan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pmeriksaan SKAi & Anti Fraud Februari 2025
21. Rekomendasi Nomor : 22/KA/DEKOM-BPD.ST/III/2025 Tanggal 20 Maret 2025 Perihal Kredit Posisi januari dan februari 2025
22. Rekomendasi Nomor : 23/KA/DEKOM-BPD.ST/III/2025 Tanggal 20 Maret 2025 Perihal Laporan Keuangan Februari 2025
23. Rekomendasi Nomor : 24/KA/DEKOM-BPD.ST/III/2025 Tanggal 21 Maret 2025 Perihal Persetujuan OJK Atas Recovery Plan 2024
24. Rekomendasi Nomor : 25/KA/DEKOM-BPD.ST/III/2025 Tanggal 21 Maret 2025 Perihal Penyesuaian OJK Atas Recovery Plan 2024
25. Rekomendasi Nomor : 26/KA/DEKOM-BPD.ST/III/2025 Tanggal 24 Maret 2025 Perihal LPU KCP Labean S II 2024
26. Rekomendasi No.27/KA/DEKOM-BPD.ST/IV/2025 Tanggal 15 April 2025 Perihal Laporan Tindak Lanjut Temuan SKAI & Anti Fraud
27. Rekomendasi No.28/KA/DEKOM-BPD.ST/IV/2025 Tanggal 15 April 2025 Perihal Peningkatan Tata Kelola TI dan Siber Bank Sulteng

9. Recommendation Number: 10/KA/DEKOM-BPD.ST/II/2025 Date: February 05, 2025 Re: Principal Report – Audit Results H2 2023
10. Recommendation Number: 11/KA/DEKOM-BPD.ST/II/2025 Date: February 05, 2025 Re: 2024 Public Accounting Firm (KAP) Management Letter
11. Recommendation Number: 12/KA/DEKOM-BPD.ST/II/2025 Date: February 07, 2025 Re: Approval of 2024 – 2027 RBB Revision
12. Recommendation Number: 13/KA/DEKOM-BPD.ST/II/2025 Date: February 10, 2025 Re: OJK Response to General Meeting of Shareholders (GMS) results
13. Recommendation Number: 14/KA/DEKOM-BPD.ST/II/2025 Date: February 17, 2025 Re: Follow-up Report on Internal Audit (SKAI) & Anti-Fraud Inspection Findings January 2025
14. Recommendation Number: 15/KA/DEKOM-BPD.ST/II/2025 Date: February 17, 2025 Re: Anti-Fraud Strategy Implementation Report H2 2024
15. Recommendation Number: 16/KA/DEKOM-BPD.ST/II/2025 Date: February 17, 2025 Re: 2024 AML/CFT (APU & PPT) Implementation Report
16. Recommendation Number: 17/KA/DEKOM-BPD.ST/II/2025 Date: February 20, 2025 Re: Submission of New Product Revision for 2025 RBB
17. Recommendation Number: 18/KA/DEKOM-BPD.ST/II/2025 Date: February 20, 2025 Re: Submission of General Audit Schedule H2 2024
18. Recommendation Number: 19/KA/DEKOM-BPD.ST/III/2025 Date: March 07, 2025 Re: Optimization of Non-Performing Financing Settlement
19. Recommendation Number: 20/KA/DEKOM-BPD.ST/III/2025 Date: March 11, 2025 Re: Report on the 2024 Audit Report
20. Recommendation Number: 21/KA/DEKOM-BPD.ST/III/2025 Date: March 12, 2025 Re: Follow-up Report on Internal Audit (SKAI) & Anti-Fraud Inspection Findings February 2025
21. Recommendation Number: 22/KA/DEKOM-BPD.ST/III/2025 Date: March 20, 2025 Re: Financing Position for January and February 2025
22. Recommendation Number: 23/KA/DEKOM-BPD.ST/III/2025 Date: March 20, 2025 Re: February 2025 Financial Statement
23. Recommendation Number: 24/KA/DEKOM-BPD.ST/III/2025 Date: March 21, 2025 Re: OJK Approval of 2024 Recovery Plan
24. Recommendation Number: 25/KA/DEKOM-BPD.ST/III/2025 Date: March 21, 2025 Re: OJK Adjustment of 2024 Recovery Plan
25. Recommendation Number: 26/KA/DEKOM-BPD.ST/III/2025 Date: March 24, 2025 Re: Unit Implementation Report (LPU) of Labean Sub-Branch Office H2 2024
26. Recommendation No. 27/KA/DEKOM-BPD.ST/IV/2025 Date: April 15, 2025 Re: Follow-up Report on Internal Audit (SKAI) & Anti-Fraud Findings
27. Recommendation No. 28/KA/DEKOM-BPD.ST/IV/2025 Date: April 15, 2025 Re: Improvement of IT Governance and Cyber Security for Bank Sulteng

28. Rekomendasi No.29/KA/DEKOM-BPD.ST/IV/2025 Tanggal 29 April 2025 Perihal Kredit Posisi maret 2025
29. Rekomendasi No.30/KA/DEKOM-BPD.ST/IV/2025 Tanggal 29 April 2025 Perihal Dokumen Akhir penyesuaian RBB 2025 – 2027
30. Rekomendasi No.31/KA/DEKOM-BPD.ST/IV/2025 Tanggal 30 April 2025 PerihalLPU KC Palu Barat & KC Sigi S II 2024
31. Rekomendasi No.32/KA/DEKOM-BPD.ST/V/2025 Tanggal 06 Mei 2025 Perihal Hasil Investigasi terjadinya Fraud pada KC Palu Barat
32. Rekomendasi No.33/KA/DEKOM-BPD.ST/V/2025 Tanggal 08 Mei 2025 Perihal Kinerja Keuangan TW I 2025
33. Rekomendasi No.34/KA/DEKOM-BPD.ST/V/2025 Tanggal 09 Mei 2025 Perihal Penegasan atas Fraud & Kejahatan Perbankan
34. Rekomendasi No.35/KA/DEKOM-BPD.ST/V/2025 Tanggal 21 Mei 2025 Perihal Kredit Posisi April 2025
35. Rekomendasi No.36/KA/DEKOM-BPD.ST/V/2025 Tanggal 26 Mei 2025 Perihal Respon OJK Atas Laporan Tata kelola Tahun 2024
36. Rekomendasi No.37/KA/DEKOM-BPD.ST/V/2025 Tanggal 26 Mei 2025 Perihal Ketidaksesuaian Data laporan Debitur SLIK S II 2024
37. Rekomendasi No.38/KA/DEKOM-BPD.ST/V/2025 Tanggal 26 Mei 2025 Perihal Teguran Keterlambatan laporan Bulanan BI
38. Rekomendasi No.39/KA/DEKOM-BPD.ST/V/2025 Tanggal 27 Mei 2025 Perihal Tanggapan OJK Atas Laporan Tahunan 2024 & Laporan Berkelanjutan 2024
39. Rekomendasi No.40/KA/DEKOM-BPD.ST/VI/2025 Tanggal 11 Juni 2025 Perihal Peningkatan Ketahanan & Keamnana Siber Bank
40. Rekomendasi No.40.a/KA/DEKOM-BPD.ST/VI/2025 Tanggal 11 Juni 2025 Perihal Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP)
41. Rekomendasi No.41/KA/DEKOM-BPD.ST/VI/2025 Tanggal 13 Juni 2025 Perihal Laporan Strategi Anti Fraud
42. Rekomendasi No.42/KA/DEKOM-BPD.ST/VI/2025 Tanggal 13 Juni 2025 Perihal Evaluasi Kualitas Kredit Debitur Inti
43. Rekomendasi No.43/KA/DEKOM-BPD.ST/VII/2025 Tanggal 20 Juni 2025 Perihal Kredit Posisi Mei 2025
44. Rekomendasi No.44/KA/DEKOM-BPD.ST/VII/2025 Tanggal 18 Juni 2025 Perihal Progress Sinergi Kelompok Usaha Bank dan Implementasi Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2027
45. Rekomendasi No.45/KA/DEKOM-BPD.ST/VII/2025 Tanggal 09 Juli 2025 Perihal Laporan Hasil Investigasi Terhadap Klaim Fiktif Transaksi Antar Bank Interkoneksi oleh Petugas Keluhan Nasabah Kantor Pusat
46. Rekomendasi No.46/KA/DEKOM-BPD.ST/VII/2025 Tanggal 16 Juli 2025 Perihal Laporan Tindak Lanjut Temuan SKAI & Anti Fraud

28. Recommendation No. 29/KA/DEKOM-BPD.ST/IV/2025 Date: April 29, 2025 Re: Financing Position March 2025
29. Recommendation No. 30/KA/DEKOM-BPD.ST/IV/2025 Date: April 29, 2025 Re: Final Document for 2025 – 2027 RBB Adjustment
30. Recommendation No. 31/KA/DEKOM-BPD.ST/IV/2025 Date: April 30, 2025 Re: Unit Implementation Report (LPU) of Palu Barat Branch Office & Sigi Branch Office H2 2024
31. Recommendation No. 32/KA/DEKOM-BPD.ST/V/2025 Date: May 06, 2025 Re: Results of Fraud Occurrence Investigation at Palu Barat Branch Office
32. Recommendation No. 33/KA/DEKOM-BPD.ST/V/2025 Date: May 08, 2025 Re: Q1 2025 Financial Performance
33. Recommendation No. 34/KA/DEKOM-BPD.ST/V/2025 Date: May 09, 2025 Re: Affirmation on Fraud & Banking Crimes
34. Recommendation No. 35/KA/DEKOM-BPD.ST/V/2025 Date: May 21, 2025 Re: Financing Position April 2025
35. Recommendation No. 36/KA/DEKOM-BPD.ST/V/2025 Date: May 26, 2025 Re: OJK Response to 2024 Governance Report
36. Recommendation No. 37/KA/DEKOM-BPD.ST/V/2025 Date: May 26, 2025 Re: Data Discrepancy in SLIK Debtor Report H2 2024
37. Recommendation No. 38/KA/DEKOM-BPD.ST/V/2025 Date: May 26, 2025 Re: Warning regarding Delay in BI Monthly Report
38. Recommendation No. 39/KA/DEKOM-BPD.ST/V/2025 Date: May 27, 2025 Re: OJK Response to 2024 Annual Report & 2024 Sustainability Report
39. Recommendation No. 40/KA/DEKOM-BPD.ST/VI/2025 Date: June 11, 2025 Re: Improvement of Bank Cyber Security & Resilience
40. Recommendation No. 40.a/KA/DEKOM-BPD.ST/VI/2025 Date: June 11, 2025 Re: Appointment of Public Accounting Firm (KAP)
41. Recommendation No. 41/KA/DEKOM-BPD.ST/VI/2025 Date: June 13, 2025 Re: Anti-Fraud Strategy Report
42. Recommendation No. 42/KA/DEKOM-BPD.ST/VI/2025 Date: June 13, 2025 Re: Evaluation of Core Debtor Financing Quality
43. Recommendation No. 43/KA/DEKOM-BPD.ST/VII/2025 Date: June 20, 2025 Re: Financing Position May 2025
44. Recommendation No. 44/KA/DEKOM-BPD.ST/VII/2025 Date: June 18, 2025 Re: Progress of Bank Business Group Synergy and Implementation of 2024 – 2027 Regional Development Bank Strengthening Roadmap
45. Recommendation No. 45/KA/DEKOM-BPD.ST/VII/2025 Date: July 09, 2025 Re: Investigation Results on Fictitious Inter-bank Interconnection Transactions by Head Office Customer Complaint Staff
46. Recommendation No. 46/KA/DEKOM-BPD.ST/VII/2025 Date: July 16, 2025 Re: Follow-up Report on Internal Audit (SKAI) & Anti-Fraud Findings

47. Rekomendasi No.47/KA/DEKOM-BPD.ST/VII/2025 Tanggal 10 Juli 2025 Perihal Persetujuan Pengusulan Pimpinan Divisi SKAI
48. Rekomendasi No.48/KA/DEKOM-BPD.ST/VII/2025 Tanggal 18 Juli 2025 Perihal Kredit Posisi Juni 2025
49. Rekomendasi No.49/KA/DEKOM-BPD.ST/VII/2025 Tanggal 22 Juli 2025 Perihal Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
50. Rekomendasi No.50/KA/DEKOM-BPD.ST/VII/2025 Tanggal 23 Juli 2025 Perihal Penyampaian Jadwal Audit Umum Smester II 2024
51. Rekomendasi No.51/KA/DEKOM-BPD.ST/VII/2025 Tanggal 29 Juli 2025 Perihal Perubahan RBB Tahun 2025 – 2027
52. Rekomendasi No.52/KA/DEKOM-BPD.ST/VII/2025 Tanggal 29 Juli 2025 Perihal Ketidaksesuaian Data Laporan Debitur SLIK Semester I 2025
53. Rekomendasi No.53/KA/DEKOM-BPD.ST/VIII/2025 Tanggal 01 Agustus 2025 Perihal Laporan Pemeriksaan KC Banggai Laut dan KC Salakan
54. Rekomendasi No.54/KA/DEKOM-BPD.ST/VIII/2025 Tanggal 05 Agustus 2025 Perihal Persetujuan Penyesuaian Perubahan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2025 – 2027
55. Rekomendasi No.55/KA/DEKOM-BPD.ST/VIII/2025 Tanggal 11 Agustus 2025 Perihal Laporan Rekapitulasi Tindaklanjut Temuan Hasil Pemeriksaan SKAI & Anti Fraud
56. Rekomendasi No.56/KA/DEKOM-BPD.ST/VIII/2025 Tanggal 28 Agustus 2025 Perihal Laporan Pemeriksaan KC Jakarta, KC Bungku dan KC Ampana
57. Rekomendasi No.57/KA/DEKOM-BPD.ST/IX/2025 Tanggal 02 September 2025 Perihal Laporan Pemeriksaan KC Labean, KC Toli-toli S II 2024
58. Rekomendasi No.58/KA/DEKOM-BPD.ST/IX/2025 Tanggal 02 September 2025 Perihal Evaluasi Perkreditan Posisi Juli 2025
59. Rekomendasi No.59/KA/DEKOM-BPD.ST/IX/2025 Tanggal 18 September 2025 Perihal Evaluasi Perkreditan Posisi Agustus 2025
60. Rekomendasi No.60/KA/DEKOM-BPD.ST/IX/2025 Tanggal 23 September 2025 Perihal Surat Ke Bank Mega Tentang Pemenuhan Posisi Dewan Komisaris dan Direksi
61. Rekomendasi No.61/KA/DEKOM-BPD.ST/IX/2025 Tanggal 29 September 2025 Perihal Penyampaian OJK atas Pemanfaatan Sistem Informasi Pelaku di Sektor Jasa Keuangan (SIPELAKU)
62. Rekomendasi No.62/KA/DEKOM-BPD.ST/X/2025 Tanggal 02 Oktober 2025 Perihal Laporan Rekapitulasi Tindaklanjut Temuan Hasil Pemeriksaan SKAI & Anti Fraud
63. Rekomendasi No.63/KA/DEKOM-BPD.ST/X/2025 Tanggal 03 Oktober 2025 Perihal Tanggapan OJK Atas Permohonan Penyelenggaraan Aktivitas Baru
64. Rekomendasi No.64/KA/DEKOM-BPD.ST/X/2025 Tanggal 07 Oktober 2025 Perihal Laporan Tugas Komite Audit TW III Tahun 2025

47. Recommendation No. 47/KA/DEKOM-BPD.ST/VII/2025 Date: July 10, 2025 Re: Approval of Internal Audit (SKAI) Division Head Nomination
48. Recommendation No. 48/KA/DEKOM-BPD.ST/VII/2025 Date: July 18, 2025 Re: Financing Position June 2025
49. Recommendation No. 49/KA/DEKOM-BPD.ST/VII/2025 Date: July 22, 2025 Re: Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM) Report
50. Recommendation No. 50/KA/DEKOM-BPD.ST/VII/2025 Date: July 23, 2025 Re: Submission of General Audit Schedule H2 2024
51. Recommendation No. 51/KA/DEKOM-BPD.ST/VII/2025 Date: July 29, 2025 Re: Change in 2025 – 2027 Bank Business Plan (RBB)
52. Recommendation No. 52/KA/DEKOM-BPD.ST/VII/2025 Date: July 29, 2025 Re: Data Discrepancy in SLIK Debtor Report H1 2025
53. Recommendation No. 53/KA/DEKOM-BPD.ST/VIII/2025 Date: August 01, 2025 Re: Inspection Report of Banggai Laut Branch Office and Salakan Branch Office
54. Recommendation No. 54/KA/DEKOM-BPD.ST/VIII/2025 Date: August 05, 2025 Re: Approval of 2025 – 2027 Bank Business Plan (RBB) Adjustment
55. Recommendation No. 55/KA/DEKOM-BPD.ST/VIII/2025 Date: August 11, 2025 Re: Recapitulation Report of Internal Audit (SKAI) & Anti-Fraud Follow-up Findings
56. Recommendation No. 56/KA/DEKOM-BPD.ST/VIII/2025 Date: August 28, 2025 Re: Inspection Report of Jakarta Branch Office, Bungku Branch Office, and Ampana Branch Office
57. Recommendation No. 57/KA/DEKOM-BPD.ST/IX/2025 Date: September 02, 2025 Re: Inspection Report of Labean Branch Office and Toli-toli Branch Office H2 2024
58. Recommendation No. 58/KA/DEKOM-BPD.ST/IX/2025 Date: September 02, 2025 Re: Financing Evaluation as of July 2025
59. Recommendation No. 59/KA/DEKOM-BPD.ST/IX/2025 Date: September 18, 2025 Re: Financing Evaluation as of August 2025
60. Recommendation No. 60/KA/DEKOM-BPD.ST/IX/2025 Date: September 23, 2025 Re: Letter to Bank Mega regarding Fulfillment of Board of Commissioners and Directors Positions
61. Recommendation No. 61/KA/DEKOM-BPD.ST/IX/2025 Date: September 29, 2025 Re: OJK Submission regarding the Use of Financial Sector Participant Information System (SIPELAKU)
62. Recommendation No. 62/KA/DEKOM-BPD.ST/X/2025 Date: October 02, 2025 Re: Recapitulation Report of Internal Audit (SKAI) & Anti-Fraud Follow-up Findings
63. Recommendation No. 63/KA/DEKOM-BPD.ST/X/2025 Date: October 03, 2025 Re: OJK Response to Application for Implementation of New Activities
64. Recommendation No. 64/KA/DEKOM-BPD.ST/X/2025 Date: October 07, 2025 Re: Q3 2025 Audit Committee Task Report

65. Rekomendasi No.65/KA/DEKOM-BPD.ST/X/2025 Tanggal 07 Oktober 2025 Perihal Rekomendasi Kinerja Keuangan TW III Tahun 2025
66. Rekomendasi No.66/KA/DEKOM-BPD.ST/X/2025 Tanggal 10 Oktober 2025 Perihal Persetujuan Tindak Lanjut Temuan OJK Pusat atas APU PPT dan PPPSM Tahun 2025
67. Rekomendasi No.67/KA/DEKOM-BPD.ST/X/2025 Tanggal 10 Oktober 2025 Perihal Persetujuan Tindak Lanjut Temuan OJK Pusat atas APU PPT & PPPPSM point Struktur UKK APUPPT
68. Rekomendasi No.68/KA/DEKOM-BPD.ST/X/2025 Tanggal 15 Oktober 2025 Perihal Evaluasi Perkreditan Posisi September 2025
69. Rekomendasi No.68.a/KA/DEKOM-BPD.ST/X/2025 Tanggal 16 Oktober 2025 Perihal Persetujuan Pengusulan Pimpinan SKAI & Anti Fraud
70. Rekomendasi No.69/KA/DEKOM-BPD.ST/X/2025 Tanggal 20 Oktober 2025 Perihal Pemenuhan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bank Sulteng oleh OJK
71. Rekomendasi No.70/KA/DEKOM-BPD.ST/X/2025 Tanggal 23 Oktober 2025 Perihal Penegasan Optimalisasi atas Informasi Keuangan Historis Tahunan pada PT Bank Sulteng Tahun Buku 2025
72. Rekomendasi No.71/KA/DEKOM-BPD.ST/XI/2025 Tanggal 04 November 2025 Perihal Evaluasi Kualitas Governance, Risk dan Compliance Serta Kinerja PT Bank Sulteng Terhadap Kontribusi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 oleh BPKP Sulawesi Tengah
73. Rekomendasi No.72/KA/DEKOM-BPD.ST/XI/2025 Tanggal 07 November 2025 Perihal Laporan Rekapitulasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan SKAI & Anti Fraud
74. Rekomendasi No.73/KA/DEKOM-BPD.ST/XI/2025 Tanggal 11 November 2025 Perihal Laporan Kinerja Keuangan dibandingkan dengan Realisasi RBB TW III Tahun 2025
75. Rekomendasi No.74/KA/DEKOM-BPD.ST/XI/2025 Tanggal 12 November 2025 Perihal Informasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank PT Bank Sulteng Periode Semster I Tahun 2025
76. Rekomendasi No.75/KA/DEKOM-BPD.ST/XI/2025 Tanggal 12 November 2025 Perihal Tanggapan Atas Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin SKAI & Anti Fraud dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK)
77. Rekomendasi No.76/KA/DEKOM-BPD.ST/XI/2025 Tanggal 13 November 2025 Perihal Laporan Pemeriksaan Umum KC Parigi Semester I Tahun 2025
78. Rekomendasi No.77/KA/DEKOM-BPD.ST/XI/2025 Tanggal 18 November 2025 Perihal Evaluasi Laporan Perkreditan PT Bank Sulteng Posisi Oktober 2025
79. Rekomendasi No.78/KA/DEKOM-BPD.ST/XI/2025 Tanggal 21 November 2025 Perihal Tanggapan OJK Atas kelengkapan Dokumen Layanan Nasabah Prioritas

65. Recommendation No. 65/KA/DEKOM-BPD.ST/X/2025 Date: October 07, 2025 Re: Q3 2025 Financial Performance Recommendation
66. Recommendation No. 66/KA/DEKOM-BPD.ST/X/2025 Date: October 10, 2025 Re: Approval of Follow-up on OJK Central Findings regarding AML/CFT (APU PPT) and APPSM 2025
67. Recommendation No. 67/KA/DEKOM-BPD.ST/X/2025 Date: October 10, 2025 Re: Approval of Follow-up on OJK Central Findings regarding AML/CFT & APPSM - UKK APUPPT Structure Point
68. Recommendation No. 68/KA/DEKOM-BPD.ST/X/2025 Date: October 15, 2025 Re: Financing Evaluation as of September 2025
69. Recommendation No. 68.a/KA/DEKOM-BPD.ST/X/2025 Date: October 16, 2025 Re: Approval of Internal Audit (SKAI) & Anti-Fraud Leadership Nomination
70. Recommendation No. 69/KA/DEKOM-BPD.ST/X/2025 Date: October 20, 2025 Re: Fulfillment of Follow-up on Bank Sulteng Inspection by OJK
71. Recommendation No. 70/KA/DEKOM-BPD.ST/X/2025 Date: October 23, 2025 Re: Affirmation on the Optimization of Annual Historical Financial Information at PT Bank Sulteng Fiscal Year 2025
72. Recommendation No. 71/KA/DEKOM-BPD.ST/XI/2025 Date: November 04, 2025 Re: Evaluation of Governance, Risk, and Compliance Quality and PT Bank Sulteng's Performance towards Regional Development Contribution of Central Sulawesi Province 2024 by BPKP Central Sulawesi
73. Recommendation No. 72/KA/DEKOM-BPD.ST/XI/2025 Date: November 07, 2025 Re: Recapitulation Report of Internal Audit (SKAI) & Anti-Fraud Follow-up Findings
74. Recommendation No. 73/KA/DEKOM-BPD.ST/XI/2025 Date: November 11, 2025 Re: Financial Performance Report compared to Q3 2025 RBB Realization
75. Recommendation No. 74/KA/DEKOM-BPD.ST/XI/2025 Date: November 12, 2025 Re: Bank Soundness Level Rating (TKS) Information for PT Bank Sulteng H1 2025
76. Recommendation No. 75/KA/DEKOM-BPD.ST/XI/2025 Date: November 12, 2025 Re: Response to Appointment and Dismissal of Internal Audit (SKAI) & Anti-Fraud Leaders and Compliance Unit (SKK)
77. Recommendation No. 76/KA/DEKOM-BPD.ST/XI/2025 Date: November 13, 2025 Re: General Inspection Report of Parigi Branch Office H1 2025
78. Recommendation No. 77/KA/DEKOM-BPD.ST/XI/2025 Date: November 18, 2025 Re: Financing Report Evaluation of PT Bank Sulteng as of October 2025
79. Recommendation No. 78/KA/DEKOM-BPD.ST/XI/2025 Date: November 21, 2025 Re: OJK Response to Priority Banking Services Document Completion

80. Rekomendasi No.79/KA/DEKOM-BPD.ST/XI/2025 Tanggal 27 November 2025 Perihal Persetujuan OJK atas Produk/Aktivitas Baru Berupa Layanan Bank Sulteng Prioritas
81. Rekomendasi No.80/KA/DEKOM-BPD.ST/XI/2025 Tanggal 27 November 2025 Perihal Pemindahan Alamat KC Kolonodale
82. Rekomendasi No.81/KA/DEKOM-BPD.ST/XI/2025 Tanggal 27 November 2025 Perihal Persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2026 – 2028
83. Rekomendasi No.82/KA/DEKOM-BPD.ST/XI/2025 Tanggal 27 November 2025 Perihal Pemberitahuan Rencana Pemindahan Alamat KC Kolonodale
84. Rekomendasi No.83/KA/DEKOM-BPD.ST/XI/2025 Tanggal 28 November 2025 Perihal Uji Coba Terbatas Smart Branch
85. Rekomendasi No.84/KA/DEKOM-BPD.ST/XII/2025 Tanggal 01 Desember 2025 Perihal Perubahan Struktur Organisasi Dan Job Description PT Bank Sulteng Tahun 2026
86. Rekomendasi No.85/KA/DEKOM-BPD.ST/XII/2025 Tanggal 03 Desember 2025 Perihal Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2026
87. Rekomendasi No.86/KA/DEKOM-BPD.ST/XII/2025 Tanggal 03 Desember 2025 Perihal Rencana Penyelenggaraan Produk Baru (RPPB) PT Bank Sulteng Tahun 2026
88. Rekomendasi No.87/KA/DEKOM-BPD.ST/XII/2025 Tanggal 08 Desember 2025 Perihal Pemenuhan Komitmen Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Khusus APUPPT OJK Pusat Posisi 31 Juli 2025
89. Rekomendasi No.88/KA/DEKOM-BPD.ST/XII/2025 Tanggal 09 Desember 2025 Perihal Laporan Implementasi dan Realisasi Layana QRIS MPM sebagai issuer dan Acquirer PT Bank Sulteng
90. Rekomendasi No.89/KA/DEKOM-BPD.ST/XII/2025 Tanggal 10 Desember 2025 Perihal Permohonan Persetujuan Kredit Hapus Buku
91. Rekomendasi No.90/KA/DEKOM-BPD.ST/XII/2025 Tanggal 12 Desember 2025 Perihal Hasil Pemeriksaan PT Bank Sulteng oleh OJK Tahun 2025
92. Rekomendasi No.91/KA/DEKOM-BPD.ST/XII/2025 Tanggal 19 Desember 2025 Perihal Laporan Rekapitulasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan SKAi & Anti Fraud
93. Rekomendasi No.92/KA/DEKOM-BPD.ST/XII/2025 Tanggal 23 Desember 2025 Perihal Evaluasi Laporan Perkreditan PT Bank Sulteng Posisi November 2025
94. Rekomendasi No.93/KA/DEKOM-BPD.ST/XII/2025 Tanggal 23 Desember 2025 Perihal Financial Integrity Rating On Money and Terorism Financing (FIR on ML/TF)
95. Rekomendasi No.94/KA/DEKOM-BPD.ST/XII/2025 Tanggal 29 Desember 2025 Perihal Laporan Pemeriksaan Umum KC Donggala, KC Posos dan KCP Tinombo Semester I Tahun 2025

80. Recommendation No. 79/KA/DEKOM-BPD.ST/XI/2025 Date: November 27, 2025 Re: OJK Approval for New Products/Activities in the form of Bank Sulteng Priority Services
81. Recommendation No. 80/KA/DEKOM-BPD.ST/XI/2025 Date: November 27, 2025 Re: Relocation of Kolonodale Branch Office Address
82. Recommendation No. 81/KA/DEKOM-BPD.ST/XI/2025 Date: November 27, 2025 Re: Approval of 2026 – 2028 Bank Business Plan (RBB)
83. Recommendation No. 82/KA/DEKOM-BPD.ST/XI/2025 Date: November 27, 2025 Re: Notification of Kolonodale Branch Office Relocation Address
84. Recommendation No. 83/KA/DEKOM-BPD.ST/XI/2025 Date: November 28, 2025 Re: Smart Branch Limited Trial
85. Recommendation No. 84/KA/DEKOM-BPD.ST/XII/2025 Date: December 01, 2025 Re: Change of Organizational Structure and Job Description of PT Bank Sulteng Year 2026
86. Recommendation No. 85/KA/DEKOM-BPD.ST/XII/2025 Date: December 03, 2025 Re: 2026 Sustainable Finance Action Plan (RAKB)
87. Recommendation No. 86/KA/DEKOM-BPD.ST/XII/2025 Date: December 03, 2025 Re: 2026 PT Bank Sulteng New Product Implementation Plan (RPPB)
88. Recommendation No. 87/KA/DEKOM-BPD.ST/XII/2025 Date: December 08, 2025 Re: Fulfillment of Commitment to Follow-up on OJK Central AML/CFT (APUPPT) Special Inspection Findings as of July 31, 2025
89. Recommendation No. 88/KA/DEKOM-BPD.ST/XII/2025 Date: December 09, 2025 Re: Implementation and Realization Report of QRIS MPM as Issuer and Acquirer for PT Bank Sulteng
90. Recommendation No. 89/KA/DEKOM-BPD.ST/XII/2025 Date: December 10, 2025 Re: Application for Financing Write-off Approval
91. Recommendation No. 90/KA/DEKOM-BPD.ST/XII/2025 Date: December 12, 2025 Re: 2025 OJK Inspection Results of PT Bank Sulteng
92. Recommendation No. 91/KA/DEKOM-BPD.ST/XII/2025 Date: December 19, 2025 Re: Recapitulation Report of Internal Audit (SKAI) & Anti-Fraud Follow-up Findings
93. Recommendation No. 92/KA/DEKOM-BPD.ST/XII/2025 Date: December 23, 2025 Re: Financing Evaluation of PT Bank Sulteng as of November 2025
94. Recommendation No. 93/KA/DEKOM-BPD.ST/XII/2025 Date: December 23, 2025 Re: Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing (FIR on ML/TF)
95. Recommendation No. 94/KA/DEKOM-BPD.ST/XII/2025 Date: December 29, 2025 Re: General Inspection Report of Donggala Branch Office, Poso Branch Office, and Tinombo Sub-Branch Office H1 2025

96. Rekomendasi No.95/KA/DEKOM-BPD.ST/XII/2025 Tanggal 30 Desember 2025 Perihal Penyampaian Penyelenggaraan Aktivitas Baru Layanan Bank Sulteng Prioritas

96. Recommendation No. 95/KA/DEKOM-BPD.ST/XII/2025 Date: December 30, 2025 Re: Submission of New Activity Implementation for Bank Sulteng Priority Services

Pelaporan Komite Audit

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit mengacu pada rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan dan berpedoman pada Piagam Komite Audit. Laporan disampaikan Komite Audit kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang berikan. Pada setiap akhir tahun Komite Audit menyampaikan laporan tahunan Komite Audit kepada Dewan Komisaris yang meliputi seluruh kegiatan Komite Audit selama 1 (satu) tahun buku.

Audit Committee Reporting

In carrying out its duties and responsibilities, the Audit Committee refers to the established annual work plan and is guided by the Audit Committee Charter. Reports are submitted by the Audit Committee to the Board of Commissioners for each given assignment. At the end of each year, the Audit Committee submits an annual Audit Committee report to the Board of Commissioners covering all Audit Committee activities for 1 (one) financial year.

Rapat Komite Audit

Rapat Komite Audit diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan. Sesuai ketentuan Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu) persen dari jumlah anggota Komite Audit termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen. Ketua Komite Audit memimpin Rapat Komite Audit. Apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir makan rapat dipimpin anggota Komite Audit lain yang merupakan Komisaris Independen.

Dalam Rapat Komite Audit, keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Komite Audit menyusun risalah Rapat Komite Audit yang di dalamnya memuat seluruh hasil rapat termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat. Risalah rapat ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali sepanjang tahun 2025. Untuk jumlah rapat dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Audit dalam Rapat Komite Audit dapat diuraikan berikut ini:

Audit Committee Meetings

Audit Committee Meetings are held at least 1 (one) time a month. In accordance with regulations, an Audit Committee Meeting can be held if attended by at least 51% (fifty-one percent) of the total Audit Committee members, including 1 (one) Independent Commissioner and 1 (one) Independent Party. The Chairman of the Audit Committee presides over the Audit Committee Meeting. If the Chairman of the Audit Committee is unable to attend, the meeting shall be chaired by another Audit Committee member who is an Independent Commissioner.
In Audit Committee Meetings, meeting decisions are made based on deliberation for consensus. The Audit Committee prepares the minutes of the Audit Committee Meeting which contain all meeting results, including if there are differences of opinion. The minutes of the meeting are signed by all Audit Committee members present to be further submitted to the Board of Commissioners.

The Audit Committee has held 7 (Seven) meetings throughout 2025. The number of meetings and the attendance rate of each Audit Committee member in the Audit Committee Meetings can be described as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Percentage
Novi V.B. Kaligis	Ketua Komite Audit Chairman of the Audit Committee	7	7	100%
Max Kembuan*	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	7	7	100%
Nurmarjani Loulembah	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	7	7	100%
James Adolf Nelson Rompas*	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	7	7	100%
Bill Wowor**	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	7	7	100%

*) menjabat mulai 6 Oktober 2025 / served until October 6, 2025
*) menjabat sampai 7 Oktober 2025 / served until October 7, 2025
**) menjabat mulai 8 Oktober 2025 / serving from October 8, 2025

Remunerasi Komite Audit

Sebagaimana tercantum dalam Surat Penugasan masing-masing anggota Komite Audit, anggota Komite Audit yang berasal dari pihak Independen (bukan Komisaris) mendapatkan remunerasi yang besarnnya ditetapkan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kemampuan Perusahaan.

Program Pengembangan Komite Audit

Komite Audit melaksanakan program pengembangan (pelatihan) guna meningkatkan kompetensi anggota Komite Audit dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit agar berjalan secara efektif. Melalui program pengembangan tersebut, Komite Audit dapat senantiasa memperbaharui perkembangan terbaru mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Berikut ini program pengembangan dalam rangka peningkatan kompetensi yang telah diikuti Komite Audit selama tahun 2025:

1. Mengikuti Dialog dan Lokakarya : Berani Harmoni Wujudkan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sulawesi Tengah Berkelanjutan dan Inklusif oleh Bank Indonesia dan ISEI Sulawesi Tengah.
2. Seminar Peluncuran Laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional (PEKKI) 2025.
3. Seminar online OJK Institut Implementasi dan Peran Industri Keuangan dalam Bisnis dan HAM.
4. Seminar online Digitalisasi Perbankan dari Dua Sudut Pandang.
5. Seminar online Strategi Aman Transaksi Kripto dan Keuangan Digital : Perlindungan Data Probasi dan Dampak Teknologi Biometrik di Indonesia.
6. Seminar online Peran GRC dalam Meningkatkan Kepercayaan Investor dan Stabilitas Sektor Keuangan.

Penilaian Kinerja Komite Audit

Secara berkala kinerja Komite Audit dinilai oleh Dewan Komisaris setiap 1 (satu) tahun sekali dengan melihat sejauh mana realisasi dan penyelesaian program kerja yang telah dilakukan oleh Komite Audit sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan Komite Audit. Sebagai bagian dari penilaian kinerja Komite Audit, Dewan Komisaris juga melihat kualitas saran, rekomendasi dan masukan yang telah disampaikan Komite Audit kepada Dewan Komisaris.

Audit Committee Remuneration

As stated in the Assignment Letter of each Audit Committee member, Audit Committee members originating from Independent parties (non-Commissioners) receive remuneration, the amount of which is determined by the Board of Commissioners taking into account the Company's capabilities.

Audit Committee Development

Program The Audit Committee implements development programs (training) to improve the competency of Audit Committee members in order to support the effective implementation of the Audit Committee's duties and responsibilities. Through these development programs, the Audit Committee can continuously update the latest developments regarding various matters related to the Company's business activities.

The following are the development programs for competency enhancement that have been attended by the Audit Committee during 2025:

1. Attending Dialogue and Workshop: "Dare to Harmony: Realizing Sustainable and Inclusive Tourism Industry and Creative Economy of Central Sulawesi" by Bank Indonesia and ISEI Central Sulawesi.
2. Seminar: Launch of the 2025 Economic, Financial Development, and International Cooperation Report (PEKKI).
3. Online Seminar: OJK Institute - Implementation and Role of the Financial Industry in Business and Human Rights.
4. Online Seminar: Banking Digitalization from Two Perspectives.
5. Online Seminar: Secure Strategies for Crypto Transactions and Digital Finance: Probation Data Protection and the Impact of Biometric Technology in Indonesia.
6. Online Seminar: The Role of GRC (Governance, Risk, and Compliance) in Enhancing Investor Confidence and Financial Sector Stability.

Audit Committee Performance Assessment

Periodically, the performance of the Audit Committee is assessed by the Board of Commissioners once every 1 (one) year by looking at the extent of the realization and completion of the work programs that have been carried out by the Audit Committee as outlined in the Audit Committee's Annual Work Plan. As part of the Audit Committee's performance assessment, the Board of Commissioners also evaluates the quality of suggestions, recommendations, and input that have been submitted by the Audit Committee to the Board of Commissioners.

Penilaian kinerja Komite Audit yang dilakukan Dewan Komisaris juga digunakan sebagai bahan pertimbangan Dewan Komisaris dalam memutuskan untuk memberhentikan atau mengangkat kembali anggota Komite Audit untuk periode jabatan berikutnya.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Komite Remunerasi dan Nominasi bertanggung jawab untuk membantu tugas pengawasan Dewan Komisaris guna memastikan pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Sebagai organ pendukung Dewan Komisaris, Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi di bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Dasar Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi

Dewan Komisaris memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi yang dibentuk berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Komite Remunerasi dan Nominasi bekerja secara kolektif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan salah satu kewajiban Bank Sulteng sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Tugas dan Tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam rangka mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:

1. Terkait dengan kebijakan remunerasi adalah:
    a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi
    b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
        1). Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
        2). Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

The Audit Committee performance assessment conducted by the Board of Commissioners is also used as material for consideration by the Board of Commissioners in deciding to dismiss or re-appoint Audit Committee members for the next term of office.

Remuneration and Nomination Committee

The Remuneration and Nomination Committee is appointed by and responsible to the Board of Commissioners. The Remuneration and Nomination Committee is responsible for assisting the oversight duties of the Board of Commissioners to ensure that the management of the company carried out by the Board of Directors can run effectively and efficiently.
As a supporting organ of the Board of Commissioners, the Remuneration and Nomination Committee is tasked with assisting the Board of Commissioners in carrying out its functions in areas related to the remuneration and nomination of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Basis for the Establishment of the Remuneration and Nomination

Committee The Board of Commissioners has a Remuneration and Nomination Committee established based on the decree of the Board of Commissioners. The Remuneration and Nomination Committee works collectively in supporting the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners. The establishment of the Remuneration and Nomination Committee is one of Bank Sulteng's obligations in accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 17 of 2023 dated September 14, 2023, concerning the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks.

Duties and Responsibilities of the Remuneration and Nomination

Committee In order to support the oversight function of the Board of Commissioners, the Remuneration and Nomination Committee has the following duties and responsibilities:

1. Related to remuneration policy:
    a. Conducting evaluations of the remuneration policy;
    b. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding:
        1). Remuneration policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors to be submitted to the General Meeting of Shareholders;
        2). Remuneration policy for Executive Officers and employees overall to be submitted to the Board of Directors.

2. Terkait dengan kebijakan nominasi adalah:
   a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
   b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
   c. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite.

3. Tugas lainnya, yaitu:
   a. Melakukan evaluasi atas pelaporan kebijakan SDM dan memberikan saran untuk perbaikan atau peningkatannya
   b. Melakukan self assessment dalam pelaksanaan tugasnya serta melaksanakan tugas khusus yang diberikan Dewan Komisaris

Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam rangka mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan komunikasi dengan Kepala Unit Kerja dan pihak-pihak lain di Perseroan untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan
2. Meminta Perseroan untuk melakukan survei sesuai kebutuhan Komite Remunerasi dan Nominasi
3. Mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya
4. Mendapatkan masukan dan atau saran dari pihak luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya.
5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi telah dilengkapi dengan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/SK-DK/BPD-ST/2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang BPP Pedoman Kerja dan Tata Tertib Komite Dewan Komisaris.

1. Related to nomination policy:
   a. Drafting and providing recommendations regarding the system and procedures for the selection and/or replacement of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders;
   b. Providing recommendations regarding candidates for members of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders;
   c. Providing recommendations regarding Independent Parties who will become Committee members.
2. Other duties, namely:
   a. Conducting evaluations on the reporting of HR policies and providing suggestions for their improvement or enhancement;
   b. Conducting self-assessments in the implementation of its duties and carrying out special duties assigned by the Board of Commissioners.

Authority of the Remuneration and Nomination Committee

In order to support the oversight function of the Board of Commissioners, the Remuneration and Nomination Committee has the following authorities:

1. Communicating with the Heads of Work Units and other parties within the Company to obtain information, clarifications, and request necessary documents and reports;
2. Requesting the Company to conduct surveys according to the needs of the Remuneration and Nomination Committee;
3. Accessing records or information about employees, funds, assets, and other company resources related to the implementation of its duties;
4. Obtaining input and/or advice from parties outside the Company related to its duties;
5. Exercising other authorities granted by the Board of Commissioners.

Remuneration and Nomination Committee Charter

The Remuneration and Nomination Committee has been equipped with a Remuneration and Nomination Committee Charter which serves as a guideline for the implementation of the duties and responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee. The Remuneration and Nomination Committee Charter was stipulated by the Board of Commissioners based on the Board of Commissioners Decree No. 002/SK-DK/BPD-ST/2024 dated October 31, 2024, concerning the Standard Operating Procedures (BPP) for Work Guidelines and Rules of Conduct for the Committees of

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan pedoman bagi Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan fungsi, tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya secara profesional, akuntabel, kompeten, independen dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan yang berlaku. Piagan Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan dokumen formal yang menjadi acuan bagi pihak-pihak di dalam dan di luar Perusahaan dalam hubungan kerja dengan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Struktur Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/SK/BPD-ST/2025 tanggal 6 Oktober 2025 tentang Susunan Komite Dewan Komisaris PT Bank Sulteng, susunan Komite Remunerasi dan Nominasi sampai dengan 31 Desember 2025 yaitu sebagai berikut:

1. Ketua : Novi V.B. Kaligis
2. Anggota : Max Kembuan
3. Anggota : I Gusti Putu Suartika

the Board of Commissioners. The Remuneration and Nomination Committee Charter provides guidelines for the Remuneration and Nomination Committee in carrying out its functions, duties, authorities, and responsibilities in a professional, accountable, competent, independent, and justifiable manner in accordance with applicable regulations. The Remuneration and Nomination Committee Charter is a formal document that serves as a reference for internal and external parties of the Company in working relations with the Remuneration and Nomination Committee.

Remuneration and Nomination Committee Membership Structure

Pursuant to the Decree of the Board of Commissioners No. 003/SK/BPD-ST/2025 dated October 6, 2025, regarding the Composition of the Board of Commissioners Committees of PT Bank Sulteng, the composition of the Remuneration and Nomination Committee through December 31, 2025, is as follows:

1. Chairman : Novi V.B. Kaligis
2. Member : Max Kembuan
3. Member : I Gusti Putu Suartika

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

Profile of the Remuneration and Nomination Committee

Nama Name	**Jabatan** Position	**Usia** Age	**Tahun Pengangkatan** Year of Appointment	**Pendidikan** Education	**Pengalaman Kerja** Work Experience
Novi V.B. Kaligis	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Chairman of the Remuneration and Nomination Committee	57 Tahun 57 Years	2024	Dr. Ilmu Komunikasi Dr. Communication Science	Direktur PT. Sentul Graha Sejahtera, Bogor (2022) Director of PT Sentul Graha Sejahtera, Bogor (2022)
Max Kembuan	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Member of Remuneration and Nomination Committee	68 Tahun 68 Years	2024	Sarjana Akuntansi Bachelor of Accounting	Direktur Utama PT. Trans Kalla Makassar (Trans Studio Mall Makassar) Director of PT. Trans Kalla Makassar (Trans Studio Mall Makassar)
I Gusti Putu Suartika	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Member of Remuneration and Nomination Committee	54 Tahun 54 Years	2022	S1 Ekonomi S1 Economics	Pemimpin Divisi SDM Bank Sulteng HR Division Leader of Bank Sulawesi

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Bank Sulteng memastikan seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dapat bersikap independen dan senantiasa menjaga independensinya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya karena Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki peran penting untuk memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan anggota yang independen dan tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Perusahaan.

Independence of the Remuneration and Nomination Committee

Bank Sulteng ensures that all members of the Remuneration and Nomination Committee can act independently and consistently maintain their independence in carrying out their duties and responsibilities because the Remuneration and Nomination Committee has a crucial role in providing professional and independent opinions to the Board of Commissioners. Remuneration and Nomination Committee members are independent members and do not have personal interests/affiliations that could cause negative impacts and conflicts of interest

Seluruh Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sulteng saat ini berasal dari pihak independen dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga baik dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali maupun hubungan dengan Perusahaan sehingga dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Berikut ini diuraikan aspek independensi yang harus dimiliki anggota Komite Remunerasi dan Nominasi:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi
2. Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan maupun perusahaan afiliasi
3. Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan
4. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
5. Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah.

Pelaksanaan Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan tugasnya dalam proses nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan serangkaian proses yang meliputi penyusunan kebijakan, kriteria, dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam rangka proses nominasi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan telaah dan memberikan rekomendasi/usulan calon yang memenuhi syarat sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Sulteng kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya disampaikan kepada RUPS. Pada tahun 2025 Komite Remunerasi dan Nominasi juga telah membantu Dewan Komisaris untuk memperoleh dan menganalisa data bakal calon Direksi dari *talent pool* pejabat satu tingkat di bawah Direksi serta mengidentifikasi calon Dewan Komisaris yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Bank Sulteng.

Komite Remunerasi dan Nominasi juga telah membantu Dewan Komisaris melakukan kajian terhadap sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris dan mengusulkan sistem remunerasi yang sesuai bagi Direksi dan Dewan Komisaris Bank Sulteng yang meliputi sistem penggajian/honorarium, fasilitas/tunjangan, tantiem, dan seterusnya untuk tahun 2025.

towards the Company. All current Remuneration and Nomination Committee Members of Bank Sulteng are from independent parties and have no financial, management, share ownership, and/or familial relationships with the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or Controlling Shareholders, nor relationships with the Company that could affect their ability to act independently.

The following describes the independence aspects that must be possessed by Remuneration and Nomination Committee members:

1. No financial relationship with the Board of Commissioners and the Board of Directors;
2. No management relationship within the company or affiliated companies;
3. No share ownership relationship within the company;
4. No family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow Remuneration and Nomination Committee members;
5. Not serving as an official of a political party, government official, or public official.

Implementation of Remuneration and Nomination Committee Duties

The Remuneration and Nomination Committee has carried out its duties in the nomination process for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Remuneration and Nomination Committee has carried out a series of processes which include formulating policies, criteria, and qualifications required in the context of the nomination process for candidates for the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Remuneration and Nomination Committee has conducted reviews and provided recommendations/proposals for candidates who meet the requirements as Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of Bank Sulteng to the Board of Commissioners to be further submitted to the General Meeting of Shareholders (GMS). In 2025, the Remuneration and Nomination Committee also assisted the Board of Commissioners in obtaining and analyzing data on prospective Board of Directors candidates from the talent pool of officials one level below the Board of Directors, as well as identifying prospective Board of Commissioners members who meet the requirements as determined by Bank Sulteng. The Remuneration and Nomination Committee also assisted the Board of Commissioners in reviewing the remuneration system for the Board of Directors and the Board of Commissioners and proposing an appropriate remuneration system for the Board of Directors and the Board of Commissioners of Bank Sulteng, which includes the salary/honorarium system, facilities/allowances, bonuses (tantiem), and so on for the year 2025.

Pelaporan Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Remunerasi dan Nominasi mengacu pada rencana kerja yang telah ditetapkan dan berpedoman pada Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi. Laporan disampaikan Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang berikan. Pada setiap akhir tahun Komite Remunerasi dan Nominasi menyampaikan laporan tahunan Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris yang meliputi seluruh kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi selama 1 (satu) tahun buku.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi memimpin Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi. Apabila Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi berhalangan hadir makan rapat dipimpin anggota Komite Remunerasi dan Nominasi lain yang merupakan Komisaris Independen.

Dalam Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Komite Remunerasi dan Nominasi menyusun risalah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi yang di dalamnya memuat seluruh hasil rapat termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat. Risalah rapat ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang hadir untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan rapat sebanyak 6 (enam) kali sepanjang tahun 2025. Untuk jumlah rapat dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dalam Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dapat diuraikan berikut ini:

Remuneration and Nomination Committee Reporting

In carrying out its duties and responsibilities, the Remuneration and Nomination Committee refers to the established work plan and is guided by the Remuneration and Nomination Committee Charter. Reports are submitted by the Remuneration and Nomination Committee to the Board of Commissioners for each assignment given. At the end of each year, the Remuneration and Nomination Committee submits an annual Remuneration and Nomination Committee report to the Board of Commissioners covering all Remuneration and Nomination Committee activities for 1 (one) financial year.

Remuneration and Nomination Committee Meetings

The Chairman of the Remuneration and Nomination Committee presides over the Remuneration and Nomination Committee Meeting. If the Chairman of the Remuneration and Nomination Committee is unable to attend, the meeting shall be chaired by another Remuneration and Nomination Committee member who is an Independent Commissioner.

In Remuneration and Nomination Committee Meetings, meeting decisions are made based on deliberation for consensus. The Remuneration and Nomination Committee prepares the minutes of the Remuneration and Nomination Committee Meeting which contain all meeting results, including if there are differences of opinion. The minutes of the meeting are signed by all Remuneration and Nomination Committee members present to be further submitted to the Board of Commissioners.
The Remuneration and Nomination Committee has held 6 (six) meetings throughout 2025. The number of meetings and the attendance rate of each Remuneration and Nomination Committee member in the Remuneration and Nomination Committee Meetings can be described as follows:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jumlah Rapat** Number of Meetings	**Jumlah Kehadiran** Total Attendance	**Persentase** Percentage
Novi V.B. Kaligis	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Chairman of the Remuneration and Nomination Committee	6	6	100%
Max Kembuan*	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Member of Remuneration and Nomination Committee	6	6	100%
I Gusti Putu Suartika	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Member of Remuneration and Nomination Committee	6	6	100%

*) menjabat mulai 6 Oktober 2025 / served until October 6, 2025

Remunerasi Komite Remunerasi dan Nominasi

Sebagaimana tercantum dalam Surat Penugasan masing-masing anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari pihak Independen (bukan Komisaris) mendapatkan remunerasi yang besarnnya ditetapkan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kemampuan Perusahaan.

Program Pengembangan Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi melaksanakan program pengembangan (pelatihan) guna meningkatkan kompetensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi agar berjalan secara efektif. Melalui program pengembangan tersebut, Komite Remunerasi dan Nominasi dapat senantiasa memperbaharui perkembangan terbaru mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Penilaian Kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Secara berkala kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi dinilai oleh Dewan Komisaris setiap 1 (satu) tahun sekali dengan melihat sejauh mana realisasi dan penyelesaian program kerja yang telah dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi. Sebagai bagian dari penilaian kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi, Dewan Komisaris juga melihat kualitas saran, rekomendasi dan masukan yang telah disampaikan Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris.

Penilaian kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi yang dilakukan Dewan Komisaris juga digunakan sebagai bahan pertimbangan Dewan Komisaris dalam memutuskan untuk memberhentikan atau mengangkat kembali anggota Komite Remunerasi dan Nominasi untuk periode jabatan berikutnya.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko diangkat dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab untuk membantu tugas pengawasan Dewan Komisaris guna memastikan pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Remuneration and Nomination Committee Remuneration

As stated in the Assignment Letter of each Remuneration and Nomination Committee member, Remuneration and Nomination Committee members originating from Independent parties (non-Commissioners) receive remuneration, the amount of which is determined by the Board of Commissioners taking into account the Company's capabilities.

Remuneration and Nomination Committee Development Program

The Remuneration and Nomination Committee implements development programs (training) to improve the competency of Remuneration and Nomination Committee members in order to support the effective implementation of the Remuneration and Nomination Committee's duties and responsibilities. Through these development programs, the Remuneration and Nomination Committee can continuously update the latest developments regarding various matters related to the Company's business activities.

Remuneration and Nomination Committee Performance Assessment

Periodically, the performance of the Remuneration and Nomination Committee is assessed by the Board of Commissioners once every 1 (one) year by looking at the extent of the realization and completion of the work programs that have been carried out by the Remuneration and Nomination Committee as outlined in the Remuneration and Nomination Committee's Work Plan. As part of the Remuneration and Nomination Committee's performance assessment, the Board of Commissioners also evaluates the quality of suggestions, recommendations, and input that have been submitted by the Remuneration and Nomination Committee to the Board of Commissioners.

The Remuneration and Nomination Committee performance assessment conducted by the Board of Commissioners is also used as material for consideration by the Board of Commissioners in deciding to dismiss or re-appoint Remuneration and Nomination Committee members for the next term of office.

Risk Oversight Committee

The Risk Oversight Committee is appointed by and responsible to the Board of Commissioners. The Risk Oversight Committee is responsible for assisting the oversight duties of the Board of Commissioners to ensure that the management of the company carried out by the Board of Directors can run effectively and efficiently. As a supporting organ of the Board of Commissioners, the Risk Oversight Committee is tasked

Sebagai organ pendukung Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi untuk melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang ditetapkan oleh Direksi.

Dasar Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Dewan Komisaris memiliki Komite Pemantau Risiko yang dibentuk berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko bekerja secara kolektif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Pembentukan Komite Pemantau Risiko merupakan salah satu kewajiban Bank Sulteng sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Tugas dan Tanggung jawab Komite Pemantau Risiko

Dalam rangka mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:

1. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun oleh Direksi mencakup:
   a. Pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi;
   b. Kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit;
   c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran pemantauan serta sistem pengendalian manajemen risiko yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan;
   d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kebijakan dan strategi manajemen risiko;
3. Mengevaluasi laporan profil risiko triwulan dan pelaksanaan proses manajemen risiko, untuk selanjutnya memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh Bank serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi atas risiko-risiko tersebut, apabila dipandang perlu Dewan Komisaris dapat memberikan masukan untuk langkah perbaikan kepada Direksi dan Jajarannya;

with assisting the Board of Commissioners in carrying out its function to evaluate the risk management policies and strategies established by the Board of Directors.

Basis for the Establishment of the Risk Oversight Committee

The Board of Commissioners has a Risk Oversight Committee established based on the decree of the Board of Commissioners. The Risk Oversight Committee works collectively in supporting the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners. The establishment of the Risk Oversight Committee is one of Bank Sulteng's obligations in accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 17 of 2023 dated September 14, 2023, concerning the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks.

Duties and Responsibilities of the Risk Oversight Committee

In order to support the oversight function of the Board of Commissioners, the Risk Oversight Committee has the following duties and responsibilities:

1. Evaluating the risk management policies and strategies developed by the Board of Directors covering:
   a. Active supervision by the Board of Commissioners and the Board of Directors;
   b. Adequacy of policies, procedures, and limit setting;
   c. Adequacy of risk identification, measurement, monitoring processes, and risk management control systems covering credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk, and compliance risk;
   d. A comprehensive internal control system.
2. Monitoring and evaluating the implementation of duties of the Risk Management Committee and the Risk Management and Compliance Unit to determine their conformity with risk management policies and strategies;
3. Evaluating quarterly risk profile reports and the implementation of the risk management process, to subsequently provide input to the Board of Commissioners on the risk conditions faced by the Bank as well as proposed steps for the mitigation of these risks; if deemed necessary, the Board of Commissioners can provide input for corrective measures to the Board of Directors and their ranks;

4. Memantau dan mengevaluasi kepatuhan sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko terhadap perjanjian dan komitmen yang dibuat Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak terkait lainnya;
5. Menganalisa/mengevaluasi setiap surat/memo yang diterima/masuk terkait dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya, baik dari intern maupun ekstern dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris;
6. Membuat laporan atas segala pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris setiap 3 (tiga) bulan dan setiap akhir tahun buku; dan
7. Melaksanakan tugas-tuga lainnya yang ditugaskan Dewan Komisaris yang berhubungan dengan ruang lingkup tugas Komite Pemantau Risiko.

Wewenang Komite Pemantau Risiko

Dalam rangka mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan komunikasi dengan Kepala Unit Kerja dan pihak-pihak lain di Perseroan untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan
2. Mengakses catatan atau informasi tentang pegawai, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya
3. Memperoleh Laporan Profil Risiko, Laporan Tingkat Kesehatan Bank, dan Laporan lainnya terkait penerapan manajemen risiko
4. Mendapatkan masukan dan/atau saran dari pihak luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya.
5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko telah dilengkapi dengan Piagam Komite Pemantau Risiko yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko. Piagam Komite Pemantau Risiko ditetapkan Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/SK-DK/BPD-ST/2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang BPP Pedoman Kerja dan Tata Tertib Komite Dewan Komisaris.

Piagam Komite Pemantau Risiko memberikan pedoman bagi Komite Pemantau Risiko dalam menjalankan fungsi, tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya secara profesional, akuntabel, kompeten, independen dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan yang berlaku. Piagan Komite Pemantau Risiko merupakan dokumen formal yang menjadi acuan bagi pihak-pihak di dalam dan di luar Perusahaan dalam hubungan kerja dengan Komite Pemantau Risiko.

1. Monitoring and evaluating compliance in relation to the implementation of risk management against agreements and commitments made by the Board of Directors to the Financial Services Authority and other related parties;
2. Analyzing/evaluating every incoming letter/memo related to its field of duties and responsibilities, both from internal and external sources, and reporting the results to the Board of Commissioners;
3. Preparing reports on all implementation of its duties to the Board of Commissioners every 3 (three) months and at the end of every financial year; and
4. Carrying out other duties assigned by the Board of Commissioners related to the scope of duties of the Risk Oversight Committee.

Authority of the Risk Oversight Committee

In order to support the oversight function of the Board of Commissioners, the Risk Oversight Committee has the following authorities:

1. Communicating with the Heads of Work Units and other parties within the Company to obtain information, clarifications, and request necessary documents and reports;
2. Accessing records or information about employees, funds, assets, and other company resources related to the implementation of its duties;
3. Obtaining Risk Profile Reports, Bank Soundness Level Reports, and other reports related to the implementation of risk management;
4. Obtaining input and/or advice from parties outside the Company related to its duties;
5. Exercising other authorities granted by the Board of Commissioners.

Risk Oversight Committee Charter

The Risk Oversight Committee has been equipped with a Risk Oversight Committee Charter which serves as a guideline for the implementation of the duties and responsibilities of the Risk Oversight Committee. The Risk Oversight Committee Charter was stipulated by the Board of Commissioners based on the Board of Commissioners Decree No. 002/SK-DK/BPD-ST/2024 dated October 31, 2024, concerning the Standard Operating Procedures (BPP) for Work Guidelines and Rules of Conduct for the Committees of the Board of Commissioners.

The Risk Oversight Committee Charter provides guidelines for the Risk Oversight Committee in carrying out its functions, duties, authorities, and responsibilities in a professional, accountable, competent, independent, and justifiable manner in accordance with applicable regulations. The Risk Oversight Committee Charter is a formal document that serves as a reference for internal and external parties of the Company in working relations with the Risk Oversight Committee.

Struktur Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/SK/BPD-ST/2025 tanggal 6 Oktober 2025 tentang Susunan Komite Dewan Komisaris PT Bank Sulteng, susunan Komite Pemantau Risiko sampai dengan 31 Desember 2025 yaitu sebagai berikut:

1. Ketua : Novi V.B. Kaligis
2. Anggota : Max Kembuan
3. Anggota : James Adolf Nelson Rompas
4. Anggota : Ramadianti

Risk Oversight Committee Membership Structure

Pursuant to the Decree of the Board of Commissioners No. 003/SK/BPD-ST/2025 dated October 6, 2025, regarding the Composition of the Board of Commissioners Committees of PT Bank Sulteng, the composition of the Risk Monitoring Committee through December 31, 2025, is as follows:

1. Chairman : Novi V.B. Kaligis
2. Member : Max Kembuan
3. Member : James Adolf Nelson Rompas
4. Member : Ramadianti

Profil Komite Pemantau Risiko

Profile of the Risk Oversight Committee

Nama Name	**Jabatan** Position	**Usia** Age	**Tahun Pengangkatan** Year of Appointment	**Pendidikan** Education	**Pengalaman Kerja** Work Experience
Novi V.B. Kaligis	Ketua Komite Pemantau Risiko Chairman of the Risk Monitoring Committee	57 Tahun 57 Years	2024	Dr. Ilmu Komunikasi Dr. Communication Science	Direktur PT. Sentul Graha Sejahtera, Bogor (2022) Director of PT Sentul Graha Sejahtera, Bogor (2022)
Max Kembuan	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of Risk Monitoring Committee	68 Tahun 68 Years	2024	Sarjana Akuntansi Bachelor of Accounting	Direktur Utama PT. Trans Kalla Makassar (Trans Studio Mall Makassar) Director of PT. Trans Kalla Makassar (Trans Studio Mall Makassar)
James Adolf Nelson Rompas	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of Risk Monitoring Committee	69 Tahun 69 Years	2025	SMA High School	Kepala Unit Mikro Bank Mandiri Pare-Pare Head of Micro Unit Bank Mandiri Pare-Pare
Ramadianti	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of Risk Monitoring Committee	58 Tahun 58 Years	2024	S1 Hukum Bachelor of Laws	Pimpinan Bagian Kesekretariatan dan Surat Menyurat Divisi Corsec Head of Secretarial and Correspondence Section of Corsec Divisionv

Independensi Komite Pemantau Risiko

Bank Sulteng memastikan seluruh anggota Komite Pemantau Risiko dapat bersikap independen dan senantiasa menjaga independensinya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya karena Komite Pemantau Risiko memiliki peran penting untuk memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris. Anggota Komite Pemantau Risiko merupakan anggota yang independen dan tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Perusahaan.

Seluruh Anggota Komite Pemantau Risiko Bank Sulteng saat ini berasal dari pihak independen dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga baik dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali maupun hubungan dengan Perusahaan sehingga dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Independence of the Risk Oversight Committee

Bank Sulteng ensures that all members of the Risk Oversight Committee can act independently and consistently maintain their independence in carrying out their duties and responsibilities because the Risk Oversight Committee has a crucial role in providing professional and independent opinions to the Board of Commissioners. Risk Oversight Committee members are independent members and do not have personal interests/affiliations that could cause negative impacts and conflicts of interest towards the Company.

All current Risk Oversight Committee Members of Bank Sulteng are from independent parties and have no financial, management, share ownership, and/or familial relationships with the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or Controlling Shareholders, nor relationships with the Company that could affect their ability to act independently.

Berikut ini diuraikan aspek independensi yang harus dimiliki anggota Komite Pemantau Risiko:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan maupun perusahaan afiliasi;
3. Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan;
4. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit;
5. Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah.

Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2025

Rencana kerja Komite Pemantau Risiko disusun untuk digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko dalam rangka mendukung tugas pengawasan Dewan Komisaris. Untuk tahun 2025 rencana kerja Komite Pemantau Risiko meliputi:

1. Melakukan surat menyurat dan memberikan rekomendasi berkaitan dengan tugas Komite Pemantau Risiko;
2. Mendokumentasikan dokumen Komite Pemantau Risiko;
3. Melakukan evaluasi berdasarkan laporan hasil pelaksanaan manajemen risiko;
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Dewan Koimisaris.

Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko

Sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya, Komite Pemantau Risiko secara berkala menyusun dan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris. Laporan Komite Pemantau Risiko terdiri dari laporan yang bersifat rutin dan laporan atas setiap penugasan yang diberikan Dewan Komisaris.

Selama tahun 2025, beberapa kegiatan Komite Pemantau Risiko yang telah dijalankan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko, diantaranya yaitu:

1. Melakukan penelaahan atas beberapa laporan maupun hal-hal yang dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris;
2. Menyusun rekomendasi dan laporan yang ditujukan kepada Dewan Komisaris;

The following describes the independence aspects that must be possessed by Risk Oversight Committee members:

1. No financial relationship with the Board of Commissioners and the Board of Directors;
2. No management relationship within the company or affiliated companies;
3. No share ownership relationship within the company;
4. No family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow Audit Committee members;
5. Not serving as an official of a political party, government official, or public official.

Risk Oversight Committee Work Plan for 2025

The Risk Oversight Committee's work plan is prepared to be used as a reference in carrying out the Risk Oversight Committee's duties and responsibilities in order to support the Board of Commissioners' oversight duties. For the year 2025, the Risk Oversight Committee's work plan includes:

1. Conducting correspondence and providing recommendations related to the duties of the Risk Oversight Committee;
2. Documenting the Risk Oversight Committee's documents;
3. Conducting evaluations based on reports on the results of risk management implementation;
4. Reporting the implementation of duties to the Board of Commissioners.

Implementation of Risk Oversight Committee Duties

As a form of accountability and responsibility for the implementation of its duties, the Risk Oversight Committee periodically prepares and submits reports to the Board of Commissioners. Risk Oversight Committee reports consist of routine reports and reports on every assignment given by the Board of Commissioners.

During 2025, several Risk Oversight Committee activities have been carried out as part of the implementation of the Risk Oversight Committee's duties and responsibilities, which include:

1. Conducting reviews of various reports and matters requiring approval from the Board of Commissioners.

2. Developing recommendations and reports addressed to the Board of Commissioners.

3. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajamen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Selama tahun 2025 Komite Pemantau Risiko telah menyampaikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Rekomendasi No 01/KPR-Dekom/BPD-ST/I/2025 Bulan 1 Januari 2025 Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko
2. Rekomendasi No 02/KPR-Dekom/BPD-ST/II/2025 Tanggal 24 Januari 2025 Laporan HasilAudit Kepatuhan Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2024
3. Rekomendasi No 03/KPR-Dekom/BPD-ST/III/2025 Tanggal 12 Februari 2025 Laporan Pelaksanaan Penerapan Program APU & PPT PT Bank Sulteng
4. Rekomendasi No 04/KPR-Dekom/BPD-ST/2025 Tangal 20 Maret 2025 Recovery Plan Bank Saudara
5. Rekomendasi No 06/KPR-Dekom/BPD-ST/2025 Tanggal 10 April 2025 Peningkatan Tata Kelola Teknologi (TI) dan Siber Bank Saudara
6. Rekomendasi No 07/KPR-Dekom/BPD-ST/2025 Tanggal 6 Mei 2025 Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kebijakan Risk Limit PT Bank Sulteng
7. Rekomendasi No 09/KPR-Dekom/BPD-ST/V/2025 Tanggal 16 Mei 2025 Laporan Data Perkreditan Bank Sulteng Posisi 30 April 2025
8. Rekomendasi N0 10/KPR-Dekom/BPD-ST/VII/2025 Tanggal 10 Juli 2025 Laporan Data Perkreditan Bank Sulteng Posisi 31 Juni 2025
9. Rekomendasi N0 11/KPR-Dekom/BPD-ST/VIII/2025 Tanggal 25 Agustus 2025 Laporan Data Perkreditan Bank Sulteng Posisi 31 Juli 2025
10. Rekomendasi N0 12/KPR-Dekom/BPD-ST/IX/2025 Tanggal 9 September 2025 Laporan Data Perkreditan Bank Sulteng Posisi 31 Agustsus 2025
11. Rekomendasi No 13/KPR-Dekom/BPD-ST/X/2025 Tanggal 03 Oktober 2025 Laporan Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan SKAI & Anti Fraud
12. Rekomendasi No 14/KPR-Dekom/BPD-ST/X/2025 Tanggal ...Oktober 2025 Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko Triwulan III Tahun 2025
13. Rekomendasi No 15/KPR-Dekom/BPD-ST/X/2025 Tanggal 10 Oktober 2025 Laporan Perkreditan Bank Sulteng Posisi 30 September 2025
14. Rekomendasi No 16/KPR-Dekom/BPD-ST/XI/2025 Tanggal 12 November 2025 Laporan Profil Risiko Triwulan III Tahun 2025
15. Rekomendasi No 17/KPR-Dekom/BPD-ST/XI/2025 Tanggal 13 November 2025 Realisasi Rencana Bisnis Bank Triwulan 3 Tahun 2025
16. Rekomendasi No 18/KPR-Dekom/BPD-ST/XI/2025 Tanggal 14 November 2025 Laporan Pemeriksaan Umum Semester I Tahun 2025 Kantor Cabang Parigi

3. Evaluating the execution of duties of the Risk Management Committee and the Risk Management Unit (SKMR).

During 2025, the Risk Monitoring Committee submitted the following recommendations:

1. Recommendation No: 01/KPR-Dekom/BPD-ST/I/2025 | Month: January 2025 | Re: Risk Monitoring Committee Task Implementation Report
2. Recommendation No: 02/KPR-Dekom/BPD-ST/II/2025 | Date: January 24, 2025 | Re: 2024 Compliance Audit Results Report on Risk Management Implementation
3. Recommendation No: 03/KPR-Dekom/BPD-ST/III/2025 | Date: February 12, 2025 | Re: Task Implementation Report on AML/CFT (APU & PPT) Program at PT Bank Sulteng
4. Recommendation No: 04/KPR-Dekom/BPD-ST/2025 | Date: March 20, 2025 | Re: Bank Saudara Recovery Plan
5. Recommendation No: 06/KPR-Dekom/BPD-ST/2025 | Date: April 10, 2025 | Re: Improvement of IT Governance and Cyber Security at Bank Saudara
6. Recommendation No: 07/KPR-Dekom/BPD-ST/2025 | Date: May 06, 2025 | Re: Corporate Manual (BPP) on Risk Limit Policy at PT Bank Sulteng
7. Recommendation No: 09/KPR-Dekom/BPD-ST/V/2025 | Date: May 16, 2025 | Re: Financing Data Report of Bank Sulteng Position as of April 30, 2025
8. Recommendation No: 10/KPR-Dekom/BPD-ST/VII/2025 | Date: July 10, 2025 | Re: Financing Data Report of Bank Sulteng Position as of June 30, 2025
9. Recommendation No: 11/KPR-Dekom/BPD-ST/VIII/2025 | Date: August 25, 2025 | Re: Financing Data Report of Bank Sulteng Position as of July 31, 2025
10. Recommendation No: 12/KPR-Dekom/BPD-ST/IX/2025 | Date: September 09, 2025 | Re: Financing Data Report of Bank Sulteng Position as of August 31, 2025
11. Recommendation No: 13/KPR-Dekom/BPD-ST/X/2025 | Date: October 03, 2025 | Re: Recapitulation Report of Internal Audit (SKAI) & Anti-Fraud Follow-up Findings
12. Recommendation No: 14/KPR-Dekom/BPD-ST/X/2025 | Date: October ... 2025 | Re: Q3 2025 Risk Monitoring Committee Task Implementation
13. Recommendation No: 15/KPR-Dekom/BPD-ST/X/2025 | Date: October 10, 2025 | Re: Financing Data Report of Bank Sulteng Position as of September 30, 2025
14. Recommendation No: 16/KPR-Dekom/BPD-ST/XI/2025 | Date: November 12, 2025 | Re: Q3 2025 Risk Profile Report
15. Recommendation No: 17/KPR-Dekom/BPD-ST/XI/2025 | Date: November 13, 2025 | Re: Q3 2025 Bank Business Plan Realization
16. Recommendation No: 18/KPR-Dekom/BPD-ST/XI/2025 | Date: November 14, 2025 | Re: H1 2025 General Inspection Report of Parigi Branch Office

17. Rekomendasi No 19/KPR-Dekom/BPD-ST/XI/2025 Tanggal 18 November 2025 Laporan Data Perkreditan Bank Sulteng Posisi 31 Oktober 2025
18. Rekomendasi No 20/KPR-Dekom/BPD-ST/XI/2025 Tanggal 4 November 2025 Realisasi Rencana Bisnis Bank TW III Tahun 2025
19. Rekomendasi No 21/KPR-Dekom/BPD-ST/XI/2025 Tanggal 27 November 2025 Persetujuan Produk / Aktivitas Baru Berupa Layanan Bank Sulteng Prioritas
20. Rekomendasi No 22/KPR-Dekom/BPD-ST/XII/2025 Tanggal 4 Desember 2025 Tanggapan Atas Permohonan Penyelenggaraan Aktivitas / Produk Baru Berupa Layanan Surat Branch
21. Rekomendasi No 23/KPR-Dekom/BPD-ST/XII/2025 Tanggal 15 Desember 2025 Penyampaian Laporan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) PT Bank Sulteng Tahun2025
22. Rekomendasi No 24/KPR-Dekom/BPD-ST/XII/2025 Tanggal 18 Desember 2025 Laporan Data Perkreditan Bank Sulteng Posisi 30 November 2025

Pelaporan Komite Pemantau Risiko

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko mengacu pada rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan dan berpedoman pada Piagam Komite Pemantau Risiko. Laporan disampaikan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang berikan. Pada setiap akhir tahun Komite Pemantau Risiko menyampaikan laporan tahunan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris yang meliputi seluruh kegiatan Komite Pemantau Risiko selama 1 (satu) tahun buku.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan. Sesuai ketentuan Rapat Komite Pemantau Risiko dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu) persen dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen. Ketua Komite Pemantau Risiko memimpin Rapat Komite Pemantau Risiko. Apabila Ketua Komite Pemantau Risiko berhalangan hadir makan rapat dipimpin anggota Komite Pemantau Risiko lain yang merupakan Komisaris Independen.

Dalam Rapat Komite Pemantau Risiko, keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Komite Pemantau Risiko menyusun risalah Rapat Komite Pemantau Risiko yang di dalamnya memuat seluruh hasil rapat termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat. Risalah rapat ditandatangani

17. Recommendation No: 19/KPR-Dekom/BPD-ST/XI/2025 | Date: November 18, 2025 | Re: Financing Data Report of Bank Sulteng Position as of October 31, 2025
18. Recommendation No: 20/KPR-Dekom/BPD-ST/XI/2025 | Date: November 04, 2025 | Re: Q3 2025 Bank Business Plan Realization
19. Recommendation No: 21/KPR-Dekom/BPD-ST/XI/2025 | Date: November 27, 2025 | Re: Approval of New Products/ Activities in the form of Bank Sulteng Priority Services
20. Recommendation No: 22/KPR-Dekom/BPD-ST/XII/2025 | Date: December 04, 2025 | Re: Response to Application for Implementation of New Activities/ Products in the form of Branch Services
21. Recommendation No: 23/KPR-Dekom/BPD-ST/XII/2025 | Date: December 15, 2025 | Re: Submission of 2025 PT Bank Sulteng Recovery Plan Report
22. Recommendation No: 24/KPR-Dekom/BPD-ST/XII/2025 | Date: December 18, 2025 | Re: Financing Data Report of Bank Sulteng Position as of November 30, 2025

Risk Oversight Committee Reporting

In carrying out its duties and responsibilities, the Risk Oversight Committee refers to the established annual work plan and is guided by the Risk Oversight Committee Charter. Reports are submitted by the Risk Oversight Committee to the Board of Commissioners for each assignment given. At the end of each year, the Risk Oversight Committee submits an annual Risk Oversight Committee report to the Board of Commissioners covering all Risk Oversight Committee activities for 1 (one) financial year.

Risk Oversight Committee Meetings

Risk Oversight Committee Meetings are held at least 1 (one) time a month. In accordance with regulations, a Risk Oversight Committee Meeting can be held if attended by at least 51% (fifty-one percent) of the total Risk Oversight Committee members, including 1 (one) Independent Commissioner and 1 (one) Independent Party. The Chairman of the Risk Oversight Committee presides over the Risk Oversight Committee Meeting. If the Chairman of the Risk Oversight Committee is unable to attend, the meeting shall be chaired by another Risk Oversight Committee member who is an Independent Commissioner.

In Risk Oversight Committee Meetings, meeting decisions are made based on deliberation for consensus. The Risk Oversight Committee prepares the minutes of the Risk Oversight Committee Meeting which contain all meeting results, including if there are differences of opinion. The minutes of the

oleh seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang hadir untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

meeting are signed by all Risk Oversight Committee members present to be further submitted to the Board of Commissioners.

Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali sepanjang tahun 2025. Untuk jumlah rapat dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko dalam Rapat Komite Pemantau Risiko dapat diuraikan berikut ini:

The Risk Oversight Committee has held 7 (Seven) meetings throughout 2025. The number of meetings and the attendance rate of each Risk Oversight Committee member in the Risk Oversight Committee Meetings can be described as follows:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jumlah Rapat** Number of Meetings	**Jumlah Kehadiran** Total Attendance	**Persentase** Percentage
Novi V.B. Kaligis	Ketua Komite Pemantau Risiko Chairman of the Risk Monitoring Committee	7	7	100%
Max Kembuan*	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of Risk Monitoring Committee	7	7	100%
Bill Wowor*	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of Risk Monitoring Committee	7	7	100%
James Adolf Nelson Rompas**	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of Risk Monitoring Committee	7	7	100%
Ramadianti	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of Risk Monitoring Committee	7	7	100%

*) menjabat mulai 6 Oktober 2025 / served until October 6, 2025
*) menjabat sampai 7 Oktober 2025 / served until October 7, 2025
**) menjabat mulai 8 Oktober 2025 / serving from October 8, 2025



Remunerasi Komite Pemantau Risiko

Sebagaimana tercantum dalam Surat Penugasan masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko, anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak Independen (bukan Komisaris) mendapatkan remunerasi yang besarnnya ditetapkan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kemampuan Perusahaan.

Program Pengembangan Komite Pemantau Risiko

Komite Audit melaksanakan program pengembangan (pelatihan) guna meningkatkan kompetensi anggota Komite Pemantau Risiko dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko agar berjalan secara efektif. Melalui program pengembangan tersebut, Komite Pemantau Risiko dapat senantiasa memperbaharui perkembangan terbaru mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Penilaian Kinerja Komite Pemantau Risiko

Secara berkala kinerja Komite Pemantau Risiko dinilai oleh Dewan Komisaris setiap 1 (satu) tahun sekali dengan melihat sejauh mana realisasi dan penyelesaian program kerja yang telah dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan Komite Pemantau Risiko. Sebagai bagian dari penilaian kinerja Komite Pemantau Risiko, Dewan Komisaris juga melihat kualitas saran, rekomendasi dan masukan yang telah disampaikan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

Penilaian kinerja Komite Pemantau Risiko yang dilakukan Dewan Komisaris juga digunakan sebagai bahan pertimbangan Dewan Komisaris dalam memutuskan untuk memberhentikan atau mengangkat kembali anggota Komite Pemantau Risiko untuk periode jabatan berikutnya.

Risk Oversight Committee Remuneration

As stated in the Assignment Letter of each Risk Oversight Committee member, Risk Oversight Committee members originating from Independent parties (non-Commissioners) receive remuneration, the amount of which is determined by the Board of Commissioners taking into account the Company's capabilities.

Risk Oversight Committee Development Program

The Audit Committee (Note: The original text specifies "Komite Audit" here, but the context implies Risk Oversight Committee) implements development programs (training) to improve the competency of Risk Oversight Committee members in order to support the effective implementation of the Risk Oversight Committee's duties and responsibilities. Through these development programs, the Risk Oversight Committee can continuously update the latest developments regarding various matters related to the Company's business activities.

Risk Oversight Committee Performance Assessment

Periodically, the performance of the Risk Oversight Committee is assessed by the Board of Commissioners once every 1 (one) year by looking at the extent of the realization and completion of the work programs that have been carried out by the Risk Oversight Committee as outlined in the Risk Oversight Committee's Annual Work Plan. As part of the Risk Oversight Committee's performance assessment, the Board of Commissioners also evaluates the quality of suggestions, recommendations, and input that have been submitted by the Risk Oversight Committee to the Board of Commissioners.

The Risk Oversight Committee performance assessment conducted by the Board of Commissioners is also used as material for consideration by the Board of Commissioners in deciding to dismiss or re-appoint Risk Oversight Committee members for the next term of office.

Komite di Bawah Direksi

Dalam rangka membantu Direksi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terutama dalam menetapkan berbagai kebijakan strategis, Direksi dibantu oleh komite-komite sebagai organ pendukung Direksi yang berada di bawah Direksi dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi yang terdiri dari *Asset Liability Committee* (ALCO), Komite Kredit, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko, dan Komite Personalia.

Asset Liability Committee (ALCO)

ALCO merupakan suatu komite permanen yang dibentuk untuk menyusun kebijakan dan membuat keputusan dalam mengelola dan mengendalikan kekayaan keuangan dan kewajiban keuangan Bank Sulteng dalam rangka mengoptimalkan pendapatan.

Tugas dan Tanggung Jawab ALCO

Sebagai organ pendukung Direksi, ALCO memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:

1. Menetapkan tujuan global Bank, menetapkan strategi dan kebijakan pengendalian kekayaan dan kewajiban keuangan Bank (ALMA);
2. Meninjau dan mengkaji ulang apakah pedoman dan kebijakan Bank telah disusun secara berkesinambungan dalam lingkup ALMA sesuai dengan tujuan Bank dan perkembangan perbankan;
3. Melihat prakiraan dan proyeksi keadaan ekonomi, suku bunga, nilai tukar untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan;
4. Menetapkan batas dan petunjuk pengelolaan dan pengendalian risiko yang berdampak pada Manajemen Likuiditas (*Liquidity Management*), Manajemen Suku Bunga (*Gap Management*), Manajemen Investasi dan Pendapatan (*Earning & Investment Management*);
5. Mereview dana, menetapkan suku bunga kredit dan bunga dana;
6. Menetapkan batas (limit) *Primary Reserve* (GWM, Nostro dan Kas);
7. Menetapkan batas (limit) *Secondary Reserve* serta instrumennya;
8. Menetapkan batas (limit) *Gap* serta instrumennya;
9. Menetapkan batas (limit) kredit serta penyebarannya;
10. Menetapkan batas KPMM dan risiko pasar (suku bunga, nilai tukar dan surat berharga);
11. Melaporkan risiko pasar dan Value at Risk (*Internal Fund Transfer Pricing Rate*) atau harga Rekening Antar Kantor (RAK) dalam memicu efisiensi pengelolaan bank disetiap cabang;

Committees Under The Board of Directors

In order to assist the Board of Directors in carrying out its duties and responsibilities, especially in determining various strategic policies, the Board of Directors is assisted by committees as supporting organs of the Board of Directors that are under the Board of Directors and report directly to the Board of Directors, consisting of the Asset Liability Committee (ALCO), Credit Committee, Information Technology Steering Committee, Risk Management Committee, and Personnel Committee.

Asset Liability Committee (ALCO)

ALCO is a permanent committee established to formulate policies and make decisions in managing and controlling the financial assets and financial liabilities of Bank Sulteng in order to optimize revenue.

Duties and Responsibilities of ALCO

As a supporting organ of the Board of Directors, ALCO has the following duties and responsibilities:

1. Setting the global objectives of the Bank, establishing strategies and policies for controlling the Bank's financial assets and liabilities (ALMA);
2. Reviewing and reassessing whether the Bank's guidelines and policies have been continuously prepared within the scope of ALMA in accordance with the Bank's objectives and banking developments;
3. Looking at forecasts and projections of economic conditions, interest rates, and exchange rates to direct the established policies;
4. Setting limits and guidelines for risk management and control that impact Liquidity Management, Gap Management, Earning & Investment Management;
5. Reviewing funds, setting lending rates and funding rates;
6. Setting limits for Primary Reserves (Statutory Reserve Requirement/GWM, Nostro, and Cash);
7. Setting limits for Secondary Reserves and their instruments;
8. Setting Gap limits and their instruments;
9. Setting credit limits and their distribution;
10. Setting limits for the Capital Adequacy Ratio (KPMM) and market risks (interest rates, exchange rates, and securities);
11. Reporting market risk and Value at Risk (Internal Fund Transfer Pricing Rate) or Inter-Branch Account (RAK) pricing in triggering the efficiency of bank management in each branch;

12. Meninjau kembali performance posisi kekayaan dan kewajiban keuangan Bank maupun terhadap kepatuhan regulasi;
13. Mengadakan penyesuaian strategi, batasan-batasan dan petunjuk pelaksanaan serta kebijakan dalam rangka mencapai tujuan ALCO dan tujuan Bank.

Struktur dan Keanggotaan ALCO

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 45/SK-DIR/BPD-ST/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Bank Sulteng No. 28/SK-DIR/BPD-ST/2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Tim Asset Liability Committee (ALCO) tanggal 13 Mei 2024, susunan keanggotaan ALCO Bank Sulteng yaitu sebagai berikut:

12. Reviewing the performance of the Bank's financial asset and liability position as well as compliance with regulations;
13. Making adjustments to strategies, limits, and implementation guidelines as well as policies in order to achieve the objectives of ALCO and the objectives of the Bank.

ALCO Structure and Membership

In accordance with the Board of Directors Decree No. 45/SK-DIR/BPD-ST/2024 dated May 13, 2024, concerning the Amendment to the Decree of the Board of Directors of Bank Sulteng No. 28/SK-DIR/BPD-ST/2022 dated February 16, 2022, regarding the Asset Liability Committee (ALCO) Team dated May 13, 2024, the membership composition of Bank Sulteng's ALCO is as follows:

Jabatan Position	**Dijabat oleh** Served by	**Hak Suara** Voting Rights
Ketua Chair	Direktur Utama President Director	Memiliki Own
Wakil Ketua I Vice Chairman I	Direktur Bisnis Business Director	Memiliki Own
Wakil Ketua II Vice Chairman II	Direktur Kepatuhan Compliance Director	Memiliki Own
Sekretaris Secretary	Pemimpin Divisi Treasury Treasury Division Leader	Memiliki Own
Anggota Member	Pemimpin Divisi Pemasaran, Dana & Jasa Head of Marketing, Funds & Services Division	Memiliki Own
	Pemimpin Divisi Perkreditan Credit Division Leader	Memiliki Own
	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis Strategic Planning Division Leader	Memiliki Own
	Pemimpin Divisi Operasional Operations Division Leader	Memiliki Own
	Pemimpin Satuan Kerja Manajemen Risiko Risk Management Work Unit Leader	Memiliki Own
	Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia Human Resources Division Leader	Memiliki Own

Profil Anggota ALCO

Berikut ini profil anggota ALCO Bank Sulteng, yaitu sebagai berikut:

Profile of ALCO

Members The following is the profile of Bank Sulteng's ALCO members:

Nama Name	**Jabatan** Position	
	di Komite in the Committee	**di Perusahaan** in the Company
Hj. Ramiyatie, SE	Ketua Chair	Direktur Utama President Director
Myrna Rianasari	Wakil Ketua I Vice Chairman I	Direktur Bisnis Business Director
Judy Kaogaw	Wakil Ketua II Vice Chairman II	Direktur Kepatuhan Compliance Director
Max Iswanto	Sekretaris Secretary	Pemimpin Divisi Treasury Treasury Division Leader
Kiky Christiana Kembuan	Anggota Member	Pemimpin Divisi Pemasaran, Dana & Jasa Head of Marketing, Funds & Services
Firmansyah Azis	Anggota Member	Pemimpin Divisi Perkreditan Head of Credit Division
Mohamad Affandi	Anggota Member	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis Head of Strategic Planning Division
Muh Abduh Bunre	Anggota Member	Pemimpin Divisi Operasional Head of Operations Division
Tinus Nuanto	Anggota Member	Pemimpin Divisi SKMR Head of SKMR Division
I Gusti P Suartika	Anggota Member	Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia Head of Human Resources Division

Tata Kerja ALCO

Dalam menjalankan tugasnya, Asset and Liability Committee (ALCO) Bank Sulteng memiliki tata kerja yaitu sebagai berikut:

1. ALCO mengadakan rapat minimal 1 (satu) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan Bank
2. Agenda utama, disusun berdasarkan laporan bulanan ALCO yang disusun oleh Sekretaris ALCO sesuai dengan kerangka kerja ALMA Bank dan dipimpin oleh Ketua
3. Keputusan rapat ALCO sebagai berikut:
   a. Kuorum rapat ALCO utama bila sedikitnya dihadiri oleh sekurang-kurangnya Ketua dan Ketua Pengganti ditambah dengan lebih dari 50% + 1 anggota dari jumlah anggota hadir.
   b. Keputusan rapat dengan agenda khusus dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurangkurangnya 1 orang Direksi ditambah dengan anggota yang secara langsung terkait dengan permasalahan yang dibahas.

ALCO Work Procedures

In carrying out its duties, the Asset and Liability Committee (ALCO) of Bank Sulteng has the following work procedures:

1. ALCO holds meetings at least 1 (one) time a month or according to the Bank's needs.
2. The main agenda is prepared based on the monthly ALCO report compiled by the ALCO Secretary in accordance with the Bank's ALMA framework and is chaired by the Chairman.
3. The decisions of the ALCO meeting are as follows:
   a. The quorum of the main ALCO meeting is met if attended by at least the Chairman or Substitute Chairman plus more than 50% + 1 of the members present.
   b. Meeting decisions with a special agenda are declared valid if approved by at least 1 member of the Board of Directors plus members who are directly related to the issues being discussed.
   c. Meeting decisions must be finalized and

c. Keputusan rapat harus sudah selesai dan diterima anggota komite paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah rapat anggota.
d. Keputusan rapat ALCO ditandatangani oelh salah satu anggota Direksi dan Sekertaris ALCO
e. Keputusan rapat ALCO ditandatangani oleh salah satu anggota Direksi dan Sekretaris ALCO.
f. Keputusan rapat merupakan keputusan ALCO.
g. Hasil keputusan rapat yang memerlukan tindak lanjut segera, koordinasi serta pemantauannya dilaksanakan oleh Sekretaris.

4. Anggota ALCO adalah Kepala Divisi dan apabila berhalangan tidak dapat diwakili di dalam rapat ALCO.
5. Bahan rapat ALCO selambat-lambatnya harus sudah diterima oleh anggota sebelum rapat sehingga anggota ALCO dapat mempersiapkan materi bahasan rapat.
6. Staff Support Group ALCO (Koordinator beserta Anggota) dapat menghadiri rapat ALCO hanya sebagai pengamat tanpa hak suara, yang bertugas membantu Sekretaris ALCO dalam hal:
   a. Mempersiapkan bahan rapat ALCO
   b. Menjawab setiap pertanyaan yang berhubungan dengan bahan rapat ALCO
   c. Mempersiapkan risalah rapat
   d. Mempersiapkan hasil keputusan rapat

Rencana Kerja ALCO Tahun 2025

ALCO menetapkan rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga dapat berjalan secara optimal. Rencana kerja ALCO tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada misi ALCO yaitu untuk menetapkan kebijakan dalam mengendalikan kekayaan dan kewajiban keuangan bank (ALMA) dalam rangka mengoptimalkan pendapatan. Untuk membahas berbagai permasalahan yang terkait dengan bidang tugasnya, kegiatan Rapat ALCO diselenggarakan minimal 1 (satu) bulan sekali pada tanggal yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Rapat ALCO

Rapat ALCO telah berjalan secara efektif dan dilaksanakan sebanyak 10 (Sepuluh) kali selama tahun 2025. Berikut ini jumlah rapat dan agenda yang dibahas dalam Rapat ALCO sepanjang tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

received by committee members no later than 5 (five) working days after the member meeting.
d. The decisions of the ALCO meeting are signed by one of the members of the Board of Directors and the ALCO Secretary.
e. The decisions of the ALCO meeting are signed by one of the members of the Board of Directors and the ALCO Secretary.
f. Meeting decisions constitute ALCO decisions.
g. The results of meeting decisions that require immediate follow-up, coordination, and monitoring are carried out by the Secretary.

4. ALCO members are Division Heads and if unable to attend cannot be represented in the ALCO meeting.

5. ALCO meeting materials must be received by members at the latest before the meeting so that ALCO members can prepare for the meeting discussion materials.
6. The ALCO Staff Support Group (Coordinator and Members) may attend ALCO meetings only as observers without voting rights, who are tasked with assisting the ALCO Secretary in:
   a. Preparing ALCO meeting materials;
   b. Answering any questions related to ALCO meeting materials;
   c. Preparing meeting minutes;
   d. Preparing the results of meeting decisions.

ALCO Work Plan for 2025

ALCO sets an annual work plan that is used as a reference in carrying out its duties and responsibilities so that they can run optimally. The ALCO work plan for 2025 was prepared by being guided by the ALCO mission, which is to formulate policies in controlling the bank's financial assets and liabilities (ALMA) in order to optimize revenue. To discuss various issues related to its field of duties, ALCO Meeting activities are held at least 1 (one) time a month on the scheduled dates.

Implementation of ALCO

Meetings ALCO meetings have run effectively and were held 10 (Ten) times during 2025. The following is the number of meetings and agendas discussed in ALCO Meetings throughout 2025:

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat	Meeting Agenda
1.	Kamis, 06 Maret 2025 Thursday, March 06, 2025	1. *Market* Share *& Asset*, Laporan Keuangan, 2. Dana Pihak Ketiga & Deposito Corporate 3. Suku Bunga Dasar Kredit (SDBK) & Surat Berharga 4. Pendapatan *Treasury*.	1. Market Share & Asset, Financial Statements, 2. Third-Party Funds & Corporate Deposits, 3. Prime Lending Rate (SDBK) & Securities, 4. Treasury Revenue
2.	Selasa, 11 April 2025 Tuesday, April 11, 2025	1. *Market Share & Asset*, Laporan Keuangan, 2. Dana Pihak Ketiga & Deposito Corporate 3. Suku Bunga Dasar Kredit (SDBK) & Surat Berharga 4. Pendapatan *Treasury*.	1. Market Share & Asset, Financial Statements, 2. Third-Party Funds & Corporate Deposits, 3. Prime Lending Rate (SDBK) & Securities, 4. Treasury Revenue
3.	Senin, 05 Mei 2025 Monday, May 05, 2025	1. Rapat Evaluasi Kinerja Bulan April 2025 2. Rapat Pembahasan ALCO 3. Isu-isu strategis lainnya	1. Performance Evaluation Meeting for April 2025, 2. ALCO Discussion Meeting, 3. Other strategic issues
4.	Rabu, 18 Juni 2025 Wednesday, June 18, 2025	1. *Market Share & Asset* 2. Laporan Keuangan 3. Surat Berharga & DPK 4. Profit/*Loss & Other Issues*	1. Market Share & Asset, 2. Financial Statements, 3. Securities & Third-Party Funds (DPK), 4. Profit/Loss & Other Issues
5.	Rabu, 09 Juli 2025 Wednesday, July 09, 2025	1. Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Juli 2025 2. Rapat Pembahasan ALCO 3. Isu-isu strategis lainnya	1. Performance Evaluation Meeting for July 2025, 2. ALCO Discussion Meeting, 3. Other strategic issues
6.	Senin, 25 Agustus 2025 Monday, August 25, 2025	1. Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Juli 2025 2. Rapat Pembahasan ALCO 3. Isu-isu strategis lainnya	1. Performance Evaluation Meeting for July 2025, 2. ALCO Discussion Meeting, 3. Other strategic issues
7.	Rabu, 3 September 2025 Wednesday, September 3, 2025	1. Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Agustus 2025 2. Rapat Pembahasan ALCO 3. Isu-isu strategis lainnya	1. Performance Evaluation Meeting for August 2025, 2. ALCO Discussion Meeting, 3. Other strategic issues
8.	Rabu, 8 Oktober 2025 Wednesday, October 8, 2025	1. *Market Share* & Asset 2. Laporan Keuangan 3. Surat Berharga & DPK 4. Profit/*Loss & Other Issues*	1. Market Share & Asset, 2. Financial Statements, 3. Securities & Third-Party Funds (DPK), 4. Profit/Loss & Other Issues
9.	Senin, 3 November 2025 Monday, November 3, 2025	1. Market Share & Asset 2. Laporan Keuangan 3. Surat Berharga & DPK 4. Profit/*Loss & Other Issues*	1. Market Share & Asset, 2. Financial Statements, 3. Securities & Third-Party Funds (DPK), 4. Profit/Loss & Other Issues
10.	Selasa, 9 Desember 2025 Tuesday, December 9, 2025	1. Laporan Keuangan 2. DPK & Kredit 3. Surat Berharga Dimiliki 4. Profit/*Loss & Other Issues*	1. Financial Statements, 2. Third-Party Funds (DPK) & Credit, 3. Owned Securities, 4. Profit/Loss & Other Issues

Komite Kredit

Komite Kredit merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam memutuskan pemberian kredit (baru, tambahan, penurunan, dan atau perpanjangan) yang dikelola oleh Business Unit sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/perubahan struktur kredit.

Credit Committee

The Credit Committee is a committee tasked with assisting the Board of Directors in deciding on the provision of credit (new, additional, reduction, and/or extension) managed by the Business Unit in accordance with authority limits, including the determination/ alteration of credit structures.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kredit

Sebagai organ pendukung Direksi, Komite Kredit memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:

1. Memastikan bahwa setiap kredit atau pembiayaan yang diberikan telah memnuhi ketentuan perbankan dan sesusai dengan asas-asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat;
2. Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan telah sesuai dengan kebijakan perkreditan Bank Sulteng dan Pedoman Pelaksanaan Kredit atau Pembiayaan;
3. Memastikan bahwa pemberian kredit atau pembiayaan telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama, serta terlepas dari pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit/pembiayaan meyakini bahwa kredit atau pembiayaan yang akan diberikan dapat dilunasi kembali pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit atau pembiayaan yang bermasalah.

Struktur dan Keanggotaan Komite Kredit

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 117/SK-DIR/BPD-ST/2025 tanggal 04 Agustus 2025 tentang Pembentukan Tim Komite Kredit Senior (KKS) Dalam Rangka Memutus Fasilitas Kredit Langsung Maupun Kredit Tidak Langsung (Bank Garansi) PT Bank Sulteng, susunan keanggotaan Komite Kredit Bank Sulteng adalah sebagai berikut:

Duties and Responsibilities of the Credit Committee

As a supporting organ of the Board of Directors, the Credit Committee has the following duties and responsibilities:

1. Ensuring that every credit or financing provided has met banking regulations and is in accordance with sound credit or financing principles;
2. Ensuring that the implementation of credit or financing provision is in accordance with Bank Sulteng's credit policies and Credit or Financing Implementation Guidelines;
3. Ensuring that the provision of credit or financing is based on an honest, objective, careful, and thorough assessment, and is free from the influence of parties with interests in the credit/financing applicant, to ensure that the credit or financing to be provided can be repaid on time and will not develop into a non-performing loan or financing.

Credit Committee Structure and Membership

In accordance with the Board of Directors Decree No. 16/SK/BPD-ST/2024 dated February 29, 2024, regarding the Establishment of the Senior Credit Committee (KKS) Team for the Purpose of Approving Direct Credit Facilities and Indirect Credit (Bank Guarantees) of PT Bank Sulteng, the membership composition of Bank Sulteng's Credit Committee is as follows:

Jabatan Position	**Dijabat oleh** Served by	**Hak Suara** Voting Rights
Ketua Chair	Direktur Utama President Director	Memiliki Own
Wakil Ketua Vice Chairman	Direktur Bisnis Business Director	Memiliki Own
Anggota Secretary	Direktur Kepatuhan Compliance Director	Memiliki Own
	Pimpinan Divisi Perkreditan Head of Credit Division	Memiliki Own
	Pemimpin Divisi Admin dan Kebijakan Kredit Head of Admin and Credit Policy Division	Memiliki Own
Sekretaris Secretary	Pemimpin Bagian Reviewer Reviewer Section Leader	Tidak Memiliki No Voice

Profil Anggota Komite Kredit

Berikut ini profil anggota Komite Kredit Bank Sulteng, yaitu sebagai berikut:

Profile of Credit Committee

Members The following is the profile of Bank Sulteng's Credit Committee members:

Nama Name	**Jabatan** Position	
	di Komite in the Committee	**di Perusahaan** in the Company
Hj. Ramiyatie	Ketua Chair	Direktur Utama President Director
Myrna Rianasari	Wakil Ketua Vice Chairman	Direktur Bisnis Business Director
Judy Koagow	Anggota Member	Direktur Kepatuhan Compliance Director
Darsyaf Agus Slamet	Anggota Member	Pimpinan Divisi Perkreditan Head of Credit Division
I Made Surata	Anggota Member	Pemimpin Divisi Admin dan Kebijakan Kredit Head of Admin and Credit Policy Division
Sofyan Hardy	Sekretaris Secretary	Pemimpin Bagian Reviewer Section Leader Reviewer

Tata Kerja Komite Kredit

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Kredit Bank Sulteng memiliki tata kerja yaitu sebagai berikut:

1. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan kredit dan permohonan penyelesaian kredit bermasalah sesuai batas wewenang dan kriteria yang sudah ditetapkan
2. Komite Kredit Bank Sulteng telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif termasuk dalam memutuskan permohonan kredit dilakukan dalam bentuk rapat (*meeting*) atau sirkulasi.

Credit Committee Work Procedures

In carrying out its duties, Bank Sulteng's Credit Committee has the following work procedures:

1. Evaluating and deciding on credit applications and non-performing loan settlement applications in accordance with established limits of authority and criteria.
2. Bank Sulteng's Credit Committee has carried out its duties and responsibilities effectively, including deciding on credit applications conducted in the form of meetings or circulation.

Rencana Kerja Komite Kredit Tahun 2025

Komite Kredit menetapkan rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga dapat berjalan secara optimal. Rencana kerja Komite Kredit tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada bidang tugas Komite Kredit. Untuk membahas berbagai permasalahan yang terkait dengan bidang tugasnya, kegiatan Rapat Komite Kredit diselenggarakan minimal 1 (satu) bulan sekali pada tanggal yang telah ditetapkan.

Credit Committee Work Plan for 2025

The Credit Committee sets an annual work plan that is used as a reference in carrying out its duties and responsibilities so that they can run optimally. The Credit Committee's work plan for 2025 was prepared by being guided by the scope of duties of the Credit Committee. To discuss various issues related to its field of duties, Credit Committee Meeting activities are held at least 1 (one) time a month on the scheduled dates.

Pelaksanaan Rapat Komite Kredit

Komite Kredit Bank Sulteng telah menyelenggarakan rapat-rapat sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Rapat Komite Kredit dilaksanakan dalam rangka membahas dan memutuskan berbagai permasalahan yang menjadi bidang tugas Komite Kredit. Sepanjang tahun 2025 pelaksanaan rapat Komite Kredit secara umum telah berjalan secara memadai baik yang bersifat internal Komite Kredit maupun rapat yang dilaksanakan bersama pihak lain.

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan strategis di bidang teknologi informasi serta melakukan evaluasi atas implementasi kebijakan strategis tersebut.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

Sebagai organ pendukung Direksi, Komite Pengarah Teknologi Informasi memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:

1. Memberikan usulan kepada Direksi Bank Sulteng terkait arahan dan strategi manajemen Teknologi Informasi Bank Sulteng;
2. Merumuskan Rencana Strategis Teknologi Informasi Bank Sulteng termasuk berbagai perubahan atau tambahannya, selaras dengan Rencana Bisnis Bank dan mengkomunikasikan kebijakan dan arahan strategis pengelolaan Manajemen Teknologi Informasi Bank Sulteng kepada pihak-pihak yang terkait;
3. Merumuskan kebijakan, standar dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan Teknologi Informasi bank, dan mengajukan kepada Direksi untuk disetujui dan diberlakukan;
4. Memastikan efektivitas pelaksanaan dari Rencana Strategis Teknologi Informasi Bank Sulteng untuk menjamin bahwa hasil dan manfaat yang diharapkan telah dapat dicapai dan penggunaan berbagai sumber daya Teknologi Informasi telah dilakukan dengan optimal, melalui evaluasi dan pelaporan secara periodik;
5. Memastikan Kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi. Komite juga menetapkan status prioritas proyek Teknologi Informasi yang bersifat kritikal (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank) misalnya pergantian Aplikasi Core Banking System, Server Production dan Topologi Jaringan;

Implementation of Credit Committee

Meetings Bank Sulteng's Credit Committee has held meetings as part of the implementation of its duties and responsibilities. Credit Committee meetings are held to discuss and decide on various issues that fall under the scope of duties of the Credit Committee. Throughout 2025, the implementation of Credit Committee meetings generally ran adequately, both internal Credit Committee meetings and meetings held with other parties.

Information Technology Steering Committee

The Information Technology Steering Committee is a committee tasked with assisting the Board of Directors in formulating strategic policies in the field of information technology and evaluating the implementation of these strategic policies.

Duties and Responsibilities of the Information Technology Steering Committee

As a supporting organ of the Board of Directors, the Information Technology Steering Committee has the following duties and responsibilities:

1. Providing proposals to the Board of Directors of Bank Sulteng regarding the directives and strategies for Information Technology management of Bank Sulteng;
2. Formulating the Bank Sulteng Information Technology Strategic Plan, including various changes or additions, aligned with the Bank Business Plan, and communicating the policies and strategic directives of Bank Sulteng's Information Technology Management to related parties;
3. Formulating policies, standards, and procedures related to the management of the bank's Information Technology, and proposing them to the Board of Directors for approval and enactment;
4. Ensuring the effectiveness of the implementation of the Bank Sulteng Information Technology Strategic Plan to guarantee that the expected results and benefits can be achieved and the use of various Information Technology resources has been optimized, through periodic evaluation and reporting;
5. Ensuring the conformity of approved Information Technology projects with the Information Technology Strategic Plan. The Committee also determines the priority status of Information Technology projects that are critical (having a significant impact on the Bank's operational activities), such as the replacement of the Core Banking System Application, Production Servers, and Network Topology;

6. Melakukan langkah-langkah untuk minimalisasi risiko dan efektivitas atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi, bahwa investasi tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank;
7. Melakukan pemantauan kecukupan alokasi sumber daya Teknologi Informasi yang dimiliki Bank. Apabila sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi maka Komite Pengarah Teknologi Informasi harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan, standar dan prosedur terkait;
8. Merekomendasikan berbagai pengendalian preventif dan korektif untuk memastikan keselarasan antara Rencana Teknologi Informasi Bank dengan Rencana Bisnis Bank serta memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dari Rencana Teknologi Informasi Bank;
9. Melakukan Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi, dan upaya peningkatannya;
10. Memberikan upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara. Komite dapat memfasilitasi hubungan antara kedua satuan kerja tersebut;
11. Komite Pengarah Teknologi Informasi Bank Sulteng disamping berkewajiban untuk mematuhi peraturan tata tertib dan disiplin pegawai sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pokok Kepegawaian Bank Sulteng sesuai surat Keputusan Direksi yang berlaku dalam menjalankan tugasnya juga wajib menjunjung tinggi integritas dan nama baik, membela kepentingan Bank Sulteng serta menjauhi diri dari segala tindakan yang dapat merugikan martabatnya sebagai Komite Teknologi Informasi.

6. Taking steps to minimize risks and ensure the effectiveness of the Bank's investments in the Information Technology sector, so that these investments can contribute to the achievement of the Bank's business objectives;
7. Monitoring the adequacy of Information Technology resource allocations owned by the Bank. If the resources owned are inadequate and the Bank will use the services of other parties in the provision of Information Technology, the Information Technology Steering Committee must ensure that the Bank has relevant policies, standards, and procedures;
8. Recommending various preventive and corrective controls to ensure alignment between the Bank's Information Technology Plan and the Bank's Business Plan, as well as ensuring the effectiveness and efficiency of the implementation of the Bank's Information Technology Plan;
9. Monitoring the performance of Information Technology and efforts for its enhancement;
10. Providing efforts to resolve various IT-related problems that cannot be resolved by the user work units and provider work units. The Committee may facilitate relationships between these two work units;
11. In addition to being obliged to comply with the rules of order and employee discipline as stated in the Basic Personnel Regulations of Bank Sulteng in accordance with the applicable Decree of the Board of Directors, the Bank Sulteng Information Technology Steering Committee in carrying out its duties is also obliged to uphold integrity and good reputation, defend the interests of Bank Sulteng, and refrain from any actions that could harm its dignity as the Information Technology Committee.

Struktur dan Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 130/SK/BPD-ST/2025 tanggal 20 Agustus 2025 tentang Susunan Personalia Komite Pengarah Teknologi Informasi PT Bank Sulteng, susunan keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi Bank Sulteng adalah sebagai berikut:

Structure and Membership of the Information Technology Steering Committee

In accordance with the Decree of the Board of Directors No. 130/SK/BPD-ST/2025 dated August 20, 2025, regarding the Personnel Composition of the Information Technology Steering Committee of PT Bank Sulteng, the membership structure of the Information Technology Steering Committee of Bank Sulteng is as follows:

Jabatan Position	**Dijabat oleh** Served by	**Hak Suara** Voting Rights
Ketua Chair	Direktur Operasional Operations Director	Memiliki Own
Sekretaris Secretary	Pemimpin Divisi Teknologi Informasi Information Technology Division Leader	Memiliki Own
Anggota Member	Direktur Kepatuhan Compliance Director	Memiliki Own
	Pemimpin Divisi Satuan Kerja Kepatuhan Head of Compliance Working Unit Division	Memiliki Own
	Pemimpin Divisi Satuan Kerja Manajemen Risiko Head of Risk Management Work Unit Division	Memiliki Own
	Satuan Kerja Pengguna Teknologi Informasi Information Technology User Unit	Memiliki Own

Profil Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi

Berikut ini profil anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi Bank Sulteng, yaitu sebagai berikut:

Profile of Information Technology Steering Committee Members

The following is the profile of Bank Sulteng's Information Technology Steering Committee members:

Nama Name	**Jabatan** Position	
	di Komite in the Committee	**di Perusahaan** in the Company
-	Ketua Chair	Direktur Operasional Operations Director
Muh. Abduh Bundung	Sekretaris Secretary	Pemimpin Divisi Teknologi Informasi Information Technology Division Leader
Judy Koagow	Anggota Member	Direktur Kepatuhan Compliance Director
Rizal Akase	Anggota Member	Pemimpin Divisi Satuan Kerja Kepatuhan, Division Head of Compliance Working Unit,
Tinus Nuanto	Anggota Member	Pemimpin Divisi Satuan Kerja Manajemen Risiko, Division Leader of Risk Management Work Unit,

Rencana Kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi Tahun 2025

Komite Pengarah Teknologi Informasi menetapkan rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga dapat berjalan secara optimal. Rencana kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada bidang tugas Komite Pengarah Teknologi Informasi.

Information Technology Steering Committee Work Plan for 2025

The Information Technology Steering Committee sets an annual work plan that is used as a reference in carrying out its duties and responsibilities so that they can run optimally. The Information Technology Steering Committee's work plan for 2025 was prepared by being guided by the scope of duties of the Information Technology Steering Committee.

Untuk membahas berbagai permasalahan yang terkait dengan bidang tugasnya, kegiatan Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi yang akan diadakan secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam waktu 1 (satu) tahun dan/atau pada keadaan tertentu, seperti *force majeure* dan tindak lanjut temuan audit secara intern/ekstern untuk membicarakan hal-hal terkait strategi penggunaan Teknologi Informasi yang didokumentasikan dalam bentuk Notulen Rapat.

To discuss various issues related to its field of duties, the activities of the Information Technology Steering Committee Meetings will be held periodically at least 2 (two) times a year and/or under certain circumstances, such as force majeure and follow-up on internal/external audit findings, to discuss matters related to Information Technology usage strategies documented in the form of Meeting Minutes.

Pelaksanaan Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi telah berjalan secara efektif dan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali selama tahun 2025. Berikut ini jumlah rapat dan agenda yang dibahas dalam Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi sepanjang tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

Implementation of Information Technology Steering Committee Meetings

The Information Technology Steering Committee meetings have run effectively and were held 3 (three) times during 2025. The following is the number of meetings and agendas discussed in the Information Technology Steering Committee Meetings throughout 2025:

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1.	24 April 2025 April 24, 2025	1. Isu Fraud BI-Fast 2. Addendum Kerjasama dengan Tambahan Jaminan Keamanan Pada CBS dan Layanan Transaksi Digital. 3. Evaluasi layanan SMS Banking Bank Sulteng 4. Aplikasi Asuransi 5. Isu lainnya yang berkenaan dengan Teknologi Informasi pada Bank Sulteng 1. BI-Fast Fraud Issues 2. Cooperation Addendum regarding Additional Security Guarantees for CBS and Digital Transaction Services 3. Evaluation of Bank Sulteng SMS Banking Services 4. Insurance Application 5. Other issues pertaining to Information Technology at Bank Sulteng
2.	04 Juli 2025 July 04, 2025	1. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Khusus Teknologi Informasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2025 1. Follow-up on Information Technology Special Audit Findings by the Financial Services Authority (OJK) Year 2025
3.	02 September 2025 September 02, 2025	1. Rapat Komite Teknologi Infomasi (TI) 1. Information Technology (IT) Committee Meeting

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi melakukan identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko, penetapan kebijakan dan strategi manajemen risiko.

Risk Management Committee The Risk

Management Committee is a committee tasked with assisting the Board of Directors in conducting risk identification, measurement, and monitoring, as well as determining risk management policies and strategies.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Sebagai organ pendukung Direksi, Komite Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:

1. Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk Strategi Manajemen risiko, tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko, kerangka manajemen risiko serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
2. Penyempurnaan proses manajemen risiko secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko bank dan hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan manajemen risiko.

Duties and Responsibilities of the Risk Management Committee

As a supporting organ of the Board of Directors, the Risk Management Committee has the following duties and responsibilities:

1. Preparing Risk Management policies and their amendments, including Risk Management Strategy, the level of risk taken and risk tolerance, risk management framework, as well as contingency plans to anticipate the occurrence of abnormal conditions.
2. Continuously and periodically refining the risk management process as a result of changes in the bank's external conditions affecting capital adequacy and the bank's risk profile, as well as the results of evaluating the effectiveness of risk management implementation.

3. Menetapkan hal-hal terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan berdasarkan suatu pertimbangan bisnis dan hasil analisis yang terkait dengan transaksi atau kegiatan usaha bank tertentu sehingga memerlukan adanya penyimpangan terhadap prosedur yang telah ditetapkan bank.

1. Determining matters related to business decisions that deviate from normal procedures, such as decisions on significant business expansion overages compared to the previously established bank business plan, or taking risk positions/ exposures that exceed established limits based on business considerations and analysis results related to specific bank transactions or business activities, thus requiring deviations from procedures determined by the bank.

Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 174/SK-DIR/BPD-ST/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Struktur Keanggotaan dan Pedoman Tata Kerja Komite Manajemen Risiko PT Bank Sulteng, susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko Bank Sulteng adalah sebagai berikut:

Risk Management Committee Structure and Membership

In accordance with the Board of Directors Decree No. 174/SK-DIR/BPD-ST/2024 dated December 16, 2024, regarding the Membership Structure and Operational Guidelines of the Risk Management Committee of PT Bank Sulteng, the membership composition of Bank Sulteng's Risk Management Committee is as follows:

Jabatan Position	**Dijabat oleh** Served by	**Hak Suara** Voting Rights
Anggota Tetap Permanent Member	Direktur Utama President Director	Memiliki Own
	Direktur Kepatuhan Compliance Director	Memiliki Own
	Direktur Bisnis Business Director	Memiliki Own
	Pimpinan Divisi SKAI & Anti Fraud Head of SKAI & Anti Fraud Division	Tidak Memiliki Do not have
	Pimpinan Satuan Kerja Kepatuhan Head of SKAI & Anti Fraud Division	Tidak Memiliki Do not have
	Pimpinan Divisi Penyelesaian Kredit NPL Head of NPL Settlement Division	Tidak Memiliki Do not have
	Pimpinan Divisi Operasional Head of Operations Division	Tidak Memiliki Do not have
Sekretaris (merangkap Anggota Tetap) Secretary (concurrently Permanent Member)	Pimpinan SKMR SKMR Leader	Tidak Memiliki Do not have
Anggota Tidak Tetap Non-permanent Member	Unit Kerja terkait Related Work Units	Tidak Memiliki Do not have

Profil Anggota Komite Manajemen Risiko

Berikut ini profil anggota Komite Manajemen Risiko Bank Sulteng, yaitu sebagai berikut:

Profile of Risk Management Committee Members

he following is the profile of Bank Sulteng's Risk Management Committee members:

Nama Name	**Jabatan** Position	
	di Komite in the Committee	**di Perusahaan** in the Company
Hj. Ramiyatie	Anggota Tetap Permanent Members	Direktur Utama President Director
Judy Koagow	Anggota Tetap Permanent Members	Direktur Kepatuhan Compliance Director
Myrna Rianasari	Anggota Tetap Permanent Members	Direktur Bisnis Business Director

Nama Name	Jabatan Position	
	di Komite in the Committee	di Perusahaan in the Company
Moh. Taslim	Anggota Tetap Permanent Members	Pimpinan Divisi SKAI & Anti Fraud Head of SKAI & Anti Fraud Division
Rizal Akase	Anggota Tetap Permanent Members	Pimpinan Satuan Kerja Kepatuhan Head of Compliance Work Unit
Wirdaningsih	Anggota Tetap Permanent Members	Pimpinan Divisi Penyelesaian Kredit NPL Head of NPL Settlement Division
Muh Abduh Bunre	Anggota Tetap Permanent Members	Pimpinan Divisi Operasional Head of Operations Division
Tinus Nuanto	Sekretaris (merangkap Anggota Tetap) Secretary (concurrently Permanent Member)	Pimpinan SKMR SKMR Leader

Rencana Kerja Komite Manajemen Risiko Tahun 2025

Komite Manajemen Risiko menetapkan rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga dapat berjalan secara optimal. Rencana kerja Komite Manajemen Risiko tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada bidang tugas Komite Manajemen Risiko.

Untuk membahas berbagai permasalahan yang terkait dengan bidang tugasnya, Komite Manajemen Risiko akan mengadakan Rapat minimal 3 (tiga) bulan sekali dan dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan, yaitu jika Direksi memandang perlu atau adanya usulan anggota KOMENKO melalui Sekretaris KOMENKO.

Risk Management Committee Work Plan for 2025

The Risk Management Committee sets an annual work plan that is used as a reference in carrying out its duties and responsibilities so that they can run optimally. The Risk Management Committee's work plan for 2025 was prepared by being guided by the scope of duties of the Risk Management Committee.

To discuss various issues related to its field of duties, the Risk Management Committee will hold meetings at least once every 3 (three) months and can be held at any time if necessary, i.e., if deemed necessary by the Board of Directors or upon the proposal of KOMENKO members through the KOMENKO Secretary.

Pelaksanaan Rapat Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko Bank Sulteng telah menyelenggarakan rapat-rapat sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Rapat Komite Manajemen Risiko dilaksanakan dalam rangka membahas dan memutuskan berbagai permasalahan yang menjadi bidang tugas Komite Manajemen Risiko. Sepanjang tahun 2025 pelaksanaan rapat Komite Manajemen Risiko secara umum telah berjalan secara memadai baik yang bersifat internal Komite Manajemen Risiko maupun rapat yang dilaksanakan bersama pihak lain.

Implementation of Risk Management Committee Meetings

Bank Sulteng's Risk Management Committee has held meetings as part of the implementation of its duties and responsibilities. Risk Management Committee meetings are held to discuss and decide on various issues that fall under the scope of duties of the Risk Management Committee. Throughout 2025, the implementation of Risk Management Committee meetings generally ran adequately, both internal Risk Management Committee meetings and meetings held with other parties.

Komite Personalia

Komite Personalia merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam menetapkan strategi pengelolaan SDM, menetapkan dan mengembangkan organisasi, serta menetapkan arah strategis pengembangan Sistem Informasi SDM.

Personnel Committee

The Personnel Committee is a committee tasked with assisting the Board of Directors in establishing HR management strategies, establishing and developing the organization, as well as setting the strategic direction for the development of HR Information Systems.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Personalia

Sebagai organ pendukung Direksi, Komite Personalia memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:

1. Melakukan penilaian serta merekomendasikan pegawai yang menerima *reward* dan *punishment*.
2. Menindaklanjuti temuan serta rekomendasi baik dari Auditor Internal maupun Auditor External terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah.
3. Menentukan bobot dan jenis sanksi *(punishment)* terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran.
4. Hal-hal lain menyangkut kepegawaian yang dianggap perlu untuk dibahas di tingkat Komite Personalia.
5. Membuat dan menyampaikan rekomendasi atas hasil keputusan Rapat Komite Personalia kepada Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia dan/atau kepada Direksi.

Duties and Responsibilities of the Personnel Committee

As a supporting organ of the Board of Directors, the Personnel Committee has the following duties and responsibilities:

1. Conducting assessments and recommending employees who receive rewards and punishments.
2. Following up on findings and recommendations from both Internal Auditors and External Auditors regarding violations committed by Employees of PT. Regional Development Bank of Central Sulawesi.
3. Determining the weight and type of sanction (punishment) against employees who commit violations.
4. Other personnel-related matters deemed necessary to be discussed at the Personnel Committee level.
5. Preparing and submitting recommendations based on the decisions of the Personnel Committee Meeting to the Director in charge of Human Resources and/or the Board of Directors.

Struktur dan Keanggotaan Komite Personalia

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 148/SK/BPD-ST/2025 tentang Perubahan Komite Personalia PT Bank Sulteng tanggal 22 September 2025, susunan keanggotaan Komite Personalia Bank Sulteng adalah sebagai berikut:

Personnel Committee Structure and Membership

In accordance with the Board of Directors Decree No. 148/SK/BPD-ST/2025 concerning the Amendment of the Personnel Committee of PT Bank Sulteng dated September 22, 2025, the membership composition of Bank Sulteng's Personnel Committee is as follows:

Jabatan Position	**Dijabat oleh** Served by
Ketua Chair	Pemimpin Divisi SDM HR Division Leader
Sekretaris Secretary	Pemimpin Bagian Pengembangan & Evaluasi Pegawai Employee Development & Evaluation Section Leader
Anggota Member	Pemimpin Divisi SKK SKK Division Leader
	Pemimpin Divisi SKMR SKMR Division Leader
	Pemimpin Divisi Operasional Operations Division Leader
	Pemimpin Divisi perencanaan Strategis Strategic Planning Division Leader
Pemantau Monitors	Ketua Serikat Pekerja PT Bank Sulteng Chairman of PT Bank Sulteng Labor Union
Narasumber Source	Divisi SKAI & Anti Fraud Pemimpin Divisi/Pemimpin Cabang/ Capem/Atasan pegawai yang bersangkutan SKAI & Anti Fraud Division Division Leader/Branch Leader/Capem/Superior of the employee concerned

Profil Anggota Komite Personalia

Berikut ini profil anggota Komite Personalia Bank Sulteng, yaitu sebagai berikut:

Profile of Personnel Committee Members

The following is the profile of Bank Sulteng's Personnel Committee members:

Nama Name	**Jabatan** Position	
	di Komite in the Committee	**di Perusahaan** in the Company
I Gusti P. Suartika, SE	Ketua Chair	Pemimpin Divisi SDM HR Division Leader
Febi Aprilyanti, SE, MM	Sekretaris Secretary	Pemimpin Bagian Pengembangan & Evaluasi Pegawai Employee Development & Evaluation Section Leader
Rizal Akase	Anggota Member	Pemimpin Divisi SKK SKK Division Leader
Tinus Nuanto	Anggota Member	Pemimpin Divisi SKMR SKMR Division Leader
Wirdaningsih	Anggota Member	Pemimpin Divisi Hukum & Penyelamatan Kredit Head of Legal & Credit Rescue Division
Muh. Abduh Bunre	Anggota Member	Pemimpin Divisi Operasional Operations Division Leader
Moh. Taslim	Narasumber Member	Pemimpin Divisi SKAI & Anti Fraud SKAI & Anti Fraud Division Leader
Moh. Abduh Borman, SH	Pemantau Monitors	Ketua Serikat Pekerja PT Bank Sulteng Chairman of PT Bank Sulteng Labor Union

Rencana Kerja Komite Personalia Tahun 2025

Komite Personalia menetapkan rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga dapat berjalan secara optimal. Rencana kerja Komite Personalia tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada bidang tugas Komite Personalia.

Personnel Committee Work Plan for 2025

The Personnel Committee sets an annual work plan that is used as a reference in carrying out its duties and responsibilities so that they can run optimally. The Personnel Committee's work plan for 2025 was prepared by being guided by the scope of duties of the Personnel Committee.

Pelaksanaan Rapat Komite Personalia

Rapat Komite Personalia telah berjalan secara efektif dan dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali selama tahun 2025. Secara umum agenda pembahasan dalam Rapat Komite Personalia yaitu mengenai permasalahan yang terkait dengan kepegawaian.

Implementation of Personnel Committee Meetings

Personnel Committee meetings have been conducted effectively and were convened 7 (seven) times throughout 2025. In general, the discussion agendas in the Personnel Committee meetings pertained to staffing-related matters.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Bank telah mempertimbangkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Selaras dengan regulasi tersebut, pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Sulteng telah mempertimbangkan dan memenuhi faktor keberagaman.

Bank Sulteng berpandangan bahwa keberagaman komposisi Dewan Komisaris Dan Direksi merupakan kebutuhan dalam mengelola Perusahaan, terutama terkait proses pengambilan keputusan. Dengan keberagaman komposisi tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan dunia usaha dengan kebijakan-kebijakan strategisnya serta memberikan alternatif pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas dan komprehensif.

Bank Sulteng memiliki anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang secara umum memiliki latar belakang dalam dunia perbankan dengan komposisi yang beragam. Perusahaan menghargai dan menghormati setiap perbedaan dalam sudut pandang, pengetahuan, kemampuan dan pengalaman masing-masing individu, serta tidak membeda-bedakan ras, etnis, jenis kelamin dan agama yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Bank Sulteng, menetapkan Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dengan mempertimbangkan persyaratan minimum untuk pemenuhan unsur keberagaman. Hal ini tercermin dalam unsur keberagaman anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Bank. Demikian juga dengan keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan, baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu sesuai dengan kebutuhan Bank. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi.

Gambaran unsur keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Bank Sulteng dijelaskan lebih lanjut pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

DIVERSITY IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

The Bank's policy on the diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors' composition has considered the Financial Services Authority (OJK) Circular Letter regarding the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks. In alignment with these regulations, the appointment of the Board of Commissioners and Board of Directors of Bank Sulteng has considered and fulfilled diversity factors.

Bank Sulteng believes that diversity in the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors is a necessity in managing the Company, particularly concerning the decision-making process. This diverse composition is expected to address business challenges through strategic policies and provide alternative decision-making by considering broader and more comprehensive aspects.

Bank Sulteng consists of members of the Board of Commissioners and Board of Directors who generally possess backgrounds in the banking industry with a diverse composition. The Company values and respects every difference in perspective, knowledge, ability, and experience of each individual, and does not discriminate based on race, ethnicity, gender, or religion.

Bank Sulteng determines the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors by considering the minimum requirements for fulfilling diversity elements. This is reflected in the diversity of the Board of Commissioners by observing the expertise, knowledge, and experience required for the execution of supervisory duties and the provision of advice. Similarly, the diversity in the composition of the Board of Directors represents a desired combination of characteristics, both for the Board as an organ and for its members individually, in accordance with the Bank's needs. This combination is determined by considering expertise, knowledge, and experience appropriate to the division of duties and functional positions of the Board of Directors.

An overview of the diversity elements in the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of Bank Sulteng is further explained in the Company Profile Chapter of this Annual Report.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Evaluasi atas kinerja Direksi dan Dewan Komisaris setiap tahunnya ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI) dan berdasarkan pencapaian atas rencana kerja yang sudah ditetapkan pada awal tahun. Pemegang Saham menilai kinerja Dewan Komisaris dan Direksi yang dilaksanakan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baik secara kolegial maupun individu berdasarkan kriteria evaluasi kinerja yang telah ditetapkan. Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi menjadi bahan pertimbangan untuk diangkat kembali serta menjadi dasar dalam perhitungan dan pemberian remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.

Pelaksanaan penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris secara bersama-sama melakukan penilaian mandiri *(self-assessment).* Hasil penilaian tersebut dievaluasi dalam Rapat Dewan Komisaris serta dipertanggung jawabkan dalam RUPS. Penilaian kinerja meliputi pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan jalannya Perusahaan dan memberi nasihat kepada Direksi untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta pelaksanaan tugas yang secara khusus diberikan kepada Dewan Komisaris menurut Anggaran Dasar dan/atau berdasarkan keputusan RUPS. Selain itu penilaian juga dilakukan atas kehadiran dalam rapat-rapat, kontribusi dalam proses pengambilan keputusan serta keterlibatan dalam penugasan tertentu.
b. Penilaian kinerja terhadap Direksi juga dilakukan secara kolegial. Direksi secara bersama-sama melakukan penilaian mandiri *(self-assessment)* dan kemudian hasil penilaian tersebut dievaluasi dan dipertanggungjawabkan dalam RUPS. Evaluasi atas kinerja Direksi antara lain mencakup hal-hal berikut:
   - Pencapaian target kinerja dalam kontrak manajemen dan rencana kerja.
   - Komitmen dalam memenuhi arahan Pemegang Saham.
   - Kinerja pengurusan organisasi berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi.
   - Kehadiran dalam rapat-rapat dan kontribusi dalam proses pengambilan keputusan.
   - Keterlibatan dalam penugasan tertentu.
   - Komitmen dalam memajukan kepentingan Perusahaan.
   - Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan-kebijakan Perusahaan.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

The annual evaluation of the performance of the Board of Directors and the Board of Commissioners is determined in the General Meeting of Shareholders (GMS) based on Key Performance Indicators (KPI) and the achievement of the work plan established at the beginning of the year. Shareholders assess the performance of the Board of Commissioners and Board of Directors through the GMS, both collegially and individually, based on established performance evaluation criteria. The results of these performance assessments serve as consideration for reappointment and as the basis for calculating and awarding remuneration.

The implementation of the performance assessment for the Board of Directors and Board of Commissioners is conducted as follows:

a. The Board of Commissioners collectively conducts a self-assessment. The results are evaluated in a Board of Commissioners Meeting and accounted for in the GMS. The performance assessment includes the execution of supervisory duties over the Company's management policies and providing advice to the Board of Directors for the interests and objectives of the Company, as well as the execution of duties specifically assigned to the Board of Commissioners according to the Articles of Association and/or GMS resolutions. Additionally, assessments are made regarding meeting attendance, contributions to the decision-making process, and involvement in specific assignments.

b. The performance assessment of the Board of Directors is also conducted collegially. The Board of Directors collectively performs a self-assessment, which is then evaluated and accounted for in the GMS. The evaluation of the Board of Directors' performance includes, among others:
   - Achievement of performance targets in management contracts and work plans.
   - Commitment to fulfilling Shareholder directives.
   - Organizational management performance based on the duties and responsibilities of each Board member.
   - Meeting attendance and contribution to the decision-making process.
   - Involvement in specific assignments.
   - Commitment to advancing the Company's interests.
   - Compliance with applicable laws, regulations, and Company policies.

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Bank menerapkan tata kelola dalam pemberian remunerasi serta kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris. Perusahaan menetapkan kebijakan bahwa Pemegang Saham memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi, yaitu dengan ketentuan mengenai besarnya remunerasi dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Penetapan kebijakan tersebut dengan memperhatikan ketentuan penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

The Bank implements governance in the provision of remuneration and remuneration policies for the Board of Directors and the Board of Commissioners. The Company establishes a policy that Shareholders hold full authority to determine the remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors, whereby the amount of remuneration and/or allowances is determined by the General Meeting of Shareholders (GMS).

The establishment of this policy observes the provisions for implementing governance in remuneration as carried out in accordance with the Financial Services Authority (OJK) Regulations regarding the implementation of governance in remuneration for commercial banks, sharia commercial banks, and sharia business units.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Pemberian remunerasi dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, kewajaran dan transparansi. Remunerasi diusulkan dan dikaji melalui beberapa tahap hingga ditetapkan melalui RUPS. Direksi dapat menyusun usulan mengenai besarnya remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dengan keterlibatan Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan langkah-langkah yaitu menyusun dan menelaah kebijakan mengenai pengusulan remunerasi yang dilakukan oleh Direksi serta menyampaikan usulan remunerasi (gaji, tunjangan dan fasilitas serta tantiem/insentif kerja) kepada RUPS. Selanjutnya RUPS akan memutuskan jumlah remunerasi yang diterima oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Adapun tahapan Penetapan Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi di Perusahaan, sebagai berikut:

Procedures for Determining Remuneration

The provision of remuneration is carried out based on the principles of prudence, fairness, and transparency. Remuneration is proposed and reviewed through several stages until established by the GMS. The Board of Directors may draft a proposal regarding the amount of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors to be submitted to the Board of Commissioners. The Board of Commissioners, with the involvement of the Nomination and Remuneration Committee, takes steps to draft and review the remuneration proposal policy and submits the remuneration proposal (salary, allowances, facilities, and tantiem/performance incentives) to the GMS.

Subsequently, the GMS will decide on the total remuneration received by the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.



Indikator Penetapan Remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Secara umum besaran nilai remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain:

- Skala usaha;
- Kompleksitas usaha;
- Tingkat inflasi;
- Kondisi dan kemampuan keuangan, dan
- Faktor-faktor lain yang relevan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indicators for Determining Remuneration

Generally, the remuneration value for the Board of Commissioners and Board of Directors is determined by considering several factors, including:

- Scale of business;
- Business complexity;
- Inflation rate;
- Financial condition and capacity; and
- Other relevant factors, while adhering to applicable laws and regulations.

Struktur dan Besaran Remunerasi Dewan Komisaris Dan Direksi

Perusahaan menggunakan indikator kinerja yang diatur dalam kontrak manajemen antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham yang berisi target-target Rencana Bisnis Bank termasuk target *Key Performance Indicator* (KPI) yang mencakup indikator, pembobotan, dan sasaran yang harus dicapai dalam menentukan besaran remunerasi yang dapat diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Pencapaian dalam target-target Rencana Bisnis Bank menjadi pertimbangan dalam penentuan paket dan besaran remunerasi yang diterima.

Struktur remunerasi yang diterima oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan, tantiem dan fasilitas dan bonus, sebagaimana tergambar berikut ini.

Structure and Amount of Remuneration for the Board of Commissioners and Directors

The Company utilizes performance indicators stipulated in the management contract between the Board of Directors and the Board of Commissioners and Shareholders. This includes targets for the Bank's Business Plan, including Key Performance Indicator (KPI) targets. These include indicators, weightings, and targets to be achieved in determining the remuneration received by members of the Board of Commissioners and Directors. Achievement of the Bank's Business Plan targets is taken into consideration in determining the remuneration package and amount received.

The remuneration structure received by members of the Board of Commissioners and Directors consists of salary, allowances, bonuses, facilities, and bonuses, as illustrated below.

No.	Paket Remunerasi Dewan Komisaris Board of Commissioners Remuneration Package	Paket Remunerasi Direksi Directors' Remuneration Package
1.	Honorarium Honorarium	Gaji Salary
2.	Tunjangan terdiri dari: - Tunjangan Hari Raya - Tunjangan Pakaian Dinas - Tunjangan akhir Tahun - Tunjangan Pendidikan Allowances consist of: - *Holiday Allowance* - *Office Clothing Allowance* - *Year-end allowance* - *Education Allowance*	Tunjangan terdiri dari: - Tunjangan Hari Raya - Tunjangan Pakaian Dinas - Tunjangan akhir Tahun - Tunjangan Pendidikan Allowances consist of: - *Holiday Allowance* - *Office Clothing Allowance* - *Year-end allowance* - *Education Allowance*
3.	Fasilitas terdiri dari: - Fasilitas Kesehatan, - Fasilitas Kendaraan Facilities consist of: - *Health Facilities,* - *Vehicle Facilities*	Fasilitas terdiri dari: - Fasilitas Kesehatan, - Fasilitas Kendaraan, Facilities consist of: - *Health Facilities,* - *Vehicle Facilities,*
4.	Bonus Kwartal I Quarterly Bonus I	Bonus Kwartal I Quarterly Bonus I
5	Bonus Kwartal II Quarterly Bonus II	Bonus Kwartal II Quarterly Bonus II
6	Bonus Kinerja Performance Bonus	Bonus Kinerja Performance Bonus
7.	Tantiem	Tantiem

Pada tahun 2025, besaran remunerasi yang diterima secara keseluruhan oleh Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan struktur dan paket remunerasi, yaitu untuk Paket Remunerasi bagi Direksi berjumlah Rp24.165 juta dan untuk paket Dewan Komisaris berjumlah Rp6.065 juta dengan rincian sebagai berikut:

In 2025, the total amount of remuneration received by the Board of Directors and the Board of Commissioners is in accordance with the remuneration structure and package, namely the Remuneration Package for the Board of Directors is IDR 24,165 million and for the Board of Commissioners is IDR 6.065 million with the following details:

(dalam jutaan) (in million)

No.	Jenis Remunerasi	Jumlah Remunerasi Total Remuneration		Remuneration Type
		Direksi Directors	**Dewan Komisaris** Board of Commissioners	
1.	Gaji/Honorarium	5.141	1.905	Salary/Honorarium
2.	Tunjangan-tunjangan			Benefits
	- Tunjangan Hari Raya	643	233	- *Holiday Allowance*
	- Tunjangan Akhir Tahun	643	233	- *Year-end Allowance*
	- Tunjangan Perumahan	160	-	- *Housing Allowance*
	- Tunjangan Pakaian Dinas	65	40	- *Office Clothing Allowance*
	- Tunjangan Pendidikan	428	156	- *Education Allowance*
3.	Bonus Kuartal I	428	156	Quarterly Bonus I
4.	Bonus Kuartal II	428	156	Quarterly Bonus II
5.	Tantiem	12.596	3.186	Tantiem
3.	Bonus Kinerja	3.633	-	Performance Bonus
Total Remunerasi		**24.165**	**6.065**	**Total Remuneration**

Bonus Non-Kinerja dan Opsi Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Bank Sulteng tidak memberi Bonus Non-Kinerja dan Opsi Saham kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Bank Sulteng bukan perusahaan yang dimiliki oleh publik dan perusahaan tidak memiliki kebijakan terkait pemberian Bonus Non-Kinerja dan Opsi Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Non-Performance Bonuses and Stock Options for the Board of Commissioners and Directors

Bank Sulteng does not provide Non-Performance Bonuses or Stock Options to any member of the Board of Commissioners and Directors. Bank Sulteng is not a publicly-owned company, and the company does not have a policy regarding the provision of Non-Performance Bonuses and Stock Options for the Board of Commissioners and Directors.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan identifikasi, perencanaan dan pelaksanaan strategi pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan protokoler Dewan Komisaris demi terciptanya fungsi Kesekretariatan Dewan Komisaris yang berjalan efektif, efisien dan mendukung

SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In carrying out its functions, duties, and responsibilities, the Board of Commissioners is assisted by the Secretary to the Board of Commissioners. The Secretary to the Board of Commissioners has duties and functions in carrying out administrative and secretarial activities related to all Board of Commissioners activities. The Secretary to the Board of Commissioners is responsible for coordinating the identification, planning, and implementation of strategies for managing secretarial activities and protocols for the Board of Commissioners to ensure the Board of Commissioners' secretarial function runs effectively and efficiently and supports

kelancaran aktivitas Dewan Komisaris. Selain itu, peran Sekretaris Dewan Komisaris juga sangat penting dalam memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG sesuai dengan standar terbaik dan regulasi yang berlaku.

Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Dewan Komisaris dilakukan oleh Dewan Komisaris. Masa jabatan Sekretaris Dewan Komisaris ditentukan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan kebutuhan dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Penunjukan Sekretaris Dewan Komisaris

Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris. Untuk tahun 2025, pelaksanaan tugas Sekretaris Dewan Komisaris dilakukan oleh staf Sekretariat Dewan Komisaris. Dewan Komisaris masih melakukan proses rekrutmen untuk mencari kandidat yang tepat untuk mengisi jabatan Sekretaris Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris mempunyai fungsi pokok untuk memberikan dukungan kepada Dewan Komisaris guna memperlancar tugas-tugas Dewan Komisaris dan sebagai penghubung antara Dewan Komisaris dengan Direksi serta bertanggung jawab untuk menyediakan dan menyampaikan informasi yang penting dan dibutuhkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Sesuai *Job Description* Sekretaris Dewan Komisaris, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris dijabarkan sebagai berikut:

1. Mempersiapkan rapat termasuk bahan rapat Dewan Komisaris.
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Perusahaan.
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat, maupun dokumen penting lainnya.
4. Menyusun Rancangan rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
5. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris.
6. Memastikan Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dan menerapkan prinsip-prinsip GCG.
7. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara Berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
8. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

the smooth running of the Board of Commissioners' activities. Furthermore, the Secretary to the Board of Commissioners is crucial in ensuring the implementation of GCG principles in accordance with best practices and applicable regulations.

The appointment and dismissal of the Secretary to the Board of Commissioners is carried out by the Board of Commissioners. The term of office of the Secretary to the Board of Commissioners is determined by the Board of Commissioners as needed, without prejudice to the Board of Commissioners' right to dismiss him or her at any time.

Appointment of the Secretary to the Board of Commissioners

The appointment of the Secretary to the Board of Commissioners is determined by a Decree of the Board of Commissioners. For 2025, the duties of the Secretary to the Board of Commissioners will be carried out by staff from the Board of Commissioners Secretariat. The Board of Commissioners is currently conducting a recruitment process to find the right candidate to fill the position of Secretary to the Board of Commissioners.

Duties and Responsibilities of the Secretary to the Board of Commissioners

The Secretary to the Board of Commissioners' primary function is to provide support to the Board of Commissioners to facilitate the Board of Commissioners' duties and to act as a liaison between the Board of Commissioners and the Board of Directors. He or she is responsible for providing and conveying important information needed by the Board of Commissioners and the Board of Directors.

According to the Job Description of the Secretary to the Board of Commissioners, the duties and responsibilities of the Secretary to the Board of Commissioners are outlined as follows:

1. Preparing meetings, including meeting materials for the Board of Commissioners.
2. Preparing minutes of Board of Commissioners meetings in accordance with the Company's Articles of Association.
3. Administering Board of Commissioners documents, including incoming and outgoing correspondence, meeting minutes, and other important documents.
4. Preparing the Draft Work Plan and Budget for the Board of Commissioners.
5. Drafting reports for the Board of Commissioners.
6. Ensuring that the Board of Commissioners complies with applicable laws and regulations and implements GCG principles.
7. Providing information required by the Board of Commissioners periodically and/or at any time upon request.
8. Carrying out other duties assigned by the Board of Commissioners.

Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat Dewan Komisaris

Pada tahun 2025 Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan kegiatan, antara lain:

1. Mengkoordinasikan kegiatan rapat Dewan Komisaris dan Komite di bawah Dewan Komisaris.
2. Menjalankan fungsi sebagai notulis rapat Dewan Komisaris dan Komite di bawah Dewan Komisaris.
3. Berkoordinasi dengan Divisi terkait untuk membuat dan memastikan tersedianya materi, data, informasi yang diperlukan Dewan Komisaris untuk Rapat.
4. Mengelola laporan khusus pelaksanaan tugas Dewan Komisaris kepada lembaga eksternal.
5. Mengkoordinasikan kegiatan protokoler untuk Dewan Komisaris.
6. Mengkoordinasikan anggota Komite dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris
7. Membantu Dewan Komisaris dan Komite di bawah Dewan Komisaris dalam penyusunan Pedoman dan Tata Tertib Kerja.
8. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai rencana kerja.

Pelatihan Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris dan staf Sekretariat Dewan Komisaris dapat mengikuti program pelatihan yang dibutuhkan sebagai bagian pengembangan kapasitas untuk memperkuat kemampuan dalam membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Perusahaan memfasilitasi kebutuhan akan pelatihan sekretariat Dewan Komisaris yang didasarkan pada program kerja yang dibuat dan berdasarkan usulan kebutuhan pelatihan.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) berfungsi sebagai penghubung yang memfasilitasi komunikasi antara Perusahaan dan Pemangku Kepentingan, dan berperan dalam memperlancar komunikasi di antara berbagai organ Perusahaan serta dalam menjalin hubungan yang solid dengan Pemegang saham dan Regulator. Sebagai organ pendukung, Sekretaris Perusahaan juga memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga persepsi publik terhadap citra Perusahaan.

Penunjukan Sekretaris Perusahaan didasarkan pada prosedur internal Perusahaan, pengangkatan Sekretaris Perusahaan dilakukan oleh Direktur Utama dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Sekretaris Perusahaan memiliki kewajiban langsung untuk melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Direktur Utama.

Implementation of the Board of Commissioners Secretariat Activities

In 2025, the Secretary of the Board of Commissioners carried out the following activities:

1. Coordinating meetings of the Board of Commissioners and Committees under the Board of Commissioners.
2. Acting as a note-taker for meetings of the Board of Commissioners and Committees under the Board of Commissioners.
3. Coordinating with relevant Divisions to prepare and ensure the availability of materials, data, and information required by the Board of Commissioners for meetings.
4. Managing special reports on the implementation of the Board of Commissioners' duties to external institutions.
5. Coordinating protocol activities for the Board of Commissioners.
6. Coordinating Committee members to facilitate the Board of Commissioners' duties.
7. Assisting the Board of Commissioners and Committees under the Board of Commissioners in preparing Work Guidelines and Rules of Procedure.
8. Preparing reports on the implementation of activities and budgets in accordance with the work plan.

Board of Commissioners Secretary Training

The Board of Commissioners Secretary and staff of the Board of Commissioners Secretariat can participate in required training programs as part of capacity development to strengthen their abilities in assisting the Board of Commissioners in carrying out their duties. The Company facilitates training for the Board of Commissioners secretariat based on the established work program and proposed training needs.

CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary serves as a liaison, facilitating communication between the Company and its stakeholders, and plays a role in facilitating communication between various Company organs and in establishing strong relationships with shareholders and regulators. As a supporting body, the Corporate Secretary also has the important responsibility of maintaining public perception of the Company's image.

The appointment of the Corporate Secretary is based on the Company's internal procedures. The appointment of the Corporate Secretary is made by the President Director and requires approval from the Board of Commissioners. The Corporate Secretary is directly responsible for reporting his/her activities periodically to the President Director.

Profil Corporate Secretary

Corporate Secretary Profile



I Gusti P. Suartika
Pth. Corporate Secretary
Act. of Corporate Secretary

Periode Menjabat Term of Office	:	26 Januari 2026 sd 09 Februari 2026 January 26, 2026 to February 9, 2026
Tempat Tanggal Lahir & Usia Place, Date of Birth & Age	:	Jembrana, 06 Agustus 1971 / 54 Tahun per 31 Desember 2025 Jembrana, 06 Agustus 1971 / 54 years old as of 31 December 2025
Domisili & Kewarganegaraan Domicile & Nationality	:	Palu, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	Sarjana Ekonomi, UNISMUH Palu (2010) Bachelor of Economics, UNISMUH Palu (2010)
Sertifikasi Certifications	:	• Sertifikasi Manajemen Risiko Level IV • Risk Management Certification Level IV • Sertifikasi Manajemen Umum Dana Pensiun • Pension Fund General Management
Pengalaman Kerja Career History	:	• Pemimpin Bagian Administrasi & Kepegawaian (2019) • Pjs. Pemimpin Divisi SDM (2021) • Pemimpin Divisi SDM (2022) • Head of Administration and Personnel Division (2019) • Acting Head of Human Resources Division (2021) • Head of Human Resources Division (2022)

Dasar Hukum Penunjukan Corporate Secretary

Corporate Secretary saat ini dijabat oleh I Gusti P. Suartika diangkat berdasarkan Memo Internal Nomor: 6498/BPD-ST/MI/DIR/SDM/2025 tentang Penunjukan Sementara Sekretaris Perusahaan PT Bank Sulteng.

Perusahaan membuat ketentuan kualifikasi untuk dapat menduduki jabatan Kepala Divisi *Corporate Secretary* sebagaimana dijelaskan dalam dokumen ketentuan Persyaratan Kompetensi Jabatan. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan juga mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Sekretaris Perusahaan.

Legal Basis for Appointment of Corporate Secretary

The current Corporate Secretary is I Gusti P. Suartika, appointed based on Internal Memo Number: 6498/BPD-ST/MI/DIR/SDM/2025 concerning the Temporary Appointment of the Corporate Secretary of PT Bank Sulteng..

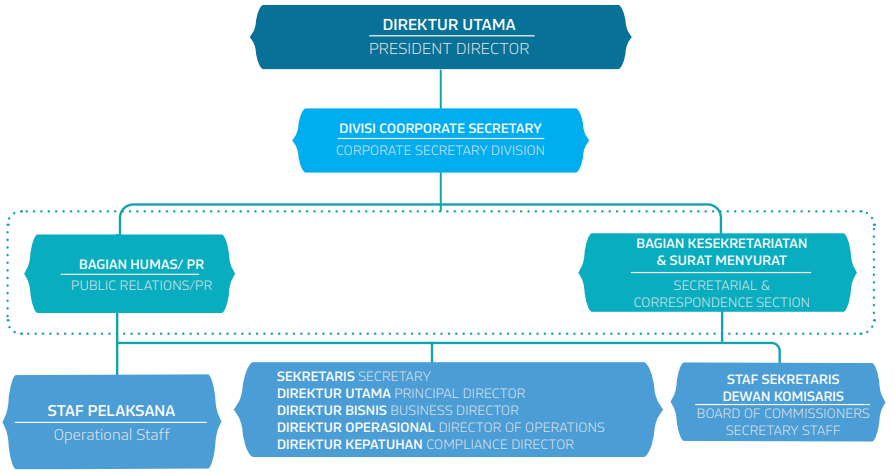
The Company establishes qualification requirements for the position of Head of the Corporate Secretary Division, as outlined in the Job Competency Requirements document. The appointment of the Corporate Secretary also refers to the provisions of the Financial Services Authority Regulation concerning Corporate Secretaries.

Struktur Organisasi Divisi Corporate Secretary

Struktur Organisasi Divisi *Corporate Secretary* diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 191/SK-DIR/BPD-ST/2025 Tentang Perubahan Struktur Organisasi PT Bank Sulteng Tahun 2025. Bagan struktur organisasi Divisi Corporate Secretary sebagai berikut:

Organizational Structure of the Corporate Secretary Division

The organizational structure of the Corporate Secretary Division is regulated by Board of Directors Decree Number 191/SK-DIR/BPD-ST/2025 concerning Changes to the Organizational Structure of PT Bank Sulteng in 2025. The organizational structure chart of the Corporate Secretary Division is as follows:



Tugas dan Tanggung Jawab Corporate Secretary

Corporate Secretary Bank Sulteng mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu:

- Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran *(Business Plan) Divisi Corporate Secretary*
- Bertanggung jawab atas terselenggaranya dukungan kesekretariatan dan protokol kepada Direksi.
- Mengkoordinir administrasi surat masuk/ keluar dan meneliti disposisi Direksi serta menyampaikannya kepada unit kerja yang dituju.
- Bertanggung jawab atas kelancaran arus dokumen yang beredar antar Direksi.
- Memantau dan menginformasikan kembali tindak lanjut atas surat-surat/dokumen yang telah di disposisi Direksi yang ditujukan kepada Unit Kerja terkait.
- Menginformasikan kepada Direksi atas jadwal undangan yang harus dihadiri baik secara tertulis maupun lisan dan bekerja sama dengan sekretaris Direksi dalam hal sebagai berikut:
- Mengkomunikasikan kepada Divisi/Unit Kerja terkait untuk mempersiapkan/melengkapi bahan dalam rangka pelaksanaan rapat sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- Membuat notulen rapat Direksi/Divisi dan rapat Pimpinan serta menyampaikan hasil rapat kepada Direksi dan Unit Kerja terkait.
- Mengatur dan menyusun rencana perjalanan dinas/ kunjungan kerja resmi Direksi.
- Mengkoordinir seluruh kebutuhan Direksi dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan berkoordinasi dengan Unit Kerja terkait.
- Mengkoordinir pelaksanaan tugas sekretaris dan protokoler Direksi.
- Mengkoordinir penyelenggaraan penanda-tanganan kerja sama dengan pihak ketiga, serah

Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

The Corporate Secretary of Bank Sulteng has the following duties and responsibilities:

- Preparing the Corporate Secretary Division's Work Plan and Budget.
- Responsible for providing secretarial and protocol support to the Board of Directors.

- Coordinating the administration of incoming and outgoing mail, reviewing the Directors' dispositions and submitting them to the appropriate work units.
- Responsible for ensuring the smooth flow of documents circulating among the Board of Directors.
- Monitoring and providing follow-up information on letters/documents dispositioned by the Directors to the relevant Work Units.

- Informing the Board of Directors of the schedule of invitations to attend, both in writing and verbally, and collaborating with the Board of Directors' secretary in the following matters:
- Communicating with the relevant Divisions/Work Units to prepare/complete materials for meetings according to the predetermined schedule.

- Preparing minutes of Board of Directors/Division and Leadership meetings and conveying meeting results to the Board of Directors and relevant Work Units.
- Arranging and preparing official travel/working visit plans for the Board of Directors.
- Coordinate all the Board of Directors' needs for carrying out official duties in coordination with relevant Work Units.
- Coordinate the implementation of secretarial and protocol duties for the Board of Directors.
- Coordinate the signing of cooperation agreements with third parties, and handovers of Directors/

terima jabatan Direksi/Kepala Divisi/Kepala Unit/ Pemimpin Cabang.
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan upacara resmi Direksi.
- Mengkoordinir penyusunan sambutan/pidato Direksi untuk kegiatan intern maupun ekstern.
- Mengkoordinir penyusunan materi presentasi Direksi dalam rangka *expose* kepada pihak ekstern.
- Menyusun Buku Pedoman Perusahaan Divisi *Corporate Secretary*.
- Memberikan layanan konsultasi hukum mengenai masalah kebijakan, praktik hukum yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.
- Menampung dan melayani permintaan advis dari semua unit organisasi Bank dan memberikan penjelasan, bimbingan dan pemecahan atas masalah hukum yang berhubungan dengan pola kebijakan Bank.
- Mendampingi/membantu Divisi dan unit kerja lain dalam rangka melakukan negosiasi dengan pihak ekstern yang berkaitan dengan masalah hukum yang dihadapi.
- Mengkaji dan memberi saran hukum terhadap tindakan yang menyimpang dari kebijakan dan standar hukum yang berlaku.
- Memberikan saran atau pendapat hukum dalam rangka pembuatan skim produk baru beserta petunjuk pelaksanaannya.
- Mengusulkan pembentukan panitia dalam rangka penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan bertanggung jawab atas penyusunan laporan Pertanggungjawaban Direksi kepada Pemegang Saham.
- Bertanggung jawab atas terselenggaranya program-program kehumasan, pembinaan relasi, hubungan dengan media massa dan kegiatan protokol yang berhubungan dengan kepentingan Bank.
- Mengelola kegiatan informasi yang berhubungan dengan *corporate image* Bank termasuk *press release*.
- Menatausahakan dokumen yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- Mewakili Bank Sulteng dalam mengadakan hubungan dengan pihak ketiga.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direksi.

Division Heads/Unit Heads/Branch Managers.

- Coordinate the organization of official Board of Directors ceremonies.
- Coordinate the preparation of remarks/speeches by the Board of Directors for internal and external activities.
- Coordinate the preparation of presentation materials for the Board of Directors for exposures to external parties.
- Prepare the Corporate Secretary Division's Company Guidelines.

- Provide legal consultation services on policy issues and legal practices related to the Bank's business activities.

- Receive and serve requests for advice from all Bank organizational units and provide explanations, guidance, and solutions to legal issues related to the Bank's policy framework.
- Assist/assist Divisions and other work units in negotiating with external parties regarding legal issues they face.
- Review and provide legal advice on actions that deviate from applicable policies and legal standards.

- Provide legal advice or opinions regarding the development of new product schemes and their implementation guidelines.

- Propose the formation of a committee for the General Meeting of Shareholders (GMS) and be responsible for preparing the Board of Directors' Accountability Report to Shareholders.
- Responsible for the implementation of public relations programs, relationship building, media relations, and protocol activities related to the Bank's interests.
- Manage information activities related to the Bank's corporate image, including press releases.
- Administer documents related to their duties.
- Represent Bank Sulteng in establishing relationships with third parties.
- Perform other duties as assigned by the Board of Directors.

Program Pelatihan *Corporate Secretary*

Perusahaan selalu berupaya untuk memfasilitasi setiap pegawai untuk terus berkembang dengan memiliki sumber daya manusia yang unggul dan dapat bersaing. Pada tahun 2025, *Corporate Secretary* telah menerima program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan serta untuk mendukung pelaksanaan kerja yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi yang dibutuhkan.

Rincian pengembangan kompetensi yang diikuti oleh *Corporate Secretary* sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Corporate Secretary Training Program

The Company consistently strives to facilitate the continuous development of each employee by developing superior and competitive human resources. By 2025, the Corporate Secretary will have received training and competency development programs to enhance knowledge and support work performance that meets the required qualifications and competency standards.

Details of the competency development that the Corporate Secretary will participate in throughout 2025 are as follows:

NO.	NAMA PELATIHAN TRAINING NAME	PENYELENGGARA ORGANIZER	TEMPAT PELAKSANAAN ORGANIZER	WAKTU PELAKSANAAN DUE
1.	*In House Training Risk Awareness* In House Training Risk Awareness	Mutual Berkah Sejahtera	Palu	Maret 2025 March 2025
2.	*In House Training Public Speaking* In House Public Speaking Training	SKY Elite Indonesia	Palu	Maret 2025 March 2025
3.	*In House Trainig Security Awareness* In House Security Awareness Training	Mutual Berkah Sejahtera	Palu (Online)	Agustus 2025 August 2025
4.	Pelatihan Media *Handling* Media Handling Training	*Rayhan Gemilang Sejati*	Jakarta	Agustus 2025 August 2025
5.	Pelatihan MC Protokoler dan Kesekretariatan MC Protocol and Secretarial Training	Rayhan Gemilang Sejati	Jakarta	September 2025 September 2025
6.	*In House Training* Perlindungan Data Pribadi In House Training on Personal Data Protection	Mutual Berkah Sejahtera	Palu (Online)	Oktober 2025 October 2025
7.	*In House Training* APU PPT In House Training APU PPT	Kreasi Indo Mandiri	Palu (Online)	Oktober 2025 October 2025
8.	*In House Training Internal Control over Financing Report* In House Training Internal Control over Financing Report	Mutual Berkah Sejahtera	Palu (Online)	November 2025 November 2025

Pelaksanaan Tugas Dan tanggung Jawab *Corporate Secretary*

Corporate Secretary telah menjalankan sejumlah kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Berikut Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan *Corporate Secretary* selama tahun 2025, antara lain:

1. Menyiapkan dan menyerahkan laporan-laporan yang disyaratkan oleh ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

Implementation of Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

The Corporate Secretary has carried out a number of activities in accordance with their duties and responsibilities. The following activities were carried out by the Corporate Secretary during 2025:

1. Preparing and submitting reports required by the Financial Services Authority and Bank Indonesia.

2. Menyiapkan dan menyampaikan keterbukaan informasi.
3. Mempersiapkan dan melaksanakan RUPS Tahunan dan RUPS-LB Tahun 2025
4. Mengadakan Rapat Kerja Evaluasi Tahun 2024 dan RBB Tahun 2025.
5. Mengadakan Rapat Evaluasi Kinerja Triwulanan PT. Bank Sulteng.
6. Menyelenggarakan Rapat Internal Direksi dan Rapat Bersama Direksi dan Dewan Komisaris termasuk membuat risalah atas setiap rapat yang diadakan.
7. Menyelenggarakan kegiatan yang bersifat kehumasan, promosi perusahaan dan kegiatan yang terkait penciptaan *corporate image* Perusahaan.
8. Menjadi penghubung atas kegiatan dan kepentingan Perusahaan baik ke dalam maupun keluar Perusahaan.
9. Memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan atau seminar untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
10. Memperkuat wawasan dengan menghadiri pelatihan dan *workshop*, baik yang diselenggarakan oleh regulator maupun asosiasi profesi.

Laporan Pelaksanaan Tugas *Corporate Secretary*

Corporate Secretary membuat laporan pelaksanaan tugas secara tahunan untuk menjadi pertimbangan Direksi dalam menilai sejauhmana realisasi pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan. Laporan yang dibuat berdasarkan ketentuan dalam *job description* dan dengan mengacu pada Peraturan OJK No. 35/POJK/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik, khusus pada pasal 11 yang mengatur kewajiban Sekretaris Perusahaan menyusun laporan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun mengenai pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

Corporate Secretary membuat dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dengan menyampaikan laporan terkait kegiatan dan progress kegiatan yang dilakukan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan program kerja Divisi *Corporate Secretary* serta tugas lain yang diberikan Direktur Utama. Laporan yang disampaikan dibuat dalam bentuk laporan pencapaian rencana kerja dan realisasi pelaksanaan fungsi dan tugas Corporate Secretary selama tahun berjalan.

2. Preparing and submitting information disclosures.
3. Preparing and implementing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS).
4. Conducting the 2024 Evaluation Work Meeting and the 2025 Business Plan (RBB).
5. Conducting the Quarterly Performance Evaluation Meeting of PT. Bank Sulteng.
6. Conducting Internal Board of Directors Meetings and Joint Meetings with the Board of Directors and Commissioners, including preparing minutes of each meeting.
7. Conducting public relations activities, company promotions, and activities related to creating the Company's corporate image.
8. Acting as a liaison for the Company's activities and interests, both internally and externally.
9. Facilitating the organization of training and seminars for members of the Board of Directors and Board of Commissioners.
10. Strengthen your knowledge by attending training and workshops, both organized by regulators and professional associations.

Corporate Secretary Duties Implementation Report

The Corporate Secretary prepares an annual report on the implementation of duties for the Board of Directors to consider in assessing the extent to which activities have been implemented. This report is prepared based on the provisions in the job description and with reference to OJK Regulation No. 35/POJK/2014 concerning Corporate Secretaries of Issuer Companies or Public Companies, specifically Article 11, which stipulates the Corporate Secretary's obligation to prepare periodic reports at least once a year regarding the implementation of corporate secretarial functions to the Board of Directors, with a copy to the Board of Commissioners.

The Corporate Secretary prepares and reports on the implementation of his/her duties to the President Director, with a copy to the Board of Commissioners, and submits a report on activities and progress carried out in accordance with the scope of duties and work program of the Corporate Secretary Division, as well as other duties assigned by the President Director. This report is presented in the form of a report on the achievement of the work plan and the implementation of the Corporate Secretary's functions and duties during the current year.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Implementasi Sistem Pengendalian Internal ditujukan untuk menjamin semua kegiatan usaha Bank dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, maupun kebijakan dan prosedur internal Bank.

Sistem pengendalian internal yang efektif dapat membantu manajemen Perusahaan meningkatkan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjamin tersedianya laporan keuangan dan laporan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu, serta memenuhi efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha Perusahaan.

Terselenggaranya sistem pengendalian internal yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi Bank. Bank Sulteng memastikan seluruh unsur yang terlibat dalam kegiatan usaha Bank wajib melaksanakan pengendalian internal dengan mengacu pada pedoman dan SOP pengendalian internal Bank.

Kebijakan Pengendalian Internal

Bank Sulteng menetapkan Sistem Pengendalian Internal sebagai suatu mekanisme pengawasan yang dilaksanakan secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi. Penerapan Sistem Pengendalian Internal yang efektif akan menjaga dan mengamankan *asset* bank, menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat dan dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud* dan pelanggaran aspek kehati- hatian serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Untuk melaksanakan Sistem Pengendalian Internal yang efektif, Bank Sulteng menetapkan kebijakan pengendalian internal dilakukan pada seluruh tingkatan organisasi Bank dengan berpedoman pada:

- Peraturan Otoriitas Jasa Keuangan, No. 1/ POJK.03/2019, tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.
- Surat Edaran Peraturan Otoriitas Jasa Keuangan, No. 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.
- Buku Pedoman Perusahaan tentang Sistem Pengendalian Intern Bank Sulteng

INTERNAL CONTROL SYSTEM

The implementation of the Internal Control System aims to ensure that all Bank business activities are carried out in accordance with laws and regulations, whether issued by the government, the Financial Services Authority, or the Bank's internal policies and procedures.

An effective internal control system can help the Company's management improve its compliance with applicable laws and regulations, ensure the availability of accurate, complete, and timely financial and management reports, and ensure the efficiency and effectiveness of the Company's business activities.

The implementation of a reliable and effective internal control system is the responsibility of all parties involved in the Bank's organization. Bank Sulteng ensures that all elements involved in the Bank's business activities are required to implement internal controls by referring to the Bank's internal control guidelines and SOPs.

Internal Control Policy

Bank Sulteng establishes the Internal Control System as a continuous oversight mechanism for the implementation of business and operational activities at all levels of the organization. The implementation of an effective Internal Control System will safeguard and protect bank assets, ensure the availability of more accurate and reliable reports, improve compliance with applicable laws and regulations, reduce financial impacts/losses, irregularities, including fraud and prudential violations, and enhance organizational effectiveness and cost efficiency.

To implement an effective Internal Control System, Bank Sulteng has established an internal control policy at all levels of the Bank's organization, guided by:

- Financial Services Authority Regulation No. 1/ POJK.03/2019, dated January 28, 2019, concerning the Implementation of the Internal Audit Function in Commercial Banks.
- Financial Services Authority Regulation Circular No. 35/SEOJK.03/2017 concerning Guidelines for Internal Control System Standards for Commercial Banks.
- Company Manual on Bank Sulteng's Internal Control System

Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Tujuan penerapan sistem pengendalian internal secara efektif dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjamin tersedianya pelaporan keuangan yang lengkap dan akurat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan asset dan sumber daya lain dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian, serta meningkatkan efektivitas budaya risiko pada organisasi Bank secara menyeluruh.

Bagi Bank Sulteng tujuan membangun Sistem Pengendalian Internal adalah:

1. *Reliability of Financing Reporting*
   Pengendalian internal diharapkan dapat menyediakan data-data yang dapat dipercaya, sebab dengan data-data atau catatan yang andal mungkin akan tersusun laporan keuangan yang dapat diandalkan.
2. *Effectiveness and Efficiency of Operation*
   Pengendalian internal dimaksudkan untuk menghindarkan pengulangan kerja sama yang tidak perlu dan pemborosan dalam seluruh aspek usaha serta mencegah penggunaan sumber daya secara tidak efisien.
3. *Compliance with Applicable Laws and Regulations*
   Pengendalian internal dimaksudkan untuk memastikan bahwa segala peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan manajemen untuk mencapai tujuan Perusahaan itu ditaati oleh seluruh pegawai.

Kerangka Kerja Sistem Pengendalian Internal

Komponen Sistem Pengendalian Intern Perusahaan merupakan bagian integral dari proses bisnis Perusahaan, dan bukan sebagai komponen terpisah dari aktivitas bisnis Perusahaan. Sistem pengendalian internal Bank terdiri dari 5 (lima) komponen utama yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu:

a. Lingkup Pengendalian

Lingkup pengendalian menunjukkan keseluruhan komitmen, perilaku, kepedulian serta langkah Direksi dan Dewan Komisaris Bank Sulteng dalam melaksanakan kegiatan operasional. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan SPI. Dewan Komisaris berperan aktif untuk memastikan adanya perbaikan terhadap permasalahan Perusahaan yang dapat mengurangi efektivitas SPI. Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan strategi serta prosedur pengendalian internal.

Objectives of the Internal Control System

The purpose of implementing an effective internal control system is to improve the Bank's compliance with applicable laws and regulations, ensure complete and accurate financial reporting, increase the effectiveness and efficiency of asset and other resource utilization to protect the Bank from the risk of loss, and enhance the effectiveness of the risk culture within the Bank's organization as a whole.

For Bank Sulteng, the objectives of establishing an Internal Control System are:

1. Reliability of Financing Reporting
   Internal control is expected to provide reliable data, as reliable data or records can lead to the preparation of reliable financial reports.
2. Effectiveness and Efficiency of Operation
   Internal control is intended to prevent unnecessary duplication of cooperation and waste in all aspects of the business and prevent inefficient use of resources.
3. Compliance with Applicable Laws and Regulations
   Internal control is intended to ensure that all regulations and policies established by management to achieve the Company's objectives are adhered to by all employees.

Internal Control System Framework

The components of the Company's Internal Control System are an integral part of the Company's business processes, not separate from its business activities. The Bank's internal control system consists of five main, interrelated components:

a. Scope of Control

The scope of control reflects the overall commitment, behavior, concern, and steps taken by the Board of Directors and Board of Commissioners of Bank Sulteng in carrying out operational activities. The Board of Commissioners is responsible for ensuring that the Board of Directors monitors the effectiveness of the Internal Control System (SPI). The Board of Commissioners plays an active role in ensuring that the Company addresses issues that could reduce the effectiveness of the SPI. The Board of Directors is responsible for establishing internal control policies, strategies, and procedures.

Direksi juga bertanggung jawab untuk memantau kecukupan dan efektivitas dari SPI. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab dalam meningkatkan etika kerja dan integritas yang tinggi serta menciptakan kultur organisasi yang menekankan pada seluruh pegawai mengenai pentingnya pengendalian internal yang berlaku di Bank Sulteng.

Adapun unsur-unsur lingkup pengendalian meliputi:
1. Struktur organisasi yang memadai.
2. Gaya kepemimpinan dan filosofi manajemen Bank.
3. Integritas dan nilai-nilai etika serta kompetensi seluruh pegawai.
4. Kebijakan dan prosedur sumber daya manusia Bank.
5. Atensi dan arahan manajemen Bank dan komite lainnya seperti Komite Manajemen Risiko.
6. Faktor-faktor ekstern yang mempengaruhi operasional Bank dan penerapan Manajemen Risiko.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan suatu rangkaian Tindakan yang dimulai dari identifikasi, analisis dan pengukuran risiko Perusahaan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Penilaian risiko dilakukan terhadap seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap proses/aktivitas yang berpotensi merugikan Perusahaan.

Dalam rangka pelaksanaan SPI yang efektif, maka Perusahaan secara terus menerus mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) melakukan kaji ulang secara berkala terhadap penilaian risiko yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) sehingga cakupan audit yang dilakukan lebih luas dan menyeluruh. Penilaian tersebut mencakup semua risiko yang dihadapi, baik risiko individual maupun keseluruhan, yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan.

c. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah meliputi kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi *(segregation of duties)*, dengan uraian sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengendalian
   Kegiatan pengendalian melibatkan seluruh jajaran Perusahaan yang mencakup perencanaan, penetapan kebijakan dan prosedur, penerapan pengendalian serta proses verifikasi dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur telah dipatuhi secara konsisten. Kegiatan Pengendalian merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Perusahaan sehari-hari.

The Board of Directors is also responsible for monitoring the adequacy and effectiveness of the Internal Control System (SPI). The Board of Commissioners and the Board of Directors are responsible for fostering high work ethics and integrity and creating an organizational culture that emphasizes the importance of internal control at Bank Sulteng to all employees.

The elements of the scope of control include:
1. An adequate organizational structure.
2. The Bank's leadership style and management philosophy.
3. The integrity, ethical values, and competency of all employees.
4. The Bank's human resource policies and procedures.
5. The attention and direction of Bank management and other committees, such as the Risk Management Committee.
6. External factors affecting the Bank's operations and the implementation of Risk Management.

b. Risk Assessment

Risk assessment is a series of actions that begin with the identification, analysis, and measurement of the Company's risks to achieve its stated objectives. Risk assessment is conducted on all types of risks inherent in each process/activity that have the potential to harm the Company.

To implement effective Internal Control System (SPI), the Company continuously identifies and assesses risks that could impact the achievement of its objectives. The Internal Audit Unit (SKAI) periodically reviews the risk assessments produced by the Risk Management Unit (SKMR) to ensure a broader and more comprehensive audit scope. This assessment encompasses all risks faced, both individual and aggregate, including credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk, and compliance risk.

c. Control Activities

Control activities encompass control activities and segregation of duties, as described below:

1. Control Activities
   Control activities involve all levels of the Company, encompassing planning, establishing policies and procedures, implementing controls, and early verification processes to ensure consistent compliance with policies and procedures. Control activities are inseparable from every function or day-to-day activity of the Company.

2. Pemisahan Fungsi
   - Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya.
   - Struktur organisasi dibuat dengan memisahkan fungsi pencatatan, pemeriksaan, operasional dan non operasional (segregation of duties), sehingga tercipta suatu sistem dual control, dual custody dan terhindar dari duplikasi kerja dalam setiap kegiatan serta terhindar dari benturan kepentingan *(conflict of interest).*

d. Informasi dan komunikasi

Direksi wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi keuangan dan non keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam waktu dan bentuk yang tepat untuk memudahkan pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawabannya. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif baik komunikasi di lingkungan Perusahaan maupun komunikasi dengan pihak luar yang terkait.

e. Pemantauan

Merupakan proses menilai kualitas Sistem Pengendalian Internal Perusahaan dalam jangka waktu tertentu, pemantauan dilaksanakan melalui:

1. Pemantauan rutin terhadap kegiatan yang sedang berjalan, diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan-tindakan lain yang terkait pelaksanaan tugas.
2. Evaluasi oleh unit terpisah / independen, diselenggarakan melalui penilaian mandiri, reviu, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian internal.

Pelaksanaan Pengendalian Internal

Bidang Operasional

Pengendalian operasional yang dilakukan oleh Bank Sulteng, antara lain:

1. Kaji ulang oleh Direksi dengan meminta penjelasan (informasi) dan laporan kinerja operasional Perusahaan sehingga Direksi dapat mendeteksi jika terjadi kelemahan pengendalian, kesalahan laporan keuangan atau penyimpangan lainnya *(fraud).*
2. Kaji ulang oleh Internal Audit dengan melakukan kaji ulang terhadap penilaian risiko (laporan profil risiko) yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko, menganalisis data operasional.

2. Separation of Functions
   - Separation of functions is intended to ensure that each person in their position has no opportunity to commit or conceal errors or irregularities in the performance of their duties.
   - The organizational structure is created by separating recording, auditing, operational, and non-operational functions (segregation of duties), thus creating a system of dual control and dual custody, avoiding duplication of work in every activity and avoiding conflicts of interest.

d. Information and Communication

The Board of Directors is required to identify, record, and communicate financial and non-financial information related to the implementation of its main duties and functions in a timely and appropriate manner to facilitate implementation, control, and accountability. Communication of this information must be conducted effectively, both within the Company and with relevant external parties.

e. Monitoring

This is the process of assessing the quality of the Company's Internal Control System over a specific period. Monitoring is carried out through:

1. Routine monitoring of ongoing activities, conducted through routine management activities, supervision, comparisons, reconciliations, and other actions related to task implementation.
2. Evaluation by a separate/independent unit, conducted through self-assessment, review, and testing of the effectiveness of the internal control system.

Implementation of Internal Control

Operational Areas

Operational controls implemented by Bank Sulteng include:

1. Reviews by the Board of Directors by requesting explanations (information) and reports on the Company's operational performance so that the Board of Directors can detect any control weaknesses, financial reporting errors, or other irregularities (fraud).
2. Reviews by Internal Audit by reviewing the risk assessment (risk profile report) produced by the Risk Management Work Unit and analyzing operational data.

3. Melakukan kaji ulang terhadap realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran.
4. Melakukan pengendalian atas teknologi informasi meliputi pengendalian terhadap operasional pusat data serta pengendalian aplikasi.
5. Pendokumentasian atas seluruh seluruh kebijakan, prosedur dan standar kerja.

Bidang Keuangan

Pengendalian keuangan yang dilakukan Bank Sulteng yaitu antara lain:

1. Menerapkan pemisahan fungsi yang dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Seluruh kebijakan, prosedur, sistem operasional dan standar akuntansi diperbarui *(update)* secara berkala guna menggambarkan kegiatan operasional yang aktual.
3. Persetujuan atas pengeluaran dana dan realisasi pengeluaran.
4. Pengendalian atas rekening nasabah dan rekening pemilik Bank.
5. Pengendalian atas transaksi dalam pembukuan Bank.
6. Pengendalian aset fisik meliputi antara lain pengamanan aset, catatan dan dokumentasi serta akses terbatas terhadap program aplikasi.

Sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh Bank mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum. Selain menjadi pedoman dalam pengendalian di bidang keuangan dan operasional, pelaksanaan sistem pengendalian intern Bank juga bertujuan untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Penerapan Sistem Pengendalian Internal

Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan pengendalian internal yang efektif agar Bank dapat mencapai tujuannya. Dewan Komisaris, dibantu oleh Komite Audit, bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa pengendalian internal dilakukan sesuai ketentuan.

Dalam pelaksanaannya Direksi membuat pernyataan/asersi bahwa setiap kegiatan dan transaksi Perusahaan dilaksanakan berdasarkan pada Sistem Pengendalian Internal yang memadai. Direksi juga telah menandatangani Pernyataan Komitmen Penerapan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan dan menyatakan bahwa seluruh unit kerja dan pegawai Perusahaan wajib berpartisipasi dalam penerapan sistem pengendalian internal perusahaan dengan secara aktif.

3. Reviewing the implementation of work plans and budgets.
4. Controlling information technology, including controlling data center operations and application controls.
5. Documentation of all policies, procedures, and work standards.

Financial Sector

Bank Sulteng's financial controls include, among other things:

1. Implementing segregation of functions to ensure that each person in their position has no opportunity to commit or conceal errors or irregularities in the performance of their duties.

2. All policies, procedures, operational systems, and accounting standards are periodically updated to reflect actual operational activities.

3. Approval of disbursements and the realization of expenditures.
4. Control of customer accounts and bank owner accounts.
5. Control of transactions in the bank's books.
6. Control of physical assets includes, among other things, the security of assets, records, and documentation, as well as limited access to application programs.

The internal control system implemented by the Bank refers to the Financial Services Authority Circular Letter concerning Guidelines for Internal Control System Standards for Commercial Banks. In addition to providing guidelines for financial and operational control, the implementation of the Bank's internal control system also aims to maintain compliance with laws and regulations.

Implementation of the Internal Control System

The Board of Directors is responsible for implementing effective internal controls to ensure the Bank achieves its objectives. The Board of Commissioners, assisted by the Audit Committee, is responsible for overseeing and ensuring that internal controls are implemented in accordance with regulations.

In its implementation, the Board of Directors has made a statement/assertion that all Company activities and transactions are conducted based on an adequate Internal Control System. The Board of Directors has also signed a Statement of Commitment to Implementing the Company's Internal Control System and stated that all work units and employees of the Company are required to actively participate in the implementation of the Company's internal control system.

Selain itu Direksi telah memberikan sertifikasi terhadap laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Auditor Eksternal. Dalam sertifikasi tersebut salah satunya menyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan, pencegahan dan penanggulangan kecurangan serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi Perusahaan

Furthermore, the Board of Directors has certified the annual financial statements audited by an External Auditor. This certification, among other things, states that the Board of Directors is responsible for the Company's internal control system, fraud prevention and mitigation, and compliance with laws and regulations relevant to the Company.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa Bank Sulteng telah menerapkan Sistem Pengendalian Internal yang efektif dan memadai. Sistem Pengendalian Internal dirancang untuk mengelola risiko-risiko yang dihadapi oleh Perusahaan dan menjaga risiko tetap berada dalam batas toleransi yang ditentukan sejalan dengan tujuan Perusahan.

Kehandalan Sistem Pengendalian Internal tercermin dalam operasional Bank Sulteng yang berjalan secara efektif dan efisien. Perusahaan mampu menjalankan kegiatan operasional dengan baik, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, dan memastikan efisiensi dalam proses bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjalankan kegiatan operasional Perusahaan secara optimal.

Selain itu, Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa Bank Sulteng secara konsisten menyampaikan laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan dengan tepat waktu. Hal ini mencerminkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Perusahaan mampu memastikan integritas dan keandalan informasi keuangan yang disajikan kepada pemangku kepentingan.

Bank Sulteng juga telah berhasil mengamankan aset-asetnya dengan baik. Implementasi Sistem Pengendalian Internal yang efektif telah membantu melindungi aset-aset Perusahaan dari risiko kerugian, penyalahgunaan, atau penggunaan yang tidak sah. Hal ini menunjukkan komitmen Perusahaan dalam menjaga keamanan dan keberlanjutan bisnisnya.

Direksi dan Dewan Komisaris juga menegaskan bahwa Bank Sulteng mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan oleh Perusahaan telah dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga Perusahaan dapat beroperasi dengan standar kepatuhan yang berlaku.

Statement by the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the Adequacy of the Internal Control System

The Board of Directors and Board of Commissioners state that Bank Sulteng has implemented an effective and adequate Internal Control System. The Internal Control System is designed to manage the risks faced by the Company and maintain risks within the determined tolerance limits in line with the Company's objectives.

The reliability of the Internal Control System is reflected in the effective and efficient operations of Bank Sulteng. The Company is able to carry out operational activities well, optimize the use of existing resources, and ensure efficiency in business processes. This demonstrates that the implemented Internal Control System has made a significant contribution to the optimal operation of the Company.

Furthermore, the Board of Directors and Board of Commissioners stated that Bank Sulteng consistently submits accurate and reliable financial reports in a timely manner. This reflects the Company's Internal Control System's ability to ensure the integrity and reliability of the financial information presented to stakeholders.

Bank Sulteng has also successfully secured its assets. The implementation of an effective Internal Control System has helped protect the Company's assets from the risk of loss, misuse, or unauthorized use. This demonstrates the Company's commitment to maintaining the security and sustainability of its business.

The Board of Directors and Board of Commissioners also affirmed that Bank Sulteng complies with applicable laws and regulations. The Internal Control System implemented by the Company has been designed to ensure compliance with applicable laws and regulations, enabling the Company to operate in accordance with applicable compliance standards.

Dengan demikian, Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa Bank Sulteng telah berhasil mengimplementasikan Sistem Pengendalian Internal yang efektif dan memadai. Sistem tersebut telah terbukti mampu mengelola risiko dengan baik, menjaga efektivitas operasional Perusahaan, menyampaikan laporan keuangan yang akurat, melindungi aset Perusahaan, dan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

Pelaporan Pengendalian Internal

Setiap unit kerja di lingkungan Perusahaan menyusun dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal di unit kerja masing-masing dan disampaikan kepada Direksi. Atas laporan yang dibuat digunakan sebagai bahan evaluasi dan untuk melihat sejauhmana efektivitas sistem pengedalian internal sudah berjalan.

Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian internal dilakukan oleh Divisi SKAI & Anti Fraud dengan cara memantau efektivitas sistem pengendalian internal dalam kegiatan operasional di kantor pusat, kantor Cabang. Auditor Internal melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas Sistem Pengendalian Internal untuk melihat SOP dan kebijakan yang dibuat oleh manajemen terkait seluruh proses di lingkungan Perusahaan baik terkait bidang keuangan, operasional, SDM, TI dan CSR serta sarana pendukung lainnya dengan melakukan pemeriksaan atas keakuratan data keuangan dan operasional serta kepatuhan terhadap perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Selain itu Divisi SKAI & Anti Fraud melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas Sistem Pengendalian Internal Perusahaan secara menyeluruh untuk mendukung asersi Direksi tentang efektivitas Sistem Pengendalian Internal Perusahaan yang diterapkan.

AUDITOR INTERNAL

Bank Sulteng membentuk Audit Internal sebagai pengendali dan pengawas terhadap pengendalian internal Perusahaan. Fungsi Audit Internal di lingkup Perusahaan dijalankan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) & Anti Fraud yang membantu Direksi dalam melaksanakan audit guna menilai efektivitas sistem pengendalian internal, memastikan seluruh sistem dan prosedur yang ditetapkan Perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Therefore, the Board of Directors and Board of Commissioners state that Bank Sulteng has successfully implemented an effective and adequate Internal Control System. The system has been proven to be able to manage risks well, maintain the Company's operational effectiveness, deliver accurate financial reports, protect the Company's assets, and comply with applicable laws and regulations.

Internal Control Reporting

Each work unit within the Company prepares and submits a report on the implementation of the Internal Control System in their respective work units, which is submitted to the Board of Directors. The report is used as evaluation material and to determine the effectiveness of the internal control system.

Evaluation of the Effectiveness of the Internal Control System

The Internal Control System implementation is evaluated by the Internal Audit & Anti-Fraud Division by monitoring the effectiveness of the internal control system in operational activities at the head office and branch offices. Internal auditors evaluate the adequacy and effectiveness of the Internal Control System. This includes reviewing the SOPs and policies established by management related to all processes within the Company, including finance, operations, HR, IT, CSR, and other supporting facilities. This is done by examining the accuracy of financial and operational data and compliance with applicable laws and regulations.

Furthermore, the Internal Audit & Anti-Fraud Division evaluates the adequacy and effectiveness of the Company's Internal Control System as a whole to support the Board of Directors' assertions regarding the effectiveness of the Company's Internal Control System.

INTERNAL AUDITOR

Bank Sulteng has established an Internal Audit unit to control and oversee the Company's internal controls. The Internal Audit function within the Company is carried out by the Internal Audit & Anti-Fraud Work Unit (SKAI) which assists the Board of Directors in conducting audits to assess the effectiveness of the internal control system and ensure that all established systems and procedures are implemented in accordance with regulations.

SKAI & Anti Fraud dibentuk untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional Bank Sulteng melalui kegiatan audit *(assurance)* dan konsultasi *(consulting)* yang independen dan objektif. Melalui fungsi penjaminan *(assurance)*, Auditor Internal mengevaluasi proses tata kelola, pengelolaan risiko dan efektivitas pengendalian internal pada semua aspek kegiatan Bank melalui pendekatan berbasis risiko. Sedangkan fungsi konsultatif Auditor Internal memberikan masukan atas pengendalian internal kepada satuan kerja lainnya, seperti pemberian rekomendasi atau saran perbaikan dalam berbagai pemeriksaan yang dilakukan, masukan atas *draft* kebijakan atau prosedur, dan lainnya.

SKAI & Anti-Fraud was established to provide added value and improve Bank Sulteng's operations through independent and objective audit (assurance) and consulting activities. Through this assurance function, the Internal Auditor evaluates governance processes, risk management, and the effectiveness of internal controls across all aspects of the Bank's operations using a risk-based approach. The Internal Auditor's consultative function provides input on internal controls to other work units, such as providing recommendations or suggestions for improvements in various audits, input on draft policies or procedures, and other information.

Profil Pimpinan SKAI & Anti Fraud

Internal Audit & Anti-Fraud Leadership Profile



Moh. Taslim
Divisi SKAI & Anti Fraud
Skai & Anti Fraud Division

Tempat Tanggal Lahir & Usia Place, Date of Birth & Age	:	Palu, 18 Oktober 1973 / 52 Tahun per 31 Desember 2025 Palu, 18 Oktober 1973 / 52 years old as of 31 December 2025
Periode Jabatan Term & Tenure	:	2025 – Sekarang 2025 - present
Domisili & Kewarganegaraan Domicile & Nationality	:	Palu, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	Sarjana Ilmu Sosial, STIA Panca Marga Palu (2005) Bachelor of Social Sciences, STIA Panca Marga Palu (2005)
Sertifikasi Certifications		Sertifikasi Manajemen Risiko Level IIIF Risk Management Certification Level IIIF
Riwayat Jabatan Career History	:	• Pelaksana Sub Kredit KCP Donggala (11/10/2005 - 16/01/2011) • Pelaksana Seksi Akuntansi/laporan KC Parigi (17/01/2011 - 00/00/2012) • Staf Seksi kredit KC Parigi (00/00/0000 - 09/09/2012) • Kepala Seksi Kredit KC Parigi (10/09/2012 - 27/10/2013) • Pemimpin Seksi kredit KC Parigi (28/10/2013 - 13/07/2014) • Kepala Seksi Pemasaran Kantor Cabang Parigi (14/07/2014 - 18/10/2015) • Pjs. Kepala Cabang Poso (19/10/2015 - 11/04/2016) • Kepala Cabang Poso (11/04/2016 - 20/08/2017) • Kepala Cabang Parigi (21/08/2017 - 20/05/2019) • Pemimpin Kantor Cabang Parigi (21/05/2019 - 23/03/2021) • Pinbag. Pemb. Fisik & Pemeliharaan Kantor Divisi Asset & Umum (24/03/2021 - 03/08/2021) • Pjs.Pemimpin Divisi Aset & Umum (04/08/2021 - 03/01/2022) • Pemimpin Divisi Umum & Aset 03/01/2021 - 18/07/2024 • Pemimpin Divisi Hukum & Penyelamatan Kredit (18/07/2024 - 20/10/2025) • Pemimpin Divisi SKAI & Anti Fraud (20/10/2025 – Sekarang) • Sub-Credit Officer, Donggala Branch (11/10/2005 - 16/01/2011) • Accounting/Reporting Officer, Parigi Branch (17/01/2011 - 00/00/2012) • Credit Section Staff, Parigi Branch (00/00/0000 - 09/09/2012) • Credit Section Head, Parigi Branch (10/09/2012 - 27/10/2013) • Credit Section Leader, Parigi Branch (28/10/2013 - 13/07/2014) • Marketing Section Head, Parigi Branch (14/07/2014 - 18/10/2015) • Acting Poso Branch Manager (October 19, 2015 - April 11, 2016) • Poso Branch Manager (April 11, 2016 - August 20, 2017) • Parigi Branch Manager (August 21, 2017 - May 20, 2019) • Parigi Branch Manager (May 21, 2019 - March 23, 2021) • Physical Development & Office Maintenance Division, Asset & General Affairs (March 24, 2021 - August 3, 2021) • Acting Head of the Assets & General Affairs Division (August 4, 2021 - January 3, 2022) • Head of the Assets & General Affairs Division (January 3, 2021 - July 18, 2024) • Legal & Credit Recovery Division (July 18, 2024 - October 20, 2025) • Head of the Internal Audit & Anti-Fraud Division (October 20, 2025 - Present)

Penunjukan Pimpinan SKAI & Anti Fraud

Pimpinan SKAI & Anti *Fraud* saat ini dijabat oleh Moh Taslim diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 143/SK.M.BPD-ST/2025 tentang Pengangkatan Pimpinan SKAI & Anti *Fraud* PT Bank Sulteng.

Perusahaan membuat ketentuan kualifikasi untuk dapat menduduki jabatan Pimpinan SKAI & Anti *Fraud* sebagaimana dijelaskan dalam dokumen ketentuan Persyaratan Kompetensi Jabatan. Pengangkatan Pimpinan SKAI & Anti *Fraud* juga mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Struktur Organisasi Dan Kedudukan SKAI & Anti Fraud

Struktur Organisasi SKAI & Anti *Fraud* diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 122/SK-DIR/BPD-ST/2025 Tentang Perubahan Struktur Organisasi PT Bank Sulteng Tahun 2025. Bagan struktur organisasi Divisi SKAI & Anti *Fraud* sebagai berikut:

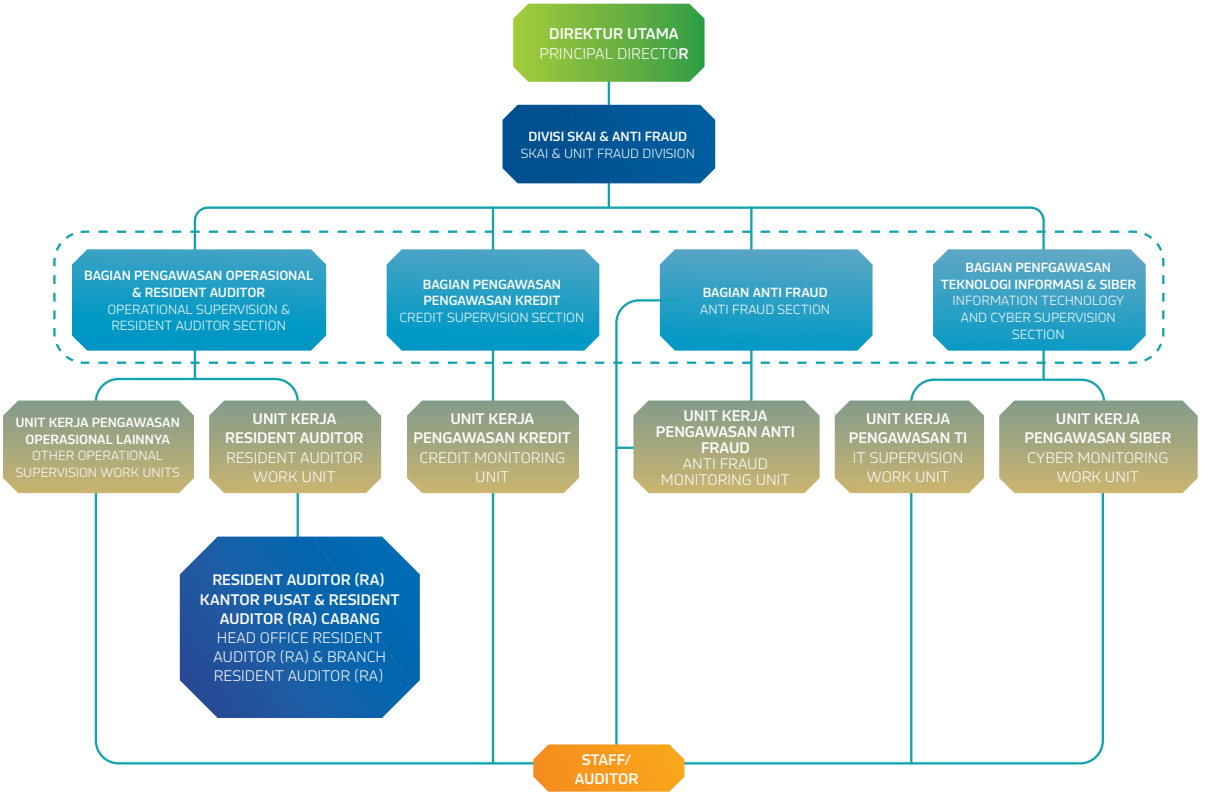
Appointment of the Head of Internal Audit & Anti-Fraud

The current Head of SKAI & Anti Fraud is Moh Taslim, appointed based on the Decree of the Board of Directors Number: 143/SK.M.BPD-ST/2025 concerning the Appointment of the Head of SKAI & Anti Fraud of PT Bank Sulteng.

The Company has established qualification requirements for the Head of Internal Audit & Anti-Fraud as outlined in the Job Competency Requirements document. The appointment of the Head of Internal Audit & Anti-Fraud also refers to the provisions of the Financial Services Authority Regulations.

Organizational Structure and Position of Internal Audit & Anti-Fraud

The organizational structure of Internal Audit & Anti-Fraud is regulated by Board of Directors Decree Number 122/SK-DIR/BPD-ST/2025 concerning Changes to the Organizational Structure of PT Bank Sulteng in 2025. The organizational structure of the Internal Audit & Anti-Fraud Division is as follows:



SKAI & Anti *Fraud* merupakan organ pendukung Direksi dalam menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Perusahaan. Kedudukan Satuan Pengawasan Internal di dalam struktur organisasi Bank Sulteng adalah sebagai berikut:

1. Satuan Pengawasan Internal Bank Sulteng dipimpin oleh seorang Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Anti *Fraud*.
2. Kepala Divisi SKAI & Anti *Fraud* Bank Sulteng diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
3. Auditor - auditor yang duduk dalam Satuan Pengawasan Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Divisi SKAI & Anti *Fraud.*
4. SKAI & Anti *Fraud* Bank Sulteng bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama.
5. Dalam melaksanakan tugas, SKAI menyampaikan laporan kepada Direktur Utama atau Dewan Komisaris.
6. Laporan disampaikan kepada Direktur Utama dan salinan disampaikan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.

Tugas dan Tanggung Jawab Auditor Internal

Piagam Audit Intern *(Internal Audit Charter)* telah memuat dengan rinci terkait tugas dan tanggung jawab Divisi SKAI & Anti *Fraud*. Adapun tugas utama yaitu:

1. Menyusun Rencana Audit Tahunan berbasis risiko yang selaras dengan profil risiko dan strategi Bank, untuk memperoleh persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit;
2. Melaksanakan Kegiatan Audit Internal sesuai dengan Rencana Audit Tahunan dan Standar Profesional Audit Internal;
3. Melaksanakan audit atas seluruh aktivitas Bank secara independen dan objektif, termasuk audit operasional, keuangan, kepatuhan, teknologi infromasi, dan audit khusus lainnya;
4. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil audit secara objektif, akurat, dan tepat waktu kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit;
5. Mendukung pemenuhan kewajiban penyampaian laporan terkait fungsi Audit Internal kepada regulator dan/atau otoritas yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Memastikan pemenuhan ketentuan regulator terkait fungsi Audit Internal, termasuk keselarasan substansi Piagam Audit Internal dengan dokumen perencanaan Bank yang relevan (termasuk RBB) sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Melakukan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit yang telah disepakati dengan auditee;

The Internal Audit Unit (SKAI) and Anti-Fraud Unit (SKAI) is a supporting organ of the Board of Directors in implementing internal oversight within the Company. The position of the Internal Audit Unit within Bank Sulteng's organizational structure is as follows:

1. The Internal Audit Unit of Bank Sulteng is led by a Division Head of the Internal Audit Unit (SKAI) and Anti-Fraud.
2. The Head of the SKAI and Anti-Fraud Division of Bank Sulteng is appointed and dismissed by the President Director after obtaining approval from the Board of Commissioners, taking into account the recommendations of the Audit Committee.
3. Auditors within the Internal Audit Unit report directly to the Head of the SKAI and Anti-Fraud Division.
4. The SKAI and Anti-Fraud Division of Bank Sulteng reports directly to the President Director.
5. In carrying out its duties, the SKAI submits reports to the President Director or the Board of Commissioners.
6. The report is submitted to the President Director, with copies submitted to the Board of Commissioners, the Audit Committee, and the Director in charge of the compliance function.

Duties and Responsibilities of Internal Auditors

The Internal Audit Charter details the duties and responsibilities of the SKAI and Anti-Fraud Division. The main duties are:

1. Develop a risk-based Annual Audit Plan aligned with the Bank's risk profile and strategy, to obtain approval from the Board of Directors and the Board of Commissioners through the Audit Committee;
2. Conduct Internal Audit Activities in accordance with the Annual Audit Plan and Internal Audit Professional Standards;
3. Conduct audits of all Bank activities independently and objectively, including operational, financial, compliance, information technology, and other special audits;
4. Prepare and submit audit reports objectively, accurately, and timely to the Board of Directors and the Board of Commissioners through the Audit Committee;
5. Support the fulfillment of reporting obligations related to the Internal Audit function to regulators and/or authorized authorities in accordance with applicable regulations;
6. Ensure compliance with regulatory requirements related to the Internal Audit function, including the alignment of the substance of the Internal Audit Charter with relevant Bank planning documents (including the Business Plan) in accordance with applicable regulations;
7. Monitor and evaluate follow-up actions on audit recommendations agreed with the auditee;

8. Melaporkan temuan signifikan, kelemahan pengendalian material, dan indikasi fraud kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk memperoleh tindak lanjut yang memadai;
9. Melaksanakan Investigasi atas indikasi fraud dan pelanggaran sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku;
10. Memberikan layanan konsultasi dan tugas khusus sesuai ketentuan Piagam Audit Internal dengan tetap menjaga independensi dan objektivitas;
11. Menyelenggarakan dan melaksanakan Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) untuk menjaga dan meningkatkan kualitas fungsi Audit Internal;
12. Menyusun, menetapkan, memelihara, dan memutakhiran kebijakan serta prosedur Audit Internal (BPP dan SOP) agar selalu selaras dengan ketentuan regulator, standard profesional, dan kondisi organisasi Bank;
13. Menjaga kerahasian informasi Bank yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas Audit Internal.

Wewenang Auditor Internal

Wewenang yang dimiliki SKAI & Anti Fraud sebagai berikut:

1. Akses Informasi & Sumber Daya
   SKAI berwenang untuk memperoleh akses penuh, langsung, dan tanpa pembatasan yang tidak wajar terhadap seluruh informasi yang relevan dengan pelaksanaan Audit Internal, termasuk namun tidak terbatas pada :
   a. Catatan, dokumen, data, dan laporan Bank;
   b. Sistem informasi dan aplikasi, termasuk data elektronik;
   c. Aset fisik Bank;
   d. Sumber Daya lainnya yang diperlukan.
2. Akses terhadap Personel & Klarifikasi
   SKAI berwenang untuk :
   a. Meminta keterangan, penjelasan, dan klarifikasi dari seluruh Pegawai Bank serta pihak lain yang terkait dengan aktivitas yang diaudit;
   b. Meminta konfirmasi atas data dan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan audit.
3. SKAI berwenang untuk
   a. Berkomunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit terkait pelaksanaan tugas Audit Internal;
   b. Menetapkan ruang lingkup audit, menentukan prioritas, memilih objek audit, serta mengalokasikan sumber daya audit dengan pendekatan berbasis risiko; dan
   c. Melakukan eskalasi kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris melalui Komite Audit apabila terdapat;
      a). Pembatasan akses informasi;
      b). Ketidakpatuhan auditee terhadap proses audit; atau
      c). Temuan signifikan dan indikasi fraud yang memerlukan perhatian segera.

8. Report significant findings, material control weaknesses, and indications of fraud to the Board of Directors and the Board of Commissioners for adequate follow-up;
9. Conduct investigations into indications of fraud and violations in accordance with applicable authorities and regulations;
10. Provide consulting services and special assignments in accordance with the Internal Audit Charter while maintaining independence and objectivity;
11. Organize and implement a Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) to maintain and improve the quality of the Internal Audit function;
12. Draft, establish, maintain, and update Internal Audit policies and procedures (BPP and SOP) to ensure they are aligned with regulatory requirements, professional standards, and the Bank's organizational conditions;
13. Maintain the confidentiality of Bank information obtained in the course of performing Internal Audit duties.

Internal Auditor Authority

The Internal Audit Unit (SKAI) and Anti-Fraud have the following authorities:

1. Access to Information & Resources
   SKAI is authorized to obtain full, direct, and unrestricted access to all information relevant to the implementation of Internal Audits, including but not limited to:
   a. Bank records, documents, data, and reports;
   b. Information systems and applications, including electronic data;
   c. Bank physical assets;
   d. Other necessary resources.

2. Access to Personnel & Clarification
   SKAI is authorized to:
   a. Request information, explanations, and clarifications from all Bank employees and other parties related to the audited activities;
   b. Request confirmation of data and information obtained during the audit.
3. SKAI is authorized to
   a. Communicate directly with the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Audit Committee regarding the implementation of Internal Audit duties;
   b. Determine the audit scope, determine priorities, select audit objects, and allocate audit resources using a risk-based approach; and
   c. Escalate issues to the Board of Directors and/or the Board of Commissioners through the Audit Committee, if any;
      a). Restrict access to information;
      b). Auditee non-compliance with the audit process; or
      c). Significant findings and indications of fraud that require immediate attention.

4. Pembatasan Wewenang
   Dalam melaksanakan kewenangannya, SKAI tidak berwenang untuk :
   a. Melaksanakan kegiatan operasional Bank;
   b. Menginisiasi, menyetujui, atau mengambil keputusan atas transaksi atau aktivitas operasional dan non-operasional Bank; dan
   c. Mengarahkan pegawai Bank di luar penugasan Audit Internal.

Piagam Audit Internal

Piagam Audit Internal *(Internal Audit Charter)* merupakan pedoman bagi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Auditor Internal agar dapat menjalankan suatu kegiatan *assurance* dan konsultasi yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip independensi, profesionalisme, integritas dan objektif guna memberikan riilai tambah *(value added)* dalam pencapaian tujuan organisasi Perusahaan secara menyeluruh.

Bank Sulteng memberlakuan Piagam Audit Internal*)* sebagaimana ditetapkan melalui keputusan Direksi Nomor: 014/SK-DIR/BPD-ST/2026 tanggal 29 Januari 2026 tentang Revisi Piagam Audit Intern *(Internal Audit Charter).* Penyusunan Piagam Audit Internal mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/ POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum dan Standar profesional Internal Audit yang dikeluarkan oleh ***T****he Institute Internal Audit.*

Piagam Audit Internal merupakan dokumen yang berisi dan menjelaskan mengenai keberadaan fungsi pengawasan internal di Perusahaan yang memuat berbagai aspek yaitu:

- Landasan Hukum dan Standar
- Visi Dan Misi
- Kedudukan, Struktur, dan Independensi SKAI
- Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal
- Tugas Dan Tanggung Jawab SKAI
- Wewenang SKAI
- Hubungan dengan Fungsi Pengendalian Lain
- Layanan Konsultasi dan Tugas Khusus
- Kode Etik Audit Internal
- Persyaratan Dan Kompetensi Auditor Internal
- *Quality Assurance* dan *Improvement Program (QAIP)*
- Penggunaan Tenaga Ahli Eksternal
- Rotasi dan Masa Tunggu *(Cooling-Off Period)*
- Perlindungan Hukum
- Penutup

Divisi SKAI & Anti Fraud secara berkala melakukan kaji ulang dan penyelarasan Piagam, serta dokumen-dokumen turunannya seperti kebijakan dan prosedur Internal Audit sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

4. Limitations on Authority
   In exercising its authority, the Internal Audit Unit is not authorized to:
   a. Carry out Bank operational activities;
   b. Initiate, approve, or make decisions on Bank operational and non-operational transactions or activities; and
   c. Direct Bank employees outside of Internal Audit assignments.

Internal Audit Charter

The Internal Audit Charter serves as a guideline for the implementation of the duties and responsibilities of Internal Auditors, enabling them to carry out assurance and consulting activities based on the principles of independence, professionalism, integrity, and objectivity, in order to provide added value in achieving the Company's overall organizational goals.

Bank Sulteng implements an Internal Audit Charter, as stipulated in Board of Directors Decree No. 014/ SK-DIR/BPD-ST/2026 dated January 29, 2026, concerning the Revision of the Internal Audit Charter. The Internal Audit Charter is formulated in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 1/ POJK.03/2019 concerning the Implementation of the Internal Audit Function in Commercial Banks and the Internal Audit Professional Standards issued by the Institute for Internal Audit.

The Internal Audit Charter is a document that contains and explains the existence of the internal oversight function in the Company, covering various aspects, namely:

- Legal Basis and Standards
- Vision and Mission
- Position, Structure, and Independence of the Internal Audit Unit
- Objectives and Scope of Internal Audit
- Duties and Responsibilities of the Internal Audit Unit
- Authorities of the Internal Audit Unit
- Relationship with Other Control Functions
- Consulting Services and Special Assignments
- Internal Audit Code of Ethics
- Internal Auditor Requirements and Competencies
- Quality Assurance and Improvement Program (QAIP)
- Use of External Experts
- Rotation and Cooling-Off Period
- Legal Protection
- Conclusion

The Internal Audit Unit & Anti-Fraud Division periodically reviews and aligns the Charter and its derivative documents, such as Internal Audit policies and procedures, with applicable regulations and standards.

Landasan Pelaksanaan Audit Internal

Bank Sulteng memiliki standar dan metodologi dalam melakukan audit internal yang dituangkan dalam kebijakan, pedoman dan prosedur audit dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktik terbaik di lingkungan industri Perbankan. Oleh karenanya Kegiatan SKAI & Anti Fraud dilaksanakan dengan berpedoman, antara lain pada:

- Peraturan Otoriitas Jasa Keuangan, No. 1/ POJK.03/2019, tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.
- Peraturan Otoriitas Jasa Keuangan, No. 11/ POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- Surat Edaran Peraturan Otoriitas Jasa Keuangan, No. 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.
- *Mandatory Guidance* yang ditetapkan oleh *The Institute Internal Auditors.*
- Standar *Information System And Control Association* (ISACA) sebagai acuan *best practice*.
- Buku Pedoman Perusahaan tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* yang disusun berdasarkan POJK No. 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum.
- Buku Pedoman Perusahaan tentang Sistem Pengendalian Intern Bank Sulteng dan Piagam Audit Intern
- Pakta Integritas Anti Fraud, sebagai wujud komitmen Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan/karyawati Bank Sulteng untuk tidak akan terlibat ataupun melakukan *fraud.*
- Peraturan-peraturan Pemerintah lainnya serta Standar Operasional Prosedur yang berlaku di Bank Sulteng.
- Pelaksanaan kaji ulang untuk melihat sejauhmana efektivitas pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (PFAIB) dan kepatuhannya yang dilakukan oleh pihak eksternal yang independen sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun.

Kode Etik Auditor Internal

Piagam Audit Internal Bank telah memuat Kode Etik bagi auditor dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kode Etik auditor merupakan aturan perilaku yang diterapkan dan melekat pada diri atau lembaga Auditor Internal. Penerapan kode etik auditor internal mengacu pada standar dan kode etik audit internal yang berlaku umum. Bank Sulteng menetapkan Kode Etik yang harus dipatuhi oleh auditor dalam menjalankan tugasnya, yaitu:

Internal Audit Implementation Basis

Bank Sulteng has standards and methodologies for conducting internal audits outlined in audit policies, guidelines, and procedures, while adhering to applicable laws and regulations and best practices in the banking industry. Therefore, Internal Audit and Anti-Fraud activities are carried out in accordance with, among other guidelines:

- Financial Services Authority Regulation No. 1/ POJK.03/2019, dated January 28, 2019, concerning the Implementation of the Internal Audit Function in Commercial Banks.
- Financial Services Authority Regulation No. 11/ POJK.03/2022 concerning the Implementation of Information Technology by Commercial Banks.
- Financial Services Authority Regulation Circular No. 35/SEOJK.03/2017 concerning Guidelines for Internal Control System Standards for Commercial Banks.
- Mandatory Guidance established by the Institute of Internal Auditors.
- Information System and Control Association (ISACA) standards as a reference for best practices.
- The Company's Guidelines for the Implementation of Anti-Fraud Strategies are based on OJK Regulation No. 39/POJK.03/2019 dated December 19, 2019, concerning the Implementation of Anti-Fraud Strategies for Commercial Banks.
- The Company's Guidelines for Bank Sulteng's Internal Control System and Internal Audit Charter
- The Anti-Fraud Integrity Pact demonstrates the commitment of the Board of Commissioners, Directors, and all employees of Bank Sulteng to refrain from engaging in or committing fraud.
- Other government regulations and applicable Standard Operating Procedures at Bank Sulteng.
- A review to assess the effectiveness of the Bank's Internal Audit Function (PFAIB) and its compliance is conducted by an independent external party at least once every three years.

Internal Auditor Code of Ethics

The Bank's Internal Audit Charter contains a Code of Ethics for auditors in carrying out their duties and responsibilities. The Auditor's Code of Ethics is a code of conduct that applies to and is inherent in the Internal Auditor's individual or institutional role. The implementation of the internal auditor code of ethics refers to generally accepted internal audit standards and codes of ethics. Bank Sulteng has established a Code of Ethics that auditors must adhere to in carrying out their duties, namely:

1. Integritas
   a. Bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas;.
   b. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan internal Bank, dan standar profesional.
   c. Tidak menyalahgunakan jabatan, kewenangan, atau informasi yang diperoleh selama pelaksanaan tugas;
   d. Menghindari segala bentuk tindakan yang dapat merugikan Bank atau mencederai reputasi fungsi Audit Internal.
2. Objektivitas dan Independensi
   a. Menjaga independensi dan objektivitas dalam memberikan penialian dan rekomendasi;
   b. Menghindari benturan kepentingan, baik yang bersifat nyata maupun potensial;
   c. Tidak menerima gratifikasi, hadiah, atau bentuk imbalan lainnya yang dapat mempengaruhi atau dianggap mempengaruhi independensi dan objektivitas;
   d. Mengungkapkan secara terbuka kepada atasan apabila terdapat potensi konflik kepentingan dalam penugasan Audit Internal;
   e. Tidak mengaudit aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan rotasi dan masa tunggu *(cooling-off period).*
3. Kerahasiaan
   a. Menjaga kerahasiaan seluruh informasi dan data Bank yang diperoleh selama pelaksanaan tugas Audit Internal;
   b. Menggunakan informasi hanya untuk kepentingan tugas Audit Internal;
   c. Tidak mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak uang tidak berwenang, kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
   d. Melindungi dokumen dan data audit dari penyalahgunaan atau akses yang tidak sah.
4. Kompetensi dan Profesionalisme
   a. Melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan pengalaman yang dimiliki;
   b. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesional secara berkelanjutan;
   c. Mematuhi Standar Profesional Audit Internal dalam setiap penugasan;
   d. Menjaga kualitas hasil audit melalui penerapan metodologi audit yang memadai dan terdokumentasi dengan baik.

Independensi Auditor Internal

SKAI & Anti Fraud melaksanakan tugas atau profesi sesuai standar baku yang berlaku serta menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesional yang telah ditetapkan.

1. Integrity
   a. Be honest, fair, and responsible in carrying out their duties;
   b. Perform duties in accordance with laws and regulations, the Bank's internal policies, and professional standards.
   c. Do not abuse your position, authority, or information obtained during the performance of your duties;
   d. Avoid any actions that could harm the Bank or damage the reputation of the Internal Audit function.
2. Objectivity and Independence
   a. Maintain independence and objectivity in providing assessments and recommendations;
   b. Avoid conflicts of interest, both real and potential;
   c. Do not accept gratuities, gifts, or other forms of remuneration that could affect or be perceived to affect independence and objectivity;
   d. Disclose openly to your superiors any potential conflict of interest in an Internal Audit assignment;
   e. Do not audit activities under your responsibility for a specified period of time in accordance with rotation and cooling-off periods.
3. Confidentiality
   a. Maintain the confidentiality of all Bank information and data obtained during the implementation of Internal Audit duties;
   b. Use information solely for the purposes of Internal Audit duties;
   c. Do not disclose confidential information to unauthorized parties, unless required by law;
   d. Protect audit documents and data from misuse or unauthorized access.
4. Competence and Professionalism
   a. Perform duties in accordance with existing competencies, expertise, and experience;
   b. Continuously improve professional knowledge, expertise, and abilities;
   c. Adhere to Internal Audit Professional Standards in every assignment;
   d. Maintain the quality of audit results by implementing adequate and well-documented audit methodologies.

Independence of Internal Auditors

The Internal Audit Unit (SKAI) and Anti-Fraud Unit (Anti-Fraud Unit) carries out its duties and profession in accordance with applicable standards and adheres to established professional ethics.

Kedudukan SKAI & Anti *Fraud* bebas dari campur tangan pihak lain dalam bentuk apapun guna menjaga independensi dalam melaksanakan tugasnya. SKAI & Anti Fraud melaksanakan tugas sesuai Rencana Audit Tahunan (RAT) dan hanya menerima penugasan dari Direktur Utama apabila ada penugasan atau pemeriksaan khusus.

Metodologi Audit Internal

Divisi SKAI & Anti Fraud menggunakan metode audit dalam mendukung pencapaian sasaran Perusahaan terutama kegiatan bisnis dan unit kerja yang memiliki risiko signifikan menjadi prioritas untuk dilakukan audit. Metodologi audit yang digunakan dalam penerapan fungsi audit adalah audit berbasis risiko yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta pemantauan tindak lanjut perbaikan.
Metode audit yang digunakan, yaitu:

1. Offsite Audit
   Proses audit yang dilakukan Divisi SKAI & Anti Fraud di kantor pusat, meliputi,
   a. Melakukan perencanaan audit.
   b. Menyiapkan Laporan Keuangan Cabang, Nominatif kredit, Giro, Tabungan, Deposito, Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Cabang.
   c. Melakukan analisa permulaan (analisa awal) terhadap kinerja cabang berdasarkan Laporan Keuangan periode pemeriksaan (Realisasi dan RKAT) serta pemantauan terhadap transaksi mencurigakan.
   d. Menyiapkan permintaan sampel data ke cabang antara lain: dokumen kredit dan jaminan, aplikasi pembukaan rekening, dokumen-dokumen terkait DPK, bukti transaksi dan biaya-biaya dll
2. Onsite Audit
   Proses pemeriksaan (audit) dengan mengunjungi/ mendatangi cabang, cabang pembantu dan kantor kas serta kantor-kantor layanan Bank untuk melihat secara langsung pelaksanaan operasional dan aktivitas pekerjaan serta melakukan penelitian, penilaian maupun anlisa terhadap fakta-fakta yang diperoleh dari hasil sampel data dan analisa awal yang telah dilakukan di kantor pusat.
   Adapun aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada saat onsite audit meliputi;
   a. Memeriksa dokumen kredit secara menyeluruh (analisa kredit, persyaratan kredit, administrasi kredit) sampai dengan dokumentasi/ penyimpanan agunan.
   b. Menganalisa penyebab terjadinya pergeseran kolektibilitas.
   c. Melakukan *On The Spot* (kunjungan) ke lokasi usaha dan jaminan untuk memastikan proses pemberian kredit dilakukan dengan mengedepankan prinsip prudential, kunjungan

The Internal Audit Unit (SKAI) and Anti-Fraud Unit is free from interference from other parties in any form to maintain independence in carrying out its duties. The Internal Audit & Anti-Fraud Division carries out its duties in accordance with the Annual Audit Plan (RAT) and only accepts assignments from the President Director for special assignments or audits.

Internal Audit Methodology

The Internal Audit & Anti-Fraud Division utilizes audit methods to support the achievement of Company targets, especially prioritizing business activities and work units with significant risks for audit. The audit methodology used in implementing the audit function is a risk-based audit, which begins with the planning process, implementation, reporting, and monitoring of follow-up improvements.
The audit methods used are:

5. Offsite Audit
   The audit process conducted by the Internal Audit & Anti-Fraud Division at the head office includes:
   a. Conducting audit planning.
   b. Preparing Branch Financial Reports, Credit Nominatives, Current Accounts, Savings Accounts, Deposits, and the Branch Annual Work Budget Plan (RKAT).
   c. Conducting a preliminary analysis of branch performance based on the audit period's Financial Reports (Realization and RKAT), as well as monitoring suspicious transactions.
   d. Prepare data sample requests to branches including: credit and guarantee documents, account opening applications, DPK related documents, proof of transactions and fees, etc.
6. Onsite Audit
   An audit involves visiting branches, sub-branches, cash offices, and bank service offices to directly observe operational implementation and work activities. It also involves conducting research, assessment, and analysis of facts obtained from data samples and initial analysis conducted at the head office.

   Activities conducted during an onsite audit include:

   a. Complete review of credit documents (credit analysis, credit requirements, credit administration), including documentation/ collateral storage.
   b. Analyzing the causes of shifts in collectibility.

   c. Conducting on-the-spot visits to business locations and collateral to ensure that the credit disbursement process prioritizes prudential

tersebut dilakukan dengan mengambil sampel debitur.
d. Memeriksa aktivitas *customer service* antara lain proses pelayanan nasabah, kelengkapan dokumen seperti pengisian *form* aplikasi pada saat pembukaan rekening maupun penginputan dalam CBS Olibs, KYC, Penyimpanan Surat Berharga, PIN Meiler ATM dll.
e. Memeriksa aktivitas teller meliputi *cash count* (pemeriksaan kas), bukti/validasi transaksi, pengisian ATM dan aktivitas lainnya.
f. Melakukan pemeriksaan terhadap ruang khazanah dan brankas tempat penyimpanan uang dan dokumen-dokumen berharga.
g. Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan menganalisa debitur terbesar cabang.
h. Menilai dan menganalisa kinerja cabang berdasarkan RKAT yang telah ditetapkan.
i. Melakukan kunjungan ke lokasi ATM.
j. Melakukan pemeriksaan terhadap *back office* antara lain pencatatat/pembebanan biaya-biaya, perlengkapan dan inventaris kantor, CCTV, ATM dan aktivitas lainnya.
k. Melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas *security*.
l. Memastikan kelengkapan dan kenyamanan pelayanan terhadap nasabah terpenuhi seperti kebersihan ruang kerja dan lingkungan kantor, proses antrian, suhu ruangan dan sarana penunjang lainnya.
m. Memastikan kondisi keamanan kantor terpenuhi untuk memitigasi risiko yang dapat terjadi seperti ketersediaan tabung APAR yang masih bisa digunakan, *kick alarm, security*.
n. Aktivitas lainnya yang terjadi di Cabang/Cabang Pembantu/Kantor Kas.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan audit, Divisi SKAI & Anti Fraud telah menggunakan aplikasi Sistem Audit Internal Terpadu (SATU) yang terintegrasi mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta pemantauan tindak lanjut perbaikan yang dipantau melalui *dashboard.*

Rencana Audit Tahunan

Rencana Audit Tahunan (RAT) Bank Sulteng disusun berbasis risiko yang telah di identifikasi untuk setiap jenis audit yang akan dilaksanakan. Pada tahun 2025 jenis audit yang akan dilaksanakan, yaitu:

a. Audit Umum
   Audit umum adalah adalah audit yang dilaksanakan secara rutin terhadap seluruh kegiatan atau aktivitas di unit kerja Perusahaan untuk menguji, dan mengevaluasi proses pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola yang dijalankan.

principles. These visits involve taking a sample of debtors.
d. Inspecting customer service activities, including customer service processes and document completeness, such as filling out application forms for account opening and inputting CBS Olibs, KYC, securities storage, ATM PINs, etc.
e. Inspecting teller activities, including cash counts (cash checks), transaction evidence/validation, ATM top-ups, and other activities.
f. Inspect the treasury and safe deposit boxes where cash and valuable documents are stored
.
g. Examine documents and analyze the branch's largest debtors.
h. Assess and analyze branch performance based on the established RKAT.
i. Visit ATM locations.
j. Inspect back office areas, including recording/charging expenses, office equipment and inventory, CCTV, ATMs, and other activities.
k. Inspect security activities.
l. Ensure completeness and comfort of customer service, such as cleanliness of the workspace and office environment, queuing processes, room temperature, and other supporting facilities.
m. Ensure office security conditions are met to mitigate potential risks, such as the availability of usable fire extinguishers, kick alarms, and security.
n. Other activities occurring at the Branch/Sub-Branch/Cash Office.

To support audit activities, the Internal Audit & Anti-Fraud Division has utilized the Integrated Internal Audit System (SATU) application, which integrates the planning, implementation, reporting, and monitoring of corrective follow-up actions, all of which are monitored through the dashboard.

Annual Audit Plan

Bank Sulteng's Annual Audit Plan (RAT) is prepared based on identified risks for each type of audit to be conducted. The following audit types will be implemented in 2025:

a. General Audit
   A general audit is a routine audit of all activities within the Company's work units to test and evaluate internal control processes, risk management, and governance.

b. Audit Kepatuhan
Audit kepatuhan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk untuk memastikan bahwa unit kerja mematuhi standar, regulasi, kebijakan, dan prosedur yang berlaku, baik dari sisi eksternal (peraturan perundang-undangan) maupun intern (kebijakan dan prosedur Perusahaan).

c. Audit Teknologi Informasi
Audit Teknologi Informasi (TI) adalah audit yang dilaksanakan khusus terkait teknologi informasi yang digunakan bank dalam operasionalnya. Pelaksanaan audit dilakukan untuk memastikan bahwa Pihak Penyedia Jasa Teknologi Sistem Informasi telah memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan internal Bank Sulteng terutama yang berkaitan dengan masalah *confidentiality, Integrity dan Availability.*

d. Audit Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI)
Audit SPBI merupakan pengawasan terhadap sistem yang menyangkut seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga dan *settlement* dana seketika.

e. Pengawasan Resdident Auditor
Merupakan pengawasan terhadap Kantor Cabang, KCP dan Kantor Kas yang dilaksanakan oleh masing-masing Resident Auditor yang berada di wilayah kerjanya.

f. Audit Investigasi
Merupakan proses mencari, menemukan, mengumpulkan dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak-pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi *fraud* / tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lain sesuai peraturan yang berlaku.

Kebutuhan Personil Audit Internal

Kriteria personil yang dibutuhkan oleh Divisi SKAI & Anti Fraud disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang diatur dalam BPP tentang Audit Internal dengan tetap memperhatikan ketentuan lainnya terkait pengisian sumber daya manusia yang berlaku di Perusahaan.

SKAI & Anti Fraud membuat rencana kebutuhan tenaga auditor dan staf dengan analisa beban kerja sebagai bagian dari pemenuhan standar yang dibutuhkan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugasnya. Pada tahun 2025 SKAI & Anti *Fraud* Bank Sulteng didukung sebanyak 30 (tiga puluh) pegawai baik auditor maupun staf. Adapun gambaran kondisi sumber daya manusia pada Divisi SKAI & Anti Fraud, sebagai berikut:

b. Compliance Audit
A compliance audit is an examination conducted to ensure that work units comply with applicable standards, regulations, policies, and procedures, both externally (laws and regulations) and internally (Company policies and procedures).

c. Information Technology Audit
An Information Technology (IT) audit is an audit conducted specifically regarding the information technology used by the bank in its operations. The audit is conducted to ensure that the Information System Technology Service Provider has complied with and implemented all provisions stipulated in applicable laws and regulations and Bank Sulteng's internal regulations, particularly those related to confidentiality, integrity, and availability.

d. Bank Indonesia Payment System Audit (SPBI)
SPBI audits oversee the system, including a set of rules, institutions, and mechanisms for conducting transactions, administering securities, and real-time fund settlement.

e. Resident Auditor Supervision
Supervision of Branch Offices, Branch Offices, and Cash Offices is carried out by each Resident Auditor within their respective jurisdiction.

f. Investigative Audit
Is the process of systematically searching for, discovering, collecting, analyzing, and evaluating evidence by competent and independent parties to uncover facts or actual events regarding indications of fraud/corruption and/or other specific objectives in accordance with applicable regulations.

Internal Audit Personnel Needs

The personnel criteria required by the Internal Audit & Anti-Fraud Division are aligned with the needs and provisions stipulated in the Internal Audit Budget (BPP) while still adhering to other applicable provisions regarding human resource recruitment within the Company.

The Internal Audit & Anti-Fraud Division plans auditor and staff needs through workload analysis as part of meeting the required standards to support the implementation of its duties. In 2025, the Internal Audit & Anti-Fraud Division of Bank Sulteng will employ 30 (thirty) employees, both auditors and staff. The human resource situation within the Internal Audit & Anti-Fraud Division is as follows:

Jumlah Personil Berdasarkan Posisi/Jabatan
Number of Personnel Based on Position/Title

Posisi	Jumlah Personil Number of Personnel	Position
Pemimpin Divisi SKAI & Anti Fraud	1	SKAI & Anti-Fraud Division Leader
Pemimpin Bagian	4	Section Leader
Pemimpin Unit Kerja	4	Work Unit Leader
Resident Auditor	20	Resident Auditor
Staf	1	Staff

Jumlah Personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Number of Personnel Based on Education Level

Posisi	Jumlah Personil	Position
Doktor (S3)	0	Doctoral (S3)
Magister (S2)	2	Master (S2)
Sarjana (S1)	21	Bachelor degree)
Diploma III	0	Advanced Diploma
SMA/SMK	7	Senior High School

Jumlah Personil Berdasarkan Masa Kerja
Number of Personnel Based on Length of Service

Posisi	Jumlah Personil	Position
0 – 5 tahun	1	0 – 5 years
5 – 10 tahun	2	5 – 10 years
10 – 20 tahun	16	10 – 20 years
Lebih dari 20 tahun	11	More than 20 years

Kecukupan jumlah tenaga auditor dan staf terus dikaji dan akan ditingkatkan jumlahnya seiring kebutuhan dan perkembangan Perusahaan.

Rencana Pengembangan Kualitas Auditor

Dalam menjalankan fungsi audit internal, Divisi SKAI & Anti Fraud membuat rencana kerja pengembangan profesi berkelanjutan dalam rangka pengembangan kapasitas dan kebutuhan organisasi baik untuk mendapatkan sertifikasi maupun mengikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan.

Adapun pelatihan dan sertifikasi bagi auditor dan staf Divisi SKAI & Anti Fraud sesuai rencana kerja tahun 2025, sebagai berikut:

The adequacy of the number of auditors and staff is continuously reviewed and will be increased in line with the Company's needs and developments.

Auditor Quality Development Plan

In carrying out its internal audit function, the Internal Audit & Anti-Fraud Division has developed a continuous professional development work plan to develop capacity and meet organizational needs, both for certification and participation in training.

The training and certification for auditors and staff in the Internal Audit & Anti-Fraud Division, according to the 2025 work plan, are as follows:

a. Pelatihan

a. Training

No	MATERI MATERIAL	PESERTA PARTICIPANTS	JUMLAH AMOUNT
1.	Internal Auditing For Beginners Internal Auditing For Beginners	Pemimpin Bagian Pemimpin Unit Staff Section Leader Unit Leader Staff	10 Orang
2.	Internal Auditing: Tools and Tehniques Internal Auditing: Tools and Techniques	Seluruh karyawan Divisi SKAI & Anti Fraud All employees of the Internal Audit & Anti-Fraud Division	30 Orang
3.	Inhause Training Tentang audit In House Training About auditing	Resident Auditor Staff Resident Auditor Staff	21 Orang

b. Sertifikasi

b. Certification

No.	Jenis Sertifikasi	Peserta
1	*Qualified Internal Auditor* Tingkat dasar Qualified Internal Auditor (Basic Level)	Pemimpin Bagian | Section Leader Pemimpin Unit | Unit Leader Staff | Staff
2	*Qualified Internal Auditor* Tingkat Manajerial Qualified Internal Auditor (Managerial Level)	Pemimpin Divisi Division Leader
3	Qualified Information System (CISA) Qualified Information System (CISA)	Pemimpin Bagian Pengawan TI | IT Supervisory Section Leader Pemimpin Unit Pengawan TI | IT Supervisory Unit Leader
4	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 6 Risk Management Certification Qualification Level 6	Pemimpin Divisi Division Leader
5	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 5 Risk Management CertificationQualification Level 5	Pemimpin Unit Kerja Kantor Pusat | Headquarters Work Unit Leader Resident Auditor | Resident Auditor
6	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 4 Risk Management CertificationQualification Level 4	Staff Staff
7	Sertifikasi General Banking Tingkat 3 General Banking Certification Level 3	Pemimpin Divisi Division Leader
8	Sertifikasi General Banking Tingkat 2 General Banking Certification Level 2	Pemimpin Bagian Section Leader
9	Sertifikasi General Banking Tingkat 1 General Banking Certification Level 1	Pemimpin Unit Kerja Kantor Pusat | Headquarters Work Unit Leader Resident Auditor | Resident Auditor Staff | Staff
10	Sertifikasi auditor Kualifikasi 6 Auditor Certification Qualification 6	Pemimpin Divisi Division Leader
11	Sertifikasi auditor Kualifikasi 5 Auditor Certification Qualification 5	Pemimpin Bagian Section Leader
12	Sertifikasi auditor Kualifikasi 4 Auditor Certification Qualification 4	Pemimpin Unit Kerja Kantor Pusat | Headquarters Work Unit Leader Resident Auditor | Resident Auditor Staff | Staff
13	Sertifikasi Anti Fraud Anti-Fraud Certification	Pemimpin Bagian Anti Fraud | Anti-Fraud Section Leader Pemimpin Unit Pengawan Anti Fraud | Anti-Fraud Supervisory Unit Leader

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal

Sepanjang tahun 2025 Divisi SKAI & Anti Fraud telah melaksanakan kegiatan, sebagai berikut:

- Melaksanakan Pemeriksaan Umum kepada Kantor cabang dan Kantor cabang Pembantu sebanyak 19 dengan rincian 16 Kantor Cabang dan 4 Kantor Cabang pembantu.
- Melakukan Audit Kepatuhan kepada sejumlah Divisi dan Kantor Cabang sebanyak 8 Pemeriksaan.
- Melakukan Audit Investigasi Khusus sebanyak 8 pemeriksaan pada Kantor cabang, Kantor cabang Pembantu dan Divisi.
- Melaksanakan Sosialisasi Anti *Fraud* dan Penandatanganan Pakta Integritas pada Cabang Sigi dan Cabang Palu Barat.
- Mengikuti pendidikan dan pelatihan dan sertifikasi baik dalam bentuk *workshop, inhause training*, seminar untuk peningkatan kualitas tenaga auditor.
- Menjadi *liasion officer* untuk kegiatan pemeriksaaan auditor eksternal.
- Melakukan pemantauan *progress* hasil tindak lanjut temuan audit.
- Membuat laporan pelaksanaan tugas Divisi SKAI & Anti Fraud baik triwulanan, semesteran dan tahunan.

Evaluasi Kinerja Audit Internal

Direktur Utama sebagai atasan langsung melakukan evaluasi dan penilaian dengan melihat pencapaian dan realisasi atas Rencana Audit Tahunan yang telah dibuat yang dilakukan secara berkala setiap tahun. Evaluasi dilakukan untuk melihat efektivitas kerja pada tahun berjalan, disamping itu evaluasi dilakukan untuk memastikan Auditor Internal memberi nilai tambah bagi pengendalian internal dan juga proses tata kelola perusahaan secara keseluruhan di Perusahaan.

AUDITOR EKSTERNAL

Audit Eksternal merupakan organ eksternal Perusahaan yang berfungsi memberikan opini terkait kesesuaian penyajian laporan keuangan Perusahaan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan audit eksternal untuk memberi keyakinan yang memadai mengenai kehandalan pelaporan keuangan dan kesesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Perusahaan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang telah ditetapkan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris dan Komite Audit. Proses pemilihannya dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Penunjuk Akuntan

Implementation of Internal Audit Activities

Throughout 2025, the Internal Audit & Anti-Fraud Division carried out the following activities:

- Conducted 19 General Audits at branch offices and sub-branch offices, comprising 16 branch offices and 4 sub-branch offices.
- Conducted 8 Compliance Audits at several divisions and branch offices.
- Conducted 8 Special Investigative Audits at branch offices, sub-branch offices, and divisions.
- Conducted Anti-Fraud Socialization and the Signing of an Integrity Pact at the Sigi Branch and West Palu Branch.
- Attended education, training, and certification programs in the form of workshops, in-house training, and seminars to improve the quality of auditors.
- Served as a liaison officer for external auditor audit activities.
- Monitored the progress of follow-up actions on audit findings.
- Prepared quarterly, semi-annual, and annual reports on the implementation of the Internal Audit & Anti-Fraud Division's duties.

Internal Audit Performance Evaluation

The President Director, as the direct supervisor, conducts evaluations and assessments by reviewing the achievement and realization of the Annual Audit Plan, which is conducted periodically every year. This evaluation is conducted to assess the effectiveness of the work during the current year and to ensure that the Internal Auditor adds value to internal control and the overall corporate governance process within the Company.

EXTERNAL AUDITOR

The External Audit is an external body of the Company that provides an opinion regarding the conformity of the Company's financial statements with the Financial Accounting Standards (SAK) applicable in Indonesia. External audits are conducted to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting, its conformity with generally accepted accounting principles, and compliance with laws and regulations.

The Company appoints a Public Accounting Firm appointed by the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) based on the recommendations of the Board of Commissioners and the Audit Committee. The selection process is carried out in accordance with applicable

Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk penyusunan laporan keuangan yang diaudit setiap tahun adalah yang terdaftar pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan Indonesia

Bank Sulteng memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat dan disajikan berkualitas dan telah memenuhi Standar Akuntansi Indonesia. Untuk memberikan keyakinan bahwa catatan akuntansi akurat, lengkap dan disusun sesuai dengan ketentuan PSAK yang berlaku, Bank Sulteng secara rutin setiap tahun melakukan kerja sama dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) Independen untuk melakukan audit laporan keuangan.

Kepatuhan terhadap laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Indonesia yang disajikan oleh Perusahaan salah satunya tergambar dari pernyataan pendapat atas kewajaran Laporan Keuangan yang disampaikan oleh Kantor Akuntan Publik.

Mekanisme Penunjukan Akuntan Publik

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Sulteng menetapkan tahapan-tahapan dalam Penunjukan KAP untuk melakukan audit laporan keuangan Perusahan, tahapan tersebut berikut:

1. Dewan Komisaris menyampaikan permintaan kepada Direksi untuk melakukan pemilihan KAP yang akan ditetapkan sebagai Auditor Eksternal Laporan Keuangan.
2. Direksi melakukan proses pengadaan dalam rangka pemilihan KAP sebagai Auditor Eksternal.Tahapan pengadaan dimulai dengan pembentukan Tim Pengadaan sampai dengan tahapan melakukan evaluasi aspek teknis dan aspek finansial atas proposal KAP peserta pengadaan serta menyampaikan hasilnya kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
3. Komite Audit menyusun dan menyampaikan rekomendasi atas penunjukan Akutan Publik dan/ atau KAP kepada Dewan Komisaris.
4. Dewan Komisaris menyampaikan usulan penunjukan Akuntan Publik dan/atau KAP kepada RUPS Tahunan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/ POJK.03/2016 perihal pelaksanaan Penerapan Tata Kelola bagi Bank umum).
5. RUPS Tahunan, memutuskan untuk menetapkan KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan konsolidasi Bank Sulteng, termasuk memberikan

procedures. The Public Accountant (AP) and Public Accounting Firm (KAP) appointed for the preparation of the annual audited financial statements are registered with Bank Indonesia and the Financial Services Authority.

Compliance with Indonesian Financial Accounting Standards

Bank Sulteng ensures that the financial statements it prepares and presents are of high quality and comply with Indonesian Accounting Standards. To ensure that its accounting records are accurate, complete, and prepared in accordance with applicable PSAK provisions, Bank Sulteng regularly collaborates annually with an Independent Public Accounting Firm (KAP) to conduct a financial statement audit.

Compliance with the financial statements presented by the Company in accordance with Indonesian Accounting Standards is reflected in the opinion issued by the Public Accounting Firm on the fairness of the Financial Statements.

Public Accountant Appointment Mechanism

The appointment of a Public Accounting Firm (KAP) is carried out in accordance with applicable laws and regulations. Bank Sulteng has established the following stages in appointing a KAP to audit the Company's financial statements:

1. The Board of Commissioners submits a request to the Board of Directors to select the KAP to be appointed as the External Auditor of the Financial Statements.
2. The Board of Directors conducted the procurement process to select a Public Accountant Firm (KAP) as the External Auditor. The procurement process began with the formation of a Procurement Team and continued with the evaluation of the technical and financial aspects of the participating KAP proposals, and the results were submitted to the Board of Commissioners through the Audit Committee.
3. The Audit Committee prepared and submitted recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of the Public Accountant and/or KAP.
4. The Board of Commissioners submitted the proposal for the appointment of the Public Accountant and/or KAP to the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), taking into account the recommendations of the Audit Committee (Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks).
5. The Annual General Meeting of Shareholders resolved to appoint a KAP to audit Bank Sulteng's consolidated financial statements, including

kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut.

6. Bank menyampaikan surat kepada KAP mengenai hasil keputusan RUPS Tahunan yang menetapkan KAP tersebut sebagai KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan.

Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2025

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 20 Januari 2025, dengan agenda salah satunya yaitu penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit Tahun Buku 2025. Hasil keputusan RUPS tersebut menyebutkan bahwa RUPS memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan pada tahun buku 2025, dan selanjutnya dilaporkan kepada Pemegang Saham Pengendali (PSP).

Perusahaan telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Cahyadi & Adhi untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2025. Penetapan besaran biaya jasa audit diputuskan oleh Dewan Komisaris berdasarkan hasil penetapan keputusan RUPS yang melimpahkan kewenangan kepada Dewan komisaris untuk menetapkan besaran biaya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran harga.

Adapun ruang lingkup pelaksanaan audit yang dilakukan oleh KAP Cahyadi & Adhi yaitu untuk melakukan pemeriksaan dan menyatakan pendapatnya atas Laporan Keuangan Perusahaan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 secara komprehensif dan menyeluruh. KAP Cahyadi & Adhi tidak memberi jasa audit lainnya selain melakukan Audit Atas Laporan Keuangan Perusahaan.

Profil Kantor Akuntan Publik yang digunakan oleh Perusahaan di tahun 2025,sebagai berikut:

authorizing the Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements for the KAP.

6. The Bank submitted a letter to the KAP regarding the decision of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) appointing the KAP as the KAP to audit the Financial Statements.

Audit of Financial Statements for Fiscal Year 2025

The Annual General Meeting of Shareholders (GMS) for Fiscal Year 2024 of PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, held on Wednesday, January 20, 2025, included the appointment of a Public Accounting Firm to conduct the audit for Fiscal Year 2025. The resolutions of the GMS authorized the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to conduct the audit for the 2025 fiscal year, which will then be reported to the Controlling Shareholder (PSP).

The Company has appointed Public Accounting Firm Cahyadi & Adhi to audit the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2025. The Board of Commissioners will determine the amount of audit fees based on the GMS resolution, which delegates authority to the Board of Commissioners to determine the amount of audit fees, taking into account the reasonableness of the price.

The scope of the audit conducted by KAP Cahyadi & Adhi is to comprehensively and thoroughly examine and express an opinion on the Company's Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2025. KAP Cahyadi & Adhi does not provide any other audit services beyond the audit of the Company's Financial Statements.

The profile of the Public Accounting Firm used by the Company in 2025 is as follows:

Kantor akuntan Publik Public Accounting Firm	**KAP Cahyadi & Adhi**
Izin Usaha KAP Public Accounting Firm Business License	No. 170/MK/SK/2025
Akuntan Accountant	Annas Cahyadi, M.Sc, Ak, CA, CPA
Tahun Audit Audit Year	Tahun Buku 2025 Fiscal Year 2025
Ruang Lingkup Audit Audit Scope	Audit laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2025 Audit of the Company's Financial Statements for the Financial Year 2025
Periode Penugasan Engagement Period	Ke 4 | 4th
Biaya Jasa Audit Audit Service Fee	Rp560.000.000 | IDR 560,000,000

Berikut merupakan daftar Kantor Akuntan Publik selama 5 tahun terakhir dan opini yang diberikan dalam mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan.

The following is a list of Public Accounting Firms for the last 5 years and the opinions given in auditing the Company's Financial Statements.

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan	Scope Audit	Biaya Audit	Opini Audit
2025	Cahyadi & Adhi	Annas Cahyadi, M.Sc, Ak, CA, CPA, CFI	Audit Keuangan Atas Laporan Keuangan 2025 Financial Audit of 2025 Financial Statements	Rp560.000.000	Wajar dalam semua hal yang material Reasonable in all material respects
2024	Annas Cahyadi	Annas Cahyadi, M.Sc, Ak, CA, CPA	Audit Keuangan Atas Laporan Keuangan 2024 Financial Audit of 2024 Financial Statements	Rp538.000.000	Wajar dalam semua hal yang material Reasonable in all material respects
2023	Annas Cahyadi	Annas Cahyadi, M.Sc, Ak, CA, CPA	Audit Keuangan Atas Laporan Keuangan 2023 Financial Audit of 2023 Financial Statements	Rp510.000.000	Wajar dalam semua hal yang material Reasonable in all material respects
2022	Annas Cahyadi	Annas Cahyadi, M.Sc, Ak, CA, CPA	Audit Keuangan Atas Laporan Keuangan 2022 Financial Audit of 2022 Financial Statements	Rp510.000.000	Wajar dalam semua hal yang material Reasonable in all material respects
2021	Annas Cahyadi	Annas Cahyadi, M.Sc, Ak, CA, CPA	Audit Keuangan Atas Laporan Keuangan 2021 Financial Audit of 2021 Financial Statements	Rp450.000.000	Wajar dalam semua hal yang material Reasonable in all material respects

Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Auditor

Berdasarkan pemeriksaan Akuntan Publik tahun 2025, tidak terdapat temuan yang signifikan terhadap pencapaian Perusahaan dan yang berdampak material bagi Perusahaan. Perusahaan senantiasa menindaklanjuti setiap temuan auditor atas pelaksanaan audit keuangan yang dilakukan, hal ini merupakan bagian dari pembenahan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk menjadi perusahaan yang semakin baik.

Auditor Findings and Follow-Up

Based on the 2025 Public Accountant audit, there were no significant findings affecting the Company's performance or having a material impact on the Company. The Company consistently follows up on every auditor finding from its financial audits. This is part of its ongoing improvement efforts to become a better company.

MANAJEMEN RISIKO

Untuk meningkatkan keberlangsungan bank dalam menghadapi gejolak ekonomi, serta ancaman-ancaman eksternal lainnya, Bank berupaya memperkuat proses manajemen risiko di setiap kegiatan usaha. Bank akan melakukan penyempurnaan atas kebijakan, infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia terkait dengan pengelolaan risiko yang berpedoman kepada ketentuan Bank Indonesia, POJK dan aturan internasional secara *best practices*.

Bank Sulteng merancang proses manajemen risiko agar mampu mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan usaha Bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi

RISK MANAGEMENT

To enhance the bank's sustainability in the face of economic turmoil and other external threats, the Bank strives to strengthen its risk management processes across all business activities. The Bank will refine its policies, infrastructure, and human resource quality related to risk management, guided by Bank Indonesia regulations, the Financial Services Authority Regulation (POJK), and international best practices.

Bank Sulteng has designed a risk management process to identify, measure, monitor, and control the risks faced by the Company. This is intended to ensure that the Bank's business activities do not incur losses

risk appetite yang sudah ditentukan atau bahkan mengganggu kelangsungan usaha Bank.

Penerapan Manajemen Risiko yang sistematis dan terstruktur diharapkan akan tumbuh budaya sadar risiko dimana segenap unsur di Perusahaan mengenali risiko-risiko yang dihadapi dalam pencapaian visi maupun sasaran Perusahaan, sehinga dapat mempersiapkan langkah mitigasinya dengan memamfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal.

Kebijakan Manajemen Risiko

Kebijakan manajemen risiko dibuat untuk memastikan bahwa eksposur risiko Bank sejalan dengan kebijakan dan prosedur internal serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu kebijakan tersebut dibuat untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dihadapi oleh Bank, untuk menetapkan batas risiko dan pengendalian yang tepat, dan memantau risiko dan kepatuhan terhadap batas risiko.

Penerapan Sistem Manajemen Risiko Bank Sulteng berdasarkan pada empat cakupan yaitu:

a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi sebagai bagian dari peran pengawasan manajemen.
b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit sebagai pedoman penerapan manajemen risiko.
c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen.
d. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Dalam Peraturan OJK Nomor 18/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Bank diwajibkan menetapkan kebijakan risiko yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris. Ruang lingkup kebijakan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam POJK tersebut, sekurang-kurangnya memuat:

1. Penetapan risiko terkait dengan produk dan transaksi perbankan.
2. Penetapan penggunaan metode pengukuran dan system imformasi manajemen risiko.
3. Penentuan limit dan penetapan toleransi risiko.
4. Penetapan penilaian peringkat risiko.
5. Penyusunan rencana darurat dalam kondisi terburuk.
6. Penetapan sistem pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Bank Sulteng memandang perlu menetapkan kebijakan manajemen risiko yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang melekat pada kegiatan fungsional masing-masing. Kebijakan

exceeding its predetermined risk appetite or even disrupt its business continuity.

The implementation of systematic and structured Risk Management is expected to foster a risk-aware culture where all elements in the Company recognize the risks faced in achieving the Company's vision and goals, so that they can prepare mitigation steps by optimally utilizing existing resources.

Risk Management Policy

The risk management policy is established to ensure that the Bank's risk exposure aligns with internal policies and procedures and applicable laws and regulations. Furthermore, the policy is designed to identify and analyze the risks faced by the Bank, establish appropriate risk limits and controls, and monitor risks and compliance with risk limits.

The implementation of Bank Sulteng's Risk Management System is based on four areas:

a. Active supervision by the Board of Commissioners and Board of Directors as part of their management oversight role.
b. The adequacy of policies, procedures, and limit setting as guidelines for risk management implementation.
c. The adequacy of risk identification, measurement, monitoring, and control processes, as well as the management information system.
d. A comprehensive internal control system.

OJK Regulation Number 18/SEOJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks requires banks to establish a risk policy that must be approved by the Board of Commissioners. The scope of the risk management policy, as referred to in the POJK, includes at least:

1. Determination of risks related to banking products and transactions.
2. Determination of the use of measurement methods and risk management information systems.
3. Determining limits and establishing risk tolerance.
4. Establishing risk rating assessments.
5. Developing contingency plans for worst-case scenarios.
6. Establishing an internal control system for implementing risk management.

In light of the above, Bank Sulteng deems it necessary to establish a risk management policy intended to serve as a guideline for all work units in identifying, measuring, monitoring, and controlling risks inherent in their respective functional activities. This policy is

tersebut dituangkan dalam Surat KeputusanDireksi Nomor: 166 /SK-DIR/BPD-ST/2024 Tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kebijakan Manajemen Risiko PT. Bank Sulteng.

Dasar Penerapan Manajemen Risiko

Adapun acuan ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan manajemen risiko Bank, antara lain:

1. Peraturan OJK Nomor 17/ Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran OJK Nomor 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
3. Surat Edaran OJK Nomor 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.
4. Peraturan OJK Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
5. Peraturan OJK Nomor 18/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
6. Surat Edaran OJK Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
7. Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
8. Peraturan OJK Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Penerapan kebijakan Manajemen Risiko dan ketentuan internal lainnya terkait dengan risiko di Perusahaan dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan-peraturan tersebut diatas.

outlined in Board of Directors Decree Number: 166/SK-DIR/BPD-ST/2024 concerning the Company Guidelines (BPP) for PT Bank Sulteng's Risk Management Policy.

Basis for Implementing Risk Management

The reference provisions that form the basis for implementing Bank risk management include:

1. OJK Regulation Number 17/2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.
2. OJK Circular Letter Number 21/SEOJK.03/2017 concerning the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks.
3. OJK Circular Letter Number 35/SEOJK.03/2017 dated July 7, 2017, concerning Guidelines for Internal Control System Standards for Commercial Banks.
4. OJK Regulation Number 46/POJK.03/2017 dated July 12, 2017, concerning the Implementation of the Compliance Function of Commercial Banks.
5. OJK Regulation Number 18/SEOJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.
6. OJK Circular Letter Number 34/SEOJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks
7. OJK Circular Letter Number 14/SEOJK.03/2015 concerning the Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomerates.
8. OJK Regulation Number 17/POJK.03/2014 concerning the Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomerates.

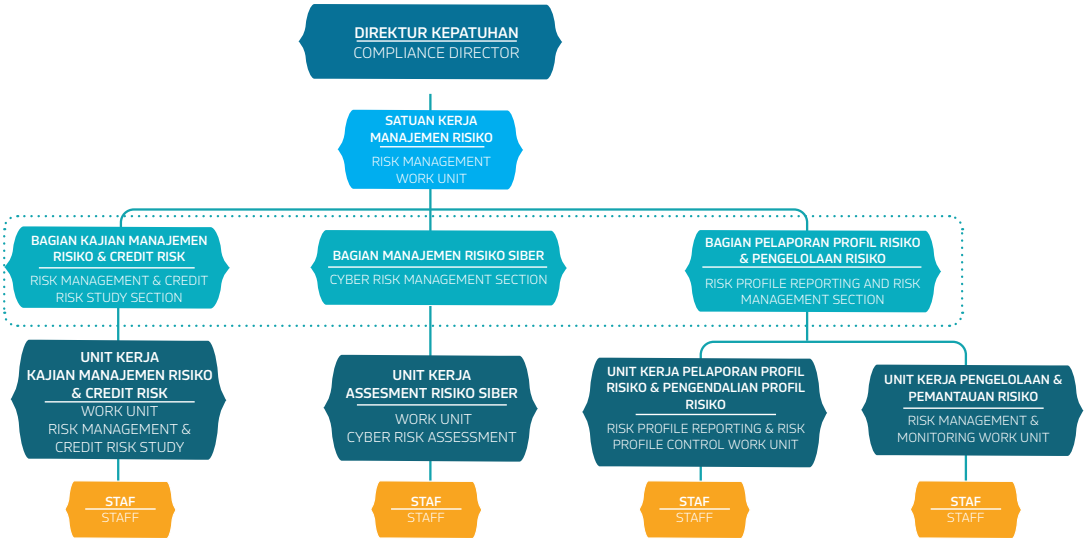
The implementation of Risk Management policies and other internal provisions related to risk in the Company is carried out in accordance with the aforementioned regulations.

Struktur Organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.191/SK-DIR/BPD-ST/2025 Tentang Perubahan Struktur Organisasi, Bagan struktur organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) ditetapkan sebagai berikut:

Organizational Structure of the Risk Management Work Unit

Based on Board of Directors Decree No. 191/SK-DIR/BPD-ST/2025 concerning Changes to the Organizational Structure, the organizational structure chart for the Risk Management Work Unit (SKMR) is as follows:



Profil Pimpinan Satuan Kerja Manajemen Risiko

Tinus Nuanto
Pemimpin Divisi Satuan Kerja Manajemen Risiko

Periode Menjabat & Masa Jabatan
2024 – Sekarang

Tempat & Tanggal Lahir
Palu, 08 September 1963 (usia 62 tahun)

Domisili & Kewarganegaraan
Palu, Indonesia
Pendidikan Dan Sertifikasi
Diploma Tiga Manajemen, Universitas Sintuwu Maroso (1999)
Sertifikat BSMR Level IV, 2014, LSPP, Jakarta
Sertifikat Pemeliharaan, 2020, BSMR, Jakarta

Dasar Hukum Penunjukan:
SK Direksi No. 02/PKWT/SH/BPD/-ST/2024

Pengalaman Kerja:
- Pemimpin Cabang PT. Bank Mega Cabang Palu (01/07/2006 s.d 04/01/2016)
- *Credit Relationship Manager* (Comersial) PT. Bank Mega Cabang Palu (04/01/2016 s.d 13/12/2016)
- *Credit Collections Staff* PT. Bank Mega Cabang Palu (13/12/2016 s.d 03/04/2017)

Risk Management Unit Leader Profile

Tinus Nuanto
Risk Management Unit Division Leader

Term of Office & Term of Office
2024 – Present

Place & Date of Birth
Palu, September 8, 1963 (age 62)

Domicile & Citizenship
Palu, Indonesia
Education and Certification
Diploma Three in Management, Sintuwu Maroso University (1999)
BSMR Level IV Certificate, 2014, LSPP, Jakarta
Maintenance Certificate, 2020, BSMR, Jakarta

Legal Basis for Appointment:
Board of Directors' Decree No. 02/PKWT/SH/BPD/-ST/2024

Work Experience:
- Branch Manager of PT. Bank Mega, Palu Branch (July 1, 2006 to January 4, 2016)
- Credit Relationship Manager (Commercial) PT. Bank Mega, Palu Branch (January 4, 2016 to December 13, 2016)
- Credit Collections Staff, PT. Bank Mega, Palu Branch (December 13, 2016 to April 3, 2017)

- *Credit Collections* dan *remedial staff* PT. Bank Mega Cabang Palu (03/04/2017 s.d 08/09/2018)
- Anggota Komite Pemantau Risiko (26/02/2021 s.d 02/08/202)
- Komisaris Utusan (16/02/2022 s.d 22/09/2024)
- Pemimpin Divisi Satuan Kerja Manajemen Risiko PT Bank Sulteng (sejak 02/10/2024 s.d sekarang)

Pelatihan:
- *Training* Kredit SME *Banking* Program, Bank Mega, Jakarta, 2009..
- *IT Security*, Bank Mega, *Online*, 2014.
- Pelatihan APU & PPT, Bank Mega, Palu, 2014.
- *Groming and Greeting,* Bank Mega, *Online*, 2015.
- Penyusunan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris & Analisa Rencana Bisnis Bank, Sinergi Indonesia Pintar. Jogyakarta, 2021.

Tugas Dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko, sebagai berikut:
1. Menyusun, menetapkan dan mengevaluasi konsep Rencana Kerja & Anggaran Tahunan sesuai dengan Keputusan Kebijakan Umum Bank Sulteng.
2. Merencanakan, mengelola dan mengembangkan sistem dan prosedur Divisi SKMR.
3. Mengelola dan mengkoordinir tugas-tugas bagian risiko kredit dan bagian risiko operasional & risiko lainnya.
4. Menetapkan, mengembangkan langkah-langkah guna menjaga agar aktivitas operasional yang dilakukan bank tidak menimbulkan kerugian ataupun membahayakan kelangsungan usaha bank.
5. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian intern dengan mengacu pada peraturan bank Indonesia tentang penerapan manajemen risiko bagi bank.
6. Melaksanakan pengelolaan manajemen risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko oprasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan bank.
7. Memantau pelaksanaan prinsip mengenal nasabah, agar kegiatan operasional bank tetap terjaga dengan baik.
8. Melakukan pembinaan ke cabang dalam bidang manajemen risiko.
9. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bagian risiko kredit dan bagian risiko operasional & risiko lainnya.
10. Memberikan petunjuk dan bimbingan bagi pelaksana tugas masing-masing bagian sesuai dengan bidang tugas yang telah ditetapkan.
11. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan divisi SKMR dan/atau yang diberikan oleh atasan.
12. Melakukan proses penyelenggaraan kegiatan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan divisi SKMR secara periodik maupun insidentil.

- Credit Collections and Remedial Staff, PT. Bank Mega Palu Branch (April 3, 2017 to September 8, 2018)
- Member of the Risk Monitoring Committee (February 26, 2021 to February 8, 2022)
- Delegated Commissioner (February 16, 2022 to September 22, 2024)
- Head of the Risk Management Work Unit Division of PT Bank Sulteng (since October 2, 2024 to present)

Training:
- SME Banking Program Credit Training, Bank Mega, Jakarta, 2009.
- IT Security, Bank Mega, Online, 2014.
- AML & CFT Training, Bank Mega, Palu, 2014.
- Grooming and Greeting, Bank Mega, Online, 2015.
- Preparation of the Board of Commissioners' Supervisory Report & Analysis of the Bank's Business Plan, Smart Indonesia Synergy. Yogyakarta, 2021.

Duties and Responsibilities of the Risk Management Work Unit

The duties and responsibilities of the Risk Management Work Unit are as follows:
1. Prepare, establish, and evaluate the Annual Work Plan & Budget concept in accordance with the General Policy Decree of Bank Sulteng.
2. Plan, manage, and develop the systems and procedures of the Risk Management Division.
3. Manage and coordinate the tasks of the credit risk division, operational risk division, and other risk divisions.
4. Determine and develop measures to ensure that the bank's operational activities do not cause losses or endanger the bank's business continuity.
5. Identify, measure, monitor, and implement internal controls in accordance with Bank Indonesia regulations concerning the implementation of risk management for banks.
6. Implement the management of credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk, and compliance risk.
7. Monitor the implementation of the "know your customer" principle to ensure the bank's operational activities are maintained effectively.
8. Provide guidance to branches in the area of risk management.
9. Conduct performance appraisals of the credit risk division, operational risk division, and other risk divisions.
10. Provide guidance and direction to those performing the duties of each division according to their assigned areas of responsibility.
11. Perform other duties related to the SKMR division and/or as assigned by superiors.
12. Manage the implementation of activities and prepare periodic and incidental reports on the implementation of SKMR division activities.

13. Melaksanakan perbaikan/penyelesaian temuan hasil pemeriksaan audit intern maupun ekstern.
14. Melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur internal, Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan, dan Peraturan Bank Indonesia serta peraturan lainnya yang berlaku.
15. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kegiatannya.

Prinsip Manajemen Risiko

Prinsip Manajemen Risiko yang dijalankan Bank Sulteng, sebagai berikut:

1. Permodalan
   Bank Sulteng menyediakan permodalan sesuai risiko yang ditanggung dan memelihara tingkat permodalan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Transparansi
   Bank Sulteng secara terbuka menyampaikan informasi yang relevan dalam proses pengambilan risiko dan proses pengambilan risiko itu sendiri.
3. Independensi
   Manajemen Bank Sulteng bertindak secara profesional dan terbebas dari tekanan dan pengaruh pihak lain.
4. Terintegrasi
   Bank Sulteng menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Lembaga Jasa Keuangan yang tergabung dalam konglomerasi keuangan Bank Sulteng sesuai dengan ketentuan regulator.
5. Berkesinambungan
   Pengendalian risiko dilakukan secara terus-menerus dikembangkan agar lebih baik sesuai dengan kondisi bisnis dan *best practice* yang ada.
6. Akuntabilitas
   Bank Sulteng menerapkan kebijakan dan prosedur untuk menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder.*
7. Responsibilitas
   Bank Sulteng bertindak berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
8. Kewajaran
   Bank Sulteng memperhatikan kepentingan *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran *(equal treatment).*

Strategi Manajemen Risiko

Strategi Manajemen Risiko yang dijalankan oleh Bank Sulteng, sebagai berikut:

1. Strategi Manajemen Risiko Bank dirumuskan sesuai strategi bisnis secara keseluruhan denganmempertimbangkan tingkat risiko pada limit yangdapat diterima dan menguntungkan Bank dalam rangka memastikan kontinuitas usaha Bank.

13. Implement improvements/resolve internal and external audit findings.
14. Ensure compliance with internal systems and procedures, the Financial Services Authorization Regulation, Bank Indonesia Regulations, and other applicable regulations.
15. Accountable for the implementation of core duties, functions, and activities.

Risk Management Principles

The Risk Management Principles implemented by Bank Sulteng are as follows:

1. Capitalization
   Bank Sulteng provides capital commensurate with the risks assumed and maintains capital levels in accordance with applicable regulations.
2. Transparency
   Bank Sulteng openly discloses relevant information regarding the risk-taking process and the risk-taking process itself.
3. Independence
   Bank Sulteng's management acts professionally and is free from pressure and influence from other parties.
4. Integrated
   Bank Sulteng implements Integrated Risk Management at the Financial Services Institutions within the Bank Sulteng financial conglomerate in accordance with regulatory requirements.
5. Sustainable
   Risk control is continuously developed to improve its effectiveness in line with business conditions and existing best practices.
6. Accountability
   Bank Sulteng implements policies and procedures to ensure management accountability to stakeholders.
7. Responsibility
   Bank Sulteng acts based on the principle of prudence and compliance with applicable laws and regulations.
8. Fairness
   Bank Sulteng considers the interests of stakeholders based on the principles of equality and fairness (equal treatment).

Risk Management Strategy

The Risk Management Strategy implemented by Bank Sulteng is as follows:

1. The Bank's Risk Management Strategy is formulated in accordance with the overall business strategy, taking into account the level of risk within acceptable and profitable limits for the Bank to ensure business continuity.

2. Strategi Manajemen Risiko disusun untuk memastikan bahawa eksposur risiko Bank dikelola secara terkendali sesuai dengan kebijakan, prosedur internal bank serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Strategi Manajemen Risiko disusun berdasarkan prinsip-prinsip umum sebagai berikut:
   a. Strategi Manajemen Risiko harus berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha Bank dengan mempertimbangkan kondisi/siklus ekonomi.
   b. Strategi Manajemen Risiko secara komprehensif dapat mengendalikan dan mengelola risiko Bank dan mencapai kecukupan permodalan yang diharapkan disertai alokasi sumber daya yang memadai.
4. Strategi Manajemen Risiko disusun dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:
   a. Perkembangan ekonomi dan industri serta dampaknya pada risiko Bank.
   b. Organisasi Bank termasuk kecukupan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung.
   c. Kondisi keuangan Bank termasuk kemampuan untuk menghasilkan laba dan mengelola risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan internal.
   d. Bauran serta diversifikasi portofolio Bank.
   e. Mengkomunikasikan Strategi Manajemen Risiko secara efektif kepada seluruh satuan kerja, manajer dan staf yang relevan agar dipahami dengan jelas.
   f. Melakukan reviu Strategi Manajemen Risiko secara berkala termasuk dampaknya terhadap kinerja keuangan Bank, untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan terhadap Strategi Manajemen Risiko.

Tahapan Implementasi Manajemen Risiko

Adapun skema tahapan implementasi manajemen risiko Bank Sulteng sebagai berikut:

1. Perencanaan Manajemen Risiko
   Tahap perencanaan manajemen risiko mencakup penentuan konteks risiko dan penyusunan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang sesuai dengan kebutuhan bank.
2. *Awareness Risiko*
   Merupakan bagian dari proses manajemen perubahan yang meliputi peluncuran, sosialisasi dan pelatihan terkait dengan konsep manajemen risiko yang pada akhirnya dapat mendorong tumbuhnya budaya peduli risiko.
3. Implementasi Manajemen Risiko
   Langkah awal pada tahap ini adalah dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh jajaran, kemudian melakukan kegiatan identifikasi,

2. The Risk Management Strategy is developed to ensure that the Bank's risk exposure is managed in a controlled manner in accordance with the Bank's policies and internal procedures, and applicable laws and regulations.
3. The Risk Management Strategy is developed based on the following general principles:
   a. The Risk Management Strategy must be long-term oriented to ensure the Bank's business continuity, taking into account economic conditions/cycles.
   b. A comprehensive Risk Management Strategy can control and manage the Bank's risks and achieve the expected capital adequacy with adequate resource allocation.

4. The Risk Management Strategy is developed by considering the following factors:
   a. Economic and industrial developments and their impact on the Bank's risks.
   b. The Bank's organization, including the adequacy of human resources and supporting infrastructure.
   c. The Bank's financial condition, including the ability to generate profits and manage risks arising from changes in external and internal factors.
   d. The Bank's portfolio mix and diversification.
   e. Effectively communicate the Risk Management Strategy to all relevant work units, managers, and staff to ensure its clear understanding.
   f. Periodically review the Risk Management Strategy, including its impact on the Bank's financial performance, to determine whether changes to the Risk Management Strategy are necessary.

Risk Management Implementation Stages

The stages of risk management implementation at Bank Sulteng are as follows:

1. Risk Management Planning
   The risk management planning stage includes determining the risk context and developing risk management policies and procedures tailored to the bank's needs.
2. Risk Awareness
   This is part of the change management process, encompassing the launch, socialization, and training related to risk management concepts, which ultimately foster a culture of risk awareness.

3. Risk Management Implementation
   The initial step in this stage is to conduct socialization at all levels, followed by identifying, measuring,

pengukuran dan monitoring risiko bank sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

4. Pengendalian Risiko
   Pada tahapan ini, Bank Sulteng melakukan kajian, menentukan jenis dan bentuk perlakuan terhadap risiko yang diperlukan mencakup kegiatan evaluasi atas pengelolaan risiko yang telah dilakukan, termasuk proses monitoring dan *review* atas semua aspek dari proses manajemen risiko.
5. Pelaporan dan *Disclosure* Risiko
   Tahapan ini merupakan wujud implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan risiko yang telah dilakukan oleh Bank Sulteng kepada pihak internal maupun eksternal.

Proses Manajemen Risiko

Proses Manajemen Risiko Perusahaan yang diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Risiko dilaksanakan pada seluruh level organisasi secara transaksional maupun portfolio.
2. Manajemen Risiko dilaksanakan secara terintegrasi bukan secara parsial.
3. Proses Manajemen Risiko merupakan proses yang dinamis, sehingga diperlukan ***review*** secara berkala agar tetap sesuai dengan kondisi terkini dan peraturan yang berlaku.
4. Pelaksanaan Manajemen Risiko dilakukan dalam suatu rangkaian yang terdiri atas identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko.

Rencana Kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko

Pada tahun 2025, Satuan Kerja Manajemen Risiko membuat Rencana Kerja, sebagai berikut:

1. Menyusun SOP *Cut Loss Limit*.
2. Menyusun SOP *Risk Tolerance*.
3. Menyusun SOP terkait kewajiban evaluasi dan mekanisme pelaporan yang harus dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Menyusun BPP dan SOP *Stress Testing*.
5. Menyusun SOP Rencana Resolusi Bank Umum.
6. Menyusun SOP *Risk Register*.
7. *Review* BPP dan SOP Laporan Profil Risiko.
8. *Review risk appetite, risk tolerance* dan *risk limit* Bank Sulteng.
9. *Workshop* dan pendampingan pengisian aplikasi Profil Risiko Cabang (PRC).
10. Menyusun laporan Profil Risiko Bank Sulteng.
11. Menyusun laporan Rasio Pengungkit/*Rasio Leverage* Bank Sulteng.
12. Menyusun laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Sulteng.

and monitoring bank risks in accordance with established policies.

4. Risk Control
   At this stage, Bank Sulteng conducts a study and determines the type and form of risk treatment required. This includes evaluating the risk management implemented, including monitoring and reviewing all aspects of the risk management process.
5. Risk Reporting and Disclosure
   This stage demonstrates the implementation of the principles of transparency and accountability in risk management implemented by Bank Sulteng to both internal and external parties.

Risk Management Process

The Company's Risk Management process, as stipulated in the Risk Management Policy, is as follows:

1. Risk Management is implemented at all levels of the organization, both transactionally and portfolio-wise.
2. Risk Management is implemented in an integrated manner, not in parts.
3. The Risk Management process is dynamic and requires regular review to ensure it remains in line with current conditions and applicable regulations.
4. Risk Management is implemented through a series of steps, including risk identification, risk measurement, risk monitoring, and risk control.

Risk Management Unit Work Plan

In 2025, the Risk Management Unit will develop the following Work Plan:

1. Developing a Cut Loss Limit SOP.
2. Developing a Risk Tolerance SOP.
3. Developing an SOP regarding evaluation obligations and reporting mechanisms for the Board of Directors and Board of Commissioners.
4. Developing a BPP and a Stress Testing SOP.
5. Developing a Commercial Bank Resolution Plan SOP.
6. Developing a Risk Register SOP.
7. Reviewing the BPP and the Risk Profile Report SOP.
8. Reviewing Bank Sulteng's risk appetite, risk tolerance, and risk limit.
9. Conducting a workshop and assistance in completing the Branch Risk Profile (PRC) application.
10. Developing a Bank Sulteng Risk Profile report.
11. Developing a Bank Sulteng Leverage Ratio report.
12. Developing a Bank Sulteng Minimum Capital Adequacy Requirement report.

13. Menyampaikan seluruh laporan rutin kepada Otoritas Jasa Keuangan baik secara *online* maupun *offline*.
14. Melakukan pengkajian terhadap Surat Keputusan Direksi, pengkajian BPP/SOP, usulan-usulan strategi bisnis yang berbasis pada pengendalian risiko dan kegiatan bisnis bank.
15. Melakukan pengkajian dan opini terhadap usulan perjanjian kerja sama beserta dokumen pendukungnya.
16. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap risiko-risiko yang ditetapkan.
17. Melaksanakan sosialisasi Penerapan Budaya Risiko ke Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Bank Sulteng.

Profil Risiko Bank

Bank sulteng melakukan penilaian profil risiko mencakup penilaian terhadap risiko yang melekat dan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko yang mencerminkan sistem pengendalian risiko *(risk control system)* baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi. Penilaian profil risiko bank yang dilakukan sudah mengacu pada SE OJK No. 14 /SEOJK.03/2017 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Bank Sulteng melakukan penilaian profil resiko dilakukan terhadap 8 (delapan) Risiko yaitu :
- Risiko Kredit
- Risiko Pasar
- Risiko Likuiditas
- Risiko Operasional
- Risiko Hukum
- Risiko Stratejik
- Risiko Kepatuhan dan
- Risiko Reputasi.

Jenis-jenis risiko yang dikelola oleh Perusahaan, yaitu:

1. Risiko Kredit
   Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit adalah untuk memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana Bank tidak terekspos pada Risiko Kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada Bank. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko tersebut tergolong cukup signifikan.

2. Risiko Pasar
   Risiko pasar adalah risiko bahwa perubahan harga pasar seperti suku bunga, akan memengaruhi pendapatan atau nilai dari instrumen keuangan.

13. Submitting all routine reports to the Financial Services Authority, both online and offline.

14. Conducting reviews of Board of Directors' Decrees, BPP/SOP reviews, and proposed business strategies based on risk control and the bank's business activities.
15. Conducting reviews and opinions on proposed cooperation agreements and supporting documents.

16. Monitoring and evaluating identified risks.

17. Conducting outreach on the Implementation of Risk Culture at Bank Sulteng Branch Offices and Sub-Branches.

Bank Risk Profile

Bank Sulteng conducts a risk profile assessment, including an assessment of inherent risks and an assessment of the quality of risk management implementation, reflecting the risk control system for both the individual bank and the consolidated bank. The bank risk profile assessment is conducted in accordance with OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.03/2017 concerning the Assessment of the Soundness Level of Commercial Banks.

Bank Sulteng conducts a risk profile assessment of eight risks:
- Credit Risk
- Market Risk
- Liquidity Risk
- Operational Risk
- Legal Risk
- Strategic Risk
- Compliance Risk and
- Reputation Risk.

The types of risks managed by the Company are:

1. Credit Risk
   The primary objective of Credit Risk Management is to ensure that the Bank's funding activities are not exposed to Credit Risk that could result in losses for the Bank. Considering the Bank's business activities, the potential losses the Bank faces from this risk are considered quite significant.

2. Market Risk
   Market risk is the risk that changes in market prices, such as interest rates, will affect the income or value of financial instruments.

Risiko tingkat bunga bank merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan bunga, mengingat tingkat suku bunga tersebut sesuai dengan strategi bisnis Bank. Kegiatan manajemen dalam memonitoring aset dan liabilitas bank dilakukan terhadap setiap perubahan tingkat suku bunga. Adapun pengelolaan risiko suku bunga disertai dengan pemantauan sensitivitas aset keuangan dan liabilitas bank untuk meningkatkan atau menurunkan tingkat suku bunga pasar.

Bank interest rate risk is an activity aimed at optimizing interest income, considering that the interest rate level aligns with the Bank's business strategy. Management monitors the bank's assets and liabilities for any changes in interest rates. Interest rate risk management includes monitoring the sensitivity of the bank's financial assets and liabilities to increases or decreases in market interest rates.

Risiko nilai tukar adalah risiko kerugian akibat pergerakan yang berlawanan dari nilai tukar pada saat Bank memiliki posisi terbuka. Bank tidak memiliki saldo dan transaksi dalam mata uang asing. Dengan demikian, Bank tidak menghadapi risiko nilai tukar.

Exchange rate risk is the risk of loss due to adverse movements in exchange rates when the Bank has open positions. The Bank does not have balances or transactions in foreign currencies. Therefore, the Bank does not face exchange rate risk.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko di mana Bank tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajibannya (membayar kepada kreditur atau melunasi hutang-hutangnya pada saat jatuh tempo). Risiko likuiditas dapat diperkecil dengan suatu perencanaan *cash flow* dan pengelolaan kelebihan dana yang tepat dengan tetap mengantisipasi kebutuhan dan kewajiban di masa yang akan datang. Pengelolaan likuiditas dan risiko pendanaannya diawasi oleh komite ALCO. Kebijakan risiko likuiditas merupakan tanggung jawab manajemen dan strategis yang harus diambil untuk menjamin likuiditas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan Bank sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk that a Bank will not have sufficient funds to meet its obligations (pay creditors or settle its debts as they fall due). Liquidity risk can be minimized through proper cash flow planning and management of excess funds, while still anticipating future needs and obligations. Liquidity management and funding risk are overseen by the ALCO committee. Liquidity risk policy is a management and strategic responsibility that must be implemented to ensure sufficient liquidity to meet the Bank's needs in accordance with applicable regulations.

Ukuran utama yang digunakan oleh Bank untuk mengelola risiko likuiditas adalah rasio aset lancar bersih terhadap simpanan nasabah. Rasio aktiva lancar bersih dianggap sebagai uang tunai dan kas pada aktiva lancar dikurangi dengan simpanan dari bank (Giro pada Bank Lain).

The primary measure used by Banks to manage liquidity risk is the ratio of net current assets to customer deposits. The net current asset ratio is considered cash and cash equivalents to current assets minus deposits from the bank (Current Accounts with Other Banks).

4. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya masalah eksternal yang memengaruhi operasional bank. Tujuan Bank adalah untuk mengelola risiko operasional sehingga dapat menghindari kerugian keuangan dan reputasi Bank.

4. Operational Risk

Operational risk is the risk caused by, among other things, inadequate and/or malfunctioning internal processes, human error, system failures, or external issues that impact the Bank's operations. The Bank's objective is to manage operational risk to avoid financial and reputational losses.

5. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko hukum dapat bersumber antara lain dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh bank, ketiadaan dan/atau

5. Legal Risk

Legal risk is the risk resulting from lawsuits and/or legal weaknesses. Legal risk can stem from, among other things, legal weaknesses caused by weak obligations entered into by the bank, the absence and/or changes in laws and regulations that cause

perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang akan ada dan proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Bank maupun Bank terhadap pihak ketiga.
Bank berusaha untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko hukum, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Bank juga telah melakukan pengarsipan dengan cukup baik, khususnya arsip/dokumen kredit yang terkait dengan jaminan nasabah guna menghindari tuntutan hukum.

6. Risiko Reputasi
Risiko Reputasi merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank.

Pengedalian risiko yang berdampak pada risiko reputasi telah dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan mengevaluasi setiap kejadian yang berdampak pada reputasi Bank. Pengawasan terhadap risiko reputasi dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan memberikan informasi yang konprehensif kepada nasabah dan *stakeholder* sehingga dapat memberikan pemahaman atas setiap permasalah ataupun kejadian yang dialami oleh bank melalui Divisi Corporate Secretary.

7. Risiko Stratejik
Risiko Stratejik adalah risiko yang disebabkan karena adanya pelaksanaan strategi dalam bank yang tidak sesuai, pengambilan keputusan yang tidak tepat atau tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Pengedalian risiko yang berdampak pada risiko stratejik dimana dilakukan strategi pengembangan bisnis, diantarahnya adalah penguatan *funding* beserta perbaikan komposisinya. Selain itu, Bank telah mengeluarkan produk-produk baru guna menghimpun DPK.

Perwujudan Sistem Pengendalian Risiko untuk Risiko Stratejik Bank harus memastikan sistem informasi manajemen yang dimiliki telah memadai untuk mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan stratejik namun perlu dilakukan *review* berkala agar sejalan dengan regulasi dan perkembangan bisnis perbankan.

8. Risiko Kepatuhan
Risiko Kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan

a transaction to be non-compliant with existing provisions, and litigation processes arising from lawsuits filed by third parties against the bank or the bank against third parties.

The bank strives to minimize the possibility of legal risk, in accordance with applicable regulations and based on the principle of prudence. The bank has also maintained adequate archiving, particularly regarding credit archives/documents related to customer guarantees, to avoid lawsuits.

6. Reputational Risk
Reputational risk is the risk caused by negative publicity related to the bank's business activities or negative perceptions of the bank.

The Board of Commissioners and the Board of Directors have implemented risk controls that impact reputational risk by evaluating every incident that impacts the bank's reputation. Reputational risk oversight is carried out by the Board of Commissioners and Board of Directors by providing comprehensive information to customers and stakeholders, enabling them to understand any issues or incidents experienced by the bank through the Corporate Secretary Division.

7. Strategic Risk
Strategic risk is the risk caused by inappropriate implementation of strategies within the bank, inappropriate decision-making, or failure to implement changes to applicable laws and regulations.

Risk control impacts strategic risk, including business development strategies, including strengthening funding and improving its composition. In addition, the Bank has launched new products to raise third party funds.

Implementation of a Risk Control System for Strategic Risk: The Bank must ensure its management information system is adequate to support strategic planning and decision-making processes. However, regular reviews are necessary to ensure it aligns with regulations and banking business developments.

8. Compliance Risk
Compliance risk is the risk arising from a bank's failure to comply with and/or implement applicable

peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

laws and regulations, including Sharia principles for Sharia commercial banks and Sharia business units.

Berikut hasil penilaian profil risiko Bank Sulteng sesuai matriks profil risiko Per- Desember 2025, sebagai berikut:

The following are the results of Bank Sulteng's risk profile assessment according to the risk profile matrix as of December 2025:

Laporan Profil Risiko Per Desember 2025
Risk Profile Report as of December 2025

No	Profil Risiko Risk Profile	Periode Laporan Reporting Period					
		Desember 2025 December 2025			Desember 2024 December 2024		
		Peringkat Rating					
		Resiko Inherent Risk Inherent	Kualitas Manajemen Risiko Management Quality Risk	Tingkat Resiko Level Risk	Resiko Inherent Risk Inherent	Kualitas Manajemen Risiko Management Quality Risk	Tingkat Resiko Level Risk
1	Risiko Kredit Credit Risk	Low	Satisfactory	2*	Low to Moderate	Satisfactory	2
2	Risiko Pasar Market Risk	Low To Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
3	Resiko Likuiditas Liquidity Risk	Low	Satisfactory	2*	Low	Satisfactory	2*
4	Risiko Operasional Operational Risk	Low	Satisfactory	2*	Low to Moderate	Satisfactory	2
5	Risiko Stratejik Strategic Risk	Low To Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
6	Risiko Hukum Legal Risks	Low	Satisfactory	2*	Low	Satisfactory	2*
7	Risiko Kepatuhan Compliance Risk	Low	Satisfactory	2*	Low to Moderate	Satisfactory	2
8	Risiko Reputasi Reputational Risk	Low	Satisfactory	2*	Low	Satisfactory	2*
	Peringkat Komposit Composite Value			2			2

Profil risiko Bank untuk periode Desember 2025 berada pada peringkat 2 (dua), dimana hampir seluruh parameter penilaian atau indikator risiko inheren berada pada peringkat 2 (dua) atau indikator risiko inheren berada pada tingkat *Low to Moderate* dan rata-rata kualitas penerapan manajemen risiko berada pada posisi *Satisfactory.* Hal ini menunjkkan bahwa eksposur risiko yang dihadapi Bank masih dalam batas toleransi risiko yang dapat diterima, serta tidak memberi dampak material terhadap kelangsungan usaha dan stabilitas keuangan Bank. Sebagian besar parameter atau indikator risiko Inheren pada laporan profil risiko yangmencakup Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi menunjukkan tingkat eksposur yang relatif terkendali didukung oleh penerapan manajemen risiko yang memadai.

The Bank's risk profile for the December 2025 period was ranked 2 (two), with almost all assessment parameters or inherent risk indicators ranked 2 (two), or inherent risk indicators at the Low to Moderate level, and the average quality of risk management implementation was Satisfactory. This indicates that the Bank's risk exposure remains within acceptable risk tolerance limits and does not have a material impact on the Bank's business continuity and financial stability. Most of the inherent risk parameters or indicators in the risk profile report, including Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk, Strategic Risk, Compliance Risk, and Reputation Risk, indicate a relatively manageable level of exposure supported by adequate risk management implementation.

Budaya Manajemen Risiko

Bank Sulteng menilai penting untuk mengetahui dan mengerti beragam risiko yang dihadapi dalam aktivitas Bank. Karena itu, budaya manajemen risiko diimplementasikan dengan membangun suatu kepercayaan, pelaksanaan dan pengawasan manajemen yang akan memastikan bahwa aktivitas Bank telah berjalan dengan menganut prinsip kehati-hatian.

Budaya sadar risiko diterapkan pada seluruh pegawai dan lapisan serta tingkatan dalam organisasi Perusahaan. Bank Sulteng melakukan sosialisasi terkait kebijakan dan proses implementasi manajemen risiko kepada seluruh Insan Perusahaan sebagai upaya untuk memperkenalkan, menyebarluaskan informasi dan memberi pemahaman mengenai manajemen risiko sehingga dapat diterapkan secara konsisten di lingkungan Perusahaan

Evaluasi Atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Bank Sulteng melakukan peninjauan atau *review* terhadap efektivitas penerapan sistem manajemen risiko yang digunakan setidaknya 1 (satu) tahun sekali. Evaluasi meliputi penyesuaian strategi dan kerangka risiko sebagai bagian dari kebijakan manajemen risiko, kecukupan sistem informasi manajemen risiko serta kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

Dewan Komisaris melalui Komite Audit berperan aktif dalam pelaksanaan evaluasi sistem manajemen risiko dengan me*review* hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Direksi sebagai organ yang bertanggung jawab atas efektivitas penerapan sistem manajemen risiko.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Audit Atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit menyatakan bahwa Bank Sulteng telah memiliki sistem manajemen risiko yang cukup dan memadai yang dirancang untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan memantau risiko yang dihadapi Perusahaan secara efektif.

Bank Sulteng telah menetapkan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk mengelola risiko- risiko yang teridentifikasi. Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank Sulteng mencakup langkah-langkah yang tepat dalam mengidentifikasi risiko, menentukan toleransi risiko yang dapat diterima, dan mengembangkan strategi pengelolaan risiko yang sesuai dengan tujuan dan kepentingan Perusahaan.

Risk Management Culture

Bank Sulteng considers it essential to recognize and understand the various risks faced in the Bank's activities. Therefore, a risk management culture is implemented by building trust, implementing, and overseeing management that will ensure that the Bank's activities are conducted in accordance with prudent principles.

A risk-aware culture is implemented at all levels and levels within the Company's organization. Bank Sulteng conducts outreach regarding risk management policies and implementation processes to all Company personnel as an effort to introduce, disseminate information, and provide an understanding of risk management so that it can be consistently implemented throughout the Company.

Evaluation of the Effectiveness of the Risk Management System

Bank Sulteng conducts a review of the effectiveness of its risk management system implementation at least annually. This evaluation includes adjustments to the risk strategy and framework as part of the risk management policy, the adequacy of the risk management information system, and the adequacy of the risk identification, measurement, monitoring, and control processes.

The Board of Commissioners, through the Audit Committee, plays an active role in the evaluation of the risk management system by reviewing the results of the evaluation conducted by the Board of Directors, as the body responsible for the effectiveness of the risk management system implementation.

Statement by the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or the Audit Committee on the Adequacy of the Risk Management System

The Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Audit Committee state that Bank Sulteng has a sufficient and adequate risk management system designed to effectively identify, assess, manage, and monitor the risks faced by the Company.

Bank Sulteng has established clear policies and procedures to manage identified risks. The risk management system implemented by Bank Sulteng includes appropriate steps for identifying risks, determining acceptable risk tolerances, and developing risk management strategies aligned with the Company's objectives and interests.

Selain itu, Bank Sulteng memiliki mekanisme pemantauan dan pengendalian yang efektif untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang diidentifikasi dikelola dengan tepat. Komite Audit memiliki peran penting dalam memantau implementasi sistem manajemen risiko dan menilai keefektifannya. Komite Audit membantu melakukan evaluasi secara independen terhadap sistem manajemen risiko yang ada dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan jika diperlukan.

Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pegawai Bank Sulteng dalam penerapan sistem manajemen risiko. Pelibatan aktif dan komitmen dari seluruh tingkatan organisasi sangat penting untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan dapat dikelola secara efektif.

Dengan adanya sistem manajemen risiko yang cukup dan memadai, Bank Sulteng dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang dihadapi dengan baik, sehingga dapat menjaga keberlanjutan bisnis, melindungi kepentingan Pemegang Saham, dan memenuhi tanggung jawab kepada semua pemangku kepentingan.

Melalui komitmen yang kuat terhadap sistem manajemen risiko yang efektif, Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit meyakini bahwa Bank Sulteng mampu menghadapi tantangan risiko, mampu menerapkan tindakan pengendalian yang tepat, dan mencapai tujuan-tujuan strategis dengan keberhasilan yang berkelanjutan.

Furthermore, Bank Sulteng has an effective monitoring and control mechanism to ensure that identified risks are managed appropriately. The Audit Committee plays a crucial role in monitoring the implementation of the risk management system and assessing its effectiveness. The Audit Committee assists in conducting an independent evaluation of the existing risk management system and provides recommendations for improvements, if necessary.

The Board of Directors, Board of Commissioners, and Audit Committee also emphasize the importance of involving all Bank Sulteng employees in implementing the risk management system. Active involvement and commitment from all levels of the organization are crucial to ensuring that the Company's risks are effectively managed.

With a sufficient and adequate risk management system, Bank Sulteng can effectively identify and manage its risks, thereby maintaining business sustainability, protecting the interests of Shareholders, and fulfilling its responsibilities to all stakeholders.

Through a strong commitment to an effective risk management system, the Board of Directors, Board of Commissioners, and Audit Committee believe that Bank Sulteng is able to face risk challenges, implement appropriate control measures, and achieve strategic objectives with sustainable success.

FUNGSI KEPATUHAN

Fungsi Kepatuhan adalah fungsi untuk melakukan pengawasan yang terkait dengan ***ex-ante***, yaitu melalui penggunaan hak untuk menolak dan meminta seluruh pengurus bank untuk tidak melanjutkan suatu kebijakan dan atau keputusan atas setiap transaksi penting yang akan diambil yang didalamnya mengandung unsur ketidakpatuhan. Oleh karenanya merupakan salah satu bagian penting dari sistem pengendalian internal oleh manajemen Bank yang secara aktif mengambil berbagai langkah untuk mencegah manajemen Bank dalam menetapkan kebijakan dan atau mengambil keputusan yang di dalamnya mengandung unsur-unsur ketidakpatuhan, penyimpangan atau bahkan pelanggaran terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

COMPLIANCE FUNCTION

The Compliance function is responsible for conducting ex-ante oversight, namely through the exercise of the right to reject and request all bank management to discontinue a policy and/or decision regarding any significant transaction that contains elements of non-compliance. Therefore, it is a crucial part of the Bank's internal control system, which actively takes various steps to prevent Bank management from establishing policies and/or making decisions that contain elements of non-compliance, deviations, or even violations of the provisions of the Financial Services Authority and other applicable laws and regulations.

Bank Sulteng memahami pentingnya fungsi kepatuhan yang efektif dalam pengelolaan Perusahaan, mengingat kompleksitas kegiatan usaha Bank Sulteng yang semakin meningkat yang mengakibatkan tantangan dan eksposur risiko yang dihadapi juga semakin besar, maka diperlukan berbagai macam upaya untuk memitigasi risiko tersebut, salah satunya adalah risiko kepatuhan. Berdasarkan POJK No.46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Bank melakukan pengelolaan risiko kepatuhan serta memastikan terlaksananya budaya kepatuhan dalam kegiatan dan aktivitas Bank.

Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi kepatuhan yang dilaksanakan oleh Bank berdasarkan POJK, yaitu:

a. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank;
b. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh bank;
c. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;dan
d. Memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau pengawas lain yang berwenang;
e. Memastikan Bank Sulteng dapat menerapkan prinsip-prinsip tata Kelola yang baik dengan menjunjung tinggi etika bisnis sehingga Bank Sulteng memiliki reputasi yang baik;
f. Memastikan Bank Sulteng telah memiliki pedoman pengendalian dan pelaporan gratifikasi yang digunakan oleh seluruh jajaran Bank Sulteng;
g. Memastikan Bank Sulteng dapat mewujudkan budaya anti korupsi dan menghindarkan Bank Sulteng dari Tindakan kecurangan *(fraud),* dengan membentuk lingkungan organisasi yang sadar dan terkendali dalam penanganan praktik gratifikasi sehingga prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam menjalankan kegiatan operasional dan bisnis bank sehari-hari dapat terimplementasi dengan baik.

Bank Sulteng understands the importance of an effective compliance function in the management of the Company. Given the increasing complexity of Bank Sulteng's business activities, resulting in greater challenges and risk exposures, various efforts are required to mitigate these risks, one of which is compliance risk. Pursuant to POJK No. 46/POJK.03/2017 concerning the Implementation of the Compliance Function of Commercial Banks, the Bank manages compliance risk and ensures the implementation of a compliance culture in the Bank's activities.

In general, the Bank's compliance duties and functions, based on the OJK Regulation, include:

a. Creating a culture of compliance at all levels of the organization and in all business activities;
b. Managing compliance risks faced by the bank;
c. Ensuring that the Bank's policies, provisions, systems, and procedures, as well as its business activities, comply with the provisions of the Financial Services Authority (OJK) and other laws and regulations, including Sharia principles for Islamic commercial banks and Sharia business units; and
d. Ensuring the Bank's compliance with commitments made to the Financial Services Authority and/or other authorized supervisors;
e. Ensuring that Bank Sulteng implements good governance principles by upholding business ethics, thereby maintaining a good reputation;
f. Ensuring that Bank Sulteng has guidelines for controlling and reporting gratification that are used by all levels of Bank Sulteng;
g. Ensuring that Bank Sulteng can embody an anti-corruption culture and prevent fraud by establishing an organizational environment that is aware of and controlled in handling gratification practices, ensuring the effective implementation of the principles of transparency and accountability in the bank's daily operations and business.

Hirarki Dan Landasan Hukum Penerapan Fungsi Kepatuhan

Hierarchy and Legal Basis for the Implementation of the Compliance Function



Penerapan fungsi Kepatuhan Bank Sulteng memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mengikat bagi Bank sesuai dengan hirarki baik terkait UU, ketentuan dari regulator maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan internal Bank. Secara khusus penerapan fungsi Kepatuhan Bank Sulteng berlandaskan, antara lain:

1. POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
2. Surat Keputusan Direksi Bank Sulteng No. 10/ SK-DIR/ BPD-ST/2018 Tentang Buku Pedoman Perusahaan Kepatuhan Bank Sulteng.
3. Surat Keputusan Direksi Bank Sulteng No. 135/ SK/BPD-ST/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Kepatuhan Bank Sulteng.
4. Surat Keputusan Direksi Bank Sulteng No. 104/ SK-DIR/BPD-ST/2017 Tentang Buku Pedoman Perusahaan Penerapan Program Prinsip APU-PPT.

The implementation of Bank Sulteng's Compliance function adheres to the bank's binding regulations, in accordance with the hierarchy, including laws, regulatory requirements, and internal bank policies. Specifically, the implementation of Bank Sulteng's Compliance function is based on, among other things:

1. OJK Regulation No. 46/POJK.03/2017 dated July 12, 2017, concerning the Implementation of the Compliance Function of Commercial Banks.
2. Bank Sulteng Board of Directors Decree No. 10/SK-DIR/BPD-ST/2018 concerning the Bank Sulteng Compliance Company Guidelines.
3. Bank Sulteng Board of Directors Decree No. 135/ SK/BPD-ST/2017 concerning Bank Sulteng's Compliance Standard Operating Procedures.
4. Bank Sulteng Board of Directors Decree No. 104/ SK-DIR/BPD-ST/2017 concerning the Company Guidelines for the Implementation of the AML-CFT Principles Program.

Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan secara berkesinambungan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip kepatuhan, yaitu:

a. Kepatuhan dimulai dari atas *(Tone from the Top)*
b. Kepatuhan merupakan tanggung jawab semua pihak
c. Kepatuhan dijalankan untuk pemenuhan hukum dan peraturan yang berlaku
d. Implementasi kepatuhan agar dijalankan dengan kompetensi dan integritas sesuai dengan tanggung jawab

Compliance Risk Management

Compliance risk management is carried out continuously based on the following compliance principles:

a. Compliance starts from the top (Tone from the Top)
b. Compliance is the responsibility of all parties
c. Compliance is carried out to comply with applicable laws and regulations
d. Compliance implementation must be carried out with competence and integrity in accordance with responsibilities

e. Berorientasi kepada pemangku kepentingan,
f. Dedikasi kepada Bank, dan Orientasi kepada pemecahan masalah

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Pelaksanaan terhadap kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang mengikat bagi Perusahaan berlaku bagi semua Insan Perusahaan dan menjadi tanggung jawab semua komponen di lingkungan Bank. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Pegawai wajib mematuhi dan melaksanakan kebijakan/peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan secara konsisten serta wajib menghindari setiap tindakan dan/atau perilaku yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris dan Direksi melakukan pengawasan secara aktif untuk memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank Sulteng telah dijalankan sesuai ketentuan. Pengawasan aktif tersebut dilakukan dalam bentuk:

a. Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur.
b. Menerima laporan secara periodik.
c. Meminta penjelasan, dan pertemuan atas hal hal yang mempengaruh operasional bank secara keseluruhan.
d. Memberikan pendapat atas rencana produk dan aktivitas baru, untuk memastikan bahwa produk yang akan dibuat dan aktivitas baru yang akan dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
e. Memberikan persetujuan atas rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan.
f. Melakukan koordinasi dalam rangka melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan Bank berbasis risiko.
g. Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai dan transaksi keuangan transfer dana kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
h. Mengkoordinasi pelaksanaan pengkinian data nasabah melalui penyusunan target dan pemantauan realisasi terhadap target.
i. Melakukan pengembangan aplikasi APU-PPT dan mengawasi pelaksanaannya.
j. Berkoordinasi dengan Divisi lainnya tentang *review* atau penyusunan kebijakan dan operasional prosedur Bank.
k. Melakukan penyesuaian kebijakan atau Pedoman Perusahaan baik yang sudah ada maupun yang akan diterbitkan termasuk pedoman benturan kepentingan dan BPP kewenangan secara keseluruhan.

e. Stakeholder-oriented,
f. Dedicated to the Bank, and Oriented towards problem-solving

Implementation of the Compliance Function

Implementation of compliance with laws and regulations, as well as other provisions binding on the Company, applies to all Company Personnel and is the responsibility of all components within the Bank. The Board of Commissioners, Directors, and all Employees are required to consistently comply with and implement Company policies/regulations and laws and regulations and must avoid any actions and/or behavior that could lead to violations of laws and regulations.

In its implementation, the Board of Commissioners and Directors actively supervise to ensure that Bank Sulteng's compliance function is carried out in accordance with regulations. This active supervision is carried out in the form of:

a. Approving policies and procedures.
b. Receive periodic reports.
c. Request clarifications and meetings on matters affecting the bank's overall operations.
d. Provide opinions on new product and activity plans to ensure that the products being developed and new activities being undertaken comply with applicable regulations.
e. Approve draft internal regulations to be issued.
f. Coordinate risk-based assessments of the bank's health.
g. Report suspicious financial transactions, cash transactions, and fund transfers to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK).
h. Coordinate customer data updates by setting targets and monitoring their implementation.
i. Develop and oversee AML-CFT applications.
j. Coordinate with other divisions regarding the review or development of the bank's policies and operational procedures.
k. Adjust existing and future policies and guidelines, including conflict of interest guidelines and the overall authority of the Bank's Compliance Management Agency (BPP).

Selain itu Bank melakukan langkah-langkah untuk mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan di lingkungan Perusahaan, antara lain:

1. Melakukan sosialiasi peraturan yang berhubungan dengan kepatuhan.
2. Melaksanakan fungsi konsultatif terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku.
3. Menyediakan informasi peraturan OJK, Bank Indonesia dan regulator lainnya.
4. Memastikan penyesuaian ketentuan internal dengan peraturan yang berlaku.

Struktur Organisasi Fungsi Kepatuhan

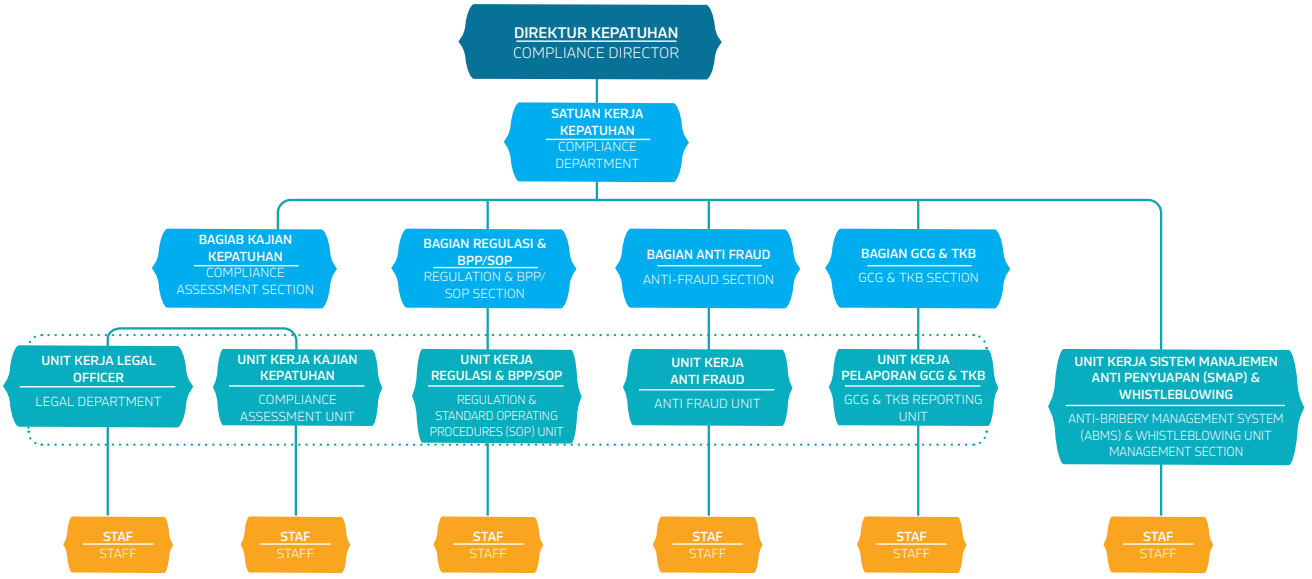
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.191/SK-DIR/BPD-ST/2025 Tentang Perubahan Struktur Organisasi, Bagan struktur organisasi Divisi Satuan Kerja Kepatuhan ditetapkan sebagai berikut:

In addition, the Bank takes steps to encourage a Compliance Culture within the company, including:

1. Disseminating compliance-related regulations.
2. Performs consultative functions related to the implementation of applicable regulations.
3. Provides information on regulations from the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, and other regulators.
4. Ensures alignment of internal provisions with applicable regulations.

Compliance Function Organizational Structure

Based on Board of Directors Decree No. 191/SK-DIR/BPD-ST/2025 concerning Changes to the Organizational Structure, the organizational structure chart for the Compliance Work Unit Division is as follows:



Mengacu pada Peraturan OJK No. 46/ POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan secara hirarki organisasi, Bank menetapkan Direktur Kepatuhan yang membawahkan fungsi kepatuhan Perusahaan. Untuk melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan.

Adapun tugas dan tanggung jawab organisasi yang menjalankan fungsi kepatuhan di Bank, sebagai berikut:

Direktur Kepatuhan

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Bank Sulteng dijabat oleh Judy Koagow, Direktur Kepatuhan telah memenuhi persyaratan dan standar independensi yang diatur dalam peraturan dan telah lulus uji Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan.

Referring to OJK Regulation No. 46/POJK.03/2017 concerning the Implementation of the Compliance Function of Commercial Banks and the organizational hierarchy, the Bank has appointed a Compliance Director to oversee the Company's compliance function. To carry out his/her functions, duties, and responsibilities, the Compliance Director is assisted by a Compliance Work Unit.

The duties and responsibilities of the organization that carries out the compliance function at the Bank are as follows:

Compliance Director

The Director overseeing Bank Sulteng's compliance function is Judy Koagow. The Compliance Director has met the independence requirements and standards stipulated in the regulations and has passed the Financial Services Authority's Fit and Proper Test.

Direktur Kepatuhan adalah salah satu jajaran Direksi yang memiliki tugas menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan pada seluruh aktivitas Bank terhadap ketentuan dan komitmen dengan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan serta seluruh perjanjian dengan pihak lainnya dan mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Manajemen Bank dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian.

Tugas dan tanggung jawab Direktur kepatuhan Bank Sulteng sebagai berikut:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi.
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal bank.
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Meminimalkan risiko kepatuhan.
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Satuan Kerja Kepatuhan

Kedudukan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) adalah setingkat Divisi dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan dibentuk secara tersendiri, independen terhadap satuan kerja operasional dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya. Satuan kerja Kepatuhan di bentuk di kantor Pusat dengan cakupannya meliputi seluruh jaringan kantor dan unit kerja yang ada pada Bank Sulteng.

Satuan Kerja Kepatuhan selain bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan, juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ketentuan Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

The Compliance Director is a member of the Board of Directors tasked with determining the necessary steps to ensure compliance in all Bank activities with the provisions and commitments with the Financial Services Authority and laws and regulations, as well as all agreements with other parties, and to prevent any deviations by Bank Management in establishing policies related to prudential principles.

The duties and responsibilities of the Compliance Director of Bank Sulteng are as follows:

1. Formulating strategies to foster the Bank's Compliance Culture.
2. Proposing compliance policies or compliance principles established by the Board of Directors.
3. Establishing compliance systems and procedures to be used in developing the Bank's internal regulations and guidelines.
4. Ensuring that all policies, regulations, systems, and procedures, as well as business activities conducted by the Bank, comply with the provisions of the Financial Services Authority and applicable laws and regulations.
5. Minimizing compliance risks.
6. Taking preventive measures to ensure that policies and/or decisions made by the Bank's Board of Directors do not deviate from the provisions of the Financial Services Authority and applicable laws and regulations.

Compliance Work Unit

The Compliance Work Unit (SKK) is at the Division level and reports directly to the Director of Compliance. The Compliance Work Unit is established separately, independent of operational work units, and free from the influence of other work units. The Compliance Work Unit is established at the Head Office, with coverage covering the entire network of offices and work units within Bank Sulteng.

The Compliance Work Unit is not only responsible for implementing the compliance function, but is also responsible for implementing the provisions on the Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing.

Profil Pemimpin Divisi Satuan Kerja Kepatuhan

Compliance Unit Division Head Profile



Rizal Akase, SE
Pemimpin Divisi Satuan Kerja Kepatuhan
Compliance Unit Division Head

Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	:	SK Direksi No. 120/SK.M/BPD-ST/2025 Directors' Decree No. 120/SK.M/BPD-ST/2025
Tempat Tanggal Lahir & Usia Place, Date of Birth & Age	:	Leok, 23 Mei 1975 , Usia 50 Tahun per 31 Desember 2025 Leok, May 23, 1975, Age 50 Years as of December 31, 2025
Domisili & Kewarganegaraan Domicile & Nationality	:	Palu, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	Sarjana Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YASIH, 1998 Bachelor of Economics, YASIH College of Economics, 1998
Sertifikasi Certifications		• Sertifikasi Audit Internal Bank – Auditor • Sertifikasi Manajemen Risiko Level IV • Bank Internal Audit Certification – Auditor • Level IV Risk Management Certification
Pengalaman Kerja Career History	:	• Pemimpin Divisi Satuan Kerja Kepatuhan • Pemimpin Divisi SKAI & Anti Fraud • Pemimpin Divisi Umum & Aset • Head of the Compliance Unit • Head of the Internal Audit & Anti-Fraud Division • Head of the General & Assets Division
Periode Menjabat & Masa Jabatan Term & Tenure	:	2025 – Sekarang 2025 - present
Pelatihan		• Refreshment Sertifikasi Audit Intern Bank, RMG, Palu 2021. • Diklat dan Ujian Nasional Sertifikasi Keahlian Pengadaan, Diponegoro Smart Solution, Palu 2021 • .Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Audit Intern Bank, LSPP, Palu 2017 • Bank Internal Audit Certification Refreshment, RMG, Palu 2021. • National Procurement Expertise Certification Training and Exam, Diponegoro Smart Solution, Palu 2021 • Bank Internal Audit Certification Training and Exam, LSPP, Palu 2017

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan mempunyai fungsi pokok memberikan rekomendasi langkah-langkah Direktur Kepatuhan atas pelanggaran kepatuhan dan rekomendasi dari sisi kepatuhan atas rancangan keputusan operasionai dan non operasionai kepada Direksi dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi.

Dalam rangka melaksanakan Fungsi Kepatuhan, tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan mencakup:

a. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
b. Memantau identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
c. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Duties and Responsibilities of the Compliance Work Unit

The Compliance Work Unit's primary function is to provide recommendations to the Compliance Director regarding compliance violations and recommendations regarding compliance issues to the Board of Directors regarding draft operational and non-operational decisions in an effort to improve organizational performance.

In carrying out its Compliance Function, the Compliance Work Unit's duties and responsibilities include:

a. Developing measures to support the creation of a Compliance Culture across all Bank business activities at every organizational level;
b. Monitoring the identification, measurement, monitoring, and control of Compliance Risks in accordance with the Financial Services Authority (OJK) Regulations concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks;
c. Assessing and evaluating the effectiveness, adequacy, and compliance of the Bank's policies, provisions, systems, and procedures with applicable laws and regulations;

d. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
f. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Fokus Kegiatan Satuan Kerja Kepatuhan Tahun 2025

Satuan Kerja Kepatuhan menfokuskan pada Rencana Program Kerja Tahun 2025, dengan menyiapkan *framework* implementasi peran dan fungsi Kepatuhan Bank Sulteng yaitu:

1. Mensosialisasikan peran dan fungsi Kepatuhan kepada Internal Bank Sulteng agar tercipta *awareness* dan budaya kepatuhan.
2. Melaksanakan setiap kegiatan usaha mengacu kepada prinsip-prinsip serta regulasi perbankan serta kebijakan internal Bank Sulteng.
3. Menilai implementasi prinsip-prinsip Kepatuhan di Bank Sulteng dengan *Self Assessment* dan penilaian lembaga independen.

Program Pelatihan Dan Sertifikasi SDM Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan merancang pelatihan dan sertifikasi yang dikuti oleh pegawai sebagai langkah berkesinambungan dalam memperkuat kemampuan terutama dalam meminimalisir risiko kepatuhan serta sebagai salah satu bagian dalam memperkuat sistem pengendalian internal Bank. Berbagai macam pelatihan yang dirancang tahun 2025 baik yang diadakan oleh internal bank maupun pihak eksternal, sebagai berikut:

1. Pelatihan *Legal Drafting & Legal Opinion.*
2. Pelatihan Penerapan Kepatuhan.
3. Pelatihan Pajak.
4. Pelatihan *Governance Risk Management Compliance*.
5. Sertifikasi keahlian yakni:
   - Kepatuhan Level 1 & 2
   - Manajemen Risiko
   - Barang & Jasa
   - *Treasury*
   - Audit
   - Anti *Fraud*
   - Dana Pensiun

d. Reviewing and/or recommending updates and improvements to the Bank's policies, provisions, systems, and procedures to ensure they comply with the provisions of the Financial Services Authority and applicable laws and regulations;
e. Making efforts to ensure that the Bank's policies, provisions, systems, and procedures, as well as its business activities, comply with the provisions of the Financial Services Authority and applicable laws and regulations; and
f. Performing other duties related to the Compliance Function.

Compliance Work Unit Activity Focus in 2025

The Compliance Work Unit is focusing on the 2025 Work Program Plan, by preparing a framework for implementing the role and function of Bank Sulteng's Compliance, namely:

1. Socializing the role and function of Compliance within Bank Sulteng to create awareness and a culture of compliance.
2. Carrying out all business activities in accordance with banking principles, regulations, and Bank Sulteng's internal policies.
3. Assessing the implementation of Compliance principles at Bank Sulteng through Self-Assessment and independent assessments.

Compliance Work Unit HR Training and Certification Program

The Compliance Work Unit designs training and certification programs for employees as a continuous effort to strengthen their capabilities, particularly in minimizing compliance risks, and as part of strengthening the Bank's internal control system. Various training programs planned for 2025, both conducted internally by the bank and externally, are as follows:

1. Legal Drafting & Legal Opinion Training.
2. Compliance Implementation Training.
3. Tax Training.
4. Governance Risk Management Compliance Training.
5. Certifications include:
   - Level 1 & 2 Compliance
   - Risk Management
   - Goods & Services
   - Treasury
   - Audit
   - Anti-Fraud
   - Pension Funds

PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT), DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (PPSPM)

Meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada industri jasa keuangan semakin tinggi risiko Penyedia Jasa Keuangan digunakan sebagai sarana Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Tindak Pidana Pendanaan Terorisme serta Tindak Pidana Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul maka Bank perlu menerapkan prinsip kehati-hatian.

Industri perbankan, sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Tindak Pidana Pendanaan Terorisme serta Tindak Pidana Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, karena pada industri perbankan tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku tindak pidana tersebut dalam upaya melancarkan tindak kejahatannya. Oleh karenanya, Bank selaku Penyedia Jasa Keuangan (PJK) memiliki peran strategis untuk mendeteksi adanya transaksi keuangan mencurigakan ataupun melaporkan transaksi tertentu sesuai dengan ketentuan POJK No 8 tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

Bank wajib menerapkan program APU- PPT dan PPPSPM secara efektif dengan memperhatikan risiko TPPU-TPPT, dan/atau PPSPM serta kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, dan/atau karakteristik usaha Bank yang mencakup :
a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
b. Kebijakan dan Prosedur;
c. Pengendalian Internal;
d. Sistem informasi manajemen; dan
e. Sumber daya manusia dan pelatihan.

ANTI-MONEY LAUNDERING (AML) AND TERRORISM FINANCING PREVENTION (TFP) PROGRAMS, AND WEAPONS OF MASS DESTRUCTION PROLIFERATION FINANCING PREVENTION (WPSPM).

The increasing use of information technology in the financial services industry increases the risk that financial service providers will be used as a means of money laundering, terrorism financing, and weapons of mass destruction proliferation. In this regard, and to mitigate potential risks, banks need to implement the precautionary principle.

The banking industry is highly vulnerable to being used as a medium for money laundering, terrorism financing, and weapons of mass destruction proliferation, as it offers numerous transaction options for perpetrators of these crimes. Therefore, banks, as financial service providers (PJK), have a strategic role in detecting suspicious financial transactions and reporting specific transactions in accordance with OJK Regulation No. 8 of 2023, dated June 14, 2023, concerning the Implementation of Anti-Money Laundering, Terrorism Financing Prevention, and Weapons of Mass Destruction Proliferation Financing Programs in the Financial Services Sector.

Banks are required to implement AML-CFT and PPPSPM programs effectively, taking into account the risks of ML-TF and/or PPSPM, as well as the bank's activities, business scale, business complexity, and/or business characteristics, including:
a. Active supervision by the Board of Directors and Board of Commissioners;
b. Policies and Procedures;
c. nternal Control;
d. Management Information Systems; and
e. Human resources and training.

Dasar Hukum Penerapan APU, PPT DAN PPPSPM

1. Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 31, Tambahan Lembaran Negara No. 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 No. 182 dan Tambahan Lembaran Negara No. 3790).
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Undang-undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
4. Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemeritah Pengganti undang No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/ POJK.03/2017 Tentang Penarapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Umum.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8 tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/ POJK.01/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/ POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di sektor Jasa Keuangan.
8. Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
9. Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No. 2/4/KEP.PPATK/2003 Tanggal 15 Oktober 2003 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Bank.
10. Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No. PER-09/1.02.2/ PPATK/09/12 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan.
11. Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No. PER-11/1.02/ PPATK/09/2012 Tentang Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pelaporan.
12. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan No. PER-02/1.02/ PPATK/02/2014 Tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu.

Legal Basis for the Implementation of AML, PPT, and PPPSPM

1. Law No. 7 of 1992 concerning Banking (State Gazette of 1992 No. 31, Supplement to the State Gazette No. 3472), as amended by Law No. 10 of 1998 (State Gazette of 1998 No. 182 and Supplement to the State Gazette No. 3790).
2. Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering.
3. Law No. 9 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Terrorist Financing.
4. Law No. 5 of 2018 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2002 concerning the Eradication of Terrorism into Law.
5. Financial Services Authority Regulation No. 46/ POJK.03/2017 concerning the Implementation of the Compliance Function for Commercial Banks.
6. Financial Services Authority Regulation No. 8 of 2023 dated June 14, 2023, concerning the Implementation of Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Counter-Proliferation of Weapons of Mass Destruction Programs in the Financial Services Sector.
7. Financial Services Authority Regulation No. 23/ POJK.01/2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation No. 12/POJK.01/2017 concerning the Implementation of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Programs in the Financial Services Sector.
8. OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.03/2017 concerning the Implementation of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Programs in the Financial Services Sector.
9. Decree of the Head of the Financial Transaction Reports and Analysis Center No. 2/4/KEP.PPATK/2003 dated October 15, 2003, concerning Guidelines for Identification of Suspicious Financial Transactions for Banks.
10. Decree of the Head of the Financial Transaction Reports and Analysis Center No. PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 concerning Procedures for Submitting Suspicious Financial Transaction Reports and Cash Financial Transaction Reports for Financial Service Providers.
11. Decree of the Head of the Financial Transaction Reports and Analysis Center No. PER-11/1.02/ PPATK/09/2012 concerning Cash Financial Transactions Exempted from Reporting Obligations.
12. Regulation of the Head of the Financial Transaction Reports and Analysis Center No. PER-02/1.02/ PPATK/02/2014 concerning the Integrated Service User Information System.

13. Peraturan Pemerintah No. 02 Tahun 2016 tentang Tatacara penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
14. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke Luar Negeri Melalui Aplikasi GOAML Bagi Penyedia Jasa Keuangan.
15. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan No. PER-02/1.02/ PPATK/02/2014 Tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu.

Kebijakan APU, PPT DAN PPPSPM

Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) di lingkungan Bank Sulteng mendasarkan diri pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. Selain itu Program tersebut termasuk cakupan yang diwajibkan dalam *Financial Action Task Force* (FATF) *Recomendation* dan *The Basel Committee on Banking Supervision* sebagai upaya untuk melindungi Bank agar tidak dijadikan sebagai sarana atau sasaran kejahatan baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan terkait APU, PPT Dan PPPSPM dan secara khusus memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, maka Perusahaan membuat kebijakan sebagai wujud implementasi dari penerapan APU, PPT DAN PPPSPM tersebut yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT.Bank Sulteng Nomor: I/SK-DIR/BPD-ST/2023 Tanggal 12 Desember 2023 Tentang Buku Pedoman Perusahaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU,PPT Dan PPPSPM) PT. Bank Sulteng

13. Government Regulation No. 02 of 2016 concerning Procedures for Submitting Data and Information by Government Agencies and/or Private Institutions in the Prevention and Eradication of Money Laundering.
14. Regulation of the Head of the Financial Transaction Reports and Analysis Center No. 1 of 2021 concerning Procedures for Submitting Reports of Suspicious Financial Transactions, Cash Transactions, and Fund Transfers from and to Abroad Through the GOAML Application for Financial Service Providers.
15. Regulation of the Head of the Financial Transaction Reports and Analysis Center No. PER-02/1.02/ PPATK/02/2014 concerning the Integrated Service User Information System.

AML, CFT, and PPPSPM Policies

The implementation of the Anti-Money Laundering (AML), Counter-Terrorism Financing (CFT), and Counter-Proliferation of Weapons of Mass Destruction (PPSPM) Programs within Bank Sulteng is based on applicable laws and regulations and regulatory requirements. Furthermore, these programs include the scope required by the Financial Action Task Force (FATF) Recommendations and the Basel Committee on Banking Supervision, as an effort to protect banks from being used as vehicles or targets for crimes, whether committed directly or indirectly by criminals.

In connection with the implementation of regulations related to Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Counter-Terrorism Financing (PPPSPM), and specifically in light of Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 8 of 2023 concerning the Implementation of Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Counter-Terrorism Financing (PPPSPM) Programs in the Financial Services Sector, the Company has established a policy to implement these AML, CFT, and PPPSPM programs, as stipulated in the Decree of the Board of Directors of PT. Bank Sulteng Number: I/SK-DIR/BPD-ST/2023 dated December 12, 2023, concerning the Company's Guidelines for the Implementation of Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Counter-Terrorism Financing (PPPSPM) Programs at PT. Bank Sulteng.

Unit Kerja Penerapan APU, PPT & PPPSPM

Peran aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris sangat diperlukan dalam menciptakan efektifitas penerapan Program APU-PPT dan PPPSPM, mengingat peranan Direksi dan Dewan Komisaris akan mempengaruhi tingkat pencapaian tujuan organisasi dalam penerapan Program APU-PPT dan PPPSPM. Selain itu, peranan Direksi dan Dewan Komisaris juga dapat memotivasi pegawai dan unit kerja dalam mendorong terbentuknya budaya kepatuhan di seluruh jajaran organisasi. Terbentuknya kerangka kerja tata kelola perusahaan yang kuat dalam organisasi akan mendukung pengawasan terhadap pelaksanaan Pedoman Penerapan Program APU-PPT dan PPPSPM yang dimiliki.

Dalam pelaksanaannya, Bank Sulteng membentuk unit kerja khusus yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU-PPT dan PPSPM di Perusahaan yang bersifat independen dari fungsi lain. Bagian UKK, APU-PPT & PPPSPM yang berada dibawah Direktur Kepatuhan ditunjuk dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ketentuan Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM).

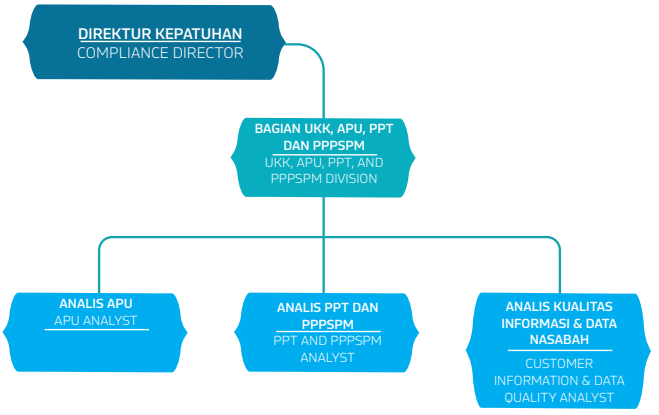
AML, CFT, & PPPSPM Implementation Work Unit

The active role of the Board of Directors and the Board of Commissioners is crucial to ensuring the effective implementation of the AML-CFT and PPPSPM programs, as their roles will influence the achievement of organizational goals in implementing the AML-CFT and PPPSPM programs. Furthermore, the Board of Directors and Board of Commissioners can also motivate employees and work units to foster a culture of compliance across the organization. Establishing a strong corporate governance framework within the organization will support oversight of the implementation of the AML-CFT and PPPSPM Program Implementation Guidelines.

To implement this, Bank Sulteng has established a dedicated work unit responsible for the implementation of the AML-CFT and PPSPM Programs within the Company, independent of other functions. The UKK, AML-CFT & PPPSPM Division, under the Compliance Director, is appointed and responsible for implementing the provisions of the Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Counter-Proliferation of Weapons of Mass Destruction (AML, CFT, and PPPSPM) Implementation Guidelines.

Struktur Organisasi APU, PPT & PPPSPM

AML, CFT & PPPSPM Organizational Structure



Tugas Dan Tanggung Jawab Unit Kerja Penerapan APU, PPT & PPPSPM

Penanggung jawab penerapan program APU-PPT dan PPPSPM mempunyai tugas paling kurang meliputi:

1. Menganalisis secara berkala penilaian risiko TPPU, TPPT dan PPSPM terkait dengan Nasabahnya, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi *(delivery channels)* sebanyak 1 (satu) kali dan 1 (satu) tahun;

Duties and Responsibilities of the AML, CFT, and PPPSPM Implementation Work Unit

The person responsible for implementing the AML, CFT, and PPPSPM programs has the following duties:

1. Periodically analyzing ML, TF, and PPSPM risk assessments related to their customers, countries or geographic areas, products, services, transactions, or distribution channels once and annually;

2. Menyusun, melakukan pengkinian, dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APUPPT dan PPPSPM yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko untuk dimintakan pertimbangan dan persetujuan Direksi;
3. Memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh Nasabah;
4. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan dan kompleksitas usaha, karakteristik usaha, volume transaksi Bank, dan/atau modus TPPU, TPPT dan PPSPM;
5. Memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU-PPT dan PPPSPM;
6. Memantau rekening nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah;
7. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri;
8. Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi;
9. Memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah;
10. Memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap TPPU, TPPT dan/atau PPSPM diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur Bank serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK;
11. Memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU,PPT dan PPPSPM dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti *tipping-off*;
12. Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU,PPT dan PPPSPM terhadap satuan kerja terkait;
13. Memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU,PPT dan PPPSPM dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai;
14. Menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh satuan kerja;

2. Preparing, updating, and proposing policies and procedures for implementing the AML, TF, and PPPSPM programs to manage and mitigate risks based on the risk assessments for consideration and approval by the Board of Directors;
3. Ensuring the existence of a system that can effectively identify, analyze, monitor, and provide reports on customer profiles, characteristics, and transaction patterns;
4. Ensuring that the policies and procedures are in line with changes and developments, including products, services, and technology in the financial services sector, business activities and complexity, business characteristics, bank transaction volume, and/or ML, TF, and PPSPM methods;
5. Ensuring that customer-related forms accommodate the data required for the implementation of the AML-CFT and PPPSPM programs;
6. Monitoring customer accounts and customer transactions;
7. Evaluating the results of monitoring and analyzing customer transactions to determine the presence or absence of suspicious financial transactions, cash transactions, and/or fund transfers to and from abroad;
8. Administering the results of monitoring and evaluation;
9. Ensuring that customer data and profiles, as well as customer transaction data and profiles, are updated;
10. Ensuring that business activities with a high risk of ML, TF, and/or PPSPM are effectively identified in accordance with Bank policies and procedures and the provisions stipulated in OJK Regulations;
11. Ensuring the existence of a sound communication mechanism from each relevant work unit to the specific work unit or official responsible for implementing the AML, CFT, and PPPSPM programs, while maintaining information confidentiality and adhering to anti-tipping-off provisions;
12. Supervising the implementation of the AML, CFT, and PPPSPM programs within relevant work units;
13. Ensure the identification of high-risk areas related to the implementation of the AML, CFT, and PPPSPM programs by referring to statutory provisions and adequate information sources;
14. Receive, analyze, and compile reports on Suspicious Financial Transactions and/or cash transactions submitted by work units;

15. Menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan luar negeri;
16. Memantau secara berkala dan memastikan tindak lanjut terhadap DTTOT dan DPPSPM telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPT dan peraturan mengenai pencegahan dan pemberantasan PPSPM;
17. Memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU,PPT dan PPPSPM bagi pejabat dan/atau pegawai Bank;
18. Memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU- PPT dan PPPSPM terlaksana dengan baik; dan
19. Melakukan tugas lain untuk penerapan program APU, PPT dan PPPSPM.

Strategi Penguatan Penerapan APU, PPT & PPPSPM

Strategi yang dilakukan oleh Bank Sulteng dalam melaksanakan dan menerapkan Program APU, PPT & PPPSPM di Perusahaan, sebagai berikut:

a. Melakukan koordinasi dan pemantauan Implementasi bagian APU & PPT Kantor Pusat melalui sentralisasi pelaporan dan diseluruh Cabang melalui UKPN yang terintegrasi.
b. Memperbaharui UKPN yang ada di seluruh Cabang melalui Surat Keputusan (SK) Direksi tentang Perubahan Unit Khusus Pengenalan Nasabah (UKPN) pada Kantor Cabang.
c. Melakukan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis bagi petugas APU & PPT Kantor Pusat maupun UKPN yang ada di seluruh Cabang baik itu diselanggarakan oleh pihak internal Bank maupun eksternal.
d. Melaksanakan *on-site* ke seluruh Cabang berdasarkan *Risk Based Approach (RBA)* untuk memastikan telah diterapkannya penerapan APU & PPT sesuai Ketentuan, Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
e. Melaksanakan kunjungan koordinasi ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan apakah penerapaan AML sesuai dengan *best practice* AML.
f. Memperkuat jalur komunikasi dengan seluruh Cabang yang dilakukan melalui media yang dimiliki Bank berupa email, video, dan telepon sebagai bagian dari kegiatan pemantauan dan pemberian arahan/petunjuk kepada jajaran pegawai yang terkait dengan penerapan APU & PPT agar menjalankan tugas sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku.

15. Prepare reports on Suspicious Financial Transactions, Cash Transactions, and/or fund transfers from and outside the country;
16. Regularly monitor and ensure that follow-up actions on the DTTOT and DPPSPM are in accordance with laws and regulations regarding the prevention and eradication of TF and PPSPM;
17. Monitor, analyze, and recommend training needs for the implementation of the AML, CFT, and PPPSPM programs for Bank officials and/or employees;
18. Ensure that all activities related to the implementation of the AML-CFT and PPPSPM programs are carried out effectively; and
19. Perform other duties related to the implementation of the AML, CFT, and PPPSPM programs.

Strategy for Strengthening the Implementation of AML, CFT, and PPPSPM

Bank Sulteng's strategies for implementing and implementing the AML, CFT, and PPPSPM programs at the Company are as follows:

a. Coordinate and monitor the implementation of the AML & CFT division at the Head Office through centralized reporting and across all branches through an integrated UKPN (National Unit for Customer Identification).
b. Update the UKPN at all branches through a Directors' Decree (SK) concerning Changes to the Special Customer Identification Unit (UKPN) at Branch Offices.
c. Conduct training, outreach, and technical guidance for AML & CFT officers at the Head Office and UKPN in all branches, both internally and externally.
d. Conduct on-site training at all branches based on the Risk-Based Approach (RBA) to ensure AML & CFT implementation complies with applicable laws, regulations, and regulations.
e. Conduct coordination visits to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) and the Financial Services Authority (OJK) to ensure AML implementation aligns with best practices.
f. Strengthen communication channels with all branches through the Bank's channels, including email, video, and telephone, as part of monitoring and providing direction/instructions to employees involved in AML & CFT implementation to ensure they carry out their duties in accordance with applicable guidelines and regulations.

Pelaksanaan Program APU, PPT & PPPSPM

Pelaksanaan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang dilakukan oleh Bank dalam bentuk kegiatan, sebagai berikut:

1. Efektivitas Uji Tuntas Nasabah dan Uji Tuntas Lanjutan Nasabah atau disebut Penerapan *Customer Due Diligence (CDD)* dan *Enchance Due Diligence (EDD).*
   a. Efektivitas penerapan CDD terhadap nasabah adalah kegiatan berupa:
      - Identifikasi, di mana Bank melakukan pemantauan terhadap Profil Calon Nasabah, Nasabah dan *Walk In Customer* (WIC) melalui kelengkapan data pada CIF.
      - Verifikasi, di mana Bank melakukan pengecekan terhadap kebenaran data Profil Calon Nasabah, Nasabah dan Walk In Customer (WIC) pada CIF.
      - Monitoring, di mana Bank memastikan bahwa transaksi yang dilakukan oleh Nasabah sesuai dengan profil karakteristik, dan/atau pola transaksi Calon Nasabah, Nasabah dan *Walk In Customer (WIC).*
   b. Efektivitas penerapan EDD adalah kegiatan CDD yang lebih mendalam berupa pemantauan dan pemeriksaan yang dilakukan Bank terhadap Nasabah berisiko tinggi dengan kriteria sebagai berikut:
      - Pekerjaan yang tergolong berisiko tinggi *(high risk job).*
      - Bidang usaha yang tergolong berisiko tinggi (high risk business).
      - Produk yang tergolong berisiko tinggi (high risk product).
      - Negara yang tergolong berisiko tinggi (high risk country).
      - Termasuk Nasabah *Politically Expose Person (PEP)*
2. Efektivitas Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT).
   a. Efektivitas Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) Bank Sulteng didukung oleh Peran aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris dalam menciptakan efektivitas penerapan Program APU-PPT, mengingat peranan Direksi dan Dewan Komisaris sangat mempengaruhi tingkat pencapaian tujuan Bank Sulteng dalam penerapan Program APU-PPT.
   Selain itu, peranan Direksi dan Dewan Komisaris juga dapat memotivasi karyawan dan unit kerja dalam mendorong terbentuknya budaya kepatuhan di seluruh jajaran Bank Sulteng. Terbentuknya kerangka kerja tata kelola

Implementation of AML, CFT, and PPPSPM Program

The Bank implements the Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Counter-Proliferation of Weapons of Mass Destruction (WMD) programs in the following activities:

1. Effectiveness of Customer Due Diligence and Advanced Due Diligence, also known as Customer Due Diligence (CDD) and Enhanced Due Diligence (EDD).
   a. The effectiveness of CDD implementation for customers includes the following activities:
      - Identification, where the Bank monitors the profiles of prospective customers, existing customers, and walk-in customers (WICs) through the completeness of the data in the CIF.
      - Verification, where the Bank checks the accuracy of the profile data of prospective customers, existing customers, and walk-in customers (WICs) in the CIF.
      - Monitoring, where the Bank ensures that transactions conducted by customers align with the characteristics and/or transaction patterns of prospective customers, existing customers, and walk-in customers (WICs).
   b. The effectiveness of EDD implementation is determined by a more in-depth CDD activity, which involves monitoring and examining high-risk customers, based on the following criteria:
      - High-risk jobs.
      - High-risk business sectors.
      - High-risk products.
      - High-risk countries.
      - Including Politically Exposed Persons (PEPs).
2. Effectiveness of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML & CFT) Implementation.
   a. The effectiveness of Bank Sulteng's Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML & CFT) implementation is supported by the active role of the Board of Directors and Board of Commissioners in ensuring the effective implementation of the AML-CFT Program. Their roles significantly influence the achievement of Bank Sulteng's objectives in implementing the AML-CFT Program.
   Furthermore, the Board of Directors and Board of Commissioners can also motivate employees and work units by fostering a culture

perusahaan *(corporate governance)* yang kuat dalam organisasi akan mendukung pengawasan terhadap pelaksanaan Pedoman Penerapan Program APU-PPT yang dimiliki.

b. Implementasi Penerapan Program APU & PPT dilaporkan secara periodik oleh Satuan Kerja Kepatuhan Bagian APU & PPT Kepada Direktur yang menbawahi fungsi Kepatuhan.

c. Penguatan fungsi APU & PPT juga dilakukan melalui pengembangan sistem Aplikasi APU & PPT dengan persiapan implementasi *upgrade* Aplikasi APU & PPT versi 2.1 yang telah disesuaikan dan dapat mengakomodir kebutuhan APU & PPT sesuai Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Efektivitas Penerapan *Know Your Employee (KYE).*

Dalam rangka pencegahan penggunaan Bank Sulteng sebagai media atau tujuan pencucian uang dan pendanaan terorisme, maka penerapaan KYE dilakukan Bank dalam berbagai bentuk kegiatan sebagai berikut

a. Prosedur penyaringan *(pre-employee screening)* pada saat penerimaan pegawai baru sebagai bagian dari *Know Your Employee (KYE)*, antara lain:

- Metode *screening* dengan memastikan profil calon karyawan tidak memiliki catatan kejahatan tindak pidana pencucian uang, dan pendanaan terorisme ataupun terlibat tindak pidana lainnya.
- Melakukan verifikasi Identitas (KTP) dan pendidikan yang telah diperoleh calon karyawan.
- Memastikan apakah calon karyawan memiliki kredit macet atau tidak.
- Memastikan track record calon karyawan dalam kurun waktu tertentu, misal 5 tahun terakhir.
- Melakukan penelitian melalui media informasi lainnya.

b. Pengenalan dan pemantauan profil karyawan antara lain mencakup perilaku dan gaya hidup karyawan, seperti:

- Memastikan karyawan tidak memiliki kredit macet.
- Melakukan penelitian melalui media internet.
- Melakukan verifikasi terhadap karyawan yang mengalami perubahan gaya hidup yang cukup signifikan.
- Memastikan bahwa karyawan telah memahami dan mentaati kode etik karyawan *(staff code of conduct).*
- Mengevaluasi karyawan yang bertanggung jawab pada aktivitas yang tergolong berisiko tinggi antara lain memiliki akses ke data Bank, berhadapan dengan Calon Nasabah atau Nasabah, dan terlibat dalam pengadaan barang dan jasa bagi Bank.

of compliance throughout Bank Sulteng. The establishment of a strong corporate governance framework within the organization will support oversight of the implementation of the AML-CFT Program Implementation Guidelines.

b. The AML & CFT Program Implementation is periodically reported by the AML & CFT Compliance Unit to the Director in charge of the Compliance function.

c. Strengthening the AML & CFT function is also carried out through the development of the AML & CFT Application system, with preparations for the implementation of the AML & CFT Application upgrade version 2.1, which has been adjusted and can accommodate AML & CFT needs in accordance with applicable laws and regulations.

3. Effectiveness of Know Your Employee (KYE) Implementation.

To prevent Bank Sulteng from being used as a medium or destination for money laundering and terrorism financing, the Bank implements KYE through various activities, as follows:

a. Pre-employee screening procedures during new employee recruitment, as part of Know Your Employee (KYE), include:

- Screening methods to ensure prospective employees have no criminal record of money laundering, terrorism financing, or involvement in other crimes.
- Verifying the identity (KTP) and educational attainment of prospective employees.
- Ensuring whether prospective employees have bad debts.
- Verifying prospective employees' track records over a specific period, for example, the last five years.
- Conducting research through other information media.

b. Employee profile recognition and monitoring include employee behavior and lifestyle, such as:

- Ensuring employees have no bad debts.
- Conducting research through internet media.
- Verifying employees who have experienced significant lifestyle changes.
- Ensuring that employees understand and adhere to the employee code of conduct.
- Evaluating employees responsible for high-risk activities, including access to Bank data, dealing with prospective or existing customers, and procurement of goods and services for the Bank.

4. Sosialisasi Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) Pelaksanaan sosialisasi APU-PPT yang dilakukan oleh Bank Sulteng saat ini dilakukan secara berkelanjutan dalam berbagai bentuk kegiatan antara lain:
   a. Sosialisasi dan Pelatihan terkait Penerapan APU-PPT kepada Calon Pegawai Bank disetiap penerimaan pegawai baru Bank Sulteng.
   b. Pelatihan APU-PPT kepada Unit Khusus Pengenalan Nasabah (UKPN) yang ada disetiap Kantor Cabang Bank Sulteng minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
   c. Pelatihan dan *Refreshment test* APU-PPT untuk *Branch Manager*, Pimpinan seksi, dan *Frontliner* pada seluruh Cabang Bank Sulteng.

Fokus Kegiatan Program APU, PPT & PPPSPM Tahun 2025

Pada tahun 2025, fokus kegiatan yangmenjadi program kerja bagian APU, PPT dan PPPSPM, sebagai berikut:

1. Melakukan penyempurnaan Aplikasi GoAML untuk versi 5.4 modul LTKT dan LTKM.
2. Melakukan sosialiasi Penerapan Program APU & PPT bagi seluruh Karyawan & Karyawati Bank.
3. Melakukan *review* Kebijakan dan Prosedur dengan melakukan penyesuaian BPP & SOP APU&PPT.
4. Membuat Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM).
5. Membuat Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT).
6. Membuat Laporan Sistem Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT).
7. Membuat Laporan Sistem Informasi Pendanaan Terorisme (SIPENDAR).
8. Membuat Laporan APOLO APU & PPT.
9. Membuat Laporan Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang (SIGAP).
10. Mengikuti pelatihan pelaporan SIGAP demi Memaksimalkan proses identifikasi *(screening)* Nasabah pada CBS yang tergolong dalam daftar DTTOT & Proliferasi senjata pemusnah massal serta pelaporan pada SIGAP.
11. Mengikuti Pelatihan penyusunan Pelaporan APOLO APU & PPT oleh OJK.
12. Mengikuti Pelatihan Pelaporan SIPENDAR demi Memaksimalkan proses indetifikasi dan analisa terhadap nasabah yang tergolong dalam DTTOT.
13. Membuat Laporan Rencana dan Realisasi Pengkinian Data.
14. Membuat Laporan *Financial Integrated Rating* (FIR).
15. Membuat Laporan Permintaan Pihak Terkait (Aparat Penegak Hukum).
16. Membuat Laporan *Individual Risk Assesment* (IRA) APU, PPT & PPPSPM.

4. Socialization of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML & CFT) Implementation. Bank Sulteng's AML-CFT socialization efforts are currently carried out continuously through various activities, including:
   a. Socialization and training related to AML-CFT implementation for prospective bank employees at every new Bank Sulteng recruitment event.
   b. AML-CFT training for the Special Customer Identification Unit (UKPN) at each Bank Sulteng branch office at least once a year.
   c. AML-CFT training and refresher tests for Branch Managers, Section Heads, and Frontliners at all Bank Sulteng branches.

Focused Activities for the AML, CFT, and PPPSPM Programs in 2025

In 2025, the focus of the AML, CFT, and PPPSPM work programs is as follows:

1. Improving the GoAML application for version 5.4, including the LTKT and LTKM modules.
2. Socializing the implementation of the AML & CFT program for all bank employees.
3. Reviewing policies and procedures by adjusting the BPP and AML & CFT standard operating procedures.
4. Preparing Suspicious Financial Transaction Reports (LTKM).
5. Preparing Cash Financial Transaction Reports (LTKT).
6. Preparing Integrated Service User System Reports (SIPESAT).
7. Preparing Terrorism Financing Information System Reports (SIPENDAR).
8. Preparing APOLO AML & CFT Reports.
9. Preparing Anti-Money Laundering Program Information System Reports (SIGAP).
10. Participating in SIGAP reporting training to optimize the identification (screening) process for customers on the CBS list of DTTOT and Weapons of Mass Destruction Proliferation (WMD) and reporting to SIGAP.
11. Participated in APOLO AML & CFT Reporting Training from the Financial Services Authority (OJK).
12. Participated in SIPENDAR Reporting Training to maximize the identification and analysis process for customers classified as DTTOT.
13. Prepared a Data Update Plan and Implementation Report.
14. Prepared a Financial Integrated Rating (FIR) Report.
15. Prepared a Request Report for Related Parties (Law Enforcement Officials).
16. Prepared an Individual Risk Assessment (IRA) Report for AML, CFT & PPPSPM.

Laporan APU, PPT & PPPSPM

Bank Sulteng melalui Bagian UKK, APU-PPT & PPPSPM wajib melaporkan secara harian penerapan program APU, PPT Dan PPPSPM kepada PPATK yaitu Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada PPATK, dan juga menyampaikan laporan kegiatan program APU-PPT dan PPPSPM kepada regulator yang terkait lainnya. Laporan-laporan yang disampaikan merupakan laporan sesuai ketentuan harus dilaporkan dan laporan atas permintaan yang bersifat insidentil.

APU, PPT & PPPSPM Reports

Bank Sulteng, through its UKK, APU-PPT & PPPSPM Division, is required to report daily on the implementation of its APU, PPT, and PPPSPM programs to the Financial Transaction Reports (PPATK), including Cash Transaction Reports (LTKT) and Suspicious Transaction Reports (LTKM). These reports also include reports on APU-PPT and PPPSPM program activities to other relevant regulators. These reports include reports that comply with regulatory requirements and reports upon incidental requests.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN

Bank Sulteng belum pernah melakukan program kepemilikan saham yang diberikan kepada Komisaris dan Direksi *(Management Stock Option Program/ MSOP)* maupun program kepemilikan saham yang diberikan kepada pegawai Perusahaan *(Employee Stock Option Program/ESOP).*

Perusahaan bukan merupakan perusahaan dengan kepemilikan saham oleh publik, sehingga belum terdapat kepemilikan saham yang dapat dimiliki oleh Dewan Komisaris, Direksi, ataupun pegawai di Perusahaan.

EMPLOYEE AND/OR MANAGEMENT STOCK OWNERSHIP PROGRAM

Bank Sulteng has not implemented a Management Stock Option Program (MSOP) for Commissioners and Directors, or an Employee Stock Option Program (ESOP).

The Company is not a publicly-owned company, and therefore, no shares can be owned by the Board of Commissioners, Directors, or employees.

KODE ETIK

Untuk mewujudkan visi menjadi Bank yang handal, yang terfokus pada kepuasan pelanggan, Bank mempunyai komitmen untuk menerapkan dan mencapai standar tata kelola bagi bank yang tinggi. Penerapan Kode Etik merupakan bagian penting dari kerangka kerja Tata Kelola Bank dan memberikan dasar untuk merumuskan kebijakan, sistem dan prosedur di lingkungan Bank.

Kode Etik yang diterapkan oleh Perusahaan dirancang sebagai acuan perilaku bagi manajemen dan Pegawai Bank dalam menjalankan operasional Bank dan dalam menjalin hubungan dan berinteraksi dengan seluruh pemangku kepentingan Bank Sulteng serta mengatur agar dapat mematuhi budaya Perusahaan.

Bank Sulteng mengatur dan menetapkan Kode Etik Perusahaan melalui keputusan Direksi No. 22/ SK-DIR/BPDST/2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Pedoman Nilai-Nilai Budaya dan Kode Etik Bank Sulteng. pemberlakukan Kode Etik ini diharapkan akan menciptakan budaya perusahaan yang mengakar

CODE OF ETHICS

To realize its vision of becoming a reliable bank focused on customer satisfaction, the Bank is committed to implementing and achieving high standards of corporate governance. The implementation of the Code of Ethics is an essential part of the Bank's Governance framework and provides the basis for formulating policies, systems, and procedures within the Bank.

The Code of Ethics implemented by the Company is designed to serve as a behavioral guideline for Bank management and employees in conducting Bank operations and in establishing relationships and interactions with all Bank Sulteng stakeholders. It also regulates adherence to the Company's corporate culture.

Bank Sulteng established and established the Company's Code of Ethics through Board of Directors Decree No. 22/SK-DIR/BPDST/2019 dated March 1, 2019, concerning Guidelines for Bank Sulteng's Cultural Values and Code of Ethics. The implementation of this Code of Ethics is expected to create a deeply rooted

baik dalam berkata maupun bertindak pada setiap jajaran di Perusahaan, serta mampu memahami dan menerapkan kewajiban-kewajiban dasar yang sangat vital bagi keberhasilan Perusahaan, terjalin sinergi antara stadar etika pribadi masing-masing pegawai dengan standar etika bisnis Perusahaan.

Pelaksanaan Kode Etik yang konsisten akan dapat menjamin Perusahaan melakukan aktivitas bisnis yang beretika dan menciptakan lingkungan kerja yang baik, serta dapat meningkatkan kesejahteraan Pegawai.

Maksud Dan Tujuan Penerapan Kode Etik

Maksud dan tujuan ditetapkannya Kode Etik Perusahaan, yaitu:

1. Menjadi pedoman dalam berperilaku ataupun bersikap bagi Insan Perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya baik dalam menjalankan tugas maupun dalam berperilaku.
2. Memberikan pedoman atau kepastian perilaku yang seharusnya dilakukan pada saat berhadapan dengan situasi yang dilema, dimana kepentingan pribadinya bertolak belakang dengan kepentingan Bank.
3. Menciptakan suasana yang kondusif dan meningkatkan etos kerja di lingkungan internal Perusahaan.
4. Mendorong perbaikan pengelolaan Perusahaan melalui pengembangan nilai-nilai atau budaya yang pada akhirnya akan meningkatkan reputasi Perusahaan.

Pokok-Pokok Kode Etik Perusahaan

Secara garis besar pokok-pokok muatan Kode Etik mengatur hal terkait sikap dan perilaku Insan Perusahaan dalam bekerja di Perusahaan dan mengatur hal-hal yangmenjadi tanggung jawab Perusahaan maupun individu Insan Perusahaan maupun pihak lain yang melakukan kegiatan usaha dengan Perusahaan.

Adapun pokok-pokok muatan Kode Etik, sebagai berikut:

corporate culture in both words and actions at every level of the Company, enabling the Company to understand and implement basic obligations that are vital to the Company's success. This synergy between each employee's personal ethical standards and the Company's business ethical standards is fostered.

Consistent implementation of the Code of Ethics will ensure the Company conducts ethical business activities and creates a positive work environment, while improving employee welfare.

Purpose and Objectives of Implementing the Code of Ethics

The purpose and objectives of establishing the Company Code of Ethics are:

1. To serve as a guideline for the behavior and attitude of Company Personnel in carrying out their duties and responsibilities, both in carrying out their duties and in their behavior.
2. To provide guidance or certainty regarding appropriate behavior when faced with dilemmas where personal interests conflict with the interests of the Bank.
3. To create a conducive atmosphere and enhance work ethics within the Company.
4. To encourage improvements in Company management through the development of values or culture that will ultimately enhance the Company's reputation.

Principles of the Company Code of Ethics

In general, the main contents of the Code of Ethics regulate matters related to the attitudes and behavior of Company Personnel while working at the Company and regulate matters that are the responsibility of the Company, individual Company Personnel, and other parties conducting business with the Company.

The main contents of the Code of Ethics are as follows:

Aspek yang Diatur Regulated Aspects	**Penjelasan** Explanation
Ketentuan Umum General Provisions	Bab ini berisikan penjelasan tentang definisi dari ketentuan yang diatur This chapter contains an explanation of the definitions of the regulated provisions.
Maksud, Tujuan Dan Manfat Kode Etik Bank Sulteng Purpose, Objectives, and Benefits of Bank Sulteng's Code of Ethics	Bab ini berisikan: This chapter contains: Maksud Purpose Tujuan Objectives Manfaat Benefits
Visi Dan Misi Bank sulteng Bank Sulteng's Vision and Mission	Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi Bank Sulteng This chapter explains Bank Sulteng's vision and mission.

Nilai-Nilai Budaya Dan Kode Etik Cultural Values and Code of Ethics	Bab ini mengatur nilai-nilai budaya yang dianut dan kode etik Bank. This chapter regulates the Bank's adopted cultural values and code of ethics. Pengaturan Nilai-Nilai Budaya tersebut yaitu: The regulation of these Cultural Values is as follows: Integrity Integrity Continuous Improvement Continuous Improvement Accountability Accountability Customer Focus Customer Focus Optimism Optimism Motivation Motivation Execution Execution Kode etik Bank mencakup: The Bank's code of ethics includes Etika Bekerja Di Lingkungan Bank Sulteng Ethics of Working within Bank Sulteng Etika Melayani Nasabah Ethics of Serving Customers Etika Menghindari Adanya Benturan Kepentingan Pribadi Dan Bank Ethics of Avoiding Conflicts of Personal and Bank Interest Etika Menjalankan Hak Berpolitik Sebagai Warga Negara Dan Tanggung Jawab Sebagai Pegawai Bank Sulteng. Ethics of Exercising Political Rights as Citizens and Responsibilities as Bank Sulteng Employees Etika Memperlakukan Data Dan Informasi Bank Ethics of Handling Bank Data and Information
V. Penutup V. Conclusion	Berisikan penjelasan terkait pemberlakukan Pedoman Nilai-Nilai Budaya dan Kode Etik dan Penjelasan Pernyataan kepatuhan manajemen dan Pegawai Bank Sulteng. Contains an explanation regarding the implementation of the Cultural Values Guidelines and Code of Ethics and an explanation of the compliance statement of Bank Sulteng management and employees.

Kepatuhan Kode Etik Perusahaan

Pemberlakuan Kode Etik merupakan tanggung jawab seluruh Pegawai, Direksi dan Dewan Komisaris untuk berperilaku sesuai dengan norma hukum dan budaya Perusahaan. Kebijakan Perusahaan untuk memastikan setiap Insan di Perusahaan untuk wajib tunduk dan patuh kepada Pedoman Nilai-Nilai Budaya dan Kode Etik Bank Sulteng yang berlaku pada semua tingkatan organisasi dan seluruh kegiatan usaha Perusahaan.

Seluruh jajaran Pengurus dan Pegawai Bank Sulteng wajib memahami dan dapat menerima sepenuhnya serta berjanji akan menerapkan dengan sebaik-baiknya Pedoman Nilai-Nilai Bank dan Kode Etik Bank Sulteng yang dinyatakan dalam pernyataan Kepatuhan Manajemen dan Pegawai Bank Sulteng.

Compliance with the Company's Code of Ethics

Enforcing the Code of Ethics is the responsibility of all Employees, Directors, and Commissioners to conduct themselves in accordance with legal norms and the Company's culture. It is Company policy to ensure that every individual in the Company is required to comply with and adhere to the Bank Sulteng Cultural Values Guidelines and Code of Ethics, which apply at all organizational levels and throughout the Company's business activities.

All Management and Employees of Bank Sulteng are required to fully understand and accept, and pledge to implement, in the best possible manner, the Bank's Values Guidelines and Code of Ethics, as outlined in the Bank Sulteng Management and Employee Compliance Statement.

Contoh Lembar
Sample Sheet
Pernyataan Kepatuhan terhadap Pedoman Nilai-Nilai Budaya dan Kode Etik Bank Sulteng
Declaration of Compliance with the Bank Sulteng Cultural Values and Code of Ethics Guidelines

PERNYATAAN KOMITMEN DAN KEPATUHAN
INSAN PT BANK SULTENG
DECLARATION OF COMMITMENT AND COMPLIANCE
PT BANK SULTENG PERSONNEL

Yang bertanda tangan di bawah ini:
The undersigned:
Nama Name : .....
Nomor Pegawai Employee Number : .....
Jabatan Position : .....
Fungsi Function : .....
Unit Kerja/Cabang Work Unit/Branch : .....

Dengan ini menyatakan telah menerima, membaca dan memahami Pedoman Nilai-Nilai Budaya dan Kode Etik Bank Sulteng dan bersedia untuk mematuhi semua ketentuan yang tercantum di dalamnya, menerapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dan bersedia menerima sanksi atas pelanggaran yang saya lakukan.
I hereby declare that I have received, read, and understood the Bank Sulteng Cultural Values and Code of Ethics Guidelines and am willing to comply with all provisions contained therein, implement them in my daily duties, and accept sanctions for any violations I commit.

....., ...2025

(.....)

Penegakan dan Penanganan Kode Etik

Kode Etik Perusahaan berlaku untuk seluruh Insan Perusahaan baik Direksi, Dewan Komisaris dan juga pegawai Perusahaan termasuk individu yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan, serta seluruh pemangku kepentingan yang melakukan hubungan dan transaksi bisnis dengan Perusahaan. Perusahaan secara berkala melakukan pemantauan terhadap penegakan Kode Etik Perusahaan. Selain itu, Perusahaan juga telah menyediakan fasilitas pengaduan terhadap pelanggaran kode Etik melalui sarana WBS yang ada di Perusahaan.

Seluruh Insan Perusahaan mempunyai kesadaran untuk menjalankan Kode Etik dan Seluruh Insan Perusahaan wajib tunduk terhadap ketentuan yang dimuat dalam Kode Etik Perusahaan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan dalam Kode Etik tidak dapat ditolerir dan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

Enforcement and Handling of the Code of Ethics

The Company's Code of Ethics applies to all Company Personnel, including the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees, including individuals acting for and on behalf of the Company, as well as all stakeholders conducting business relationships and transactions with the Company. The Company regularly monitors the enforcement of the Code of Ethics. Furthermore, the Company has provided a complaint facility for Code of Ethics violations through the Company's WBS (Commitment Report).

All Company Personnel are committed to adhering to the Code of Ethics and are required to comply with the provisions contained in the Code of Ethics. Non-compliance with the provisions of the Code of Ethics will not be tolerated and will be subject to sanctions in accordance with applicable Company regulations.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan telah merealisasikan penegakan Kode Etik Perusahaan dimana terdapat kasus pelanggaran sesuai jenis/kategori pelanggaran berjumlah 120 kasus. Jumlah pelanggaran ketentuan dalam Kode Etik lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Adapun jumlah pelanggaran dan sanksi atas pelanggaran sesuai kategori, sebagai berikut:

Number of Code of Ethics Violations

Throughout 2025, the Company implemented enforcement of the Company's Code of Ethics, with 120 cases of violations by type/category. This number of violations of the Code of Ethics provisions was higher than the previous year. The number of violations and sanctions for violations by category are as follows:

NO.	JENIS SANKSI	JUMLAH PELANGGARAN NUMBER OF VIOLATIONS		TYPES OF SANCTIONS
		2025	2024	
1.	Surat Teguran	61	13	Warning Letter
2.	Surat Peringatan I	28	3	Warning Letter I
3.	Surat Peringatan II	11	9	Warning Letter II
4.	Surat Peringatan III	9	6	Warning Letter III
5.	Skorsing	-	-	Suspension
6.	Penundaan Pengangkatan	5	-	Delay in Appointment
7.	Pemutusan Hubungan Kerja	6	2	Termination of Employment
	Jumlah	120	33	Total

Setiap pelanggaran terhadap Pedoman Nilai-Nilai Budaya dan Kode Etik Bank Sulteng yang terbukti melalui mekanisme penegakan Kode Etik akan dikenakan sanksi sesuai dengan kebijakan Perusahaan. Jenis sanksi dan mekanisme pemberian sanksi mengacu kepada kebijakan kepegawaian yang berlaku di Perusahaan.

Any violation of Bank Sulteng's Cultural Values Guidelines and Code of Ethics proven through the Code of Ethics enforcement mechanism will be subject to sanctions in accordance with Company policy. The type of sanctions and the mechanism for imposing them will refer to the Company's applicable personnel policies.

Sosialisasi Kode Etik Perusahaan

Perusahaan mensosialisasikan Kode Etik Perusahaan kepada seluruh Insan Perusahaan dengan kebijakan yang jelas dan komprehensif agar dapat dengan mudah dipahami dan tidak ditafsirkan secara keliru oleh jajaran Perusahaan. Bank Sulteng memastikan bahwa kebijakan yang termaktub dalam Kode Etik Perusahaan telah dimengerti dan dipahami, serta dapat diimplementasikan dengan baik di lingkungan Perusahaan.

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui berbagai media baik dilakukan melakui pertemuan yang secara khusus diadakan ataupun melalui jaringan intranet yang dimiliki oleh Perusahaan. Selain itu untuk memudahkan pemahaman Kode Etik Perusahaan, setiap Insan Perusahaan juga menerima satu salinan Kode Etik.

Socialization of the Company's Code of Ethics

The Company socializes the Company's Code of Ethics to all Company Personnel with clear and comprehensive policies to ensure it is easily understood and not misinterpreted by any Company member. Bank Sulteng ensures that the policies contained in the Company's Code of Ethics are understood and implemented effectively within the Company.

Socialization is carried out through various media, including specially convened meetings and the Company's intranet. Furthermore, to facilitate understanding of the Company's Code of Ethics, each Company Personnel also receives a copy of the Code of Ethics.

Evaluasi Kode Etik Perusahaan

Bank Sulteng melakukan evaluasi atas ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kode Etik Perusahaan untuk memastikan kesesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, standar etika dan

Evaluation of the Company's Code of Ethics

Bank Sulteng evaluates the provisions stipulated in the Company's Code of Ethics to ensure compliance with applicable laws and regulations, applicable ethical and

perilaku yang berlaku, praktik-praktik terbaik serta relevansi dengan visi dan misi Bank.

Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berkala dengan melihat sejauhmana kesesuaian Kode Etik Perusahaan dengan kebutuhan Perusahaan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, pengembangan dan perbaikan dari program impementasinya akan dilakukan secara berkesinambungan.

PENERAPAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bertanggung jawab, Perusahaan menyediakan sistem yang berfungsi sebagai fondasi untuk membangun budaya Perusahaan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG dan praktik bisnis yang beretika. Bank Sulteng mengembangkan Sistem Pelaporan Pelanggaran *(Whistleblowing System/WBS)* yang merupakan kegiatan penting untuk menjaga proses bisnis berjalan sesuai dengan etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai dan integritas.

Whistleblowing System Bank Sulteng merupakan media pelaporan untuk menyampaikan adanya dugaan atau kejadian yang berhubungan dengan tindakan kecurangan *(fraud)*, pelanggaran hukum, peraturan Perusahaan, kode etik, gratifikasi dan benturan kepentingan yang dilakukan oleh pihak internal Bank. Melalui penerapan *WhistleBlowing System* memungkinkan pihak internal dan eksternal Perusahaan melaporkan dugaan pelanggaran dengan mudah dan nyaman.

Keberadaan *WhistleBlowing System* diharapkan dapat mencegah dan mendeteksi potensi terjadinya pelanggaran di Perusahaan yang berarti tersedianya mekanisme deteksi dini *(early warning system)* serta sebagai upaya meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian *Fraud* dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan.

Perusahaan menetapkan kebijakan pengaduan pelanggaran diatur dalam SK Direksi Nomor. 106/SK-DIR/BPD-ST/SKK/2024 Tanggal 18 September 2024 Tentang Standar Operasional (SOP) Sistem Pelaporan Pelanggaran *(WhistleBlowing System)*.

Maksud Dan Tujuan *WhistleBlowing System*

Maksud dan tujuan penerapan *WhistleBlowing System* di Perusahaan, yaitu:

1. Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik dengan menjunjung tinggi etika bisnis sehingga Bank Sulteng mempunyai reputasi yang baik;

behavioral standards, best practices, and relevance to the Bank's vision and mission.

Evaluations are conducted periodically to assess the extent to which the Company's Code of Ethics aligns with the Company's needs. Based on the evaluation results, the implementation program will be continuously developed and improved.

IMPLEMENTATION OF A WHISTLEBLOWING SYSTEM

To create a clean and responsible work environment, the Company provides a system that serves as a foundation for building a corporate culture based on GCG principles and ethical business practices. Bank Sulteng has developed a Whistleblowing System (WBS), a crucial activity to ensure business processes run in accordance with business ethics that uphold values and integrity.

Bank Sulteng's Whistleblowing System provides a reporting channel for reporting suspected or incidents related to fraud, violations of laws, Company regulations, the code of ethics, bribery, and conflicts of interest committed by internal parties within the Bank. Implementing the Whistleblowing System allows internal and external parties to report suspected violations easily and conveniently.

The Whistleblowing System is expected to prevent and detect potential violations within the Company, providing an early warning system and increasing the effectiveness of the Fraud Control System by emphasizing disclosure through complaints.

The Company has established a whistleblowing policy, which is regulated in Board of Directors Decree No. Decree of the Director General of Bank Indonesia No. 106/SK-DIR/BPD-ST/SKK/2024 dated September 18, 2024, concerning the Standard Operating Procedures (SOP) for the Whistleblowing System.

Purpose and Objectives of the Whistleblowing System

The purpose and objectives of implementing the Whistleblowing System in the Company are:

1. Implementing the principles of Good Governance by upholding business ethics so that Bank Sulteng has a good reputation;

2. Memperkuat sistem pengendalian *fraud* sehingga Bank dapat terhindar dari segala risiko yang dapat mengganggu kelancaran operasional dan kelangsungan usaha.
3. Menjadi sarana untuk Pegawai, nasabah atau mitra kerja dalam menyampaikan informasi apabila ditemukannya indikasi penyimpangan atau kecurangan oleh Pegawai Bank sebagai salah satu bentuk pencegahan risiko terjadinya *fraud.*

Pengelola *Whistleblowing System*

Bank Sulteng menetapkan Unit Kerja Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) & *Whistleblowing* yang berada dibawah struktur Divisi Satuan Kerja Kepatuhan sebagai Unit yang bertanggung jawab untuk menerima dan mengelola laporan pelanggaran yang disampaikan oleh *Whistleblower.*

Muatan *Whistleblowing System*

Standar Operasional (SOP) Sistem Pelaporan Pelanggaran *(WhistleBlowing System)* yang dimiliki Perusahaan memuat berbagai hal terkait penanganan dan penegakan *WhistleBlowing System* di lingkungan Bank, adapun muatan SOP tersebut, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan
- Latar belakang
- Dasar-dasar hokum
- Pengertian umum

BAB II Tujuan Dan Ruang Lingkup
- Maksud dan tujuan
- Strategi Anti *Fraud*
- Kebijakan *WhistleBlowing System*
  - Deteksi *fraud* melalui WBS
  - Jenis tindakan yang dilaporkan
  - Pelapor pelanggarandan *whistleblower*
  - Sarana pelaporanpelanggaran

BAB III Struktur Pengendalian Internal Bank
- Struktur Organisasi
- Tugas & Fungsi Unit SMAP & *Whistleblower* dalam *Whistleblowing System.*
- Jaminan Perlindungan dari Bank
- Reward dan Sanksi
- Evaluasi Efektifitas *WhistleBlowing System*

BAB IV Mekanisme & Alur Pelaporan
- Informasi Laporan
- Mekanisme pelaporan *WhistleBlowing System*
- Alur Pelaporan

BAB V Penutup

2. Strengthening the fraud control system so that the Bank can avoid any risks that could disrupt smooth operations and business continuity.

3. To serve as a means for employees, customers, or business partners to report any indications of irregularities or fraud by Bank employees as a form of fraud risk prevention.

Whistleblowing System Management

Bank Sulteng has established an Anti-Bribery Management System (SMAP) and Whistleblowing Work Unit, under the Compliance Work Unit Division, as the unit responsible for receiving and managing reports of violations submitted by whistleblowers.

Whistleblowing System Content

The Company's Standard Operating Procedures (SOP) for the Whistleblowing System (Whistleblowing System) cover various aspects related to the handling and enforcement of the Whistleblowing System within the Bank. The SOP's contents are as follows:

CHAPTER I: Introduction
- Background
- Legal Basis
- General Definition

CHAPTER II: Objectives and Scope
- Intent and Purpose
- Anti-Fraud Strategy
- Whistleblowing System Policy
  - Fraud Detection through the WBS
  - Types of Reported Actions
  - Violation Reporters and Whistleblowers
  - Means for Reporting Violations

CHAPTER III: Bank Internal Control Structure
- Organizational Structure
- Duties and Functions of the SMAP Unit and Whistleblower in the Whistleblowing System.
- Bank Protection Guarantee
- Rewards and Sanctions
- Whistle-Blowing System Effectiveness Evaluation

CHAPTER IV Reporting Mechanism & Flow
- Report Information
- Whistle-Blowing System Reporting Mechanism
- Reporting Flow

CHAPTER V Conclusion

Perlindungan Bagi Pelapor

Bank Sulteng dapat memberikan perlindungan hukum kepada pelapor sebagai bentuk keamanan dan keselamatan terhadap segala bentuk tekanan, ancaman atau intimidasi (misalnya pemecatan, perlakuan yang tidak adil, dan lainnya) sehubungan dengan pelaporan yang disampaikannya melalui saluran WBS.

Setiap pelapor pelanggaran mendapat jaminan perlindungan dari Bank Sulteng dalam bentuk:

1. Perlindungan secara internal:
   a. Kerahasiaan identitas pelapor
   b. Bantuan pendampingan hokum
   c. Perlakuan yang merugikan secara internal adalah sebagai berikut:
      - Pemecatan yang tidak adil
      - Penurunan jabatan atau pangkat
      - Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya
      - Catatan yang merugikan dalam *file* data pribadinya *(personal file record).*
2. Perlindungan eksternal
   Perlindungan eksterna mengacu kepada undang-undang terkait perlindungan saksi dan korban, yang antara lain meliputi:
   a. Perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata.
   b. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/ atau keluarga Pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental.
   c. Perlindungan terhadap harta pelapor.
   d. Kerahasiaan dan penyamaran identitas pelapor.
   e. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan terlapor, pada setiap tingkat pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan.

Lingkup Pengaduan yang Dilaporkan

Jenis dan lingkup tindakan pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui *WhistleBlowing System* mencakup antara lain:

1. Pelanggaran peraturan perundang-undangan, meliputi:
   - Pemalsuan
   - Korupsi
   - Penggelapan
   - Penggunaan Narkoba
   - Penyuapan
   - Penipuan Dan
   - Pencurian.
2. Pelanggaran pedoman etika Bank, meliputi:
   - Benturan kepentingan
   - Membuka rahasi Bank untuk kepentingan pribadi
   - Pelecehan

Protection for Whistleblowers

Bank Sulteng can provide legal protection to whistleblowers as a form of security and safety against all forms of pressure, threats, or intimidation (e.g., dismissal, unfair treatment, and others) related to reports submitted through the WBS channel.

Every whistleblower receives guaranteed protection from Bank Sulteng in the following forms:

4. Internal protection:
   a. Confidentiality of the whistleblower's identity
   b. Legal assistance
   c. Internal adverse treatment includes the following:
      - Unfair dismissal
      - Demotion or demotion
      - Harassment or discrimination in any form
      - Adverse records in their personal file records.
5. External protection
   External protection refers to laws regarding witness and victim protection, which include:
   a. Protection from criminal and/or civil prosecution.
   b. Protection of the personal safety and/or safety of the whistleblower's family from physical and/ or mental threats.
   c. Protection of the whistleblower's assets.
   d. Confidentiality and anonymity of the whistleblower.
   e. Providing information without meeting the reported party face-to-face, at every stage of the case investigation, if the violation is subject to court proceedings.

Scope of Reported Complaints

The types and scope of violations that can be reported through the Whistleblowing System include:

6. Violations of laws and regulations, including:
   - Forgery
   - Corruption
   - Embezzlement
   - Drug Use
   - Bribery
   - Fraud and
   - Theft.
7. Violations of the Bank's ethical guidelines, including:
   - Conflict of interest
   - Disclosing Bank secrets for personal gain
   - Harassment

- Perbuatan asusila di dalam atau di luar Bank
- Melanggar kode etik Perusahaan

3. Pelanggaran lainnya, meliputi:
   - Melanggar prinsip akuntansi yang berlaku umum.
   - Melanggar kebijakan dan prosedur operasional Bank antara lain melakukan pelanggaran terhadap anggaran dasar, kebijakan tata kelola perusahaan *(Good Corporate Governance)*, kebijakan barang dan jasa, dan penyalahgunaan aset serta penyalahgunaan kewenangan.
   - Tindakan kecurangan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian finansial ataupun non finansial.
   - Tindakan yang membahayakan keselamatan kerja

- Indecent acts inside or outside the Bank
- Violating the Company's code of ethics

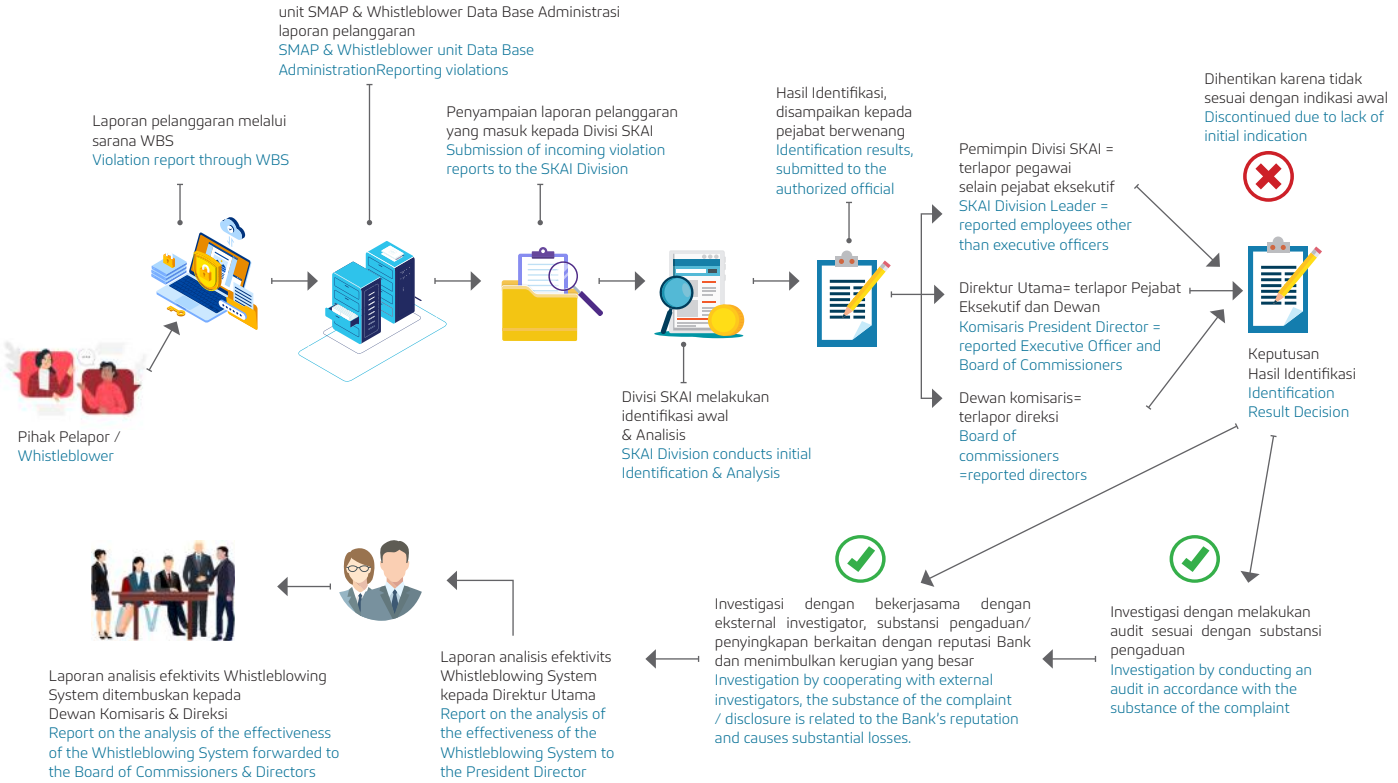
8. Other violations, including:
   - Violating generally accepted accounting principles.
   - Violating the Bank's operational policies and procedures, including violating the articles of association, good corporate governance policies, goods and services policies, misuse of assets, and abuse of authority.
   - Other fraudulent acts that can result in financial or non-financial losses.
   - Actions that endanger occupational safety

Mekanisme Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran

Seluruh Insan Perusahaan beserta pihak eksternal dapat melakukan pelaporan WBS dugaan pelanggaran malalui alur sebagai berikut:

Reporting and Handling Mechanism for Violations

All Company personnel and external parties can report suspected violations of the WBS through the following channels:



Bank Sulteng memberi kesempatan seluas-luasnya bagi pelapor pengaduan pelanggaran, baik dari pihak internal maupun pemangku kepentingan lainnya. Pengaduan yang disampaikan harus memenuhi syarat-syarat bahwa pengaduan disampaikan secara tertulis, memuat identitas pelapor (kerahasiaan identitas pelapor akan tetap terjaga), memuat informasi yang memberikan petunjuk mengenai permasalah seperti yang diuraikan pada bagian di atas, Informasi harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan dapat diandalkan sebagai data awal untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pelaporan yang disampaikan minimal berisikan data dan/atau informasi sebagai berikut:

1. Identitas terlapor mencakup;
   - Nama
   - Jabatan
   - atau dapat dilakuakan secara anonim
2. Informasi Pelanggaran;
3. Pihak-pihak yang terlibat;
4. Perkiraan kerugian yang terjadi;
5. Tempat dan waktu kejadian.

Penanganan atas laporan yang disampaikan oleh *whistleblower* akan ditindaklanjuti hingga tuntas apabila laporan yang disampaikan melalui mekanisme dan saluran resmi yang disediakan.

Sarana Penyampaian Laporan

Pelapor menyampaikan tindakan pelanggaran melalui sarana *Whistleblowing System* yang telah disediakan oleh Perusahaan. Pelapor dapat menyampaikan dugaan pelanggaran atau penyimpangan kepada Perusahaan melalui media yang telah disediakan, yakni:

- *Website* Bank Sulteng www.banksulteng.co.id;
- Email *whistleblower*@banksulteng.co.id;
- Pesan *Whatsapp* (WA) dengan nomor telepon +62 821 8865 2228;
- Pesan singkat (SMS) dengan nomor telepon +62 821 8865 2228;
- *T*elepon dengan nomor +62 821 8865 2228.
- Surat dengan tujuan ke alamat:
- *Whistleblowing System* Bank Sulteng
- Divisi Satuan Kerja Kepatuhan (Unit SMAP & *Whistleblower*)
  Kantor Pusat PT. Bank Sulteng
  31. Sultan Hasanuddin No. 20 Palu

Jumlah Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran

Sampai akhir tahun 2025, terdapat 4 jumlah pengaduan *Whistleblowing System* yang masuk. Laporan yang masuk sudah dilakukan penanganan baik dengan status masih ditindaklanjuti melalui mekanisme penanganan laporan maupun laporan yang sudah tuntas dengan status pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Berikut laporan pengaduan dan penanganan pelanggaran yang terjadi sepanjang tahun 2025, sebagai berikut:

Bank Sulteng provides ample opportunity for whistleblowers, both internal and other stakeholders, to report violations. Complaints must be submitted in writing, include the reporter's identity (confidentiality of the reporter's identity will be maintained), and contain information that provides clues to the problem as described in the section above. The information must be supported by sufficient and reliable evidence as initial data for further investigation. At a minimum, the report should contain the following data and/or information:

1. Identity of the reported party, including:
   - Name
   - Position
   - or can be done anonymously
2. Violation Information;
3. Parties involved;
4. Estimated losses;
5. Place and time of the incident.

Reports submitted by whistleblowers will be followed up to completion if the report is submitted through the official mechanisms and channels provided.

Report Submission Method

The whistleblower reports violations through the Whistleblowing System provided by the Company. Reporters can report alleged violations or irregularities to the Company through the following channels:

- Bank Sulteng website www.banksulteng.co.id;
- Email whistleblower@banksulteng.co.id;
- WhatsApp (WA) message to +62 821 8865 2228;
- SMS message to +62 821 8865 2228;
- Phone call to +62 821 8865 2228.
- Letters addressed to:
- Bank Sulteng Whistleblowing System
- Compliance Unit Division (SMAP & Whistleblower Unit)
- PT. Bank Sulteng Head Office
- 31. Sultan Hasanuddin No. 20 Palu

Number of Reports and Handling of Violations

As of the end of 2025, there were 4 complaints received through the Whistleblowing System. Reports received have been handled, either with a status still being followed up through the report handling mechanism or with a status of being resolved with sanctions imposed for the violations committed. The following is a report on complaints and the handling of violations that occurred throughout 2025:

Jumlah Laporan Yang Masuk
Number of Incoming Reports

No.	Uraian	Jumlah Laporan Number of Reports		Description
		2025	2024	
1.	Triwulan I	1	0	Quarter I
2.	Triwulan II	2	2	Quarter II
3.	Triwulan III	0	1	Quarter III
4.	Triwulan IV	1	1	Quarter IV
Total		**4**	**4**	

Hasil Penanganan Pengaduan
Complaint Handling Results

No.	Nomor Tiket Ticket Number	Dugaan Jenis Pelanggaran Alleged Type of Violation	Tindak Lanjut Follow-up	Tindak Lanjut SKAI SKAI Follow-up	Status Laporan Report Status
1.	01.03/BPD-ST/MI/SKK-WBS/2025	Fraud dan Pelanggaran SOP Fraud and SOP Violations	Masih Menunggu Keputusan Still Awaiting Decision	Risalah hasil ekspose audit investigatif No. 03/BPD-ST/ RHE/SKAI/2025 LHP dugaan penarikan rekening tabungan nasabah oleh pegawai internal yang diduga dilakukan tidak sesuai prosedur sebesar Rp. 81.540.000 Investigative Audit Report No. 03/BPD-ST/RHE/SKAI/2025 LHP on alleged improper withdrawals from a customer's savings account by an internal employee amounting to Rp 81,540,000	Punishment 1(satu) orang pegawai mendapatkan Surat Peringatan III dan 8 (delapan) orang pegawai mendapatkan Surat Teguran Punishment: One employee received a third warning letter, and eight employees received warning letters.
2.	02.04/BPD-ST/MI/SKK-WBS/2025	Fraud dan Pelanggaran SOP Fraud and SOP Violations	Masih Menunggu Keputusan Still Awaiting Decision	Risalah hasil ekspose audit investigatif No. 004/BPD-ST/ RHE/SKAI/2025 LHP dugaan akses core banking oleh pihak tidak berwenang yang tidak sesuai prosedur di KCP Labean Investigative Audit Report No. 004/BPD-ST/RHE/SKAI/2025 LHP on alleged improper access to core banking by an unauthorized party at the Labean Branch Office	Punishment 5(lima) orang Pegawai mendapatkan Surat Peringatan II dan 1 (satu) orang pegawai mendapatkan Surat Teguran Punishment: Five employees received a second warning letter, and one employee received a warning letter.
3.	03.06/BPD-ST/MI/SKK-WBS/2025	Fraud dan Pelanggaran SOP Fraud and SOP Violations	Masih dalam proses investigasi Still under investigation	Risalah hasil ekspose audit investigatif No. 006/BPD-ST/ RHE/SKAI/2025 Investigative Audit Report No. 006/BPD-ST/RHE/SKAI/2025	Masih menunggu hasil investigasi oleh Divisi SKAI & Anti Fraud Awaiting the results of the investigation by the Internal Audit and Anti-Fraud Division.
4.	04.12/BPD-ST/MI/SKK-WBS/2025	Fraud dan Pelanggaran SOP Fraud and SOP Violations	Masih dalam proses investigasi Still under investigation	Risalah hasil ekspose audit investigatif No.007/BPD-ST/ RHE/SKAI/2025 Investigative Audit Report No. 007/BPD-ST/RHE/SKAI/2025	Masih menunggu hasil investigasi oleh Divisi SKAI & Anti Fraud Awaiting the results of the investigation by the Internal Audit and Anti-Fraud Division.

Penghargaan dan Sanksi

Perusahaan memiliki kebijakan untuk memberikan penghargaan dan juga sanksi terhadap pelaporan indikasi pelanggaran di lingkungan Perusahaan. Pemberian penghargaan dan sanksi untuk memotivasi *Whistleblower* untuk berani mengungkapkan informasi atas dugaan terjadinya tindakan pelanggaran dan juga untuk menciptakan rasa kepedulian Insan Perusahaan terhadap penegakan tata kelola perusahaan yang baik.

Laporan dari *Whistleblower* yang terbukti benar akan mendapatkan penghargaan, sedangkan yang pengaduannya tidak benar, didasari dengan kehendak buruk dan fitnah sehingga mengganggu budaya kerja bank akan dikenakan sanksi, pemberian *reward* dan sanksi ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi.

Sosialisasi *Whistleblowing* System

Perusahaan melakukan sosialisasi mengenai *Whistleblowing System* kepada seluruh Insan Perusahaan untuk mendapatkan pemahaman yang memadai mengenai penerapan *Whistleblowing System* di lingkungan Perusahaan. Pelaksanaan sosialisasi antara lain dilakukan melalui:

- Situs resmi Perusahaan www.banksulteng.co.id
- Papan informasi berupa pamflet, spanduk dan stiker yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis yang mudah diakses oleh publik di seluruh kantor dan unit kerja Perusahaan.
- *Screen display* pada *workstation* setiap pegawai, yang dilaksanakan bersamaan dengan sosialisasi anti fraud.

Evaluasi Efektivitas *Whistleblowing System*

Bank Sulteng melakukan evaluasi terkait efektivitas pelaksanaan *Whistleblowing System* di Perusahaan melalui mekanisme evaluasi, sebagai berikut:

- Unit Sistem Manajamen Anti Penyuapan (SMAP) & *Whistleblower* menghimpun data dan/atau Informasi pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran *(Whistleblowing System).*
- Unit Sistem Manajamen Anti Penyuapan (SMAP) & *Whistleblower* mengevaluasi data dan/atau informasi sebagaimana yang dimaksud pada point diatas.
- Berdasarkan data dan/atau informasi yang telah di evaluasi, Unit Sistem Manajamen Anti Penyuapan (SMAP) & *Whistleblower* setiap triwulan menyusun Laporan Analisis efektivitas pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran *(Whistleblowing System).*
- Laporan Analisis efektivitas pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran *(Whistleblowing System)* berdasarkan laporan yang masuk untuk disampaikan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris dan Direksi.

Rewards and Sanctions

The Company has a policy of providing rewards and sanctions for reporting suspected violations within the Company. These rewards and sanctions motivate whistleblowers to come forward with information about alleged violations and foster a sense of concern among Company personnel for upholding good corporate governance.

Whistleblowers whose reports are proven to be true will receive a reward, while those whose reports are false, based on ill will or slander that disrupt the bank's work culture will be subject to sanctions. These rewards and sanctions are determined by a Board of Directors' Decree.

Whistleblowing System Socialization

The Company conducts outreach regarding the Whistleblowing System to all Company personnel to ensure a sufficient understanding of its implementation within the Company. This outreach includes:

- The Company's official website www.banksulteng.co.id
- Information boards in the form of pamphlets, banners, and stickers placed in strategic locations easily accessible to the public in all Company offices and work units.
- Screen displays at each employee's workstation, which are implemented concurrently with anti-fraud outreach.

Evaluating the Effectiveness of the Whistleblowing System

Bank Sulteng evaluates the effectiveness of the company's Whistleblowing System through the following evaluation mechanisms:

- The Anti-Bribery Management System (SMAP) and Whistleblower Unit collects data and/or information on the implementation of the Whistleblowing System.
- The Anti-Bribery Management System (SMAP) and Whistleblower Unit evaluates the data and/or information referred to in the above point.
- Based on the evaluated data and/or information, the Anti-Bribery Management System (SMAP) and Whistleblower Unit prepares a quarterly Analysis Report on the Effectiveness of the Whistleblowing System.
- The Analysis Report on the Effectiveness of the Whistleblowing System is based on incoming reports and is submitted to the President Director with copies to the Board of Commissioners and the Board of Directors.

ANTI FRAUD

Bank Sulteng menyusun dan menerapkan strategi anti *fraud* serta membentuk unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti *fraud* dalam organisasi Bank. Penerapan ketentuan mengenai penerapan strategi anti *fraud* serta pengenaan sanksi administratif sehubungan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti *fraud* pada bank umum.

Bank berkomitmen untuk melakukan pencegahan terhadap segala bentuk kejadian *fraud* dan segera menindaklanjutinya untuk mengurangi dampak kerugian bagi nasabah, dan/atau Bank, termasuk mengelola reputasi Bank atas adanya publikasi negatif yang dapat berdampak kepada hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Bank.

Dalam menyusun dan menerapkan strategi anti *fraud*, Bank mendasarkan diri pada peraturan OJK (POJK) Nomor: 12 Tahun 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Lembaga Jasa Keuangan, dan POJK 39/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum. Peraturan tersebut menjelaskan mengenai kewajiban Perusahaan untuk menerapkan strategi anti *fraud* serta kewajiban pelaporan bagi Bank secara lebih komprehensif serta menjadi landasan utama dalam mengelola *fraud* yang terjadi di lingkungan Perusahaan yang dilakukan melalui pendekatan 4 pilar yaitu pencegahan, deteksi, investigasi/sanksi dan pemantauan.

Jenis-Jenis *fraud* pada Bank

POJK 39/POJK.03/2019 Tentang penerapan strategi anti *fraud* bagi bank umum pasal 2 ayat 1 telah menjelaskan jenis perbuatan yang tergolong *fraud* yaitu terdiri atas kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana perbankan, dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu termasuk juga perilaku yang tidak etis yang dilakukan oleh pegawai Bank.

Bank Sulteng telah mengidentifikasi jenis–jenis perbuatan yang tergolong *fraud* dengan mengacu pada POJK tersebut untuk selanjutnya dimuat dalam Pedoman atau SOP Anti *fraud*.

Pelaporan *Fraud*

Bank Sulteng menyusun sistem pelaporan *Fraud* yang efektif yang memuat kejelasan proses pelaporan, antara lain mengenai tata cara pelaporan, sarana, dan pihak yang bertanggung jawab untuk menangani pelaporan. Sistem pelaporan didukung dengan adanya

ANTI-FRAUD

Bank Sulteng has developed and implemented an anti-fraud strategy and established a work unit or function tasked with managing the implementation of the anti-fraud strategy within the Bank's organization. The implementation of provisions regarding the implementation of the anti-fraud strategy and the imposition of administrative sanctions for violations of these provisions are carried out in accordance with the Financial Services Authority Regulation concerning the implementation of an anti-fraud strategy in commercial banks.

The Bank is committed to preventing all forms of fraud and promptly responding to them to minimize the impact of losses on customers and/or the Bank, including managing the Bank's reputation in the event of negative publicity that could lead to a loss of public trust in the Bank.

In developing and implementing the anti-fraud strategy, the Bank adheres to Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 12 of 2024 concerning the Implementation of an Anti-Fraud Strategy for Financial Services Institutions and POJK 39/POJK.03/2019 concerning the Implementation of an Anti-Fraud Strategy for Commercial Banks. These regulations explain the Company's obligations to implement an anti-fraud strategy and the Bank's reporting obligations in a more comprehensive manner. They serve as the primary foundation for managing fraud within the Company, which is carried out through a four-pillar approach: prevention, detection, investigation/sanctions, and monitoring.

Types of Fraud in Banks

OJK Regulation 39/POJK.03/2019 concerning the implementation of anti-fraud strategies for commercial banks, Article 2, paragraph 1, explains the types of acts that constitute fraud, including cheating, deception, embezzlement of assets, information leaks, banking crimes, and other similar acts, including unethical behavior by bank employees.

Bank Sulteng has identified the types of acts that constitute fraud, referring to the POJK, and then incorporated them into the Anti-fraud Guidelines or SOP.

Fraud Reporting

Bank Sulteng has established an effective fraud reporting system that clearly defines the reporting process, including reporting procedures, facilities, and responsible parties. The reporting system is supported

kejelasan mekanisme tindak lanjut terhadap *Fraud* yang dilaporkan. Kebijakan tersebut dikomunikasikan secara transparan kepada seluruh jajaran organisasi dan diterapkan secara konsisten agar dapat menimbulkan kepercayaan seluruh pegawai Bank terhadap keandalan dan kerahasiaan penanganan pengaduan.

Perusahaan mendorong kejadian *fraud* yang melibatkan internal Perusahaan dapat dilaporkan melalui sarana WBS, sehingga proses penanganannya akan lebih mudah dan terjamin kerahasiaannya.

Pelanggaran Internal Fraud Dan Sanksi

Bank menerapkan *zero tolerance* terhadap setiap kejadian *fraud*. Bank akan menindaklanjuti setiap dugaan atau tindakan *fraud*, termasuk memberikan sanksi kepada karyawan yang terbukti melakukan serta yang terlibat dalam kejadian *fraud.*

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pelanggaran *(fraud)* yang dilakukan oleh satuan Kerja Audit Internal & Anti *Fraud* terdapat kejadian *fraud* yang melibatkan internal Bank yang memiliki dampak signifikan dan telah dilaporkan kepada OJK.

by a clear follow-up mechanism for reported fraud. This policy is transparently communicated to all levels of the organization and consistently implemented to instill confidence in the reliability and confidentiality of complaint handling by all bank employees.

The company encourages reporting of fraud incidents involving internal parties through the WBS, facilitating the handling process and ensuring confidentiality.

Internal Fraud Violations and Sanctions

The Bank implements a zero-tolerance policy for all incidents of fraud. The Bank will follow up on any suspected or actual fraudulent activity, including imposing sanctions on employees found to have committed or participated in the fraud.

Based on the results of the fraud investigation conducted by the Internal Audit & Anti-Fraud Unit, there have been fraud incidents involving internal Bank personnel that have had significant impacts and have been reported to the Financial Services Authority (OJK).

Internal Fraud Internal Fraud	Pengurus Bank Bank Manager		Pegawai Tetap Permanent Employees		Pegawai Tidak Tetap Non-permanent Employees	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Telah diselesaikan Completed	0	0	2	4	0	0
Dalam proses penyelesaian di Internal Bank In the process of internal resolution at the Bank	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaian Settlement not yet attempted	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui Proses Hukum Has been followed up through the Legal Process	0	0	0	0	0	0
Total Fraud Total Fraud	**0**	**0**	**2**	**4**	**0**	**0**

Pada tahun 2025, terdapat terdapat 2 kasus tindakan fraud yang melibatkan pihak internal Perusahaan. Atas keterlibatan tersebut Perusahaan telah melakukan investigasi yang dilakukan oleh Divisi SKAI & Anti Fraud dan dengan melibatkan Komite Personalia dengan hasil pemeriksaan sebanyak 5 (orang) pelaku dan telah diberi sanksi berupa Surat Peringatan (SP) dan 2 Orang dengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

In 2025, there were two cases of fraud involving internal parties. The Company conducted an investigation into this involvement by the Internal Audit & Anti-Fraud Division and the Personnel Committee. The investigation resulted in five perpetrators being sanctioned with a warning letter and two individuals being dismissed.

KOMITMEN ANTI KORUPSI & PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Komitmen menerapkan kebijakan anti korupsi dan program pengendalian gratifikasi di lingkungan Perusahaan dalam rangka untuk mewujudkan kesadaran dari semua pihak untuk mengedepankan bisnis yang bersih dan bertanggung jawab serta untuk mencegah kerugian, baik material maupun imateril yang dapat mempengaruhi operasional Perusahaan.

Kebijakan Anti Korupsi bagi Perusahaan dilakukan dengan menjalankan dan mematuhi peraturan perundang-undangan anti korupsi yang berlaku di Indonesia. Perusahaan mengadopsi ketentuan dan nilai-nilai yang mencegah terjadinya korupsi termasuk didalamnya praktik memberi dan menerima hadiah dan suap.

Perusahaan tidak mentolerir apabila terjadi praktik korupsi di lingkungan Perusahaan. Setiap tindakan yang terindikasi korupsi, suap dan sejenisnya yang dilakukan insan Perusahaan dapat dilaporkan kepada Perusahaan, dan Bank Sulteng memastikan akan menindaklanjutinya hingga tuntas laporan tersebut baik dilakukan melalui mekanisme internal atau diproses melalui jalur hukum. Untuk memudahkan laporan atas tindakan yang melanggar hukum tersebut, Perusahaan telah menyediakan mekanisme pelaporan yang terlindungi dan menjamin kerahasiaan yaitu melalui sarana *whistleblowing system* yang tersedia dalam *website* Perusahaan.

Kebijakan Anti Korupsi & Program Pengendalian Gratifikasi

Pencegahan tindakan korupsi dan gratifikasi dilingkungan Perusahaan dengan mendasarkan diri pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai wujud dari kesadaran untuk memberi petunjuk bagi seluruh unit kerja dan Insan Perusahaan dalam menerapkan kebijakan dan pedoman anti korupsi dan gratifikasi, Bank Sulteng telah menyusun kebijakan dan prosedur yang mengatur tentang upaya pencegahan tindakan korupsi dan program pengendalian gratifikasi diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) dan Standar Operasional Perusahaan (SOP). Pengaturan kebijakan tersebut, sebagai berikut:

ANTI-CORRUPTION COMMITMENT & GRATIFICATION CONTROL PROGRAM

The Company is committed to implementing an anti-corruption policy and gratification control program within the Company to raise awareness among all parties to prioritize clean and responsible business practices and to prevent losses, both material and immaterial, that could impact the Company's operations.

The Company's Anti-Corruption Policy is implemented by implementing and complying with applicable anti-corruption laws and regulations in Indonesia. The Company adopts provisions and values that prevent corruption, including the giving and receiving of gifts and bribes.

The Company does not tolerate any corrupt practices within the Company. Any acts suspected of corruption, bribery, or similar acts committed by Company personnel can be reported to the Company, and Bank Sulteng ensures that reports will be followed up thoroughly, either through internal mechanisms or through legal channels. To facilitate reporting of unlawful acts, the Company has provided a protected and confidential reporting mechanism through a whistleblowing system available on the Company's website.

Anti-Corruption Policy & Gratification Control Program

The prevention of corruption and gratuities within the Company is based on Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption.

As a manifestation of its commitment to providing guidance to all work units and Company personnel in implementing anti-corruption and gratuity policies and guidelines, Bank Sulteng has developed policies and procedures governing corruption prevention and gratuity control programs, which are outlined in the Company Manual (BPP) and the Company Standard Operating Procedures (SOP). These policies are as follows:

- Surat Keputusan Direksi Nomor: 126/SK-Dir/BPD-ST/SKK/2022/Tentang Standar Operasional Prosedur Pengendalian, Pelaporan Gratifikasi Dan Anti Penyuapan.
- Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang telah disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 1 Oktober 2024, dan telah melakukan sertifikasi SNI ISO 37001:2016.

Dalam rangka menerapkan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan serta mewujudkan Bank Sulteng yang bersih dan berintegritas sebagai upaya pencegahan praktik KKN, Manajemen Bank Sulteng bersama dengan seluruh pegawai telah membuat dan menandatangani Pernyataan Kebijakan Anti Penyuapan.

Struktur Organisasi Pengelola Gratifikasi

Bank Sulteng membentuk Unit Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) & *Whistleblower* dibawah Divisi Satuan Kerja Kepatuhan yang berfungsi sebagai unit pengendalian gratifikasi dan sejenisnya. Adapun tugas Unit Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) & *Whistleblower* sebagai berikut:

1. Mengatur sistem dan mekanisme pelaporan gratifikasi di lingkungan PT. Bank Sulteng;
2. Melakukan sosialisasi terkait dengan gratifikasi, serta memberikan masukan terhadap masalah yang berkaitan dengan gratifikasi;
3. Menerima laporan gratifikasi dan dokumennya dari penerima gratifikasi;
4. Mereview laporan gratifikasi dan mengadministrasikan laporan gratifikasi;
5. Menyampaikan laporan triwulan terkait pengelolaan gratifikasi kepada Direkturyang membawahi fungsi kepatuhan;
6. Menyampaikan laporan gratifikasi kepada KPK sesuai dengan ketentuan berlaku;
7. Melakukan penyimpanan barang dan atau bingkisan gratifikasi;
8. Mengelola pemajangan objek gratifikasi dan himbauan kepada seluru rekanan/mitra kerja bank untuk tidak memberikan gratifikasi terkait perayaan keagamaan dan lain - lain;
9. Melaksanakan sosialisasi gratifikasi secara berkelanjutan kepada seluruh level organisasi untuk meningkatkan *awareness.*
10. Menyediakan media sosialiasi mengenai kebijakan gratifikasi seperti pemasangan poster, *email blast, screen saver*, dan video pendek.

- Board of Directors Decree Number: 126/SK-Dir/BPD-ST/SKK/2022/Concerning Standard Operating Procedures for Controlling, Reporting Gratuities, and Anti-Bribery.
- The Anti-Bribery Management System (SMAP) Guidelines were ratified by the Board of Directors and Board of Commissioners on October 1, 2024, and have been certified to SNI ISO 37001:2016.

To implement SNI ISO 37001:2016 on the Anti-Bribery Management System and realize a clean and integrated Bank Sulteng as an effort to prevent corruption, collusion, and nepotism (KKN), Bank Sulteng Management, together with all employees, have created and signed an Anti-Bribery Policy Statement.

Gratuity Management Organizational Structure

Bank Sulteng has established an Anti-Bribery Management System (SMAP) & Whistleblower Unit under the Compliance Unit Division, which functions as a control unit for gratuities and similar activities. The duties of the Anti-Bribery Management System (SMAP) & Whistleblower Unit are as follows:

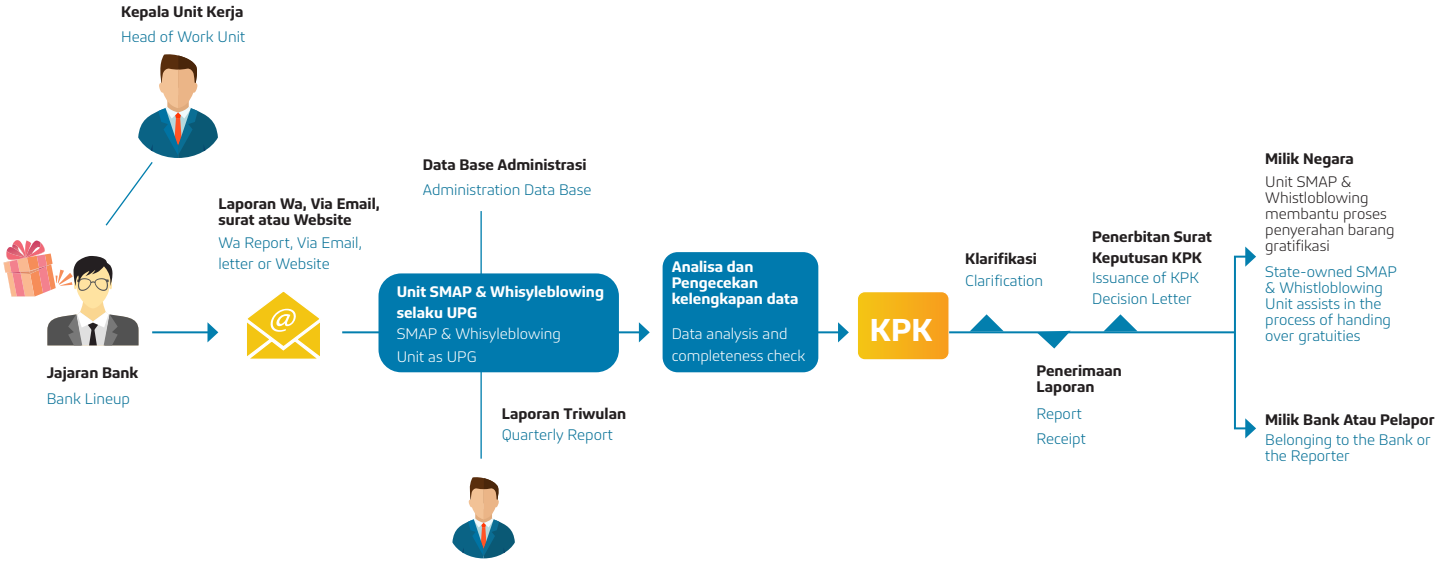
1. Managing the gratuity reporting system and mechanism within PT. Bank Sulteng;
2. Conducting outreach related to gratuities and providing input on issues related to gratuities;
3. Receiving gratuity reports and documentation from gratuity recipients;
4. Reviewing gratuity reports and administering them;
5. Submitting quarterly reports on gratuity management to the Director in charge of the compliance function;
6. Submitting gratuity reports to the Corruption Eradication Commission (KPK) in accordance with applicable regulations;
7. Storing gratuity items and/or gifts;
8. Managing the display of gratuity objects and advising all bank partners/colleagues not to provide gratuities related to religious celebrations and other events;
9. Conduct ongoing outreach on gratuity at all levels of the organization to raise awareness.
10. Provide social media regarding gratuity policies, such as posters, email blasts, screensavers, and short videos.

Penanganan Gratifikasi

Bank Sulteng menetapkan mekanisme penanganan gratifikasi yang dilaksanakan melalui alur sebagai berikut:

Handling Gratification

Bank Sulteng has established a mechanism for handling gratuities, which is implemented through the following channels:



a. Jajaran Bank Sulteng yang menerima atau menolak gratifikasi membuat laporan kepada Unit SMAP & *Whistleblower* selaku Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Bank Sulteng dengan mengisi formulir dan mengirimkan melalui email/surat/No.*Whatsapp* dan diketahui oleh atasan langsung;
b. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Bank Sulteng akan menerima dan melakukan pengecekan terhadap laporan yang masuk, jika data belum lengkap maka Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) akan menghubungi pelapor untuk meminta keterangan lebih lanjut;
c. Setelah laporan tersebut lengkap, Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) melakukan analisis dan mengadministrasikan laporan penerimaan gratifikasi;
d. Meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
e. Selanjutnya Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan verifikasi, analisis dan penetapan status kepemilikan gratifikasi tersebut;
f. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penetapan status kepemilikan, Komisi Pemberantasan Korupsi akan menerbitkan surat yang menerangkan status kepemilikan gratifikasi tersebut kepada pelapor/Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Bank Sulteng;
g. Dalam hal status gratifikasi ditetapkan menjadi milik penerima, maka objek gratifikasi tersebut dikembalikan kepada pelapor;

a. Bank Sulteng employees who receive or reject gratuities must submit a report to the SMAP & Whistleblower Unit, the Bank Sulteng Gratuity Control Unit (UPG). This form must be completed and sent via email, letter, or WhatsApp number. This must be acknowledged by their immediate superior.
b. The Bank Sulteng Gratuity Control Unit (UPG) will receive and verify the report. If the information is incomplete, the UPG will contact the reporter for further information.

c. Once the report is complete, the UPG will analyze and administer the gratuity receipt report.

d. The UPG will forward the gratuity receipt report to the Corruption Eradication Commission (KPK).
e. The KPK will then verify, analyze, and determine the ownership status of the gratuity.

f. After the Corruption Eradication Commission (KPK) determines ownership status, the KPK will issue a letter explaining the ownership status of the gratuity to the reporter/Bank Sulteng's Gratification Control Unit (UPG).

g. If the gratuity is determined to belong to the recipient, the object of the gratuity will be returned to the reporter.

h. Dalam hal status gratifikasi ditetapkan menjadi milik negara, objek gratifikasi diserahkan kepada KPK dibantu oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), jika barang akan dikirimkan ke alamat KPK, jika berupa uang akan disetorkan ke rekening Komisi Pemberantasan Korupsi dan dilaporkan beserta dengan bukti setoran, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan.
i. Setiap Gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik Negara akan diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi didalam Berita Negara Republik Indonesia;
j. Laporan-laporan Gratifikasi tersebut akan disampaikan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) kepada Direktur Kepatuhan berupa laporan triwulan;
k. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) juga akan melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi secara periodik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

Setiap Pegawai wajib untuk menyampaikan laporan Gratifikasi dalam hal:
1. Telah menerima Gratifikasi.
2. Telah menolak suatu penerimaan dan/atau permintaan Gratifikasi.
3. Telah memberikan Gratifikasi.
4. Sama sekali tidak melakukan praktek Gratifikasi (dalam hal ini Pimpinan/Kepala Unit Kerja tidak menerima Laporan atas penerimaan dan/atau pemberian Gratifikasi, maka wajib melakukan pelaporan paling lambat setiap tanggal 15 Bulan berikutnya).

Pegawai Bank atau Pihak Ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat pada Pedoman ini, agar segera melaporkan pelanggaran dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku di Bank melalui Divisi Kepatuhan. Bank menjamin bahwa proses pelaporan Gratifikasi yang dilakukan oleh Insan Bank maupun Pihak Ketiga akan dijaga kerahasiaannya.

Proses pelaporan dalam program pengendalian Gratifikasi antara lain:
1. Setiap Pegawai Bank harus melaporkan atas penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap dan Gratifikasi Dalam Kedinasan kepada Divisi Kepatuhan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerimaan Gratifikasi.
2. Setiap Pegawai Bank harus melaporkan penolakan atas Penerimaan Gratifikasi kepada Divisi Kepatuhan.
3. Setiap Pegawai Bank harus melaporkan atas Pemberian kepada Pihak Ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian.

h. If the gratuity is determined to belong to the state, the object of the gratuity will be handed over to the KPK with the assistance of the Gratification Control Unit (UPG). If it is in the form of goods, it will be sent to the KPK's address. If it is in the form of money, it will be deposited into the KPK's account and reported along with proof of payment, no later than 7 (seven) days from the date of the decision.
i. Every gratuity determined to belong to the state will be announced by the KPK in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

j. Reports of these gratuities will be submitted by the Gratification Control Unit (UPG) to the Director of Compliance in the form of quarterly reports.

k. The Gratification Control Unit (UPG) will also periodically report a summary of the receipt and rejection of gratuities to the Corruption Eradication Commission.

Gratification Reporting Mechanism

Every employee is required to submit a Gratification report if:
1. They have received a Gratification.
2. They have rejected the acceptance and/or request for a Gratification.
3. They have given a Gratification.
4. They have not engaged in any Gratification practices at all (in cases where the Leader/Head of the Work Unit does not receive a report on the receipt and/or provision of a Gratification, they must report it no later than the 15th of the following month).

Bank employees or third parties who become aware of any violations of the provisions of this Guideline must immediately report the violation in accordance with applicable Bank regulations through the Compliance Division. The Bank guarantees that the Gratification reporting process carried out by Bank personnel and third parties will be kept confidential.

The reporting process in the Gratification Control Program includes:
1. Every Bank Employee must report the receipt of any Gratification deemed a bribe or any Gratification in the Performance of His/Her Service to the Compliance Division no later than 7 (seven) working days after receipt.
2. Every Bank Employee must report any rejection of Gratification to the Compliance Division.
3. Every Bank Employee must report any Gifts to Third Parties that do not comply with the terms of the Gift.

4. Setiap Pegawai Bank harus melaporkan permintaan dari Pihak Ketiga yang menjurus kepada pemerasan dan/atau pemaksaaan yang terkait dengan kelancaran proses Bisnis Bank kepada Unit Kerja terkait untuk selanjutnya disampaikan kepada Divisi Kepatuhan.
5. Divisi Kepatuhan menyampaikan Lembar Penyerahan Penanganan Atas Pelaporan Penerimaan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
6. Divisi Kepatuhan menyampaikan Lembar Rekapitulasi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan yang dikelola setiap bulan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
7. Divisi Kepatuhan menyampaikan Laporan Rekapitulasi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan dan Pemberian Gratifikasi kepada Direksi setiap periode 3 (tiga) bulan.

Sarana Pelaporan Gratifikasi Dan Sejenisnya

Bank Sulteng menetapkan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi dan sejenisnya yaitu mencakup berbagai perilaku yang bertentangan dengan hukum, peraturan, dan kebijakan Perusahaan yang melibatkan pegawai baik individu atau kelompok yang secara sengaja ataupun tidak sengaja mengeksploitasi posisi dan kewenangan mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok, dengan potensi merugikan keuangan dan integritas Perusahaan.

Untuk memastikan bahwa Perusahaan beroperasi sesuai dengan standar etika yang tinggi dalam rangka menciptakan budaya yang transparan, mendukung integritas Perusahaan dan keberlanjutan operasionalnya, Perusahaan mengharapkan adanya dukungan dari publik untuk melaporkan tindakan pelanggaran hukum khususnya atas dugaan terjadinya korupsi, pemberian dan penerimaan gratifikasi dan penyuapan yang melibatkan Insan Perusahaan melalui sarana yang disediakan. Pelaporan indikasi atau potensi gratifikasi pada Insan Bank Sulteng dapat disampaikan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi melalui Sistem Pelaporan Gratifikasi, dan ditujukan kepada:

Unit SMAP & *Whistleblower:*
- Divisi Satuan Kerja Kepatuhan Kantor Pusat Bank Sulteng Jl. Sultan Hasanuddin No. 20 Palu, Sulawesi Tengah
- *Website* Perusahaan melalui kanal *Whistle Blowing System* (WBS)
- *E-mail: whistleblower*@banksulteng.co.id
- *Whatsapp & SMS:* +62 821 8865 2228

4. Every Bank Employee must report any requests from Third Parties that constitute extortion and/or coercion related to the smooth running of the Bank's business processes to the relevant Work Unit, for subsequent submission to the Compliance Division.
5. The Compliance Division submits a Handling Handling Reporting Handling Sheet to the Corruption Eradication Commission.
6. The Compliance Division submits a Monthly Recapitulation of Handling and Follow-Up Reporting of Receipts to the Corruption Eradication Commission.
7. The Compliance Division submits a Summary Report on the Handling and Follow-up of Reports on the Receipt and Provision of Gratuities to the Board of Directors every three months.

Reporting Facilities for Gratuities and Similar Offenses

Bank Sulteng defines actions that can be categorized as corruption and similar offenses as encompassing various behaviors that violate laws, regulations, and Company policies, involving employees, either individuals or groups, who intentionally or unintentionally exploit their positions and authority for personal or group gain, potentially harming the Company's finances and integrity.

To ensure that the Company operates in accordance with high ethical standards, fostering a culture of transparency, supporting the Company's integrity and the sustainability of its operations, the Company seeks public support in reporting violations of the law, particularly allegations of corruption, the giving and receiving of gratuities, and bribery involving Company personnel, through the provided channels. Reports of indications or potential gratification of Bank Sulteng personnel can be submitted to the Gratification Control Unit through the Gratification Reporting System and addressed to:

SMAP & Whistleblower Unit:
- Compliance Work Unit Division, Bank Sulteng Head Office Jl. Sultan Hasanuddin No. 20, Palu, Central Sulawesi
- Company Website via Whistleblowing System (WBS)
- Email: whistleblower@banksulteng.co.id
- WhatsApp & SMS: +62 821 8865 2228

Sanksi Pelanggaran

Bank Sulteng memastikan akan memberi sanksi atas pelanggaran kebijakan Perusahaan sesuai dengan tingkat kesalahannya, ketentuan mengenai sanksi ini bersifat mengikat sebagai bagian dari Kode Etik dan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik. Sanksi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut ditetapkan dalam Kebijakan Kepegawaian yang berlaku.

Sosialisasi & Edukasi

Untuk membangun budaya yang berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik maka Unit SMAP & *Whistleblower* secara rutin melakukan sosialisasi gratifikasi dan sejenisnya yang dilakukan berkelanjutan baik internal maupun eksternal kepada mitra usaha Bank Sulteng. Sosialisasi dilakukan dengan menggunakan media seperti poster atau *leaflet*, melalui pengiriman *E-mail Blast, Screen Saver*, pembuatan lemari pajang barang gratifikasi dan himbauan kepada seluruh rekanan/mitra kerja Bank untuk tidak memberikan gratifikasi terkait perayaan keagamaan, hari raya, dan tahun baru melalui surat atau media surat kabar lokal maupun nasional.

Laporan Gratifikasi

Sepanjang tahun 2025, Bank Sulteng tidak menerima laporan tindakan korupsi, gratifikasi, Penyuapan yang dilakukan oleh Insan Perusahaan yang dilaporkan melalui sarana yang disediakan.

Sanctions for Violations

Bank Sulteng ensures that sanctions will be imposed for violations of Company policies according to the severity of the offense. The provisions regarding these sanctions are binding as part of the Code of Ethics and the implementation of Good Governance principles. Sanctions for violations of these provisions are stipulated in the applicable Personnel Policy.

Socialization & Education

To build a culture based on the principles of Good Governance, the SMAP & Whistleblower Unit routinely conducts ongoing outreach on gratuities and similar forms, both internally and externally, to Bank Sulteng's business partners. This outreach is conducted through media such as posters or leaflets, email blasts, screensavers, the creation of display cabinets displaying gratuities, and by appealing to all Bank partners/colleagues not to provide gratuities related to religious celebrations, holidays, and New Year's through letters or local or national newspapers.

Gratuity Report

Throughout 2025, Bank Sulteng received no reports of corruption, gratuities, or bribery committed by Company personnel, reported through the provided channels.

PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN *INSIDER TRADING*

Insider trading merupakan praktik memperoleh informasi rahasia tentang suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi harga saham, dan menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi dengan cara membeli atau menjual saham perusahaan tersebut.

Bank Sulteng bukan merupakan Perusahaan yang dimiliki oleh Publik sehingga belum secara khusus menetapkan kebijakan terkait *Insider trading*, namun secara umum penjelasan tentang kebijakan tersebut dapat ditemui antara lain dalam Pedoman Etika Perusahaan dan kebijakan terkait Benturan Kepentingan. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi mengenai kebijakan terkait *insider trading* dikarenakan Perusahaan merupakan perusahaan yang sahamnya tidak diperjualbelikan.

INSIDER TRADING POLICY DISCLOSURE

Insider trading is the practice of obtaining confidential information about a company that could affect its stock price and using that information for personal gain by buying or selling the company's shares.

Bank Sulteng is not a publicly traded company and therefore has not specifically established a policy regarding insider trading. However, a general explanation of this policy can be found, among other things, in the Company's Ethics Guidelines and the Conflict of Interest policy. Therefore, there is no information regarding the insider trading policy, as the Company is a non-tradable company.

PAKTA INTEGRITAS

Setiap Insan Bank diwajibkan untuk membuat dan menandatangani Pakta Integritas yang dilakukan secara berkala setiap tahun. Pentingnya penerapan pakta integritas sebagai bagian komitmen dalam menjalankan pengurusan Perusahaan yang dilakukan secara penuh tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pakta Integritas akan dapat menghindari situasi apa pun yang mungkin menciptakan konflik antara kepentingan pribadi dan kepentingan Perusahaan.

Bank Sulteng memastikan setiap Insan Bank telah menandatangi pakta integritas dan berkomitmen sebagi berikut:

1. Senantiasa mematuhi Hukum dan Ketentuan-Ketentuan Peraturan perundang-Undangan.
2. Bertindak objektif dan berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.
3. Berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara amanah dan professional sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance)* guna memberikan hasil terbaik bagi Bank.
4. Tidak pernah dan tidak akan pernah membuat keputusan dan/atau memberikan perintah yang bertujuan akan memanfaatkan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menguntungkan saya secara pribadi, keluarga dan/atau golongan tertentu.
5. Berperan aktif dalam upaya pencegahan, pemberantasan *Fraud* serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadinya tindakan *Fraud* di lingkungan Bank dan tidak akan melakukan segala bentuk tindakan *Fraud* serta menghindarkan diri dari perbuatan yang mempermudah atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan tindakan *Fraud*.
6. Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
7. Tidak mempunyai jabatan lain pada Badan Usaha lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan Bank.
8. Akan mengajak pelaku-pelaku usaha yang berkaitan di Bank baik secara langsung maupun tidak langsung untuk juga melaksanakan Pakta Integritas, serta menyampaikan informasi kepada Bank tentang terjadinya dan ataupun indikasi adanya *Fraud*, pelanggaran atau perbuatan melawan hukum lain yang dilakukan oleh Penguru dan/atau Pekerja Bank.

INTEGRITY PACT

Every Bank employee is required to create and sign an Integrity Pact, which is carried out annually. Implementing an integrity pact is crucial as part of the commitment to managing the Company responsibly and in accordance with the principles of good corporate governance. The Integrity Pact will help avoid any situation that might create a conflict between personal interests and the interests of the Company.

Bank Sulteng ensures that every Bank employee has signed an integrity pact and commits to the following:

1. Always comply with laws and regulations.
2. Act objectively and adhere to ethical and moral values, being fair, transparent, and consistent, while upholding honesty and commitment.
3. Committed to carrying out duties and responsibilities in a trustworthy and professional manner in accordance with the principles of Good Corporate Governance to deliver the best results for the Bank.
4. I have never made and will never make decisions and/or issue orders aimed at exploiting the Bank, either directly or indirectly, to benefit myself, my family, and/or a particular group.
5. I will actively participate in efforts to prevent and eradicate fraud and will be willing to report any fraudulent activity within the Bank. I will not engage in any form of fraud and will refrain from actions that facilitate or provide opportunities for others to commit fraud.
6. I will create a work environment free from Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN).
7. Not holding any other position in another business entity that could create a direct or indirect conflict of interest with the Bank.
8. Will encourage business actors involved in the Bank, both directly and indirectly, to also implement the Integrity Pact and provide information to the Bank regarding the occurrence or indication of fraud, violations, or other unlawful acts committed by Bank Management and/or Employees.

9. Telah memahami dan bersedia untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya:
   a. Pedoman *Good Corporate Governance* Bank.
   b. Standar Etika Perusahaan.
   c. Budaya Perusahaan.
   d. Budaya Kepatuhan dan Budaya Risiko serta budaya Anti Fraud
   e. Demi tercapainya tata kelola perusahaan yang baik.

9. Has understood and is willing to implement to the best of his ability:
   a. The Bank's Good Corporate Governance Guidelines.
   b. The Company's Standards of Ethics.
   c. The Company's Culture.
   d. The Compliance Culture, Risk Culture, and Anti-Fraud Culture
   e. To achieve good corporate governance.

PERKARA HUBUNGAN INDUSTRIAL

Bank Sulteng memastikan tidak memiliki perkara yang berkaitan dengan hubungan industrial yang melibatkan pegawai dengan Perusahaan, setiap hal yang berkaitan dengan hubungan industrial telah dituangkan dalam Buku Peraturan Perusahaan. Apabila timbul perselisihan, Bank akan mengupayakan untuk dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya di tingkat satuan kerja Perusahaan dengan tetap mengacu pada ketentuan UU No. 13 tahun 2003 jo UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

INDUSTRIAL RELATIONS CASES

Bank Sulteng confirms that it has no industrial relations cases involving employees and the Company. All matters relating to industrial relations are outlined in the Company Regulations. If disputes arise, the Bank will endeavor to resolve them as best as possible at the Company's work unit level, while adhering to the provisions of Law No. 13 of 2003 in conjunction with Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation and Law No. 2 of 2004 concerning the Settlement of Industrial Relations Disputes.

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Permasalahan Hukum

Dalam menjalankan proses usahanya, Perusahaan mendapatkan permasalahan sebagai bagian dari proses bisnis yang dijalankan seperti adanya gugatan dari nasabah, dan Pada tahun 2025 terdapat permasalahan hukum yang dihadapi oleh Perusahaan berupa gugatan perdata dan pidana yang ditujukan kepada Perusahaan baik sebagai tergugat maupun penggugat.

Terhadap permasalahan hukum tersebut, Tim Hukum Perusahaan memetakan potensi permasalahan dan mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, Perusahaan dapat meminta pendapat hukum atau menunjuk kuasa hukum sebagai upaya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut baik secara litigasi maupun non litigasi sehingga nantinya dapat meminimalisir potensi kerugian yang kemungkinan didapat oleh Perusahaan.

MAJOR CASES FACED BY THE COMPANY

Legal Issues

In carrying out its business processes, the Company encounters issues as part of its business processes, such as lawsuits from customers. In 2025, the Company faced legal issues in the form of civil and criminal lawsuits filed against the Company, both as defendants and plaintiffs.

Regarding these legal issues, the Company's Legal Team maps out potential problems and seeks appropriate solutions to resolve the problems faced. The Company can request legal opinions or appoint legal counsel as an effort to resolve these issues either through litigation or non-litigation so that it can minimize potential losses that the Company may incur.

Perkara-Perkara Hukum Yang Dihadapi Perusahaan Tahun 2025
Legal Cases Facing Companies in 2025

Kasus Perdata
Civil Cases

No	Kasus Hukum Legal Case	Jangka Waktu Time Period	Tuntutan Demand	Perkembangan Kasus Case Developments	Keterangan Description
1.	Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum antara Yuliawati M. Yasin penggugat melawan Collis R. Alul (Tergugat I), Kantor Kas Bahomatefe (Tergugat II) dan PT. Bank Sulteng (Tergugat III) gugatan ini terkait deposito fiktif yang dilakukan oleh mantan kepala kas Bahomatefe (Collis R. Alui) Civil Lawsuit for Unlawful Acts between Yuliawati M. Yasin, plaintiff, against Collis R. Alul (Defendant I), Bahomatefe Cash Office (Defendant II) and PT. Bank Sulteng (Defendant III). This lawsuit is related to fictitious deposits made by the former head of Bahomatefe cash (Collis R. Alui).	2020-2025	Gugatan Perdata ini terdaftar dengan Nomor register perkara 108/PDT.G/2020/PN.PAL, tuntutan penggugat yaitu Para tergugat wajib mengembalikan dana deposito milik Yuliawti M Yasin yang mana kerugian materiil Rp 728.000.000 dan Rp. 187,000,000 serta kerugian Immateriil Rp 20.000.000.000 This civil lawsuit is registered with case registration number 108/PDT.G/2020/PN.PAL, the plaintiff's demand is that the defendants are required to return the deposit funds belonging to Yuliawti M Yasin, which have suffered material losses of IDR 728,000,000 and IDR 187,000,000 as well as immaterial losses of IDR 20,000,000,000.	Gugatan telah memperoleh putusan majelis Pengadilan Negeri Palu dengan putusan Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan sisa uang milik Penggugat sebesar Rp. 728.000.000 dan hilangnya keuntungan materiil dari bunga Bank selama 3 (tiga) tahun (sejak Mei 2017 s/d Mei 2020) sebesar Rp. 187.740.000 The lawsuit has obtained a verdict from the Palu District Court, ordering the Defendants to jointly and severally return the Plaintiff's remaining funds of Rp. 728,000,000 and the loss of material profits from bank interest for three years (from May 2017 to May 2020) amounting to Rp. 187,740,000. Gugatan teregister dengan nomor 56/PDT/2021/PT PAL dan telah memperoleh putusan majelis Pengadilan Tinggi Sulteng dengan putusan Menguatkan Putsan Pengadilan Negeri Palu 108/PDT.G/2020/PN.PAL The lawsuit is registered with number 56/PDT/2021/PT PAL and has obtained a decision from the Central Sulawesi High Court panel with a decision to confirm the decision of the Palu District Court 108/PDT.G/2020/PN.PAL. Gugatan teregister dengan nomor 1079 K/Pdt/2022 dan telah memperoleh putusan Tingkat Kasasi dengan putusan Menolak Permohonan Kasasi Collis R. Alul (Tergugat I), dan Tidak menerima permohonan kasasi Kantor Kas Bahomatefe (Tergugat II) dan PT. Bank Sulteng (Tergugat III) The lawsuit is registered with number 1079 K/Pdt/2022 and has obtained a decision at the Cassation Level with the decision to reject the Cassation Application of Collis R. Alul (Defendant I), and not accept the cassation application of Bahomatefe Cash Office (Defendant II) and PT. Bank Sulteng (Defendant III)	Penggugat Memohonkan Pelaksanaan Putusan secara tanggung renteng Kepada Para Tergugat melalui Anmaning dari Pengadilan Negeri Palu, adapun Nominal Pelaksanaan Putusan sebesar Rp915.740.000 The Plaintiff Requests Joint Enforcement of the Decision Against the Defendants through Anmaning from the Palu District Court, with the nominal amount of the Decision Enforcement amounting to IDR 915,740,000.
2.	Gugatan Sederhana antara Isnayati Padati (Penggugat) melawan PT. Bank Sulteng Cabang Kolonodale (Tergugat) Simple Lawsuit between Isnayati Padati (Plaintiff) against PT. Bank Sulteng Kolonodale Branch (Defendant)	2025	Gugatan Sederhana ini terdaftar dengan Nomor register perkara 4/Pdt.G.S/2025/PN Pso, tuntutan Penggugat yaitu Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan wajib mengembalikan kerugian materiil sejumlah Rp129.967.179 serta kerugian immateriil sejumlah Rp365.000.000 This simple lawsuit is registered with case registration number 4/Pdt.G.S/2025/PN Pso, the Plaintiff's claim is that the Defendant has committed an act of breach of contract and is obliged to return material losses amounting to Rp. 129,967,179 and immaterial losses amounting to Rp. 365,000,000.	Pelaksanaan Persidangan telah dimulai sejak tanggal 14 Juli 2025, Gugatan ini telah memperoleh Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 21 Agustus 2025 dan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ditolak The trial has commenced on July 14, 2025. This lawsuit has received a decision from the Panel of Judges at the Poso District Court on August 21, 2025 and the Plaintiff's lawsuit cannot be accepted/rejected.	

Kasus Pidana
Criminal Case

No	Kasus Hukum	Jangka Waktu	Permasalahan	Perkembangan Kasus	Keterangan
1.	Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Rio Kartono (mantan Pemimpin Seksi Kredit Cabang Kolonodale) sesuai surat Laporan Informasi Nomor R/ LI/19/II/RES.26/2023/ Ditreskrimsus tanggal 24 Februari 2023 Alleged Money Laundering by Rio Kartono (former Head of the Credit Section of the Kolonodale Branch) according to Information Report Number R/ LI/19/II/RES.26/2023/ Ditreskrimsus dated February 24, 2023.	2023-2025	Permasalahan ini merupakan tindaklanjut dari pidana perbankan yang telah dilakukan sdr Rio Kartono (mantan Pemimpin Seksi Kredit Cabang Kolonodale) yang mana setelah dilakukan penelitian dan dimohonkan informasi transaksi keuangan milik sdr Rio Kartono di kantor PPATK ditemukan beberapa aliran dana yang dianggap mencurigakan pada rekening sdr Rio Kartono This case is a follow-up to a banking crime committed by Rio Kartono (former Head of the Credit Section of the Kolonodale Branch). After conducting an investigation and requesting information on Rio Kartono's financial transactions at the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), several suspicious cash flows were discovered in his account.	- Kasus ini telah memperoleh putusan Pengadilan Negeri Poso dengan amar putusan menyatakan sdr. Rio Kartono terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dan dipidana penjara selama 5 tahun subsidair Rp10.000.000.000 The Poso District Court has ruled in this case, declaring Mr. Rio Kartono guilty of money laundering and sentenced him to five years' imprisonment, or a fine of Rp 10,000,000,000.	asset yang telah terkonfirmasi saat ini antara lain ; 1 Unit Rumah di Daerah Silae Kota Palu, tanah beserta kandang ayam petelur didaerah Poona dgn luas kurang lebih +2000 m2 The assets currently confirmed include a house in the Silae area of Palu City, and land and a chicken coop in the Poona area, covering an area of approximately 2,000 m2.
2.	Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Pelanggaran Sektor Jasa Keuangan Sesuai Surat Laporan Polisi Nomor : Aduan/564/ XI/2023/Sulteng/Res. Banggai tanggal 07 Nopember 2023 Report of Alleged Financial Services Sector Violations According to Police Report Number: Aduan/564/XI/2023/ Sulteng/Res. Banggai dated November 7, 2023.	2023-2025	Permasalahan ini merupakan hasil aduan timbul dari Pengaduan Nasabah an. Rusman yang merasa keberatan atas hilangnya uang pada rekening an. Rusman di Kantor Cabang Utama sebesar Rp. 89.000.000 This case stems from a complaint filed by a customer named Rusman, who complained about the disappearance of Rp 89,000,000 from his account at the Main Branch Office.	- Berdasarkan hasil audit internal Divisi SKAI diketahui telah terjadi penarikan dana milik sdr Rusman di Kantor Cabang Luwuk yang mana penarikannya dilakukan oleh mantan pegawai Ita Permata Ali, sehingga menindaklanjuti pengaduan tersebut melalui Bagian Hukum telah mengudakan tindakan mantan pegawai Ita Permata Ali ke Polres Banggai Based on an internal audit by the Internal Audit Division, it was discovered that Mr. Rusman's funds were withdrawn from the Luwuk Branch Office by a former Ita Permata Ali employee. Following up on the complaint, the Legal Department has filed a report with the Banggai Police regarding the actions of the former Ita Permata Ali employee.	Kasus ini masih dalam tahap penyeledikan dan penyidik kembali meminta keterangan dari Pihak Nasabah an Rusman, Teller, Head Teller Cabang Luwuk, dan pihak terlapor sdri Ita Permata Ali This case is still under investigation, and investigators are again requesting information from the customer, Rusman, the teller, the Head Teller at the Luwuk Branch, and the accused, Ita Permata Ali.
3.	Laporan Pengaduan sdr Moh. Darwis sesuai Surat Polisi Nomor B/205/III/ RES.1.24/2025/ Direskrimsus tanggal 21 Februari 2025 Complaint Report by Moh. Darwis according to Police Report Number B/205/III/RES.1.24/2025/ Direskrimsus dated February 21, 2025.	2025	Permasalahan ini merupakan hasil aduan saudara Moh Darwis Sebagai Direktur CV. Citra Rajawali yang merasa keberatan atas penarikan dana yang ditarik tanpa sepengetahuan Direktur CV. Citra Rajawali, permasalah tersebut terjadi di cabang Utama pada tanggal20 Desember melalui 2 buah Cek dengan nilai masing-masing Rp920.000.000 dan Rp86.760.470 This case stems from a complaint filed by Moh Darwis, Director of CV Citra Rajawali, who complained about the withdrawal of funds without the Director's knowledge. The case occurred at the Main Branch on December 20th, using two checks for Rp 920,000,000 and Rp 86,760,470, respectively.	- Kasus ini telah dinyatakan bukan merupakan tindak pidana, dan saat ini menunggu surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari Kepolisian This case has been declared not a crime, and we are currently awaiting a Notification of Investigation Progress from the Police.	

No	Kasus Hukum	Jangka Waktu	Permasalahan	Perkembangan Kasus	Keterangan
4.	Laporan Informasi Nomor LI/I/ RES.2.2/2025 Ditreskrimsus tanggal 09 januari 2025 terkait dugaan pelanggaran dalam proses pemberian Kredit kepada CV. Sumber Daya Baru Information Report Number LI/I/ RES.2.2/2025 from the Directorate of Special Criminal Investigation dated January 9, 2025, regarding alleged violations in the credit granting process to CV. Sumber Daya Baru.	2025	Permasalahan ini merupakan hasil pengembangan pihak Kepolisian yang menduga adanya proses permohonan kredit yang diajukan oleh Juninson Pasongli sebagai Direktur CV. Sumber Daya Baru dengan menggunakan Kontrak Fiktif This case is the result of a police investigation, which suspected that Juninson Pasongli, the Director of CV. Sumber Daya Baru, used a fictitious contract to process a credit application.	- Kasus ini telah naik status ke tahap penyidikan dan telah menetapkan status salah satu karyawan PT. Bank Sulteng sebagai tersangka (Deni Taiso) This case has been escalated to the investigation stage, and one of PT. Bank Sulteng's employees (Deni Taiso) has been named a suspect.	
5.	Laporan Polisi Nomor B/625/V/ RES.2.2/2025/ Ditreskrimsus tanggal 27 Mei 2025 Police Report Number B/625/V/RES.2.2/2025/ Ditreskrimsus dated May 27, 2025	2025	Permasalahan ini merupakan pengaduan PT. Teknik Alum Servis (PT. TAS) di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, terkait penarikan dana yang dianggap tidak sesuai prosedur sebesar Rp4.600.000.000,- penarikan dilakukan oleh saudara maulana yang merupakan kuasa Direktur, bahwa menurut pihak PT. TAS pada bulan september 2024 - oktober 2024 PT.TAS telah memohonkan kepada PT.Bank Sulteng Cabang Utama untuk melakukan perubahan kuasa direktur dari saudara maulana kepada saudara lucy, sehingga pendapat PT. TAS penarikan dana yang dilakukan maulana tidak sah. This case is a complaint filed by PT. Teknik Alum Servis (PT. TAS) with the Central Sulawesi Regional Police regarding a withdrawal of Rp 4,600,000,000 deemed unprocedural. The withdrawal was made by Maulana, the Director's attorney. According to PT. TAS, between September and October 2024, PT. TAS requested that the Main Branch of PT. Bank Sulteng change the director's attorney from Maulana to Lucy. Therefore, PT. TAS considers Maulana's withdrawal invalid.	- Kasus ini telah naik status ke tahap penyidikan dan telah mengahadirkan kembali pihak Head CS, CS, Teller, funding, Wakil Pimpinan Cabang Utama, untuk memberikan keterangan This case has been escalated to the investigation stage and the Head of Customer Service, Customer Service, Teller, Funding, and Deputy Branch Manager have been brought back to provide testimony.	
6.	Pelaporan Dugaan tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Sesuai Surat Laporan Polisi Nomor : LP-B/183/ VIII/2024/SPKT/ Polda Sulteng tanggal 20 Agustus 2024 Report of Alleged Fraud and Embezzlement According to Police Report Number: LP-B/183/VIII/2024/SPKT/ Polda Sulteng dated August 20, 2024.	2023-2025	Permasalahan ini terkait penarikan dana yang tidak dilakukan oleh Nasabah Cabang Bungku an Abd. Rasul dan Cabang Donggal Hamka Baharuddin This issue relates to withdrawals of funds not made by customers at the Bungku an Abd. Rasul Branch and the Donggal Hamka Baharuddin Branch.	- Pihak Polda Sulteng menindaklanjuti laporan Polisi dengan menghadirkan pihak Bank Sulteng yang memproses penarikan dana yang dilakukan oleh orang yang mengaku sebagai Abdul Rasul dan Hamka Baharuddin pada cabang Tawaeli dan cabang Tolai The Central Sulawesi Regional Police followed up on the police report by presenting representatives from Bank Sulteng, who processed the withdrawals made by individuals claiming to be Abdul Rasul and Hamka Baharuddin at the Tawaeli and Tolai branches.	Orang yang mengaku sebagai Abdul Rasul dan Hamka Baharuddin saat ini dalam proses penetapan DPO dari Pihak Polda Sulteng The individuals claiming to be Abdul Rasul and Hamka Baharuddin are currently on the wanted list by the Central Sulawesi Regional Police.

No	Kasus Hukum	Jangka Waktu	Permasalahan	Perkembangan Kasus	Keterangan
7.	Dugaan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan dengan nomor perkara 142/Pid.Sus/2025/PN Pal an. Nola Dien Novita & Rizal Afriansyah dan nomor perkara 143/Pid.Sus/2025/PN Pal an. Darsyaf Agus Slamet Alleged Financial Services Crimes, case number 142/Pid.Sus/2025/PN Pal, in the name of Nola Dien Novita & Rizal Afriansyah, and case number 143/Pid.Sus/2025/PN Pal, in the name of Darsyaf Agus Slamet.	2025	Permasalahan ini terkait pemberian kredit kepada CV. Mugniy Alamgir dimana terdapat dugaan sebagian dana pencairan kredit digunakan untuk menutupi Bank Garansi PT. Insan Citra Karya This case relates to the granting of credit to CV. Mugniy Alamgir, where it is alleged that some of the loan disbursement funds were used to cover the bank guarantee of PT. Insan Citra Karya.	- Kasus ini telah memperoleh putusan Pengadilan Negeri Palu dengan amar putusan menyatakan ketiga karyawan PT.Bank Sulteng diputus dengan pidana penjara selama 3 tahun subsidair Rp5.000.000.000 (2 bulan) The Palu District Court has ruled in this case, with the verdict declaring that the three employees of PT. Bank Sulteng were sentenced to three years' imprisonment, with a subsidiary fine of Rp5,000,000,000 (2 months).	Kasus ini sedang dalam tahapan banding di Pengadilan Tinggi Sulteng This case is currently under appeal at the Central Sulawesi High Court.

Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris Dan Direksi Yang Sedang Menjabat

Selama tahun 2025, Bank memastikan tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris Perusahaan. Demikian juga Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank yang sedang menjabat tidak pernah tersangkut atau terlibat dalam suatu kasus dan/atau perselisihan perdata dan/atau pidana.

Perkara Penting di Luar Perkara Hukum

Hingga akhir tahun 2025, Bank tidak menemukan adanya perkara penting di luar perkara hukum yang melibatkan Perusahaan, Dewan Komisaris maupun Direksi

Current Legal Cases Faced by the Board of Commissioners and Current Directors

Throughout 2025, the Bank ensured that no administrative sanctions were imposed on any members of the Board of Directors or the Board of Commissioners. Likewise, all current members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Bank were never involved in any civil and/or criminal cases and/or disputes.

Major Cases Outside of Legal Cases

As of the end of 2025, the Bank had no significant cases outside of legal cases involving the Company, the Board of Commissioners, or the Board of Directors.

SANKSI ADMINISTRATIF

Sepanjang tahun 2025, Bank mendapatkan sanksi administratif yang dikenakan kepada Perusahaan oleh Regulator berupa denda yang diakibatkan pada umumnya terkait keterlambatan penyampaian laporan kepada lembaga otoritas. Adapun jumlah sanksi dan jumlah denda yang dikenakan kepada Perusahaaan pada tahun 2025 yaitu sebesar Rp348.079.319,- dengan rincian Rp700.000,- dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Rp347.379.319,- dikenakan oleh Bank Indonesia.

ADMINISTRATIVE SANCTIONS

Throughout 2025, the Bank received administrative sanctions imposed on the Company by the Regulator in the form of fines, generally related to late submission of reports to the authorities. The total sanctions and fines imposed on the Company in 2025 amounted to Rp348,079,319, with a breakdown of Rp700,000 imposed by the Financial Services Authority and Rp347,379,319 imposed by Bank Indonesia.

TRANSPARANSI PENYAMPAIAN LAPORAN

Bank Sulteng senantiasa patuh terhadap kewajiban penyampaian laporan baik yang bersifat wajib maupun sukarela mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang diatur di internal Perusahaan serta dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tatacara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan transparansi kondisi keuangan

TRANSPARENCY IN REPORTING

Bank Sulteng consistently complies with its mandatory and voluntary reporting obligations, in accordance with applicable laws and regulations and internal company policies, and reports in accordance with applicable regulations.

The Bank prepares and presents reports in accordance with the procedures, types, and scopes stipulated in the transparency provisions for financial and non-financial

dan non keuangan yang mengacu pada ketentukan Otoritas Jasa Keuangan. Secara umum sebagai bentuk transparansi Informasi keuangan dan non keuangan Bank telah dipublikasikan secara transparan melalui *website* Perusahaan, https://www.banksulteng.co.id/

Perusahaan menyajikan berbagai macam laporan terkait Perusahaan baik Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dan Laporan Keuangan Konsolidasi serta terkait informasi produk dan layanan dan kegiatan-kegiatan operasional Perusahaan kepada publik dan juga regulator yang dilaporkan secara manual maupun melalui aplikasi elektronik .

AKSES DATA DAN INFORMASI PERUSAHAAN

Bank Sulteng telah menyediakan berbagai sarana guna mempermudah akses bagi publik dalam mendapat informasi dan data yang dibutuhkan yang dapat dilakukan secara manual dengan permintaan tertulis atau melalui sarana elektronik yang dapat diakses secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana.

Penyediaan akses informasi menjadi komitmen Perusahaan dalam rangka memberikan kemudahan layanan kepada para pemangku kepentingan. Adapun akses informasi dan data yang diperlukan dapat dilakukan melalui beberapa media saluran yang disediakan, yaitu:

- ***Website* Bank Sulteng**
  Memuat beragam informasi terkait Perusahaan antara lain memuat informasi Profil Perusahaan, Produk dan layanan, Jaringan Kantor, Hubungan Investor, Pemegang Saham, struktur organisasi, Profil Dewan Komisaris Dan Direksi, Laporan Keuangan, Analisa Kinerja Keuangan, Laporan tata Kelola Perusahaan, CSR dan Kontak Perusahaan.

- ***Call Center* Bank Sulteng**
  Hotline 14069
  Bank Sulteng memberi kemudahan dan kecepatan dalam merespon kebutuhan dan pengaduan nasabah, *call center* yang disediakan dapat menjawab kebutuhan data dan informasi terkait produk dan layanan Bank Sulteng,termasuk memberi solusi terhadap pengaduan jika terjadi peristiwa yang tidak di inginkan.

conditions, which are regulated by the Financial Services Authority (OJK). As a form of transparency, the Bank's financial and non-financial information is published transparently on the Company's website, https://www.banksulteng.co.id/

The Company presents various reports related to the Company, including Annual Reports, Quarterly Published Financial Reports, Monthly Published Financial Reports, and Consolidated Financial Reports, as well as information on products and services and operational activities to the public and regulators, both manually and electronically.

COMPANY DATA AND INFORMATION ACCESS

Bank Sulteng has provided various facilities to facilitate public access to necessary information and data. This can be done manually with a written request or through electronic means, which can be accessed quickly, timely, at a low cost, and in a simple manner.

Providing access to information is the Company's commitment to providing easy service to stakeholders. Access to necessary information and data can be done through several channels, including:

- **Bank Sulteng Website**
  Contains a variety of information related to the Company, including information on the Company Profile, Products and Services, Office Network, Investor Relations, Shareholders, organizational structure, Board of Commissioners and Directors Profiles, Financial Reports, Financial Performance Analysis, Corporate Governance Reports, CSR, and Company Contacts.

- **Bank Sulteng Call Center**
  Hotline 14069
  Bank Sulteng provides easy and fast response to customer needs and complaints. The call center can answer data and information needs related to Bank Sulteng products and services, including providing solutions to complaints in the event of an unexpected event.

- **Kantor Bank Sulteng**
  CP. *Corporate Secretary*, melalui:
  Alamat Kantor : Jl. Sultan Hasanuddin No. 20 Palu - Sulawesi Tengah 94111
  E-Mail : corsec@banksulteng.co.id

  Masyarakat dan nasabah dapat menghubungi *Corporate Secretary* sebagai saluran satu pintu untuk mendapatkan akses data-data Perusahaan.

- **Media Sosial**
  Instagram : PT. BANK SULTENG (@BankSulteng)
  Twitter : Bank Sulteng (@BankSulteng)
  Facebook : Bank Sulteng
  Youtube : official Bank Sulteng
  Media sosial tersebut merupakan media sosial resmi yang dikelola oleh Perusahaan yang memuat banyak informasi terkait produk dan layanannya.

- **Media lainnya**
  Publik dapat juga mengakses informasi melalui media lainnya yang disedia oleh Perusahaan berupa Siaran Pers, konferensi pers, poster dan *banner*.

TRANPARANSI PRAKTIK BAD CORPORATE GOVERNANCE

Sejalan dengan komitmen Bank Sulteng dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan sedapat mungkin menghindari praktik-praktik *bad corporate governance*. Perusahaan berkomitmen untuk tidak melakukan segala tindakan serta kebijakan yang berkaitan dengan praktik *bad corporate governance* dan oleh karenanya Perusahaan senantiasa berupaya untuk menerapkan tata kelola perusahaan secara konsisten dan sistematis dengan mengacu pada standar-standar yang berlaku serta praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan Perusahaan.

Sebagai bentuk tranparansi, berikut adalah pengungkapan mengenai tindakan yang terkait dengan praktik kurang baik dalam tata kelola perusahaan *(bad corporate governance)*, yaitu:

- **Bank Sulteng Office**
  CP. Corporate Secretary, through:
  Office Address: Jl. Sultan Hasanuddin No. 20 Palu - Central Sulawesi 94111
  E-Mail: corsec@banksulteng.co.id

  The public and customers can contact the Corporate Secretary as a one-stop shop for access to Company data.

- **Social Media**
  Instagram: PT. BANK SULTENG (@BankSulteng)
  Twitter: Bank Sulteng (@BankSulteng)
  Facebook: Bank Sulteng
  YouTube: official Bank Sulteng
  These social media platforms are officially managed by the Company and contain a wealth of information regarding its products and services.

- **Other Media**
  The public can also access information through other media provided by the Company, such as press releases, press conferences, posters, and banners.

TRANSPARENCY OF BAD CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES

In line with Bank Sulteng's commitment to implementing good corporate governance, the Company avoids bad corporate governance practices to the fullest extent possible. The Company is committed to refraining from any actions or policies related to bad corporate governance practices. Therefore, the Company consistently strives to implement corporate governance in a consistent and systematic manner, adhering to applicable standards and best practices in corporate management.

As a form of transparency, the following disclosures relate to actions related to poor corporate governance practices:

No.	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation
1.	Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan Reports of environmental pollution	Tidak No
		Perusahaan memperhatikan aspek lingkungan dan menjadi bagian penting dalam pengelolaan Perusahaan The company considers environmental aspects to be an important part of its management.
2.	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan Important matters currently being faced by the company, subsidiaries, current members of the Board of Directors, and/or members of the Board of Commissioners are not disclosed in the Annual Report	Tidak No
		Perusahaan telah mengungkapkan informasi yang terkait perkara penting yang dihadapi oleh Perusahaan. The company has disclosed information related to significant issues faced by the company.
3.	Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan Non-compliance with tax obligations	Tidak No
		Perusahaan mematuhi kewajiban perpajakan termasuk penyampaian laporan perpajakan. The company complies with tax obligations, including the submission of tax reports.
4.	Ketidaksesuaian penyajian laporan tahunan dan laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK Discrepancies in the presentation of the annual report and financial statements with applicable regulations and Indonesian Financial Accounting Standards (SAK)	Tidak No
		Perusahaan menyajikan laporan tahunan dan laporan keuangan yang disusun sesuai SAK. The company presents annual reports and financial statements prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK).
5.	Pelanggaran hukum yang berkaitan dengan masalah perburuhan/ ketenagakerjaan Violations of laws related to labor/employment issues	Tidak No
		Perusahaan tidak melakukan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan perburuhan/ ketenagakerjaan. The company has not violated any labor/employment laws.
6.	Terdapat ketidaksesuaian antara Laporan Tahunan hardcopy dengan Laporan Tahunan softcopy Discrepancies between the hardcopy Annual Report and the softcopy Annual Report	Tidak No
		laporan tahunan yang dibuat dan disajikan sudah sesuai baik laporan tahunan yang dicetak maupun dalam bentuk softcopy. The annual report prepared and presented is in accordance with both the printed and softcopy annual reports.





Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL)

Bank Sulteng menyadari bahwa perlunya hubungan yang harmonis antara Bank dan *stakeholder*, dimana keterlibatan *stakeholder* membantu Bank mencapai tujuan keberlanjutan, sementara praktik keberlanjutan Bank memberikan nilai tambah bagi para *stakeholder*. Dalam hal ini, Bank Sulteng turut mendorong terwujudnya keselarasan dan keharmonisan antara kegiatan bisnis dengan lingkungan dan masyarakat yang berada di sekitar lingkungan Perusahaan.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu bagian dari kegiatan Perusahaan. Implementasi kegiatan CSR dan kinerja bisnis bersinergi dan sangat berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dengan demikian, maka dapat meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang berdampak positif bagi Perusahaan dan masyarakat.

Implementasi kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan manifestasi dari partisipasi dan kepedulian Bank dalam mendukung program pemerintah, masyarakat dan lingkungan kerja Bank. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk program filantropi perusahaan (*corporate philanthrophy*), pengembangan masyarakat (*community development*), pengembangan kewirausahaan (*enterpreuneurship development*), *reengineering value chain* dan pemasaran kemasyarakatan korporat (*corporate societal marketing*), program kemitraan Bank Sulteng yang merupakan program pembangunan ekonomi berkelanjutan (*sustainable*) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang berkelanjutan.

Maksud dan Tujuan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan menjadi salah satu bagian yang telah disusun untuk melaksanakan proses perencanaan, pengelolaan, evaluasi dan perbaikan program atas program-program tanggung jawab sosial. Program ini ditetapkan untuk memperkuat reputasi, persepsi dan citra perusahaan *(corporate image)* dalam rangka menunjang kelancaran operasional perusahaan, menjamin keberlanjutan *(sustainability)* dan pertumbuhan *(growth)* yang seimbang antara kinerja Bank Sulteng, lingkungan dan masyarakat.

Maksud dan tujuan yang ingin dicapai atas pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan antara lain:

Corporate Social Responsibility (CSR) Policy

Bank Sulteng recognizes the necessity of a harmonious relationship between the Bank and its stakeholders, where stakeholder engagement assists the Bank in achieving sustainability goals, while the Bank's sustainability practices provide added value to the stakeholders. In this regard, Bank Sulteng also encourages the realization of alignment and harmony between business activities and the environment and communities surrounding the Company's operational areas.

Corporate Social and Environmental Responsibility (CSER) or Corporate Social Responsibility (CSR) is an integral part of the Company's activities. The implementation of CSR activities and business performance are synergistic and play a vital role in sustainable economic development. Thus, it can improve the quality of life and the environment, which brings positive impacts to the Company and the community.

The implementation of the corporate social and environmental responsibility activities is a manifestation of the Bank's participation and concern in supporting the programs of the government, the community, and the Bank's working environment. These activities are carried out in the form of corporate philanthropy programs, community development, entrepreneurship development, reengineering value chain, and corporate societal marketing, as well as Bank Sulteng's partnership program, which is a sustainable economic development program aimed at improving the quality of life and fostering a sustainable environment.

Purpose and Objectives of the Corporate Social Responsibility Program

The implementation of the corporate social responsibility program serves as an integral component established to execute the planning, management, evaluation, and improvement processes of social responsibility programs. This program is established to strengthen the corporate reputation, perception, and corporate image in order to support the smooth operation of the company, ensuring sustainability and balanced growth among Bank Sulteng's performance, the environment, and the community.

The purpose and objectives to be achieved from the implementation of the corporate social responsibility program include:

1. Merupakan wujud kepedulian sosial Perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.
2. Menciptakan hubungan saling menunjang antara Perusahaan dengan masyarakat sekitar agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di lingkungan wilayah kerja Perusahaan serta terwujudnya ekonomi kerakyatan tanpa mengabaikan peran usaha dari Perusahaan.
3. Membantu masyarakat setempat yang berlokasi di sekitar Perusahaan melalui program-program tanggung jawab sosial Perusahaan dan lingkungan yang dibuat.

Kebijakan Umum Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Dalam implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan sebagai wujud dan partisipasi nyata melalui pendekatan *creating shared value,* maka Bank Sulteng telah menetapkan kebijakan umum sebagai berikut:

1. Bisnis tumbuh berkesinambungan di lingkungan yang kondusif.
2. Entitas berkepentingan meningkatkan kualitas sosial dan lingkungan yang bersentuhan dengan bisnis intinya.
3. Pendekatan strategis untuk memastikan kesinambungan bisnis bersinergi dengan *stakeholder.*
4. Bagian strategi bisnis, selaras dengan visi, misi, dan *value,* berkontribusi pada bisnis berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip keuangan berkelanjutan.

Penggunaan dan pemberian dana CSR harus bersifat layak, patut, wajar, sesuai kemampuan Bank dan anggaran yang tersedia. Pengelolaan dana CSR harus dikelola secara akuntabilitas, transparansi, berperilaku etis, memperhatikan *stakeholder,* mematuhi hukum, menghormati perilaku norma-norma masyarakat, menghargai hak asasi manusia yang penuh kehati-hatian dan berdasarkan pada azas manfaat dan tepat guna bagi masyarakat luas serta prinsip *good corporate governance.*

Dana CSR Bank Sulteng disisihkan dari laba bersih Bank dengan jumlah dalam persentase tertentu dari laba bersih Bank Sulteng yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setiap tahunnya dengan pola penyaluran sebagai berikut:

- Diserahkan ke rekening yang ditunjuk oleh para Pemegang Saham, yang mana pengelolaan kegiatan dan anggaran diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing Pemegang Saham.

1. As a manifestation of the Company's social concern for the surrounding community and environment.
2. To create a mutually supportive relationship between the Company and the surrounding community in order to improve the community's living standards within the Company's operational areas and realize a populist economy without disregarding the Company's business role.
3. To assist the local communities located around the Company through the established corporate social and environmental responsibility programs.

General Policy for the Implementation of the Corporate Social Responsibility Program

In implementing the corporate social responsibility program as a tangible manifestation of participation through a creating shared value approach, Bank Sulteng has established the following general policies:

1. The business grows sustainably in a conducive environment.
2. Interested entities improve social and environmental quality that intersects with their core business.
3. A strategic approach to ensure business sustainability synergizes with stakeholders.
4. As part of the business strategy, aligned with the vision, mission, and values, contributing to sustainable business by prioritizing sustainable finance principles.

The utilization and provision of CSR funds must be feasible, proper, reasonable, in accordance with the Bank's capacity, and within the available budget.
The management of CSR funds must be administered with accountability, transparency, ethical behavior, stakeholder consideration, legal compliance, respect for community norms, and human rights, applying strict prudence, and based on the principles of utility and effectiveness for the wider community as well as good corporate governance principles.

Bank Sulteng's CSR funds are allocated from the Bank's net profit at a certain percentage, which is decided in the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) each year, with the following distribution patterns:

- Transferred to accounts designated by the Shareholders, wherein the management of activities and budget is entirely delegated to the respective Shareholders.

- Pengelolaan kegiatan dan anggarannya diserahkan ke Bank yaitu yang dianggarkan dalam Rencana Bisnis dan RKAT Bank atau diputuskan oleh RUPS untuk dikelola Bank.

Dana CSR yang pengelolaan kegiatan dan anggarannya diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing Pemegang Saham, maka program-program TJSLP/CSR akan ditentukan oleh masing-masing Pemegang Saham.

Dana CSR yang pengelolaan kegiatan dan anggarannya diserahkan ke Bank maka program-program TJSLP/CSR yang berupa program sosial kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan lingkungan serta internal dan eksternal Bank.

Landasan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Bank Sulteng telah melaksanakan program-program terkait tanggung jawab sosial perusahaan dengan berdasarkan peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku serta disesuaikan dengan *best practice.*

Acuan dan kebijakan Bank Sulteng dalam mengimplementasikan praktik-praktik tanggung jawab sosial Perusahaan sebagai berikut:

- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah.
- Pedoman ISO 26000.

Uraian lebih lanjut dari ketentuan-ketentuan tersebut tertuang dalam panduan teknis pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang disusun dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 67/SK-DIR/BPD-ST/2025 tanggal 06 Maret 2025 tentang Perubahan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan *(Corporate Social Responsibility*/CSR) PT. Bank Sulteng Tahun 2025.

Pedoman Kebijakan dan Prosedur Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bertujuan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan yang dilakukan dalam implementasi programnya berjalan secara efektif dan efisien serta dapat mengantisipasi berbagai situasi *stakeholder* yang dinamis, tetapi terkendali dan konsisten.

- The management of activities and budgets is delegated to the Bank, meaning it is budgeted within the Bank's Business Plan and RKAT (Company Work Plan and Budget) or decided by the AGMS to be managed by the Bank.

For CSR funds where the management of activities and budgets is entirely delegated to the respective Shareholders, the CSR programs will be determined by each Shareholder.

For CSR funds where the management of activities and budgets is delegated to the Bank, the CSR programs will consist of community social programs aimed at increasing community and environmental participation, as well as the Bank's internal and external engagements.

Legal Basis of the Corporate Social Responsibility Policy

Bank Sulteng has implemented programs related to corporate social responsibility based on applicable laws and regulations and adapted to best practices.

Bank Sulteng's references and policies in implementing Corporate Social Responsibility practices are as follows:

- Law No. 40 of 2007 Article 74 concerning Limited Liability Companies.
- Government Regulation (PP) No. 47 of 2012 concerning Corporate Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies.
- Articles of Association of PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah.
- ISO 26000 Guidelines.

Further details of these provisions are contained in the technical guidelines for the management of corporate social and environmental responsibility, stipulated in the Board of Directors' Decree Number: 67/SK-DIR/BPD-ST/2025 dated March 6, 2025, concerning Amendments to the Guidelines for Corporate Social and Environmental Responsibility (CSR) Policies and Procedures of PT. Bank Sulteng Year 2025.

The Policy and Procedure Guidelines for Corporate Social and Environmental Responsibility aim to ensure that all decisions and actions taken in the implementation of its programs run effectively and efficiently and can anticipate various dynamic stakeholder situations, while remaining controlled and consistent.

Pedoman ini tidak hanya bersifat internal tetapi juga eksternal. Hal ini dikarenakan pedoman ini tidak hanya digunakan untuk mengukur responsibilitas, dan akuntabilitas pelaksanaan program, tetapi juga dapat memberikan landasan operasional yang lebih baik guna meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program, transparansi, berperilaku etis, memperhatikan *stakeholder,* mematuhi hukum, menghormati perilaku norma masyarakat dengan prinsip *Prudential Banking* dan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Struktur Pengelola Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

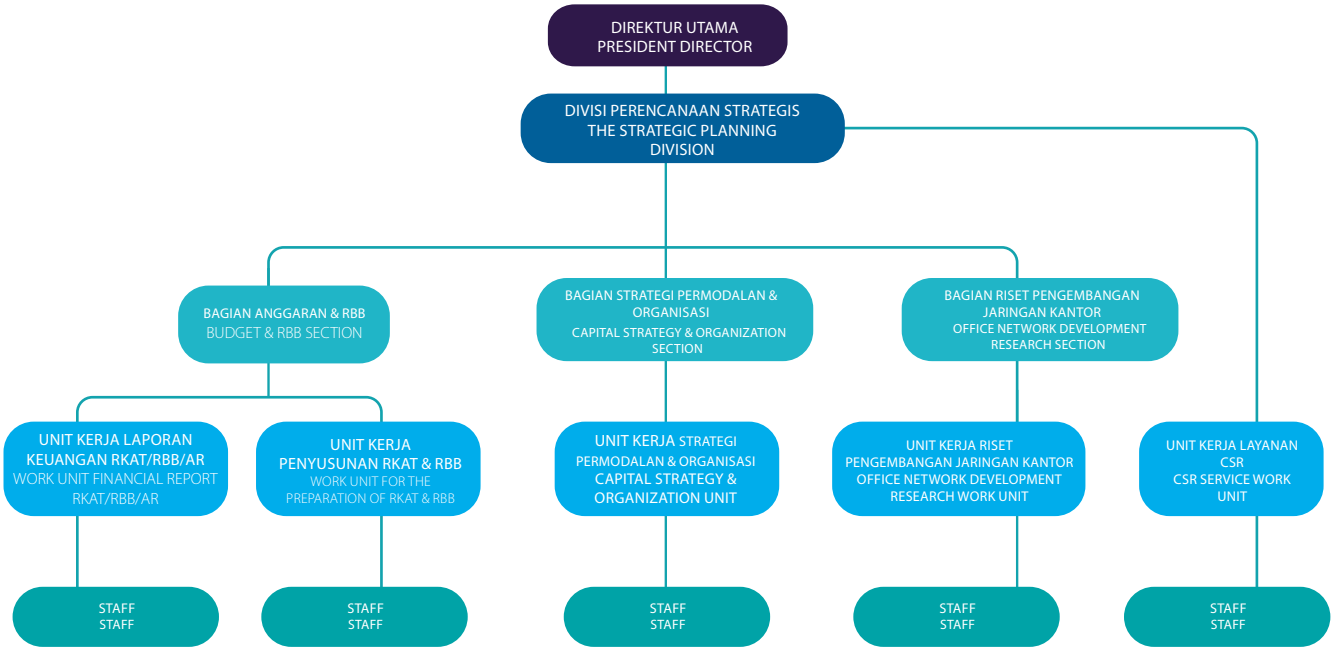
Bank Sulteng telah menetapkan unit kerja dan fungsi yang mengelola program-program tanggung jawab sosial perusahaan yaitu Unit Kerja Layanan CSR yang berada di bawah Divisi Perencanaan Strategis. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 93/SD-DIR/BPD-ST/2024 tentang Perubahan Struktur Organisasi PT Bank Sulteng Tahun 2024, kemudian diubah dalam SK Direksi Nomor: 191/SK-DIR/BPD-ST/ 2025 tentang Perubahan Struktur Organisasi PT Bank Sulteng Tahun 2025.

Bagan Struktur Organisasi Bagian dan Unit Kerja di Bawah Divisi Perencanaan Strategis ditetapkan sebagai berikut:

These guidelines are not only internal but also external in nature. This is because these guidelines are used not only to measure the responsibility and accountability of program implementation but also to provide a better operational foundation to enhance program accountability, transparency, ethical behavior, stakeholder consideration, legal compliance, and respect for community norms, adhering to Prudential Banking principles and Good Corporate Governance.

Management Structure of the Corporate Social Responsibility Program

Bank Sulteng has established the work unit and function that manages corporate social responsibility programs, namely the CSR Service Work Unit under the Strategic Planning Division. This is as stated in the Board of Directors Decree Number: 93/SD-DIR/BPD-ST/2024 concerning the Amendment to the Organizational Structure of PT Bank Sulteng Year 2024, subsequently amended by the Board of Directors Decree Number: 191/SK-DIR/BPD-ST/ 2025 concerning the Amendment to the Organizational Structure of PT Bank Sulteng Year 2025.
The Organizational Structure Chart of the Departments and Work Units under the Strategic Planning Division is established as follows:



Bank Sulteng telah menetapkan uraian tugas pengelola Unit Kerja Layanan CSR sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana diatur dalam Pedoman Kebijakan dan Prosedur Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Dalam praktiknya, perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan juga melibatkan unit-unit kerja lainnya yaitu Divisi Operasional, Divisi Umum dan Aset, Divisi SKAI dan Anti *Fraud* serta seluruh Pemimpin Kantor Cabang.

Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Bank Sulteng telah menetapkan program-program yang menjadi ruang lingkup implementasi tanggung jawab sosial perusahaan yang juga disesuaikan dengan maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial di lingkungan Perusahaan.

Adapun ruang lingkup program tanggung jawab sosial perusahaan antara lain:

1. CSR yang pengelolaan/pelaksanaan kegiatan dan anggarannya diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing pemegang saham, maka program-program TJSLP/CSR akan ditentukan oleh masing-masing pemegang saham.
2. CSR yang pengelolaan/pelaksanaan kegiatan dan anggarannya diserahkan ke Bank, maka program-program TJSLP/CSR berupa program sosial kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan lingkungan serta internal dan eksternal Bank.

Ruang lingkup pengelolaan program tanggung jawab sosial melalui program internal Bank Sulteng meliputi 2 (dua) program penting sebagai berikut:

1. Merupakan program internal yang didahului usulan kegiatan atau permohonan yang melalui persetujuan Direksi sebagai bentuk kepedulian perusahaan untuk membentuk hubungan industrial yang kokoh antara perusahaan dan seluruh karyawan. Oleh karenanya, hak dan kewajiban setiap karyawan terus diupayakan oleh perusahaan untuk tetap dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perusahaan sebagai bentuk kebijakan perusahaan dalam bidang ketenagakerjaan.
2. Ruang lingkup kegiatan diwujudkan dalam berbagai aktivitas kehidupan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, olahraga, ibadah dan keagamaan, bencana alam dan kebakaran bagi karyawan/ti dan pensiunan Bank Sulteng yang diberikan dalam bentuk bantuan atau sumbangan yang dibutuhkan dan sesuai dengan manfaat dan prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Bank Sulteng has determined the job descriptions of the CSR Service Work Unit administrators according to their respective duties and responsibilities as stipulated in the Guidelines for Corporate Social and Environmental Responsibility Policies and Procedures.

In practice, the planning and implementation of the Company's corporate social and environmental responsibility also involve other work units, namely the Operational Division, the General Affairs and Asset Division, the Internal Audit (SKAI) and Anti-Fraud Division, as well as all Branch Managers.

Scope of Corporate Social Responsibility

Bank Sulteng has defined the programs that fall within the scope of the corporate social responsibility implementation, which are also aligned with the purpose and objectives of carrying out social responsibility activities within the Company's environment.

The scope of the corporate social responsibility programs includes:

1. CSR where the management/implementation of activities and budgets is entirely delegated to the respective shareholders; thus, the CSR programs will be determined by each shareholder.

2. CSR where the management/implementation of activities and budgets is delegated to the Bank; thus, the CSR programs will consist of community social programs aimed at increasing community and environmental participation, as well as internal and external Bank engagements.

The scope of corporate social responsibility program management through Bank Sulteng's internal programs encompasses 2 (two) essential programs as follows:

1. Internal programs preceded by activity proposals or requests requiring Board of Directors' approval as a form of corporate concern to build robust industrial relations between the company and all employees. Therefore, the rights and obligations of every employee continue to be pursued by the company to ensure they are executed in accordance with laws and company regulations as a form of corporate policy in the field of employment.

2. The scope of activities is manifested in various life activities in the fields of social, education, health, sports, worship and religion, natural disasters, and fires for employees and retirees of Bank Sulteng, provided in the form of assistance or donations as needed, aligned with the benefits and principles of Corporate Social Responsibility (CSR).

Sedangkan ruang lingkup pengelolaan program tanggung jawab sosial melalui program eksternal Bank Sulteng meliputi 3 (tiga) program penting sebagai berikut:

1. Melaksanakan program *Enterpreuneurship Development* (Pengembangan Kewirausahaan) atau *Community Development* (Pengembangan Perorangan/Kelompok/Komunitas) dalam bentuk Program Kemitraan (PK), yaitu program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri secara berkelanjutan *(sustainable)* yang dapat memberikan manfaat pada masyarakat secara luas.
2. Melaksanakan program Bina Lingkungan (BL), yaitu program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di sekitar wilayah Perusahaan di berbagai bidang seperti pendidikan, sosial, kesehatan, olahraga, ibadah dan keagamaan, ekonomi, seni dan budaya, lingkungan hidup dan pelestarian alam secara berkelanjutan *(sustainable)* yang dapat memberi manfaat pada masyarakat secara luas.
3. Mendukung Program Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian dana CSR kepada Pemegang Saham dan partner strategis (PT Mega Copora selaku Pemegang Saham), dan dalam penggunaan dana CSR tersebut diatur sendiri oleh Pemerintah Daerah dan PT Mega Corpora dalam peruntukannya.

Pada tahun 2025, program *Corporate Social Responsibility* diperuntukkan sesuai kondisi daerah masing-masing yang tersebar di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dengan penjabaran fokus program kegiatan sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan
   Bank Sulteng ikut berpartisipasi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan melalui program pemberian beasiswa, penyediaan sarana dan prasarana bagi lembaga pendidikan. Selain itu, Bank Sulteng juga memberikan sumbangan untuk kegiatan para siswa berprestasi, sumbangan untuk dukungan kegiatan seperti pelatihan *in house, workshop,* penelitian, seminar lokal, nasional dan internasional serta diskusi panel. Guna memperkuat perekonomian daerah, Bank Sulteng juga menyediakan program pemberdayaan atau pendidikan keterampilan praktis untuk usaha kecil atau kelompok masyarakat. Selanjutnya, untuk mendukung budaya literasi di kalangan masyarakat, juga disediakan bantuan penerbitan buku, biaya penelitian dan penerbitan yang bertajuk khusus seperti adat istiadat, seni budaya, agama, sosial, pariwisata, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, perlindungan hukum dan HAM, serta ekonomi dan usaha kecil di Provinsi Sulawesi Tengah.

Meanwhile, the scope of corporate social responsibility program management through Bank Sulteng's external programs encompasses 3 (three) essential programs as follows:

1. Executing Entrepreneurship Development or Community Development programs in the form of Partnership Programs (PK), which aim to enhance the capabilities of small businesses to become resilient and independent sustainably, providing widespread benefits to the community.
2. Executing Community Fostering (Bina Lingkungan / BL) programs, which are programs to empower the social conditions of communities around the Company's operational areas across various sectors such as education, social, health, sports, worship and religion, economy, arts and culture, environment, and nature conservation sustainably, providing widespread benefits to the community.
3. Supporting Regional Government Programs in accordance with the needs desired by the Regional Government through the provision of CSR funds to Shareholders and strategic partners (PT Mega Corpora as a Shareholder), where the utilization of these CSR funds is regulated independently by the Regional Government and PT Mega Corpora for their respective allocations.

In 2025, Corporate Social Responsibility programs are allocated according to the respective regional conditions spread across the Central Sulawesi Province with the following breakdown of focus areas:

1. Education Sector
   Bank Sulteng participates in improving the quality of education through scholarship programs and the provision of facilities and infrastructure for educational institutions. In addition, Bank Sulteng also provides donations for outstanding student activities, support for activities such as in-house training, workshops, research, local, national, and international seminars, and panel discussions.
   To strengthen the regional economy, Bank Sulteng also provides empowerment programs or practical skills education for small businesses or community groups. Furthermore, to support the literacy culture among the community, assistance is also provided for book publishing, research costs, and publications with specific themes such as customs, arts and culture, religion, social issues, tourism, development, community empowerment, legal and human rights protection, as well as the economy and small businesses in the Central Sulawesi Province.

2. Bidang Sosial
   Sebagai wujud perhatian di bidang sosial, Bank Sulteng memberikan bantuan untuk kegiatan pemuda Karang Taruna, pembuatan dan perbaikan saluran air bersih, panti asuhan, khitanan massal, pembangunan rumah tinggal layak huni, korban kebakaran, bencana alam, program Gerakan Kemanusiaan, serta sumbangan untuk perlombaan.
3. Bidang Kesehatan
   Dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, Bank Sulteng turut berpartisipasi melalui program pemulihan dan kesehatan masyarakat, penyediaan dan pemberian sarana dan prasarana untuk rumah sakit, pembuatan kotak sampah, sumbangan untuk penyandang disabilitas dan pengobatan gratis bagi nasabah, bantuan untuk masyarakat yang terkena penyakit epidemi, donor darah serta perbaikan sarana dan prasarana sanitasi dan kesehatan lingkungan kawasan kumuh.
4. Bidang Seni Budaya
   Dalam kegiatan seni budaya, Bank Sulteng berpartisipasi melalui kegiatan pembinaan, pagelaran festival seni dan budaya di Provinsi Sulawesi Tengah serta kegiatan pelestarian dan perlindungan cagar budaya daerah setempat.
5. Bidang Olahraga
   Bank Sulteng juga peduli terhadap kegiatan keolahragaan melalui pemberian bantuan olahraga untuk kegiatan pemuda dan remaja di cabang olahraga seperti sepak bola, *badminton, volleyball,* tenis lapangan, dan tenis meja. Selain itu, juga diberikan bantuan untuk atlet dan pelatih, kegiatan pertandingan olahraga pada berbagai tingkat dan *event* yang diselenggarakan.
6. Bidang Lingkungan Hidup dan Alam
   Dalam rangka memelihara lingkungan hidup dan keseimbangan alam Bank Sulteng mewujudkannya melalui program Penyuluhan Lingkungan Hidup, program Penghijauan untuk daerah pesisir, program *Clean & Green City* serta pemberian penghargaan terhadap mitra usaha yang dalam kegiatan usahanya berdampak terhadap lingkungan.
7. Bidang Sarana Umum
   Bank Sulteng juga turut menyediakan sarana umum bagi masyarakat seperti air bersih, MCK, listrik, perbaikan jalan, jembatan, rehabilitasi daerah bencana alam, serta mendukung revitalisasi dan rehabilitasi lingkungan kawasan kumuh. Bagi instansi pemerintahan, Bank Sulteng juga memberikan bantuan untuk pembangunan sarana prasarana yang tidak dianggarkan dalam APBD/APBN serta menunjang sarana pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan kesenian, olahraga dan pendidikan.

2. Social Sector
   As a manifestation of concern in the social sector, Bank Sulteng provides assistance for Karang Taruna (youth organization) activities, the construction and repair of clean water channels, orphanages, mass circumcision, the construction of livable homes, fire and natural disaster victims, the Humanitarian Movement program, as well as donations for competitions.
3. Health Sector
   To improve public health, Bank Sulteng participates through public health and recovery programs, the provision and donation of facilities and infrastructure for hospitals, the provision of trash bins, donations for people with disabilities and free medical treatment for customers, assistance for communities affected by epidemic diseases, blood donation, and the improvement of sanitation facilities and infrastructure and environmental health in slum areas.
4. Arts and Culture Sector
   In arts and cultural activities, Bank Sulteng participates through coaching activities, organizing arts and cultural festivals in Central Sulawesi Province, as well as activities for the preservation and protection of local cultural heritage.
5. Sports Sector
   Bank Sulteng also cares about sports activities by providing sports assistance for youth and adolescent activities in sports such as football, badminton, volleyball, tennis, and table tennis.
   Furthermore, assistance is also provided for athletes and coaches, sports match activities at various levels, and hosted events.
6. Environment and Nature Sector
   To preserve the environment and nature's balance, Bank Sulteng realizes this through Environmental Counseling programs, Reforestation programs for coastal areas, Clean & Green City programs, as well as granting awards to business partners whose operational activities impact the environment.

7. Public Facilities Sector
   Bank Sulteng also participates in providing public facilities for the community, such as clean water, MCK (bathing, washing, and toilet facilities), electricity, road and bridge repairs, rehabilitation of natural disaster areas, and supporting the revitalization and rehabilitation of slum environments.
   For government agencies, Bank Sulteng also provides assistance for the construction of infrastructure not budgeted in the APBD/APBN (Regional/State Revenue and Expenditure Budget), as well as supporting government facilities related to arts, sports, and educational activities.

Rencana Kerja dan Anggaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Bank Sulteng menyusun rencana kerja atas program-program tanggung jawab sosial yang akan dilaksanakan oleh Perusahaan yang disesuaikan dengan ruang lingkup kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Penyusunan rencana kerja ini dilakukan dengan memperhatikan wilayah sekitar operasional perusahaan dengan menganalisis kebutuhan serta dampak yang diperoleh dari hasil pemetaan kebutuhan. Alokasi dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk tahun 2025 ditetapkan oleh RUPS dimana sumber pembebanannya dari laba tahun berjalan dan dicadangkan setiap bulannya. Penggunaan data tersebut diatur oleh Direksi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan penetapan CSR dengan penggunaan yang bersumber dari Cadangan Umum Bank yang diputuskan dalam RUPS tahunan.

Pada tahun 2025, Bank Sulteng telah mengalokasikan anggaran pelaksanaan program-program tanggung jawab sosial perusahaan yang terbagi menjadi 2 (dua) kluster yaitu dikelola oleh PT Bank Sulteng sebesar Rp.4.127 juta dan dikelola oleh Pemegang Saham PT Bank Sulteng sebesar Rp.14.847 juta.

Penyisihan anggaran untuk kegiatan dan program-program CSR tidak memiliki dampak yang material bagi Perusahaan, anggaran untuk pelaksanaan program CSR berasal dari pembebanan laba yang diputuskan oleh RUPS.

Dampak Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Dengan dilaksanakannya program tanggung jawab sosial perusahaan, maka akan memberikan dampak positif bagi seluruh *stakeholder* yang memenuhi ketentuan peraturan, hukum dan etika yang berlaku. Bank Sulteng percaya bahwa pelaksanaan program tanggung jawab sosial membawa dampak positif bagi Perusahaan diantaranya:

1. Peningkatan citra perusahaan *(corporate image).*
2. Penguatan daya saing Perusahaan.
3. Pengembangan dan pengamanan aset.
4. Terciptanya harmonisasi Perusahaan dengan masyarakat.

Work Plan and Budget for Corporate Social Responsibility

Bank Sulteng formulates a work plan for corporate social responsibility programs to be implemented by the Company, tailored to the scope of corporate social responsibility activities. The preparation of this work plan is carried out by paying attention to the areas surrounding the company's operations, analyzing needs, and assessing the impacts derived from the needs mapping results. The allocation of Corporate Social Responsibility (CSR) funds for the year 2025 is determined by the General Meeting of Shareholders (RUPS), where the source of burdening is from the current year's profit and is reserved monthly. The use of these funds is regulated by the Board of Directors in accordance with Standard Operating Procedures (SOP) and the determination of CSR utilization sourced from the Bank's General Reserves decided in the Annual General Meeting of Shareholders.
In 2025, Bank Sulteng has allocated a budget for the implementation of corporate social responsibility programs divided into 2 (two) clusters: managed by PT Bank Sulteng amounting to Rp.4,127 million and managed by the Shareholders of PT Bank Sulteng amounting to Rp.14,847 million.

The budget provisioning for CSR activities and programs does not have a material impact on the Company; the budget for implementing CSR programs comes from the profit allocation decided by the General Meeting of Shareholders.

Impact of Corporate Social Responsibility Implementation

By implementing corporate social responsibility programs, it will provide a positive impact for all stakeholders, complying with the applicable regulations, laws, and ethics. Bank Sulteng believes that the implementation of social responsibility programs brings positive impacts to the Company, including:

1. Enhancement of corporate image.
2. Strengthening the Company's competitiveness.
3. Development and safeguarding of assets.
4. Creation of harmonization between the Company and the community.

Cakupan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Bank Sulteng telah merumuskan fokus program tanggung jawab sosial sebagai strategi untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan *stakeholders* dan memelihara kelestarian lingkungan baik dari aspek lingkungan hidup, aspek ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja (K3), aspek pengembangan sosial kemasyarakatan, dan aspek perlindungan kepada konsumen.

Coverage of Corporate Social Responsibility Implementation

Bank Sulteng has formulated the focus of social responsibility programs as a strategy to create harmonious relationships with stakeholders and preserve environmental sustainability from the aspects of environment, employment, occupational health and safety (OHS), social and community development, and consumer protection.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE ENVIRONMENTAL SECTOR

Bank Sulteng meyakini bahwa pengelolaan dan tanggung jawab terhadap lingkungan sangat menentukan keberhasilan jangka panjang Perusahaan. Bank Sulteng senantiasa mempertimbangkan masalah dan dampak lingkungan dari seluruh kegiatan bisnisnya, terutama dalam hal pengambilan segala bentuk keputusan dan kegiatan yang dilaksanakan.

Bank Sulteng berkomitmen untuk menjalankan program yang disusun sebagai bentuk penjabaran Bank Sulteng terhadap program inisiatif tujuan pembangunan berkelanjutan, pencegahan polusi, penggunaan sumber daya berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, perlindungan lingkungan, keanekaragaman hayati serta pemulihan habitat alami.

Guna mewujudkan pelestarian lingkungan hidup, Bank Sulteng senantiasa berupaya untuk:

- Mematuhi semua peraturan perundang-undangan mengenai pelestarian lingkungan hidup.
- Memperhatikan masalah dan dampak lingkungan dari seluruh aktivitas Perusahaan serta melakukan pencegahan seluruh dampak negatif akibat aktivitas operasional Perusahaan.
- Menangani masalah pencemaran lingkungan yang mungkin terjadi dengan mengurangi limbah, emisi dan penggunaan bahan berbahaya dan beracun.
- Menyisihkan dana secara konsisten untuk kegiatan penghijauan lingkungan.

Bank Sulteng believes that environmental management and responsibility are highly decisive for the Company's long-term success. Bank Sulteng continuously considers environmental issues and impacts in all its business activities, especially concerning decision-making and executed activities.

Bank Sulteng is committed to running programs designed as a translation of Bank Sulteng's initiatives for sustainable development goals, pollution prevention, sustainable resource use, climate change mitigation and adaptation, environmental protection, biodiversity, and natural habitat restoration.

To realize environmental conservation, Bank Sulteng consistently strives to:

- Comply with all laws and regulations regarding environmental conservation.
- Consider environmental issues and impacts of all Company activities and prevent all negative impacts resulting from the Company's operational activities.
- Address potential environmental pollution issues by reducing waste, emissions, and the use of hazardous and toxic materials.
- Consistently set aside funds for environmental greening activities.

Pelaksanaan Kegiatan Bidang Lingkungan

Bank Sulteng menyadari bahwa dalam kegiatan operasional bisnis yang dilaksanakan tentu memberikan dampak bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, Bank Sulteng senantiasa berupaya untuk mengembangkan penerapan pengelolaan lingkungan dalam kegiatan bisnisnya. Upaya tersebut dilakukan Bank Sulteng dengan cara sebagai berikut:

- Memastikan Insan Perusahaan untuk mematuhi setiap ketentuan standar terkait dengan K3L, baik yang berlaku umum maupun yang berlaku khusus di lingkungan Perusahaan.
- Mengidentifikasi aspek dan dampak lingkungan di setiap unit kerja Perusahaan.
- Melaksanakan progran penghematan energi di kantor-kantor Perusahaan dengan menggunakan lampu LED dan pengaturan suhu udara AC pada suhu normal.
- Melakukan upaya pengelolaan sampah dan limbah yang dihasilkan oleh Perusahaan dengan melakukan penanganan pengelolaan limbah yang dilakukan secara terencana.
- Melakukan pengurangan pemakaian kertas dengan cara pemakaian kembali kertas bekas, pemakaian kertas bolak balik serta mengefektifkan penggunaan sarana teknologi informasi.
- Mendukung kegiatan penghijauan lingkungan baik dilakukan sendiri oleh Perusahaan atau melalui pemberian sumbangan untuk penghijauan lingkungan.

Pengaduan Masalah Lingkungan

Guna memudahkan dalam penyampaian laporan tentang masalah lingkungan yang berhubungan dengan aktivitas operasional Perusahaan, Bank Sulteng telah menyediakan Layanan Pengaduan Nasabah. Jenis Pengaduan lisan dan tertulis yang dapat diterima di setiap kantor Bank Sulteng. Layanan Call Center Bank Sulteng tersedia 24 Jam setiap hari untuk melayani kebutuhan mendesak nasabah seperti pemblokiran kartu atau kendala transaksi lainnya.

Sepanjang tahun 2025, Bank Sulteng tidak menerima laporan pengaduan yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Demikian pula, tidak ditemukan adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terkait dengan aspek pengelolaan lingkungan.

Implementation of Environmental Sector Activities

Bank Sulteng realizes that the execution of its operational business activities naturally impacts the surrounding environment and communities. Therefore, Bank Sulteng consistently strives to develop the implementation of environmental management within its business activities. These efforts are carried out by Bank Sulteng in the following ways:

- Ensuring that Company Personnel comply with every standard provision related to HSE (Health, Safety, and Environment), both general and specific to the Company's environment.
- Identifying environmental aspects and impacts in every Company work unit.
- Implementing energy-saving programs at Company offices by using LED lights and setting air conditioning to normal temperatures.
- Managing the garbage and waste produced by the Company by handling waste management in a planned manner.
- Reducing paper consumption by reusing scrap paper, printing double-sided, and utilizing information technology facilities effectively.
- Supporting environmental greening activities, whether conducted independently by the Company or through donations for environmental greening.

Environmental Complaints

To facilitate the submission of reports on environmental issues related to the Company's operational activities, Bank Sulteng has provided a Customer Complaints Service. Both verbal and written complaints can be received at any Bank Sulteng office. The Bank Sulteng Call Center is available 24 hours a day to address urgent customer needs, such as card blocking or other transaction issues.

Throughout 2025, Bank Sulteng received no complaints related to environmental issues. Similarly, no violations of laws and regulations related to environmental management were found.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

Bank Sulteng senantiasa berupaya melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat setempat melalui program CSR yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Bank Sulteng menganggap program pengembangan sosial dan kemasyarakatan bertujuan untuk menciptakan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan yang memberikan dampak pada kualitas kehidupan sosial, kesehatan, pendidikan, keagamaan dan kesejahteraan sosial masyarakat termasuk yang berada di wilayah Perusahaan.

Implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan di bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan lingkungan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan visibilitas serta meningkatkan reputasi positif Bank Sulteng terhadap para *stakeholder.*

Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Sepanjang tahun 2025, program tanggung jawab sosial perusahaan bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan terbagi menjadi 2 (dua) kluster yaitu penyaluran dana CSR Pemegang Saham PT Bank Sulteng dan penyaluran dana CSR yang dikelola oleh Bank Sulteng.

Realisasi penyaluran dana CSR bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan oleh Pemegang Saham PT Bank Sulteng yaitu sebesar Rp14.847 juta dengan pemberian bantuan sebagai berikut:

- Bantuan fasilitas mobil *ambulance* untuk UPTD Puskesmas setempat guna menunjang mobilitas dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.
- Kegiatan kompetisi sepak bola, catur, *taekwondo, volleyball* dan berbagai *event* lainnya untuk memotivasi dan meningkatkan prestasi atlet tanah air khususnya atlet Sulawesi Tengah.
- Kegiatan penghargaan bagi ASN guna memotivasi ASN untuk semakin memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat setempat.
- Kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang keagamaan untuk meningkatkan semangat umat beragama dalam beribadah.
- Program beasiswa dan biaya tugas akhir untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Sulawesi Tengah.

Bank Sulteng constantly strives to empower and develop local communities through CSR programs implemented sustainably. Bank Sulteng considers that the social and community development programs aim to create community empowerment through activities that impact the quality of social life, health, education, religion, and social welfare of the community, including those within the Company's area.

The implementation of corporate social responsibility programs in the field of social and community development can increase community and environmental participation to achieve community welfare, create visibility, and enhance Bank Sulteng's positive reputation among stakeholders.

Implementation of Social and Community Development Activities

Throughout 2025, the corporate social responsibility programs in the field of social and community development were divided into 2 (two) clusters: the distribution of CSR funds from the Shareholders of PT Bank Sulteng and the distribution of CSR funds managed by Bank Sulteng.

The realization of CSR fund distribution for social and community development by the Shareholders of PT Bank Sulteng amounted to Rp.14,847 million providing the following assistance:

- Assistance with ambulance facilities for the local UPTD Puskesmas (Community Health Center) to support mobility and improve public health services.
- Football, chess, taekwondo, volleyball competitions, and various other events to motivate and improve the achievements of national athletes, particularly those from Central Sulawesi.
- Award events for ASN (State Civil Apparatus) to motivate them to continuously provide the best public services for the local community.
- Community empowerment activities in the religious sector to enhance the religious fervor of the congregation in their worship.
- Scholarship programs and final project funding to improve the quality of education for the people of Central Sulawesi.

- Bantuan pengobatan untuk masyarakat yang kurang mampu yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Sulawesi Tengah.
- Kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian untuk mendorong produktivitas petani sehingga dapat meningkatkan daya saing di bidang ekonomi.
- Kegiatan pengembangan usaha UMKM untuk meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat.
- Bantuan sarana prasarana pendopo latihan sanggar seni untuk upaya memelihara dan melestarikan budaya daerah setempat.
- Kegiatan PGRI guna mendukung para guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mencerdaskan anak bangsa.
- Pembangunan mesjid untuk menunjang kenyamanan umat Islam dalam beribadah.
- Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai organisasi.
- Kegiatan penyaluran pangan untuk masyarakat.
- Revitalisasi fasilitas umum di Provinsi Sulawesi Tengah pascabencana.
- Bantuan untuk pengadaan mobil pengangkut sampah, *mini dump pick up* sampah dan bak *container* sampah guna menunjang kebersihan wilayah Sulawesi Tengah.

Realisasi penyaluran dana CSR bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan yang dikelola oleh Bank Sulteng yaitu sebesar Rp4.127 Juta dengan pemberian bantuan sebagai berikut:

- Kegiatan kompetisi sepak bola untuk memotivasi dan meningkatkan prestasi atlet sepak bola tanah air khususnya Sulawesi Tengah.
- Kegiatan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah untuk meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat.
- Bantuan wifi *Starlink* untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas.
- Bantuan Toyota Zenic 2.0 G CVT untuk Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.
- Kegiatan revitalisasi mesjid guna menunjang sarana peribadatan.

Penghargaan Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Pada tahun 2025, Bank Sulteng mendapat 2 (Dua) Penghargaan "IJK Literasi Keuangan Teraktif dan IJK Literasi Keuangan Peserta Terbanyak" dalam kegiatan Kejar Award oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah.

- Medical assistance for the underprivileged community aimed at improving the health quality of the people in Central Sulawesi.
- Community empowerment activities in the agricultural sector to boost farmers' productivity and thereby enhance economic competitiveness.

- MSME business development activities to boost the community's creative economy.
- Infrastructure assistance for art studio training pavilions to maintain and preserve local regional culture.
- PGRI (Indonesian Teachers Association) activities to support teachers in improving the quality of education and enlightening the nation's youth.
- Mosque construction to support the comfort of Muslims in performing their worship.
- Community empowerment activities through various organizations.
- Food distribution activities for the community.
- Revitalization of public facilities in Central Sulawesi Province post-disaster.
- Assistance for the procurement of garbage collection vehicles, mini dump pick-ups for garbage, and garbage containers to support cleanliness in the Central Sulawesi region.

The realization of CSR fund distribution for social and community development managed by Bank Sulteng amounted to Rp.4,127 million providing the following assistance:

- Football competition activities to motivate and enhance the achievements of national football athletes, especially in Central Sulawesi.
- Empowerment activities for micro, small, and medium enterprises to boost the community's creative economy.
- Starlink Wi-Fi assistance to improve health services at Puskesmas (Community Health Centers).
- Assistance of a Toyota Zenix 2.0 G CVT for the Central Sulawesi High Prosecutor's Office.
- Mosque revitalization activities to support places of worship.

Awards in Social and Community Development

In 2025, Bank Sulteng received 2 (Two) Awards for "Most Active Financial Literacy Financial Services Institution (IJK)" and "Financial Services Institution with the Most Participants in Financial Literacy" in the Kejar Award organized by the Financial Services Authority of Central Sulawesi Province. .

TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN EMPLOYMENT AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS)

Implementasi kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan bidang ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengadopsi beberapa peraturan terbaik yang menjadi landasan. Adopsi dari kebijakan tersebut kemudian dirancang khusus dalam kebijakan internal Perusahaan yang berbentuk Buku Pedoman Perusahaan Bank Sulteng. Buku Pedoman tersebut berisi peraturan tertulis yang berfungsi sebagai acuan bagi karyawan dan Perusahaan dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Bank Sulteng memposisikan karyawan sebagai sumber daya yang bernilai, menghormati hak dan kewajiban, mewadahi aspirasi karyawan serta menjadikannya sebagai mitra dalam membangun usaha untuk mewujudkan tujuan Perusahaan. Bank Sulteng juga mengatur kebijakan mengenai ketenagakerjaan dan hubungan industrial, perlindungan karyawan, pemberian kesempatan yang sama serta jaminan keselamatan dan kesehatan kerja yang dilaksanakan secara kontinu.

The implementation of corporate social responsibility policies in the fields of employment, occupational health, and safety is based on applicable laws and regulations and adopts several best practice regulations as its foundation. The adoption of these policies is then specifically designed into the Company's internal policies in the form of the Bank Sulteng Company Manual. This manual contains written regulations that function as a reference for employees and the Company in executing their rights and obligations. Bank Sulteng positions its employees as valuable resources, respects their rights and obligations, accommodates employee aspirations, and treats them as partners in building the business to achieve the Company's goals. Bank Sulteng also regulates policies regarding employment and industrial relations, employee protection, the provision of equal opportunities, and guarantees for occupational health and safety executed continuously.

Di sisi lain, Bank Sulteng juga menyusun rencana strategis pengelolaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan untuk menjamin kelangsungan operasional Bank. Melalui strategi bisnis Perusahaan, pengembangan sumber daya manusia dikembangkan untuk mencapai hasil bisnis yang diinginkan.

On the other hand, Bank Sulteng also prepares strategic human resource management plans according to needs to guarantee the continuity of the Bank's operations. Through the Company's business strategy, human resource development is advanced to achieve desired business outcomes.

Bank Sulteng memprioritaskan aspek kesehatan dan keselamatan kerja dalam setiap aktivitas usaha untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan. Bank Sulteng akan mengambil tindakan yang tepat guna menghindari terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan di lingkungan kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi karyawan dan memastikan aset-aset, lokasi usaha dan fasilitas lainnya sesuai standar dan memenuhi peraturan perundang-undangan.

Bank Sulteng prioritizes occupational health and safety aspects in every business activity to minimize negative impacts. Bank Sulteng will take appropriate actions to prevent workplace accidents and health disruptions and to create a comfortable work environment for employees, ensuring assets, business locations, and other facilities meet standards and comply with laws and regulations.

Kesetaraan dan Kesempatan Kerja

Kesetaraan *gender* dan kesempatan kerja bagi semua karyawan Perusahaan merupakan kebijakan yang dilaksanakan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Pada praktiknya, dalam proses rekrutmen karyawan baru dan penempatannya, Bank Sulteng tidak melakukan diskriminasi. Semua proses rekrutmen dan seleksi didasarkan pada kompetensi, kebutuhan karyawan serta perjanjian kerja yang disepakati bersama.

Equality and Employment Opportunities

Gender equality and equal employment opportunities for all Company employees are policies implemented in human resource management. In practice, during the recruitment and placement processes for new employees, Bank Sulteng does not discriminate. All recruitment and selection processes are based on competency, employee needs, and mutually agreed-upon work agreements.

Bank Sulteng senantiasa memberikan kesempatan yang sama terhadap karyawan tanpa diskriminasi dalam hal umur, suku, agama, bangsa, ras, dan *gender* dalam sistem ketenagakerjaan seperti proses rekrutmen, pengembangan karir, promosi, mutasi yang dilaksanakan melalui seleksi yang transparan dan obyektif. Demikian juga dalam hal pemberian remunerasi, *reward* dan *punishment*, pelatihan, penggunaan fasilitas kantor, semua diperlakukan sama dengan mengacu pada kebijakan-kebijakan teknis yang diatur Perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bank Sulteng consistently provides equal opportunities to employees without discrimination based on age, ethnicity, religion, nationality, race, or gender in the employment system, such as in recruitment processes, career development, promotion, and mutation, conducted through transparent and objective selection. Similarly, regarding remuneration, rewards and punishments, training, and the use of office facilities, all are treated equally with reference to the technical policies regulated by the Company and the applicable laws.

Tingkat *Turnover* Karyawan

Bank Sulteng senantiasa memperhatikan rasio *employee turnover* yang bekerja di Perusahaan dengan mempertimbangkan kebutuhan karyawan yang seimbang sesuai dengan kebutuhan ideal. Tingkat *turnover* yaitu persentase karyawan yang meninggalkan Perusahaan dalam periode waktu tertentu. Rasio ini dihitung berdasarkan jumlah karyawan yang keluar dari jumlah karyawan secara keseluruhan.

Tingkat *turnover* karyawan Bank Sulteng pada tahun 2025 yaitu sebesar 3,76%. Hal ini disebabkan adanya karyawan yang pensiun, *resign* atas keinginan sendiri, dan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Tingkat *turnover* karyawan selama tahun 2025 sebagai berikut:

Employee Turnover Rate

Bank Sulteng continually monitors the employee turnover ratio within the Company, considering the need for a balanced workforce according to ideal requirements. The turnover rate is the percentage of employees who leave the Company within a certain period. This ratio is calculated based on the number of departing employees out of the total number of employees.

The employee turnover rate at Bank Sulteng in 2025 was 3,76%. This was caused by employees retiring, resigning voluntarily, and the occurrence of Terminations of Employment (PHK). The employee turnover rate during 2025 is as follows:

***Turnover* Pegawai**	**Jumlah** Total	Employee Turnover
Mencapai Usia Pensiun & Pensiun Dini	10	Reaching Retirement Age and Early Retirement
Mengundurkan Diri	10	Resignation
Pemutusan Hubungan Kerja	4	Termination of Employment
Meninggal Dunia	2	Death
Habis Masa Kontrak	2	Contract Expiration
Jumlah	**28**	**Total**
Tingkat Turnover (%)	**3,76%**	**Turnover Rate (%)**

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan tingkat *turnover* karyawan Bank Sulteng masih relatif kecil serta tidak menunjukkan pengaruh signifikan bagi kelangsungan operasional Perusahaan.

Based on these data, it shows that the employee turnover rate at Bank Sulteng is still relatively low and does not indicate a significant impact on the continuity of the Company's operations.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Bank Sulteng senantiasa memfasilitasi seluruh Insan Perusahaan dengan lingkungan kerja yang sehat dan nyaman, sarana prasarana yang memadai sesuai dengan ketentuan Perusahaan serta memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank Sulteng senantiasa melindungi seluruh karyawan dari kegiatan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan kerja serta menjamin tidak terjadi tindakan ancaman maupun kekerasan di lingkungan Perusahaan.

Dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan sehat, setiap Insan Perusahaan diwajibkan mematuhi peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja dengan demikian, dapat tercapainya kecelakaan nihil pada setiap unit kerja secara konsisten dan berkala tiap tahunnya.

Fasilitas Tanggap Darurat

Bank Sulteng telah menyediakan fasilitas tanggap darurat untuk mengantisipasi jika terjadi keadaan darurat dan melaksanakan kegiatan penanganan keadaan darurat sebagai upaya preventif jika terjadi kecelakaan kerja.

Bank Sulteng juga telah mengidentifikasi potensi keadaan darurat terutama mengidentifikasi kesiapan Perusahaan mengenai sumber daya manusia, sarana prasarana untuk menghadapi potensi yang mungkin muncul seperti kebakaran, bencana dan lain-lain.

Program penanganan keadaan darurat tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan melalui *safety induction* terutama melakukan kegiatan latihan simulasi tanggap darurat untuk melatih kesiapsiagaan karyawan dalam situasi darurat di lingkungan Perusahaan.

Sarana Keselamatan Kerja

Bank Sulteng telah menyediakan sarana keselamatan kerja di setiap kantor yang terdiri dari alat pemadam api ringan, Alat Pelindung Diri (APD), jalur evakuasi dan titik kumpul jika terjadi kejadian luar biasa seperti kebakaran dan bencana alam. Selanjutnya, dilakukan pemeliharaan dan pemeriksaan terhadap fasilitas kerja dan bangunan secara berkala untuk memastikan kelayakan sarana dan lingkungan kerja.

Occupational Health and Safety

Bank Sulteng continually provides all Company Personnel with a healthy and comfortable work environment, adequate infrastructure according to Company regulations, and meets occupational health and safety standards that refer to applicable laws and regulations.

Bank Sulteng continually protects all employees from activities that endanger occupational health and safety and guarantees there are no acts of threat or violence in the Company environment.

In order to create a safe and healthy work environment, every Company Personnel is obliged to comply with occupational health and safety regulations; thus, zero accidents can be achieved consistently and periodically in every work unit each year.

Emergency Response Facilities

Bank Sulteng has provided emergency response facilities to anticipate emergency situations and carry out emergency handling activities as a preventive measure in the event of a workplace accident.

Bank Sulteng has also identified potential emergency situations, especially identifying the Company's preparedness regarding human resources and infrastructure to face potential threats that may arise, such as fires, disasters, and others.

The emergency handling program has been socialized to all employees through safety inductions, particularly conducting emergency response simulation exercises to train employee preparedness in emergency situations within the Company environment.

Occupational Safety Facilities

Bank Sulteng has provided occupational safety facilities in every office consisting of light fire extinguishers, Personal Protective Equipment (PPE), evacuation routes, and assembly points in the event of extraordinary occurrences such as fires and natural disasters. Furthermore, regular maintenance and inspections are carried out on work facilities and buildings to ensure the viability of the facilities and the work environment.

Tingkat Kecelakaan Kerja

Bank Sulteng memfokuskan pada aspek pencegahan dengan memaksimalkan tingkat pemahaman terhadap penerapan kebijakan dan sistem K3 serta pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dan standar yang berlaku.

Sepanjang tahun 2025, karyawan Bank Sulteng mengalami kecelakaan kerja sebanyak 1 (satu) orang.

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Bank Sulteng telah menetapkan pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi karyawan sebagai berikut:

1. Bank memberikan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada karyawan beserta keluarganya dengan mengikutsertakan dalam BPJS Kesehatan.
2. Bank juga memberikan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Pegawai dan/atau beserta keluarganya kepada pihak asuransi kesehatan lainnya untuk mengcover tindakan dan perawatan kesehatan yang tidak dicover oleh BPJS Kesehatan.
3. Dalam hal pembayaran klaim Rumah Sakit oleh BPJS Kesehatan dan/atau asuransi kesehatan lainnya tidak mencukupi, maka sisanya ditanggung Bank sesuai tarif hak karyawan.
4. Bank memberikan fasilitas pemeriksaan umum kesehatan *(General Check Up)* kepada karyawan setahun sekali di klinik laboratorium yang bekerja sama dengan Bank.
5. Bank memberikan fasilitas penggantian biaya kacamata baca kepada karyawan.

Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan

Karyawan Bank Sulteng diperbolehkan untuk memberikan masukan dan pengaduan terkait ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Oleh karena itu, Bank Sulteng telah menyediakan sarana yang dapat digunakan karyawan untuk melaporkan problem ketenagakerjaan baik yang dilakukan melalui komunikasi antara atasan dan bawahan maupun melalui *Human Resources Information System (HRIS).* Sepanjang tahun 2025, Bank Sulteng tidak mendapat laporan pengaduan terkait keluhan dan problem karyawan yang disebabkan oleh hubungan industrial maupun terkait ketenagakerjaan lainnya.

Workplace Accident Rate

Bank Sulteng focuses on prevention aspects by maximizing the level of understanding regarding the implementation of OHS policies and systems, as well as fulfilling facilities and infrastructure according to applicable needs and standards.

Throughout 2025, Bank Sulteng experienced workplace accidents involving 1 (one) person.

Health Maintenance Guarantee

Bank Sulteng has stipulated the implementation of health maintenance guarantees for employees as follows:

1. The Bank provides a Health Maintenance Guarantee to employees and their families by enrolling them in BPJS Kesehatan (National Health Insurance).
2. The Bank also provides a Health Maintenance Guarantee to Employees and/or their families through other health insurance providers to cover medical actions and treatments not covered by BPJS Kesehatan.
3. In the event that the payment of hospital claims by BPJS Kesehatan and/or other health insurance is insufficient, the remainder is borne by the Bank according to the employee's entitlement tariff.
4. The Bank provides general medical check-up facilities for employees once a year at a laboratory clinic partnered with the Bank.
5. The Bank provides reading glasses reimbursement facilities for employees.

Employment Complaints

Bank Sulteng employees are allowed to provide input and complaints regarding employment and industrial relations.Therefore, Bank Sulteng has provided channels that employees can use to report employment problems, whether done through communication between superiors and subordinates or through the Human Resources Information System (HRIS). Throughout 2025, Bank Sulteng received no complaint reports regarding employee grievances and problems caused by industrial relations or other employment matters.

Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Program-program kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan di bidang ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja pada tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan Blueprint Pengembangan Sumber Daya Manusia.
2. Melanjutkan implementasi Human *Capital Management System* (HCMS) yang terintegrasi secara online dan dapat diakses oleh seluruh pegawai.
3. Melakukan pembaharuan terhadap *Standard Operating Procedure* (SOP) dan peraturan serta kebijakan yang sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini.
4. Mengevaluasi beban kerja pada masing-masing Divisi serta unit kerja lainnya yang relevan untuk proses bisnis Bank ke arah yang lebih baik.
5. Melakukan rekrutmen calon karyawan dengan menyesuaikan kebutuhan Bank baik terkait perluasan jaringan kantor atau menggantikan karyawan yang telah pensiun atau keluar dari Perusahaan.
6. Meningkatkan kepedulian, pengetahuan dan kemampuan karyawan dalam bidang keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan antara lain melalui publikasi, sosialisasi dan pelatihan.
7. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi pegawai secara berkesinambungan melalui program program pelatihan yang diadakan baik pelatihan teknis maupun pelatihan *soft skill*.
8. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam memperkuat kerjasama dan soliditas antar karyawan di Perusahaan. Melakukan evaluasi terkait Key Performance Indicator (KPI) secara berkala.

Penghargaan Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pada tahun 2025, Bank Sulteng belum mendapat penghargaan terkait implementasi pengelolaan Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Implementation of Employment, Occupational Health, and Safety Activities

The corporate social responsibility activities in the fields of employment, occupational health, and safety in 2025 are detailed as follows:

1. Implementing the Human Resources Development Blueprint.
2. Continuing the implementation of the Human Capital Management System (HCMS), which is integrated online and accessible to all employees.
3. Updating Standard Operating Procedures (SOPs), regulations, and policies that are no longer aligned with the current situation.
4. Evaluating the workload in each Division and other relevant work units to improve the Bank's business processes.
5. Recruiting prospective employees by adjusting to the Bank's needs, whether related to expanding the office network or replacing employees who have retired or left the Company.
6. Enhancing employee awareness, knowledge, and abilities in occupational health, safety, and the environment through publications, socializations, and training.
7. Continuously improving employee professionalism and competence through training programs conducted for both technical training and soft skills training.
8. Executing activities to strengthen cooperation and solidarity among employees in the Company. Conducting periodic evaluations regarding Key Performance Indicators (KPI).

Awards in Employment, Occupational Health, and Safety

In 2025, Bank Sulteng had not yet received any awards related to the implementation of Employment, Occupational Health, and Safety management.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN CONSUMER PROTECTION

Bank Sulteng senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dengan cara terus meningkatkan stabilitas pengadaan produk, mutu, dan peningkatan pelayanan yang berasaskan hubungan kepercayaan dan tanggung jawab kepada nasabah. Upaya ini mencerminkan bahwa Bank Sulteng sangat mengutamakan kepuasan konsumen.

Bank Sulteng juga sangat mengutamakan *Customer Focus* yaitu senantiasa berorientasi pada nasabah, membina hubungan baik, membangun kepercayaan, inovatif, proaktif dan cepat tanggap menghadapi keluhan dan masukan dari nasabah. Hal-hal inilah yang menjadi nilai tambah bagi Perusahaan.

Selain itu, Bank Sulteng sangat memperhatikan standar mutu dan layanan dalam menawarkan produk dan jasa yang kompetitif. Beragam program disusun sehingga dapat memberikan opsi dan kemudahan guna menjawab kebutuhan nasabah yang semakin kompleks.

Kebijakan Perlindungan Konsumen

Seiring dengan perkembangan industri perbankan, perlindungan terhadap nasabah sebagai konsumen menjadi semakin penting. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi payung hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Dengan adanya Undang-Undang tersebut juga dapat mengedukasi nasabah terhadap produk dan layanan Bank Sulteng yang akan digunakan.

Bank Sulteng telah menetapkan kebijakan terkait perlindungan konsumen yang sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK/07/2022 tentang Perlindungan Nasabah dan Masyarakat serta POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan ini diterbitkan dalam rangka mewujudkan perlindungan nasabah, menjaga kepercayaan nasabah serta memastikan kepatuhan hukum terhadap peraturan perundang-undangan.

Sebagai penjabaran POJK tersebut, secara rinci kebijakan Bank Sulteng terhadap perlindungan nasabah ditetapkan dalam:

- Surat Keputusan Direksi Nomor: 112/SK-DIR/BPD-ST/LSEC/2024 Tanggal 25 September tentang Buku Pedoman Perusahaan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat.
- Surat Keputusan Direksi Nomor: 153.SK-DIR/BPD-ST/LSEC/2024 Tanggal 25 November 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Pengaduan Nasabah.

Bank Sulteng is continually committed to providing the best service by continuously improving the stability of product provision, quality, and service enhancement based on trust and responsibility to customers.
This effort reflects that Bank Sulteng highly prioritizes customer satisfaction.

Bank Sulteng also places great emphasis on Customer Focus, continually orienting towards the customer, fostering good relationships, building trust, and being innovative, proactive, and responsive to customer complaints and feedback. These factors serve as added value for the Company.

Furthermore, Bank Sulteng pays close attention to quality and service standards in offering competitive products and services. Various programs are designed to provide options and conveniences to answer increasingly complex customer needs.

Consumer Protection Policy

Along with the development of the banking industry, protecting customers as consumers has become increasingly important. The Consumer Protection Law serves as a legal umbrella in providing protection for consumer rights. The existence of this Law can also educate customers regarding Bank Sulteng's products and services that will be used.

Bank Sulteng has established policies related to consumer protection that are in line with the Financial Services Authority Regulation Number 6/POJK/07/2022 concerning Customer and Public Protection and POJK Number 22 of 2023 concerning Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector. This regulation was issued to realize customer protection, maintain customer trust, and ensure legal compliance with laws and regulations.

As an elaboration of the POJK, Bank Sulteng's policy on customer protection is specifically stipulated in:

- Board of Directors Decree Number: 112/SK-DIR/BPD-ST/LSEC/2024 Dated September 25 concerning the Company Manual for Consumer and Public Protection.
- Board of Directors Decree Number: 153.SK-DIR/BPD-ST/LSEC/2024 Dated November 25, 2024, concerning Standard Operating Procedures for Customer Complaint Services.

Dengan adanya kebijakan dan SOP tersebut menjadi pedoman dan ketentuan tertulis bagi Bank Sulteng dalam mengimplementasikan aktivitas usaha dan memenuhi perlindungan nasabah, menjaga kepercayaan serta memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip Perlindungan Konsumen

Bank Sulteng memiliki prinsip perlindungan konsumen yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

- Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha dan/atau memberikan produk dan layanan kepada calon konsumen dan/atau konsumen.
- Memperlakukan atau melayani konsumen tidak diskriminatif, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan/atau konsumen.
- Memastikan pihak ketiga yang bekerja untuk dan/atau mewakili kepentingan Bank memperlakukan atau melayani konsumen tidak diskriminatif.
- Tidak melakukan tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma yang berlaku di masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau psikis terhadap calon konsumen dan/atau konsumen dalam melaksanakan kegiatan usaha.

Pusat Layanan Konsumen

Sebagaimana yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur Layanan Pengaduan Konsumen, Bank Sulteng memiliki mekanisme dalam penanganan keluhan konsumen. Kebijakan ini disusun sebagai pedoman dan ketentuan tertulis bagi Perusahaan dalam melaksanakan aktivitas usaha sebagai wujud pemenuhan perlindungan nasabah yang efektif, menjaga kepercayaan nasabah, serta memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, maka memudahkan konsumen/nasabah untuk menyampaikan persoalan keluhan, saran dan masukan sehingga dapat ditanggapi Perusahaan dengan cepat dan tepat.

Secara spesifik, Bank Sulteng telah memiliki saluran resmi yang disiapkan sebagai kontak konsumen untuk memudahkan konsumen menyampaikan keluhan, masukan, dan permintaan dengan menghubungi melalui layanan penerimaan pengaduan berikut:

- Layanan penerimaan pengaduan melalui *Call Center* Bank Sulteng yang tersedia 24 jam dengan nomor telepon 14069
- Layanan penerimaan pengaduan pada seluruh perwakilan kantor Cabang, Capem dan Kantor Kas Bank Sulteng pada jam operasional (08.15 s/d 15.00 WITA).

The existence of these policies and SOPs serves as guidelines and written provisions for Bank Sulteng in implementing business activities and fulfilling customer protection, maintaining trust, and ensuring Bank compliance with applicable laws and regulations.

Consumer Protection Principles

Bank Sulteng has consumer protection principles that have been implemented as follows:

- Acting in good faith in conducting business activities and/or providing products and services to prospective consumers and/or consumers.
- Treating or serving consumers non-discriminatorily, unless stipulated otherwise by laws and regulations and/or the consumers.
- Ensuring third parties working for and/or representing the Bank's interests treat or serve consumers non-discriminatorily.
- Not committing actions that violate laws and regulations or prevailing societal norms that may cause physical and/or psychological disturbance to prospective consumers and/or consumers in executing business activities.

Consumer Service Center

As stipulated in the Standard Operating Procedures for Consumer Complaint Services, Bank Sulteng has a mechanism for handling consumer complaints. This policy was formulated as a guideline and written provision for the Company in executing business activities to fulfill effective customer protection, maintain customer trust, and ensure Company compliance with laws and regulations. Thus, it facilitates consumers/customers to submit issues regarding complaints, suggestions, and input so that the Company can respond swiftly and accurately.

Specifically, Bank Sulteng has official channels prepared as consumer contacts to facilitate consumers in submitting complaints, input, and requests by reaching out through the following complaint reception services:

- Complaint reception service via the Bank Sulteng Call Center, available 24 hours at telephone number 14069
- Complaint reception service at all Branch Offices, Sub-Branch Offices (Capem), and Bank Sulteng Cash Offices during operational hours (08:15 to 15:00 WITA).

Pengaduan Konsumen

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Bank Sulteng telah mengelola dan menindaklanjuti setiap pengaduan konsumen kepada Perusahaan hingga tuntas dan melaporkannya kepada regulator.

Sepanjang tahun 2025, Bank Sulteng mendapatkan laporan terkait pengaduan konsumen yang disampaikan melalui media yang disediakan. Pengaduan yang masuk berjumlah 1.747 Pengaduan Nasabah dengan rincian sebagai berikut :

Consumer Complaints

As stated in the Financial Services Authority Regulation Number 22 of 2023 concerning Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector, Bank Sulteng has managed and followed up on every consumer complaint to the Company until resolution and reports it to the regulator.

Throughout 2025, Bank Sulteng received reports regarding consumer complaints submitted through the provided media. The incoming complaints totaled 1,747 Customer Complaints with the following details:

Rekapitulasi Penanganan Pengaduan Konsumen Tahun 2025
Recapitulation of Consumer Complaint Handling in 2025

Keterangan Description	Semester I Semester I	Semester II Semester II
Jumlah pengaduan yang ditangani Number of complaints	784	963
Jumlah pengaduan yang terselesaikan Number of complaints resolved	784	963
Jumlah pengaduan yang belum terselesaikan Number of unresolved complaints	0	0
Jumlah pengaduan yang diteruskan ke Bank indonesia / lembaga penyelesain sengketa Number of complaints forwarded to Bank Indonesia/institutions dispute resolution	0	0
Total Pengaduan Konsumen **Total Complaints**	**1.747**	**1.747**

Pengaduan konsumen yang disampaikan melalui media yang telah disediakan yaitu terkait Pengaduan ATM, *Mobile Banking* dan QRIS.

Consumer complaints submitted through the provided media were related to ATM, Mobile Banking, and QRIS Complaints.

Informasi Produk dan Layanan

Salah satu prinsip dasar perlindungan konsumen yaitu keterbukaan dan transparansi informasi produk dan layanan. Keakuratan, kebenaran, kejelasan serta tidak berpontensi menyesatkan mengenai informasi seputar produk dan layanan baik sebelum, saat maupun sesudah produk dan layanan digunakan oleh nasabah. Dalam informasi tersebut juga termasuk penyampaian data atau informasi yang akurat, dan uraian tentang risiko kerugian yang mungkin akan terjadi yang diakibatkan oleh hal-hal tertentu.

Bank Sulteng menyediakan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, benar, mudah diakses dan tidak berpotensi menyesatkan nasabah. Perusahaan senantiasa menggunakan istilah, frasa dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia dan mudah dimengerti oleh nasabah serta menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram dan tanda yang dapat dibaca secara jelas pada setiap dokumen mengenai informasi produk dan/atau layanan. Dalam

Product and Service Information

One of the basic principles of consumer protection is the openness and transparency of product and service information. Accuracy, truthfulness, clarity, and the absence of misleading potential regarding information surrounding products and services before, during, and after the products and services are utilized by the customer. This information also includes the delivery of accurate data or information, and a description of the risk of potential losses that may occur caused by specific matters.

Bank Sulteng provides information regarding products and/or services that is clear, accurate, true, easily accessible, and has no potential to mislead the customer. The Company consistently uses terms, phrases, and/or sentences that are simple in Indonesian and easily understood by customers, and uses letters, writing, symbols, diagrams, and signs that are clearly legible on every document containing product and/or service information.

hal penyediaan informasi mengenai produk dan/atau layanan akan digunakan oleh calon nasabah dan/atau nasabah negara asing, dokumen mengenai produk dan/atau layanan menggunakan Bahasa Indonesa harus disandingkan dengan Bahasa Asing.

Informasi mengenai produk dan/atau layanan yang dimaksud diantaranya; manfaat yang dapat diperoleh, biaya yang harus dibayarkan, risiko yang mungkin harus ditanggung, hak yang dapat diperoleh, kewajiban yang harus dipenuhi, persyaratan dan tata cara yang harus dipatuhi dan jenis akad yang disepakati.

Dalam praktiknya, Bank Sulteng telah mengkomunikasikan informasi produk/jasa melalui *website* Perusahaan dengan alamat www.banksulteng.co.id., juga dalam bentuk pembuatan *company profile* serta menggunakan media sosial Perusahaan secara efektif. Selain itu, Bank Sulteng menyediakan akses langsung dengan menggunakan teknologi *web based* dan media sosial untuk mengkomunikasikan produk dan layanan.

Berikut ini media yang telah disediakan Bank Sulteng untuk mengakses informasi produk dan layanan dengan mudah antara lain:

- *Call Center* : 14069
- *Website* : www.banksulteng.co.id.
- Media sosial :
  - Instagram : PT BANK SULTENG (@BankSulteng)
  - Twitter : Bank Sulteng (@BankSulteng)
  - Facebook : Bank Sulteng
  - Youtube : official Bank Sulteng

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Bidang Pelayanan Konsumen

Konsumen merupakan faktor penting untuk keberlangsungan suatu usaha. Demikian pula, peningkatan kualitas produk dan layanan menjadi hal yang sangat krusial, terutama menyangkut kenyamanan, kemudahan akses dan keselamatan konsumen.

Loyalitas dan kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan yang ditawarkan Bank Sulteng merupakan salah satu sasaran Perusahaan secara berkesinambungan. Guna meningkatkan layanan, maka Bank Sulteng terus mengupayakan berbagai inovasi dan penyempurnaan sehingga dapat memberikan opsi dan kemudahan yang mana selanjutnya akan memposisikan Bank Sulteng menjadi bank yang semakin terdepan dan terpercaya.

In the event that the provision of information regarding products and/or services will be used by prospective foreign customers and/or foreign customers, the documents regarding products and/or services using Indonesian must be juxtaposed with a Foreign Language.
The intended information regarding products and/or services includes; benefits that can be obtained, costs that must be paid, risks that may need to be borne, rights that can be acquired, obligations that must be fulfilled, requirements and procedures that must be complied with, and the type of agreed contract.

In practice, Bank Sulteng has communicated product/service information through the Company's website at www.banksulteng.co.id., as well as in the form of generating a company profile and effectively utilizing the Company's social media. Moreover, Bank Sulteng provides direct access utilizing web-based technology and social media to communicate products and services.

The following are media provided by Bank Sulteng to easily access product and service information, among others:

- Call Center : 14069
- Website : www.banksulteng.co.id.
- Social media :
  - Instagram : PT BANK SULTENG (@BankSulteng)
  - Twitter : Bank Sulteng (@BankSulteng)
  - Facebook : Bank Sulteng
  - Youtube : official Bank Sulteng

Corporate Social Responsibility Activities in Consumer Services

Consumers are a critical factor for the continuity of a business. Likewise, improving product and service quality is highly crucial, especially concerning convenience, accessibility, and consumer safety.

Consumer loyalty and trust in the products and services offered by Bank Sulteng is a continuous target for the Company. To enhance services, Bank Sulteng continuously seeks various innovations and improvements to provide options and conveniences, which will subsequently position Bank Sulteng as an increasingly leading and trusted bank.

Sepanjang tahun 2025, Bank Sulteng telah melakukan kegiatan tanggung jawab sosial bidang pelayanan konsumen (Edukasi Literasi dan Inklusi Keuangan) antara lain:

Throughout 2025, Bank Sulteng has conducted corporate social responsibility activities in consumer services (Financial Literacy and Inclusion Education), including:

No	Periode(Tahun)	kabupaten/Kota	Nama Kegiatan	Dokumentasi
1	2025	Banggai Laut	Edukasi Keuangan produk bank aman dan menguntungkan Financial Education: Safe and Profitable Bank Products	
2	2025	Salakan	Edukasi Keuangan produk bank aman dan menguntungkan Financial Education: Safe and Profitable Bank Products	
3	2025	Palu	Goes to school SDN Inpres Tanamodindi "Goes to School" Initiative: SDN Inpres Tanamodindi	
4	2025	Morowali	Goes to school SDN 9 Bungku "Goes to School" Initiative: SDN 9 Bungku	
5	2025	Poso	Goes to school Madrasah Ibtidayah Alkhairat Poso "Goes to School" Initiative: Madrasah Ibtidayah Alkhairat Poso	

No	Periode(Tahun)	kabupaten/Kota	Nama Kegiatan	Dokumentasi
6	2025	Morowali Utara	Goes to school SMP Alkhairat Bungintimbe "Goes to School" Initiative: SMP Alkhairat Bungintimbe	
7	2025	Donggala	Goes to school SDN 1 Banawa "Goes to School" Initiative: SDN 1 Banawa	
8	2025	Banggai Laut	Goes to school SDN Lokotoy "Goes to School" Initiative: SDN Lokotoy	
9	2025	Banggai	Goes to school SDN 1 Nambo "Goes to School" Initiative: SDN 1 Nambo	
10	2025	Tojo Una-una	Goes to school SMPN 3 Ampana Kota "Goes to School" Initiative: SMPN 3 Ampana Kota	
11	2025	Donggala	Goes to school SDN 15 Banawa "Goes to School" Initiative: SDN 15 Banawa	

No	Periode(Tahun)	kabupaten/Kota	Nama Kegiatan	Dokumentasi
12	2025	Sigi	Goes to school SDN 1 Kalukubula "Goes to School" Initiative: SDN 1 Kalukubula	
13	2025	Palu	Goes to school SDN Inpres 1 Lere "Goes to School" Initiative: SDN Inpres 1 Lere	
14	2025	Palu	Goes to school SDN Inpres 2 Lere "Goes to School" Initiative: SDN Inpres 2 Lere	
15	2025	Palu	Goes to school SDN Inpres 3 Lere "Goes to School" Initiative: SDN Inpres 3 Lere	
16	2025	Palu	Goes to school SDN Inpres 2 Kamonji "Goes to School" Initiative: SDN Inpres 2 Kamonji	

No	Periode(Tahun)	kabupaten/Kota	Nama Kegiatan	Dokumentasi
17	2025	Palu	Goes to school SD Alkhairat 1 Palu "Goes to School" Initiative: SD Alkhairat 1 Palu	
18	2025	Palu	Goes to school SD Inpres 1 Kamonji "Goes to School" Initiative: SD Inpres 1 Kamonji	
19	2025	Palu	Goes to school SD Inpres 1 Ujuna "Goes to School" Initiative: SD Inpres 1 Ujuna	
20	2025	Palu	Goes to school SD DDI Palu "Goes to School" Initiative: SD DDI Palu	
21	2025	Morowali	Goes to school SDN 01 Bungku "Goes to School" Initiative: SDN 01 Bungku	

No	Periode(Tahun)	kabupaten/Kota	Nama Kegiatan	Dokumentasi
22	2025	Buol	Goes to school SDN 08 Bunobogu "Goes to School" Initiative: SDN 08 Bunobogu	
23	2025	Sigi	Goes to school SDN 02 Kalukubula "Goes to School" Initiative: SDN 02 Kalukubula	
24	2025	Buol	Goes to school SDN 11 Gadung "Goes to School" Initiative: SDN 11 Gadung	
25	2025	Toli-toli	Goes to school SDN 02 Soni "Goes to School" Initiative: SDN 02 Soni	
26	2025	Parigi Moutong	Goes to school SDN Astina "Goes to School" Initiative: SDN Astina	
27	2025	Donggala	Goes to school SDN 16 Banawa "Goes to School" Initiative: SDN 16 Banawa	

No	Periode(Tahun)	kabupaten/Kota	Nama Kegiatan	Dokumentasi
28	2025	Toli-toli	Goes to school MI DDI Siapo "Goes to School" Initiative: MI DDI Siapo	
29	2025	Buol	Goes to school SDN 3 Paleleh Barat "Goes to School" Initiative: SDN 3 Paleleh Barat	
30	2025	Palu	Goes to school SD Inpres Bumi Bahari "Goes to School" Initiative: SD Inpres Bumi Bahari	
31	2025	Donggala	Goes to school SDN 11 Banawa "Goes to School" Initiative: SDN 11 Banawa	
32	2025	Tojo Una-una	Goes to school SDN 13 Ampana Kota "Goes to School" Initiative: SDN 13 Ampana Kota	
33	2025	Toli-toli	Goes to school SDN 17 Baolan "Goes to School" Initiative: SDN 17 Baolan	

No	Periode(Tahun)	kabupaten/Kota	Nama Kegiatan	Dokumentasi
34	2025	Parigi Moutong	Goes to school SD Inpres Tindaki "Goes to School" Initiative: SD Inpres Tindaki	
35	2025	Morowali Utara	Goes to school SMP Negeri 2 Petasia Timur "Goes to School" Initiative: SMP Negeri 2 Petasia Timur	
36	2025	Morowali Utara	Goes to school Paskibraka Morowali Utara "Goes to School" Initiative: Morowali Utara National Flag Hoisting Troop (Paskibraka)	
37	2025	Parigi Moutong	Goes to school Paskibraka Parigi "Goes to School" Initiative: Parigi National Flag Hoisting Troop (Paskibraka)	
38	2025	Palu Barat	Goes to school SDN Inpres Baru "Goes to School" Initiative: SDN Inpres Baru	
39	2025	Banggai Laut	Goes to school SMP Mansalean "Goes to School" Initiative: SMP Mansalean	

No	Periode(Tahun)	kabupaten/Kota	Nama Kegiatan	Dokumentasi
40	2025	Kolonodale	Sosialisasi Produk Bank di PKM Tambayoli Bank Product Socialization at Tambayoli Community Health Center (PKM)	
41	2025	Kolonodale	Sosialisasi Produk Bank di Sat. Damkar Bank Product Socialization at the Fire Department (Sat. Damkar)	
42	2025	Kolonodale	Sosialisasi Produk Bank di Sat. Pol PP Bank Product Socialization at the Civil Service Police Unit (Sat. Pol PP)	
43	2025	Donggala	Goes to school SMP 2 Banawa Selatan "Goes to School" Initiative: SMP 2 Banawa Selatan	
44	2025	Kota Palu	Sosialisasi Produk Bank dan Perlindungan Konsumen Bank Product and Consumer Protection Socialization	

No	Periode(Tahun)	kabupaten/Kota	Nama Kegiatan	Dokumentasi
45	2025	Bungku	Sosialisasi Goes to school SD 2 Bungku "Goes to School" Socialization: SD 2 Bungku	
46	2025	Bungku	Sosialisasi Goes to school SD 5 Matansala "Goes to School" Socialization: SD 5 Matansala	

Penghargaan Bidang Pelayanan Konsumen

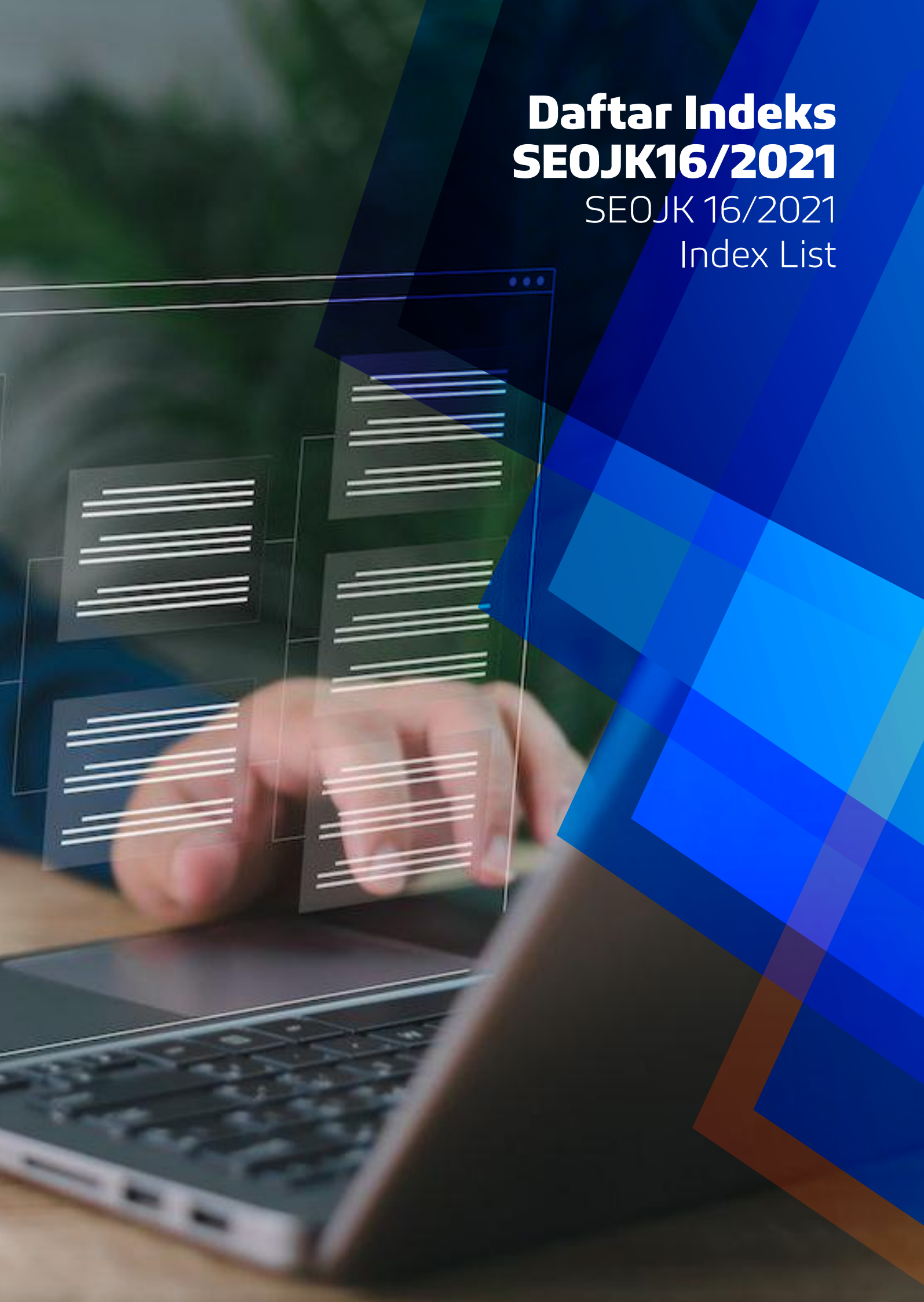
Pada tahun 2025, Bank Sulteng mendapat 2 (Dua) Penghargaan "IJK Literasi Keuangan Teraktif dan IJK Literasi Keuangan Peserta Terbanyak" dalam kegiatan Kejar Award oleh Otoritas Jasa Keuangan Propinsi Sulawesi Tengah.

Awards in Consumer Services

In 2025, Bank Sulteng received 2 (Two) Awards for "Most Active Financial Literacy Financial Services Institution (IJK)" and "Financial Services Institution with the Most Participants in Financial Literacy" in the Kejar Award organized by the Financial Services Authority of Central Sulawesi Province. .







Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK 16/2021
Index List

REFERENSI SEOJK NOMOR 16/SEOJK.04/2021: LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE SEOJK NUMBER 16/SEOJK.04/2021: ANNUAL REPORT OF ISSUERS OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman	Description
a. Ikhtisar Data Keuangan Penting | Summary of Key Financial Data		
Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat:	22-28	Summary of key financial data contains financial information presented in comparative form for 3 (three) financial years or since commencement of business if the Issuer or Public Company has been in business for less than 3 (three) years, including at least:
1). pendapatan/penjualan;		1). revenue/sales;
2). laba bruto;		2). gross profit;
3). laba (rugi);		3). profit (loss);
4). jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;		4). total profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests;
5). total laba (rugi) komprehensif;		5). total comprehensive income (loss);
6). jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;		6). total comprehensive income (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests;
7). laba (rugi) per saham;		7). earnings (loss) per share;
8). jumlah aset;		8). total assets;
9). jumlah liabilitas;		9). total liabilities;
10). jumlah ekuitas;		10). total equity;
11). rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;		11). ratio of profit (loss) to total assets;
12). rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;		12). profit (loss) to equity ratio;
13). rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan;		13). ratio of profit (loss) to revenue/sales;
14). rasio lancar;		14). current ratio;
15). rasio liabilitas terhadap ekuitas;		15). the ratio of liabilities to equity;
16). rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan		16). the ratio of liabilities to total assets; and
17). informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya.		17). information and other financial ratios relevant to the Issuer or Public Company and the type of industry.
b. Informasi Saham | Stock Information		
Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat:	29	Share information for Public Listed Companies shall at least contain:
1). saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: a). jumlah saham yang beredar; b). kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; c). harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan d). volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan. Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek;		1). shares issued for each quarterly period presented in comparative form for the last 2 (two) financial years, at least containing: a). number of shares outstanding; b). market capitalization based on the price on the stock exchange where the shares are listed; c). the highest, lowest, and closing share price based on the price on the stock exchange where the shares are listed; and d). trading volume on the stock exchange where the shares are listed. The information in (b), (c) and (d) is only disclosed if the shares are listed on the stock exchange;

Keterangan	Halaman	Description
2). dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai: a). tanggal pelaksanaan aksi korporasi; b). rasio pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham; c). jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; d). jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan e). harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi;		2). in the event of corporate actions that cause changes in shares, such as stock splits, reverse stock mergers, stock dividends, bonus shares, changes in par value of shares, issuance of convertible securities, as well as capital increases and decreases, the share information as referred to in the figure shall be added with at least an explanation regarding: a). date of implementation of corporate action; b). the ratio of stock splits, reverse stock mergers, stock dividends, bonus shares, number of convertible securities issued, and changes in the nominal value of shares; c). number of shares outstanding before and after the corporate action; d). number of convertible securities exercised (if any); and e). the share price before and after the corporate action;
3). dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) tersebut; dan		3). in the event of suspension and/or delisting during the financial year, explain the reasons for the suspension and/or delisting; and
4). dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (*delisting*) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) tersebut.		4). in the event that the suspension as referred to in point 3) and/or delisting process is still ongoing until the end of the Annual Report period, describe the actions taken to resolve the suspension and/or delisting.
c. Laporan Direksi | Directors' Report		
Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:		The report of the Board of Directors shall at least contain a brief description of:
1). kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a). strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; b). peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; c). proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik; d). perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan e). kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik;	48-66	1). performance of the Issuer or Public Company, containing at least: a). strategic strategies and policies of the Issuer or Public Company; b). the role of the Board of Directors in the formulation of strategic strategies and policies of the Issuer or Public Company; c). the process undertaken by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer's or Public Company's strategy; d). comparison between the results achieved and those targeted by the Issuer or Public Company; and e). obstacles faced by the Issuer or Public Company;
2). gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan		2). description of the business prospects of the Issuer or Public Company; and
3). penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.		3). implementation of governance of the Issuer or Public Company.
d. Laporan Dewan Komisaris | Board of Commissioners Report		
Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	36-47	The Board of Commissioners' report shall at least contain a brief description of:
1). penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi;		1). assessment of the performance of the Board of Directors regarding the management of the Issuer or Public Company, including the supervision of the Board of Commissioners in the formulation and implementation of the strategy of the Issuer or Public Company carried out by the Board of Directors;
2). pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan		2). views on the business prospects of the Issuer or Public Company prepared by the Board of Directors; and
3). pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik		3). views on the implementation of governance of the Issuer or Public Company

Keterangan	Halaman	Description
e. Profil Emiten atau Perusahaan Publik | Profile of Issuer or Public Company		
Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat informasi:	69-102	Profile of Issuer or Public Company at least contains information:
1). nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku;	79	1). name of the Issuer or Public Company including if there is a change of name, the reason for the change, and the effective date of the change of name in the financial year;
2). akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: a). alamat; b). nomor telepon; c). alamat surat elektronik; dan d). alamat situs web;	71, 74-75	2). access to the Issuer or Public Company including branch offices or representative offices that enable the public to obtain information about the Issuer or Public Company, including: a). address; b). telephone number; c). electronic mail address; and d). website address;
3). riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	76-79	3). brief history of the Issuer or Public Company;
4). visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik serta budaya perusahaan (*corporate culture*) atau nilai-nilai perusahaan;	82-85	4). vision and mission of the Issuer or Public Company as well as corporate culture or corporate values;
5). kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan;	90-98	5). business activities according to the latest articles of association, business activities carried out in the financial year, and types of goods and/or services produced;
6). wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan	98-99	6). operational area of the Issuer or Public Company; operational area is the area or region where operational activities are carried out or the scope of the company's operational activities.
7). struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan;	100-101	7). organizational structure of the Issuer or Public Company in the form of a chart, at least up to a structure of 1 (one) level below the Board of Directors including committees under the Board of Directors (if any) and committees under the Board of Commissioners, accompanied by names and positions;
8). daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan;	102	8). membership list of industry associations both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance;
9). profil Direksi, paling sedikit memuat: a). nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; b). foto terbaru; c). usia; d). kewarganegaraan; e). riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; f). riwayat jabatan, meliputi informasi: (1). dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; (2). rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan (3). pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; g). hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan h). perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	106-111	9). profile of the Board of Directors, containing at least: a). name and title appropriate to duties and responsibilities; recent photograph; b). Recent photo; c). Age; d). citizenship; e). education and/or certification history; f). position history, including information: (1). the legal basis of appointment as a member of the Board of Directors of the relevant Issuer or Public Company; (2). concurrent positions, either as members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and/or members of committees and other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that the members of the Board of Directors do not have concurrent positions, then disclose the matter; and (3). work experience along with the period of time both inside and outside the Issuer or Public Company; g). affiliated relationships with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly up to the individual owner, including the name of the affiliated party. In the event that a member of the Board of Directors has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose the same; and h). changes in the composition of the Board of Directors and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Directors, it shall be disclosed;

Keterangan	Halaman	Description
10). profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: a). nama dan jabatan; b). foto terbaru; c). usia; d). kewarganegaraan; e). riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; f). riwayat jabatan, meliputi informasi: (1). dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris; (2). dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; (3). rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan (4). pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	112-117	10). profile of the Board of Commissioners, containing at least: a). name and position; b). recent photograph; c). age; d). nationality; e). education and/or certification history; f). position history, including information: (1). legal basis for appointment as a member of the Board of Commissioners; (2). the legal basis for the first appointment as a member of the Board of Commissioners who is an independent commissioner of the relevant Issuer or Public Company; (3). dual positions, either as member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of committee and other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Commissioners does not hold concurrent positions, this should be disclosed; and (4). work experience along with the period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;
g). hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut;	Profil Direksi (hal 106-111) dan Profil Dewan Komisaris (hal 112-117)	g). affiliation with other members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly up to the individual owner, including the name of the affiliated party; In the event that a member of the Board of Commissioners has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose the same;
h). pernyataan independensi komisaris independent dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan		h). statement of independence of independent commissioners in the event that independent commissioners have served more than 2 (two) periods; and
i). perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;		i). changes in the composition of the Board of Commissioners and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the Board of Commissioners, it shall be disclosed;
11). dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya;	104, 112	11). in the event that there is a change in the composition of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners that occurs after the end of the financial year until the deadline for submitting the Annual Report, the composition included in the Annual Report is the last and previous composition of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
12). jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	130-131	12). number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contract) in the financial year; Disclosure of information can be presented in tabular form.
13). nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai: a). pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik; b). anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan c). kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik; Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel.	132-138	13). names of shareholders and percentage of ownership at the beginning and end of the financial year, which consists of information regarding: a). shareholders who own 5% (five percent) or more of the shares of the Issuer or Public Company; b). members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who own shares of the Issuer or Public Company. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not own shares, then disclose the matter; and c). groups of public shareholders, namely groups of shareholders who each own less than 5% (five percent) of the shares of the Issuer or Public Company; The information above can be presented in tabular form.

Keterangan	Halaman	Description
14). persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	134	14). percentage of indirect ownership of the Issuer's or Public Company's shares by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the financial year, including information on shareholders registered in the register of shareholders for indirect ownership purposes. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not have indirect ownership of the Issuer's or Public Company's shares, such disclosure shall be made.
15). jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi: a). kepemilikan institusi lokal; b). kepemilikan institusi asing; c). kepemilikan individu lokal; dan d). kepemilikan individu asing;	134	15). number of shareholders and percentage of ownership as of the end of the financial year by classification: a). local institutional ownership; b). foreign institutional ownership; c). local individual ownership; and d). foreign individual ownership;
16). informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	133	16). information on major shareholders and controlling shareholders of the Issuer or Public Company, either directly or indirectly, down to individual owners, presented in the form of schemes or charts;
17). nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama; Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut.	147	17). name of subsidiaries, associated companies, joint venture companies over which the Issuer or Public Company has joint control (if any), together with percentage of share ownership, line of business, total assets, and operating status of subsidiaries, associated companies, joint venture companies; For subsidiaries, information on the address of the subsidiary is added.
18). kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada);	147	18). chronological listing of shares, number of shares, nominal value, and offering price from the beginning of the listing until the end of the financial year as well as the name of the stock exchange where the shares of the Issuer or Public Company are listed, including stock splits, reverse stock combinations, stock dividends, bonus shares, and changes in the nominal value of shares, implementation of convertible securities, implementation of capital increase and reduction (if any);
19). informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada);	147	19). information on the listing of other securities other than the securities as referred to in point 18), which have not matured in the financial year shall at least contain the name of the securities, year of issuance, interest rate/yield, maturity date, offering value, and securities rating (if any);
20). informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi: a). nama dan alamat; b). periode penugasan; c). informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan; d). biaya jasa (*fee*) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan e). dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel.	148	20). information on the use of public accounting services (AP) and public accounting firms (KAP) and their networks/associations/alliances include: a). name and address; b). period of the assignment; c). information on audit and/or non-audit services provided; d). audit and/or non-audit fees for each assignment provided during the fiscal year; and e). in the event that the AP and KAP along with its network/association/alliance, appointed do not provide non-audit services, then disclose the information; and Disclosure of information on the use of AP and KAP services and their networks/associations/alliances can be presented in tabular form.
21). nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP.	149	21). name and address of capital market supporting institutions and/or professionals other than AP and KAP.
f. Analisis dan Pembahasan Manajemen | Management Discussion and Analysis		
Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat:		Management's discussion and analysis contains analysis and discussion of the financial statements and other key information with an emphasis on material changes that occurred during the financial year, which includes at least:

Keterangan	Halaman	Description
1). tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: a). produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya; b). pendapatan/penjualan; dan c). profitabilitas;	200-211	1). review of operations per business segment in accordance with the type of industry of the Issuer or Public Company, at least regarding: a). production, including process, capacity, and development; b). revenue/sales; and c). profitability;
2). kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai: a). aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; b). liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; ekuitas; c). pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan d). arus kas;	212-236	2). comprehensive financial performance which includes a comparison of financial performance in the last 2 (two) fiscal years, an explanation of the causes of the changes and the impact of these changes, at least regarding: a). current assets, non-current assets, and total assets; b). current liabilities, long-term liabilities, and total liabilities; equity; c). revenue/sales, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and total comprehensive income (loss); and d). cash flows;
3). kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	237-238	3). ability to pay debts or liabilities by presenting relevant ratio calculations;
4). tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	239-240	4). collectibility level of receivables of the Issuer or Public Company by presenting relevant ratio calculation;
5). struktur modal (*capital structure*) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure*) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud;	242-243	5). capital structure and management's policy on the capital structure, along with the basis for determining the policy;
6). bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit memuat: a). tujuan dari ikatan tersebut; b). sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut; c). mata uang yang menjadi denominasi; dan d). langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;	243	6). discussion of material ties for investment in capital goods with an explanation containing at least: a). the purpose of the bond; b). the expected source of funds to fulfill the bond; c). the currency in which it is denominated; and d). measures planned by the Issuer or Public Company to hedge the risk of the related foreign currency position;
7). bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: a). jenis investasi barang modal; b). tujuan investasi barang modal; dan c). nilai investasi barang modal yang dikeluarkan;	243	7). a discussion of the investment in capital goods realized in the last financial year, at least containing: a). type of capital goods investment; b). purpose of capital goods investment; and c). the value of capital goods investment incurred;
8). informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada);	251	8). information and material facts that occurred after the date of the accountant's report (if any);
9). prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya;	251-252	9). business prospects of the Issuer or Public Company in relation to industry conditions, the economy in general and international markets accompanied by quantitative supporting data from reliable data sources;
10). perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai: a). pendapatan/penjualan; b). laba (rugi); c). struktur modal (*capital structure*); atau d). hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	248-250	10). comparison between the target/projection at the beginning of the financial year and the results achieved (realization), regarding: a). revenue/sales; b). profit (loss); c). capital structure; or d). other matters considered important for the Issuer or Public Company;
11). target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai: a). pendapatan/penjualan; b). laba (rugi); c). struktur modal (*capital structure*); d). kebijakan dividen; atau e). hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	250-251	11). target/projection to be achieved by the Issuer or Public Company for the next 1 (one) year, regarding: a). revenue/sales; b). profit (loss); c). capital structure; d). dividend policy; or e). other matters considered important for the Issuer or Public Company;
12). aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;	253-255	12). marketing aspects of the goods and/or services of the Issuer or Public Company, at least regarding marketing strategy and market share;

Keterangan	Halaman	Description
13). uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit: a). kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih; b). tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; c). jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan d). jumlah dividen per tahun yang dibayar; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	256	13). description of dividends for the last 2 (two) financial years, at least: a). dividend policy, including information on the percentage of dividends distributed to net income; b). cash dividend payment date and/or non-cash dividend distribution date; c). the amount of dividends per share (cash and/or non-cash); and d). the amount of dividends per year paid; Disclosure of information may be presented in tabular form. In the event that the Issuer or Public Company has not distributed dividends in the last 2 (two) years, it shall disclose the same.
14). realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan: a). dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan b). dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut;	257	14). realization of the use of proceeds from the public offering, provided that: c). in the event that during the financial year, the Issuer has an obligation to submit a report on the realization of the use of proceeds, then disclose the cumulative realization of the use of proceeds from the public offering up to the end of the financial year; and d). in the event that there is a change in the use of proceeds as stipulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the report on the realization of the use of proceeds from a public offering, the Issuer shall explain such change;
15). informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit memuat: a). tanggal, nilai, dan objek transaksi; b). nama pihak yang melakukan transaksi; c). sifat hubungan afiliasi (jika ada); d). penjelasan mengenai kewajaran transaksi; e). pemenuhan ketentuan terkait; dan f). dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi: (1). pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*armslength principle*); dan (2). peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*armslength principle*); g). untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut. h). untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut; i). dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	257-258	15). material information (if any), among others regarding investment, expansion, divestment, merger/consolidation, acquisition, debt/capital restructuring, material transactions, affiliated transactions, and conflict of interest transactions, which occurred in the financial year, at least contains: a). date, value, and object of the transaction; b). the name of the party conducting the transaction; c). nature of affiliated relationship (if any); d). explanation of the fairness of the transaction; e). fulfillment of related provisions; and f). in the event that there is an affiliated relationship, in addition to disclosing the information as referred to in letter a) up to letter e), the Issuer or Public Company shall also disclose the information: (1). a statement from the Board of Directors that the related party transaction has gone through adequate procedures to ensure that the related party transaction is carried out in accordance with generally accepted business practices, among others, by fulfilling the armslength principle; and (2). The role of the Board of Commissioners and the audit committee in conducting adequate procedures to ensure that affiliated transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, among others, by fulfilling the armslength principle; g). For affiliated transactions or material transactions that are business activities carried out in order to generate business income and are carried out routinely, repeatedly, and/or continuously, an explanation is added that the affiliated transaction or material transaction is a business activity carried out in order to generate business income and is carried out routinely, repeatedly, and/or continuously; In the event that the affiliated transaction or material transaction has been disclosed in the annual financial report, information regarding the reference to the disclosure in the annual financial report shall be added. h). For the disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that are the result of the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, information is added regarding the date of the GMS that approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions; i). in the event that there is no affiliated transaction and/or conflict of interest transaction, it is disclosed regarding this matter;

Keterangan	Halaman	Description
16). perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan	264	16). changes in laws and regulations that significantly affect the Issuer or Public Company and their impact on the financial statements (if any); and
17). perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada).	264-265	17). changes in accounting policies, reasons and impact on the financial statements (if any).
g. Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik | Governance of Issuers or Public Companies		
Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:		The governance of the Issuer or Public Company shall at least contain a brief description of:
1). RUPS, paling sedikit memuat a). Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi: (1). keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan (2). keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan; b). dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	301-311	1). GMS, at least contains a). Information regarding GMS resolutions in the financial year and 1 (one) year prior to the financial year includes: (1). resolutions of the GMS in the financial year and 1 (one) year prior to the financial year that are realized in the financial year; and (2). resolutions of the GMS in the financial year and 1 (one) year prior to the financial year that have not been realized along with the reasons for not being realized; b). in the event that the Issuer or Public Company uses an independent party in the implementation of the GMS to conduct vote counting, it shall disclose such matter;
2). Direksi, paling sedikit memuat: a). tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel. b). pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Direksi; c). kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. d). pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi: (1). kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan (2). pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada); e). penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat: (1). prosedur penilaian kinerja; dan (2). kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan f). dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas ireksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	337-350	2). Board of Directors, at least contains: a). duties and responsibilities of each member of the Board of Directors; Information regarding the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors is described and can be presented in the form of a table. b). a statement that the Board of Directors has a guideline or charter of the Board of Directors; c). policies and implementation of the frequency of Board of Directors meetings, joint Board of Directors meetings with the Board of Commissioners, and the level of attendance of members of the Board of Directors in such meetings including attendance at the GMS; Information on the level of attendance of members of the Board of Directors in meetings of the Board of Directors, joint meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, or GMS can be presented in the form of a table. d). training and/or competency improvement for members of the Board of Directors: (1). training policy and/or competency improvement of members of the Board of Directors, including orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any); and (2). training and/or competency improvement attended by members of the Board of Directors in the financial year (if any); e). the Board of Directors' assessment of the performance of committees that support the implementation of the duties of the Board of Directors in the financial year contains at least: (1). performance appraisal procedures; and (2). criteria used such as performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings; and f). in the event that the Issuer or Public Company does not have a committee that supports the implementation of the duties of the board of directors, it shall disclose such matter.

Keterangan	Halaman	Description
3). Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: a). tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; b). pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris; c). kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. d). pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris: (1). kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan (2). pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada); e). penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: (1). prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; (2). kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan (3). pihak yang melakukan penilaian. f). penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi: (1). prosedur penilaian kinerja; dan (2). kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat;	312-336	3). The Board of Commissioners, at least contains: a). duties and responsibilities of the Board of Commissioners; b). a statement that the Board of Commissioners has a guideline or charter for the Board of Commissioners; c). policy and implementation of the frequency of Board of Commissioners meetings, Board of Commissioners meetings with the Board of Directors and the attendance rate of members of the Board of Commissioners in such meetings including attendance at the GMS; Information on the level of attendance of members of the Board of Commissioners in Board of Commissioners meetings, Board of Commissioners meetings with the Board of Directors, or GMS can be presented in the form of a table. d). training and/or competency improvement for members of the Board of Commissioners: (1). training and/or competency improvement policies for members of the Board of Commissioners, including orientation programs for newly appointed members of the Board of Commissioners (if any); and (2). training and/or competency improvement attended by members of the Board of Commissioners in the financial year (if any); e). performance assessment of the Board of Directors and the Board of Commissioners and each member of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, at least containing: (1). procedures for conducting performance appraisals; (2). criteria used such as performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings; and (3). the party conducting the assessment. f). The Board of Commissioners' assessment of the performance of the Committees that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners in the financial year includes: (1). performance appraisal procedures; and (2). criteria used such as performance achievements during the financial year, competence and meeting attendance;
4). Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: a). prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan b). prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: (1). prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; (2). struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/ bonus dan lainnya; dan (3). besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	394-396	4). Nomination and remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners, at least contains: a). nomination procedures, including a brief description of the policy and process for nominating members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and b). procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners, among others: (1). procedures for determining the remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners; (2). remuneration structure of the Board of Directors and Board of Commissioners such as salary, allowances, tantiem/bonus and others; and (3). the amount of remuneration of each member of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners; Disclosure of information may be presented in tabular form.
5). Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat: a). nama; b). dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah; c). periode penugasan dewan pengawas syariah; d). tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; dan e). frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik;	NA Dikarenakan Bank Sulteng tidak menjalankan usaha syariah	5). Sharia supervisory board, for Issuers or Public Companies conducting business activities based on sharia principles as stated in the articles of association, at least contains: a). Name; b). legal basis for the appointment of the sharia supervisory board; c). the period of assignment of the sharia supervisory board; d). duties and responsibilities of the sharia supervisory board; and e). the frequency and manner of providing advice and counsel and supervising the fulfillment of sharia principles in the capital market to Issuers or Public Companies;

Keterangan	Halaman	Description
6). Komite audit, paling sedikit memuat: a). nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; b). usia; c). kewarganegaraan; d). riwayat pendidikan; e). riwayat jabatan, meliputi informasi: (1). dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; (2). rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan (3). pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; f). periode dan masa jabatan anggota komite audit; g). pernyataan independensi komite audit; h). pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); i). kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan j). pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (*charter*) komite audit;	350-363	6). The audit committee, at least contains: a). name and position in committee membership; b). Age; c). citizenship; d). education history; e). position history, including information: (1). legal basis for appointment as a committee member; (2). concurrent positions, either as members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or members of committees and other positions (if any); and (3). work experience along with the period of time both inside and outside the Issuer or Public Company; f). period and tenure of audit committee members; g). statement of audit committee independence; h). training and/or competency improvement that has been participated in the financial year (if any); i). policies and implementation of the frequency of audit committee meetings and the level of attendance of audit committee members at such meetings; and j). implementation of audit committee activities in the financial year in accordance with the guidelines or charter of the audit committee;
7). komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a). nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; b). usia; c). kewarganegaraan; d). riwayat pendidikan; e). riwayat jabatan, meliputi informasi: (1). dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; (2). rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan (3). pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; f). periode dan masa jabatan anggota komite; g). pernyataan independensi komite; h). pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); i). uraian tugas dan tanggung jawab; j). pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*); k). kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; l). uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan m).dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan: (1). alasan tidak dibentuknya komite; dan (2). pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi;	363-368	7). nomination and remuneration committee or function of the Issuer or Public Company, at least contains: a). name and position in committee membership; b). Age; c). citizenship; d). education history; e). position history, including information: (1). legal basis for appointment as a committee member; (2). concurrent positions, either as members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or members of committees and other positions (if any); and (3). work experience along with the period of time both inside and outside the Issuer or Public Company; f). terms and tenure of committee members; g). committee independence statement; h). training and/or competency improvement that has been participated in the financial year (if any); i). job descriptions and responsibilities; j). statement that it has a guideline or charter; k). policy and implementation of the frequency of meetings and the level of attendance of members at such meetings; l). a brief description of the implementation of activities in the financial year; and m).in the event that no nomination and remuneration committee is formed, the Issuer or Public Company shall disclose the information as referred to in letter i) up to letter l) and disclose: (1). the reasons for not establishing the committee; and (2). parties who carry out the nomination and remuneration function;

Keterangan	Halaman	Description
8). komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: a). nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; b). usia; c). kewarganegaraan; d). riwayat pendidikan; e). riwayat jabatan, meliputi informasi: (1). dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; (2). rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan (3). pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; f). periode dan masa jabatan anggota komite; g). pernyataan independensi komite; h). pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan i). uraian tugas dan tanggung jawab; j). pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) komite; k). kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan l). uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku;	368-391	8). other committees owned by the Issuer or Public Company in order to support the functions and duties of the Board of Directors (if any) and/or committees that support the functions and duties of the Board of Commissioners, at least containing: a). name and position in committee membership; b). Age; c). citizenship; d). education history; e). position history, including information: (1). legal basis for appointment as a committee member; (2). concurrent positions, either as members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or members of committees and other positions (if any); and (3). work experience along with the period of time both inside and outside the Issuer or Public Company; f). terms and tenure of committee members; g). committee independence statement; h). training and/or competency improvement that has been participated in the financial year (if any); and i). job descriptions and responsibilities; j). statement that it has a committee guideline or charter; k). policies and implementation of the frequency of committee meetings and the level of attendance of committee members at such meetings; and l). brief description of the implementation of committee activities during the year under review;
9). Sekretaris perusahaan, paling sedikit memuat: a). nama; b). domisili; c). riwayat jabatan, meliputi: (1). dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan (2). pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; d). riwayat pendidikan; e). pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan f). uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku;	398-403	9). The company secretary, at least contains: a). Name; b). domicile; c). position history, including: (1). legal basis for appointment as company secretary; and (2). work experience along with the period of time both inside and outside the Issuer or Public Company; d). education history; e). training and/or competency improvement attended in the financial year; and f). brief description of the implementation of the duties of the company secretary in the financial year;
10). Unit audit internal, paling sedikit memuat: a). nama kepala unit audit internal; b). riwayat jabatan, meliputi: (1). dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan (2). pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; c). kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); d). pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; e). struktur dan kedudukan unit audit internal; f). uraian tugas dan tanggung jawab; g). pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) unit audit internal; dan h). uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit;	410-423	10). Internal audit unit, including at least: a). name of the head of the internal audit unit; b). position history, including: (1). legal basis for appointment as head of internal audit unit; and (2). work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company; c). qualification or certification as an internal audit professional (if applicable); d). training and/or competency improvement attended in the financial year; e). structure and position of the internal audit unit; f). job descriptions and responsibilities; g). a statement that the internal audit unit has a guideline or charter; and h). a brief description of the implementation of the internal audit unit's duties in the financial year including the policy and implementation of the frequency of meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or audit committee;
11). uraian mengenai sistem pengendalian internal (*internal control*) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a). pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; b). tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; dan c). pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal;	404-410	11). description of the internal control system implemented by the Issuer or Public Company, at least containing: a). financial and operational controls, and compliance with other laws and regulations; b). review of the effectiveness of the internal control system; and c). statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system;

Keterangan	Halaman	Description
12). sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a). gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; b). jenis risiko dan cara pengelolaannya; c). tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan d). pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko;	426-439	12). risk management system implemented by the Issuer or Public Company, at least containing: a). overview of the risk management system of the Issuer or Public Company; b). types of risk and how they are managed; c). review of the effectiveness of the Issuer's or Public Company's risk management system; and d). statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners or audit committee on the adequacy of the risk management system;
13). perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat: a). pokok perkara/gugatan; b). status penyelesaian perkara/gugatan; dan c). pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;	477-482	13). legal cases with material impact faced by the Issuer or Public Company, its subsidiaries, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners (if any), at least containing: a). the subject matter of the case/defense; b). the status of the settlement of the case/defense; and c). its effect on the condition of the Issuer or Public Company;
14). informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada);	482	14). information on administrative sanctions/sanctions imposed on the Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, by the Financial Services Authority and other authorities in the financial year (if any);
15). informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi: a). pokok-pokok kode etik; b). bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya;dan c). pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	456-460	15). information on the code of ethics of the Issuer or Public Company includes: a). principles of the code of ethics; b). the form of socialization of the code of ethics and its enforcement efforts; and c). a statement that the code of ethics applies to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Issuer or Public Company;
16). uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock ownership program*/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (*employee stock ownership program*/ESOP); Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock ownership program*/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (*employee stock ownership program*/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat: a). jumlah saham dan/atau opsi; b). jangka waktu pelaksanaan; c). persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan d). harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan;	456	16). a brief description of the policy of providing performance-based long-term compensation to management and/or employees owned by the Issuer or Public Company (if any), among others in the form of management stock ownership program (MSOP) and/or employee stock ownership program (ESOP); In the case of compensation in the form of management stock ownership program (MSOP) and/or employee stock ownership program (ESOP), the information disclosed shall at least contain: a). number of shares and/or options; b). period of exercise; c). requirements of eligible employees and/or management; and d). exercise price or determination of exercise price;
17). uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai: a). kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan b). pelaksanaan atas kebijakan dimaksud;	482-483	17). brief description of the information disclosure policy regarding: a). share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) business days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of the Public Listed Company; and b). implementation of the policy;
18). uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) di Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a). cara penyampaian laporan pelanggaran; b). perlindungan bagi pelapor; c). penanganan pengaduan; d). pihak yang mengelola pengaduan; dan e). hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit: (1). jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan (2). tindak lanjut pengaduan; Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	461-467	18). description of the whistleblowing system in the Issuer or Public Company, at least containing: a). how to submit a violation report; b). protection for whistleblowers; c). complaint handling; d). parties who manage complaints; and e). results of complaint handling, at least: (1). the number of complaints received and processed in the fiscal year; and (2). follow-up of complaints; In the event that the Issuer or Public Company does not have a whistleblowing system, it shall disclose this matter.

Keterangan	Halaman	Description
19). uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a). program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan b). pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; c). Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud.	470-475	19). description of the anti-corruption policy of the Issuer or Public Company, at least containing: a). programs and procedures in place to address corruption, kickbacks, fraud, bribery and/or gratuities within the Issuer or Public Company; and b). anti-corruption training/socialization to employees of the Issuer or Public Company; c). In the event that the Issuer or Public Company does not have an anti-corruption policy, the reasons for not having such a policy should be explained.
20). penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi: a). pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau b). penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternative pelaksanaannya (jika ada). Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	292	20). implementation of the Public Company governance guidelines for Issuers that issue equity securities or Public Companies, including: a). a statement regarding recommendations that have been implemented; and/or b). explanation of recommendations that have not been implemented, along with reasons and alternative implementation (if any). Disclosure of information may be presented in tabular form.
h. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik Social and Environmental Responsibility of Issuers or Public Companies		
1). Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a). penjelasan strategi keberlanjutan; b). ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup); c). profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik; d). penjelasan Direksi; e). tata kelola keberlanjutan; f). kinerja keberlanjutan; g). verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada; h). lembar umpan balik (*feedback*) untuk pembaca, jika ada; dan i). tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya;	488-517	1). The information disclosed in the social and environmental responsibility section constitutes the Sustainability Report as referred to in the Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, containing at least: a). explanation of sustainability strategy; b). overview of sustainability aspects (economic, social and environmental); c). brief profile of the Issuer or Public Company; d). explanation of the Board of Directors; e). sustainability governance; f). sustainability performance; g). written verification from independent parties, if any; h). feedback sheet for readers, if any; and i). the Issuer's or Public Company's response to the previous year's report feedback;
2). Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;	Laporan Keberlanjutan, 26-201	2). The Sustainability Report as referred to in point 1), must be prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as set out in Appendix II which is an integral part of this Circular Letter of the Financial Services Authority;
3). informasi Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) pada angka 1) dapat: a). diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/atau b). merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik;	Laporan Keberlanjutan, 9-21	3). informasi Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) pada angka 1) dapat: a). disclosed in other relevant sections outside the social and environmental responsibility section, such as the Board of Directors' explanation of the Sustainability Report disclosed in the relevant section of the Board of Directors' Report; and/or b). refer to other sections outside the social and environmental responsibility section while still referring to the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Report for Issuers and Public Companies as set out in Appendix II which is an integral part of this Circular Letter of the Financial Services Authority, such as the profile of the Issuer or Public Company;
4). Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan;	Laporan Keberlanjutan, 26-201	4). The Sustainability Report as referred to in point 1) is an integral part of the Annual Report but can be presented separately with the Annual Report;

Keterangan	Halaman	Description
5). Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus: a). memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan b). disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;	Laporan Keberlanjutan, 26-201	5). In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, the information disclosed in the Sustainability Report must: a). contains all information as referred to in number 1); and b). prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Report for Issuers and Public Companies as set out in Appendix II which is an integral part of this Circular Letter of the Financial Services Authority;
6). Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan; dan	Laporan Keberlanjutan, 126-185	6). In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, the social and environmental responsibility section shall contain information that information regarding social and environmental responsibility has been disclosed in the Sustainability Report presented separately from the Annual Report; and
7). Penyampaian Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.	Laporan Keberlanjutan, 26-201	7). Submission of the Sustainability Report that is presented separately with the Annual Report must be submitted together with the submission of the Annual Report.
i. Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit | Audited Annual Financial Statements		
Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan tahunan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan berkala perusahaan efek dalam hal Emiten merupakan perusahaan efek.	540-627	The annual financial statements contained in the Annual Report are prepared in accordance with Indonesian financial accounting standards and have been audited by a public accountant registered with the Financial Services Authority. The annual financial report shall contain a statement regarding the responsibility for the financial statements as stipulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the responsibility of the Board of Directors for financial statements or the laws and regulations in the capital market sector that regulate the periodic reports of securities companies in the event that the Issuer is a securities company.
j. Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Statement Letter of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners on the Responsibility for the Annual Report		
Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.	67	The statement letter of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners regarding responsibility for the Annual Report is prepared in accordance with the format of the Statement Letter of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners regarding Responsibility for the Annual Report as set out in Appendix I which is an integral part of this Circular Letter of the Financial Services Authority.

Referensi Bonus PUGKI 2021

Keterangan	Halaman	Description
Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris (PUGKI 1.3.2)	- dan -	Types of decisions requiring Board of Commissioners approval (PUGKI 1.3.2)
Rincian tugas Komisaris Utama (PUKGI 1.3.13.1)	-	Details of the duties of the President Commissioner (PUKGI 1.3.13.1)
Kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading (PUKGI 7.2.3)	-	Policy to prevent insider trading (PUKGI 7.2.3)
Apakah korporasi menerbitkan laporan tahunan secara terintegrasi yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek korporasi di masa depan, sehingga membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan? (PUKGI 6.2.4)	disajikan terpisah dalam Buku Buku *Sustainability Report* (Laporan Keberlanjutan) are presented separately in the Sustainability Report Book.	Does the corporation publish an integrated annual report that puts historical performance into context and describes the corporation's risks, opportunities and future prospects, thereby helping shareholders and stakeholders understand the corporation's strategic objectives and its progress in creating sustainable value? (PUKGI 6.2.4)

Referensi Bonus ASEAN CG *Scorecard*

Keterangan	Halaman	Description
Tanggung jawab Komite Audit dalam pemberian rekomendasi atas penunjukan dan pemberhentian auditor eksternal (E.2.24)	-	Audit Committee's responsibility in providing recommendations on the appointment and dismissal of external auditors (E.2.24)
Deskripsi proses tata kelola terkait isu IT termasuk disruption (gangguan), *cyber security* (keamanan dunia maya), dan *disaster recovery* (pemulihan bencana) untuk memastikan semua risiko utama telah diidentifikasi, dikelola, dan dilaporkan pada Direksi (B.E.5.1)	-	Description of governance processes related to IT issues including disruption, cyber security, and disaster recovery to ensure all key risks are identified, managed, and reported to the Board of Directors (B.E.5.1)
Kebijakan penghargaan/kompensasi yang memperhitungkan kinerja perusahaan jangka panjang (C.3.3)	-	Reward/compensation policies that take into account long-term company performance (C.3.3)
Kebijakan untuk melakukan penelaahan dan persetujuan transaksi dengan pihak berelasi yang material/ signifikan (D.3.1)	-	Policy to review and approve transactions with material/ significant related parties (D.3.1)
Kebijakan terkait perencanaan atas suksesi anggota Direksi dan managemen kunci (E.5.3)	-	Policy on succession planning for members of the Board of Directors and key management (E.5.3)
Kerangka pelaporan berkelanjutan yang diakui secara internasional (contoh: GRI, *Integrated Reporting*, SASB) yang diadopsi oleh Perusahaan (B.C.1.1)	-	Internationally recognized sustainability reporting frameworks (e.g. GRI, Integrated Reporting, SASB) adopted by the Company (B.C.1.1)

Referensi Penalti ASEAN CG *Scorecard*

Keterangan	Halaman	Description
Ketepatan waktu publikasi laporan keuangan dan laporan tahunan (B.D.1.1)	-	Timeliness of publication of financial statements and annual reports (B.D.1.1)
Opini auditor independen atas laporan keuangan perusahaan (B.D.1.1)	-	Independent auditor's opinion on the company's financial statements (B.D.1.1)
Apakah terjadi perdagangan orang dalam yang melibatkan direksi/komisaris, manajemen dan karyawan dalam tiga tahun terakhir? (P.B.1.1)	-	Has there been insider trading involving directors/ commissioners, management and employees in the last three years? (P.B.1.1)
Apakah ada kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan dan peraturan yang berkaitan dengan transaksi pihak berelasi yang signifikan atau material dalam tiga tahun terakhir? (P.B.2.1))	-	Were there any cases of non-compliance with laws, rules and regulations relating to related party transactions that were significant or material in the last three years? (P.B.2.1))
Apakah telah terjadi pelanggaran hukum apa pun yang berkaitan dengan masalah perburuhan/ ketenagakerjaan/ konsumen/ kepailitan/ komersial/ persaingan atau lingkungan (P.C.1.1)	-	Whether there has been any violation of any law relating to labor/ employment/ consumer/ insolvency/ commercial/ competition or environmental matters (P.C.1.1)
Apakah perusahaan menghadapi sanksi dari regulator karena tidak membuat pengumuman dalam jangka waktu yang ditentukan untuk peristiwa penting (material event)? (P.C.2.1)	-	Has the company faced sanctions from regulators for not making announcements within the prescribed timeframe for material events? (P.C.2.1)

Keterangan	Halaman	Description
Apakah ada bukti bahwa perusahaan tidak mematuhi aturan dan peraturan pencatatan apa pun selama setahun terakhir selain dari aturan pengungkapan? (P.E.1.1)	-	Is there evidence that the company did not comply with any listing rules and regulations during the past year other than disclosure rules? (P.E.1.1)


Bank Sulteng
digital
Lounge



Laporan Keuangan Audited

Audited Financial Reports

Bank Sulteng

bersama membangun indonesia

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH

LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



2025

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH

LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2025
dan Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025

dan

Laporan Auditor Independen

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2025

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	
Laporan Posisi Keuangan	545-546
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	547
Laporan Perubahan Ekuitas	548
Laporan Arus Kas	549
Catatan atas Laporan Keuangan	550-627

Bank Sulteng

bersama membangun indonesia

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2025

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Hj. Ramiyatie
Jabatan	:	Direktur Utama
Alamat Kantor	:	JL. Sultan Hasanuddin No. 20 Palu
Nama	:	Judy Koagow
Jabatan	:	Direktur Kepatuhan
Alamat Kantor	:	JL. Sultan Hasanuddin No. 20 Palu
Nama	:	Myrna Rianasari
Jabatan	:	Direktur Bisnis
Alamat Kantor	:	JL. Sultan Hasanuddin No. 20 Palu

Menyatakan bahwa:

1. *Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan;*
2. Laporan keuangan perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh Perusahaan sesuai perundang-undangan yang berlaku;
5. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Palu, 22 Januari 2026
PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah



Hj. Ramiyatie	**Judy Koagow**	**Myrna Rianasari**
Direktur Utama	*Direktur Kepatuhan*	*Direktur Bisnis*

Alamat :
Jl. Sultan Hasanudin No. 20 Palu
Telp. (0451) 424537, 429509, 421780 Fax. (0451) 452836
Website : www.banksulteng.co.id
Sulawesi Tengah - 94112

Cahyadi&Adhi
Registered Public Accountants

Kantor Akuntan Publik Cahyadi dan Adhi
Izin Usaha KAP No. 170/MK/SK/2025
The Boulevard Office Tower 1st Floor D1,
Jl. H. Fachrudin No.5, Jakarta Pusat - 10250
Phone/Fax: 021-31991447
Email: admin@cacpa.id Website: cacpa.id

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
00001/2.1518/AU.1/07/1162-5/1/I/2026

Kepada Yth
Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah

Opini
Kami telah mengaudit laporan keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah ("Perusahaan"), yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2025, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini
Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan
Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara

Cahyadi&Adhi
Registered Public Accountants

Kantor Akuntan Publik Cahyadi dan Adhi
Izin Usaha KAP No. 170/MK/SK/2025
The Boulevard Office Tower 1st Floor D1,
Jl. H. Fachrudin No.5, Jakarta Pusat - 10250
Phone/Fax: 021-31991447
Email: admin@cacpa.id Website: cacpa.id

agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Hormat kami,
Kantor Akuntan Publik
Cahyadi dan Adhi

Cahyadi&Adhi

Amas Cahyadi, M.Sc, Ak, CA, CPA, CFI
NRAP: AP.1162

00001

22 Januari 2026

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
ASET			
Kas	3	154.429.064.600	134.176.063.100
Giro pada Bank Indonesia	2e,4	1.133.091.295.839	996.769.159.813
Giro pada Bank Lain	2e,5	7.377.748.175	6.765.106.392
Setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai tahun 2025 sebesar Nihil dan tahun 2024 sebesar Nihil			
Penempatan pada BI dan Bank Lain	2f,6	-	690.000.000.000
Setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai tahun 2025 sebesar Nihil dan tahun 2024 sebesar Nihil			
Efek-efek	2d,2g,7	3.627.164.993.139	2.509.215.116.110
setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai tahun 2025 sebesar Nihil dan tahun 2024 sebesar Rp49.901.400.			
Kredit yang Diberikan	2d,8		
Pihak Berelasi		19.367.329.606	21.503.235.606
Pihak Ketiga		8.528.645.978.063	8.359.709.555.739
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	2h	(119.281.413.944)	(94.639.169.619)
Jumlah Kredit yang Diberikan - Bersih		8.428.731.893.725	8.286.573.621.726
Aset Tetap	2j,9	146.648.272.204	135.453.845.815
setelah dikurangi akumulasi penyusutan tahun 2025 sebesar Rp85.327.769.566 dan tahun 2024 sebesar Rp57.728.450.370.			
Aset Tak Berwujud	10	1.421.357.234	1.919.152.638
setelah dikurangi akumulasi amortisasi tahun 2025 sebesar Rp4.070.124.766 dan tahun 2024 sebesar Rp3.572.329.362.			
Aset Pajak Tangguhan	16c	13.696.677.975	8.032.709.561
Beban Dibayar Di Muka dan Aset Lain-lain	11	136.382.388.431	153.943.170.289
TOTAL ASET		13.648.943.691.322	12.922.847.945.443

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas			
Liabilitas Segera	2l,12	636.661.177.716	569.640.170.932
Simpanan Nasabah	2m,13		
Pihak Berelasi		35.703.510.957	82.458.366.325
Pihak Ketiga		8.690.865.090.984	9.176.031.611.047
Simpanan dari Bank Lain	2n,14	1.275.000.000.000	530.000.000.000
Pinjaman yang Diterima	2o,15	1.220.535.374.855	897.343.706.484
Utang Pajak	16	9.161.095.900	8.161.209.320
Liabilitas Imbalan Kerja	2s,17	55.644.354.744	50.174.741.586
Beban yang Masih Harus Dibayar dan Liabilitas Lain-lain	18	14.318.243.307	11.990.030.403
Jumlah Liabilitas		11.937.888.848.463	11.325.799.836.097
Ekuitas			
Modal Saham	19a	491.969.800.000	491.969.800.000
Nilai nominal Rp100.000 per saham, modal dasar 17.000.000 saham, dan modal ditetapkan dan disetor penuh tahun 2025 dan 2024 sebanyak 4.919.698 Lembar saham.			
Agio Saham	19c	202.901.484.806	202.901.484.806
Dana Setoran Modal	19b	43.226.070.410	12.366.070.410
Komponen Ekuitas Lainnya			
Pendapatan Komprehensif Lainnya			
Keuntungan/(Kerugian) Aktuarial Program Manfaat Pasti Setelah Dikurangi/Ditambah Pajak-pajak Terkait	20	10.703.341.353	10.231.034.443
Saldo Laba			
Telah Ditentukan Penggunaannya		684.678.288.485	637.348.203.684
Belum Ditentukan Penggunaannya		277.575.857.805	242.231.516.003
Jumlah Ekuitas		1.711.054.842.858	1.597.048.109.346
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		13.648.943.691.322	12.922.847.945.443

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan Bunga	2p,22	1.239.531.990.329	1.083.149.389.688
Beban Bunga	2p,23	(446.728.993.752)	(405.566.264.416)
Pendapatan Bunga - Bersih		792.802.996.576	677.583.125.272
Pendapatan Operasional Lainnya	24	78.205.954.543	117.008.128.933
Beban Operasional			
Penyisihan/(Pemulihan) CKPN	25	25.747.058.932	15.128.464.424
Administrasi dan Umum	26	163.001.156.601	161.464.909.061
Tenaga Kerja	27	285.134.021.321	267.429.335.524
Lainnya	28	32.430.095.082	32.231.908.205
Jumlah Beban Operasional		506.312.331.936	476.254.617.214
Laba Operasional		364.696.619.183	318.336.636.991
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Non Operasional	29	2.307.061.369	4.228.421.271
Beban Non Operasional	29	(5.746.615.172)	(1.907.367.397)
Jumlah Pendapatan dan Beban Non Operasional		(3.439.553.802)	2.321.053.874
Laba Bersih Sebelum Pajak		361.257.065.381	320.657.690.866
Beban Pajak Penghasilan	2r,16		
Beban Pajak Kini		89.478.390.760	80.448.835.500
(Manfaat)/Beban Pajak Tangguhan		(5.797.183.184)	(2.022.660.638)
Jumlah Beban Pajak Penghasilan		83.681.207.576	78.426.174.862
Laba Tahun Berjalan		277.575.857.805	242.231.516.003
Pendapatan Komprehensif Lain			
Pos - pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
Keuntungan/(Kerugian) Akturial Program Manfaat Pasti		605.521.679	(5.473.877.483)
Pajak Penghasilan terkait dengan komponen OCI		(133.214.769)	(1.204.253.046)
(Kerugian)/Pendapatan Komprehensif Lain Periode Berjalan		472.306.910	(6.678.130.529)
Total Laba Komprehensif		278.048.164.714	235.553.385.474

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

				Keuntungan/ (Kerugian) Aktuarial				
		Dana		Program Manfaat	Telah Ditentukan Penggunaannya		Belum Ditentukan	
	Modal Disetor	Setoran Modal	Agio	Pasti	Cadangan Tujuan	Cadangan Umum	Penggunaannya	Jumlah
Saldo Per 31 Desember 2023	465.005.400.000	28.433.506.586	187.138.366.210	16.909.164.972	-	563.828.321.241	257.575.111.108	1.518.889.870.117
Tambahan Setoran Modal selama tahun 2024	26.964.400.000	(16.067.436.176)	15.763.118.596					26.660.082.420
Pembagian Laba Tahun 2023								-
Dividen							(154.545.066.665)	(154.545.066.665)
Cadangan Umum						103.030.044.443	(103.030.044.443)	-
CSR					(29.510.162.000)	-		(29.510.162.000)
Reklasifikasi Cadangan Umum ke Cadangan Tujuan (CSR)					29.510.162.000	(29.510.162.000)		-
Laba Setelah Pajak							242.231.516.003	242.231.516.003
Pendapatan (Beban) Komprehensif lain tahun berjalan				(6.678.130.529)				(6.678.130.529)
aldo Per 31 Desember 2024	491.969.800.000	12.366.070.410	202.901.484.806	10.231.034.443	-	637.348.203.684	242.231.516.003	1.597.048.109.346
ambahan Setoran Modal selama tahun 2025	-	30.860.000.000	-					30.860.000.000
embagian Laba Tahun 2024								-
Dividen							(169.562.061.202)	(169.562.061.202)
Cadangan Umum						72.669.454.801	(72.669.454.801)	-
SR					(25.339.370.000)	-		(25.339.370.000)
Reklasifikasi Cadangan Umum ke Cadangan Tujuan (CSR)					25.339.370.000	(25.339.370.000)		-
Laba Setelah Pajak							277.575.857.805	277.575.857.805
Pendapatan (Beban) Komprehensif lain tahun berjalan				472.306.910				472.306.910
Saldo Per 31 Desember 2025	491.969.800.000	43.226.070.410	202.901.484.806	10.703.341.353	-	684.678.288.485	277.575.857.805	1.711.054.842.858

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2025	2024
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan Bunga	1.237.050.247.483	1.083.149.389.688
Pembayaran Bunga	(446.728.993.752)	(405.566.264.416)
Pembayaran Kepada Karyawan	(285.134.021.321)	(267.429.335.524)
Pembayaran Beban Umum dan Administrasi	(138.358.912.276)	(146.336.444.637)
Penerimaan Pendapatan Lainnya	80.513.015.913	121.236.550.204
Pembayaran Beban Lainnya	(38.176.710.254)	(34.139.275.601)
Arus Kas	409.164.625.792	350.914.619.714
Aset dan Kewajiban Operasi		
Penurunan/(Kenaikan) Aset Operasi :		
Kredit Yang Diberikan	(192.547.575.256)	(1.329.729.172.417)
Aset Lain-lain	20.042.524.704	(9.930.165.197)
Kenaikan/(Penurunan) Liabilitas Operasi:		
Liabilitas Segera	67.021.006.784	(1.011.405.888.302)
Beban Yang Masih Harus Dibayar	2.328.212.904	(1.235.182.741)
Simpanan Nasabah:		
Pihak Berelasi	(46.754.855.367)	(136.572.033.321)
Pihak Ketiga	(485.166.520.063)	2.171.354.631.839
Simpanan dari Bank Lain	745.000.000.000	(795.000.000.000)
Pembayaran Pajak Penghasilan	(88.478.504.180)	(85.031.374.894)
Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Operasi	430.608.915.317	(846.634.565.319)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Efek - efek	(1.084.747.729.906)	(466.677.048.408)
Pembelian Aset Tetap	(38.295.950.181)	(27.557.403.230)
Pembelian Aset Tidak berwujud	-	-
Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi	(1.123.043.680.087)	(494.234.451.638)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Penerimaan Pinjaman yang Diterima	323.191.668.371	540.680.315.000
Penambahan Modal Disetor	30.860.000.000	26.660.082.420
Pembayaran Dividen	(169.562.061.202)	(154.545.066.665)
CSR	(25.339.370.000)	(30.598.844.807)
Pendapatan Komprehensif	472.306.910	(6.678.130.529)
Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	159.622.544.079	375.518.355.419
Kenaikan/(Penurunan) Kas dan Setara Kas	(532.812.220.691)	(965.350.661.538)
Kas dan Setara Kas Awal Periode	1.827.710.329.305	2.793.060.990.843
Kas dan Setara Kas Akhir Periode	1.294.898.108.614	1.827.710.329.305
Kas dan Setara Kas, terdiri dari		
Kas	154.429.064.600	134.176.063.100
Giro Bank Indonesia	1.133.091.295.839	996.769.159.813
Giro Pada Bank Lain	7.377.748.175	6.765.106.392
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	-	690.000.000.000
Jumlah Kas dan Setara Kas	1.294.898.108.614	1.827.710.329.305

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut "PT Bank Sulteng" atau "Bank", yang mulanya bernama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah No. 6 tahun 1966 tentang Bank Pembangunan Daerah dan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1999.

Sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 23 tanggal 30 April 1999 yang dibuat oleh Notaris Anand Umar Adnan, SH., berkedudukan di Palu, maka BPD Sulteng telah berubah statusnya dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) dan bernama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, serta telah mendapat pengesahan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-12841 HT .01.01 TH 99 tanggal 12 Juli 1999 dan telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri No. 584.52-442 tanggal 10 Mei 1999 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah No. 02 tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) dan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. I/29/KEP.GBI/1999 tanggal 10 Desember 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembagunan Daerah Sulawesi Tengah.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Akta Notaris Farid, SH No. 2 tanggal 3 Februari 2025 yang telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.09-0064449 tanggal 8 Februari 2025.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pendirian Bank adalah untuk mendorong pertumbuhan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu alat kegiatan ekonomi di bidang keuangan/perbankan untuk pengelolaan sumber pendapatan asli daerah, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2) Memberikan kredit;
3) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
4) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
5) Membeli melalui pelanggan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut dicairkan secepatnya;

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Maksud dan Tujuan (lanjutan)

6) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan serta sewa guna usaha pada bank atau perusahan lain di bidang keuangan serta sewa guna usaha, modal ventura perusahaan efek asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
7) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dana pensiun yang berlaku;
8) Membantu Pemda dalam membina BPR milik Pemda Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten;
9) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Jaringan Kantor

Bank berkantor pusat di Jl. Hasanuddin Nomor 20 Palu, Sulawesi Tengah. Bank mengklasifikasikan Kantor Cabang menjadi Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan Unit Pelayanan. Jumlah kantor dan jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Kantor Pusat	1	1
Kantor Cabang Utama	1	1
Kantor Cabang	14	14
Kantor Cabang Pembantu	11	11
Kantor Kas	14	12
Kentor Pelayanan Kas (Payment Point)	42	38
Kantor Kas Mobil berjalan (Service Mobile)	1	1
Anjungan Tunai Mandiri	143	131
Jumlah	227	209

1. UMUM (lanjutan)

d. Pengurus Perusahaan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama/Independen	-	-
Komisaris Independen	Novi Ventje Berti Kaligis	Novi Ventje Berti Kaligis
Komisaris	Max Kembuan	Maimun Lawira
Komisaris	-	-
Direksi		
Direktur Utama	Hj. Ramiyatie	Hj. Ramiyatie
Direktur Operasional	-	-
Direktur Bisnis	Myrna Rianasari	Myrna Rianasari
Direktur Kepatuhan	Ir. Judy Koagow	Ir. Judy Koagow

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Adapun susunan keanggotaan komite-komite tersebut adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Komite Audit		
Ketua	Novi V.B Kaligis	-
Anggota	Max Kembuan	Novi V.B Kaligis
Anggota	Nurmarjani Loulembah	Nurmarjani Loulembah
Anggota	Bill Wowor	Adolf Nelson Rompas
Anggota	-	-
Komite Pemantau Risiko		
Ketua	Novi V.B Kaligis	Novi V.B Kaligis
Anggota	Max Kembuan	Bill Wowor
Anggota	James Adolf Nelson Rompas	Ramadianti
Anggota	Ramadianti	-
Anggota	-	-
Komite Remunerasi dan Nominasi		
Ketua	Novi V.B Kaligis	Novi V.B Kaligis
Anggota	Max Kembuan	Hj. Maimun Lawira
Anggota	I Gusti Putu Suartika	I Gusti Putu Suartika
Anggota	-	-

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Pengurus Perusahaan (lanjutan)

Pengangkatan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-121/PB.02/2025 tanggal 2 Mei 2025 perihal Penyampaian Keputusan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) atas Pengangkatan Komisaris Non Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) PT. Bank Sulteng nomor 500.16.3.5/430/GUB.ST/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Pengangkatan Komisaris Non Independen PT. Bank Sulteng Periode 2024 - 2028, telah menetapkan Saudara Max Kembuan sebagai Komisaris Independen terhitung 20 September 2024 sampai 20 September 2028.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan–Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK–IAI), serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/SEOJK.03/2021 tentang Buku Panduan Akuntansi Perbankan Bagi Bank Umum Konvensional.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman serta tidak dibatasi penggunaannya.

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:
1) Nilai aset dan liabilitas dilaporkan, dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan;
2) Jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Mata uang penyajian yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Bank.

Bank telah menyusun laporan keuangan dengan dasar bahwa Bank akan terus mempertahankan kelangsungan usaha.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam menjalankan usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 (sekarang PSAK 224) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

1) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   iii. Merupakan personel manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan sesama entitas anak saling berelasi dengan entitas anak lainnya);

   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
   vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
   vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (1) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
   viii. Entitas atau anggota dari kelompok di mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi. Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan Bank terdiri atas:

<table>
<tr><th colspan="2">Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 71</th><th>Golongan (ditentukan oleh Bank)</th><th>Subgolongan</th></tr>
<tr><td rowspan="15">Aset keuangan</td><td rowspan="2">Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui labarugi</td><td colspan="2">Efek-efek</td></tr>
<tr><td colspan="2">Tagihan derivatif</td></tr>
<tr><td rowspan="13">Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi</td><td colspan="2">Kas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Giro pada Bank Indonesia</td></tr>
<tr><td colspan="2">Giro pada bank lain</td></tr>
<tr><td colspan="2">Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain</td></tr>
<tr><td colspan="2">Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali</td></tr>
<tr><td colspan="2">Tagihan akseptasi</td></tr>
<tr><td colspan="2">Kredit yang diberikan</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Aset lain-lain</td><td>Bunga yang masih akan diterima</td></tr>
<tr><td>Piutang sewa</td></tr>
<tr><td>Setoran jaminan</td></tr>
<tr><td>Tagihan penjualan surat berharga</td></tr>
<tr><td>Aset yang diblokir</td></tr>
<tr><td>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain</td><td colspan="2">Efek-efek</td></tr>
<tr><td rowspan="14">Liabilitas Keuangan</td><td>Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba-rugi</td><td colspan="2">Liabilitas derivatif</td></tr>
<tr><td rowspan="13">Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi</td><td colspan="2">Liabilitas segera</td></tr>
<tr><td colspan="2">Liabilitas akseptasi</td></tr>
<tr><td colspan="2">Simpanan nasabah</td></tr>
<tr><td colspan="2">Simpanan dari bank lain</td></tr>
<tr><td colspan="2">Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali</td></tr>
<tr><td colspan="2">Obligasi subordinasi</td></tr>
<tr><td colspan="2">Pinjaman yang diterima</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain</td><td>Bunga yang masih harus dibayar</td></tr>
<tr><td>Setoran jaminan</td></tr>
<tr><td>Kewajiban pembelian surat berharga</td></tr>
</table>

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Klasifikasi

Bank mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

1) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
2) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
3) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

1) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
2) persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

Pada saat pengakuan awal, Bank dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk diperdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Saat pengakuan awal Bank dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai ”*accounting mismatch*”).

Penilaian model bisnis

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

1) Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Bank;
2) Apakah risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
3) Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dikelola dan penilaian kinerjanya berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Derivatif juga dikategorikan dalam kelompok ini, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga
Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuknilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periodewaktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga marjin laba.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, Bank mempertimbangkan:

1) Peristiwa kontinjensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
2) Fitur leverage;
3) Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
4) Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
5) Fitur yang dapat mengubah nilai waktu dari elemen uang.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

1) Liabilitas keuangan yang diukur padanilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok di perdagangkan;
2) Liabilitas keuangan lain. Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuanliabilitas.

Pengakuan
Bank pada awalnya mengakui aset dan liabilitas keuangan pada tanggal perolehan. Pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim (reguler) diakui pada tanggal perdagangan dimana Bank memiliki komitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut. Semua aset dan liabilitas keuangan lainnya pada awalnya diakui pada tanggal perdagangan dimana Bank menjadi suatu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Pada saat pengakuan awal, aset atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah (untuk item yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal) biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset keuangan atau penerbitan liabilitas keuangan. Pengukuran aset dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada awal pengakuan liabilitas.

Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

1) Aset keuangan dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajarnya.
2) Aset dan liabilitas keuangan lainnya yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian pengakuan

Bank menghentikan pengakuan asetkeuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, atau pada saat Bank mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Bank secara substansial telah mentransfer seluruh risikodan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau liabilitas atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Bank diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Bank menghentikan pengakuan liabilitas keuangan pada saat liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Dalam transaksi dimana Bank secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Bank menghentikan pengakuan aset tersebut jika Bank tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, Bank tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan, dimana tingkat keberlanjutan Bank dalam aset yang ditransfer adalah sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer.

Bank menghapusbukukan saldo kredit dan efek utang untuk tujuan investasi, dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait, pada saat Bank menentukan bahwa kredit atau efek-efek tersebut tidak dapat ditagih. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan informasi seperti telah terjadinya perubahan signifikan pada posisi keuangan debitur/penerbit sehingga debitur/penerbit tidak lagi dapat melunasi liabilitasnya, atau hasil penjualan agunan tidak akan cukup untuk melunasi seluruh ekposur kredit yang diberikan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Saling Hapus
Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan di laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus jumlah keduanya dan terdapat intensi untuk diselesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Hak yang berkekuatan hukum berarti:
a. tidak terdapat kontinjensi di masa yang akan datang, dan
b. hak yang berkekuatan hukum pada kondisi-kondisi berikut ini;
   i. kegiatan bisnis normal;
   ii. kondisi kegagalan usaha; dan
   iii. kondisi gagal bayar atau bangkrut.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

Pengukuran biaya diamortisasi
Biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi cadangan kerugian penurunan

Pengukuran nilai wajar
Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk engalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:
a. Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
b. Jika tidak terdapat pasar utama, dipasa ryang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Nilai wajar suatu aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset dan liabilitas tersebut dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomik terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Bank menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hierarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
- Level 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung.
- Level 3: input untuk aset dan liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Bank menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hierarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

Reklasifikasi instrumen keuangan
Bank mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai wajar.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Giro pada Bank Indonesia dan bank-bank lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank-bank lain disajikan sebesar nilai nominal atau nilai saldo bruto, dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai, jika diperlukan. Giro pada Bank Indonesia dan bank-bank lain diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

f. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain merupakan penanaman dana dalam bentuk call money, Fasilitas Simpanan Bank Indonesia dan deposito berjangka.

Penempatan pada Bank Indonesia dinyatakan sebesar saldo penempatan dikurangi dengan pendapatan bunga yang ditangguhkan.

Penempatan pada bank lain pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif (EIR).

g. Efek - efek

Efek-efek terdiri dari obligasi korporasi, Obligasi Pemerintah Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia (“SBI”), Surat Perbendaharaan Negara, dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (“SRBI”).

Efek-efek pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali aset keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dimana biaya transaksi diakui langsung ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pengukuran setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.

Pengukuran efek-efek dan obligasi Pemerintah didasarkan atas klasifikasinya sebagai berikut:

1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Surat-surat berharga yang diklasifikasikan sebagai dinilai pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dinyatakan pada nilai wajar. Pendapatan bunga diakui dalam laba rugi menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi selisih kurs atas surat-surat berharga diakui pada laba rugi.

Perubahan nilai wajar lainnya diakui langsung dalam ekuitas sampai surat-surat berharga dijual atau mengalami penurunan nilai, dimana akumulasi keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Efek - efek (lanjutan)

2. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laba rugi periode berjalan. Pendapatan bunga dari surat-surat berharga dicatat dalam laba rugi sesuai dengan persyaratan dalam kontrak.

h. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Bank menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi investment grade yang dipahami secara global.

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE")
Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- Aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Bank sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank);
- Aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;
- Komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank;
- Kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

Bank mengklasifikasikan kredit yang diberikan menjadi 3 tahap/stage sesuai dengan peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awalnya.

Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan (Stage 1)
KKE diakui pada saat pengakuan awal instrumen keuangan dan merepresentasikan kekurangan kas sepanjang umur aset yang timbul dari kemungkinan gagal bayar di masa yang akan datang dalam kurun waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. KKE terus ditentukan oleh dasar ini sampai timbul peningkatan risiko kredit yang signifikan pada instrumen tersebut atau instrumen tersebut telah mengalami penurunan nilai kredit. Jika suatu instrumen tidak lagi dianggap menunjukkan peningkatan risiko kredit yang signifikan, maka KKE dihitung kembali berdasarkan basis 12 bulan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Peningkatan Risiko Kredit yang Signifikan (Stage 2)
Jika aset keuangan mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan ("SICR") sejak pengakuan awal, kerugian kredit ekspektasian diakui atas kejadian gagal bayar yang mungkin terjadi sepanjang umur aset. Peningkatan signifikan dalam risiko kredit dinilai dengan membandingkan risiko gagal bayar atas eksposur pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar saat pengakuan awal (setelah memperhitungkan perjalanan waktu dari akun tersebut). Signifikan tidak berarti signifikan secara statistik, juga tidak dinilai dalam konteks perubahan dalam KKE. Perubahan atas risiko gagal bayar dinilai signifikan atau tidak, dinilai menggunakan sejumlah faktor kuantitatif dan kualitatif, yang bobotnya bergantung pada tipe produk dan pihaklawan. Aset keuangan dengan tunggakan30 hari atau lebih dan tidak mengalamipenurunan nilai akan selalu dianggap telahmengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan.

Eksposur yang Mengalami Penurunan Nilai Kredit atau Gagal Bayar (Stage 3)
Aset hanya akan dianggap mengalami penurunan nilai dan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya diakui, jika terdapat bukti objektif penurunan nila yang dapat diobservasi. Faktor-faktor yang diobservasi ini, termasuk antara lain aset gagal bayar atau mengalami kesulitan keuangan yang signifikan atau mengalami forbearance atas kredit yang mengalami penurunan nilai.

Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai kredit atau gagal bayar merupakan aset yang setidaknya telah memiliki tunggakan lebih dari 90 hari atas pokok dan/atau bunga. Aset keuangan juga dianggap mengalami penurunan nilai kredit di mana debitur kemungkinan besar tidak akan membayar dengan terjadinya satu atau lebih kejadian yang teramati yang memiliki dampak menurunkan jumlah estimasi aruskas masa depan dari aset keuangan tersebut. Cadangan kerugian penurunan nilai terhadap aset keuangan yang mengalami penurunan nilai ditentukan berdasarkan penilaian terhadap arus kasyang dapat dipulihkan berdasarkan sejumlah skenario, termasuk realisasi jaminan yang dimiliki jika memungkinkan.

Aset Keuangan yang Direstrukturisasi
Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam, maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

- Jika restrukturisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada.
- Jika restrukturisasi akan menghasilkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari aset keuangan yang ada pada saat penghentian pengakuannya. Jumlah ini dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan yang ada yang didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan yang ada.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan yang Memburuk
Pada setiap tanggal pelaporan, Bank menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti objektif penurunan nilai adalah sebagai berikut:
- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- Pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan;
- Pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- Terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; atau
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

Pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

Penyajian penyisihan kerugian kredit ekspektasian dalam laporan posisi keuangan
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;
- instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Perhitungan penurunan nilai secara individual
Bank menetapkan kredit yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual jika kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai Stage 3 (non performing) dan dianggap signifikan secara individual (lebih dari Rp3 Miliar). Bank menghitung KKE dengan mengestimasi arus kas ekspektasian dari kredit yang diberikan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif
Bank menetapkan kredit yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif jika kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai Stage 1, Stage 2 dan Stage 3 yang tidak dianggap signifikan secara individual. Bank menghitung KKE menggunakan pendekatan kolektif dengan model parameter risiko yang menggunakan beberapa parameter utama, antara lain Probability of Default ("PD"), Loss Given Default ("LGD"), Exposure at Default ("EAD"), dan tingkat diskonto setelah memperhitungkan informasi perkiraan masa depan, termasuk faktor makroekonomi.

Bank menggunakan model yang kompleks yang menggunakan matriks PD, LGD dan EAD.

1) Probability of Default ("PD")
   Probabilitas yang timbul di suatu waktu dimana debitur mengalami gagal bayar, dikalibrasikan sampai dengan periode 12 bulan dari tanggal laporan (Stage 1) atau sepanjang umur (Stage 2 dan 3) dan digabungkan pada dampak asumsi ekonomi masa depan yang memiliki risiko kredit. PD diestimasikan pada poin in time di mana hal ini berfluktuasi sejalan dengan siklus ekonomi.

2) Loss Given Default ("LGD")
   Kerugian yang diperkirakan akan timbul dari debitur yang mengalami gagal bayar dengan menggabungkan dampak dari asumsi ekonomi masa depan yang relevan (jika ada) di mana hal ini mewakili perbedaan antara arus kas kontraktual yang akan jatuh tempo diterima. Bank mengestimasikan LGD berdasarkan data historis dari tingkat pemulihan dan memperhitungkan pemulihan yang berasal dari jaminan terhadap aset keuangan dengan mempertimbangkan asumsi ekonomi di masa depan jika relevan.

3) Exposure at Default ("EAD")
   Perkiraan nilai eksposur neraca pada saat gagal bayar dengan mempertimbangkan bahwa perubahan ekspektasi yang diharapkan selama masa eksposur. Hal ini menggabungkan dampak penarikan fasilitas yang committed, pembayaran pokok dan bunga, amortisasi dan pembayaran dipercepat, bersama dengan dampak asumsi ekonomi masa depan jika relevan.

Untuk menentukan kerugian kredit ekspektasian komponen-komponen ini akan diperhitungkan secara bersama-sama dan didiskontokan ke tanggal laporan keuangan menggunakan diskonto berdasarkan suku bunga efektif.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan
Ketika kredit yang diberikan tidak tertagih, kredit yang diberikan tersebut dihapusbuku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Kredit yang diberikan tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada periode berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada periode sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain pendapatan bunga.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Penurunan nilai aset non-keuangan

Nilai tercatat dari aset yang bukan aset keuangan Bank, kecuali aset pajak tangguhan, ditelaah setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jika indikasi tersebut ada, maka nilai yang dapat dipulihkan dari aset tersebut akan diestimasi.

Nilai yang dapat diperoleh kembali dari suatu aset atau unit penghasil kas adalah sebesar jumlah yang lebih tinggi antara nilai pakainya dan nilai wajar aset atau unit penghasil kas dikurangi biaya untuk menjual. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini terhadap nilai kas kini dan risiko spesifik terhadap aset tersebut.

Cadangan penurunan nilai diakui pada periode sebelumnya dinilai pada setiap tanggal pelaporan untuk melihat adanya indikasi bahwa kerugian telah menurun atau tidak ada lagi. Kerugian penurunan nilai dijurnal balik jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan nilai yang dapat dipulihkan.

Cadangan kerugian penurunan nilai dijurnal balik hanya hingga nilai tercatat aset tidakmelebihi nilai tercatat yang telah ditentukan, dikurangi dengan depresiasi atau amortisasi, jika cadangan penurunan nilaitidak pernah diakui.

Bank tidak diwajibkan lagi untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai untuk aset non produktif, tetapi Bank tetap harus menghitung cadangan kerugian penurunan nilai mengacu pada standar akuntansi yang berlaku.

j. Aset Tetap

Aset tetap, kecuali tanah, dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat ("*carrying amount*") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya.

Aset tetap kecuali tanah disusutkan dengan menggunakan metode dan taksiran masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

Jenis	Metode	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan
Gedung dan Bangunan	Garis Lurus	10 - 20 Tahun	10% - 5%
Perabot Kantor	Saldo Menurun Berganda	4 - 8 Tahun	50% - 25%
Mesin Kantor	Saldo Menurun Berganda	4 - 8 Tahun	50% - 25%
Kendaraaan	Saldo Menurun Berganda	4 - 8 Tahun	50% - 25%

Peralatan kantor terdiri dari perabotan dan perlengkapan, instalasi, perangkat lunak dan perangkat keras komputer, peralatan komunikasi dan peralatan kantor lainnya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Aset Tetap (lanjutan)

Tanah awalnya dinyatakan berdasarkan harga perolehan dan tidak disusutkan.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Aset tetap dievaluasi kemungkinan penurunan nilainya jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya tidak dapat seluruhnya dipulihkan.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar harga perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap pada saat pekerjaan selesai dan aset tersebut siap untuk digunakan.

Semua biaya dan beban yang terjadi sehubungan dengan perolehan hak atas tanah, diakui sebagai biaya perolehan hak atas tanah. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah.

k. Aset hak guna dan liabilitas sewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Bank menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Bank dapat memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka-pendek dan/atau sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Bank harus menilai apakah:
- Bank memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Bank memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Bank memiliki hak ini ketika Bank memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya:
  1) Bank memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
  2) Bank telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal permulaan sewa, Bank mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan. Untuk pengukuran selanjutnya, aset hak guna dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai, serta disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Aset hak-guna diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang jangka waktu sewa.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Bank menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto. Untuk pengukuran selanjutnya, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan pertambahan bunga dan dikurangi pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, jumlah tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan dalam penilaian opsi untuk membeli aset pendasar.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Bank pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Bank akan mengeksekusi opsi beli, maka Bank menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Bank menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

l. Liabilitas segera

Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya liabilitas atau diterima perintah dari pemberi amanat, baik dari masyarakat maupun dari bank lain. Liabilitas segera dinyatakan sebesar liabilitas Bank dan diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi.

m. Simpanan dari nasabah

Simpanan dari nasabah adalah dana yang ditempatkan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Termasuk dalam akun ini adalah giro, tabungan, deposito berjangka dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Giro merupakan simpanan dari nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek, atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya.

Tabungan merupakan simpanan dari nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan melalui counter dan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), atau dengan cara pemindah bukuan jika memenuhi persyaratan yang disepakati, tetapi penarikan tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan cek atau instrumen setara lainnya.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah di Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan Bank.

Deposito on call merupakan deposito dengan jangka waktu harian dan dapat ditarik sewaktu-waktu.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Simpanan dari nasabah

Simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

n. Simpanan dari Bank lain

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain, baik dalam maupun luar negeri, dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito berjangka.

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif, kecuali simpanan syariah yang dinyatakan sebesar nilai liabilitas Bank kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan dari bank lain dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

o. Pinjaman yang diterima

Pinjaman diterima merupakan dana yang diterima dari Bank Indonesia atau pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal pinjaman diterima dan biaya transaksi merupakan bagian tidak terpisahkan dari metode suku bunga efektif.

p. Pendapatan dan Beban Bunga

Pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kasmasa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Pendapatan dan Beban Bunga (lanjutan)

Kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu diragukan, secara umum diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai.

q. Pendapatan Provisi dan Komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang jumlahnya signifikan yang berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan suku bunga efektif. Untuk pinjaman yang dilunasi sebelum jatuh temponya, saldo pendapatan provisi dan komisi ditangguhkan diakui pada saat pinjaman dilunasi. Pendapatan provisi dan komisi lainnya diakui pada saat terjadinya transaksi.

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan dengan kredit diakui sebagai bagian dari pendapatan bunga. Untuk pembiayaan syariah, provisi dan komisi diakui selama jangka waktu akad dengan metode garis lurus.

Provisi dan komisi lainnya yang tidak berkaitan dengan kegiatan perkreditan dan atau jangka waktu perkreditan, atau jumlahnya tidak material diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat terjadinya transaksi.

r. Pajak Penghasilan

Perlakuan akuntansi atas pajak penghasilan sesuai dengan PSAK 46 (sekarang PSAK 216) tentang Pajak Penghasilan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Bank menerapkan metode liabilitas untuk menentukan pajak penghasilannya. Berdasarkan metode liabilitas, aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer pelaporan komersial dan pajak atas aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan. Metode ini mensyaratkan pengakuan manfaat pajak di masa mendatang, contoh: saldo rugi fiskal yang belum digunakan, sepanjang terdapat kemungkinan besar realisasi manfaat pajak tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif atau peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substantif telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Penyesuaian atas liabilitas pajak dicatat saat surat ketetapan pajak diterima, atau jika Bank mengajukan keberatan, saat putusan banding telah diterbitkan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar laba fiskal tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

s. Imbalan Kerja

Imbalan kerja jangka pendek
Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terhutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual.

Imbalan kerja jangka pendek seperti gaji, tunjangan, insentif dan imbalan jangka pendek lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan kerja jangka pendek diukur sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pasca kerja
Imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pasca kerja seperti pensiun, uang duka dan penghargaan dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang memenuhi kriteria. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan Bank dan persyaratan minimum Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003 serta perubahannya.

Bank memiliki program pensiun imbalan pasti untuk karyawan tetapnya. Program pensiun imbalan pasti didanai melalui pembayaran kepada Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Sulteng yang ditentukan dengan perhitungan aktuaris secara berkala, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi No.49/SK/BPD-ST/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia No.KEP-836/KM.10/2011 tanggal 14 November 2011 dan telah diubah berdasarkan SK Direksi No.50/SK/BPD-ST/2015 tanggal 31 Juli 2015 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No.Kep-566/NB.1/2015 tanggal 17 November 2015.

Program manfaat pasti merupakan program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun yang biasanya tergantung pada satu faktor atau lebih seperti umur, masa kerja dan jumlah kompensasi.

Jumlah kontribusi karyawan dalam progam pensiun ini ditetapkan sebesar 5% dari gaji dasar karyawan yang bersangkutan dan sisanya ditanggung oleh Bank.

Beban liabilitas masa lampau diakui secara langsung di laporan laba rugi, kecuali pembayaran imbalan tersebut tergantung pada apakah karyawan tetap bekerja selama periode waktu tertentu (periode vesting). Dalam hal ini biaya jasa lalu diamortisasi secara metode garis lurus sepanjang periode vesting.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Imbalan Kerja (lanjutan)

Liabilitas imbalan kerja merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan dikurangi nilai wajar aset program serta disesuaikan dengan keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Liabilitas imbalan pasti dihitung sekali setahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode projected unit kredit.

Keuntungan atau kerugian aktuaria dari penyesuaian dan perubahan asumsi aktuaria sebagai kelebihan atas nilai yang lebih tinggi antara 10% dari nilai wajar aset program atau 10% dari nilai kini liabilitas imbalan pasti pada awal periode diamortisasi dan diakui sebagai biaya atau keuntungan selama perkiraan rata rata sisa tahun jasa pegawai yang telah memenuhi kriteria.

Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskonto estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan.

Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskonto estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan.

Bank harus menyediakan program pensiun dengan imbalan minimal tertentu sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. Karena UU Ketenagakerjaan menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya jumlah program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti. Perhitungan imbalan pensiun yang dilakukan oleh aktuaris menunjukkan bahwa perkiraan imbalan yang disediakan oleh dana pensiun Bank akan melebihi imbalan pensiun minimal yang ditentukan oleh UU Ketenagakerjaan, oleh karena itu, Bank tidak perlu melakukan penyesuaian atas imbalan pensiun yang disediakannya.

Program imbalan jangka panjang lainnya
Diluar program pensiun imbalan pasti, Bank juga memberikan imbalan yang bersifat jangka panjang lainnya, yaitu meliputi penghargaan masa kerja, dan uang duka, penghargaan akhir masa jabatan direksi dan komisaris dan tunjangan hari tua pegawai dan direksi.

Sama seperti imbalan pensiun, liabilitas dan beban pendanaan penghargaan masa kerja, dan uang duka, penghargaan akhir masa jabatan direksi dan komisaris dan tunjangan hari tua pegawai dan direksi dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode projected unit credit.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Imbalan Kerja (lanjutan)

Bonus dan tantiem
Bank dapat memberikan bonus kepada karyawan serta tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Estimasi besarnya cadangan tersebut ditentukan berdasarkan keputusan dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jumlah bonus dan tantiem diakui pada tahun berjalan jika keputusan RUPS ditetapkan sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Jika RUPS dilakukan setelah tanggal laporan keuangan diterbitkan, bonus dan tantiem diakui sebagai beban tahun pelaksanaan RUPS.

t. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Setiap peristiwa setelah akhir tahun yang menyebabkan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Bank (*adjusting event*) akan disesuaikan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah akhir tahun yang bukan merupakan adjusting events, jika ada, akan diungkapkan ketika memiliki dampak material terhadap laporan keuangan.

u. Penggunaan Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi Signifikan

Penyusunan laporan keuangan Bank mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Pertimbangan profesional dan estimasi signifikan dalam menentukan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Usaha yang berkelanjutan
Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Nilai wajar atas instrumen keuangan
Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika statistik. Masukan (input) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Penggunaan Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

Klasifikasi pada investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo
Bank mengklasifikasikan aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo. Klasifikasi memerlukan pertimbangan signifikan untuk memiliki investasi tersebut sampai dengan jatuh tempo. Dalam membuat pertimbangan ini, Bank mengevaluasi intensi dan kemampuan untuk memiliki investasi tersebut hingga jatuh tempo.

Aset keuangan tanpa harga kuotasi dalam pasar aktif
Bank mengklasifikasikan aset keuangan dengan mengevaluasi, yaitu antara lain, apakah aset memiliki harga kuotasi atau tidak dalam pasar aktif. Termasuk dalam evaluasi apakah aset keuangan memiliki kuotasi pasar dalam pasar aktif adalah penentuan apakah harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dan apakah harga tersebut merepresentasikan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.

Penurunan nilai kredit yang diberikan dan piutang
Bank menelaah kredit yang diberikan yang signifikan secara individual dan piutang pada setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi komprehensif. Secara khusus, justifikasi oleh manajemen diperlukan dalam estimasi jumlah dan waktu arus kas di masa mendatang ketika menentukan penurunan nilai. Dalam estimasi arus kas ini, Bank membuat justifikasi tentang situasi keuangan debitur dan nilai realisasi bersih agunan. Estimasi-estimasi ini didasarkan pada asumsi-asumsi tentang sejumlah faktor dan hasil aktual yang mungkin berbeda, yang tercermin dalam perubahan di masa mendatang penyisihan penurunan nilai tersebut.

Penurunan nilai efek dimiliki hingga jatuh tempo
Bank menelaah efek yang diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo pada setiap tanggal posisi keuangan untuk menilai apakah telah terjadi penurunan nilai. Penurunan nilai atas investasi tersebut dinilai apakah terdapat penurunan signifikan atau berkepanjangan nilai wajar dibawah nilai perolehan atau terdapat bukti objektif telah terjadi penurunan nilai. Penentuan apa yang dimaksud dengan “signifikan” dan “berkepanjangan” membutuhkan pertimbangan dari Bank. Dalam menentukan pertimbangan, Bank mengevaluasi diantaranya faktor, pergerakan harga pasar historis dan jangka waktu serta lama perpanjangan di mana nilai wajar dari investasi kurang dari biayanya.

Penurunan nilai atas aset tidak produktif
Bank melakukan penilaian atas penurunan nilai pada aset non finansial kapan saja terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat pada suatu aset mungkin tidak dapat diperoleh kembali. Faktor-faktor yang dianggap penting oleh Bank yang dapat memicu adanya ulasan atas penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- Kinerja dibawah rata-rata yang signifikan yang relatif terhadap hasil historis atau proyeksi hasil operasi yang diharapkan di masa yang akan datang;
- Perubahan yang signifikan dari cara penggunaan aset yang diperoleh atau strategi untuk bisnis secara keseluruhan; dan
- Tren negatif industri dan ekonomi yang signifikan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Penggunaan Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

Pengakuan pajak tangguhan
Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh saldo rugi fiskal dan perbedaan temporer sampai pada batas adanya kemungkinan bahwa keuntungan yang dikenai pajak akan tersedia dimana kerugian dapat dimanfaatkan. Pertimbangan manajemen yang signifikan juga diperlukan untuk menentukan jumlah dari aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan waktu yang mungkin terjadi dan tingkatan dari keuntungan yang dikenakan pajak di masa yang akan datang bersama dengan strategi perencanaan pajak di masa yang akan datang.

Nilai sekarang dari kewajiban pensiun
Biaya untuk program pensiun manfaat pasti dan imbalan pasca kerja ditentukan menggunakan penilaian aktuaria. Penilaian aktuarial melibatkan pembuatan asumsi mengenai tingkat diskonto, tingkat pengembalian dari aset yang diharapkan, peningkatan gaji di masa depan, tingkat kematian dan peningkatan jumlah pensiun di masa depan. Karena sifat jangka panjang rencana-rencana ini, estimasi memiliki ketidakpastian yang signifikan.

3. KAS DAN SETARA KAS

	2025	2024
Kas Besar	116.416.214.600	95.697.763.100
Kas ATM	38.012.850.000	33.478.300.000
Kas dalam Perjalanan	-	5.000.000.000
Jumlah	154.429.064.600	134.176.063.100

4. GIRO PADA BANK INDONESIA

	2025	2024
Giro Rupiah	1.133.091.295.839	996.769.159.813

Bank dipersyaratkan untuk memiliki Giro Wajib Minimum (GWM) dalam mata uang Rupiah dalam kegiatannya sebagai bank umum dan GWM dalam mata uang asing dalam kegiatannya melakukan transaksi mata uang asing.

GWM primer adalah simpanan minimum yang wajib dipenuhi oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia. Penyangga Likuiditas Makroprudensial (dahulu GWM sekunder) adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan Sertifikat Rupiah Bank Indonesia (SRBI). GWM Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) (dahulu GWM LFR) adalah tambahan simpanan minimum yang wajib dipenuhi oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia, jika RIM Bank di bawah minimum RIM target Bank Indonesia (84%) atau jika di atas maksimum RIM target Bank Indonesia (94%) dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank lebih kecil dari KPMM Insentif Bank Indonesia sebesar 14%.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Per 31 Desember 2025, Pemenuhan Giro Wajib Minimum ("GWM") mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Pengendalian Moneter yang mencabut PBI No.20/3/PBI/2018 tanggal tanggal 29 Maret 2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah beserta ketentuan perubahannya.

PBI tersebut dijelaskan lebih lanjut melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 24/8/PADG/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah sebanyak 3 (tiga) kali melalui PADG Nomor 2 tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023, PADG Nomor 12 tahun 2023 tanggal 27 September 2023, dan PADG Nomor 8 tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025.

PADG baru tersebut mengatur bahwa pemenuhan GWM dalam Rupiah Bank Umum Konvensional (BUK) ditetapkan sebagai berikut:

	2025	2024
GWM Primer	9,00%	9,00%
Harian	0,00%	0,00%
Rata-rata	9,00%	9,00%
PLM (d/h GWM Sekunder)	4,00%	5,00%

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, Bank juga harus memenuhi PBI No.20/4/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.21/12/PBI/2019 tanggal 26 November 2019; PBI No.22/17/PBI/2020 tanggal 01 Oktober 2020; dan terakhir kali melalui PBI No.23/17/PBI/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang dijelaskan melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.21/22/PADG/2019 tanggal 28 November 2019 yang telah diubah dengan PADG No.22/30/PADG/2020 tanggal 05 Oktober 2020; PADG No.23/7/PADG/2021 tanggal 28 April 2021; PADG No.24/14/PADG/2022 tanggal 1 November 2022; PADG Nomor 10 tahun 2023 tanggal 14 September 2023; dan terakhir kali diubah dengan PADG Nomor 18 tahun 2023 tanggal 1 Desember 2023.

Bank juga mendapatkan insentif likuiditas makoprudensial berdasarkan PADG No.24/12/PADG/2022 tertanggal 20 Juli 2022 sebagaimana diubah dengan PADG No.11 tahun 2023 tanggal 27 September 2023 dan PADG No.4 tahun 2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang perubahan atas PADG No 11 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial.

Rasio GWM Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024
GWM Harian	0%	0%
GWM Rata-rata	9%	9%
Insentif KLM	3,50%	3.10%
RIM	85,93%	89.05%

5. GIRO PADA BANK LAIN

	2025	2024
Giro pada Bank Pemerintah		
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	135.965.766	137.586.640
PT. Bank Syariah Indonesia	590.003.853	105.295.524
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	735.073.182	505.898.835
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.807.066.560	3.241.569.696
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	569.106.870	565.901.611
Jumlah Giro pada Bank Pemerintah	5.837.216.231	4.556.252.306
Giro pada Bank Daerah		
PT. Bank DKI	13.120.143	13.120.143
PT. Bank Sulselbar	76.624.398	76.624.398
Jumlah Giro pada Bank Daerah	89.744.541	89.744.541
Giro pada Bank Swasta		
PT. Bank Danamon Tbk	531.620.857	532.220.857
PT. Bank Maybank Indonesia Tbk	48.639.864	48.848.537
PT. Bank Mega Tbk	19.642.597	693.088.846
PT. Bank Panin Tbk	2.181.722	3.641.722
PT. Bank Muamalat Tbk	29.380.096	29.620.096
PT. Bank CIMB Niaga Tbk	3.083.197	3.083.197
PT. Bank Nationalnobu Tbk	130.189.275	130.478.415
PT. Bank Mayapada Tbk	686.049.794	678.127.875
Jumlah Giro pada Bank Swasta	1.450.787.403	2.119.109.546
Jumlah Giro pada Bank Lain	7.377.748.175	6.765.106.392

Suku bunga efektif rata-rata setahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar 1%.

Seluruh giro pada bank lain digolongkan lancar. Manajamen berpendapat tidak terdapat indikasi adanya penurunan nilai terhadap Giro Bank Sulteng pada Bank lain.

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN

a. Berdasarkan Jenis dan Jatuh Tempo

	2025	2024
Call Money Depo Facility	-	-
Term Deposit	-	-
Call Money	-	690.000.000.000
DOC dan Deposito Berjangka	-	-
Jumlah	-	690.000.000.000

Seluruh penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain jatuh tempo pada bulan Januari tahun berikutnya.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN (lanjutan)

b. Berdasarkan Penerbit

	2025	2024
Bank Indonesia (Call Money Depo Facility)	-	-
Bank Lain:		
Call Money:		
PT. Bank Sulut	-	100.000.000.000
PT. Bank Maluku	-	150.000.000.000
PT. Bank Kalimantan Selatan	-	40.000.000.000
PT. Bank Kaltimtara	-	150.000.000.000
PT. Bank Sultra	-	50.000.000.000
PT. Bank BJB	-	100.000.000.000
PT. Bank DKI	-	100.000.000.000
Jumlah Call money	-	690.000.000.000
Deposit on Call/Deposito Berjangka		
Jumlah Deposit on Call/Deposito Berjangka	-	-
Jumlah	-	690.000.000.000

c. Tingkat Suku Bunga Per Tahun

	2025	2024
Call Money (FASBI)	-	-
Term Deposit	-	-
Interbank Call Money	-	6.30% - 6.55%
Deposito Berjangka	-	-

Manajemen tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain karena seluruh penempatan tersebut digolongkan lancar.

Pada tanggal 31 Desember 2025, tidak terdapat penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dalam bentuk Call Money, Term Deposit, Interbank Call Money, maupun Deposito Berjangka.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang digunakan sebagai jaminan.

7. EFEK - EFEK

a. Berdasarkan Jenis dan Tujuan

	2025	2024
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo:		
Obligasi	17.000.000.000	32.000.000.000
Negotiable Certificate Deposit	-	-
Surat Berharga Negara	1.051.054.660.554	1.612.172.728.452
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)	2.261.500.000.000	700.000.000.000
Surat Berharga Repo	300.000.000.000	200.000.000.000
Diskonto Surat Berharga	(2.389.667.415)	(34.907.710.943)
Jumlah Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	3.627.164.993.139	2.509.265.017.510
Tersedia untuk Dijual		
Sertifikat Bank Indonesia	-	-
Jumlah Tersedia Untuk Dijual	-	-
Jumlah Efek-Efek	3.627.164.993.139	2.509.265.017.510
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	(49.901.400)
Jumlah Bersih Efek-Efek	3.627.164.993.139	2.509.215.116.110

b. Berdasarkan Penerbit

	2025	2024
Bank Lain		
PT. BPD Sulselbar	5.000.000.000	5.000.000.000
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.000.000.000	2.000.000.000
PT. Bank Negara Indonesia	5.000.000.000	20.000.000.000
PT. Bank Victoria International, Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000
Jumlah Efek Bank Lain	17.000.000.000	32.000.000.000
Selain Bank		
Pemerintah Republik Indonesia	1.351.054.660.554	1.812.172.728.452
Bank Indonesia	2.261.500.000.000	700.000.000.000
Diskonto Surat Berharga	(2.389.667.415)	(34.907.710.943)
Jumlah Selain Bank	3.610.164.993.139	2.477.265.017.510
Jumlah Efek-Efek	3.627.164.993.139	2.509.265.017.510
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	(49.901.400)
Jumlah Bersih Efek-Efek	3.627.164.993.139	2.509.215.116.110

c. Berdasarkan Jangka Waktu

	2025	2024
Kurang dari 1 Tahun	2.261.500.000.000	867.955.195.364
1 Tahun sampai dengan 5 Tahun	388.300.000.000	890.059.427.264
Lebih dari 5 Tahun	977.364.993.139	751.200.493.482
Jumlah	3.627.164.993.139	2.509.215.116.110

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK - EFEK (lanjutan)

d. Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo

	2025	2024
Kurang dari 1 Tahun	2.452.918.975.515	1.353.014.622.628
1 Tahun sampai dengan 5 Tahun	750.054.040.597	702.864.188.324
Lebih dari 5 Tahun	424.191.977.027	453.336.305.158
Jumlah	3.627.164.993.139	2.509.215.116.110

e. Peringkat Obligasi

Peringkat obligasi berdasarkan hasil pemeringkatan oleh PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024
PT. Bank Sulselbar	idA+	idA+
PT. Bank Negara Indonesia	idAAA	idAAA
PT. Bank Rakyat Indonesia	idAAA	idAAA
PT. Bank Victoria International, Tbk	idA-	idA-

f. Tingkat Suku Bunga

	2025	2024
Surat Berharga Negara	5,42% - 7,56%	5.13% - 7.50%
Obligasi	6,45% - 9,5%	6.35% - 9.50%
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)	4.67% - 6.25%	6.75% - 7.05%

g. Kolektabilitas

Seluruh efek-efek yang dimiliki oleh PT. Bank Sulteng pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 digolongkan dalam kolektabilitas lancar.

Seluruh efek-efek yang dimiliki dalam bentuk mata uang Rupiah untuk dimiliki hingga jatuh tempo.

8. KREDIT YANG DIBERIKAN

a. Berdasarkan Jenis dan Hubungan dengan Bank

	2025	2024
Pihak Berelasi		
Konsumsi	19.367.329.606	21.503.235.606
Jumlah Kredit Pihak Berelasi	19.367.329.606	21.503.235.606
Pihak Ketiga		
Modal Kerja	561.032.182.555	616.710.456.187
Investasi	1.088.734.887.031	1.181.143.020.740
Konsumsi	6.878.878.908.477	6.561.856.078.812
Jumlah Kredit Pihak Ketiga	8.528.645.978.063	8.359.709.555.739
Jumlah Kredit Yang Diberikan	8.548.013.307.669	8.381.212.791.345
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(119.281.413.944)	(94.639.169.619)
Jumlah Bersih	8.428.731.893.725	8.286.573.621.726

Kredit kepada pihak berelasi adalah kredit yang diberikan kepada pihak-pihak yang memenuhi kriteria pihak terkait dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum maupun PSAK 224: Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi.

b. Berdasarkan Kolektabilitas

	2025	
	Nilai Tercatat	CKPN
Lancar	8.209.077.819.621	29.621.873.318
Dalam Perhatian Khusus	72.172.347.764	4.047.529.552
Kurang Lancar	30.476.726.827	5.693.002.785
Diragukan	17.833.226.257	3.234.982.852
Macet	218.453.187.200	76.684.025.437
Jumlah	8.548.013.307.669	119.281.413.944

	2024	
	Nilai Tercatat	CKPN
Lancar	7.875.293.391.819	13.796.250.052
Dalam Perhatian Khusus	278.721.594.825	5.866.352.950
Kurang Lancar	7.661.828.804	1.336.941.350
Diragukan	32.091.700.020	3.796.803.774
Macet	187.444.275.878	69.842.821.493
Jumlah	8.381.212.791.345	94.639.169.619

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

b. Berdasarkan Sektor Ekonomi

	2025	2024
Pertanian	253.519.952.725	40.538.538.545
Pertambangan	257.025.551.123	390.038.374.501
Perindustrian	20.557.183.265	49.043.248.069
Perdagangan/Restoran & Hotel	454.430.915.467	384.204.783.971
Konstruksi	546.010.913.055	606.882.107.747
Pengangkutan	492.551.991	256.751.273
Jasa dunia usaha	117.739.856.966	15.209.495.462
Lain-lain	6.898.236.383.076	6.895.039.491.777
Jumlah	8.548.013.307.669	8.381.212.791.345
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(119.281.413.944)	(94.639.169.619)
Jumlah Bersih	8.428.731.893.725	8.286.573.621.726

Matriks kredit yang diberikan berdasarkan sektor ekonomi dan kolektabilitas adalah sebagai berikut:

2025

Sektor Ekonomi:	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	CKPN	Jumlah
Pertanian	242.747.172.702	33.608.457	3.595.000.000	-	7.144.171.566	21.384.767.795	232.135.184.930
Pertambangan	255.248.238.817	1.378.645.640	-	-	398.666.666	887.558.195	256.137.992.928
Perindustrian	18.401.015.249	250.655.615	-	15.478.319	1.890.034.082	666.272.711	19.890.910.554
Perdagangan/Restoran & Hotel	408.357.526.935	1.100.526.739	19.120.077.836	40.588.077	25.812.195.881	14.892.109.973	439.538.805.495
Konstruksi	495.244.908.005	-	-	-	50.766.005.050	35.932.608.516	510.078.304.539
Pengangkutan	262.500.008	-	-	-	230.051.983	112.023.388	380.528.603
Jasa dunia usaha	105.061.183.733	-	23.080.266	-	12.655.592.967	4.894.304.984	112.845.551.982
Lain-lain	6.683.755.274.172	69.408.911.313	7.738.568.725	17.777.159.861	119.556.469.005	40.511.768.382	6.857.724.614.694
Jumlah	8.209.077.819.621	72.172.347.764	30.476.726.827	17.833.226.257	218.453.187.200	119.281.413.944	8.428.731.893.725

2024

Sektor Ekonomi:	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	CKPN	Jumlah
Pertanian	33.206.115.546	98.699.345	-	57.707.734	7.176.015.920	3.921.557.150	36.616.981.395
Pertambangan	387.005.707.835	-	-	-	3.032.666.666	3.628.516.748	386.409.857.753
Perindustrian	43.452.737.149	3.621.206.588	-	41.757.313	1.927.547.019	1.125.196.969	47.918.051.100
Perdagangan/Restoran & Hotel	311.359.542.271	24.700.399.788	878.480.093	21.993.837.516	25.272.524.303	15.240.750.770	368.964.033.201
Konstruksi	550.422.943.036	2.893.639.160	-	-	53.565.525.551	33.953.003.911	572.929.103.836
Pengangkutan	-	-	-	-	256.751.273	80.284.623	176.466.650
Jasa dunia usaha	2.433.754.102	71.820.208	4.166.665	-	12.699.754.487	1.094.101.066	14.115.394.396
Lain-lain	6.547.412.591.879	247.335.829.736	6.779.182.046	9.998.397.457	83.513.490.659	35.595.758.382	6.859.443.733.395
Jumlah	7.875.293.391.819	278.721.594.825	7.661.828.804	32.091.700.020	187.444.275.878	94.639.169.619	8.286.573.621.726

8. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

c. Berdasarkan Jangka Waktu

Berdasarkan Jangka Waktu Perjanjian

	2025	2024
Kurang dari atau sama dengan 1 tahun	179.713.008.343	265.420.030.351
Lebih dari 1 tahun sampai 2 tahun	88.671.147.652	74.748.521.475
Lebih dari 2 tahun sampai 5 tahun	2.356.191.351.234	1.993.035.380.055
Lebih dari 5 tahun	5.923.437.800.441	6.048.008.859.465
Jumlah	8.548.013.307.669	8.381.212.791.345
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(119.281.413.944)	(94.639.169.619)
Jumlah Bersih	8.428.731.893.725	8.286.573.621.726

Berdasarkan Sisa Waktu Hingga Jatuh Tempo

	2025	2024
Kurang dari atau sama dengan 1 tahun	313.069.628.982	343.079.640.330
Lebih dari 1 tahun sampai 2 tahun	303.596.827.233	210.710.485.205
Lebih dari 2 tahun sampai 5 tahun	2.414.856.225.987	2.119.807.960.674
Lebih dari 5 tahun	5.516.490.625.467	5.707.614.705.136
Jumlah	8.548.013.307.669	8.381.212.791.345
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(119.281.413.944)	(94.639.169.619)
Jumlah Bersih	8.428.731.893.725	8.286.573.621.726

d. Suku Bunga Rata-Rata

Suku bunga rata-rata atas kredit yang diberikan Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar 8,39% dan 8,39%.

e. Ikhtisar Kredit Bermasalah (NPL) Berdasarkan Sektor Ekonomi

	2025	2024
Pertanian	10.739.171.566	7.233.723.654
Pertambangan	398.666.666	3.032.666.666
Perindustrian	1.905.512.401	1.969.304.332
Perdagangan/Restoran & Hotel	44.972.861.794	48.144.841.912
Konstruksi	50.766.005.050	53.565.525.551
Pengangkutan	230.051.983	256.751.273
Jasa dunia usaha	12.678.673.233	12.703.921.152
Lain-lain	145.072.197.591	100.291.070.162
Jumlah	266.763.140.284	227.197.804.702

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

f. Perubahan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit

	2025	2024
Saldo awal	94.639.169.619	89.823.771.580
Cadangan kerugian penurunan nilai kolektif:		
(Pemulihan)/kerugian penurunan nilai tahun berjalan	25.262.934.083	15.128.464.424
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	-	(10.313.066.385)
Pemulihan kerugian berasal dari Cadangan Umum	(620.689.758)	-
Saldo akhir	119.281.413.944	94.639.169.619

g. Informasi Pokok Lainnya Sehubungan dengan Kredit yang Diberikan

Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dilakukan berdasarkan PSAK 71 (Sekarang PSAK 109) tentang Instrumen Keuangan dan berpedoman pada SOP Penerapan PSAK 71 PT.Bank Sulteng, sesuai Keputusan Direksi Bank Sulteng No. 04/SK-DIR/BPD-ST/2024 tanggal 11 Januari 2024.

Kredit yang diberikan pada umumnya dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito berjangka atau jaminan lain yang dapat diterima oleh perbankan.

Kredit konsumsi terdiri dari kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor dan kredit perorangan lainnya.

Kredit yang diberikan kepada karyawan bank merupakan kredit untuk membeli rumah, kendaraan dan keperluan lainnya yang dibebani bunga sebesar 7% per tahun dengan jangka waktu kredit berkisar antara 1 (satu) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan dari karyawan yang bersangkutan.

Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera adalah kredit dengan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang diterbitkan oleh Bank Sulteng kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka pemilikan rumah sejahtera yang dibeli dari pelaku pembangunan. Kerdit ini merupakan kerja sama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Bank Sulteng.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat pelanggaran ataupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada pihak ketiga dan pihak berelasi. Bank telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan Bank Indonesia.

8. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

g. Informasi Pokok Lainnya Sehubungan dengan Kredit yang Diberikan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025, rasio NPL-gross dan rasio NPL-net adalah masing-masing sebesar 2,9% dan 1,9% sedangkan pada posisi 31 Desember 2024, rasio NPL-gross dan rasio NPL-net adalah masing-masing sebesar 2,71% dan 1,82% yang dihitung berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.

Pada Tahun 2025 Bank melakukan hapus buku kredit, sedangkan pada tahun 2024, Bank tidak melakukan penghapusan kredit. Penghapusbukuan kredit tersebut bukan merupakan hapus tagih, sehingga upaya penagihan tetap dilakukan.

9. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA

	2025				
Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Harga Perolehan:					
Tanah	15.675.049.256	-	-	-	15.675.049.256
Bangunan Kantor	73.445.807.823	-	-	-	73.445.807.823
Rumah Dinas	11.243.283.697	-	-	-	11.243.283.697
Kendaraan	185.234.000	-	-	-	185.234.000
Mesin Kantor	10.523.984.745	172.813.821	-	209.116.180	10.905.914.746
Perabot Kantor	21.036.003.695	475.045.637	-	2.161.757.530	23.672.806.861
Perabot Rumah Dinas	185.777.000	30.550.000	-	-	216.327.000
Aset Hak Guna	54.154.276.752	56.975.616.911	40.561.501.676	-	70.568.391.987
Jumlah	186.449.416.968	57.654.026.369	40.561.501.676	2.370.873.710	205.912.815.371
Aset Dalam Penyelesaian	6.732.879.217	21.701.220.892	-	(2.370.873.710)	26.063.226.399
Jumlah Harga Perolehan	193.182.296.185	79.355.247.261	40.561.501.676	-	231.976.041.770
Akumulasi Penyusutan:					
Bangunan Kantor	(26.423.585.251)	(3.679.287.228)	-	-	(30.102.872.479)
Rumah Dinas	(5.250.714.937)	(878.988.329)	-	-	(6.129.703.267)
Kendaraan	(158.676.327)	(17.670.492)	-	-	(176.346.819)
Mesin Kantor	(8.320.659.879)	(887.413.683)	-	-	(9.208.073.561)
Perabot Kantor	(15.635.272.428)	(2.519.109.909)	-	-	(18.154.382.337)
Perabot Rumah Dinas	(168.364.229)	(14.736.404)	-	-	(183.100.633)
Aset Hak Guna	(1.771.177.320)	(20.896.444.949)	(1.294.331.798)	-	(21.373.290.471)
Jumlah Akumulasi Penyusutan	(57.728.450.370)	(28.893.650.994)	(1.294.331.798)	-	(85.327.769.566)
Nilai Buku Aset Tetap	135.453.845.815				146.648.272.204

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA (lanjutan)

	2024				
Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Harga Perolehan:					
Tanah	11.835.332.741	3.839.716.515	-	-	15.675.049.256
Bangunan Kantor	69.718.897.823	3.726.910.000	-	-	73.445.807.823
Rumah Dinas	11.243.283.697	-	-	-	11.243.283.697
Kendaraan	1.211.888.045	-	(1.026.654.045)	-	185.234.000
Mesin Kantor	32.238.807.178	-	(21.714.822.433)	-	10.523.984.745
Perabot Kantor	44.415.582.174	-	(23.379.578.479)	-	21.036.003.695
Perabot Rumah Dinas	524.435.122	-	(338.658.122)	-	185.777.000
Aset Hak Guna	35.025.179.087	19.129.097.665	-	-	54.154.276.752
Jumlah	206.213.405.868	26.695.724.180	(46.459.713.079)	-	186.449.416.968
Aset Dalam Penyelesaian	5.871.200.167	861.679.050	-	-	6.732.879.217
Jumlah Harga Perolehan	212.084.606.035				193.182.296.185
Akumulasi Penyusutan:					
Bangunan Kantor	(22.886.226.914)	(3.537.358.336)	-	-	(26.423.585.251)
Rumah Dinas	(4.339.872.526)	(910.842.411)	-	-	(5.250.714.937)
Kendaraan	(1.172.019.661)	-	(1.013.343.334)	-	(158.676.327)
Mesin Kantor	(29.110.294.013)	-	(20.789.634.135)	-	(8.320.659.879)
Perabot Kantor	(37.465.603.352)	-	(21.830.330.924)	-	(15.635.272.428)
Perabot Rumah Dinas	(487.558.809)	-	(319.194.581)	-	(168.364.229)
Aset Hak Guna	-	(1.771.177.320)	-	-	(1.771.177.320)
Jumlah Akumulasi Penyusutan	(95.461.575.276)	(6.219.378.068)	(43.952.502.973)	-	(57.728.450.370)
Nilai Buku Aset Tetap	116.623.030.759				135.453.845.815

Aset tetap dalam penyelesaian sebesar Rp26.063.226.399 dan Rp6.732.879.217 adalah bangunan kantor dan inventaris dalam penyelesaian yang masih dalam proses pengerjaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi terjadinya penurunan nilai pada aset tetap.

Tidak terdapat Aset Tetap yang dijaminkan oleh Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

10. ASET TAK BERWUJUD

	2025				
Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Harga Perolehan					
Aset Tak Berwujud	5.491.482.000	-	-	-	5.491.482.000
Jumlah	5.491.482.000	-	-	-	5.491.482.000
Akumulasi Amortisasi					
Aset Tak Berwujud	(3.572.329.362)	(497.795.404)	-	-	(4.070.124.766)
Jumlah	(3.572.329.362)	(497.795.404)	-	-	(4.070.124.766)
Nilai Buku	1.919.152.638				1.421.357.234

	2024				
Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Harga Perolehan					
Aset Tak Berwujud	5.491.482.000	-	-	-	5.491.482.000
Jumlah	5.491.482.000	-	-	-	5.491.482.000
Akumulasi Amortisasi					
Aset Tak Berwujud	(3.074.533.958)	(497.795.404)	-	-	(3.572.329.362)
Jumlah	(3.074.533.958)	(497.795.404)	-	-	(3.572.329.362)
Nilai Buku	2.416.948.042				1.919.152.638

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi adanya penurunan nilai aset tidak berwujud Per 31 Desember 2025 dan 2024

11. BEBAN DIBAYAR DIMUKA DAN ASET LAIN-LAIN

	2025	2024
Persediaan	4.127.964.717	9.632.484.638
Beban Dibayar Dimuka	14.291.665.643	8.982.996.503
Tagihan ATM Bersama	45.037.500.209	27.380.735.930
Tagihan ATM Bersama (Transfer)	-	-
Tagihan Klaim Asuransi - Bersih	12.003.074.381	-
Tagihan Link Telkom	13.049.563	44.220.596.026
Pendapatan Yang Masih Akan Diterima	60.644.014.885	58.162.272.039
Aset Lainnya	262.119.033	3.117.607.963
Panjar Uang Muka PPh Pasal 25	-	2.438.652.189
Panjar Uang Muka Pihak Ketiga	3.000.000	7.825.000
Jumlah	136.382.388.431	153.943.170.289

Penjelasan atas Beban Dibayar Dimuka dan Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

a. Persediaan

	2025	2024
Persediaan Barang Cetakan dan Formulir	2.261.574.942	4.850.300.464
Persediaan Alat Tulis Kantor	14.133.695	21.211.022
Persediaan Buku Cek dan Bilyet Giro	1.852.256.081	1.693.679.581
Persediaan Barang Iklan dan Promosi	-	3.067.293.572
Jumlah	4.127.964.717	9.632.484.638

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. BEBAN DIBAYAR DIMUKA DAN ASET LAIN-LAIN (lanjutan)

b. Beban Dibayar di Muka

	2025	2024
Beban Sewa Gedung	4.718.235.617	2.970.689.046
Beban Sewa Mesin-mesin Kantor	5.525.032.605	4.591.704.203
Beban Asuransi Aset Tetap	148.896.009	144.633.085
Beban Flagging Taspen	3.796.524.825	-
Beban Personalia Lainnya	50.555.556	-
Beban Operasional Kas Kecil	52.421.031	-
Beban Program SIMANTAP	-	8.979.167
Beban Sewa Inventaris	-	916.416.000
Beban Jasa Pengelolaan TSI	-	350.575.003
Jumlah	14.291.665.643	8.982.996.503

c. Pendapatan Bunga Yang Masih akan Diterima

	2025	2024
Bunga Kredit	43.761.197.245	38.745.928.641
Bunga Deposito Berjangka	301.388.889	301.388.889
Surat Berharga Negara	16.400.471.977	18.767.209.958
Bunga Call Money	-	140.327.778
Obligasi	141.123.111	167.583.111
Lainnya Antar Bank	39.833.662	39.833.662
Jumlah	60.644.014.885	58.162.272.039

12. LIABILITAS SEGERA

	2025	2024
Kiriman Uang	62.019.262.162	195.655.256.530
Dana Titipan	117.236.703.337	18.357.433.049
Titipan Pajak Penghasilan	1.977.978.030	4.784.133.037
Kewajiban Pada Pihak Ketiga	116.317.768.782	110.035.618.886
Standing Instruction (SI) Gaji	116.453.532	1.106.445.695
Standing Instruction (SI) Kredit	114.149.368	106.149.353
Angsuran Asset Sales	341.474.175	340.555.114
Setoran Deposito Jatuh Tempo	-	-
Cadangan Remunerasi	1.144.242.183	887.992.500
Liabilitas Hak Aset Guna	48.978.786.147	50.061.186.768
Kewajiban atas Surat Berharga Repo	288.414.360.000	188.305.400.000
Jumlah	636.661.177.716	569.640.170.932

12. LIABILITAS SEGERA (lanjutan)

Liabilitas segera adalah kewajiban bank kepada pihak lain yang sifatnya segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat atau perjanjian yang ditetapkan sebelumnya.

Liabilitas segera terdiri dari kiriman uang, dana titipan, dana yang sudah jatuh tempo tapi belum diambil nasabah, transaksi kliring, kewajiban pada pihak ketiga dan kewajiban wajib pungut/potong PPh.

Rincian atas liabilitas segera adalah sebagai berikut:

a. Kiriman Uang

	2025	2024
Titipan KU yang akan dibayar	3.478.136.344	4.303.574.734
Titipan KU via RTGS	48.668.493.406	166.074.108.476
Titipan KU via Kliring	9.872.632.412	25.277.573.320
Jumlah	62.019.262.162	195.655.256.530

b. Dana Titipan

	2025	2024
Titipan pihak ketiga	103.109.639.516	16.174.731.405
Titipan Pihak Ketiga Angsuran Pinjaman	-	165.435.409
Titipan Penampungan Selisih	4.365.775.320	1.148.317.250
Kas Titipan Bank Indonesia	19.929.539	10.579.300
Titipan Setoran Pajak Pihak III	5.981.809.398	626.399.554
Titipan antar Biro/Seksi Bank Sulteng	3.759.549.564	231.970.130
Jumlah	117.236.703.337	18.357.433.049

c. Titipan Pajak Penghasilan

	2025	2024
Titipan PPh Bunga Tabungan	203.006.554	194.484.411
Titipan PPh Bunga Deposito Berjangka	1.072.002.025	2.747.347.354
Titipan PPh Jasa Giro	26.193.290	34.256.723
Titipan PPh Pasal 21/23/25	613.032.973	1.676.859.925
Titipan PPN	63.743.187	131.184.624
Jumlah	1.977.978.030	4.784.133.037

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. LIABILITAS SEGERA (lanjutan)

d. Kewajiban Pada Pihak Ketiga

	2025	2024
Kewajiban ATM Bersama	61.708.123.218	68.609.927.429
Pelimpahan ATM Bersama	965.832.674	6.458.692.329
Kewajiban Link - Telkom	2.084.791.539	32.275.880.906
Kewajiban PLN	95.053.782	37.183.702
Kewajiban Tiket Pesawat	6.097.300	6.097.300
Kewajiban Payment Telkomsel	435.473.836	338.638.464
Kewajiban Biller ATM	70.205.186	62.768.535
Kewajiban Purchase & Void EDC Jalin	673.812.669	105.098.516
Kewajiban Purchase & Void EDC Artajasa	198.308.654	259.228.711
Multibiler Emobile	97.326.320	78.047.759
Titipan Kewajiban QRIS	27.387.617	4.373.754
Titipan Fee admin Digital Ekosistem	109.002.847	7.752.752
Kewajiban Artajasa Digital Ekosistem	49.844.599.948	1.791.928.728
Kewajiban EDC Hitachi	1.753.192	-
Titipan Penampung Transaksi PBB	-	-
Jumlah	116.317.768.782	110.035.618.886

13. SIMPANAN NASABAH

a. Berdasarkan jenis

	2025	2024
Pihak Berelasi:		
Giro	33.587.275.912	79.157.094.311
Tabungan		
- Simantap	748.744.810	1.303.554.779
- Simpeda	1.043.473.846	844.461.787
- PNS	15.758.273	798.300.987
- Tabunganku	32.388.117	3.688.465
- Tabungan Rencana Bank Sulteng	275.870.000	167.800.000
- Tabungan Siswa plus		2.745.581
- Tabungan Simantap 3 In 1	-	180.720.414
Jumlah Pihak Berelasi	35.703.510.957	82.458.366.325
Pihak Ketiga:		
Giro	1.944.377.051.049	2.706.066.227.742
Tabungan	-	-
- Simantap	97.967.377.044	111.745.882.812
- Tabungan Lokal	4.330.805	2.497.106
- Simpeda	781.924.545.116	794.807.581.952
- Tabunganku	179.475.588.225	185.053.078.303
- Tabungan PNS	794.038.397.193	733.841.381.630
- Tabungan Pensiunku	16.629.705.700	18.331.007.623
- TabunganKU Plus	45.713.302.032	47.020.680.012
- Tabungan Siswa	33.275.629.423	33.370.866.026
- Tabungan Siswa plus	24.780.781.286	16.824.622.202
- Tabungan Simpel	9.726.344.871	7.347.285.732
- Tabungan Simantap 3 In 1	197.129.595.287	203.179.496.266
Deposito	4.565.822.442.955	4.318.441.003.642
Jumlah Pihak Ketiga	8.690.865.090.984	9.176.031.611.047
Jumlah Simpanan	8.726.568.601.941	9.258.489.977.372

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. SIMPANAN NASABAH (lanjutan)

b. Deposito berjangka berdasarkan jangka waktu

	2025	2024
Deposito Berjangka:		
- 1 Bulan	567.295.712.717	1.465.836.934.301
- 3 Bulan	1.279.314.130.500	660.322.926.835
- 6 Bulan	169.280.693.000	600.961.193.000
- 12 Bulan	2.249.931.906.738	1.571.319.949.506
- Deposito on Call	300.000.000.000	20.000.000.000
Jumlah	4.565.822.442.955	4.318.441.003.642

c. Deposito berjangka berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo

	2025	2024
Deposito Berjangka:		
- ≤ 1 Bulan	596.036.834.190	1.576.557.320.774
- ≤ 3 Bulan	2.283.852.305.317	785.001.818.048
- ≤ 6 Bulan	613.168.899.774	648.024.428.885
- ≤ 12 Bulan	772.764.403.674	1.288.857.435.935
- Deposito on Call	300.000.000.000	20.000.000.000
Jumlah	4.565.822.442.955	4.318.441.003.642

d. Tingkat Suku Bunga

	2025	2024
Giro	0,00% - 1,90%	0,35% - 2,40%
Tabungan	0,00% - 2,20%	0,00% - 2,50%
Deposito	1.00% - 7,85%	0.00% - 8,00%

Simpeda adalah produk tabungan dari Bank Pembangunan Daerah yang memberikan jasa bunga yang dihitung dari saldo rata-rata harian dengan memberikan hadiah yang diundi secara nasional.

Simantap adalah produk tabungan khusus dari PT Bank Sulteng dengan memberikan jasa bunga yang dihitung dari saldo rata-rata harian namun tidak menawarkan hadiah.

TabunganKu adalah produk tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan antara lain tanpa biaya adminstrasi yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2014 Bank Sulteng mengeluarkan produk baru yaitu Tabungan Siswa dan Tabungan Siswa Plus. Tabungan ini merupakan produk turunan dari TabunganKu yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, yang dikembangkan lagi oleh Bank Sulteng. Tabungan Siswa Plus ini memiliki jangka waktu minimal 2 tahun.

PT Bank Sulteng mengeluarkan produk baru untuk jenis tabungan yang dituangkan dalam Memo No. 02/BPD-ST/DIR/XV-A/2011 tanggal 14 Januari 2011 perihal Mandatory Produk Tabungan PNS dan PensiunKu.

13. SIMPANAN NASABAH (lanjutan)

Tabungan PNS adalah produk tabungan untuk perorangan yang disyaratkan hanya kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Propinsi/Kota/Kabupaten se-Sulawesi Tengah.

Tabungan PensiunKu adalah produk tabungan untuk perorangan yang disyaratkan hanya kepada Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pejabat Negara, Hakim, Pensiun PNS Ex Pengadilan, Pensiun PNS Ex Departemen Perhubungan pada PT KAI, TNI dan Polri, serta Penerima Tunjangan Veteran, Dana Kehormatan Veteran PKRI dan KNIP.

Pada tahun 2015 Bank Sulteng mengeluarkan produk baru yaitu Tabungan Simpel. Tabungan SimPel adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

Pada tahun 2016 Bank Sulteng mengeluarkan program baru yaitu Tabungan Simantap 3 in 1.Tabungan Simantap 3 in 1 merupakan program yang dikeluarkan oleh Bank Sulteng dengan memberikan 3 manfaat dalam 1 rekening, dimana nasabah menerima 3 manfaat (*rate, cash back, gift*).

14. SIMPANAN BANK LAIN

	2025	2024
Call Money	1.275.000.000.000	530.000.000.000
Jumlah	1.275.000.000.000	530.000.000.000

Call money pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 memiliki masa jatuh tempo kurang dari satu bulan.

	2025	2024
Tingkat suku bunga:		
Giro	-	-
Call Money	4.20% - 4.85%	6.15% - 6.55%

Tidak terdapat simpanan dari bank lain yang diblokir atau dijadikan jaminan atas pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

15. PINJAMAN YANG DITERIMA

Pinjaman yang diterima oleh PT. Bank Sulteng adalah sebagai berikut:

	2025	2024
BP Tapera	85.939.208.681	88.607.713.035
PT. Sarana Multigriya Financial (SMF)	1.134.596.166.174	808.735.993.449
Jumlah	1.220.535.374.855	897.343.706.484

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Pinjaman Fasilitas Liquiditas Pembiayaan Perumahan (PFLPP) adalah fasilitas liquiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pinjaman tersebut diperoleh dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dengan PT Bank Sulteng Nomor 29/PKS/BP-TPR/IV/12/2024 dan Nomor 1211/BPD-ST/DIR/PKS/KDT/X/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Penyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan melalui kredit pemilikan rumah sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan jangka waktu Perjanjian Kerjasama selama 1 (satu) Tahun terhitung dari tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Kewajiban penyetoran pokok kepada Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan jangka waktu kredit kepada debitur.

Pinjaman Fasilitas Liquiditas Pembiayaan pada PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) adalah fasilitas likuiditas pembiayaan dalam rangka penyaluran KPR Sejahtera kepada masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dengan PT Bank Sulteng Nomor 058/FLPP/PP/SMF-BPD.SULTENGIII/2025 dan Nomor 305/BPD-ST/PKS/KDT/XVII/2025 tanggal 13 Maret 2025.

16. PAJAK PENGHASILAN

a. Kewajiban Pajak

Saldo kewajiban pajak penghasilan Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Pajak Penghasilan Kini	89.478.390.760	80.448.835.500
Angsuran Pajak Penghasilan (Pasal 25)	(80.317.294.860)	(72.287.626.180)
Jumlah	9.161.095.900	8.161.209.320

b. Taksiran Pajak Penghasilan

	2025	2024
Beban Pajak Kini	89.478.390.760	80.448.835.500
Beban/(Manfaat) Pajak Tangguhan	(5.797.183.184)	(2.022.660.638)
Jumlah	83.681.207.576	78.426.174.862

16. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

b. Taksiran Pajak Penghasilan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan kena pajak Bank untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	361.257.065.381	320.657.690.866
Koreksi Fiskal:		
Perbedaan temporer		
Beban Manfaat Karyawan Menurut Aktuaris	24.069.310.888	20.812.981.148
Iuran dan Pembayaran Manfaat Karyawan	(15.969.232.757)	(12.146.714.925)
CKPN	(6.691.732.937)	5.189.685.957
Jumlah Beda Temporer	1.408.345.194	13.855.952.180
Perbedaan Tetap		
Beban Penyusutan Rumah Dinas	878.988.329	910.842.411
Beban Sewa Rumah Dinas Pemimpin Cabang	1.589.712.488	418.495.818
Beban Sewa Kendaraan	2.716.500.000	3.222.852.000
Beban Pemeliharaan Rumah Dinas	9.999.500	13.407.900
Beban Pembinaan Pegawai dan Keluarga	553.819.000	457.295.697
Beban Langganan Surat Kabar dan Majalah	57.573.000	126.085.562
Beban Perjamuan Tamu	1.148.479.696	1.292.351.465
Beban Rekreasi dan Olah raga	660.973.605	2.494.934.225
Beban Bantuan kepada Pegawai	465.276.689	416.353.456
Beban Hadiah dan Sumbangan	1.805.516.175	1.415.627.273
Beban jamuan kepada pegawai	1.582.189.712	1.518.036.050
Beban perayaan HUT	11.663.500	377.430.014
Beban tunjangan PPh Karyawan	24.309.981.496	16.403.965.431
Beban perawatan kesehatan	2.232.202.549	1.614.951.998
Beban Pajak-pajak	2.438.652.189	10.031.610
Beban Non Operasional Lainnya	3.593.019.678	470.221.779
Jumlah Beda Tetap	44.054.547.606	31.162.882.689
Jumlah Koreksi Fiskal	45.462.892.800	45.018.834.869
Laba Kena Pajak	406.719.958.181	365.676.525.734
Laba Kena Pajak (Dibulatkan)	406.719.958.000	365.676.525.000

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

	2025	2024
Laba Kena Pajak (Dibulatkan)	406.719.958.000	365.676.525.000
Perhitungan Pajak Penghasilan Kini		
Tahun 2025:	89.478.390.760	
Tahun 2024:		80.448.835.500
Pajak Penghasilan Kini		
Uang Muka Pajak (PPh Pasal 25)	(80.317.294.860)	(72.287.626.180)
Kurang/(Lebih) Bayar Pajak	9.161.095.900	8.161.209.320

Sesuai ketentuan perpajakan di Indonesia, Bank menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang (self-assesment system). Perhitungan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dapat berbeda dan dapat menimbulkan perubahan terhadap jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar. Perubahan jumlah kewajiban pajak akibat perhitungan kembali oleh DJP tersebut akan disesuaikan pada laporan keuangan tahun berjalan dimana perhitungan dilakukan.

c. Pajak Tangguhan

Komponen Aset/(Kewajiban) Pajak Tangguhan

	2025			
	Saldo Awal	Dikreditkan/ (Dibebankan) ke OCI	Dikreditkan/ (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi	Saldo Akhir
Imbalan Pasca Kerja	11.038.443.149	(133.214.769)	1.319.268.349	12.224.496.729
CKPN	(3.005.733.588)		4.477.914.834	1.472.181.246
Jumlah	8.032.709.561	(133.214.769)	5.797.183.184	13.696.677.975

	2024			
	Saldo Awal	Dikreditkan/ (Dibebankan) ke OCI	Dikreditkan/ (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi	Saldo Akhir
Imbalan Pasca Kerja	10.730.193.133	(1.204.253.046)	1.512.503.063	11.038.443.149
CKPN	(3.515.891.163)	-	510.157.575	(3.005.733.588)
Jumlah	7.214.301.969	(1.204.253.046)	2.022.660.638	8.032.709.561

Aset pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Manajemen berpendapat bahwa terdapat kemungkinan besar jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer yang menimbulkan aset pajak tangguhan tersebut.

17. IMBALAN PASCA KERJA

Bank memberikan imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja lainnnya kepada para karyawannya yang memenuhi syarat yang terdiri dari program pensiun manfaat pasti, tunjangan hari tua, penghargaan masa kerja, uang duka dan penghargaan pensiun, serta penghargaan akhir masa jabatan direksi, yang dihitung berdasarkan Peraturan Perusahaan yang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perubahannya.

Penilaian akutaria atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja dihitung oleh akutaria independen (Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto) dengan menggunakan metode projected unit credit. Perhitungan aktuaria untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, diperoleh dari laporan aktuaria tanggal 5 Januari 2026.

	2025	2024
Dana Pensiun	78.460.522	-
Tunjangan Hari Tua	18.053.174.665	17.417.579.536
Penghargaan Masa Kerja, Uang Duka dan Pensiun	27.571.117.863	24.500.830.511
Akhir Masa Jabatan Direksi dan Komisaris	9.941.601.694	8.256.331.539
Liabilitas Imbalan Pascar Kerja	55.644.354.744	50.174.741.586

a. Program Dana Pensiun

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah memiliki program pensiun manfaat pasti melalui Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah yang pesertanya meliputi setiap karyawan yang telah berusia 18 tahun atau telah menikah. Program tersebut memberikan manfaat pensiun yang akan dibayarkan kepada karyawan yang berhak pada saat karyawan pensiun atau pada saat karyawan tersebut berhenti sesuai dengan peraturan dana pensiun yang bersangkutan.

Pendanaan program pensiun ini dibentuk dari iuran peserta sebesar 5,00% dan iuran normal dan tambahan sesuai dengan perhitungan aktuaria yang dibayarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah sebagai pendiri. Di samping itu, sumber pendanaan lainnya adalah hasil investasi Dana Pensiun. Aset Investasi dana pensiun berupa deposito berjangka.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

a. Program Dana Pensiun (lanjutan)

Berdasarkan laporan aktuaris No 012-D/PSAK/KKA-AS/I/2026 tanggal 5 Januari 2026 untuk perhitungan Dana Pensiun. Beban (Pendapatan) Imbalan Pasca kerja untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Biaya Jasa kini	4.035.612.272	3.787.828.637
Biaya (Pendapatan) Netto		
a. Biaya Bunga	7.162.225.227	6.809.726.142
b. Pendapatan Bunga dari Aset	(7.499.195.834)	(6.850.727.923)
c. Bunga atas dampak batasan aset	-	41.001.781
Beban (Pendapatan) yang Diakui	3.698.641.665	3.787.828.637
Rekonsiliasi Pendanaan:		
Nilai Kini Kewajiban	(110.946.095.039)	(100.876.411.654)
Nilai Wajar Aset	110.867.634.517	105.622.476.531
Status Pendanaan	(78.460.522)	4.746.064.877
Kewajiban transisi yang belum diakui	-	
Biaya Jasa Lalu yang belum diakui	-	
(Laba)/Rugi Aktuaria yang belum diakui	-	
BDD/(Cadangan) Akhir Periode	(78.460.522)	4.746.064.877
Perubahan atas Dampak Batasan Aset	-	4.151.836.158

Rekonsiliasi Biaya Dibayar Dimuka (Cadangan) Kewajban Imbalan Pasca Kerja:

BDD/(Cadangan) Awal Periode	4.746.064.877	594.228.719
Pembayaran Imbalan:		
Beban (Pendapatan)	3.698.641.665	3.787.828.637
Pendapatan Komprehensif Lain	3.995.588.016	(4.701.783.695)
Iuran Pemberi Kerja	2.869.704.282	3.237.881.100
BDD/(Cadangan) Akhir Periode	(78.460.522)	4.746.064.877
Jumlah Diakui dalam Laporan Posisi Keuangan		
Liabilitas		
Aset Sebelum Batasan Aset	(78.460.522)	4.746.064.877
Nilai Kini Pengembalian Masa Depan		
Aset Setelah Batasan Aset	(78.460.522)	4.746.064.877

Posisi pendanaan Per 31 Desember 2024 adalah defisit Rp78.460.522 dan posisi Per 31 Desember 2024 adalah surplus Rp4.746.064.887. Surplus Per 31 Desember 2024 tersebut tidak memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset Bank.

17. IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

a. Program Dana Pensiun (lanjutan)

Akumulasi (Laba)/Rugi Aktuaria yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain:

	2025	2024
Pendapatan Komprehensif Lain Awal	6.652.072.128	7.202.019.665
(Laba)/Rugi Aktuaria pada Kewajiban	2.499.089.089	(6.473.638.057)
(Laba)/Rugi Aktuaria pada Aset	1.496.498.927	1.812.856.143
Perubahan dampak batas aset	(4.746.064.877)	4.110.834.377
Pendapatan Komprehensif Lain Akhir Periode	5.901.595.267	6.652.072.128

b. Program Tunjangan Hari Tua Pegawai dan Direksi

Berdasarkan laporan aktuaris Nomor 012-B/PSAK/KKA-AS/I/2026 tanggal 5 Januari 2026 untuk perhitungan Tunjangan Hari Tua, Beban (Pendapatan), imbalan Pasca kerja untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Tunjangan Hari Tua Pegawai dan Direksi

	2025	2024
Biaya Jasa Kini	3.391.972.808	3.008.731.203
Biaya Bunga	2.703.362.551	2.470.886.748
Hasil yang Diharapkan dari Aset	(1.466.714.404)	(1.177.234.141)
Beban (Pendapatan) yang diakui	4.628.620.955	4.302.383.810

Status Rekonsiliasi imbalan pasca kerja untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rekonsiliasi Pendanaan		
Nilai Kini Kewajiban	(42.291.598.362)	(38.075.528.892)
Nilai Wajar Aset	24.238.423.697	20.657.949.356
Status Pendanaan	(18.053.174.665)	(17.417.579.536)
Kewajiban Transisi yang belum diakui	-	-
Biaya jasa Lalu yang belum diakui	-	-
(Laba)/Rugi Aktuaria yang belum diakui	-	-
BDD/(Cadangan) Akhir Periode	(18.053.174.665)	(17.417.579.536)

Rekonsiliasi Biaya Dibayar Dimuka (Cadangan) Kewajiban Imbalan Pasca Kerja

BDD/(Cadangan) Awal Periode	(17.417.579.536)	(18.480.751.539)
Pembayaran Imbalan	-	
Beban (Pendapatan)	4.628.620.955	4.302.383.810
Pendapatan Komprehensif Lain	892.887.607	(500.741.084)
Iuran Pemberi Kerja	4.885.913.433	4.864.814.729
BDD/(Cadangan) Akhir Periode	(18.053.174.665)	(17.417.579.536)

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

b. Program Tunjangan Hari Tua Pegawai dan Direksi (lanjutan)

Jumlah Diakui dalam Laporan Posisi Keuangan

	2025	2024
Liabilitas	18.053.174.665	17.417.579.536
Aset	-	-
Liabilitas Neto	18.053.174.665	17.417.579.536

Akumulasi (Laba)/Rugi Aktuaria yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain:

	2025	2024
Pendapatan Komprehensif Lain Awal	(10.970.594.518)	(10.469.853.434)
(Laba)/Rugi Aktuaria pada Kewajiban	54.648.568	(1.439.037.585)
(Laba)/Rugi Aktuaria pada Aset	838.239.039	938.296.501
Pendapatan Komprehensif Lain Akhir Periode	(10.077.706.911)	(10.970.594.518)

c. Program Penghargaan Masa Kerja Uang Duka dan Penghargaan Pensiun

Berdasarkan laporan aktuaris Nomor 012-A/PSAK/KKA-AS/I/2026 tanggal 5 Januari 2026 untuk perhitungan penghargaan Masa Kerja Uang Duka dan Penghargaan Pensiun, Beban (Pendapatan) imbalan pasca kerja untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Biaya Jasa Kini	8.234.223.264	7.097.782.707
Biaya Bunga	1.739.558.966	1.761.530.475
Hasil yang Diharapkan dari Aset	-	-
(Laba)/Rugi Aktuaria	-	-
Beban Jasa Lalu	-	-
a. Vested	-	-
b. Non Vested	-	-
c. Transisi	-	-
Beban (Pendapatan) yang diakui	9.973.782.230	8.859.313.182

Status Rekonsiliasi Pendanaan untuk tahun-tahun yang berkakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Nilai Kini Kewajiban	(27.571.117.863)	(24.500.830.511)
Nilai Wajar Aset	-	-
Status Pendanaan	(27.571.117.863)	(24.500.830.511)
Kewajiban transisi yang belum diakui	-	-
Biaya Jasa Lalu yang belum diakui	-	-
(Laba)/Rugi Aktuaria yang belum diakui	-	-
BDD/(Cadangan) Akhir Periode	(27.571.117.863)	(24.500.830.511)

17. IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

c. Program Penghargaan Masa Kerja Uang Duka dan Penghargaan Pensiun (lanjutan)

Rekonsiliasi Biaya Dibayar Dimuka (Cadangan) Kewajiban Imbalan Pasca Kerja:

	2025	2024
BDD/(Cadangan) Awal Periode	(24.500.830.511)	(25.164.721.067)
Pembayaran Imbalan	6.297.653.540	5.150.400.335
Beban (Pendapatan)	9.973.782.230	8.859.313.182
Pendapatan Komprehensif Lain	(605.841.338)	(4.372.803.403)
Iuran Pemberi Kerja		-
BDD/(Cadangan) Akhir Periode	(27.571.117.863)	(24.500.830.511)
Jumlah Diakui dalam Laporan Posisi Keuangan		
Liabilitas	27.571.117.863	24.500.830.511
Aset	-	-
Liabilitas Neto	27.571.117.863	24.500.830.511

Akumulasi (Laba)/Rugi Aktuaria yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain:

	2025	2024
Pendapatan Komprehensif Lain Awal	(31.845.421.890)	(27.472.618.487)
(Laba)/Rugi Aktuaria pada Kewajiban	(605.841.338)	(4.372.803.403)
(Laba)/Rugi Aktuaria pada Aset	-	-
Pendapatan Komprehensif Lain Akhir Periode	(32.451.263.228)	(31.845.421.890)

d. Penghargaan Akhir Masa Jabatan Direksi dan Komisaris

Berdasarkan laporan aktuaris Nomor 012-C/PSAK/KKA-AS/I/2026 tanggal 5 Januari 2026 untuk perhitungan penghargaaan Akhir Masa Jabatan Direksi, beban (pendapatan) imbalan pasca kerja untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Biaya Jasa Kini	5.223.348.156	3.271.497.540
Biaya Bunga	544.917.882	333.328.615
Hasil yang diharapkan dari aset	-	-
(Laba)/Rugi Aktuaria	-	-
Beban Jasa Lalu	-	-
a. Vested	-	-
b. Non Vested	-	-
c. Transisi	-	-
Beban (Pendapatan) yang diakui	5.768.266.038	3.604.826.155

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

d. Penghargaan Akhir Masa Jabatan Direksi dan Komisaris (lanjutan)

Status Rekonsiliasi Pendapatan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Nilai Kini Kewajiban	(9.941.601.694)	(8.256.331.539)
Nilai Wajar Aset	-	-
Status Pendanaan	(9.941.601.694)	(8.256.331.539)
Perubahan pada Dampak Batas Aset	-	-
BDD/(Cadangan) Akhir Periode	(9.941.601.694)	(8.256.331.539)

Rekonsiliasi Biaya Dibayar Dimuka (Cadangan) Kewajiban Imbalan Pasca Kerja:

	2025	2024
BDD/(Cadangan) Awal Periode	(8.256.331.539)	(5.128.132.542)
Pembayaran imbalan	1.660.500.000	9.939.712.500
Beban (pendapatan)	5.768.266.038	3.604.826.155
Pendapatan Komprehensif Lain	(2.422.495.883)	9.463.085.342
Iuran Pemberi Kerja	-	-
BDD/(Cadangan) Akhir Periode	(9.941.601.694)	(8.256.331.539)

Jumlah yang Diakui dalam Laporan Posisi Keuangan:

Liabilitas	9.941.601.694	8.256.331.539
Aset	-	-
Liabilitas Neto	9.941.601.694	8.256.331.539

Akumulasi (Laba)/Rugi Aktuaria yang diakui dalam pendapatan Komprehensif Lain:

	2025	2024
Pendapatan Komprehensif Lain Awal	21.933.785.788	12.470.700.446
(Laba)/Rugi Aktuaria pada Kewajiban	(2.422.495.883)	9.463.085.342
(Laba)/Rugi Aktuaria pada Aset	-	-
Perubahan dampak batas aset	-	-
Pendapatan Komprehensif Lain akhir periode	19.511.289.905	21.933.785.788

17. IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

Asumsi yang digunakan oleh aktuaris untuk menentukan besarnya seluruh kewajiban manfaat karyawan di atas adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Tingkat Mortalitas	GAM tahun 1971	GAM tahun 1971
Tingkat Kecatatan	0.01% per tahun	0.01% per tahun
Tingkat Pengunduran Diri	0.50% per tahun	0.50% per tahun
Tingkat Pensiun Awal	0.10% per tahun	0.10% per tahun
Selisih Usia Peserta dan Suami/istri	5 Tahun	5 Tahun
Rata-rata Kenaikan Gaji	5%	5%
Tingkat Kenaikan Manfaat Pensiun Berkala	Nihil	Nihil
Tingkat Bunga Pengukuran Kewajiban Aktuaria	5,2% - 6,7%	4,7% - 7,5%
Tingkat Bunga Pengukuran Aset Aktuaria	0% - 6,7%	0% - 7,5%
Usia Pensiun	56 Tahun	56 Tahun
Metode yang Digunakan	Projected Unit Credit	Projected Unit Credit

18. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR DAN LIABILITAS LAIN-LAIN

Liabilitas lain-lain adalah liabilitas yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam klasifikasi-klasifikasi akun liabilitas di atas, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Jaminan Tender	-	-
Bunga Yang Masih Harus Dibayar	12.418.599.056	10.816.813.127
CKPN Rekening Administratif (Longgar Tarik)	1.826.607.395	1.156.016.237
Lain lain	73.036.856	17.201.039
Jumlah	14.318.243.307	11.990.030.403

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. PERMODALAN

a. Modal Saham

Modal saham Bank masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal	
	2025	2024
Modal Dasar	1.700.000.000.000	1.700.000.000.000
Belum Ditempatkan	(1.208.030.200.000)	(1.208.030.200.000)
Jumlah Modal Disetor	491.969.800.000	491.969.800.000

	Lembar Saham	
	2025	2024
Modal Dasar	17.000.000	17.000.000
Belum Ditempatkan	(12.080.302)	(12.080.302)
Jumlah Modal Disetor	4.919.698	4.919.698

Komposisi pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025		
	Lembar Saham	%	Nominal Saham
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	1.507.448	30,64%	150.744.800.000
Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong	242.638	4,93%	24.263.800.000
Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai	238.417	4,85%	23.841.700.000
Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli	222.523	4,52%	22.252.300.000
Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	181.068	3,68%	18.106.800.000
Pemerintah Daerah Kabupaten Poso	171.897	3,49%	17.189.700.000
Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala	168.487	3,42%	16.848.700.000
Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Unauna	164.495	3,34%	16.449.500.000
Pemerintah Daerah Kabupaten Buol	148.407	3,02%	14.840.700.000
Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara	144.741	2,94%	14.474.100.000
Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali	144.164	2,93%	14.416.400.000
Pemerintah Daerah Kota Palu	125.728	2,56%	12.572.800.000
Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut	113.591	2,31%	11.359.100.000
Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi	66.746	1,36%	6.674.600.000
PT. Mega Corpora	1.279.348	26,00%	127.934.800.000
Jumlah	4.919.698	100,00%	491.969.800.000

19. PERMODALAN (lanjutan)

a. Modal Saham (lanjutan)

	2024		
	Lembar Saham	%	Nominal Saham
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	1.507.448	30,64%	150.744.800.000
Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong	242.638	4,93%	24.263.800.000
Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai	238.417	4,85%	23.841.700.000
Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli	222.523	4,52%	22.252.300.000
Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	181.068	3,68%	18.106.800.000
Pemerintah Daerah Kabupaten Poso	171.897	3,49%	17.189.700.000
Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala	168.487	3,42%	16.848.700.000
Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Unauna	164.495	3,34%	16.449.500.000
Pemerintah Daerah Kabupaten Buol	148.407	3,02%	14.840.700.000
Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara	144.741	2,94%	14.474.100.000
Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali	144.164	2,93%	14.416.400.000
Pemerintah Daerah Kota Palu	125.728	2,56%	12.572.800.000
Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut	113.591	2,31%	11.359.100.000
Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi	66.746	1,36%	6.674.600.000
PT. Mega Corpora	1.279.348	26,00%	127.934.800.000
Jumlah	4.919.698	100,00%	491.969.800.000

Pada tanggal 26 Januari 2024, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (Bank Sulteng) telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Mega Corpora untuk membentuk Kelompok Usaha Bank (KUB). Dalam struktur KUB ini, PT Bank Mega Tbk akan berperan sebagai pelaksana perusahaan induk, sementara Bank Sulteng menjadi perusahaan anak. Pembentukan KUB ini diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan, tata kelola, manajemen risiko, pengembangan sumber daya manusia, akselerasi transformasi digital, serta efisiensi operasional Bank Sulteng. Selain itu, sinergi bisnis yang saling menguntungkan, seperti perluasan basis pelanggan dan layanan bersama, diharapkan dapat terwujud melalui kerja sama ini. Langkah ini sejalan dengan upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendorong konsolidasi perbankan untuk meningkatkan daya saing dan ketahanan bank di tingkat regional dan nasional.

Berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-191/PB.31/2024 tanggal 19 September 2024 perihal Perubahan Anggota Kelompok Usaha Bank (KUB) Mega Corpora, telah disampaikan bahwa perubahan struktur KUB Mega Corpora telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK. Struktur KUB tersebut terdiri dari PT Bank Mega Tbk sebagai Pelaksana Perusahaan Induk, serta PT Bank Mega Syariah, PT Allo Bank Indonesia Tbk, dan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah sebagai anggota. OJK menginstruksikan agar seluruh entitas dalam KUB Mega Corpora melaksanakan sinergi secara optimal sesuai prinsip *arm's-length* untuk mendukung penguatan struktur, ketahanan, dan daya saing KUB, serta berkoordinasi dengan PT Mega Corpora selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) guna memastikan pemenuhan kebutuhan permodalan dan likuiditas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. PERMODALAN (lanjutan)

b. Dana Setoran Modal

Dana Setoran Modal merupakan tambahan setoran modal oleh para pemegang saham untuk menambah kepemilikan saham, namun belum didukung kelengkapan persyaratan modal sehingga harus dicatat pada rekening dana setoran modal sesuai Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

Tambahan modal disetor pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:

	2025	2024
Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali	15.000.368.675	1.500.368.675
Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli	8.000.537.943	537.943
Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut	5.000.483.731	2.000.483.731
Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	4.720.407.788	2.360.407.788
Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara	4.500.683.844	4.500.683.844
Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Unauna	4.000.268.064	2.000.268.064
Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong	1.000.409.158	409.158
Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala	1.000.234.219	234.219
Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai	685.320	685.320
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	608.412	608.412
Pemerintah Daerah Kabupaten Poso	434.112	434.112
Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi	380.586	380.586
Pemerintah Daerah Kabupaten Buol	351.709	351.709
Pemerintah Daerah Kota Palu	216.848	216.848
PT. Mega Corpora	-	-
Jumlah	43.226.070.410	12.366.070.410

Dana setoran modal tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp43.226.070.410 dan Rp12.366.070.410 berasal dari setoran modal Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Wilayah Sulawesi Tengah yang belum mendapatkan persetujuan RUPS dan Otoritas Jasa Keuangan.

c Agio

Per 31 Desember 2025 dan 2024, agio saham yang berasal dari setoran modal Pemprov, Pemkot dan Pemkab di Wilayah Sulawesi Tengah adalah sebesar Rp128.112.080.074, sedangkan agio saham PT. Mega Corpora sebesar Rp74.789.404.732.

19. PERMODALAN (lanjutan)

c Agio (lanjutan)

Rincian saldo agio Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	45.194.945.195	45.194.945.195
Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli	4.426.983.152	4.426.983.152
Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong	3.823.393.977	3.823.393.977
Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai	5.426.865.888	5.426.865.888
Pemerintah Daerah Kabupaten Poso	8.531.506.460	8.531.506.460
Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala	7.747.162.057	7.747.162.057
Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	4.795.917.901	4.795.917.901
Pemerintah Daerah Kabupaten Buol	5.158.948.291	5.158.948.291
Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Unauna	4.611.421.297	4.611.421.297
Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali	10.735.293.842	10.735.293.842
Pemerintah Daerah Kota Palu	3.025.019.414	3.025.019.414
Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara	9.532.792.212	9.532.792.212
Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut	8.461.414.119	8.461.414.119
Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi	6.640.416.269	6.640.416.269
PT. Mega Corpora	74.789.404.732	74.789.404.732
Jumlah	202.901.484.806	202.901.484.806

Harga saham atas Dana setoran modal Pemegang Saham Tahun 2013 sampai saat ini adalah sebesar Rp158.459 per lembar saham dengan rincian Rp100.000 dibukukan sebagai Nominal saham dan Rp58.459 dibukukan sebagai Agio saham berdasarkan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik "Miduk Totok" yang telah diputuskan pada RUPS-LB tanggal 12 April 2013 dan tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT. Bank Pembangunan Daerah Sulteng No.69 tanggal 21 Juni 2013.

20. PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA

	2025	2024
Keuntungan (Kerugian) Nilai Wajar Surat Berharga	-	-
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Program Manfaat Pasti	10.703.341.353	10.231.034.443
Jumlah	10.703.341.353	10.231.034.443

Keuntungan atau kerugian aktuaria dari penyesuaian dan perubahan asumsi aktuaria sebagai kelebihan atas nilai yang lebih tinggi antara 10% dari nilai wajar aset program atau 10% dari nilai kini liabilitas imbalan pasti pada awal periode diamortisasi dan diakui sebagai biaya atau keuntungan selama perkiraan rata rata sisa tahun jasa pegawai yang telah memenuhi kriteria.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pembagian laba tahun buku 2024 dilaksanakan pada tahun 2025 berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat RUPS Tahunan yang tertuang dalam Akta Notaris Farid,SH nomor 27 tanggal 20 Januari 2025. Sedangkan pembagian laba tahun buku 2023 dilaksanakan pada tahun 2024 berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat RUPS Tahunan yang tertuang dalam Akta Notaris Farid,SH nomor 22 tanggal 12 Februari 2024.

Adapun alokasi pembagian laba untuk tahun-tahun tersebut adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Dividen	169.562.061.202	154.545.066.665
Cadangan Umum	72.669.454.801	103.030.044.443
Cadangan Tujuan	-	-
Jumlah Alokasi Laba	242.231.516.003	257.575.111.108

22. PENDAPATAN BUNGA

	2025	2024
Penempatan pada Bank Indonesia	157.761.655.059	51.837.593.617
Penempatan pada Bank Lain	6.773.556.551	16.961.150.143
Kredit yang Diberikan	976.206.578.192	894.223.647.569
Pihak Ketiga bukan Bank (SBN)	98.790.200.527	120.126.998.360
Jumlah	1.239.531.990.329	1.083.149.389.688

23. BEBAN BUNGA

	2025	2024
Bank Indonesia		
- Lending Facility Bank Indonesia	-	-
Jumlah Beban Bunga Bank Indonesia	-	-
Bank Lain		
- Call Money	43.731.174.167	47.888.792.222
- Deposito Berjangka	1.513.000	-
- Giro	973.792	1.490.828
- Lainnya (REPO)	11.531.546.782	15.950.262.550
Jumlah Beban Bunga Bank Lain	55.265.207.741	63.840.545.601
Non Bank		
- Giro	43.824.329.751	41.459.366.619
- Tabungan	12.807.886.841	11.854.659.573
- Deposito Berjangka	257.180.346.560	232.866.129.354
- Lainnya	77.651.222.860	55.545.563.269
Jumlah Beban Bunga Non Bank	391.463.786.012	341.725.718.816
Jumlah	446.728.993.752	405.566.264.416

24. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

	2025	2024
Pendapatan Provisi Kredit	17.379.354.506	35.988.815.683
Penerimaan Bunga Kredit Hapus Buku	83.675.354	87.107.858
Penerimaan Pokok Kredit Hapus Buku	2.049.026.083	1.410.111.463
Provisi Bank Garansi	316.238.374	556.875.635
Denda Kredit dan Deposito	5.695.530.487	4.813.109.225
Jasa Penggantian Cek dan Bilyet Giro	361.684.970	407.716.020
Jasa Administrasi	43.258.262.736	62.233.841.727
Jasa Transfer	575.555.100	655.080.004
Pendapatan Fee	5.958.485.204	9.598.166.862
Lainnya	2.528.141.730	1.257.304.457
Jumlah	78.205.954.543	117.008.128.933

25. PENYISIHAN (PEMULIHAN) CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI

	2025	2024
Kredit yang diberikan	25.262.934.083	15.128.464.424
Tagihan Klaim Asuransi	484.124.849	-
Jumlah	25.747.058.932	15.128.464.424

26. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

	2025	2024
Beban Barang dan Jasa Pihak Ketiga	74.070.963.795	87.156.391.933
Beban Sewa	6.072.810.938	19.339.736.474
Beban Bunga Aset Hak Guna	3.813.107.773	194.813.916
Beban Asuransi	21.900.227.986	18.034.935.903
Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	2.284.818.585	2.585.038.624
Beban Penyusutan dan Amortisasi	29.391.446.398	11.987.369.817
Beban Promosi	12.193.086.571	12.459.458.614
Beban Perjalanan Dinas	10.617.110.772	9.449.933.215
Beban Pajak dan Retribusi	2.657.583.784	257.230.565
Jumlah	163.001.156.601	161.464.909.061

27. BEBAN TENAGA KERJA

	2025	2024
Gaji dan Tunjangan	76.564.817.897	77.562.981.300
Honorarium Dewan Komisaris	4.425.712.403	3.416.588.990
Lembur	754.793.700	575.298.550
Pembayaran Lainnya Ke Pegawai	93.825.678.706	83.861.774.875
Jasa Produksi dan Kesejahteraan	52.079.775.940	55.378.648.887
Imbalan Kerja	24.069.310.888	20.812.981.148
Pendidikan dan Seminar	33.413.931.787	25.821.061.774
Jumlah	285.134.021.321	267.429.335.524

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. BEBAN LAINNYA

	2025	2024
Tenaga Ahli	3.155.849.251	5.174.043.278
Beban Iuran Dana Pensiun	3.340.122	23.973.820
Beban Operasional Lainnya	28.848.952.412	26.556.923.761
Beban Dari Bank Lain	421.953.297	476.967.346
Jumlah	32.430.095.082	32.231.908.205

29. PENDAPATAN/(BEBAN) NON OPERASIONAL

	2025	2024
Pendapatan Non Operasional:		
Pendapatan Non Operasional Lainnya	2.307.061.369	4.228.421.271
Jumlah	2.307.061.369	4.228.421.271
Beban Non Operasional:		
Beban Non Operasional Lainnya	(3.593.019.678)	(470.221.779)
Denda Laporan	(700.000)	(21.518.345)
Denda Pajak	-	-
Denda Lainnya	(347.379.319)	-
Hadiah dan Sumbangan	(1.805.516.175)	(1.415.627.273)
Jumlah	(5.746.615.172)	(1.907.367.397)
Jumlah Pendapatan/(Beban) Non Operasional	(3.439.553.802)	2.321.053.874

30. TAGIHAN DAN LIABILITAS KOMITMEN KONTIJENSI

	2025	2024
KOMITMEN		
Tagihan komitmen:		
- Komitmen Kredit yang Belum Digunakan	-	-
- Lainnya	-	-
Jumlah	-	-
Liabilitas komitmen:		
- Komitmen Kredit yang Belum Ditarik	169.610.768.242	269.587.123.224
- Lainnya		-
Jumlah	169.610.768.242	269.587.123.224
Komitmen bersih	169.610.768.242	269.587.123.224
KONTIJENSI		
Tagihan Kontijensi:		
- Pendapatan Bunga dalam Penyelesaian	61.685.403.801	46.215.088.368
- Lainnya		-
Jumlah	61.685.403.801	46.215.088.368
Liabilitas Kontijensi:		
- Garansi yang Diterbitkan	29.237.022.874	(41.301.242.430)
- Lainnya	620.485.232	-
Jumlah	29.857.508.106	(41.301.242.430)
Kontijensi Bersih	91.542.911.907	4.913.845.938
LAINNYA		
- Aset Produktif yang Dihapusbukukan	93.807.439.139	67.204.285.850
- Lainnya	211.242.809	770.358.160
Jumlah Tagihan Lainnya	94.018.681.948	67.974.644.010
Jumlah Tagihan Komitmen dan Kontijensi - Bersih	355.172.362.097	332.647.921.296

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. MANAJEMEN RISIKO

PT. Bank Sulteng menerapkan manajemen risiko secara independen dan sesuai dengan standar yang mengacu pada ketentuan regulator (Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia) serta praktik terbaik yang diadopsi dalam industri perbankan internasional.

Bank mengimplementasikan prosedur manajemen risiko sesuai dengan POJK No.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, sehingga Bank harus mengelola serta melakukan mitigasi risiko sesuai ruang lingkup aktivitas bisnisnya, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan.

Direksi memiliki tanggung jawab secara menyeluruh terhadap pembentukan dan pengawasan terhadap kerangka manajemen risiko Bank. Direksi telah membentuk Komite Aset dan Liabilitas (ALCO), Komite Risiko Kredit dan Operasional yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memonitor kebijakan manajemen risiko Bank di area yang telah ditetapkan. Semua komite Dewan memiliki anggota eksekutif dan non-eksekutif dan melaporkan secara teratur kepada Direksi pada tanggal kegiatan mereka.

Kebijakan manajemen risiko Bank dibuat untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dihadapi oleh Bank, untuk menetapkan batas risiko dan pengendalian yang tepat, dan memantau risiko dan kepatuhan terhadap batas risiko. Kebijakan manajemen risiko dan sistem direview secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar, produk dan jasa yang ditawarkan.

Bank, melalui pelatihan dan pemeliharaan prosedur operasi standar, bertujuan untuk mengembangkan lingkungan pengendalian yang disiplin dan konstruktif, sehingga semua karyawan memahami peran dan kewajibannya masing-masing.

Komite Audit Bank bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko Bank, dan untuk mengkaji kecukupan kerangka kerja manajemen risiko dalam kaitannya dengan risiko yang dihadapi oleh Bank. Komite Audit Bank dibantu oleh fungsi-fungsi internal Audit. Internal Audit melakukan review terhadap prosedur dan pengendalian manajemen risiko secara regular dan ad-hoc, hasilnya dilaporkan kepada Komite Audit Bank.

Seluruh risiko dilaporkan Bank kepada Bank Indonesia melalui penyusunan laporan Profil Risiko secara triwulan dan laporan Tingkat Kesehatan Bank secara semesteran untuk menggambarkan seluruh risiko yang melekat dalam kegiatan bisnis Bank.

a. Profil Risiko Bank

Penilaian Profil Risiko, yang mencakup penilaian terhadap Risiko Inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko yang mencerminkan sistem pengendalian Risiko (risk control system), baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi. Penilaian tersebut dilakukan terhadap 8 (delapan) Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum,Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi.

31. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Profil Risiko Bank (lanjutan)

Ringkasan sesuai matriks profil risiko, yaitu sebagai berikut:

Profil Risiko	Des-25			Desember 2024		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit	Low	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Pasar	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Operasional	Low	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Likuiditas	Low	Satisfactory	2	Low	Satisfactory	2
Risiko Hukum	Low	Satisfactory	2	Low	Satisfactory	2
Risiko Reputasi	Low	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Strategik	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Kepatuhan	Low	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
Peringkat Komposit	Low	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2

Dengan melihat risiko inheren berada pada posisi Low dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada posisi Satisfactory, maka peringkat Profil Risiko Per Desember 2025 adalah peringkat 2 (dua).

b. Risiko Kredit

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit adalah untuk memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana Bank tidak terekspos pada Risiko Kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada Bank.

Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko tersebut tergolong cukup signifikan. Dengan melihat Risiko Inherent yang berada pada posisi Low, serta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang berada pada posisi Satisfactory, dapat disimpulkan Peringkat Risiko untuk Risiko Kredit mendapatkan nilai 2 (Dua).

Peringkat Risiko Kredit mendapatkan nilai 2 (dua) disebabkan oleh:

1) Rasio KKR (Kredit Kualitas Rendah) terhadap total kredit pada periode Desember 2025 tercatat sebesar 3,97% menurun dibandingkan posisi September 2025 sebesar 4,71%. Penurunan rasio ini mencerminkan perbaikan kualitas kredit, yang terutama di sebabkan oleh turunnya nominal total KKS sebesar 57 Miliar, dari Rp395 miliar pada September menjadi Rp338 miliar pada Desember 2025. Dengan demikian, parameter resiko kredit untuk periode Desember 2025 berada dalam kondisi Appetite in-Line, menunjukkan bahwa kualitas kredit masih terjaga dengan batas resiko yang di tetapkan.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko Kredit (lanjutan)

2) Sumber dana untuk penyediaan dana dalam rangka membiayai kredit masih tetap bersumber dari pihak ketiga yaitu deposito, giro dan tabungan untuk posisi Desember 2025 yaitu sebesar Rp8.726Milyar.
3) Kredit per sektor ekonomi dibagi dengan total kredit untuk periode bulan Desember 2025 didominasi oleh sektor rumah tangga yaitu sebesar Rp6.898Milyar.

Sehubungan dengan bertambahnya kredit bermasalah selama Semester II Tahun 2025 dampak yang terjadi adalah sebagai berikut:
1) Pelaksanaan pengawasan aktif oleh Komisaris dan Direksi sudah dilakukan dengan cukup baik.
2) Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi tercermin dari tanggung jawab atas efektifitas penerapan manajemen risiko di Bank Sulteng. Kedepannya agar pengawasan secara aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi untuk terus ditingkatkan dengan memberikan arahan dalam meningkatkan manajemen risiko melalui mekanisme rapat yang terus menerus atau dalam bentuk rekomendasi atau evaluasi penerapan manajemen risiko.
3) Perumusan tingkat risiko yang diambil cukup memadai (risk appetite, tolerance, limit), namun pelaksanaannya belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dan belum dilakukan review secara berkala. Hal ini dapat berjalan dengan maksimal apabila seluruh komponen yang terlibat dapat bersinergi dengan baik serta saling mendukung.
4) Penetapan tingkat risiko dan toleransi risiko juga harus sejalan dengan Rencana Bisnis Bank sehingga lebih terarah serta dapat menjadi acuan dan bahan evaluasi bagi risk taking unit untuk mengambil langkah strategis yang tepat kedepannya didalam merealisasikan ekspansi kredit, menekan peningkatan Non Performing Loan (NPL), sehingga biaya yang timbul dalam pembentukkan CKPN bisa diminimalisasi dan pencapaian profit dapat terealisasi.

Adapun Maksimum Eksposur Risiko Kredit adalah sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

	2025	2024
Bank Indonesia	1.133.091	996.769
Giro pada Bank Lain	7.378	6.765
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	-	690.000
Efek-efek	3.627.165	2.509.215
Kredit yang Diberikan	8.548.013	8.381.213
Jumlah - Bruto	13.315.647	12.583.962
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(119.281)	(94.639)
Jumlah - Bersih	13.196.366	12.489.323

Eksposur risiko kredit terhadap rekening administratif pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Garansi yang Diterbitkan	(29.237.022.874)	41.301.242.430
Fasilitas Kredit Kepada Debitur Belum Digunakan	(169.610.768.242)	(269.587.123.224)
Jumlah - Bersih	(198.847.791.117)	(228.285.880.794)

31. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko Kredit (lanjutan)

Tabel di atas menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit bagi Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya. Untuk aset pada laporan posisi keuangan, eksposur di atas ditentukan berdasarkan nilai tercatat bersih seperti yang diungkapkan pada laporan keuangan.

	2025	
	Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai
Pertanian	242.780.781.159	10.739.171.566
Pertambangan	256.626.884.457	398.666.666
Perindustrian	18.651.670.864	1.905.512.401
Perdagangan/Restoran & Hotel	409.458.053.674	44.972.861.794
Konstruksi	495.244.908.005	50.766.005.050
Pengangkutan	262.500.008	230.051.983
Jasa dunia usaha	105.061.183.733	12.678.673.233
Lain-Lain	6.753.164.185.485	145.072.197.591
Jumlah	8.281.250.167.385	266.763.140.284
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(34.367.447.002)	(84.913.966.942)
Jumlah - Bersih	8.246.882.720.383	181.849.173.342

	2024	
	Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai
Pertanian	33.304.814.891	7.233.723.654
Pertambangan	387.005.707.835	3.032.666.666
Perindustrian	47.073.943.737	1.969.304.332
Perdagangan/Restoran & Hotel	336.059.942.059	48.144.841.912
Konstruksi	553.316.582.196	53.565.525.551
Pengangkutan	-	256.751.273
Jasa dunia usaha	2.505.574.310	12.703.921.152
Lain-Lain	6.794.748.421.615	100.291.070.162
Jumlah	8.154.014.986.643	227.197.804.702
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(19.662.603.002)	(74.976.566.617)
Jumlah - Bersih	8.134.352.383.641	152.221.238.085

Bank mendorong optimalisasi portofolio kredit dimana perluasan/diversifikasi kredit didasarkan pada rencana strategis Bank, kondisi ekonomi saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan kredit, standar dan pelaksanaan serta pemantauan dan pengadministrasian portofolio kredit ditetapkan oleh pejabat bank. Kebijakan ini disetujui oleh Dewan Komisaris dan secara berkala diperbarui untuk memasukkan perubahan pasar dan peraturan perbankan yang baru.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko Kredit (lanjutan)

Risiko inherent untuk risiko kredit berada pada posisi Low. Berikut ini adalah rasio non-Performing Loan (NPL) Gross dan Rasio Non-Performing Loan (NPL) Netto Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

	2025	2024
Rasio NPL Gross	2,90%	2,71%
Rasio NPL Netto	1,90%	1,82%
Rasio KAP	2,03%	1,96%

Rasio Kualitas Aset Produktif (KAP) merupakan rasio antara aset yang diklasifikasikan tidak produktif (AYDTP) dibandingkan dengan total aset produktif (AP). Aset yang diklasifikasikan tidak produktif merupakan rata-rata tertimbang aset berdasarkan kolektibilitas.

Risiko NPL Gross merupakan rasio antara baki debet pinjaman yang digolongkan non-performing loan (kategori kurang lancar, diragukan dan macet) dibandingkan dengan total baki debet pinjaman. Rasio NPL Netto merupakan rasio antara nilai bersih pinjaman yang digolongkan non-performing loan (kategori kurang lancar, diragukan dan macet) dibandingkan dengan baki debet pinjaman. Nilai bersih merupakan baki debet dikurangi saldo penyisihan penghapusan pinjaman.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit berada pada posisi Satisfactory. Kebijakan yang diambil oleh Bank Sulteng dalam Penerapan Manajemen Risiko Kredit adalah sebagai berikut:

1) Bank telah memiliki sistem dan prosedur bagi penanganan kredit bermasalah namun masih secara umum, yang belum sampai secara detail. Atas sistem dan prosedur yang telah tersedia belum dilaksanakan secara efektif, khususnya melakukan restrukturisasi kredit.
2) Administrasi kredit untuk menjalankan fungsinya telah diatur secara tertulis, baik itu berkenaan dengan kebijakan maupun prosedur dalam bentuk SK, SE & SOP Administrasi Kredit.
3) Proses pengajuan kredit, Bank telah melakukan pemisahan antara AO dengan administrasi kredit, baik fungsi/tugas maupun personalnya.
4) Proses pengendalian risiko harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang memadai. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu Pengurus Bank dalam menjaga aset dari Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya. Meningkatkan kepatuhan Bank terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan sistem pengendalian intern Bank yang efektif dan memadai menjadi tanggung jawab dari seluruh satuan kerja operasional dan satuan kerja pendukung dan secara khusus dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dengan cara melakukan pemeriksaan audit berbasis risiko. Disamping itu untuk keperluan Sistem Pengendalian Intern yang independen dari Risk Taking Unit, Bank telah menempatkan Resident Audit sebagai pelaksana harian fungsi SKAI pada cabang-cabang yang ada.
5) Bank secara rutin telah melakukan monitoring/pemantauan terhadap seluruh portofolio kredit yang ada melalui laporan watchlist terhadap kondisi dan kualitas kredit masing-masing cabang secara bulanan, namun belum secara spesifik dilakukan khusus untuk debitur-debitur dengan eksposure tertentu yang berpotensi bisa terjadi penurunan kualitas kredit. Kedepannya akan dilakukan review secara kontinyu perbulan atau per 3 (tiga) bulanan melalui Post Mortem Review oleh Divisi Kredit minimal kepada eksposure kredit yang besar.
6) Bank telah menerapkan Credit Scoring melalui Aplikasi Loan Origination System (LOS).

31. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

c. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko bahwa perubahan harga pasar seperti suku bunga, akan memengaruhi pendapatan atau nilai dari instrumen keuangan.

Risiko tingkat bunga bank merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan bunga, mengingat tingkat suku bunga tersebut sesuai dengan strategi bisnis Bank. Kegiatan manajemen dalam memonitoring aset dan liabilitas bank dilakukan terhadap setiap perubahan tingkat suku bunga. Adapun pengelolaan risiko suku bunga disertai dengan pemantauan sensitivitas aset keuangan dan liabilitas bank untuk meningkatkan atau menurunkan tingkat suku bunga pasar.

Risiko nilai tukar adalah risiko kerugian akibat pergerakan yang berlawanan dari nilai tukar pada saat Bank memiliki posisi terbuka. Bank tidak memiliki saldo dan transaksi dalam mata uang asing. Dengan demikian, Bank tidak menghadapi risiko nilai tukar.

Risiko Inherent yang berada pada posisi Low to Moderat, serta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang berada pada posisi Satisfactory, dapat disimpulkan Peringkat Risiko untuk Risiko Pasar adalah 2 (Dua). Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh Bank, kemungkinan kerugian yang akan dihadapi oleh Bank dari risiko pasar cukup tinggi selama periode waktu tertentu dimasa datang.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko pasar berada pada posisi Satisfactory. Kebijakan yang diambil oleh Bank Sulteng dalam Penerapan Manajemen Risiko Pasar adalah sebagai berikut:

1) Bank telah memperhatikan penyusunan dan penetapan toleransi risiko serta besarnya risiko yang akan diambil dengan mempertimbangkan strategi dan tujuan bisnis bank yang tertuang dalam RBB. Namun belum dilakukan secara berkala;
2) Direksi telah memberikan arahan kepada setiap unit kerja dalam Menyusun kebijakan Manajemen risiko khususnya penyusunan limit risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;
3) Pengawasan aktif Dewan Komisaris cukup memadai.
4) Komisaris telah mendapatkan informasi mengenai suku bunga yang diinformasikan secara berkala.

Rasio CASA Bank Sulteng terhadap CASA peer group pada Desember 2025 tercatat sebesar 70,28% menurun jika dibandingkan dengan posisi September 2025 yang sebesar 91,68%. Penurunan ini mencapai 21,41 point presentase. Dengan demikian, Ratio CASA Bank Sulteng masih berada jauh di atas risk appetite ≥60%, sehingga menunjukkan bahwa bank tetao kompetitif dalam menghimpun dana murah dibandingkan dengan peer group nya. Dengan demikian, Parameter ini masih berada pada posisi Appetite in-Line.

Rasio CASA Bank Sulteng terhadap total DPK pada Desember 2025 tercatat sebesar 47,68%, menurun jika dibandingkan dengan posisi September 2025 yang sebesar 61,90%. Penurunan ini mencapai 14,23 point presentase, yang disebabkan oleh penurunan nominal CASA Bank sebesar Rp 1,71 triliun. Rasio tersebut berada di bawah ambang batas risk appetite yang ditetapkan (≥55%). Dengan demikian parameter ini berada pada posisi Limit Breach.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

c. Risiko Pasar (lanjutan)

Tabel di bawah ini merupakan besaran tingkat bunga per tahun untuk aset dan liabilitas yang signifikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

	2025	2024
ASET		
Giro pada bank lain	1%	1%
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain		
Call Money Fasbi	-	-
Interbank Call Money	-	6.30% - 6.55%
Efek-efek		
Surat Berharga Negara	5,42% - 7,56%	5.13% - 7.50%
Reverse Repo	-	-
Obligasi	6.45% - 9.50%	6.35% - 9.50%
Medium Term Note	-	-
Kredit yang diberikan	4,5% - 20%	4,5% - 20%
LIABILITAS		
Simpanan dan Nasabah		
Giro	0,00% - 1,90%	0,35% - 2,40%
Tabungan	0,00% - 2,20%	0,00% - 2,50%
Deposito	1.00% - 7,85%	0.00% - 8,00%
Simpanan dari Bank Lain		
Giro	-	-
Call Money	4.20% - 4.85%	6.15% - 6.55%

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko di mana Bank tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajibannya (membayar kepada kreditur atau melunasi hutang-hutangnya pada saat jatuh tempo). Risiko likuiditas dapat diperkecil dengan suatu perencanaan cash flow dan pengelolaan kelebihan dana yang tepat dengan tetap mengantisipasi kebutuhan dan kewajiban di masa yang akan datang. Pengelolaan likuiditas dan risiko pendanaannya diawasi oleh komite ALCO. Kebijakan risiko likuiditas merupakan tanggung jawab manajemen dan strategis yang harus diambil untuk menjamin likuiditas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan Bank sesuai dengan peraturan yang berlaku.

31. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

d. Risiko Likuiditas (lanjutan)

Dengan melihat Risiko Inheren yang berada pada posisi Low, serta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang berada pada posisi Satisfactory, dapat disimpulkan Peringkat Risiko untuk Risiko Likuiditas adalah 2 (Dua).

Ukuran utama yang digunakan oleh Bank untuk mengelola risiko likuiditas adalah rasio aset lancar bersih terhadap simpanan nasabah. Rasio aktiva lancar bersih dianggap sebagai uang tunai dan kas pada aktiva lancar dikurangi dengan simpanan dari bank (Giro pada Bank Lain).

Untuk memantau tingkat risiko likuiditas Bank melakukan analisis jatuh tempo aset dan kewajiban secara periodik.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis jatuh tempo aset dan liabilitas Bank dihitung berdasarkan sisa periode pada akhir tahun sampai ada jatuh tempo kontrak.

	2025					
	Saldo	<1 Bulan	1-3 Bulan	3-6 Bulan	6-12 Bulan	>12 Bulan
ASET						
Kas	154.429	154.429	-	-	-	-
Giro pada BI	1.133.091	1.133.091	-	-	-	-
Antar Bank Aktiva	7.378	7.378	-	-	-	-
Efek-efek	3.627.165	1.911.018	-	-	665.092	1.051.055
Kredit yg diberikan	8.548.013	88.407	68.298	11.447	144.918	8.234.945
Lain-lain	-	-	-	-	-	-
Jumlah	13.470.076	3.294.323	68.298	11.447	810.010	9.285.999
LIABILITAS						
Simpanan	8.726.569	5.056.783	2.283.852	613.169	772.764	-
Antar Bank Pasiva	1.275.000	1.275.000	-	-	-	-
Pinjaman yg Diterima	1.220.535	-	-	-	1.220.535	-
Lain-lain	-	-	-	-	-	-
Jumlah	11.222.104	6.331.783	2.283.852	613.169	1.993.300	-
Perbedaan JT	2.247.972	(3.037.460)	(2.215.555)	(601.722)	(1.183.290)	9.285.999

	2024					
	Saldo	<1 Bulan	1-3 Bulan	3-6 Bulan	6-12 Bulan	>12 Bulan
ASET						
Kas	134.176	134.176	-	-	-	-
Giro pada BI	996.769	996.769	-	-	-	-
Antar Bank Aktiva	696.765	696.765	-	-	-	-
Efek-efek	2.509.215	231.950	-	-	665.092	1.612.173
Kredit yg diberikan	8.381.213	172.842	15.018	57.018	97.415	8.038.920
Lain-lain	-	-	-	-	-	-
Jumlah	12.718.138	2.232.502	15.018	57.018	762.507	9.651.093
LIABILITAS						
Simpanan	9.788.490	6.955.886	660.323	600.961	1.571.320	-
Antar Bank Pasiva	550.000	550.000	-	-	-	-
Pinjaman yg Diterima	897.344	897.344	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-	-
Jumlah	11.235.834	8.403.230	660.323	600.961	1.571.320	-
Perbedaan JT	1.482.305	(6.170.727)	(645.305)	(543.943)	(808.813)	9.651.093

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

e. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya masalah eksternal yang memengaruhi operasional bank. Tujuan Bank adalah untuk mengelola risiko operasional sehingga dapat menghindari kerugian keuangan dan reputasi Bank.

Dengan melihat Risiko Inherent yang berada pada posisi Low, serta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang berada pada posisi Satisfactory, dapat disimpulkan Peringkat Risiko untuk Risiko Operasional adalah 2 (Dua). Hal tersebut tercermin dengan karakteristik dan kompleksitas bisnis Bank.

Risiko Inherent untuk Risiko Operasional berada pada posisi Low, dengan beberapa parameter penilaian sebagai berikut:

1) Karakteristik dan kompleksitas bisnis Bank cukup memadai.
2) SDM yang dimilik oleh Bank cukup memadai
3) Bank telah membentuk struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan skala usaha Bank.
4) Untuk komposisi parameter Pegawai Permanen Keluar akibat PHK karena Melanggar Ketentuan Perusahaan terhadap Total Pegawai Permanen (rata-rata 3 bulan) Posisi Desember 2025 0,43 mengalami peningkatan dibandingkan dengan posisi September 2025 yakni 0,14%, berdasarkan data yang ada pada posisi Desember 2025 terdapat 3 (Tiga) orang pegawai yang di PHK karena melanggar ketentuan Bank sehingga rasio meningkat dibanding periode sebelumnya.
5) Komposisi Jumlah Pegawai Permanen Keluar Mengundurkan Diri terhadap Total Pegawai Permanen (rata-rata 3 bulan) posisi Desember 2025 sebesar 0,14%, rasio ini turun jika dibandingkan dengan posisi September 2025 yaitu 0,71%, peningkatan rasio ini mencerminkan perubahan Berdasarkan data Divisi SDM terdapat 1 (Satu) orang pegawai permanen yang mengundurkan diri selama TW IV 2025.
6) Tidak terdapat gangguan system yang mempengaruhi kegiatan Operasional kantor pada periode ini.
7) Pengawasan aktif Komisaris dan Direksi cukup memadai
8) Tingkat risiko yang diambil belum sepenuhnya menggambarkan sasaran yang ingin dicapai oleh Bank. Hal tersebut dikarenakan Bank belum mereview kebijakan - kebijakan manajemen risiko terkait dengan penetapan Risk Appetite.
9) Komisaris dan Direksi belum sepenuhnya memastikan seluruh Unit kerja dilengkapali oleh BPP dan SOP yang ada dan belum sepenuhnya melakukan review sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku terkait BPP dan SOP yang telah ada.

Adapun tanggung jawab untuk meminimalisir terjadinya risiko operasional yang dapat memengaruhi kegiatan Bank, antara lain sebagai berikut:

1) Penyesuaian dan pemisahan tugas serta otorisasi transaksi bank
2) Pemantauan operasional bank.
3) Dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4) Mengontrol seluruh dokumentasi dan prosedur bank
5) Jika terjadi kesalahan ataupun kegagalan dalam operasional bank akan dilakukan pelaporan dan pengusulan tindakan perbaikan
6) Melakukan pelatihan dan pengembangan pegawai terhadap risiko operasional
7) Memitigasi risiko yang mungkin timbul

31. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

e. Risiko Operasional (lanjutan)

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional berada pada posisi Satisfactory, pengelolaan Risiko Operasional menjadi perhatian oleh manajemen, dimana dalam pengelolaannya melalui beberapa cara antara lain:

1) Pengisian profil risiko melalui Aplikasi Tingkat Kesehatan Bank secara rutin setiap bulan untuk mengidentifikasi early warning system sehingga Bank segera mengambil Langkah-langkah mitigasi yang diperlukan;
2) Penerapan Standar Operasional Prosedur yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk menghindari risiko;
3) Saat ini Bank sudah memiliki sistem informasi manajemen risiko (TKB) dan Profil Risiko Cabang (PRC) yang dapat memastikan terukurnya eksposur risiko baik eksposur risiko secara keseluruhan/ komposit maupun eksposur per jenis risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank, maupun eksposur risiko per jenis aktivitas fungsional Bank namun belum secara akurat, informatif, dan tepat waktu.

f. Risiko Hukum

Risiko inherent yang berada pada posisi Low serta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang berada pada posisi Satisfactory, dapat disimpulkan Peringkat Risiko untuk Risiko Hukum adalah 2 (Dua), hal ini disebabkan adanya perkembangan atas kasus hukum yang dihadapi Bank Sulteng, dimana kasus tersebut bank dinyatakan kalah oleh Mahkamah Agung dan terdapat pula beberapa kasus hukum lainnya yang tengah dihadapi oleh Bank.

Adapun yang menjadi Area of Concern yaitu progress kasus hukum yang dihadapi PT. Bank Sulteng TW IV tahun 2025 sebagai berikut:

1) Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Rio Kartono (mantan Pemimpin Seksi Kredit Cabang Kolonodale). Sesuai surat laporan informasi Nomor: R/LI/19/II/RES.26/2023/Ditreskrimsus tanggal 24 Februari 2023.
   Jangka waktu kasus 2023-2025, permasalahan ini merupakan tindaklanjut dari pidana perbankan yang telah dilakukan mantan Pemimpin Seksi Kredit Cabang Kolonodale. Sebagai keterangan kasus ini dalam tahap persidangan dipengadilan Negeri Poso dengan agenda selanjutnya yaitu pembacaan putusan.
2) Pelaporan Dugaan tindak Pidana Dugaan Tindak Pidana Pelanggaran Sektor Jasa Keuangan Sesuai surat laporan polisi Nomor: Aduan/564/XI/2023/Sulteng/Res. Banggai tanggal 07 Nopember 2023. Jangka waktu kasus 2023-2025, permasalahan ini merupakan hasil aduan timbul dari Pengaduan Nasabah yang merasa keberatan atas hilangnya uang pada rekening di Kantor Cabang Utama. Sebagai keterangan kasus ini masih dalam tahap penyeledikan dan penyidik kembali meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dalam kasus ini.
3) Laporan Pengaduan Nasabah Cabang Utama Sesuai surat laporan polisi Nomor: B/205/III/RES.1.24/2025/Direskrimsus tanggal 21 Februari 2025, dengan jangka waktu kasus tahun 2025 permasalahan ini merupakan hasil aduan saudara Moh darwis Sebagai Direktur CV. Citra Rajawali yang merasa keberatan atas penarikan dana yang ditarik tanpa sepengetahuan Direktur CV. Citra Rajawali, permasalahan tersebut terjadi di cabang Utama pada tanggal 20 Desember melalui 2 buah Cek. Perkembangan kasus ini telah dinyatakan bukan merupakan tindak pidana, dan saat ini menunggu surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan dari Kepolisian.
4) Laporan Aduan PT. Bank Sulteng Kepada CV. Resky Aditya Pratama. Permasalahan ini terkait objek jaminan fidusia yang dijual oleh Debitur tanpa sepengetahuan penerima fidusia/Bank Sulteng. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan penyidik telah memanggil debitur untuk dimintai keterangan.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

f. Risiko Hukum

5) Laporan Informasi terkait dugaan pelanggaran dalam proses pemberian Kredit. Laporan Informasi Nomor LI/I/RES.2.2/2025 Ditreskrimsus tanggal 09 januari 2025 dengan jangka waktu kasus tahun 2025, permasalahan ini merupakan hasil pengembangan pihak Kepolisian yang menduga adanya proses permohonan kredit yang diajukan oleh Juninson Pasongli sebagai Direktur CV. Sumber Daya Baru dengan menggunakan Kontrak Fiktif, perkembangan Kasus ini Kasus ini telah naik status ke tahap penyidikan dan telah menetapkan status salah satu karyawan PT. Bank Sulteng sebagai tersangka.
6) Laporan polisi terkait pengaduan PT. Teknik Alum Servis (PT. TAS). Laporan Polisi Nomor B/625/V/RES.2.2/2025/Ditreskrimsus tanggal 27 Mei 2025 dengan jangka waktu kasus tahun 2025, Permasalahan ini merupakan pengaduan PT. Teknik Alum Servis (PT. TAS) di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, terkait penarikan dana yang dianggap tidak sesuai prosedur sebesar Rp4.600.000.000, PT.TAS telah memohonkan kepada PT. Bank Sulteng Cabang Utama untuk melakukan perubahan kuasa direktur, sehingga menurut PT. TAS penarikan dana yang dilakukan Direktur sebelumnya tidak sah. Perkembangan kasus ini masih dalam tahap penyidikan dan telah menghadirkan Kembali pihak Head CS, CS, Head Teller, Teller, Funding, Wakil Pimpinan Cabang Utama, untuk memberikan keterangan kepada pihak kepolisian.
7) Laporan polisi terkait Dugaan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan. Laporan Polisi nomor 142/Pid.Sus/2025/PN Pal an. Nola Dien Novita & Rizal Afriansyah dan nomor perkara 143/Pid.Sus/2025/PN Palu an. Darsyaf Agus Slamet, terkait pemberian kredit kepada CV. Mugniy Alamgir dimana terdapat dugaan sebagian dana pencairan kredit digunakan untuk menutupi Bank Garansi PT. Insan Citra Karya. Perkembangan kasus ini telah memperoleh putusan Pengadilan Negeri Palu dengan amar putusan menyatakan ketiga karyawan PT. Bank Sulteng diputus dengan pidana penjara selama 3 Tahun subsidair Rp5.000.000.000 (2 Bulan). Saat ini kasus tersebut sedang dalam tahapan banding di Pengadilan Tinggi Sulteng.
8) Laporan Aduan PT. Bank Sulteng kepada CV. Fuji Yama (Debitur KCP Beteleme). Permasalahan ini terkait objek jaminan yang tidak berada dalam penguasaan KCP Beteleme dan terdapat indikasi Kerjasama antara Notaris dan oknum pegawai bank untuk menyerahkan jaminan kepada Debitur/Pemilik Jaminan, status kredit saat ini dalam kategori macet. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan dijadwalkan di bulan Januari 2026 penyidik akan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan.

Bank telah berusaha untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko hukum, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Bank juga telah melakukan pengarsipan dengan cukup baik, khususnya arsip/dokumen kredit yang terkait dengan jaminan nasabah guna menghindari tuntutan hukum.

31. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

g. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank.

Risiko Inherent yang berada pada posisi Low, serta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang berada pada posisi Satisfactory, dapat disimpulkan Peringkat Risiko untuk Risiko Reputasi adalah 2 (Dua).

Risiko inheren untuk Risiko Reputasi berada pada posisi Low, dengan beberapa parameter penilaian sebagai berikut:

1) Tidak adanya pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh Bank
2) Tidak terdapat pemberitaan negative pada periode ini.
3) Bank juga telah membentuk satuan khusus untuk menangani keluhan nasabah
4) Bank juga terus berusaha meningkatkan pelayanan Bank kepada Nasabah

Pengedalian risiko yang berdampak pada risiko reputasi telah dilakukan oleh dewan komisaris dan direksi dengan mengevaluasi setiap kejadian yang berdampak pada reputasi bank. Pengawasan terhadap risiko reputasi dilakukan oleh dewan komisaris dan direksi dengan memberikan informasi yang konprehensif kepada nasabah dan stakeholder sehingga dapat memberikan pemahaman atas setiap permasalah ataupun kejadian yang dialami oleh bank melalui Divisi Corsec.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi kebijakan yang diambil oleh Bank Sulteng dalam penerapan Manajemen Risiko Reputasi adalah sebagai berikut:

1) Bank telah memperhitungkan semua aktivitas dan dampak risiko pada setiap kegiatan operasional masing-masing divisi dengan memberlakukan kebijakan dan prosedur untuk dilaksanakan dalam proses pengambilan keputusan, namun dalam proses identifikasi setiap risiko bank belum melakukan pendekatan dengan menggunakan alat ukur yang memadai.
2) Proses pengambilan keputusan oleh direksi telah mempertimbangkan kejadian masa lalu yang berdampak atas risiko reputasi untuk melahirkan proses lengkap, akurat dan tepat waktu.
3) Dalam pengambilan keputusan penggunaan sistem informasi oleh bank dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko telah melalui proses seleksi secara independen melalui perjanjian kerjasama. Untuk mendukung pengambilan proses risiko yang akurat serta penggunaan sistem informasi tersebut telah didukung dengan sistem dan teknologi terbaru yang dapat diakses dengan mudah dan akurat. Namun Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Manajemen Risiko saat ini masih perlu untuk diberikan pendidikan dan pelatihan terkait tugas dan tanggung jawabnya guna mendukung efektivitas proses manajemen risiko.

h. Risiko Stratejik

Risiko Inherent yang berada pada posisi Low to Moderat, serta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang berada pada posisi Satisfactory, dapat disimpulkan Peringkat Risiko untuk Risiko Strategik adalah 2 (Dua).

Risiko Inherent untuk Risiko Stratejik berada pada posisi Low to Moderate dan untuk mencapai Visi Misi Bank Sulteng dimana dilakukan strategi pengembangan bisnis, diantarahnya adalah penguatan funding beserta perbaikan komposisinya. Selain itu, Bank telah mengeluarkan produk-produk baru guna menghimpun DPK, namun belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang telah ditargetkan.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

h. Risiko Stratejik (lanjutan)

Perwujudan Sistem Pengendalian Risiko untuk Risiko Stratejik Bank harus memastikan sistem informasi manajemen yang dimiliki telah memadai untuk mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan stratejik namun perlu dilakukan review berkala agar sejalan dengan regulasi dan perkembangan bisnis perbankan.

i. Risiko Kepatuhan

Risiko Inherent yang berada pada posisi Low, serta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang berada pada posisi Satisfactory dapat disimpulkan Peringkat Risiko untuk Risiko Kepatuhan adalah 2 (dua). Hal tersebut terjadi akibat belum terciptanya budaya-budaya kepatuhan dan fungsi kepatuhan yang baik pada Bank, tercermin dari masih terdapat beberapa komitmen Bank kepada OJK yang belum dipenuhi sesuai dengan komitmen Bank.

Fungsi kepatuhan yang kurang maksimal diterapkan di lingkungan intern Bank Sulteng sehingga kepatuhan bank terhadap Otoritas Jasa Keuangan masih kurang, hal ini terlihat pada komitmen Bank yang belum terpenuhi atas hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan masih terdapat denda-denda atas ketidakpatuhan Bank terhadap peraturan yang berlaku.

Tata Kelola yang Bank laksanakan untuk memitigasi Risiko Kepatuhan sebagai berikut:
1) Pengawasan Aktif Komisaris dan Direksi harus lebih ditingkatkan.
2) Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan telah mensosialisasikan budaya risiko dan kepatuhan kepada seluruh pegawai.
3) Bank telah memiliki pedoman kebijakan tentang Kepatuhan, namun belum menguraikan tentang pertimbangan toleransi risiko dan dampak terhadap permodalan, kedepannya akan dilakukan revisi BPP tentang penerapan fungsi kepatuhan.
4) Bank telah memiliki ukuran tentang kompetensi pegawai karena sumber daya manusia khususnya pada aktivitas fungsional treasuri dan investasi belum sepenuhnya memiliki sertifikasi treasuri, namun kedepannya setiap petugas yang menangani treasuri mulai dari jenjang Direksi sampai dengan staff harus mengikuti sertifikasi treasuri.

32. MANAJEMEN PERMODALAN

Tujuan manajemen permodalan Bank adalah untuk mempertahankan posisi modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan mempertahankan investor, deposan, pelanggan dan pasar dalam pengelolaan permodalan Bank mempertimbangkan faktor-faktor seperti: pengembalian modal yang optimal pada pemegang saham, menjaga keseimbangan antara keuntungan yang lebih tinggi dengan gearing ratio serta kesamaan yang diberikan oleh posisi modal yang sehat.

Rasio Penyediaan Modal Minimum

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (Capital Adequacy Ratio [CAR]) adalah rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko (Risk - Weighted Assets (RWA)). Berdasarkan peraturan Bank Indonesia, jumlah modal untuk risiko kredit terdiri dari modal Inti (Tier I) dan Modal Pelengkap (Tier II) dikurangi penyertaan pada Entitas Anak. Rasio kecukupan Modal pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut (dalam jutaan Rupiah):

	2025	2024
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Kredit	5.520.862	5.671.904
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Operasional	545.970	505.374
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Pasar	-	-
Total Modal	1.546.738	1.356.581
Rasio Kewajiban Penyertaan Modal Minimum (KPMM)	25,49%	23,11%
Rasio Minimum menurut POJK 11/POJK.03/2016	9,12%	10,39%

Kegiatan alokasi modal didorong oleh optimalisasi jumlah modal yang jumlahnya tergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memaksimalkan laba atas risiko yang disesuaikan dengan modal dasar yang digunakan dalam menentukan bagaimana modal dialokasikan oleh Bank pada operasional atau kegiatan tertentu. Kebijakan Bank yang berhubungan dengan pengelolaan modal dan alokasi dana diriview secara berkala oleh Direksi.

Dalam rangka memenuhi regulasi kewajiban pemenuhan modal inti minimum, Bank melaksanakan skema Kelompok Usaha Bank (KUB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum. Struktur KUB tersebut terdiri dari PT Bank Mega Tbk sebagai Pelaksana Perusahaan Induk, serta PT Bank Mega Syariah, PT Allo Bank Indonesia Tbk, dan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah sebagai anggota.

Bank mengklasifikasikan modal dalam 2 (dua) tingkatan:

a. Modal Inti (Tier 1) yang meliputi:
   1) Modal Inti Utama (CET 1) meliputi modal disetor (setelah dikurangi saham tresuri), cadangan tambahan modal, kepentingan non-pengendali yang dapat diperhitungkan, dan faktor pengurang Modal Inti Utama;
   2) modal inti tambahan (Additional Tier 1); dan
b. Modal Pelengkap (Tier 2), antara lain meliputi instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan, agio atau disagio yang berasal dari penerbitan instrumen modal pelengkap, cadangan umum aset produktif (Penyisihan Penghapusan Aktiva) yang wajib dibentuk (maksimal 1,25% ATMR Risiko Kredit), dan faktor pengurang modal Tier 2.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Bank bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang diselesaikan dan disetujui oleh Direksi Bank pada tanggal 22 Januari 2026.


Bank
Sulteng

Bank Sulteng

Digital for All

Bank Sulteng

Jl. Sultan Hasanuddin, No.20 Palu,
Sulawesi Tengah| *Central Sulawesi* - 94112

corsec@banksulteng.com

www.banksulteng.co.id

Call Center
14069